



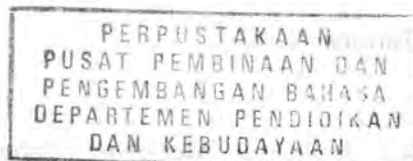
BAHASA INDONESIA MENJELANG TAHUN 2000

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1998**



BAHASA INDONESIA MENJELANG TAHUN 2000

**Risalah
Kongres Bahasa Indonesia VI**



**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
1998**

ISBN 979-459-904-2

Penyunting Penyelia

Hasan Alwi, Dendy Sugono
S.R.H. Sitanggang

Penyunting Pelaksana

Mustakim, Meity Taqdir Qodratillah, Rini Adiati Ekoputranti
Dedi Puryadi, S.S.T. Wisnu Sasangka, Fairul Zabadi
Dad Murniah, Mu'jizah

Pewajah Kulit

Agnes Santi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

**Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah Pusat**

Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. (Pemimpin)
Drs. Djamari (Sekretaris), Sartiman (Bendaharawan)
Drs. Sukasdi, Drs. Teguh Dewabrata, Dede Supriadi,
Tukiyar, Hartatik, dan Samijati (Staf)

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

499.2106

BAH Bahasa # ju

b Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000: Risalah
Kongres Bahasa Indonesia VI.--Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, 1998.
1151 hlm.: 23 cm.

ISBN 979-459-904-2

1. Bahasa Indonesia-Temu Ilmiah

PA
499-210 6
BAH
6

No. Registrasi	0563
Tgl. Pendaftaran	11-11-98
Tgl. Pengambilan	
Tgl. Pengembalian	

KATA PENGANTAR

Terbitan ini merupakan risalah atau laporan Kongres Bahasa Indonesia VI yang diselenggarakan di Hotel Indonesia Jakarta pada tanggal 28 Oktober–2 November 1993. Kongres ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia bersamaan dengan Peresmian Peringatan Ke-65 Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda dan Musyawarah Ke-7 Komite Nasional Pemuda Indonesia di Balai Sidang Hotel Hilton Jakarta pada tanggal 28 Oktober pukul 10.00.

Kongres bertujuan memantapkan peran bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana pembinaan kehidupan bangsa. Atas dasar tujuan itu, Kongres mengambil tema "Bahasa Indonesia Menjelang tahun 2000" yang dijadikan judul terbitan ini. Adapun subtemanya ialah (1) Bahasa Indonesia Merupakan Sarana yang Kukuh dalam Pembangunan Bangsa, (2) Peningkatan Mutu Bahasa Indonesia Memperlancar Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan (3) Peningkatan Kemampuan Masyarakat Berbahasa Indonesia Memperkaya Kehidupan Budaya Bangsa. Tema dan subtema tersebut dijabarkan ke dalam 79 makalah. Delapan belas makalah disajikan dalam sidang pleno dan sisanya dalam sidang kelompok. Sidang kelompok yang merupakan sidang paralel ini ada lima buah, yaitu Kelompok Peran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Pembangunan Bangsa, Kelompok Pengembangan Bahasa dan Sastra, Kelompok Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kelompok Pengajaran Bahasa dan Sastra, dan Kelompok Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, terdapat sepuluh makalah sumbangan yang, karena keterbatasan waktu, tidak dibahas di dalam Kongres. Perlu ditambahkan bahwa selain dalam sidang pleno dan sidang kelompok, ada pula sejumlah makalah yang dibahas dalam diskusi panel.

Kongres diikuti oleh 897 orang peserta yang terdiri atas pakar bahasa dan sastra, dosen, guru, pejabat pemerintah, cendekiawan, budayawan, peminat bahasa dan sastra, dan wakil lembaga pendidikan tinggi, lembaga ilmiah, organisasi profesi, dan media massa yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta dari dalam negeri berjumlah 840 orang, sedangkan peserta dari luar negeri 57 orang.

Dalam rangka kongres itu diselenggarakan pula Pameran Buku dari tanggal 28 Oktober–2 November 1993 di tempat yang sama (Hotel Indonesia), yang menyajikan 385 judul buku yang terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan kongres bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, bahasa dan sastra Indonesia, serta kamus berbagai bidang ilmu, antara lain kimia, matematika, fisika, biologi, kedokteran, dan manajemen.

Selain itu, disajikan pula panel Sumpah Pemuda, foto kegiatan kebahasaan/kesastraan, dan peragaan komputer sebagai pengolah data kebahasaan.

Keputusan dan kesimpulan yang dicapai dalam kongres itu menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat, baik kalangan Pemerintah, kalangan swasta, maupun kalangan masyarakat umum. Sesuai dengan isi pidato Presiden Soeharto pada Pembukaan Kongres, sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia hidup dan berkembang sejalan dengan kehidupan dan perkembangan kebudayaan bangsa. Karena pembinaan dan pengembangan bahasa menjadi bagian dari pembinaan bangsa, maka pembinaan dan pengembangan bahasa menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya tanggung jawab ahli bahasa. Oleh karena itu, pelaksanaan keputusan dan kesimpulan kongres itu menghendaki peningkatan kerja sama yang erat antara Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VI dimungkinkan oleh adanya bantuan berbagai pihak dan biaya yang disalurkan melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia-Jakarta. Adapun penerbitan Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI ini dibiayai oleh Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Pusat. Atas segala bantuan itu, dengan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus. Terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para penyunting yang telah menyiapkan naskah terbitan ini.

Jakarta, 6 Februari 1998

Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa

Hasan Alwi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 SAMBUTAN PRESIDEN PADA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA/HARI PEMUDA KE-65, PEMBUKAAN KONGRES KNPI VII DAN KONGRES BAHASA INDONESIA VI PADA TANGGAL 28 OKTOBER 1993 DI JAKARTA	1
 LAPORAN KETUA PANITIA PENYELENGGARA MENGENAI PELAKSANAAN PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA V PADA KONGRES BAHASA INDONESIA VI	5
1. Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa Azwar Anas	10
2. Bahasa Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Ginandjar Kartasasmita	17
3. Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara: Akar dan Dampak Ideologis dari Istilah-Istilah Politik Moerdiono	26
4. Peranan Bahasa Indonesia dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa M. Yogie S.M.	38
5. Peran Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Beberapa Pokok Sumbangan Pemikiran Wardiman Djojonegoro	47
✓ 6. Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional Edi Sedyawati	52

7.	Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan H. Hasbullah Mursyid	59
8.	Bahasa Indonesia dan Generasi Muda Hayono Isman	69
9.	Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional Machmud Subarkah	79
10.	Keberartian dan Legitimasi Kesusastraan Goenawan Mohamad	87
11.	Sastra Indonesia dan Kepribadian Generasi Muda Emha Ainum Nadjib	96
12.	Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000 Hasan Alwi	103
13.	Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Boediono	119
14.	Bahasa Indonesia dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern B.J. Habibie	125
15.	Kesinambungan dalam Kebijakan Bahasa Nasional Amran Halim	133
16.	Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan A. Hamid Saleh Attamimi	143
17.	Pengembangan Laras Bahasa dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern Anton M. Moeliono	158
18.	Penerjemahan dengan Mesin, Prospek, dan Permasalahannya Darmawan Sukmadjaja	170
19.	Peranan Karya-Karya Kebahasaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Harimurti Kridalaksana	186

20.	Penetapan Mesin Swaajar pada Pemrosesan Bahasa Alami: Suatu Eksperimen untuk Bahasa Indonesia Hammam Rieza Yusuf	208
21.	Kehidupan dan Masa Depan Sastra Daerah di Indonesia S.R.H. Sitanggang	217
22.	Masa Depan Bahasa Daerah dalam Kaitannya dengan Pembinaan Bahasa Indonesia Mansoer Pateda	235
✓ 23.	Penerjemahan Karya Sastra dan Sumbangannya bagi Pengembangan Bahasa Indonesia Rahayu S. Hidayat	248
24.	Pengembangan Bahasa Indonesia Melalui Penelitian Multamia R.M.T. Lauder	264
25.	Kemajuan Penelitian Sastra Indonesia: Konsep Penelitian dan Sejarah Perkembangannya Chamamah Soeratno	278
26.	Pengembangan Sastra Melalui Penerjemahan Sapardi Djoko Damono	303
27.	Hambatan dan Tantangan dalam Penerjemahan Karya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi B.H. Hoed	314
28.	Kemajuan dalam Penelitian Bahasa Indonesia B. Karno Ekowardono	330
29.	Karya Kesastraan sebagai Sarana Pengembangan Bahasa Nafron Hasjim	353
30.	Penyerapan Unsur Bahasa Asing dalam Pers M. Marcellino	367
31.	Pemetaan Bahasa (Daerah): Untuk Apa dan untuk Siapa? Ayatrohaedi	386
32.	Bahasa Indonesia, Politik, dan Otoritas Mochtar Pabottingi	398

33. Perkembangan Pengaruh Bahasa Daerah dalam Bahasa Indonesia Inyo Yos Fernandez	406
34. Kemajuan Penelitian Bahasa Indonesia di Amerika Serikat James T. Collins	420
35. Penelitian Tata Bahasa Indonesia dalam Konteks Ilmu Bahasa Rusia Natalia F. Alieva	435
36. Peranan Psikologi dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra Fuad Hassan	443
37. Strategi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa: Beberapa Pokok Pikiran Hans Lapoliwa	449
38. Strategi Penyuluhan Sastra: Sebuah Pengantar Leon Agusta	460
39. Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Cetak Zainuddin Taha	471
40. Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Mutu Kewartawanan S. Sinansari-ecip	483
41. Pendidikan Bahasa Indonesia Melalui Media Elektronik Ishadi Sk.	493
42. Strategi Penyuluhan Bahasa: Suatu Pemikiran H. A. Latief	502
43. Peningkatan Apresiasi Sastra Klasik Indonesia: Suatu Masalah I. Kuntara Wiryamartana	507
44. Peran Penyuntingan dalam Meningkatkan Mutu Bahasa Indonesia Adjat Sakri	515
45. Sumbangan Media dalam Memasyarakatkan Sastra Darmanto Jatman	525
46. Pengembangan Sikap Positif dalam Berbahasa Indonesia Basuki Suhardi	535

47.	Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat Yayah B. Lumintaintang	546
48.	Terbitan Ilmiah dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia H.J. Koesoemanto	557
49.	Terbitan sebagai Sarana Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra: Antara Harapan dan Kenyataan Sumardi	581
50.	Gatra Bahasa Teks dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mien A. Rifai	592
51.	Peranan Organisasi Profesi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia Sjamsul Basri	612
52.	Peranan Profesi Kedokteran dalam Pembinaan Bahasa Indonesia Kartono Mohamad	622
53.	Bahasa Indonesia dalam Perkembangan Perekonomian Nasional Prijono Tjiptoherijanto	626
54.	Pengembangan Profesionalisme dan Bahasa Indonesia Imam Sucipto Umar	628
55.	Pengembangan Kemampuan Bernalar, Kreativitas, dan Budaya Tulis Melalui Jalur Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Sabarti Akhadiyah M.K.	636
56.	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dalam Pembinaan Bahasa Indonesia Bambang Kaswanti Purwo	641
57.	Menumbuhkan Kebebasan Kreativitas dan Membebaskan Masyarakat dari Kejumudan Tradisi A.A. Navis	646
58.	Pokok-Pokok Pikiran tentang Puisi Indonesia Tahun 70-an Sampai Kini Sutardji Chalzoom Bachri	653

59.	Kehidupan Sastra Kita: Beberapa Catatan Hamid Jabbar	656
60.	Bahasa Asing sebagai Kendala Pembinaan Bahasa Indonesia Asim Gunarwan	659
61.	Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Sutarto	676
62.	Bahan Pengajaran Bahasa Indonesia di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Sumarsono	689
63.	Perguruan Tinggi sebagai Jalur Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa T.A. Ridwan	701
64.	Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Jalur Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa Yus Rusyana	716
65.	Pengajaran Mengarang sebagai Sarana Pengembangan Kemampuan Berbahasa Indonesia Gorys Keraf	734
66.	Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi: Menoleh ke Belakang, Melihat ke Depan Liberty Sihombing	750
67.	Pengembangan Pengujian Bahasa di Sekolah Jahja Umar	763
68.	Upaya Meningkatkan Apresiasi Sastra Siswa Lewat Pengajaran Sastra di SMA B. Rachmanto	773
69.	Pengkajian Bahasa Indonesia di Luar Negeri Khaidir Anwar	786
70.	Peningkatan Peran Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing Soenjono Dardjowidjojo	797

71. Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia James Sneddon	810
72. Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia di Jerman Bernd Nothofer	831
73. Keadaan Pengajaran Bahasa Indonesia di Korea Chung Young-rhim	853
74. Bahan Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing Soeseno Kartomihardjo	868
75. Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing S. Sugino	889
76. Kerja Sama Kebahasaan Antarnegara Liek Wilardjo	899
77. Perkembangan Bahasa Melayu di Singapura (Mas) Haji Muhammad Ariff Ahmad	907
78. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Melayu di Malaysia Farid M. Onn	924
79. Perkembangan Bahasa Melayu di Brunei Darussalam Awang Much. Amin bin Begawan Pehin Khatib Paduka Awang Haji Sirat	944
80. Penelitian Pengajaran Bahasa dan Budaya Indonesia di Beijing Huang Chenfang	953
81. Bahasa Kunlun dalam Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Kong Yuan Zhi	968
82. Kebudayaan sebagai Pengetahuan Sehubungan dengan Pengajaran dan Pelajaran Bahasa Indonesia di Australia Edmund A. Anderson	977
83. Penggunaan Kata-Kata dari Bahasa Indonesia di Brunei Darussalam: Laporan Awal Karyono Purnama	994

84. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dalam Konteks Negara Brunei Darussalam Awang Mataim Bakar	1011
85. Kedwibahasaan Prestasi Akademik dan Penguasaan Bahasa Melayu di Kalangan Penuntut-Penuntut Melayu di Singapura Hajah Kamsiah bin Haji Abdullah	1029
86. Pengembangan Bahasa Indonesia terhadap Perkembangan Bahasa Melayu di Malaysia Farid M. Onn/Amdun Husein	1044
87. Perkembangan Bahasa Melayu dalam Bidang Pendidikan di Singapura Haji Abbas Mohd. Shariff	1052
88. Pengembangan Sumber Daya Manusia Lulusan Program Sarjana Bahasa dan Sastra Pengutamaan Linguistik Bambang Kaswanti Purwo	1068
89. Peran Organisasi Profesi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia Lukman Ali	1074
PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA VI	1078
SAMBUTAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN PADA UPACARA PENUTUPAN	1091
LAMPIRAN	
1. DAFTAR PEMAKALAH DALAM DAN LUAR NEGERI	1093
2. DAFTAR PESERTA DALAM DAN LUAR NEGERI	1098
3. PANITIA PENYELENGGARA	1146

**SAMBUTAN PRESIDEN
PADA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA/
HARI PEMUDA KE-65, PEMBUKAAN KONGRES KNPI VII
DAN KONGRES BAHASA INDONESIA VI
PADA TANGGAL 28 OKTOBER 1993
DI JAKARTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara,

Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pada peringatan hari bersejarah ini sekaligus dibuka Kongres KNPI dan Kongres Bahasa Indonesia. Ketiga peristiwa tadi saling erat berkaitan antara yang satu dengan lainnya; dan bersumber pada Sumpah Pemuda yang diikrarkan kaum muda bangsa kita pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa kita.

Sejak kebangkitan nasional—yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, pada tanggal 20 Mei 1908—bangsa kita mulai memasuki babak baru dalam sejarah perjuangan kemerdekaannya. Muncul kesadaran baru bahwa perjuangan bangsa haruslah didukung oleh organisasi masyarakat bangsa kita sendiri. Kesadaran ini tumbuh di berbagai kalangan kaum muda bangsa kita saat itu. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai organisasi pemuda yang kebanyakan masih bersifat kesukuan dan kedaerahan.

Melalui berbagai organisasi itu, para pemuda terpelajar bangsa kita mengembangkan diri mereka. Tumbuhlah semangat, cita-cita, dan paham kebangsaan yang mengatasi perbedaan suku dan agama. Ikrar Pemuda yang kemudian kita kenal dengan Sumpah Pemuda itu merupakan penjelmaan dari semangat, cita-cita, dan paham kebangsaan tadi.

Semangat kebangsaan itulah yang mempersatukan bangsa kita yang berbeda-beda suku, bahasa, adat-istiadat, dan agamanya. Semangat kebangsaan itu pula yang menumbuhkan tekad untuk hidup bersatu sebagai satu bangsa meskipun kita hidup dalam wilayah kepulauan yang sangat luas dengan puluhan ribu pulau besar dan kecil. Sungguh kehadiran kita sebagai bangsa yang bersatu padu merupakan keunikan tersendiri di dunia.

Kita bersyukur bahwa tekad bangsa kita untuk bersatu itu jauh lebih kuat dibanding dengan benih-benih perpecahan. Benih itu memang pernah muncul dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang sempat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa kita.

Berbagai pengalaman pahit yang pernah kita alami di masa lampau hendaknya kita jadikan pelajaran untuk melanjutkan perjuangan bangsa kita. Hal ini terutama ingin saya tekankan bagi para peserta Kongres KNPI VII yang akan dimulai hari ini.

Segenap anggota KNPI dan generasi muda umumnya hendaknya menyadari bahwa mereka adalah andalan dan harapan bangsa kita, andalan dan harapan dari bangsa yang sedang membangun untuk mengejar keterbelakangannya. Kegiatan-kegiatan generasi muda hendaknya dapat menunjukkan peran pelopor kaum muda dalam pembangunan. Untuk berperan sebagai pelopor, generasi muda harus mampu membaca tanda-tanda zaman.

Sekarang kita hidup dalam zaman yang penuh perubahan. Dunia terus bergerak bertambah cepat. Berbagai peristiwa yang mempunyai dampak global terjadi di luar dugaan kita. Dampak global itu dengan sendirinya mempengaruhi perkembangan bangsa dan negara kita. Tidak ada bangsa dan negara yang bisa lepas dan bebas dari proses perubahan itu, baik dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan politik maupun kehidupan sosial dan budaya.

Untuk menghadapi proses globalisasi dunia dan pengaruhnya pada kehidupan dan perkembangan bangsa dan negara kita tadi, kita harus meningkatkan ketahanan nasional. Bukan untuk melawan arus sejarah, tetapi untuk memantapkan jatidiri kita sebagai bangsa. Kita tidak ingin hanyut begitu saja dalam arus perubahan dunia. Untuk itu, kita harus ikut mendorong perubahan tadi ke arah kebaikan kehidupan dan martabat manusia. Karena itu, kita semua mengharapkan agar generasi muda bangsa kita terus membina diri sehingga memiliki kepribadian yang kuat, wawasan yang luas, dan pandangan yang jauh ke masa depan.

Hal ini perlu kita camkan bersama agar kita tidak mengulangi pengalaman pahit yang menimpa berbagai bangsa dan negara. Dewasa ini di berbagai bagian dunia berkecamuk bentrokan-bentrokan fisik yang ditimbulkan oleh fanatisme golongan dan nasionalisme sempit yang menimbulkan gerakan separatisme baik dengan latar belakang maupun agama.

Kita bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita telah berketepatan hati untuk menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keputusan bersejarah itu merupakan penangkal yang sangat ampuh untuk menghindarkan diri dari konflik ideologi di negeri kita. Namun, kita sadar bahwa kita tidak boleh berhenti hanya pada penegasan Pancasila sebagai satu-satunya asas tadi. Kita harus berupaya terus-menerus untuk mengamalkan dan memantapkan Pancasila. Sikap fanatisme golongan dan nasionalisme yang sempit itu mungkin saja tampil dalam berbagai bentuk. Generasi muda hendaknya siap dan mampu menangkal gejala-gejala itu.

Kongres KNPI VII ini saya harapkan dapat terus menyalakan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928.

Sebagai organisasi, KNPI hendaknya menjadi ajang pemupukan semangat persatuan dan kesatuan generasi muda kita. Perbedaan latar belakang dari organisasi-organisasi pemuda yang bergabung dalam organisasi ini tidak boleh menjadi unsur yang menimbulkan perpecahan generasi muda bangsa kita.

Saya juga mengharapkan agar dalam kongres ini KNPI berani mawas diri. Hal ini penting untuk menatap masa depan yang penuh tantangan. Kesalahan harus diperbaiki, kekurangan harus diisi dan kegagalan harus ditebus. Kita harus berguru pada pengalaman-pengalaman kita sendiri.

Saudara-saudara,

Hari ini akan dimulai Kongres Bahasa Indonesia. Melalui kongres ini, para ahli bahasa dan budayawan bangsa kita akan melihat secara cermat perkembangan bahasa nasional kita. Kesadaran pentingnya menjunjung tinggi bahasa nasional yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda itu hendaknya terus disebarluaskan.

Seperti yang pernah saya katakan, sejarah perkembangan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan bangsa Indonesia. Keduanya seiring dan sejalan. Bahasa kita hidup dan berkembang sejalan dengan kehidupan dan perkembangan kebudayaan bangsa. Bertambah majunya kehidupan kebudayaan harus diimbangi dengan upaya yang makin besar dalam membina dan mengembangkan bahasa. Karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa nasional mutlak kita lakukan dan menjadi bagian dari pembinaan bangsa kita. Karena itu pula, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab ahli bahasa.

Kita memang telah banyak melakukan upaya untuk membina dan mengembangkan bahasa. Namun, upaya ini perlu terus kita galakkan lagi. Jika kita sampai lengah, mustahil dalam era globalisasi sekarang ini kita akan kehilangan jatidiri. Bahasa sungguh merupakan salah satu lambang jatidiri kita sebagai bangsa. Dewasa ini, ancaman terhadap lambang jatidiri itu sudah mulai kita rasakan, terutama melalui pemakaian kata-kata dan istilah bahasa asing yang makin tidak terkendali.

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang mengharuskan kita untuk menguasai bahasa asing. Akan tetapi, penguasaan dan kemampuan kita berbahasa asing itu janganlah sampai melunturkan rasa hormat kita terhadap bahasa nasional kita sendiri. Penguasaan dan pengetahuan bahasa asing yang kita miliki jangan pula memperkecil peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

Pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi justru harus mendorong kita untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Salah satu upaya untuk meningkatkan bobot bahasa kita adalah dengan memperbanyak kepustakaan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam bahasa pergaulan. Bahasa nasional kita harus dan memang dapat menjadi bahasa ilmu pengetahuan.

Demikianlah harapan dan ajakan yang ingin saya kemukakan dalam kesempatan ini.

Akhirnya, dengan ini saya resmikan dimulainya Kongres KNPI VII dan Kongres Bahasa Indonesia VI.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 28 Oktober 1993

Soeharto

LAPORAN
KETUA PANITIA PENYELENGGARA MENGENAI PELAKSANAAN
PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA V
PADA
KONGRES BAHASA INDONESIA VI

Kongres Bahasa Indonesia VI ini diselenggarakan dalam rangka menyediakan forum bagi para ahli dari berbagai disiplin ilmu, tokoh dari berbagai lapangan profesi, serta para peminat bahasa lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk saling bertukar informasi, pikiran, dan pengalaman khususnya mengenai hal-hal yang bertalian dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Kongres ini tidak terlepas dari kongres-kongres serupa sebelumnya. Oleh karena itu, pada tempatnyalah saya, selaku Ketua Panitia Penyelenggara dan selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, mengantarkan kegiatan persidangan kita dalam forum ini dengan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan keputusan Kongres Bahasa Indonesia V.

Kongres Bahasa Indonesia V yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober--3 November 1988 di Jakarta menyepakati 43 butir usul tindak lanjut keputusan Kongres. Ke-43 usul tindak lanjut itu mencakupi bidang bahasa sebanyak 17 butir, bidang sastra sebanyak 12 butir, bidang pengajaran bahasa sebanyak 8 butir, dan bidang pengajaran sastra sebanyak 6 butir. Laporan ini lebih dikhususkan pada butir-butir simpulan yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan wewenang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

I. Bidang Bahasa

Berbagai usaha meningkatkan mutu bahasa Indonesia serta mutu pemakaiannya telah dilaksanakan, baik berupa produk hukum sebagai landasan kerja maupun berbagai kerja sama antarinstitusi dan kegiatan penyuluhan.

1. Dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia para pejabat telah dilaksanakan kegiatan penyegaran dan penyuluhan bahasa Indonesia untuk para pejabat eselon II, III, dan IV pada instansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991 tanggal 28 Oktober 1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam rangka Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992, tanggal 1 April 1992,

tentang Peningkatan Usaha Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam rangka Memperkokuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kegiatan itu dilakukan dan akan makin ditingkatkan atas dasar piagam kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Pemerintah Daerah Tingkat I. Yang telah ditandatangani/diresmikan ialah piagam kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Diharapkan sebelum tahun anggaran 1993/1994 berakhir kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I lainnya dapat segera diresmikan. Khusus dengan Pemerintah DKI Jakarta, kerja sama itu bahkan sudah diresmikan sebelum insrtuksi kedua menteri itu dikeluarkan, yaitu pada tahun 1989.

2. Media massa, baik cetak maupun elektronik, terutama yang berada di Jakarta, telah memanfaatkan tenaga kebahasaan yang bertugas sebagai editor atau penyunting bahasa. Hasilnya memang belum seratus persen memuaskan antara lain dan mungkin terutama karena ciri khas media massa yang dalam pelaksanaan tugasnya harus berpacu dengan waktu.
3. Dalam mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan modern telah diterbitkan, antara lain, beberapa kamus istilah dan daftar istilah untuk empat bidang ilmu (Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika). Istilah-istilah itu merupakan hasil persidangan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim).
4. Usul agar bahasa Indonesia menjadi salah satu jalur pemerataan belum secara eksplisit dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993. Meskipun demikian, kalau disimak secara lebih jauh, rumusan GBHN 1993 mengenai bahasa Indonesia, baik dalam sektor pendidikan maupun kebudayaan, secara tersurat dan tersirat memperlihatkan arah perkembangan yang jauh lebih menggembirakan dibandingkan dengan rumusan tentang hal yang sama pada GBHN-GBHN sebelumnya.
5.
 - a. Penerjemahan buku asing ke dalam bahasa Indonesia dilaksanakan melalui kerja sama dengan Proyek Pendidikan Penerjemah dan Jurusan Bahasa, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, mulai tahun 1992/1993. Setiap tahun diterjemahkan sebanyak $\pm$ 50 judul.
 - b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bekerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sedang mengupayakan untuk mengembangkan mesin penerjemah. Seberapa jauh upaya itu telah dilakukan dapat kita saksikan di ruang Pameran.
6. Bekerja sama antara lain dengan Perum Balai Pustaka dan Pusat Perbukuan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menyusun "Kebijaksanaan Terpadu tentang Kepustakaan", sebagai langkah awal ke arah disepakatinya politik perbukuan nasional.
7. Pemupukan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang mencakupi unsur kebanggaan pada bahasa, kesetiaan pada bahasa, dan kesadaran akan norma

bahasa telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Upaya penghapusan pemakaian bahasa asing pada papan nama gedung umum seperti toko direalisasikan melalui Peraturan Daerah No. 1 tahun 1992 tentang Pemakaian Bahasa Indonesia pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang, dan Iklan/Reklame di wilayah DKI Jakarta.
9. Upaya penyusunan bahan ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional (yang sejenis dengan ujian TOEFL) belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya tenaga di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Mengingat pentingnya hal ini, kegiatan itu perlu dilaksanakan pada masa yang akan datang dengan melibatkan/mengikutsertakan para ahli dan lembaga dalam bidang yang bersangkutan.
10. Penelitian bahasa Indonesia dan daerah terus dilaksanakan. Setiap tahun diperoleh sekitar 90 naskah laporan hasil penelitian dan sebagian besar telah diterbitkan setelah melalui tahap penilaian dan penyuntingan.

Dalam upaya meningkatkan mutu tenaga peneliti, telah dilaksanakan berbagai lokakarya, seminar, dan penataran.

11. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* telah dilaksanakan penyempurnaannya.
 - a. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi pertama memuat 62.116 kosakata, sedangkan edisi keduanya ini memuat 72.805 kosakata.
 - b. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* edisi kedua, dibandingkan dengan edisi pertama, memperlihatkan perubahan yang cukup substansial, terutama pada bab yang berkenaan dengan fonologi, verba, adjektiva, adverbial, nomina, kalimat, dan hubungan antarklausa.
12. Penulisan tata bahasa pengajaran sudah mulai dilakukan, tetapi belum selesai. Oleh karena itu, penyusunan jenis tata bahasa ini masih harus diteruskan.

II. Bidang Sastra

1. Upaya meningkatkan mutu dan jumlah karya sastra telah dilakukan melalui pemilihan dan pemberian penghargaan karya sastra, pemberian bimbingan, dan pengadaan berbagai kegiatan sayembara/lomba penulisan karya sastra dan esai sastra yang merupakan kegiatan Bulan Sastra setiap tahun (sejak 1991).
2. Upaya mengembangkan minat baca sastra, khususnya di kalangan siswa, telah dilakukan melalui penyuluhan sastra untuk siswa SLTA, pertemuan sastrawan dengan siswa, dan diskusi sastra yang melibatkan guru, sastrawan, dan pemerhati sastra (khusus untuk wilayah DKI Jakarta).
3. Upaya memasyarakatkan sastra yang telah dilakukan berupa penyajian karya sastra dalam bentuk kegiatan musikalisasi puisi, pendramaan prosa dan cerpen,

serta penyebaran konsep-konsep sastra melalui acara cepat-tepat sastra, khususnya dalam rangka kegiatan Bulan Sastra.

4. Upaya memperkenalkan sastra sejak dini dilakukan melalui penyediaan sarana bacaan sastra untuk anak-anak usia sekolah dasar yang digali dari sumber-sumber lisan dan tulisan yang memuat sastra rakyat di seluruh Nusantara.
5. Untuk menarik minat pembaca terhadap sastra telah diterbitkan buku *Citra Manusia dalam Puisi Indonesia Modern (1920-1960)*, *Citra Manusia dalam Drama Indonesia Modern (1920-1960)*, dan *Nilai Budaya dalam Beberapa Karya Sastra Nusantara: Sastra Daerah di Sumatra*. Penerbitan ketiga buku itu diharapkan dapat turut menciptakan situasi yang menunjang perkembangan apresiasi masyarakat terhadap sastra.
6. Sebagai langkah awal, telah diupayakan penerbitan ulang kamus istilah sastra edisi perbaikan yang dalam batas-batas kemampuan yang ada mencoba mendeskripsikan konsep-konsep sastra dengan pumpunan kesusastraan Indonesia. Penerbitannya tengah dilakukan oleh Balai Pustaka.
7. Penyusunan buku teori dan kritik sastra yang relevan dengan karya sastra Indonesia yang dapat dipakai sebagai acuan bagi para guru sastra dan peneliti sastra belum dilakukan karena hal itu perlu didahului oleh penelitian tentang karya sastra Indonesia dan daerah yang terpadu dan menyeluruh. Kegiatan ini baru saja dimulai. Sebagai langkah awal, telah dilakukan persiapan "**Penelitian dan Penyusunan Sejarah Sastra Indonesia Modern**" yang mencakupi penyusunan rancangan tentang penelitian sejarah dan ragangan buku sejarah. Untuk itu, seperangkat instrumen penelitian siap untuk diujicobakan. Dalam kaitan itu, telah pula diselenggarakan kegiatan penataran yang diarahkan pada penyiapan tenaga teknis penelitiannya.

III. Bidang Pengajaran Bahasa

1. Harapan agar kurikulum bahasa untuk sekolah dasar dan sekolah menengah memperhatikan aspek psikologi dan sosiolinguistik serta lebih memberikan penekanan pada keterampilan berbahasa daripada aspek teori kebahasaan telah dijadikan acuan oleh Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam proses penyusunan Kurikulum 1994 dan oleh Pusat Perbukuan dalam penyusunan buku teks. Seberapa jauh usul atau harapan para peserta Kongres Bahasa Indonesia V mengenai aspek-aspek pengajaran bahasa Indonesia itu berhasil dijabarkan dalam Kurikulum 1994, kita baru akan mengetahuinya setelah Kurikulum 1994 itu secara resmi mulai diberlakukan.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia dalam buku-buku pelajaran yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sarana Pendidikan dan Pusat Perbukuan telah lama bekerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk melakukan penilaian

dan penyuntingan terhadap berbagai naskah buku pelajaran yang akan digunakan di sekolah.

3. Dalam rangka meningkatkan mutu wawasan dan keterampilan guru-guru bahasa Indonesia, berbagai kegiatan dalam bentuk pelatihan dan penataran telah diselenggarakan, terutama oleh Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa. Di samping itu, berbagai naskah/buku panduan pengajaran bahasa dan sastra telah pula dihasilkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
4. Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi di luar jurusan bahasa/sastra Indonesia pada sebagian besar perguruan tinggi telah dipadukan dalam mata kuliah dasar umum.
5. Pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri masih perlu diperhatikan secara lebih serius, baik yang menyangkut kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman/informasi maupun yang berhubungan dengan pemberian kemudahan bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Indonesia mengingat makin besarnya minat orang asing mempelajari bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia masih perlu dibicarakan dan dikaji ulang dalam Kongres ini.

IV. Bidang Pengajaran Sastra

1. Seperti halnya untuk pengajaran bahasa, usul dan saran mengenai pengajaran sastra telah dijadikan acuan pelaksanaan tugas berbagai direktorat dan pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Keinginan agar pengajaran bahasa dan pengajaran sastra tidak dirangkap oleh seorang guru, tampaknya belum dapat dipenuhi secara nasional karena jumlah tenaga guru berikut keahlian dan minat yang dimilikinya untuk setiap sekolah pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kondisi sekolah.
3. Butir-butir lain yang masih perlu diperjuangkan, antara lain, penelitian dan penyusunan bahan pengajaran sastra untuk setiap jenis dan jenjang persekolahan dan pengajaran drama yang sebaiknya ditangani oleh guru yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi di bidang itu.

Jakarta, 28 Oktober 1993

Kepala Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa
selaku
Ketua Panitia Penyelenggara
Kongres Bahasa Indonesia VI

Hasan Alwi

PERAN BAHASA INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Azwar Anas

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saya hormati,

Para hadirin yang berbahagia,

1. Pendahuluan

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkahi kita sehingga dapat bersilaturahmi untuk membicarakan masalah-masalah yang perlu kita perhatikan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Repelita VI yang mengawali perjalanan panjang Pembangunan Jangka Panjang II Ke-25 tahun yang akan datang.

Undangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada saya untuk membicarakan "Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Nasional" sungguh saya hargai karena sejalan dengan sasaran yang ingin kita capai melalui upaya pembangunan, antara lain meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sehingga digunakan secara baik dan benar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti diamanatkan oleh GBHN 1993.

Pemuda Indonesia telah berikrar dalam Sumpah Pemuda, yaitu: Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari situlah awal bahasa Indonesia yang selanjutnya menempati kedudukan sebagai bahasa nasional.

Sekarang perkembangan bahasa Indonesia, demikian pesatnya, tidak saja di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara yang mempelajari bahasa Indonesia, baik sebagai alat komunikasi, maupun sebagai objek kajian ilmiah.

Dalam era globalisasi ini, peranan bahasa sebagai alat komunikasi sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, tepat kiranya tema yang dipilih untuk Kongres Bahasa Indonesia VI, yaitu Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000.



2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia

Sebagaimana diketengahkan di depan, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diikrarkan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan sebagai bahasa negara, diatur sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebangsaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antara budaya antardaerah.

Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan kemasyarakatan, pemerintahan, dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, dan (4) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Sebelum dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tersebut, selain disebut sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai bahasa pemersatu, bahasa persatuan, bahasa perhubungan, bahasa resmi, bahasa negara. Apa pun nama yang diberikan kepada bahasa Indonesia, para ahli bahasa sepakat pada forum Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, 1954, bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Secara taat asas dari Kongres Bahasa Indonesia III s.d. VI dalam selang lima tahunan kongres menetapkan rumusan-rumusan penting berkenaan dengan upaya meningkatkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.

Untuk sekedar menyegarkan kembali apa yang pernah diputuskan dalam kongres bahasa Indonesia 10 tahun yang lalu, Kongres Bahasa Indonesia (KBI) IV di Jakarta (1983), mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, yaitu sarana komunikasi pemerintahan dan kemasyarakatan, di bawah ini dikutip hasil putusan tersebut.

"Semua aparat pemerintah, terutama yang secara langsung terlibat dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memadai sehingga hukum/undang-undang yang dihasilkan dan yang harus dilaksanakan itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda.

Semua petugas pemerintahan, khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti lurah, guru, juru penerangan, penyiar RRI/TVRI, dan staf redaksi media cetak harus memiliki kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu cara yang perlu segera ditempuh ialah bahwa setiap

menggunakan bahasa asing dari pada menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu pastilah berpengaruh terhadap pembangunan, terutama dalam bidang mental bangsa. Sikap yang kurang positif terlihat pada banyaknya penggunaan bahasa asing yang tidak pada tempatnya.

Berkaitan dengan sikap bahasa tersebut di atas maka keberhasilan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh motivasi pemakai bahasa Indonesia. Motivasi itu sendiri ditentukan oleh sikap serta pandangan pemakai bahasa Indonesia terhadap bahasa Indonesia.

5. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam PJP II

Dalam rangka PJP II berbagai upaya dapat dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sehingga betul-betul memenuhi berbagai fungsinya, baik dalam kedudukan sebagai bahasa nasional maupun dalam kedudukan sebagai bahasa negara.

Amanat GBHN 1993 (Tap. No. II/MPR/1993) mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah seperti berikut.

"Pembinaan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian bangsa.

Penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Pengembangan bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan melalui upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi sarana pengungkap cipta, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra termasuk bacaan anak yang berakar pada budaya bangsa serta penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan untuk memperkaya bahasa, kesusastraan, dan pustaka Indonesia".

Sesuai dengan amanat yang tercantum dalam GBHN 1993 di atas, maka dalam rangka pembinaan bahasa Indonesia, penggunaan istilah asing ternyata mendapat penekanan. Walaupun sudah ditetapkan pedoman istilah, masih perlu ditekankan bahwa istilah asing yang sudah ada padanannya bahasa Indonesia harus dihindari.

Mengenai pengembangan bahasa Indonesia perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut: (1) penelitian untuk terus menumbuhkan kembangkan bahasa Indonesia secara baik dan benar, (2) pembakuan istilah dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa (BI), (3) penulisan karya ilmiah dan karya sastra, termasuk bacaan anak, (4) penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra dan (5) pengkajian dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian dari bahasa nasional.

Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang mantap dalam pembangunan bangsa adalah selain melanjutkan apa yang telah dirintis sebelumnya, juga melakukan langkah-langkah strategis secara berencana. Misalnya, memelihara dan menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa

departemen, lembaga nondepartemen, dan organisasi swasta merencanakan kegiatan kebahasaan sedemikian rupa sehingga setiap petugas dan anggota dalam badan itu sekurang-kurangnya memiliki keterampilan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhannya dalam melaksanakan tugas pembangunan" (KBI IV/1983).

Apabila keputusan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentulah perkembangan bahasa Indonesia lebih baik lagi dari apa yang telah kita capai sampai saat ini.

Untuk menunjang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu, GBHN 1993 memberikan arahan tentang sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera....; makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa melalui, antara lain, pengajaran dan pembinaan bahasa Indonesia.

Pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan agar (1) setiap warga negara Indonesia mau dan mampu berbahasa Indonesia secara baik dan benar, (2) setiap warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sesama warga negara Indonesia, dan (3) setiap warga negara Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengerti dan menyerap pesan-pesan pembangunan serta program pemerintah.

3. Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan

Bahasa Indonesia itu merupakan salah satu unsur dari kebudayaan dan sekaligus sebagai alat mengkomunikasikan unsur-unsur kebudayaan.

Pembangunan nasional itu berdasarkan kesepakatan nasional mencakupi (1) bidang ekonomi, (2) bidang kesejahteraan, (3) bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (4) bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) bidang hukum, (6) bidang politik, dan (7) bidang pertahanan keamanan.

Berdasarkan cakupan pembangunan tersebut, peranan yang menonjol dari bahasa Indonesia, antara lain, (1) bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan dan (2) bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan itu merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam melaksanakan proses itu, bahasa memegang peranan penting. Tanpa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sistemnya tidak akan serasi atau berarti berantakan.

Hasil pembangunan itu perlu diinformasikan dengan menggunakan bahasa alatnya. Sehubungan dengan itu, baik pemberi maupun penerima informasi harus memiliki kemampuan dalam menggunakan dan memahami media komunikasi yang dipakai, yaitu bahasa Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan. Dalam hal ini, pastilah bahasa memegang peranan. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam keilmuan

dan keteknologian. Ciri yang menonjol dari ragam bahasa keilmuan itu adalah kecendekiannya.

Kecendekiian bahasa dapat diartikan kesesuaian dan penyesuaiannya sehingga bahasa itu mampu membentuk pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Bentuk kalimatnya mencerminkan ketelitian penalaran (ilmiah) yang objektif.

Sesungguhnya telah banyak upaya dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengaktualkan peran bahasa Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan hasilnya memang kelihatan. Apabila kita bandingkan pemakaian bahasa Indonesia sejak Sumpah Pemuda (1928) sampai sekarang (1993), nyata sekali bedanya. Namun, masih ada kekurangan-kekurangan di sana-sisi, yang disebabkan berbagai hambatan.

4. Hambatan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, pada saat ini betul-betul terasa manfaatnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan sudah terealisasi antara lain sebagai alat komunikasi di bidang pemerintahan, baik lisan maupun tertulis. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan juga sudah terealisasi, paling tidak di sekolah-sekolah negeri. Namun, fungsi-fungsi itu belum terlaksana secara optimal. Artinya, masih sering terjadi kekurangan-kekurangan sehingga terjadi salah pengertian yang diakibatkan penggunaan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar.

Hal yang paling mendasar yang patut ditelusuri mengapa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih belum terealisasi secara optimal ialah sikap pemakai bahasa Indonesia itu sendiri.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua bagi sebagian besar masyarakat Indonesia karena bahasa pertama mereka adalah bahasa daerah. Selain itu, masih cukup banyak di antara pengguna bahasa yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Hal itu sering menimbulkan hambatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil sensus 1990 tercatat 17 % masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan dan tidak memahami bahasa Indonesia; 15% dari penduduk Indonesia mampu memakai dan memahami bahasa Indonesia; dan 68% penduduk menyatakan dapat mengerti tetapi tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Hal itu pastilah merupakan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama dalam menyerap informasi dan menerima umpan balik dari pemberian informasi pembangunan itu.

Ilmu dan teknologi modern dewasa ini kita terima dari Barat yang tentulah menggunakan bahasa Barat itu. Sementara itu, bahasa Indonesia belum begitu siap untuk menampung konsep-konsep yang diserap itu. Sebagai akibatnya, terpaksa dilakukan peminjaman dan/atau penyerapan bahasa asing yang kadang-kadang sukar dimengerti.

Salah satu akibat dari hal tersebut di atas, sebagian masyarakat memperlihatkan sikap yang kurang positif terhadap bahasa Indonesia. Mereka lebih bangga

Indonesia di kalangan masyarakat. Penanaman sikap positif terhadap bahasa Indonesia di semua lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.

Para ahli bahasa melakukan upaya pengkajian dan pengembangan bahasa Indonesia sehingga masyarakat luas memakainya secara baik dan benar dan digunakan dengan penuh kebanggaan serta memperluas perbendaharaan bahasa sehingga mampu menampung perkembangan pembangunan di masa yang akan datang.

Terima kasih atas perhatian Saudara.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Peran Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Nasional
Pemakalah : H. Azwar Anas
Pemandu : H. Warsito
Pencatat : Slamet Riyadi Ali
E. Zaenal Arifin

TANYA JAWAB

Pertanyaan: (tidak menyebutkan nama)

Mungkinkah setiap pelanggar kaidah bahasa diberi sanksi?

Jawaban:

Mungkin. (Mohon dibicarakan dalam kongres ini)

Saran/Usul:

Warga negara asing yang akan mengurus kewarganegaraan Indonesia diwajibkan melengkapi persyaratan dengan surat keterangan terampil berbahasa Indonesia.

BAHASA INDONESIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ginandjar Kartasasmita

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas

1. Pendahuluan

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia VI atas undangan untuk berbicara dalam kongres ini. Dengan senang hati saya menyambut undangan tersebut karena saya menganggap kongres ini merupakan peristiwa penting, tidak hanya dalam sejarah kebahasaan kita, tetapi juga dalam sejarah kebangsaan kita.

Kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena pada tanggal 28 Oktober 1928 para perintis kemerdekaan kita telah menetapkan satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, sebagai salah satu dari tiga butir Sumpah Pemuda yang terkenal itu. Ini memperlihatkan betapa jauh pandangan mereka dalam menyusun dasar kebangsaan kita karena hal itu sudah mereka lakukan tujuh belas tahun sebelum bangsa kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Jadi, di samping mengucap puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kita juga patut mengucapkan terima kasih kepada para perintis itu yang telah memecahkan satu masalah penting dalam masyarakat kita yang beraneka suku bangsa dan bahasa ini. Berkat merekalah, pada saat merdeka kita sudah memiliki *satu* bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa resmi. Seringkali kita lupa akan hikmah ini. Coba bayangkan dalam bahasa apa naskah proklamasi harus dinyatakan andaikata pada tahun 1945 itu kita belum mempunyai bahasa nasional? Dalam bahasa apa Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan kita ditulis andaikata kita belum memiliki bahasa resmi? Dalam bahasa apa pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat yang tersebar dari 27 propinsi ini?

Kita akan lebih merasakan hikmah ini jika menengok ke negara lain, seperti Kanada dan Belgia. Di Kanada semua dokumen resmi harus ditulis dalam dua bahasa resmi, yakni bahasa Inggris dan Prancis. Dapat dibayangkan berapa biaya yang digunakan untuk mencetak dokumen-dokumen itu dan berapa pula biaya yang harus dikeluarkan untuk menerjemahkannya. Demikian pula di Belgia yang bahasa resminya adalah bahasa Prancis dan Vlaams. Ditambah lagi bahwa di negara itu tidak jarang

terjadi sengketa antarpemutur akibat penggunaan bahasa resmi yang dianggap kurang seimbangan secara politis.

Kesulitan menerapkan satu bahasa nasional terjadi di India. Meskipun bahasa Hindi telah ditetapkan sebagai bahasa resmi, dalam kenyataan masih belum sepenuhnya diakui secara sosial oleh suku-suku bangsa yang tidak berbahasa Hindi. Akibatnya, bahasa Inggris masih tetap dominan baik sebagai bahasa pergaulan antarsuku, maupun antara pemerintah dan sebagian masyarakat.

Contoh-contoh di atas adalah sekedar untuk memperlihatkan betapa pentingnya kita mempunyai *satu* bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa resmi.

Tema kongres ini adalah "Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000". Dalam uraian berikut ini saya akan mencoba melihat dari kaca mata perencanaan pembangunan dan memaparkan bahasa Indonesia dalam konteks realitas kebahasaan yang ada di Indonesia. Ada tiga bahasa yang merupakan alat komunikasi penting dalam interaksi kultural di masyarakat kita, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

2. Bahasa dalam Interaksi dan Dinamika Kultural

Telah dikemukakan bahwa bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa negara. Apa yang telah dirintis pada tahun 1928 itu kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36.¹

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus menjadi ciri identitas nasional setiap pemakainya yang membedakannya dengan pemutur bahasa asing. Selain itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan bangsa kita, yakni yang menjembatani masalah komunikasi antara lebih dari 250 suku bangsa yang mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam administrasi negara, hukum dan perundang-undangan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertemuan-pertemuan yang sifatnya nasional, baik di pusat maupun di daerah. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi dalam administrasi negara digunakan dalam perencanaan.

Undang-Undang Dasar 1945 juga melindungi bahasa dan kebudayaan daerah. Silakan periksa Penjelasan Pasal 36.² Bahasa daerah merupakan bahasa resmi dalam upacara-upacara kedaerahan dan merupakan ciri identitas masyarakat dan kebudayaan daerah serta merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat daerah tertentu. Bahasa daerah memiliki berbagai orientasi konseptual khas yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daerah yang bersangkutan dan yang seringkali tidak dapat diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Meskipun demikian, bahasa daerah tetap merupakan unsur kebudayaan nasional yang memberi ciri kebudayaan daerah tertentu dalam masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini.

Undang-Undang Dasar kita juga menempatkan kebudayaan asing pada tempatnya di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikemukakan dalam Penjelasan

Pasal 32.¹ Bahasa asing sebagai salah satu kebudayaan asing adalah alat komunikasi dalam pergaulan internasional. Dalam menghadapi tantangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diplomasi, serta perdagangan, diperlukan penguasaan bahasa asing tertentu oleh sebagian anggota masyarakat kita. Perlu saya tekankan bahwa dalam menghadapi tantangan gejala globalisasi yang melanda kita dewasa ini dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa asing makin diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam pergaulan internasional.

Jadi, apa yang saya kemukakan itu *bukan sekedar masalah bahasa Indonesia*, melainkan masalah *peranan bahasa Indonesia*, bahasa daerah, dan bahasa asing dalam *kebudayaan* kita. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang terbuka dan demokratis, maka dalam masyarakat ini selalu terjadi interaksi antara unsur-unsur budaya di dalamnya. Interaksi itu secara garis besar terjadi pada persentuhan tiga "lapisan" budaya, yaitu lapisan budaya daerah, melalui bahasa daerah; lapisan budaya nasional, melalui bahasa Indonesia; dan lapisan budaya global (atau internasional), melalui bahasa asing. Persentuhan antara lapisan budaya nasional dan global di satu pihak dan antara lapisan budaya nasional dan daerah di pihak lain, itulah yang merupakan tempat terjadinya interaksi kultural. Interaksi itu menimbulkan suatu dinamika kultural. Dinamika ini akan tetap ada dan berkembang terus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam hal kebahasaan kita harus siap menghadapi tantangan yang menghadang kita menjelang tahun 2000 dan selanjutnya. Dalam kaitan dengan proses perencanaan pembangunan nasional, kita harus melihat interaksi kultural ini sebagai suatu dinamika kultural yang mendukung berkembangnya sistem perencanaan yang sungguh-sungguh mencerminkan potensi dan aspirasi masyarakat. Berikut ini saya akan membicarakan pemakaian bahasa dalam proses perencanaan pembangunan.

3. Bahasa sebagai Alat Komunikasi dalam Perencanaan

Saya akan berbicara di sini sebagai pemakai bahasa, bukan sebagai ahli bahasa. Bagi saya, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat, antarunsur aparatur Pemerintah, dan antaranggota masyarakat. Hal ini telah saya uraikan pada awal pembicaraan saya. Tujuan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah agar pesan pengirim dapat dipahami oleh penerimanya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang ingin kita komunikasikan dan dengan cara yang mudah dipahami sasaran komunikasi kita.

Perencanaan mencakup kegiatan yang menggunakan serangkaian metode untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, cara untuk mencapainya, dan alat-alat yang dipergunakan jika suatu cara dipilih. Pada dasarnya proses perencanaan yang baik harus merupakan proses interaksi kultural antara Bappenas di Pusat dan Bappeda di tingkat propinsi, kabupaten/kotamadya, serta desa. Di satu pihak oleh Bappenas perencanaan nasional harus disajikan dalam suatu kerangka *makro-sektoral*, sedangkan di pihak lain, di tingkat Bappeda tingkat II, perencanaan daerah harus melalui suatu

proses *mikro-spasial*. Keduanya mewakili dua lapisan budaya yang berbeda: yang pertama termasuk dalam lapisan budaya nasional, sedangkan yang kedua ke dalam lapisan budaya daerah. Di kabupaten/kotamadya yang dikenal sebagai daerah tingkat II sering terjadi interaksi kultural antara unsur-unsur lapisan budaya nasional dan daerah tersebut. Dalam proses interaksi kultural itu, peranan bahasa sangat menentukan. Kesalahan bahasa dapat mengakibatkan kesalahan perencanaan.

Seperti kita ketahui, selama ini Pemerintah selalu mendorong adanya perencanaan dari bawah. Di satu pihak, proses perencanaan membutuhkan komunikasi yang harus secara jelas menyalurkan gagasan-gagasan pembangunan. Gagasan-gagasan itu disampaikan dari tingkat pusat ke daerah. Penyampaian gagasan-gagasan itu tidak selalu harus, bahkan tidak perlu harus disampaikan dalam bahasa yang teknis. Di pihak lain, kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat harus dapat dikomunikasikan secara jelas dari daerah kepada pusat melalui saluran yang sudah ada dalam administrasi pemerintahan. Dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya, aparatur daerah dan rakyat, juga tidak perlu menggunakan istilah-istilah teknis. Namun, pada waktu sudah berwujud rencana, Bappeda harus mengemukakan dalam bahasa teknis, dan meskipun masih bersifat *mikro-spasial*, sudah harus menempatkan diri dalam rangka *makro-sektoral*. Inilah yang dimaksud dengan dinamika kultural, yang di dalamnya terjadi interaksi kultural antara unsur-unsur lapisan budaya nasional dan lapisan budaya daerah.

Ini berarti bahwa dalam perencanaan daerah peranan bahasa Indonesia, dengan berbagai variasinya, dan bahasa daerah sangat penting. Dalam dinamika kultural yang saya kemukakan tadi, titik simpul tempat interaksi antara kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional adalah pada daerah tingkat II (dati II), khususnya di Bappeda Dati II. Artinya, bahwa dalam proses perencanaan, di situlah tempat terjadinya dinamika kultural yang intensif yang melibatkan unsur-unsur kedua lapisan budaya itu. Dinamika kultural pada tataran ini memerlukan dukungan kemampuan para aparatur dan kalangan swasta di daerah.

Dalam pada itu, di tingkat pusat, antara lain di Bappenas, terjadi pula interaksi kultural antara lapisan budaya nasional dan global. Artinya bahwa pada tataran inilah unsur-unsur pada lapisan budaya nasional berinteraksi paling intensif dengan unsur-unsur lapisan budaya internasional. Interaksi itu terjadi dalam hubungan di berbagai bidang, seperti politik, kebudayaan, ekonomi, perdagangan, atau ilmu pengetahuan. Bahkan sekarang ini interaksi seperti itu sudah terjadi pada tingkat propinsi (dati I), yakni dengan terbukanya hubungan langsung antara daerah dengan para investor asing. Di sini terjadi pula dinamika yang untuk memanfaatkan bagi pembangunan menuntut profesionalisme baik para pejabat maupun kalangan swasta. Proses interaksi ini tidak lama lagi dan malahan sekarang sudah mulai di beberapa tempat sehingga akan menyentuh banyak daerah kabupaten.

Di bidang perencanaan pembangunan, masalah yang seringkali timbul adalah tidak atau kurang dipahaminya gagasan-gagasan pembangunan nasional oleh masyarakat. Hal itu dipersulit dengan masalah komunikasi gagasan dari unit

perencanaan suatu tingkat, misalnya Pusat, ke tingkat yang lain, yaitu dari I dan dari II. Bahasa Indonesia di bidang perencanaan terdiri atas sejumlah istilah teknis yang mengandung konsep-konsep tertentu dalam perencanaan pembangunan. Namun, pada waktu para perencana meminta kepada aparatur Pemerintah lainnya di daerah informasi tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, istilah-istilah teknis itu dapat dan tidak harus selalu dipergunakan. Jadi, tidak perlu istilah-istilah teknis di bidang perencanaan membebani baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat di desa sehingga mereka menjadi canggung dalam mengemukakan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sebaliknya, aparatur Pemerintah di daerah yang diharapkan memberikan masukan tentang kebutuhan nyata masyarakat di wilayah tertentu (misalnya desa, kecamatan) juga seringkali tidak dapat menyampaikan kebutuhannya secara jelas kepada para perencana. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat sering tidak dipahami sehingga membatasi kemampuan para perencana untuk "menerjemahkan" bahasa sehari-hari di dalam konteks masyarakat tertentu, khususnya masyarakat desa, ke dalam bahasa teknis perencanaan yang harus dituangkan dalam bahasa Indonesia yang jelas.

Dalam interaksi kultural yang saya maksud itu tidak jarang terjadi kekeliruan "bahasa". Dengan demikian, informasi tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak dapat dipahami dengan baik oleh perencana. Akibatnya, dapat terjadi perencanaan yang salah. Saya berpendapat bahwa bahasa Indonesia harus dilihat sebagai alat untuk melancarkan proses perencanaan "oleh, dan untuk rakyat". Akibatnya, kita harus menempatkannya dalam konteks peranannya bersama dengan bahasa daerah.

Ditinjau dari segi ini, saya tidak melihat bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang homogen, tetapi mempunyai beberapa variasi, sesuai dengan tataran komunikasinya. Ini saja sudah merupakan dinamika dalam bahasa Indonesia sendiri karena bahasa Indonesia resmi dan tidak resmi harus dapat digunakan dalam konteks komunikasi sesuai dengan kebutuhan dalam proses perencanaan. Dinamika itu selanjutnya diperluas cakupannya dengan dimungkinkannya penggunaan bahasa daerah untuk keperluan tertentu dalam proses perencanaan di daerah.

4. Penutup

Sebagai penutup saya ingin menyampaikan pada forum ini betapa bahasa Indonesia harus mampu mendukung upaya pengembangan sumber daya manusia, yakni membuat manusia Indonesia makin mandiri. Oleh karena itu, kita harus mempunyai kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia dan berusaha agar secara teknis bahasa Indonesia mampu mengangkat harkat manusia Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Kita tidak dapat membiarkan bahasa asing mengisi rumpang (*gap*) yang ada di dalam dinamika kultural yang saya kemukakan tadi, misalnya dalam pembakuan istilah dan mengisi kekurangan karya asli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik para ahli bahasa maupun ahli di bidang-bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi harus sadar dan berusaha terus-menerus agar bahasa Indonesialah yang mengisi rumpang itu.

Dengan mengetengahkan bahasa Indonesia dalam perencanaan pembangunan, saya ingin menekankan pentingnya memahami pembangunan bahasa yang merupakan bagian dari pembangunan kebudayaan dalam rangka pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut di atas itulah saya memahami pembangunan bahasa. Dengan pendekatan ini, diharapkan kita akan berhasil menjawab salah satu tantangan terhadap bahasa Indonesia menjelang tahun 2000, yaitu untuk menjadi alat komunikasi yang efektif guna mendukung pembangunan nasional dalam dinamika kultural yang berkelanjutan.

Demikianlah sumbangan pikiran saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.

CATATAN

1. Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia
2. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.
3. (...) Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak merusak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa sendiri.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan
Pemakalah : Ginanjar Kartasasmita/Mustafadidjaya
Pemandu : Daulat Purnama Tampubolon
Pencatat : Sutiman

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Usdiyanto, SMA Taruna Nusantara Magelang
 - a. Sejauh mana dalam interaksi kultural perencanaan pembangunan telah memberikan tindak nyata agar komunikasi antarmasyarakat yang kompleks ini bisa terekam dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan dalam merencanakannya.
 - b. Sejauh mana kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan dengan pihak-pihak yang berkompetensi di bidang kebahasaan.

Jawaban:

Dalam hubungan ini masalahnya adalah bagaimana interaksi kultural yang dilakukan membantu perencanaan bahasa Indonesia, di satu pihak, dan efektivitas dalam mencerna dan mengkoordinasi aspirasi-aspirasi atau kebutuhan yang ada di bawah. Oleh karena itu, ada dua segi yang dapat diperhatikan.

- a. Secara institusional pemerintah telah menata sistem perencanaan sampai ke daerah dan dilakukan oleh pejabat yang berasal dari daerah sehingga komunikasi atau interaksi yang dimaksudkan untuk mencernakan aspirasi-aspirasi itu sedapat mungkin diupayakan menampung aspirasi-aspirasi itu. Dengan demikian, sistem perencanaan terjembatani oleh institusi-institusi itu dari pusat hingga ke desa-desa.
 - b. Kerjasama Bappenas dengan lembaga kebahasaan telah dilakukan dengan
 - (1) mengupayakan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia staf perencanaan;
 - (2) mengundang ahli bahasa untuk ikut berperan serta dalam merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan (secara redaksional).
2. **Pertanyaan:** Sukowaluyo Mintorahardjo, Anggota DPR

Mengacu ke makalah Pak Ginanjar, bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dalam rangka pembangunan nasional. GBHN 1993 secara jelas mengungkapkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif berarti mampu menjadi sarana pengungkapan cipta, rasa, dan karsa

secara tertib dan mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus terjangkau oleh proses pembahasan itu, bangga, dan berkepribadian dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ada tiga strategi dasar untuk mencapai sasaran itu, yaitu pengajaran, pembinaan, dan pengembangan.

- a. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan sesuai dengan yang diamanatkan GBHN, sejauh mana Bappenas memberikan tempat (mempedulikan) bagi pengajaran, pembinaan, dan pengembangan?
- b. Apa peran masyarakat bahasa dalam rangka menggerakkan segala potensinya untuk mencapai sasaran agar bahasa Indonesia betul-betul menjadi alat komunikasi yang efektif dalam pembangunan nasional. Dalam kaitan ini kalau dalam kongres bahasa yang lalu mengenai kebutuhan guru sastra telah diungkapkan dan sampai sekarang belum bisa diwujudkan. Se jauh mana kepedulian Bappenas terhadap masalah tersebut.

Jawaban:

Pertanyaan ini merujuk ke makalah Pak Menteri, tetapi jika yang diminta adalah pendapat saya pribadi, maka akan saya kemukakan beberapa hal.

Fokus pertanyaan adalah bagaimana kepedulian Bappenas khususnya, Pemerintah pada umumnya dalam konteks strategi pemanfaatan bahasa baik dalam pengajaran, pembinaan, dan pengembangan bahasa.

Strategi pemanfaatan bahasa, baik dalam pengajaran, pembinaan maupun pengembangan bahasa, jika konteksnya diarahkan ke masa yang akan datang, bisa kita bicarakan kemudian dalam konteks Repelita VI ini. Namun, saya kira kita bisa melihat kepedulian itu secara hipotetis dan ini merupakan alat uji untuk melihat kadar kepedulian tadi. Misalnya, seberapa jauh alokasi sumber daya (*resources*) untuk menunjang ketiga jenis strategi itu; seberapa jauh implementasi operasional strategi itu diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari.

3. Pertanyaan: H. Paturungi Parawansa, IKIP Ujung Pandang

Apa yang Bapak kemukakan bahwa bahasa Indonesia sangat penting dalam perencanaan pembangunan, dan kesalahan bahasa dapat menyebabkan kesalahan perencanaan, sangat berarti bagi kami, para bahasawan. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana meningkatkan peranan bahasa.

Usul:

Baru-baru ini Pak Ginanjar di Ujung Pandang mengungkapkan ketertinggalan; dan menyebut kurang lebih 50% daerah kantong kemiskinan ada di wilayah timur. Oleh karena itu, kami mengajukan imbauan dalam perencanaan kenyataan ini bisa menjadi perhatian. Khusus pada Inpres Desa Tertinggal, kami mengusulkan agar dijadikan satu paket peningkatan taraf hidup sehingga rakyat yang tidak

mampu berbahasa Indonesia, dan yang berbahasa Indonesia tidak baik dan benar dapat dimasukkan dalam program seperti itu.

Jawaban:

Efektivitas dalam mengkomunikasikan ide melalui bahasa Indonesia akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemiskinan memang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, dirancang proyek untuk desa atau kawasan yang terbelakang baik melalui inpres maupun kebijakan pemerintah. Langkah-langkah itu dimungkinkan melalui Inpres Desa Tertinggal dan berbagai institusi kebijakan lainnya seperti dalam bidang fiskal dan moneter.

Kalau memang instrumen-instrumen yang dimaksudkan untuk membantu tidak dipahami karena akses dan pesan-pesannya tidak tertangkap, instrumen itu tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok sesuai dengan yang dimaksud. Jadi, kita dapat memahami identifikasi tadi bahwa kemiskinan bahasa bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk.

Dimensi lain adalah mengoptimalkan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang dapat dipahami dalam rangka pemasyarakatan dan pengefektifan pesan-pesan pembangunan.

Paling tidak ada dua segi untuk mendayagunakan pelaksanaan pembangunan IBT supaya betul-betul menyentuh kelompok sasaran tersebut, yaitu:

- a. memanfaatkan tenaga-tenaga edukatif dari daerah yang bersangkutan;
- b. menggunakan bahasa yang sederhana dalam menjelaskan upaya Pemerintah mengentaskan penduduk dari bawah garis kemiskinan atau memperbaiki taraf hidupnya.

BAHASA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA: AKAR DAN DAMPAK IDEOLOGIS DARI ISTILAH POLITIK

Moerdiono

Menteri Sekretaris Negara

1. Pendahuluan

Jika kita renungkan baik-baik, menurut pandangan saya, bahasa Indonesia adalah suatu *bahasa baru* walaupun akarnya bisa ditemukan pada bahasa-bahasa daerah, terutama pada bahasa Melayu.

Bahasa Melayu telah cukup lama dipergunakan sebagai *lingua franca* dalam komunikasi sosial antardaerah di kepulauan Indonesia. Karena pertimbangan praktis, administrasi pemerintahan kolonial mempergunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa resmi pemerintahan. Namun, para perumus Sumpah Pemuda tahun 1928 tidak menyebutkan bahasa Melayu untuk mendukung bangsa baru yang hendak mereka bangun, tetapi memilih bahasa Indonesia, yang sesungguhnya pada saat itu masih harus dikembangkan.

Pemilihan tersebut jelas bukannya tanpa makna. Keindonesiaan bangsa dan nusa yang hendak dibangun bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan penjumlahan dari kedaerahan yang merupakan unsurnya, tetapi merupakan peningkatan, penyempurnaan, perluasan, dan juga koreksi terhadap keterbatasan kedaerahan itu. Bahasa Indonesia yang baru itu diharapkan akan tumbuh sebagai tali pengikat serta wahana komunikasi politik dari bangsa baru itu.

Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara resmi bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, dan Madura), bahasa-bahasa itu akan dihormati sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Dengan demikian, kita sama sekali tidak menemui kesulitan dalam merumuskan politik bahasa untuk melaksanakan kaidah konstitusional yang cukup arif ini. Bahasa Indonesia yang kita kembangkan tidak meniadakan bahasa-bahasa daerah, tetapi malah memperkayanya. Mungkin itulah sebabnya mengapa dalam sejarah nasional kita tidak pernah terjadi protes dari pendukung bahasa daerah, seperti yang terjadi di sebagian negara lain.

Dalam makalah ini, bahasan mengenai bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan negara saya pusatkan pada penggunaan *istilah politik*. Istilah politik digunakan dalam

proses komunikasi politik dari dua komponen negara, yaitu antara *rakyat* dan *pemerintah*. Pokok perhatiannya terutama berkenaan dengan visi, kebijaksanaan, dan strategi yang dianut pemerintah dalam menunaikan tugasnya serta peranan dan hak-hak warganegara dalam kehidupan kenegaraan itu.

2. Pemahaman Kontekstual dan Istilah Politik

Sungguh menarik untuk kita amati bahwa setiap kurun dalam sejarah nasional bangsa kita mempunyai seperangkat istilah politiknya sendiri, yang secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan semangat kurun yang bersangkutan.

Kita dapat membedakan dengan jelas istilah-istilah politik yang berkembang dalam zaman kerajaan-kerajaan lokal prokolonialisme dengan istilah-istilah politik yang berkembang pada zaman pergerakan kemerdekaan menentang kolonialisme; serta dengan istilah-istilah yang berkembang setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam suasana merdeka itu sendiri, kita dapat membedakan dengan jelas perangkat peristilahan yang berkembang dalam kurun perang kemerdekaan 1945–1949 dengan istilah yang kita gunakan dalam suasana demokrasi parlementer 1950–1959, dalam suasana Orde Lama 1959–1965, dan yang berkembang dalam Orde Baru sejak 1966.

Mungkin tidak terlalu keliru untuk menyimpulkan bahwa sebagai media ekspresi suatu nilai yang dianut, bahasa mempunyai peranan politik yang penting, bukan hanya sekedar sebagai suatu wahana komunikasi politik, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi dan integrasi politik. Dalam zaman kolonial, bahasa bahkan berfungsi sebagai manifestasi identitas dan garis pembeda yang jelas antara "kaum sana" dan "kaum sini". Dalam konteks itulah dapat kita pahami betapa strategisnya makna tiga pernyataan dalam Sumpah Pemuda 1928; yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia.

Mengingat luas dan mendasarnya implikasi istilah politik ini, dalam penyelenggaraan negara kita harus sungguh-sungguh berhati-hati dalam mencipta, memilih, dan mempergunakan istilah-istilah. Berbeda dengan istilah-istilah dalam bidang lain, istilah politik tidaklah sekedar mempunyai makna denotasi yang netral. Istilah-istilah politik hampir selalu mempunyai konotasi yang sarat dengan makna ideologis yang melatarbelakangi istilah-istilah tersebut. Istilah yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda-beda dalam konteks kenegaraan yang berbeda-beda, tergantung pada latar belakang sejarah, filsafat politik, dan kepemimpinan politiknya.

Kita menyaksikan perbedaan makna dari istilah politik yang sama pada bangsa yang sudah berusia tua dengan bangsa yang baru saja dibangun.

Bangsa-bangsa yang lebih tua mengembangkan perangkat peristilahan politiknya dalam waktu yang cukup panjang. Makna ideologis yang dikandung oleh perangkat peristilahan tersebut dikembangkan serta disosialisasikan melalui sistem politiknya dalam waktu yang amat panjang dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Stabilitas

politiknya bertumpu pada pemahaman yang sama antara pemerintah dan rakyat mengenai konsep-konsep politik yang sama, yang mempunyai akar historis yang kokoh.

Berbeda halnya dengan bangsa-bangsa yang lebih muda, yang masih harus membangun, mengukuhkan, dan mengembangkan semangat kebangsaannya dari kemajemukan golongan yang membentuk negara kebangsaan baru tersebut. Dalam waktu yang relatif pendek, tokoh-tokoh politik dari bangsa yang muda tersebut harus menciptakan, memberi makna, memasyarakatkan, dan menggunakan seperangkat istilah-istilah politik baru, yang sesuai dengan wawasan ideologis yang dianutnya mengenai masa depan yang hendak dibangunnya di dalam negara baru tersebut.

Sebagai titik tolak, para pendiri negara baru tersebut dapat mengambil, mengangkat, dan memodifikasi perangkat istilah-istilah politik tradisional dari kerajaan-kerajaan lokal yang telah ada. Namun, hal itu tidak mudah untuk dilakukan karena peristilahan tradisional tersebut lazimnya sarat dengan makna dan konotasi feodalistik dan patrimonial yang mungkin sekali tidak lagi sesuai dengan semangat zaman.

Sebagai alternatif, tidaklah jarang bahwa para pemimpin negara baru harus mempergunakan perangkat peristilahan politik modern yang sebagian besar berasal dari dunia Barat, yang memang merupakan asal dari negara nasional yang umumnya dianut dewasa ini. Namun, hal ini juga mempunyai masalahnya sendiri. Sebabnya adalah karena istilah-istilah tersebut—misalnya "demokrasi", "partai politik", atau "hak asasi manusia"—mempunyai konotasi liberalistik kuat yang tidak selalu sesuai dengan wawasan ideologis yang dianut para pemimpin negara baru tersebut.

Perlu menjadi perhatian kita bahwa walaupun dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dengan jelas bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang kita pergunakan dan dalam penjelasannya ditegaskan penghormatan kita terhadap bahasa-bahasa daerah yang masih dipelihara rakyatnya. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan juga bahwa tidak kurang dari 42 buah istilah politik yang berasal dari bahasa Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis yang dipergunakan oleh para pendiri negara. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian konsep-konsep politik kita, setidak-tidaknya pada taraf awal, memang mengacu kepada pemikiran politik Barat yang masih harus kita pahami dalam konteks budaya, filsafat, dan ideologi kita sendiri.

Mengingat tidak sederhananya masalah ini, saya ingin mengajak kita sekalian menelaah lebih dalam akar dan dampak ideologis dari istilah-istilah politik ini dalam rangka mencari dan mengembangkan peristilahan politik dalam penyelenggaraan negara dalam tahun-tahun mendatang, yang lebih sesuai dengan wawasan serta perkembangan bangsa kita.

3. Akar Ideologi dari Istilah-Istilah Politik

Menurut penglihatan saya, istilah-istilah politik memang tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari dan wujud operasional suatu filsafat politik yang

melatarbelakanginya. Dengan demikian, istilah-istilah politik yang timbul dari suatu sistem filsafat politik tidak dapat dipinjam untuk dipakai begitu saja oleh para penganut filsafat politik yang lain. Istilah-istilah politik tidaklah statis, tetapi tumbuh dan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan wawasan dan dinamika kehidupan para pendukung filsafat politik. Dengan demikian, dalam perjalanan panjang setiap sistem politik akan tumbuh dan berkembang perangkat peristilahannya sendiri.

Masalah ideologis yang paling dasar dari proses pembentukan istilah-istilah politik adalah *masalah konsistensi nilai* yang dikandungnya, di satu pihak antara istilah politik dengan filsafat politik yang menjadi acuannya, di lain pihak antara kenyataan riil yang hendak diterangkan atau diwujudkan dengan istilah-istilah tersebut.

Dengan sendirinya yang terkandung dalam pernyataan ini adalah sikap bahwa *inkonsistensi* antara istilah politik yang dipergunakan dengan filsafat politik yang merupakan acuannya, atau dengan kenyataan yang hendak diterangkannya akan menimbulkan kerancuan berpikir yang serius yang harus dikoreksi.

Tugas mencipta, mensistematisasi, menguraikan makna, mengembangkan lebih lanjut, dan mengoreksi istilah-istilah politik agar diperoleh tingkat konsistensi yang tinggi ini pada dasarnya adalah tugas para filosof politik, ideologi serta potisi dari sistem politik yang bersangkutan. Tanpa peranan mereka ini, cepat atau lambat akan tumbuh berbagai istilah yang bukan saja maknanya tidak jelas, tetapi juga akan bersimpangsiur dan bukan tidak mungkin malah berkontradiksi satu dengan lainnya. Sungguh amat sulit tugas penyelenggaraan negara jika istilah-istilah politiknya mengalami kesimpangsiuran semantik seperti itu.

4. Implikasi Tiga Wawasan Kenegaraan dalam Kandungan Makna Istilah Politik

Rasanya perlu perhatian kita bersama bahwa penciptaan istilah-istilah politik di negara kita sebagian besar dilakukan oleh *praktisi politik*, baik untuk menerangkan maupun untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap wawasan yang dianutnya. Dapatlah dipahami bahwa walaupun kejernihan konseptual istilah-istilah tersebut tetap dipertimbangkan, tetapi fokus perhatian adalah pada upaya memperoleh pengertian serta dukungan politik dari rakyat Indonesia. Dengan sendirinya merupakan suatu kebutuhan yang berlanjut agar para teoretisi mensistematisasi demikian banyak istilah politik yang berkembang dan serta secara konseptual menjernihkan kandungan maknanya.

Para pendiri negara yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan para pemimpin politik untuk secara berkala setiap lima tahun memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia dan merumuskan arah yang hendak diturut untuk lima tahun berikutnya dalam dokumen konstitusional *Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Dengan demikian, dokumen itu adalah lokasi otentik yang paling tepat untuk mengenal perkembangan istilah-istilah politik yang mencerminkan wawasan ideologis suatu kurun dalam sejarah nasional bangsa kita.

Dalam kesempatan lain, beberapa tahun yang lalu saya telah menganjurkan disusunnya suatu *Kamus* atau *Ensiklopedi Pancasila* untuk merumuskan dengan jernih istilah-istilah politik yang kita gunakan, terutama dalam era Orde Baru ini. Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh BP7 Pusat bekerjasama dengan Sekretariat Negara dan Pusat Bahasa yang sebagian di antaranya sudah dipergunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, tugas ini jelas tidak akan pernah selesai karena dinamika masyarakat, bangsa, dan negara kita.

Dalam hubungan bahasan mengenai penyelenggaraan negara, pertama-tama kita harus bertanya terlebih dahulu: dalam konteks filsafat politik manakah kita akan memahami artian *negara* itu? Jika kita amati baik-baik, dalam masyarakat kita dewasa ini bergumul serentak tiga konsep kenegaraan, masing-masingnya dengan paket peristilahan politiknya sendiri yang secara bersamaan kita pergunakan.

a. Negara dalam Artian Modern

Negara dalam artian modern dewasa ini mengacu pada filsafat politik *nasionalisme*. Secara historis dan yuridis, negara kebangsaan yang terdiri dari kesatuan wilayah, rakyat dan pemerintah merupakan konsep Eropa Barat yang lahir sekitar abad ke-17 dan 18. Bangsa Indonesia serta bangsa-bangsa di Dunia Ketiga lainnya mengenal dan menerima bentukan negara modern ini melalui kontak dengan negara-negara Barat tersebut.

Suatu ciri khas yang amat menonjol dari negara nasional modern ini adalah pentingnya peranan rakyat. Baik yang mempergunakan sistem pemerintahan parlementer maupun yang mempergunakan sistem pemerintahan presidensial, negara-negara nasional modern pada umumnya menganut paham *kedaulatan rakyat* yang dioperasionalkan melalui *hak-hak warganegara*, *partai-partai politik*, *lembaga pers*, *media massa*, *pemilihan umum*, dan *dewan-dewan perwakilan rakyat*.

Negara Nasional, *Republik* dan *Kedaulatan Rakyat* merupakan konsep-konsep besar yang masih harus dijabarkan dan dioperasionalkan lebih lanjut dalam wujud istilah-istilah politik yang sarat dengan makna ideologis. Upaya mengembangkan istilah-istilah operasional dari konsep-konsep besar tersebut jelas sangat dipengaruhi oleh suasana zamannya.

Untuk Indonesia, dalam kurun perjuangan kemerdekaan 1945–1949, beberapa istilah politik kunci yang amat luas dipakai adalah: *republik*, *Yogya*, *Nica*, *diplomasi*, *perjuangan*, *lasykar*, *Bung*, *rakyat*, *federal*, *koperator*, *nonkoperator*, *gerilya*. Konotasi ideologis yang terkandung dari rangkaian istilah-istilah ini adalah suatu negara baru, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sangat berjiwa kerakyatan, dengan Yogyakarta sebagai pusat perjuangannya, menghadapi Nica, ingin membubarkan bentukan negara federal buatan Belanda, yang berhasil memperoleh dukungan dari sebagian tokoh-tokoh Indonesia sendiri, yang dilawan melalui rangkaian diplomasi dan perjuangan bersenjata, yang dilancarkan oleh

tentara reguler yang masih belum teratur, tetapi didukung oleh demikian banyak laskar yang lebih tidak teratur lagi. Dapatlah dipahami bahwa dalam kurun ini tidak banyak istilah-istilah yang berkenaan dengan pembangunan ekonomi. Sebagian besar istilah ini lenyap setelah pengakuan kedaulatan akhir Desember 1949.

Dalam kurun demokrasi parlementer 1950–1959, paket peristilahan politik pokoknya adalah *kabinet, partai, parlemen, koalisi, mosi tidak percaya, lisensi istimewa, pemilihan umum, konstituante, pusat, daerah berontak*. Konstruksi ideologisnya adalah suatu sistem pemerintahan parlementer yang peranan pentingnya dipegang oleh partai-partai politik, yang karena demikian banyak dan tidak satu pun yang merupakan mayoritas, harus berkoalisi untuk membentuk kabinet, dan sering jatuh karena mosi tidak percaya dari parlemen. Partai yang mempunyai portofolio kabinet mencari dana dengan cara memberikan izin-izin khusus berupa berbagai dispensasi ekonomi kepada kelompoknya sendiri. Pilihan umum yang diselenggarakan untuk menyusun sebuah konstitusi baru tidak berhasil memperoleh kesepakatan mengenai hubungan antara negara dengan keanekaragaman umat beragama yang menjadi warganegaranya. Sistem pemerintahan sentralistis yang menyebabkan daerah-daerah merasa terabaikan sehingga akhirnya memberontak terhadap pemerintah pusat tersebut. Kelompok istilah politik ini juga lenyap dengan berakhirnya kurun demokrasi parlementer yang penuh hiruk pikuk itu.

Dalam kurun 1959–1965 berkembang pula perangkat istilah politik yang khas dengan visi ideologis para pemimpin saat itu, yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh hangatnya *suasana perang dingin* dan pertentangan antara blok Barat dengan blok Timur. Istilah-istilah yang berkembang dalam kurun itu adalah: *revolusi, kontra revolusi, pemimpin besar revolusi, nasakom, indokrinasi, nefos, oldefos, nekolim, ganyang, konfrontasi, poros, sukarelawan*. Konstruksi ideologisnya adalah suatu kepemimpinan negara yang memandang dirinya sebagai pelopor pembentukan suatu dunia baru, yang jika perlu diwujudkan melalui cara-cara kekerasan bersenjata, bekerjasama dengan negara-negara lain yang sepaham. Rakyat terbagi antara mereka yang mendukung paham ini dan yang tidak mendukungnya. Yang tidak mendukungnya harus ditekan secara terus-menerus. Aksi-aksi Gerakan 30 September/PKI merupakan titik kulminasi dari kurun ini. Penumpasannya dalam waktu yang demikian cepat sekaligus mengakhiri penggunaan istilah-istilah politik kurun tersebut.

Akhirnya, sejak tahun 1966 secara bertahap kita mengembangkan pula seperangkat peristilahan politik yang sesuai dengan wawasan ideologis kita, antara lain: *supersemar, pembangunan nasional, inpres, banpres, dip, parasamya purnakarya nugraha, teladan, penataran P4, manggala, serasi, selaras, seimbang, pemilu, luber, wawasan nusantara, ketahanan nasional, suprastruktur dan infrastruktur politik, trilogi, pemerataan, mandiri, dwifungsi ABRI, keterbukaan, manunggal, ideologi terbuka, IBT, demokratisasi, hak asasi manusia*. Wawasan ideologisnya adalah suatu

bangsa yang bertekad mengejar ketinggalannya dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi dengan komitmen penuh dari pemerintah pusat, yang dengan berbagai jalur berusaha mencapai lapisan rakyatnya yang paling bawah. Pembangunan ini tertumpu pada suatu ideologi pembangunan yang dimasyarakatkan secara teratur dan berencana kepada seluruh lapisan kepemimpinan masyarakat oleh para penatar dan manggala yang bertugas secara penuh.

b. Negara-Negara Tradisional Pranasional

Berbeda dengan negara yang dalam artian modern yang berasal dari Eropa Barat adalah bentukan-bentukan kenegaraan besar kecil yang berkembang secara tradisional, termasuk di daerah-daerah di Tanah Air kita ini. Hampir secara menyeluruh negara-negara pra-nasionalisme itu tidak didasarkan pada filsafat politik kedaulatan rakyat. Bukannya rakyat, tetapi *raja*-lah yang mempunyai kekuasaan dan raja sendiri memperoleh kekuasaan itu dari suatu kekuasaan supranatural yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun juga.

Sesuai dengan filsafat politik yang dianutnya, negara-negara tradisional ini juga mengembangkan perangkat peristilahan politik dengan kandungan makna sendiri pula. Peristilahan politik dari negara-negara tradisional ini masih tetap terpelihara sebagai bagian dari kebudayaan daerah yang secara konstitusional dilindungi oleh Pasal 32, Undang-Undang Dasar 1945.

Ditinjau dari segi kandungan nilainya, sebagian istilah-istilah politik tradisional tersebut sesuai dan tetap relevan untuk kita lanjutkan dalam konteks negara nasional modern, seperti *bhineka tunggal ika, ing arso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. Penggunaan istilah-istilah yang mempunyai akar kultural yang kuat itu akan memberikan kesinambungan yang diperlukan untuk kelestarian negara. Namun, sudah barang tentu, ada peristilahan politik yang akan terasa sangat ganjil untuk diteruskan dalam konteks negara nasional yang modern yang berbentuk republik, misalnya *priyayi, wong cilik, kawula, titah, upeti*, dan istilah-istilah feodalistik lainnya, yang rasanya hanya sesuai dengan suasana suatu pemerintahan kerajaan.

Mengingat kenyataan ini, sungguh amatlah arif bahwa dari 62 orang pendiri republik yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945, sebanyak 56 orang memilih bentuk republik dan hanya 6 orang saja yang memilih bentuk kerajaan. Pilihan bersejarah tersebut tidak boleh kita anggap telah selesai. Implementasinya secara konsisten masih perlu ditindaklanjuti, baik dalam tataran pemerintahan maupun dalam kebiasaan masyarakat kita sendiri, terutama di daerah-daerah yang pernah mempunyai tradisi kerajaan yang kuat. Secara pribadi saya berpendapat bahwa memang dalam republiklah wawasan negara nasional modern serta paham kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara optimal.

5. Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Proses Pembentukan Hukum Nasional

Suatu bidang dalam penyelenggaraan negara di mana istilah-istilah harus dirumuskan dengan sangat jernih adalah dalam proses pembentukan hukum nasional, khususnya dalam proses penyusunan peraturan perundangan. Nuansa yang dikandung oleh berbagai istilah, terutama istilah politik, bukan saja akan mempunyai implikasi akademik, tetapi juga mempunyai konsekuensi yuridis.

Dewasa ini kita harus mengganti banyak sekali peraturan perundang-undangan kolonial dan bersama dengan itu kita mengembangkan hukum nasional kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menyeleksi serta mengakomodasi demikian banyak produk legislasi badan-badan internasional dalam berbagai bidang. Tidaklah berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa tugas pembangunan hukum nasional dalam babak baru kehidupan kenegaraan kita ini merupakan tugas yang amat kompleks. Kita bukan saja secara cermat harus menyeleksi konsep-konsep yang kita miliki dan ingin kita teruskan dalam konteks negara nasional, tetapi juga harus menelaah demikian banyak konsep-konsep baru yang kandungan makna serta implikasinya belum kita pahami secara penuh.

Dalam bidang politik, tugas mendasar yang harus kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama adalah menyinkronisasikan wawasan kita mengenai hak asasi manusia berdasarkan Sila Pertama Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, dengan sekitar 24 buah instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *Human Rights*. Jenis masalah ini bukan khas Indonesia karena negara-negara pada setiap kontingen menyusun deklarasinya sendiri untuk menjabarkan serta menindaklanjuti *The Universal Declaration of Human Rights*, berbagai *Covenants*, dan instrumen lainnya.

Untuk melaksanakan tugas ini, dalam bulan Juni 1993 yang lalu kita telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diberi waktu selama enam bulan untuk menyusun keanggotaan serta merumuskan program kerjanya.

6. Simpulan dan Penutup

Izinkanlah saya menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang saya sajikan dalam makalah singkat ini.

Bahasa Indonesia sudah memainkan peranan yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Seperti juga halnya dengan negara nasional kita sendiri yang masih tumbuh dan berkembang, bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan negara juga masih tumbuh dan berkembang secara terus-menerus. Setiap kurun dalam sejarah nasional kita mengembangkan perangkat istilah politik yang sesuai dengan wawasan ideologis yang dianut pada zaman itu. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan negara akan terus berkembang secara dinamik.

GBHN adalah dokumen otentik untuk memantau istilah-istilah politik pokok yang berkembang dalam masyarakat kita sekali lima tahun.

Suatu tantangan yang harus kita jawab dalam pengembangan bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan negara adalah memberikan makna yang jernih dan konsisten kepada istilah-istilah politik yang kita gunakan, bukan hanya konsisten dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang merupakan acuannya, tetapi juga dengan dinamika kehidupan masyarakat kita itu sendiri.

Saya mengharapkan agar para filosof politik dan para ahli bahasa bersedia memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perumusan istilah-istilah politik kita, bekerja sama dengan para tokoh teoretisi dan praktisi yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara kita.

Sekian, dan terima kasih.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dalam Pengelenggaraan Negara Akar dan Dampak Ideologis dan Istilah Politik
Pemakalah : Moerdiono
Pemandu : Amran Halim
Laporan : Caca Sudarsa
Erwina Burhanuddin

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** F.X. Oerip Soedjoed, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia

Dalam hubungan dengan penggunaan kata-kata asing seperti *open*, *closed*, *tailor* di toko-toko kecil yang tidak pernah dikunjungi oleh orang asing, apakah ada instruksi Mendagri tahun 1992 yang melarang pemakaian istilah-istilah asing untuk nama-nama perusahaan, yang ternyata tidak diindahkan sampai sekarang. Apakah tidak mungkin ditingkatkan menjadi inpres atau undang-undang?

Jawaban:

Hal itu merupakan perkembangan yang sangat menyedihkan. Saya melihat adanya kecenderungan yang menarik mengenai bahasa Indonesia. Kalau dahulu orang bersikap acuh tak acuh, sekarang ini ada kelompok yang sangat memperhatikan dan ingin tunduk kepada kaidah-kaidah yang benar, tetapi juga ada orang-orang yang sembrono. Presiden di dalam pembukaan kongres ini mengatakan bahwa kita perlu berhati-hati dengan penggunaan istilah-istilah asing. Saya sangat bahagia dapat mengemukakan dalam kongres ini bahwa tidak kurang dari Presiden memperhatikan pandangan ahli/pakar mengenai bahasa. Beberapa tahun yang lalu di dalam pertanggungjawaban beliau di MPR digunakan "pertanggungan jawab", tetapi sesudah di dalam Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia melalui TVRI dikatakan bahwa yang betul adalah "pertanggungjawaban", "pertanggungan jawab" diubah menjadi "pertanggungjawaban". Kalau Presiden Republik saja begitu sikapnya, mengapa yang bukan presiden tidak mengambil sikap yang sama? Contoh lain, sebagai Menteri Sekretaris Negara, saya bertanggung jawab dalam penyusunan undang-undang. Dalam hal ini, saya selalu berhubungan dengan Pusat Bahasa. Istilah *bounded ware house* disarankan agar diindonesiakan menjadi 'kawasan berikat'. Mula-mulanya saya mempertanyakan istilah "kawasan berikat" itu, tetapi alah bisa karena biasa, ternyata "kawasan berikat" itu merupakan istilah yang baik.

2. **Pertanyaan:** Indiyah Imran, FPBS IKIP Bandung

- a. Kata-kata seperti *diamankan*, *penyesuaian harga* sebetulnya menutupi sesuatu yang menyakitkan. Misalnya, *diamankan* sebetulnya berarti 'ditahan'; 'penyesuaian' sebenarnya berarti 'naik harga'. Siapa yang membuat istilah ini, wartawan atau pemerintah sebagai bahasa politik?
- b. Apakah Bapak Mensesneg dapat membaca ini tanda-tanda zaman apa?

Jawaban:

Tatkala menaikkan harga BBM, mungkin dua kali yang terakhir, istilah itu sudah diganti; bukan '*disesuaikan*' lagi, tetapi '*dinaikkan*'. Pemerintah mulai mencoba bertindak lebih rasional karena barangkali masyarakat yang maju itu salah satu cirinya adalah berpandangan rasional. Menjadi manusia itu harus ada emosinya juga, kalau rasional saja malah lucu, bukan manusia jadinya, bayangkan orang yang tidak punya emosi.

Tanda zaman apa? Karena semua tertawa, saya anggap barangkali semua sudah tahu jawabannya. Terima kasih.

3. **Pertanyaan:** Poppy Dewi Puspitawati, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa

Bagaimana sikap politis kita sehubungan dengan adanya pembauran, tetapi masih banyak orang, khususnya bukan pribumi, yang menggunakan bahasanya di tempat umum?

Jawaban:

Memang barangkali ini masalah kita bersama. Saya khawatir, secara pribadi, belakangan ini hal itu agak serius. Saya mendengar dari seseorang yang kebetulan menjadi anggota Dewan Komisaris suatu bank. Di dalam suatu bank yang banyak saudara-saudara kita sewarga negara yang bukan asli berkumpul membicarakan masalah bank itu. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia. Ini serius. Barangkali kongres ini dapat memikirkan keadaan seperti itu dapat diatasi.

4. **Pertanyaan:** Leonardus Lumbanbatu, Kopertis Wilayah II Palembang

Bagaimana istilah politik berikut.

Peristiwanya adalah pembunuhan jenderal oleh G30-S/PKI. Harinya adalah Hari Kesaktian Pancasila. Korbannya disebut Pahlawan Revolusi, Orang revolusioner dinyatakan PKI sebagai golongan sendiri. Ada pelajar yang mengatakan bahwa ketujuh pahlawan revolusi itu sebaiknya disebut pahlawan Pancasila dalam rangka pemasyarakatan P-4. Bagaimana tanggapan Bapak?

Jawaban:

Terus terang, waktu itu konotasi politik kuat. Waktu itu adalah zaman revolusioner, semuanya revolusi-revolusi. Jadi, dengan sangat hormat, tujuh pahlawan itu disebut Pahlawan Revolusi.

5. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Pertanyaan saya mangacu kepada bahasa daerah yang Bapak singgung-singgung tadi. Bahasa daerah yang dipelihara oleh Pemerintah. Terasa ada kekaburan. Yang dipelihara itu yang seperti apa? Dengan kata lain, apa tolok ukurnya? Apakah ada kesengajaan para penulis UUD 45 itu mengaburkan hal itu supaya nantinya Pemerintah tidak usah memelihara. Maksud saya, kalau Pemerintah harus memelihara 500 bahasa daerah, kapan kita bisa membangun bidang yang lain karena biayanya akan begitu tinggi. Menurut penilaian Bapak, apakah di sini ada kesengajaan mengaburkan pengertian "dipelihara" itu.

Jawaban:

Pertama, saya ingin menjawab bahwa saya yakin seyakini-yakinnya tidak ada niat dari perancang UUD itu untuk mengaburkan pengertian itu. Secara pribadi, saya menganggap banyak pikiran besar yang dituangkan dalam UUD kita yang menurut saya justru sangat modern. Definisi itu makin longgar, cakupannya lebih banyak. Makin *njelimet* rumusannya, makin terbatas cakupannya. Kita bersyukur karena dengan rumusan-rumusan yang singkat kita dapat menjawab tantangan-tantangan zaman yang bergerak dengan sangat dinamis. Oleh karena itu, pada tahun 85, misalnya, kita menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Pengertian-pengertiannya dinamis. Misalnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan "bumi air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat". Apa yang dimaksud dengan "dikuasai negara": 'dikuasai langsung', 'diatur', 'melalui BUMN', atau apa? Apa yg dimaksud dengan "sebesar-sebesar kemakmuran rakyat"? apa yang dimaksud dengan "menguasai hajat untuk orang banyak"? Beberapa tahun lalu kita pikir bahwa transportasi itu menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu, kereta api, misalnya, harus dikelola oleh negara. Padahal, alasannya sederhana. Kereta api dan lokomotif itu ongkosnya mahal. Pihak swasta tidak ada yang kuat. Dulu kita tidak membayangkan bahwa sektor swasta itu dapat memberikan perusahaan penerbangan. Oleh karena itu, penerbangan nasional itu dikira cuma Garuda. Jadi, menurut saya tidak ada kesengajaan.

Saran/Usul

Perlu disusun "Ensiklopedia Pancasila" oleh Pusat Bahasa yang bekerja sama dengan Sekretariat Negara dan BP7.

PERANAN BAHASA INDONESIA DALAM PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

M. Yogie S.M.
Menteri Dalam Negeri

Seperti tadi dikemukakan bahwa kami ditugaskan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dengan suatu nota dan sekaligus dibekali dengan suatu bahan yang sudah disiapkan, yang ditugaskan oleh beliau kalau bisa saya bacakan supaya disiapkan yang baik, dan Kepala Badan Diklat mewakilinya.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Saya pribadi sangat mendapat kehormatan sekali untuk bisa bersama-sama dalam acara ini karena sebagai pribadi saya mengetahui bahwa kongres ini adalah kongres yang sangat tinggi dan saya mengikuti acara ini dari koran-koran sangat banyak disiapkan. Saya akan memulai dengan membacakan ceramah Menteri Dalam Negeri pada Kongres Bahasa Indonesia VI pada tanggal 30 Oktober 1993.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Saudara Ketua dan Panitia Penyelenggara serta peserta Kongres Bahasa Indonesia VI, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mengawali uraian ini perkenankanlah kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puja, puji, dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan dan kuria-Nya memungkinkan kita berada pada kesempatan yang membahagiakan ini.

Perbincangan tentang bahasa nasional dengan segala masalahnya, bagi saya memberikan kebahagiaan tersendiri karena sejak lama kita yakin bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa menunjukkan dan merupakan jati diri bangsa sehingga perbincangan pada lingkup yang lebih luas dan jangkauan lebih jauh akan berarti sebagai usaha membenahi diri agar mempunyai ketahanan dan bahkan berperan dalam pembangunan kehidupan antarbangsa dalam harmoni yang kita cita-citakan.

Tema Kongres ini adalah "Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000" menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya kita menentukan peran terbaik, baik dalam membangun kehidupan antarbangsa itu maupun dalam membangun diri sendiri sebagai tumpuan kokoh bagi pembangunan kehidupan antarbangsa itu, sedangkan bahasan yang diminta dikemukakan adalah "Peran Bahasa dan Kesatuan Bangsa"

memberikan gambaran optimistik bahwa bahasa Indonesia berpotensi lebih kaya daripada sekadar alat berkomunikasi saja. Oleh karena itu, saya sangat merasa terhormat untuk mengemukakannya meskipun banyak keterbatasan saya untuk menyajikannya.

Sungguh besar rasa terima kasih kita kepada pendahulu yang dalam Sumpah Pemuda memasukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan, yang harus kita pelihara dan kita kembangkan karena mampu pula mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan itu lebih lanjut. Dan, memang kita telah melihat bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya, khususnya pada saat perjuangan melahirkan, pada saat kita mempertahankan dan menumbuhkan kemerdekaan bangsa. Sejalan dengan itu, kita pun sering khawatir bahwa penggunaan bahasa asing ataupun bahasa daerah secara berlebihan dalam wacana dan perbincangan lisan bahasa Indonesia dapatlah mungkin melemahkan rasa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa itu. Apakah kekhawatiran ini dapat dinilai berlebihan atau kurang pada tempatnya atau terlalu subjektif memang perlu dikaji. Namun, kalau mengingat bahwa bahasa mencerminkan cara dan isi pikiran penggunaannya, sedangkan kesesuaian isi dan jalan berpikir merupakan akar timbulnya kebersamaan, tampaknya kekhawatiran itu boleh untuk tidak diabaikan. Apalagi kalau unsur perasaan kita perhitungkan sebagai hal yang erat melekat pada bahasa itu.

Dalam pembangunan politik selama periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, peranan bahasa Indonesia dalam pendidikan politik cukup kita catat menonjol. Bahasa Indonesia telah mampu menerjemahkan pesan dan gagasan pembangunan nasional kepada rakyat dengan jelas, dengan mudah dipahami. Partisipasi rakyat dalam pembangunan, meskipun masih memperlihatkan adanya keterbatasan, cukuplah kita katakan memuaskan. Selain besarnya partisipasi rakyat itu juga kita lihat tanda-tanda keberhasilan berupa mantapnya stabilitas politik dalam negeri, mantapnya Pancasila sebagai ideologi nasional, berkembangnya demokrasi Pancasila, dan mantapnya kesatuan dan persatuan bangsa. Kemantapan itu bisa saja mempunyai arti relatif, tetapi memang demikian dalam kehidupan kemasyarakatan kita tidak dapat mengharapkan adanya ukuran-ukuran yang mutlak karena ukuran-ukuran mutlak atau kemutlakan—dalam hal ini sekaligus bukan berarti kemandekan. Tentu saja kita tidak dapat menganggap bahwa kemantapan yang diutarakan tadi itu terwujud hanya karena kita memiliki satu bahasa nasional. Banyak memang faktor yang berperanan. Bahasa Indonesia yang kita miliki paling tidak telah mampu menjadi peubah anteseden terhadap lahirnya kesatuan dan persatuan untuk kemudian melahirkan kemantapan yang dimaksudkan. Menurut hemat saya, tuntutan kita terhadap bahasa untuk berfungsi sebagai pemersatu dan sebagai wujud jiwa kesatuan bangsa seharusnya tidak berlebihan pula.

Hadirin yang saya hormati,

Meskipun terdapat keberhasilan seperti telah dikemukakan dan banyak orang yang menyatakan bahwa kita tidak mempunyai masalah mendasar mengenai bahasa

nasional, tidaklah berarti bahwa masalah yang berkaitan dengan kebahasaan tidak ada sama sekali. Dari berbagai masalah yang masih kita jumpai, antara lain, terdapat pada hal berikut.

Pertama, penggunaan bahasa nasional yang belum sempurna sebagai sarana pembangunan bangsa, sarana pengembangan ilmu dan teknologi, serta sarana kehidupan dan pembinaan kebudayaan bangsa.

Kedua, bahwa keberhasilan pembangunan dapat dinilai belum efisien dan belum optimal karena ada sebagian masyarakat yang kurang bergairah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku serta sebahagian lainnya masih belum mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Yang kurang bergairah itu umumnya yang tinggal di kota, sedangkan yang belum mampu itu berada di desa-desa apalagi yang terpencil. Usaha-usaha penanggulangan terhadap itu memang telah diadakan, misalnya Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991, tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, kepada Bupati, Kepala Kota Madya, Kepala Daerah Tingkat II, Walikota Administratif, kepada camat seluruh Indonesia. Hakikat instruksi ini adalah mendorong seluruh masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di lokasi pemukiman, di pasar-pasar, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Dengan dorongan itu diharapkan muncul kesadaran warga kita untuk mau, untuk mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mempunyai kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia, kita berkomunikasi bersama mereka, dan untuk mempunyai kemampuan untuk mengerti, untuk menyerap pesan-pesan pembangunan serta program-program lainnya. Sebaliknya, mampu menyatakan dengan tepat aspirasinya agar dapat dipahami dan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan-keputusannya.

Kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar di daerah-daerah terpadu dalam kegiatan Bulan Bahasa pada setiap bulan Oktober. Memang kegiatan ini merupakan kegiatan yang masih terlalu kecil dibandingkan dengan tantangan dan cita-cita yang dikehendaki. Namun, diharapkan menjadi langkah awal, langkah kecil yang mampu menciptakan langkah yang besar, yang raksasa, pada kemudian hari.

Masalah kedua adalah adanya sebagian orang kelas atas yang kurang bergairah menggunakan bahasa Indonesia baku, melainkan lebih sering menggunakan bahasa dan istilah-istilah asing serta adanya sebagian masyarakat kelas bawah yang belum mampu menikmati belajar bahasa Indonesia dengan benar dan teratur. Alasan mereka yang menyebut diri kelas atas yang sangat menghargai bahasa dan istilah asing sangat berbagai-bagai, tetapi pada dasarnya sangat berhubungan dengan profesi atau hidup mereka sehari-harinya. Dalam globalisasi sekarang ini industri perdagangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi hampir tidak dapat dikendalikan mengalirkan istilah dan bahasa bangsa-bangsa yang relatif dominan di bidang yang bersangkutan juga di bidang-bidang lainnya, seperti makanan, pakaian kelas tinggi, hiburan, serta kesenian

yang eksklusif bangsa yang berada di posisi terlemah terpaksa atau dengan suka rela menggunakan bahasa atau istilah-istilah asing itu. Memang banyak hal yang tidak bisa diterima sebagai alasan, misalnya karena belum adanya bahasa Indonesia yang baku, padahal mereka sebenarnya yang tidak mengikutinya. Alasan gengsi pun bisa jadi ada sebagai sisa mental bangsa yang terjajah untuk waktu yang relatif lama. Mengenai adanya warga negara yang masih belum mampu menikmati pendidikan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar masalahnya adalah menyangkut situasi ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya. Di luar itu terdapat tiga kelompok faktor yang menyebabkannya adalah

1. faktor geografis yang menyangkut permukiman mereka yang terpencil. Karena faktor ini mereka hidup lebih asing terisolasi dalam arti tidak pernah mengunjungi daerah-daerah lainnya atau dikunjungi oleh masyarakat daerah lain.
2. faktor demografis ialah bahwa mereka hidup hanya di antara suku mereka saja. Oleh karena itu, mereka hanya berbicara dengan bahasa suku bangsa saja dan merasa tak perlu mampu untuk berbahasa Indonesia.
3. faktor psikososial kultural, khususnya untuk mereka yang masih berstatus asing atau sangat terikat pada rumpun asalnya. Meskipun sudah berpuluh tahun telah bermukim di wilayah Indonesia. Mereka umumnya hidup berkelompok sambil teguh memegang ajaran nilai dan norma asalnya.

Menghadapi masalah kedua yang dihadapi tadi kita memandang perlu untuk dinyatakannya kemauan politik baru, kemauan politik baru yang bermaksud menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa seluruh rakyat Indonesia yang dapat dibanggakan. Kemajuan pembangunan, baik yang dicapai selama PJP I maupun yang akan kita capai pada tahap yang akan datang ini seharusnya menyangkut pula kebanggaan semua lapisan masyarakat untuk berbahasa Indonesia dengan baik, dengan benar dan mengatasi segala keterpencilan sehingga hal itu tidak selalu menjadi alasan yang mengesahkan, membenarkan kekurangan-kekurangan tadi itu. Secara pribadi, saya dan seluruh jajaran Departemen Dalam Negeri insya-Allah serta pemerintah daerah akan menjadi salah satu saka guru dalam menjadikan bahasa Indonesia ini mampu digunakan untuk menghadapi masalah-masalah aktual ataupun potensial pada tahun 2000-an nanti.

Sebagai penutup secara ringkas, saya ingin memberikan respon apa usul Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di dalam permintaannya untuk kesempatan ini untuk diajukan tiga hal sebagai berikut.

1. Mengenai seberapa jauh dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat berbangsa di Indonesia, bahasa Indonesia berkomunikasi dan sekaligus sebagai inspirasi ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Dari uraian tadi dapat dikemukakan sebagai berikut.

Sebagai sumber inspirasi ke arah persatuan dan kesatuan bangsa, menurut hemat saya, sudah tidak diragukan. Namun, bahasa Indonesia bukan satu-satunya sumber sehingga kalau tidak mendapat promosi dan pemeliharaan yang tepat akan

ditinggalkan. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan itu kualitas persatuan dan kesatuan yang diikat tanpa ikatan bahasa akan memperlihatkan penurunan kualitas karena dalam bahasa tercermin cara berpikir dan cara yang mengandung muatan perasaan.

2. Kendala yang dihadapi bahasa Indonesia dalam memainkan peran itu menyangkut banyak faktor. Faktor pertama atau kendala pertama adalah faktor mendesak untuk menggunakan bahasa asing. Berhubung makin deras arus informasi dan lancarnya media komunikasi. Faktor kedua adalah faktor geografis yang memungkinkan hubungan antarsuku bangsa kurang lancar. Berbeda dengan hubungan antarbangsa yang makin deras. Ketiga faktor demografis yang berkaitan erat dengan faktor geografis tadi. Keempat faktor psikososial kultural yang memungkinkan interaksi sosial budaya menjadi sangat terbatas. Dalam hal ini kita perlu memandang bahasa Indonesia yang mampu berperan mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa ialah dalam posisi sebagai peubah bebas. Akan tetapi, juga kita memandangnya sebagai peubah terikat ialah adanya hasil dari persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dikemukakan sebagai berikut.
 - a. Diperlukan adanya kemauan politik dari kita semua dengan pemerintah sebagai penggerak yang selanjutnya diikuti dengan penuh kesungguhan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaannya. Untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu kemauan politik berarti adanya suatu keterikatan yang kuat untuk menggunakan setiap cara yang mungkin untuk mewujudkannya dengan kehormatan bangsa dan negara sebagai taruhannya. Saat ini aspek operasionalnya masih sangat lemah.
 - b. Perlu yang khas lagi untuk membangun bahasa Indonesia yang baku, tetapi yang kira-kira bisa hidup di masyarakat yang luas, kita perlu ingat bahwa yang akan digunakan masyarakat nantinya adalah yang mereka terima dan yang mereka setujui. Bukan hanya karena benar saja.
 - c. Perlu usaha lebih keras lagi untuk membangun bahasa dan istilah-istilah baku untuk bidang-bidang khusus, terutama bidang-bidang yang berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya, teknologi dan keuangan perdagangan.
 - d. Dalam mengangkat bahasa daerah menjadi bahasa Indonesia pengangkatannya hendaknya tidak dari satu bahasa daerah. Untuk satu pengertian dapat diangkat istilah dari tiga atau empat bahasa daerah sebagai padanan.
 - e. Pengajaran bahasa Indonesia sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi banyak menggunakan metode aktif kreatif ialah menulis fiksi dan nonfiksi maupun bahasan analisis dan pengemukaan gagasan-gagasan.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam keterbatasan yang nyata seperti ini, maka saya sampaikan uraian sebagai respon positif. Atas penghargaan dan permintaan Saudara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Panitia Kongres Bahasa Indonesia VI kepada saya untuk berperan serta dalam pertemuan yang terhormat ini. Untuk segala kekurangannya tadi, saya mohon maaf dan atas perhatian para hadirin, uraian yang disampaikan tadi saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Peran Bahasa Indonesia dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pemakalah : H.H.H. Siahaan
Pemandu : A. Latief
Pencatat : Adi Sunaryo
Elita Burhanuddin

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Abdul Djebar Hapip, FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini seyogianya diikuti oleh semacam petunjuk pelaksanaan karena tidak ada kejelasan aspek-aspek nasionalnya di daerah. Hal itu perlu karena pemerintah daerah tidak tahu persis lembaga-lembaga yang kompeten yang bisa membantu dalam pengembangan dan penyuluhan itu.

Sementara ini ada kecenderungan pejabat menjadi kambing hitam. Kenyataannya, bahasa yang dipakai oleh pejabat itu sulit dimengerti oleh rakyat. Sebuah istilah yang lahir dari pejabat tinggi dari pusat bisa saja sampai ke tingkat pedesaan dan diucapkan oleh seorang kepala desa. Yang diragukan ialah apakah ada kepala desa itu mengerti akan istilah itu. Masalahnya ialah apakah ada petunjuk dari Menteri Dalam Negeri bagaimana seyogianya pejabat itu menggunakan bahasa sesuai dengan pendengar atau objek yang menjadi sasaran. Saya kira ini erat sekali hubungannya dengan efektivitas informasi yang disampaikan. Misalnya, istilah "tinggal landas" yang diucapkan gubernur, kemudian ditiru oleh bupati, camat, sampai kepala desa, tetapi rakyat masih geleng kepala. Tinggal landas itu apa? Andaikata dijelaskan dalam bentuk uraian yang lebih sederhana, saya kira semua orang bisa mengerti. Saya kira, ini sebagai salah satu contoh bahasa Indonesia yang masih kurang efektif.

Jawaban:

Saya tertegun ketika mendengar pertanyaan itu. Ini merupakan pekerjaan besar dan akan kami bicarakan. Saya akan melihat bagaimana pelaksanaannya dan perlu dilakukan analisis singkat. Saya akan membawa masalah ini menjadi satu analisis mengenai instruksi Mendagri, sedangkan petunjuk pelaksanaannya akan kami bahas dan kami siapkan bersama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

2. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Sehubungan dengan penanya yang pertama, saya ditugasi untuk mengajarkan bahasa Indonesia di diklat Indonesia bagian Timur, yang mencakupi Kalimantan

Tengah, NTB, dan NTT. Setiap saya menyampaikan penyuluhan mengenai bahasa Indonesia, saya mendapat kesan bahwa mereka itu sama sekali belum mengetahui instruksi yang dikatakan tadi. Jadi, saya tertarik sekali menyampaikan usul sekiranya instruksi tadi disampaikan pada para peserta diklat ini sehingga mereka mengetahui. Sebenarnya hal semacam itu memang sudah digariskan dari atas, dari menteri. Karena selama diklat itu ada tanya jawab dan kemudian terbentur, seakan-akan belum diatur oleh menteri, padahal sudah ada aturannya. Yang kedua, masalah administrasi, misalnya, "diklat tingkat spadya" tulisannya masih *dya* padahal dalam Ejaan Yang Disempurnakan hendaknya diganti *dia*. Saya kira, itu bisa dikoreksi sesuai dengan apa yang sudah dibakukan. Ada pertanyaan dari peserta diklat angkatan 26 mengenai singkatan diklat yang pada saat itu masih di tulis pendidikan dan latihan hendaknya pendidikan dan pelatihan, tetapi saya mendengar tadi Bapak sudah mengatakan pendidikan dan pelatihan. Jadi, sudah ada perbaikan.

Jawaban:

Pengisian pelajaran dan hubungan kerja antara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Depdikbud, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memang baik sekali dibicarakan secara lebih terprogram.

3. Pertanyaan: Nurhasim, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

Ada tiga hal yang sedang dan akan kita lakukan, yaitu (1) perombakan, (2) perbaikan, dan (3) pengembangan. Yang akan saya sampaikan di sini adalah masalah perbaikan. Misalnya, "fakultas" atau "akademi bank" sekarang menjadi Akademi Perbankan dan Keuangan. Akan tetapi, ada juga fakultas ekonomi. Mengapa tidak dikatakan fakultas perekonomian karena kalau kita mengambil kata yang sejajar dengan itu, seperti fakultas perikanan, kita tidak akan mengatakan "fakultas ikan", fakultas pertanian bukan "fakultas tani". Hal ini perlu diatasi karena sekarang tampak bukan merupakan suatu gejala, tetapi sudah merupakan satu fakta. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengantisipasi dampak yang kurang menguntungkan. Yang saya tanyakan adalah antisipasi yang bagaimana yang diambil pemerintah untuk menyetop kemungkinan perkembangan gejala bahasa seperti itu.

Saran saya, mengapa tidak didirikan suatu wadah atau lembaga yang disebut lembaga pengkajian dan penerapan bahasa nasional supaya semua bahasa bisa dikontrol dari atas.

Jawaban:

[Pemandu] Antisipasi Pemerintah dalam kebahasaan barangkali kurang tepat dipaksakan kepada pembawa makalah untuk menjawabnya. Menurut hemat saya,

kita teruskan saja kepada lembaga yang berwenang, yaitu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

4. **Pertanyaan:** Leonardus Lumbanbatu, ASM Sriwijaya, Palembang

Bantulah kami yang tidak memiliki kekuasaan untuk memperbaiki bahasa Indonesia. Saya kira, persatuan dan kesatuan bangsa kita akan terganggu bila apa yang dikatakan bukan itu yang dilakukan. Kesenjangan antara pernyataan pemerintah dengan kenyataan membuat orang melecehkan bahasa Indonesia. Misalnya, saya buat istilah PAM (Perusahaan Air Minum) yang dikatakan pemerintah daerah. Padahal, sebenarnya perusahaan air bersih. Nah, kalau itu diminum sakit perut. Bagaimana tanggapan Bapak, supaya kesenjangan pernyataan dari Pemerintah dan kenyataan itu erat sehingga apa yang dikatakan itulah yang dilakukan.

Jawaban:

[Pemandu] Masalah nama Perusahaan Air Minum bahwa air minumnya itu belum dapat diminum, rasanya itu bukan wewenang Mendagri. Namun, apakah kita, umpamanya, pada suatu saat tidak berkeinginan bahwa memang perusahaan itu airnya dapat diminum? Kalau itu yang menjadi tujuan, daripada sekarang namanya air mandi dan nanti muncul nama lain yang pada akhirnya juga air minum, lebih baik kita gunakan saja nama itu. Akan tetapi, jika seringkali berganti tujuan, barangkali hal itu perlu dipertimbangkan dan ini menjadi tugas ahli bahasa.

PERAN BAHASA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Beberapa Pokok Sumbangan Pemikiran

Wardiman Djojonegoro
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Pertama-tama saya sampaikan puji syukur ke hadirat Allah swt. yang karena izin-Nyalah kita dapat berkumpul kembali dalam forum Kongres Bahasa Indonesia VI ini. Pertemuan akbar yang diselenggarakan lima tahun sekali ini bukan hanya merupakan peristiwa bahasa saja, tetapi sekaligus sebagai suatu peristiwa budaya yang amat penting bagi bangsa kita. Kita semua menyadari betapa penting dan menentukan-nya peran bahasa dalam perkembangan budaya nasional dan proses pembudayaan bangsa. Kita juga bersyukur peristiwa yang penting ini dapat secara teratur dan berkala kita selenggarakan tiap lima tahun sekali, terutama setelah Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga.

Perkenankanlah saya memohon maaf kepada semua peserta Kongres karena saya tidak dapat mengemukakan secara langsung sumbangan pikiran saya dalam forum yang amat penting ini. Hal itu disebabkan karena tugas yang harus saya tunaikan di luar negeri. Saya berharap Kongres Bahasa Indonesia VI ini dapat berlangsung dengan sukses dan menghasilkan rumusan pemikiran dan sumbang saran yang nyata bagi perkembangan dan pembinaan bahasa khususnya dan perkembangan budaya kita pada umumnya. Saya yakin, harapan ini akan dikabulkan Allah swt. mengingat yang hadir dalam forum kongres ini bukan saja pakar yang ahli dalam bahasa Indonesia, tetapi juga mereka yang mencintai dan mendambakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia di masa depan.

Para Peserta Kongres yang terhormat,

Perkenankanlah berikut ini secara singkat saya sampaikan pokok-pokok pikiran yang saya harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan saran bagi para peserta dalam menyukkseskan kongres kita ini.

Dengan judul "Peran Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan", saya ingin mengajak para peserta Kongres untuk merenungkan kembali apa yang dicetuskan para pendahulu kita 65 tahun yang lalu, yaitu Sumpah Pemuda. Butir ketiga ikrar Sumpah Pemuda 1928 secara tegas menyatakan menjunjung bahasa

persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan itu telah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia bahwa bahasa Indonesia telah menyatukan bangsa yang terdiri atas bermacam suku dengan bahasa daerah masing-masing yang tersebar dari Sabang hingga Merauke ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.

Jika dalam masa perjuangan "menjunjung bahasa persatuan" berarti mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia, maka pada masa pembangunan ini "menjunjung bahasa persatuan" berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar demi memperkokoh rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

Kedudukan bahasa Indonesia makin kukuh setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Pasal 36) memperkuat kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Di samping sebagai bahasa resmi, kandungan makna Pasal 36 Undang-Undang Dasar 45 tersebut juga mencakup pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti: (1) sebagai bahasa pengantar bagi semua jenis dan jenjang pendidikan, (2) sebagai bahasa perhubungan nasional (bahasa administrasi), terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, (3) sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (4) sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Sebagaimana dikemukakan tadi, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang pendidikan. Hal itu dipertegas di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu berarti bahwa penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar mutlak diperlukan bagi peserta didik. Penguasaan bahasa Indonesia secara baik dan benar akan menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Sebab, bahasa Indonesia menjadi sarana pengembangan penalaran dan sebagai sarana pengembangan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi sarana peningkatan sumber daya manusia dalam memasuki era globalisasi.

Sementara itu, bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan. Di samping itu, bahasa daerah dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia serta khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri bangsa.

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Sementara itu, penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan untuk memperluas cakrawala berpikir, penguasaan ilmu dan teknologi, serta memperlancar komunikasi dengan bangsa lain. Semua buku ajaran ataupun bacaan harus dapat mendorong minat siswa untuk membaca, dan akhirnya menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas peserta didik untuk menulis atau mengarang. Peserta didik aktif melakukan kegiatan belajar untuk memenuhi

tuntutan kebutuhan dirinya sebagai sumber daya manusia Indonesia yang tangguh pada masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan peran bahasa Indonesia secara lebih mantap dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, ada empat hal yang menurut saya perlu diperhatikan.

Pertama, kurikulum—yang merupakan dasar kegiatan belajar-mengajar pada semua jenjang pendidikan—harus dapat mencerminkan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Untuk itu, semua unsur yang berpengaruh dalam proses belajar-mengajar harus mendorong terciptanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti buku ajaran atau buku bacaan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak hanya tercermin pada buku pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga harus tercermin dalam buku semua bidang studi pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Guru dapat membangkitkan minat peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Para peserta didik harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperagakan tingkat kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik secara tertulis maupun lisan.

Kedua, guru—yang merupakan motivator dalam proses pendidikan—perlu menyadari sedalam-dalamnya bahwa bahasa yang digunakan oleh mereka harus dapat memberikan keteladanan bagi peserta didik. Dalam hubungan ini, tanggung jawab pembinaan generasi penerus tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar berada di tangan guru. Yang saya maksud guru di sini tidak terbatas pada guru bahasa saja, tetapi juga guru semua bidang studi dan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Guru dapat membangkitkan minat peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Ketiga, sikap positif—yang merupakan prioritas utama dalam pembinaan bahasa—perlu ditanamkan sedini mungkin. Hal ini berarti pendidikan bahasa perlu mendapat perhatian sejak dari tingkat pendidikan dasar dan terus ditingkatkan dan dikembangkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan penanaman sikap positif sejak dini, rasa setia dan bangga akan bahasa Indonesia akan menjadi dasar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia.

Keempat, lingkungan di luar sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan ketiga hal tadi. Untuk itu, perlu diciptakan lingkungan yang mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama di tempat-tempat umum seperti papan nama, papan petunjuk, dan iklan. Begitu juga media massa cetak dan elektronik—surat kabar, majalah, radio, dan televisi—harus mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Para peserta kongres yang terhormat,

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 menegaskan bahwa pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional perlu makin ditingkatkan agar bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Dengan ungkapan lain, pembinaan dan

pengembangan bahasa juga diarahkan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Pada hemat saya, upaya ke arah itu perlu dilakukan dengan memperhatikan lima hal sebagai berikut.

Pertama, perlu lebih digiatkannya penelitian kebahasaan yang secara khusus bertujuan untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

Kedua, perlu lebih ditingkatkan kembali pembakuan istilah ilmiah di berbagai cabang ilmu pengetahuan, serta peningkatan pemasarakatannya ke dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Ketiga, pengembangan kaidah bahasa serta pemekaran perbendaharaan bahasa perlu mendapat perhatian dan peninjauan sejalan dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan.

Keempat, kegiatan penerjemahan buku-buku ilmiah dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya, perlu lebih ditingkatkan lagi.

Kelima, sehubungan dengan butir kedua dan keempat di atas, maka penerbitan kamus-kamus istilah keilmuan terasa menjadi amat penting. Di samping aspek kelengkapan dan keluasan isinya, masalah rancangan penyajian (tampilan) kamus peristilahan ilmiah tersebut perlu pula diperhatikan.

Para peserta kongres yang berbahagia,

Akhirnya, di penghujung sajian ini saya ingin mengutip pemikiran orang bijak yang menyebutkan bahwa: "Ketertiban berbahasa menunjukkan ketertiban berpikir manusia, dan kemajuan dalam berbahasa menunjukkan kemajuan peradaban dan budaya suatu bangsa". Dengan merenungkan kata-kata arif di atas, saya mengajak kepada seluruh peserta Kongres dan kepada seluruh warga masyarakat untuk makin mencintai bahasa kita. Salah satu perwujudan kecintaan tersebut ialah dengan berbahasa secara baik dan benar.

Sekali lagi, kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat, dan semoga karya nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia VI ini merupakan salah satu tonggak sejarah yang berarti dalam perkembangan bahasa dan budaya kita.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dalam Dunia Pendidikan
Pemakalah : Wardiman Djojonegoro
 dibacakan oleh Hasan Walinono
Pemandu : Hasan Alwi
Pencatat : Suryo Handono
 Junaiyah H.M.

TANYA JAWAB

1. Pendapat

Proses intelektualisasi dapat berhasil bila seseorang menguasai bahasa asing. Dengan kata lain, bahasa Indonesia belum mampu sebagai bahasa ilmu pengetahuan.

2. Tanggapan

- a. Penguasaan bahasa asing bukanlah untuk proses intelektualisasi, melainkan untuk kepentingan yang lain.
- b. Bahasa Indonesia sudah mampu sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Semua itu bergantung bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri.

3. Saran/Usul

- a. Guru harus dapat membangkitkan kesadaran/sikap positif pada pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu pun tidak hanya terbatas pada guru bahasa saja, tetapi semua guru harus melakukannya.
- b. Pendaftaran calon pegawai hendaknya menuntut syarat berkemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bukan berkemampuan berbahasa asing.
- c. Program penerjemahan perlu digalakkan (ditingkatkan).
- d. Produk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu dibenahi pemakaian bahasanya, termasuk ejaannya.

BAHASA INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

Edi Sedyawati
Direktur Jenderal Kebudayaan

Agak berlebih-lebihanlah kiranya apabila kita masih mempertanyakan kaitan antara bahasa Indonesia dan usaha-usaha pengembangan kebudayaan nasional. Bahasa Indonesia adalah salah satu tiang penunjang utama bagi kebudayaan nasional Indonesia. Walaupun demikian, apabila ditinjau dalam perspektif sejarah, akan terlihat perubahan atau dapat juga dikatakan perkembangan dari fungsi bahasa Indonesia sepanjang sejarah modern kita yang masih cukup singkat ini.

1. Tahap Perkembangan

Tahap pertama perkembangan fungsi bahasa Indonesia terjadi pada masa prakemerdekaan bangsa Indonesia. Pada masa itu terjadi loncatan perkembangan pemikiran pada suatu golongan tertentu masyarakat Indonesia, yaitu golongan terpelajar yang telah bersentuhan dengan sistem pendidikan cara Eropa. Perkembangan pemikiran itu diikuti dan juga kemudian didorong oleh gerakan-gerakan sosial yang memunculkan himpunan, organisasi yang bergerak di bidang budaya, politik, pendidikan, dan ekonomi. Himpunan atau organisasi itu lah yang merupakan batu-batu landasan bagi terwujudnya konsep "bangsa Indonesia". Dalam rangka itu, "bahasa Indonesia", yang pada waktu masih berada dalam taraf pendefinisian dijadikan instrumen yang ampuh untuk mempercepat proses pembentukan bangsa baru, bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa bangsa berdasarkan keputusan atas pilihan. Pada gilirannya, pada waktu itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pembentuk kesadaran akan kesatuan bangsa; kesadaran akan kebutuhan bersatu mengatasi keaneka-ragaman berbagai budaya dari masyarakat yang sama-sama dijajah oleh Belanda, dan juga kesadaran akan perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa asing di luarnya.

Tahap kedua perkembangan fungsi bahasa Indonesia terjadi pada masa kemerdekaan awal. Pada masa itu negara Republik Indonesia telah terbentuk, tetapi masih mengalami masa pancaroba dalam bidang politik dan kemiliteran. Rongrongan-rongrongan terhadap persatuan bangsa dilakukan oleh berbagai pihak musuh. Dalam

situasi demikian itu, pelaksanaan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara merupakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan saja merupakan lambang persatuan bangsa, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan bernegara yang memerlukan pengelolaan tersendiri. Pengelolaan itu didasari oleh suatu strategi tertentu untuk memastikan berfungsinya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, serta untuk mendemonstrasikan suatu kenyataan hadirnya sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat, yang mempunyai bahasanya sendiri.

Pada tahap kedua itu lah dilakukan usaha ke arah terwujudnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Upaya yang disebut sebagai "pembinaan" diarahkan ke dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar bahasa nasional itu, sebagai media komunikasi, semakin luas dikenal dan dipergunakan di dalam masyarakat Indonesia baru. Tujuan keduanya adalah agar bahasa itu sendiri, sebagai suatu sistem simbol, menjadi semakin lengkap sebagai suatu perangkat yang utuh. Dalam hal terakhir ini dilakukan upaya-upaya pengkajian dan perumusan kaidah secara berkelanjutan, baik berkenaan dengan ejaan, kosa kata, maupun tata bahasa.

Tahap ketiga perkembangan fungsi bahasa Indonesia terjadi ketika kekuatan negara Republik Indonesia semakin mantap. Organisasi pengelolaan bahasa pun semakin mantap, dana untuk pelaksanaan berbagai usaha pun tersedia, dan pakar-pakar Indonesia yang ahli bahasa dan kesusastraan semakin banyak muncul dan berperan dalam bidang keahliannya. Bahasa Indonesia, dengan kemajuan-kemajuan dalam perkembangannya, menjadi berfungsi untuk semakin memantapkan jati diri bangsa. Karya ilmiah yang bermutu telah banyak ditulis dalam bahasa Indonesia, dan dalam bidang kesusastraan pun terlihat perkembangan, melalui karya-karya penulisannya, berupa semakin kayanya bahasa Indonesia akan variasi kemungkinan ekspresi. Di samping itu, semakin disadari pula adanya perbedaan ragam di dalam bahasa Indonesia. Pada tahap ketiga ini, di mana kita sekarang berada, penganeka-ragaman ini mulai tampil secara nyata, baik melalui perkembangan alamiahnya di dalam masyarakat maupun melalui kajian serta usaha yang memang terarah ke sana. Di samping kristalisasi ragam bahasa, perluasan perbendaharaan kata pun berjalan terus.

2. Dua Arah Perkembangan

Sebagai salah satu sarana pembinaan jati diri bangsa, bahasa Indonesia senantiasa perlu dirawat oleh seluruh warga masyarakat, yaitu baik pemerintah maupun swasta, baik pakar maupun awam. Pembinaan itu meliputi dua aspeknya yang perlu berjalan seimbang. Aspek pertama adalah kebahasaan yang meliputi baik ketatabahasaan maupun kosakata, sedangkan aspek kedua adalah kesusastraan. Kedua aspek tersebut memang berkaitan erat, tetapi tetap dapat dipisahkan fungsinya. Pada sisi kebahasaan yang dipentingkan adalah rancang bangunnya atau tingkat kebakuan kaidah-kaidahnya. Termasuk pula ke dalamnya persoalan kosakata. Perwujudan nyata dari penanganan sisi kebahasaan ini adalah kajian linguistik beserta peggungan-peggunaan

terapannya. Pokok kajian linguistik ini, sebagaimana diketahui, meliputi baik kosakata, struktur ketatabahasaan, tingkah laku penggunaan bahasa, maupun pembunyian dan penulisannya. Di sini bahasa ditinjau sebagai suatu sistem tanda. Dalam penggunaan sistem ini bisa terdapat perbedaan antara modus yang tepat dan yang salah. Di antara keduanya terdapat modus yang menyimpang, yang apabila menjadi kebiasaan dapat menjadi suatu penanda ragam bahasa yang khusus.

Pada sisi kesusastraan, pokok pandang yang dipentingkan adalah bagaimana sistem tanda itu dimanipulasi dan dipergunakan sebagai media ekspresi. Baik pengindahan, perlambangan di atas lambang-lambang, maupun kadang-kadang pengingkaran secara sengaja atas kaidah-kaidah umum merupakan kiat-kiat yang dapat digunakan oleh sastrawan. Tujuan karya sastra bukanlah semata-mata menyampaikan pesan, melainkan juga untuk menumbuhkan efek afektif tertentu pada pembacanya.

Bagi setiap pengguna bahasa perlu latihan-latihan berbahasa secara efektif. Di samping penggunaan sehari-hari yang bersifat "apa adanya" dan "tidak sadar", diperlukan pula latihan-latihan untuk paling kurang dapat membedakannya dengan modus penggunaan yang "ilmiah" dan yang "susastra". Penggunaan bahasa untuk keperluan ilmiah atau yang sejalan dengannya memerlukan ketepatan dan keterbatasan yang jelas dari setiap kata yang digunakan. Sebaliknya, penggunaan bahasa untuk keperluan berkesusastraan justru mencari daya resonansi dan asosiasi yang memerlukan daya tangkap yang halus dari pembacanya. Kedua modus yang disebut terakhir ini, yaitu yang ilmiah dan yang susastera, memperkaya akalbudi manusia. Maka, pelatihan berbahasa sebanyak-banyaknya warga masyarakat Indonesia akan menjadikan bangsa Indonesia ini lebih kuat sebagai bangsa yang cerdas dan arif. Di sinilah letak arti bahasa dalam pembentukan jati diri bangsa.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah: Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional

Pemakalah : Edi Sedyawati

Pemandu : Hasan Muarif Ambary

Pencatat : Haniah
Puji Santoso

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Usdiyanto, SMA Taruna Nusantara, Magelang
 - a. Ada perbedaan pendapat mengenai puncak-puncak kebudayaan daerah yang akan diangkat menjadi kebudayaan nasional, (1) yang dapat dikomunikasikan dan (2) kebudayaan daerah yang tertinggi. Bagaimanakah pendapat Ibu?
 - b. Proses mengkomunikasikan budaya daerah dengan bahasa Indonesia terasa kurang "srek" bagi pemiliknya, misalnya wayang dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat Ibu?

Jawaban

- a. Saya memiliki penafsiran yang lebih operasional tentang puncak-puncak kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional. Tidak semua kebudayaan daerah dapat dinilai dalam satu kriteria yang sama. Terutama kesenian dan sastra daerah mempunyai simbol yang khas. Jadi, yang disebut puncak budaya daerah adalah yang mampu melintasi batas-batas daerahnya. Dalam arti kebudayaan tersebut dapat dinikmati dan dipelajari oleh masyarakat daerah lain, misalnya *tari bali*, *tari pedati*, penarinya bukan hanya orang Bali atau Aceh lagi.
- b. Ada beberapa tingkat proses mengindonesia dalam kaitannya dengan budaya daerah, yaitu kita yang sama-sama bangsa Indonesia itu yang terdiri atas berbagai suku bangsa (etnik) perlu terlebih dahulu saling kenal; untuk saling kenal ini ada dua jalan, jalan yang singkat dan jalan yang panjang. Jalan yang singkat adalah apabila ekspresi-ekspresi bahasa daerah itu ditransformasikan ke dalam bahasa Indonesia untuk dikenal suku bangsa lain.

Jalan yang panjang adalah adanya para ahli-ahli kebudayaan untuk mempelajari budaya daerah dan kemudian menyajikan ke dalam bahasa Indonesia. Wayang dalam bahasa Indonesia jika dirasakan kurang srek, anggap saja itu hanya sebagai promosi atau pengenalan kepada etnis lain. Jika sudah diperkenalkan budaya daerah tersebut, diharapkan etnis lain itu akan mempelajari atau mengajar budaya yang diperkenalkan tersebut.

2. **Pertanyaan:** Muhammad Darwis, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Bahasa Indonesia sebagai unsur kebudayaan nasional sekarang terancam budaya asing, misalnya bahasa Inggris. Gedung-gedung modern diberi nama dengan bahasa Inggris. Bagaimana pandangan Ibu? Apakah dalam kondisi seperti itu bahasa Indonesia dapat diharapkan menjadi alat mengembangkan kebudayaan nasional?

Jawaban:

Saya menganjurkan untuk dapat merawat bahasa Indonesia, artinya kita sendiri harus mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, baik dari modus ilmiah maupun dari modus seni yang menampilkan berbagai macam imajinasi. Apabila kedua modus itu terawat dengan baik, kita tidak perlu khawatir dengan adanya pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Untung pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengadakan peraturan daerah guna menertibkan pemasangan papan-papan nama. Yang perlu kita hilangkan adalah sikap rasa gengsi kita terhadap bahasa asing, tetapi tidak berarti kita harus menghilangkan bahasa-bahasa asing itu dari perbendaharaan bahasa Indonesia.

3. **Pertanyaan:** Imam Sukarsono, Staf Ahli Dewan Koperasi Indonesia

Bagaimanakah langkah operasional pembinaan bahasa Indonesia dalam menghadapi pengaruh bahasa asing?

Jawaban:

Langkah operasional untuk pemuda dalam pembinaan bahasa Indonesia ada dua jalur, yaitu rumah dan sekolah. Bagaimana pemakaian bahasa Indonesia mereka di rumah? Hal itu sangat bergantung kepada lingkungan penutur bahasa Indonesia di rumah tersebut. Bagaimana pemakaian bahasa Indonesia di sekolah? Hal itu sangat bergantung kepada guru dan teman-teman di lingkungan sekolah. Serapan mereka di kedua lingkungan tersebut akan kuat pengaruhnya dalam pemakaian bahasa Indonesia.

4. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

- Apakah kebudayaan nasional itu sudah ada? Apakah dalam embrio atau dalam taraf pembentukan?
- Apakah kebudayaan nasional nanti itu akan diwarnai oleh kebudayaan etnis, khususnya dengan warna mencolok Jawa?

Jawaban:

- Saya tidak setuju kalau kebudayaan nasional itu masih dalam embrio. Kita sudah memiliki kebudayaan nasional yang berupa bahasa Indonesia. Ini

merupakan suatu komponen terpenting dalam kebudayaan nasional. Sebab, melalui bahasa Indonesia itulah kita memiliki sistem simbol yang sama untuk mengungkapkan maksud-maksud kita. Apa pun yang terekspresi dalam bahasa Indonesia adalah ekspresi budaya nasional kita. Ada beberapa sistem nilai yang termasuk dalam budaya nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang mengikat kita semua secara nasional. Jadi, sudah benar kebudayaan nasional itu ada dan bukan hanya dalam embrio saja. Sudah barang tentu tidak semua aspek kebudayaan termasuk dalam kebudayaan nasional, misalnya karya-karya seni tari baru yang dihasilkan oleh koreografer modern yang bukan tari Jawa, Bali, dan Minangkabau, tetapi mengambil bahan dari tari daerah untuk diangkat menjadi tari nasional. Dalam musik-musik diatonik jelas terlihat dengan lagu-lagu nasional, misalnya Indonesia Raya, lagu-lagu seriosa, dan lagu-lagu pop, itu sudah merupakan aset kebudayaan nasional. Demikian halnya dengan seni lukis di atas kanvas, lukisan Affandi, misalnya, sudah menjadi aset kebudayaan nasional. Seni sastra yang menggunakan bahasa Indonesia juga termasuk aset kebudayaan nasional, misalnya novel dan roman yang tidak dimiliki oleh kebudayaan daerah.

- b. Pengaruh adanya konsep demokrasi sosial tidak memungkinkan kebudayaan nasional kita didominasi oleh kebudayaan daerah Jawa. Bahasa yang digunakan pun sudah menggunakan bahasa Indonesia yang lebih dekat dengan Melayu.

5. **Pertanyaan:** Sukanto, FKIP Universitas Tanjungpura

"Saya mengikuti kongres hari ini" dapat diubah:

"Saya hari ini mengikuti kongres" dan dapat diubah:

"Hari ini saya mengikuti kongres"

Pemakaian pola kalimat ini apakah dapat mencerminkan pemakai bahasa yang berbudaya tinggi? Sebab kelompok kata *hari ini* bisa di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Padahal, kelompok kata *hari ini* tidak mencerminkan waktu secara operasional.

Jawaban:

Saya kurang paham dengan pertanyaan Saudara. Pembolak-balikan posisi frasa dalam kalimat itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu berbudaya lebih tinggi atau lebih rendah.

6. **Pertanyaan:** Sukanto, FKIP Universitas Tanjungpura

- a. Apakah konsep dasar hubungan antara pendidikan dan kebudayaan? Bagaimanakah sebenarnya kedudukan antara pendidikan dan kebudayaan?
- b. Bagaimanakah keterikatan antara bahasa Indonesia dalam pengembangan kebudayaan nasional sehubungan dengan adanya era globalisasi dalam PJP II?

- c. Bagaimana titik sentral transformasi budaya dalam GBHN 1993 sehubungan dengan masyarakat Indonesia yang menuju ke arah industrialisasi?

Jawaban:

- a. Pendidikan itu suatu proses pembudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah cocok atau ada kebenaran yang dikandungnya. Pendidikan itu sendiri merupakan proses pembudayaan dan proses internalisasi nilai-nilai pada anak dari sebelum terdidik sampai sesudah terdidik sehingga menambah muatan kesadaran kebudayaannya. Kebudayaan itu sendiri sesuatu yang sangat luas cakupannya, meliputi berbagai aspek kehidupan. Tidak semua aspek kebudayaan dapat ditransformasikan kepada anak didik di pendidikan formal, tetapi juga dapat ditransformasikan dalam proses belajar mengajar di pendidikan nonformal.
- b. Strategi pengembangan kebudayaan dalam era globalisasi saya kaitkan dengan pertanyaan ketiga tentang masyarakat industri. Masyarakat industri itu tidak berarti bahwa seluruh warga masyarakat menjadi industriawan. Masyarakat itu secara keseluruhan mempunyai kekuatan industrial. Kekuatan-kekuatan industrial inilah yang mengangkat posisi ekonomis bangsa ini secara keseluruhan. Keputusan negara untuk mengarah ke masyarakat industrialisasi tentu ada dampaknya, yaitu akan lebih banyak diperlukan tenaga manusia yang cocok dengan bidangnya. Ini tidak berarti manusia Indonesia harus menjadi manusia-manusia industrial. Kita akan tetap memerlukan seniman-seniman yang mengembangkan kebudayaan Indonesia. Bangsa Indonesia tidak semata-mata menjadi bangsa pembeli, tetapi juga diarahkan untuk menjadi bangsa produsen dan penjual iptek. Kita memang harus menahan pengaruh arus globalisasi itu, khususnya dalam bahasa Indonesia, agar tidak tenggelam dan tersapu bersih.

BAHASA INDONESIA DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN

H. Hasbullah Mursyid
Mewakili Menteri Agama RI

1. Pendahuluan

Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk ikut ambil bagian dalam forum yang terhormat ini dengan membawakan makalah yang berjudul "Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan".

Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara bagi Republik Indonesia yang kita cintai berasal dari bahasa Melayu yang sudah lama menjadi *lingua franca* di kawasan Asia Tenggara. Baik sekarang maupun di masa yang lalu penutur mereka yang dalam berkomunikasi sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat lain, selalu menggunakan bahasa tersebut relatif kecil. Namun, tanpa rintangan yang berarti bahasa itu dapat diterima sebagai bahasa negara bagi penduduk yang saat ini berjumlah lebih dari 180 juta yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan agama, adat, dan budaya yang berbeda-beda.

Jika memperhatikan keberhasilan itu dan memperbandingkannya dengan usaha beberapa negara yang sampai saat ini belum juga berhasil, kita layak bersyukur kepada Allah Swt. bahwa dewasa ini kedudukan bahasa Indonesia di negara Republik Indonesia tidak dapat diragukan lagi kemantapannya. Bahasa tersebut dipergunakan secara luas dalam bidang pemerintah, pendidikan, ilmu, teknologi, dan bidang-bidang lainnya termasuk dalam bidang keagamaan.

2. Bahasa Indonesia dan Kegiatan Keagamaan

Dewasa ini bahasa Indonesia di negara sudah menjadi wahana kegiatan keagamaan yang cukup efektif. Hal itu tidak mengherankan karena sejak zaman dahulu-waktu masih bernama bahasa Melayu—bahasa tersebut sudah menjadi wahana pengkajian dan penyiaran agama yang andal juga.

Negara maritim Sriwijaya yang beribu kota di Sumatera pernah menjadi pusat pengkajian dan penyiaran agama Budha. I Tsing, musafir dari Cina, memperdalam pengetahuannya tentang agama Budha di ibu kota Sriwijaya tersebut. Dengan bahasa apa lagi agama Budha kala itu dipelajari dan disebarkan dari ibu kota Sriwijaya kalau tidak dengan bahasa wilayah itu juga, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa

Sriwijaya, atau apapun namanya. Di samping itu, di wilayah Jawa Tengah terdapat sebuah prasasti yang berasal dari abad VII, dikenal dengan nama "prasasti Canggal", ditulis dengan bahasa Melayu. Padahal, di situ pastilah sudah ada bahasa untuk komunikasi antarpenduduk setempat, bahasa Jawa. Prasasti itu berkaitan dengan kegiatan keagamaan juga.

Setelah agama Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara, tak dapat diragukan lagi bahwa bahasa Melayu juga memegang peranan penting untuk penyebarannya ke daerah-daerah yang jauh. Hal itu tidak mengherankan karena secara kebetulan penutur asli bahasa tersebut tinggal di daerah strategis yang banyak disinggahi—juga dijadikan tempat bermukim untuk waktu pendek ataupun panjang—oleh para pedagang dan para musafir.

Bangsa Portugis, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia, dalam usaha perdagangan dan misinya menyebarkan agama di Kepulauan Maluku, juga menggunakan bahasa Melayu—bukan bahasa Portugis dan bukan pula bahasa setempat—sebagai bahasa pengantar.

Atas dasar itu semua, kiranya tidaklah salah kalau disimpulkan bahwa sudah sejak dahulu bahasa Indonesia/Melayu—atau apa pun namanya—sudah menjadi bahasa pengantar bagi penyebaran agama di wilayah Indonesia dan bahkan di wilayah Asia Tenggara. Meskipun tidak ada atau sedikit sekali bukti yang mendukungnya, agaknya tidak terlalu salah bila diperkirakan bahwa agama Hindu dan Buddha yang pada zaman dahulu dipeluk oleh banyak penduduk di Indonesia khususnya dan di Asia Tenggara umumnya, dikaji dan disebarkan dengan bahasa pengantar bahasa Melayu (baca Indonesia). Memang tidak ada atau sedikit sekali bukti yang menunjukkan kegiatan keagamaan itu, tetapi tidak berarti kegiatan tersebut tidak ada. Hal itu hanya karena kegiatan baca tulis pada waktu itu, kecuali memang tidak sebanyak sekarang, juga menggunakan peralatan yang tidak efektif dan tidak dapat tahan lama. Akan tetapi, pada masa sesudahnya—sesudah ditemukan alat tulis yang agak praktis—ditemukan cukup banyak bukti kegiatan pengkajian dan penyiaran agama. Yang demikian itu kita ketahui melalui bukti yang cukup banyak, yaitu berkat kemajuan teknologi perekaman, khususnya perekaman berupa tulisan. Sejak ditemukan kertas—alat merekam yang lebih praktis untuk segala peristiwa—banyak kegiatan di masa lampau, termasuk kegiatan keagamaan dapat diketahui. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan di Indonesia khususnya dan di wilayah Asia Tenggara pada umumnya dahulu ataupun sekarang sudah banyak dilakukan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia yang pada masa lampau bernama bahasa Melayu. Agama yang dikaji dan yang disiarkan itu adalah agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen.

3. Kaitan Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dengan Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan

Dalam subjudul di atas "bahasa daerah" didampingkan dengan "bahasa asing" dan kemudian didampingkan lagi dengan "bahasa Indonesia". Itu menyiratkan bahwa

ketiga jenis bahasa tersebut berbeda. Menurut terminologi, "bahasa asing" adalah semua bahasa di luar (satu) bahasa tertentu yang dirujuk. Misalnya, bagi penutur bahasa Jepang, semua bahasa di luar bahasa Jepang termasuk bahasa asing, entah bahasa itu bahasa Cina, bahasa Korea, apalagi bahasa Inggris. Begitu juga seharusnya bagi penutur bahasa Indonesia, semua bahasa di luar bahasa Indonesia adalah bahasa asing. Namun, agaknya yang berlaku pada masyarakat awam kita tidak demikian. Meskipun di luar bahasa Indonesia, bahasa semacam bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, Batak dan lain-lain tidak lazim disebut bahasa asing. Orang yang lancar berbahasa Bugis, misalnya, tidak akan dikatakan "lancar berbahasa asing".

Yang berlaku pada masyarakat awam kita tampaknya seperti yang berlaku di masyarakat Belgia atau Swiss. Pada masyarakat negara Belgia, penutur bahasa Belanda tidak menganggap bahasa Prancis sebagai bahasa asing dan sebaliknya, penutur bahasa Prancis juga tidak menganggap bahasa Belanda sebagai bahasa asing. Bagi masyarakat di negara itu, kedua bahasa tersebut "tidak asing" karena memang sama-sama digunakan. Begitu juga di Swiss, di antara ketiga bahasa, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Italia, tak satu pun yang dianggap sebagai bahasa asing. Ketiganya sama-sama digunakan dalam berkomunikasi sehingga bagi mereka tidak terasa "asing" pula.

Begitu juga agaknya yang terjadi di Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah sama-sama dianggap dan diperlakukan bukan sebagai bahasa asing. Penutur bahasa daerah tidak menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dan penutur bahasa Indonesia juga tidak menganggap bahasa daerah sebagai bahasa asing. Keduanya sama-sama digunakan dalam berkomunikasi.

Pengertian "asing" yang dikaitkan dengan bahasa bagi anggota masyarakat Indonesia yang pada umumnya "religius", agaknya lebih ditekankan pada "tidak dikenal" daripada "berasal dari luar". Para pemeluk agama Islam, misalnya, sewaktu mengucapkan kata atau ungkapan seperti "*Alhamdulillah rabbil 'alamin*", "*Astagfirullah al'azim*", "*Subhanahu wa ta'ala*", dan banyak sekali yang lain, tidak merasa bahwa mereka mengucapkan kata atau ungkapan bahasa asing.

Tentu saja demikian sebab bagi mereka kata atau ungkapan semacam itu memang tidak asing, kalau tidak boleh dikatakan dekat sekali dengan mereka. Kata-kata atau ungkapan semacam itu terucapkan secara spontan, seolah-olah terlontar begitu saja dari mulut. Ketika mendengar berita yang menggembirakan, mereka langsung saja mengucapkan ungkapan semacam itu. Begitu juga bila mendengar berita yang menyedihkan. Selalu saja yang mereka ucapkan adalah kata-kata atau ungkapan semacam itu juga.

Apa yang terjadi pada pemeluk agama yang satu terjadi juga pada pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama lain—maksudnya bukan agama Islam—juga tidak merasa bahwa mereka menggunakan unsur bahasa asing. Kata *Kitab* yang berasal dari bahasa Arab misalnya, dipergunakan secara bersama-sama untuk *Kitab Weda*, *Kitab Tripitaka*, *Kitab Injil*, di samping, tentu saja, *Kitab Qur'an*. Padahal kitab yang pertama itu merupakan kitab suci agama Hindu, yang kedua agama Buddha, dan yang ketiga

agama Kristen Sementara itu, dalam bahasa Indonesia ada tiga kata yang merujuk pada benda itu, yaitu *pustaka* yang berasal dari bahasa Sanskerta, *buku* yang berasal dari bahasa Belanda, dan *kitab* yang sudah disebutkan di atas. Meskipun demikian, tidak pernah ada penamaan *Pustaka Weda*, *Pustaka Tripitaka*, dan *Buku Injil* atau *Buku Bibel*.

Begitu juga istilah-istilah seperti *sorga*, *neraka*, *puasa*, dan *pendeta* yang berasal dari bahasa Sanskerta diperlukan secara bersama-sama, baik oleh umat Buddha, Hindu, Islam maupun Kristen.

Itu perlakuan masyarakat Indonesia terhadap bahasa atau unsur bahasa asing, bahasa atau unsur bahasa di luar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Perlakuan terhadap bahasa atau unsur bahasa daerah juga tidak jauh berbeda dengan itu. Istilah *kiai*, *pondok*, *langgar*, *ajengan* yang asli dari bahasa daerah juga turut memperkaya bahasa Indonesia dengan penambahan perbendaharaan kata untuk menghaluskan pengertian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara kegiatan keagamaan dan bahasa Indonesia terjadi peristiwa saling menunjang atau saling membantu. Kegiatan keagamaan berkembang berkat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Indonesia berkembang berkat penggunaannya dalam kegiatan keagamaan meskipun diakui bahwa bahasa Indonesia bukanlah satu-satunya faktor penunjang perkembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan keagamaan juga bukan satu-satunya penunjang perkembangan bahasa Indonesia. Keduanya, masing-masing merupakan salah satu faktor penunjang bagi yang lain.

Bahasa Indonesia digunakan dalam aktivitas keagamaan sebagai alat/sarana komunikasi dan menginformasikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat melalui berbagai macam media, baik elektronik, media cetak maupun ceramah-ceramah.

Penyampaian pesan keagamaan itu dapat dibagi dalam dua bentuk.

a. Bahasa Tulisan

Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan pesan keagamaan secara ilmiah atau dengan kata lain bahasa Indonesia sebagai wacana ilmiah keagamaan. Penulisan buku agama untuk pendidikan dari jenjang pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi dalam berbagai bidang ilmu keagamaan. Buku keagamaan ditulis oleh para penulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Di samping penulisan buku agama, juga dilakukan penerjemahan (alih bahasa) buku-buku agama dari bahasa asing. Buku terjemahan ini banyak digunakan di lingkungan pendidikan tinggi, baik sebagai buku wajib mahasiswa, buku-buku penunjang sesuai dengan silabus dan kurikulum maupun buku-buku yang diperlukan untuk memperluas wawasan akademika dan juga untuk memperbanyak koleksi buku-bukupustaka. Di samping penulisan buku dan penerjemahan, tidak sedikit produk-produk kaum intelektual Islam yang berupa artikel, paper, dan makalah dibutuhkan oleh kalangan tertentu, terutama masyarakat ilmiah.

Produk-produk tersebut, baik berupa buku maupun artikel-artikel dan lain-lain yang ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan kondisi masyarakat sangat bermanfaat dalam memperkaya pengalaman dan pengetahuan masyarakat, meningkatkan kemampuan pengertian, dan pemahaman masyarakat terhadap norma-norma dan nilai-nilai agama sehingga dapat memperluas wawasan keagamaan masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Malahan kitab-kitab suci dari agama-agama yang dianut di Indonesia sebagai sumber ajaran dari tiap-tiap agama sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, baik secara fragmentaris maupun secara keseluruhan.

b. Bahasa Lisan

Bahasa Indonesia digunakan dalam menyampaikan ajaran agama melalui bahasa dakwah oleh para mubalig, dai, ustad, pendeta, pastor, dan biksu. Bahasa yang digunakan pada dasarnya adalah bahasa lisan yang efektif, yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan mudah dipahami sekalipun kurang memperhatikan ketentuan grammatikanya. Pada umumnya dalam menyampaikan ajaran agama, bahasa yang dipakai sangat menentukan sasaran dan tujuan yang diinginkan.

4. Penulisan Kata yang Berkaitan dengan Agama

Hal yang jelas terlihat kaitan antara kegiatan keagamaan dan penggunaan bahasa Indonesia ialah kegiatan tulis-menulis. Kita ketahui bersama huruf yang dipergunakan dalam kegiatan tulis-menulis dalam bahasa Indonesia dewasa ini adalah huruf latin. Huruf itu mulai dipergunakan secara resmi pada tahun 1901 dan sampai sekarang sudah mengalami pergantian ejaan dua kali. Pergantian pertama terjadi pada tahun 1947 dan yang kedua pada tahun 1972.

Sebelum digunakan huruf Latin, huruf yang secara umum digunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia adalah huruf Arab. Karena ada perbedaan sedikit dengan huruf Arab yang digunakan untuk menuliskan bahasa Arab pada umumnya, huruf Arab yang digunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia dinamakan huruf Arab Melayu. Sebelum penggantian huruf Arab Melayu itu, huruf yang digunakan adalah huruf Palawa, suatu jenis huruf yang berasal dari India bagian selatan.

Dari segi tulisan atau huruf saja sudah dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbuka. Maksudnya, sepanjang sejarah penulisannya sudah tiga jenis huruf yang dipergunakan, yaitu huruf Palawa, huruf Arab Melayu, dan huruf Latin. Dari segi kosa kata juga demikian, artinya, sejak dahulu bahasa Indonesia banyak menerima kata-kata dari berbagai bahasa, bahasa asing ataupun bahasa daerah. Mulai dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Bahasa Parsi, bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris yang semuanya merupakan bahasa yang berasal dari wilayah di luar Indonesia sampai pada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang-

kabau dan lain-lain yang semuanya merupakan bahasa daerah, bahasa yang dipergunakan di dalam wilayah Indonesia sendiri. Oleh karena itu, kosakata bahasa Indonesia berisi campuran kata-kata dari berbagai bahasa.

Hal yang menarik mengenai tulisan yang digunakan untuk menuliskan bahasa Indonesia ialah kedua jenis huruf yang terakhir itu, yakni huruf Arab Melayu dan huruf Latin. Yang terakhir itu terutama versi yang kita gunakan sekarang, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EBIYD) yang mulai berlaku tahun 1972.

Pada waktu bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Arab Melayu, kata-kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab mendapat perlakuan berbeda dengan kata-kata lainnya. Kata-kata serapan dari bahasa Arab itu pada umumnya ditulis mengikuti kaidah penulisan bahasa Arab. Kata-kata itu misalnya *مظاهر*, *إخلاص*, *مقصود* dan lain-lain yang kalau ditransliterasikan ke dalam huruf Latin (versi SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987) menjadi *maqsūd*, *ikhlas*, *zāhir*. Padahal, ketiga kata tersebut dalam EBIYD ditulis *maksud*, *ikhlas*, dan *lahir*. Jadi, sebenarnya kata-kata dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Arab Melayu itu masih merupakan kata bahasa Arab.

Sementara itu, dalam EBIYD penulisan kata-kata sesuai dengan ketentuan, lepas dari bahasa mana kata-kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia asli, dari bahasa daerah atau dari bahasa asing. Kata-kata dari bahasa asing yang tertulis dalam bahasa Indonesia, misalnya *Senin*, *lahir* (bahasa Arab), *seng*, *ember* (bahasa Belanda), *riset*, *tim* (bahasa Inggris). Padahal, wujud tulisan dalam bahasa asli kata-kata tersebut masing-masing adalah *isnain*, *zāhir* (setelah ditransliterasikan menurut SKB tersebut di atas), *zink*, *emmer*, *research*, dan *team*.

Sementara itu, di kalangan pemeluk salah satu agama, Islam, ada kecenderungan untuk melafalkan sefasih-fasihnya terhadap kata-kata serapan dari bahasa Arab yang berkaitan dengan agama. Maksudnya, kata-kata tersebut diusahakan agar lafalnya menyamai atau mendekati lafal aslinya dalam bahasa sumber. Kalaupun harus dituliskan—dengan huruf Latin lagi—tulisan itu juga diusahakan agar tidak terlalu jauh dari wujud aslinya.

Apa yang dikemukakan di atas itu membawa dampak berupa kesenjangan antara ketentuan yang terdapat dalam EBIYD menggariskan kata-kata—sebagaimana tercermin dalam kamus *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1988)—ditulis *doa*, *isya*, *isra*, *Kabah*, *Kakbah*, *mikraj*, *Quran*, dan *salat*, sementara masyarakat menulisnya *do'a*, *isya'*, *isra'*, *Ka'bah*, *mi'raj*, *Qur'an*, *shalat*.

Mereka seolah-olah merasa "kurang enak" menghilangkan tanda apostrof begitu saja atau menggantikannya dengan huruf [k] seperti yang dilakukan beberapa kata lain yang jumlahnya tidak banyak, bukan kata-kata di luar itu. Mereka seolah-olah "minta dispensasi" untuk kata-kata serapan dari bahasa Arab yang ada kaitan dengan agama (Islam).

Itu terbukti dari perlakuan mereka terhadap kata-kata serapan dari bahasa Arab juga, seperti *masalah*, *kaidah*, *ulama* dan masih banyak lagi yang lain yang jarang

sekali muncul berupa *mas'alah*, *ka'idah/qa'idah*, *ulama'*. Padahal, fungsi apostrof pada ketiga kata yang terakhir itu sama dengan fungsinya pada keenam kata yang awal. Begitu juga penulisan dengan huruf Latin [s] terhadap huruf Arab س.

Kalau kata itu sekadar *sabar*, *kisah*, *sah*, dan lain-lain yang aslinya dalam bahasa Arab ditulis dengan huruf س, tidaklah menjadi soal benar. Adapun kalau kata itu *salat* yang aslinya juga ditulis dengan huruf س, mereka kurang rela. Kata itu diinginkan ditulis *shalat*.

5. Penutup dan Saran

Upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia dalam kegiatan keagamaan tidak terlepas dari masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik, perkembangan ilmu dan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat yang kadang-kadang kurang diikuti oleh masyarakat pemakai bahasa, baik para penulis atau pengarang maupun penceramah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan usaha agar pemakai bahasa dapat selalu mengikuti perkembangan bahasa. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia dalam kegiatan keagamaan dapat dilakukan sebagai berikut.

- Mengupayakan agar penulis, pengarang, dan penerjemah buku-buku keagamaan dapat lebih memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya secara tepat dalam tulisan-tulisannya. Penggunaan bahasa asing harus memperhatikan apakah bahasa tersebut sudah dikenal oleh masyarakat atau ada sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Para penulis, pengarang dan penerjemah dapat melakukan pertemuan secara berkala untuk membicarakan perkembangan bahasa yang berkaitan dengan kegiatan penulisan.
- Mengupayakan pertemuan konsultatif antara lembaga-lembaga keagamaan dan pemuka-pemuka agama untuk membicarakan bagaimana cara terbaik dalam penyampaian pesan-pesan keagamaan dan menitikberatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan buku-buku agama dan ceramah-ceramah agama.
- Menumbuhkan saling pengertian mengenai batas-batas penggunaan istilah-istilah suatu agama untuk agama lain.

Tadi telah dikemukakan di atas bahwa ada kata-kata dari suatu agama yang tidak menimbulkan kerawanan untuk digunakan oleh agama lain. Misalnya, kata *agama* yang berasal dari bahasa Sanskerta erat kaitannya dengan agama Hindu, tetapi dipakai oleh semua agama.

Juga kata *Al-kitab* dipergunakan oleh agama Kristen di Indonesia untuk terjemahan *Bibel*. Padahal, kata *Al-kitab* itu berasal dari bahasa Arab yang erat kaitannya dengan agama Islam. Demikian pula, kata *Ruhul-kudus* yang berasal dari bahasa Arab dan dipergunakan oleh agama Kristen di Indonesia untuk terjemahan kata *Holy Spirit*.

Juga kata *nirwana* yang erat kaitannya dengan agama Buddha, tetapi dipergunakan untuk konotasi yang sekuler, seperti untuk nama klub malam yang tidak ada reaksi dari umat Buddha.

Sebaiknya, ada istilah-istilah yang khas untuk suatu agama dan menimbulkan kerawanan bila dipergunakan oleh agama lain untuk konotasi yang berbeda. Misalnya, penggunaan istilah *pura-agung* untuk suatu gereja Nasrani pernah ditentang oleh masyarakat Hindu di Bali. Juga penggunaan kata *madrasah Al-kitab* oleh suatu sekte Nasrani, pernah mendapat reaksi dari umat Islam di suatu tempat di Jakarta.

Mungkin diperlukan tukar pendapat di antara para pemuka agama serta para pakar bahasa Indonesia untuk merumuskan kriteria yang diperlukan dalam penggunaan istilah-istilah agama serupa itu. Perlu dicatat pula kiranya bahwa alih aksara dari suatu bahasa ke aksara Indonesia memerlukan dua macam pengaturan.

- a. Pedoman alih aksara untuk bahasa Indonesia yang umum (sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan).
- b. Pedoman alih aksara dari aksara asing yang berkaitan dengan agama ke dalam aksara Indonesia untuk keperluan kelompok-kelompok profesi teknis. Misalnya: pedoman alih aksara dari aksara Arab ke aksara Indonesia bagi IAIN dan Jurusan Sastra Arab pada Fakultas Sastra. Juga alih aksara dari aksara Sanskerta ke aksara Indonesia pada jurusan-jurusan studi dan profesi yang berkaitan.

Demikianlah yang dapat saya kemukakan mengenai kaitan antara kegiatan keagamaan dan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan
Pemakalah : H. Hasbullah Mursyid
Pemandu : Nafron Hasjim
Pencatat : Abdul Gaffar Ruskhan
Erlis Nur Mujiningsih

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Usdiyanto, SMA Taruna Nusantara Magelang
 - a. Pusat Bahasa harap memperhatikan penggunaan bahasa dalam istilah keagamaan
 - b. Kegiatan keagamaan di daerah sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia seperti dalam kegiatan ceramah dan akad nikah karena dalam kenyataannya masih banyak bahasa daerah yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan instruksi dari Menteri Agama.
 - c. Setuju dengan simpulan dan saran dari Menteri Agama agar dalam penulisan istilah-istilah agama Islam diperlakukan secara khusus.

Jawaban:

- a. Dikembalikan ke sidang
- b. Saran diteruskan kepada Menteri Agama

Berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan keagamaan dari daerah seperti ceramah dan akad nikah Departemen Agama tidak dapat memaksakan masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan oleh pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tidak menimbulkan keresahan. Akan tetapi, bahasa Indonesia secara berangsur-angsur dapat dipergunakan.

2. **Pertanyaan:** Abdulhayi, FPBS IKIP Yogyakarta
 - a. *Pedoman transliterasi Arab-Latin* perlu disebarluaskan kepada kalangan yang membutuhkan, seperti perguruan tinggi jurusan sastra/bahasa Arab.
 - b. Penulisan singkatan-singkatan istilah keagamaan harus diatur dengan mantap seperti *subhanawataala* dan *sallallahu alaihi wassalam* apakah *s.w.t* atau *SWT* dan *s.a.w* atau *SAW*.

Jawaban:

Saran ditampung.

3. **Pertanyaan:** Yohanes Tri Mastoyo J.K., Ketua MLI Cabang Yogyakarta
- 1) Apakah penulisan kata *engkau* untuk kata ganti nama Tuhan harus dengan huruf kapital?
 - 2) Apakah kata *engkau* tepat untuk menyapa Tuhan?

Jawaban:

Diserahkan ke sidang.

BAHASA INDONESIA DAN GENERASI MUDA

Hayono Isman

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

1. Pendahuluan

Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan dan sekaligus sebagai pendukung kebudayaan itu. Berkaitan dengan itu, masalah bahasa merupakan salah satu masalah nasional karena selain sebagai unsur dan pendukung kebudayaan, bahasa juga menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat, baik pemimpin maupun rakyat, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, baik kalangan sipil maupun militer, baik bidang politik maupun bidang ekonomi, sosial, dan budaya, baik generasi tua maupun generasi muda (Halim, 1979). Masalah bahasa menyangkut kepentingan hidup kita sehari-hari, baik sebagai perseorangan maupun sebagai bangsa, baik dalam keadaan resmi maupun setengah resmi atau keadaan tidak resmi.

Sehubungan dengan bahasa Indonesia, masalah bahasa menyangkut segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara kita. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan isi dan semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya seperti itu, bahasa Indonesia mengemban berbagai fungsi yang berperan dalam kehidupan kita sebagai bangsa (Halim, 1980). Fungsi bahasa Indonesia itu, antara lain, adalah sebagai lambang jati diri, lambang kebanggaan, alat pemersatu, bahasa resmi kenegaraan, alat pengembangan ilmu, teknologi, dan kebudayaan.

Berdasarkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia seperti diuraikan di atas, dapatlah dipikirkan bahwa bahasa Indonesia bukanlah hanya sekadar alat untuk berkomunikasi, melainkan juga merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh dan bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan itu, dapat dikatakan juga bahwa masa depan bahasa Indonesia berkaitan erat dengan masa depan bangsa dan negara. Barangkali, inilah yang dimaksud dengan ungkapan yang menyatakan, "Bahasa menunjukkan bangsa" yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Jika hal itu dihubungkan dengan generasi muda—yang lazim juga disebut generasi penerus, generasi pewaris bangsa dan negara—, masalah bahasa Indonesia sekarang dan pada masa yang akan datang juga tergantung pada sikap generasi muda

terhadap bahasa nasional kita itu. Generasi muda mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan terhadap masalah pembinaan dan pengembangan bahasa di tanah air kita ini.

2. Sikap Bahasa dan Generasi Muda

Para pakar linguistik (lihat Halim, 1979 dan Moeliono, 1985) menjelaskan bahwa sikap bahasa itu mencakupi (1) sikap kesetiaan bahasa, (2) sikap kebanggaan bahasa, dan (3) sikap kesadaran akan norma dan kaidah bahasa baku. *Sikap kesetiaan bahasa* itu lahir dari fungsi bahasa sebagai pemersatu dan pemberi kekhasan; sikap ini mendorong suatu masyarakat bahasa mempertahankan bahasanya dan, apabila perlu, mencegah adanya pengaruh bahasa asing. *Sikap kebanggaan bahasa* muncul dari fungsi pemberi wibawa; sikap ini mendorong orang menyumbangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakatnya. *Sikap kesadaran akan adanya norma bahasa* dihasilkan dari fungsi bahasa sebagai kerangka acuan; sikap ini mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun.

Sejarah telah mencatat bahwa 65 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, para pemuda telah menunjukkan sikap yang sangat positif terhadap bahasanya. Betapa tidak, dalam suasana terjajah, mereka telah berani mencetuskan ikrar "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Ikrar itu mereka realisasikan dalam perbuatan dan tindakan; mereka bersatu dan berjuang. Hasil perjuangan mereka itulah yang kita nikmati sekarang ini.

Pengalaman masa lalu itu menunjukkan bahwa bahasa telah berperan dalam perkembangan dan pengembangan organisasi pemuda. Dengan kata lain, bahasa ikut berperan dalam membangkitkan semangat persatuan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda. Generasi 1928 telah menempatkan bahasa Indonesia pada kedudukan yang sangat tepat di tengah-tengah masyarakat yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan latar belakang budaya. Bahasa Indonesia telah mereka jadikan sebagai alat perekat yang ampuh untuk membina dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memperjuangkan nasib bangsanya. Dengan bahasa Indonesia, mereka dapat menerobos tembok kesukuan sehingga komunikasi antarsuku tidak terhalang.

Sehubungan dengan uraian di atas, sebuah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah "Bagaimanakah seharusnya generasi muda kita hari ini bersikap terhadap bahasa Indonesia?" Jika Generasi 1928 telah memberikan contoh yang sangat baik, generasi muda sekarang seharusnya tidak boleh kurang dari itu, bahkan harus melebihinya. Kesadaran dan sikap positif Generasi 1928 terhadap bahasa Indonesia muncul dari sanubari mereka sendiri, tidak ada orang, golongan, atau kelompok lain yang mendorong atau memaksa mereka, kecuali keinginan untuk bersatu dalam melakukan perjuangan. Begitu pula hendaknya sikap generasi muda kita dewasa ini. Saya mengimbau agar generasi muda tetap tegar pada pendirian dan pandangannya tentang bahasa. Generasi muda haruslah tidak hanyut dalam arus yang kurang menguntungkan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Arus itu dapat berupa pengaruh

yang datangnya dari kalangan sendiri dan yang datang dari luar. Generasi muda seharusnya memperlihatkan kepeloporannya dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa nasional kita seperti yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kita itu.

3. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Kalangan Generasi Muda

Dalam hubungan dengan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, generasi muda dapat ditempatkan pada dua posisi, yaitu posisi subjek dan posisi objek. Pada posisi subjek, generasi muda bertindak sebagai pelaku, sebagai pembina dan pengembang bahasa, sedangkan pada posisi objek, generasi muda merupakan sasaran pembinaan bahasa.

Penempatan generasi muda sebagai subjek itu sejalan dengan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993, Bab IV, "Pembangunan Lima Tahun Keenam" mengenai "Kondisi Umum" yang mencantumkan pernyataan sebagai berikut.

"Pembinaan generasi muda telah dapat meningkatkan kualitas generasi muda, mengembangkan suasana serta semangat yang sehat, dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap tantangan pembangunan masa depan. Organisasi kepemudaan makin menghadapi tantangan yang makin besar untuk lebih mampu melaksanakan fungsinya dalam pembangunan secara operasional, termasuk pelaksanaan pendidikan politik yang dapat menjangkau pemuda di seluruh tanah air.

Informasi GBHN itu menyiratkan bahwa generasi muda kini sudah dapat dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan program pembangunan. Generasi muda sudah dipersiapkan dan siap untuk menghadapi tantangan yang makin besar. Sehubungan dengan itu, salah satu tugas generasi muda adalah ikut serta dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peranan generasi muda dalam pembinaan bahasa sejalan dengan jiwa dan semangat kepeloporannya. Seperti saya kemukakan tadi, Sumpah Pemuda 1928 menunjukkan sikap yang sangat positif para pemuda pada saat itu terhadap bahasa nasionalnya. Sampai saat ini semangat dan jiwa kepeloporan generasi muda itu tidak pernah padam untuk ikut serta melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, sambil mereka mempersiapkan diri sebagai generasi penerima tongkat estapet yang akan meneruskan dan meningkatkan pembangunan bangsa kita pada masa yang akan datang.

Sebagai generasi penerus, pemuda atau generasi muda haruslah memiliki kemampuan berpikir dan bernalar dengan cermat dan tepat. Hal itu dicerminkan oleh kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dengan baik dan benar serta secara cermat dan tepat. Di dalam berkomunikasi dan mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi itu, generasi muda secara tidak langsung telah berperan dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa. Kegiatan-kegiatan kesenian-terutama kegiatan yang bersangkutan-paut dengan sastra: drama, deklamasi, dan mem-

baca puisi-, sayembara mengarang, lomba pidato merupakan wujud keikutsertaan pemuda dalam membina dan mengembangkan bahasa.

Generasi muda merupakan potensi yang dapat berperan sebagai subjek dalam membina dan mengembangkan bahasa kita. Potensi itu perlu dimanfaatkan secara optimal. Jiwa dan semangat kepeloporan generasi muda dapat mengikis unsur-unsur negatif yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Unsur-unsur negatif yang saya maksudkan itu, misalnya penggunaan bahasa asing yang tidak pada tempatnya seperti yang kita lihat di sekitar kita di Jakarta ini. Sebagai ibu kota negara, seharusnya DKI Jakarta bersih dari pemakaian bahasa asing yang menjamur dewasa ini. Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) No. 1 Tahun 1992 Pemerintah Daerah DKI Jakarta tentang "Pemakaian Bahasa Indonesia pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang, dan Iklan" itu harus kita dukung pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, generasi muda dapat dan harus dilibatkan secara aktif dalam mengefektifkan Perda tersebut.

Pembicaraan tentang kedudukan generasi muda atau pemuda sebagai objek dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dapat dilakukan dengan merujuk arahan-arahan GBHN 1993. Di dalam "Kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Keenam" terdapat arahan sebagai berikut.

"... Pembinaan dan pengembangan pemuda diarahkan kepada upaya generasi muda menjadi kader bangsa yang tangguh dan ulet dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara. Pemuda sebagai penerus perjuangan bangsa diarahkan agar mampu mewujudkan cita-cita nasional serta mampu berperan sebagai insan pembangunan yang berjiwa Pancasila ... dst."

Pada bagian lain dicantumkan pula arahan berikut.

"Pembinaan dan pengembangan pemuda sebagai generasi pewaris nilai-nilai luhur budaya dan penerus cita-cita bangsa dan insan pembangunan diarahkan agar pemuda menjadi kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila, disiplin, peka, mandiri, beretos kerja, tangguh, memiliki idealisme yang kuat, berwawasan kebangsaan yang luas, mampu mengatasi tantangan, baik masa kini maupun masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan nilai sejarah yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan dan pengembangan pemuda ditujukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial, serta kepeloporan pemuda dalam membangun masa depan bangsa dan negara."

"Pemuda sebagai kader bangsa dan kader pembangunan perlu terus meningkat kan kebiasaan gemar membaca yang mendorong semangat dan kemauan belajar dan bekerja keras untuk mengembangkan kecerdasan, keahlian dan keterampilan, serta dengan nalar, berpikir kritis analitis dan tanggap terhadap tantangan dan lingkungan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi."

Arahan-arahan GBHN itu memperlihatkan secara jelas betapa besar perhatian Pemerintah terhadap pembinaan generasi muda. Pemberian perhatian yang besar itu tentulah didorong oleh harapan yang besar pula terhadap generasi muda itu. Generasi muda diharapkan menjadi kader bangsa yang tangguh, kader pemimpin bangsa, pewaris nilai-nilai luhur budaya, generasi yang berdisiplin, orang yang memperhatikan

nilai-nilai sejarah, orang yang memiliki landasan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan, pemuda yang memiliki kebiasaan gemar membaca serta daya nalar dan pemikiran kritis, dan menguasai ilmu dan teknologi.

Jika harapan-harapan dan cita-cita kita mengenai generasi muda itu dikaitkan dengan pembinaan sikap mereka terhadap bahasa Indonesia, tampaknya merupakan kewajiban kita semua untuk melakukan pembinaan bahasa Indonesia terhadap generasi muda itu. Seperti telah saya katakan tadi bahwa kemampuan bernalar dan berpikir kritis hanya dimungkinkan oleh pemakaian bahasa dengan cermat dan tepat. Selain itu, dengan menanamkan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda berarti kita telah berupaya pula untuk menyadarkan pemuda agar menghargai nilai-nilai luhur budaya bangsa, nilai-nilai sejarah, serta semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan.

Sehubungan dengan pentingnya upaya pemupukan apresiasi dan sikap generasi muda terhadap bahasa Indonesia itu, pendahulu saya, Menteri Akbar Tanjung, telah menguraikannya secara rinci pada Kongres Bahasa Indonesia V, 1988. Pada kesempatan itu, Menteri Akbar Tanjung, antara lain, menyatakan hal-hal seperti berikut.

- 1) Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara sadar di kalangan generasi muda berarti membiasakan diri untuk berdisiplin.
- 2) Kecintaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk nasionalisme dan patriotisme yang perlu ditumbuhkan dalam mengarahkan arus modernisasi.
- 3) Pemakaian bahasa Indonesia dan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda akan memperkuat kepribadian mereka, yang pada gilirannya menjadi pertahanan dalam menghadapi persaingan.
- 4) Pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan generasi muda akan membawa mereka masuk ke dunia budaya tulis yang sempurna yang merupakan bekal utama untuk menguasai ilmu dan teknologi.
- 5) Pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang cermat dan tepat di kalangan generasi muda hendaknya dilakukan juga dalam bahasa lisan, seperti dalam berbagai pertemuan, diskusi, seminar, dan sebagainya.

Secara sengaja saya kutip kembali pernyataan Menteri Akbar Tanjung itu pada kesempatan ini untuk mengingatkan kita semua, terutama generasi muda, tentang betapa pentingnya pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda itu. Dalam kaitan ini, peranan lembaga pendidikan—mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke tingkat perguruan tinggi—, baik formal maupun nonformal, dan peranan organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan. Jiwa dan semangat kepeloporan pemuda perlu dimanfaatkan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya demi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, demi pembinaan dan pengembangan kebudayaan kita, dan demi pembangunan bangsa dan negara kita.

4. Penutup

Tema pokok Kongres Bahasa Indonesia VI ini adalah Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000.

Tujuan Kongres ini adalah memantapkan peran bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa.

Rumusan tema pokok dan tujuan Kongres itu sejalan dengan "Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua" yang dinyatakan sebagai berikut.

"Pembangunan Jangka Panjang Kedua diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar makin maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua, rasa cinta tanah air yang melandasi kesadaran kebangsaan, semangat pengabdian, dan tekad untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik harus terus dibangkitkan ... dst."

Sehubungan dengan itu, kedudukan generasi muda, baik sebagai subjek maupun sebagai objek, dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia penting mendapat perhatian semua pihak. Perhatian yang serius terhadap masalah itu akan menghindarkan kita dari praduga Rendra yang dilontarkan Dick Hartoko pada Kongres Bahasa Indonesia V yang menyatakan

"Sesudah 43 tahun negara dan bangsa kita merdeka, saya masih meragukan apakah generasi muda sungguh sudah merdeka. Mereka semua jinak seperti generasi tua"

Dengan keikutsertaan generasi muda dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, kita semua berharap gejala dinamika generasi muda makin kentara dan kreativitas mereka makin berkembang. Dan, pada gilirannya, kepercayaan dan keyakinan kita untuk mengalihkan tongkat estapet kepemimpinan ke tangan mereka makin mantap.

Akhirulkalam, untuk mencapai harapan itu, demi generasi muda, demi bahasa Indonesia, dan demi masa depan bangsa dan negara, saya berpendapat bahwa sekarang ini sudah saatnya bagi kita untuk memikirkan pola pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda, seperti pola yang telah ditempuh dalam pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sudah berlangsung selama belasan tahun itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Amran. 1979. "Faktor Sosial Budaya dalam Pembakuan Bahasa Indonesia". Dalam *Pembinaan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 1979. "Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijakan Bahasa Nasional". Dalam *Pembinaan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran. Editor. 1980. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hartoko, Dick. 1990. "Bahasa dan Kreativitas". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993*. Jakarta: Mini Jaya Abadi.
- Moeliono, Anton. M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Murad, A. dan S.R.H. Sitanggang. Editor. 1992. *Kongres Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Tanjung, Akbar. 1990. "Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembinaan Generasi Muda". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah	: Bahasa Indonesia dan Generasi Muda
Pemakalah	: Hayono Isman
Pemandu	: Hans E. Kawuluan
Pencatat	: Zulkarnaen M. Abdul Khak

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Suparno, FPBS IKIP Malang

Pertama, saya perlu menyampaikan rasa penghargaan saya kepada Bapak Hayono Isman atas kehadirannya. Yang kedua, saya kagum atas penampilan Bapak sebagai Menpora menggambarkan tampilan berbahasa Indonesia yang mudah-mudahan merupakan idola para pemuda.

Satu pertanyaan saya yaitu sehubungan dengan pernyataan terakhir Bapak tadi. Kalau Bapak mengundang kita harus memikirkan pola pembinaan kepada kawula muda dalam berbahasa, apakah Bapak sudah memiliki gagasan-gagasan mengenai pemikiran kemahiran berbahasa Indonesia atau pembinaan bahasa Indonesia bagi generasi muda? Terima kasih.

2. **Pertanyaan:** Mayong Maman, Jakarta

Sesuai dengan pernyataan Pak Menteri pada bagian akhir tadi bahwa perlu dipikirkan tentang pola pembinaan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Dalam beberapa iklan di surat kabar di Jawa Timur, saya mengambil secara proposif sekitar 18–40 persen iklan itu memprasyaratkan penguasaan bahasa Mandarin di dalam pelamaran tenaga kerja. Oleh karena itu, saya ingin mengusulkan kepada Bapak menteri supaya persyaratan seperti itu ditinjau kembali.

3. **Pertanyaan:** Sri Ummiaty Haroen, IKIP Muhammadiyah Yogyakarta

Di Yogyakarta saya banyak mengikuti organisasi pemuda dan bergerak di berbagai macam bidang, seperti di politik, kesenian, dan olah raga. Kami sering mengadakan suatu rapat, diskusi, atau uneg-uneg, misalnya, tetapi dalam mimbar bebas, mahasiswa itu selalu saja diintel, dijaga seperti ada kecurangan pada mahasiswa itu. Saya heran, karena kata para pakar psikologi, apa yang keluar dari mahasiswa itu murni, tidak ada pengaruh dari luar karena idealisme mereka sangat murni. Singkatnya, saya akan menanyakan apakah ada batasan buat mahasiswa/generasi muda untuk berkarya. Kalau mereka menulis puisi, puisi itu sangat sulit sekali untuk bisa diekspos, mungkin mahasiswa itu sangat kritis, sedangkan Bapak mengharapkan mahasiswa itu tanggap, mandiri, dan berwawasan.

Jawaban:

Saya akan menjawab pertanyaan Saudari yang berasal dari IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Walaupun pertanyaan tidak langsung menyangkut masalah bahasa, tetapi mempunyai dampak yang cukup kuat kenapa bahasa Indonesia itu di kalangan generasi muda tidak/belum berhasil sebagai bahasa komunikasi yang baik.

Yang pertama harus saya katakan di setiap negara pasti ada batasan-batasan tertentu yang diutarakan melalui anggaran dasarnya. Kita pun memiliki Pancasila dan UUD. Yang membatasi dan mengatur agar tidak keluar dari batasan yang telah disepakati. Oleh karena itu, apabila di kampus ada mimbar bebas, dan mimbar bebas ini tentunya tidak bebas di luar batasan falsafah dan konstitusi-konstitusinya, saya pikir kita semua akan mendukung. Kalau di mimbar bebas itu ada yang menyatakan, saya ingin kembalinya PKI di Indonesia, itu jelas bertentangan dengan falsafah kita, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa karena PKI tidak mengakui adanya Tuhan. Jika pernyataan-pernyataan itu di luar batas-batas, pasti dilarang. Tetapi, jika masalahnya baik, disampaikan dengan cara yang baik, tentu tidak ada masalah. Masalahnya adalah mahasiswa itu sering menggunakan bahasa-bahasa/perkataan-perkataan yang sangat kasar dalam menyampaikan pandangannya. Saya tidak menyalahkan mahasiswa tersebut karena kesalahannya terjadi mulai dari dia di sekolah dasar. Anak kita di sekolah dasar pada khususnya (di SMP, SMA) itu kalau disuruh bertanya di kelas tidak ada yang berani. Saya tidak tahu apa sebabnya. Sampai sekarang, hal seperti itu masih ada. Banyak negatifnya jika mereka tidak berhasil mengeluarkan "uneg-uneg"-nya. Di rumah mereka juga tidak berhasil mengeluarkan "uneg-uneg"-nya. Yang ekstrim adalah mereka yang mengeluarkan "uneg-uneg"-nya di pinggir-pinggir jalan dan yang tidak ekstrim adalah mereka yang menyampaikan "uneg-uneg"-nya melalui mimbar dan melalui dialog. Karena mereka itu ada paksaan untuk menyampaikan "uneg-uneg"-nya, mereka tidak bisa mengendalikan bahasanya dengan baik. Sering kita lihat mahasiswa mengajukan petisinya di DPR-DPRD menggunakan kata-kata kasar dan tidak simpatik. Pikiran dan pandangannya itu benar, tetapi tata kramanya, bahasanya sangat buruk. Ini mungkin bermula dari sekolah-sekolah, bermula dari keluarga yang masih memakai pola-pola yang sudah tidak relevan lagi. Anak-anak sekarang ini seharusnya diberi suasana yang kondusif sehingga mereka berani bertanya. Saya pikir ini yang dapat direnungkan oleh Kongres untuk dikaji. Menurut saya pribadi, sumber masalahnya karena di rumah dan di sekolah mereka tidak bebas menyampaikan "uneg-uneg"-nya, di mimbar bebas mereka mengeluarkan kata yang tidak senonoh, seolah-olah di situlah mereka balas dendam. Mereka mengetahui bahwa sekolah adalah tempat bertanya. Karena di sekolah mereka tidak mendapatkan kebebasan tersebut, mereka mencari jalan lain, melalui mimbar bebas, demonstrasi, dan lain-lain. Kalau bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang komunikatif, hal-hal yang telah dilakukan oleh generasi muda untuk menyampaikan pandangannya itu tentu akan berkurang. Kemudian, kita juga melihat mereka mencari alternatif baru, mencari bahasa mereka sendiri,

misalnya bahasa prokem, yang dapat dipakai secara eksklusif. Waktu pertunjukan Mas Guruh Soekarno, saya mendengar mereka menggunakan bahasa prokem yang hanya bisa dipahami oleh mereka sendiri. Karena mereka merasa suara-suara mereka sudah tidak lagi didengar, mereka membuat bahasa sendiri sebagai bahasa mereka. Hal ini saya kira sebagai akibat bahwa bahasa Indonesia yang baik belum berhasil dipakai sebagai bahasa komunikasi. Oleh karena itu, di dalam Kongres Pemuda, di dalam Kongres KNPI mereka diberi kesempatan untuk menentukan keinginan nya sendiri secara baik dan memberi kesempatan mereka untuk memilih ketuanya secara langsung. Pemilihan ketuanya tidak melalui formatur sehingga tidak ada kesan kalau melalui formatur itu biasanya banyak pesan-pesan sponsor yang kadang-kadang tidak menggambarkan aspirasi kongres. Ini kita coba dalam suasana yang makin terbuka, makin mapan sehingga memberi iklim yang baik kepada pemuda. Siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, merekalah yang menentukan, tanpa campur tangan orang lain, yang mungkin maksudnya baik tetapi karena caranya salah sehingga mematikan dinamika pemuda itu sendiri. Saya senang banyak mahasiswa hadir dalam Kongres Pemuda kali ini yang belum pernah ada dalam kongres sebelumnya.

Tentang iklan yang mensyaratkan berbahasa Mandarin, saya pikir tidak perlu ditinjau kembali karena hal ini berfungsi untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Jangan sampai trauma G30S PKI masih berpengaruh sampai sekarang. Kita belajar bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan kita, terutama dalam menghadapi globalisasi. Jadi, belajar bahasa asing tidak dapat dihindari. Asal kita tetap menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa asing dapat dipakai untuk memperkuat bahasa Indonesia. Caranya bagaimana, yaitu dengan meminta para guru, pemimpin kita, untuk memakai bahasa Indonesia secara benar. Selama masih ada menteri yang sok kebelanda-belandaan di hadapan anak muda, selama itu mereka akan melihat suatu kejanggalan. Jadi, ada kontradiksi antara ucapan pemimpin dan perilaku pemimpin. Hati-hati memilih pemimpin. Saya melihat bahwa bahasa Belanda dipakai untuk mengakrabkan diri sesama menteri. Jadi, bahasa Indonesia belum mampu untuk mengakrabkan diri di antara beberapa menteri. Jadi, jika gaya selama itu masih ditunjukkan dihadapan kita, kita akan begini-begini saja. Apapun program yang kita lakukan tidak ada gunanya.

Kemudian, jawaban untuk Pak Suparno mengenai gagasan konkrit. Jujur saya katakan belum ada. Kantor Menpora pada bulan Desember tanggal 21 akan mengadakan Rakornas Kepemudaan, barangkali kita akan dapat mencari berbagai rumusan untuk mewujudkan amanat rakyat yang dirumuskan melalui GBHN 1993, salah satunya bahasa. Jika kongres ini dapat memberi sumbangan pada Rakornas, saya sangat berterima kasih.

BAHASA INDONESIA DAN KETAHANAN NASIONAL

Machmud Subarkah

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

1. Pendahuluan

Paparan tentang bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional kurang lengkap apabila tidak dikaitkan pula dengan wawasan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yaitu Wawasan Nusantara.

Karenanya, dalam paparan ini akan banyak disinggung Wawasan Nasional dalam kaitannya dengan Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional pada dasarnya adalah perwujudan Wawasan Nasional melalui upaya pembangunan tiap aspek kehidupan nasional. Bentuk perwujudannya berupa kondisi dinamik yang berkembang tiap saat.

Kajian terhadap bahasa Indonesia dalam konteks Wawasan Nasional serta Ketahanan Nasional tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan tonggak-tonggak sejarah nasional, seperti "Sumpah Pemuda" pada tahun 1928, "Proklamasi 17 Agustus 1945", dan "Undang-Undang Dasar 1945" yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sumpah Pemuda atau ikrar pemuda sebagai hasil kongres atau rapat pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 mengisyaratkan bahwa penduduk kepulauan Nusantara Indonesia merupakan suatu bangsa yang bersatu padu yang disebut bangsa Indonesia; dan bahwa wilayah nusantara di mana bangsa Indonesia hidup dan menetap merupakan tanah tumpah darah bangsa Indonesia serta merupakan satu kesatuan nusa, yaitu tanah air bangsa Indonesia; dan bahwa bangsa Indonesia berbahasa satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah pemuda memberikan pada bangsa Indonesia suatu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pembentukan Negara Republik Indonesia melalui penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dirumuskan dalam bahasa Indonesia dan memberikan pada bangsa Indonesia suatu "bahasa Indonesia" sebagai bahasa perantara.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itu berarti bahwa sejak tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi bahasa Indonesia menjadi bahasa negara.

2. Sumpah Pemuda, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan UUD 1945

Membahas bahasa Indonesia dan Ketahanan nasional sangat tepat apabila dimulai dengan membahas Sumpah Pemuda yang selengkapya berbunyi:

- 1) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
- 2) Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
- 3) Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Disimak dari isi teks tersebut di atas sangat kuat terasa adanya tekad pemuda pemudi yang berasal dari berbagai suku yang menghuni wilayah Nusantara untuk menyatu menjadi suatu bangsa secara politis yang hidup dalam wadah tanah air Indonesia serta sekaligus mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Butir satu menyatakan tekad dan pengakuan bahwa seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan yang utuh yang meliputi tanah dan air (laut). Ini sesuai dengan asas negara kepulauan yang menganggap bahwa pulau-pulau dan laut yang ada di antaranya merupakan satu kesatuan yang utuh. Asas negara kepulauan tersebut telah diterapkan dalam Wawasan Nusantara.

Butir dua menunjukkan adanya tekad yang kuat pada diri para pemuda dan pemudi pada waktu itu untuk menyatukan diri dalam wujud bangsa Indonesia untuk mengatasi rasa kesukuan yang pada waktu itu dengan sengaja ditimbulkan oleh penjajah dalam upaya memecah belah (*divide et impera*).

Butir tiga secara khusus menyatakan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Secara implisit butir ini mengakui adanya kebinekaan bahasa yang digunakan dan dipelihara oleh tiap-tiap suku, tetapi seluruhnya bersepakat untuk menentukan suatu bahasa yang digunakan secara bersama sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, rumusan kalimat aslinya "menjunjung bahasa persatuan", bukan "satu bahasa".

Sebagai bahasa persatuan ditetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Kesepakatan memilih bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia didasari oleh kesadaran akan kenyataan bahwa bahasa Melayu tersebut telah menjadi bahasa pergaulan antarsuku dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota pelabuhan yang menyebar melalui perantau/pedagang.

Bahasa Jawa meskipun jumlahnya besar tidak menjadi bahasa pergaulan antarsuku karena bahasa tersebut hanya digunakan oleh suku Jawa saja. Bahkan, Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Pulau Jawa (Jakarta) tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar.

Keseluruhan isi Sumpah Pemuda telah menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh dan seluruh pribumi nusantara menjadi satu bangsa serta didukung adanya wahana komunikasi pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa Sumpah Pemuda adalah cikal bakal Wawasan

Nusantara yang kita kenal sekarang. Tanpa peranan bahasa Indonesia sebagai wahana komunikasi pemersatu, sulit untuk mewujudkan adanya "satu bangsa Indonesia". Bahkan, kalau diteliti sejarah seluruh bangsa-bangsa di dunia, hanya bangsa Indonesia satu-satunya yang memiliki "Sumpah Pemuda" yang pada hakikatnya merupakan sumpah persatuan.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pembangunan nasional memperluas peran bahasa Indonesia, antara lain sebagai bahasa perantara, bahasa ilmu, bahasa hukum, bahasa pergaulan, bahasa budaya, bahasa agama, bahasa administrasi, dan sebagainya.

Sebagai bahasa pergaulan, bahasa Indonesia berkembang pesat dan berhasil melaksanakan fungsinya sebagai bahasa persatuan dan kesatuan, serta dapat memenuhi peranannya sebagai alat komunikasi sosial, yaitu sebagai jembatan penghubung antara beratus suku bangsa yang bermukim tersebar di seluruh wilayah Nusantara Indonesia.

Data-data statistik yang bersumber dari Biro Pusat Statistik memberi gambaran bahwa ambisi nasional untuk "membahasaindonesiakan" bangsa Indonesia belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diinginkan.

Angka-angka statistik tentang penduduk Indonesia di atas usia 5 tahun menunjukkan bahwa pada tahun 1971 baru 40,8% rakyat Indonesia yang mampu berbahasa Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1980 meningkat menjadi 60,8%. Pada sensus tahun 1990 baru dicapai 80,8%. Hal tersebut menggambarkan bahwa setelah 62 tahun Sumpah Pemuda diikrarkan dan 45 tahun setelah berlakunya bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi negara belum seluruh bangsa Indonesia mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.

Data-data lebih rinci memberikan informasi bahwa di Pulau Jawa masih ada sekitar 19 juta penduduk di atas usia 5 tahun yang tidak berbahasa Indonesia dan sekitar 7,5 juta di Jawa Timur (terbesar). Di Irian Jaya, masyarakat yang mampu berbahasa Indonesia sudah sekitar 75%, sedangkan di Timor Timur baru sekitar 54%.

3. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Setiap bangsa di dunia, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki dan menetapkan wawasan bangsanya yang digunakan untuk memandang, menghadapi, dan menentukan sikap terhadap masalah internal ataupun eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

Bangsa Indonesia telah pula menentukan wawasan bangsanya, yaitu wawasan tentang diri (internal) dan lingkungannya (eksternal) yang didasarkan pada kedudukan geografis wilayah, keanekaragaman, dan jumlah penduduk serta kekayaan alam yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia, yang kesemuanya merupakan anugerah Allah swt. kepada bangsa Indonesia. Wawasan bangsa Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara berisi konsepsi tentang bagaimana memandang, menghadapi, dan bersikap

terhadap masalah internal dan eksternal yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Hakikat Wawasan Nasional Indonesia adalah menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan bersendikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Wawasan Nasional bangsa Indonesia menerapkan konsep negara kepulauan dan muatan isi konsepsinya mendasar pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam sekitar 192 butir amanat. Di dalam 192 butir amanat tersebut terdapat sekitar 35 butir amanat yang bermakna wawasan bangsa tentang diri dan lingkungannya sebagai berikut.

Wawasan bangsa Indonesia, yaitu Wawasan Nusantara merupakan konsepsi strategi bangsa Indonesia yang berintikan asas kesatuan dan persatuan, dan berfungsi sebagai konsepsi yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dengan inti wawasan sebagai berikut.

- 1) Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi dan politik,
- 2) Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi,
- 3) Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan
- 4) Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan bela negara.

Butir-butir Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai wawasan, antara lain, adalah:

- 1) Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa;
- 2) Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;
- 3) Rakyat Indonesia berkeinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas;
- 4) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat;
- 5) Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi kepulauan Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke;
- 6) Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan;
- 7) Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 8) Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
- 9) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
- 10) Bahasa negara ialah bahasa Indonesia;
- 11) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah;
- 12) Negara mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan orang-seorang;
- 13) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 14) Tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;

- 15) Kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh MPR RI;
- 16) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Butir-butir tersebut mengandung arahan kepada bangsa Indonesia tentang bagaimana bentuk upaya bangsa Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Bangsa Indonesia diarahkan oleh butir-butir wawasan tersebut agar upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tidak bersifat "agresif-offensive" melainkan "defensif-aktif".

Dalam menganalisis butir-butir yang mengandung nilai wawasan sebagai turunan dari butir-butir amanat Undang-Undang Dasar 1945 disimpulkan bahwa dalam upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya, bangsa Indonesia tidak menerapkan "konsep kekuatan" (*power concept*) yang menggambarkan sifat-sifat agresif ekspansif dengan membangun kekuatan angkatan bersenjata yang dahsyat, melainkan ingin menerapkan konsep bertahan sekaligus menangkal dalam arti menyiapkan diri dengan membentuk "kondisi dinamis bangsa Indonesia" yang berisi keuletan dan ketangguhan dengan kemampuan daya lenting yang tinggi sehingga mampu menanggulangi tiap tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang dimanifestasikan dalam bentuk tantangan terhadap kehidupan nasional, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan atau bela negara.

Konsep bertahan yang dimaksud di atas disebut Ketahanan Nasional yang merupakan konsep aktualisasi Wawasan Nasional. Empat aspek Ketahanan Nasional tersebut meliputi (1) Ketahanan Ideologi dan Politik, (2) Ketahanan Ekonomi, (3) Ketahanan Sosial Budaya, dan (4) Ketahanan Bela Negara yang dapat digambarkan sebagai tembok-tembok ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan bela negara yang mampu menanggulangi segala bentuk tantangan dan ancaman.

4. Penutup

Ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara kesatuan Republik Indonesia membawa konsekuensi bahwa seluruh produk-produk kenegaraan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus ditulis dalam bahasa Indonesia, dan seluruh pejabat lembaga pemerintahan negara dari yang tertinggi sampai yang terendah, dalam forum resmi atau tidak resmi, harus menggunakan bahasa Indonesia.

Karena semua peraturan ditulis dan pembicaraan diucapkan dalam bahasa Indonesia, maka untuk menjamin semua peraturan dipahami dan dilaksanakan serta pembicaraan dapat dimengerti, seluruh rakyat Indonesia wajib memahami bahasa Indonesia.

Sejak diikrarkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sejak itu pula bahasa Indonesia diterima oleh semua suku di Indonesia sebagai bahasa pergaulan antarsuku. Meskipun setiap suku mempunyai dan tetap memelihara bahasanya masing-masing, semuanya telah bersepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam

pergaulan antarsuku. Kesepakatan tersebut menuntut seluruh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia untuk memahami dan dapat berbicara dalam bahasa Indonesia. Pemahaman bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar oleh masyarakat Indonesia secara luas akan mencegah timbulnya kesalahpahaman antarsuku. Dengan demikian, perwujudan kesatuan sosial budaya dalam implementasi Wawasan Nasional jadi makin mantap dan kondisi Ketahanan Sosial Budaya makin meningkat sebagai akibat mantapnya pemahaman dan penguasaan bahasa Indonesia secara luas dalam masyarakat.

Dalam kaitan antara bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional, upaya utama yang perlu dilakukan adalah menggalakkan kegiatan "membahasaindonesiakan seluruh bangsa Indonesia" melalui kampanye bahasa Indonesia selama satu dasawarsa (dasawarsa bahasa Indonesia).

Keberhasilan upaya membahasaindonesiakan seluruh bangsa Indonesia akan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang berarti memantapkan implementasi Wawasan Nusantara dan sekaligus meningkatkan Ketahanan Nasional.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional
Pemakalah : Machmud Subarkah
Pemandu : Hasan Alwi
Pencatat : Zaenal Arifin
Kasno

TANYA JAWAB

1. **Penanya:** I Wayan Cika, Fakultas Sastra Universitas Udayana

- a. Bapak mengharapkan agar semua pejabat, mulai pejabat tinggi sampai lurah harus menggunakan bahasa Indonesia, baik formal maupun tidak formal, dalam situasi resmi dan tidak resmi. Hal itu bertentangan dengan UUD 1945 yang mengharapkan kita juga memelihara bahasa daerah.
- b. Mengapa membahasa-indonesiakan bangsa Indonesia dibatasi hanya satu dasawarsa.

Jawaban:

- a. Hal itu tidak bertentangan sama sekali, hanya maksudnya agar warga kita yang belum dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan catatan Biro Pusat Statistik secara bertahap dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan contoh para pejabat tersebut.
- b. Pembahasa-indonesiaan hanya satu dasawarsa karena pembinaan bahasa itu harus konseptual. Setiap 5 tahun kita mengadakan kongres. Dalam kongres tersebut ditetapkan kebijakan yang harus ditempuh dan kebijakan 5 tahunan dimasukkan dalam GBHN. Kebijakan satu tahunan juga ada, yaitu yang dimasukkan dalam APBN.

2. **Pertanyaan:** Budinuryanta Yohanes, IKIP Surabaya

Ketahanan Nasional diibaratkan tembok. Jadi ada elemen, besi, pasir, dan bata. Bahasa Indonesia termasuk elemen yang mana?

Jawaban:

Contoh itu hanyalah suatu ibarat, jangan dianggap persis sama dengan tembok. Dapat juga Ketahanan Nasional diibaratkan papan yang berfungsi untuk

menahan dan membentengi. Ketahanan nasional sebenarnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap segala segi kehidupan yang bersifat dinamis. Ketahanan Nasional dapat bertambah panjang dan dapat juga bergeser sesuai dengan perkembangan bangsa itu sendiri. Ketahanan Nasional mempunyai daya lenting.

Yang langsung berkaitan dengan peningkatan bahasa Indonesia adalah wawasan nusantara dan bahasa merupakan subaspek dari wawasan nusantara.

3. **Pertanyaan:** Anwar Ali Akbar, Ketua HPBI Cabang DKI Jakarta

Pemahaman dan penghayatan terhadap citra bahasa Indonesia yang bermaksud membahasa-indonesiakan bangsa Indonesia merupakan gagasan yang sangat strategis. Dapatkah isi Pasal 36, Bab XV, UUD 1945 dibuatkan perundang-undangan yang lebih operasional?

Jawaban:

Pasal 36 UUD dapat dibuatkan perundang-undangannya. Kongres ini dipersilakan untuk membuat rumusan usulannya.

KEBERARTIAN DAN LEGITIMASI KESUSASTRAAN

Goenawan Mohamad

Majalah *Tempo*

".... karena sengsara dan bahagia, toedjoean dan tjita-tjita, kekoeatiran dan harapan doenia semoe-anja hidoep dalam dirinja, barang seni jang dihasilkannja toemboeh dengan sendirinja, boekan lagi berisi maksoed boeatan sendiri, tidak lagi teroe-koer dengan soesila dari loear" – Sanusi Pane, "Sikap Aesthetisch", *Poedjangga Baroe*, Desember 1936.

1. Saya ingin memulai perbincangan ini dengan sebuah kutipan dari pengalaman. Di tahun 1969 seorang kenalan menulis secara teratur artikel yang memperkenalkan karya sastra Indonesia di dalam koran *Indonesia Raya*. Pada suatu hari ia ingin membicarakan sajak saya, *Pariksit*, dengan iktikad yang sangat baik: agar dikomunikasikan ke publik yang lebih luas. Ia pun datang kepada saya dan bertanya, "Apa sebenarnya yang hendak Saudara katakan dengan sajak itu? Bisakah Saudara ceritakan kepada saya sedikit? Atau Saudara tuliskan barang beberapa baris lalu kirimkan kepada saya?"

Saya, terus terang, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya merasa malu, bingung, riku, dan juga barangkali marah. Saya tidak bisa menerangkan kepada diri saya sendiri kenapa perasaan campur aduk itu terjadi. Waktu itu yang teringat oleh saya ialah apa yang dulu sering ditugaskan kepada anak-anak sekolah menengah dalam pelajaran kesusastraan, "Ceritakanlah isi sajak ini dengan kata-katamu sendiri!". Bagi saya, pada hakikatnya kenalan tadi meminta saya "menceritakan sajak *Pariksit* dengan kata-kata saya sendiri. Akan tapi, bagaimana saya akan menceritakan sebuah sajak saya dengan kata-kata saya sendiri? Apakah sajak itu *bukan* kata-kata saya sendiri? Jika saya bisa mengatakannya dengan cara lain apa yang ingin saya katakan dalam *Pariksit*, maka kenapa saya harus menuliskannya sebagaimana adanya kemudian, yakni sebagai sajak?

Itulah kemudian yang saya utarakan kepada kenalan saya itu: saya tidak mau, dan saya tidak mampu menuruti permintaannya.

Kenalan saya tidak menjawab. Ia tidak jadi membawakan *Pariksit* ke khalayak pembaca *Indonesia Raya*. Sementara itu, saya tetap dengan perasaan saya yang campur baur dan diam-diam menyadari bahwa sebenarnya saya memang tidak mampu untuk menuliskan dan menceritakan kembali apa yang saya sebenarnya hendak saya katakan dengan sajak itu. Oleh karena itu, saya mungkin merasa malu, bingung, rikuh, dan barangkali marah. Kemudian, saya mulai menerima kesulitan saya sendiri. Pada akhirnya seorang yang berbicara, lebih-lebih lagi seorang yang menulis sajak, tidak bisa mengatakan seperti ujar tokoh Humpty Dumpty dalam karya Lewis Carol *Alice Through the Looking Glass*, "Apabila saya menggunakan sepatah kata, itu berarti seperti apa yang ingin saya maksudkan, tidak kurang-tidak lebih".

2. Pada hemat saya, salah satu persoalan yang mendasari hubungan antara kesusastraan dan masyarakat dewasa ini ialah yang saya sebut sebagai "dorongan keberartian" dorongan yang tersirat di dalam pernyataan Humpty Dumpty tadi. Namun, kata *keberartian* di sini saya pergunakan lebih dari yang tersirat di situ. Ia merupakan bentukan dari kata *berarti*, dengan makna ganda: yang pertama mempunyai makna 'arti', 'ide', atau 'konsep', yang ada hubungannya dengan suatu klaim tentang kebenaran; yang kedua mempunyai makna 'penting untuk', 'relevan', yang ada hubungannya dengan kesepakatan tentang kegunaan. Dalam suatu masyarakat yang telah bergerak, terdesak oleh dinamikanya sendiri, untuk merancang dan memperoleh apa yang dimauinya, dalam sebuah masyarakat yang semakin mengkoordinasikan diri ke arah suatu perolehan--dan ini tampak terutama dalam pertumbuhan awal kapitalisme--"dorongan keberartian" itu menjadi semakin melembaga: kebaikan yang terutama adalah kepastian dan faedah.

Orang yang dalam pemikiran kesusastraan Indonesia yang menggerakkan "dorongan keberartian" ini sudah tentu S. Takdir Alisjahbana. Kesusastraan baginya--dan yang ia maksudkan adalah kesusastraan "baru", yang kemudian merupakan sebuah paradigma dalam hampir semua pembicaraan tentang kesusastraan modern di Indonesia--adalah suatu ekspresi dari "individualisme" atau "bangunnya kepribadian", tetapi sekaligus sebuah kesusastraan yang, "selain dari pada memberi kita perasaan keindahan yang nikmat, dapat pula memberi faedah bagi kita".

Dari Takdir kita tahu "individualisme" merupakan kontras dari semangat yang ada pada "puisi lama", yang hanya mengulang cara dan corak orang-orang lain dalam semangat kolektif; sebuah identitas dengan sosok dan kontur yang konsisten. Dalam hal ini, bukan kebetulan para penulis di tahun 1930-an itu menggunakan kata *pujangga* untuk menyebut seorang sastrawan: sebuah subjek yang menentukan, membentuk, dan bahkan dominan dalam proses kreatif, sebuah kesadaran yang utuh dan sebuah pusat yang layak didengar kan. "Bukankah pujangga itu boleh disamakan dengan pesuruh yang diturunkan Dewi Kesenian akan menjadi penunjuk jalan bagi bangsanya?", tulis H.B. Jassin di akhir tahun 1940, ketika ia mengkritik novel *Belenggoe* karya Armijn Pane.

Dari sini saja kita bisa melihat bahwa "dorongan keberartian" telah melahirkan sebuah anggapan tentang kesusastraan, yakni kesusastraan sebagai agenda: karya sastra adalah untuk menjalankan peran kepujanggaan, di samping karya sastra juga sebagai reproduksi dari sebuah individualitas. Apalagi ketika dinyatakan pula bahwa "pujangga" pun sebuah subjek yang ikut membentuk sebuah masyarakat baru dan—setidaknya dalam formula yang dianjurkan oleh Takdir Alisjahbana semenjak tahun 1930-an itu—tidak melepaskan diri dari pekerjaan bersama yang disebutnya sebagai "*reconstructie-arbeid* bangsa kita".

Pada kesempatan lain saya pernah mengatakan bahwa "dorongan keberartian" itu tidak berhenti dengan surutnya orang-orang Pujangga Baru. Saya sudah mengutip ucapan H.B. Jassin di akhir tahun 1940, Sejak itu, kata *pujangga* sudah pudar atau dimakzulkan dari kosakata yang biasa dipakai dalam pembicaraan tentang kesusastraan. Akan tetapi, beban "keberartian"-nya diteruskan. Di tahun 1943, Chairil Anwar menolak "hasil seni improvisasi" dan menyatakan bahwa "pikiran berpengaruh besar dalam hasil seni yang tingkatnya tinggi". Asrul Sani di tahun 1950-an menyatakan "*deadlock* pada puisi emosi semata", seakanakan memang ada sebuah sajak yang benar-benar merupakan "puisi emosi semata". Dalam argumen seperti ini tampak bahwa "pikiran" atau "ide" atau "gagasan" dalam puisi bukan saja menempati posisi yang lebih tinggi dari apa yang disebut sebagai "emosi", melainkan juga ide itu hadir mendahului proses atau gerak penulisan sajak. Apa yang harus digayuh oleh seorang penyair adalah secara *adekuat* mencapai pewujudan atau representasi dari ide itu melalui susunan kata dan bunyinya, melalui imaji atau lambang-lambang, pendeknya segala pernik-pernik, mungkin ornamen, yang umumnya disebut sebagai "bentuk".

Dari sini tampak bahwa bukan saja untuk melihat kesusastraan sebagai suatu agenda untuk menuju ke suatu "arti", melainkan juga kesusastraan sebagai sesuatu yang merupakan *mimesis* yang mereproduksi "isi", yakni "isi" yang ada di dalam diri sang pengarang sebagai subjek yang mempunyai "pikiran"; dengan kata lain, sebuah subjek yang berpikir.

Perlu saya tambahkan di sini bahwa di tengah-tengah "dorongan keberartian" yang mendominasi semangat kesusastraan Indonesia modern itu, ada sebuah suara yang berbeda. Suara itu datang dari Sanusi Pane. Ia adalah orang pertama yang menampik atau meragukan (setidaknya sebelum ia menulis naskah lakon *Manusia Baru*) asumsi kesusastraan sebagai agenda. Di tahun 1936 itu, ketika ia menyatakan bahwa "barang seni bukan lagi berisi maksud buatan sendiri", ia sebenarnya mempertanyakan asumsi yang kemudian nyaring disuarakan tentang hadirnya subjek yang merancang dan berpikir dalam kesusastraan. Ketika ia mengatakan bahwa "barang seni" itu "tidak lagi terukur dengan susila dari luar", ia pada dasarnya mempersoalkan bagaimana kesusastraan mendapatkan legitimasi nya di tengah "dorongan keberartian"?

3. Bagi Sanusi Pane, puisi tidak merancang dirinya sendiri. Ia "tumbuh dengan sendirinya". Sang penyair juga "tidak memikirkan guna barang seninya". Pendirian

seperti ini juga tersirat dalam pandangan penulis-penulis terkemuka segenerasi Sanusi. Menurut Armijn Pane, "Hasil kesusastraan tiada mungkin dibestel oleh orang lain, dan tiada mungkin pula dibestel oleh diri sendiri". J.E. Tatengkeng menyatakan bahwa seni itu "gerakan sukma", dan "jangan dijadikan kuda penghela gerobak barang yang lain". Pernyataan semacam itu adalah ekspresi lanjutan dari semangat pembebasan yang melahirkan puisi modern Indonesia di tahun 1930-an. Para pengarang sesudah mereka nampaknya tinggal menganggap masalah pembebasan yang seperti itu sudah hal yang semestinya meskipun kita sudah melihat, dalam konsepsi Chairil Anwar, misalnya, pendapat bahwa puisi "tumbuh dengan sendirinya" itu cenderung ditampik.

Mungkin karena ada sebuah paradoks dalam etos yang terkandung dalam semangat perubahan--tidak hanya di bidang kesusastraan, tetapi juga di masyarakat--yang dikemukakan oleh para intelektual Indonesia sejak tahun 1930-an, kita menemukan di dalamnya semangat pembebasan, dari adat, tekanan kolektifitas, tahyul, dan tumbuhnya semangat ilmiah, juga dalam proses desakralisasi lingkungan sosial dan alam. Akan tetapi, pada saat yang sama yang muncul adalah sejenis rasionalitas ("*intelektualisme*" dalam istilah Takdir Alisjahbana dalam *Polemik Kebudayaan*) yang menghendaki tatanan yang koheren dan sistematis, yang mengatasi pelbagai ragam pengalaman, situasi, motif, kepercayaan yang nampak centang perenang dan tidak efisien: rasionalitas yang melahirkan hukum yang formal, birokrasi modern, kemampuan untuk merancang dan mengontrol, dan meningkatkan efisiensi ekonomis dan administratif. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai "akal instrumental", atau yang oleh Weber dinamakan sebagai *Zweckrationalitat*, yang tampil dalam modernisasi masyarakat dan dalam banyak segi bertentangan dengan impuls-impuls kebebasan yang terkandung dalam penciptaan puisi.

Sanusi Pane di tahun 1935 mencemaskan hal itu ketika ia mengomentari kegandrungan Takdir Alisjahbana akan sifat "kebudayaan Barat yang *dynamisch*". Kita semua ingat argumentasinya: ia menolak "Barat" yang "mengutamakan jasmani sehingga lupa akan jiwa", ibarat Faust dalam cerita Goethe. "Akalnya dipakainya menaklukkan tenaga alam".

Sudah barang tentu suara Sanusi Pane, seorang penganut theosofi, adalah pengulangan dari banyak argumen yang dibawakan orang di Eropa dan di Asia yang kecewa kepada hal-hal yang meruyak bersama menyebarnya modernisme. Pernyataan semacam itu (tidak hanya oleh Sanusi Pane, tentu saja) barangkali juga bisa disebut sebagai sejenis romantisme yang buruk, dan Takdir dengan mudah menangkisnya sebagai sikap yang ditiru saja dari Eropa, tempat yang sudah jenuh dengan berkuasanya "akal instrumental" itu. Bukan kebetulan bahwa Takdir bertentangan pula dengan Sanusi Pane dalam pandangan keseniannya. Ia menampik pandangan Sanusi yang bertolak dari premis bahwa sang penyair "tidak memikirkan guna barang seninya", sebab bagi Takdir kesusastraan justru mendapatkan legitimasi dari kegunaannya. Tentu saja kita tahu bahwa kegunaan

itu ditentukan dari luar kesusastraan itu sendiri: "Sebab di atas segala perasaan keindahan, lebih di atas dan paling atas ialah *toekomst* kita sebagai bangsa di tengah-tengah percaturan dunia dewasa ini", kata Takdir. Di sini kita lihat bahwa paradoks yang dalam etos yang terkandung dalam semangat perubahan sosial, atau lebih tepat pembaruan itu, hendak diselesaikan Takdir dengan sederhana: memilih. "Kita bukan saja berhak memilih seni yang berfaedah bagi kita, kita mesti memilih", katanya. Dalam sebuah esai yang terbit di tahun 1941, yang berjudul "*Individualisme en Gemeenschapsbewustzijn in de moderne Indonesische letterkunde*", Takdir lebih menjelaskan argumennya bahwa kebebasan yang melahirkan individualitas dalam kesusastraan modern harus ditundukkan oleh lahirnya sebuah masyarakat modern.

Di sini kita menyaksikan bagaimana "dorongan keberartian" mendapatkan bentuknya yang paling jelas: kesusastraan tidak boleh menjadi suatu "kelainan" dalam agenda modernisasi. Ia harus merupakan bagian yang integral dari suatu rancangan besar. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa paradoks yang ada dalam agenda modernisasi sudah terpecahkan untuk kesusastraan. Impuls-impuls kebebasan yang berada dalam penciptaan kesusastraan, terutama puisi, setelah lahirnya kesusastraan modern, senantiasa tidak mudah dikendalikan oleh rasionalitas yang dipilih Takdir: rasionalitas yang mengutamakan kepastian dan faedah—satu hal yang semakin kita rasakan di masa kita, ketika munculnya kapitalisme, yang mengutamakan perhitungan akan guna dan hasil, disertai dengan dorongan akan penguasaan alam dan teknologisasi—, dan juga pengendalian terhadap kemerdekaan kreatif yang meluas.

Di dalam keadaan itu persoalan legitimasi kesusastraan menjadi soal yang gawat. Persoalan dewasa ini bukan sekedar bahwa anak-anak di sekolah tidak pernah menikmati hasil-hasil kesusastraan, tetapi karena kesusastraan sedang digugat dari dasarnya oleh sebuah masa yang semakin didesak untuk tidak memerlukannya. Sanusi Pane sendiri kemudian tidak nampak melanjutkan semangatnya yang lama. Ia menulis *Manusia Baru*, tentang seorang pahlawan buruh dalam suatu peristiwa imajiner di India, yang dalam banyak segi mengikuti "dorongan keberartian" yang dikumandangkan Takdir, dan tidak berbicara lagi tentang seni yang tidak "berisi maksud buatan sendiri" dan "tidak terukur dengan susila dari luar".

4. Bagaimana sebenarnya kesusastraan, khususnya puisi, mempunyai relevansi kepada kehidupan yang terjadi sekarang, tanpa terjatuh kepada "dorongan keberartian", dan tidak lebur tenggelam ke dalam suatu proyek yang sebenarnya bertentangan dengan semangat kebebasannya sendiri?

Di tahun 1961 Soebagio Sastrowardjo menulis sebuah sajak yang berjudul *Manusia Pertama di Angkasa Luar*. Saya kutip beberapa baris:

....berilah aku satu kata puisi
daripada seribu rumus ilmu yang penuh janji

yang menyebabkan aku terlontar kini dari bumi
yang kukasih. Angkasa ini bisu. Angkasa ini sepi.
Tetapi aku telah sampai pada tepi
Dari mana aku tak mungkin lagi kembali.

Manusia pertama di angkasa luar membutuhkan puisi: rasionalitas yang instrumental, "seribu rumus ilmu yang penuh janji", bukan saja telah mengasingkannya, tetapi telah mereduksikannya menjadi sebagai suatu hasil abstraksi, suatu contoh dari satu *species*--bukan seorang anak muda yang kesepian, punya cinta dan takut dan masa lalu dan masa kini yang tak tergantikan--yang akan diuji reaksinya dalam sebuah eksperimen. Dalam sajak ini, puisi adalah sesuatu untuk menebus kembali apa yang hilang dalam proses yang berlangsung ketika ilmu pengetahuan membuka jalan ke arah penguasaan terhadap "yang lain", baik yang berwujud orang maupun alam, sesuatu yang pernah ditakutkan Sanusi Pane hampir enam puluh tahun yang silam. Puisi bukanlah semata-mata "rasa keindahan", seperti disebutkan oleh Takdir Alisjahbana. Puisi adalah suatu dialog di mana "yang-Lain" tidak dianggap sebagai objek, apalagi sebagai "kelainan", dan dengan demikian, dianggap sebagai anomali atau gangguan yang harus dikuasai, dijinakkan, ditaklukkan hingga hilang tenggelam, karena di-"sama"-kan.

Dorongan "keberartian" pada dasarnya tidak saja melihat posisi puisi yang seperti itu, tetapi juga ingin melenyapkan puisi itu sendiri karena nampak sebagai sesuatu yang harus ditertibkan. Puisi memang tidak selamanya, bahkan seringkali, menampilkan sesuatu yang tidak koheren, penuh ambiguitas, penuh dengan hal yang tidak seragam dan tidak stabil dalam hampir tiap anasirnya, suatu penggunaan modalitas bahasa yang digambarkan oleh Julia Kristeva sebagai *le semiotique*, yakni suatu kecenderungan dalam tubuh yang bersifat dorongan naluriyah dengan dampak yang muncul dalam bahasa, suatu keadaan disintegrasi di mana pelbagai pola muncul tapi pada saat yang sama kabur dan tidak stabil. Dengan "sifat" yang sedemikian itu, puisi memang tidak punya tempat ketika dorongan ke arah kepastian dan faedah menjalari hampir semua peri kehidupan, dalam kehidupan sosial, politik, ilmu, dan juga agama. Akan tetapi, masalahnya adalah biar pun tanpa legitimasi, puisi (dan kesusastraan) agaknya akan terus diciptakan.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Keberartian dan Legitimasi Kesusastraan
Pemakalah : Goenawan Mohamad
Pemandu : Umar Kayam
Pencatat : Utjen Djusen Ranabrata
Sulistiyati

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Romlah Suhadi, IKIP Bandung

Pembicara bangga bahwa Sutan Takdir Ali Sjahbana dilibatkan dalam pembahasan makalah anda (saya memberitahukan). Tetapi, sayang beliau tidak hadir di sini. Saya memberitahukan bahwa Takdir saat ini sedang menulis karya berjudul "Dan Hidup Berjalan Terus", dan semboyannya "jangan tanggung jangan kepalang", itulah pesan Takdir Ali Sjahbana.

Jawaban:

Mudah-mudahan novel Takdir muncul lagi, baik jelek maupun baik itu penting.

2. Pertanyaan: I Gusti Ketut Ardhana, Balai Penelitian Bahasa Denpasar

Dorongan keberartian pada fitalitas kesusastraan modern disulut oleh keadaan pada jamannya itu. Apakah dorongan keberartian itu identik dengan karya-karya yang lahir pada saat itu. Apakah harus mengemban amanat tertentu bahwa sastra harus mencerminkan mimesis dari keadaan yang sudah berjalan.

Jawaban:

Di dalam pembahasan yang dapat kita peroleh masalah peran dalam kesusastraan masyarakat sangat penting dan kritik-kritik yang berbeda dalam novel tertentu itu berkisar pada masa itu. Persoalan yang dikemukakan Armin Pane terhadap novel *Dimyati* adalah seberapa jauh nasihat atau petuah itu dapat dikemukakan secara jelas. Kalau masalah sastra terbatas pada ruang lingkupnya, jangan dikatakan itu merupakan bahaya komunisme. Karena komunis sudah mati, jangan kita buat komunisme menjadi satria yang tidak mati-mati. Masalah anak-anak yang kurang dididik membaca karya sastra dan tidak diarahkan untuk berfikir karena pengajaran sastra di negara kita mematikan proses pengajaran sastra. Mereka tidak diajak menikmati sastra, tetapi hanya ditugasi menghafal angkutan-angkutan dalam perodesasi sastra. Penulis berpendapat bahwa pengajaran kesusastraan adalah penindasan. Akibatnya, bacaan sastra tidak terbaca. Jika Rendra dapat hidup di

luar negeri dari hasil karyanya di negeri kita pengarang sangat sulit mengatasi persoalan hidupnya. Akibatnya, mereka mengadakan kompromi yang tidak perlu sehingga merusak konsentrasi berpikirnya dan kerjanya menjadi jelek.

3. **Pertanyaan:** Ahmad Darwin Nasution, SMA Negeri 2 Medan

Sepanjang sejarah kita lihat bahwa Pramudya Anantatur mendobrak segala kezaliman itu pada setiap angkatan, terasa dari angkatan-angkatan 45–66. Apakah saat ini para sastrawan sudah menyusun barisan untuk mendobrak kezaliman yang terselubung, misalnya kezaliman ekonomi, kezaliman bahasa, dan sebagainya. Usaha seperti itu mungkin akan banyak yang ikut membantu.

Jawaban:

Barisan sastrawan tidak ada. Dan, penulis tidak tahu apakah sastrawan akan mendobrak kezaliman itu. Proses kreatifitas tentu akan tetap hidup dan proses kreatif itu akan memberikan rangsangan untuk mencari jalan baru dan memperbaharui hal-hal yang terhenti, misalnya mempelajari hal-hal baru dalam bahasa yang baru yang penuh dengan klise.

Kembali kepada puisi yang memiliki banyak sekali kebebasan yang ditawarkan di dalam bahasa itu. Pemakalah menunjukkan bahwa pemahaman puisi akan membuat pembaca berpikir. Pemakalah tidak setuju akan rumusan angkatan. Sejarah kesusastraan Indonesia yang terpotong-potong oleh angkatan itu sebenarnya merupakan satu kesatuan karena masing-masing generasi itu ada persamaannya. Sebaliknya, pendekatan seperti itu akan ditinggalkan.

4. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Apakah sebetulnya sastra itu merupakan kepastian dari kodrat yang telah ada?

Jawaban:

Dalam kesimpulan ada dua hal, yakni kepastian dan faedah. Masalah kebebasan berfikir seperti di negara asing itu dapat terwujud jika pembangunan telah selesai. Hambatan yang ditemui adalah sensor dalam karya sastra yang selalu menghantui pengarang. Selain itu, persoalan yang dihadapi pengarang adalah sikap seorang murid yang hanya menghafal angkatan-angkatan dalam sejarah sastra.

5. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Pengajaran sastra di SLTP dan SLTA dewasa ini mematikan kreativitas anak. Hal ini disebabkan oleh tuntutan kurikulum dan kenyataan pengajar sastra. Guru sastra harus dapat berbahasa yang baik dan benar dan berjiwa setengah sastrawan. Apakah jalan keluar dari keadaan yang terjadi sekarang ini agar pengajaran sastra tidak mematikan kreativitas anak?

Jawaban:

Para guru di sekolah tidak saja mengajarkan soal angkatan dalam sastra atau soal kesejarahan saja, tetapi lebih diutamakan agar anak didik dapat menikmati dan membaca karya sastra secara langsung.

6. Pertanyaan: (tidak menyebutkan nama)

- a. Legitimasi kesusastraan ditentukan oleh siapa?
- b. Bagaimana bentuk legitimasi itu?

Jawaban:

Legitimasi kesusastraan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Bentuknya berupa terciptanya suasana masyarakat yang memerlukan sastra.

SASTRA INDONESIA DAN KEPERIBADIAN GENERASI MUDA

Emha Ainun Nadjib
Sastrawan dan Budayawan

1. Marginalitas Seni Sastra

Seni sastra merupakan salah satu jenis kesenian yang paling marginal/pinggiran pada lingkup perhatian hidup generasi muda Indonesia. Dibandingkan dengan seni rupa, tari, musik, teater atau film, seni sastra paling kurang diperhatikan, dan semakin lama tampaknya semakin kurang diperhatikan, (bahkan) tidak saja oleh generasi muda, tetapi juga lebih menyeluruh dari itu.

Seni sastra relatif tidak tercantum dalam daftar prioritas kebutuhan masyarakat: sampo, kuteks kuku, busi motor, *T-Shirt*, atau obat penyemprot nyamuk jelas lebih dianggap penting dibandingkan karya sastra.

Seni sastra terkategoriikan sebagai sesuatu yang *boleh tidak ada*. Sementara itu, celana Jeans atau jam tangan tergolong *harus ada*. Bahkan, ada situasi di mana lokalisasi wanita tunasusila memperoleh kemerdekaan penuh untuk beroperasi. Sementara itu, karya sastra sangat diragukan, baik secara politis maupun kultural, bahwa ia *sebaiknya ada*.

Kalau pada suatu hari ada buku kumpulan puisi yang laris atau pemanggungan baca sajak yang ditonton oleh ribuan orang yang histeris, yang menjadi pusat perhatian sesungguhnya *bukanlah sastranya, melainkan figur tokoh* yang membawakannya.

2. Kultur Pembangunan

Sebab musabab keterpinggiran sastra dalam kebudayaan masyarakat masa kini, antara lain, mungkin: nilai-nilai yang diperkembangkan oleh *kultur pembangunan* kita relatif tidak mengakomodasikan atau kurang menyediakan peluang-peluang bagi terapresiasikannya seni sastra oleh warga masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya.

Pada sisi mana pun dari bangunan kebudayaan masyarakat yang sedang kita kerjakan *seolah-olah tidak ada iktikad untuk menumbuhkan tradisi apresiasi sastra*.

"Tidak ada iktikad" itu tidak sama dengan 'tidak ada'. Apalagi saya cantumkan juga kata *seolah-olah*. Mungkin begini penjelasannya: Ada sih ada, tetapi tidak begitu serius, dan pengerjaannya kurang sungguh-sungguh.

Juga, "kultur pembangunan" yang saya maksudkan adalah "wajah realitas dilapangan nyata"; jadi, tidak sama dengan bunyi GBHN, Pancasila, ucapan Mendikbud, atau petunjuk Bapak Presiden.

Adapun mengenai nilai-nilai yang dikembangkan oleh kultur pembangunan secara garis besar bisa kita lihat sekurang-kurangnya melalui tiga pola.

Pertama, pilar-pilar nilai hidup yang didirikan secara semakin kukuh oleh "lima serangkai": *materialisme, ekonomisme, kapitalisme, industrialisme, dan hedonisme*. Kita bisa mendiskusikan secara langsung mengenai masing-masing dari 'mo-limo' tersebut. Akan tetapi, prinsip terpentingnya adalah bahwa kehidupan manusia dan masyarakat terutama tidak mengacu pada prioritas untuk baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, dan indah atau tidak indah, melainkan mengacu pada menguntungkan atau merugikan, bergengsi atau tidak, menawarkan 'gaya' atau tidak, dan seterusnya.

Dalam konteks ini, seni sastra jelas bersifat nonmaterial, nonekonomi, tidak industrial alias tidak *marketable*, bukan kapital yang bermuatan keuntungan kapitalistis, bahkan bisa disebut antihedonisme.

Kedua, pilar-pilar nilai hidup yang ditanamkan secara semakin mencengkeram oleh *politik pembangunan* yang sampai hari ini masih berada pada tahap fanatisme terhadap *keamanan dan stabilitas*. Saya tidak keberatan terhadap keamanan dan stabilitas. Yang menjadi permasalahan hanyalah kenapa mata pandang keamanan dan stabilitas negara secara agak aneh melihat seni sastra sebagai suatu aktivitas budaya masyarakat yang harus diwaspadai dengan nada yang 'negatif'.

Memang hanya karya sastra tertentu dan sastrawan tertentu yang dicantumkan dalam "daftar kewaspadaan nasional", tetapi atmosfir yang ditradisikan oleh pengawasan yang berlebih terhadap seni sastra oleh institusi negara telah mengakibatkan kerugian kultural yang menyeluruh bagi perkembangan hidup seni sastra.

Ada kemungkinan seni sastra, di samping teater, memang sedikit memiliki efektivitas komunikasi dan sugesti sosial ketika difungsikan sebagai alat kontrol sosial politik. Akan tetapi, berlebihan kalau membayangkan seni sastra adalah makhluk raksasa yang bisa mengubah keadaan negara, sanggup menyelenggarakan 'suksesi' atau menumbangkan kekuasaan. Saya kira kekuasaan negara kita terlalu menganggap kambing sebagai gajah. Padahal, seandainya seni sastra hanya dianggap kambing saja pun sudah susah karena sewaktu-waktu ia menjadi langganan untuk ditaburi cat warna hitam. Saya, insya Allah, mempunyai banyak cerita dari lapangan tentang semua kesalahpahaman ini.

3. Menjawab Pertanyaan: Konsolidasi Kultural Antarinstitusi

Dalam situasi semacam itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya oleh Panitia Kongres sebagai pancingan bahan untuk sesi pleno sore ini, saya jawab dengan kegamangan dan banyak catatan kaki.

Bagaimana apresiasi generasi muda terhadap sastra Indonesia dewasa ini? Agak cenderung menurun. Penghargaan terhadap sastra sangat bergantung kepada kesadaran-

kesadaran esoterisme nilai, kepada pilihan filosofi hidup dan religiousitas. Semua itu tidak termasuk dalam *policy*, kepentingan, dan kebutuhan industri dan kekuasaan.

Harus ada pertanyaan balik: apakah pertanyaan itu diajukan untuk suatu "pengetahuan steril" ataukah *mencerminkan iktikad konsolidasi kultural* dan mungkin 'politik' antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan institusi-institusi lain yang lebih menggenggam kekuasaan dan punya otoritas terhadap mekanisme industri demi kehendak-kehendak kultural nasional di mana seni sastra dipahami sebagai sesuatu yang cukup penting bagi pembinaan kepribadian manusia Indonesia?

Bagaimana peran karya sastra Indonesia dalam pembinaan generasi muda dan peran generasi muda dalam pembinaan apresiasi sastra? Sastra belum didayagunakan secara maksimal sebagai salah satu nilai pemandu dalam pembinaan generasi muda, bahkan belum sungguh-sungguh dipercaya sebagai nilai budaya yang diperlukan untuk itu. Keadaan di lapangan bisa lebih rawan lagi karena yang dimaksudkan dengan pembinaan generasi muda seringkali adalah kooptasi politik. Sementara itu, walaupun ada iktikad tulus untuk mendayagunakan sastra sebagai sarana pembinaan, biasanya belum disertai oleh kualitas pemahaman atas sastra dan penguasaan metode akulturasinya.

Pada saat yang sama, malahan secara alamiah generasi muda kita memiliki naluri untuk menghargai dan lebih mengenali dunia sastra.

Kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan peran tersebut? Kecurigaan dari dunia politik dan desakan materialisme dan hedonisme yang terlalu dahsyat.

Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran tersebut? Iktikad politik global yang memperlakukan seni sastra lebih objektif dan jernih dalam konteks kebudayaan dan kemanusiaan. Mencari kemungkinan di mana institusi kekuasaan dan institusi industri sanggup dan bersedia melihat sastra dalam mata pandang kebudayaan, di samping mata pandang politik dan industri. Menggali metode-metode akulturasi karya sastra dalam peta kebudayaan masyarakat yang beragam dan berlapis-lapis. Mengalokasikan anggaran yang lebih rasional.

4. Sastra sebagai Komponen Wajib Suatu Peradaban

Sebagaimana bidang dan disiplin lain dalam kebudayaan masyarakat, seni sastra memiliki kemungkinan kontribusinya sendiri. Tradisi ilmu menanamkan kepada manusia disiplin untuk mengenali, memilih, meyakini, dan memelihara yang benar sebagai benar dan yang salah sebagai salah. Tradisi moral/etik/religi menumbuhkan pengetahuan, penghayatan, dan pemesraan terhadap nilai kebaikan. Adapun tradisi estetika, di mana-sastra merupakan salah satu pemeran, sarana atau pemandunya—menanamkan gagasan, *taste*, dan pendalaman tentang segala sesuatu yang indah, lembut, dan mesra ke dalam kejiwaan manusia dan masyarakat.

Estetika—dan dengan demikian juga esensi dunia sastra—seyogianya merupakan salah satu acuan dan tolok ukur bagi segala dan setiap aktivitas manusia dan

masyarakat. Dengan disebut 'masyarakat', berarti termasuk juga di dalamnya negara, pemerintahan, birokrasi, keusahaan dan manajemen, dan sebagainya.

Kegiatan pemerintahan suatu negara atau aktivitas manajemen suatu perusahaan, sesungguhnya terikat pada kebudayaan. Bahasa jelasnya: seseorang boleh bertanya apakah perilaku suatu pemerintahan dan industri berbudaya atau tidak. Keberbudayaan keputusan-keputusan politik, ekonomi, hukum dan lain-lain menentukan efektivitasnya terhadap nilai kemanusiaan yang hakiki. Dan, keberbudayaan adalah suatu kondisi esoterik, yaitu bahwa tradisi sastra bisa merupakan salah satu rujukan untuk menilainya serta merupakan pemandu untuk penumbuhannya.

Seni sastra khususnya dan kesenian pada umumnya merupakan salah satu komponen peradaban umat manusia yang memiliki hak dan relevansi untuk dikerjasamakan dengan disiplin-disiplin hidup yang lain demi *kebangunan suatu kebudayaan bangsa yang berkualitas dan manusiawi*. Sastra membiasakan orang yang mempergaulinya untuk memelihara kelembutan hati, kepekaan perasaan, ketajaman intuisi, kedalaman jiwa, kearifan sikap sosial, dan keluasan pandangan hidup. Sastra adalah salah satu jalan spiritual.

5. Kepribadian Generasi Muda

Terus terang saja kita (generasi tua, pemerintah, pemimpin-pemimpin masyarakat) masih merupakan *'orang tua yang konservatif'*. Yang kita kehendaki dari anak-anak kita terutama adalah kepatuhan dan ketertiban dalam ukuran-ukuran kita sendiri. Kita kurang memiliki tradisi simpati untuk membayangkan dan sampai batas tertentu membiarkan anak-anak kita menjadi diri mereka sendiri.

Kita lebih memilih ketaatan dibanding kemerdekaan. Padahal, mestinya pendidikan atas generasi muda adalah "bermain" di antara keduanya. Kita lebih memilih ketertiban dibanding kreativitas, atau pembakuan dibanding eksplorasi, padahal, mestinya bersama mereka kita "bergulat" di antara keduanya. Sesungguhnya tradisi budaya pendidikan kita diam-diam "membunuh" banyak kemungkinan potensial yang dimiliki (dianugerahkan oleh Tuhan) generasi muda. Kalau kita berbicara tentang pembinaan generasi muda, biasanya yang kita maksudkan adalah bagaimana agar keadaan dan sikap anak-anak muda itu sesuai dengan obsesi dan kepentingan generasi tua.

Saya kira kita bisa mencoba merekonstruksi kemungkinan pembinaan generasi muda dalam perspektif yang menyeluruh ataupun yang secara khusus menyangkut apresiasi sastra.

Secara umum kita memerlukan generasi muda yang kita beri peluang dan rangsangan untuk memiliki tradisi kreativitas di segala bidang; memiliki pengetahuan dan sikap tentang kebenaran, kebaikan dan keindahan; memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai baik yang dipilih; serta memiliki bangunan keberbudayaan yang memungkinkannya terlibat aktif sebagai

pelaku budaya kebangsaan yang berorientasi kepada kesejahteraan dan keselamatan masa depan yang sejernih-jernihnya.

Secara khusus pembudayaan apresiasi sastra pada generasi muda, kita nilai sebagai kebutuhan semua pihak, sebagai keperluan hakiki dari peradaban kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. Tradisi apresiasi sastra adalah salah satu kontributor pembangunan manusia dan kemanusiaan bangsa kita.

Lebih khusus lagi dalam mekanisme pendidikan kita, baik formal maupun nonformal, yang dewasa ini sangat mendesak untuk dikerjakan adalah mentransformasikan pola pengajaran sastra menjadi pendidikan sastra. Pengajaran sastra mungkin harus dikembangkan menjadi *workshop* sastra.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Sastra Indonesia dan Kepribadian Generasi Muda
Pemakalah : Emha Ainun Nadjib
Pemandu : Riris K. Toha Sarumpaet
Pencatat : Saksono Prijanto
Ellya Iswati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Sastra dewasa ini dapat mendidik dan merusak generasi muda. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas generasi muda melalui sastra? Bagaimana membendung sastra lakon yang dapat merusak generasi muda?

Jawaban:

Saya berpendapat bahwa generasi muda jangan hanya dijejali dengan pengertian haram atau makruh. Biarkan mereka menghadapi realitas. Beri mereka bekal untuk tidak tersesat.

2. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

- a. Sebenarnya siswa menyenangi sastra. Akan tetapi, setelah melihat sastrawan secara langsung mereka kecewa karena sastrawan/penyair lazimnya berperenampilan asal-asalan.
- b. Penyair hendaknya jangan hanya menyuarakan yang sifatnya protes sehingga sesuatu yang tidak bersifat protes kurang menarik. Apakah setiap kandungan hati nurani harus disampaikan dengan protes?

Jawaban:

- a. Saya setuju, kita jangan mengagumi orangnya, tetapi muatan puisinya. Yang patut kita kagumi hanya Tuhan. Kita jangan berhenti hanya mengagumi Rendra dan Chairil Anwar, tetapi pada tujuan yang terakhir atau cakrawala yang terakhir, yaitu Tuhan.
- b. Semua puisi pada umumnya berisi protes. Namun, setiap puisi mempunyai level yang berbeda. Saya sendiri sebenarnya kurang senang dengan puisi yang bersifat protes. Saya ingin puisi yang kontemplatif atau perenungan. Puisi protes sering dibacakan karena pragmatis dan langsung menyentuh. Masyarakatlah yang menginginkan pembacaan puisi protes.

3. **Pertanyaan:** Liliانا Muliastuti, FPBS IKIP Jakarta

Jelaskan secara riil tentang pengertian transformasi pola pengajaran menjadi pendidikan sastra. Apakah mungkin itu?

Jawaban:

Yang kita hadapi sebenarnya adalah antara kualitas dan kuantitas. Sebaiknya, kurikulum kuantitatif dan baku patut diperlonggar. Pelajaran sastra hendaknya diacukan ke kualitas, bukan hanya data-data. Esai dan ungkapan-ungkapan sastra lebih diperkenalkan. Selain itu, kurikulum nasional jangan mengikat pola tertentu sehingga guru kurang berani mengembangkan pola yang sudah digariskan itu. Temukan siswa secara langsung dengan sastra. Biasakan mereka punya sikap merefleksi sehingga memiliki sikap kritis. Ini ada akibatnya. Jika siswa kritis guru terancam karena pada umumnya guru hanya siap ditaati. Oleh karena itu, guru harus belajar demokratis. Mengenai metode dapat dibicarakan lebih lanjut. Yang penting siswa/anak tidak hanya kenal data. Mereka sebaiknya memiliki semangat. Chairil Anwar memiliki semangat nasionalisme. Puisi bukan lagi data tentang simbol, tetapi menjadi esensi dalam hidupnya dan ini harus dilatih dalam *workshop*.

4. **Pertanyaan:** Usdiyanto, SMA Taruna Nusantara, Magelang

Guru tidak punya kebebasan seperti penyair atau seniman. Menurut kami, yang terpenting bukan sejarahnya, melainkan bagaimana menghayatnya. Namun, apa artinya dapat menghayati suatu karya seni, tetapi Ebtanas tidak lulus.

Jawaban:

Dalam hal ini guru harus mengantisipasi dengan:

- a. merumuskan masalah secara konkret dan mendesak ke atas supaya kurikulum lebih rasional;
- b. mencari kesempatan dengan berbagai strategi, seperti bergerilya.

BAHASA INDONESIA MENJELANG TAHUN 2000

Hasan Alwi

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pengantar

Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 secara eksplisit mengungkapkan tekad dan semangat para pemuda pada saat itu tidak sekadar untuk mengangkat dan menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,¹ tetapi juga sekaligus untuk menjunjung-nya. Menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu secara tersirat mengandung makna yang sangat dalam, yaitu menggunakannya secara cermat sambil tetap memeliharanya agar bahasa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi yang mantap dan sekaligus sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia.

Selain sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 36, UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara itu, fungsi bahasa Indonesia harus dilihat dan ditempatkan dalam konteks usaha mencapai tujuan yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Dari sudut pandang ini, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang memperlihatkan keterkaitan yang langsung dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Jika dilihat dari kurun waktu yang telah dilaluinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berusia 65 tahun dan sebagai bahasa negara 48 tahun. Sebagai suatu bahasa untuk ratusan juta penduduk yang tersebar pada ratusan pulau dengan bahasa daerah atau bahasa ibu yang jumlahnya juga ratusan, kurun waktu yang demikian merupakan usia yang masih sangat muda. Akan tetapi, bahasa Indonesia menanggung beban tugas yang amat sarat karena ia dituntut untuk tetap menjadi sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks kegiatan pembangunan yang tengah dan akan terus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, tuntutan terhadap bahasa Indonesia itu akan makin bertambah karena pada saat yang sama ia pun harus tetap dapat mempertahankan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien tanpa kehilangan, apalagi mengorbankan, keutuhan jati dirinya.

Berdasarkan kerangka pemikiran seperti yang dipaparkan di atas, pada makalah ini akan dikemukakan beberapa hal yang seyogianya diperhatikan sehubungan dengan peran bahasa Indonesia menjelang tahun 2000, suatu kurun waktu yang menandai awal tahap lepas landas yang diharapkan akan dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kehidupan dan peradaban yang modern.

2. Peran Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia telah berhasil membangkitkan dan menggali semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam "mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan", sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antarsuku, antardaerah, dan bahkan antarbudaya.

Sebagai akibat dari ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki peran yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungan itu, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan dan dikaji ulang. Pada dasarnya peran atau fungsi bahasa Indonesia dari waktu ke waktu boleh dikatakan tidak mengalami perubahan. Artinya, rincian peran bahasa Indonesia, sekurang-kurangnya yang telah disinggung tadi, boleh dikatakan berlaku sepanjang masa selama bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang perlu dipertimbangkan ialah kemungkinan memberikan perhatian yang lebih khusus pada peran-peran tertentu, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat pemakainya.

Kalau hal yang disebutkan terakhir itu dihubungkan dengan kurun waktu menjelang tahun 2000, maka menurut hemat penulis, yang perlu dikaji ulang dan dimantapkan itu ialah peran bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa, sebagai sarana pengembangan iptek, dan sebagai sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa.

3. Bahasa Indonesia dan Pembangunan Bangsa

Bahasa dan pembangunan bangsa memperlihatkan kesalingterkaitan yang sangat erat, sebagaimana yang dikilatkan melalui ungkapan "bahasa menunjukkan bangsa". Seberapa jauh tingkat dan intensitas kesalingterkaitan itu berbanding sejajar dengan

besarnya sumbangan yang diberikan bahasa terhadap pembangunan bangsa itu sendiri. Kesalingterkaitan itu akan diwarnai oleh peran bahasa, terutama dalam pembinaan jati diri dan sistem nilai yang bercorak nasional. Dalam konteks Indonesia, hal itu akan dengan sendirinya tercermin melalui kekuatan atau daya rekat yang dimiliki bahasa Indonesia untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda menjadi kesatuan masyarakat yang lebih besar yang disebut bangsa Indonesia.

Dalam hubungan itu, perlu disinggung hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang jumlahnya ratusan itu. Hubungan itu dapat dilihat sekurangnya dari dua sisi, yaitu dari sisi bahasanya dan sisi para pemakainya. Dari segi bahasanya kita melihat adanya hubungan timbal balik antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam hal pemerayaan kosakata masing-masing. Bertambah kayanya kosakata bahasa Indonesia, antara lain, berasal dari berbagai bahasa daerah.² Demikian pula sebaliknya, bahasa daerah pun turut diperkaya kosakatanya oleh bahasa Indonesia.³

Sumbangan dari setiap bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu sudah barang tentu tidak berlangsung berdasarkan asas keadilan dan pemerataan. Asas itu justru harus dikembalikan pada kondisi objektif dari setiap bahasa daerah yang bersangkutan. Atas dasar itu, hanya bahasa daerah yang 'kuat' yang dapat memberikan sumbangannya terhadap bahasa Indonesia. Faktor kuatnya bahasa daerah itu dapat diamati, antara lain, dari jumlah penuturnya, seberapa jauh bahasa daerah itu menjadi sarana pendukung utama kebudayaan kelompok etnis yang bersangkutan, dan seberapa jauh bahasa daerah yang bersangkutan digunakan sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Dengan memperhatikan ketiga faktor itu, keberadaan bahasa-bahasa daerah haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan pemerayaan kosakata dan pementapan sistem bahasa Indonesia. Catatan yang patut ditambahkan ialah bahwa kata apa pun yang berasal dari bahasa daerah mana pun haruslah tunduk pada atau mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Kalau apa yang baru saja dikemukakan berkenaan dengan masalah pengembangan, hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dilihat dari sisi para pemakainya merupakan masalah pembinaan. Dengan mengecualikan mereka yang belum/tidak dapat berbahasa Indonesia,⁴ pada umumnya dapat dikatakan bahwa penduduk Indonesia merupakan penutur yang bilingual karena di samping menguasai bahasa Indonesia, mereka juga dapat menggunakan salah satu bahasa daerah sebagai bahasa ibunya. Penguasaan dua bahasa sekaligus oleh seseorang akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya apa yang secara teknis disebut interferensi, baik interferensi yang bercorak gramatikal maupun leksikal.

Pengamatan terhadap kenyataan pemakaian bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa interferensi leksikal jauh lebih menonjol daripada yang gramatikal. Gejala itu jelas menggambarkan tidak/kurang cermatnya penutur yang bersangkutan dalam menggunakan bahasa Indonesia dan, apabila secara kebetulan si lawan bicaranya tidak memahaminya, hal itu akan mengganggu kelancaran komunikasi. Kalau hal itu terjadi,

bahasa yang digunakan tidak lagi efektif sebagai sarana komunikasi. Dalam skala nasional, cara berbahasa seperti itu hendaknya mendapat perhatian yang layak dari semua pihak yang berkepentingan agar gejala tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Masalah ini perlu kita sadari bersama karena dalam kerangka pembangunan nasional, jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar kedua setelah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara.⁵

Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa erat pula kaitannya dengan kualitas penduduknya. Dalam makalah ini kualitas penduduk itu dihubungkan dengan mutu atau tingkat penguasaan bahasa Indonesiannya. Untuk itu, hasil sensus penduduk 1990 menggambarkan bahwa 15,07% dari penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari,⁶ sementara 67,80% tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka dapat berbahasa Indonesia (lihat pula Catatan 4). Secara keseluruhan berarti bahwa, menurut sensus terakhir itu, 82,87% dari penduduk Indonesia sudah dapat berbahasa Indonesia. Tanpa harus memperhitungkan seberapa jauh mutu atau tingkat penguasaan bahasa Indonesia mereka, karena sama sekali tidak terdapat indikator yang dapat digunakan untuk keperluan itu, dapatlah dikatakan bahwa angka 82,87% itu memperlihatkan banyaknya persentase penduduk Indonesia yang dapat menyerap dan memahami konsep-konsep dan informasi pembangunan yang disampaikan dengan bahasa Indonesia. Dari kelompok penduduk inilah sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan bangsa diharapkan dapat ditingkatkan.

Pemahaman sumber daya manusia yang potensial dan produktif dapat pula dikaitkan dengan peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang dan jenis pendidikan. Dunia pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang potensial dan produktif itu. Setelah memasuki lapangan kerja, mereka juga berhadapan dengan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang digunakan secara lisan atau tertulis dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam rangka pembangunan bangsa. Agar pembangunan itu berhasil seperti yang direncanakan, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai sarana komunikasinya perlu dikuasai secara mantap. Sampai pada tingkat tertentu bahkan tidak saja dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana pembuka jalan ke dunia kerja, tetapi juga dapat disimpulkan bahwa penguasaan bahasa Indonesia seseorang akan berbanding sejajar dengan bidang tugas atau pekerjaan yang terbuka bagi yang bersangkutan.

4. Bahasa Indonesia dan Pengembangan Iptek

Uraian di atas menyiratkan bahwa interaksi antara bahasa Indonesia pada satu pihak, dan gerak serta laju pembangunan bangsa pada pihak lain, harus memperlihatkan

kan adanya keseimbangan. Keseimbangan itu mengandung arti bahwa gerak dan laju pembangunan yang berlangsung dinamis itu harus pula diimbangi oleh upaya pengembangan bahasa Indonesianya itu sendiri.

GBHN 1993 menyebutkan iptek sebagai salah satu asas pembangunan nasional yang perlu diperhatikan. Kalau asas ini dihubungkan dengan masalah sumber daya manusia, maka implikasinya ialah bahwa sumber daya manusia itu mutunya harus diukur berdasarkan tingkat penguasaannya terhadap iptek. Penguasaan iptek itu pada gilirannya harus pula diimbangi oleh penguasaan bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangannya.

Kalau dalam hubungannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang perlu diperhatikan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dalam hal pengembangan iptek perhatian itu hendaknya dipusatkan pada bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bahasa asing. Pengaitan dengan bahasa asing itu sekaligus menggambarkan kenyataan bahwa konsep-konsep iptek modern, sebagaimana yang dimaksudkan oleh GBHN 1993, pada umumnya berasal dari dunia barat dan, oleh sebab itu, masih tertulis dalam bahasa asing.⁷

Sehubungan dengan pemanfaatan dan kemungkinan pengembangannya, buku-buku atau tulisan-tulisan tentang iptek modern yang masih diungkapkan dalam bahasa asing haruslah diupayakan penyebarluasannya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, mengusahakan agar dalam bahasa Indonesia juga tersedia perangkat peristilahan yang menyangkut bidang iptek tersebut. Cara yang disebutkan pertama akan sangat bergantung pada hasil kerja cara kedua. Artinya, penerjemahan buku-buku iptek ke dalam bahasa Indonesia hanya dapat dilakukan kalau perangkat peristilahan itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, upaya yang perlu dilakukan agar pengembangan bahasa Indonesia seimbang dengan gerak dan laju pembangunan di bidang iptek ialah penyusunan dan pembakuan istilahnya. Kalau perangkat peristilahan ini sudah tersedia secara memadai, tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia belum mampu berfungsi sebagai bahasa iptek. Bahkan, terlepas dari masalah peristilahan itu, bahasa Indonesia sebagai suatu sistem komunikasi sudah mantap untuk digunakan sebagai sarana pengungkap segala macam pikiran dan perasaan dengan berbagai nuansanya, termasuk konsep-konsep yang rumit sekalipun. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus tetap dibina dan dikembangkan agar menjadi bahasa modern yang ilmiah, indah dan lincah, serta kaya kosakatanya. Kekayaan kosakata ini mencakupi pula kosakata khusus yang lazim disebut istilah.

Penyusunan dan pembakuan istilah bidang iptek hendaknya dilakukan oleh para ahli di bidang yang bersangkutan bersama-sama dengan para ahli bahasa. Cara yang seperti inilah yang selama ini ditempuh oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam rangka pemerikayaan kosakata bahasa Indonesia, termasuk dalam hal penyediaan perangkat peristilahan di bidang iptek.⁸

Dengan demikian, kegiatan itu mutlak dilakukan, dan bahkan harus lebih ditingkatkan, dengan melibatkan sebanyak-banyaknya para ahli di bidang/subbidang ilmu yang bersangkutan. Selain itu, penerbitan dan pemasaran daftar dan kamus istilah yang ditujukan kepada berbagai kelompok pemakai juga perlu mendapat perhatian utama. Para ahli dari berbagai perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, kalangan profesi, dan bahkan mereka yang bergerak dalam bidang industri dan niaga seyogianya sama-sama memikul beban tanggung jawab demi pemantapan peran bahasa Indonesia dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek.

6. Bahasa Indonesia dan Pembinaan Kehidupan Budaya Bangsa

Dalam rangka pembangunan bangsa yang memberikan penekanan pada pengembangan iptek, hal yang berkenaan dengan pembinaan kehidupan budaya bangsa juga perlu diperhatikan. Hal itu sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah digariskan, yaitu "mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual". Tujuan itu secara tersirat mengamanatkan adanya keseimbangan antara pembangunan di bidang materiil dan pembangunan di bidang spiritual. Pembinaan budaya bangsa termasuk ke dalam pembangunan di bidang spiritual.

Salah satu aspek budaya bangsa yang telah disebutkan pada makalah ini ialah jati diri dan sistem nilai yang bercorak nasional. Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, dapat dikatakan bahwa peran bahasa Indonesia dalam pembinaan jati diri dan sistem nilai yang bercorak nasional itu pada gilirannya dapat juga ditafsirkan sebagai pembinaan kehidupan budaya bangsa. Kalau bahasa Indonesia tidak dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai alat komunikasi masyarakat bangsa, maka pertahanan kebangsaan dalam bentuk identitas dan sistem nilai itu akan makin rapuh. Bahasa Indonesia akan makin kehilangan daya rekatnya sebagai alat pemersatu.

Dalam konteks pembinaan kehidupan budaya bangsa ini, interaksi yang perlu diperhatikan tidak saja antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi juga antara bahasa Indonesia dan bahasa asing.⁹ Dalam hubungannya dengan bahasa daerah, pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang kebudayaan harus dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang puncak-puncak kebudayaan daerah yang didasari oleh nilai budaya daerah yang luhur. Persentuhan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah akan mengakibatkan dicorakinya kebudayaan nasional oleh ciri-ciri budaya daerah. Sebaliknya, persentuhan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing (lihat juga Catatan 9a dan 9c) akan membuat kebudayaan nasional itu agak bercorak mondial.

Berdasarkan kedua kecenderungan itu, bahasa Indonesia yang berperan dalam pembinaan budaya bangsa harus menampilkan diri, baik dalam sistem ketatabahasaannya maupun dalam kenyataan pemakaian bahasanya, sebagai filter yang akan menjaga keutuhan identitas dan sistem nilai yang bercorak nasional itu. Untuk itu, sejauh menyangkut pembinaan dan pengembangan bahasa, bahasa daerah dan bahasa asing harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memantapkan sistem dan pemerayaan kosakata bahasa Indonesia. Hal itu berarti bahwa unsur-unsur yang berasal dari bahasa

daerah dan bahasa asing itu, seperti yang telah dikemukakan, haruslah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

6. Penutup

Seberapa jauh pandangan dan harapan yang telah dikemukakan di atas, sehubungan dengan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, pengembangan iptek, dan pembinaan budaya bangsa, hal itu sepenuhnya akan terpulang pada masyarakat pemakainya secara keseluruhan. Sementara itu, yang perlu ditambahkan pada bagian akhir makalah ini ialah bahwa upaya apa pun yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa haruslah didasarkan pada perencanaan bahasa yang telah digariskan secara nasional.

Sebagai akibat dari begitu kompleksnya jaringan masalah kebahasaan di Indonesia karena adanya persentuhan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada satu pihak, dan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing pada pihak yang lain, ditambah pula dengan tuntutan agar bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan, maka perencanaan bahasa itu tidak semata-mata didasarkan pada eksistensi bahasa Indonesia sebagai sistem fonologi, gramatikal, dan semantis, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor nonkebahasaan seperti politik, pendidikan, iptek, kebudayaan, dan ekonomi.

CATATAN

1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda itu berbeda dari ikrar pertama dan kedua, yang masing-masing menyatakan *pengakuan* terhadap tanah air yang satu dalam (tanah air Indonesia) dan terhadap bangsa yang satu (bangsa Indonesia). Sehubungan dengan bahasa Indonesia, formulasi ikrarnya bukan berupa pernyataan pengakuan terhadap bahasa yang satu (bahasa Indonesia), melainkan berupa pernyataan *tekad* untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal itu berarti bahwa bahasa-bahasa yang lain di luar bahasa Indonesia, yaitu bahasa-bahasa daerah, tetap diakui keberadaannya. Hal itu makin lebih dipertegas oleh penjelasan Pasal 36, UUD 1945, yang menyebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara secara baik oleh rakyatnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.
2. Bertambahnya kosakata bahasa Indonesia itu jelas terlihat kalau, misalnya, kamus-kamus bahasa Indonesia yang terbit pada tahun '50-an dibandingkan dengan kamus bahasa Indonesia yang mutakhir seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Bahkan, KBBI edisi II saja sudah memuat 72.805 kata. Hal ini berarti bahwa KBBI edisi II bertambah dengan 10.000 lebih kosakata baru karena KBBI edisi I hanya memuat 62.116 kata.
3. Digunakannya kata-kata seperti *radio*, *televisi*, *kalkulator*, dan *komputer* dalam bahasa-bahasa daerah jelas memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia turut memperkaya bahasa daerah karena keberadaan kata-kata tersebut dalam bahasa daerah tidak diperoleh secara langsung dari bahasa asingnya, tetapi pasti melalui pemakaiannya dalam bahasa Indonesia.
4. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, masih terdapat 27.005.488 orang (17,13% dari keseluruhan penduduk usia 5 tahun ke atas yang berjumlah 157.924.324 orang) yang tidak/belum dapat berbahasa Indonesia. Angka buta bahasa Indonesia ini cukup menarik kalau dihubungkan dengan penduduk Indonesia yang masih miskin yang jumlahnya juga $\pm$ 27 juta. Persoalannya ialah apakah betul ada korelasi antara buta bahasa Indonesia dan kemiskinan. Hal ini merupakan masalah yang perlu diteliti secara khusus.
5. Lihat GBHN 1993.
6. Kalau angka 15,07% itu dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1980 tentang kasus yang sama yang hanya memperlihatkan angka 11,93%, kenaikan angka tersebut menggembirakan karena memperlihatkan bertambahnya penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, terlihat adanya penurunan dalam hal pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari 50,44% (sensus 1980) ke 38,08% (sensus 1990). Tampaknya ada hubungan yang timbal balik antara bertambahnya penutur bahasa Indonesia dan berkurangnya penutur bahasa Jawa itu. Khusus mengenai menurunnya angka persentase penutur bahasa Jawa, dapat dikemukakan semacam hipotesis bahwa generasi muda kelompok etnis Jawa, terutama yang tinggal di wilayah perkotaan, memperlihatkan kecenderungan untuk menghindarkan diri dari pemakaian bahasa Jawa sebagai akibat, antara lain, dari adanya tingkat-tingkat tutur pada bahasa daerah itu. Akibatnya, mereka lebih suka menggunakan bahasa lain yang lebih 'demokratis', yakni bahasa Indonesia. Kemungkinan penyebab lainnya ialah perbedaan kelompok etnis kedua orang tua mereka. Hipotesis ini perlu dibuktikan melalui penelitian.
7. Tidak semua konsep iptek menggunakan bahasa asing. Dalam hal iptek 'tradisional' yang menyangkut teknologi pembuatan batik atau keris, misalnya, konsep dalam bidang tersebut pasti diungkapkan dengan menggunakan kata/istilah bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Jawa.

8. Dalam penyusunan dan pembakuan istilah ini sejak tahun 1972 Indonesia bekerja sama dengan Malaysia melalui wadah kerja sama kebahasaan MBIM (Majelis Bahasa Indonesia—Malaysia). Dalam perkembangannya, wadah itu berubah menjadi Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam—Indonesia—Malaysia) karena sejak tahun 1985 Brunei Darussalam ikut bergabung sebagai anggota dan Singapura sebagai peninjau. Dalam rangka itu, pihak Indonesia telah menerbitkan ± 30 kamus istilah dan 4 daftar istilah komprehensif masing-masing untuk bidang ilmu kimia, fisika, matematika, dan biologi. Selain itu, menurut Johannes (1988), pada tahun 1942—1945 pernah pula ada satu badan khusus yang menangani istilah, yaitu Komisi Bahasa Indonesia.
9. Mengenai bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing ini GBHN 1993 dalam sektor kebudayaan mengemukakan sebagai berikut.
 - a. Pembinaan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian bangsa. Penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Pengembangan bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan melalui upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi sarana pengungkap cipta, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra termasuk bacaan anak yang berakar pada budaya bangsa, serta penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan untuk memperkaya bahasa, kesusastraan, dan pustaka Indonesia.
 - b. Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media.
 - c. Kemampuan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain di segala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Harsja W. 1981. "Bahasa Indonesia and the Indonesian Nation". Dalam Amran Halim (Ed.). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*: 357-376. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Biro Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk Tahun 1980*.
- Biro Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Sosok, Pokok, Tokoh: Dua Dasawarsa Kerja Sama Kebahasaan MABBIM*.
- Eastman, Carol M. 1991. *Language Planning*. San Francisco: Chandler & Sharp Publishers.
- Edwards, John. 1985. *Language Society and Identity*. Oxford: Blackwell.
- Halim, Amran. 1981. "Language, Education and Nation Building". Dalam Amran Halim (Ed.). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*: 329-337. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Johannes, Herman. 1988. "Usaha Mencari Istilah Ilmiah Indonesia". Dalam Adjat Sakri (Ed.): 130-142. *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Ketetapan-Ketetapan MPR-RI dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Salim, Emil. 1988. "Membangun Bahasa Pembangunan". Makalah Kongres Bahasa Indonesia IV.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000
Pemakalah : Hasan Alwi
Pemandu : Hunggu Tadjuddin Usup
Pencatat : Sugiyono
Lustantini Septiningsih

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Mursal Esten, Universitas Bung Hatta

Makalah ini amat penting sekali. Ada apa dengan tahun 2000? Mengapa memilih tahun 2000? Malaysia, misalnya, memilih 2020. Kalau memilih tahun 2000, bagaimana sebenarnya prediksi pemakalah tentang tahun ini? Apakah ini sudah eranya iptek di Indonesia? Dominasi, misalnya, etnik yang ada atau pergulatan bagaimana masing-masing etnik memberi kontribusi terhadap wawasan kebangsaan sudah selesai pada tahun 2000 ini. Kalau prediksi dan deskripsi tahun ini sudah dijelaskan, barangkali di sanalah kita dapat menempatkan bagaimana peranan dan kedudukan bahasa Indonesia pada tahun 2000 itu. Mohon pemakalah menjelaskan ini sebab saya kira memang ini topik yang sangat penting bagi hari depan, bagi eksistensi bahasa Indonesia.

Makalah ini juga masih berbicara tentang puncak-puncak kebudayaan Indonesia. Sering orang menganggap bahwa puncak-puncak kebudayaan Indonesia adalah yang paling khas dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Menurut hemat saya, puncak-puncak kebudayaan daerah itu adalah nilai-nilai budaya yang bisa diterima oleh suku-suku yang lain. Kalau anggapan itu diterima kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia menjadi semakin jelas. Akan tetapi, kalau puncak-puncak kebudayaan Indonesia itu kita maksudkan sebagai satuan yang paling khas itu susah diterima. Jadi, penafsiran tentang puncak-puncak kebudayaan ini saya kira juga perlu didudukkan dalam makalah ini sehingga topik yang membicarakan bahasa Indonesia menjelang tahun 2000 bisa lebih jelas.

Jawaban:

Penanya pertama memang menggugat tema ini. Mengapa bahasa Indonesia tahun 2000? Ada apa? Kita harus menyadari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pun masih harus kita perhatikan. Akan tetapi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang saya uraikan tadi sekurang-kurangnya lima dalam kehidupan pemerintahan dan negara, sebagai bahasa pengantar pendidikan, sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana iptek dan sarana pengembangan bangsa harus terus-menerus kita perhatikan. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu ada di antara kelima peran-peran itu harus kita perhatikan

karena di dalam rangka melaksanakan ini harus berpedoman pada GBHN dan PJP II merupakan tahap lepas landas. Jadi, kalau dikatakan menjelang abad ke-21, misalnya, sebelum abad ke-21 tiba, sebelum tahun 2001 itu kita masih akan melaksanakan forum seperti ini karena Kongres Bahasa Indonesia akan diadakan lima tahun sekali. Lima tahun sesudah 1993 adalah 1998.

Apa yang ditanyakan bahwa wawasan kebangsaan ini harus terus-menerus kita upayakan, saya kira tadi saya sudah menyinggungnya. Dalam rangka menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, waktu saya membicarakan interferensi tadi, timbul masalah yang lebih besar (masalah nasional) sebagai akibat dari kedudukan di antara kita yang bilingual ini. Apakah hal itu juga berdampak dengan kedudukan kita sebagai manusia yang bikultural. Tampaknya hal ini harus masih dikaji ulang karena kecenderungan-kecenderungan itu sering dipertanyakan. Tampaknya ini masih belum karena bahasa ini belum didukung sepenuhnya oleh dwibudaya, dwikultural ini tadi.

Masalah yang ketiga soal puncak-puncak kebudayaan, saya tidak menyodorkannya sebagai suatu substansi yang perlu diperhitungkan dalam rangka ini, tetapi saya menyinggung ini dalam rangka peran bahasa Indonesia antarbudaya daerah sendiri. Sering disebut, sering dibicarakan oleh budayawan, para seniman bahwa budaya yang satu dan budaya yang lain dalam zaman "keterbukaan" (maafkan saya menggunakan kata ini dalam tanda petik) itu harus ada suasana yang dapat memungkinkan budaya yang satu dengan budaya yang lain saling menyapa. Kemungkinan saling menyapa ini hanya dapat dilakukan. Dalam hal ini menggunakan bahasa Indonesia untuk tampil menampilkan peranannya sebagai pemersatu dalam, paling tidak, saling mengenal kebudayaan daerah itu sendiri. Tidak mungkin budaya kelompok etnis A diperkenalkan kepada kelompok etnis yang lain dengan menggunakan bahasa daerah kelompok A yang bersangkutan. Pasti harus dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, saya menyinggung soal ini dalam rangka peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Terima kasih.

2. Pertanyaan: D. Edi Subroto, Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret

Menurut pengamatan saya jarak antara bahasa Indonesia baku dan nonbaku itu semakin jauh karena bahasa Indonesia sehari-hari yang bersifat lisan itu banyak diwarnai dengan dialek Jakarta. Ini tampak pada orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Kalau mereka diajar tentang bahasa Indonesia, begitu mereka keluar, dia mengalami kendala untuk memahami bahasa Indonesianya orang kebanyakan. Dalam hal ini, bagaimana sikap dan upaya Pusat Bahasa untuk menangani masalah ini karena saya kira nanti akan berdampak yang sangat luas.

Kemudian, satu hal lagi yang saya kira sangat strategis ialah pemekaran dan pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Saya lihat sehari-hari, semakin tampak dengan jelas dominasi bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai orang Jawa, barangkali saya suka, tetapi sebagai orang Indonesia, saya merasa bersedih. Oleh karena itu, barangkali di Pusat Bahasa perlu dibentuk Tim Pakar pembinaan dan pemekaran kosakata bahasa Indonesia. Misalnya, sudah ada kata *efektif* dan *efisien*,

sudah ada *bertepatan guna* dan *berdaya guna*, mengapa harus juga ditampilkan *sangkal* dan *mangkal*. Ini saya kira perlu ada pembinaan agar lebih efektif. Saya kira itu saja. Pada pikiran saya, bagaimana sikap Pusat Bahasa dalam mengadakan pemekaran dan pengembangan kosa kata bahasa Indonesia.

Jawaban:

Makin menjauhnya antara bahasa Indonesia baku dan nonbaku bukan merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, perlu dirisaukan. Akan tetapi, sebaliknya, harus kita syukuri karena menggambarkan bahwa ragam bahasa Indonesia itu begitu banyak, begitu bervariasi, begitu kaya. Anda mengambil contoh orang asing yang belajar bahasa Indonesia di negerinya yang pada saat datang ke Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia karena yang dipelajarinya adalah bahasa Indonesia ragam baku, ragam resmi, yang serba dilihat dari tata kalimat; kalimatnya yang lengkap memperlihatkan unsur-unsur yang dapat diidentifikasi sebagai subjek, predikat, dan seterusnya. Pada saat datang ke Indonesia mereka menghadapi kenyataan bahasa Indonesia lisan sangat jauh berbeda dengan bahasa Indonesia yang mereka pelajari. Dalam hal ini, barangkali, ragam bahasa Indonesia lisan ini dicoraki oleh pemakaian yang bermacam-macam yang ditentukan oleh lingkungan masyarakat penuturnya, kelompok profesi penuturnya, usia penuturnya, dan macam-macam faktor yang lain. Oleh karena itu, sikap Pusat Bahasa selama ini yang dimaksudkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahwa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa, (itu yang dipelajari oleh orang asing), tetapi yang baik adalah yang sesuai dengan konteks pemakaian. Saya tidak ingin menggurui, tetapi mengingatkan kita semua bahwa yang baik itu sekurang-kurangnya didukung oleh ketiga alat ukur:

Pertama, konteks pemakaian, seharusnya resmi atau tidak resmi. Antara resmi dan tidak resmi ini ada gradasi yang begitu banyak.

Kedua, dengan siapa kita berbicara (kalau menggunakan bahasa Indonesia lisan), kepada siapa kita menulis (kalau kita menggunakan bahasa Indonesia tulis) dan apa yang dibicarakan. Selama ketiga hal ini dipenuhi, selama itu pula pemakaian bahasanya baik. Jadi, sikap Pusat Bahasa adalah mengimbau agar di dalam menggunakan bahasa Indonesia sehubungan dengan komentar begitu banyaknya kosakata bahasa daerah tertentu yang bagi Anda sebenarnya merupakan satu keuntungan, tetapi ingin saya ulangi yang saya katakan tadi karena kalau kita menjadi pemuda masyarakat, kalau kita menjadi pejabat yang sering berbicara di depan umum hendaknya cermat-cermatlah berbahasa. Jangan sampai terjadi soal interferensi seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau itu, porsinya tidak terlalu banyak, pertama yang diajak bicara tidak akan memahami; kalau tidak memahami berarti komunikasi tidak berlangsung; dan kalau komunikasi tidak berlangsung, bahasa tidak berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi alias mubazir. Yang kedua, kalau itu terjadi akan mengganggu keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini sudah kita bina. Terima kasih atas usul yang kedua; saya pikir itu usul mengenai pemekaran kosakata itu.

3. **Pertanyaan:** Gazali Dunia, Fakultas Sastra Universitas Nasional

Ketika membaca judul ini, saya tergamang. Tergamang itu ialah berdiri di tempat tinggi melihat ke bawah. Tapi, saya tidak di tempat tinggi, kita sama-sama berada dalam lembar bahasa. Dalam makalah Saudara, Saudara menyinggung mengenai iptek dan sebagainya. Kemarin, ketika saya diwawancarai oleh wartawan *Republika*, saya katakan, "Jadikanlah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini satu lembaga raksasa, khusus untuk penerjemahan, sebab sejarah telah mendidik kita bahwa bangsa Jepang maju justru karena penerjemahan. Lalu, timbul pertanyaan saya, "Mampukah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini menerjemahkan 10.000 buku setahun umpamanya?" Dan, kalau itu bukan beban Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sebenarnya beban pemerintah. Jadi, yang ingin saya tanyakan kepada Saudara pemberi makalah adalah program yang dibuat oleh Pusat Bahasa ini untuk penerjemahan masa depan, terlepas pada angka 1988.

Jawaban:

Sejauh menyangkut makalah yang saya sampaikan tadi, penerjemahan buku-buku iptek yang saya katakan adalah penerjemahan pada akhirnya tidak dapat dilakukan kalau istilahnya belum ada. Jadi, pembakuan dan penyusunan istilah merupakan satu hal yang perlu kita tempatkan pada prioritas pertama. Satu hal yang tidak perlu ditawar-tawar lagi. Yang sudah dilakukan oleh Pusat Bahasa mengenai penerjemahan sudah saya laporkan kemarin. Jadi, saya tidak ingin mengulangi karena terbatasnya waktu.

4. **Pertanyaan:** J.D. Parera, IKIP Jakarta

Bahasa Indonesia menjelang tahun 2000 sangat menarik. Saya mengharapkan tadi, Saudara pemakalah akan memberikan ciri-ciri masyarakat tahun 2000 dan bagaimana kita membina bahasa Indonesia ini. Saya hanya menambahkan satu saja, yaitu masyarakat Indonesia menjelang tahun 2000 adalah masyarakat yang harus memiliki disiplin yang tinggi. Dalam hal ini kita mempunyai tugas tentang disiplin berbahasa. Disiplin berbahasa itu menggambarkan disiplin kita berpikir. Semua yang kita katakan ini terpulang kepada kedisiplinan kita. Disiplin lalu lintas sama saja dengan disiplin berbahasa. Akan tetapi, disiplin berbahasa janganlah ditafsirkan hanya satu-satunya jalan. Kalau kita mau menyebarang jalan, ada banyak penyeberangan. Di dalam disiplin berbahasa, Pusat Bahasa memberikan kemungkinan-kemungkinan penyeberangan itu. Jangan hanya mengatakan "ini yang baku". Baku itu banyak sekali. Banyak jembatan penyeberangan. Menjelang tahun 2000, kita tidak usah berusaha mencerdaskan atau mengusahkan 27 juta orang berdisiplin berbahasa, cukup 2 juta pemimpin yang sudah berdisiplin berbahasa. Jadi, mungkin dalam lima tahun ini target kita hanya 2 juta orang saja. Jangan banyak-banyak, percuma itu.

Yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan disiplin kita ini. Disiplin ini harus dimulai dari pusat-pusat disiplin. Salah satu pusat disiplin itu adalah Pusat Bahasa, untuk bidang bahasa. Jadi, kita, misalnya, mendisiplinkan kaidah-kaidah, mendisiplinkan pemakaian kata. Jadi, saya kira tugas Pusat Bahasa sekarang ini adalah membuat disiplin-disiplin berbahasa itu dalam rangka menampung kemajuan teknologi abad ke-21 atau menjelang tahun 2000. Sekian dan terima kasih.

Jawaban:

Disiplin yang tinggi memang akan merupakan tidak saja ciri masyarakat tahun 2000, tetapi sebenarnya dari sekarang. Kalau itu dihubungkan dengan soal bahasa, disiplin berbahasa, antara lain, ditandai oleh kecermatan berbahasa. Di antara kita sendiri tampaknya masalah kecermatan berbahasa ini perlu dikaji ulang karena kalau dipersilakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bertanya, misalnya, mukadimahnya terlalu panjang, pertanyaannya pendek sekali. Ini jelas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak digunakan dengan cermat. Mana bahasa yang pengantarnya tidak perlu diucapkan karena itu sudah sama-sama dimaklumi. Hal lain-lainnya akan kami perhatikan, kami sudah berusaha membedakan bahasa yang baku dan tidak baku. Kalau kita perhatikan bahwa kamus yang seharga itu, memang ada catatan-catatan, label-label mengenai itu. Kalau bahasa itu digunakan sebagai yang tidak baku, diberi label cak atau dalam percakapan.

5. Pertanyaan: Farid On, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

Pak Hasan Alwi yang saya hormati, biasanya kami di Malaysia kalau ditanya apakah bahasa Melayu ini bisa menjadi bahasa besar dunia, saya selalu katakan sudah pasti, sebab dari segi bilangan penuturnya saja, kita selalu sebut bilangannya itu hampir 200 juta. Ini ialah 180 juta dari Indonesia, dan kira-kira hampir 15 juta dan beberapa juta yang lain dan Brunei dan Malaysia. Jadi, tadi Pak Hasan menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri walaupun ada 80% yang dapat berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tetapi hanya 15% yang menggunakan bahasa Indonesia untuk penggunaan setiap hari. Dan, saya duduk bersebelahan dengan Pak Amran Halim, dan saya menanyakan apakah beliau termasuk 15% itu. Saya terperanjat kaget, beliau mengatakan bahwa beliau juga tidak, sebab beliau berbicara bahasa Melayu-Palembang, jadi, bukan bahasa Melayu Indonesia. Kalau tadi saya merasa besar hati bahwa bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini, bisa menjadi bahasa dunia dengan bilangan penutur yang begitu besar, tetapi kok sekarang ini cuma 15% di Indonesia yang berbicara bahasa Indonesia setiap hari. Jadi, saya ingin mengetahui siapa ini yang 15% ini.

Jawaban:

Profesor Farid On ini mewakili Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, semacam Pusat Bahasa Malaysia. Akan tetapi, tampaknya lebih luas karena

sekurang-kurangnya di Dewan Bahasa dan Pustaka itu ada pusat bahasanya, ada pusat perbukannya, dan ada balai pustakanya. Sehubungan dengan 15% angka bahasa Indonesia, saya tidak dapat memberikan jawaban yang terlalu rinci karena berdasarkan angka-angka perbandingan dari ke-27 propinsi, ternyata propinsi yang ada di pulau Jawa 15% dalam hal pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Contoh, Jawa Tengah 1,47%; Jawa Timur 2,68%, DI Yogyakarta 3,08%; Jawa Barat 15,08% (lebih tinggi 0,01% dari rata-rata nasional). Apa ini artinya? Artinya, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari bahasa yang memang dipelihara oleh masyarakat penuturnya betul-betul digunakan. Bahasa daerah yang kuat penduduknya banyak menjadi sarana pendukung utama kebudayaan daerah yang bersangkutan dan digunakan juga dalam sarana tertulis. Jadi, ada jaminan bahwa satu propinsi yang angka persentase pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari rendah, itu tidak berarti bahwa pada kenyataannya tingkat pemakaian bahasa Indonesianya juga rendah karena tingkat-tingkat yang ada di dalam bahasa daerah itu sendiri, kecuali Jakarta. DKI memang memperlihatkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu 93,11% Jadi, jangan dirisaukan mengenai angka-angka persentase itu karena kita harus melihat juga dari imbalan bahasa daerah itu.

Saran/Usul: S. Tomo, RRI Jakarta

- 1) Undang-undang wajib berbahasa Indonesia
- 2) Setiap pertemuan baik nasional maupun internasional supaya menggunakan bahasa Indonesia.

BAHASA INDONESIA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Boediono

Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Bahasa Indonesia di masa depan tidak dapat dilepaskan peranannya dari tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua, amanat Ketetapan MPR-RI Nomor II, Tahun 1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu: "... mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin ...".

Perwujudannya mempunyai kaitan erat dengan Titik Berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang diletakkan pada, "... bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia ...". Oleh karena itu, peranan bahasa Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia harus dibahas secara serempak atau simultan dengan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Peranan bahasa Indonesia sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari kemajuan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan ekonomi di sekelilingnya.

Pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan umum yang telah dilakukan Pemerintah dalam periode 1965 hingga 1990 telah berhasil menempatkan Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menciptakan "keajaiban" di Asia Timur.* Delapan negara yang termasuk dalam Ekonomi Asia Berprestasi Tinggi atau *Highperforming Asian Economies* adalah (1) Jepang; "Empat Macan" (Hongkong, Korea Selatan, Singapore, dan Taiwan) dan (2) Cina; tiga negara industri baru atau *Bewly Industrializing Economies (NIE)* di Asia Tenggara, (Indonesia, Malaysia, dan Thailand).

Selama 25 tahun terakhir ini, sejak 1965 hingga 1990, ekonomi di 23 negara Asia Timur telah tumbuh lebih cepat dari negara-negara di kawasan lain. Pertumbuhan yang pesat ini tampaknya hanya disebabkan oleh keajaiban yang terjadi dalam delapan "*High-Performing Asian Economies*" (HPAE) yang secara serentak telah mampu meningkatkan pendapatan per kapita mereka secara mantap, yang hampir 6 persen setiap tahun. Dalam periode tersebut, pendapatan per kapita negara-negara Timur Tengah dan Mediteranian tumbuh dengan kecepatan kurang dari 2 persen, negara-negara Afrika Sub-Sahara dapat dikatakan tidak tumbuh, negara-negara OECD tumbuh sedikit lebih besar dari 2 persen, dan ekonomi di Amerika Latin hanya

tumbuh hampir 2 persen. Ini berarti bahwa generasi berbagai industri di negara-negara tersebut telah ikut berperan serta dalam percaturan dunia. Keberhasilan ini bukan hanya dirasakan oleh sekelompok elite tertentu, melainkan telah menjangkau penduduk secara keseluruhan. Belum pernah terjadi sebelumnya sekelompok negara yang beraneka ragam tumbuh sedemikian cepat dalam waktu sedemikian lama.

Dari segi pemerataan pendapatan, diukur dengan mengamati perubahan koefisien GINI, dalam periode yang sama, delapan negara HPAE yang telah mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita pesat tersebut juga menikmati pemerataan pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang lainnya (kecuali Korea, Taiwan, China, yang mulai menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang semakin baik). Negara-negara HPAE merupakan negara yang ekonominya menikmati tingkat pertumbuhan tinggi disertai tingkat ketidakmerataan (*inequality*) rendah. Jepang dan "empat macan" telah mengalami tingkat pertumbuhan paling tinggi dan sekaligus tingkat pemerataan paling merata. Proporsi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia telah menurun dari 56 persen pada 1960 menjadi 17 persen pada 1990.

Pertanyaan yang timbul adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan "keajaiban ekonomi" tersebut terjadi di negara-negara "superstar" Hongkong, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand? Ekonom tidak berhasil memberikan penjelasan yang memuaskan hingga sekarang. Menurut Bank Dunia, tidak ada resep sederhana yang dapat menjelaskan keberhasilan delapan negara HPAE dan tidak terdapat suatu model ekonomi Asia tunggal.

Secara garis besar, delapan negara HPAE tersebut mencapai prestasi tinggi karena telah membangun landasan secara benar (*getting the fundamentals right*). Delapan negara HPAE tersebut memiliki tiga karakteristik, yang secara tradisional biasanya dikenal dalam pertumbuhan ekonomi, berbeda dari negara sedang berkembang lainnya. Tingkat investasi tinggi, lebih dari 20 persen dari GDP secara rata-rata dalam periode 1960–1990, dan tingkat investasi swasta yang sangat tinggi, sejalan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia karena wajib belajar sekolah dasar dan sekolah menengah merupakan penyebab utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Keunggulan prestasi keberhasilan Asia Timur berpangkal dari kombinasi keberhasilan alokasi kapital kepada investasi yang cepat menghasilkan (*high-yielding investments*), dan pada kemampuan untuk mengimbangi teknologi negara maju.

Meskipun belum ada penelitian empirik tentang pertumbuhan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan kemajuan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia, kiranya tidak mudah untuk memikirkan secara hipotetis atau membayangkan bahwa keberhasilan di bidang ekonomi yang telah dicapai negara kita yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat kita tersebut sama sekali terlepas dari kemampuan penggunaan bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam proses kemajuan tersebut. Kemajuan-kemajuan tersebut di atas, setidaknya-tidaknya, tidak dapat dilepaskan dari kemampuan para pemikir pembangunan, pengamat pembangunan, dan pelaksana

pembangunan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemampuan para pemikir pembangunan untuk merumuskan pemikiran atau gagasan mereka ke dalam rumusan-rumusan yang teratur dan sistematis, baik secara lisan maupun tertulis, untuk dapat diperdebatkan dan dipahami oleh setiap pelaksana pembangunan pada segala lapisan masyarakat. Kemampuan para pengamat pembangunan untuk mengungkapkan hasil renungan, analisis, dan pengamatan mereka untuk menyempurnakan kelangsungan pembangunan nasional. Kemampuan para pelaksana pembangunan untuk menguraikan, menjabarkan, dan melaksanakan lebih lanjut gagasan dan hasil-hasil pengamatan pembangunan tersebut ke dalam langkah-langkah dan tindakan konkret di lapangan. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat digunakan untuk mewujudkan pemikiran menjadi kenyataan.

Perkembangan bahasa Indonesia dari sisi tuntutan gejala keperluan zaman sangat dipengaruhi oleh lingkungan perkembangan masyarakat, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemajuan iptek yang berlangsung di sekelilingnya, baik pada tingkat domestik maupun internasional. Kemajuan di berbagai bidang yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu Ekonomi Asia Berpretasi Tinggi harus ditunjang oleh pertumbuhan bahasa Indonesia yang memadai.

Dari sisi kemampuan penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai kaitan erat dengan mutu sumber daya yang menggunakannya. Upaya peningkatan sumber daya manusia supaya lebih bermutu, efisien, dan produktif memerlukan pertumbuhan bahasa Indonesia yang sejalan dengan keperluan itu. Baik di masa depan maupun dewasa ini, saling pengaruh antara kemajuan pembangunan nasional dengan kemajuan bahasa Indonesia tersebut menyebabkan pertumbuhan bahasa Indonesia itu sendiri agaknya perlu dipengaruhi secara sadar dan sistematis agar berlangsung sejalan dan sesuai dengan tuntutan tahap-tahap perkembangan zaman dan derajat kemampuan penggunaannya.

Pertumbuhan bahasa Indonesia pada tingkat nasional perlu diorientasikan pada penyebaran penggunaannya secara baik dan benar bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat internasional, pertumbuhan bahasa Indonesia diorientasikan pada peningkatan kemampuannya untuk menyerap dan mengembangkan kemajuan iptek yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan produktivitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan manusia.

CATATAN

- * Asia Timur terdiri atas ekonomi berpendapatan rendah dan menengah dari Asia Timur Tenggara dan Pasifik, termasuk Cina dan Thailand. Ekonomi berpendapatan rendah adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita US\$635 atau kurang pada 1991; ekonomi berpendapatan menengah adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita lebih dari US\$635 tetapi kurang dari US\$7.911 pada 1991. Perincian selanjutnya, pada pendapatan per kapita US\$2.555 pada tahun 1991, disusun antara ekonomi "berpendapatan menengah rendah" dan "berpendapatan menengah tinggi". Lihat Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Oxford University Press, Agustus 1993.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemakalah : Boediono
Pemandu : M. Alwi Dahlan
Pencatat : Suryo Handono
Kurniatri Resminingsih

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Zulkarnain, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Mengapa istilah yang disusun melalui kerja sama Mabbim tidak digunakan secara tepat di instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah, termasuk perguruan tinggi.

Jawaban:

Kita harus kembali pada kenyataan bahwa istilah-istilah yang telah disusun itu belum dikenal. Untuk itu, kita harus memasyarakatkan lebih dahulu istilah-istilah yang telah disusun, kemudian baru kita dapat menuntut pemakainya untuk menggunakannya secara cermat dan teratur.

2. **Pertanyaan:** Anton M. Moeliono, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Apakah dalam peningkatan mutu sumber daya manusia ada suatu keterbukaan sistem pembelajaran. Salah satu kemungkinan itu dengan memisahkan siswa dalam wajib belajar sembilan tahun, yaitu satu bagian hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, dan di bagian lain ada siswa yang dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Dalam bagian ini siswa diberi pelajaran bahasa Inggris.

Jawaban:

Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terbuka, tetapi tidak harus memisahkan siswa dalam dua bagian. Kita tidak perlu memisahkan pendapat bahwa bahasa Inggris lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia. Kita juga tidak perlu memisahkan interferensi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, yang penting bagaimana kita menyesuakannya dalam bahasa Indonesia.

Salah satu penyesuaian itu adalah mencari standar penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada sistem belajar sembilan tahun. Setelah itu, baru disesuaikan secara bertahap.

Pendapat: P.W.J. Nababan, IKIP Jakarta

Untuk mencapai peran bahasa Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia, yang berarti pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar, dalam kenaikan pangkat harus diadakan tes bahasa Indonesia. Di samping itu, perlu diupayakan bahwa dalam pengajaran di sekolah dasar tidak dikotori dengan bahasa Inggris.

Tanggapan:

Kita kembalikan dahulu pada tujuan dilakukannya ujian bahasa Indonesia. Jika tujuannya untuk pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tidak perlu melakukan ujian itu. Akan tetapi, justru pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang harus lebih dimasyarakatkan.

Penguasaan dua bahasa sekaligus pada seorang anak SD tidak akan mengacaukan pemakaian bahasanya. Yang harus ditingkatkan adalah penguasaan bahasa Indonesianya.

Pendapat: Nurhayati, Ujung Pandang

Mahasiswa asing yang tidak menguasai bahasa Indonesia sampai saat ini masih diperbolehkan mengikuti kuliah sehingga merepotkan para dosen. Apakah tidak mungkin diadakan tes bahasa Indonesia lebih dahulu. Bila sudah lulus baru diperbolehkan.

Tanggapan:

Pada dasarnya saya setuju, tetapi kita harus lebih dahulu menentukan standar penguasaan bahasa Indonesia yang diperlukan untuk perguruan tinggi.

Pendapat: Mahdin, SMP Negeri 2, Kendari

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari proses komunikasi menggunakan bahasa Indonesia.

Tanggapan:

Saya sepakat dengan pendapat itu, tetapi perlu juga dicari standar pemakaian bahasa Indonesia dalam komunikasi (pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar).

Pendapat: H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran, Bandung

Untuk mencapai masa depan bahasa Indonesia seperti yang kita idamkan dalam pengembangan sumber daya manusia, perlu diteliti kembali sistem pengajaran bahasa Indonesia di sekolah karena anak sekarang tidak diajarkan berbahasa (menggunakan bahasa). Mereka hanya dijejali dengan ilmu bahasa.

Tanggapan:

Memang sistem itu perlu diubah dengan memberikan waktu atau porsi penguasaan bahasa lebih banyak daripada ilmu bahasa, serta lebih ditekankan pada logika bahasa. Hal itu dapat dimulai pada siswa SLTP kemudian SLTA sehingga di perguruan tinggi tidak perlu diajarkan pemakaian bahasa.

Usul: Nn. J. Tetelepta, FKIP Universitas Pattimura

- 1) Agar semua guru bidang ilmu diberi pelatihan bahasa Indonesia.
- 2) Hendaknya pelatihan itu tidak hanya untuk guru SLTA, tetapi juga para dosen di perguruan tinggi.

BAHASA INDONESIA DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MODERN

B.J. Habibie

Menteri Riset dan Teknologi/Ketua BPPT

Saya bukan pakar bahasa, tetapi saya memanfaatkan bahasa itu untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Berkomunikasi yang baik bukan satu arah, tetapi dua arah. Hasil komunikasi tersebut bisa memberikan penilaian dan hasil pemikiran yang nilainya lebih tinggi daripada sebelum terlaksananya komunikasi tersebut. Itulah definisi bahasa yang saya kuasai. Bahasa yang saya kuasai adalah bahasa Indonesia. Kemarin malam saya diwawancarai oleh satu rombongan dari Jerman Barat yang dipimpin oleh Dr. Fomphier yang ditugasi oleh Helmut Köhl untuk memimpin industri-industri Jerman itu agar memikirkan masa depan dunia ini. Rombongan televisi tersebut datang dan mengubah ruang kerja saya menjadi studio. Setelah itu, terjadilah dialog antara Dr. Fomphier, saya, dan seorang ibu yang juga seorang dokter mengenai pengembangan sumber daya manusia, masa depan Indonesia, masa depan Circum Pasifik, masa depan pembangunan kerja sama Jerman-Indonesia, dan globalisasi seribu satu macam. Pembicaraan tersebut berlangsung satu jam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jerman. Itu adalah salah satu definisi bahasa yang lain dan itu merupakan suatu cara bagi saya untuk memberikan dan mendapatkan informasi. Setelah itu, diproses di dalam otak saya untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang Insya Allah nilainya lebih tinggi. Oleh karena itu, bukan sebagai pakar bahasa atau ahli bahasa, tetapi sebagai manusia biasa yang memanfaatkan bahasa itu, saya mau atau diperkenan memberikan pandangan. Kebetulan saya fasih berbahasa Indonesia, Jerman, Inggris, Belanda, dan sedikit Prancis, sedangkan anak saya, Ilham, lebih menguntungkan lagi karena ia dapat berbahasa Jerman, Indonesia, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Italia. Sekarang dia sedang mempelajari bahasa Arab karena dia mau berusaha mengerti Quran itu langsung dan tidak dari terjemahan dalam bahasa yang lain. Jadi, bahasa itu bagi saya dan bagi siapa pun juga adalah suatu cara untuk bisa mengerti pemikiran dan hasil pemikiran manusia itu.

Seorang guru besar tahun 60-an bernama Prof. Dr. Steinburg, sekarang sudah pensiun, ia menulis buku mengenai komputer. Dia menulis buku mengenai pengembangan komputer. Kita memiliki—saya mulai dengan bahasa—dan dapat berbahasa Indonesia dengan memanfaatkan alfabet a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan sebagainya. Dengan permutasi dari susunan huruf itu kita mengembangkan satu

bahasa. Bahkan, di dunia ini bahasa hasil permutasi begitu banyak huruf, Jerman tambah sedikit karena *u umlaute*-nya, *e*, *o* dan sebagainya tambah. Dengan permutasi tersebut timbullah bahasa-bahasa yang beraneka ragam, tetapi batu-batunya sama alfabet.

Begitu juga dengan angka. Kita memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 atau sepuluh angka. Dari permutasi sepuluh angka tersebut kita bisa menjelaskan angka minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Bahkan, kita dapat melaksanakan pemikiran dan pemanfaatan angka-angka itu, melalui perkalian dan sebagainya. Kurang lebih tiga ratus tahun yang lalu, waktu itu *lifeness* dalam matematika; matematika itu bahasa. Saya tidak melihat perbedaan antara seorang pujangga dan ahli bahasa karena mereka dapat membuat prosa yang begitu indah atau puisi yang begitu indah atau menggambarkan situasi dengan kata-kata yang begitu indah dan benar-benar bisa menggetarkan perasaan dengan memberikan respons mengenai lingkungannya. Bagi saya orang itu berbakat sama seperti manusia yang berbakat dalam menggambarkan kejadian fisik dengan ilmu pasti dan ilmu alam; menurut seluruhnya dalam persamaan-persamaan dalam ilmu pasti yang tinggi begitu kompleks dan bisa mengerti dan dimengerti. Perbedaan antara orang yang memanfaatkan bahasa ilmu pasti dan manusia yang menggambarkan situasi dengan memanfaatkan permutasi huruf dan angka-angka ialah dengan bahasa itu mendekati keadaan sebenar mungkin secara 80%. Akan tetapi, ilmu pasti itu secara matematik mendekati mungkin kebenaran eksakta untuk meneruskan kebenarannya pada generasi yang akan datang dengan kemungkinan 95% karena lebih eksak, tetapi tidak absolut eksak. Penyelesaian dan persamaan tersebut sulit sekali diselesaikan secara eksak. Oleh karena itu, dalam kaca mata saya seorang yang berbakat dan membuat teori-teori dalam aerodinamika, mekanika, dan termodinamika sangat peka seperti seorang pujangga yang kalau melihat sesuatu mampu menulisnya dengan kata-kata yang indah. Keduanya itu merupakan manusia yang berbakat, hanya realisasinya berbeda.

Saya memberikan contoh anak sendiri, Ilham. Ilham itu dapat berbahasa tujuh macam. Selain itu, Ilham mempunyai bekal doktor insinyur dalam konstruksi pesawat terbang. Akan tetapi, bukan itu saja, Ilham ketika berumur 7 tahun menjadi juara pertama dalam main piano yang diberikan *stainly* untuk seluruh Jerman. Dia mengadakan konser di hadapan dua ribu orang dan dapat hadiah. Umur sepuluh tahun dia juga menjadi nomor 1. Dia menjelaskan semua rahasianya adalah peka. Bahasa dan matematika itu sama karena keduanya merangsang otak manusia untuk berpikir dan memberikan kemampuan orang tersebut untuk memberikan ekspresinya. Contoh lain adalah anak saya yang kedua, yaitu Tariq. Dia saya didik untuk menyukai musik dan seni melalui bahasa.

Kembali kepada Prof. Steinburg tadi, saya katakan bahwa bahasa adalah permutasi dari huruf-huruf, sedangkan angka yang hanya sepuluh itu bisa memberikan kombinasi minus tak terhingga dan plus tak terhingga. Selain itu, angka dapat menghadapi perkalian dan sebagainya dan dilaksanakan sehingga timbul aljabar, matematika, dan aeromatematika.

Tiga ratus tahun yang lalu seorang yang bernama Booy dianggap sinting. Ia beranggapan, mengapa kita harus memanfaatkan sepuluh angka untuk bisa memberikan angka minus tak terhingga dan plus tak terhingga. Mengapa tidak hanya dua angka, misalnya 0 atau 1. Mengapa kita tidak bisa mempermuteasi dari 0-1. Itu juga memberikan informasi dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Dia dapat menyusun itu, kemudian dia ditanya oleh ilmuwan lainnya, kalau Anda bisa memberikan informasi apakah dengan 0 dan 1 itu Anda dapat pula melakukan operasi (*operation*) dan ekspresi dalam bentuk perkalian dan bahkan dalam bentuk apa saja dalam aljabar dengan informasi angka 0 dan 1. Buku-buku dia itu dikembangkan oleh orang lain sehingga lahir istilah Aljabar Booy. *Booy Algebra* terdiri atas hanya dua angka, yaitu 0 dan 1. Waktu itu mengapa harus memakai Booy, mengapa tidak memakai saja angka 0 sampai 10. Kalau Booy itu harus nomor 1, nomor dua 01, nomor tiga 001, makin lama makin panjang. Akan tetapi, paling panjang itu merupakan informasi kombinasi dari permutasi 01 dan paling panjang 16 digit yang dapat dia cakup seluruhnya dalam perkalian. Setelah itu *Booy Algebra* dilupakan selama 200-250 tahun, atau sampai terjadi Perang Dunia II. Waktu itu orang berlomba-lomba membuat senjata yang canggih. Dalam pengembangan senjata yang canggih tersebut, dia harus melaksanakan perhitungan-perhitungan yang ruwet sehingga tidak mungkin dengan tulisan saja. Akibat dari pengembangan itu lahirlah mesin komputer. Komputer yang paling baik dikembangkan ialah bukan yang biasa menggunakan 0-9, tetapi 0, atau 1. Kalau 0 misalnya saat sakelar dimatikan lampunya 0 kalau dinyalakan lampunya 1. Akibat hal itu dibuatlah komputer yang terdiri atas rentetan sakelar yang beroperasi (tet, tet, tet, tet) cepat sekali sehingga dia bisa melaksanakan perhitungan yang kompleks, seperti komputer sekarang ini atau disebut *biner system* dalam sains. Oleh karena itu, seluruh skenario pembangunan di dunia berubah. Hal itu juga berdasarkan pemikiran Booy, yaitu biner, nol, atau satu. Berdasarkan itu, telepon modern sekarang disebut ISDN (*Integrated System Dutch Network*). Telepon tersebut langsung bisa menghitung dengan persis berapa menit, detik, dan rekeningnya berapa. Hal itu karena adanya bahasa berdasarkan *Booy Algebra*. Saya menggarisbawahi soal bahasa. Super komputer atau apa pun sekarang itu dasarnya adalah biner 01 dan bahasa, karena, itu satu-satunya cara kita untuk mendapatkan informasi.

Booy Algebra berkembang terus dan kuncinya adalah memberikan informasi. Kode 01 sakelar adalah kalau mati 0 dan nyala 1 atau kalau saya mempunyai jaringan listrik kalau ada aliran listrik namanya 1 kalau tidak ada aliran listrik namanya 0.

Pada tahun 1947 lahirlah transistor. Transistor itu merupakan komponen di dalam radio. Karena transistor itu berupa tabung, radio akan panas kalau dipegang. Dengan terbentuknya transistor tabung yang dibuat menjadi kecil sehingga transistor dapat dimanfaatkan untuk mengetahui adanya listrik atau tidak ada listrik. Dulu misalnya sebesar buku ini hanya memiliki satu sakelar, kini menjadi 16 sakelar sebesar kuku. *Cips* sebesar kuku itu dapat dimasukkan kepadatan 16 juta sakelar. Sakelar itu kecil dan begitu padat satu sama lain dan untuk membuatnya menggunakan *high-technology* karena harus diatur dulu. Sakelar sebanyak 16 juta Sakelar itu tidak boleh berpotongan, kalau ada yang berpotongan mengakibatkan korsleting. Jadi, sebanyak

16 juta sakelar itu tidak boleh tidak ada yang berpotongan, agar terkendali. Kita akan mengalami kesulitan untuk merekayasanya apalagi membuatnya. Timbul pertanyaan mana batas-batasnya kepadatan sakelar itu. Prof. Steinburg mengatakan dibatasi oleh dua hal. Ia berpendapat tidak mungkin jarak antara sakelar satu dengan sakelar yang kedua menjadi lebih kecil daripada jarak dua atom. Dengan perhitungan-perhitungan demikian, maka sampailah pada teori yang mengatakan bahwa kepadatan itu sampai pada 150 juta sakelar dalam sebesar itu. Sekarang teknologi mengembangkan 64 juta ada yang mengatakan 256 juta sakelar. Akan tetapi, Steinburg menghitung limitnya dari mana. Dia langsung bertanya, "Andaikata manusia itu begitu hebat dan mau merekayasa otak manusia—otak Anda dan saya ini—dengan memanfaatkan teknologi yang paling canggih dengan kepadatan sakelar yang bisa dimanfaatkan dalam *Booy Algebra* tersebut, pertanyaan yang timbul berapakah besarnya volume otak manusia yang artifisial itu. "Dia menghitung dari kepadatan seribu satu macam itu akan menghasilkan bahwa otak manusia yang mau dibuat oleh manusia itu terdiri dari *caption* begitu padat dan disambung satu dengan yang lain. Jadi, kalau mau menandingi otak Anda besarnya sebesar dunia ini."

Di situlah terletak kebesaran Allah semakin mendalami ilmu pengetahuan, maka semakin meningkat imannya dan semakin meningkat kekuatannya akan kebesaran Allah tersebut. Saya menjelaskan ini karena saya sebagai seorang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan definisi bahasa sehingga kalau berhadapan dengan Saudara, saya berhadapan dengan dua super-super komputer, yaitu super-super komputer saya dan super-super komputer Saudara. Saya berhubungan dengan Saudara untuk mendapatkan data dan informasi untuk memasuki super komputer. Saya direkayasa dari *soft ware* kemudian dikembalikan untuk *trigger*. Setelah itu, kembali lagi pada data *a commulated* di dalam super komputer saya sehingga mengambil kesimpulan untuk kebijaksanaan demi menyelesaikan permasalahan.

Ada perbedaan antara super-super komputer yang direkayasa berdasarkan teknologi modern karena tidak mempunyai emosi, tidak mempunyai perasaan, tidak mampu mendapatkan inspirasi, mengembangkan visi, dan mengembangkan sistem dan mengembangkan *software*. Dia hanya bisa mencernakan data dan mengevaluasi data sesuai dengan sistem yang diberikan padanya dan dikonklusi. Akan tetapi, dia tidak mampu membaca konklusi. Itulah yang kita sebut komputer. Otak kita lebih dari itu dan merupakan super-super komputer karena kita dapat memanfaatkan emosi, memiliki dan bisa merekayasa sistem itu sendiri, dan mengembangkan sistem tersebut. Akan tetapi, hal itu timbul karena kita super komputer mengalami proses yang disebut *aging* sehingga lama-lama super komputer itu *storage* datanya rusak. Super komputer yang lain konsisten, tetapi 'gebleg' atau bodoh. Jadi, yang paling baik adalah kombinasi keduanya. Komputer yang lain dimanfaatkan untuk mengevaluasi data melalui *software*, sedangkan komputer yang lainnya dimanfaatkan hanya untuk berkonsentrasi pada sistem.

Saya tiap tahun pergi ke luar negeri, tiap dua tahun ke Eropa, satu tahun kemudian ke Amerika dan tiap kali saya berhubungan dengan pakar-pakar dan

berdiskusi ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia dari mancanegara. Dari salah satu pertemuan, mungkin 6 tahun yang lalu, di Jerman atau di Bonn saat hadir pada acara makan siang dengan pakar-pakar pemenang hadiah nobel dalam bidang biologi, biokimia, dsb. Mereka berkata "Pak itu dari suatu ilmu pengetahuan. Orang kalau masih muda seperti Ilham itu, dia detail, peka terhadap itu. Akan tetapi, kalau dia sudah mulai tua karena begitu banyak pengalamannya. Dia bukan peka dalam detail lagi karena itu dalam matematik *superratio* dia akan memberikannya pada yang lain. Akan tetapi, peka dalam sistem yang masuk ke dalam ruangan langsung tahu sistem yang begini, strukturnya begitu. Allah sangat hebat mengembangkan manusia yang mempunyai sifat demikian. Itu padahal dari percobaan-percobaan, seperti pada tikus, dsb". Selanjutnya, dia berkata "Pak kalau kita sudah tua kita lebih cepat menguasai sistem, tetapi kalau masih muda dia tidak menguasai sistem. Saya beri contoh Ilham, dia ahli konstruksi pesawat terbang seperti bapaknya juga. Kalau saya berbicara mengenai detail dengan Ilham, saya tidak punya waktu, saya katakan pada Ilham bahwa saya mempunyai keluhan begini. Coba kamu pakai super komputer kamu. Teori mana Pak. Teori-teori ini, selesai. "Dia mulai bekerja. Seminggu kemudian dia datang. "Benar Pak, tetapi detailnya masalah ini, karena dia masih muda. Apa bapaknya bisa begitu karena adanya penumpukan pengalaman yang masuk ke dalam sistem dan pengalaman itu tidak bisa dipelajari, tetapi harus dilalui. Manusia yang berumur 30 tahun, tidak mungkin mempunyai pengalaman 37 tahun, tidak mungkin, *it's not possible*.

Kembali kepada bahasa dari cara berpikir saya yang demikian, saya sangat mengharapkan bahwa bahasa dari super-super komputer itu yang rasional yang mempunyai emosi yang bisa memberikan visi. Bahasa itu harus bisa berkembang dan terus ditingkatkan efisiensinya dan produktivitasnya sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa memberikan informasi yang berkualitas tinggi dan padat. Saya melihatnya dari sudut sains. Akan tetapi, dari sains itu saya juga menghendaki informasi itu bukan saja membuat bibit unggul berupa tanaman atau membuat bibit unggul atau membuat pesawat terbang atau kapal atau membuat lukisan yang indah, tetapi bahasa dapat membuat sajak-sajak yang begitu indah, yang bisa dinikmati oleh orang. Bahasa yang dapat memanfaatkan permutasi dari a, b, c, d, dsb. itu sesuai dengan kebudayaan dan ekspresi dalam bentuk-bentuk huruf dsb. yang indah yang mengena perasaan manusia yang mendapat informasi tsb. Oleh karena itu, saya sebenarnya sangat mengharapkan agar setelah keluar pertemuan ini ada peningkatan arti dan pengertian kita, peranan bahasa di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bahasa tidak kita serahkan secara kebetulan, kalau itu yang terjadi namanya random secara acak-acakan atau *ngawur*. Akan lebih baik kalau kebijakan yang tidak membuat suatu revolusi, tetapi tetap melalui suatu evolusi yang kadang-kadang dipercepat, kadang-kadang tidak dipercepat, *an accelerated control evolution* di dalam mengembangkan bahasa untuk memberikan informasi dalam segala bidang, spektrum yang lebar antara sesama manusia.

Untuk mendapatkan itu, saya menyuruh mereka untuk merekayasa suatu industri yang *depend* rasanya ke mana dan di mana, *what system*. Saya membayangkan

bahwa perlu dibentuk suatu badan atau dewan apa namanya untuk pengembangan bahasa Indonesia yang di dalam dunia modern memanfaatkan segala macam teknologi yang cocok untuk mengikuti perkembangan perhubungan yang modern tsb. dan tanpa mengorbankan kebudayaan dsb.

Di dalam perkataan *bhineka tunggal ika*, kita sebenarnya memiliki ruang dan gudang yang besar dengan kosakata. Kata-kata indah, tetapi saya dan Anda belum tahu. Jumlah kosakata tersebut dalam kamus bahasa Indonesia mungkin ada 65 ribu. Akan tetapi, jumlahnya belum ada satu juta, atau mungkin tidak lebih dari seratus ribu. Jadi, kita sebenarnya harus membedakan antara dua sistem bahasa dari super komputer itu yang biasa disebut tata bahasa (*grammar*). Saya menyebut hal itu dengan sistem. Sistem itu sebenarnya harus hidup, tidak beku dan tidak revolusioner, instrumental, tetapi sasarannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kata-kata tersebut ada fungsinya dalam matematika. Saya menamakan "fungsi" yang masuk ke dalam sistem itu. Ada fungsi yang penting dan kompleks, ada juga fungsi yang sederhana. Saya mengambil fungsi dari fisika. Itu dapat menginterpretasikan dan menghubungkan satu sama lain dalam satu permutasi dari ekuasi. Ekuasi tersebut merupakan persamaan matematik. Ekuasi dalam bahasa adalah ucapan yang indah. Untuk menggambarkan ekuasi, saya menggambarkan sesuatu secara eksak atau mendekati eksak. Bahasa pun harus dikembangkan mendekati eksak pula. Selanjutnya, mungkin terjadi manipulasi secara sengaja atau tidak sengaja dan itu sangat berbahaya. Akan tetapi, di dalam fisika kita tidak dapat memanipulasi. Kalau memanipulasi hanya waktu singkat, kapal itu akan tenggelam atau kapal terbang akan jatuh. Bahasa itu dapat dimanipulasi sehingga pendekatannya tidak mungkin eksak. Oleh karena itu, risikonya lebih tinggi daripada itu. Saya mengambil sangsi fungsi F1, F2, F3, F4, dst. dari pengalaman saya dan melihat seluruh isi alam semesta sebagai sesuatu fisika. Apakah itu termodinamika, aerodinamika ataupun semua fisika, sedangkan bahasa harus mengambil fungsi-fungsinya dari mana. Hal itu harus diambil dari evolusi umat manusia yang berbudaya di dalam masyarakat. Sebenarnya kekayaan kita secara sistematis harus bisa mendapatkan inspirasi untuk yang akan datang sehingga itu menjadi suatu kekayaan tersendiri yang alamiah, dan terbaru sehingga cocok dengan sistem yang kita kembangkan. Akibatnya, akan menghasilkan suatu bahasa indah yang eksak dan dapat dinikmati oleh manusia Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
Pemakalah : B.J. Habibie
Pemandu : Anton M. Moeliono
Pencatat : Sriyanto
Menek Herdaniwati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Mursal Esten, IKIP N Padang

Saya ingin mengecek atau menguji sebuah pernyataan. Di zaman atau era ilmu pengetahuan dan teknologi ini peranan sastra akan menjadi semakin penting karena dengan sastralah, kata orang manusia menjadi lebih manusiawi. Apakah pemakalah setuju dengan pernyataan tersebut?

Jawaban

GNP atau kualitas hidup kita semakin lama semakin meningkat. Itu merupakan sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan Indonesia adalah peningkatan kualitas hidup bangsa kita. Kualitas itu bukan saja kualitas makan, melainkan juga kualitas berpikir dan ekspresi memanfaatkan bahasa. Kita lalu bisa lebih meningkatkan pendapatan dan lebih mampu membiayai perkembangan bahasa dalam bentuk apa pun, lebih-lebih sastra. Saya berpendapat bahwa sastra itu semakin penting. Sastra itu harus berkembang dan akan berkembang serta mempunyai tempat yang penting. Saya bisa hidup tanpa kapal terbang, tetapi tidak bisa hidup tanpa bahasa yang berbudaya dan sastra.

2. **Pertanyaan:** Amran Halim, Universitas Sriwijaya

1. Tadi dikatakan bahwa bahasa merupakan permutasi huruf dan lambang-lambang lain yang oleh pujangga atau ilmuwan sosial mendekati kenyataan kira-kira 80 persen. Sebaliknya, huruf atau lambang lain oleh ilmuwan eksakta mendekati kenyataan kira-kira 95 persen. Apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut?
2. Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk menjembatani sistem, baik sistem yang dipakai oleh ilmuwan eksakta maupun sistem yang dipakai oleh ilmuwan sosial, diperlukan bahasa yang tidak dapat kita serahkan kepada nasib untung-untungan, tetapi harus kita tetapkan, kita atur, atau kita rekayasa. Pertanyaan saya adalah jalan mana yang lebih baik kita tempuh? Kita rekayasa bahasa atau ekspresinya dulu baru kita rekayasa masyarakat atau kondisi sosialnya? Atau,

kita rekayasa masyarakat supaya orang memiliki kesiapan untuk menggunakan sistem permutasi ilmu eksakta yang dijembatani sistem permutasi ilmu sosial sedemikian rupa sehingga dengan kesiapan itu orang mengikuti bahasa yang kita rekayasa.

Jawaban

1. Permutasi bahasa yang dilakukan ilmuwan sosial dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Tidak demikian halnya dengan permutasi yang dilakukan oleh ilmuwan eksakta. Bahasa merupakan alat ekspresi tiap manusia yang tidak hanya mengandung nilai-nilai eksakta, tetapi mengandung juga nilai-nilai budaya yang indah yang penuh dengan emosi.
2. Yang mana yang harus kita dahulukan bahasa atau masyarakat? Kedua masalah itu harus ditangani bersama-sama. Yang kita konsentrasikan adalah masyarakat. Masyarakat itu terus berkembang, tetapi mereka bisa berkembang karena membutuhkan sistem informasi (*information system*) antara mereka yang penuh dengan rasio yang berfungsi secara indah serta berdaya tinggi.
3. **Pertanyaan:** D. Wilda Siregar, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa

Dalam mengambil suatu istilah dari bahasa daerah harus diperhatikan apakah istilah itu mengandung pengertian yang kurang baik atau tidak. Sebagai contoh, istilah *kudapan* di daerah Sumatra Utara mengandung pengertian yang kurang baik. Apakah tidak sebaiknya diadakan penelitian lebih dahulu sebelum mengambil suatu istilah?

Jawaban:

Sehubungan dengan itu, saya mengusulkan agar dibentuk organisasi untuk mengembangkan gramatika (*sistem*) dan kosakata (*function*). Istilah-istilah itu diambil dari "keranjang" istilah di tiap akar kebudayaan bangsa yang bhineka tunggal ika. Akan tetapi, perlu pula dipertimbangkan istilah-istilah mana yang dapat dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia dan istilah-istilah mana tidak dapat dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia.

KESINAMBUNGAN DALAM KEBIJAKSANAAN BAHASA NASIONAL

Amran Halim
Universitas Sriwijaya

1. Pengantar

Salah satu segi kebijaksanaan bahasa nasional yang perlu kita perhatikan dewasa ini adalah segi kesinambungan dalam sistematika dan strategi kebijaksanaan bahasa nasional.¹ Masalah kesinambungan dalam kebijaksanaan bahasa nasional itu perlu kita perhatikan karena masalah itu mungkin sekali merupakan salah satu titik lemah di dalam proses pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, serta pengembangan pengajaran dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia.

Yang dimaksud dengan *Kebijaksanaan Bahasa Nasional* adalah kebijaksanaan nasional yang memberikan arah serta ketentuan-ketentuan perencanaan, pembakuan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di samping itu, kebijaksanaan bahasa nasional merupakan garis-garis besar yang dapat dipakai sebagai patokan kerja dalam pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan di Indonesia, yang merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) bahasa nasional, (2) bahasa daerah, dan (3) masalah pengajaran dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia. Kebijaksanaan bahasa nasional juga menyatakan batasan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa-bahasa asing yang diajarkan atau digunakan di Indonesia. Kebijaksanaan bahasa nasional itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga keseluruhan masalah kebahasaan kita itu dapat dikelola secara berencana, terarah, menyeluruh, dan terpadu.

Salah satu masalah dalam pengelolaan kebahasaan secara berencana, terarah, menyeluruh, dan terpadu itu adalah masalah kesinambungan. Dalam hal ini, *kesinambungan* mencakup tidak hanya kesinambungan menurut garis waktu, tetapi juga kesinambungan menurut bidang dan kesinambungan menurut ruang.

2. Kesinambungan Menurut Garis Waktu

Kalau dipandang dari sudut garis waktu, kebijaksanaan bahasa nasional kita telah berkembang dengan kesinambungan yang jelas. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

dapat dipandang sebagai titik awal pernyataan kebijaksanaan bahasa nasional. Butir ketiga Sumpah Pemuda, yang menyatakan, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia", merupakan pengakuan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, atau bahasa nasional, Indonesia. Butir ketiga Sumpah Pemuda itu juga merupakan pernyataan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yang diikrarkan dengan ungkapan *menjunjung bahasa persatuan*. Kedua hal itu, pengakuan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan pernyataan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, merupakan dasar utama kebijaksanaan bahasa nasional kita. Dengan demikian, dapatlah kita katakan dengan kemantapan hati bahwa kebijaksanaan bahasa nasional kita dewasa ini bermula dengan butir ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 itu.

Pernyataan kebahasaan di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 itu diiringi dengan pernyataan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra dalam bentuk terbitan majalah *Pujangga Baru* pada tahun 30-an di bawah pimpinan Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Armijn Pane. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia kebijaksanaan kebahasaan itu berkembang lebih lanjut dengan terbentuknya Komisi Istilah, yang bertugas menyusun tata istilah dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan penyusunan buku-buku teks sebagai akibat penghapusan penggunaan buku-buku teks dalam bahasa Belanda di lembaga-lembaga pendidikan.

Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pernyataan ikrar kebahasaan dalam bentuk Sumpah Pemuda 1928 dipertegas secara resmi dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa *Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia*. Ini merupakan pernyataan resmi mengenai kebijaksanaan bahasa nasional, yang dijabarkan lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa *di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup*. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya itu pada dasarnya merupakan pernyataan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia serta fungsi dan kedudukan bahasa daerah.

Pengembangan bahasa Indonesia meningkat lagi pada tahun 50-an dengan terbitnya buku-buku tata bahasa, seperti *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia* oleh Sutan Takdir Alisjahbana, yang pengaruhnya masih dirasakan sampai sekarang, serta terbitnya *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh Poerwadarminta.

Berbagai kegiatan kebahasaan, termasuk kesastraan, berlanjut selama tahun 60-an. Pada tahun 70-an lembaran baru dalam kegiatan kebahasaan kita terbuka pula dengan dikumandangkannya *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* oleh Presiden Soeharto pada tahun 1972² dan dengan dikeluarkannya *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Pada waktu yang sama (1975) Lembaga

Bahasa Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia ditingkatkan menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Masalah kebijaksanaan bahasa nasional dijadikan pokok bahasan utama di dalam Praseminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta pada tahun 1974 dan Seminar Politik Bahasa Nasional, juga di Jakarta, pada tahun 1975. Praseminar dan seminar itu menghasilkan kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan *kebijaksanaan bahasa nasional*. Praseminar dan seminar itu juga menghasilkan kesepakatan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa daerah, dan fungsi dan kedudukan bahasa asing di Indonesia. Kebijakan bahasa nasional yang disepakati itu menggarisbawahi gagasan bahwa bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang diajarkan dan/atau digunakan di Indonesia memiliki hubungan keterkaitan yang tidak dapat diabaikan (Halim, 1976).

Kalau perkembangan kebijaksanaan bahasa nasional hingga saat ini kita perhatikan, dapatlah disimpulkan bahwa kesinambungan dalam kebijaksanaan bahasa nasional dari segi garis waktu merupakan kenyataan yang jelas dan bahwa ia akan berkembang selanjutnya sesuai dengan tuntutan dan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.

3. Kesinambungan Menurut Bidang

Kalau dipandang dari sudut bidang garapannya, kebijaksanaan bahasa nasional berhadapan dengan bidang-bidang yang memiliki hubungan timbal-balik yang sedemikian erat sehingga diperlukan kesinambungan pengelolaan yang tidak dapat diandalkan. Pertama, kebijaksanaan bahasa nasional berkaitan dengan masalah pembinaan dan masalah pengembangan bahasa Indonesia, masalah pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, serta masalah pemanfaatan bahasa asing. Dengan *pembinaan bahasa* dimaksudkan peningkatan sikap positif warga masyarakat atau pemakai bahasa terhadap bahasa yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga warga masyarakat itu berkeinginan menggunakan bahasa itu dengan baik dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dan dengan memperhatikan lingkungan sosiolinguistik yang terkait. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *pengembangan bahasa* adalah peningkatan kelengkapan bahasa yang bersangkutan (tata bahasa, tata ejaan, tata istilah, kosakata, sintaksis, dan lain-lain) sedemikian rupa sehingga bahasa itu benar-benar dapat digunakan sebagai sarana komunikasi umum, sarana komunikasi pemerintahan, sarana pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana pendukung kebudayaan. Kedua bidang itu, pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa, perlu diatur dan dikelola secara berimbang sehingga terdapat kesinambungan, baik dalam kegiatan pengaturan dan pengelolaannya maupun dalam hasil yang dicapai. Kalau pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa itu (dalam hal ini, bahasa Indonesia) kita perhatikan pada saat ini, tampaknya pengembangan bahasa memperoleh perhatian yang lebih besar daripada pembinaan bahasa. Kita lihat,

misalnya, bahwa sikap positif terhadap bahasa Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, sedangkan hasil pengembangan bahasa Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif dalam bentuk terbitan buku dalam bidang kebahasaan dan bidang-bidang lain sudah menunjukkan kemajuan yang mengembirakan. Oleh karena itu, kebijaksanaan bahasa nasional perlu merumuskan lebih lanjut garis-garis kebijaksanaan bagi tercapainya kesinambungan antara pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa.

Kedua, kebijaksanaan bahasa nasional juga berkaitan dengan masalah ragam bahasa, seperti ragam tulis dan ragam lisan, ragam profesional, dan ragam sosial. Masalah ragam bahasa adalah masalah yang rumit. Oleh karena itu, pada tahun 70-an dan 80-an kebijaksanaan bahasa nasional mengarahkan bahwa perlu disusun skala prioritas pembinaan dan pengembangan bahasa dalam kaitan dengan masalah ragam bahasa. Dengan memperhatikan tingkat kebutuhan yang mendesak, kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam bentuk ahli bahasa yang tersedia, dan pertimbangan teknis, terutama sosiolinguistik, misalnya, ragam tulis diberi prioritas yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan ragam lisan. Salah satu akibatnya adalah kenyataan bahwa ragam tulis berkembang dengan lebih terarah, sedangkan pengembangan ragam lisan tidak terarah sama sekali. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, pengembangan ragam lisan perlu diberi perhatian yang seimbang dengan perhatian yang diberikan kepada ragam tulis. Demikian juga halnya dengan ragam-ragam yang lain yang hingga saat ini diberi prioritas yang rendah. Dengan demikian, dapat kita harapkan kesinambungan usaha dan hasil dalam kaitan dengan pengembangan berbagai ragam bahasa itu.

Ketiga, kebijaksanaan bahasa nasional berkaitan pula dengan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada satu pihak dan masalah pembinaan dan pengembangan bahasa daerah pada pihak lain serta hubungan keterkaitan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Berbagai masyarakat daerah, yang memiliki latar belakang budaya dan bahasanya sendiri, mendapat kesan bahwa bahasa daerah menjadi terdesak sama sekali oleh bahasa Indonesia dan, sebagai akibatnya, berada di ambang kemusnahan; sekurang-kurangnya, masa depan kehidupan bahasa daerah itu menjadi tidak menentu. Kesan itu tentu saja tidak betul. Namun, bagaimana pun juga, kesan yang dicetuskan itu tidak dapat diabaikan apabila kita hendak membina sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia dan, pada waktu yang sama, kegairahan menggunakan dan memelihara kelangsungan hidup bahasa daerah sebagai unsur kebudayaan Indonesia yang hidup, sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. Dengan kata lain, kesinambungan pembinaan bahasa juga memerlukan keserasian perhatian dan prioritas yang diberikan kepada bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Keempat, kebijaksanaan bahasa nasional sebagai kebijaksanaan nasional memerlukan keterlibatan segenap lapisan masyarakat bangsa kita, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta, termasuk dunia usaha, dan masyarakat umum. Kenyataan dalam masyarakat kita dewasa ini memberikan kesan seakan-akan masalah kebijaksanaan bahasa nasional adalah masalah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, khususnya masalah garapan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Berbagai badan pemerintah, baik departemen maupun non-departemen (kecuali Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet), badan legislatif dan lain-lain tidak memperlihatkan adanya upaya yang bersungguh-sungguh untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta tidak memperhatikan kaidah-kaidah kebakuan bahasa Indonesia. Dengan alasan globalisasi ekonomi, kehadiran era informasi, dan perlunya pengembangan kepariwisataan untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, instansi-instansi tertentu di jajaran pemerintah dan badan-badan usaha seperti perhotelan dan pusat perbelanjaan menonjolkan penggunaan kata-kata dan ungkapan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sedemikian rupa sehingga terdapat kesan bahwa bahasa Indonesia sendiri secara langsung atau tak langsung dilecehkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa daya jangkau kebijaksanaan bahasa nasional kita tidak memiliki kesinambungan antarsektor, baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan sektor swasta. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan perlu segera diambil pada tingkat nasional apabila kita mengharapkan agar kebijaksanaan bahasa nasional kita itu benar-benar memiliki daya jangkau nasional.

4. Kesinambungan Menurut Ruang

Ketidakseimbangan antara pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di daerah perkotaan, khususnya Jakarta dan kota-kota besar lain, pada satu pihak dan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di daerah luar kota, terutama daerah pedesaan, juga telah mengakibatkan ketidakseimbangan hasil yang dicapai. Siaran *Pembinaan Bahasa Indonesia* melalui layar televisi yang ditayangkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sekali seminggu tidak dapat dikatakan mencapai sasarannya pada tingkat pedesaan bukan saja karena secara kuantitatif siaran sebanyak sekali seminggu itu tidak cukup melainkan juga karena bahan yang disajikan kadang-kadang tidak tercerna oleh masyarakat umum, terutama masyarakat luar kota. Selain itu, instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha pada tingkat daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, pada umumnya dapat dikatakan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam kaitan ini, instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1991 No. 20/1991, yang dialamatkan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, mengenai pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, dan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 April 1992 No. 1/U/1992 tentang peningkatan usaha pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Daerah DKI Jakarta No. 1 tahun 1992 tentang penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan reklame di wilayah DKI Jakarta patut kita sambut dengan sangat gembira dan dengan harapan diperhatikan pula oleh instansi pemerintah dan sektor swasta baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Langkah yang telah diambil oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam bentuk penandatanganan

piagam kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kesinambungan lintas daerah dalam kaitan dengan kebijaksanaan nasional.

Kebijaksanaan bahasa nasional juga perlu mencakup rumusan yang lebih lengkap dan tegas mengenai kedudukan dan fungsi serta pemanfaatan bahasa asing di Indonesia. Rumusan itu diperlukan untuk mengatasi kenyataan yang kita hadapi dewasa ini, yaitu bahwa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, digunakan secara berlebihan serta kata-kata dan ungkapan bahasa asing yang tidak benar-benar diperlukan bermunculan di mana-mana. Selain itu, rumusan yang tegas dan lengkap itu diperlukan untuk mencegah bertambah parahnya kenyataan kebahasaan yang kita hadapi itu dan menangkal tumbuhnya gejala dan kenyataan yang sejenis pada masa yang akan datang.

Hal-hal yang dikemukakan di atas mengharuskan kita meninjau kembali rumusan dan daya jangkau kebijaksanaan bahasa nasional kita supaya kesinambungan kebijaksanaan nasional dari berbagai segi dapat diraih. Selain itu, perumusan kembali kebijaksanaan bahasa nasional itu juga memerlukan dukungan kelembagaan. Dalam kaitan ini, salah satu kesimpulan Kongres Bahasa Indonesia III (1978) adalah bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu ditingkatkan statusnya menjadi lembaga non-departemen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kesimpulan itu diulangi dan diperkuat oleh Kongres Bahasa Indonesia IV (1983). Dukungan kelembagaan itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, Kongres Bahasa Indonesia VI ini perlu pula memperkuat kesimpulan Kongres Bahasa Indonesia III.

5. Penutup

Uraian singkat yang dikemukakan di atas dapat diakhiri dengan kesimpulan bahwa masalah kesinambungan dalam kebijaksanaan bahasa nasional kita merupakan salah satu masalah yang menuntut perhatian kita supaya kebijaksanaan bahasa nasional kita itu dapat benar-benar menjadi kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan yang berencana, terarah, menyeluruh, dan terpadu. Dalam hubungan ini, kebijaksanaan bahasa nasional itu perlu dilengkapi dengan rencana strategi pengambilan langkah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, dan pengelolaan pemanfaatan bahasa asing untuk kepentingan nasional kita. Rencana strategi itu perlu disusun baik untuk jangka panjang (25 tahun) dan jangka menengah (5 tahun) maupun untuk jangka tahunan. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan hasil yang lebih menggembirakan untuk menyambut hari esok yang lebih cerah.

CATATAN

1. Di dalam makalah ini, sesuai dengan kesepakatan Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1975, *Politik Bahasa Nasional* diganti dengan *Kebijaksanaan Bahasa Nasional*.
2. Pada tahun yang sama terbentuk pula Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia dan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (Mabbim), yang pada tahun 1985 berkembang menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim).

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kongres Bahasa Indonesia V*. Jilid I dan II.
- Halim, Amran, Editor. 1976. *Politik Bahasa Nasional*, Jilid I dan II. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1992. *Kongres Bahasa Indonesia IV*.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Kesenambungan dalam Kebijaksanaan Bahasa Nasional
Pemakalah : Amran Halim
Pemandu : Asim Gunarwan
Pencatat : M. Abdul Khak
Ellya Iswati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** S. Faizah Soenoto Rivai, Instituto Universitario Orientale Napoli, Italia

Saya sangat gembira dan setuju dengan usul Pak Amran terutama usaha pendekatan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Hal itu karena sangat berhubungan dengan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Sebagai contoh, banyak mahasiswa jurusan bahasa Indonesia di luar negeri mengalami kesukaran berbahasa jika datang ke Indonesia. Kesukaran itu disebabkan oleh adanya perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Sebagai contoh, kata *nggak* tidak pernah diajarkan, tetapi ketika mereka datang ke Indonesia kata itu seringkali digunakan. Sementara itu, di dalam kamus kata *nggak* tidak ada. Bagaimana tanggapan Bapak?

Tanggapan:

Ada dua hal yang tersirat, yaitu:

- Orang asing itu tidak mengerti bahwa orang yang diajak bicara menggunakan dialek bahasa Melayu atau bahasa daerah.
 - Kelemahannya dalam metodologi pengajaran. Biasanya yang diajarkan ialah bahasa yang baku, sedangkan yang diperlukan adalah bahasa lisan yang digunakan sehari-hari. Dengan demikian, kita harus memilih bahasa ragam apa yang akan diajarkan kepada siswa asing jurusan bahasa Indonesia.
2. **Pertanyaan:** N. Alieva, Language Departement Institut Oriental Studies Moscow, Rusia

Ragam bahasa lisan selalu menjadi masalah bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Hal itu mungkin karena banyaknya bahasa daerah di Indonesia. Di Rusia banyak terdapat bahasa yang tidak serumpun, seperti bahasa Turki dan Mongol. Namun, hal itu tidak menyulitkan penggunaannya. Bahasa lisan di Rusia disempurnakan oleh para pemain teater dan sandiwara.

Jawaban:

Bahasa lisan memang banyak tantangannya. Terutama pada bahasa Barat banyak ditemukan gabungan konsonan. Di kelas bahasa Indonesia untuk orang asing tidak diajarkan bagaimana gabungan konsonan diucapkan, sedangkan hal itu tidak terjadi pada kelas untuk bahasa Inggris.

3. **Pertanyaan:** H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran

Saya ingin mengemukakan pengalaman saya melihat pengajaran bahasa Indonesia di Australia. Mereka biasanya diajarkan percakapan yang sebetulnya percakapan itu berasal dari bahasa tulis. Menurut saya, sebaiknya diajarkan bahasa baku dulu, baru diajar dialek karena masalah ini sering menyulitkan orang asing. Sebaiknya juga dibedakan pengajaran bahasa lisan dan tulis.

Jawaban:

Saya setuju diajarkan bahasa lisan yang cermat. Ada untungnya jika orang asing itu mengetahui ungkapan atau struktur yang lebih lengkap. Perlu juga disampaikan kepada orang asing bahwa bahasa lisan itu lebih rumit karena unsur-unsurnya dapat digeser-geser.

4. **Pertanyaan:** Noerzisri A. Nazar, Institut Teknologi Bandung

Saya setuju dengan usul Pak Amran, yaitu Pusat Bahasa menjadi lembaga nondepartemen. Hal itu terutama agar usaha pembinaan bahasa lebih tuntas. Tidak perlu ada kekhawatiran bahasa daerah akan punah karena selalu dipelihara oleh pemakainya. Bagaimana kita mencapai keseimbangan antara pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah.

Tanggapan:

Usaha ini meliputi dua pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan yang bersifat nasional, yaitu meningkatkan status Pusat Bahasa menjadi lembaga nondepartemen. Kedua, secara regional tugas membina bahasa daerah adalah tugas pokok Balai Bahasa. Perlu diingatkan bahwa kekuatan bahasa daerah bervariasi dari satu daerah dari daerah lain.

BAHASA INDONESIA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hamid S. Attamimi
Universitas Indonesia

"... it is not enough to attain a degree of precision which a person reading in good faith can understand; but it is necessary to attain if possible to a degree of precision which a person reading in bad faith cannot misunderstand."

(Stephen J., dalam *In re Castioni*, 1891, dikutip dari E.A. Driedger, *Legislative Drafting*, dalam *Canadian Bar Review*, XXVII, 1949.)

1. Pendahuluan

Ahli bahasa mungkin bertanya-tanya apakah bahasa dalam perundang-undangan perlu dibicarakan secara khusus; apakah bahasa dalam perundang-undangan tidak sama dengan bahasa pada umumnya; apakah bahasa dalam perundang-undangan tidak tunduk pada kaidah-kaidah bahasa yang umum dan baku; demikian seterusnya. Namun, ahli perancangan perundang-undangan mungkin juga bertanya-tanya dari sudut yang lain, apakah perundang-undangan yang dirancangnya telah dituangkan dalam susunan kalimat perundang-undangan; apakah ungkapan yang dituangkannya cukup jernih dan tidak mengandung makna ganda, tidak terlalu banyak, dan tidak pula terlalu sedikit; apakah kata-kata yang dipilihnya sudah tepat dan tidak meninggalkan keraguan kepada pembacanya; demikian seterusnya. Ahli bahasa yang memahami teknik penyusunan perundang-undangan, demikian juga sebaliknya ahli perancangan perundang-undangan yang memahami ilmu bahasa akan memaklumi adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa bahasa Indonesia dalam perundang-undangan adalah tetap bahasa Indonesia sehingga tetap tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang umum dan baku. Bahasa Indonesia perundang-undangan adalah suatu ragam bahasa Indonesia, yang karena sifat dan tujuannya, mengandung ciri yang khas sehingga berbeda dengan ragam bahasa Indonesia lainnya. Sebagai suatu ragam bahasa, bahasa Indonesia perundang-undangan mempunyai susunan kalimat yang—menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh E.A. Driedger—tidak mengandung ketidaksempurnaan tingkat pertama dan tidak pula ketidaksempurnaan tingkat kedua. [Ketidaksempurnaan tingkat pertama meliputi kandungan makna ganda, kabur, dan terlalu luas. Ketidaksempurnaan tingkat kedua meliputi ketidaktetapan kata dan

ungkapan (untuk hal yang sama digunakan kata dan ungkapan berbeda), ketidaktetapan kepentingan (kata dan ungkapan yang sama digunakan untuk kepentingan berbeda), berlebihan, bertele-tele, kacau, ketiadaan bantuan tanda baca untuk kalimat-kalimat panjang, dan ketidakteraturan susunan.]

2. Peraturan Perundang-undangan

Kata *perundang-undangan* mengandung dua arti. Pertama, proses pembentukan peraturan negara tertulis yang bersumber pada kewenangan negara di bidang legislatif dan kedua, keseluruhan peraturan negara itu sendiri. Dalam membicarakan bahasa Indonesia dalam perundang-undangan semua pihak berkepentingan agar susunan kata dan bentukan kalimat yang dituangkan dalam proses pembentukan peraturan negara tersebut jernih dan baik sehingga peraturan negara itu terbebas dari ketidaksempurnaan sebagaimana dimaksud di atas. Jika mengingat hal-hal di atas, dapatlah dibayangkan betapa penting kedudukan seorang perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*) dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat yang menghasilkan ungkapan yang tepat sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang (atau disebut juga pengundang-undang, *legislator wetgever*).

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) yang modern. Apabila dalam negara berdasar atas hukum yang lama, pembentuk undang-undang pada hakikatnya tidak ditugasi untuk membentuk undang-undang, tetapi hanya menemukan hukum dan merumuskannya saja sebagaimana didapatnya dalam tata kehidupan masyarakat (*die gesetzgebende Gewalt macht das Gesetz nicht, die entdeckt und formuliert es nur*). Oleh karena itu, usaha kodifikasi digalakkan sehingga dalam negara hukum modern pembentuk undang-undang tidak lagi pertama-tama atau primer mengarah kepada melakukan kodifikasi, tetapi melakukan modifikasi (*de wetgever streeft niet meer primair naar codificatie maar naar modificatie*). Dengan demikian, dalam negara berdasar atas hukum Republik Indonesia, tujuan perundang-undangan tidak sama dengan tujuan itu ketika zaman Hindia Belanda, yaitu memantapkan ketenteraman dan keteraturan (*rust en orde*) semata-mata, melainkan sudah berubah, yakni selain memantapkan ketenteraman dan keteraturan berdasar cita hukum bangsa juga harus memenuhi tujuan baru, yaitu mewujudkan cita-cita masyarakat dan bangsa.

Peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, serta berfungsi menetapkan suruhan (harus melakukan perbuatan), larangan (harus tidak melakukan perbuatan), pembebasan (boleh tidak melakukan perbuatan), atau pengizinan (boleh melakukan perbuatan). Namun, selain itu, peraturan perundang-undangan dapat juga mengandung norma hukum yang memberikan kuasa untuk menetapkan norma hukum yang umum dan abstrak, yang berisi suruhan dan larangan serta yang mencabut atau menarik kembali wewenang/kuasa yang diberikan tersebut. Dengan norma-norma hukum itu peraturan perundang-undangan bertujuan mengatur tata kehidupan masyarakat, selain sesuai

dengan nilai-nilai yang telah disetujui bersama serta telah mantap juga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat sendiri.

Keputusan yang tidak mengandung norma hukum yang umum dan abstrak, misalnya yang hanya mengandung norma hukum umum dan konkret, individual dan abstrak, serta individual dan konkret, tidak dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Keputusan-keputusan semacam itu tetap disebut keputusan (*besluit*, atau *beschikking*), bukan peraturan (*regeling*).

Kalimat-kalimat yang berupa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan berisi norma hukum yang umum dan abstrak merupakan kalimat-kalimat normatif, tidak deskriptif atau deklaratif. [Dalam tata bahasa Indonesia yang baku kalimat normatif biasa disebut kalimat imperatif. Akan tetapi, karena tidak semua perintah adalah norma yang berlaku, untuk menunjukkan bahwa kalimat itu mengandung norma akan disebut saja kalimat normatif, tidak imperatif. Selain itu, menurut Hans Kelsen, norma ialah perintah yang tidak personal dan anonim (*An impersonal and anonymous "command" - that is the norm.*)]

Kalimat hukum yang normatif (*rechtsnormzin*) biasanya ditandai dengan adanya kata kerja bantu "harus" atau "dapat", tetapi dapat juga tanpa kata-kata tersebut. Dari susunannya orang segera mengetahui bahwa kalimat itu mengandung suruhan (melakukan), larangan (tidak melakukan), pembebasan (boleh tidak melakukan), atau pengizinan (boleh melakukan).

3. Penyusunan dan Penafsiran Peraturan Perundang-undangan

Berbeda dengan norma moral dan norma-norma lain dalam masyarakat, norma hukum dapat berlaku dengan disertai sanksi pidana dan sanksi pemaksa bagi penegakannya. Kekuatan negara berdiri di belakang berlakunya norma hukum negara. Oleh karena itu, terdapat dua peristiwa penting yang perlu diperhitungkan sebelum suatu peraturan perundang-undangan berlaku. Dua peristiwa itu salah satu perlu dipikirkan dan dipertimbangkan baik-baik, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penyusunannya; yang lainnya ialah penegakannya melalui penafsirannya. Kedua hal penyusunan (*construction*) dan penafsiran (*interpretation*) peraturan perundang-undangan tersebut sangat bergantung kepada apresiasi dan pemahaman bahasa tulisan di dalamnya. Penggunaan dan penafsiran medium bahasa menjadi sangat penting, bahkan sangat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan akan mencapai maksud dan tujuannya atau tidak.

Penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan dan penuangan wawasan dan gagasannya ke dalam kata-kata, kalimat, dan ungkapan perlu dilihat juga dari sudut pembacanya, yakni bagaimana pembaca mengartikannya, memahaminya, dan menafsirkannya. Nasihat Montesquieu—sebagaimana dikutip oleh C.K. Allen—penyusun peraturan perundang-undangan ada baiknya memperhatikan hal berikut:

- a) gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana;
- b) istilah yang dipilih sedapat-dapatnya bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sesedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual;
- c) hendaknya membatasi diri pada yang riil dan aktual serta menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan;
- d) Hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja; hendaknya tidak untuk latihan logika, tetapi untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia;
- e) hendaknya tidak merancukan yang pokok dengan yang pengecualian, pembatasan, atau pengubahan, kecuali apabila dianggap mutlak perlu;
- f) hendaknya tidak 'memancing perdebatan/perbantahan'; adalah berbahaya memberikan alasan-alasan yang terlalu rinci karena hal ini dapat membuka pintu pertentangan;
- g) hendaknya di atas segalanya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis; hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami; karena peraturan yang lemah, tidak diperlukan, dan tidak adil akan menyebabkan seluruh sistem peraturan dalam reputasi yang jelek dan karena itu mengguncangkan kewibawaan negara.

Pengalaman modern dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menambahkan saran-saran lain lagi. "Gangguan" komunikasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dan masyarakat pembacanya yang pada umumnya bukan ahli dapat mudah terjadi dan berkali-kali pula. Namun, di pihak lain "gangguan" komunikasi tersebut tidak seluruhnya dapat dihindarkan. Karena penggunaan bahasa yang teknis-yuridis pada umumnya tidak dapat dielakkan, perlu diusahakan hal-hal berikut.

- a) Perlu ada penjelasan dan penyuluhan lebih banyak mengenai latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan serta keadaan yang mempengaruhinya sehingga penggunaan kata-kata, kalimat, dan ungkapan di dalamnya dapat dipahami lebih baik.
- b) Penggunaan ragam bahasa teknis memang tidak dapat dihindarkan di mana-mana, tetapi penggunaan ragam bahasa teknis perundang-undangan dapat diatur lebih baik daripada ragam bahasa teknis lainnya; *jargon* atau bahasa yang tipikal dan khas di bidang hukum dapat diganti, misalnya, meskipun "ciptaan-ciptaan" baru hendaknya tidak makin menyulitkan.
- c) Definisi yang dapat menjelaskan di sana-sini boleh digunakan untuk memberikan ketepatan pengertian. Akan tetapi, arti kata-kata yang sudah diketahui masyarakat tidak perlu didefinisikan; apabila definisi sulit dirumuskan, uraian pengertian dapat digunakan.

Segera setelah peraturan perundang-undangan jadi dan berlaku, dalam menegakkannya orang tidak dapat menghindarkan diri dari penafsirannya, terutama apabila di sana-sini terdapat kata-kata, kalimat, atau ungkapan yang tidak segera dapat dimengerti. Dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan orang juga selama ini telah berpengalaman dengan beberapa dasar penafsiran yang digunakan. Hukum Inggris dan hukum negara anglosaksis lain yang dipengaruhi mengenal apa yang disebut penafsiran dengan "pendekatan tujuan" (*purpose approach*), "pendekatan harfiah" (*literal approach*), dan "pendekatan 'aturan emas'" (*golden rule approach*). Selain itu, ada juga dasar penafsiran dengan pendekatan yang lebih modern, yang disebut "pendekatan atau prinsip tunggal".

"Pendekatan tujuan" mengutamakan penafsiran dengan apa yang dikehendaki dan dituju oleh pembentuk peraturan meskipun kehendak itu tidak tampak dalam tulisan, mengingat-kata penganut pendekatan ini—apa yang dikehendaki dalam peraturan sama kuatnya dengan apa yang tertuang di dalamnya. "Pendekatan harfiah" menentukan bahwa yang dominan ialah apa yang tercantum dalam kata-kata di dalam peraturan tersebut, sedangkan "pendekatan 'aturan emas'" menafsirkan peraturan dengan mendasarkan pada pemberian arti kata-kata di dalamnya kepada maknanya yang biasa, kecuali apabila akan terjadi ketiadaan konsistensi, kejanggalan, atau "ketidaknyamanan" penafsiran sehingga pengadilan dapat menentukan bahwa maksud pembentuk peraturan tidak mungkin diartikan demikian dan dengan begitu pengadilan dibenarkan untuk mengartikan sesuai dengan yang dimaksudnya.

Penafsiran peraturan perundang-undangan dengan "pendekatan atau prinsip tunggal" yang dianggap lebih modern sebagai satu-satunya pendekatan yang benar berpendapat bahwa kata-kata dalam peraturan hendaknya dibaca dalam konteksnya dan makna bahasanya yang biasa, tetapi perlu dihubungkan dengan kehendak dan tujuan peraturan tersebut serta maksud para pembentuknya. Prinsip pendekatan ini mengajarkan bahwa kata-kata dalam peraturan hendaknya ditafsirkan dalam arti dan makna menurut tata bahasa yang biasa, kecuali jika dalam konteks atau objek peraturan ataupun dalam hubungan dengan penggunaannya terdapat petunjuk bahwa kata-kata itu mengandung arti dan makna yang berbeda daripada biasanya.

4. Bahasa Indonesia sebagaimana Tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Dewasa Ini

Untuk mengetahui beberapa penguasaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, kiranya perlu disimak beberapa produk hukum tersebut dari waktu ke waktu meskipun disertai dengan catatan bahwa yang tertuang belakangan belum berarti lebih baik daripada yang tertuang lebih dulu. Selain itu, meskipun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah undang-undang dan yang lebih rendah daripadanya, mengingat kuatnya "pengaruh" dan "contoh" yang diberikan oleh berbagai undang-undang dasar-baik yang dewasa ini berlaku maupun yang pernah berlaku pada waktu lalu—serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada baiknya disampaikan beberapa contoh berikut.

a. Kalimat Normatif

Sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan berisi norma-norma hukum yang umum dan abstrak; umum dalam arti adresatnya ialah sekelompok atau segolongan orang yang tidak dapat dipastikan siapa-siapanya (orang banyak secara umum atau orang banyak dari suatu golongan masyarakat) dan abstrak dalam arti hal yang diaturnya tidak dapat ditentukan bilangannya berapa kali. Meskipun demikian, dalam peraturan perundang-undangan dapat "diselipkan" norma hukum yang umum dan tidak abstrak (disebut "konkret"), tidak umum (disebut "individual") dan abstrak, individual, dan konkret. Beberapa contoh kalimat normatif dengan adresat yang umum serta hal yang diaturnya abstrak ialah seperti berikut.

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, orang asing yang sesudah dikeluarkan dari Indonesia berada di Indonesia secara tidak syah.

(UU Darurat No. 8 Th. 1955 Pasal 3)

Dalam segenap undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan di mana tercantum kata atas nama:

- a. "Universiteit", "Universitet" dan "Universitit" kata atas nama itu harus dibaca dalam bahasa Indonesia "Universitas";
- b. (dan seterusnya);
- c. (dan seterusnya).

(UU No. 10 Th. 1955 Pasal 1)

Kalimat normatif dengan adresat yang umum dan hal yang diaturnya abstrak dapat dilihat juga dalam contoh berikut.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(UU No. 1 Th. 1974 Pasal 7 ayat 12)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

(UU No. 1 Th. 1974 Pasal 7 ayat 1)

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

(UU No. 1 Th. 1974 Pasal 12)

Contoh kalimat normatif yang tampak seperti deklaratif dalam peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut.

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(UU No. 1 Th. 1974 Pasal 3 ayat 1)

Sebagai contoh kalimat normatif dalam peraturan perundang-undangan yang adresatnya individual dan hal yang diatur/ditetapkannya konkret ialah sebagai berikut.

- (1) Nama Universitas negeri berbunyi "Universitas Negeri Gadjah Mada" ditetapkan kini menjadi "Universitas Gadjah Mada".

- (2) Nama "Universiteit van Indonesie" atau "Universitet Indonesia" ditetapkan kini dalam bahasa Indonesia menjadi "Universitas Indonesia".

(UU No. 10 Th. 1955 Pasal 2)

b. Kata yang "Berubah" Arti

Apabila dalam UUD 1945 terdapat kata-kata atau ungkapan yang terbaca/terdengar agak "aneh", mungkin hal itu dapat dimengerti mengingat penggunaan bahasa Indonesia untuk penulisan norma-norma hukum pada tahun 1940-an masih belum terbiasa. Dalam Penjelasan UUD 1945, umpamanya mengenai Pasal-pasal 19, 20, 21, dan 23 terdapat beberapa kata yang apabila tidak diperhatikan perkembangan artinya serta tidak pula dihubungkan dengan pemahaman tentang Sistem Pemerintahan Negara yang berlaku menurut UUD 1945 sendiri. Kalimat itu terasa sangat tidak masuk akal, mustahil, *absurd*. Kalimat itu berbunyi sebagai berikut.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah.

Apabila kalimat itu diartikan secara harfiah atau dipahami hanya dari bunyinya, tidaklah mungkin Dewan Perwakilan Rakyat harus selalu memberi persetujuan tanpa hak untuk menolak rancangan undang-undang yang datang dari pemerintah. "Kunci" masalahnya barangkali terletak pada arti kata-kata "memberi persetujuan". "Persetujuan" berasal dari kata kerja atau verba "bersetuju" (dengan prefiks ganda *ber-* dan *se-*) yang berarti 'sepakat', 'semufakat', atau 'sependapat'. Oleh karena itu, arti kata *bersetuju* di sana masih bersifat "netral" dalam arti dapat menerima dan dapat pula menolak. Bahkan, dapat pula tidak memberi suara atau tidak menyatakan pendapat sama sekali (*abstain*). Yang diharuskan dalam menghadapi rancangan undang-undang dari pemerintah ialah DPR mengadakan kesepakatan, mengadakan mufakat, atau membulatkan pendapat, baik untuk menerima/menyetujui maupun untuk menolak/tidak menyetujui rancangan tersebut. Kata *harus* di sana menyebabkan DPR tidak dibenarkan untuk tidak menyatakan kesepakatan; DPR tidak dibolehkan bersikap "masa bodoh" atau membiarkan rancangan tanpa keputusan. (Kata *bersetuju* dewasa ini memang telah mempunyai "muatan" yang lebih sempit daripada tahun 1940-an; apabila dulu netral kini telah memilih pihak, kini berarti 'menyetujui', 'menerima', 'mengiakan', 'membenarkan'.)

c. Jika dan Apabila

Kalimat normatif yang menyatakan hubungan syarat sebaiknya menggunakan subordinat *jika*, sedangkan yang menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu sebaiknya menggunakan subordinat *apabila* atau *bila*. Dalam kenyataan sehari-hari sering dijumpai beberapa peraturan perundang-undangan yang "rancu" dalam menggunakan subordinat syarat tersebut. Beberapa contoh yang kurang tepat ialah seperti berikut.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(UU No. 1 Th. 1974 Pasal 2 ayat 1)

Pada contoh di atas, penggunaan subordinator *apabila* tidak tepat; yang benar ialah *jika* karena syarat "dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" tidak mengacu kepada atau bertalian dengan waktu, tetapi syarat yang murni. Kata *itu* pada akhir kalimat berlebihan dan mengganggu. Kabarinya kata *itu* dicantumkan agar sama benar bunyinya dengan rumusan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Penggunaan subordinator *apabila* dalam contoh di bawah ini dapat dibenarkan, yakni sebagai berikut.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami dan isteri.

(UU No. 1 Th. 1974 Pasal 27 ayat 2)

d. *Dan sebagainya dan dan lain-lainnya*

Berdasarkan pengalaman dapat dikemukakan bahwa perlu adanya kecermatan dalam penggunaan kata-kata *dan sebagainya* dan *dan lain-lainnya* mengingat penafsiran akibat penggunaan yang satu dalam peraturan perundang-undangan akan berbeda dari pada penggunaan yang lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Th. 1974 disebutkan sebagai berikut.

..., termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya,

Penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan sebagai berikut.

Kekayaan alam bukan hewani yang dimaksud di sini ialah misalnya pasir, kerikil, batu dan sebagainya yang terdapat dalam

Rumusan tersebut di satu pihak berlebihan karena sudah ada kata *misalnya* masih digunakan kata-kata *dan sebagainya*, tetapi di pihak lain tepat karena kata-kata *dan sebagainya* memang berbeda dengan kata-kata *dan lain-lainnya*. Yang terakhir ini akan memasukkan semua benda bukan hewani secara tidak terbatas ke dalam kekayaan alam dimaksud.

e. *Dan/Atau*

Kata-kata *dan/atau* banyak dijumpai dalam rumusan sanksi pidana. Kata-kata yang arti sebenarnya sudah jelas, yakni dapat 'menggabungkan' (kumulatif) jenis pidana dan dapat pula memilih (alternatif) salah satu. Namun, dalam praktik seringkali (biasanya dengan "itikad tidak baik") orang memisahkannya menjadi "atau" saja, itu pun 'dipilih' yang meringankan semata-mata, misalnya rumusan sanksi berikut.

Barangkali di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(Pasal 24 UU No. 9 Th. 1985)

Dalam praktik, hukuman yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan tersebut hampir selalu berupa denda, itu pun dapat ringan karena apa yang ditentukan ialah sebanyak-banyaknya.

f. Tanda Koma (,) serta Konjungsi *dan* serta Konjungsi *atau*

Menurut kaidah yang berlaku, perincian beberapa kata atau anak kalimat bagi penambahan dilakukan dengan penempatan tanda koma (,) sesudah penyebutan tiap kata atau anak kalimat dan diakhiri dengan tanda koma (,) serta kata *dan* sesudah kata atau anak kalimat sebelum terakhir. Demikian juga halnya dengan perincian pemilihan, yaitu dilakukan dengan penempatan tanda koma (,) serta kata *atau*. Apabila hal itu tidak dilakukan dengan cermat, dapat menimbulkan beberapa penafsiran mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan bersangkutan. Sebagai contoh, ketentuan di bawah ini sampai sekarang masih menimbulkan masalah.

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

(UU No. 1 Th. 1974 Pasal 57)

Karena penjelasan ketentuan tersebut mengatakan "cukup jelas", timbul beberapa penafsiran yang dapat menyulitkan penegakannya. Ada yang mengatakan ketentuan tersebut harus ditafsirkan untuk mengatur perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, seperti hukum agama dan hukum adat, dan juga mengatur dua orang berbeda kewarganegaraan yang salah satu pihak ialah warga negara Indonesia (I). Ada yang menafsirkan, ketentuan tersebut mengatur perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan dan perbedaan hukum itu disebabkan oleh yang seorang ialah warga negara Indonesia dan yang lainnya warga negara asing (II). Akibat adanya berbagai penafsiran tersebut, menurut penafsiran I, perkawinan campuran antaragama di Indonesia dapat dilangsungkan. Menurut penafsiran II perkawinan campuran antaragama di Indonesia tidak dapat dilangsungkan.

Jika menghadapi keadaan seperti di atas, menjadi makin penting apa yang dinasihatkan oleh para ahli tentang perlunya kecermatan dalam menyusun kalimat—terutama kalimat majemuk, baik yang setara maupun yang bertingkat—dan menuangkannya ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Kecermatan penyusunan akan menghasilkan kejernihan penafsiran.

5. Penutup

Demikian beberapacatatan mengenai bahasa Indonesia dalam perundang-undangan, yang merupakan salah satu dari sekian banyak ragam bahasa Indonesia. Untuk mengembangkan ragam bahasa Indonesia perundang-undangan diperlukan ahli-ahli bahasa yang memahami hukum, terutama hukum tertulis yang disebut perundang-undangan. Mungkinkah juga sebaliknya? Dapatkah keduanya tiba pada tujuan yang sama?

Satu hal sudah pasti, bahasa Indonesia dalam perundang-undangan perlu memperoleh perhatian khusus dari ahli hukum, terutama ahli perundang-undangan. Hal itu mengingat bahasa Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan adalah bahasa negara yang resmi, yang diucapkan oleh negara Republik Indonesia melalui pejabat negara dan pejabat pemerintahnya. Sudah pada tempatnya apabila Negara Republik Indonesia memberi contoh berbahasa yang baik dan benar kepada rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, C.K. *Law in the Making*. Oxford: Clarendon Press, 1945.
- Dickerson, R. *The Fundamentals of Legal Drafting, Second Edition*. Boston & Toronto: Little & Brown, 1986.
- Driedger, E.A. "Legislative Drafting." Dalam *Canadian Bar review*. Ottawa, 1949.
- , *Construction of Statutes*. Toronto: Butterworths, 1983.
- Kelsen, H. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1945.
- Koopmans, T. "De rol van de wetgever." Dalam *Honderd jaar rechtsleven*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1970.
- Moeliono, A.M. dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Ruiter, D.W.P. *Bestuursrechtelijke wetgevingsleer*. Assen/Maastricht, 1987.
- Wijk, H.D. van & W. Konijnenbelt. *Hoofdstukken van administratief recht*. s-Gravenhage: Vuga, 1984.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan
Pemakalah : Abdullah H.S. Attamimi
Pemandu : Soemarsono
Pencatat : A. Gaffar Ruskhan
Endang Nilla P.

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran
- Mengapa KUHP dan bahasa notaris masih menggunakan bahasa Belanda?
 - Mengapa dalam KUHP masih sering digunakan campuran kalimat aktif dan pasif sehingga mengaburkan makna?
 - Mengapa kalangan hukum masih menggunakan kata *syah* untuk makna *resmi* bukan *sah*?

Jawaban:

- KUHP yang resmi masih menggunakan bahasa Belanda dan belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, para praktisi hukum masih sering menafsirkannya secara berbeda-beda.
 - Biasanya bahasa notaris tidak bersifat normatif, tetapi bersifat deklaratif. Padahal, seharusnya bahasanya bersifat normatif. Bahasa hukum seolah-olah ingin dibuat sulit agar tidak ada yang meniru. Seharusnya, bahasa hukum itu sederhana, jelas, dan lugas.
 - Penggunaan kata *syah* memang tidak tepat dalam bahasa hukum. Pemakalah sendiri memakai *sah*, yang dalam bentukan lain menjadi *mengesahkan* bukan *mensyahkan*.
2. **Tanggapan:** Kusnadi, Universitas Indonesia
- Selama ini belum ada pembicaraan resmi tentang bahasa perundang-undangan.
 - Seyogianya, pilihan kata yang digunakan dalam perundang-undangan tidak mengandung makna taksa sehingga dapat menimbulkan salah tafsir.
 - Perancang undang-undang seharusnya orang yang mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - Selama ini bahasa notaris masih berpedoman pada format bahasa Belanda. Padahal, jika harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar, keabsahannya pasti tidak akan terganggu

Jawaban:

Setuju dengan tanggapan Pak Kusnadi.

3. **Pertanyaan:** Christina Sumarni, SMA Negeri 6 Jakarta

- a. Sejauh mana keterlibatan Pusat Bahasa dalam penyusunan kosakata bidang perundang-undangan?
- b. Sebaiknya, Pusat Bahasa diperkuat dengan orang yang berlatar belakang disiplin ilmu yang berbeda.

Jawaban:

- a. Sebaiknya Pusat Bahasa tidak hanya terlibat dalam pembentukan kosakata/istilah dalam bidang perundang-undangan, tetapi juga menyangkut struktur kalimat.
- b. Jawabannya diserahkan pada Pusat Bahasa. Namun, *pemandu* menambahkan bahwa selama ini Pusat Bahasa sudah menjalin kerja sama dengan para pakar dalam berbagai bidang ilmu untuk menyusun peristilahan, termasuk istilah hukum.

4. **Tanggapan:** Zulkarnain, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Dalam menyusun undang-undang selama ini selalu terjadi negosiasi antara pihak Pemerintah dan DPR. Berdasarkan pengalaman penanya, sebagai pendamping bahasa di DPR kadang-kadang terjadi negosiasi tentang istilah yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa dan istilah yang diinginkan oleh pihak perancang perundang-undangan. Tampaknya, istilah yang sudah dianggap baku di kalangan perancang perundang-undangan sulit diubah dengan istilah yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa.

Diusulkan agar para pendamping bahasa diberikan kebebasan untuk menentukan istilah-istilah yang sesuai dengan bahasa Indonesia tidak dipaksakan istilah yang diinginkan perancang undang-undang.

Jawaban:

- a. Seharusnya, pihak pendamping bahasa terus meyakinkan pihak perancang perundang-undangan dengan alasan kebahasaan agar menggunakan peristilahan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- b. Sedapat mungkin perbaikan bahasa dilakukan pada tingkat departemen sebelum diajukan ke DPR.

5. **Pertanyaan:** Syamsuddin A.R., FPBS IKIP Bandung

- a. Dalam kenyataannya bahasa undang-undang memang terdiri dari kalimat-kalimat yang panjang, yang sebenarnya dapat dijadikan kalimat-kalimat yang singkat dan padat.
- b. Sebaiknya, ada ahli bahasa yang mengamati bahasa notaris dengan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan menyodorkan konsep perbaikannya.

Jawaban:

- a. Kalimat-kalimat dalam perundang-undangan harus dilihat dari satuan-satuan yang lebih besar. Jika mempunyai hubungan yang erat dengan satuan lainnya, satuan-satuan tersebut dapat dipecah menjadi beberapa kalimat. Akan tetapi, jika tidak berhubungan, satuan-satuan tersebut dibagi dalam ayat, pasal, dan bab.

- b. Bahasa yang sering digunakan notaris bukan kalimat normatif.

Misalnya, *Hari ini datang seorang bernama anu kepada saya*. Kalimat ini hanya untuk deklaratif, bukan satu kesatuan peraturan yang sifatnya normatif.

6. **Pertanyaan:** Rahmaniah Komalaningrum, Pelaras PKG Bahasa Indonesia, Pendidikan Menengah Umum

Apakah benar bahasa hukum tidak dapat diubah. Misalnya, penggunaan kata *vide* dalam ijazah/STTB SD/SMP. Ada baiknya kata tersebut diganti dengan *menunjuk*, sesuai dengan makna kata yang terdapat dalam kamus.

Jawaban:

Tidak benar bahwa bahasa hukum tidak dapat diubah. Pemakalah sendiri memakai kata *lihat* untuk padanan kata *vide* yang berasal dari bahasa Latin. Untuk *menunjuk* digunakan *juncto*.

7. **Tanggapan:** C. Hartati Budhiman, UPN Veteran Jakarta

Dalam Undang-Undang No. 14/1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak lagi dipakai kata *dan/atau* dan *selama-lamanya*, tetapi diganti dengan *dan* atau *atau* dan *paling lama*.

Jawaban:

Kata *dan/atau* tidak selamanya dapat diganti dengan *dan* atau *atau* saja. Kata *dan/atau* dapat mengandung makna kumulatif atau alternatif. Misalnya, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata sekaligus atau salah satu di antaranya.

Oleh karena itu, adakalanya diperlukan kata *dan/atau*. Kata *selama-lamanya* dapat saja diganti dengan *paling lama*.

8. **Tanggapan:** Bruce Frederick Jarvis, Jakarta

Penanya sebagai konsultan perbankan pernah menemukan $\pm$ 200 kesalahan bahasa dalam rancangan undang-undang yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?

Jawaban:

Tidak ada jawaban dari pemakalah.

9. **Catatan Pemandu:**

Pemandu mendapat selebaran yang mepermasalahkan petikan-petikan kalimat dari UUD 45, yang menjadi sorotan adalah banyaknya penggunaan kata *ialah*, sedangkan undang-undang yang sekarang lebih banyak menggunakan kata *adalah* daripada *ialah*.

Tanggapan

Pemakalah selalu memakai kata *adalah* untuk definisi yang kembali ke diri sendiri. Misalnya, *yang dimaksud dengan ini adalah*

Kata *ialah* digunakan untuk memerinci sesuatu. Misalnya, *badan yang dimaksud dengan ini ialah* Karena bahasa itu merupakan kesepakatan, untuk pembakuan, rumusan perundang-undangan banyak menggunakan definisi. Bahkan, kalau sulit dirumuskan dalam definisi, diadakan uraian pengertian. Oleh karena itu, *adalah* digunakan untuk definisi, sedangkan *ialah* untuk uraian pengertian.

PENGEMBANGAN LARAS BAHASA DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MODERN

Anton M. Moeliono
Universitas Indonesia

Peranan bahasa Indonesia sebagai sarana ilmu pengetahuan, teknologi, seni vokal, seni sastra, dan pengungkapan unsur budaya lain dalam kehidupan orang Indonesia masa kini memberikan gambaran betapa pentingnya bahasa itu bagi masyarakat kita. Namun, kedudukannya yang penting itu tidak terutama karena mutunya sebagai sistem komunikasi, atau karena luas kosakatanya, atau pun karena keluwesannya dalam tata kalimat. Nilainya lebih banyak bersifat ekstrinsik; artinya, bahasa Indonesia menempati kedudukannya karena pertimbangan politik, demografi, dan ekonomi. Maka, kedudukannya itu dapat disaingi oleh bahasa lain, bahasa Inggris misalnya, berdasarkan pertimbangan yang sama. Mungkin kenyataan itulah yang dapat menjelaskan mengapa orang bangga terhadap bahasa Indonesia berdasarkan ciri ekstrinsiknya, tetapi tidak begitu bangga jika harus menilai ciri intrinsiknya. Bahasa itu dinilai tidak dapat mengungkapkan konsep yang modern. Terjemahan bahasa Indonesia, jika dibandingkan dengan sumber aslinya, dinilai tampak bertele-tele dan kurang bernas.

Sikap mendua itu juga terungkap jika diperhatikan pendapat setengah orang bahwa bahasa Indonesia hendaknya di mana-mana sama bentuknya dan pendapat lain yang berlawanan bahwa bahasa Indonesia dapat memiliki bentuk yang sesuai dengan cita rasa masyarakat penuturnya setempat. Pendapat yang kedua itu didasari argumen bahwa bahasa milik masyarakat.

Bahasa Indonesia yang amat luas kawasan persebarannya dan bermacam ragam penuturnya tidak dapat tidak terkena hukum perubahan. Memang tidak dapat diingkari bahasa Indonesia yang dipakai sejak lahirnya republik ini memunculkan berbagai ragam bahasa. Ragam itu masih disebut *bahasa Indonesia* karena aturan intinya di bidang tata bunyi, pembentukan kata, tata kalimat, dan tata makna masih sama. Orang Aceh yang berbahasa Indonesia dengan orang Ambon mampu paham-memahami walaupun dapat dikenali beberapa perbedaan dalam wujud pembahasaannya.

Ragam bahasa itu dapat dibagi menjadi ragam menurut golongan penuturnya dan ragam yang dikenali menurut fungsi pemakaiannya. Contoh jenis ragam bahasa

yang pertama ialah apa yang dikenal dengan nama *logat* atau *dialek*. Selanjutnya, dapat dibedakan ragam yang digunakan oleh penutur yang berpendidikan formal dan yang tidak. Pembedaan itu untuk bahasa Indonesia sangat relevan. Ragam lain yang bertalian dengan penutur bahasa ialah ragam yang pemilihannya bergantung pada sikap penutur itu terhadap mitra bicaranya atau pembacanya. *Langgam* orang jika berbahasa dengan atasannya, atau orang yang dihormatinya, akan berbeda dengan langgamnya jika ia berhadapan dengan anak buahnya, atau jika emosinya berkobar. Orang memakai ragam bahasa setempat karena tinggal di tempat itu atau pernah bermukim di situ. Begitu pula, orang memakai suatu ragam sosial karena menjadi anggota kelompok sosial tertentu. Bagi penutur bahasa, kedua ragam itu sifatnya boleh dikatakan mantap. Di samping itu, kita pun harus sadar bahwa orang dapat berkomunikasi dengan menggunakan beberapa ragam setempat atau ragam sosial. Ia akan mampu beralih ke ragam lain agar serasi dengan situasi.

Ragam bahasa yang lain terjadi karena interferensi yang mengganggu komunikasi. Orang yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, atau sebagai bahasa asing, dapat terpengaruh oleh kebiasaannya menggunakan kaidah bahasa pertamanya. Jika ada orang yang memakai kalimat *Kusno membelikan rokok aku*, ia sebenarnya memakai kata Indonesia dengan pola kalimat Jawa: *Kusno nukokake rokok aku* atau perhatikan kalimat *Apa Bapak masih gerah?*

Ragam yang bersangkutan dengan sarana pembahasaannya dapat bersifat lisan atau tulisan. Biasanya, pemakaiannya bergantung pada jauh-dekatnya peserta komunikasi. Orang yang dalam kehidupan sehari-harinya memakai bahasa Indonesia dalam ragam lisannya saja tidak dengan sendirinya fasih menggunakan ragam tulis bahasa itu. Pemakaian ragam tulisan di dalam masyarakat bahasa berakibat jauh. Rekaman tulisan yang dapat bertahan lama memungkinkan pengalihan informasi yang lebih banyak dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Setelah ragam tulisan menjadi bagian kehidupan orang sehari-hari, ragam bahasa lisan tidak dapat lagi diperikan secara terasing karena terjadinya proses pemengaruhan timbal-balik yang dapat berakibat bahasa ragam lisan mengarah ke ragam tulisan yang sifatnya lebih konservatif. Dapat ditambahkan pula bahwa pendidikan, makin tinggi jenjangnya makin banyak mengutamakan ragam tulisan (buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi, ujian) walaupun ragam lisan menjadi dasarnya.

Pada ragam bahasa yang bertautan dengan fungsi pemakaiannya, orang memilih ragam bahasa tertentu sesuai dengan maksud komunikasinya. Ragam yang digunakan dalam berbagai ranah kehidupan, di dalam berbagai jenis situasi, disebut *laras bahasa*. Laras bahasa terutama berbeda dalam segi bentuknya, yakni dalam ciri tata bahasanya dan lebih-lebih lagi di dalam pemilihan kata atau diksinya. Bandingkanlah satu dua contoh yang berikut ini. Kalimat resep dapur akan berbunyi: *Iris cabai merah tipis-tipis*. Instruksi pada kemasan obat sering dirumuskan, *Jauhkan dari anak-anak*. (Frasa *obat ini* dilesapkan). Laras jurnalistik memiliki ciri khas pada tajuk berita: "Presiden Terima Duta Besar Baru."

Laras bahasa secara umum terlepas dari dialek setempat, tetapi ada juga kendala yang muncul. Kemahiran dalam laras bahasa tertentu dapat mempraanggapkan kemahiran dalam ragam bahasa yang lain. Pengalimatan dalam laras hukum, atau bidang ilmu lain, misalnya, mempraanggapkan kemahiran dalam pemakaian ragam bahasa orang terpelajar.

Berapa banyak laras bahasa yang dapat dikenali? Jumlahnya bergantung pada tingkat atau kadar perincian yang dibuat orang. Kita dapat berbicara tentang laras ilmu pengetahuan, atau tentang laras fisika, ataupun tentang laras elektromagnetika. Laras ilmu dan teknologi memiliki rentangan pokok bahasan yang sangat luas dan yang secara berasingan dapat dianggap bidang khusus tersendiri. Agaknya dapat diterima pendapat jika kita berbicara tentang laras keilmuan. Penerapan kebahasaan di bidang teknologi, antara lain, tercermin dalam buku panduan, pedoman, atau buku petunjuk yang wacananya kadang-kadang juga disebut *laras teknis*.

Jika laras bahasa ilmiah atau teknis dipakai dengan cara yang terlalu menonjol- atau menurut pendapat kalangan awam dengan cara yang berlebihan—, laras itu akan disebut *jargon*. Jargon itu dapat juga ditemukan dalam laras lain, seperti yang dipakai oleh kalangan birokrasi dan pers.

Komunikasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memprasyaratkan ragam lisan dan tulisan orang terpelajar, dapat diperinci dalam empat golongan: (1) paparan atau eksposisi, yang bertujuan memberikan informasi, penjelasan, atau pemahaman; (2) bahasan atau argumentasi, yang bertujuan meyakinkan orang, membuktikan pendapat atau pendirian, ataupun membujuk orang agar mau menerima pernyataan atau uraian; (3) kisah atau narasi, yang sifatnya bercerita, baik berdasarkan pengamatan maupun berdasarkan perekaan; dan (4) perian atau deskripsi, yang menggambarkan suasana dan alam sekitar yang sifatnya lebih banyak mengimbau pada pencaindera. Paparan ekspositoris yang jelas dapat disaksikan pada waktu kita membaca berita di media cetak atau mendengarkan warta di media elektronik. Paparan ada kalanya menyentuh perasaan, sebagaimana halnya dengan kisah dan perian. Berita tentang meninggalnya tokoh masyarakat yang terkenal, yang dikagumi, ataupun yang dibenci orang, agaknya akan menimbulkan beragam emosi dalam hati khalayak ramai. Namun, tujuan utama eksposisi ialah pemberian informasi secara lengkap dan wajar. Oleh karena itu, jenis paparan yang baik ialah yang pemakaian bahasanya jernih, ringkas, dan lugas. Eksposisilah yang akan dipilih jika orang menulis panduan, resep dapur, atau buku penuntun aturan pakai atau aturan main. Belajar menulis karangan ekspositoris yang efektif, bagi orang terpelajar, mungkin merupakan keterampilan menulis yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Bahasan argumentatif dapat didengar dan dibaca dalam perdebatan dan karangan editorial. Kebanyakan pidato politik termasuk kategori ini. Karena di dalam argumentasi kita terikat pada argumen, atau alasan pendapat, harus dijaga agar kita tidak melepaskan kendali pernalaran, atau jangan sampai kehilangan kuasa menahan emosi, pada saat membujuk atau mengajukan pendapat. Penulis karangan argumentatif, yang berniat meyakinkan khalayaknya, akan berhasil jika ia menguraikan

pendapatnya secara lengkap, dengan objektif, dan dengan akal sehat. Di dalam hal itu, logika, atau nalar yang masuk akal, dan pemahaman yang tepat tentang pendapat, atau anggapan, yang berlawanan merupakan syarat untuk argumentasi yang efektif.

Maksud narasi ialah membuat cerita; mengisahkan secara berturut-turut suatu rangkaian peristiwa. Pencerita itu hendak menyampaikan "apa yang terjadi". Narasi ialah bentuk wacana yang paling lazim dipakai jika kita hendak menarik minat atau menghibur. Daya pikat narasi dirasakan di mana-mana. Namun, maksud cerita bukan sekadar pengisahan rangkaian peristiwa. Para pencerita menyusun kisahnya dengan tujuan agar pembaca atau pendengarnya, dapat mengambil hikmah atau ibaratnya. Lewat kisah kita berkenalan dengan watak orang seorang, dengan peri kehidupan kaum miskin yang tertekan, atau dengan kelompok masyarakat yang bergelimpang dalam kemewahan.

Lewat perian atau deskripsi penyusunnya bermaksud agar khalayaknya dapat ikut melihat, mendengar, atau melihat, apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sendiri olehnya. Deskripsi atau perian sering dikombinasi dengan paparan, bahasan, dan lebih lagi dengan kisah. Deskripsi dapat tertuang dalam dua bentuk: (1) deskripsi yang objektif atau teknis dan (2) deskripsi sugestif atau impresionistik. Deskripsi objektif menuntut dari penulis/pembaca gambaran yang seakan-akan gambar foto. Di dalam deskripsi sugestif, selain keterangan yang objektif juga terungkap sikap emosional atau penilaian subjektif. Perpaduan yang baik antara penjelasan objektif dan ungkapan berdasarkan kesan sering menghasilkan karangan deskriptif yang elok.

Di dalam wacana ekspositoris dan argumentatif peran penalaran amat penting. Simpulan dari data yang ditemukan, atau dari bahan bukti, dapat diperoleh lewat penalaran induktif, yang berawal dari yang khusus atau spesifik dan berakhir pada yang umum, dan penalaran deduktif, yang bertolak dari kebenaran yang umum dan yang menuju ke simpulan yang khusus.

Laras bahasa keilmuan berkembang dengan sepenuhnya jika ada ragam tulisannya yang dapat dipakai untuk merekam penelitian di bidang ilmu dan teknologi dan untuk komunikasi ilmiah pada umumnya. Ada hubungan timbal balik antara kemajuan ilmu dan daya ungkap bahasa yang harus merekam kemajuan itu, kemampuan untuk menjelaskannya, dan selanjutnya kelengkapannya untuk menyampaikan kemajuan itu kepada khalayak umum. Masyarakat yang tidak mampu merangsang pengembangan ilmu tidak dapat berharap memiliki laras bahasa keilmuan; sebaliknya, ketiadaan laras bahasa keilmuan akan menghambat pembenihan generasi ilmuwan yang berturut-turut.

Ciri khas laras bahasa keilmuan ialah kecendekiannya. Bentuk kalimatnya mencerminkan ketelitian penalaran yang objektif. Ada hubungan logis antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain. Hubungan antarkalimat yang logis itu meliputi relasi sebab dan akibat, lantaran dan tujuan, hubungan kesejajaran, kemungkinan (*possibility*), kementakan (*probability*), dan kegeloratan (*necessity*) yang diekspresikan lewat

bangun kalimat yang khusus, misalnya, lewat superordinasi, subordinasi, serta koordinasi.

Pengeksplisitan hubungan itu memperikutkan munculnya kata penghubung yang sebelumnya berfungsi sebagai nomina. Contohnya ialah *sebab, karena, untuk, bagi, berkat, dan dengan*. Di dalam pemakaian bahasa masa kini sifat kenominalannya masih tampak pada bentuk seperti *sebabnya, oleh karenanya, untukku, bagimu, berkat-Nya, dan tiada dengan*. Di samping itu, perbedaan antara *possibilis* dan *probabilis* dirasakan perlu dinyatakan dengan kata yang berlainan. Kalimat tunggal yang pendek-pendek perlu ditata demikian rupa sehingga gagasan pokok terdapat dalam klausa utama dan gagasan penjelas dalam klausa bawahan.

Di dalam laras keilmuan ragam tulisan, fungsi subjek, predikat, dan objek, serta hubungan di antara fungsi itu masing-masing lebih nyata. Peranti seperti huruf kapital, huruf miring, tanda kutip, dan paragraf tidak mengenal padanannya yang sama jelasnya dalam ujaran. Karena perkembangan dan pengembangan ilmu terutama berlangsung dengan sarana tulisan, semua peranti tulis-menulis yang disebutkan di atas khusus berlaku dalam karangan ilmiah.

Di dalam karangan yang efisien dan efektif, paragrafnya berpautan, dan kalimat di dalam paragrafnya juga bertalian. Perpautan itu mensyaratkan adanya peralihan yang lancar antara bagian karangan yang satu ke bagian yang lain sehingga peralihan penulis dengan mudah dapat dipahami. Setiap gagasan pokok diungkapkan oleh sebuah kalimat topik yang menjadi inti paragraf. Kalimat inti itulah yang harus dinyatakan secara eksplisit; tempatnya pada awal paragraf atau di dekatnya sehingga pendengar/pembaca dapat disiapkan untuk uraian selanjutnya. Pokok paragraf dapat dikembangkan dengan dua jalan: (1) pengembangan dengan ilustrasi yang memanfaatkan logika induktif dan (2) pengembangan dengan analisis peralihan atau penjelasan yang menggunakan logika deduktif. Kedua cara itu dapat dipakai secara berdampingan di dalam satu paragraf.

Paragraf yang berhasil tidak hanya lengkap karena pengembangannya, tetapi juga karena menunjukkan kesatuan di dalam isinya. Kesatuan itu dicapai karena pembicara/penulis hanya mengembangkan satu gagasan pokok saja. Tiap kalimat di dalam paragraf bertalian dengan ide pokok itu. Keutuhan paragraf dirusak karena (1) penyisipan perincian yang tidak bertalian dan (2) pemasukan kalimat topik yang kedua atau gagasan pokok lain ke dalamnya. Yang terjadi ialah pelanturan dan perancuan dua pokok.

Kalimat yang efektif memiliki ciri keutuhan, perpautan, penempatan fokus (pumpunan) kalimat, kehematan kata, dan variasi. Keutuhan itu dinyatakan oleh keutuhan struktur kalimat dan kesatuan logika yang jalan-menjalin. Jika salah satu tidak ada, kita berhadapan dengan penggalan yang bukan kalimat. Perpautan di dalam kalimat menyangkut pertalian di antara unsur-unsurnya. Perpautan itu akan nyata jika (1) pemakaian kata ganti diperhatikan; (2) gagasan yang sejajar dituangkan ke dalam bangun yang sejajar; dan (3) jika sudut pandang terhadap isi kalimat tetap sama. Penempatan fokus dapat dicapai dengan (1) pengubahan urutan kata yang lazim dalam

kalimat, dengan (2) pemilihan bentuk aktif atau pasif, atau dengan (3) penggunaan puntuasi khusus. Kehematan dalam pengungkapan berarti pembuangan kata yang mubazir dan penghindaran konstruksi yang berputar-putar. Selanjutnya, variasi diperoleh dengan (1) pemakaian berbagai jenis kalimat yang berbeda menurut struktur gramatikalnya; (2) pemakaian kalimat yang panjangnya berbeda-beda; dan (3) pemakaian urutan unsur kalimat, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dengan berselang-seling.

Laras keilmuan dari jurusan kosakata memerlukan istilah yang maknanya dalam cabang ilmu yang bersangkutan tidak taksa. Artinya, istilah itu tidak memiliki tafsiran ganda. Istilah itu ada yang dapat menyatakan perincian konsep secara spesifik, dan ada yang dapat melambangkan konsep yang abstrak dan generik. Kecendekiaan bahasa keilmuan yang telah disinggung di atas ditopang oleh peristilahan karena konsep yang khas dan rumit dapat dinyatakan dengan ringkas dan efisien.

Perhatikan beberapa contoh di bawah ini yang dikembangkan oleh ilmuwan kita.

1. biologi : bulunggas (*feather*), nutfah (*germ*), sintas (*survive*), peridi (*prolific*);
2. fisika : bahang (*heat*), panas (*warm*);
3. hukum : zina (*adultery*), mukah (*fornication*).

Tataran diksi dalam tulisan ilmiah lebih tinggi daripada dalam ragam beromong-omong. Pilihan kata itu diusahakan serasi dengan pokok ujaran atau tulisan. Artinya, pemakaian kata untuk pengacuan yang khas, yang sugestif, ataupun yang meluas, tidak salah tempatnya.

Di samping diksi yang serasi, karangan atau ujaran yang ilmiah memerlukan diksi yang cermat dan tepat. Makin khas suatu kata, makin cermat dan tepat maknanya. Kata yang konkret sering lebih cermat daripada kata yang abstrak. Kata tunggal alih-alih ungkapan yang berunsur dua, atau lebih, kadang-kadang dapat memperkuat diksi. Ungkapan yang idiomatik pun dapat memperkuat diksi yang cermat dan tepat. Sebaliknya, pemakaian pewatas, atau pemeris yang berlebih, dapat mengurangi kekuatan dan kecermatan diksi. Selanjutnya, diksi yang cermat dan tepat berkurang nilainya karena pemakaian ungkapan klise, yakni frasa yang sudah terlalu sering digunakan dan tidak lagi merangsang pikiran. Diksi yang tidak cermat hanya menegaskan sesuatu dengan kira-kira; diksi yang tidak tepat berarti diksi yang tidak betul, yang salah dan tidak kena.

Rangkuman uraian di atas tentang ciri laras bahasa keilmuan dapat disenaraikan sebagai berikut:

1. kelugasan dan kecermatan yang menghindari segala macam kesamaran dan ketaksaan;
2. keobjektifan yang sedapat-dapatnya tidak menunjukkan selera perseorangan;
3. pembedaan dengan teliti untuk nama, ciri, atau kategori yang mengacu ke objek penelitian atau telaahnya agar tercapai ketertiban berpikir;

4. penjauhan emosi agar tidak mencampurkan perasaan sentimen dalam tafsirannya;
5. kecenderungan membakukan makna kata dan ungkapannya, dan gaya pemerianannya, berdasarkan perjanjian atau pakat;
6. langgamnya yang tidak meluap-luap atau dogmatis;
7. penggunaan kata dan kalimat dengan ekonomis agar tidak lebih banyak daripada yang diperlukan.

Karena ilmu dan teknologi tidak mengenal batas geografi dan politik, dan metodenya di mana-mana boleh dikatakan sama jalannya, tidak mengherankan jika laras bahasa keilmuan di berbagai negeri menjurus ke arah kesamaan dan keseragaman pula.

Setengah orang sering berdalih bahwa pengembangan dan pembinaan laras bahasa tidak perlu karena masyarakat yang "memiliki" bahasa dengan sendirinya sudah tahu bagaimana memakai bahasanya. Jika pendapat itu benar, apa gunanya ada Pusat Bahasa yang oleh pemerintah justru ditugasi dan diberi kewenangan mengembangkan dan membina pemakaian bahasa?

Mahasiswa dan sarjana semuanya ikut memiliki bahasa Indonesia. Apakah kaum cendekia itu dengan sendirinya dapat menggunakan laras keilmuan? Jika begitu, tidak ada makalah, skripsi, tesis, atau disertasi yang perlu diperbaiki lagi bahasanya karena pengarang yang ikut memiliki bahasa Indonesia tidak boleh diganggu gugat.

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Pengembangan Laras Bahasa dalam Pengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Modern
Pemakalah : Anton M. Moeliono
Pemandu : Mien A. Rifai
Laporan : Erwina Burhanuddin
Widiatmoko

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Noerzisri A. Nazar, Institut Teknologi Bandung

Laras bahasa keilmuan erat kaitannya dengan penggunaan istilah disiplin ilmu tertentu dan pemahamannya dalam materi disiplin ilmu tersebut. Pemahaman di sini berarti bukan keahlian.

Pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai pengajaran bahasa Indonesia pada jurusan nonbahasa dan sastra Indonesia? Pengajarnya apakah ahli bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan ilmu yang sesuai dengan jurusan yang diajarkan atau ahli dalam bidang/disiplin tersebut yang dilengkapi dengan pengetahuan bahasa Indonesia dengan cara menatar mereka.

Jika Bapak setuju dengan yang kedua, apakah memadai pengetahuan bahasa Indonesianya sebagai pengajar bahasa Indonesia apabila hanya diperoleh melalui penataran tersebut.

Jawaban:

Jika saya bisa menangkap pertanyaan Ibu dengan benar, yaitu apakah pengajar bahasa Indonesia itu dapat menggunakan istilah atau dari manakah kita mengharapkan istilah? Dengan melihat kembali ke tahun-tahun pertama revolusi kita, kita dapat melihat bahwa pada waktu itu dunia pendidikan berhadapan dengan tugas yang sangat besar, yaitu bagaimana dengan waktu yang singkat menerjemahkan konsep-konsep iptek ke dalam bahasa Indonesia. Prinsip itu sebenarnya juga berlaku dewasa ini. Kesulitannya di dalam kehidupan kita sekarang ialah bahwa banyak ilmuwan dan teknologawan Indonesia yang terkemuka memperoleh pendidikannya di luar negeri sehingga memperoleh pengetahuan dan konsepnya itu dalam berbagai bahasa asing dan mereka tidak terlatih di dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, mereka akan memperkenalkan konsep itu dengan istilah Inggris. Jika Pusat Bahasa, sekarang ini, mengajak serta pakar-pakar ilmu pengetahuan Indonesia mengembangkan kosakata peristilahan, kesulitannya ialah tidak adanya sinkronisasi atau koordinasi di antara unit-unit yang ada di Departemen Pendidikan. Idealnya adalah, jika semua istilah yang dapat

diperoleh lewat kerja sama pakar ilmu itu—karena peristilahan itu sepatutnya dikembangkan oleh pakar ilmu itu—disalurkan ke, misalnya, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Menengah agar bisa masuk ke dalam jajaran persekolahan dan masuk ke dalam buku-buku pelajaran. Hanya dengan cara itu kita dapat mengharapkan istilah yang berasal atau yang patut dipakai dalam laras bahasa keilmuan itu menjadi milik bersama dalam pengembangan ilmu. Jadi, guru yang mengajarkan itu adalah ahli bahasa yang mengerti disiplin ilmu dan bersedia memakai istilah yang terhasil seandainya dapat terjangkau atau dapat dipasarkan. Hal itu perlu dikemukakan karena selama ini hasil-hasil peristilahan itu tidak boleh diperjualbelikan atau jika akan diperjualbelikan harus disalurkan lewat penerbit-penerbit sehingga dampaknya tidak begitu terasa.

2. **Pertanyaan:** Muhammad Darwis, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia dewasa ini tidak bermartabat, tidak bergengsi, tidak komersial, dan tidak modern. Hal itu disebabkan oleh apa yang kita upayakan sekarang ini hanya seperti memangkas rumput saja, imbauan kita belum sampai menyentuh pada persoalan yang sebenarnya. Temuan yang ditulis di dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi tidak dapat menggugah bangsa lain untuk mendapatkan isinya atau mempelajari bahasanya. Jadi, bukan terletak pada persoalan menciptakan istilah.

Banyak teman yang kecewa dengan istilah yang Bapak gunakan, yaitu *setengah orang*. Padahal, sudah ada istilah *sebagian orang*. Kalau digunakan istilah *setengah orang*, mungkin ada pula istilah *sepotong orang*.

Jawaban:

1) Bagian pertama saya dukung.

Kita sebagai pencinta bahasa jangan sampai melihat bahasa itu lepas dari masyarakat. Bahasa itu tidak dapat dilepaskan dari budaya. Saya tidak dapat membayangkan jika manusia penutur bahasa itu tidak disiplin dalam kehidupan sehari-hari akan dapat berdisiplin dalam bahasa. Jika manusia Indonesia tidak menjunjung tinggi mutu dalam kehidupannya, ia pun tidak akan menuntut mutu di dalam bahasanya. Jadi, walaupun kongres bahasa atau muktamar itu penting, kita akan menemui jalan buntu jika jalan pikiran orang Indonesia juga tidak berubah. Kecendekiaan bahasa tidak akan tercapai jika dalam pendidikan kita kecendekiaan itu tidak menjadi tujuan pendidikan formal. Jadi, semuanya itu mempunyai hubungan yang timbal balik.

2) Anda tidak setuju dengan ungkapan *setengah orang*, itu menunjukkan bahwa ungkapan idiomatik *setengah orang* tidak termasuk ke dalam logat Anda. Jadi, kalau Anda tidak senang, jangan dipakai, tetapi jangan melarang orang memakai idiom itu.

Masalah yang sama juga timbul pada hari pertama. Kata *kudapan* itu di Sumatera Barat mempunyai nilai yang kurang baik. Orang Jawa, jika berbahasa Jawa, tidak senang dengan kata *pamer*, seperti *oyo pamer*. Akan tetapi, jika kata itu disumbangkan ke dalam bahasa Indonesia, jangan ditautkan lagi dengan konotasi berbahasa Jawa. Sekarang kita dengan bangga menyelenggarakan "pameran hasil industri Indonesia", misalnya. Jadi, jika kita harus memperhatikan apa yang ada di dalam bahasa daerah masing-masing itu, kita tidak akan maju di dalam penyumbangan saham bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

3. **Pertanyaan:** J.D. Parera, IKIP Jakarta

Sebagai seorang pemerhati bahasa, apakah Bapak sependapat dengan saya bahwa kita sekarang ini menghadapi pendisiplinan berpikir dan pendisiplinan berbahasa. Akan tetapi, ilmuwan sering berbahasa dengan laras yang hanya dapat dipahami antarsesama mereka, padahal ilmu itu harus dikomunikasikan. Menurut pendapat saya, kita tidak mempunyai apa yang disebut dalam bahasa Jerman, *Bildungssprache*, yaitu bahasa ilmu untuk pendidikan. Menurut Bapak, mana yang harus kita kembangkan terlebih dahulu? Menurut saya, *Bildungssprache* ini yang harus dikembangkan. Apakah Bapak sependapat dengan saya?

Jawaban:

Gagasan Anda itu menyinggung suatu masalah yang lebih besar, yaitu kenyataan suasana konformisme di dalam masyarakat budaya kita ini. Kita takut akan keberagaman, kita takut akan variasi. Nah, jika ini dapat berkurang, apa yang dirasakan perlu oleh Bapak Parera, itu dengan sendirinya akan berkembang. Kita memang berasal dari latar budaya yang berbeda-beda. Akan tetapi, kita sangat khawatir mengemukakan bahwa pemakaian bahasa Indonesia di berbagai ranah kehidupan, termasuk dunia pendidikan, memerlukan pengembangan yang besar.

Kembali pada soal laras bahasa pendidikan, masalah ini menuntut daya cipta dari penulis buku pelajaran. Daya cipta guru dari semua bidang ilmu yang, seperti kita dengar di dalam sidang pleno atau sidang komisi, ternyata seakan-akan bahasa Indonesia itu menjadi ladang guru bahasa Indonesia saja, sedangkan guru IPA merasa tidak terkait. Jadi, jika *Bildungssprache* diminta agar dikembangkan, kembali kepada mutu sumber daya manusianya. Jika mutu sumber daya manusia Indonesia itu belum berubah, tentu saja bahasa yang dipakai oleh sumber daya manusia itu kira-kira sama mutunya.

4. **Pertanyaan:** I Wayan Bawa, Fakultas Sastra Universitas Udayana

Sehubungan dengan masalah pengembangan laras bahasa, unsur-unsurnya adalah masalah norma, masalah kosakata dan istilah, dan jenis paparan. Barangkali setiap laras bahasa terikat oleh unsur yang diperlukan. Pertanyaan saya ialah siapa

yang akan memulai untuk mengembangkan laras bahasa ini karena banyak bidang yang harus disiapkan, misalnya bidang pariwisata. Sebagai contoh, kata *springbed* apa padanannya dalam bahasa Indonesia, apakah *bed meloncat* atau *dipan loncat*, atau dibiarkan begitu.

Jawaban:

Pertanyaan Bapak *siapa yang akan memulai* menyiratkan bahwa usaha itu belum dimulai, padahal laras bahasa itu sudah ada, hanya belum diberi nama. Jadi, apa yang sekarang sudah dipakai di bidang hukum, di bidang perbankan, di bidang masak-memasak, di bidang arsitektur itu masing-masing sudah dapat disebut laras bahasa. Yang perlu ialah kesadaran bagaimana kita merasionalkannya. Jadi, tidak asal jadi. Akan tetapi, intisari uraian saya itu ialah kita harus mencendekiakan bahasa Indonesia. Itu tidak berarti lalu kita harus melupakan susastra. Kita harus mengajarkan kepada para mahasiswa bagaimana hubungan logika dengan bahasa. Jadi, jika seandainya akan dikaitkan dengan siapa yang akan memulai, saya menganjurkan ajarkanlah kepada mahasiswa, dari semester pertama, bagaimana dapat bernalar di dalam bahasa. Yang menciptakan istilah di dalam laras, tentunya adalah para ahli. Mengapa tidak diajak pakar terkait untuk menciptakan, misalnya, *ranjang pegas* atau *kasus* seperti itu.

5. Pertanyaan: Budi, IKIP Surabaya

Diakui atau tidak diakui, ada satu riak yang timbul akibat benturan antara pengembangan bahasa Indonesia dan usaha pemeliharaan bahasa daerah. Riak itu dapat dilihat dengan adanya satu kekhawatiran para penutur bahasa daerah akan musnahnya bahasa daerah pada suatu masa akibat pengembangan bahasa Indonesia itu. Kata *pelihara* dalam Penjelasan Pasal 36, Bab XV, UUD 1945, itu sampai sekarang belum dioperasionalkan dan belum diterjemahkan. Bagaimana usaha *memelihara* itu. Selama ini kata *memelihara* itu diwujudkan hanya dalam bentuk penelitian. Apakah tidak seyogianya dalam kongres ini kita mengajukan usul bahwa kata *pemeliharaan* itu perlu dioperasionalkan.

Jawaban:

Saya setuju. Kita perlu mengimbau agar di dalam GBHN yang akan datang, pemeliharaan bahasa daerah perlu ditegaskan operasionalisasinya.

6. Pertanyaan: Ny. S. Suryono (Bu Kasur), Yayasan Setia Balita, Jakarta

Apakah istilah *sintas* itu hanya dipakai dalam istilah biologi? Apakah dapat dipakai dalam konteks lain. Misalnya, saya selalu mengatakan kepada anak-anak agar makan banyak, minum banyak agar *survive*, untuk dapat bertahan hidup.

Jawaban:

Kata *sintas* yang berasal dari laras cabang biologi itu ditawarkan untuk dipakai pada berbagai konteks. Anda boleh setuju dan tidak setuju, tetapi kita jangan terlalu cepat mengatakan dipaksakan harus dipakai. Karena tidak dikenal, kita tidak mau memakainya. Jika kata itu menarik dan sedap didengar, Anda dapat memakai kata *sintas*, *menyintas*, *disintas*. Jadi, terpulang pada cita rasa Anda yang mau memakai kata *sintas*, *disintasi*, dan *menyintasi* untuk menggantikan kata *survive*.

PENERJEMAHAN DENGAN MESIN, PROSPEK, DAN PERMASALAHANNYA

Darmawan Sukmadjaja

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1. Pendahuluan

Perkembangan telekomunikasi dan informasi yang pesat mendorong peningkatan pertukaran informasi antarnegara. Di sisi lain, perbedaan bahasa antara beberapa negara menghambat laju informasi dan komunikasi internasional. Oleh karena itu, diperlukan seorang penerjemah untuk menjembatani kesenjangan bahasa ini.

Kebutuhan suatu alat yang dapat menerjemahkan teks atau paling tidak dapat membantu seorang penerjemah, sebenarnya sudah didambakan manusia sejak dulu. Kebutuhan ini semakin meningkat dalam era globalisasi saat ini.

Penelitian penerjemahan dengan mesin atau mesin penerjemah (MT; *machine translation*) banyak menarik minat para pakar komputer dan juga linguistik. Hal itu didukung oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Otomatisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi. Hal itu berlaku juga dalam dunia penerjemahan.
- 2) Penerjemahan merupakan salah satu aktivitas manusia sehingga desain konseptual MT dapat diperoleh dengan memodelkan proses penerjemahan yang dilakukan oleh manusia.
- 3) Pemakaian kamus elektronik yang *on-line* mempercepat waktu penerjemahan.

Penelitian MT yang merupakan penganalisisan bahasa, sebenarnya sudah berlangsung hampir setengah abad. Penelitian MT itu sendiri pada awal penelitian tidaklah semaju yang diharapkan. Hal itu disebabkan oleh perangkat keras serta teknik-teknik yang digunakan saat itu belum dapat mendukung penelitian MT. Walaupun penelitian MT saat itu mengalami hambatan, teknik-teknik dasar sistem MT telah terbentuk. Kemajuan teknologi elektronik yang pesat dapat menghasilkan komputer yang mampu memproses dengan kecepatan yang tinggi dan mampu menyimpan data yang besar. Di bidang komputer sendiri juga tercatat kemajuan di bidang teknologi kecerdasan buatan (AI; *artificial intelligence*) yang di antaranya termasuk juga pengolahan bahasa alami (NLP; *natural language processing*). Dengan munculnya bidang linguistik komputasi (*computational linguistics*), sistem pengolahan

bahasa alami pada umumnya serta MT secara khusus dapat berkembang dengan cepat. Beberapa negara maju yang mempunyai kesenjangan bahasa, seperti Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa giat mengadakan penelitian NLP terutama MT, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. MEE harus menerjemahkan dokumen-dokumen ke dalam sembilan bahasa yang digunakan oleh dua belas anggotanya. Hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila penelitian MT di Eropa, terutama Prancis dan Inggris begitu giat mereka lakukan. Setelah melalui masa pasang surutnya, terutama setelah ALPAC report (report dari *Automatic Language Advisory Committee* yang mengakibatkan pengurangan biaya penelitian MT) dikeluarkan, akhirnya sistem MT telah memasuki era komersialisasi. Telah banyak dijual sistem MT untuk beberapa bahasa walaupun masih banyak kelemahan dan keterbatasan pada sistem MT sekarang ini, setidaknya sistem tersebut telah dapat membantu kita dalam proses penerjemahan.

2. Teknologi MT

Dikenal tiga macam strategi umum yang digunakan dalam pengembangan MT dan biasanya strategi ini juga sering dijadikan batasan dari generasi sistem MT. Selain tiga strategi tersebut di atas, akhir-akhir ini diperkenalkan cara pendekatan suatu sistem MT yang berbeda dengan strategi yang sebelumnya.

a. Strategi Penerjemahan Langsung

Dalam strategi penerjemahan langsung setiap kalimat yang akan diterjemahkan diproses melalui sederetan prosedur. Keluaran dari satu prosedur menjadi masukan dari prosedur berikutnya. Prosedur ini di antaranya analisis morfologi, identifikasi homograf, frasa nomina dan verba, pengolahan idiom, identifikasi subjek predikat dan keambiguan, sintesis morfologi, dan pengaturan kembali kata dan frasa ekuivalen ke kalimat bahasa tujuan.

Sistem penerjemahan langsung dirancang untuk suatu pasangan bahasa asal dan bahasa tujuan yang spesifik. Sistem ini sangat bergantung pada keandalan kamus, analisis morfologi, dan perangkat lunak pengolahan teks.

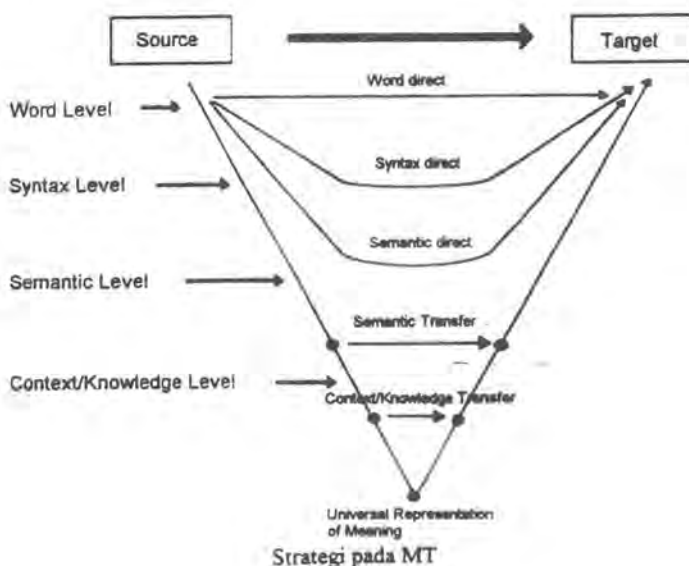
Prosedur yang digunakan dan urutan penggunaannya akan sedikit berbeda untuk sistem yang berbeda, tetapi pendekatannya sama untuk semua sistem penerjemahan langsung. Sistem MT yang menggunakan strategi penerjemahan langsung, di antaranya, adalah sistem **SYSTRAN** dan sistem **Universitas Georgetown**.

b. Strategi Transfer

Dalam strategi transfer, terdapat tiga tahapan proses untuk menerjemahkan suatu kalimat. Tahap pertama berupa penguraian kalimat asal ke dalam representasi

internal (antara) bahasa asal dan disebut proses analisis. Tahap kedua berupa proses transfer ke struktur representasi antara bahasa tujuan. Transfer dioperasikan pada tingkat leksikal dan struktural. Tahapan ketiga berupa pembentukan kalimat bahasa tujuan dari representasi internal bahasa tujuan. Proses ini disebut proses sintesis. Dalam strategi ini diperlukan tiga jenis kamus, yaitu kamus bahasa asal, kamus transfer bilingual, dan kamus bahasa tujuan.

Strategi ini merupakan perbaikan dari strategi penerjemahan langsung karena menggunakan struktur informasi di dalam prosesnya. Transfer dilakukan secara leksikal sehingga tidak dipengaruhi oleh tahapan analisis dan sintesis. Tingkat transfer berbeda dari sistem ke sistem. Representasi antara yang digunakan juga berbeda, mulai dari struktur batin, hingga anotasi pohon sintaks-semantik. Dalam tahapan transfer diperlukan komponen bilingual yang spesifik untuk tiap pasangan bahasa asal-tujuan. Metode transfer ini sangat sesuai bagi bahasa-bahasa yang mempunyai struktur tata bahasanya hampir mirip karena hal itu akan meringankan proses transfer. Sistem MT yang menerapkan strategi transfer di antaranya adalah sistem TAUM-METEO (Colmerauer, 1971) dari University Montreal untuk menerjemahkan laporan cuaca dari bahasa Inggris ke Prancis, sistem METAL (Bennet & Slocum, 1985) yang menerjemahkan bahasa Jerman-Inggris dalam bidang telekomunikasi dan MU sistem MT yang dikembangkan di Universitas Kyoto (Nagao, 1986), untuk menerjemahkan tulisan teknik dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Sistem yang dikembangkan di MEE juga banyak menggunakan strategi transfer ini, seperti sistem MT dalam proyek EUROTRA



c. Strategi Interlingua

Interlingua merupakan bentuk representasi internal yang terbebas, baik dari bahasa asal maupun dari bahasa tujuan. Pada dasarnya strategi *interlingua* merupakan pengembangan dari strategi transfer. Jika dalam strategi transfer digunakan dua macam representasi internal, dalam strategi *interlingua* digunakan satu representasi internal, yaitu *interlingua*. Dengan reduksi ini, sistem penerjemahan hanya mempunyai dua tahapan, yaitu tahapan analisis dan tahapan sintesis. Strategi ini sering juga disebut strategi pivot.

Proses penerjemahan dengan strategi *interlingua* menjadi lebih sederhana, yaitu pada tahapan pertama kalimat bahasa asal dianalisis ke bentuk *interlingua* melalui analisis morfologis, analisis sintaksis, dan analisis semantis. Pada tahapan kedua, dari representasi *interlingua* yang terbentuk ini kemudian dibangkitkan kalimat dalam bahasa tujuan melalui pembangkit sintaksis dan sintesis morfologi.

Dengan menggunakan strategi *interlingua* dimungkinkan untuk dibuat sistem penerjemahan *multilingua*. Untuk sistem penerjemahan *multilingua*, *interlingua* yang dipakai sebaiknya mencakup seluruh konsep dari bahasa yang terlibat.

Sistem penerjemahan yang memakai strategi *interlingua*, di antaranya, adalah Proyek Multilingual Mesin Penerjemahan CICC-Jepang antara bahasa Jepang dan bahasa negara tetangganya, seperti bahasa Indonesia, Cina, Malaysia, dan Thailand. DLT (Papegaa, 1986) dan *translator* (Nirenburg, 1985) juga contoh sistem MT yang menggunakan strategi *interlingua*.

Saya pergi ke pasar untuk membeli sayur.



Contoh Interlingua yang digunakan pada MT CICC

d. Strategi Basis Contoh (Example Base MT, EBMT).

Dasar pemikiran dari *Example Base MT* (EBMT) adalah sederhana (Nagao, 1984). Kalimat masukan S dicari dalam suatu basis teks dwi-bahasa, dan dalam basis teks ternyata terdapat S' dengan T' pasangan terjemahannya, maka T' merupakan terjemahan dari S apabila S' sesuai dengan S. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi ini lebih banyak mengandalkan pada contoh-contoh yang ada pada basis teks dwi-bahasa yang ada. Teknik pencarian dan pencocokan (*retrieval*) kalimat masukan dengan kalimat-kalimat yang ada dalam basis teks dwi-bahasa menjadi sangat penting dalam menghasilkan kalimat bahasa tujuan. Strategi ini tidak banyak memanfaatkan teori-teori linguistik, tetapi lebih banyak pada teknik pencocokan (*retrieval*).

Permasalahan utama dari EBMT adalah tidak selalu kalimat masukan akan cocok sepenuhnya dengan kalimat-kalimat dalam basis dwi-bahasa karena basis dwi-bahasa teks besarnya terbatas dan juga sangat bergantung pada bidang tertentu. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, ada beberapa pendekatan yang dilakukan, misalnya dengan memanfaatkan kamus tesaurus dan sinonim sehingga pencocokan dapat dilakukan lebih fleksibel. Di samping itu, juga dilakukan pendekatan dengan menentukan kriteria-kriteria pencocokan dengan memanfaatkan fungsi algoritma-algoritma atau aturan tertentu. Strategi EBMT banyak diteliti sekarang ini dan mulai dibuat prototipenya.

e. Strategi Hybrid

Strategi *hybrid* adalah penyatuan antara strategi EBMT dan strategi-strategi yang sebelumnya (*transfer*, *interlingua*, dll.). Tujuannya, tak lain adalah untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada setiap strategi. Kita sadari bahwa pengembangan EBMT relatif lebih mudah dan murah, bergantung hanya pada besarnya basis teks dwi-bahasa. Akan tetapi, kelemahan dari strategi ini adalah apabila tidak didapati kalimat yang cocok dalam basis teks, kemungkinan menghasilkan terjemahan yang baik sangat kecil sekali. Kelemahan itu diharapkan dapat diatasi oleh strategi-strategi yang lain. Saat ini sistem *hybrid* baru berupa konsep-konsep dasar saja, masih banyak permasalahan dalam implementasinya.

3. Proses pada MT

Proses penerjemahan dengan sistem mesin penerjemah dapat dibedakan ke dalam beberapa proses.

a. Masukan Bahasa Asal

Cara pemasukan (*input*) dalam sistem MT dapat dilakukan dengan pengetikan secara langsung kalimat demi kalimat atau dapat pula dengan mengumpulkan

kalimat dalam suatu *file* dan penerjemahan dilakukan sekaligus. Selain itu, masukan dari buku dan sebagainya dapat dilakukan dengan menggunakan OCR (*Optic Character Reader*). Dalam proses masukan, kalimat-kalimat masukan diubah dalam bentuk media elektronis agar dapat diproses oleh komputer.

b. Prasunting (Pre-editing)

Tujuan dari prasunting adalah untuk menghindari kalimat-kalimat yang panjang dan sulit agar pada waktu dilakukan penerjemahan dengan mesin akan banyak kalimat yang dapat diterjemahkan. Pada proses prasunting struktur-struktur kalimat diperbaiki, misalnya kalimat yang terlalu panjang diubah menjadi beberapa kalimat yang pendek, kalimat yang rancu (*ambigu*) diubah dengan menghilangkan kerancuannya. Dengan melakukan prasunting ini, keberhasilan penerjemahan dan akurasi hasil penerjemahan akan bertambah. Pada proses ini juga dilakukan pemeriksaan ejaan untuk mencari dan memperbaiki kata-kata yang salah ejaannya sehingga kata-kata kalimat masukan sudah terjamin ada dalam kamus sistem MT. Selain itu, pada proses prasunting ini juga dilakukan pekerjaan untuk memisahkan teks dengan gambar, graf, tabel, atau tanda-tanda khusus sehingga masukan dalam proses berikutnya hanyalah dalam bentuk teks.

c. MT

Proses ini adalah proses utama dari MT. Teks yang tersimpan dalam bentuk *file-file* elektronik menjadi masukan untuk selanjutnya diterjemahkan dan keluarannya akan berupa teks dalam bahasa tujuan. Pada proses ini tidak ada keterlibatan manusia.

d. Pascasunting (Post-editing)

Pada umumnya keluaran (*output*) dari sistem MT harus diperbaiki karena masih ada kalimat-kalimat yang tidak dapat diterjemahkan dan masih banyak hasil terjemahan yang kurang tepat. Pada proses pascasunting inilah hasil terjemahan diperbaiki oleh manusia agar lebih sesuai dengan teks masukan dan dapat dimengerti. Pada proses ini juga dilakukan penggabungan kembali dengan gambar, graf, dan tabel yang dipisahkan pada saat proses prasunting dengan teks.

e. Penulisan Ulang (Rewriting)

Penulisan ulang (*rewriting*) adalah pemeriksaan terakhir dari penerjemahan. Penulisan ulang dimaksudkan agar mendapatkan terjemahan yang baik. Penulisan ulang biasanya dilakukan oleh penutur asli (*native speaker*) yang tidak mengetahui/mengerti bahasa asal.

f. Pencetakan Hasil

Proses ini merupakan proses akhir dari penerjemahan dengan MT. Pada proses ini hasil terjemahan yang masih dalam bentuk elektronis diubah atau dicetak dengan penyesuaian *font* kata dan paragraf sehingga keluaran dari proses ini dalam bentuk kertas atau buku dalam bahasa tujuan.

4. Manfaat Lain dari Sistem MT

MT saat ini belum dapat menghasilkan terjemahan yang memuaskan. Oleh karena itu, masih diperlukan intervensi manusia sehingga biaya terjemahan dengan MT tidak memperlihatkan perbedaan yang besar sekali dibandingkan dengan terjemahan oleh manusia. Akan tetapi, dengan menggunakan MT ada hal-hal lain yang bermanfaat dan dapat mempercepat proses penerjemahan, misalnya hal-hal seperti berikut.

- 1) Penggunaan kata yang seragam, terutama istilah-istilah dan keseragaman di dalam *gaya* penerjemahan. Banyaknya penerjemah yang terlibat dalam penerjemahan, umumnya akan menghasilkan suatu terjemahan yang berbeda, baik penggunaan istilah-istilah dan juga penggunaan *gaya* bahasanya sehingga ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat dan memakan waktu yang lama bagi penyunting akhir yang harus menyeragamkan keseluruhan.
- 2) Tidak akan ada kalimat masukan yang terlewat diterjemahkan. Manusia melakukan terjemahan dengan melihat kalimat demi kalimat yang akan diterjemahkan sehingga kemungkinan ada kalimat yang terlewat diterjemahkan cukup besar.
- 3) Masukan dari media elektronik dapat dikirim secara langsung ke sistem MT dari jarak jauh, misalnya dengan menggunakan jaringan telepon sehingga pekerjaan dapat dilakukan di tempat yang berlainan dan terjadi pemanfaatan waktu yang cukup besar.
- 4) Terbentuknya kamus elektronik. Biasanya, sistem MT dilengkapi oleh tiga macam kamus, yaitu kamus yang sudah ada dalam sistem MT-nya yang biasanya terdiri dari kata-kata umum dan biasanya disebut sebagai kamus umum, kamus istilah teknik yang sangat bergantung pada bidang (dominan) terjemahan, dan kamus pemakai, merupakan kamus yang dikembangkan oleh pemakai untuk lebih menyesuaikan hasil penerjemahan dengan keinginannya. Dengan menambah terus-menerus kamus melalui proses MT, akan terbentuk kamus yang besar. Kamus yang dikembangkan oleh pemakai itulah akan menjadi warisan yang sangat bermanfaat sekali baginya dalam melakukan terjemahan-terjemahan.

5. Permasalahan Sistem MT Saat Ini

Dibandingkan dengan dua puluh tahun yang lalu, MT telah berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Hal itu tidak lain karena kemampuan perangkat keras

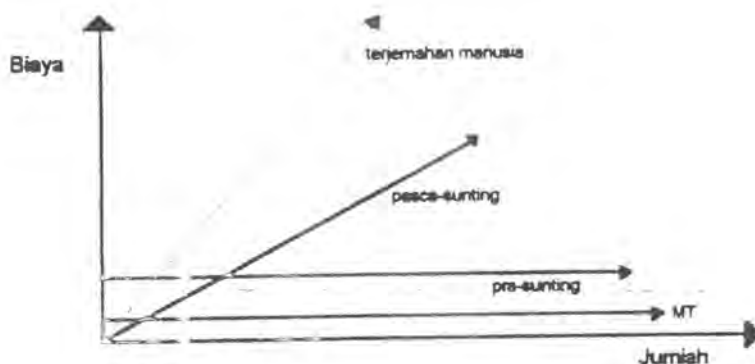
komputer yang mengalami kemajuan dan juga makin bertambah mahalnya tenaga manusia. Akan tetapi, kemampuan MT masih sangat terbatas walaupun pada akhir-akhir ini sudah mulai keluar produk-produk MT yang telah dikomersialkan. Berbagai penelitian telah dilakukan dalam penggunaan MT dan berbagai hasil juga didapat. Ada yang merasakan kemampuan MT masih kurang sehingga belum dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, di pihak lain ada yang merasakan MT sangat membantu, terutama dalam melakukan terjemahan pada lingkup (domain) tertentu dan dalam skala yang besar.

Kita simak keadaan penggunaan MT sekarang ini, terutama berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di Jepang. Tujuan dari pemanfaatan MT adalah mendapatkan terjemahan yang lebih murah dan pekerjaan penerjemahan dapat dilakukan dengan cepat. Kalau dilihat dari kemampuan MT sekarang ini masih memerlukan keterlibatan manusia, MT belum dapat menggantikan keseluruhan pekerjaan terjemahan manusia sehingga biaya penggunaan MT masih relatif tinggi karena masih adanya intervensi manusia.

Prasunting adalah suatu pekerjaan yang sangat mengandalkan pada kemampuan manusia. Orang yang melakukan prasunting adalah orang yang mengerti bahasa teks masukan dan juga mengetahui kemampuan sistem MT yang digunakannya dan pascasunting harus dilakukan oleh orang yang mengerti kedua bahasa, baik bahasa asal maupun bahasa tujuan untuk dapat melakukan perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan angket yang dilakukan pada beberapa perusahaan penerjemah di Jepang, telah didapat suatu data bahwa setiap halaman biaya sistem MT hanya 7-10% dari biaya penerjemahan dengan manusia. Berdasarkan prakiraan bahwa setelah pra- dan pascasunting biaya yang diperlukan meningkat tinggi karena adanya keterlibatan manusia, menjadi kurang lebih 75% dari biaya penerjemahan dengan manusia.

Jenis pekerjaan pra- dan pascasunting adalah suatu bidang pekerjaan yang baru. Pada pekerjaan prasunting bukan saja pengetahuan kebahasaan, tetapi juga dituntut pengetahuan mengenai sistem MT. Biasanya, untuk mendapatkan seorang yang dapat melakukan pekerjaan prasunting, dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus. Demikian juga dengan pekerjaan pascasunting, dan biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh seorang penerjemah pemula.



Gambaran perbandingan biaya MT

Gambar di atas menerangkan perbandingan biaya-biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan sistem MT. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa apabila terjemahan dilakukan dalam jumlah yang besar, maka biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan MT dapat jauh lebih murah dibandingkan penerjemahan dengan manusia. Di sini juga dapat dilihat bahwa apabila biaya pra- dan pascasunting dapat ditekan serendah mungkin, manfaat penggunaan MT akan terasa sekali. Beberapa usaha memang dilakukan untuk menekan biaya-biaya tersebut, misalnya dengan mengembangkan perangkat-perangkat pendukung untuk pekerjaan pra- dan pascasunting, memberikan pekerjaan sunting tersebut pada negara-negara yang tenaga manusianya relatif lebih murah, seperti ke Singapura atau negara lainnya melalui jaringan komputer dan hal itu sedang dilakukan uji coba pada beberapa perusahaan.

6. Prospek MT

Permintaan penerjemahan bertambah setiap tahunnya, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, tetapi persediaan (*supply*) akan tenaga penerjemah tidak berkembang sesuai dengan permintaan sehingga penerjemahan semakin lama semakin mahal adalah suatu kenyataan. Untuk mengatasi keadaan tersebut, manusia terpaksa harus mengandalkan bantuan pada mesin seperti MT untuk mengatasi masalah ini,

Penerjemahan dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan tangan yang mempunyai nilai seni, sedangkan sistem MT adalah suatu alat yang melakukan penerjemahan berdasarkan teknik. Tujuan sistem MT adalah melakukan penerjemahan dengan biaya murah dan dengan kecepatan tinggi. Oleh karena itu, mendapatkan metode yang efektif dari penggunaan sistem MT harus diciptakan teknik baru penerjemahan dokumen yang berbeda dengan penerjemahan manusia. Sekarang ini banyak dilakukan penelitian mengenai cara atau metodologi yang tepat bagi penggunaan sistem MT yang ada sekarang ini agar dengan kemampuannya yang ada saat ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Banyak pakar yang berpendapat dan percaya bahwa keadaan sistem MT sekarang ini mempunyai persamaan pada waktu alat pengolah kata (*word processor*) dikembangkan pertama kali. Pada saat itu masih banyak dijumpai kekurangan pada kemampuan alat pengolah kata, baik dari cara pengoperasiannya yang masih cukup rumit dan tidak *user friendly* maupun kemampuan cetaknya yang sangat sederhana tidak didukung oleh pilihan bentuk karakter yang banyak. Di samping itu, juga harganya masih sangat mahal. Sedikit sekali orang yang mau atau dapat menggunakan alat pengolah kata. Karena kemampuannya yang terbatas itu, banyak juga yang segan untuk menggunakannya. Mereka lebih terbiasa dengan mesin ketik, sebaliknya banyak juga yang mencoba menggunakan alat tersebut dan kemudian terbiasa dengan cara pemanfaatan alat pengolah kata, kemudian orang yang menggunakannya akan merasa segan untuk menggunakan mesin ketik. Kemajuan teknologi komputer yang drastis sekali, baik perangkat keras maupun perangkat lunak telah mengakibatkan kita dapat menjumpai alat pengolah kata yang mempunyai kemampuan seperti sekarang ini.

Sebenarnya dengan teknologi NLP, kemampuan sistem MT dapat sedikit ditingkatkan, tetapi untuk itu diperlukan biaya yang cukup tinggi. Untuk dapat menganalisis lebih dalam lagi arti kalimat masukan atau menghapuskan kerancuan yang ada dari hasil analisis diperlukan kemampuan perhitungan (*computing power*) yang besar. Peningkatan kemampuannya tidak berimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Paralel komputer yang mempunyai kemampuan perhitungan yang sangat besar, harganya masih sangat mahal sekali saat ini. Kita mengharapkan paralel komputer juga akan menjadi murah kemudian hari. Di samping itu, kemajuan teknologi perangkat lunak komputer terutama teknologi NLP dan inteligensia buatan juga merupakan harapan untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi saat ini.

7. Penutup

Teknologi NLP khususnya MT telah demikian berkembang di negara-negara maju. Sistem MT telah mulai dicoba oleh negara-negara maju. Akan tetapi, pekerjaan penerjemahan juga sangat diperlukan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia untuk dapat mempercepat penyerapan informasi dari luar. Perlu kita sadari bahwa

pada teknologi ini kita tidak dapat bergantung pada produk-produk dari luar karena teknologi ini sangat bergantung pada bidang kebahasaan. Penutur asli yang terbaik untuk mengembangkan sistem MT.

BPPT sangat menyadari hal tersebut di atas, terlebih-lebih dengan pengalaman yang kami peroleh dari kerja sama dengan pemerintah Jepang dan negara Asianya dalam mengembangkan sistem *multilingual machine translation*. Pengalaman yang sangat berharga telah didapat oleh peneliti-peneliti kita, baik dalam bidang linguistik maupun dalam bidang teknologi NLP-nya sendiri. Banyak pula produk yang dihasilkan dalam kerja sama ini. Akan tetapi, kami juga menyadari masih banyak pula permasalahan yang perlu ditangani terutama yang berkaitan dengan bidang bahasa. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kerja sama yang lebih erat lagi dengan para pakar bahasa untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam sistem NLP ataupun MT yang sedang dikembangkan. Di samping itu, kami juga percaya bahwa hasil penelitian kami dapat dimanfaatkan oleh para pakar bahasa untuk melakukan penelitian kebahasaan yang tidak berhubungan dengan sistem MT ataupun NLP.

Contoh hasil sistem MT dari Bahasa Jepang ke bahasa Inggris.

- SRC 言語による違いは、語順の違い、文法機能の違いからくる素性や素性値の違い、およびユニフィケーションの対象の違いで解決される。
- 1ST The difference due to language can be traced to (で解決される) the difference in word order, the difference in identity (素性) and identity value (素性値) due to difference in grammar function, and the difference in target of unification.
- 2ND The difference due to language appear as the difference in word order, the difference in feature and feature value due to grammatical function of each language, and the difference in objects to be applied to the unification operation.
- 030 The difference according to the language is solved by the difference of the object of the difference between the feature which comes from the difference of the word order and the difference of a grammatical function and the feature value and unification.
- 040 A difference in a language is solved in the difference of word order, the difference of a feature and a feature value caused by a difference of a grammatical function and the difference of the object of unification.
- 130 A difference by a language is solved in a difference of a word order, a difference of a feature and feature value that come from a difference of grammar function and a difference of an object of unification.

DAFTAR PUSTAKA

- Kikai Honyaku no Kaihatsu to Jitsuyo Ni Kansuru Jittai Chosa*. 1989. Japan Electronic Industry Development Association.
- Nagao, M. 1984. *A Framework of a Mechanical Translation between Japanese and English by Analogy Principal*.
- Satoshi, Sato. 1993. "Example-Based Translation of Technical Terms." Proc. of the Fifth International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation 1993 (pp. 58-68).
- Sergei, Nirenburg. 1993. "Two Approaches to Matching in Example-Based Machine Translation." Proc. of the Fifth International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation 1993 (pp. 47-57)
- Survey of MT usage in Japan. "Report from Work Groups System Application Technic W.G." Journal of the Asia-Pacific Association for Machine Translation.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Penerjemahan dengan Mesin, Prospek, dan Permasalahannya
Pemakalah : Darmawan Sukmadjaja
Pemandu : Bambang Kaswanti Purwo
Pencatat : Alma Evita Almanar
Muhammad Jaruki

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: P.W.J. Nababan, IKIP Jakarta

- a. Yang dimaksud dengan NLP itu apakah *Natural Language Processing*?
- b. Saya kurang mengerti KWIC-nya itu, *concordance system* itu. Kalau saya, sebagai linguist, barangkali akan mengatakan itu *expanse system*. Keterangan itu dapat saya pahami.
- c. Mengenai *pre-editing* dan *post-editing* ini apakah diperlukan kedua-duanya atau cukup satu saja. Kalau yang berat barangkali pascasunting daripada prasunting. Kalau sistem sudah dibuat dan ini masuk ke sistem sana yang diperlukan hanya pascasunting saja sehingga biaya tidak terlalu mahal.

Jawaban:

- a. NLP memang *Natural Language Processing*.
- b. Kami dari orang komputer tidak mengenal *concordance system*, tetapi lebih mengenal KWIC, yang maksudnya adalah *Key Word in Context*. Pada prinsipnya cara kerjanya sama, yaitu di dalam mencari kata di dalam *corpus* dalam penelitian mengenai satu kata di dalam *corpus* dapat dicari bagaimana kedudukannya dalam suatu kalimat. Kita tidak usah mempermasalahkan mengenai istilah tersebut. Akan tetapi, untuk istilah tersebut orang bahasa menggunakan istilah *concordance system*. Itu adalah sistem komputernya, yaitu *soft ware* untuk melakukan sistem KWIC itu.
- c. Mengenai *pre-* dan *post-editing* memang menjadi permasalahan sampai saat ini. Akan tetapi, ada terobosan yang dilakukan oleh pihak Jepang karena informasi yang kita dapat dari sana mengenai *pre-editing* itu. Mereka bisa memberikan suatu *soft ware* atau suatu sistem yang bisa dibeli orang dengan mudah. Begitu juga *post-editing*. Jadi, dibantu dengan komputer supaya lebih mudah, misalnya *sectional word*, untuk mencari kamus juga, dan satu lagi yang mereka lakukan terobosan lagi adalah *pre-editing* dan *post-editing* itu tidak dilakukan di Jepang. Di Jepang mereka melakukan *pre-editing* itu dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Sekarang mereka coba di Singapura karena

memang untuk *pre-editing* itu harus dilakukan oleh orang yang mengerti bahasa Inggris. Di Amerika pun mahal, di Singapura atau di India nanti lebih murah. Jadi, mengenai pascasuntingnya, *post-editingnya* tidak dilakukan, cukup menerjemahkan saja ke mesinnya. Jadi, pertama-tama kalau sudah ada media elektronik itu mudah sekali, dengan jaringan (*network*) bisa dikirim langsung ke Jepang, tidak perlu orangnya datang ke Jepang. Tidak juga barangnya dikirim, tetapi langsung bisa dikirim via jaringan telepon. Mungkin dengan komputer *network*, ihwal waktu lebih cepat dan murah.

2. **Pertanyaan:** Jan Hoesoeda, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Saya mempunyai tugas di kelompok Ikatan Akuntan UI dan Pusat Bahasa untuk memulai menyusun tim pembentukan kamus akuntansi. Sumbernya adalah kamus-kamus berbahasa Inggris. Kemudian apa yang bisa saya bina bersama Bapak di dalam pemanfaatan komputer di dalam pembuatan kamus itu dalam jangka waktu proyek sekitar dua atau tiga tahun?

Jawaban:

Mengenai penyusunan kamus akuntansi, saya berpendapat yang pertama harus dilakukan adalah komputerisasi. Di dalam membuat kamus, pengalaman kami ada juga kata-kata yang kadang-kadang tidak ada di kamus, tetapi keluar di dalam teks. Saya rasa paling baik setelah jadi kamus, Bapak juga harus mempunyai *corpus* yang saya katakan. Yang disebut *corpus* itu adalah kumpulan kalimat di dalam surat kabar. Misalnya, akuntan biasanya menggunakan kalimat apa saja yang dikumpulkan itu, kita lihat ada tidak kata yang belum masuk ke dalam *corpus*, tetapi sering digunakan. Itu pasti ada yang terlewat satu atau dua. Seperti sekarang kami kenapa punya *corpus* 10.000.000 kata dan kalau kalimat kurang lebih 180.000 kalimat. Tujuannya untuk melihat kamus kita ini masih banyak yang kurang atau tidak.

3. **Pertanyaan:** Budinuryanta Yohanes, FPBS IKIP Surabaya

Saya melihat bahwa mesin terjemahan ini kalau dikaitkan dengan tema kongres, yaitu Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000 atau berapa saja, saya lihat begitu strategis. Oleh karena itu, saya pribadi berpandangan bahwa mesin terjemahan di Indonesia ini tampaknya memang harus dilakukan dengan serius. Akan tetapi, sudah lima tahun ini setelah saya mendengar tentang mesin terjemahan ini sampai sekarang tampaknya hasilnya belum menggembirakan. Khusus untuk ini saya mohon informasi dari Mas Darmawan sendiri selaku ahli yang mengaplikasikan hasil penelitian para linguist. Apakah penelitian para linguist tentang bahasa Indonesia ini sudah cukup memberikan suatu deskripsi yang langsung bisa diterapkan ke dalam komputer untuk mesin terjemahan ini?

Kalau belum, barangkali para linguist perlu menyaratkan di dalam penelitiannya bahwa pengemukaan manfaat penelitian itu tidak hanya melihat dari manfaat teoretis, tetapi juga manfaat praktis dan langsung dikaitkan dengan komputer dan tidak hanya disebutkan dalam pendahuluan. Akan tetapi, di akhir penelitian itu betul-betul diberikan contoh bagaimana penelitian deskripsi bahasa Indonesia itu bisa dimanfaatkan untuk dimasukkan ke dalam mesin komputer terjemahan ini.

Jawaban:

Saya sudah berbicara lima tahun yang lalu mengenai *machine translation* (MT), tetapi permasalahannya dari segi kebahasaan Indonesia pun masih banyak permasalahan bagi kita. Mudah-mudahan yang saya lihat bahwa nanti yang seperti rencana kami lima tahun yang akan datang untuk lebih banyak meneliti. Di situ diharapkan kita membawa hasil lebih baik.

PERANAN KARYA-KARYA KEBAHASAAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Harimurti Kridalaksana
Universitas Indonesia

Tesis

*Pembinaan dan pengembangan bahasa
(termasuk di dalamnya pengajaran dan
penyuluhan bahasa) harus didasarkan pada
penelitian bahasa. Tanpa prinsip ini
keputusan dan penilaian tentang bahasa akan
terus berubah-ubah, pengguna bahasa akan
meninggalkan sikap positif dan akan
kehilangan wawasan yang cerah, dan stabilitas
komunikasi tidak akan tercapai.*

**Terlangsung perahu boleh balik,
terlangsung cakap tak boleh balik.**

1. Latar Belakang

Bahasa Indonesia hidup bukan hanya karena ada penuturnya, bukan hanya karena ada badan pembinanya (Pusat Bahasa dengan seperangkat garis haluannya), bukan hanya karena ada media untuk menyebarkannya (buku, koran, radio, televisi), bukan hanya karena ada sarana untuk mengukuhkannya (pengajaran bahasa dengan institusi pendukungnya, yaitu sekolah), dan bukan hanya karena ada karya sastra dengan kritik sastranya, melainkan juga karena ada penelitian yang memantau perkembangannya dan mendalami hakikatnya. Lebih jauh daripada itu, ada sarana dan program untuk menyebarkan hasil penelitian itu dengan tujuan agar kukuh tertanam pada penuturnya, dan agar penuturnya mampu memberikan apresiasi kepada bahasanya itu. Sarana itulah yang dimaksud dengan karya kebahasaan yang menjadi topik yang ditugaskan kepada kami.

Selain buku pelajaran, dalam karya kebahasaan kami masukkan:

- 1) hasil penelitian linguistik yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang hakikat bahasa Indonesia berupa skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah ringkas berupa monografi atau makalah teknis,

- 2) buku tata bahasa yang bersifat teknis ataupun pedagogis,
- 3) buku rujukan penggunaan bahasa seperti pedoman ejaan dan kamus,
- 4) buku yang berisi bahan penyuluhan bagi orang awam,
- 5) kumpulan karangan pribadi atau beberapa penulis yang berisi:
 - a) laporan hasil penelitian seperti pada (1), atau
 - b) pemikiran tentang pelbagai aspek bahasa Indonesia yang dapat menambah wawasan penutur, dan
 - c) pelbagai jurnal mengenai bahasa, baik yang bersifat teknis maupun yang berisi penyuluhan.

Daftar semua karya seperti itu akan merupakan bibliografi lengkap tentang bahasa kita. Di sini bukanlah tempatnya untuk menyajikannya. Beberapa contoh kiranya dapat menjelaskan penggolongan itu.

Dalam golongan (1) termasuk karya seperti disertasi Sudaryanto tentang predikat-obyek, disertasi Hasan Alwi tentang modalitas, monografi Lie Tie Gwan tentang lafal dan ejaan, monografi Khaidir Anwar tentang perkembangan bahasa Indonesia, dan makalah Djoko Kentjono tentang perkembangan ejaan.

Dalam golongan (2) termasuk karya tata bahasa Gorys Keraf dan Abdul Chaer yang bersifat pedagogis, dan karya Ramlan dan karya Samsuri tentang sintaksis yang bersifat teknis.

Dalam golongan (3) termasuk pedoman-pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa dan pelbagai kamus bahasa kita.

Dalam golongan (4) termasuk karya Amin Singgih, *Membina Bahasa Indonesia*, dan karya J.S.Badudu, *Inilah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar*.

Dalam golongan (5a) termasuk karya Basuki Suhardi dan Lucy Montolalu tentang bilingualisme di Indonesia, dan karya Bambang Kaswanti Purwo tentang pragmatik dan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam golongan (5b) termasuk karya Takdir Alisjahbana, *Dari Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Indonesia*, dan karya Anton Moeliono, *Kembara Bahasa*.

Dalam golongan (6) termasuk jurnal terbitan MLI, HPBI, Pusat Bahasa, dll. Secara kasar karya-karya itu dapat dibagi atas, *pertama*, karya-karya ilmiah atau teknis murni dan, *kedua*, karya-karya pedagogis dan karya-karya untuk penyuluhan.

Yang menarik untuk dibahas mengenai karya-karya kebahasaan itu bukan kenyataan bahwa semua itu menampakkan diri dalam bentuk terbitan, melainkan seberapa jauh pemikiran di dalamnya diperhatikan orang, dan seberapa jauh memperkaya wawasan pembacanya. Salah satu pertanda bahwa sebuah karya disimak orang atau tidak ialah dibahas tidaknya sebuah karya dalam karya penelitian kemudian, sehingga tampak apakah penelitian baru itu merupakan kemajuan dibandingkan dengan karya yang mendahuluinya, apakah peneliti menerapkan atau memanfaatkan karya pendahulunya, apakah peneliti menghargai karya orang lain terutama yang pernah menggarap topik yang sama sebelumnya, atau sekurang-

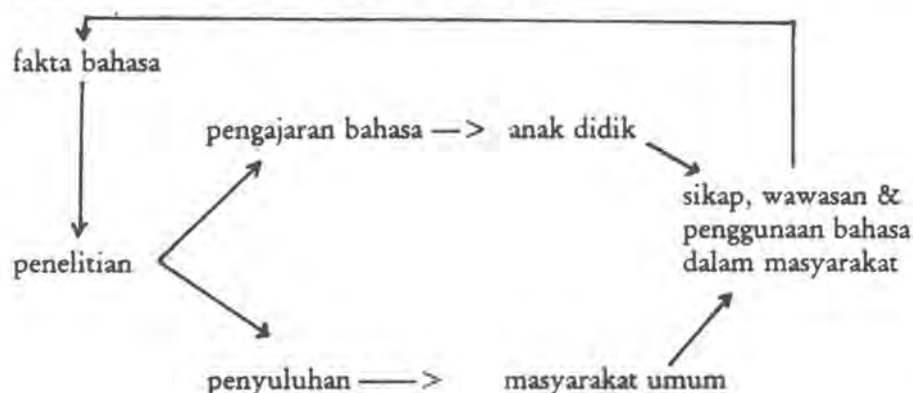
kurangnya apakah peneliti pernah membaca karya-karya lain dalam bidang yang sama. Harus diakui bahwa untuk melacak hal itu dalam buku-buku pedagogis tidaklah mudah karena karya-karya itu sering mengabaikan etik ilmiah, yakni tidak menyebut rujukan yang dipergunakan penulisnya.

Dalam usaha kita untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dewasa ini sangat diperlukan kritik terhadap semua karya kebahasaan, bukan dengan tujuan untuk mencari cacat dan kesalahan, melainkan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai sehingga kita semua dapat melaju cepat dalam usaha kita itu. Kita hanya akan menyia-nyiakan tenaga, waktu, dan dana saja, kalau kita hanya mampu mengulang-ulang apa yang pernah dibuat orang sebelum kita, apalagi kalau yang kita buat itu lebih terkebelakang daripada apa yang dibuat pendahulu kita. Kritik itulah yang menjadi tujuan utama makalah ini.

Secara khusus dalam makalah ini akan dilaporkan pengamatan penulis tentang kenyataan seberapa jauh hasil penelitian ilmiah murni, seperti karya-karya golongan (1) di atas, menampakkan bekasnya dalam karya-karya pedagogis dan dalam karya-karya yang dijadikan bahan penyuluhan.

Jelas ada perbedaan yang tajam di antara karya-karya ilmiah murni dengan karya-karya pedagogis dan penyuluhan. Karya ilmiah murni bertujuan untuk memahami hakikat bahasa Indonesia dengan segala aspeknya, sedangkan karya pedagogis dan penyuluhan bertujuan untuk menumbuhkan sikap positif dan apresiatif dalam berbahasa Indonesia. Guru atau penyuluh mengajarkan segala aspek bahasa bukan dengan tujuan akhir untuk menunjuk-nunjukkan kesalahan, melainkan supaya murid atau pesuluh dalam berbahasa sekaligus juga memahami secara sadar segala aspek bahasa yang dipakainya itu.

Dalam mengajar dan menyuluh guru dan penyuluh tidak dapat bekerja dari kekosongan, dalam arti mereka tidak dapat mengarang-ngarang apa yang harus diajarkan dan disuluhkan. Sebaliknya bukanlah tugas mereka untuk melakukan penelitian murni guna memperoleh bahan-bahan pengajaran dan penyuluhan itu. Mereka harus memanfaatkan hasil penelitian murni yang ada. Di sinilah kedua aspek pembinaan dan pengembangan bahasa itu dijembatani.



Dalam makalah ini, setelah dikemukakan tujuan penulisan di atas, disajikan sebuah survei tentang kemajuan linguistik Indonesia yang telah dicapai selama ini. Sesudah itu, akan diutarakan tinjauan atas beberapa karya pedagogis dan penyuluhan yang masih beredar dalam tahun 1993 ini.

2. Perkembangan wawasan tentang bahasa Indonesia

Tahun 1960 secara kasar dapat dianggap sebagai titik balik dalam sejarah perkembangan ilmu bahasa di Indonesia. Sebelum itu, dunia bahasa dan dunia pengajaran bahasa kuat sekali dipengaruhi karya S.Takdir Alisjahbana, *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia* (1949-50). Dalam dunia pengajaran, buku lain yang berpengaruh ialah karya C.A. Mees, *Tata Bahasa Indonesia* (1951), dan karya St.M.Zain, *Djalan Bahasa Indonesia* (1942-54), dan karya Poedjawijatna dan Zoetmulder, *Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas* (1955). Sebuah karya lain perlu dicatat di sini, yaitu *Dasar-dasar Tata Bahasa Indonesia* oleh S.Zainuddin gl.Pg.Batuah (1956), karena karya ini merupakan usaha paling awal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk menetapkan buku tata bahasa standar resmi dalam sejarah pengajaran bahasa di Indonesia, tetapi tampaknya pengaruh tata bahasa yang resmi itu dalam dunia pengajaran masih kalah oleh ketiga karya yang "tidak resmi" itu.

Buku lain yang sering disebut ialah karya Armijn Pane, *Mentjari Sendi Baru Tata Babasa Indonesia* (1950), karya A.A.Fokker, *Inleiding tot de Studie van de Indonesische Syntaxis* (1951) atau terjemahannya, *Pengantar Sintaksis Indonesia*, dan karya Slametmuljana, *Kaidah Bahasa Indonesia* (1956-7), tetapi tampaknya karya-karya terakhir itu pengaruhnya kurang kuat. Sebabnya ialah--menurut tilikan penulis makalah ini--pada waktu itu perhatian pada aspek ilmiah bahasa Indonesia sangat kurang sehingga karya Armijn Pane yang "empiris", karya Fokker yang berorientasi pada aliran Praha, dan karya Slametmuljana yang bersifat "generatif" (dengan demikian ketiganya bersifat teoretis-ilmiah) itu tidak populer. Juga karya-karya teknis lain jarang muncul dalam dunia penerbitan Indonesia. Sebenarnya dalam majalah *Pembina Bahasa Indonesia*, artikel-artikel Takdir Alisjahbana banyak mengandung argumentasi kritis tentang beberapa aspek bahasa Indonesia, misalnya tentang masalah aktif-pasif, "inovasinya" tentang hukum D-M atau perdebatannya dengan A.A.Fokker tentang bahasa Indonesia dan bahasa daerah (1950-1), tetapi karangan-karangan semacam itu kurang bersambut (salah satu kekecualian di antaranya adalah karya-karya H.D.van Pernis yang terkumpul dalam *Taman Bahasa Indonesia* (1952)) sehingga boleh dikata pada masa itu ilmu tentang bahasa Indonesia tidak berkembang.

Sekitar tahun 1960 muncullah beberapa karya yang mendedah cakrawala baru pada kajian tentang bahasa Indonesia. Dimulai dengan karya-karya empiris dan kritis seperti artikel Samsuri tentang sistem fonem dan ejaan (1960), artikel T.W.Kamil dan Sugeng Sukarsono tentang morfem-morfem produktif (1960), artikel Tang Tjia Han tentang awalan *ter-* (1960), artikel T.W.Kamil dan A.M.Moeliono tentang pelaksanaan linguistik di Indonesia (1961), dan artikel Ramlan tentang *immediate constituent* (1964) dan kata majemuk (1965)--ditambah dengan artikel-artikel mengenai bidang bahasa

lain, seperti kajian dialek, kajian komparatif, dan peristilahan, yang tidak dibahas di sini karena ada di luar jangkauan makalah ini—, wawasan linguistik merasuk ke dalam dunia bahasa Indonesia. Bahwasanya artikel-artikel itu merupakan penerapan dari teori dan pandangan linguistik deskriptif Amerika, khususnya aliran Neo-Bloomfieldian, yang dominan pada waktu itu, kiranya jelas bagi para pembacanya. Pada tahun-tahun kemudian timbul usaha untuk menerapkan teori lain dalam memerikan bahasa Indonesia, seperti teori transformasi generatif dan teori deskriptif Eropa. Dan, baru pada tahun 80 dan 90-an mulai dikembangkan teori tentang bahasa Indonesia yang merupakan sintesis atas teori-teori yang ada atau paradigma mandiri yang mengikat teori-teori yang diabstraksikan dari fakta-fakta empiris bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain di Indonesia. Semua teori tentang bahasa Indonesia itu membuka kesadaran kita bahwa seluk-beluk bahasa Indonesia itu bukan semata-mata menyangkut masalah penggunaan bahasa secara praktis. Fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan bahasa memperkaya pemahaman kita tentang bahasa Indonesia sehingga penutur bahasa itu dapat secara lebih kritis dan apresiatif mempergunakan dan memanfaatkannya.

Dalam hubungan ini perlu dicatat tonggak sejarah perkembangan wawasan tentang bahasa Indonesia berupa penyelenggaraan 3 pertemuan bahasa yang mengembalikan dan menyegarkan minat dan fokus pada bahasa yang sempat redup sampai tahun-tahun itu, yaitu Simposium Bahasa dan Sastra Indonesia 1966, Seminar Bahasa Indonesia 1968, dan Seminar Bahasa Indonesia 1972. Diperkuat oleh peresmian Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 (ditambah dengan diskusi-diskusi ilmiah yang mendahuluinya), ketiga pertemuan itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong penelitian ilmiah terhadap bahasa Indonesia. Karangan-karangan dalam pelbagai media massa sekitar tahun-tahun itu pun ikut juga mengubah orientasi kepada bahasa yang sampai ketika itu hampir seluruhnya bersifat preskriptif ke orientasi yang deskriptif—syarat mutlak yang diperlukan bila orang akan mendekati bahasa secara ilmiah.

Setelah menyebut artikel-artikel perintis dalam kajian ilmiah bahasa Indonesia di atas, marilah kita amati dampaknya pada wawasan dan pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia, dan sekaligus kita tinjau kemajuan lain yang dicapai kajian bahasa kita sampai tahun 1990 ini, berturut-turut mulai dari kajian fonologi, morfologi, sintaksis, sociolinguistik, pragmatik, sampai sejarah bahasa Indonesia.

Masuknya konsep fonem ke dalam wawasan tentang bahasa Indonesia mengubah sama sekali pandangan orang tentang hakikat bahasa kita. Bila semula bunyi dianggap sebagai satuan terkecil bahasa, sejak tahun 1960 dapat dibedakan mana aspek konkret dan mana aspek abstrak dari satuan terkecil bahasa itu, dan baru disadari bahwa dalam menulis dan membaca orang lebih banyak berurusan dengan aspek abstrak itu, yakni fonem, daripada dengan bunyi. (Sebenarnya dalam majalah *Bahasa dan Budaya* (1953) sudah muncul beberapa artikel tentang ejaan yang berwawasan fonem, dan dalam Kongres Bahasa Indonesia 1954 sudah dibahas dan diputuskan suatu pembaruan ejaan dengan dasar fonemik (bahkan seperti kita ketahui, telah direncanakan untuk

dilaksanakan), tetapi karena perkembangan politik dan ekonomi pada waktu itu, pengaruhnya tidak bergema dalam dunia ilmiah dan dunia pengajaran bahasa; bahkan Kongres itu sendiri hampir dilupakan orang). Kalau kita menyadari bahwa konsep fonem sudah muncul dalam linguistik umum di Eropa pada akhir abad ke-19, sedangkan konsep itu baru secara serius dilihat relevansinya dalam sistem bahasa Indonesia pada tahun 60-an, kita melihat betapa terlambatnya wawasan ilmiah berkembang dalam hubungan dengan bahasa kita.

Di samping konsep fonem, dalam bidang fonologi sampai tahun 1990 kita catat kemajuan wawasan tentang unsur-unsur suprasegmental dan ciri-ciri pembeda bahasa kita, yang kita saksikan dalam karya Amran Halim tentang intonasi (1969) dan karya Hans Lapoliwa tentang kajian fonologi Indonesia secara generatif yang menambah wawasan kita tentang ciri-ciri pembeda (1981). Akan tetapi, karena kedua karya itu—seperti beberapa kajian ilmiah bermutu lain—merupakan tesis perguruan tinggi luar negeri yang tidak diedarkan, pengaruhnya dalam perkembangan wawasan tentang bahasa Indonesia sama sekali tidak terasa. Harus dicatat pula usaha untuk memahami lafal bahasa Indonesia sekarang ini sebagaimana dilakukan oleh Djoko Kentjono (1983) dan usaha kodifikasi pengetahuan tentang fonologi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Ny. Aminuddin dan kawan-kawan (1984). Dalam hubungan ini perlu ditambahkan bahwa kalau kita berbicara tentang kemajuan fonologi setelah tahun 1960, itu tidak berarti bahwa sebelumnya orang tidak memperhatikan masalah-masalah itu. Di atas telah kami sebut buku Armijn Pane yang memberi perhatian besar pada aspek bunyi dari bahasa Indonesia, bahkan dalam buku Takdir Alisjahbana yang berpengaruh itu pun sudah dibahas beberapa aspek suprasegmental; di samping itu, sudah pula kami sebut monografi Lie Tie Gwan tentang lafal dan ejaan. Perlu pula kita perhatikan beberapa artikel tentang penyukuan dalam majalah *Bahasa dan Budaya* (1955-6) dan tentang lafal dalam majalah *Medan Bahasa* (1955 dst.) yang lebih bersifat preskriptif.

Pengenalan konsep morfem merombak sama sekali pandangan orang bahwa seolah-olah unsur terkecil gramatika adalah kata. Memang lama sebelum tahun 1960 orang sudah melihat perbedaan di antara "kata dasar" dan pelbagai imbuhan, tetapi kami tidak percaya bahwa orang memahami hubungan di antaranya atau mampu membedakan secara jelas status kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk karena wawasan pada waktu itu lebih bersifat atomistis daripada struktural. Pandangan baru yang diperoleh berdasar penelitian Kamil dan Ramlan tersebut di atas adalah suatu sistem morfologi Indonesia yang bersifat penataan karena model yang dipergunakan ialah model penataan (Ing. *item-and-arrangement model*). Pada tahun 70-an di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dikembangkan pemerian bahasa Indonesia atas dasar model proses (Ing. *item-and-process model*) yang mencakup gambaran yang agak lengkap dan terperinci tentang jenis-jenis afiks, hubungan di antara afiks (karena afiksasi dianggap sebagai satu sistem siklus yang utuh, sekalipun merupakan sebuah subsistem dalam morfologi), hubungan di antara proses pengimbuhan, pengulangan dan pemajemukan, dan morfofonemik. Lebih jauh dari itu, sejak tahun 80-an konsep leksem diintegrasikan dalam pemerian bahasa Indonesia. Konsep ini diperkenalkan

kembali sebagai konsekuensi pandangan tentang adanya keterkaitan di antara leksikon dan gramatika sehingga dalam pemerian tata bahasa Indonesia bukannya dikotomi morfem-kata saja yang menjadi poros, melainkan trikotomi leksem-kata-morfem sebagai poros horisontal dan hierarki gramatikal dari kata hingga wacana sebagai poros vertikal sehingga morfologi dan sintaksis membentuk satu (sub)sistem, yaitu gramatika-berdampingan dengan leksikon dan fonologi.

Siapa sebenarnya yang pertama kali memperkenalkan konsep hierarki gramatikal dalam linguistik Indonesia, sebenarnya kurang jelas. Hanya kami ingat bahwa dalam kuliah-kuliah T.W. Kamil di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 60-an sedikit-sedikit konsep itu disinggung; dan kemudian dalam kuliah-kuliah penulis sejak tahun 70-an—karena pengaruh teori tagmemik—wawasan itu menjadi dasar teori sintaksisnya, bahkan sampai sekarang (lih. antara lain karya penulis 1985). Yang jelas pada tahun 1964 Ramlan sudah memperkenalkan konsep frase, sebagai penerapan teori Hockett. Wawasan hierarki gramatikal itu menjelaskan perbedaan di antara kata, frase, klausa, dan kalimat. Atas dasar itu salah satu masalah klasik, yaitu yang menyangkut apa yang lazim disebut kata majemuk dapat dipecahkan: kata majemuk adalah kata, bukannya gabungan kata; karena gabungan kata adalah frase. Bila pada tahun 1965 oleh Ramlan dan pada tahun 1978 oleh Badudu kata majemuk dianggap sebagai gabungan morfem dengan morfem yang berstatus kata, pada tahun 1985 oleh penulis makalah ini kata majemuk dianggap sebagai kata yang terjadi dari gabungan leksem dengan leksem. Atas dasar hierarki gramatikal itu pula kalimat majemuk bukan lagi dianggap sebagai gabungan (anak) kalimat dengan (anak) kalimat, melainkan gabungan klausa dengan klausa, jadi pandangan kita tentang subyek-predikat yang pada hakikatnya menjadi inti klausa, dan bukan inti kalimat—suatu fakta yang sudah lama dianut orang—menjadi lebih jelas. Dengan demikian, klasifikasi kalimat pun menjadi lebih kaya: bukan hanya ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat bersusun, melainkan juga tampak ada kalimat yang merupakan gabungan klausa terikat dengan klausa terikat, ada kalimat yang bukan merupakan klausa, dsb. Perbedaan di antara klausa dan kalimat mempertajam pemahaman orang tentang perilaku unsur-unsur pembentuknya, sebagaimana ditunjukkan oleh Sudaryanto dalam disertasinya (1979).

Konsep wacana baru diperkenalkan ke dalam sistem tata bahasa Indonesia melalui dua artikel singkat penulis makalah ini (1970 dan 1978). Pengakuan atas adanya satuan terbesar itu menyebabkan hierarki gramatikal meningkat, tidak terbatas pada kalimat, melainkan terus "ke atas" sampai gugus kalimat, paragraf, monolog/dialog, hingga ke wacana. Karangan-karangan penulis yang sebenarnya tidak terlalu orisinal itu memicu penelitian yang intensif tentang segala aspek wacana dalam pelbagai bahasa di Indonesia oleh lusinan peneliti sampai hari ini di perguruan-perguruan tinggi yang tersebar di negeri kita, bahkan di negeri jiran kita, Malaysia. Pandangan bahwa wacana adalah satuan gramatikal yang lengkap lebih menyadarkan orang akan keterbatasan bahasa sehingga dengan lebih jelas orang dapat melihat hubungan di antara bahasa dengan fenomena lain di luarnya, dan makin meyakinkan orang bahwa bahasa itu merupakan suatu sistem tanda. Keyakinan itu mengarahkan orang pada penelitian mengenai aspek-aspek semiotik, khususnya pragmatik, seperti

gejala deiksis (Kaswanti Purwo, 1984) dan gejala ketakziman (lihat himpunan makalah kumpulan Suhardi dan Muhadjir 1990, yang sebagian merupakan kritik terhadap artikel penulis makalah ini tahun 1974). Hubungan antara bahasa dan fenomena di luarnya, khususnya penuturnya dan pranata-pranata budaya yang terikat pada bahasa, menyadarkan orang bahwa bahasa Indonesia itu bukan sebuah sistem monolit, melainkan suatu fenomena sosial yang secara intrinsik mengandung variasi-variasi, sebagai refleksi keanekaragaman hakiki manusia dan kelompok manusia penuturnya. Konsekuensi langsung dari kesadaran itu ialah timbulnya pencerahan bahwa dalam bahasa Indonesia ada variasi standar dan ada variasi bukan standar. Keyakinan itu diperkuat dengan penelitian empiris yang sangat intensif dalam bidang sosiolinguistik. Alhasil, masalah betul-salah dalam berbahasa Indonesia—dengan demikian, dalam berbahasa baku atau bukan baku—bukan semata-mata masalah betul-salah dalam lafal atau ejaan atau dalam tata bahasa atau dalam pilihan kata (seperti yang dianut orang sebelum tahun 60-an), melainkan lebih-lebih masalah cocok tidaknya orang berujar dalam konteks logis, strategi komunikasi, atau suasana psikologis yang tepat. Singkatnya, penggunaan bahasa diwujudkan sesuai dengan fungsi bahasa.

Demikianlah gambaran perkembangan wawasan bahasa selama tiga puluh tahun terakhir ini, yaitu seperti menggelindingnya bola salju, perkembangan yang dimulai dengan pengenalan konsep yang begitu sederhana seperti fonem, morfem, dan wacana sampai ke konsep yang begitu rumit, tetapi yang rupanya lebih bermanfaat bagi kalangan yang lebih luas daripada para ahli bahasa, yakni strategi berbahasa.

Perkembangan lain yang patut dicatat di sini ialah usaha untuk mengembangkan tata bahasa Indonesia berdasarkan teori transformasi-generatif yang dipelopori oleh Samsuri. Dalam pidato pengukuhan nya ia menganjurkan agar teori itu dapat dijadikan kerangka dalam penyusunan tata bahasa Indonesia (1973). Salah satu hasil pemikirannya ialah buku *Tata Kalimat Bahasa Indonesia* (1985), sebuah buku sintaksis yang cukup komprehensif, tetapi yang secara teoretis—harus diakui—tidak murni generatif. Karya lain yang menerapkan teori ini versi tahun 1970-an ialah disertasi Hans Lapoliwa (1990) yang membahas sebuah aspek sintaksis yang cukup sentral, tetapi kurang diperhatikan orang, yakni masalah pemerangkapan. Dalam karya terdahulu nya seperti disebut di atas—sarjana itu berusaha memerikan fonologi bahasa Indonesia berdasarkan teori fonologi generatif. Ada banyak usaha lain untuk menerapkan pelbagai versi teori TG dalam pemerian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi—sepanjang yang terbaca oleh penulis makalah ini—, terdorong oleh keinginan untuk memaksakan data ke dalam teori, kebanyakan pemerian itu meleset dari prinsip teori itu sendiri ataupun dari sudut gambaran tentang bahasa yang diselidiki. Sebabnya jelas: para peneliti itu tidak sepenuhnya memahami teori Chomsky dan anak buahnya (tampak antara lain dari bacaan yang tidak mutakhir), dan mereka terlalu terpesona pada pembedaan (yang lebih merupakan semboyan) di antara "struktur batin dan struktur lahir", serta kenyataan bahwa teori TG itu sendiri tidak pernah mantap, tetapi selalu berubah-ubah.

Perhatian kepada aspek-aspek mikro dan teknis itu tidak menutupi kenyataan bahwa sejak lama dalam perkembangan kajian tentang bahasa kita sudah ada minat yang cukup serius pada aspek-aspek makro. Di atas telah disinggung perhatian kepada strategi berbahasa sejak tahun 60-an. Aspek ini jelas bersifat makro meskipun jalan ke situ dicapai melalui pendekatan bahasa Indonesia yang bersifat teknis sosiolinguistik. Dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 pembahasan yang bersifat makro justru lebih dominan daripada segala sesuatu yang bersifat mikro. Perhatikan misalnya *praeadvies-praeadvies* M. Tabrani tentang usaha mempercepat penyebaran bahasa Indonesia, Soekardjo Wirjopranoto tentang bahasa Indonesia dalam badan perwakilan, Mr. Muh. Yamin tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kebudayaan, Ki Hadjar Dewantara tentang bahasa Indonesia di perguruan, dsb. Setelah kemerdekaan yang harus dicatat ialah pidato pengukuhan A.A. Fokker yang berjudul *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah* (1951) yang termasuk dalam karya golongan ini. Pidato pengukuhan Slametmuljana yang berjudul *Politik Bahasa Nasional* (1959) mengandung saran agar pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan secara terencana. Baru sesudah tahun 70-an, dengan mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan mengenai perencanaan bahasa di luar negeri, bermunculanlah gagasan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa; salah satu titik puncaknya ialah seminar tentang politik bahasa nasional (1974). Yang patut disayangkan atas segala gagasan yang bermutu tentang perencanaan bahasa itu ialah bahwa semuanya hanyalah kesepakatan seminar belaka dan tidak satu pun di antaranya yang kemudian dituangkan menjadi produk hukum sehingga tidak mengikat siapa pun. Kalau kita periksa secara teliti, ternyata butir-butir tentang bahasa dalam Garis Besar Haluan Negara kita dalam tahun mana pun tidak tersusun secara sistematis seperti diputuskan oleh seminar tentang politik bahasa nasional itu. Bahkan, pembaca GBHN pasti akan merasa bahwa rumusan-rumusan tentang bahasa di dalamnya sebenarnya lebih merupakan petunjuk pelaksanaan dari suatu politik bahasa nasional (yang tidak tersurat atau pun tersirat di situ). Akibatnya, tampak pada adanya endemi perasaan ketidakpastian dan ketiadaan pedoman yang eksplisit dalam berbahasa Indonesia dewasa ini, dan pada "kebijakan" Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berubah-ubah, serta pada keengganan banyak kalangan masyarakat untuk "mematuhi fatwa" badan bahasa itu.

Historiografi bahasa Indonesia diminati banyak penulis selama beberapa dasawarsa ini. Dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 pun sudah muncul pembahasan tentang topik ini. Periksa misalnya *praeadvies* Sanusi Pane tentang sejarah bahasa Indonesia dan Amir Sjarifuddin tentang peristilahan. Dalam tahun-tahun kemudian ada beberapa karangan oleh beberapa sarjana luar negeri yang membahas fenomena "ajaib" berupa penerimaan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia "tanpa bencana apa-apa". Bagi banyak ahli bahasa Indonesia pribumi gejala semacam itu tidak dianggap ajaib; aspek-aspek sejarah bahasa Indonesia diterima apa adanya, tidak perlu ada kritik atau kajian tentang itu semua. Itulah sebabnya sedikit sekali di antara peneliti Indonesia yang mau mendalami sumber-sumber primer dan sekunder sejarah bahasa kita. Bahwasanya sekarang ini sudah terdapat kemajuan yang pesat dalam teori sejarah bahasa ternyata hanyalah pengetahuan yang terbatas di antara dinding-dinding

ruang kuliah Fakultas Sastra Universitas Indonesia sehingga pemahaman tentang sejarah bahasa dan sejarah kajian bahasa Indonesia di kalangan awam ataupun di kalangan pendidikan tetap bersifat permukaan saja.

Demikianlah serba sedikit survei tentang perkembangan wawasan mengenai bahasa Indonesia. Survei semacam ini tentu saja sangat tidak lengkap, apalagi bila kita ketahui adanya beberapa karya ilmiah yang orisinal yang terbit sesudah tahun 80-an, berupa disertasi, tesis, dan makalah-makalah yang terbit dalam pelbagai media. Ketidaklengkapan itu memberi kesan kurang menghargai karya-karya bermutu itu. Namun, pembaca pasti maklum bahwa maksud kami jauh dari itu.

3. Pengaruh dalam pendidikan dan penyuluhan

Hasil penelitian dan pemikiran yang berkembang selama bertahun-tahun itu tentu saja bermanfaat sedikit sekali kalau hanya diketahui oleh kalangan akademis saja; apalagi kalau tidak berpengaruh terhadap perkembangan dan pengembangan bahasa kita. Semua itu kita katakan ada dampaknya kalau pemikiran, atau sekurang-kurangnya kerangka pemikirannya, muncul dalam dunia pendidikan dan kalangan umum, melalui buku sekolah dan bahan-bahan penyuluhan. Marilah kita periksa dampaknya dalam dunia pendidikan.

Kalau kita amati kurikulum sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas dalam tahun mana pun serta beberapa buku pelajaran yang dipergunakan di sekolah-sekolah, ada kesan bahwa apa yang diteliti dan dipikirkan para sarjana di atas memang ada pengaruhnya.

Pertama-tama kita periksa peristilahan. Tampak bahwa istilah-istilah seperti fonem, frase, dan wacana sudah lazim dalam buku-buku tersebut, tentu saja dengan pelbagai variasi pengertian. Ada yang menyatakan bahwa fonem itu semata-mata istilah baru untuk bunyi yang selama itu lazim di kalangan pendidikan, dan bahwa frase adalah istilah baru untuk gabungan kata-suatu pertanda bahwa penggunaan istilah baru semata-mata didorong oleh mode, tanpa melihat latar dan sistematis sebuah istilah. Karena pengertian itu tersebar lewat dunia pendidikan, akibat fatal yang menyertainya tidak terbayangkan lagi.

Yang menarik ialah penggunaan istilah wacana yang muncul dalam kurikulum sekolah dasar tahun 1975, padahal istilah itu diciptakan sebagai istilah linguistik Indonesia untuk memadani istilah Inggris *discourse* baru pada tahun 1966, dan tulisan ilmiah pertama yang membahasnya baru muncul pada tahun 1970. Kenyataan ini menunjukkan betapa cepat dunia pendidikan "menyambar" konsep baru seperti itu. Memang benar konsep ini sangat penting bagi pengajaran bahasa, tetapi apakah pengertian yang disandangnya dan disebarkan itu sesuai dengan pengertian teknisnya, tidak jelas bagi kita; padahal kebanyakan di antara para penulis buku pedagogis itu tidak memasukkan aspek ini dalam buku-bukunya.

Konsep lain yang menarik untuk diperhatikan penyebarannya ialah klausa. Pengenalan konsep ini menjelaskan perbedaannya dengan konsep kalimat, dan

sekaligus-seperti dinyatakan di atas—menegaskan satuan gramatikal mana yang menyandang konsep yang penting seperti subyek dan predikat. Dalam praktiknya konsep yang sangat vital untuk penalaran ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan para penulis buku pedagogis sehingga kita mendapat kesan bahwa para penulis itu kurang memahami hakikatnya. Jadi, kita tidak perlu heran kalau sebagai guru kita mendapati murid kita bertubi-tubi menulis kalimat dengan klausa yang tak berpredikat karena rupanya di sekolah mereka tidak dibiasakan menyusun kalimat dengan klausa yang lengkap.

Istilah pragmatik rupanya sudah muncul dalam kurikulum dan buku-buku terbitan sesudah tahun 80-an, dan selalu disajikan dengan keterangan "keterampilan berbahasa", dan memang yang dicakup hanyalah itu. Tentu saja kita bertanya-tanya, mengapa harus dipergunakan istilah yang begitu mentereng (tetapi konsepnya salah!) untuk bidang kegiatan berbahasa yang begitu praktis? Karena istilah pragmatik dipergunakan tanpa konsep yang benar, luputlah dari pembahasan gejala yang khas Indonesia, tetapi yang tidak satu pun buku tata bahasa pedagogis mengamatinya, yakni bentuk kalimat seperti *Pak Ali anaknya cantik-cantik*, *Adapun perkara ini sudah ditangani oleh kejaksaan*, atau *Mengenai soal ini aku tidak bisa berkata apa-apa*. Kalimat-kalimat itu jelas khas Indonesia, tetapi tidak dapat dianalisis atas subyek-predikat saja, melainkan harus diamati menurut fungsi pragmatis atas tema-remas. Namun, tampaknya belum satu pun buku pelajaran bahasa Indonesia yang memperkenalkan konsep yang vital ini, apalagi menguraikan perbedaan di antara pragmatik linguistik dan pragmatik sosial (Di sini letak pentingnya disertasi Suparno tahun 1991 mengenai yang pertama itu).

Kalau dalam mempergunakan istilah-istilah tersebut di atas dunia pendidikan berusaha semutakhir mungkin, tidak demikian halnya dengan penggunaan istilah-istilah untuk kelas kata, seperti nomina, verba, dan adjektiva. Keengganan banyak penulis untuk memanfaatkannya merupakan resistensi terhadap istilah-istilah internasional itu. Ini suatu kasus betapa seperangkat istilah diterima tanpa memperhatikan sistematik teoretis yang melatarinya. Kurang dipahami oleh para penulis itu bahwa istilah-istilah, seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat adalah istilah-istilah untuk konsep leksikal dan konsep dunia luar bahasa, sedangkan istilah-istilah nomina, verba, adjektiva, dsb. adalah istilah-istilah tata bahasa; dan bahwa penggunaan perangkat istilah terakhir itu memudahkan penggunaan peristilahan yang sistematis seperti nominalisasi, denominalisasi, verbalisasi, dan deverbalisasi. Memang, konsep-konsep terakhir ini belum banyak muncul dalam kebanyakan buku pedagogis, padahal sangat vital untuk menggambarkan proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Akibatnya ialah dalam pengajaran morfologi masih dilakukan pendekatan atomistik, padahal pembentukan kata dalam bahasa kita merupakan sistem siklus yang utuh (Dapatkah murid-murid sekolah menjelaskan keteraturan bentuk-bentuk seperti *perbuatan-pembuatan-buatan*, *penyuruh-pesuruh-suruhan*, *mengajar-pengajaran-pengajar-belajar-pelajaran-pelajar-ajaran*, *peroketan-pengroketan*, *perumahan-pengrumahan*, *mengarang-mengarang-mengkarang*, dsb. itu?).

Bahwasanya peristilahan tata bahasa sangat penting dalam dunia pendidikan kiranya tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Dengan menguasai istilah-istilah itu memang tidak dijamin bahwa peserta didik akan lebih mahir berbahasa Indonesia. Bukan itu tujuannya. Pengajaran peristilahan dengan konsepnya yang tepat sebagai komponen pengajaran tata bahasa—khususnya untuk siswa tingkat lanjut—dimaksudkan agar mereka dapat secara kritis mengapresiasi potensi bahasanya dan mampu menajamkan persepsinya dalam mengamati fenomena bahasa di sekitarnya. Proses pengajaran sebagai usaha untuk mencerdaskan peserta didik tentu saja mesti membekalinya dengan peristilahan mutakhir dengan kerangka teoretis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah wawasan sosiolinguistik sudah merasuk ke dalam dunia pengajaran? Dengan gembira harus dicatat bahwa dalam kebanyakan kurikulum aspek itu sudah termuat. Dalam komponen yang disebut keterampilan berbahasa (walaupun dengan label yang menyesatkan, pragmatik—seperti diuraikan di atas) bahan pengajaran seperti berdialog atau menulis sesuai dengan situasi atau ragam bahasa tertentu juga diberikan. Namun, kegembiraan itu menjadi kurang berarti karena banyak keluhan dari para pengajar komposisi bahwa para siswa dan mahasiswa selalu mencampurkan ragam lisan ke dalam tulisannya. Dari para guru pun terdengar keluhan bahwa anak-anak muda ketika berbicara dalam situasi resmi sulit menghindari unsur-unsur tak baku. Apakah sebabnya? Apakah karena lingkungan luar sekolah lebih berpengaruh daripada lingkungan sekolah? Apakah karena para siswa tidak mempunyai cukup panutan dalam berbahasa? Jawaban atas semua pertanyaan itu kami serahkan kepada ahli lain yang sudah menelitinya.

Salah satu usaha untuk meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap bahasanya ialah melalui sejarah bahasa. Hampir semua buku pedagogis memuat uraian bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahwa bahasa itu diangkat menjadi bahasa persatuan karena sudah lama menjadi *lingua franca* di Asia Tenggara ini, dsb. Semua hal itu sudah banyak kita ketahui, tetapi tidak ada hal baru yang dikemukakan yang berasal dari hasil penelitian mutakhir, misalnya tentang periodisasi bahasa Melayu/Indonesia, tentang keanekaragaman historis bahasa kita, atau tentang hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah (fakta yang sebenarnya dapat membangkitkan penghayatan pada asas kemasyarakatan kita, *bhinneka tunggal ika*).

Yang jelas sangat kurang diketengahkan ialah aspek-aspek sejarah kajian bahasa, padahal bidang ini diperlukan untuk mengapresiasi tradisi tata bahasa Indonesia. Karena tidak mempergunakan hasil penelitian mutakhir, masih saja ada buku yang menyatakan bahwa Aristoteleslah yang membagi kelas kata atas sepuluh jenis—kesalahan yang berasal dari Mees dan Alisjahbana pada tahun 50-an. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar bahwa materi yang bersifat historiografis ini perlu diketahui para guru (tetapi mungkin tidak perlu disajikan di depan kelas) supaya tidak dibingungkan oleh perkembangan teori linguistik yang sangat semarak dewasa ini.

Demikianlah keadaan buku-buku pelajaran di pelbagai jenjang sekolah. Bagaimana dengan buku-buku bahan penyuluhan?

Secara garis besar apa yang kami utarakan tentang buku-buku pelajaran tersebut berlaku pula bagi kebanyakan bahan penyuluhan, baik yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa maupun oleh perseorangan atau kelompok penulis.

Dalam pertemuan seperti yang kita hadiri sekarang ini tentu akan merupakan keasyikan tersendiri bila kita dapat mengupas satu demi satu butir-butir bahasa yang disajikan dalam pelbagai buku penyuluhan itu; tetapi, hanya karena keterbatasan waktu dan tempat, hal itu tidak kita lakukan. Butir-butir penting sajalah yang akan kami soroti di sini.

Penyajian tentang ejaan merupakan porsi terbesar dalam kebanyakan buku-buku itu. Hal ini dapat kita pahami karena sekalipun sudah 21 tahun kita mempunyai pedoman ejaan standar, tetapi sampai sekarang—mungkin karena lemahnya daya nalar kita atau karena kuatnya kecenderungan kita untuk melanggar segala macam aturan—ternyata "pelanggaran" terhadap konvensi ejaan adalah kesalahan terbanyak dalam peri laku bahasa masyarakat kita. Karena buku pedoman ejaan itu sudah ada, para penulis itu tinggal mengutip mentah-mentah semua peraturan dalam buku itu (biasanya tanpa minta izin pemegang hak ciptanya, yakni Pusat Bahasa!), atau membuat latihan berdasarkan peraturan-peraturan itu.

Penyajian tentang penggunaan kosakata adalah bagian kedua terbesar dalam kebanyakan buku penyuluhan. Bahan semacam ini tentu saja sangat membantu pemsayarakatan apa yang selama ini hanya dapat disajikan dalam kamus. Diperlukan kesempatan tersendiri untuk membahas aspek penyuluhan yang penting ini.

Sesudah soal-soal kosakata itu barulah disajikan pelbagai masalah tata bahasa. Yang menarik untuk dicatat mengenai bidang ini ialah kenyataan bahwa—kecuali karya Imam Syafii 1990, Adjat Sakri 1992, dan Ramlan 1993—petunjuk penggunaan wacana dengan seluk-beluknya tidak pernah disajikan dalam buku-buku itu. Hal itu sungguh mengherankan karena justru aspek ini merupakan kelemahan banyak orang yang mengungkapkan pikiranya dengan tulisan. Sebabnya mungkin terletak pada kenyataan bahwa—seperti diuraikan di atas—tidak semua buku tata bahasa pedagogis membahas seluk-beluk wacana, dan para penulis itu tidak berusaha memperdalam masalah itu (Biasanya para penulis itu enggan memeriksa karya-karya teknis tentang pelbagai aspek bahasa hasil penelitian mutakhir). Memang baru dalam buku penulis (1985) wacana diintegrasikan dalam sintaksis deskriptif Indonesia (walaupun sudah sejak tahun 1970 dikuliahkan), dan kemudian diikuti oleh buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (1988).

Dalam setiap pembahasan tentang betul-salah dalam penggunaan bahasa cukup dalam buku-buku itu dipergunakan ukuran baku-tidak baku. Kriteria patokannya biasanya sangat arbitrer, dan tidak mempergunakan konsep baku-tidak baku sebagai ragam yang bersangkutan dengan 4 penggunaan bahasa, yakni komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Misalnya kalimat *Presiden lantik lima duta besar* dalam sebuah buku

dinyatakan tidak baku, padahal masalahnya ialah bahwa kalimat itu hanya merupakan contoh gaya jurnalistik, dan tidak ada sangkut pautnya dengan ragam baku atau tak baku. Inilah kesulitan para penulis buku penyuluhan yang memberi penilaian terhadap suatu kalimat lepas dari wacananya, bahkan lepas dari konteks penggunaannya. Bahkan, dalam penyuluhan dewasa ini sering dicampuradukkan konsep betul-salah dengan konsep baku-tak baku dan dengan konsep efektif-tak efektif.

Sebuah kasus tata bahasa lain yang pernah dinilai salah menyangkut konstruksi Tema_x + Rema (Subyek *nya_x* + Predikat) seperti *Pak Ali anaknya cantik-cantik* dan *Masalah ini pemecahannya tidak mudah* (Lihat juga pasal 3.2.4 di atas). Kalimat semacam itu dikatakan salah; yang dinyatakan betul ialah kalimat *Anak Pak Ali cantik-cantik* dan *Pemecahan masalah ini tidak mudah*. Kasus ini memperlihatkan bahwa penilaian betul-salah tidak didasarkan pada hasil penelitian yang mengungkapkan kekhasan bahasa kita, yakni bahwa konstruksi tema-remata dan subyek-predikat adalah konstruksi yang sama-sama lazim dan "sah" dalam bahasa kita; mana yang dipakai, tergantung dari strategi komunikasi penutur. Berlainan dengan bahasa Inggris misalnya, dalam ragam tulis yang dianggap betul ialah konstruksi subyek-predikat saja. Pernyataan bahwa kalimat dengan konstruksi tema-remata salah jelas tidak memanfaatkan buku sintaksis Fokker yang kami sebut di atas karena di dalamnya sudah dibahas (walaupun dengan peristilahan yang berbeda dari apa yang dikemukakan di sini). Patut disayangkan bahwa dalam buku-buku tata bahasa pedagogis Indonesia dewasa ini—apalagi buku-buku penyuluhan—aspek pragmatik seperti ini tidak disinggung, padahal di sinilah letak kekhasan bahasa kita. Sekali lagi, ini pun kasus betapa suatu konsep seperti aspek pragmatik yang begitu penting—yang tidak kurang pentingnya dari aspek sintaksis dan semantik—hanya didengar istilahnya, tetapi tidak dipahami konsepnya.

Sebuah kalimat yang akhir-akhir ini hangat diperdebatkan orang ialah kalimat seperti *Penjahat itu berhasil ditangkap polisi*. Yang dipermasalahkan ialah siapa yang berhasil, penjahat atau polisi. Kalau kita ingat bentuk-bentuk kalimat lain seperti *Barang ini mudah didapat di mana-mana* atau *Bumbu ini mau diapakan?*, kita akan melihat persamaan polanya sehingga tidak akan mengecapnya sebagai kalimat yang salah. Memang benar, pola kalimat itu tidak sama dengan pola seperti *Sikecil ini mau saja dicium orang asing*. Kami tergoda untuk menjelaskannya secara teoretis; tetapi, biarlah kita tunda untuk pertemuan yang lebih terbatas. Walau bagaimanapun, setiap penilaian mengenai suatu bentuk bahasa seharusnya dicek dahulu benar tidaknya dari sudut penelitian bahasa.

Yang patut diperhatikan mengenai pembahasan dalam beberapa buku itu ialah penilaian bahwa bentuk-bentuk tertentu salah karena merupakan pengaruh Jawa, misalnya konstruksi seperti (1) *sepedanya Tuti*; (2) *kedengaran; mati kedinginan*; (3) *membangun daripada perumahan rakyat*. Kalau kita memeriksa prasasti-prasasti Sriwijaya dan pasal-pasal buku *Sejarah Melayu*, ternyata konstruksi posesif $N^1 + nya + N^2$ bukanlah konstruksi yang ganjil. Konstruksi semacam itu bahkan masih kita temukan dalam buku tata bahasa Melayu karya Sasrasoeganda; siapa yang kemudian

meng" haram"kannya dalam tata bahasa Indonesia, tidaklah jelas (Dalam banyak bahasa daerah--bukan hanya bahasa Jawa--konstruksi posesif dengan "ligatur" semacamnya itu merupakan konstruksi wajib). Bentuk *ke-an* ergatif seperti contoh itu cukup lazim dalam bahasa Melayu Klasik pada masa mana pun. Konstruksi *V+daripada+O* pun sudah lazim dalam bahasa Melayu Klasik abad ke-16 (konstruksi yang terakhir ini tidak ada dalam bahasa Jawa!). Sekalipun penulis tidak pernah mempergunakan bentuk terakhir itu, ia tidak akan menilainya sebagai konstruksi yang salah, melainkan sebagai konstruksi klasik atau arkais (Maklumlah, orang yang mengerti sejarah biasanya pemaaf). Apa yang kami katakan ini menguatkan pernyataan di atas bahwa pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu/Indonesia belum menyebar di kalangan umum, bahkan di antara para ahli bahasa sekalipun. Alhasil, "fatwa" yang dinyatakan tentang betul-salah--yang akhir-akhir ini diberi label baru, baku-tidak baku--, semata-mata didasarkan pada khayalan belaka.

4. Keputusan Bahasa yang Tidak Mantap

Dalam hubungan ini ada baiknya di sini dituturkan pengalaman penulis dan beberapa teman sejawatnya ketika menghadapi kekalutan karena bahan yang akan mereka sebar luaskan ke tengah masyarakat tidak didasarkan pada penelitian yang komprehensif.

Ketika mengemban tugas untuk menyiapkan peresmian EYD pada tahun 1972, penulis dan beberapa teman sejawatnya harus memeriksa kembali naskah *Ejaan Baru Bahasa Indonesia* yang disusun pada tahun 1966. Mereka mendapati bahwa di dalamnya terdapat beberapa rumusan aturan ejaan yang tidak didukung oleh penelitian sehingga sukar untuk dimasyarakatkan, misalnya aturan mengenai kata depan *ke*. Di situ dinyatakan bahwa kata depan itu harus dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Memang rumusan itu sederhana, dan karena kuatnya retorika, mudah sekali diterima orang. Akan tetapi, setelah kami telaah lebih jauh, rumusan itu malah dapat membingungkan orang--hal yang tidak diramalkan sebelumnya: bagaimana bila bentuk itu bergabung dalam kata jadian, seperti *ke samping*, *ke mana* yang harus bergabung dengan *me-kan* atau *di-kan*? Baru setelah mengadakan diskusi lama, dan melihat segala konsekuensi semua rumusan di dalam peraturan itu, kami bersepakat menjadikannya *mengesampingkan* dan *dikemanakan*. (Beberapa tahun kemudian kami mengadakan penelitian teoretis tentang keputusan itu, dan ternyata aturan itu masih dapat dipertanggungjawabkan: bentuk seperti *ke samping* yang menjadi *mengesampingkan* merupakan kasus penurunan tataran dari frase ke morfem dasar, dan juga merupakan kasus leksikalisasi). Cara yang sama kami lakukan sehingga ada rumusan tentang aturan-aturan penulisan lain, seperti *sebar luaskan-disebarluaskan* dan *Indonesia-pengindonesiaan*, serta perumusan lain yang menyangkut cara menulis dan cara membaca.

Pengalaman itu meyakinkan kami bahwa semua segi suatu keputusan bahasa harus diteliti secara cermat, baik dari sudut pertanggungjawaban ilmiah maupun dari sudut pelaksanaan praktis, dan kemudian dirumuskan dengan memperhatikan

kekonsistenan dan kekomprehensifan aturannya. Karena hanya dengan memperhatikan konsekuensi setiap aturan normatif bahasa, penutur benar-benar akan merasa dituntun untuk berbahasa secara teratur dan rapi; dan aturan itu akan bertahan lama ditaati orang. Sayangnya sekali dalam perkembangan bahasa selama beberapa tahun terakhir ini, kita menemukan keputusan-keputusan yang justru membingungkan orang karena ternyata tidak didukung oleh penelitian yang mendasar.

Salah satu kaidah asas yang melatari EYD 1972 ialah perubahan beberapa huruf tanpa perubahan lafalnya. Itu yang berlaku bagi huruf *dj*, *j*, *nj*, *sj*, *tj*, dan *ch* yang diubah menjadi *j*, *y*, *ny*, *sy*, *c*, dan *kh*. (Latar belakang sejarah dan sistematik keputusan itu sudah pernah dibahas dalam kesempatan lain, jadi tidak diulang lagi di sini). Atas dasar itu dituliskan kata-kata seperti *Januari*, *injeksi*, *subyek*, *junior*, *vinyet*, dsb. Tiba-tiba tanpa pengumuman resmi dan tanpa perembukan, dipreskripsikan untuk menulis *subjek*, *objek*, dsb.; dan oleh beberapa penulis dinyatakan itulah bentuk baku. Tidak dibantah oleh para penulis itu adanya kata-kata seperti *proyek*, *proyektil* dan *trayek* yang seakar. Jelas sekali cara penulisan seperti *subjek* dan *objek* tidak didukung oleh penelitian yang komprehensif, dan tidak didasari oleh ketaatan pada konvensi yang telah disepakati itu (karena para penganjur penulisan yang melanggar EYD itu tidak terlibat dalam usaha pemasyarakatan EYD pada tahun 1972, mereka tidak dapat merasakan betapa susah payahnya Lembaga Bahasa pada waktu itu meyakinkan orang untuk meresmikan dan menerimanya).

Cara penulisan yang juga tidak memperhatikan kekonsistenan dan kekomprehensifan ialah pengejaan kata *wasalam* (dengan satu *s*), padahal sudah lazim orang menuliskan *assalam alaikum* (yang tampaknya tidak akan diubah-ubah orang). Kasus lain ialah penulisan *Anda* (dengan *A* kapital) yang diatur dalam Pedoman EYD versi 1988 (tanpa penjelasan apa-apa), padahal dalam Pedoman EYD versi 1975 ditulis *anda* (dengan *a* kecil). Menurut Pedoman EYD versi 1975, hanya kata sapaan yang berasal dari istilah kekerabatan saja yang ditulis dengan huruf kapital. Contohnya: *Bapak*, *Ibu*, *Saudara*. Itu sebabnya kita mempertanyakan apa latar belakang rumusan Pedoman EYD versi 1988 itu, karena *anda* bukan istilah kekerabatan.

Begitulah beberapa kasus cara mengeja yang berubah-ubah karena perumusannya tidak didasarkan pada wawasan yang komprehensif, melainkan diungkapkan secara *ex cathedra*. Kita tidak perlu heran bila dalam media massa terdapat keanekaragaman cara mengeja kata-kata itu—sesuatu yang mengurangi kerapian bahasa Indonesia dan menggoyahkan kaidah-kaidahnya dan menggerogoti kepercayaan masyarakat kepada para ahli bahasa Indonesia.

5. Penutup

Kalau kita amati perkembangan wawasan tentang bahasa kita selama tiga puluh tahun terakhir ini, kita dapat mencatat kemajuan yang melebihi wawasan sebelumnya. Dalam segi struktur dapat dikemukakan wawasan tentang fonem, morfem, siklus morfologis, hierarki gramatikal, wacana dan bagian-bagiannya, perbedaan fungsi sintaktis, fungsi pragmatik dan fungsi semantis. Dalam segi sosiolinguistik dapat

dikemukakan wawasan tentang keanekaragaman bahasa, pembakuan bahasa, dan fungsi-fungsi bahasa. Sementara itu, penelitian yang bertujuan untuk mempertajam konsep-konsep bahasa yang sudah lazim juga terus dilakukan para sarjana bahasa Indonesia. Banyak di antara wawasan itu sudah sampai ke dunia pendidikan dan masyarakat umum (walaupun dengan variasi dalam penyajian dan penerimaannya), banyak juga yang belum menyentuh para pengguna bahasa.

Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah diperdalam penyelidikan mengenai sejarah bahasa Melayu/Indonesia, tetapi dampaknya dalam masyarakat belum tampak. Akhir-akhir ini pun sudah mulai dirintis penyelidikan tentang dialek-dialek bahasa Indonesia (yang ternyata tidak sama dengan dialek-dialek bahasa Melayu), tentang proses produksi dan resepsi bahasa, tentang seluk-beluk bahasa anak, tentang cacat bahasa, tentang bilingualisme, dan tentang sikap bahasa. Kapan semua hasil penyelidikan itu akan menjadi pengetahuan bersama dan dimanfaatkan masyarakat umum, masih perlu kita ikuti terus.

Bahwasanya semua kemajuan dalam penelitian bahasa itu dapat memperkaya cara pandang bahasa dan meningkatkan mutu praktik berbahasa para penutur, kiranya tidak perlu dibesar-besarkan lagi.

Masih banyak yang harus kita lakukan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya dalam menuntun penutur bahasa untuk bersikap positif dan apresiatif terhadap bahasa Indonesia, dan untuk bertutur secara bernalar dan apik. Untuk tujuan itu para penutur memerlukan kaidah-kaidah normatif yang konsisten, komprehensif, dan stabil, yang tidak mengabaikan kepraktisan dan keluwesan yang diperlukan untuk berbahasa secara kreatif. Dengan sendirinya kaidah-kaidah itu harus dirumuskan dengan penuh tanggung jawab, setelah diteliti semua latarnya dan ditilik segala konsekuensinya. Inilah yang harus kita lakukan sekarang ataupun nanti, tak berapa lama lagi, dalam tahun 2000.

**Elok kata dalam mupakat,
buruk kata di luar mupakat.**

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Abdullah. 1986. *Intisari Tatabahasa Indonesia*. Bandung: Djatnika
- Ikram, Achadiati dan Lukman Ali (ed.). 1966. *Simposium Bahasa Indonesia dan Kesusastraan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Sakri, Adjat. 1988. *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia Menyambut 60 Tahun Sumpah Pemuda 1928-1988*. Bandung: Penerbit ITB
- . 1992. *Bangun Paragraf Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB
- . 1993. *Bangun Kalimat Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB
- Aminoedin, A. dkk. 1984. *Fonologi Bahasa Indonesia: Sebuah Studi Deskriptif*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Halim, Amran. 1984. *Intonasi dalam Hubungannya dengan Sintaksis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan
- Pane, Armijn. 1950. *Mentjari Sendi Baru Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Badudu, J.S. 1992. *Cakrawala Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1984. *Deiksis dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fokker, A.A. 1951a. *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*. Pidato Pengukuhan U.I. Groningen-Jakarta: Wolters'
- . 1951b. *Inleiding tot de Studie van de Indonesische Syntaxis*. Groningen-Jakarta: Wolters'
- Garis-garis Besar Program Pengajaran Bidang Studi Bahasa Indonesia*. 1987. Jakarta: Departemen P & K
- Keraf, Gorys. 1991. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia untuk Tingkat Pendidikan Menengah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Adidarmojo, Gunawan Wibisono. 1989. *Renda-renda Bahasa: Petunjuk Praktis guna Terampil dan Mampu Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Lapoliwa, Hans. 1990. *Klausur Pemerlengkapan dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Kridalaksana, Harimurti dkk. 1985. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia I: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Bahasa

- Kridalaksana, Harimurti. 1968. "Tutur sapa dalam penggunaan bahasa Indonesia dewasa ini: sebuah studi sosiolinguistik". *Seminar Ikatan Linguistik Indonesia*
- . 1971. "Terms of address in contemporary Indonesian". Kertas kerja 28th *International Congress of Orientalists*, Canberra (Australia)
- . 1974. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah
- . 1972. "Nya sebagai penanda anafora". *Bahasa dan Kesusastraan* 1:2
- . 1978. "Keutuhan Wacana". *Dewan Bahasa* 22: 507-17
- . 1989. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Alwi, Hasan. 1990. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Syafiie, Imam dkk. 1990. *Bahasa Indonesia Profesi*. Malang: IKIP
- Kamil, T.W. & Sugeng Sukarsono. 1960. "Beberapa Morfem yang Produktif dalam Bahasa Indonesia". *Bahasa dan Budaya*
- Kamil, T.W. 1964. "Perbandingan Beberapa Pandangan tentang Konsepsi Morfem dan Saran- Saran mengenai Adaptasi Konsepsi tersebut dalam Bahasa-Bahasa Nusantara". *MISI*
- Kamil, T.W. & A.M. Moeliono. 1961. "Beberapa Patokan dan Saran untuk Pelaksanaan Linguistik di Indonesia". *Medan Ilmu Pengetahuan*
- Mees, C.A. 1951. *Tatabahasa Indonesia*. Bandung: Masa Baru
- Muhadjir & Basuki Suhardi (ed.). 1990. *Bilingualisme dan Variasi Bahasa*. Depok: Fakultas Sastra U.I.
- Poedjawijatna, I.R. & P.J. Zoetmulder. 1955. *Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas*. Jakarta: Obor
- Ramlan, M., dkk. 1992. *Bahasa Indonesia yang Salah dan yang Benar*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ramlan, M. 1964. "Immediate Constituent (IC) dalam morfologi dan sintaksis Indonesia". *MISI*
- . 1965. "Kata-majemuk dalam bahasa Indonesia". *MISI*
- . 1993. *Paragraf: Alur Pikiran dan Kepaduannya dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Samsuri. 1960. "Sistim Fonem Indonesia dan Suatu Penyusunan Edjaan Baru" *Medan Ilmu Pengetahuan*
- . 1989. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sastra Hudaya
- Sebeok, T.A. 1971. *Current Trends in Linguistics*, jilid 8: *Linguistics in Oceania*. The Hague & Paris: Mouton
- Simatupang, M.D.S. 1983. *Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Yundiafi, Siti Zahra (ed.). 1992. *Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Slametmuljana. 1956-7. *Kaidah Bahasa Indonesia*. 2 jilid. Jakarta: Djambatan
- , 1959. *Politik Bahasa Nasional*, Pidato Pengukuhan U.I. Jakarta: Djambatan
- Sudaryanto. 1983. *Predikat Obyek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Alisjahbana, Takdir. 1944-50. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat
- , 1954. *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*. Jakarta: Pustaka Rakyat
- , 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Djakarta: Pustaka Rakyat
- Tang Tjia Han. 1960. "Awalan Kata Kerja 'ter' dalam Bahasa Indonesia". *Bahasa dan Budaya*
- Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta: Balai Pustaka
- Teeuw, A. 1961. *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Tim Bahasa Indonesia SMKTA Jakarta. 1992. *Panduan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMEA, STM, SMKK, SMIP, dll*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega
- Suryaman, Ukun. 1992. *Dasar Bahasa Indonesia Baku*. Bandung: Penerbit Alumni
- Uhlenbeck, E.M. 1971. "Indonesia and Malaysia" dalam Sebeok 1971.8:55-111
- Wedhawati, dkk. 1991. *Yang Penting Buat Anda: para pejabat, eksekutif, wartawan, dan dosen*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press
- Arifin, E. Zaenal & Farid Hadi. 1991. *1001 Kesalahan Berbahasa: Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo
- Arifin, E. Zaenal. 1987. *Berbahasa Indonesialah dengan Benar: Petunjuk praktis untuk pelajar, mahasiswa dan guru*. Jakarta: P.T. Mediyatama Sarana Perkasa
- Zain, S.M. 1942-54. *Djalan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dharma
- Zainuddin GLPg, Batuah, S. 1956. *Dasar-dasar Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Zulkarnain. 1990. *Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI 1984/1990*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah	:	Peranan Karya Kebahasaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia
Pemakalah	:	Harimurti Kridalaksana
Pemandu	:	Sudaryono
Pencatat	:	Nurweni Saptawuryandari Kasno

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia

Mengapa makalah Bapak hanya menekankan pada masalah kesejarahan bahasa tanpa menyinggung karya-karya kebahasaan dan pembinaan.

Jawaban:

Karena dengan menekankan masalah kesejarahan, kita menghargai para pendahulu kita dan ada dampaknya pada dunia bahasa, serta wawasan kita lebih dipertajam. Jelasnya, makalah ini menekankan pada perspektif historis.

2. **Pertanyaan:** H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran

Setuju dasar historis, tetapi terlalu jauh ke belakang. Dan kita sering mendengar penggunaan bahasa versi Zain dan Harimurti. Misalnya, *semena-mena* sudah ada pada abad-17 oleh S.M. Zain dikatakan berasal dari bahasa Sanskerta, sedangkan (Harimurti) mengatakan bahwa *semena-mena* sama dengan *sewenang-wenang*. Pusat Bahasa terlalu sering mengubah kata-kata sehingga semakin tidak karuan. Apalagi kalau kata itu sudah melembaga seperti kata *analisis* dan *analisa*. Kata *analisis*, yang kita tahu hanya dipakai di lingkungan perguruan tinggi dan kata *analisa* dipakai oleh masyarakat umum.

Jawaban:

Sebagai penyusun kamus saya merekam apa yang ada dalam masyarakat. Seperti KBBI I sebenarnya hampir sama dengan KBBI II dan kita bukan otoritas bahasa yang ingin sesuka hati mengubah kata, asal tidak bertentangan dengan etimologi kita terima.

3. **Pertanyaan:** Leonardus Lumbanbatu, ASM Sriwijaya

Pengamatan saya tentang bahasa lisan dan tulisan sangat campur baur (*gado-gado*), tetapi kenapa tidak ada yang menyinggung pemilihan bahasa lisan dan tulis.

Jawaban:

Bahasa lisan telah diteliti oleh Armijn Pane dalam buku *Sendi Baru Bahasa Indonesia*, oleh Halim, dan Lapoliwa.

4. **Pertanyaan:** H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran
Bagaimana dengan corak bahasa lisan yang banyak ragamnya?

Jawaban:

Pada dasarnya corak bahasa lisan bebas dari unsur daerah. Asal terlihat kenasionalannya.

Saran: H. Iman Syafi'ie, FPBS IKIP Malang

Penting! Politik Bahasa Nasional sudah merupakan keputusan yang yuridis. Untuk itu, segera dibuat surat keputusan tentang Politik Bahasa Nasional yang bukan hanya sekadar garis-garis bahasa. Saya menganjurkan agar kongres ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi tentang Politik Bahasa Nasional.

Jawaban:

Sependapat dengan Bapak.

PENERAPAN MESIN SWAAJAR PADA PEMROSESAN BAHASA ALAMI : SUATU EKSPERIMEN UNTUK BAHASA INDONESIA

Hamam Riza Yusuf

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Abstrak

Menguraikan kalimat yang mengandung kata yang tidak diketahui oleh suatu sistem pemrosesan bahasa alami memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan bila semua kata telah diketahui oleh sistem. Keadaan ini disebabkan oleh adanya berbagai struktur gramatika yang dimiliki oleh kata tersebut dan perlu diproses oleh sistem. Untuk mengatasi masalah ini, cetakan (*templates*) dari berbagai struktur gramatika diekstrak dari sekumpulan kalimat dengan memanfaatkan metode yang memungkinkan komputer untuk belajar secara otomatis (*machine learning*). Cetakan-cetakan ini menyimpan struktur kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Bila sebuah kalimat sesuai dengan salah satu cetakan, sistem pemrosesan bahasa tersebut dapat menggunakan cetakan ini sehingga waktu untuk menguraikan kalimat yang belum dikenal menjadi lebih singkat.

Suatu eksperimen yang menggunakan metode ini dilakukan untuk bahasa Indonesia. Eksperimen ini memperlihatkan bahwa sistem pemrosesan bahasa alami dapat "belajar" kaidah tata bahasa bahasa Indonesia melalui proses penyerapan (akuisisi) komponen leksikal. Metode ini berdasarkan pada salah satu pendekatan dalam teknologi mesin swaajar yang dikenal dengan sebutan *explanation-based learning*. Dengan eksperimen ini, dimungkinkan untuk mengembangkan sistem pemrosesan bahasa Indonesia secara lebih efisien dan efektif.

Kata kunci

Pemrosesan bahasa alami, mesin swaajar (*machine learning*), *explanation-based learning* (EBL), akuisisi leksikal, leksikon.

1. Pendahuluan

Pemrosesan bahasa alami merupakan salah satu aplikasi yang sangat populer dari teknik kecerdasan buatan. Dewasa ini penelitian pemrosesan bahasa alami oleh

komputer berkembang dengan pesat dengan adanya sistem penerjemahan dengan mesin, sistem koneksionis (*connectionist, neural network*) yang menganalisis percakapan aktual dan sistem komputer untuk otomatisasi fungsi linguistik lainnya. Hal itu tidak terlepas dari meningkatnya penelitian di bidang ilmu linguistik komputasional, ilmu kognitif, serta kecerdasan buatan.

Penelitian teori tata bahasa yang berdasarkan pada unifikasi (*unification grammar*) [Shieber, 1991] yang berkembang dewasa ini mensyaratkan tersedianya berbagai informasi linguistik di dalam leksikon. Persyaratan ini berbeda dari teori tata bahasa konvensional, yang biasanya menempatkan informasi linguistik di dalam modul pengetahuan kaidah tata bahasa. Di pihak lain, membangun suatu leksikon merupakan pekerjaan yang sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama meskipun hanya untuk leksikon yang berukuran kecil. Meskipun begitu, suatu sistem pemrosesan bahasa alami yang dimaksudkan untuk aplikasi yang serius harus memiliki leksikon berukuran besar—umumnya berjumlah ribuan kata—yang tentu saja menambah kompleksitas dari sistem tersebut. Untuk memecahkan masalah itu, alat bantu untuk akuisisi leksikal tidak saja diperlukan, alat bantu ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh sistem pemrosesan bahasa alami yang andal.

Masalah pembangunan leksikon ini dapat diatasi dengan memakai sejumlah program yang memerlukan pengarah interaktif bila sebuah entri leksikal dimasukkan ke dalam suatu sistem leksikon. Entri leksikal ini dapat bersumber dari teks 'mentah' (seperti dalam Trost & Buchberger 86, Wilensky 90, dan Zernik & Dyer 85, Zernik 87) maupun dari kamus yang dapat dibaca oleh mesin komputer, seperti LDOCE (lihat Bougarev 87, Calzolari & Bindi 90). Meskipun alat bantu interaktif ini menurunkan kompleksitas pembuatan suatu sistem leksikon, keinginan kita adalah untuk menciptakan sistem yang tidak memerlukan interaksi dengan manusia, yaitu suatu sistem yang dapat belajar sendiri (*swaajar*) dari masukan (*input*) yang diberikan padanya.

Dalam makalah ini, akan diuraikan suatu prosedur untuk meningkatkan otomatisasi dan efisiensi dari sistem pemrosesan bahasa alami melalui salah satu metode dalam teknik *machine learning* (ML) atau "mesin swaajar". Pada dasarnya, mesin swaajar merupakan suatu sistem komputer yang dapat "belajar" sendiri secara otomatis. Dalam hal ini, suatu sistem pemrosesan bahasa alami diberikan kemampuan untuk menerima "pelajaran" dari berbagai penjelasan linguistik - yang dapat diberikan oleh pakar linguistik - berupa contoh latihan (*training examples*) sebagai masukan sistem komputer tersebut. Contoh latihan ini akan diolah oleh mesin untuk kemudian menjadi bagian dari "pengetahuan" sistem, di samping pengetahuan yang sudah dimiliki oleh sistem itu terlebih dahulu. Tentu saja, contoh latihan yang diberikan ini memerlukan batasan yang sesuai dengan kemampuan sistem untuk menerima "pelajaran" tersebut.

Sistem ML yang digunakan di sini memakai sebuah mesin pemroses bahasa dan berbagai sumber informasi. Mesin pemroses bahasa memuat kaidah tata bahasa, pengetahuan semantik, morfologi, dan fonologi yang dapat dikatakan sebagai

"pengetahuan dasar" dari sistem tentang bahasa Indonesia. Sumber informasi adalah berbagai korpus kalimat, yang menyediakan kalimat masukan yang sudah dimengerti oleh sistem. Berbagai elemen ini selanjutnya digabungkan agar dapat melakukan inferensi terhadap kalimat ataupun kata yang belum pernah dipelajari (dimengerti) oleh sistem. Gambar 1 menunjukkan konfigurasi sistem yang digunakan untuk eksperimen ini.

Pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai elemen dari sistem yang menggunakan metode swaajar. Pada bagian ketiga akan diulas algoritma EBL serta menjelaskan metode ini dalam konteks ML. Pada bagian ketiga pula diterangkan eksperimen yang dilakukan untuk bahasa Indonesia.



Gambar 1.
Konfigurasi Sistem Swaajar

2. Elemen Sistem Swaajar

a. Mesin Pemroses Bahasa Alami

Untuk melakukan pemrosesan terhadap kalimat masukan, diperlukan mesin pemroses bahasa alami. Dalam hal ini, kami menggunakan mesin yang dibangun untuk pemrosesan bahasa, yang dikenal dengan nama *Core Language Engine (CLE)*. Mesin ini dikembangkan oleh SRI, Cambridge dengan tujuan sebagai salah satu elemen dari berbagai aplikasi pemrosesan bahasa alami, seperti sistem tanya/jawab basis data, sistem mesin penerjemahan, dan sistem translasi bahasa lisan ke tulisan. Tujuan penggunaan CLE dalam eksperimen ini adalah untuk memetakan kalimat masukan ke dalam bentuk logik (*Quasi-Logical Form*) [Alshawi & van Eijck 89]. Sistem ini sepenuhnya berdasarkan pada proses unifikasi dan sesuai dengan teori tata bahasa yang berdasarkan struktur frasa, seperti halnya bahasa Indonesia.

Untuk menerapkan CLE pada bahasa Indonesia, diperlukan berbagai adaptasi yang menyangkut kekhususan karakteristik bahasa Indonesia seperti dalam morfologi dan fonologi.

Entri leksikal mengandung informasi mengenai morfologi (derivasional), sintaktik, semantik (subkategori), dan restriksi seleksional. Informasi mengenai fungsi linguistik dari sebuah entri direpresentasikan dengan melihat berbagai jenis informasi sebagai suatu pohon hierarki, yang terdiri dari simbol utama sebagai akar (*root*) dan spesifikasi fitur sintaktik/semantik sebagai daun (*leaves*). Kategori ini juga disediakan pada modul tata bahasa CLE. Pada saat kalimat diuraikan, kedua informasi ini dicocokkan dan digabungkan melalui proses unifikasi. Sebuah kategori dapat diunifikasi dengan kategori lain bila batasan pada fitur sintaktik/semantik dari keduanya sesuai (*compatible*) satu sama lainnya.

b. Pembangun Kosakata

Dalam eksperimen ini, kita ingin menyelidiki cara untuk membangun leksikon yang hanya memerlukan interaksi dengan pemakai seminimal mungkin. Untuk itu, sistem pembangun kosakata diberi sekumpulan kalimat (dalam jumlah besar) dengan asumsi bahwa *kata yang tidak diketahui* (disingkat KTD) akan muncul dalam berbagai pola kalimat. Sebelum menjelaskan hal ini lebih jauh, akan didefinisikan pengertian dari paradigma, atau dikenal juga dengan sebutan subkategorisasi.

Definisi 1

Sebuah paradigma adalah perpotongan yang minimal (dan tidak kosong) dari entri leksikal. Setiap kategori di dalam sebuah paradigma akan muncul di dalam sekumpulan entri di leksikon seperti halnya kategori lainnya (jika ada) di dalam paradigma tersebut. Setiap entri mengandung gabungan yang lepas (disjoint union) dari berbagai paradigma.

Definisi ini mengasumsikan bahwa leksikon dapat dideskripsikan sebagai bagian dari paradigma, yang pada dasarnya menganggap kata-kata berkategori terbuka mempunyai kesamaan satu dengan lainnya. Selanjutnya, setelah KTD beserta pola kalimat itu ditampung oleh modul pembangun kosakata, kumpulan itu diberikan kepada sistem swaajar leksikal, seperti dijelaskan berikut ini.

c. Sistem Leksikon Swaajar

Eksperimen di bidang akuisisi leksikal menggunakan sekumpulan kalimat dan tata bahasa formal untuk menalar jenis kata dalam kalimat-kalimat yang akan dianalisis tersebut. Semula, menurut pemikiran kami, kita dapat membangun leksikon dari dasar (leksikon yang kosong). Hal itu dengan menganggap bahwa aturan tata bahasa dapat memberikan restriksi seleksional pada kata-kata yang tidak diketahui dan selanjutnya menetapkan kategori (jenis) kata-kata tersebut. Ini dapat dipandang sebagai suatu prosedur untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear, dengan kata merupakan variabel yang akan dicari nilainya.

Dalam kenyataannya, pemikiran ini tidaklah benar. Sebuah kalimat yang mengandung beberapa KTD akan sangat sulit diuraikan oleh modul pengurai kalimat (*parser*). Oleh karena itu, pendekatan di atas direvisi sebagai berikut: leksikon diisi dengan sejumlah kata yang berkategori tertutup (*closed-class*) seperti jenis kata ganti, kata depan, kata sandang, dan kata sambung. Sistem analisis, selanjutnya, menguraikan kalimat yang berisi hanya sebuah KTD, dengan harapan sistem dapat belajar "perbendaharaan kata" secara otomatis dari kalimat ini. Pengetahuan akan kosakata ini selanjutnya digunakan untuk analisis kalimat yang mengandung KTD lainnya secara berkesinambungan.

d. Sistem Swaajar Tata Bahasa Berbasis Penjelasan

Suatu permasalahan pada tata bahasa bahasa alami adalah adanya berbagai konstruksi yang sebenarnya jarang muncul di dalam kalimat yang aktual. Dengan menggunakan teknik swaajar yang berdasarkan pada penjelasan (*explanation based learning*, disingkat EBL) kita dapat meningkatkan efisiensi dari proses penguraian (*parsing*) melalui penggunaan metode swaajar leksikal (bagian 2.3 di atas).

Metode ini pada dasarnya menggunakan sekumpulan aturan yang "dipelajari" oleh sistem yang melaksanakan fungsi komponen analisis tata bahasa, yaitu menguraikan kalimat sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Dengan menggunakan indeks, aturan yang dipelajari sistem dapat digunakan secara lebih cepat dibandingkan bila aturan tersebut harus disediakan terlebih dahulu (seperti halnya sistem yang konvensional). Aturan yang dipelajari dapat dipandang sebagai suatu cetakan bagi suatu frasa yang benar secara kaidah bahasa. Aturan ini diekstrak dari sekumpulan kalimat latihan menggunakan EBL. Di sini kita menggunakan definisi berikut:

Definisi 2

Suatu cetakan adalah sebuah generalisasi yang dibangun dari pohon uraian (parse tree) sebagai hasil pemrosesan sebuah frasa.

Karena cetakan tersebut diperoleh dari kaidah tata bahasa, hal itu menjamin bahwa cetakan tersebut merepresentasikan suatu frasa secara benar. Di samping itu, karena cetakan ini diekstraksi dari sekumpulan kalimat, ia menjamin suatu konstruksi yang aktual yang kita jumpai.

3. Sistem Swaajar Berbasis Penjelasan

Algoritma untuk sistem swaajar berbasis penjelasan (EBL) adalah sebagai berikut.

- 1) Dengan menggunakan korpus yang besar dari suatu domain, lakukan ekstraksi cetakan dari kalimat yang tidak mengandung KTD
- 2) Analisis kalimat selanjutnya (kalimat yang mengandung KTD) menggunakan cetakan kalimat, sambil membangun suatu leksikon "sekunder" untuk KTD.
- 3) Bandingkan restriksi yang ada pada KTD menggunakan hasil analisis kalimat yang sudah ada sesuai dengan suatu paradigma di dalam leksikon.
- 4) Membentuk entri leksikal "aktual" dari informasi yang terdapat di dalam leksikon "sekunder" bila seluruh cetakan yang membentuk sebuah paradigma telah dipelajari.

a. Ekstraksi Cetakan

Keadaan yang cocok untuk melaksanakan metode ini adalah bila kita ingin membangun suatu sistem pemrosesan bahasa alami yang mempunyai leksikon untuk domain tertentu. Kosakata yang dipakai dalam domain ini akan melibatkan istilah teknis yang tidak dimiliki oleh leksikon inti. Demikian pula, pemakaian kata dalam leksikon inti dapat berbeda dari satu domain ke domain lainnya. Beberapa struktur gramatika juga akan lebih sering digunakan pada satu domain tertentu dibandingkan dengan domain lainnya. Untuk itu, eksperimen ini hanya mencoba "mempelajari" struktur kalimat dalam lingkup aplikasi yang terbatas.

Korpus dibagi atas dua bagian, yaitu bagian yang mengandung kalimat yang bersih dari KTD dan bagian lainnya yang mengandung kalimat yang memiliki KTD. Bagian yang pertama digunakan untuk ekstraksi cetakan kalimat yang "menangkap" bangun gramatika di dalam domain tertentu. Proses ekstraksi cetakan kalimat dari kalimat latihan telah dijelaskan pada bagian 2d di atas.

b. Analisis Kalimat

Dengan menganggap bahwa suatu kumpulan cetakan-frasa dapat diterapkan pada sebuah kalimat yang mengandung KTD, sekumpulan batasan kategori dapat dilekatkan pada KTD tersebut. Pada dasarnya, hal ini dapat dilaksanakan bila batasan

DAFTAR PUSTAKA

- Alshawhi, H., and J. van Eijck. 1989. "Logical Forms in the Core Language Engine." The 27th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Vancouver, British Columbia.
- Asker, Lars, B. Gambäck, and C. Samuelsson. 1992. *EBL²: An Approach to Automatic Lexical Acquisition*. Proceeding of the 15th International Conference in Computational Linguistics, Nantes, France.
- Boguraev, B., T. Briscoe, and J. Carroll. 1987. *The Derivation of A Grammatically Indexed Lexicon from the LDOCE*. The 25th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Stanford, pp. 193-200.
- Calzolari, N. and R. Bindi. 1990. "Acquisition of Lexical Information from a Large Textual Italian Corpus." International Conference in Computational Linguistics, Helsinki, Finland.
- Shieber, S. 1986. *An Introduction to Unification-based Approaches to Grammar*, CSLI, Lecture Notes, Stanford.
- Trost, H., and E. Buchberger. 1986. "Towards the Automatic Acquisition of Lexical Data." The 11th International Conference in Computational Linguistics, Bonn, Germany.
- Wilensky, R. 1990. *Extending the Lexicon by Exploiting Subregularities*. The DARPA Speech and Natural Language Workshop, Hidden Valley, PA.
- Yusuf, Hammam. 1989. "Sistem Pemrosesan Bahasa Alami pada Komputer Generasi ke-V." Konferensi Ikatan Pemakai Komputer Indonesia, Jakarta.
- Yusuf, Hammam. 1988. "Strategi Aktual dalam Penelitian dan Pengembangan Sistem Penerjemahan dengan Mesin." Diskusi Besar Inteligensia Buatan HMIF-ITB, Bandung.
- Yusuf, Hammam. 1992. *Analysis of Indonesian Language for Interlingual Machine Translation System*, Proceeding of the 15th International Conference in Computational Linguistics, Nantes, France.
- Yusuf, Hammam. 1993. "Teknologi Penerjemahan dengan Mesin dan Penerapannya di Indonesia." Kongres dan Seminar Permias 1993, Houston, Texas, Agustus.
- Zernik, U. and M. Dyer. 1985. "Towards a Self Extending Lexicon". The 23rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, University of Chicago, IL.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Penerapan Mesin Swaajar Pemrosesan Bahasa Alami: Suatu
Eksperimen untuk Bahasa Indonesia
Pemakalah : Hammam Riza Yusuf
Penyaji : Darmawan Sukmadjaja
Pemandu : Hans Lapoliwa
Pencatat : Farid Hadi
Titik Indijastini

Penyaji makalah tidak hadir.
Sidang ditiadakan!

KEHIDUPAN DAN MASA DEPAN SASTRA DAERAH DI INDONESIA

S.R.H. Sitanggang

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pendahuluan

Sikap Pemerintah Indonesia terhadap kedudukan bahasa daerah telah dinyatakan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 sebagai berikut.

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itupun akan dipelihara juga oleh Negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Kutipan di atas menyiratkan bahwa perkembangan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah bergantung kepada sikap masyarakat pendukungnya. Namun, dalam kenyataan pada umumnya penilaian masyarakat Indonesia sekarang ini mengenai segala sesuatu yang tidak modern, apalagi yang bersifat pribumi, termasuk sastra lisan dan sastra lama, kurang memperlihatkan kepedulian (Ikram, 1976:7,9).

Kondisi semacam itu tentu suatu ancaman bagi kehidupan bahasa dan sastra daerah. Hal itu perlu disikapi secara positif oleh semua kalangan. Uluran tangan dan perhatian Pemerintah sangat diperlukan dalam berbagai tindak kegiatan.

Pemerintah, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, telah menyelenggarakan sejumlah pertemuan bahasa dan sastra daerah sejak 1975, Seminar Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah sampai pada Pertemuan Bahasa dan Sastra Daerah di Indonesia Wilayah Timur (Ujung Pandang, 6-12 Januari 1985) dan di Indonesia Wilayah Barat (Pekanbaru, 12-18 Januari 1986). Dalam kegiatan itu, para pakar dan pengamat masih merasakan manfaat sastra daerah dalam pelbagai aspek kehidupan: (1) penunjang perkembangan bahasa daerah; (2) penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia; (3) pengungkap alam pikiran, sikap, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat; serta (4) penyampai gagasan yang mendukung pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah merupakan suatu tuntutan sebagaimana juga tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, khusus untuk kebudayaan pada Pelita VI, butir (f), sebagai penjabaran Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa " ... perlu

ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya dapat dijadikan sebagai jaminan pengembangan sastra daerah".

Usaha ke arah pengentasan bahasa dan sastra daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Hasjim dkk., 1993) telah melakukan pula 14 kali kegiatan penelitian tentang kedudukan dan fungsi bahasa daerah (1976–1993) dan 11 kegiatan penelitian tentang manfaat nilai budaya sastra daerah (1991–1992). Selama jangka waktu 1975–1993 para peneliti di daerah di bawah koordinasi instansi tersebut juga telah berhasil melakukan 937 kegiatan penelitian bahasa dan sastra daerah di 26 propinsi dengan perincian: 188 kegiatan penelitian tentang sastra daerah dan 749 kegiatan penelitian tentang berbagai aspek bahasa daerah dengan sasaran 241 bahasa daerah, termasuk dialek.

TABEL 1
KEGIATAN PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
DI SETIAP WILAYAH DI INDONESIA
1975–1993

No.	Wilayah	Bahasa Daerah	Sastra Daerah	Jumlah
1.	DI Aceh	46	12	58
2.	Sumatra Utara	33	8	41
3.	Sumatra Barat	35	14	49
4.	Riau	34	4	38
5.	Bengkulu	9	—	9
6.	Jambi	15	3	18
7.	Lampung	21	5	26
8.	Sumatra Selatan	33	6	39
9.	DKI Jakarta	4	2	6
10.	Jawa Barat	48	32	80
11.	Jawa Tengah/DI Yogya	74	30	104
12.	Jawa Timur	46	10	56
13.	Kalimantan Barat	38	5	43
14.	Kalimantan Tengah	29	2	31
15.	Kalimantan Selatan	28	2	30
16.	Kalimantan Timur	13	—	13
17.	Sulawesi Utara	25	5	30
18.	Sulawesi Tengah	34	5	39
19.	Sulawesi Tenggara	49	16	65
20.	Sulawesi Selatan	39	12	51
21.	Bali	21	14	35
22.	Nusa Tenggara Barat	23	2	25
23.	Nusa Tenggara Timur	17	4	21
24.	Maluku	30	5	35
25.	Irian Jaya	23	—	23
26.	Timor Timur	11	3	14
	Jumlah	749	188	937

Dapat pula diinformasikan bahwa Proyek Penerbitan Buku Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada 1976–1993¹ juga telah menerbitkan 207 judul buku sastra daerah, misalnya cerita rakyat, puisi, dan hikayat, termasuk 41 judul cerita anak-anak.

Sebagai sarana pendukung penelitian sastra daerah, 48 kamus bahasa daerah–Indonesia juga telah diterbitkan (1976–1992) dengan rincian sebagai berikut.

TAHUN BAHASA DAERAH/DIALEK

1976	Dialek Jakarta
1977	Angkola/Mandailing, Toba, Biak, Bugis, Dairi/Pakpak, Gorontalo, Mandar, Madura, Banjar, Dialek Jawa, dan Banten
1985	Aceh, Alas, Karo, Bakumpai, Bali Kuna, Gayo, Bima, Lampung, Manado, Melayu, Melayu Bali, Melayu Deli, Melayu Langkat, Makasar, Mentawai, Minangkabau, Muna, Nias, Ogan, (Praktis) Jawa, Rejang, Sakai, Sasak, Simalungun, Sumbawa, Sunda, Suwana, Tetum, Tolaki, Tondano, Kerinci, dan Wolio
1986	Melayu Riau
1992	Cirebon dan (Ungkapan) Wolio

Jika diperhatikan secara keseluruhan uraian di atas, dapat dikatakan Pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap usaha pembinaan dan pengembangan sastra daerah di Indonesia.

2. Kehidupan Sastra Lisan

Tradisi bersastra di Indonesia pada umumnya hadir dalam bentuk lisan karena budaya tulis masih sangat muda usianya. Dapat dikatakan sastra lisan di Indonesia sebagian besar tersimpan di dalam ingatan orang tua atau tukang cerita, seperti *tukang kaba* (Minangkabau), *juru pantun* (Sunda), dan *tukang kentrung* (Jawa) yang jumlahnya semakin berkurang dimakan usia.

Hal pentingnya sastra lisan, selain dapat menjadi alat untuk memelihara dan menurunkan buah pikiran suatu suku atau bangsa (Robson, 1978:9), juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi sastra tertulis.

Pada awal abad-19 (Teeuw, 1984:283–287), sastra lisan, terutama yang berkaitan dengan antropologi keagamaan, di berbagai daerah di Indonesia sudah pernah diteliti khususnya oleh para misionaris (Lembaga Alkitab Belanda, *Nederlandsch Bijbelgenootschap*). Sastra lisan yang diteliti, antara lain dari daerah *Batak* (H.N. Van der Tuuk, 1850; P. Voorhoeve, 1927; W.A. Braasem, 1951), *Toraja* (N. Adriani, 1865), *Tontemboan* (Schwarz, 1907), *Dayak Ngaju* (H. Van der Schaver, 1966), *Dayak Mualang* (P. Donatus Dunselman, 1959), *Nias* (W.L. Steinhart, 1934), dan *Timor* (P. Mindelkoop, 1939). Setelah itu, penelitian pada tahap berikutnya terasa terhenti.

Sejak Lembaga Bahasa Nasional berganti nama menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, penelitian sastra lisan di Indonesia baru kemudian dilakukan secara terprogram. Setidaknya hingga tahun 1993 telah terbit lima puluh buah hasil penelitian, yaitu *sastra lisan Abui, Aceh, Aluwe, Banjar, Bolaang Mangondow, Bugis, Dawan, Dayak Sangan, Gorontalo Iban, Jambi, Jawa, Kaili, Karo, Kayu Agung, Komering, Lampung, Lampung Dialek Abung, Manboi (Tintim), Mandar, Massenrem-pulu, Melayu Bangka, Melayu Belitung, Melayu Deli, Melayu Dialek Kuantan Hilir, Melayu Langkat, Melayu Serdang, Mentawai, Minahasa, Minangkabau, Mori, Rote, Roti, Saluan, Sambas, Sangir Talaud, Sasak, Simalungun, Sumbawa, Sunda, Tetum, Terum Belu, Toba, Tolaki, Toraja, Totemboan, Totoli, dan Wolio*. Dalam setiap simpulan hasil penelitian itu disarankan perlunya dilakukan penelitian sastra lisan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan agar terhindar dari kepunahan. Perhatian dan minat generasi muda kini terhadap sastra lisan dikatakan cenderung tidak memperlihatkan sikap positif.

3. Sastra Daerah Modern sebagai Sastra Majalah

Dalam perjalanan sastra daerah di Indonesia, sastra daerah yang berkembang pada zaman kolonial yang tampaknya hingga kini masih menunjukkan napas kehidupan hanya sebagian kecil—sastra Jawa, Sunda, Bali, dan Madura(?)—sebagaimana (pernah) tampak dalam berbagai media massa, khususnya majalah dan surat kabar. Para pengamat sastra daerah modern menjulukinya "sastra majalah" karena hampir semua sastra daerah modern dipublikasikan dalam majalah dan surat kabar (Rosidi, 1966; Soebagijo I.N., 1991; Hariyadi dkk., 1977; Made dkk., 1978).

a. Sastra Jawa Modern

Pada masa praperang (revolusi), masyarakat Jawa memiliki berbagai macam majalah dan surat kabar, baik yang dikelola oleh Pemerintah, seperti *Kejawen*, maupun oleh swasta, misalnya *Jaya Baya* (Kediri, 1945), *Obor* (Solo, 1946), dan *Penjebat Semangat* (Solo dan Surabaya). *Penjebat Semangat* terbit pertama kali pada 1930-an, lalu mati pada masa pendudukan Jepang, kemudian bangkit kembali pada 1949. Majalah *Expres*—yang kemudian berganti nama menjadi *Ekspres* dan *Espres*—lahir pada masa praperang, lalu mati pada masa pendudukan Jepang, tetapi terbit lagi pada 1950. Beberapa majalah dan surat kabar yang bertahan hidup hingga sekarang ialah *Jaya Baya*, *Jawa Anyar*, *Mekar Sari*, *Djaka Lodhang*, dan *Penjebat Semangat*.

Ketika masyarakat Jawa memiliki berbagai media massa daerah, tampak sastra Jawa modern (SJM) telah diperkaya oleh berbagai bentuk karangan yang sebelumnya tidak dikenal, yaitu cerpen (cerita pendek), cerbung (cerita besambung, novel), dan soneta.

Pada 1930 SJM sudah mengenal bentuk cerpen dengan terbitnya "Jejodhowan Wurung" 'Perkawinan yang Gagal' dalam *Kedjawen* dan *Penjebat Semangat* (Pradopo dkk., 1985:1) Bahkan, Ras (1977:ix-x) mencatat pada 1920 SJM telah mengenal

karangan bentuk novel dengan terbitnya *Serat Riyanta* (satu di antara enam judul yang diterbitkan oleh Balai Pustaka). Beberapa karya sastra Indonesia dan asing juga telah dialihbahasakan, misalnya novel *Salah Asuhan* (Abdul Muis) menjadi *Kelem ing Katresnan*, *Captain Blood* (Rafael Sabatini) menjadi *Kapten Blood*, dan puisi Shakespeare (dalam *Mekar Sari* dan *Jaya Baya*). Pers berbahasa daerah yang memperkenalkan hasil kesusastraan Indonesia, termasuk kesusastraan dunia, tidak bisa tidak menambah perbendaharaan kesusastraan daerah.

Sekitar tahun 70-an dan 80-an telah terbit sejumlah buku yang menghimpun dan menganalisis SJM, antara lain *Telaah Kesusastraan Jawa Modern* (Suripan Sadi Hutomo, 1975), "Sastra Jawa Modern" (Siti Sundari Tjitrosbonodkk., 1977), *Javanese Literature Since Independence, An Anthology* (J.J. Ras, 1979), *Jatuh Bangun Bersama Sastra Jawa* (Suparto Brata, 1981), *Struktur Cerita Pendek Jawa* (Sri Widati Pradopo dkk., 1985), yang menampilkan 2.500 cerita pendek Jawa sebelum perang sampai tahun 80-an, *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir* (J.J. Ras, 1985), *Struktur Puisi Jawa Modern* (Sutadi Wiryatmaja dkk., 1987), dengan populasi puisi 4.000 buah dalam pelbagai media cetak antara 1920 dan 1983, serta *Struktur Cerita Rekaan Jawa Modern Berlatar Perang* (Sri Widati Pradopo dkk., 1988).

Dalam perkembangan berikutnya, kehadiran media massa cetak tampak merosot. Jumlah karya kreatif sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan penerbitan karya sastra Indonesia kendatipun pada 1993 ini pihak swasta di Surabaya menerbitkan lima novel Jawa, antara lain *Kembang Alang-Alang* dan *Nalika Prau Gonjing* (*Kedaulatan Rakyat*, 23 Agustus 1993). Hal itulah tampaknya yang mendorong Temu Sastrawan Jawa baru-baru ini di Surabaya akan membentuk lembaga yang menangani hadiah sastra Jawa secara periodik (*Jawa Post*, 10 Agustus 1993).

Hal kelesuan kehidupan sastra (dan bahasa) Jawa ini juga terlontar dalam Kongres Bahasa Jawa (1991). Disebutkan perkembangan SJM masih memprihatinkan karena generasi mudanya kurang menaruh minat. Dalam hal ini, Soebagijo I.N. (1991:8) menyatakan kemasygulananya sebagai berikut.

... tidak jarang di berbagai media massa sendiri ataupun dalam berbagai pertemuan keluar keluh kesah yang menyebutkan bahwa bahasa dan sastra Jawa sedang sakit; rusak, mengalami erosi hebat, lesu darah, bahkan ada yang secara ekstrim menyebutkan bahasa Jawa sudah mati.

b. Sastra Sunda Modern

Terbitnya *Kesusastraan Sunda Dewasa Ini* (Rosidi, 1966) juga menggambarkan peranan majalah dan surat kabar terhadap pertumbuhan dan perkembangan sastra Sunda modern (SSM). Buku ini memperbincangkan SSM (puisi, cerpen, drama) setelah Perang Dunia II (1950–1960) dan mengisyaratkan bahwa SSM, yang baru mulai lagi menunjukkan kegiatannya sekitar tahun 1950, masih tetap bertahan hingga tahun 70-an.

Pada tahun 1950-an, peranan penerbit swasta tidak tampak, sedangkan Balai Pustaka hanya menerbitkan lima karangan, misalnya *Hujung Munggaran* (1960). Menurut catatan Rosidi, dalam kurun waktu itu berturut-turut terbit majalah *Lingga* (1950), *Warga* (sejak 1951), *Sunda* (1952–1954), *Tjandra* (1954–1956), *Panghegar* (1955–1956), *Kiwari* (1957–1958), *Mangle* (sejak 1957), *Kudjang* (sejak 1955), *Kalawarta LB & SS* (sejak 1957). Di samping itu, surat kabar yang menarik perhatian pada SSM adalah *Sipatahoenan* (lahir pada 1923, sempat mati pada masa pendudukan Jepang, tetapi terbit lagi pada 1948) dan *Siliwangi*.

Sejumlah karya SSM, seperti *Rasiah Nu Goreng Patit*, pernah terbit, antara lain, berkat usaha penerbit *Kiwari* (Bandung) pada 1962. Selanjutnya, terbit karangan Ajip Rosidi antologi *Kanjutkundang* (bersama Rusman Sutiasumarga, 1963), *Beber Layar* (1964), dan *Masjitoh* (drama, 1964). Namun, pada masa itu peranan majalah dan surat kabar tetap menonjol.

Pasang surut kehidupan majalah pada dasawarsa 1950-an, juga terjadi pada periode 1960–1965. Di satu pihak ada majalah yang mati, tetapi di pihak lain muncul yang baru, misalnya *Sari*, *Langensari*, *Sangkuriang*, *Baranangsiang*, dan *Mangle*.

Puisi atau *guguritan* Sunda sebanyak 123 buah yang bersumber dari sejumlah majalah dan buku pada masa sebelum Perang Dunia II hingga tahun 70-an telah dihimpun dalam "Puisi *Guguritan* Sunda" (Rusyana dan Ani Raksanagara, 1980:7). Dua tahun sebelum itu, sudah terbit informasi mengenai *Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua* (Mulyono dkk., 1978) dan *Cerita Pendek Sunda Sesudah Perang Dunia Kedua* (Sutiasumarga dkk. 1978), yang memuat 130 cerpen dari berbagai sumber. Dalam *Sawidak Carita Pondok* (Mustapa dkk., 1983) terkumpul pula 60 cerpen pilihan redaktur majalah *Mangle* (1957–1982). Dapat pula ditambahkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah dan akan mengupayakan penyusunan buku *Wawacan dalam Sastra Sunda* (1978), *Geografi dan Karya Sastrawan Sunda 1966–1980* (1981), *Biografi Sastrawan Sunda* (1979), dan *Bahasa dan Sastra Sunda dalam Media Cetak dan Elektronik* (1993).

Sastra Sunda Modern hingga sekarang masih tetap bertahan hidup karena bahasa Sunda tetap dipelihara, baik dalam media cetak (seperti dalam *Galura* asuhan *Pikiran Rakyat* dan majalah *Mangle*) maupun media elektronik (RRI dan non-RRI). Bahasa Sunda yang diajarkan kembali ke pendidikan formal dan tetap dipergunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam proses pendidikan nonformal seperti dalam pengajian, dakwah, dan kursus keterampilan merupakan faktor pendukung kehidupan sastra daerah itu (*Pikiran Rakyat*, 22 Januari 1986). Agaknya, itulah yang menyebabkan para pengamat sastra Sunda, misalnya Ajip Rosidi dan Enas Mabarti, dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa SSM masih tetap menunjukkan kehadirannya dalam khasanah kesastraan kita.

c. Sastra Bali Modern

Peranan majalah dan surat kabar, sebagaimana dalam SJM dan SSM, juga tampak dalam usaha pembinaan dan pengembangan sastra Bali modern (SBM), termasuk sastra tradisional.

Tercatat bahwa majalah daerah yang pernah terbit antara tahun 1923 dan 1950 hanya bermanfaat dalam penelusuran beberapa tulisan mengenai hasil sastra Bali tradisional. Majalah yang dimaksud pertama-tama adalah *Pemberita Sara Poestaka* (1923) dan *Santi Adnyana* (1923–1924), kemudian berganti nama menjadi *Bali Adnyana* (1924–1930). Selanjutnya, tercatat pula majalah *Suryakantana* (1925–1930), *Bhawanagara* (1931–1935), dan *Jatayu* (1936–1941).

SBM, selain termuat dalam majalah, antara lain *Jatayu* dan *Medan Bahasa bagian Bahasa Bali*, surat kabar *Bali Post*, *Suluh Marhaen*, dan *Angkatan Bersenjata* edisi Nusa Tenggara, juga merupakan hasil sayembara yang dipublikasikan (Made dkk., 1978:2,12).

Kenyataan menunjukkan bahwa sampai sekarang, perlakuan masyarakat Bali terhadap sastra tradisional lebih istimewa dibandingkan dengan perlakuannya terhadap SBM. Hal itu dapat dipahami mengingat kekayaan sastra tradisional Bali, setidaknya berjumlah 4.000 lontar, telah memiliki akar yang kukuh dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan SBM terlihat sejak Balai Pustaka menerbitkan novel (roman) *Nemu Karma* (1931), yang kemudian disusul dengan terbitnya secara bersambung *Mlancaran Ka Sasak* (1939) dalam *Jatayu* dan pada 1978 dicetak ulang oleh Yayasan Sabha Sastra Bali. Pada 1959 dan 1966 dua buah puisi (terjemahan) muncul pula dalam *Medan Bahasa bagian Bahasa Bali* (Yogyakarta) dan harian *Angkatan Bersenjata* (edisi Nusra). Setelah itu, perkembangan SBM terasa terhenti.

Sayembara mengarang yang diadakan oleh Lembaga Bahasa Nasional Cabang Singaraja (Balai Penelitian Bahasa) pada 1968, diikuti sayembara kedua pada 1969, merupakan patokan kelahiran (kembali) SBM. Pada masa itu SBM meningkat pesat, tetapi menjelang 1971 menyusut kembali karena ditiadakannya "Ruang Sastra Bali" dalam harian *Angkatan Bersenjata* dan *Suluh Marhaen* yang sejak 1969 memuat sastra Bali. Yayasan Sabha Sastra Bali yang dibentuk khusus menangani masalah kesastraan itu tidak mampu berbuat banyak karena kesulitan biaya. Kehidupan SBM akhirnya melemah walaupun masih diadakan sayembara mengarang pada 1972 dan 1975, antara lain oleh Listibya Propinsi Bali.

Sejak kelahiran SBM pada 1931 hingga 1977 tercatat puisi sebanyak 276; cerpen, novel, dan drama masing-masing 27, 2, 16 buah, sedangkan buku yang terbit sebanyak 9 judul. Menurut catatan Ginarsa dkk. (1985: 6–7), 6 novel dan 28 cerpen yang sudah dan belum dipublikasikan hingga tahun 1980.

Perkembangan SBM dewasa ini tampak kurang menggembirakan, bahkan dapat dikatakan tidak mengalami kemajuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Kongres Bahasa Bali (27–28 Februari 1991). Disebutkan pula peranan dan fungsi bahasa Bali dalam beberapa cabang seni budaya terasa makin kurang mantap seperti dalam seni drama *gong, arja*, dan drama modern (Bagus, 1992:108). Hal itu juga disebabkan oleh sikap masyarakat (generasi muda) yang kurang positif, kurangnya perhatian pemerintah daerah dan pihak penerbit terhadap SBM (Made dkk., 1978:48).

d. Sastra Madura

Menurut Hariyadi dkk. (1981), yang pernah merintis penelitian perkembangan sastra Madura modern (SMM) dalam kurun waktu 32 tahun (1945–1977), sastra daerah Madura itu sudah pernah dipublikasikan dalam 132 media cetak: 75 majalah, 7 buletin, 3 selebaran, dan 47 buku pelajaran. Hal itu berarti bahwa SMM hidup hanya pada majalah dan buku pelajaran. Informasi positif mengenai angka tersebut masih merupakan perkiraan karena, antara lain, koran berbahasa Madura–yang diasumsikan memuat SMM–ditemukan, yaitu *Muncar*, *Tjolo*, *Nanggala*, *Sumenep Expres*, dan *Pangudi*. Majalah (mingguan) yang pernah menyediakan "Ruang Bahasa Madura" adalah *Gelora Pelita*, *Pembina*, *Medan Bahasa*, *Petodu*, *Karya Pembangunan*, *Pancaran Pelita*, *Mingguan Harapan*, *Paddjar*, *Kuncup*, *Somekhar*, *Tjolo*, *Muncar*, *Nanggala*, *Aji Brata*, *Sumenep Expres*, dan *Pangudi* (Hariyadi dkk., 1981:170).

Dari 132 media cetak yang disebutkan di atas kekayaan SMM terdiri atas 11 cerkan dalam bentuk cerpen (novel tidak ditemukan) dan 61 buah puisi. Kegersangan perkembangan sastra daerah itu disebabkan oleh tidak tersedianya media (majalah, surat kabar) khususnya yang berbahasa Madura. Kaderisasi (sastrawan muda) pun tidak ada. Sastrawan daerah itu rata-rata berusia lanjut, yang mengarang sebelum dan pada zaman SMM. Tegasnya, gejala yang ada sekarang adalah bahwa sastra Madura tampak lesu, bahkan menuju kepunahan sebagaimana termaktub dalam kutipan di bawah ini.

Dapat diramalkan dalam tempo yang dekat dan bila tidak ada usaha pembinaan, Bahasa Madura akan kehilangan sastra Maduranya. Kegairahan dalam pembinaan lebih nampak pada usaha dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta kerja sama penelitian dengan negeri Belanda. Usaha penelitian itu hanya merupakan usaha yang bersifat ilmiah yang rasanya tidak langsung bermanfaat bagi konsumen bahasa Madura. Namun, usaha penelitian tersebut patut mendapat penghargaan yang semestinya (Hariyadi dkk., 1981:44).

3. Dampak Perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia terhadap Sastra Daerah

Pada galibnya pembinaan dan pengembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa. Adanya hubungan timbal-balik antara bahasa/sastra daerah dan bahasa/sastra Indonesia adalah sesuatu yang tidak terpungkiri.

Esten (1984: 77), Rosidi (1988:54), dan Sardjono (1992) pernah mencatat bahwa sesudah tahun 50-an berbagai nilai dan unsur sastra tradisional (daerah) pernah dikembangkan secara kreatif. Beberapa nama disebut, Sitor Situmorang, Ajip Rosidi, Subagio Sastrowardjo, W.S. Rendra, Goenawan Mohammad, Sapardi Djoko Damono, Ramadhan K.H., Taufik Ismail, Putu Wijaya, Hamid Jabbar, Y.B. Mangunwijaya, Husni Djamaluddin, Linus Suryadi Ag, Danarto, Ibrahim Sattah, dan yang paling menonjol ialah Sutardji Calzoum Bachri.

Kini timbul pertanyaan adakah dampak perkembangan bahasa dan sastra Indonesia (modern) terhadap perkembangan sastra daerah?

Menurut Kayam (*Suara Karya*, 5 Februari 1987), penulis sastra daerah saat ini lebih mampu berbahasa Indonesia daripada berbahasa daerah. Terdesaknya bahasa daerah dan kurang efektifnya menampilkan masalah yang muncul dewasa ini menyebabkan sastra daerah condong ke sastra Indonesia. Seiring dengan itu, Moeliono (*Kompas*, 1 April 1991) pernah berkata bahwa akan tiba saatnya bahasa daerah harus menentukan sikap, yaitu melebur ke dalam bahasa Indonesia atau membiarkan diri hilang begitu saja. Penyebabnya adalah keluwesan bahasa Indonesia dalam menerima berbagai pembaruan, seperti pemekaran kosakata, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Dari sisi lain, Rosidi (1988:48) melihatnya sebagai akibat sistem pendidikan sekarang ini menitikberatkan penguasaan bahasa Indonesia. Erosi kehidupan bahasa daerah ini dialami oleh semua bahasa daerah tanpa kecuali. Jika kekhawatiran itu benar, patut pula kita simak lontaran Slametmuljana dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar beberapa waktu silam.

... merasuknya bahasa Indonesia melalui pengumuman resmi, siaran radio, pelajaran sekolah, surat kabar, pidato-pidato dan lain-lain ke dalam kehidupan suku, mengurangi otonomi bahasa daerah dalam hati para warga-suku. Perembesan ini acapkali dirasakan sebagai ancaman yang lambat-laun menindas nilai-nilai kesukuan (Slametmuljana dalam Rosidi, 1966:39).

Dalam kaitan itu, Tambunan (*Kompas*, 14 November 1986) mengemukakan bahwa sastra lisan Toba, sudah di ambang kepunahan karena masyarakat pengguna bahasa Toba secara baik, kini berusia lima puluh tahun ke atas. Generasi mudanya, terutama yang tinggal di kota, merasa lebih bangga berbahasa Indonesia daripada berbahasa nenek moyangnya.

Mengenai gejala kemunduran pemakaian bahasa daerah ini, Moerdiono (1992:122) dalam Kongres Bahasa Indonesia V (1988) mengingatkan "... rasanya ada kewajiban konstitusional bagi kita semua untuk mempelajari bahasa daerah di tempat kita bertugas agar kita bisa berkomunikasi dengan efektif dan intim dengan rakyat dalam bahasa ibunya."

Masih dalam kaitan di atas, patut dicatat bahwa penutur bahasa Indonesia semakin meluas. Pada tahun 2041 penduduk Indonesia diperkirakan sudah mampu bertutur dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 di bawah ini.

Suatu hal yang tidak terpungkiri adalah bahwa masyarakat pendukung bahasa dan sastra daerah adalah juga masyarakat pendukung bahasa dan sastra Indonesia. Kedua-duanya hidup dalam satu ekosistem budaya, yakni budaya Indonesia. Derasnya dampak perkembangan bahasa dan sastra Indonesia terhadap perkembangan bahasa dan sastra daerah juga sesuatu yang tidak terelakkan. Penelitian ke arah itu memang belum pernah dilakukan orang, tetapi perlu diwaspadai. Jika kecenderungan itu menjadi kenyataan, berarti pada masa yang akan datang peranan bahasa dan sastra daerah sebagai pendukung bahasa dan sastra Indonesia akan terancam pula. Padahal, peranan kesusastraan Indonesia, sebagaimana bahasa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam memperkuat dan mengembangkan masyarakat kita sebagai suatu bangsa amat besar.

TABEL 2
TAHUN KETIKA TIAP-TIAP PROPINSI AKAN MEMPUNYAI
100% PENUTUR BAHASA INDONESIA

No.	Propinsi	Tahun Ketika Penduduk 100% Penutur BI
1.	DKI Jakarta	1981
2.	Irian Jaya (daerah pesisir)	1981
3.	Riau	1991
4.	Jambi	1991
5.	Sumatera Selatan	1991
6.	Sulawesi Utara	1991
7.	Maluku	1991
8.	Sumatera Utara	2001
9.	Sumatera Barat	2001
10.	Bengkulu	2001
11.	Kalimantan Timur	2001
12.	Sulawesi Tengah	2001
13.	Daerah Istimewa Aceh	2011
14.	Lampung	2011
15.	Kalimantan Barat	2011
16.	Kalimantan Tengah	2011
17.	Kalimantan Selatan	2011
18.	Nusa Tenggara Timur	2011
19.	Sulawesi Tenggara	2021
20.	Jawa Barat	2031
21.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2031
22.	Sulawesi Selatan	2031
23.	Jawa Tengah	2041
24.	Jawa Timur	2041
25.	Bali	2041
26.	Nusa Tenggara Barat	2041
27.	Timor Timur	belum ada data

Sumber: Biro Pusat Statistik, Seri E (dalam Abas, 1992:265-266)

4. Faktor Penghambat dan Penunjang Perkembangan Sastra Daerah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, terlihat beberapa faktor penghambat perkembangan dan pengembangan kehidupan sastra daerah di Indonesia.

- a. Generasi muda kurang menaruh minat terhadap sastra daerah karena dianggap sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman.
- b. Generasi muda cenderung kurang menguasai bahasa daerahnya secara baik dan benar.

- c. Generasi muda, termasuk orang tua yang sudah lama tinggal di kota/perantauan, cenderung kurang menguasai sastra daerah yang ditampilkan seperti dalam kegiatan/upacara adat.
- d. Generasi muda cenderung merasa lebih bangga atau bergengsi menguasai bahasa Indonesia daripada menguasai bahasa daerah.
- e. Media massa (majalah dan surat kabar) yang berbahasa daerah tidak ditemukan atau tidak berkembang dengan baik sebagaimana media massa yang berbahasa Indonesia.
- f. Penerbit (redaktur media massa) kurang tertarik menerbitkan karya sastra daerah atau yang bersifat kedaerahan.
- g. Penelitian dan penyebarluasan sastra daerah belum menjangkau semua daerah, terutama daerah yang terpencil.

Dalam hubungan dengan pengentasan sastra daerah di Indonesia, terlebih-lebih yang sama sekali belum terjamah, ada beberapa faktor penunjang yang barangkali dapat dikaji kemungkinannya dalam kongres ini.

- a. Garis-Garis Besar Haluan Negara, khusus untuk kebudayaan pada Pelita VI, butir (f), sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang menyatakan ... perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya dapat dijadikan sebagai jaminan pengembangan sastra daerah.
- b. Media massa (cetak dan elektronik) masih ada yang menerbitkan, menyiarkan, atau menayangkan karya atau kegiatan sastra daerah.
- c. Bahasa daerah masih dipergunakan sebagai bahasa pengantar antarwarga/masyarakat pemiliknya.
- d. Bahasa daerah masih berperan dalam berbagai kegiatan adat-istiadat dan agama, baik di kota maupun di daerah/desa.
- e. Bahasa daerah masih diberi peluang untuk diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah dasar di beberapa daerah yang memerlukannya.
- f. Beberapa daerah masih memperlihatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah mendirikan pusat pengkajian bahasa, sastra, dan budaya daerahnya.
- g. Pertemuan atau sarasehan bahasa dan sastra daerah hingga kini masih diadakan, baik oleh Pemerintah maupun lembaga swasta, di beberapa tempat/daerah.
- h. Beberapa daerah masih mengupayakan pemberian hadiah atau piagam penghargaan kepada penulis esai atau karya kreatif/sastra daerah yang bersangkutan.
- i. Instansi pemerintah, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, masih tetap melakukan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.
- j. Beberapa perguruan tinggi masih membuka jurusan sastra daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang diuraikan di atas, tulisan ini mencoba menawarkan usul pengembangan sastra daerah sebagai berikut.

- a. Kegiatan penginventarisasian sastra daerah (lisan, tulisan) hendaknya dilanjutkan hingga menjangkau semua daerah di Indonesia.

- b. Pemerintah daerah hendaknya turut mendukung penerbitan hasil penelitian dan karya kreatif sastra daerah yang disusun/dikarang oleh penulis, baik yang bermukim di daerah asal maupun yang di luar daerahnya.
- c. Pemerintah daerah atau lembaga kemasyarakatan (swasta) hendaknya mengupayakan pusat pengkajian bahasa, sastra, dan budaya daerah di daerah masing-masing.
- d. Media massa (cetak dan elektronik) di semua daerah hendaknya menyediakan rubrik (kolom berita) atau program khusus sastra/budaya daerah yang bersangkutan.
- e. Perlu digiatkan penerjemahan sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia sehingga daerah lain dapat memahaminya.
- f. Para tokoh adat atau pemuka masyarakat hendaknya mengupayakan demikian rupa penyajian sastra daerah dalam kegiatan/upacara adat sehingga generasi muda merasa tertarik pada kekayaan sastra/budaya daerahnya itu.
- g. Pemerintah daerah, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan hendaknya mengupayakan pemberian hadiah atau piagam penghargaan secara berkala bagi penulis esai, sastrawan, pengamat, atau pengayom (*maecenas*) sastra daerah di daerah masing-masing.
- h. Pemerintah, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hendaknya mengupayakan pemberian penghargaan yang bergengsi, semacam "Piala Citra", misalnya setiap lima tahun bagi para penulis atau kritikus terbaik sastra daerah.
- i. Hendaknya dilanjutkan penyusunan kamus sastra daerah-Indonesia dan disusun ensiklopedi sastra daerah sebagai acuan penyusunan sejarah pertumbuhan dan perkembangan sastra daerah di Indonesia.
- j. Pembinaan dan pengembangan sastra daerah dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia hendaknya dijabarkan secara operasional dan sungguh-sungguh dalam kurikulum sekolah.

Untuk mengakhiri tulisan ini, pertanyaan pertama yang harus dipertimbangkan kalau kita mempertanyakan masa depan sastra adalah apakah sastra memang mempunyai masa depan? Masa depan sastra daerah, baik atau buruk, bergantung pada masyarakat pemilik sastra itu. Sastra daerah tidak akan punah apabila bahasa daerah yang menjadi pendukungnya masih dipelihara dan digunakan oleh masyarakatnya.

CATATAN

1. Ketika dikelola oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan proyek ini bernama Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1992. "Angka Statistik sebagai Salah Satu Indikator Masalah Kebahasaan dengan Menampilkan Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Kasus Khusus". Dalam A. Murad dan S.R.H. Sitanggang (Penyunting). *Kongres Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bagus, I Gusti Ngurah. (Penyunting). 1992. "Kongres Bahasa Bali Ketiga dalam Perspektif Kebinekaan Budaya". *Majalah Widya Pustaka*. Edisi Khusus, Tahun IX, Juli.
- "Bahasa Batak Toba Punah". *Kompas*, 14 November 1986
- Esten, Mursal. 1984. "Kritik Sastra Indonesia: Peranan dan Perkembangannya". *Horison*, No. 2 Februari.
- Ginarsa, Ketut dkk. 1982. *Struktur Novel dan Cerpen Sastra Bali Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hariyadi dkk. 1981. *Sastra Madura Modern; Cerkai dan Puisi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hasjim dkk. 1993. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1977-1993*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1984. "Peranan dan Kedudukan Sastra Bahasa Daerah dalam Pengembangan Sastra Indonesia". Dalam Lukman Ali dan Adun Sjubarsa. (Penyunting). *Seminar Pengembangan Sastra Indonesia 1975*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Ikram, Achadiati. 1976. "Sastra Lama sebagai Penunjang Pengembangan Sastra Indonesia". *Bahasa dan Sastra*, 6 (1). Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- I.N., Soebagijo. 1976. "Peranan Media Massa dalam Pengembangan Sastra Daerah". Dalam Lukman Ali dan Sumardi (Penyunting), *Seminar Pengembangan Sastra Daerah*, Jakarta 13-17 Oktober 1975. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1991. "Media Massa Berbahasa Jawa sebagai Sarana Penunjang Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa". *Kongres Bahasa Jawa 1991*. Semarang: Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
- Mabarti, Enas. 1986. "Sastra Sunda Tidak akan Mati". *Pikiran Rakyat*, 22 Januari.

- Made, Sukada dkk. 1977/78. "Perkembangan Kesusastraan Bali Modern". Denpasar: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali.
- Moerdiono. 1992. "Bahasa Indonesia dalam Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan". Dalam S.R.H. Sitanggang dkk. (Penyunting). *Kongres Bahasa Indonesia V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyono, Iyo dkk. 1977. *Puisi Sunda Selepas Perang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- "Paguyuban Sastrawan Jawa Terima Sumbangan Rp 2 Juta Tiap Tahun: Penyumbang-nya Sastrawan Sunda". *Jawa Post*, 10 Agustus 1993.
- "Pengarang Sastra Daerah Lebih Mampu Menulis Sastra Indonesia". *Suara Karya*, 5 Februari 1987.
- Prawoto, Poer Adhie. Editor. 1993. *Wawasan Sastra Jawa Modern*. Bandung: Angkasa.
- Pradopo, Sri Widati dkk. 1985. *Struktur Cerita Pendek Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Ras, J.J. 1977. *Proza en Poezie van de Periode na Wereldoorlog II*. Leiden: Vakgroep Indonesische Talen en Culturen.
- Robson, S.O. 1978. "Pengkajian Sastra-Sastra Tradisional Indonesia". *Bahasa dan Sastra*, 6 (IV).
- Rosidi, Ajip. 1966. *Kesusastraan Sunda Dewasa Ini*. Bandung: Tjupumanik.
- Santoso, H.R. 1993. "Sastra Jawa Bangkit dari Timur". *Kedaulatan Rakyat*, 22 Agustus.
- Sardjono, Maria A. 1992. *Paham Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- "Suatu Saat Bahasa Daerah Dipaksa Menentukan Sikap". *Kompas*, 1 April 1991.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Yatmana, A. Sudi. 1977. "Penggunaan Bahasa Daerah Jawa dalam Pers" *Konferensi Bahasa Daerah 1977*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Kehidupan dan Masa Depan Sastra Daerah di Indonesia
Pemakalah : S.R.H. Sitanggang
Pemandu : Mursal Esten
Pencatat : Sugiyono
Kurniatri Resminingsih

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Johanes Kalamper, Ketua HPBI Cabang Palangkaraya

Penelitian sastra daerah di Kalimantan Tengah sangat kurang, demikian juga sastra daerah di Sangir, Dayak Ngaju (hanya digunakan dalam upacara perkawinan), sastra daerah Banjar dan lain-lain belum tergarap. Untuk itu, saya mengusulkan agar dibentuk balai bahasa di propinsi lain yang belum memilikinya.

Jawaban:

Pusat Bahasa tetap mengusahakan penelitian bahasa dan sastra daerah itu, tetapi itu terpulang pada ada atau tidaknya orang daerah yang meneliti. Karena bahasa dan sastra daerah banyak, tentu ada prioritasnya. Pemakalah setuju jika balai bahasa di semua propinsi di Indonesia didirikan sehingga menjadi wakil pemerintah dalam menangani bahasa dan sastra daerah di Indonesia.

2. **Pertanyaan:** Leonardus Lumbanbatu, Kopertis Wilayah II Palembang

Bagaimana sastra daerah tahun 2000 nanti? Sastra daerah harus tetap dipertahankan, tetapi bagaimana caranya, apakah akan dikembangkan dengan mempertahankan bahasa daerah atau dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia?

Jawaban:

Untuk memperkenalkan bahasa daerah yang satu ke bahasa lain, perlu digalakkan penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh kalangan lain. Menurut saya, kehidupan sastra tahun 2000 itu semakin suram. Sastra daerah itu merupakan nilai budaya yang kita manfaatkan untuk kehidupan yang lebih luas dan saya anggap sastra daerah masih ada manfaatnya, paling tidak untuk diarsipkan.

3. **Pertanyaan:** I Ketut Ardhana, Balai Penelitian Bahasa Denpasar

Apa sebenarnya sastra daerah modern, apa sastra Bali modern? Judul makalah seharusnya diganti dengan "Ambang Kematian Sastra Daerah di Indonesia"?

Jawaban:

Menurut I Made Sukada, sastra Bali mulai berkembang tahun 1968 sesudah dirangsang melalui sayembara mengarang. Sastra klasik di Bali lebih berkembang dibanding dengan sastra modern. Menurut catatan, masih ada 4.000 lontar yang masih digeluti oleh orang Bali. Hal itu barangkali erat hubungannya dengan budaya atau tata kramanya yang dipetik dari sastra Bali.

Saya ingin melihat dari segi positifnya masa depan kehidupan sastra Indonesia. Masa depan itu sebetulnya suram. Kesuraman itu karena bahasa daerah dan bahasa Indonesia ada persamaannya. Persamaan itu, antara lain adanya kepentingan bersama tentang sastra Indonesia yang dituangkan dalam bahasa daerah. Orang cenderung berbicara bahasa Indonesia untuk menuangkan isi hatinya sehingga sastra daerah ditinggalkannya. Jadi, ada ekosistem yang sama antara kehidupan sastra daerah dan sastra Indonesia. Kalau tidak ditangani secara serius, sastra daerah akan jatuh. Masalahnya sekarang bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu, apakah akan kita biarkan begitu saja, semua terpulang pada kawan-kawan yang ada di daerah.

4. **Pertanyaan:** Sugit Zulianto, FPS IKIP Malang

Benarkah media massa daerah tidak diperlukan (pernyataan No.5 di atas) Di Jawa Timur ada pekan budaya yang menjadi pementasan sastra lisan.

Jawaban:

Di dalam bahasa Jawa masih ada media massa yang hidup. Kalau dibandingkan dengan majalah sebelumnya, sekarang ini paling hanya empat atau lima buah majalah daerah yang hidup di Jawa dibandingkan dengan tahun 20-an, demikian juga majalah berbahasa Sunda. Yang saya maksudkan dengan pernyataan No. 5, halaman 19 itu pada umumnya, mungkin yang ada hanya di beberapa daerah.

5. **Pertanyaan:** R.B. Suprihanto, Ketua HPBI Cabang Timor Timur

- a. Dukungan pemerintah (berupa uang, proyek) supaya dipergalak.
- b. Sudah ada dua kamus Timor Timur yang terbit, tetapi Timor Timur belum mendapatkannya, lalu akan diapakan naskah itu?

Saran/Usul:

1. Widjono H.S., FPBS IKIP Jakarta

Saya kira tidak seorang pun membantah apabila pelestarian sastra daerah itu dilakukan dengan kreativitas. Untuk itu, didorong agar kreatifitas meningkat

sehingga produktivitas meningkat. Para sastrawan barangkali tidak sanggup mengembangkannya.

Yang pertama, saya berharap ada kerja sama antara sastrawan dengan lembaga, seperti Dikdasmen agar memasukkan sastra daerah dalam muatan lokal/kurikulum. Yang kedua, ada kerja sama dengan Perusahaan Film Nasional supaya sastra daerah itu difilmkan.

2. H. Akhlan Husen, FPBS IKIP Bandung

Kondisi sastra daerah di seluruh Indonesia tidak sama, tetapi sastra daerah yang diajarkan di daerah masih hidup. Saya mendukung bahwa muatan lokal di daerah hendaknya diisi sebaik-baiknya oleh Pemda Tingkat II untuk memasukkan bahasa daerah ke dalam kurikulum.

Saya mengusulkan adanya kongres bahasa daerah secara nasional. Sastra daerah modern di Sunda berkembang karena kami mempunyai hadiah sastra, baik yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat lembaga. Kalau hal itu dikembangkan di seluruh daerah itu perkembangannya akan sama.

Saya mendukung Pusat Bahasa dengan proyek penerjemahan sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia.

3. Sjahrial S.A.R. Ibrahim, FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Berbicara mengenai sastra daerah, kami sependapat bahwa ini perlu untuk menghadapi masa depan dan untuk masa sekarang. Dua judul nilai-nilai budaya sastra Banjar dan struktur sastra Banjar yang sudah diteliti sampai sekarang tidak ada beritanya dari Pusat Bahasa. Padahal, daerah sudah menunggu. Seandainya buku itu disetujui dan dicetak dan akan dikembangkan untuk dijadikan buku bacaan di sekolah yang diambil dari cerita-cerita rakyat itu.

4. Mangasa Silitonga, FPBS IKIP Medan

Bagaimana kita mengharapkan agar generasi muda dapat menghargai sastra, sedangkan ia tidak menguasai daerah itu. Di daerah-daerah yang bahasa daerahnya masih aktif dipakai, pengajaran bahasa tidak diajarkan. Ini suatu kerugian. Kesempatan mengajar bahasa daerah itu ada, tetapi mengapa tidak dimanfaatkan? Dari mana tenaga pengajarnya? IKIP tidak membuka jurusan daerah lagi. Jadi, perlu adanya kerja sama antara perguruan tinggi dan departemen yang bersangkutan di daerah dan di pusat.

5. T.A. Ridwan, Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara

Sebenarnya jurusan sastra daerah di USU itu sudah dibuka, tetapi sesudah jurusan itu dibuka dan disetujui oleh departemen, lulusannya tidak dipakai.

6. Samsuri, IKIP Malang

Di Jawa Timur bahwa bahasa Jawa pada mulanya ada empat tataran (*ngoko*, *ngoko alus*, *krama*, dan *krama alus*). Sekarang ada kecenderungan tinggal satu tataran saja mungkin karena pengaruh bahasa Indonesia dan sejarah. Tahun 1919 ada gerakan yang disebut *Jawa Dwipa* yang mengingatkan hanya ada satu tataran saja. Ada oknum Syarikat Islam yang mengatakan bahwa tataran itu tidak manusiawi dan tahun 1936 diikuti oleh majalah *Penyebar Semangat* yang hanya memakai satu tataran saja. Apa pun bentuknya, sastra daerah di Jawa Timur itu masih ada, hanya tidak sehebat dahulu.

MASA DEPAN BAHASA DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Mansoer Pateda
Universitas Sam Ratulangi

1. Pendahuluan

Kalau kita membahas bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disingkat BI) dan bahasa daerah (untuk selanjutnya disingkat BD), acuan kita yang utama adalah UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia", dan di dalam penjelasannya disebutkan "di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, dan Madura) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup".

Sungguh arif pendiri negara ini yang telah merumuskan berdasarkan kenyataan, yakni di samping BI sebagai bahasa nasional yang telah menyatukan kita semua, terdapat bahasa daerah yang memberikan keintiman dan kehangatan manusiawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumusan di atas mengisyaratkan kewajiban konstitusional bagi kita untuk secara bersama-sama membina dan mengembangkan BI dan BD.

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia tidak terjadi konflik karena soal bahasa. Bangsa Indonesia memiliki toleransi yang tinggi dalam memilih bahasa yang akan digunakannya ketika berkomunikasi. Namun, setiap orang mengakui bahwa pemakaian BD cenderung menurun. Itu sebabnya, rasanya arif untuk membahas masa depan BD itu secara terbuka, objektif, dan penuh tanggung jawab.

2. Hubungan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

Secara yuridis hubungan antara BI dan BD tersirat dalam Penjelasan UUD 1945, Pasal 36 yang kalimatnya berbunyi, "... bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup" yang kemudian dijabarkan di dalam GBHN (1993), khusus untuk kebudayaan pada Pelita VI, butir (f) yang berbunyi, "pembinaan BD perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian,

dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media".

Amanat pada Penjelasan UUD 1945 itu pun dijabarkan di dalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah, misalnya di dalam UU No. 2 Tahun 1989, Bab XI, Pasal 41 yang berbunyi, "bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia" dan untuk BD tertuang di dalam Pasal 42, Ayat (1) yang berbunyi, "bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu". Di dalam PP No. 30 Tahun 1990, Bab III, Pasal 7, Ayat (1) disebutkan, "pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar", sedangkan Ayat (2) berbunyi, "bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan".

Hubungan antara BI dan BD dalam segi budaya tersirat pula di dalam UUD 1945, Bab XIII, Pasal 32 yang berbunyi, "pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Penjelasan pasal ini berbunyi, "kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Pasal 36 ini hendaknya dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 32 karena di dalam Penjelasan Pasal 36 terdapat rumusan yang berbunyi, "... bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup".

Dilihat dari segi kebahasaan telah diakui bahwa bahasa-bahasa di Indonesia merupakan satu rumpun, yakni rumpun bahasa Austronesia. Persoalannya sekarang adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana menjaga dan mempertahankan BI tetap sebagai pemersatu bangsa yang bernapaskan bhineka tunggal ika.
- 2) Bagaimana memanfaatkan unsur BD sehingga tidak mengganggu, menghambat, bahkan merusak BI, tetapi hendaklah betul-betul memperkaya dan memperkuat BI.
- 3) Bagaimana mengupayakan agar BI dan BD tetap menjalankan fungsinya, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam penggunaannya secara praktis oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Bagaimana caranya, baik BI maupun BD, dapat memudahkan peserta didik untuk menyerap pokok bahasan yang diberikan, dan pada tingkat tinggi tidak menyebabkan penghalang bagi mahasiswa untuk menyerap konsep-konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui buku teks yang diwajibkan.

3. Pemakaian Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

a. Beberapa Kenyataan

Beberapa kenyataan yang dapat dicatat berkaitan dengan pemakaian BI dan BD adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan landasan yuridis, BI secara geografis telah mencapai seluruh wilayah RI, baik melalui media massa, sistem pendidikan, maupun melalui pemerintahan.
- 2) Meskipun BD digunakan dalam situasi tidak resmi, dalam keadaan tertentu, misalnya adanya kehadiran orang, penutur BD tertentu akan beralih ke BI.
- 3) Pada waktu seseorang mengadakan perjalanan, ia memilih menggunakan BI ketika berkomunikasi.
- 4) Bahasa daerah tetap digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan terutama di kelas permulaan SD.
- 5) Bahasa daerah digunakan di dalam beberapa mata acara di RRI.
- 6) Bahasa daerah diizinkan dikembangkan melalui surat kabar atau majalah, sekurang-kurangnya tersedia kolom atau rubrik yang khusus untuk BD atau karangan dalam BD.
- 7) Bahasa daerah masih digunakan sebagai bahasa pengantar untuk khotbah di mesjid dan penyuluhan di lapangan.
- 8) Kegiatan masyarakat, misalnya dalam peminangan tetap menggunakan BD sebagai bahasa pengantar.
- 9) Kegiatan kesenian malah lebih mantap jika menggunakan BD sebagai pengantar.
- 10) Petinggi-petinggi di daerah dianggap lebih dekat dengan rakyat jika sekali-kali menggunakan BD sebagai wahana penyuluhan.

Kenyataan-kenyataan itu memberikan harapan bagi mereka yang merisaukan punahnya BD tertentu. Kita dapat mengatakan bahwa BD susah untuk punah selama penuturnya masih menggunakannya dan menghormatinya sebagai kekayaan batin mereka.

b. Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua penduduk di tanah air kita menggunakan BI sebagai alat komunikasi. Tabel 1 pada halaman berikut ini memperlihatkankannya.

Meskipun tabel berikut (penulis menyesal belum mendapatkan data terakhir) memperlihatkan bahwa pada tahun 1980 hanya 12% dari seluruh penduduk Indonesia menggunakan BI sebagai bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari, terdapat kecenderungan bahwa pemakaian BI semakin meluas, sebaliknya hampir di seluruh Indonesia ada keluhan mengenai gejala kemunduran pemakaian BD (Moerdiono; 1988:6, Nababan; 1982:2).

TABEL 1
PENDUDUK MENURUT BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI,
LAKI-LAKI, PEREMPUAN DI KOTA DAN DESA, TAHUN 1980

Bahasa	Penduduk	
	Bahasa yang dipakai sehari-hari di rumah (dalam ribuan jiwa)	Dalam persentase terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia
1. Jawa	59.357	40
2. Sunda	22.110	15
3. Indonesia	17.505	12
4. Madura	6.914	5
5. Minangkabau	3.546	2
6. Bugis	3.322	2
7. Batak	3.107	2
8. Bali	2.481	2
9. Banjar	1.662	1
10. Lain-lain	25.653	18
11. Tak jelas	1.118	1
Jumlah	146.775	100

Sumber: Biro Pusat Statistik (dalam Salim; 1988:5)

Dalam kaitannya dengan makin meluasnya pemakaian BI, Biro Pusat Statistik (lihat Abas; 1985:311-312) telah memproyeksikan, kapan tiap provinsi akan mempunyai penduduk 100% penutur BI. Berdasarkan proyeksi itu, kota Metropolitan Jakarta Raya sejak tahun 1981 sudah mempunyai penduduk yang 100% penutur BI, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 1991 telah mempunyai penduduk yang 100% penutur BI. Berdasarkan observasi penulis secara sepintas, proyeksi ini telah merupakan kenyataan di Sulawesi Utara, meskipun penduduk masih dapat berbicara dalam BD masing-masing.

Berdasarkan proyeksi, paling lambat pada tahun 2041 seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya diperkirakan berkisar 350 juta orang akan menjadi penutur BI atau sekurang-kurangnya orang yang buta BI sudah tidak ada. Lalu, bagaimanakah nasib BD?

Untuk jelasnya proyeksi dimaksud terlihat pada tabel berikut.

TABEL 2
TAHUN KETIKA TIAP-TIAP PROVINSI AKAN MEMPUNYAI 100%
PENUTUR BAHASA INDONESIA

Provinsi	Tahun ketika penduduk 100% penutur BI
1. Metropolitan Jakarta Raya	1981
2. Irian Jaya (Daerah pesisir)	1981
3. Riau	1991
4. Jambi	1991
5. Sumatra Selatan	1991
6. Sulawesi Utara	1991
7. Maluku	1991
8. Sumatra Utara	2001
9. Sumatra Barat	2001
10. Bengkulu	2001
11. Kalimantan Timur	2001
12. Sulawesi Tengah	2001
13. Daerah Istimewa Aceh	2011
14. Lampung	2011
15. Kalimantan Barat	2011
16. Kalimantan Tengah	2011
17. Kalimantan Selatan	2011
18. Nusa Tenggara Timur	2011
19. Sulawesi Tenggara	2021
20. Jawa Barat	2031
21. Daerah Istimewa Yogyakarta	2031
22. Sulawesi Selatan	2031
23. Jawa Tengah	2041
24. Jawa timur	2041
25. Bali	2041
26. Nusa Tenggara Barat	2041
27. Timor Timur	belum ada data

Sumber: Biro Pusat Statistik (dalam Abas; 1985:312)

4. Masa Depan Bahasa Daerah

Moerdiono (1988) seperti telah dikemukakan di atas mengatakan, "hampir di seluruh daerah ada keluhan mengenai gejala kemunduran pemakaian BD". Hal itu bukan tidak beralasan, sebab hasil-hasil penelitian kebahasaan, misalnya yang dilaksanakan oleh Laiya (Pusat Bahasa; 1985), Wakidi, dkk (Pusat Bahasa; 1989), Andianto, dkk (Pusat Bahasa; 1989), Kalamper, dkk (Pusat Bahasa; 1989), dan Sawardo, dkk (Pusat Bahasa; 1989) mendukung pernyataan itu.

Persolannya sekarang, mengapa terjadi kemunduran pemakaian BD? Kemunduran pemakaian BD antara lain disebabkan oleh hal berikut.

- 1) Lingkungan sekitar anak yang tidak menggunakan BD.
- 2) Makin terbukanya jalan dan transportasi yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain menyebabkan mobilitas penduduk dari daerah satu ke daerah lain, makin tinggi. Penduduk yang bepergian tentu akan memilih BI sebagai alat komunikasi.
- 3) Adanya pernikahan antara kelompok etnis yang akan memilih BI sebagai bahasa komunikasi di rumah.
- 4) Keinginan orang tua untuk memilih menggunakan BI di rumah.
- 5) Pertimbangan praktis, yakni BI memungkinkan dapat berkomunikasi dengan sesama bangsa Indonesia, sedangkan BD terbatas pada penutur BD yang bersangkutan.
- 6) Makin meluasnya pendidikan menyebabkan makin meluasnya pemakaian BI sebagai bahasa pengantar. Hal itu disebabkan oleh adanya guru yang ditempatkan di daerah tertentu tidak memahami BD setempat.
- 7) Bahasa Indonesia digunakan di kelas sebagai bahasa pengantar karena pertimbangan keheterogenan siswa.
- 8) Bahasa daerah tidak diajarkan di daerah tersebut.
- 9) Petinggi di daerah tidak menggunakan BD sebagai alat komunikasi dengan masyarakat setempat.
- 10) Bahasa daerah dianggap tidak mempunyai prospek yang menggembirakan jika dikaitkan dengan lapangan kerja dan pertimbangan ekonomi.
- 11) Pengaruh media massa, baik yang elektronik maupun yang bukan elektronik sudah menjangkau pelosok-pelosok di tanah air kita.
- 12) Sikap generasi muda yang lebih suka menggunakan BI karena ada anggapan bahwa menggunakan BD berarti tidak tergolong orang yang berpendidikan.
- 13) Makin tertanamnya rasa nasionalisme yang dilaksanakan melalui upacara bendera, lagu kebangsaan, dan penataran-penataran.
- 14) Pengaruh buku yang ditulis dalam BI.
- 15) Bahasa daerah yang bersangkutan kurang digunakan dalam kegiatan kesenian.
- 16) Berhasilnya kegiatan pemberantasan buta BI.
- 17) Di daerah yang bersangkutan tidak ada pakar bahasa (daerah), atau tidak ada orang yang secara ikhlas mengadakan pembinaan terhadap BD.
- 18) Di daerah yang bersangkutan belum ada stasiun radio atau surat kabar daerah yang dapat dijadikan sarana pembinaan BD.

5. Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi kekhawatiran akan punahnya BD (tertentu), ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Hal itu, adalah sebagai berikut.

- 1) Mengajarkan BD di tingkat pendidikan dasar yang dimulai di kelas IV sampai VI. Ini berarti BD merupakan satu mata pelajaran.
- 2) Pengajaran BD hanya disinggung melalui konsep muatan lokal.
- 3) Ada alokasi waktu tertentu untuk pengajaran khusus BD yang terintegrasi dengan pengajaran BI. Misalnya, kalau tersedia waktu sepuluh jam per minggu untuk BI, dua jam di antaranya disediakan untuk BD.
- 4) Mengadakan pembinaan melalui kegiatan inventarisasi, penelitian pengkajian, dan penyiaran hasil.
- 5) Mengadakan kegiatan penyuluhan, baik melalui inisiatif pemerintah daerah, maupun upaya swadaya dan swadana masyarakat. Dalam kaitan ini organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi sebaiknya dilibatkan.
- 6) Menggalakkan teater dan bentuk pagelaran seni yang lain yang menggunakan BD sebagai bahasa pengantar.
- 7) Melanjutkan upaya penyusunan kamus untuk setiap BD.
- 8) Mengusahakan penyusunan tata bahasa deskriptif untuk setiap BD.
- 9) Menyediakan waktu di RRI untuk acara cerita untuk anak dalam BD, demikian pula hal yang sama melalui koran daerah.
- 10) Mengumpulkan kekayaan batin kelompok etnis berupa puisi dan prosa lisan.
- 11) Mengintegrasikan penggunaan BD oleh pemimpin dan petinggi di daerah ketika mereka menjelaskan sesuatu kepada masyarakat.
- 12) Meningkatkan minat baca peserta didik melalui karya sastra yang ditulis dalam BD.
- 13) Menggalakkan apresiasi seni di kalangan peserta didik melalui pagelaran dan perlombaan seni yang menggunakan BD sebagai media.
- 14) Mengupayakan agar koran yang terbit di daerah dapat menambah jumlah halaman yang dapat diisi tentang pengajaran BD atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan BD setempat.
- 15) Memasukkan BD sebagai bahasa pengantar untuk beberapa mata acara di RRI, misalnya berita daerah dalam BD, siaran pedesaan, pembinaan BD, siaran sastra budaya, dan Indonesia negara tercinta.
- 16) Memberikan tanda penghargaan kepada pengarang buku, dan sastrawan yang menulis dalam BD, dan juga kepada perorangan, lembaga, dan organisasi yang secara sungguh-sungguh membina dan mengembangkan BD.

Hal-hal yang telah disebutkan di atas memerlukan kebijaksanaan nasional yang harus dikaji dari segi politik, ekonomi, linguistik, sosiolinguistik, paedagogi, dan psikologi.

6. Mekanisme Penanggulangan

Seperti diketahui, BD di Indonesia mencapai jumlah lima ratusan. Jumlah sebanyak itu belum mungkin dibebankan pada pemerintah pusat. Oleh karena itu,

pemerintah daerah terutama Pemda Tingkat II yang paling tahu mengenai BD tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat, baik melalui anggaran yang disalurkan melalui Departemen Dalam Negeri, sebaiknya menyalurkan anggaran itu kepada gubernur melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Rasanya sudah tiba saatnya untuk mempertimbangkan kegiatan Inpres BI dan BD. Dalam hubungan itu diharapkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menjadi pengendali tunggal untuk upaya pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa di Indonesia. Ada baiknya dicatatkan di sini, jika Pemda Tingkat II tidak mendapat instruksi dari atasan langsung mereka tentang kepedulian terhadap BD, jangan harap kegiatan pembinaan dan pengembangan BI dan BD berlangsung seperti yang dicita-citakan.

7. Penutup

Kearifan para pendiri negara ini harus kita teruskan, antara lain, dengan jalan membina dan mengembangkan BI dan BD sebab secara yuridis hal itu merupakan amanat konstitusi kita. Banyak upaya yang dapat dipertimbangkan dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang sebaiknya meningkatkan kepeduliannya terhadap pembinaan dan pengembangan BD.

Agar upaya pembertahanan terhadap BD tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 harus dihunjamkan ke lubuk hati yang terdalam pada setiap warga negara RI yang tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andianto, Rus, M., dkk. 1989. *Struktur Bahasa Bawo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hente, Asri, dkk. 1989. *Struktur Bahasa Dampelas*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kalamper, Yohanes, dkk. 1989. *Morfologi Bahasa Tamuan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Laiya, Sitasi, Z. dkk. 1985. *Kamus Nias-Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moerdiono. 1988. "Bahasa Indonesia dalam Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan". Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Depdikbud (1-13).
- Nababan, P.W.J. 1982. "Pengajaran Bahasa Daerah dalam Pendidikan Indonesia". Makalah Seminar Pengajaran Bahasa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1-11).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1985. *Kongres Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Salim, Emil. 1988. "Membina Bahasa Komunikasi". Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Depdikbud (1-15).
- Sawardo, Paulus, dkk. 1989. *Fonologi, Morfologi, dan Sintaksis Bahasa Kedang*. Jakarta: Depdikbud.
- Wakidi, dkk. 1989. *Morfo-Sintaksis Bahasa Blagar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Masa Depan Bahasa Daerah dalam Kaitannya dengan Pembinaan Bahasa Indonesia
Pemakalah : Mansoer Pateda
Pemandu : Multamia R.M.T. Lauder
Pencatat : Djoemingan K.P. Atisah

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Zainudin

- Dalam makalah ini ada delapan belas butir kemunduran pemakaian bahasa daerah, apakah kedelapan belas butir kemunduran itu hasil penelitian atau hanya asumsi saja.
- Jika kedelapan belas butir ini benar, apakah pada tahun x nanti di Indonesia hanya akan terdapat satu bahasa, yakni bahasa Indonesia, apakah bahasa-bahasa daerah akan punah?
- Upaya penanggulangan dalam makalah Bapak juga ada beberapa butir, butir pertama itu dikemukakan, "Mengajarkan bahasa daerah di tingkat pendidikan dasar", bagaimana dengan tingkat perguruan tinggi?

Jawaban:

- Tidak melalui penelitian, tetapi melalui pengalaman pemakalah (pergi ke kecamatan untuk penyuluhan), diskusi dengan guru dan masyarakat. Dari diskusi itu pemakalah menemukan kasus bahwa masyarakat di kecamatan tertentu sudah tidak lagi mengajarkan bahasa daerah (bahasa Gorontalo) sebab bahasa daerah tidak mempunyai masa depan yang menggembirakan. Mereka lebih senang mengajarkan bahasa Inggris atau sekurang-kurangnya bahasa Indonesia sebab berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Di samping itu, adanya swadaya Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) yang mempunyai tanggung jawab moral dalam membina bahasa daerah agar tidak punah.
- Pada suatu ketika, kalau kita tidak hati-hati sudah dapat dipastikan bahasa daerah itu akan punah, kecuali kalau penuturnya mau menggunakannya lagi. Saat ini, salah satu jalan, segera mendokumentkannya sekurang-kurangnya berbentuk kamus.
- Belum ada kesepakatan dan instruksi yang ada. Bahasa daerah diajarkan dari kelas empat sampai kelas enam SD.

2. **Pertanyaan:** Maurits Simatupang, Universitas Indonesia

- a. Tujuan mengembangkan dan membina bahasa daerah itu apa? Kalau bahasa Indonesia jelas, yaitu agar lebih modern, bisa mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun untuk bahasa daerah, ranahnya sudah berkurang. Apakah hanya motivasi kebanggaan saja?
- b. Jatidiri tidak ditentukan melalui bahasanya, apakah akan menciptakan peradaban modern dalam bahasa daerah? Untuk apa? Sebab kegunaan dan fungsi bahasa tidak diperhatikan.

Jawaban:

- a. Tujuannya adalah rumusan yang diamanatkan dalam GBHN 1993, khusus untuk kebudayaan pada Pelita VI, butir f (ada dalam makalah hlm. 2)
- b. Dalam bahasa daerah tersimpan masalah-masalah adat, perilaku, dan kesopanan. Hal ini juga membantu pelestarian ideologi negara kita (Pancasila)

3. **Pertanyaan:** Aron Meko Mbete, Fakultas Sastra Universitas Udayana

- a. Sikap bahasa dan sikap budaya perlu dibina dalam upaya strategi penanggulangannya, yang ini kurang tersurat rumusannya.
- b. Untuk sejumlah bahasa daerah yang besar penuturnya, strategi pembinaan dan kemampuan kedwibahasaan yang agak seimbang perlu dipikirkan.

Jawaban:

- a. Setuju dengan sikap Pak Aron karena kalau sikapnya positif, pelestarian bahasa akan terwujud.
- b. Kita menghindari istilah minoritas dan mayoritas, kita mempunyai kewajiban untuk membina semua bahasa daerah. Oleh karena itu, pembinaan bahasa daerah ini diserahkan pada Pemda Tk. II.

4. **Pertanyaan:** Akhlan

- a. Salah satu jalan untuk memelihara bahasa daerah adalah harus diajarkan di sekolah sehingga bahasa daerah tidak akan hilang. Saya tidak setuju bahasa daerah diajarkan di kelas empat, tetapi bahasa daerah harus diajarkan di kelas satu sekolah dasar. Mungkin kondisi tiap daerah berbeda, di Jawa Barat bahasa daerah diajarkan dari kelas satu SD sampai SMP.
- b. Saya setuju pembinaan bahasa daerah diserahkan pada Pemda Tk. II. Hal itu pun sesuai dengan kurikulum 94, muatan lokal diserahkan pada pemda Tk. II.

Imbauan:

Dapatkah Kongres ini memberi masukan, sehubungan akan diselenggarakannya kongres ke-2 bahasa Sunda, 26 Desember 1993. Kami akan mengundang pakar-pakar bahasa daerah lain. pada kongres itu kami akan cetuskan "kongres bahasa daerah se-Indonesia.

Jawaban:

- a. Ada bahasa daerah yang sudah memiliki alfabet dan ada yang belum memiliki tradisi tulis. Kalau bahasa daerah diajarkan dari kelas satu akan timbul kesulitan.

Tanggapan:

MMP menggunakan huruf Latin bukan huruf daerah.

5. Pertanyaan: H. Ny. Masrurah Mokhtar, UMI Ujung Pandang

- a. Telah disinggung oleh penanya terdahulu tentang kurikulum SD 1994. Dapatkah ditempuh langkah-langkah strategis untuk menerapkannya. Hal ini melihat kenyataan, anak-anak saya sudah tidak mengenal bahasa daerahnya (Bugis) karena bahasa itu tidak diajarkan di SD dan di SMP. Saya menginginkan huruf-huruf daerah tetap lestari penggunaannya di daerah masing-masing.
- b. Perlu langkah strategis dalam pengambilan kosakata bahasa daerah yang dimasukkan dalam bahasa Indonesia (saya melihat kosakata yang masuk dalam bahasa Indonesia banyak diambil dari bahasa Jawa padahal banyak kosakata dari bahasa lain). Bagaimana kalau Pusat Bahasa menampung istilah-istilah yang berasal dari kosakata bahasa daerah yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia?
- c. Apakah perkiraan statistik Abas itu akan memudahkan bahasa daerah?

Jawaban:

- a. Pembinaan bahasa daerah ditangani oleh Pemda Tk. II. Untuk pelestarian huruf daerah silahkan saja.
- b. Banyak petinggi dari Jawa dan juga wartawan banyak menggunakan kata-kata Jawa. Harus ada petinggi yang menggunakan bahasa daerah di luar bahasa Jawa.
- c. Abas mengutip dari BPS bukan penelitian sendiri.

6. **Pertanyaan:** Mahudin

Dalam masalah pembinaan, kita berhadapan dengan pembinaan bahasa daerah dan pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia salah satu tujuannya menuju bahasa Indonesia baku, salah satu ciri bahasa yang sudah tidak menunjukkan ciri kedaerahannya, sedangkan pembinaan bahasa daerah masih mempertahankan ciri kedaerahannya agar tidak jadi singgungan bagaimana arah pembinaan dan pengembangan itu?

Jawaban:

Semua bahasa mempunyai sistem sendiri. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa harus ditangani sendiri sesuai dengan sistemnya dan dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahan pembandingan dan pemberi.

PENERJEMAHAN KARYA SASTRA DAN SUMBANGANNYA BAGI PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Rahayu S. Hidayat
Universitas Indonesia

"Untuk memahami diri sendiri, manusia perlu dipahami oleh orang lain. Untuk dipahami oleh orang lain, ia harus memahami orang lain itu" (Thomas Hora).

"Terjemahkan secara bebas sesuai dengan artinya"
(Heidegger)

"Yang terpenting, lupakan saya." (Nietzsche)

"Ketika membaca terjemahan karya saya, timbul rasa aneh. Di dalamnya saya melihat kembali diri saya dan diri orang lain. Saya seolah mengalami transformasi, menjadi lebih ringan..." (Octavio Paz)

1. Pengantar

Penerjemahan karya sastra dari berbagai bahasa ke bahasa Indonesia akhir-akhir ini sering dilakukan. Sejak dahulu karya sastra asing diterjemahkan tidak hanya ke bahasa Melayu, tetapi juga ke bahasa Minangkabau, Jawa, Sunda, dan mungkin ke bahasa lain.

Kita mengetahui bahwa pengarang kita gemar menerjemahkan karya sastra asing dan mungkin ada di antaranya menjadi pengarang setelah menerjemahkan karya asing. Tidak dapat dimungkiri bahwa penerjemahan merupakan latihan yang baik untuk menafsirkan (menginterpretasi) dan mengungkapkan gagasan. Komunikasi verbal didasari oleh interpretasi dan pengungkapan gagasan yang merupakan tindak aktualisasi hasil interpretasi tadi (Seleskovitch dan Lederer 1986).

2. Penerjemahan Karya Sastra

Mungkin ada yang menyanggah bahwa pada penulisan karya asli dan pada penerjemahan, terdapat perbedaan penafsiran. Penulis karya asli menafsirkan

"dunianya" sendiri, sedangkan penerjemah menafsirkan "dunia" orang lain—pengarang—yang kemudian dijadikannya dunianya sendiri. Dengan demikian, perbedaan antara penulisan karya asli dan penerjemahan terletak pada gagasan (hasil interpretasi) yang akan diungkapkan itu. Ketika menulis karyanya, pengarang mengungkapkan gagasannya sendiri—sehingga relatif bebas menentukan arah cerita—sedangkan penerjemah dibatasi oleh gagasan pengarang.

Karya sastra terjemahan tidak akan tepat sama (identik) dengan karya aslinya. Bagaimanapun penerjemahan karya sastra akan menghasilkan *tulisan kedua*—dibandingkan dengan karya asli yang merupakan *tulisan pertama*—meskipun cerita tetap sama, warna karya akan berbeda (Munier, 1987:24-25). Oleh karena itu, dua penerjemah yang menerjemahkan karya yang sama akan menghasilkan karya sastra terjemahan yang berbeda. Hal itu dapat dibuktikan pada beberapa karya yang telah diterjemahkan, misalnya karya Albert Camus, *L'Etranger* oleh Apsanti Djokosujatno yang diterbitkan oleh Jambatan pada tahun 1985. Max Arifin menerjemahkan *The Stranger* yang diterjemahkan dari *L'Etranger* oleh Stuart Gilbert pada tahun 1980. Karya terjemahan Max Arifin tersebut diberi judul *Orang Aneh*, diterbitkan oleh Nusa Indah pada tahun 1990. Kasus ini menarik karena terjemahan pertama berasal dari bahasa Prancis, yang sudah pasti berwarna Perancis, sedangkan terjemahan kedua dari bahasa Inggris. Jika kita perhatikan judulnya saja, sudah tampak perbedaan interpretasi—dan perbedaan sudut pandang?—dari kedua penerjemah. Meskipun judul versi Inggris artinya "orang asing", penerjemah menggantinya menjadi *Orang Aneh* sesuai dengan penafsiran ceritanya. Lebih menarik lagi bila kita bandingkan *Orang Aneh* dengan *Orang Terasing* hasil penerjemah Malaysia (Ainon Muhammad, Balai Bahasa dan Pustaka, 1979), yang telah dicetak ulang tiga kali (1991). Keduanya diterjemahkan dari bahasa Inggris, tetapi tampaknya penerjemah dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris itu pernah berubah pendapat sehingga dua versi terjemahannya diberi judul yang berbeda. Pada terjemahan Malaysia ditulis bahwa karya sumber berjudul *The Outsider* (Stuart Gilbert, Vintage Book, t.tg.), sedangkan terjemahan Indonesia bersumber dari versi yang berjudul *The Stranger*.² Sayang *The Outsider* tidak ada tahun terbit, namun dari tahun terbit karya terjemahan *Orang Terasing* dapat dideduksikan bahwa versi bahasa Inggris, *The Outsider*, yang menjadi sumbernya, lebih tua daripada versi *The Stranger* (1980).

Terlepas dari bagus tidaknya ketiga terjemahan tersebut—artinya setia tidaknya dengan gagasan asal dan enak tidaknya dibaca—bukan tugas saya hari ini untuk membahasnya. Yang jelas, penerjemahan karya sastra merupakan *seni*. Istilah seni ini perlu dijelaskan lebih lanjut.

Penerjemahan karya sastra—seperti juga penerjemahan karya nonsastra—merupakan pengalihan apa yang disebut *teks* ke dalam suatu bahasa lain. Namun, perlu diingat bahwa teks hanya lahir satu kali: seorang pengarang menghasilkan suatu tulisan hanya satu kali, yaitu ketika ia menulisnya pertama kali secara semerta (spontan) di dalam bahasanya. Sentuhan dan perbaikan yang dilakukan kemudian—atas permintaan penerbit atau karena sebab-sebab lain—membentuk sebuah teks lain.

Jadi, dari seorang penulis pun mungkin dihasilkan dua versi tulisan: satu teks yang sama dan sekaligus berbeda karena masing-masing lahir pada saat yang berbeda karena tuntutan penulisan yang berbeda pula.

Keunikan teks itu dihasilkan secara alami di dalam satu-satunya bahasa, yaitu bahasa penulisnya. Penerjemahan karya sastra yang berpretensi mengulangi kata-kata penulis di dalam bahasa lain merupakan tindak kekerasan yang memperkosa karya orang lain, atau dapat juga dikatakan tidak mungkin. Agar penerjemahan menjadi mungkin, kita harus berbicara tentang penerjemahan yang menghasilkan teks *lain* yang mencoba mengambil kembali data yang terdapat di dalam teks asli, tulisan pertama yang lahir satu kali dan di dalam satu-satunya bahasa, ditumbuhkembangkan di dalam tulisan kedua yang juga lahir satu kali dan di dalam satu bahasa, yaitu bahasa si penerjemah.

Dengan demikian, penerjemahan karya sastra yang menghasilkan tulisan kedua sama dengan membuat kembali teks di dalam bahasa sasaran. Penerjemah roman, drama, atau puisi akan membuat kembali sebuah roman, drama, atau puisi di dalam bahasanya. Teks yang dihasilkannya hampir sama mandiri dan sama bebas dengan teks pertama, artinya merupakan pengungkapan semerta dengan tetap setia pada asalnya. Setiap penerjemah melakukan tugasnya sesuai dengan temperamennya yang khas, hubungannya dengan bahasanya, bakatnya menulis, dan gayanya. Keahlian menghasilkan teks kedua itu tidak dapat diuraikan dalam ilmu atau metode—seperti juga tata bahasa, meskipun sangat diperlukan, tidak dapat menciptakan gaya seorang pengarang—namun terdapat di dalam seni yang paling tak terduga. Pengetahuan bahasa [bahasa sumber dan bahasa sasaran] dan pengetahuan tentang penulis merupakan dasar penerjemahan karya sastra. Namun, setelah itu, penulisan yang penuh kejutan ..." (Munier, 1987:32).

Penerjemahan tidak mungkin mengalihkan seratus persen gagasan penulis karya asli, pasti ada pemenggalan, atau penambahan karena segalanya bergantung pada penafsiran penerjemah dan adat bahasa tulis bahasa sasaran. Penerjemahan sudah dianggap cukup berhasil jika tidak ada kesalahpahaman (*contresens*) atau salah terjemah. Oleh karena itu, paling baik adalah menerjemahkan karya asli dan bukan dari karya terjemahan. Selain itu, konsultasi dengan penulis—jika masih hidup dan dapat dihubungi—akan sangat membantu penerjemahan karya sastra. Mengingat dalam penerjemahan karya sastra terjadi proses menuliskan kembali (*réécriture*) yang melibatkan daya cipta (kreativitas), kita sepakat bahwa penerjemahan karya sastra bukanlah pekerjaan yang ringan. Seorang penerjemah karya sastra dituntut untuk menjadi pengarang, dapat memahami penulisan karya sastra, dan dapat menghasilkan karya kedua yang sama indahnya. Oleh karena itu, penerjemahan karya sastra sebaiknya dilakukan oleh pengarang atau paling tidak penerjemah yang kaya imajinasi serta menguasai bahasa asing dan bahasa Indonesia ragam sastra.

3. Sumbangan Penerjemahan Karya Sastra bagi Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

Sebelum saya melanjutkan uraian ini, perlu saya jelaskan bahwa yang saya maksud dengan karya sastra adalah semua karya rekaan tertulis, mulai dari karya sastra "tinggi", atau karya klasik, karya sastra modern yang tinggi mutunya, karya sastra populer yang biasa disebut *best-seller*, dan komik. Kita tahu bahwa banyak orang membaca karya sastra populer daripada membaca karya sastra "tinggi". Anak-anak serta remaja yang masih dalam tahap mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia lebih sering membaca komik daripada prosa, apalagi drama, atau puisi.

Penerjemahan karya sastra memperkaya khasanah susastra Indonesia. Apalagi jika kita mengingat niat pemerintah untuk menggalakkan minat baca bangsa Indonesia, penerjemahan karya sastra dapat berperan dalam penyediaan bacaan yang bermutu.

Orang mungkin bertanya-tanya, mengapa karya sastra begitu banyak diterjemahkan? Sebuah karya yang bagus biasanya segera diterjemahkan ke berbagai bahasa dan tidak ketinggalan ke bahasa Indonesia. Karya sastra Indonesia telah diterjemahkan ke bahasa asing seperti ke bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis. Mengapa demikian? Karya sastra lazimnya mengandung gagasan yang universal sehingga dipahami oleh pembaca mana pun yang menguasai bahasa penulisnya. Berkat keuniversalan itu karya sastra merupakan satu di antara hasil budaya yang khas dari suatu masyarakat yang mampu menembus batas-batas budaya masyarakat lain. Bahkan, tidak jarang pula mampu melampaui batas-batas politis antarnegara. Selain batas ruang, karya sastra juga mampu menembus batas waktu, karena segi-segi kemanusiaan yang digambarkaninya begitu universal. Kita melihat berapa banyak karya terjemahan yang aslinya ditulis pada abad-abad yang silam. Akhir-akhir ini kita lihat terjemahan karya-karya Voltaire (abad XVIII) seperti *Si Lugu* (Ida S. Husen, Yayasan Obor Indonesia, 1989), *Suratan Takdir* (Ida S. Husen, Pustaka Jaya, 1989).

Meskipun mengandung gagasan kemanusiaan yang universal, tidak dapat disangkal bahwa karya sastra terjemahan membawa serta kebudayaan asalnya, baik yang bersifat positif maupun negatif dari sudut pandang kita. Dari karya sastra Barat, kita belajar berbagai gagasan modern yang mendorong kemajuan. Orang mengkhawatirkan pendangkalan budaya sebagai dampak kehadiran sekian banyak komik terjemahan—yang mendesak komik asli—karena komik, sebagai karya seni populer, dianggap mengungkapkan gagasan yang dangkal dan tidak mempedulikan "estetika susastra". Namun, harus diakui bahwa tidak sedikit unsur mendidik yang terdapat di dalamnya, paling tidak jiwa ksatria tokoh yang selalu membantu kaum yang lemah di balik tindakan kekerasan yang ditunjukkannya. Selain mengajarkan perilaku baik, komik berhasil pula mengajarkan pengetahuan umum kepada pembacanya, misalnya satu seri komik terjemahan dari bahasa Jepang (cf. Takeshi Maekawa, *Break Shot*, sudah terbit tiga jilid, Elex Media Komputindo, 1993), selain menunjukkan budaya Jepang yang modern dan sportivitas, juga banyak menjelaskan prinsip-prinsip fisika dan ilmu ukur melalui permainan bilyar.

Kembali pada penerjemahan karya sastra pada umumnya, kita juga melihat perannya di dalam memperkenalkan suatu aliran sastra yang sedang berkembang di dalam masyarakat tertentu kepada para pengarang Indonesia. Meskipun beberapa pengarang Indonesia terpengaruh oleh aliran sastra tertentu karena membaca karya aslinya, tidak mustahil ada pula yang mendapat pengaruh itu melalui pembacaan karya terjemahan. Iwan Simatupang adalah pengarang Indonesia yang memiliki gagasan dan gaya khas, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa karyanya *Ziarah* diwarnai juga oleh absurditas.

Budaya Indonesia yang mengenal bentuk sastra lisan, mulai dari tukang cerita sampai drama rakyat dan wayang wong, dengan mudah mencerna bentuk-bentuk drama impor—kebanyakandari Barat—melalui penerjemahan karya sastra jenis drama (cf. *Si Bachil* karya Molière, abad XVII, *Perkawinan Figaro*, karya Baumarchais, abad XVIII, dan *Menunggu Godot*, Albert Camus, abad XX). Selain itu, bentuk-bentuk puisi tidak sedikit yang dialihkan ke bahasa-bahasa lain, seperti soneta Italia yang dikenal di seluruh dunia dan pantun Melayu yang ditiru seorang penulis Perancis (cf. Baudelaire, abad XIX). Puisi modern karya penyair Indonesia tidak berbentuk pantun atau gurindam, tetapi mengambil bentuk puisi Barat. Jelaslah bahwa penerjemahan karya sastra banyak menyumbang pengembangan sastra, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Kalau tadi saya mengemukakan sumbangan penerjemahan karya sastra bagi pengembangan gagasan, bentuk tulisan, gaya penulisan, sekarang saya ingin meninjau sekilas sumbangan bagi pengembangan bahasa, khususnya kosakata dan ragam bahasa.

Baru-baru ini, seorang mahasiswa Fakultas Sastra lulus sebagai Sarjana berkar skripsinya yang membahas penggunaan kata-kata tidak lazim di dalam buku *Nyonya Bovary* karya Gustave Flaubert, abad XIX (Winarsih Arifin, Pustaka Jaya, 1990). Terjemahan yang oleh banyak pembaca muda dirasakan menggunakan bahasa "eyang kita" ternyata telah menyumbang pengembangan bahasa Indonesia dengan menghidupkan kembali kata-kata arkais dan meminjam kata-kata bahasa daerah serta bahasa asing sebagai padanan kata-kata bahasa Prancis abad XIX. Penulis skripsi itu menemukan sekitar seratus kata yang menurut kriterianya, tidak lazim di dalam bahasa Indonesia "modern". Beberapa contoh kata-kata tidak lazim itu dapat dicari maknanya di dalam *KBBI* atau *Kamus Poerwadarminta* yaitu: *berpusing*, *berteleku*, *kida-kida*, *kelemayuh*, *kandil*, *keliti*, *bidal*, *onderok* (Intan D. Savitri, 1993). Walau pembaca mengeluh, kata-kata itu memang merupakan padanan paling tepat dari kata-kata Prancis sehingga kita harus berterima kasih kepada penerjemah atas kecermatannya mencari kata-kata Indonesia yang "tak lazim" itu. Tampaknya, penerjemah sengaja menggunakan kata-kata "kuno" (dan gaya bahasa "eyang-eyang") itu untuk menciptakan kembali dunia abad XIX. Mengenai penggunaan kata-kata dari bahasa daerah, setelah saya bandingkan dengan beberapa cerpen kontemporer yang dimuat dalam berbagai surat kabar, saya melihat bahwa para pengarang Indonesia juga sering menggunakan kata-kata bahasa daerah dan kata pinjaman dari bahasa asing.

Jadi, wajar bahwa penerjemah karya sastra menggali kekayaan bahasa-bahasa kita dan meminjam kata-kata asing. Sebagai hasilnya, ia turut mengembangkan kosakata Indonesia.

Setelah kita melihat kosakata dalam karya sastra "tinggi", kita akan melihat ragam bahasa dalam terjemahan komik. Sekali lagi saya mengambil contoh hasil penelitian mahasiswa (Dewi, 1993) yang memperlihatkan bahwa penerjemah komik ternyata kurang berani menggunakan ragam kasar di dalam terjemahannya, atau penerbit menyensornya karena menjunjung misi pendidikan melalui terbitannya. Sebenarnya, jika berbagai petualangan Si Lupus boleh terbit dan bahkan difilmkan, tidak ada alasan bagi penerjemah atau penerbit untuk menghindari ragam kasar di dalam menerjemahkan komik. Justru dengan menggunakan ragam kasar, pembaca akan melihat perbedaan situasi yang memungkinkan penggunaan berbagai ragam bahasa. Biarkanlah para bandit ber "lu-gue" di lingkungannya agar jelas perbedaannya dengan orang baik-baik yang menggunakan bahasa yang santun; bagaimanapun para bandit dapat juga menggunakan ragam resmi ketika berhadapan dengan hakim. Di sinilah letak sumbangan penerjemahan di dalam pengembangan bahasa Indonesia: kalau di sekolah anak-anak dan remaja jarang dilatih menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi, paling tidak mereka dapat belajar dari bacaan.

4. Simpulan dan Saran

Penerjemahan karya sastra besar sumbangannya bagi pengembangan bahasa dan sastra Indonesia bagi pengembangan pengetahuan umum. Satu hal yang harus dijaga adalah jangan sampai penerjemahan karya sastra mematikan karya pengarang Indonesia. Kita tahu bahwa beberapa penerbit, dengan alasan kemudahan dan komersial, lebih bersemangat menerbitkan karya terjemahan daripada menerbitkan karya asli. Hal itulah yang harus dicegah, sedapat-dapatnya ada keseimbangan dalam penerbitan karya-karya. Beberapa penerbit yang lain lebih suka menerbitkan terjemahan karya sastra populer, terutama komik, dengan alasan karya sastra tinggi tidak laku dijual. Hal ini pun perlu dicegah agar di pasar tersedia bacaan yang beragam.

Upaya penerbit saja tidak cukup untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia yang besar perannya dalam pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia. Dengan adanya sekian banyak saluran televisi di Indonesia, orang dapat menonton televisi selama dua puluh empat jam yang menyuguhkan teks visual yang lebih mudah dipahami meskipun semua tahu bahayanya bagi berbagai kemampuan manusia. Akibatnya, perpustakaan rakyat yang menyediakan bacaan gratis menjadi sepi pengunjung. Mereka yang mampu membeli buku pun tidak sedikit yang memilih membeli baju baru meskipun lemarnya sudah penuh sesak, atau menyewa kaset video. Konsumerisme yang melanda masyarakat telah membuat orang menomorduakan pembelian buku dengan alasan tidak dipakai nampang atau lebih enak nonton video dan televisi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali memasyarakatkan kembali minat baca.

Meskipun penerbit, berkat kemauan baiknya, dengan mudah menyediakan berbagai bacaan bermutu², tetap sulit mengubah sikap mental masyarakat jika masyarakat itu sendiri tidak ingin—atau tidak ada dorongan—untuk mengubah sikap mentalnya.

Upaya penerbit juga harus ditunjang oleh penerjemahan yang baik. Betapa sering kita mendengar komentar "lebih baik membaca karya aslinya, terjemahannya tidak dapat dipahami". Penerjemahan yang baik memang tidak mudah. Jadi, penerbit harus disadarkan bahwa menerjemahkan membutuhkan waktu sehingga memberi waktu (dan imbalan) yang memadai untuk dapat memperoleh terjemahan yang baik³. Kemudian, penerbit dilengkapi dengan penyunting yang menguasai bahasa asing—dan bahasa Indonesia—untuk dapat menilai terjemahan yang akan diterbitkannya. Terakhir, mitos yang mengatakan "orang yang pandai berbahasa asing dapat menerjemahkan" (seperti mitos orang yang pandai berbahasa dapat mengajar bahasa) harus dihancurkan. Tidak sedikit orang yang berpretensi pandai menerjemahkan menerima pesanan terjemahan sehingga kita sering melihat terjemahan yang tidak tedas (*illegible*). Oleh karena itu, perlu ada sekolah penerjemahan yang mengajarkan teknik penerjemahan profesional. Saya katakan, teknik penerjemahan profesional untuk membedakan dengan penerjemahan pedagogis dalam rangka pengajaran bahasa asing. Sekolah penerjemahan yang saya maksudkan hanya menerima murid yang pandai berbahasa asing dan bahasa Indonesia. Sekolah ini tidak lagi mengajarkan bahasa-bahasa, tetapi mengajarkan teknik penerjemahan.

Teknik penerjemahan profesional yang saya anjurkan adalah penerjemahan berdasarkan interpretasi (ini bedanya dengan penerjemahan pedagogis), suatu teknik yang memanfaatkan analisis wacana sebagai metode penerjemahan. Contohnya, untuk menerjemahkan sebuah teks berbahasa asing, murid diminta untuk membaca teks pendek dengan cermat—artinya mencari tahu siapa penulisnya, di masa apa teks ditulis, untuk siapa teks ditulis, di mana teks diterbitkan (di surat kabar atau terbitan lepas), apakah teks merupakan bagian dari teks yang lebih besar atau merupakan sebuah teks utuh, dsb.—sehingga ia dapat menafsirkan isi teks secara tepat. Setelah itu, tanpa melihat ke teks ia harus dapat menceritakan kembali isi teks dalam bahasa asing bersangkutan (penerjemahan intrabahasa), mula-mula secara ringkas. Kemudian, dengan bimbingan guru serta saran dari teman-teman, semakin rinci. Terakhir, barulah ia menerjemahkan dengan melihat teks sumber hanya untuk mengecek rincian yang terlewat (penerjemahan antarbahasa). Pada tahap pengecekan itu ia harus mempertimbangkan pilihan kata penulis sehingga dapat memberikan padanan yang tepat. Pada tahap ini pula, murid dilatih untuk menggunakan gaya bahasanya sendiri dengan memperhatikan kelaziman dalam bahasa sasaran. Saya penuh harapan bahwa dengan adanya sekolah penerjemahan yang bermutu, suatu hari akan tersedia penerjemah—dan mungkin juru bahasa—yang bermutu pula.

Selain di sekolah penerjemahan, kita semua tahu bahwa penerjemahan sering pula dilakukan di kelas bahasa asing dengan tujuan utama melatih pemahaman teks (Déjean le Féal, 1987). Namun, sayangnya penerjemahan pedagogis ini sering kali

tidak berdasarkan interpretasi, yang dipentingkan kesetiaan pada bentuk dan bukan kesetiaan pada gagasan. Murid yang berani mengungkapkan kembali secara bebas sehingga tulisannya lebih komunikatif dan padu dipersalahkan hanya karena guru tidak dapat menilai perpadanan kosakata atau struktur yang ingin diujinya.⁴ Kita tahu bahwa kalau orang Inggris mengatakan *he swam accross the river* dalam penerjemahan interpretatif kita tidak perlu menerjemahkan dengan *ia berenang menyeberangi sungai*. Padanan yang tepat bergantung pada konteksnya. Bila ceritanya mengenai orang yang meninggalkan perahu yang akan karam, kita boleh saja menerjemahkan dengan *ia berenang ke tepi*. Jika ceritanya mengenai orang dikejar musuh dari tepi sungai, mengapa kita tidak menerjemahkannya dengan *ia menyelamatkan diri ke seberang*? Jika konteksnya memang menuntut penonjolan kata *berenang* dan *menyeberangi sungai*, barulah kita berusaha setia pada bentuk.

Ditinjau dari kemampuan berbahasa murid dan tujuan pengajaran bahasa asing, tampaknya kurang tepat jika kita menggunakan teknik penerjemahan profesional di kelas bahasa asing karena tujuan pelajaran menerjemahkan bukan untuk mencetak penerjemah. Walaupundemikian, menurut saya, pengajaran penerjemahan berdasarkan interpretasi tetap mungkin—dan sebaiknya—dilakukan asalkan teksnya dipilih sesuai dengan tingkat pengetahuan bahasa murid. Jika teknik itu diterapkan dan murid didorong untuk menggali kekayaan bahasa sasaran serta kemampuannya sendiri, saya kira tidak saja kemampuan berbahasa asing murid akan berkembang dengan baik, kemampuan berbahasa Indonesianya pun akan berkembang dan akhirnya hasil terjemahannya pun akan memadai. Siapa tahu pelajaran penerjemahan di kelas bahasa asing dapat memicu bakat-bakat pengarang yang tersembunyi?

Terakhir, mitos "puisi tak dapat diterjemahkan" sebaiknya juga dihilangkan. Menerjemahkan puisi paling sulit di antara penerjemahan semua *genre* sastra karena bentuk puisi mendukung maknanya. Akibatnya, sering kali penerjemah terlalu ingin mempertahankan bentuk sehingga amanat puisi berubah; kemungkinan lain, penerjemah terlalu ingin setia pada makna sehingga lupa menyusun puisinya. Meskipun demikian, penerjemahan puisi bukannya tidak mungkin (Miclau 1987, Zimmermann 1989) dan kita sudah melihat sekian banyak puisi terjemahan dalam bahasa Indonesia yang cukup berhasil. Jadi, selama penerjemah menghasilkan puisi lagi dan menyuarakan suara yang sama, ia dapat dikatakan berhasil menerjemahkan.

Untuk membuktikan bahwa selama penerjemahan didasari penafsiran semua teks dapat diterjemahkan⁵, saya ingin mengajak Saudara sekalian menerjemahkan teks berikut ini:

LIVE reverses into EVIL and EROS reverses into SORE. You must not forget the SIN in SINCERE and the CON in CONFIDENCE.

Teks khas Inggris ini, berkat permainan katanya, tampak tidak mungkin diterjemahkan. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, teks itu mengatakan bahwa "di dalam, kehidupan segalanya bermuka ganda, atau di balik kebatilan ada kebajikan, atau juga sisi lain dari kegembiraan adalah kesedihan".

Setelah memahami makna teks tadi, saya yakin bahwa Saudara sekalian, yang sedikit berbakat penyair atau yang suka bermain dengan kata, pasti dapat mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia. Kalau boleh, saya kemukakan "ciptaan" saya yang sederhana:

Cukup mengganti K dengan L, maka KAWAN menjadi LAWAN; dan mengganti P dengan M, maka PAKAR menjadi MAKAR. Jangan lupa, ada KUTU dalam SEKUTU; dan ada TUAN dalam BANTUAN.

Sekian, dan terima kasih atas kesabaran Saudara mendengarkan uraian saya.

CATATAN

1. Kasus yang sama adalah karya Jean-Jacques Rousseau, *Du contrat social* (abad XVIII) yang diterjemahkan dari bahasa Inggris (*The Social Contract*, 1974, Hafner Publishing Com.) menjadi *Kontrak Sosial* oleh Soemardjo, Penerbit Erlangga, 1986 dan kemudian diterjemahkan dari bahasa Perancis menjadi *Perihal Kontrak Sosial Atau Prinsip-prinsip Hukum Politik* oleh Ida S. Husen dan Rahayu S. Hidayat, Penerbit Dian Rakyat, 1989. Juga terjemahan Malaysia, *Dari Hal Perjanjian Sosial* oleh Puteri R.M. Ramli, Penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, dari bahasa Perancis.
2. Terjemahan karya sastra—sebenarnya karya sastra klasik Indonesia perlu juga—yang dijadikan bacaan di sekolah sebaiknya dilengkapi dengan catatan belakang yang menjelaskan kata tak lazim atau konsep yang asing bagi anak-anak dan remaja sehingga karya itu mudah dipahami.
Teks terjemahan diolah dengan komputer yang dilengkapi kamus Inggris dan program-program teks, *Weston Iterirage*. Ejaan bahasa Indonesia diperkosa komputer tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya sukarela untuk menggantikan program pengolahan teks *western Iterirage* dengan *KBBI*.
3. Keluhan pemirsa bahwa sub-titel film Inggris sering tidak tepat sudah saatnya didengarkan. Rumah produksi harus disadarkan bahwa tidak mungkin menerjemahkan dialog film sepanjang 26 menit dalam waktu beberapa jam!
4. Contoh yang jelas dari penerjemahan pedagogis adalah latihan menerjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Perancis yang disusun oleh J.V. Baardewijk-Resseguier dan M.V. Willigen-Sinemus (*Materiaux pour la traduction du neerlandais en francais*, Muideberg, Coutinho, 1986) yang melatih penerjemahan berbagai struktur kalimat bahasa Belanda ke bahasa Prancis. Bahaya latihan semacam ini adalah murid akan terbiasa untuk setia pada bentuk sehingga tidak berhasil membebaskan dirinya untuk mencipta.
5. Seorang ahli traduktologi dari Ecole supérieure d'interprétation et de traduction (ESIT, Paris) yang menjadi pengarah pada seminar penerjemahan, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Perancis pada tanggal 2-7 Agustus yang lalu, mengisahkan bahwa telah menerjemahkan tanpa menguasai bahasa penulis. Ia beberapa kali menerjemahkan sebuah artikel (bukan karya sastra) surat kabar dan majalah Indonesia, padahal tidak dapat berbahasa Indonesia sama sekali. Caranya adalah meminta kepada seorang peserta untuk menceritakan segala sesuatu mengenai artikel itu dalam bahasa Perancis. Setelah itu, ia meminta kepada peserta untuk menceritakan isi setiap paragraf secara bergiliran dan setelah

mendengarkan isi suatu paragraf, ia mencoba menerjemahkannya secara lisan sambil menanyakan kembali berbagai rincian dalam paragraf bersangkutan. Setelah selesai menerjemahkan seluruh artikel, ia menyuruh peserta yang mencatat terjemahannya untuk membaca catatannya, sambil ia sendiri mengganti beberapa kata dan struktur kalimat sehingga akhirnya gagasan dalam teks itu berhasil diungkapkannya kembali dalam bahasa Prancis dengan tulisan yang sepenuhnya berwarna Prancis (dan pasti diwarnai gaya sang pakar). Maka, penerjemahan suatu karya sastra melalui terjemahannya mungkin dilakukan asalkan penerjemah mempelajari terlebih dahulu berbagai faktor eksternal yang mengkondisi teks dan berkonsultasi dengan orang yang menguasai bahasa penulis karya itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bataillon, Michel (pimpinan diskusi). "Texte et théâtralité", dalam *Sixièmes assises de la traduction littéraire (Arles 1989)*. Arles: Actes Sud/Atlas, hlm. 69-93.
- Belkeddar, Odile dan Suzanne Bukiet. 1985. "Traduire pour les enfants" dalam *Actes des deuxièmes assises de la traduction littéraire (Arles 1987)*. Arles, Actes Sud/Atlas, hlm. 134-137.
- Bensoussan, Albert. 1989. "Du littéral au littéraire", dalam J. Canavaggio & B. Darbord ed. *La Traduction*, hlm. 113-118.
- Canavaggio, J. & B. Darbord ed. 1989. *La Traduction. Actes du XIII congrès de la société des hispanistes français. Caen, 13-15 mars 1987*. Caen; Centre de Publication de l'Université de Caen.
- Déjean le Féal, Karla, 1987 "Traduction pédagogique et traduction professionnelle", dalam *Le français dans le monde*, numéro spécial, Agustus/September, hlm. 107-112.
- Dewi, Rosita. 1993. *Penerjemahan Ragam Kasar dalam Komik Terjemahan dari Bahasa Perancis ke Bahasa Indonesia* (skripsi). Depok; Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Larson, Mildred L. 1989. *Penerjemahan Berdasar Makna*. Jakarta; Penerbit Arcan. Terjemahan Kencanawati Taniran, dari *Meaning Based Translation, A Guide to Cross-Language Equivalence*. Lanham (Maryland): University Press of America. 1984.
- Miclau, Paul. 1987. "La traduction de l'image poétique", dalam *Le français dans le monde*. numéro spécial, Agustus/September, hlm. 68-71.
- Munier Roger. 1987. "Le texte traduit, une écriture seconde", dalam *Actes des quatrièmes assises de la traduction littéraire (Arles 1987)*. Arles, Actes Sud/Atlas, hlm. 21-34.
- Pelegrin, Benito. 1985. "De la traduction du poème à la traduction poétique", dalam *Actes des deuxièmes assises de la traduction littéraire (Arles 1987)*. Arles, Actes Sud/Atlas, hlm. 125-130.
- Saillard, Simone. 1989. "Pour une histoire de la traduction moderne. A propos de *Travail/Trabajo*, Zola/Clarín, 1901", dalam J. Canavaggio & B. Darbord ed., *La Traduction*, hlm. 35-58.

- Savitri, Intan Dewi. 1993. *Penggunaan Kata-Kata Bahasa Indonesia Tidak Lazim dalam Terjemahan Madame Bovary: Tinjauan Perpadanan* (skripsi). Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Seleskovitch, Danica & Marianne Lederer. 1986 (ed. ke-2). *Interpréter pour traduire*. Paris: Didier Erudition.
- Thomas, D.M. 1984. "Ecriture et traduction", dalam *Actes des premières assises de la traduction littéraire (Arles 1984)*, Arles, Actes Sud/Atlas, hlm. 148-152.
- Watzlawik, Paul. 1978. *La réalité de la réalité: confusion, désinformation, communication*, Paris, Seuil, bab 1, "Les pièges de la traduction", hlm. 13-23. Terjemahan dari *How real is real? Communication, disinformation, confusion*. New York: Random House. 1976.
- Zimmermann, Marie-Claire. 1989. "Problèmes pratiques de la traduction poétique", dalam J. Canavaggio & B. Darbord ed., *La Traduction*, hlm. 175-200.

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Penerjemahan Karya Sastra dan Sumbangannya bagi Pengembangan Bahasa Indonesia
Pemakalah : Rahayu S. Hidayat
Pemandu : Melani Budianta
Pencatat : Juhriah
: Cepi Suwangga

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Memen Durahman

Di dalam makalah Ibu terdapat kalimat, "perlu diingat bahwa teks hanya lahir satu kali saja; seorang pengarang menghasilkan suatu tulisan hanya satu kali saja, yaitu ketika ia menulisnya pertama kali secara semerta (spontan) di dalam bahunya." Ada kasus, Ajip Rosidi menulis sajak ke dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, juga Teti Relawati Candrawasisto menulis cerita pendek "Jakarta" dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Apakah kedua teks itu dapat disebut sebagai salah satu teks terjemahan atau bagaimana?

Saya tidak setuju dengan Teeuw bahwa sajak "Jante Arkidam" dalam beberapa hal lebih kuat dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda. Tampaknya, Teeuw tidak mengerti bahasa Sunda. "Jante Arkidam" lebih kuat ditulis dalam bahasa Sunda daripada dalam bahasa Indonesia.

Jawaban:

Pada dasarnya komunikasi adalah proses menerjemahkan. Kita akan menginterpretasi dulu hal-hal yang akan kita bicarakan atau kita tulis. Hasil interpretasi ini diungkapkan dengan unsur bahasa. Jadi, kita menerjemahkan satu dunia yang kita lihat untuk dapat dipahami orang lain. Kalau kita melihat komunikasi seperti ini, sajak tadi adalah contoh komunikasi atau proses psikologis interpretasi. Hal tersebut dinamakan proses psikologis interpretasi. Saya tidak tahu mana yang lebih dahulu dia buat. Yang pasti tidak membuat bahasa Indonesia dan bahasa Sunda sekaligus. Yang dibuat lebih dahulu itu adalah teks pertama dan teks kedua, mungkin saja diterjemahkan, oleh pengarang yang sama. Pengungkapan sajak ke dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, itu terserah dia. Saya kira, itu adalah kasus yang unik di Indonesia karena bahasa Sunda adalah bahasa ibu kita. Orang Inggris menulis bahasa ibunya bahasa Inggris. Di Indonesia tidak begitu. Jika bahasa ibunya bahasa Sunda, dia akan menulis dalam bahasa Sunda. Namun, dia ingin karyanya dibaca oleh sebanyak mungkin orang Indonesia. Maka, dibuat

lagi mungkin dalam bahasa Indonesia. Apakah itu hasil terjemahan dengan memperhatikan kata per kata, seperti kita menerjemahkan dari bahasa asing, atau hasil menginterpretasi yang diungkapkan kembali?

2. **Pertanyaan:** Didin Wahjudin, IKIP Surabaya

Pengetahuan saya selama ini tentang penerjemahan, hanya sebatas alih kode. Ibu tadi menyatakan bahwa penerjemahan itu didasarkan pada interpretasi, yaitu seperti penafsiran terhadap suatu karya. Jika begitu dalam penerjemahan ini unsur apa saja yang perlu diterjemahkan oleh seorang penerjemah? Saya membaca *Orang Asing* terjemahan Apanti Djokosujatno yang mengubah total unsur budaya Perancis ke dalam budaya Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu?

Jawaban:

Saya perlu menunjukkan tiga model penerjemahan, yaitu sebagai berikut.

- a. Penerjemahan linguistik menggunakan analisis kontrastif untuk dapat membedakan unsur-unsur dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain.
- b. Penerjemahan pedagogis dasarnya adalah stilistika bandingan. Misalnya, kita mengenal "teh celup" karena praktis dibuat semua orang menggunakan teh celup walaupun kita mengetahui bahasa Inggrisnya adalah "tea bag". Untuk orang Inggris dilihat kantongnya *tea bag*, orang Indonesia dilihat fungsinya harus dicelup, jadi teh celup. Dari segi stilistika ini menarik karena ada perubahan sudut pandang. Penerjemahan interpretasi adalah menerjemahkan suatu dunia untuk diketahui orang lain. Memang, ada risiko dia salah interpretasi. Kita ingat bahwa tidak akan ada *sartre* kalau manusia itu tidak salah mengerti Heidegger. Dia menerjemahkan Heidegger, dia salah mengerti, maka muncullah filsafat *Sartre*. Sebagai penerjemah jangan sampai salah paham mengenai perubahan budaya. Tidak bisa dihindari kalau si penerjemah berkeinginan membuat pembacanya memahami teksnya. Hanya, sekarang harus dibedakan sejauh mana kita bisa menyadur. Terjemahan bebas itu ada batasnya sampai disebut saduran, pencatatan kembali, dan sebagainya.

3. **Pertanyaan:** Nurhayati, Universitas Sriwijaya

- a. Pada makalah Ibu halaman 6, dikemukakan bahwa ada kata-kata karya sastra populer, kemudian Ibu menyetarakan karya sastra ini dengan *best seller*. Saya rasa perlu dibedakan karena karya sastra populer adalah kontradiksi dari karya sastra tinggi atau karya sastra bermutu. Mohon penjelasan!
- b. Ibu mengatakan bahwa usaha penerjemahan karya sastra merupakan tindakan yang memperkosa karya sastra itu sendiri. Saya rasa ini merupakan kata-kata yang agak ekstrem. Ibu juga menyatakan bahwa penerjemahan merupakan dampak positif terhadap perkembangan bahasa. Mohon penjelasan!

- c. Pada makalah Ibu halaman 5, mohon dikoreksi. Kalau penerjemahan tetap mandiri dan bebas dengan teks pertama, berarti dia tidak mandiri. Teks yang dihasilkannya, maksudnya terjemahannya, dalam hal ini hampir sama mandiri dan sama bebas dengan teks pertama. Kalau hampir sama, berarti tidak mandiri dalam hal ini!

Jawaban:

Saya jawab dulu yang pertama, mengenai istilah. Saya membaca di dalam makalah salah seorang peserta yang membedakan antara sastra tinggi, sastra pop, dan sastra massa. *Best seller* dimasukkan dalam sastra pop, sedangkan komik termasuk sastra massa atau sastra populer. Saya berterima kasih atas peringatan Ibu karena tadi malam saya juga membacanya ternyata ada pembagian yang lebih halus. Saya membaginya secara kasar, ada yang tinggi dan ada yang populer. Ternyata, ada yang di tengah-tengah.

Kedua, mengenai kemandirian teks. Kalau kita menerjemahkan karya sastra, kita tahu bahwa itu adalah karya seni. Kita tidak dapat hanya menerjemahkan begitu saja. Kebetulan saya banyak menerjemahkan karya-karya ilmiah sehingga saya dapat merasakan bedanya dan sampai saat ini saya tidak berani menerjemahkan karya sastra. Menerjemahkan komik lebih mudah karena anak-anak bisa ditipu-tipu. Penerjemahan teks nonsastra itu objektif dia bicara tentang objek, sedangkan karya sastra itu subjektif, apalagi ada kreativitas di dalamnya. Seorang penerjemah dituntut untuk berkreasi, itu sebabnya seorang penulis pernah mengatakan bahwa penerjemahan karya sastra itu penuh kejutan. Bahkan, ada seorang penyair sangat memuji terjemahan syairnya dan dia mengatakan saya melihat diri saya lain di sana, seperti mengalami transformasi. Penerjemahan karya sastra itu merupakan penulisan kedua. Kalau penerjemahan karya sastra berpretensi mengulangi kata-kata penulis di dalam bahasa sasaran, itu tidak mungkin. Coba saja Anda mengulangi kata-kata saya secara tepat sama. Anda harus menangkap, seperti yang dijelaskan oleh Pak Fuad Hassan, sebuah data. Yang akan diolah penambahan atau pemenggalan. Itulah anjuran dari para pakar penerjemah karya sastra.

4. Pertanyaan: H.S. Suryatin, FPBS IKIP Bandung

- a. Saya mendengar dari ceramah Pak Habiebie bahwa kita boleh mengikuti iptek sampai kemana pun, tetapi jangan lupa kita takwa kepada pencipta kita dan tetap berpijak pada akar budaya bangsa kita. Berdasarkan hal itu, apakah upaya Ibu dalam menerjemahkan karya-karya sastra asing yang jauh berbeda dengan budaya kita?
- b. Apakah benar kata-kata ibu yang diungkapkan bahwa lebih mudah menerjemahkan komik dengan menipu anak-anak? Mudah-mudahan harapan saya yang

sudah bercucu lima ini, tipu-tipuan itu membalikkan 180 derajat budaya asing kepada nilai-nilai budaya bangsa yang harus dimiliki oleh anak-anak kita.

- c. Ibu mengatakan bahwa ada sastra tinggi dan sastra pop atau sastra massa. Apakah sastra massa itu dapat disamakan dengan sastra yang komersial karena ibu memberi contoh komik. Sastra yang di tengah-tengah itu disebut dengan istilah apa?

Jawaban:

Kita sebagai bangsa yang tinggal di perempatan atau di persilangan antara negara tidak dapat menolak budaya asing. Apakah ibu yakin bahwa akar budaya bangsa kita yang kita anggap sebagai akar budaya itu bukan karena kita kedatangan orang India, misalnya, atau kita pernah kedatangan orang Gujarat? Kita juga tidak yakin. Jadi, di satu pihak kita jangan terlalu membuka diri sehingga kita larut ke dalam budaya asing, tetapi juga sebaiknya tidak menutup diri. Saya kira karya penerjemahan ini peranannya di sana.

Pertanyaan yang kedua itu hanya komentar dalam penerjemahan komik tidak dapat kita terjemahkan begitu saja. Seringkali, kita mengubah kata-kata agar cerita itu mudah diterima. Jadi, saya tidak perlu bersusah payah mencari padanan meskipun sebenarnya kalau anak itu tahu bahasa Prancis, dia pasti akan menanyakan kebenaran kata-kata yang saya terjemahkan.

Ada tiga kelompok jenis sastra, yaitu yang kesatu sastra tinggi, yang kedua sastra pop, yang ketiga sastra massa. Jadi sastra tinggi, sastra klasik dimulai dari *Arjuna Wiwaha* sampai *Layar Terkembang*. Ziarah mungkin akan menjadi sastra klasik sastra pop adalah *best seller*, sedangkan sastra massa itu komik. Sastra komersial, tergantung pada karya besar yang sangat bermutu dari segi seni yang laku keras. Sementara itu sebuah komik karena tidak menarik, tidak laku. Jadi, saya kira soal komersial, tidak komersial, agak sulit. Dengan sangat menyesal, kita tutup acara diskusi yang sangat menarik ini.

PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA MELALUI PENELITIAN

Multamia R.M.T. Lauder
Universitas Indonesia

1. Latar

Siapa yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari untuk mengungkapkan cita rasa dan pikiran? Berdasarkan Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduk Indonesia tercatat 146.775.000 jiwa. Mereka yang mengaku sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia hanya 17.505.000 orang atau rata-rata 12% dari seluruh penduduk Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, juga berdasarkan Sensus Penduduk 1990, jumlah penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas tercatat 157.924.324 jiwa. Mereka yang menyatakan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia menjadi 27.055.488 orang atau rata-rata 15% dari seluruh penduduk Indonesia.

Berdasarkan data dari Sensus Penduduk 1980 dan 1990 itu, terlihat bahwa penduduk yang mengaku berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meningkat. Hal ini, walaupun kadar lajunya tidak begitu pesat, tetap menunjukkan kemajuan jika ditinjau dari sudut pemasyarakatan bahasa Indonesia atau penyebaran bahasa Indonesia.

Sebagai langkah awal, ada baiknya kita menengok sejenak kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang menyatakan bahwa *bahasa negara ialah bahasa Indonesia*. Alwi (1993) mengulas lebih lanjut bahwa pernyataan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu, sekurang-kurangnya mengisyaratkan adanya lima fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu:

- (1) *sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan,*
- (2) *sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan jenjang pendidikan (dengan catatan tambahan tentang dijadikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi),*
- (3) *sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional),*
- (4) *sebagai sarana pengembangan iptek, dan*
- (5) *sebagai sarana pengembangan kebudayaan.*

Dengan mengacu pada penjabaran Alwi (1993) mengenai fungsi bahasa Indonesia itu, sekurang-kurangnya dapat dipikirkan bahwa ada lima hal yang harus diperhatikan jika akan melaksanakan pengembangan bahasa Indonesia, yaitu:

- (1) *bahasa Indonesia harus dikembangkan agar penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,*
- (2) *bahasa Indonesia harus dikembangkan agar menjadi bahasa pengantar yang efektif pada semua jenis dan jenjang pendidikan,*
- (3) *bahasa Indonesia harus dikembangkan agar menjadi bahasa perhubungan nasional terutama dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional,*
- (4) *bahasa Indonesia harus dikembangkan agar menjadi sarana pengembangan iptek, dan*
- (5) *bahasa Indonesia juga harus dikembangkan agar menjadi sarana pengembangan kebudayaan.*

Program pengembangan bahasa Indonesia sebaiknya direncanakan sejalan dengan fungsi yang diemban oleh bahasa Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengembangan bahasa Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah dan sekali jalan.

2. Situasi Kebahasaan

Situasi kebahasaan kita yang multilingual sekurang-kurangnya menyiratkan adanya dua kubu bahasa yang hidup berdampingan, yaitu kubu bahasa daerah dan kubu bahasa Indonesia. Situasi diglosik seperti itu, secara alamiah kita dapati di hampir seluruh wilayah Indonesia. Akhir-akhir ini, kehadiran situasi diglosik semakin nyata. Bahasa daerah pada umumnya dipilih untuk menyatakan hal-hal yang bersifat keseharian dan kedaerahan, sedangkan bahasa Indonesia dipilih untuk menyatakan hal-hal yang bersifat kedinasan.

Berdasarkan hasil Penelitian Kelompok LIPI dan FSUI¹ dinyatakan bahwa apabila kita hendak memperoleh gambaran sinkronis tentang keadaan kebahasaan dalam masyarakat Indonesia, keadaan itu haruslah dipikirkan menurut dua perspektif, yaitu (1) menurut perspektif ketersediaan bahasa, dan (2) menurut perspektif penggunaan bahasa.

Menurut perspektif ketersediaan bahasa, bahasa-bahasa membentuk superimposisi dari tiga lapisan interaksi, yaitu bahasa suku bangsa; bahasa antarsuku bangsa; dan bahasa Indonesia. Pada lapisan dasar terdapat bahasa suku bangsa; di atas lapisan dasar itu terdapat suatu bahasa yang berfungsi sebagai bahasa pergaulan antarsuku bangsa. Jika bahasa itu bahasa Melayu, bahasa ini dapat berfungsi sebagai bahasa suku bangsa dan atau bahasa perantara. Dengan demikian, bahasa Melayu pada lapisan ini dapat pula berperan sebagai bahasa lisan nonformal dengan bahasa Indonesia sebagai mitra formalnya. Akhirnya, bahasa Indonesia berada pada lapisan teratas yang mencakupi semua bahasa yang berada pada lapisan-lapisan di bawahnya. Menurut perspektif penggunaan bahasa, bahasa-bahasa tersebut terikat dalam suatu hierarki yang menentukan prioritas bahasa mana dapat dipilih dalam situasi apa. Dalam hal ini, bahasa perantara memainkan peranan yang penting.

Situasi kebahasaan di Indonesia ternyata tidak sesederhana yang kita duga. Dengan mengacu pada perspektif ketersediaan bahasa dan perspektif penggunaan bahasa, situasinya lebih bersifat multiglosik daripada diglosik. Kehadiran bahasa perantara, sebagai kenyataan yang hadir di dalam situasi kebahasaan, perlu mendapat perhatian karena bahasa ini seolah-olah menjembatani antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia.

Bahasa perantara muncul semata-mata karena kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara tepat dan mengena. Hibrida antara bahasa daerah setempat dan bahasa Indonesia yang menghasilkan bahasa perantara itu, mereka rasakan dapat memenuhi kebutuhan mereka sebagai alat ekspresi diri sekaligus penanda jati diri bahasa perantara. Menurut pendapat saya, sekurangnya perlu ditinjau agar rencana pembuatan program pengembangan bahasa dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pemakainya.

3. Masyarakat Bahasa

Bahasa hanyalah cermin dari konsep-konsep tatanan hidup masyarakat pemakainya. Dengan demikian, bahasa cenderung berubah mengikuti derap perubahan yang muncul pada tatanan kehidupan masyarakat pemakainya.

Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang sudah barang tentu menunjukkan adanya perbedaan dengan bahasa Indonesia setengah abad yang lalu. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan tatanan hidup. Kini masyarakat pemakai bahasa Indonesia sibuk membangun dan berbenah diri untuk menyambut ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan sebelumnya masyarakat pemakai bahasa Indonesia masih sibuk dengan masalah pergerakan dan kemerdekaan.

Untuk dapat mengikuti derap langkah perubahan masyarakat pendukungnya, dasar dan arah kebijakan pengembangan bahasa harus berdasarkan situasi kebahasaan yang aktual sehingga menghasilkan bahasa Indonesia yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, "persaingan" di antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing agar dapat terkendali. Saya cenderung melihat pengendalian itu sebagai distribusi komplementer dalam masalah pemakaian bahasa. Tiap bahasa mempunyai fungsi dan perannya sendiri-sendiri sehingga dapat saling melengkapi.

Cukup banyak ahli bahasa, khususnya para ahli dialektologi, yang mencemaskan penyebaran dan penyusupan bahasa Indonesia secara besar-besaran sehingga pada akhirnya akan memusnahkan bahasa daerah. Menurut pendapat saya, kekhawatiran itu lebih berdasarkan pada perasaan bukan pada fakta di lapangan. Mereka yang mengkhawatirkan kemurnian bahasa-bahasa daerah itu terancam memberikan "bukti-bukti" pemakaian kalimat yang dianggapnya sudah bercampur-aduk dan tidak lazim dalam aturan bahasa daerah. Apabila dikaji lebih lanjut, pada umumnya, bukti-bukti yang mereka ajukan itu adalah sejenis bahasa yang saya golongkan sebagai bahasa perantara, bukan bahasa daerahnya itu sendiri.

Menurut pendapat saya, kekhawatiran musnahnya bahasa daerah tidak berdasar, justru hasil penelitian (Muhadjir dan Lauder, 1990) dapat menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia di seluruh Indonesia persentasenya kecil sekali jika dibandingkan dengan pemakaian bahasa daerah. Proporsi pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik menurut usia, pendidikan, status sekolah, pekerjaan utama, maupun agama, menunjukkan bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia cenderung menggunakan bahasa daerah.

4. Peran Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pada hakikatnya kita menginginkan bahasa Indonesia itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakainya. Dalam hal ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, saya anggap, mempunyai kewajiban untuk menyusun program jangka pendek dan jangka panjang pengembangan bahasa Indonesia.

Harus disadari sepenuhnya bahwa pemerintah, menurut pendapat saya, mempunyai dua kepentingan nasional yang agaknya bersifat kontradiktif, yaitu program pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di satu pihak dan program pelestarian bahasa-bahasa daerah sebagai unsur kebudayaan nasional di lain pihak. Kedua kegiatan itu saya anggap kontradiksi karena sudah sewajarnya jika di dalam sebuah ruang gerak yang sama, sebuah bahasa pemersatu dikembangkan. Akibatnya, secara tidak langsung akan mendesak ruang gerak dan daya hidup bahasa suku bangsa.

Jika bahasa-bahasa daerah itu ingin tetap dilestarikan dan pada saat yang sama bahasa Indonesia juga harus berdiri kokoh sebagai bahasa persatuan, diperlukan informasi dasar mengenai situasi kebahasaan di Indonesia. Informasi tersebut sangat diperlukan untuk menyusun rencana kerja pengembangan bahasa Indonesia yang operasional. Dalam hal ini, informasi dasar mengenai situasi kebahasaan harus didasarkan pada data empiris di lapangan.

Sebelum mencoba menyusun rencana program pengembangan bahasa Indonesia ada baiknya jika kita jenguk sepiintas struktur organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang dianggap berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pengembangan bahasa Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terdiri atas Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah; Bidang Sastra Indonesia dan Daerah; Bidang Peristilahan dan Perkamusan; dan Bidang Pengembangan. Dengan melihat struktur organisasi yang semacam itu, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Pertama, apakah Bidang Pengembangan membuat perencanaan untuk pengembangan bahasa Indonesia di masa mendatang dan siapakah yang melaksanakan pengembangan bahasa Indonesia itu? Sejauh pengetahuan saya, Bidang Pengembangan cenderung melaksanakan pemasyarakatan bahasa, dalam berbagai bentuk, antara lain, penyuluhan bahasa. Jika hal itu benar, Bidang Pengembangan cenderung melaksanakan penyebaran bahasa Indonesia dan bukannya pengembangan bahasa Indonesia. Pertanyaan kedua, jika Bidang Pengembangan tidak membuat perencanaan dan pelaksanaan pengembangan

bahasa Indonesia, lalu tugas ini diambil alih oleh bidang yang mana? Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah dan/atau Bidang Peristilahan dan Perkamusan? Saya yakin, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan bahasa Indonesia sudah merupakan bagian yang integral dari kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Hanya saja gambarannya belum jelas, walaupun perencanaan bahasa disusun, dapat dibayangkan kerepotannya dan kendala-kendala yang mereka hadapi, mengingat struktur organisasinya tidak mendukung. Selain itu, bagaimanakah proporsi perhatian Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Kelihatannya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa lebih memfokuskan diri pada bahasa Indonesia, sedangkan bahasa daerah dipercayakan kepada Balai Bahasa yang berada di Yogyakarta, Bali, dan Ujung Pandang. Dengan demikian, apakah semua bahasa daerah sudah mendapat perhatian yang cukup? Hal ini saya pertanyakan mengingat:

- (1) *"bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh para penuturnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara".*
- (2) *Undang-Undang Nomor 4, Tahun 1950, Bab IV, Pasal 5, Ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa guru diperbolehkan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tiga kelas terendah di SD.*
- (3) *bahasa daerah dapat dianggap sebagai bahan baku atau pemasok untuk pengembangan bahasa Indonesia.*

Bahkan, Alwi (1993:5) berpendapat bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai salah satu sarana pendidikan dini; sebagai landasan pengembangan dan pemerdayaan perbendaharaan bahasa Indonesia; sebagai khazanah kebudayaan nasional; sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa.

Berdasarkan pendapat itu, lebih lanjut, dapat diuraikan lagi bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana berpikir, bahasa daerah berfungsi sebagai landasan pengembangan dan pemerdayaan bahasa Indonesia, dan bahasa asing berfungsi sebagai alat memperluas cakrawala berpikir.

5. Objek Penelitian

Sudah masanya kita menyadari bahwa bahasa Indonesia yang akan kita jadikan objek penelitian adalah sebuah bahasa yang majemuk. Jika ditelusur dari proses pembentukannya saja, sudah dapat diperkirakan hadirnya lapis-lapis budaya yang saling berdampingan dan/atau bertumpang tindih. Pemahaman yang benar mengenai proses pertumbuhan bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk memahami karakteristik bahasa Indonesia dengan lebih baik yang pada akhirnya dapat membantu merumuskan perencanaan pengembangan bahasa itu sendiri dengan lebih cermat.

Anggapan atau dugaan mengenai asal-usul bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu Riau perlu ditinjau kembali dengan teliti. Apakah dugaan itu benar? Bahkan, dugaan itu seolah-olah sudah berkembang menjadi "mitos". Ternyata, pengetahuan kita mengenai proses perkembangan bahasa Indonesia masih samar.

Masalahnya, sampai saat ini belum ada penelitian yang dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Katakanlah, bukti-bukti linguistik perkembangan bahasa Indonesia awal sampai bahasa Indonesia modern memang belum pernah dikumpulkan.

Mengapa bahasa Indonesia memperlihatkan perkembangan yang berbeda dari bahasa Malaysia? Apakah salah satu kemungkinannya karena kedua bahasa itu berpijak pada dua dialek bahasa Melayu yang berbeda? Apakah mungkin bahasa Malaysia itu mendasarkan diri pada sebuah dialek Melayu di wilayah Indonesia bagian Barat, sedangkan bahasa Indonesia mendasarkan diri pada sebuah dialek Melayu di wilayah Indonesia bagian Timur? Selain itu, mungkinkah jika dalam perkembangannya, bahasa Malaysia banyak menggali ke dalam bahasa Melayu itu sendiri untuk pengembangan konsep-konsep baru guna menampung gejolak pembaruan dalam masyarakat pemakainya? Di lain pihak, bahasa Indonesia dalam mengembangkan dirinya lebih banyak memanfaatkan kosakata dari berbagai bahasa daerah? Jika dugaan itu benar, tentunya wajar jika dalam perjalanan pengembangan bahasanya antara bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia terjadi gerakan yang bersifat divergensi.

Kemajemukan lain dari bahasa Indonesia jika ditinjau dari sudut pandang dialektologi memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia baku yang biasa digunakan untuk keperluan kedinasan bersifat situasional sehingga tidak mungkin untuk dipetakan, sedangkan, bahasa Indonesia nonbaku yang biasa digunakan untuk keperluan keseharian bersifat regional sehingga dapat dibuatkan peta bahasanya.

Mengingat kemajemukan profil bahasa Indonesia, sebaiknya secara eksplisit dinyatakan bahasa Indonesia yang mana yang akan dijadikan objek penelitian. Sekurang-kurangnya harus jelas bahwa yang diteliti adalah ragam bahasa Indonesia tertentu, dapat dikatakan misalnya, bahasa Indonesia ragam formal atau nonformal, atau ragam bahasa lisan atau bahasa tulis. Makin cermat kita membuat rambu-rambu akan makin tajam hasil yang diperoleh.

6. Hasil Penelitian

Penelitian yang dirancang untuk pengembangan bahasa Indonesia diharapkan hasil penelitiannya harus dapat memberikan masukan untuk membuat perencanaan pengembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitiannya jangan terbatas pada penelitian yang bersifat mikrolinguistik saja. Penelitian makrolinguistik dan juga penelitian nonlinguistik yang dapat memberi masukan harus diberi kesempatan. Penelitian mikrolinguistik pada umumnya sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu linguistik itu sendiri. Hal yang diperlukan saat ini, yaitu merancang penelitian untuk pengembangan bahasa Indonesia dengan batasan penelitian itu mempunyai ruang lingkup yang jelas dan jangkauannya nasional. Selain itu, penelitian-penelitian untuk pengembangan bahasa juga harus mencakup bahasa daerah jika bahasa daerah diakui fungsinya sebagai pemasok utama bahasa Indonesia.

Jangan salahkan orang luar jika mereka menganggap bahwa orang-orang yang berkecimpung di bidang bahasa dan sastra tidak memberikan sumbangan apa pun bagi pembangunan bangsa. Pandangan itu muncul, karena sejujurnya sebagian besar dari kita memang terlalu sibuk dengan penelitian-penelitian yang mikroskopik yang hanya dapat dimengerti dan dimanfaatkan oleh kalangan ahli bahasa saja. Sekarang saatnya kita membuat perencanaan penelitian yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita harus menunjukkan pada masyarakat bahwa sumbangan kita untuk pembangunan bangsa ini juga besar. Salah satu di antaranya ialah yaitu berusaha mengembangkan bahasa Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat pemakainya.

Pada bagian ini akan disampaikan salah satu penelitian nonlinguistik yang dapat kita manfaatkan sebagai masukan untuk pengembangan bahasa Indonesia. Suparman (1987) berusaha mencari keterkaitan beberapa indikator sosial dengan indikator tingkat kemampuan berbahasa Indonesia. Ia melihat sejauh mana pemerintah dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Ada lima faktor yang ditelitinya, yaitu faktor kesehatan, sarana lingkungan, ekonomi, demografi, dan pendidikan. Hasil analisisnya menyatakan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia dipengaruhi secara langsung oleh faktor pendidikan, sarana lingkungan, dan kesehatan. Dengan demikian, pengembangan bahasa Indonesia tidak semata-mata tanggung jawab para ahli bahasa. Akan tetapi, merupakan tanggung jawab kita semua. Berdasarkan hasil penelitian itu, sebenarnya pemerintah dapat membantu dengan melakukan intervensi pada faktor pendidikan dengan memperbaiki ratio antara banyaknya murid SD yang dilayani oleh 1 orang guru; pada faktor sarana lingkungan dengan memprioritaskan proyek listrik masuk desa; dan pada faktor kesehatan dengan memperbaiki ratio antara banyaknya dokter per 10.000 jiwa.

Suparman juga menyarankan agar para imam pada salat Jumat di daerah-daerah sebaiknya mulai menyadari bahwa mereka dapat merupakan pahlawan-pahlawan masyarakat bahasa Indonesia, seandainya di dalam memberikan khotbah Jumat diusahakan menyusupkan bahasa Indonesia sehingga tanpa disadari, secara bertahap mendidik penduduk setempat berbahasa Indonesia.

7. Pengembangan Bahasa Indonesia

Menurut Ananta dan Hatmaji (1985), jumlah penduduk yang besar merupakan beban pembangunan. Beban pembangunan itu dapat diubah menjadi modal pembangunan jika mutu manusianya ditingkatkan. Mutu manusia berperan penting dalam menentukan apakah suatu jumlah penduduk merupakan beban atau modal pembangunan. Jumlah penduduk yang besar memang mempersulit usaha peningkatan mutu semua penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, strategi yang paling memungkinkan pada saat ini adalah pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana di satu pihak dan peningkatan mutu modal manusia di lain pihak.

Pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan salah satu segi pembangunan bangsa Indonesia. Sejumlah ahli malah telah menggunakan dan

memperhitungkan bahasa Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan mutu modal manusia Indonesia (Tjiptoherijanto, 1985:259). Andaikata bertambahnya pengetahuan dan pengalaman kerja dapat dijadikan tolok ukur semakin baiknya kualitas seseorang, pemakaian bahasa Indonesia tentunya secara tak langsung akan mempengaruhi mutu orang tersebut.

Kondisi yang ada saat ini, para ahli bahasa telah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan berbagai istilah baru, hanya saja, kerja keras itu belum tersebar luas di kalangan pemakai bahasa. Di pihak lain, masyarakat merasa tidak puas karena banyak hal tidak dapat diekspresikannya dengan tepat. Akhir-akhir ini, perkembangan profil bahasa Indonesia, justru memperlihatkan banyaknya kosakata asing yang "menyusup" ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia setelah melalui tahap adaptasi fonologis.

Kita sama-sama mengetahui tahapan yang harus kita laksanakan untuk menciptakan sebuah istilah baru. Bahasa asing merupakan pilihan terakhir. Akan tetapi, kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa bahasa asing merupakan pilihan favorit dan kini naik ke peringkat pertama. Tahapan-tahapan lainnya tak pernah disentuh apalagi diterapkan. Sebagai ahli bahasa, situasi dan kondisi masyarakat saat ini, harus ditanggapi secara tepat. Apakah kita akan tetap bertahan dengan rumusan yang kita buat puluhan tahun yang lalu itu, atau kita berusaha mereformulasikan prosedur kerja pembentukan istilah agar sesuai dengan situasi masyarakat masa kini? Hal ini, harus mendapat perhatian khusus, selain mencermatkan rancangan penelitian untuk pengembangan bahasa Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan jaman, kehidupan kebangsaan pun kian terjalin dengan masyarakat anatarbangsa sebagai mitra dialog yang kian kompleks pula. Sebagai bahagian masyarakat antarbangsa, kita pun harus memperkaya khazanah bahasa Indonesia—khususnya kosakata dan peristilahannya—sehingga apa yang kita serap dari lingkungan yang demikian luas dan multidimensional itu dapat juga diteruskan ke dalam masyarakat Indonesia. Proses ini tidak akan ada hentinya. Oleh karena itu, prosesperkayaan yang dialami oleh bahasa Indonesia berlangsung terus menerus. Mungkin dalam hubungan inilah terasa keperluannya untuk menciptakan kata dan istilah (Hassan, 1988)

Sakri (1993) berpendapat bahwa setiap bahasa alami memiliki kemampuan untuk berkembang ke segala arah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan komunikasi. Bila muncul perkara atau konsep baru di dalam pengalaman masyarakat bahasa, misalnya, temuan baru atau perjumpaan dengan masyarakat lain. Setiap bahasa alami ternyata mampu menemukan cara untuk mencipta kata atau ungkapannya. Jika ada orang yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia tidak mampu mengungkapkan gagasannya dengan tepat, mungkin orang itu lupa bahwa tulisan itu merupakan ungkapan pikir yang jernih dan merupakan keterampilan berbahasa tulis.

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, media pengungkap cita rasa, dan pikiran dapat saja kita biarkan tumbuh sendiri secara alami mengikuti kebutuhan

masyarakat pemakainya. Namun, hal itu memerlukan waktu, padahal tuntutan zaman memacu kita harus bersegera menggapai kemajuan agar sejajar dengan negara-negara lain di dunia ini. Perencanaan bahasa dalam hal ini perencanaan pengembangan bahasa dapat membantu mempercepat laju perkembangan itu.

Bahasa Indonesia, sebagaimana telah saya sampaikan di awal tulisan ini, harus dikembangkan sedemikian rupa agar sesuai dengan fungsi yang diembannya. Hal itu, ditegaskan pula oleh Moeliono (1985:78) yang menyatakan bahwa pengembangan bahasa Indonesia bertalian erat dengan proses pembangunan nasional yang sedang berlangsung di republik ini.

CATATAN

1. Penelitian "Pemakaian dan Perkembangan Indonesia dalam Hubungannya dengan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia" yang dibiayai oleh The Toyota Foundation dan akan segera terbit pada tahun 1994.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 1993. "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek." Makalah pada Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Hassan, Fuad. 1988. "Bahasa Indonesia dan Daya Penalaran." Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Lauder, Multamia R.M.T. 1990. "Pemetaan dan Distribusi Bahasa-Bahasa di Tangerang". Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Muhadjir dan Multamia R.M.T. Lauder. 1990. "Persebaran Pemakaian Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah." Makalah pada Seminar Sociolinguistik IV. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sakri, Adjat. 1993. "Tinjauan Mengenai Perkembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek." Makalah pada Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Suparman, I.A. 1988. "Keterkaitan Beberapa Indikator Sosial dengan Indikator Tingkat Kemampuan Berbahasa Indonesia". Makalah pada Seminar Sociolinguistik I. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengembangan Bahasa Indonesia Melalui Penelitian
Pemakalah : Multamia R.M.T. Lauder
Pemandu : Aron Meko Mbete
Pencatat : Mudini

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

- Di manakah letak pengembangan bahasa melalui penelitian?
- Apakah melalui penelitian, Ibu melihat kesenjangan antara teori yang diberikan di sekolah dan lingkungan yang ditempati.
- Berdasarkan penggunaan bahasa, apakah orang Mentawai berbahasa Mentawai, orang Minang berbahasa Minang atau berbahasa Indonesia? Apakah mereka menggunakan bahasa itu berdasarkan fungsi bahasa atau ada rasa bangga?

Jawaban:

- Penelitian tidak secara langsung dapat mengembangkan bahasa. Penelitian memberikan gambaran-gambaran lalu disusun program untuk membuat pengembangannya. Penelitian memberikan informasi/masukan serta situasi keadaan seperti ini. Oleh karena itu, buatlah program seperti ini yang cocok. Jangan sampai membuat program di belakang meja tanpa melihat situasi kebahasaan sebenarnya sehingga program itu tidak jalan.
- Karena teori itu dilahirkan di Barat, data itu berdasarkan penelitian di Barat, dan teori itu merupakan abstraksi penelitian setempat. Seharusnya teori itu dimodifikasi atau dibuat teori sendiri.
- Mereka menggunakan bahasa itu bukan karena kebanggaan. Kalau ia ingin berkomunikasi dengan orang lain ia harus memilih strategi. Jika ia berkomunikasi dengan orang sekampung, ia pakai bahasa setempat. Kalau bukan orang sekampung, baru ia pakai bahasa Minang. Kalau bukan orang Minang, baru ia pakai bahasa Indonesia. Jadi, ada hierarki pemilihan bahasa.

2. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

- Kita menyadari bahwa masyarakat kita masyarakat yang majemuk, multietnis dan multilingual. Apakah adil jika kita mempunyai harapan bahwa sehari-hari kita berbahasa Indonesia. Bukankah sehari-hari kita berbahasa Indonesia,

Bukankah bahasa daerah mempunyai fungsi sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Menurut saya, bahasa Indonesia dan bahasa daerah dapat berdampingan dan dibina bersama-sama.

- b. Dalam kaitan dengan pemanfaatan penelitian, strategi apa yang dapat dideskripsikan sebagai pedoman operasional dalam pengembangan bahasa Indonesia.

Jawaban:

- a. Mengenai pelaksanaan penelitian itu dilaksanakan ke mana dapat kita lihat pada halaman 2 (makalah ini). Penelitian itu harus diarahkan sesuai dengan fungsi yang diemban. Fungsi bahasa Indonesia itu ada lima, yaitu berfungsi sebagai a, b, c, d, dan e. Kita harus meneliti ragam-ragam yang ada pada kelima fungsi itu dan kita melihat seperti apa dan dikembangkan ke mana. Yang penting harus dilihat dan merupakan repertoar baru di dalam kebahasaan kita yang merupakan hasil penelitian LIPI itu ada bahasa antara.

Mengapa bahasa antara itu muncul sehingga para sesepuh menggerutu, anak sekarang sudah tidak berbahasa Jawa, Sunda, bahasanya sudah rusak. Yang mereka katakan rusak dan kacau itu menurut saya itu bahasa antara. Mereka tidak berbahasa Batak. Wadahnya batak, tetapi dicampur dengan bahasa Indonesia atau sebaliknya. Mereka berbahasa Indonesia ditambah bahasa Batak untuk menambah keakraban. Mereka itu menggunakan bahasa itu karena mereka membutuhkan. Mereka merasa bahasa daerah tidak sepenuhnya dapat mengekspresikan dan bahasa Indonesia pun tidak. Jadi, mereka jelas mengambil jalan dengan menggunakan bahasa antara. Hal ini perlu diteliti dan bukan untuk dilestarikan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan.

Kita dapat mendeteksi kebutuhan masyarakat melalui bahasa antara. Dengan demikian, kita dapat memberikan saran untuk menyusun pengembangan bahasa Indonesia, agar bahasa Indonesia itu dikembangkan, dipakai sesuai dengan kebutuhan masyarakat jangan sampai dikembangkan, tetapi kita tidak pakai.

- b. Bahasa yang dipakai bahasa sehari-hari di rumah.
-
3. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)
 - a. Bahasa daerah yang bagaimana yang tidak terancam.
 - b. Apakah dalam penelitian linguistik juga ditentukan kualitas bahasa itu.
 - c. Kekhawatiran terhadap keponakan bahasa daerah ada dasarnya sebab adanya diglosia berarti ada kebocoran
 - d. Penelitian model apa yang dilakukan

- e. Bahasa daerah tidak akan punah, kenyataannya bahasa selajar sekarang hanya dipakai oleh orang-orang tua

Jawaban:

- a. Yang perlu kita sadari bahwa bahasa daerah itu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, kalau kita menginginkan bahasa daerah persis seperti 50 tahun yang lalu juga tidak bisa dipakai sebagai alat untuk mengeskpresikan penuturnya. Kemungkinan oleh sesepeuh bahasanya yang dianggap sudah luntur sebenarnya itu tetap bahasa daerah. Bahasa daerah semacam itu tidak terancam, dia mempunyai daya hidup karena dibutuhkan oleh penuturnya untuk mengeskpresikan kebutuhannya.
- b. Kualitas belum diteliti.
- c. Bahasa daerah dan bahasa asing bisa sama-sama kita pakai untuk pembentukan istilah baru. Ada langkah-langkah, mulai dari bahasa yang kita pakai untuk pembentukan istilah baru. Ada langkah-langkah, mulai dari bahasa yang kita kenal, bahasa serumpun sampai pada bahasa asing. Sebetulnya bahasa asing yang menjadi bahan baku terakhir. Namun, sekarang terbalik bahasa asing yang menjadi bahan pokok, bahasa lainnya tidak diperhatikan. Apakah rumusan yang kita buat langkah pembentukan istilah itu akan kita pertahan-pertahankan, padahal kondisinya seperti ini, atau kita modifikasi.
- d. Penelitian sosiolinguistik ini tidak tepat karena hanya berbicara tentang orang. Hal ini dicatat dan diobservasi oleh para peneliti, yaitu ketika orang Mentawai itu pertama kali bertemu dengan seseorang yang belum dia kenal lalu itulah strategi berbahasa yang dia pakai.

Bahasa daerah menjadi terdesak, terancam mungkin, tetapi untuk punah kemungkinan itu tidak segawat yang kita pikirkan. Terancam mungkin daya gerakannya, ruang gerakannya makin kecil, tetapi punah, hilang, sulit sekali. Untuk menghilangkan bahasa daerah, kecuali orang Jawa dibunuh semua. Selama masih ada orangnya bahasa itu masih ada.

- e. Bahasa Layalo hampir punah dan sekarang orang-orang cenderung memakai bahasa Selajar. Memang ada bahasa-bahasa yang penuturnya sedikit dan kemungkinan bisa punah seperti bahasa di Irian Jaya yang penuturnya hanya 20-50 orang.

Kedua, kesempatan untuk hidup dengan menggunakan bahasa itu kecil sehingga terpaksa menggunakan bahasa Selajar untuk bisa mempertahankan hidupnya. Karena keadaan bahasa tidak bisa membantu untuk bertahan hidup, lebih baik berpindah bahasa. Ini kemungkinan untuk bahasa-bahasa yang sedikit jumlah penuturnya.

Masyarakat bertahan berbahasa daerah. Ini situasinya seperti di Lombok. Mereka lebih banyak berbahasa daerah daripada berbahasa Indonesia. Daerah seperti itu baik untuk diteliti supaya kita melihat faktor apa yang menyebabkan dan mempertahankan bahasa mereka. Faktor-faktor itu mungkin bisa kita terapkan ke bahasa lain yang hampir punah itu. Kita suntikkan faktor-faktor itu supaya dia ada daya hidupnya dan tahun 2005 masyarakat akan menggunakan bahasa Indonesia. Ini hanya prediksi yang dilakukan andaikata akselerasinya 5% per tahun tanpa memperhitungkan apapun. Daya hidup bahasa daerah, perkembangan ekonomi, kalau lajunya 5% itu konstan tanpa mempertimbangkan faktor lain.

KEMAJUAN PENELITIAN SASTRA INDONESIA: KONSEP PENELITIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Chamamah Soeratno

Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada

1. Pendahuluan

Penelitian merupakan satu kegiatan dengan ciri yang memperlihatkan sikap dan kerja yang cermat dan teliti (Fowler dan Fowler, 1950; Sumadi-Suryabrata, 1983; Sutrisno-Hadi, 1984). Sebagai istilah, kata *penelitian* sering dihubungkan dengan dan dilakukan untuk berbagai kepentingan, seperti penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi di lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan pusat-pusat studi.

Di perguruan tinggi, sebagaimana yang disebutkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, penelitian dirumuskan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam "upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian" (PP RI No. 30 Tahun 1990). Kegiatan penelitian, dengan demikian, dilakukan "dalam rangka memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta kehidupan bermasyarakat" (Statuta UGM, 1992).

Kegiatan penelitian tersebut, selama ini, telah dilakukan terhadap hasil-hasil sastra Indonesia. Pembicaraan di sini akan mengemukakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap hasil-hasil sastra Indonesia selama ini. Materi yang terkait dengan pembicaraan akan mencakup konsep tentang kerja penelitian dengan aspek-aspeknya dan perkembangan penelitian sastra di Indonesia.

Penelitian mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu. Apabila ilmu bersifat kumulatif, hidup dan berkembangnya ilmu bergantung kepada kegiatan yang mengakumulasinya. Dalam hal inilah, penelitian dengan hasil penelitiannya menyediakan unsur-unsur yang akan mengakumulasi ilmu. Hubungan yang erat antara penelitian dan ilmu memperlihatkan keduanya dalam sisi yang penting, sebagaimana dikatakan oleh Sutrisno Hadi 1988 bahwa ilmu dan penelitian seperti dua sisi pada mata uang. Oleh karena itu, dalam dunia ilmu, kerja penelitian merupakan satu kegiatan yang perlu senantiasa diupayakan. Sejalan dengan pandangan ini, *sastra* di dalam pembicaraan di sini akan dilihat dari sisinya sebagai ilmu, yaitu ilmu sastra.

Kedudukan sastra sebagai ilmu dapat dilihat dari fenomenanya sebagai suatu sistem yang terungkap pada hasil-hasil kegiatan yang disebut ciptaan sastra. Sebagai ilmu, dengan demikian, sastra dapat dikaji, ditelaah, dan diteliti, untuk mengungkapkan sisi keilmuannya. Jadi, penelitian sebagai bentuk studi sastra merupakan proses yang akan membuahakan prinsip umum yang berlaku pada ciptaan-ciptaan yang disebut hasil sastra. Demikian pula bagi penelitian sastra Indonesia. Prinsip atau kaidah-kaidah yang diangkat dari fenomena literer itulah yang akan menjadi unsur pembangun ilmu sastra Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Theodorson dan Theodorson (dalam Hamdani, 1988), penelitian merupakan *a systematic and objective attempt to study a problem for the purpose of deriving general principles*. Gejala yang bersifat umum menjadi indikasi akan suatu kebenaran ilmiah. Berdasar pemikiran tersebut, penelitian sastra di sini merupakan serangkaian kegiatan yang bercorak ilmu: cermat, teliti, sistematis, serta terorganisasi yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah atas fenomena kesastraan yang terungkap pada hasil-hasil kegiatan bersastra di Indonesia (bandingkan Effendi, 1978; Arief Budiman, Goenawan Mohamad, 1978).

Konsekuensi dari keberadaan sastra sebagai ilmu adalah bahwa pengembangannya memerlukan kegiatan penelitian dan bahwa upaya penelitian yang dilakukan terhadap ciptaan sastra memerlukan metode yang bercorak ilmu pula atau metode yang secara 'umum' dikenal dengan metode ilmiah. Pemakaian metode yang ilmiah berkaitan dengan sikap berpikir yang kritis yang berbeda dengan penelitian yang dalam menghadapi fenomena dikuasai oleh hal-hal yang bersifat subjektif, seperti intuisi, rasa, dan *commensense*. Merton (1957, dalam Bruce A. Chadwick dkk. dalam Sulistia dkk. 1991) mengatakan bahwa kerja yang bercorak ilmu bertolak dari kesangsian yang sistematis dan terorganisasi. Hasil penelitian yang diakui umum sebagai bersifat ilmiah (Koentjaraningrat, 1977; Nazir, 1985), antara lain, adalah validitasnya kerja penelitian yang ditentukan oleh kriteria "objektivitas" (bandingkan Budiman, 1978; Wellek dan Warren, 1956).

Sejalan dengan kondisinya sebagai kerja dengan metode ilmiah, penelitian sastra memperhitungkan sejumlah kriteria "ilmiah" yang selama ini diakui oleh umum, di antaranya adalah "bebas" dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, dan menggunakan ukuran "objektif" yang berarti tuntutan jarak metodologis (lihat Chamamah-Soeratno, 1989; bandingkan Nazir, 1987, Sutrisno Hadi, 1988). Penelitian dengan kriteria keilmiahannya inilah yang selama ini dituntut dalam kegiatan meneliti yang bersifat ilmiah, termasuk meneliti sastra.

Penelitian sastra, apabila dihadapkan pada tata kegiatan meneliti, sering harus berhadapan dengan berbagai masalah. Dua masalah yang menonjol dalam hal ini, pertama adalah masalah sifat ilmiah studi sastra itu sendiri (periksa pandangan Mh. Rustandi Kartakusuma 1960 dalam Pradopo, 1988 mengenai "keilmiahannya studi sastra") dan kedua adalah metodologinya.

Untuk menjawab masalah tersebut, perlu dilihat hakikat sastra pada situasi ontologis dan fenomenologisnya. Dari gejala literer yang diangkat dari hakikat sastra

tersebut akan dapat dikemukakan corak studi sastra, sifat ilmiahnya, dan kesahihan (validitas) serta kehandalan (*reliable*) metode yang dipergunakan.

Pembicaraan demikian sekaligus akan memberi satu alternatif jawaban atas pertanyaan yang selama ini sering diajukan yang menunjukkan keraguan mengenai keilmiahan studi sastra (Ellis, 1974) dan atas pertanyaan tentang macam metode yang akan menyediakan hasil penelitian yang sah dan handal selaku kegiatan yang bersifat ilmiah (Perhatikan berbagai kritikan yang sering dilontarkan terhadap keilmiahan studi sastra).

Kritikan tentang keilmiahan studi sastra yang sering dikaitkan dengan keberadaan sastra sebagai ilmu merupakan akibat dari pengelompokan "ilmu" menurut seorang filsuf bernama F. Windelband, yang disebutnya dengan ilmu nomotetis yang menekankan pada hukum-hukum umum dan ilmu idiografis yang menekankan pada hukum-hukum individual (dalam Vredenberg, 1985). Sebagai satu sistem yang terungkap pada hasil-hasil kegiatan bersastra, sastra memperlihatkan kaidah-kaidah, norma-norma, dan hukum-hukumnya (Effendi, 1978), selain juga memperlihatkan sisi individualitasnya sebagai ciptaan yang banyak terlibat di dalamnya unsur imajinasi. Oleh karena itu, muncul pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Wellek dan Warren bahwa *"Like every human being, each work of literature has its individual characteristics; but it also shares common properties with other works of art, just as every man shares traits with humanity, with all members of his sex, nation, class, profession, etc."* Jadi, sebagai satu disiplin perlu diperhatikan pula bahwa ilmu sastra pun mempunyai karakteristik keilmiahan sendiri, sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Wellek dan Warren, (1976) *"Literary scholarship has its own valid methods which are not always those of the natural sciences but are nevertheless intellectual methods"*. Oleh karena itu, validitas penelitian sastra mempunyai prinsipnya sendiri, seperti juga yang dikemukakan oleh Hirsch (1966), ialah *"The aim of validation is not reach an objective necessarily to denominate an individual victor, but rather to reach an objective conclusion about relative probabilities."* Tanggapan atas kritikan yang berhubungan dengan studi sastra, yaitu kritikan keilmiahannya, dapat diangkat dari konsep tentang hasil kegiatan yang bernama sastra sebagaimana terlihat pada pembicaraan pada situasi ontologis dan fenomenologis berikut.

2. Konsep Penelitian Sastra

Mengungkapkan konsep sastra, pada umumnya, tidak mudah. Para kritikus dan teoretisi sastra merasakan sulitnya memberi jawaban tentang pertanyaan "Apakah sastra itu". Pernyataan Hazard Adams dalam bukunya *The Interest of Criticism* yang dikemukakan oleh Ellis (1974), *"He considers it a vital question but immediately confesses that he cannot answer it"* menunjukkan bahwa akan selalu muncul pertanyaan yang berhubungan dengan penjelasan tentang konsep sastra, tetapi selalu pula berakhir pada kesimpulan yang menunjukkan kegagalannya. Di sini, upaya mengenali konsep sastra akan dilakukan melalui sifat-sifatnya sebagai sistem sastra.

Apabila satu fenomena menunjukkan bahwa sastra merupakan gejala yang universal, satu fenomena yang lain memperlihatkan bahwa sastra universal itu tidak mendapatkan konsepnya yang universal. Kriteria ke-"sastra"-an yang dominan dalam suatu masyarakat, misalnya kriteria rekaan yang dominan pada ciptaan sastra di dunia Barat, tidak dapat diterapkan pada kriteria ke-"sastra"-an yang ada pada masyarakat yang lain, seperti karya-karya yang ada di Arab, India, Cina, atau Jawa (Idema, 1976; Lichtenstadter, 1974, : Teeuw, 1984). Perhatikan, apabila kriteria itu diterapkan pada karya-karya yang selama ini dikenal sebagai karya sastra Jawa *Hadiluhung*, seperti *Serat Wulang Reh* dan *Wedatama*. Gejala demikian memperlihatkan bahwa sastra mengandung sifat yang umum, tetapi sekaligus juga sifat yang khusus.

Sebagai produk masyarakat, produk budaya, karya sastra adalah karya seni, yaitu karya yang berupa bangunan bahasa. Sastra dengan konsep seperti hanya dapat dijangkau pertama-tama melalui mediumnya yang berupa bahasa. Bahasa yang dipakai dalam sastra terlihat sebagai *organized in a particular way* (Lotman, 1972). Corak bahasa demikian adalah hasil pengolahan atau manipulasi (Yunus, 1985) dalam rangka memfungsikan bahasa secara maksimal untuk menghasilkan sastra sebagai organisme yang hidup. Pengolahan dan pemanipulasian bahasa sering terlihat oleh peneliti sebagai "menyimpang" (*ungrammaticalities* menurut Riffaterre, 1978), atau taksa. Penyusunan bahasa demikian, pada hakikatnya, adalah dalam rangka fungsi sastra sebagai sarana komunikasi yang padat informasi, yang maksimal—perhatikan teori informasi yang dikemukakan oleh Eco (1976)—, yang tidak dimiliki oleh sarana komunikasi yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lotman (1977), sastra memiliki "*an exclusive, inherent system of signs and rules governing their combination which serve to transmit special messages, nontransmittable by other means.*". Sebagai satu sistem, bahasa sastra yang dipakai berada dalam satu konteks kebulatan yang menyeluruh. Teksnya menampilkan fenomena yang hanya dapat ditangkap maknanya dalam hubungan timbal balik antarunsurnya (Ellis, 1974).

Sebagai produk masyarakat, karya sastra dapat dilihat keberadaannya sebagai tanda. Dalam rangka semiotik inilah segenap faktor yang ada dalam keseluruhan sastra, seperti faktor penciptaan, faktor pragmatik, faktor objektif, dan faktor mimetik berjalanan secara wajar. Kondisi dan situasi sastra demikian, dengan sendirinya, menuntut pendekatan yang bersifat holistik.

Sebagai gejala semiotik, sastra mengungkapkan fenomena yang memperlihatkan dialektika antara teks dan pembacanya. Dengan demikian, teks sastra tidak *self-formulated*. Dalam hal ini, peran pembaca menjadi penting. Dalam proses pembacaan, pembaca sudah dibekali dengan sejumlah pengetahuan yang dalam pembacaan berperan mengarahkan tindak pembacaannya (Jauss, 1974). Bekal pengetahuan, yang terbentuk dari sumber-sumber yang menurut istilah Iser (1978) *repertoire*, memasukkan pembaca dalam kegiatan berdialog dengan karya yang dihadapinya—interaksi antara pembaca dengan karya yang dihadapi. Dalam situasi itulah sastra terlihat sebagai struktur yang kompleks (Ellis, 1974:172) sehingga bersifat mentak (*probable*).

Hal ini menuntut proses pembacaan yang berkembang berdasarkan prinsip probabilitas (hementakan) juga.

Dalam hubungannya dengan peran pembaca perlu pula diingat bahwa pembaca bukan satu faktor yang mantap-stabil. Pembaca adalah faktor yang variabel, sesuai dengan masa, tempat, latar sosial budaya, dan pandangan hidup yang mewarnai pembacaan. Dari situasi ini terlihat bahwa dalam komunikasi sastra, informasi yang disampaikan oleh teks sastra sejalan dengan bekal pembacanya dan dengan kegiatan interaksinya dengan teks yang dibacanya. Oleh karena itu, teks sastra dapat mengungkapkan makna yang bermacam-macam kepada pembaca yang bermacam-macam pula (bandingkan Selden 1986). Faktor pembaca sebagai pihak yang dituju oleh informasi yang disampaikan oleh sastra dan proses pembacaannya, dengan demikian, menjadi penting. Studi sastra, dengan demikian, merupakan proses pertemuan antara ciptaan yang bernama karya sastra dengan pembacanya. Pernyataan ini sekaligus "memperbaiki" pandangan tentang adanya poros pengarang-teks-pembaca.

Dalam kegiatan melakukan studi sastra, pembaca adalah sang peneliti itu sendiri. Peneliti, dalam sejarah penerimaan karya sastra, adalah pembaca yang menempati mata rantai pembacaan yang terakhir (Jauss, 1975). Bandingkan dengan Vodicka yang menempatkan peneliti di luar pembaca sebagaimana Gunter (dalam Segers, 1978). Peneliti di sini adalah *real reader*. Selama ini dikenal sejumlah istilah untuk "pembaca", antara lain *ideal reader*, *implisit reader*, *hypothetical reader*, dan *real reader* (Iser, 1978); atau *superreader*, menurut Riffaterre, (dalam Jacques Ehrmann, 1970:203)—dengan memperhatikan peringatan Segers untuk penelitian resepsi eksperimental (1978). Dalam hal ini, perlu pula diperhatikan kedudukan pembaca yang peneliti berbeda dengan pembaca awam.

Dalam kaitannya dengan faktor pembaca, karya sastra lama yang muncul dalam naskah-naskah salinan dengan sejumlah variasi-teks variabel—memberikan gambaran akan adanya sambutan dan sekaligus penciptaan kembali dari pembaca yang penyalin. Munculnya sejumlah teks variabel dapat menandai adanya dinamik sistem dalam sejarah sastranya. Gejala demikian mengundang penelitian yang akan menelusuri sejarah pembacaan dan penerimaan suatu ciptaan sastra dalam interaksinya dengan faktor-faktor sosial budaya. Peneliti dalam menghadapi karya-karya sastra lama menghadapi corak dinamika sendiri. Ia ada dalam ketegangan antara makna kekinian—menurut konteks pembacaannya—dan makna kesejarahannya—yaitu makna yang muncul pada rangkaian penerimaannya.

Dalam hal studi yang dilakukan terhadap hasil-hasil sastra daerah, berbagai bentuk interferensi struktural antara peneliti dan konsep yang telah diwarnai tradisi Indonesia dengan tradisi daerah merupakan corak penelitian sendiri. Sementara itu, konsep sastra daerah dan sastra tradisional perlu juga memperoleh pengertian yang konsisten. Selama ini istilah sastra tradisional, yang dipertentangkan dengan modern, sering dipakai sebagai pengganti atau sinonim istilah sastra lama (Robson, 1978). Satu penyebutan yang tidak tepat.

Dari ciri yang dapat dilihat dari situasi sastra tersebut, dalam komunikasi sastra, peran peneliti menjadi penting. Peneliti yang mendapatkan masalahnya, yang menetapkan alat kerjanya—teori yang dimanfaatkan—, dia pulalah yang menggerakkannya untuk mencapai tujuan studi sastra, dan dia pulalah yang memberi warna pada wujud hasil penelitiannya.

Konsep tentang peran peneliti dalam kerja penelitian sastra Indonesia demikian besar pengaruhnya pada konsep tentang studi sastra, terutama yang marak dengan istilah *kritik*. Diskusi yang tak kunjung selesai mengenai telaah sastra terlihat sebagaimana yang dikemukakan oleh Arief Budiman dan Goenawan Mohamad, berhadapan dengan Nasution, dan S.Effendi dalam diskusi pada tahun enam puluhan (Ali, 1978). Demikian pula persoalan metodologinya yang masih senantiasa dalam dialog antara metode analitik dan metode *Ganzheit*, atau metode Rawamangun. Bahkan, pada suatu penataran ahli-ahli sastra pada tahun 1979, terlontar satu pembicaraan mengenai metode Samiriono, Yogyakarta, tetapi tidak berlanjut.

Penelitian sastra merupakan proses yang akan membuahkan prinsip-prinsip yang umum yang berlaku pada ciptaan-ciptaan yang disebut hasil sastra, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barthes, Culler, dan beberapa teoretisi dengan *to make explicit the underlying system which makes reading, literary effects possible* (Teeuw, 1982). Pernyataan itu menunjukkan bahwa kerja penelitian bertujuan mengungkapkan fenomena sastra yang terbaca pada ciptaan-ciptaan sastra, yang daripadanya akan terangkat prinsip-prinsip umum berlaku pada hasil-hasil kegiatan sastra (bandingkan Effendi, 1978). Dari prinsip-prinsip yang umum itulah diangkat konsep tentang sastra sebagai satu sistem. Penelitian sastra akan menghasilkan sejumlah teori mengenai sastra sebagai sistem, yaitu sistem yang berkaitan dengan proses penciptaannya, dengan realita dalam kehidupan, dengan wujud strukturnya, dan dengan perannya sebagai produk yang lahir dalam rangka fungsi. Sebagai pengembang ilmu sastra, dengan demikian, peneliti sastra akan memajukan dan mengembangkan ilmu sastra, Indonesia.

Dari konsep penelitian sastra seperti itu perlu diperhatikan kembali konsep tentang kritik sastra. Dalam hal ini, menarik dikemukakan pernyataan Arief Budiman dan Goenawan Mohamad yang membedakan kritik dengan penelitian, "... dalam bentuk karya kritik yang penting bukan kriteria objektif. ... Kritik bukanlah satu penelaahan, bukan penyiasatan, bukan penelitian, tetapi semata-mata kecakapan pengungkapan kembali suatu pengalaman estetik." (1978).

Dengan demikian, kegiatan penelitian tidak akan menghasilkan penilaian dalam arti kritik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hudson (1955) sebagai penghakiman dan sebagaimana yang dituntut oleh Pradopo dalam *Kritik Sastra Indonesia Modern* (1988) bagi kegiatan studi sastra yang berupa kritik sastra.

Dari konsep tentang sastra, terutama yang berkaitan dengan peran peneliti selaku pembaca, dapat dilihat bahwa penelitian sastra memberi tempat yang luas pada peran peneliti—dengan bekal pembacaannya—dan hasil interaksinya dengan ciptaan-ciptaan sastra yang diteliti. Sebagai akibatnya, penelitiannya perlu objektif; dan untuk

itu perlu pula memperhatikan jarak metodologis. Jadi, dalam penelitian sastra, peneliti merupakan satu faktor yang dominan.

Dari informasi yang mencakup segenap situasi kesastraan itu, hasil penelitian sastra dapat memberi sejumlah kegunaan, baik dari sisi keberadaan sastra sebagai ilmu maupun dari sisi keberadaannya sebagai produk masyarakat yang lahir dalam rangka fungsi-fungsi sosial. Di antara kegunaan itu dapat dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Mengungkapkan kode-kode, norma-norma, dan konvensi yang berlaku dalam ciptaan-ciptaan sastra. Pengungkapan kode, norma, dan konvensi sastra demikianlah yang selanjutnya akan melahirkan, memajukan, dan mengembangkan pandangan-pandangan tentang sastra, yang kelak terbentuk sebagai teori. Dengan kata lain, dari kerja penelitian sastra akan diketahui teori-teori sastra yang mungkin berlaku, metode-metode sastra yang memadai, dan pandangan-pandangan tentang kemungkinan munculnya bentuk-bentuk sastra. Kegunaan ini akan mengembangkan sastra dari sisinya sebagai satu ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu sastra Indonesia.
- 2) Kegunaan pertama tersebut selanjutnya akan mengungkapkan perkembangan sistem sastra pada suatu masyarakat sastra, sehingga dapat diketahui sejarah perkembangan sastra yang hidup dan berkembang dalam suatu tradisi sastra, seperti yang ada dalam dunia sastra Indonesia dan tradisi sastra pada khazanah sastra-sastra daerah di Indonesia. Demikian pula, akan dapat diungkapkan sejarah perkembangan pandangan hidup dalam suatu masyarakat, baik yang melatari penciptaan maupun yang melatari penikmatannya.
- 3) Berkaitan dengan kegunaan yang kedua itu, dari produk-produk sastra akan dapat diungkapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang akan menawarkan alternatif jawaban atas tuntutan kehidupan masyarakat. Dengan terangkatnya sejumlah nilai dari berbagai aspek dalam ciptaan yang dapat disarankan berbagai gagasan untuk memajukan dan mengembangkan kehidupan masyarakat.
- 4) Kegunaan yang ketiga itu selanjutnya akan memperlihatkan peran produk sastra bagi kehidupan masyarakat luas. Sebagaimana terlihat pada situasi kesastraan, ciptaan sastra merupakan sarana komunikasi yang paling ekonomis. Sastra memiliki "*an exclusive, inherent system of signs and rules governing their combination which serve to transmit special messages, nontransmittable by other means.*" (Lotman, 1977). Karya sastra menjadi sarana penyaji pesan yang efektif.
- 5) Penelitian yang menghasilkan bentuk parafrasanya, bentuk transformasinya, atau bentuk suntingannya (bagi teks sastra lama!) akan memberi kegunaan (a) dalam hal memperkenalkannya kepada masyarakat luas, (b) dalam hal menyediakan berbagai alternatif pembayangan dan penyaranan terhadap kehidupan, dan (c) dalam melestarikannya sebagai produk masyarakat yang fungsional bagi kehidupan.
- 6) Penelitian sastra dapat memberi pencerahan kepada masyarakat luas terhadap hasil-hasil sastra sehingga masyarakat merasa tertarik, merasa dan menangkap

manfaat yang tersimpan di dalamnya. Penelitian sastra akan mengungkap pentingnya peran sastra bagi kehidupan.

- 7) Dari pemanfaatan berbagai pandangan dan teori yang diperlukan serta metode yang memadai, kegiatan penelitian sastra akan menciptakan satu sikap kritis dan dinamis dalam menghadapi produk sastra yang banyak melibatkan unsur *verstehen* dan unsur analitis logis.
- 8) Peran sastra, baik dalam hal keberadaannya sebagai ilmu maupun dalam hal keberadaannya sebagai bentuk kreatif yang fungsional dalam kehidupan masyarakat, dalam penyebarluasannya menuntut pembelajaran. Pembelajaran sastra yang mendapat jangkauan penelitian, selanjutnya akan memperoleh kemajuan dan pengembangannya melalui kerja penelitian. Dengan demikian, kerja penelitian sastra yang ditujukan kepada pembelajarannya akan mencakup juga pengajarannya. Pengajaran sastra dapat berlangsung secara efektif dengan memanfaatkan hasil penelitian sastra yang berobjekkan pengajaran sastra. Pengajaran sastra, dengan demikian, akan mendapatkan buah pula dari kegiatan penelitian sastra.

3. Sejarah Perkembangan Penelitian Sastra

Sastra Indonesia dalam pembicaraan di sini dimaksudkan untuk menyebut sistem sastra yang terbaca pada karya-karya sastra yang tercipta di Indonesia, mencakup karya yang menggunakan bahasa Indonesia dan karya-karya sastra yang menggunakan bahasa daerah. Karya-karya itu meliputi karya dari kurun waktu lampau dan dari kurun masa kini (bandingkan Damono, 1983). Karya-karya sastra daerah yang dimaksudkan di sini adalah karya-karya yang tercipta dalam bahasa-bahasa daerah, seperti Jawa, Sunda, Aceh, dan Bali, yaitu karya-karya yang sering disebut karya sastra tradisional (Robson, 1978). Hasil-hasil sastra Indonesia telah diteliti dengan bermacam-macam motivasi, metode, dan pandangan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Studi terhadap karya-karya sastra lama selama ini telah dilakukan pada umumnya untuk memperoleh informasi, seperti data sejarah, sosial, dan budaya. Karya-karya, seperti *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Raja-Raja Pasai* dipandang sebagai sumber informasi yang penting bagi data Islamisasi Nusantara (Wake, 1964; Hill, 1963; Fatimi, 1963). Teks *Hikayat Hasanudin* (Edel, 1938), telah diteliti juga untuk menyusun sejarah Islamisasi Banten. Karya berbahasa Jawa (misalnya, *Babad Tanah Jawi*), juga yang berbahasa Sunda (misalnya, *Carita Parahyangan*), telah pula diteliti dalam fungsi demikian (Ekajati, 1988). Karya-karya sastra sebagaimana dikemukakan tersebut dipandang merupakan "sumber sejarah yang penting." (Liaw Yock Fang, 1978).

Karya-karya sastra, seperti *Syair Perahu* (Hamzah Fansuri), *Bustanussalatin* (Nuruddin Arraniri), *Kitab Seribu Masalah*, *Wulangreh*, *Wedatama*, juga, teks *Hikayat Syekh Abdulkodir Jaelani* dipandang sebagai karya ajaran agama. (Perhatikan uraian

yang terbaca pada Poerbatjaraka, 1952; Winstedt, 1977; Liauw Yock Fang, 1978; dan Ekajati, 1988). Pernyataan sebagai karya ajaran menjadi lebih kuat lagi dengan adanya penyebutan *kitab* atau *wulang* pada judul karya-karya itu.

Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa penelitian menyajikan kembali teks-teks lama dalam bentuk suntingan yang dinyatakan sebagai bentuknya yang "asli" atau "yang seharusnya", seperti karya Melayu *Hikayat Seribu Masalah* (Pijper, 1924), karya Jawa *Ramayana Kakawin* (H. Kern, 1900), *Adiparwa Oud Javaansche Prozageschrift* oleh H.H. Juynboll (1906), dan teks-teks Sunda Kuno seperti *Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian*, *Carita Parahyangan*, dan *Amanat dari Galunggung* (Ekajati, 1988).

Dari satu sisi, dapat dilihat bahwa studi sastra tersebut telah memberi sumbangan yang besar bagi masyarakat Indonesia dalam mengenali dan mengapresiasi produk-produk sastranya sendiri. Sekiranya tidak pernah terjadi studi terhadap karya-karya lama tersebut, niscaya masyarakat Indonesia masa kini kurang atau tidak mengenal karya-karya warisan nenek moyangnya—yang menurut istilah Teeuw (1982) *pramodern*. Pengenalan terhadap produk budaya sendiri merupakan satu faktor yang efektif bagi pengembangan kehidupan bersastra pada masyarakat Indonesia masa kini.

Dari sisi yang lain, hasil studi yang didasarkan pada pandangan terhadap sastra sebagai karya tulisan yang berisi catatan sejarah atau karya tulisan yang berupa buku pelajaran tidak melihatnya sebagai hasil kegiatan bersastra. Pandangan demikian merupakan akibat dari terbatasnya sumber informasi mengenai masa lampau sehingga masyarakat cenderung menyambutnya sebagai dokumen, sebagai catatan sejarah, atau sebagai kitab pelajaran (Doorenbos, 1933; Hidding, 1947; Nieuwenhuijze, 1948; Iskandar, 1964, 1965a, 1965b, 1965c, 1965d, 1966).

Perlu diperhatikan pula bahwa pandangan terhadap karya-karya dari visi kesejarahan ini menuntut perhatian atas faktor ke-"asli"-an teks dan ke-"benar"-an materi ajaran yang tersimpan di dalamnya. Metode yang dipergunakan biasanya mengikuti yang berlaku dalam filologi (metode *stemma*), yaitu metode yang diimpor dari Eropa melalui para peneliti asing yang ahli abad pertengahan. Penelitiannya diutamakan pada upaya menemukan bentuk asli teksnya, atau unsur pengaruh yang terbaca pada teksnya. Pandangan demikian menempatkan konsep kesejarahan: bentuk mula, unsur pengaruh, dan penyajian teks aslinya, dalam kedudukan yang penting pada penelitian sastra lama.

Penelitian dalam pandangan demikian sering dihadapkan pada unsur karya sastra yang menginformasikan data sejarah secara berbeda dengan yang diungkapkan oleh sumber sejarah yang lain (sumber Portugis atau sumber Cina) atau menginformasikan berita yang dipandang "tidak wajar" atau "suatu kekeliruan", sebagaimana yang dinyatakan oleh T. Iskandar terhadap *Hikayat Raja-Raja Pasai* (1964). Teksnya dilihat sebagai cerita khayalan atau mainan anak-anak saja (*fairy tales*, menurut istilah Bottoms, 1962), atau sebagai legenda seperti yang terungkap pada penelitian yang dilakukan terhadap *Hikayat Banten* (Hoesein Djajadiningrat, 1913).

Dalam hal sastra modern, penelitian cenderung pada faktor penciptaan, atau arah lahirnya karya sastra. Studi terhadap suatu teks sastra mengaitkannya dengan pengarang sebagai penciptanya. Berbagai pembicaraan tentang ciptaan sastra Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh H.B. Jassin dalam *Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang, Gema Tanah Air, Pujangga Baru, Kesusastraan Indonesia dalam Kritik dan Esai* (1955) memperlihatkan wajah teks sastra yang tak lepas dari pengarangnya, seperti yang dilakukan oleh Boen S. Oemaryati dengan *Satu Pembicaraan Roman Atheis* (1962), oleh J.U. Nasution dengan *Sitor Situmorang sebagai Penyair dan Pengarang Cerita Pendek* (1963), dan M.S. Hutagalung dengan *Jalan Tak Ada Ujung, Mochtar Lubis* (1963). Hasil penelitian seperti dicontohkan itu menunjukkan besarnya peran pengarang. Bahkan, peneliti sastra yang apabila kebetulan mengetahui pengarang dari teks sastra yang diteliti masih hidup merasa perlu untuk mengkonfirmasi pembacaannya dengan niat pengarang, atau sekurang-kurangnya mencocokkannya dengan riwayat hidup pengarangnya.

Gejala yang lain terlihat pada peran sastra sebagai sarana penyaji amanat, dengan menempatkan karya sastra sebagai tempayan yang menyajikan amanat secara sama kepada setiap pembaca. Pembaca pun dipandang sebagai benda yang harus menangkap amanat secara sama. Dalam hal ini, faktor pembaca sebagai individu dan interaksinya dengan teks dalam proses pembacaan tidak diperhitungkan.

Sastra berbahasa Indonesia yang diangkat dari tradisi luar Indonesia, dilihat sebagai hasil alih bahasa-terjemahan-saja dan tidak dilihat sebagai bentuk kreativitas masyarakat Indonesia dalam menyambut karya asing. Misalnya, *Pangeran Kecil* dari karya berbahasa Prancis *Le Petit Prince*, *Si Bachil* karya Nur Sutan Iskandar suatu bentuk sambutan atas karya Prancis *L'Avare*, dan *Kembalinya Si Anak Hilang* karya Chairil Anwar yang dilahirkan atas sambutannya terhadap karya Prancis *L'Enfant Prodigue*.

Sikap demikian terlihat pula pada karya-karya sastra asing yang dikaji sebagai sarana belajar bahasa asing. Jadi, tidak dalam keadaannya sebagai satu perwujudan sistem sastra yang utuh. Hasil sastra yang menggunakan bahasa asing dalam studi sastra dilihat dari sisi bahasa asingnya, dan tidak sebagai ciptaan sastra. Hal ini karena sastra asing diajarkan untuk menunjang keterampilan berbahasa asing.

Kritik merupakan satu kegiatan yang berakhir dengan penghakiman (Hudson, 1965) telah dilakukan pada sastra Indonesia. Sederet nama dapat disebutkan (lihat Pradopo, 1988). Gairah untuk mendapatkan penerimaan suatu teks sastra secara "baik", juga gairah untuk memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu sastra Indonesia, selama ini telah mengantarkan lahirnya sejumlah kritik. Sesuai dengan hakikat kritik-penilaian atau penghakiman-sering terjadi perbedaan pendapat antara kritikan seorang kritikus dengan pendapat pengarang atau dengan kritikus yang lain, seperti yang melahirkan dialog antara Ajip Rosidi dengan Hutagalung tentang sajak "Ular". Dialog yang berangkat dari titik pandang yang berbeda itu tidak akan dapat memperoleh penyelesaian. Berbagai peristiwa dapat dilihat sebagai contoh, misalnya kasus "Langit Makin Mendung". Dalam hal ini, sering terjadi perbedaan hasil kritik

antara kritikus dengan kritikus yang lain sebagaimana halnya kritik Rahmat Djoko Pradopo terhadap para kritikus terdahulu mengenai kritik yang dipandang "kurang adil" atau kritik yang "tidak sempurna", atau kritik yang "unsur penilaian hanya sebagian saja" (1988). Satu hal yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa kritik tidak pernah stabil, banyak faktor yang ikut menentukan. Kedudukan pembaca yang peneliti kiranya yang dapat menjernihkan persoalannya. Hutagalung (1973) mengatakan, "... tulisan yang dikarang dalam waktu yang berbeda di dalamnya pasti akan terdapat perubahan pandangan maupun pendapat."

Data yang diangkat dari hasil-hasil penelitian yang terekam dari berbagai penerbitan dan dari karya-karya yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan (di perguruan tinggi) tersebut memperlihatkan wajah penelitian sastra Indonesia—tentu saja hanya sebagian—yang ada. Daripadanya dapat diketahui bahwa kegiatan penelitian sastra selama ini telah berlaku dalam masyarakat sastra Indonesia dan daripadanya dapat diangkat sejumlah informasi mengenai sastra Indonesia, lepas daripada valid tidaknya hasil penelitian.

Penelitian sastra Indonesia, pada dekade terakhir ini, memperlihatkan gejala perkembangan. Di antara faktor yang mendorong perkembangan itu adalah semakin luasnya pengenalan tentang sejumlah pandangan dan teori tentang sastra di samping makin majunya kegiatan bersastra di Indonesia. Misalnya, pada dekade 1960-an dalam dunia sastra Jawa dijumpai produktivitas penciptaan cerpen yang tinggi (Damono, 1983). Dalam pada itu, berbagai teori sastra yang berasal dari Barat berangsur-angsur menjangkau masyarakat sastra Indonesia. Perkenalan dengan teori-teori dari Barat sebenarnya telah terjadi beberapa waktu yang lampau, misalnya melalui pandangan-pandangan Plato dan Aristoteles. Namun, perkenalan pada waktu itu belum memberikan dampak bagi perkembangan studi sastra seintensif sekarang. Untuk ini, layak pula disebut buku Rene Wellek dan Austin Warren, *Theory of Literature* yang sering disebut sebagai "buku suci" teori sastra, dan sudah sejak tahun 1960-an masuk dalam masyarakat sastra Indonesia dan mempunyai andil yang tidak kecil dalam pengenalan konsep sastra menurut teori dan pandangan baru.

Kedatangan teori-teori sastra Barat menjelang dan pada tahun 1970-an, tampaknya telah memberi pengaruh tersendiri bagi kegiatan studi sastra, baik terhadap sastra lama maupun sastra kontemporer, sastra daerah dan sastra Indonesia. Hal ini terlihat pada gejala peneliti yang semakin kritis menghadapi fenomena-fenomena sastra yang terungkap pada karya-karya sastra Indonesia. Di antara manifestasinya adalah bergesernya perhatian terhadap studi sastra, dari mempermasalahkan kedudukannya sebagai ilmu atau seni kepada peran teori bagi studi sastra Indonesia. Sejumlah diskusi dan tulisan muncul untuk menjawab kemungkinan memanfaatkan teori dari Barat bagi studi sastra Indonesia. Di samping itu, muncul pula suatu gagasan untuk menemukan teori yang "khas Indonesia" (Mursal Esten, 1988).

Gejala demikian telah memberi dampak yang besar bagi sikap dan kerja penelitian sastra. Dampaknya adalah bahwa studi sastra perlu memanfaatkan pandangan-pandangan baru yang tertuang pada teori-teori sastra tersebut—meskipun

tidak menerapkannya secara ketat, sebagaimana yang pernah dikemukakan, "Seorang peneliti perlu sekali membekali diri mereka dengan teori-teori untuk mengembangkan diri mereka sendiri supaya dapat melihat karya kita, terlepas daripada aplikasi dari teori luar secara ketat." (Teeuw, 1982; Awang Sariyan, 1985).

Pengenalan terhadap teori-teori tersebut pada sebagian masyarakat sastra di Indonesia telah membuka atau memperluas horison baru. Di antaranya dapat dilihat pada gejala berikut.

- 1) Jangkauan studi meluas tidak hanya untuk sastra Indonesia modern saja, tetapi juga untuk karya-karya sastra lama, dan karya-karya sastra daerah—yang lama dan yang baru. Gejala demikian secara jelas dapat dilihat pada perkembangan studi sastra di dunia ("kubu"?) akademi. Di Fakultas Sastra, misalnya, studi sastra tidak lagi hanya diberlakukan bagi karya-karya sastra Indonesia modern yang periodenya mulai kira-kira pada tahun 1920-an, tetapi juga untuk karya sastra lama.
- 2) Metode penelitian terutama yang diterapkan pada karya sastra lama mengalami peninjauan. Metode stemma (West, 1978) yang senantiasa diusahakan oleh hampir semua peneliti sastra lama itu, seperti Brakel yang merasa gagal bagi teksnya *Hikayat Muhammad Hanafiyah* (1975), atau Ras yang merasa berhasil bagi teksnya *Hikayat Banjar* (1968) mulai dipertimbangkan validitasnya bagi karya-karya sastra lama di Indonesia. Tampaknya, telah disadari bahwa objek studi di Indonesia tidak sama dengan objek studi di negeri asal metode stemma (Kratz, 1981). Hampir dapat dikatakan bahwa tidak mungkin—atau jarang—teks-teks sastra lama di Indonesia dapat disusun silsilah naskahnya (Chamamah Soeratno, 1991). Dari pandangan baru, ini para peneliti teks sastra lama tidak harus menyusun silsilah naskahnya atau mengungkapkan teks aslinya. Munculnya perkembangan ilmu sastra dengan menonjolnya peran kreativitas penyalin membuat alternatif baru bagi penelitian sastra lama. Metode yang didasarkan pada pandangan yang bertolak pada sisi kreativitas penyalin menjadi penting. Satu konsekuensi daripadanya adalah bahwa dalam penelitian dilibatkan pula pendekatan literer yang memadai. Beberapa contoh dapat disebutkan hasil penelitian berikut, yaitu dalam tradisi Melayu *Hikayat Hang Tuah* (Sulatin Sutrisno, 1979); *Hikayat Sri Rama* (Ikram, 1980), *Hikayat Iskandar Zulkarnain* (Chamamah-Soeratno, 1991), karya dalam tradisi Aceh: *Hikayat Meukuta Alam* (Abdullah, 1991), karya dalam tradisi Jawa: *Arjunawiwaha* (Wiryamartana, 1990), dan *Serat Panitisastra* (Sudewa, 1991), dan karya dalam tradisi Banjar: *Cerita Raja Banjar dan Raja Kotawaringin* (Chamamah Soeratno, 1992).

Perubahan sikap dan pandangan demikian terlihat juga pada penelitian terhadap *Sejarah Melayu* yang tidak lagi dirunut keasliannya. Teksnya dipandang sebagai ciptaan sastra yang dapat diinterpretasi sejalan dengan bentuk interaksi antara pembaca yang peneliti dengan teksnya. Hasil pembacaannya memperlihatkan makna teks yang sama dengan yang ada sebelumnya, yaitu karya yang mengungkapkan kebesaran raja dan kerajaan Melayu—antara lain karena menjadi keturunan Iskandar Zulkarnain—tetapi

justru merupakan ejekan kepada raja dan kerajaan Melayu (Junus, 1984 dan 1991). Penelitian itu telah mengantarkan *Sejarah Melayu* untuk "menemukan diri kembali". Dari penelitian Umar Junus ini, dapat dilihat adanya gejala perkembangan dalam melihat hasil kegiatan sastra lama. Hasil penelitian itu memperlihatkan sekaligus menyatakan bahwa terhadap karya sastra tidak hanya layak diteliti secara filologis, tetapi diperhatikan juga keberadaannya sebagai produk sastra. Langkah tersebut diambil karena dilihatnya adanya "pembagian artifisial di antara sastra lama dan sastra modern sehingga keduanya dipelajari oleh dua "disiplin" ilmu yang berbeda sedangkan kedua-duanya adalah sastra" (1984).

Perkembangan pandangan terhadap karya-karya yang dikenal sebagai karya sejarah, seperti karya babad, cukup esensial. Teks sejarah, *Babad Cirebon*, oleh peneliti sastra daerah Sunda (Ekajati, 1977) tidak lagi dipersepsi sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai produk sastra. Hal ini berarti bahwa karya babad tersebut diperlakukan sebagai fakta semiotik (Eco, 1978), penanda dari fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat dapat dibaca pada kutipan berikut.

"Babad Cirebon itu pertama-tama tidak dimaksudkan pengarangnya untuk mengungkapkan kenyataan atau kejadian sebenarnya, melainkan untuk mensahkan Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam dan penegak kekuasaan Islam di Pulau Jawa, sebagai tempat pusat kedudukannya."

Sementara itu, luasnya pandangan dan meningkatnya tingkat pemikiran yang kritis terlihat juga pada penelitian yang dilakukan terhadap karya sastra modern, khususnya dalam bidang kritik, yaitu studi yang berupa kritik, atau kritik atas kritik (Pradopo, 1988) dengan memanfaatkan berbagai teori sastra yang berkembang.

Dari contoh beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa studi sastra selama ini telah mengalami perkembangan, perkembangan dalam pengertian kemajuan. Penelitian mereka didasarkan pada pandangan bahwa hasil-hasil sastra dilihat dan dikaji dari sisi keberadaannya sebagai hasil kegiatan bersastra, kegiatan yang didasarkan pada suatu sistem, yaitu sistem sastra.

Pengenalan terhadap teori-teori sastra yang datang dari Barat tersebut, perlu diakui, telah memperluas horison pembacaan terhadap ciptaan sastra. Inilah pula yang menggerakkan para peneliti sastra memanfaatkan teori-teori dari Barat untuk mendekati karya-karya sastra Indonesia. Namun, perlu diingat pula bahwa upaya tersebut menuntut konsekuensi metodologi yang memadai karena kepincangannya akan menimbulkan kelemahan-kelemahan metodologis tersendiri. Sebagai satu studi dari bidang ilmu, konsekuensi metodologi menempati kedudukan yang menentukan sifat keilmiahannya.

Perkembangan dalam bidang ilmu sastra yang memberi dampak yang positif bagi penelitian sastra di Indonesia pada saat ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Gejala yang dapat menjadi hambatan dalam penelitian sastra tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kurangnya fasilitas yang mendukung penelitian karya-karya sastra lama yang kegiatannya perlu menjangkau naskah-naskah salinan yang tersimpan di berbagai negara.
- 2) Kurangnya sikap positif dari masyarakat luas, termasuk pihak-pihak pendukung terlaksananya studi, terhadap produk yang berupa karya sastra. Pada saat ini, masih terdapat anggapan bahwa karya sastra, lebih-lebih sastra lama, sebagai produk seni tidak atau kurang dipahami relevansinya dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat kurang apresiatif terhadap produk yang bernama sastra, seperti terbaca pada keluhan tentang manfaat sastra bagi kehidupan, "*Saya nggak ngerti apa arti pentingnya sastra pada tata hidup ini. Untuk saya pribadi, sastra maupun karya sastra itu sendiri sedikit pun tidak mempengaruhi hajat hidup saya.*" (Kompas, 4 Juni 1989). Pernah terlontar satu pertanyaan tentang sastra dan mendapat jawaban "*Sastra? Aduh apa, ya? Tapi kalau karya sastra mungkin suatu karya tulis yang berisi pikiran-pikiran rumit dari penulisnya.*" Apabila kesan itu keluar dari orang yang diharapkan dapat mengalirkan fasilitas bagi penelitian sastra—penyandang dana—dapat diperkirakan bahwa usaha pencarian dana itu tidak akan berhasil.
- 3) Kondisi kesastraan yang tidak menyampaikan makna secara langsung, *says one thing means another* menurut Riffaterre (1978), menuntut keseriusan dan perhatian yang cukup dalam pembacaannya. Pembacaan teks-teks sastra dalam kondisi demikian memerlukan bekal pengenalan terhadap konvensi bahasa, sastra, dan budaya, yaitu bekal yang pada saat ini belum siap dimiliki oleh para peneliti sastra. Pembacaan dengan interpretasi langsung masih banyak dilakukan oleh para peneliti. Dalam hal ini, menarik untuk dilihat cerpen "Kepala" (Putu, 1978) yang mengemukakan peristiwa yang terjadi pada pasangan suami istri yang baru menikmati malam pertamanya, "*Tapi barangkali tak ada istri yang tiba-tiba terkejut tatkala hendak mengusap kepala suaminya, kepala itu sudah tak ada lagi. Istri saya memekik pingsan tatkala menyadari kepala saya di rumah bapaknya.*"
- 4) Kondisi karya lama, seperti munculnya sejumlah teks variabel, ketegangan-ketegangan dalam pembacaannya akibat dari pergeseran persepsi oleh pembaca masa kini, serta benturan-benturan teori dan metode yang dipakai—dari tradisi yang berbeda (Kratz, 1981) dengan kondisi pernaskahan yang menjadi sasaran kerja.
- 5) Berkembangnya ilmu sastra berkaitan dengan lahirnya berbagai teori sastra yang belum dapat dipahami secara memadai. Dari hasil penelitian sastra selama ini terlihat munculnya dampak dari lajunya arus berbagai paham baru dalam ilmu sastra. Pengenalan dalam waktu yang relatif singkat untuk sejumlah—atau sebangkah—teori mengakibatkan pemahaman dangkal kalau tidak dapat dikatakan justru pemahaman yang kacau. Masuknya teori struktural, dari visi otonomi—atau aliran formalitas—, misalnya, telah menggiring berbagai penelitian kepada penelitian struktural tanpa memahami makna dan macamnya teori struktural itu sendiri. Demikian pula, ketika suatu teori—misalnya teori dekonstruksi—diperkenalkan, muncullah hasrat untuk bekerja dengan teori yang baru tersebut tanpa bekal

pengetahuan yang memadai mengenai teori baru tersebut. Pengenalan paham baru secara serentak dalam waktu yang relatif singkat memberi dampak negatif yang besar.

- 6) Masalah lain yang senantiasa muncul berkaitan dengan ciri-ciri kerja ilmiah adalah sifat *objektif*, jarak metodologis, dan subjektivitas peneliti yang tak terkendali. Pada penelitian terhadap karya-karya yang mengandung unsur ajaran agama, seperti karya-karya Hamzah Fansuri atau Nuruddin Arraniri, peneliti cenderung hanyut dalam materi teksnya. Sebagai akibatnya, peneliti tidak dapat melihat karya sebagai objek penelitiannya, tetapi memandangnya sebagai buku pelajaran yang harus dipelajari dan dipergunakan secara langsung. Terhadap karya-karya demikian, peneliti melihatnya sebagai yang "salah" dan yang "benar" dengan jalan mencocokkannya pada sumber ajaran yang menjadi acuannya, seperti Alquran. Hasil penelitian dari studi sastra yang teleologis, atau filosofis, bukanlah tuntutan kriteria metode ilmiah untuk pembicaraan ini. Sebagai contoh dapat dilihat pada studi sastra terhadap karya-karya tasawuf, dan terhadap karya-karya yang mengandung unsur moral atau etika yang misalnya terkandung dalam karya-karya yang berjudul *Bibi Zaenab* dan karya *Syair Siti Fatimah*.
- 7) Persoalan metodologis yang berkaitan dengan implikasi kebahasaan dalam penelitian sastra terlihat, misalnya, pada pengangkatan data dan penyusunan sinopsis, suatu bentuk ringkas dari karya sastra. Sinopsis biasanya dipandang sebagai jembatan bagi pembaca untuk memasuki karya suatu sastra, sebagaimana yang terjadi pada berbagai penelitian sastra. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa sinopsis adalah parafrase dari teksnya, dengan kata lain bentuk baru dari karyanya. Jadi, sedikit banyaknya sudah tercampur dengan subjektivitas pembuat sinopsis. Dari sisi karakteristik bahasa sastra sinopsis merupakan suatu "pemeriksaan" makna. Kerja penyingkatan teks oleh peneliti menghilangkan sejumlah unsur struktur yang dalam interrelasi antarunsurnya membangun fenomena yang merupakan bahan penyusun makna teks. Di samping itu, kerja penyingkatan memperbesar keterlibatan faktor subjek peneliti. Kerja penelitian akan melahirkan versi lain dari teksnya.
- 8) Persoalan metodologis yang berkaitan dengan kriteria "bebas prasangka" merupakan satu faktor yang perlu diperhatikan juga oleh peneliti. Dengan bekal sejumlah pengetahuannya, pada waktu berdialog dengan teks, dia sudah berinteraksi secara dinamis. Keterlibatan bekal yang tak terhindarkan yang juga membuat tindakannya tidak objektif itu tidak mungkin membebaskannya dari prasangka. Dalam situasi ini, peneliti sastra berada dalam ketegangan antara keterlibatan yang tak terhindarkan dan distansi yang harus diperhatikan. Sesuai dengan situasi dalam proses pembacaan, peneliti, sebagai pembaca berada dalam interaksi dinamis dengan teksnya tidak dapat menghindar dari keterlibatannya dalam teks. Dengan bekal pengetahuannya, ia terlibat dalam interaksi dengan teks. Situasi demikian tidak memungkinkan peneliti membuat jarak dengannya. Dengan demikian, tindak penelitiannya tidak mungkin bersifat objektif sebagaimana yang

dipersyaratkan dalam metode ilmiah (Nazir, 1985:43). Meskipun demikian, peneliti tidak juga dibenarkan hanyut dalam pembacaan. Sesuai dengan kedudukannya sebagai peneliti, dia harus membatasi tindakan responsifnya dalam pembacaannya. Dengan demikian, tindak penelitiannya bersifat objektif relatif. Peneliti ilmiah memang dianjurkan untuk membuat distansi antara peneliti dan objek kajiannya. Dalam pengangkatan data dan penyusunan sinopsis disarankan agar dilakukan (1) oleh peneliti sendiri, (2) representatif, dan (3) tidak berjarak waktu yang lama dengan analisis data.

- 9) Pemahaman teori-teori sastra, terbatas yang terutama disebabkan oleh kurangnya kemampuan memahami bahasa yang dipakai dalam buku-buku teori, tidak mudah mengikuti pola berpikir penulisteori, dan perhatian yang cukup terhadap kegiatan memahaminya.
- 10) Munculnya kesangsian terhadap keilmiahan studi sastra. Istilah *penelitian* pada studi sastra selama ini dipandang sebagai bentuk studi sastra yang bercorak ilmiah, yaitu satu kegiatan studi terhadap ciptaan sastra yang dipandang memiliki tuntutan-tuntutan pembicaraan yang sistematis dan terorganisasi. Dari hasil studi yang dilakukan selama ini, terutama dari dunia pendidikan tampak adanya perkembangan--atau dapat dikatakan kemajuan--dengan jelas. Meskipun demikian, proses itu tidaklah berjalan cepat. Diskusi tentang hakikat studi sastra sebenarnya telah gencar dilontarkan orang sejak tahun 1960-an. Persoalan mengenai apakah hasil studi sastra itu seni atau ilmu senantiasa menjadi diskusi (Ali Ed., 1978). Lukman Ali yang menulis "Penelitian Kesusastraan", (1967) mengawali tulisannya dengan pernyataan yang jelas-jelas memperlihatkan sifat ilmiah studi sastra itu. "Kita berpangkal pada pendapat bahwa kesusastraan itu dapat diselidiki secara ilmiah". Alasannya adalah bahwa "cipta sastra bukanlah hanya hasil dari apa yang disebut ilham, tetapi juga hasil dari pemikiran dan kesadaran pengarangnya". Pemahaman atas karya Indonesia yang diangkat dari karya sastra asing mendapat bentuknya yang baru, yaitu sebagai sambutan aktif dari pembaca seperti terlihat pada hasil dari proses transformasinya ke dalam tradisi yang lain. Karya-karya tersebut misalnya *Pangeran Kecil* (dari karya Prancis *Le Petit Prince* karangan Pierre Loti), *Si Bachil* karya Nur Sutan Iskandar sambutan atas karya Prancis *L'Avare*, dan *Kembalinya Si Anak Hilang* karya Chairil Anwar yang dilahirkan sebagai sambutan terhadap karya Prancis *L'Enfant Prodigue*. Pandangan demikian dapat pula dibaca pada karya-karya asing, seperti *Odipus* atau *Hamlet*, yang dibawakan dalam sistem dan konvensi sastra Indonesia. Dalam hubungannya dengan situasi pernaknik pada karya sastra lama yang ditanggapi dalam disiplin filologi tradisional dengan metode objektif atau metode stemma memperlihatkan tidak adanya perhatian terhadap partisipasi pembaca dalam berinteraksi dengan teksnya pada waktu membaca dan menyambutnya dalam bentuk salinan. Dalam rangka menjawab tuntutan metodologis tersebut perlu dipahami kembali keberadaan studi sastra sebagai satu sistem. Dengan demikian, masalah keilmuan sastra dan metodologi pendekatannya inilah yang telah diungkapkan dalam kesempatan ini.

4. Simpulan

- 1) Sastra merupakan satu sistem yang terungkap pada hasil kegiatan yang dikenal dengan nama ciptaan sastra. Studi sastra yang berupa penelitian sastra hendaknya mempertimbangkan kondisinya sebagai satu ilmu dan satu ciptaan dengan karakternya sendiri. Sebagai akibatnya adalah bahwa studi sastra memiliki sifat keilmiahannya sendiri.
- 2) Terhadap ciptaan-ciptaan sastra Indonesia, selama ini telah dilakukan sejumlah studi, baik dengan istilah penelitian maupun dengan istilah lain, seperti kritik, penyelidikan, pembicaraan, sorotan, dan telaah. Di antara istilah itu kritik banyak dilakukan.
- 3) Studi sastra di Indonesia selama ini telah mengalami perkembangan menuju kepada pemikiran yang kritis yang didasarkan pada keberadaan sastra sebagai satu sistem. Perkembangan studi sastra selama ini banyak didukung oleh pengenalan terhadap teori sastra baru yang mulai tahun tujuh puluhan merebak di dalam masyarakat sastra di Indonesia. Hal ini terlihat jelas pada perkembangan studi yang terjadi di perguruan tinggi.
- 4) Perkembangan studi sastra menuntut metodologi yang memadai. Metode dalam studi sastra memiliki ukuran keilmiahannya sendiri yang ditentukan oleh karakteristiknya sebagai suatu sistem. Validitas dan keilmiahannya studi sastra apabila dihadapkan pada ukuran studi disiplin yang lain, sering timbul masalah. Di antara masalah dapat dilacak dan dijelaskan melalui sisi bahasa dan pembaca.
- 5) Bahasa sastra dengan sifat-sifatnya yang khas, yang mengandung unsur-unsur *ungrammaticalities*, dan taksa, menuntut perhatian dan kecermatan dari peneliti sastra dalam mengangkat data penelitian. Demikian pula, jika peneliti melakukan penyusunan sinopsis bagi karya yang menjadi pendukung objek penelitian. Gejala yang terlihat pada situasi sastra tersebut menyarankan peneliti untuk beberapa hal yang berkaitan dengan (1) pengumpulan data oleh peneliti sendiri, (2) analisis dilakukan tidak lama sesudah pengangkatan data, dan (3) pengangkatan data memperhatikan asas representativitas. Aspek bahasa dan peneliti memiliki peran yang besar bagi penilaian validitas (kevalidan) dan keandalan keilmiahannya penelitian sastra secara ilmiah.
- 6) Penelitian sastra Indonesia dihadapkan pada sejumlah kendala, yaitu sehubungan dengan masih kuatnya paham lama yang melihat sastra tidak sebagai satu organisme yang hidup, tetapi sebagai satu produk ciptaan sang pengarang atau sebagai ciptaan yang memberi informasi dari sisi kebahasaannya. Kendala yang besar muncul karena kesulitan mencerna teori yang dilahirkan dari produk sastra yang tercipta dari latar sosial budaya yang berlainan dengan produk sastra Indonesia. Kendala berikutnya adalah terbatasnya fasilitas yang tersedia, baik fasilitas waktu maupun fasilitas literatur yang diperlukan. Untuk menghadapi perkembangan studi dan terbatasnya fasilitas yang tersedia,

sejumlah langkah disarankan untuk ditempuh, di antaranya adalah (1) mendorong sikap terbuka bagi peneliti sastra, (2) menyediakan dan mendorong tersedianya fasilitas yang memadai bagi upaya penelitian sastra, misalnya dukungan dana, dukungan moral, dan perhatian (3) menciptakan iklim yang mendorong berkembangnya sikap yang positif terhadap sastra. (4) memberi perhatian yang cukup terhadap pengajaran sastra yang ditujukan ke arah aspek apresiatif, (5) menimbulkan sikap yang positif pada masyarakat luas sehingga masyarakat merasa mempunyai kebutuhan terhadap sastra.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman (ed.). 1967. "Penelitian Kesoesastraan", dalam *Bahasa dan Kesoesastraan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Awang Sariyan. 1985. *Dari Kata ke Ideologi : Persoalan Stilistik Melayu*, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti SDN, BHD.
- Belsey, Catherine. 1980. *Critical Practice*. London and New York: Methuen.
- Bottoms, J.C. 1962. "Malay Historical Works". Dalam *Malaysian Historical Sources*, Singapore.
- Budiman, Arief dan Goenawan Mohamad, S. Effendi, J.U. Nasution. 1978. *Tentang Kritik Sastra: Sebuah Diskusi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep. P & K RI.
- Chamamah-Soeratno. 1989. *Metode Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta.
- . 1990a. "Hakikat Penelitian Sastra," *Gatra* 10/11/12.
- . 1990b. *Sastra dalam Pengkajian: Pembicaraan tentang Teori dan Konsekuensi Metodologisnya*. Yogyakarta.
- . 1991a. *Hikayat dan Syair "Penyimpan" Data Sejarah*. Ceramah di Universitas Indonesia. Jakarta.
- . 1991b. *Penelitian Sastra dan Problematikanya: Tinjauan dari Sisi Implikasi Sifat Bahasa Sastra*. Makalah untuk Temu Ilmiah Ilmu-Ilmu Sastra Pascasarjana se-Indonesia.
- Culler, J. 1981, *The Pursuit of Signs* London: RKP.
- Damono, Sapardi Djoko. 1983. *Kesoesastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan*. Jakarta: Gramedia.
- Djajadiningrat, Hoesein. 1913. *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*.
- Doorenbos, J. 1933. "De Geschriften van Hamzah Pansoeri". Disertasi. Leiden.
- Eco, Umberto. 1979 *A Theory of Semiotics*. Bloomington: IUP.
- Edel, J. 1938. "Hikajat Hasanoedin". Disertasi. Utrecht.
- Ekajati, E.S. 1977. "Babad Cirebon: Tinjauan Sastra". Dalam *Bunga Rampai Ilmu Sastra I*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- . 1988. *Naskah Sunda*. Bandung.
- Ellis, John M. 1974. *The Theory of Literary Criticism: A Logical Analysis*. Berkeley Los Angeles-London: University of California Press.
- Eringa, F.S. 1949. *Loetoeng Kasaroeng, een mythologisch verhaal uit West Java*.

- Esten, Mursal (Ed.). 1988. *Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan*. Bandung: Angkasa.
- Fatimi, S.Q. 1963. "Islam Comes to Malaysia". MSRI. Singapore.
- Hadi, Soetrisno. 1984. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak.Psikologi UGM.
- Hamdani, Hamzah. 1988. *Konsep dan Pendekatan Sastera*. Kuala Lumpur: DBP.
- Heraty, Toeti. 1982. *Mimpi dan Pretensi*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Hidding, K.A.H. 1947. "Indonesische Mystiek". *Indonesie*. I.
- Hill, A.H. 1960. "Hikayat Raja-Raja Pasai : A revised romanized version of Raffles Ms.67. *JMBRS* 33.
- Hirsch, Jr., E.D. 1966. *Validity in Interpretation*, New Haven and London: Yale University Press.
- . 1978. *The Aims of Interpretation*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Hudson, William Henry. 1965. *An Introduction to the Study of Literature*. London: George G. Harrap & Co Ltd.
- Hutagalung, M.S. 1963. *Djalan Tak Ada Ujung, Mochtar Lubis*. Djakarta: Gunung Agung.
- . 1973. *Telaah Puisi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Idema, W.L. 1976 *Verzinsels zijn geen letterkunde. Het literatuurbegrip in het traditionele China*. Leiden: E.J. Brill.
- Ikram, A. 1980, *Hikayat Sri Rama: Suntingan Naskah Disertai Telaah Amanat dan Struktur*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Iskandar, Teuku,.1964. "Suatu Kekeliruan dalam Hikayat Raja² Pasai", *DB*, VIII, 5.
- . 1965a. "Hamzah Fansuri", *DB*, IX.
- . 1965b. Bokhari al-Jauhari dan Tajus-Salatin" dalam *DB*, IX
- . 1965c. "Shamsuddin as-Sumatrani", dalam *DB*, IX.
- . 1965d. "Abdurrauf Singkel", dalam *DB*, IX.
- Iser, W. 1978. *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*. London: The Johns Hopkins Press Ltd.
- Jassin, H.B. 1955. *Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay*. Jakarta: Gunung Agung.
- Jauss, H.R.. 1974. "Literary History as a Challenge to Literary Theory". Dalam *New Directions in Literary History*.
- Junus, Umar. 1984. *Sejarah Melayu Menemukan Diri Kembali*. Petaling Jaya: Fajar Bakti SDN.
- Junus, Umar. 1989. *Stilistik: Satu Pengantar*. Kuala Lumpur: DBP
- . 1991. *Sejarah Melayu: Akhir, Awal dan Entah*. Makalah Simposium Ilmu-Ilmu Humaniora.

- Kartakusuma, Mh. Rustandi. "Faal Pengajaran Sastra di Perguruan Tinggi dan Sekolah Lanjutan dalam Perkembangan Sastra". Dalam *Mimbar Indonesia*. Dalam Rachmat Djoko Pradopo, *Beberapa Gagasan dalam Bidang Kritik dan Sastra Indonesia Modern*. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat (Red.). 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Korrie Layun Rampan. 1983. *Perjalanan Sastra Indonesia: Kritik dan Esai*. Jakarta: Gunung Jati.
- Kratz, E.U. 1981. "The Editing of Malay Manuscripts and Textual Criticism". *BKI*, 137.
- Lichtenstadter, Ilse. 1974. *Introduction to Classical Arabic Literature*. New York: Twayne Publishers, Inc.
- Liaw, Yock Fang. 1978. *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*. Singapura.
- Lotman, Jurij. 1972. *The Structure of the Artistic Text*. Michigan: UMP.
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Nieuwenhuijze, C.A.O. van. 1945. *Sjamsu 'l-Din van Pasai*. Disertasi. Leiden.
- Noeng Muhadjir. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaahan Positivistik, Rasionalistik, dan Fenomenologik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Noorduyn. 1955. *Een Achttiende Eeuwse Kroniek van Wadjo*.
- Oemarjati, Boen S. 1962. *Roman Atheis, Achdiat Kartamihardja*, Jakarta: Gunung Agung.
- Pijper, G.F.. 1924. *Het Boek der Duizend Vragen*. Leiden: E.J. Brill.
- Pitono, R.. "Indonesian Traditional Literature as a Source of History". Dalam *Manusia Indonesia*, VI.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng. 1952. *Kapustakan Djawa*. Djakarta.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1988. *Beberapa Gagasan dalam Bidang Kritik Sastra Indonesia Modern*. Yogyakarta.
- Rampan, Korrie Layun. 1986. *Jejak Langkah Sastra Indonesia*. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Ras, J.J. 1968. *Hikajat Bandjar*.
- Riffaterre, M. 1978. *Semiotics of Poetry*. Bloomington and London: Indiana University Press.
- Segers, R.T. 1978. *The Evaluation of Literary Texts: An Experimental Investigation into the Rationalization of Value Judgements with Reference to Semiotics and Esthetics of Reception*. Lisse: The Peter De Ridder Press.
- Selden, Raman. 1986. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Sussex Harvester Press.
- Sulastin-Sutrisno. 1979. *Hikayat Hang Tuah: Analisa Struktur dan Fungsi*. Yogyakarta.
- Teeuw, A. 1982 *Ilmu Sastra Umum dan Teori Sastra dalam Kurikulum Fakultas Sastra*. Yogyakarta: Ceramah di Fakultas Sastra UGM.

- . 1983. *Teori Sastra dan Penelitian Sastra*. Ceramah di Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta: Lokakarya Pengembangan Metode Pengajaran Sastra di Fak.Sastra UGM Tahun 1983/1984.
- . 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tirtawirya, Putu Arya. 1982. *Antologi Esai dan Kritik Sastra*. Ende: Nusa Indah.
- Vredenberg, J. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Vreede, V. 1878. *Tjarita Brakaj*.
- Wake, Christopher. 1964. "Malacca's early kings and the reception of Islam", dalam *JSEAH*, V.
- Webster, Roger. 1990. *Studying Literary Theory: An Introduction*. London, New York, Melbourne, Auckland : Edward Arnold.
- Wellek, Rene dan Austin Warren, 1956, *Theory of Literature*, New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- West, L.M. 1978. *Textual Criticism and Editorial Technique*, Stuttgart: B.G.Teubner.
- Winstedt, R.O. 1977. *A History of Classical Literature*. Kuala Lumpur: OUP
- Worsley. *Babad Buleleng*.

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Kemajuan Penelitian Sastra Indonesia: Konsep Penelitian dan Sejarah Perkembangannya
Pemakalah : Chamamah Soeratno
Pemandu : Budi Darma
Pencatat : Kasno
Juriah

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia
a. Makalah Ibu hanya merupakan deskripsi, adakah kemajuan di dalam penelitian sastra Indonesia? Kalau ada kemajuan diukur dari mana?
b. Makalah Ibu penuh pemaparan, tetapi kurang argumentasi. Adakah kemajuan penelitian sastra di Indonesia, kalau ada indikatornya apa?

Jawaban:

Jelas ada kemajuan. Ada perubahan dari penelitian lama dan modern. Penelitian sastra sejarah Melayu untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, karya sastra dipandang sebagai catatan sejarah. Akibatnya, orang mencari sumber sejarah pada karya sastra. Misalnya, Hamzah Fansuri menganggap karya itu berhubungan dengan agama.

2. **Pertanyaan:** Mahdin, SMP Negeri 2 Kendari
a. Apakah sastra Indonesia termasuk juga sastra daerah atau sastra Indonesia itu sendiri? Kalau memang sastra daerah termasuk, adakah kontribusi sastra daerah terhadap perkembangan sastra Indonesia?
b. Apakah sastra daerah itu merupakan sastra daerah yang sudah tercipta pada masa lampau? Adakah sastra daerah yang masih diciptakan sekarang sehingga penelitiannya sejalan dengan sastra Indonesia?

Jawaban:

Menggunakan bahasa Indonesia, Melayu, dan daerah tidak ada yang lama dan baru. Kontribusi sastra daerah dan sastra lama banyak, contoh *Parikesit*. Tanpa mengetahui teks *Parikesit* di Jawa, kita akan mengalami kesulitan untuk memahami cerita itu.

3. **Pertanyaan:** Sri Yaningsih, Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat
Bagaimana cara memandang karya sastrawan yang terkenal seperti karya Emha Ainun Najib dan Gunawan Mohamad? Mengapa dengan adanya karya-karya tersebut masih dikatakan kesusasteraan di Indonesia tidak berkembang?

Jawaban:

Ada sejumlah karya yang sekarang ini muncul, dan orang mengkaji serta mengkritik sastra, tetapi jumlah pengkritik dan penelitiannya sedikit sekali. Karya itu tidak berkembang dari segi fisik strukturnya, atau dilihat dari segi keberadaan karya sastra itu. Tidak berkembangnya suatu karya sastra karena ada keluhan guru-guru yang tidak berhasil mengapresiasi karya sastra itu kepada murid-murid.

4. **Pertanyaan:** Wagu Padlyati, Departemen Perindustrian

Sebagai orang awam, saya ingin mengetahui tolok ukur untuk menentukan baik buruknya penelitian sastra itu.

Jawaban:

Karya sastra tidak ada aturan KUHP, jadi yang harus kita ketahui adalah konsep sastra. Ukuran benar atau salah dengan mengemukakan karya sastra lama yang mengandung ajaran agama, sejarah, dan sosial.

5. **Pertanyaan:** Aswan, Jambi

- a. Apakah dapat dikatakan sastra Indonesia apabila karya itu diciptakan oleh pengarang kita dengan menggunakan latar budaya lain?
- b. Apakah dapat dikatakan penelitian sastra apabila kita meneliti karya sastra pada media massa?

Jawaban:

Jika hanya itu ditulis dengan bahasa Indonesia, dengan sendirinya menjadi jangkauan penelitian sastra Indonesia. Sastra dalam media massa termasuk sastra Indonesia.

Semua penelitian jangan tergelincir pada otoritas sastra yang menjadi fenomena literaturnya.

6. **Pertanyaan:** Mgt. Sri Widaningsih, FKIP Universitas Timor Timur

Dalam pembuatan skripsi masih ada model-model lama. Apakah kiranya teks analisis dapat dikembangkan dalam tingkat mahasiswa. Bagaimana dengan *Content analysis*.

Jawaban:

Penelitian sastra yang dilakukan hendaknya memperhatikan masalah, alat, metode, dan bagaimana menganalisisnya.

Usulan

1. Usulan: R.B. Supriyanto, Ketua HPBI Cabang Timor Timur
 - a. Ungkapan lama
Nusantara = "Dari Sabang Sampai dengan Merauke"

Dirambah = Dari Pulau Natuna, Pulau Sangihe sampai dengan Pulau Yaco (Pulau Timur, Timor Timur)

- b. Pak Ginanjar Kartasasmita mengatakan, "dengan bahasa apa untuk memproklamasikan 27 propinsi kita belum mempunyai bahasa resmi."

Ralat = Waktu 17 Agustus 1945 Timor Timur.

- c. Sikap kita, sebagai guru bahasa Indonesia, tentang bahasa daerah sebagai bahasa pelajaran muatan lokal belum ada petunjuk penggarapan, aspek-aspek apakah yang harus dimasukkan sebagai materi pelajaran?
- d. Perda tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar diganti dengan undang-undang pemakaian bahasa Indonesia.

2. **Usul:** Jalinus Syah, Wakil IPINDO

Sastra diharapkan mempunyai kongres sendiri karena dalam kongres sekarang ini pembicaraan materi sastra sedikit sekali.

PENGEMBANGAN SASTRA MELALUI PENERJEMAHAN

Sapardi Djoko Damono
Universitas Indonesia

Marilah kita membayangkan sebuah sajak klasik Jepang, *haiku*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Versi Inggris *haiku* tersebut dibaca oleh seorang penyair Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh seorang penyair Jawa, *haiku* versi Indonesia itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Jika kemudian, kita menerjemahkan *haiku* berbahasa Jawa itu ke bahasa aslinya, saya yakin yang kita dapatkan adalah *haiku* yang sama sekali berbeda dengan aslinya. Perbedaan itu semakin besar jika mata rantai bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan itu semakin panjang.

Ada beberapa hal penting yang bisa kita bicarakan berdasarkan peristiwa rekaan tersebut. Dalam terjemahan sastra selalu saja ada yang tercecceh atau berlebih; dalam hal ini bahkan ada yang berpendirian bahwa puisi dan sastra pada umumnya, tidak dapat diterjemahkan. Dalam bahasa sasaran, sajak yang diterjemahkan itu harus juga menjadi sajak; jika yang dapat membuat sajak itu penyair, penerjemah puisi haruslah seorang penyair. Penerjemah sastra haruslah seorang sastrawan. Dengan kata lain, terjemahan karya sastra harus layak baca sebagai karya sastra. Terjemahan sastra sama sekali tidak bisa dianggap hasil akhir; penerjemah lain akan bisa juga menerjemahkan. Sebuah sajak bisa saja diterjemahkan oleh tiga orang penyair, dan hasilnya dapat dipastikan berbeda. Jadi, terjemahan memang tidak bisa dianggap sama dengan aslinya, tidak boleh dianggap mewakili aslinya. Karya sastra asli merupakan hasil final, terjemahannya tidak.

Dalam sejarah sastra kita tercatat sejumlah besar pengarang yang menaruh minat terhadap penerjemahan. Salah seorang yang dengan sadar dan sungguh-sungguh mengaitkan penerjemahan dan proses kreatifnya sebagai pengarang adalah Chairil Anwar. Penyair yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai pelopor puisi modern Indonesia ini menjadi matang, antara lain karena menerjemahkan. Dalam menerjemahkan, seorang pengarang dipaksa menciptakan bahasa yang setepat-tepatnya untuk mengalihkan pengalaman unik yang ada dalam sastra sumber, yang sangat mungkin tidak pernah dihayatinya. Paksaan semacam itulah tentunya yang telah menjadikannya penyair yang dalam hidupnya yang singkat itu terus-menerus berusaha menajamkan kepekaannya dalam berbahasa. Hasilnya adalah bahasa Indonesia yang boleh dikatakan sama sekali baru, yang jauh melewati orang-orang

sezamannya, yang—seperti tampak dalam beberapa sajaknya—sampai sekarang pun masih kita rasakan sebagai pembaruan. Tentu harus ada semacam ikatan batin antara penerjemah dan karya sastra yang diterjemahkannya; yang terjadi bukan semata-mata terjemahan, tetapi semacam tiruan. Si penerjemah yang berasal dari kebudayaan dan, mungkin, zaman lain harus merasakan suatu keperluan untuk meniru karya sastra asli ke karya sastra sasaran demi keperluan yang berbeda, sesuai dengan zamannya.

Chairil Anwar adalah tokoh yang unik dalam sejarah sastra kita; ia dianggap pelopor suatu pembaruan sastra sekaligus dituduh penyair yang suka mencuri karya penyair asing. Saya akan menunjukkan beberapa cara yang ditempuh penyair yang meninggal pada usia 26 tahun itu untuk mengalihkan sastra sumber ke sastra sasaran. Salah satu sajak yang diterjemahkannya adalah karya John Cornford yang dalam terjemahan diberi judul "Huesca."¹ Sajak aslinya adalah sebagai berikut.

*Heart of the heartless world,
Dear heart, the thought of you
Is the pain at my side,
The shadow that chills my view*

*The wind rises in the evening
Reminds that autumn is near.
I am afraid to lose you,
I am afraid of my fear.*

*On the last mile to Huesca,
The last fence for our pride,
Think so kindly, dear, that I
Sense you at my side.*

*And if bad luck should lay my strength
Into the shallow grave,
Remember all the good you can;
Don't forget my love.*

Terjemahan Chairil Anwar adalah sebagai berikut.

*Jiwa di dunia yang hilang jiwa
Jiwa sayang, kenangan padamu
Adalah derita di sisiku,
Bayangan yang bisa bikin tinjauan beku.*

*Angin bangkit ketika senja,
Ngingatkan musim gugur akan tiba.
Aku cemas bisa kehilangan kau,
Aku cemas pada kecemasanku.*

*Di batu penghabisan ke Huesca,
Pagar penghabisan dari kebanggaan kita,
Kenanglah sayang, dengan mesra
Kau kubayangkan di sisiku ada.*

*Dan jika untung malang menghamparkan
Aku pada kuburan dangkal,
Ingatlah sebisamu segala yang baik
Dan cintaku yang kekal.*

Terjemahan Chairil Anwar ini termasuk yang setia pada aslinya; penyair kita itu tidak mencuri atau meminjam larik-larik sajak asing untuk kepentingan kreatifnya sendiri, seperti yang tampak dalam sejumlah sajaknya. Konon terjemahan itu suka diibaratkan wanita: yang setia itu tidak cantik, yang tidak setia yang cantik. Sajak terjemahan Chairil Anwar ini pernah populer di kalangan anak-anak muda yang giat dalam kesenian di Solo tahun 1950-an, ketika di kota pedalaman itu mulai muncul kegemaran berdeklamasi. Terjemahan Chairil Anwar itu disusun dalam irama dan bunyi yang enak dibaca; di samping itu tentunya faktor yang berkaitan dengan tema juga menentukan popularitasnya. Tahun 1950-an belum begitu jauh jaraknya dari masa perjuangan fisik, dan tema sajak terjemahan itu memang sesuai dengan suasana zaman.

Huesca adalah salah satu terjemahan yang cantik; jadi, adakah ia setia pada aslinya? Di antara terjemahan Chairil Anwar, sajak ini termasuk yang setia, tetapi seberapa jauh? Jika kita uraikan dengan agak cermat, ternyata ada beberapa catatan yang bisa kita buat. *Heart* diterjemahkan menjadi 'jiwa', bukan 'jantung' atau 'hati'. Jika kita mengingat frasa *dear heart* yang mungkin lebih setia diterjemahkan menjadi 'jantung hati', maka mestinya *heart* diterjemahkan 'hati'. Pada larik pertama *heartless* diterjemahkan menjadi 'hilang jiwa', suatu terjemahan yang agak aneh sebab *heartless* berarti '*cruel, unkind, has no sympathy for anyone or anything.*'²

Makna dalam bahasa aslinya itu sesuai dengan tema sajak yang berkaitan dengan perang. Dalam bahasa kita, *hilang jiwa* merupakan ungkapan yang tidak sejelas bahasa sumbernya; Chairil Anwar telah menciptakan ungkapan yang baru, setidaknya makna yang baru bagi ungkapan itu, yang sama sekali tidak membayangkan adanya faktor kekejaman dan ketiadaan belas kasihan seperti yang jelas tampak pada bahasa sumbernya. Pada larik kedua, *dear heart* diterjemahkannya menjadi 'jiwa sayang', bukan 'kekasihku' atau 'jantung hatiku'. Pengulangan kata *heart* dalam sajak sumber dipertahankan dengan cara mengulang kata *jiwa*, meskipun hal itu mengakibatkan ketidaksetiaan. Dalam hal ini, Chairil Anwar setia mengikuti teknik pengulangan, tetapi "terpaksa" tidak setia mengikuti maknanya. Pada bait kedua, *I am afraid* diterjemahkan menjadi 'aku cemas' yang jelas lebih ekspresif dari 'aku takut' atau bahkan 'aku khawatir'. Dua larik terakhir sajak ini juga menunjukkan akal Chairil Anwar menerjemahkannya; dalam sajak sumbernya terdapat paralelisme makna dengan menggunakan kata *remember* dan *don't forget*,

dalam terjemahannya dua larik terakhir itu dirangkaikan oleh kata *ingatlah*. Sementara itu, pada *my love* ditambahkan *yang kekal*, mungkin sekali untuk memburu rima dengan larik kedua bait terakhir itu.

Uraian yang sederhana itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pada terjemahan yang bisa digolongkan setia pun, penerjemah telah melakukan pengkhianatan. Namun, sebelum kita lanjutkan pembicaraan mengenai hal itu, kita kutip pandangan seorang pakar sastra bandingan, Henri Gifford,¹ mengenai sastra terjemahan.

A work translated can never be more than an oil painting reproduced in black and white. The texture has changed. Of course the broad arrangements of masses and planes will be no less clear, and perhaps even quite delicate nuances are not lost. However, the primal harmony has given place to something less finely calculated. Whenever the imagination is working at full capacity -- whether in a lyric, a play, or a novel -- it organizes the material with a degree of subtlety and comprehensiveness that no translation could ever match. The unity of the completed work draws together a multitude of converging details. It is bound to be impoverished in translation, though to what extent will depend on the form, whether prose or verse, and if verse whether short and lyrical, or narrative and sustained."

Gifford rupanya memiliki pandangan yang negatif terhadap sastra terjemahan; sastra terjemahan diibaratkannya sebagai tidak lebih dari reproduksi hitam putih dari lukisan cat minyak sebab teksturnya telah berubah. Dikatakannya pula bahwa tidak ada terjemahan yang bisa menandingi taraf kehalusan dan kelengkapan yang ada dalam imajinasi penulis asli dalam menyusun bahan karangannya; karena itu, keutuhan karya sastra asli akan dimiskinkan oleh terjemahan, meskipun taraf pemiskinan itu bergantung pada jenis karya sastra yang diterjemahkannya. Taraf pemiskinan pada puisi terjemahan tentunya sangat tinggi sebab dalam jenis sastra ini pengolahan bahasa untuk mengatur bahan menuntut imajinasi yang bekerja pada kemampuan penuh.

Pandangan semacam itu sangat wajar dalam konteks pembicaraan mengenai sastra bandingan, suatu bidang minat dalam telaah sastra yang memusatkan perhatian pada membanding-bandingkan karya sastra. Dalam bidang minat ini, tentu saja karya terjemahan tidak mempunyai kedudukan yang kukuh. Segi-segi stilistik, bahkan tematik, karya sastra tidak akan bisa dibanding-bandingkan jika bahannya adalah karya terjemahan. Bahwa terjemahan tidak akan bisa sama dengan aslinya, itu jelas. Hal itu bisa juga dijelaskan bahwa karya asli itu final, sedangkan terjemahan bukan. Saya berpendirian bahwa penerjemahan karya sastra tidak usah dianggap sebagai usaha mati-matian untuk karya yang sama dengan aslinya. Dengan landasan tersebut, tentunya kita tidak bisa sepenuhnya menerima pandangan Gifford yang mengibaratkan terjemahan sebagai reproduksi hitam putih atas lukisan cat minyak. Kecelakaan semacam itu bisa saja terjadi jika penerjemahnya kurang mampu; namun, keunggulan bisa juga dicapai oleh terjemahan. Sangat mungkin ada terjemahan yang

lebih bagus dari aslinya: hubungan antarunsurnya lebih kukuh, wawasannya lebih dalam, dan kemungkinan penghayatannya lebih luas. Dengan demikian, ia bukan reproduksi sekadar hitam putih, tetapi karya lukisan cat minyak juga yang sejajar dengan aslinya. Dalam hal inilah, sebenarnya terjemahan itu oleh orang Prancis dianggap sebagai *trahison creatrice*, sementara orang Italia menyebut *traduttore* sebagai *traditore*. Penerjemahan memang pengkhianatan yang kreatif, seperti yang ditunjukkan oleh sajak "Huesca" tersebut. Umumnya kita berpendapat bahwa penerjemah terpengaruh oleh yang diterjemahkannya; namun, kita juga boleh berpendapat bahwa penerjemah justru mempengaruhi karya yang diterjemahkannya. Bahasa itu mutlak peka budaya; cara pengungkapan dalam suatu bahasa didikte oleh segi budaya yang telah menghasilkan bahasa itu, sebab memang bahasa diciptakan untuk keperluan komunikasi di lingkungan kebudayaan tertentu. Jadi, penerjemahan sebenarnya merupakan usaha untuk mengubah suatu kebudayaan ke kebudayaan lain, atau mengubah cara pengungkapan dalam suatu kebudayaan menjadi cara pengungkapan yang ada dalam kebudayaan lain. Hal ini berarti perubahan kode agar sesuai dengan yang ada dalam kebudayaan sasaran.

Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa kebudayaan sasaran itu berpengaruh dalam penerjemahan; jadi, penerjemah mempengaruhi karya sastra yang diterjemahkannya. Penerjemah sastra pada dasarnya adalah pengarang yang mencipta dengan batasan, kungkungan, dan ikatan yang berasal dari karya yang diterjemahkannya. Ia memiliki semacam ikatan batin dengan karya sastra yang diterjemahkannya itu; ia merasakan keperluan yang mendesak untuk menciptakan "kembali" penghayatannya atas karya sastra yang diterjemahkannya itu. Ia berusaha untuk melepaskan diri dari kungkungan itu agar bisa kreatif sebab ia juga diikat oleh kebudayaannya sendiri, oleh cara pengungkapan yang ada dalam bahasanya sendiri, oleh dirinya sendiri. Akibatnya, ia harus berkhianat agar bisa kreatif.

Pengkhianatan yang "lebih jauh" lagi dilakukan oleh Chairil Anwar dalam sajaknya yang berjudul "Krawang Bekasi." Oleh beberapa pengamat, sajak itu dianggap plagiat dari sajak Archibald MacLeish⁴ yang berjudul "The Young Dead Soldiers". Sajak Chairil Anwar itu dianggap plagiat sebab ia tidak mencantumkan nama MacLeish. Saya kutip kedua sajak itu seutuhnya.

THE YOUNG DEAD SOLDIERS

*The young dead soldiers do not speak.
Nevertheless they are heard in the still houses.
(Who has not heard them?)*

*They have a silence that speaks for them at night
And when the clock counts.*

*They say,
We were young. We have died. Remember us.*

*They say,
We have done what we could
But until it is finished it is not done.*

*They say,
We have given our lives
But until it is finished no one can know what our lives gave.*

*They say,
Our deaths are not ours,
They are yours,
They will mean what you make them.*

*They say,
Whether our lives and our deaths were for peace and a new hope
or for nothing
We cannot say. It is you who must say this.*

*They say,
We leave you our deaths,
Give them their meaning,
Give them an end to the war and a true peace,
Give them a victory that ends the war and peace afterwards,
Give them their meaning.
We were young, they say,
We have died,
Remember us.*

"Plagiat" Chairil Anwar adalah sebagai berikut.

KRAWANG - BEKASI

*Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
tidak bisa teriak "Merdeka" dan angkat senjata lagi.*

*Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan berdegap hati?*

*Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak.*

*Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami.*

*Kami sudah coba yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum apa-apa.*

*Kami sudah beri kami punya jiwa
Kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti empat-lima ribu nyawa.*

*Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan.*

*Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan
atau tidak untuk apa-apa.*

*Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata*

*Kami bicara padamu dalam bening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak*

*Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskanlah jiwa kami
Menjaga Bung Karno
Menjaga Bung Hatta
Menjaga Bung Sjahrir*

*Kami sekarang mayat
Berilah kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian*

*Kenang, kenanglah kami
yang tinggal tulang diliputi debu.
Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi.*

Jika kita membandingkan kedua sajak itu agak cermat, tampak jelas bahwa sebenarnya Chairil Anwar telah menciptakan sajak yang baru dengan meminjam dan sekaligus diilhami oleh beberapa larik sajak MacLeish. Sajak MacLeish memuat nilai-nilai yang bisa diterima di mana saja; para prajurit muda yang mati dalam sajak itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Mereka bukan prajurit yang merebut kemerdekaan dari bangsa lain, mereka juga tidak menyebut-nyebut musuh. Mereka itu mungkin saja prajurit Jepang, Amerika, Italia, Jerman, atau Australia yang meninggal dalam sebuah perang entah kapan dan di mana.⁵ Sebaliknya, sajak Chairil Anwar jelas terikat tempat, yakni Krawang-Bekasi; dan tentunya juga terikat waktu,

yakni zaman perjuangan fisik. Para prajurit yang mati dalam "Krawang-Bekasi" jelas mempunyai musuh, yakni penjajah; perjuangan mereka jelas, yakni merebut kemerdekaan. Dengan demikian, sajak ini tidak mengandung nilai-nilai yang dengan mudah bisa diterima di mana dan kapan saja; ia terikat pada sejarah. Nada yang tersirat dalam sajak Chairil Anwar itu pun jelas berbeda dari "The Young Dead Soldiers." Sajak Chairil Anwar mengobarkan semangat perjuangan, sajak Archibald MacLeish memimpikan perdamaian. Penyair kita itu boleh dikatakan telah mempengaruhi sajak yang diterjemahkannya.

Terjemahan sebenarnya merupakan tafsir bangsa tertentu di suatu zaman tertentu terhadap karya sastra milik bangsa lain di zaman tertentu pula. "Krawang-Bekasi" boleh dianggap sebagai tafsir bangsa Indonesia zaman perjuangan fisik terhadap sajak MacLeish tentang Perang Dunia II. Jadi, dengan "mengubah dirinya", karya sastra bisa menembus ruang dan waktu. Sangat sering terjadi, pembaca tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berhubungan langsung dengan karya sastra yang berasal dari zaman atau negeri lain. Karya pengarang Inggris Jonathan Swift yang berjudul *Gulliver's Travels*, misalnya, sampai kepada sebagian besar kita sebagai cerita anak-anak. Demikian juga karya Daniel Defoe yang berjudul *Robinson Crusoe*. Dalam edisi aslinya, kedua novel yang pertama kali terbit ratusan tahun yang lalu di Inggris itu mengangkat faktor-faktor sosial, politik, budaya, dan intelektual dalam masalah bangsa Inggris zamannya.¹ Sebagian besar pembaca zaman ini, tidak terkecuali orang Inggris, sama sekali tidak mempunyai pengetahuan yang memungkinkan memberikan tafsiran yang memadai terhadap versi aslinya. Padahal, kedua karya sastra itu dianggap sebagai penemuan besar dalam perkembangan kebudayaan Inggris, jadi perlu diwariskan. Mereka mewariskannya dalam bentuk cerita anak-anak, kemudian kita menerjemahkan warisan itu.

Terjemahan, dengan demikian, menyebabkan karya sastra bertahan hidup; meminjam istilah Gifford, karena diterjemahkan, karya sastra mengalami *second existence*, 'keberadaan atau kehidupan kedua'. Dalam kekayaan sastra kita, epos *Mahabharata*—seluruhnya atau bagian-bagiannya—telah diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk oleh para pengarang kita selama beberapa zaman; epos yang berasal dari India itu telah mengalami kehidupan yang kesekian kalinya di Indonesia. Kisah mengenai keluarga Bharata itu tentunya memiliki makna tersendiri bagi bangsa India di zaman yang sudah lama lampau; bagi kita di zaman ini, makna epos itu tentu saja sama sekali berbeda. Beberapa karya klasik Barat seperti kisah pelayaran Odysseus oleh Homerus mengalami hal yang serupa; bangsa-bangsa modern di Eropa Barat zaman ini membaca terjemahan kisah petualangan tersebut, yang dikerjakan oleh para penyair modern, dengan makna yang berbeda, sesuai dengan keperluan mereka. Kehidupan kedua itu tidak hanya berlangsung di negeri lain, tetapi juga bisa berlangsung di negeri sendiri, seperti yang terjadi pada penerjemahan *Beowulf* di Inggris. *Beowulf* adalah puisi naratif anonim dalam bahasa Inggris kuno yang konon dihasilkan di Inggris sekitar abad VIII meskipun kisahnya mengenai negeri-negeri di Skandinavia. Puisi itu telah beberapa kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris

modern baik dalam bentuk puisi maupun prosa, baik untuk kepentingan akademik maupun umum.

Seandainya *Beowulf* itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ia akan hidup kembali dalam bahasa yang sama dengan terjemahan drama-drama Shakespeare (1564–1616), novel-novel Jane Austen (1775–1817), dan sajak-sajak T.S. Eliot (1888–1965). Bahasa(-bahasa) Inggris karya-karya itu berbeda-beda sebab berasal dari zaman yang berbeda-beda pula; meskipun berasal dari bangsa yang sama. Karena berasal dari zaman yang berbeda, kebudayaan yang mendukungnya pun telah mengalami pergeseran-pergeseran. Dalam terjemahan, semua itu seolah-olah berasal dari zaman yang sama; kita tentu tidak bisa, dan tidak perlu menciptakan bahasa(-bahasa) Indonesia khusus bagi karya berbagai pengarang itu. Ketika Taslim Ali menerbitkan bunga rampai *Puisi Dunia* (1953), ia pun menggunakan bahasa Indonesia yang sama untuk menerjemahkan sejumlah besar sajak dari berbagai negeri dan zaman. Karena sebagian besar penerjemahan dilakukan oleh Taslim Ali, mau tidak mau sajak-sajak yang berasal dari bangsa, bahasa, dan zaman yang berbeda-beda itu harus tunduk pada bahasa yang dikuasai penerjemah.

Bunga rampai puisi yang disusun oleh Taslim Ali itu merupakan salah satu usaha penting untuk memperkenalkan sastra dunia kepada kita. Pengaruh buku itu terhadap anak-anak muda tahun 1950-an yang menaruh minat terhadap karang-mengarang sangat terasa; dalam dasarwarsa itu, *Puisi Dunia* merupakan salah satu buku yang suka dibawa ke mana-mana, dan tidak jarang dipetik untuk dideklamasikan. Tahun 1950-an adalah dasawarsa pertama yang menyadari pentingnya perkenalan dengan sastra asing. Untuk pertama kali kita mempunyai kebebasan untuk memilih karya sastra yang kita sukai dan terjemahkan; untuk pertama kali pula kita mengembangkan sastra kita berdasarkan singgungan dengan puisi Tu Fu sampai T.S. Eliot, dengan drama Sophokles sampai Sartre, dengan cerita Dickens sampai Hemingway. Kebebasan untuk memilih itu langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap, atau setidaknya berjalan sejajar dengan, keinginan mencipta. Tahun 1950-an penuh dengan berbagai usaha untuk menafsirkan dan melaksanakan sejumlah mazhab dan cara pengungkapan yang pernah ada sampai saat itu.

Kegiatan penerjemahan sastra modern tentu sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, terutama oleh Balai Pustaka; tetapi, sebagian besar karya yang diterjemahkan boleh digolongkan ke dalam sastra populer atau anak-anak, seperti karya Rider Haggard, Conan Doyle, dan B. Orcszy.⁸ Di luar Balai Pustaka, penyair Amir Hamzah menghimpun terjemahan sajak dari berbagai negeri Asia, berjudul *Setinggi Timur*. Saya ingat, bunga rampai ini, meskipun terbit sebelum perang, juga pernah mendapat perhatian khusus dari "calon-calon sastrawan" di tahun 1950-an.

Usaha untuk memindahkan pengalaman dan penghayatan terhadap hidup milik bangsa lain ke kebudayaan kita itu rupanya sudah berlangsung sejak kita mengenal sastra tulis. Mungkin, bahkan bisa dikatakan bahwa dalam perkembangannya, sastra tulis kita sedikit banyak digerakkan oleh penerjemahan. Dalam adikarya

Zoetmulder mengenai sastra Jawa Kuno,⁹ kita diberi penjelasan mengenai eratnya hubungan antara penerjemahan dan penciptaan karya sastra. Jelas bisa kita simpulkan bahwa peranan *Ramayana* dan *Mahabharata* terhadap perkembangan sastra Jawa Kuno sangat menentukan. Bahkan, mungkin bisa dikatakan bahwa para penyair nenek moyang kita seperti Mpu Sedah, Mpu Panuluh, dan Mpu Kanwa adalah penerjemah atau penyadur. Keadaan yang serupa terjadi juga dalam perkembangan sastra Melayu klasik; kedua epos yang berasal dari India itu muncul dalam berbagai versi, diiringi oleh berbagai cerita yang berasal dari Timur Tengah, terutama setelah masuknya Islam.¹²

Bagi kebanyakan kita, kisah-kisah mengenai keluarga Bharata dan Sri Rama tidak lagi terasa sebagai terjemahan; kisah-kisah itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan kita. Dalam kenyataannya, terjemahan karya sastra memang merupakan bagian dari sastra yang ditulis dalam bahasa sasaran; ia sama sekali tidak berurusan dengan sastra dalam bahasa aslinya. Dipandang dari segi linguistik, terjemahan novel Charles Dickens dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak ada kaitannya dengan bahasa aslinya. Karena tokoh, peristiwa, dan latar dalam novel diciptakan dengan bahasa, *Oliver Twist* dan keadaan rumah yatim-piatu dalam terjemahan itu pun sudah menjadi milik kita pula; terlalu banyak pengertian yang harus kita paksa pindah kebudayaan dalam penerjemahan.

Berdasarkan landasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa segenap terjemahan karya sastra yang selama ini kita kerjakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sastra kita. Langsung atau tidak langsung, penerjemahan itu ikut menggerakkan sastra kita. Kita tentunya sepakat bahwa terjemahan sastra yang kita inginkan adalah yang dalam bahasa sasarannya juga berupa karya sastra. Syarat itu sangat penting, sebab jika tidak, sumbangannya terhadap perkembangan sastra perlu dipertanyakan. Bahkan, kita boleh menyatakan bahwa faktor kesastraan dalam terjemahan lebih penting daripada ketepatan menerjemahkan; sejarah sastra dunia telah menunjukkan bahwa ketidaksetiaan atau kekeliruan dalam penerjemahan kadang-kadang bisa menciptakan gairah dalam sastra bahasa sasaran.

Kita pantas berterima kasih bahwa di zaman ini sejumlah penerjemah kita telah melakukan tugasnya dengan sangat baik: Amir Hamzah, Amal Hamzah, Armijn Pane, Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, Achdiat Kartamihardja, Toto Sudarto Bachtiar, Asrul Sani, Ali Audah, Rendra, Hartoyo Andangdjaja, Taufiq Ismail, dan seterusnya. Mungkin saya telah menyebut nama-nama sastrawan; tentu ada beberapa nama penerjemah yang mungkin sekali belum pernah terlibat dalam kegiatan sastra. Namun, setidaknya bagi saya, nama-nama yang saya sebut itu telah menunjukkan bahwa sebagian besar hasil terjemahannya memang berwujud karya sastra. Hal itu menunjukkan bahwa mereka telah berupaya mempergunakan bahasa secara kreatif, suatu bukti sumbangan bagi perkembangan sastra kita. Pada gilirannya, hasil terjemahan mereka itu akan mampu menggerakkan calon-calon pengarang yang membacanya.

CATATAN

1. John Cornford adalah penyair minor, keterangan mengenai dirinya sulit didapatkan. Dalam *Puisi Dunia* (1952), Taslim Ali menyertakan sajak itu, tanpa menyertakan biografi pengarang. Kenyataan ini bisa juga menjadi bahan telaah menarik mengenai "nasib" karya sastra; di negeri sendiri mungkin tidak dikenal, di negeri terjemahannya mungkin saja ia justru dibaca luas. Sajak ini dan sajak-sajak Chairil Anwar yang lain dan aslinya dikutip dari H.B. Jassin, *Chairil Anwar Pelopor Angkatan '45*, Djakarta, 1959. Dalam bunga rampai Taslim Ali, sajak ini diberi judul "Sadjak".
2. *Collins Cobuild English Language Dictionary*, London: Collins, 1987.
3. Henry Gifford, *Comparative Literature*, New York: Routledge & Kegan Paul, 1969:45.
4. Archibald MacLeish (1892-1982) adalah seorang penyair penting Amerika yang dua buah kumpulan sajak dan sebuah dramanya memenangkan Hadiah Pulitzer, tahun-tahun 1932, 1952, dan 1958.
5. Meskipun sajak ini diterbitkan selepas Perang Dunia II, yang menunjukkan kemungkinan acuannya ke perang besar tersebut.
6. *Gulliver's Travels* (1726), misalnya, yang judul aslinya adalah *Travels into Several Remote Nations of the World, by Lemuel Gulliver*, menggambarkan perjalanan si tokoh ke empat tempat: pertama ke Liliput, yang penghuninya kerdil; kedua, ke Brobdingnag, yang penghuninya raksasa; ketiga, ke pula terbang yang bernama Laputa, kerajaan orang-orang "bijaksana"; keempat, ke Houyhnhnmland, negeri yang dihuni oleh Houyhnhm dan Yahoo. Buku yang berbentuk buku harian ini merupakan kritik tajam terhadap penyalahgunaan nalar manusia seperti yang tercermin dalam lembaga-lembaga sosial, politik, dan akademiknya. Digambarkannya bahwa manusia itu paling tinggi hanya tolol, paling rendah menjadi tak lebih dari kera.
Dalam edisi modern, yang berupa bacaan untuk anak-anak, umumnya perjalanan Gulliver itu hanya meliputi dua pulau, Liliput dan Brobdingnag; semua aspek kritik yang tajam itu terhapus.
7. Di antara terjemahan yang mutakhir adalah yang dilakukan oleh Constance B. Hieatt, dalam prosa, yang dimaksudkan sebagai bacaan umum, terbitan Bantam Book, 1993.
8. Untuk deskripsi yang agak menyeluruh tentang perkembangan penerjemahan sastra, baca Jakob Sumardjo, *Dari Kasanah Sastra Dunia*, Bandung: Alumnus, 1985.
9. *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang* (terjemahan Dick Hartoko), Jakarta: Djambatan, 1983.
10. Baca, antara lain, Liaw Yock Fang, *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik*, Singapura: Pustaka Nasional, 1982.

HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENERJEMAHAN KARYA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

B.H. Hoed¹

Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

a. *Kebutuhan Penerjemahan di Bidang Iptek*

Kebutuhan akan penerjemahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak dapat kita ragukan lagi. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang yang untuk pembangunannya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengarahkan bahwa untuk Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) titik berat diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian. Pengarahan itu merupakan akibat logis dari perkembangan pembangunan kita selama ini yang derapnya semakin cepat dan wujudnya semakin kompleks.

Kualitas sumber daya manusia harus dilihat dari dua segi, yaitu (1) nilai intrinsiknya (etis, religius, intelektual, dan fisik) dan (2) kemampuannya sebagai pelaku pembangunan. Yang kedua ini terutama mencakupi (a) kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja dan (b) kualitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan, kita memerlukan, antara lain, kegiatan pengalihan iptek. Pengalihan iptek dapat dilakukan melalui (a) pendidikan dan pelatihan formal dan (b) pendidikan nonformal (termasuk di dalamnya kegiatan belajar sendiri). Salah satu pendukung penting kegiatan tersebut adalah penerjemahan karya iptek dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan, ternyata penerjemahan menjadi sangat penting karena dapat menjembatani kekurangmampuan sumber daya manusia kita dalam upaya pengalihan iptek melalui bahasa asing.

b. *Tujuan Makalah*

Makalah ini bertujuan membicarakan keadaan, hambatan, serta tantangan dalam hal penerjemahan karya di bidang iptek. Dalam makalah ini juga akan dikemukakan

saran-saran upaya penanggulangan hambatan-hambatan tersebut. Bidang iptek yang dimaksud dalam makalah ini terbatas pada ilmu alamiah, misalnya biologi, fisika, matematika, kedokteran, teknik, dan rekayasa.

c. Kelompok Sasaran Terjemahan Karya Iptek

Penerjemahan adalah upaya mengalihkan pesan dari satu bahasa (bahasa sumber) ke bahasa lain (bahasa sasaran). Dalam konteks pembicaraan kita, bahasa sumber adalah bahasa asing dan bahasa sasaran adalah bahasa Indonesia. Hal ini perlu karena saya secara khusus mengarahkan perhatian pada dukungan terhadap upaya pengalihan iptek dari negara maju ke masyarakat kita.²

Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: **siapa** kelompok sasaran terjemahan karya di bidang iptek? Menurut pengamatan selama ini, sasaran terpenting adalah kalangan (1) perguruan tinggi, (2) lembaga penelitian dan penerapan teknologi, (3) industri, dan bahkan (4) mereka yang ingin belajar sendiri. Di kalangan itulah terdapat sumber daya manusia yang diharapkan menjadi pelaku pembangunan.

Telah dikatakan bahwa kebutuhan itu timbul karena kesulitan membaca karya dalam bahasa asing di kalangan yang disebut di atas dalam upaya menyerap iptek dari negara maju. Sementara itu, karya di bidang iptek dalam bahasa Indonesia yang mengikuti perkembangan mutakhir masih sangat kurang.³

2. Keadaan Penerjemahan Karya di Bidang Iptek

a. Perkembangan secara kuantitatif

Cukup sulit untuk memperoleh angka-angka hasil penerjemahan di bidang iptek. Tidak ada statistik yang secara nasional menggambarkan karya terjemahan di bidang iptek yang telah diterbitkan. Lembaga yang tepat untuk mengeluarkan statistik seperti itu adalah Pusat Dokumentasi dan Informasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI). Namun, secara umum kita dapat melihat bahwa jumlah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terutama dari bahasa Inggris, setiap tahun meningkat. Meskipun demikian, kalau bidang iptek kita batasi pada bidang ilmu alamiah, biologi, kedokteran, teknologi, serta rekayasa, jumlahnya masih terbatas. Buku ilmiah berupa terjemahan yang diterbitkan dewasa ini, menurut pengamatan saya, kebanyakan dari bidang ilmu sosial dan ilmu budaya.

Perlu juga dicatat bahwa di samping buku terjemahan yang diterbitkan, memang cukup banyak juga hasil penerjemahan di bidang iptek yang tidak diterbitkan. Karya-karya itu biasanya berupa hasil penerjemahan yang dilakukan dalam rangka proyek pembangunan pemerintah (antara lain proyek penerjemahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau proyek pembangunan yang menggunakan teknologi dari luar negeri), dalam rangka kegiatan industri oleh swasta, antara lain deskripsi tentang mesin (besar dan kecil)

serta petunjuk pemasangan dan pemakaiannya, atau dalam rangka kontrak dan memperoleh hak paten.

b. Kualitas Terjemahan

Membicarakan jumlah terjemahan karya di bidang iptek yang diterbitkan mungkin lebih kurang penting dibandingkan dengan membicarakan kualitas terjemahan itu sendiri. Karya ilmiah (misalnya makalah laporan penelitian) menyangkut suatu bidang yang khusus, pada dasarnya memerlukan suatu kecermatan di dalam mengalihkan isi karya itu dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Masalahnya ialah bahwa perkembangan di bidang iptek berbeda di masing-masing masyarakat. Pasti ada perbedaan antara perkembangan di bidang iptek di negara maju dan di Indonesia. Penerjemahan di bidang iptek memang mempunyai sifat khusus, berbeda dengan penerjemahan sastra atau pidato politik atau diplomasi. Salah satu sifatnya yang jelas adalah (a) banyaknya istilah, (b) banyaknya deskripsi tentang sifat-sifat atau proses suatu bahan atau produk, dan (c) cenderung bersifat internasional, meskipun tidak selalu (cf. Snell dan Crampton 1989:81–82). Dari percontoh yang saya ambil dari terjemahan masing-masing di bidang (a) kedokteran, (b) teknik, dan (c) kontrak dan paten, dapat saya simpulkan hal-hal berikut.

- 1) banyak istilah yang masih belum seragam;
- 2) kelemahan dalam menerjemahkan, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan masih terasa dipengaruhi bahasa sumbernya;
- 3) kelemahan dalam penguasaan bahasa sumber (misalnya bahasa Inggris) sehingga terjadi salah menerjemahkan.
- 4) kelemahan dalam penguasaan bahasa Indonesia sehingga hasil penerjemahan tidak layak untuk dibaca.

Khusus mengenai penerjemahan dalam rangka kegiatan di bidang hukum, seperti permohonan untuk memperoleh hak paten, seringkali terjadi masalah penggunaan istilah. Istilah yang digunakan penerjemah meskipun tidak mengganggu pemahaman, tidak sesuai dengan istilah yang digunakan oleh Departemen Kehakiman. Dalam hal ini kesalahan menggunakan istilah mempunyai akibat hukum.⁴

c. Kualitas Penerjemah

Gambaran mengenai kualitas penerjemahan yang diuraikan di atas memperlihatkan betapa masih kurangnya secara umum kualitas penerjemah di bidang iptek. Dengan kata lain, jumlah penerjemah yang baik di bidang iptek masih terbatas. Pengetahuan di bidang iptek sangat khusus sehingga tidak banyak pakar bahasa yang juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang iptek. Sebaliknya, mereka yang berlatar belakang pendidikan iptek tidak banyak yang mampu menerjemahkan. Masalah yang lebih menyulitkan lagi adalah tidak adanya tempat untuk mengetahui secara tepat informasi mengenai penerjemah yang berkualitas baik di bidang iptek.

Bahkan, hal itu tidak hanya merupakan masalah di bidang penerjemahan karya iptek, tetapi merupakan masalah yang umum di bidang penerjemahan.

3. Dunia Penerjemahan di Indonesia dan Masalahnya

a. Pelembagaan Profesi Penerjemah

Masalah dasar yang menjadi hambatan bagi seluruh kegiatan penerjemahan di Indonesia adalah belum terlaksana pelembagaan profesi penerjemah. Pelembagaan profesi penerjemah mencakupi dua hal pokok, yaitu (1) standardisasi kualitas penerjemah dan (2) pendidikan penerjemah. Khusus untuk penerjemahan yang mempunyai nilai hukum, diperlukan pelembagaan penerjemah tersumpah. Dewasa ini, setahu saya, hanya DKI Jakarta yang memiliki peraturan mengenai penerjemah tersumpah. Itu pun tidak terkait secara konsisten dengan standardisasi kualitas penerjemahnya.⁵

Standardisasi kualitas penerjemah seharusnya dilakukan oleh perhimpunan profesional seperti Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Namun, dewasa ini HPI belum mampu memainkan peranan sebagai penentu standar kualitas penerjemah. Pendidikan penerjemah sudah ada di sejumlah perguruan tinggi, tetapi belum berkaitan dengan standardisasi kualitas penerjemah. Jadi, seharusnya standardisasi kualitas berkaitan dengan pendidikan penerjemah, sedangkan pelaksanaan peraturan tentang penerjemah tersumpah harus berkaitan dengan standardisasi kualitas penerjemahannya.

Secara umum pula dapat dikatakan bahwa profesi penerjemah belum melembaga dalam masyarakat meskipun tidak sedikit dan makin banyak orang yang bergerak di bidang penerjemahan. Ini terlihat dari kenyataan bahwa dalam sensus tahun 1980 tidak terdapat kategori pekerjaan penerjemah. Profesi ini secara sosial "terkubur" dalam profesi wartawan, penulis, atau dosen (Hoed, 1991:7). Sebenarnya di negara yang sudah maju pun keadaannya juga tidak lebih baik. Secara umum masyarakat awam belum mengenal benar penerjemah sebagai profesi (Verrinder, 1989:29).

b. Pembakuan Istilah

Pembakuan memang bukan penyeragaman. Pembakuan istilah di bidang iptek berarti melakukan upaya agar terjadi persesuaian dalam penggunaan istilah-istilah tertentu dalam hal cakupan maknanya. Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu terjadi silang pendapat mengenai istilah apa yang harus digunakan dalam suatu karya di bidang iptek. Yang penting adalah definisinya. Namun, dalam pengembangan istilah di bidang iptek seharusnya para pakar bersikap lebih arif dengan mencoba mencari pertemuan pendapat mengenai pemilihan suatu istilah. Dalam kenyataan banyak pakar merasa hasil penemuan istilahnya begitu penting sehingga sekali ditulis dalam suatu karya tidak boleh diganti dengan istilah lain.

Pembakuan istilah harus dilihat sebagai suatu proses pemantapan hubungan antara istilah tersebut dan maknanya. Dalam proses pembakuan ada tahapan yang disebut *intelektualisasi*, yakni makna suatu kata (kemudian menjadi istilah) menjadi makin sempit dan terbatas. Di samping itu, istilah tersebut makin jelas pula hubungannya dengan istilah lain dan membentuk suatu paradigma sehingga terbentuk susunan sejumlah istilah yang saling berkaitan dan bahkan dapat dicakup oleh satu istilah generik (umum). Salah satu contoh adalah pembedaan antara *ahli* dan *pakar* yang seharusnya makin dimantapkan. Mestinya pembedaan itu mengacu pada pembedaan antara *expert* (seseorang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dengan tingkat yang tinggi di bidang tertentu) dan *specialist* (seseorang yang mengabdikan diri pada suatu bidang kajian atau penelitian tertentu). Jadi, seorang *ahli* (*expert*) memang *pakar* (*specialist*) di bidang tertentu, begitu pula sebaliknya. Namun, sudut pandang makna masing-masing istilah tersebut berbeda. Istilah *pakar* melihat pada sudut pandang waktu dan perhatian yang diberikan seseorang pada bidang tertentu, sedangkan *ahli* melihat pada sudut pandang tingginya tingkat atau kadar keterampilan atau pengetahuan seseorang mengenai suatu bidang. Hal ini dapat saja memberi akibat bahwa seorang "pakar" tidak ingin disebut "ahli" karena merasa belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tinggi meskipun sudah lama berkecimpung secara khusus di bidang tertentu. Sayangnya dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), baik edisi pertama maupun kedua, tidak membedakan makna kedua istilah itu. Jadi, dalam KBBI (halaman 716) **pakar** = ahli, spesialis dan (halaman 254) **eksper** = orang yang ahli di bidangnya, pakar.

Contoh di atas masih merupakan contoh yang umum. Contoh di bidang ilmu fisika, misalnya, istilah *absorbtion* yang harus dibedakan dengan *adsorbition*. Yang pertama adalah *penyerapan* dan yang kedua *penjerapan*. Istilah yang kedua ini merupakan ciptaan pakar di bidang yang bersangkutan. Pembedaan ini sangat penting karena yang pertama merupakan proses bersatunya suatu bahan (cair) ke dalam bahan yang lain secara menyeluruh, sedangkan yang kedua terjadi pada suatu bahan (cair) yang memasuki bahan lain (padat atau cair) pada penampang yang luas dan dengan kadar yang hanya sedikit.

Di bidang ilmu lingkungan hidup ada istilah *contaminant* yang dibedakan dengan *pollutant*. Yang pertama adalah bahan yang tercampur pada bahan lain dan biasanya secara teknis belum dapat disebut sebagai mencemari. Yang kedua adalah bahan yang, selain tercampur pada bahan lain, juga mencemari. Jadi, bahan ini melewati ukuran batas ambang. *Contaminant* sementara ini diterjemahkan dengan *kontaminan* dan *pollutant* dengan *bahan pencemar*.

Di bidang pertambangan ada istilah *gas bumi* yang menurut definisinya sama dengan *natural gas*. Sekarang ini terdapat kecenderungan untuk mengganti *gas bumi* dengan *gas alam* yang dianggap lebih tepat untuk menerjemahkan kata *natural*. *Gas bumi* memang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *aard gas* (*aard* = bumi). Kecenderungan ini memang merupakan upaya pembakuan. Namun, apakah hal itu perlu? Bagaimana dampaknya terhadap pemakaian yang sudah terbakukan pada

dokumen dan nama *Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*? Di pihak lain kita memperoleh istilah *bensin alam* yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *natural gasoline*. Lebih menarik bila kita baca definisinya dalam sebuah kamus resmi: "campuran hidrokarbon cair yang diekstrak dari *gas bumi* (huruf miring dari saya) dengan bermacam-macam metode (.....)" dan seterusnya.

Contoh yang lebih menarik adalah penerjemahan di bidang iptek untuk keperluan permohonan perlindungan hukum untuk suatu penemuan (*invention*) yang kita kenal *hak paten*. Dalam hal ini pemakaian istilah berkaitan erat dengan pengakuan hasil teknologi dan kaitannya dengan kekuatan hukum dan fungsinya dalam perdagangan. Sebuah contoh umum di bidang ini adalah istilah *improvement* yang harus betul-betul dibedakan dengan *correction*. Yang pertama berarti 'meningkatkan dari yang baik ke arah yang lebih baik', sedangkan yang kedua 'memperbaiki yang tadinya salah'. Kalau salah satu dari kedua istilah itu diterapkan pada suatu produk teknologi, dampaknya secara komersial pun menjadi lain. Jadi, kalau suatu penemuan suatu produk dinyatakan sebagai *improvement* produk lain yang sudah ada, implikasinya produk lain itu sudah baik dan betul. Akan tetapi, kalau suatu penemuan produk dinyatakan sebagai *correction* dari produk yang sudah ada, maka implikasinya produk yang lain itu dianggap salah atau kurang baik. Bagaimana kedua kata itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Mestinya *improvement* diterjemahkan dengan *peningkatan* dan bukan *perbaikan* karena yang kedua dapat memberi makna 'memperbaiki sesuatu yang tidak/belum baik', sedangkan *peningkatan* lebih memberikan makna 'menambah kebaikannya'. Jadi, *correction* seharusnya diterjemahkan dengan *koreksi* atau *perbaikan*.

Ternyata bahwa istilah-istilah tertentu di bidang iptek telah dibakukan oleh Departemen Kehakiman dan mempunyai nilai hukum. Tidak jelas dasar apa yang dipakai untuk membakukan istilah-istilah itu. Jadi, untuk menjadi istilah yang berkekuatan hukum (untuk mendapat perlindungan hukum/paten) istilah *volatile* tidak dapat diterjemahkan dengan *menggerbak* (yang kelihatannya dipakai di kalangan akademis), tetapi *mudah menguap*. Mungkin ini dapat dilihat sebagai dua istilah untuk pengertian yang sama, masing-masing sebagai istilah akademis (*menggerbak*) dan teknis (*mudah menguap*). Kata *gelung* yang diperkenalkan dalam salah satu kamus istilah tidak dapat diterima sebagai terjemahan dari *loop*, sehingga sementara ini *loop* dipakai sebagai istilah pinjaman. Yang menarik dan positif adalah pemakaian istilah *kempa mekanis* untuk *mechanical press* dan bukan *pengepres mekanis*. Ini merupakan hal yang konstruktif, dan mungkin *pengepres mekanis* masih dapat digunakan sebagai istilah untuk kalangan montir.

Bagaimanapun, penerjemahan di bidang iptek sudah waktunya mendapat perhatian khusus dari kalangan iptek sendiri dan kalangan ahli bahasa karena berkaitan dengan industri, perdagangan, dan hukum. Pembakuan istilah dan kodifikasinya sangat penting bagi kegiatan penerjemahan. Bahkan, pembakuan dan kodifikasi merupakan pendukung utama kegiatan penerjemahan. Sebaliknya, kegiatan penerjemahan dengan hasil baik dapat merupakan sumbangan bagi upaya pembakuan

istilah karena tidak jarang penerjemah berperan sebagai "pencipta" istilah baru. Pembakuan istilah dan kodifikasinya harus merupakan kegiatan berlanjut dan ditangani secara profesional, baik dari segi substansinya (oleh ahli dan pakar di bidang iptek) maupun teknis leksikografisnya (oleh ahli dan pakar di bidang bahasa).

4. Hambatan, Tantangan, dan Upaya Penanggulangan

a. Hambatan

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa hambatan dalam penerjemahan karya iptek adalah:

- 1) kualitas penerjemahan yang masih belum memadai;
- 2) kualitas sebagian besar penerjemah yang ada belum memadai;
- 3) masih banyak istilah bahasa Indonesia yang belum baku dan masih banyak istilah bahasa asing yang belum ada terjemahannya;
- 4) keadaan profesi penerjemah secara kelembagaan belum mantap.

b. Tantangan

Dalam upaya menanggulangi hambatan-hambatan itu, sejumlah tantangan perlu kita hadapi, yaitu:

- 1) *Pendidikan*, pendidikan formal dan nonformal penerjemah—termasuk penerjemahan di bidang iptek—perlu kita benahi dari segi kualitas program dan pengajarnya.
- 2) *Pembakuan dan kodifikasi*, pembakuan istilah perlu diteruskan dan dikodifikasikan secara lebih cepat dan dengan penyebaran yang lebih mengenai sasaran.
- 3) *Standardisasi kualitas penerjemah*, perlu dilakukan standardisasi kualitas penerjemah, baik dari segi peringkatnya maupun bidang pengkhususannya, dan
- 4) *Program penerjemahan yang terarah*, penerjemahan karya iptek perlu didukung program yang lebih terarah dan dana khusus karena penerjemahan yang baik dapat memberikan sumbangan pada pembentukan dan pembakuan istilah dalam bahasa Indonesia, dan selanjutnya mendukung upaya pengalihan iptek dari negara maju ke Indonesia.

c. Upaya Penanggulangan

Berikut ini akan saya kemukakan beberapa saran upaya penanggulangan hambatan-hambatan yang disebutkan tadi serta upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam penerjemahan di bidang iptek. Upaya itu mencakup hal-hal sebagai berikut.

(1) Pendidikan

Penerjemah adalah seorang yang harus mampu mengalihkan pesan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Jadi, ia harus menguasai kedua bahasa yang bersangkutan dan

mampu pula memperoleh pedoman yang diperlukan. Untuk itu, selain pengalaman, diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi seorang penerjemah.

Pendidikan formal yang realistik untuk diselenggarakan di Indonesia adalah pada tingkatan *Spesialis 1* dan *Spesialis 2*. Jadi, masukannya harus S1 dengan syarat telah lulus tes masuk. Pendidikan formal pada tingkat yang lebih rendah menurut pengalaman saya tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Perlu ada dukungan Pemerintah untuk pendidikan di tingkat *Spesialis* ini.

Pendidikan nonformal seperti penataran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Lokakarya oleh Program Pendidikan Penerjemah dan Juru Bahasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia (PPPJ-FSUI) perlu dilanjutkan. Pendidikan nonformal seperti itu berfungsi sebagai terobosan dan pengembangan kualitas. Penataran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sangat baik untuk para pemula dan mereka yang mulai melakukan penerjemahan buku teks bagi perguruan tinggi, sedangkan lokakarya oleh PPPJ-FSUI lebih ditujukan kepada mereka yang sudah berpengalaman dan ingin meningkatkan kemampuannya dalam penerjemahan di bidang tertentu.

(2) *Pembakuan dan Kodifikasi*

Pembakuan harus dilakukan secara terus-menerus. Pembakuan tidak cukup dengan melemparkan istilah-istilah baru ke tengah-tengah masyarakat. Bahkan seharusnya, jika sudah ada istilah untuk sesuatu konsep, tidak perlu lagi para pakar bahasa melemparkan istilah baru. Jadi, kalau sudah ada *efisien* dan *efektif* tidak perlu lagi ada *berdaya guna* dan *berhasil guna*, apalagi *sangkil* dan *mangkus*.

Istilah di bidang iptek dapat dibagi menjadi dua golongan (a) istilah akademis atau teknis dan (b) istilah populer (cf. Newmark, 1988:234). Misalnya, di bidang kedokteran untuk pengertian yang sama ada perbedaan pemakaian antara *resistensi* dan *daya tahan tubuh*. *Resistensi* lebih banyak digunakan dalam kalangan akademis/dokter, sedangkan *daya tahan tubuh* merupakan istilah populer. Begitu pula *diabetes melitus* dan *variola* untuk *penyakit kencing manis* dan *cacar*. Di bidang biologi ada istilah *spina* yang sama dengan *duri*. Yang terakhir adalah istilah yang digunakan dalam karangan populer. Di bidang teknik, *dimensi mesin* lebih banyak digunakan di kalangan akademis, sedangkan *ukuran mesin* lebih di kalangan montir atau bengkel.

Kodifikasi istilah penting sekali dan harus dilakukan secara konsisten. Hal ini memang terus dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam bentuk daftar istilah dan kamus istilah. Penerbitan kamus istilah di bidang iptek sangat penting. Penerbitan daftar istilah saja tidak cukup untuk mendukung kegiatan penerjemahan yang baik. Pembakuan juga harus menerima masukan dari para penerjemah. Terjemahan yang baik dapat menjadi sumber untuk memperoleh istilah-istilah baru. Yang juga penting mendapat perhatian adalah penyebarannya di kalangan pemakai, termasuk para penerjemah. Pengembangan istilah di bidang iptek,

tidak hanya di kalangan akademis dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang harus aktif, tetapi PDII-LIPI juga harus diikutsertakan.

3) *Standardisasi Kualitas Penerjemah*

Standardisasi kualitas penerjemah berarti pembakuan peringkat kemampuan profesional penerjemah. Sistem yang berlaku di negara seperti Australia membedakan empat peringkat (*levels*) kemampuan. Masing-masing peringkat mencerminkan kemampuan tertentu di bidang penerjemahan. Pemberian suatu peringkat kepada penerjemah didasarkan pada ujian yang diberikan oleh suatu lembaga yang mempunyai otoritas profesional di bidang penerjemahan. Di Australia ada badan nasional yang sangat dihormati dan sangat menjaga integritas profesionalnya. Di Indonesia badan semacam ini belum ada. Di bidang kedokteran, organisasi profesi (spesialis) mempunyai wewenang profesional untuk menentukan peringkat profesional tertentu. Sebenarnya HPI harus dapat bertindak seperti itu. Namun, pada saat ini HPI masih belum mampu melakukan hal itu secara profesional karena secara organisasi dan profesional masih lemah. Perlu dipikirkan adanya badan semacam itu yang dikaitkan dengan pendidikan. Standardisasi kualitas penerjemah perlu untuk mendukung hasil penerjemahan yang baik dan dapat dipercaya.

(4) *Program Penerjemahan yang Terarah*

Program penerjemahan di bidang iptek harus dilakukan secara lebih terarah. Maksudnya adalah agar para pakar di (a) perguruan tinggi, (b) lembaga penelitian dan penerapan iptek, dan (c) lembaga penelitian dan penerapan teknologi di industri (swasta) perlu mengusulkan judul-judul buku atau karya lain di bidang iptek untuk diterjemahkan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus secara aktif dan sistematis mengumpulkan judul-judul itu untuk dipublikasikan sehingga mereka yang berminat menerjemahkan dapat daftar tersebut sebagai acuan. Daftar ini harus diketahui oleh para penerbit yang tentunya dapat memanfaatkannya untuk tujuan komersial. Penyediaan dana dari Pemerintah perlu, tetapi hanya untuk penerjemahan karya yang tidak mudah dipasarkan (tidak diminati oleh penerbit swasta), padahal sangat diperlukan.

Dalam pada itu, PDII-LIPI perlu bertindak sebagai pusat informasi karya-karya di bidang iptek yang telah diterjemahkan dan diterbitkan. Informasi ini penting bagi mereka yang perlu memanfaatkannya, atau menghindari penerjemahan ganda, atau bagi penerbit yang ingin menawarkan suatu karya untuk diterjemahkan.

(5) *Penerjemahan dalam Tim*

Penerjemahan di bidang iptek memerlukan pengetahuan khusus di bidang yang bersangkutan. Penerjemah yang ahli bahasa seringkali mengalami kesulitan dalam penerjemahan karya di bidang iptek karena tidak menguasai makna istilah-istilah yang

harus diterjemahkan. Sebaliknya, pakar di bidang iptek yang bersangkutan belum tentu mampu menerjemahkan. Dalam hal demikian, penerjemahan harus dilakukan dalam sebuah tim yang terdiri atas ahli bahasa dan ahli di bidang substansi yang harus diterjemahkan.

Dengan cara di atas biasanya dapat diharapkan hasil penerjemahan yang baik dan sekaligus mendukung upaya pembakuan istilah.

5. Kesimpulan

Kebutuhan akan penerjemahan karya di bidang iptek tidak dapat diragukan lagi. Dalam rangka menunjang pengalihan iptek dari negara maju diperlukan penerjemahan karya di bidang iptek sebagai upaya menjembatani kesulitan membaca buku atau tulisan yang berbahasa asing di bidang iptek. Kebutuhan ini tidak hanya karena memang iptek penting dalam pembangunan kita, tetapi juga, seperti telah kita lihat, berkaitan dengan pembangunan industri, perdagangan, dan hukum. Dalam upaya kita menangani penerjemahan di bidang ini, ternyata terdapat sejumlah hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, perlu ada perhatian yang lebih besar pada bidang ini.

Hambatan dalam penerjemahan di bidang iptek meliputi (1) jumlah penerjemah yang di bidang iptek berkualitas baik masih terbatas, (2) banyak istilah yang masih belum seragam dan masih banyak istilah asing yang belum mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia, dan (3) kurang lancarnya kegiatan pembakuan istilah dan penerbitan kamus istilah.

Tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi hambatan-hambatan itu adalah (1) perlunya peningkatan dan standardisasi kemampuan profesional penerjemah, (2) perlunya pembakuan istilah secara lebih konsisten, dan (3) perlunya pelembagaan penerjemah tersumpah yang konsisten dengan standardisasi kemampuan profesional penerjemah.

Untuk menanggulangi hambatan dan tantangan tersebut di atas, disarankan sejumlah upaya penanggulangan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah, perguruan tinggi, dan juga swasta perlu meneruskan dan meningkatkan pendidikan nonformal dalam bentuk penataran dan lokakarya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan penerjemah yang sudah berpengalaman atau baru mulai.
- 2) Pemerintah perlu mempercepat jalannya pembakuan istilah Indonesia di bidang iptek dan kodifikasinya. Pembakuan tidak hanya cukup dengan melemparkan istilah ke masyarakat, tetapi harus dengan memberikan definisi sebuah istilah dalam kamus atau leksikon istilah di bidang iptek. Perlu ada kesepakatan mengenai istilah di antara para ahli dan pakar. Paling sedikit ada kesepakatan mengenai definisinya agar dapat membantu upaya pembakuan istilah dan dengan sendirinya meringankan beban penerjemah dalam tugasnya. Hasil kerja pener-

jemah juga merupakan masukan yang berharga bagi pembakuan istilah. Terjemahan yang baik dapat merupakan sumber untuk memperoleh istilah baru.

- 3) Pemerintah perlu membuka pendidikan formal penerjemah dan juru bahasa *Spesialis 1* dan *Spesialis 2*. Tidak disarankan untuk membuka pendidikan seperti itu di tingkat *Diploma* karena pendidikan penerjemah dan juru bahasa memerlukan masukan paling rendah S1. Pendidikan formal seperti ini perlu dipersiapkan dengan baik dan didukung oleh tenaga pengajar yang profesional dan berkelayakan.
- 4) Pemerintah, melalui perguruan tinggi, perlu melakukan standarisasi kualitas penerjemah dan juru bahasa secara bertahap dikaitkan dengan pendidikan penerjemah dan juru bahasa agar dapat dijamin adanya terjemahan yang baik dan dapat dipercaya, di samping pelembagaan profesi penerjemah tersumpah.
- 5) Pemerintah perlu mendukung program penerjemahan yang lebih terarah di bidang iptek karena sangat dibutuhkan agar dapat mendukung secara lebih efisien dan efektif upaya pengalihan iptek dan pengembangan industri serta perdagangan, termasuk segi hukumnya. Keikutsertaan pihak swasta (industri, penerbit) perlu digalakkan/didorong.
- 6) Penerjemahan yang lebih terarah itu perlu didukung oleh sistem penerjemahan dengan tim yang terdiri atas pakar bahasa dan pakar di bidang iptek yang bersangkutan guna menjamin kualitas terjemahan yang baik.
- 7) Perlu ada bantuan dana pemerintah dalam upaya-upaya penanggulangan tersebut. Namun, bantuan itu dibatasi pada bidang yang diperlukan dan tidak mudah dipasarkannya penerbitannya.

Demikianlah sumbangan pikiran saya bagi Kongres Bahasa Indonesia VI ini. Semogasehat kita--Pemerintah dan masyarakat--tidak hanya sampai dalam Kongres ini saja. Saya ingin mengimbau Pemerintah dan masyarakat agar bidang penerjemahan tetap mendapat perhatian, bahkan lebih banyak perhatian. Khusus untuk penerjemahan di bidang iptek, saya menghimbau perhatian khusus dari kalangan iptek sendiri. Penerjemahan dapat merupakan penyalur yang efektif kemajuan iptek di negara maju ke dalam masyarakat kita yang sedang membangun ini.

CATATAN

1. Lektor Kepala, Linguistik dan Teori Penerjemahan, Koordinator Program Pendidikan Penerjemah dan Juru Bahasa (PPPJ), Fakultas Sastra Universitas Indonesia, dan Staf Ahli bidang Bahasa dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
2. Di Jepang, pengalihan iptek yang pertama dilakukan melalui penerjemahan buku tentang anatomi dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Jepang (abad ke 18). Selanjutnya modernisasi Jepang terjadi pada jaman berkembangnya penerjemahan. Pada abad ke-19 70% buku yang terdapat di kementerian Pendidikan adalah terjemahan. Studi dan penerjemahan berjalan seiring. Penerjemahan karya iptek dilakukan kebanyakan oleh para pakar di bidang yang bersangkutan (Minowa 1984:17-25).

3. Memang ada yang berpendapat bahwa penerjemahan tidak pernah dapat dilakukan dengan baik dan memuaskan karena latar belakang kebudayaan setiap karya dan bahasanya berbeda. Namun, khususnya di bidang iptek, ada kecenderungan konvergensi budaya sehingga penerjemahan di bidang iptek tidak terlalu banyak terpengaruh oleh perbedaan budaya, meskipun tidak harus lebih mudah (cf. Mounin 1963).
4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Toeti H. Noerhadi, Pimpinan Biro Oktroi Roosseno (BOR), yang telah memberikan keterangan mengenai prosedur permohonan perlindungan hukum atas suatu penemuan (hak paten) dan memberikan kepada saya kesempatan untuk mempelajari beberapa teks terjemahan. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Sdr. Effendi Yahya, salah seorang staf dan penerjemah BOR.
5. Praktik yang dilakukan sekarang adalah banyak penerjemah tersumpah yang tidak menerjemahkan, tetapi mengesahkan terjemahan agar mempunyai kekuatan hukum. Juga tidak sedikit orang yang merasa tidak puas dengan beberapa penerjemah tersumpah yang mereka gunakan jasanya. Sulit untuk segera mengetahui penerjemah tersumpah mana yang baik untuk suatu penerjemahan di bidang tertentu, kecuali jika sudah mengenal betul orang dan hasil kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoed, B.H. 1991. *Improving the capabilities of Translators and Institutionalizing Their Profession in Indonesia* (makalah untuk *Conference of the Interpreter Educator's Association of Australia*, Melbourne, Australia, 3-5 Oktober 1991). Tidak diterbitkan.
- Minowa, S. 1984. "The Development of Professional Translation in Japan" dalam *International Conference on Translation, The Role of Translation in National Development* (17-25). Kuala Lumpur: The Malaysian Translators Association.
- Mounin, G. 1963. *Les problèmes théoriques de la traduction*. Paris: Gallimard.
- Newmark, P. 1988. *A Textbook of Translation*, New York: Prentice Hall
- Snell, B. dan P. Crampton. 1989 (1983). "Types of Translations" dalam C. Picken (Ed.). *The Translator's Handbook* (71-86). London: Aslib.
- Verrinder, J. 1989 (1983). "Who are the Translators?" dalam C. Picken (Ed.). *The Translator's Handbook* (27-33). London: Aslib.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Hambatan dan Tantangan dalam Penerjemahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pemakalah : B.H. Hoed
Pemandu : I Wayan Bawa
Pencatat : Zaenal Arifin
Farida Ariani

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Yon Adlis, Universitas Jambi

- Manakah yang lebih baik, apakah penerjemah harus seorang spesialis ilmu atau spesialis bahasa, baik bahasa sumber maupun bahasa tujuan.
- Sebaiknya penerjemah bukan S_1 , tetapi master atau S_2 .
- Saya menyarankan agar kita membuat tim atau badan penerjemah di Indonesia kalau kita ingin memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Badan penerjemah diharapkan mampu mewadahi bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai bahasa ilmu.

Jawaban:

- Dalam penerjemahan karya ilmu pengetahuan dan teknologi ada masalah, kalau penerjemah dari bidangnya, yang menjadi masalah adalah bahasanya, dan kalau ia dari bahasa, yang menjadi masalah adalah bidangnya. Saya mengusulkan yang dibentuk adalah tim, bukan mendirikan badan karena badan sudah banyak tetapi tidak berfungsi. Secara teori dikatakan bahwa kalau orang terlalu menguasai bidang-bidang, maka ia cenderung sembrono. Tugas dari penerjemah adalah memindahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran.
- Penerjemah memang harus spesialis yang artinya pasca atau S_2 .

2. **Pertanyaan:** Nursehan Lubis, Departemen Pertambangan dan Energi

Dalam makalah Bapak tertulis antara *gas bumi* dan *gas alam*. Yang paling tepat dalam hal ini adalah *gas alam*. Misalnya, di tim ada namanya *liquefied natural gas* diterjemahkan *gas alam* cair. Perubahan ini harus diadakan dengan pendekatan instansi terkait, yaitu Departemen Pertambangan dan Energi dan mengadakan kerja sama dengan membentuk suatu tim. Pada prinsipnya sangat setuju membentuk satu tim, yaitu dari Pusat bahasa, substansi, dan LIPI.

Jawaban:

Dalam pemakaian *gas alam* dan *gas bumi* kalau memang perlu perubahannya, maka yang mengubahnya adalah pakar dari bidang tersebut agar tepat artinya.

Tambahan jawaban: Pak Purwo, ITB Bandung

Di Amerika *gas alam* disebut *natural gas*, dan di Jerman disebut *natargas*. Ini sudah disepakati yang akhirnya terbentuk minyak gas alam dan bumi. Hal tersebut untuk mengimbangi Pertamina menggunakan usaha *geothermal*. Jadi, *gas alam cair*. Menurut Tata Bahasa Baku *gas alam cair* salah, yang betul adalah *gas bumi yang sudah dicairkan*.

3. Pertanyaan: Dameria Nainggolan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Istilah bidang ilmu mempunyai buku rujukan, antara lain, *Dictionary Scientific and Technical Termy* dan pada buku halaman kuning terbitan Elnusa. Selain itu, Pusat Bahasa mempunyai kamus bidang ilmu dan daftar istilah untuk membantu penerjemah.

Jawaban:

Tim dalam bidang tertentu perlu dan ini sudah disepakati. Kalau kita salah menerjemahkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempunyai akibat di bidang ekonomi dan perdagangan. Tetapi ada lagi yang penting adalah di bidang patens, karena paten mempunyai latar belakang suatu produk. Oleh sebab itu, ini harus diterjemahkan secara tepat.

4. Pertanyaan: Boyke, Antara

- a. Apakah BPPT sudah terlibat, dilibatkan, atau melibatkan diri dalam menerjemahkan dan menjelaskan buku-buku iptek?
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lama dan baru ada satu kata bermakna bukan hanya berbeda, tetapi juga bertentangan. Misalnya, kata *jebolan* artinya 'lulusan' selain dari arti tersebut ada lagi arti yang lain, yaitu 'keluar dari lembaga pendidikan karena sudah tamat', dan 'keluar dari lembaga pendidikan karena tidak tamat'. Apakah dalam hal seperti ini kita dapat mengandalkan kamus, dan apakah lembaga tersebut siap dengan dirinya meningkatkan statusnya?
- c. Bagaimanakah dengan pengaturan hak cipta, dan apakah untuk penerjemah harus ada hubungan dengan penulis atau tempat asalnya?
Apakah penerjemah kita sudah terlindung dengan undang-undang?

Jawaban:

- a. Sekolah penerjemah sedang dalam persiapan.
- b. Dalam melihat kamus, kita harus cermat dan kritis, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa asing. Sebab, kemampuan seseorang dalam menulis kamus terbatas, kecuali kalau kamus tersebut sudah tingkat *Webster's* atau kamus *Oxford*. Kita juga harus berpikir, apakah perlu kamus yang tebal tersebut harus ditangani pemerintah? Karena pemerintah sumber dayanya terbatas, maka hal ini serahkan pada penerbit yang cukup mempunyai dana.
- c. Sikap suatu kata, ini pendapat orang berbeda-beda dan ini adalah bahasa Indonesia.

KEMAJUAN DALAM PENELITIAN BAHASA INDONESIA

B. Karno Ekowardono
FPBS IKIP Semarang

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 menetapkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penjelasan pasal itu menyatakan bahwa di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu merupakan sebagian kebudayaan Indonesia yang hidup.

Selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, di Indonesia dipakai juga bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk keperluan hubungan luar negeri dan pemerolehan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Atas dasar kenyataan itu, Pemerintah telah menetapkan politik bahasa nasional, yakni kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah bahasa di Indonesia.

Salah satu fungsi politik bahasa nasional adalah memberikan dasar dan pengarahan bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional, dan pada waktu yang sama memberikan jawaban atas pertanyaan pokok yang berhubungan dengan:

- 1) fungsi dan kedudukan bahasa nasional (bahasa Indonesia) dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa-bahasa asing;
- 2) penentuan ciri bahasa Indonesia baku;
- 3) tata cara pembakuan dan pengembangan bahasa nasional;
- 4) pengembangan pengajaran bahasa nasional pada semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi (Halim, 1984:16).

Politik bahasa nasional juga memberikan dasar dan pengarahan bagi masalah bahasa nasional di dalam hubungannya dengan:

- 1) pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar lembaga pendidikan,
- 2) pelaksanaan administrasi pemerintah,

- 3) pengembangan ketenagaan baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan swasta,
- 4) pengembangan kesusastraan nasional,
- 5) pengembangan kebudayaan nasional,
- 6) peningkatan mutu dan jumlah bahan bacaan umum,
- 7) peningkatan mutu persuratkabaran dan siaran radio serta televisi, dan
- 8) penulisan buku-buku ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk karangan asli maupun dalam bentuk terjemahan (Halim, 1984:16).

Jadi, politik bahasa nasional sebagai kebijakan resmi mengenai keseluruhan masalah bahasa yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing yang dipergunakan di Indonesia, memberikan dasar pegangan dan pengarah yang diperlukan di dalam penentuan ciri-ciri bahasa baku, di dalam usaha pembakuan dan pengembangan bahasa, dan di dalam pengembangan pengajaran bahasa. Sebagai kebijakan nasional yang resmi, politik bahasa nasional dapat dijadikan dasar di dalam penentuan skala prioritas di dalam perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia pada masa yang akan datang (Halim, 1984:25).

Program penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia itu--mengingat perlunya peningkatan pengembangan bahasa demi tercapainya tujuan akhir, yakni "kemampuan untuk mempergunakan bahasa Indonesia yang sebaik mungkin di kalangan masyarakat luas sebagai sarana komunikasi nasional antarmanusia Indonesia" (Repelita Kedua: 230)--oleh Pemerintah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua. Untuk melaksanakan program ini Pemerintah menugasi Lembaga Bahasa Nasional. Kemudian, dengan Surat Keputusan Presiden No.45 tahun 1974, Lembaga Bahasa Nasional itu diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang berkedudukan di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Repelita Kedua (1974/1975—1978/79) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melaksanakan dua proyek, yakni (1) Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah dan (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah. Pelaksana kedua proyek tersebut bukan hanya dari lingkungan Lembaga Bahasa Nasional atau kemudian Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi juga dari universitas, IKIP, ITB, IPB, IAIN, dan lain-lain.

Pada masa sebelum Proyek Penelitian Bahasa masuk ke dalam Repelita Kedua, penelitian bahasa tentu sudah dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang mengelola Jurusan Bahasa Indonesia. Namun, penelitian itu mungkin bersifat swasta atau dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penulisan skripsi, tesis, atau disertasi.

Masalah yang timbul dari keadaan itu ialah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana gambaran umum mengenai kemajuan usaha penelitian bahasa Indonesia dewasa ini?
- 2) Aspek-aspek bahasa Indonesia apa saja yang telah diteliti?

- 3) Bagaimana gambaran umum mengenai mutu hasil penelitian bahasa Indonesia yang telah dilakukan selama ini?
- 4) Upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan usaha dan mutu penelitian bahasa Indonesia?

Pembahasan masalah itu satu persatu akan dilakukan di bagian berikut secara berturut-turut. Dalam pembahasan ini tentu saja tidak mungkin semua hasil penelitian dapat terjangkau, mengingat tidak semua hasil penelitian dicetak dan dipublikasikan, atau kalau sudah diterbitkan, karena keterbatasan saya, terbitan itu belum bisa saya peroleh. Oleh karena itu, dalam pembahasan masalah-masalah itu saya akan bersandar kepada hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang dapat saya peroleh.

2. Gambaran Umum tentang Kemajuan Usaha Penelitian Bahasa Indonesia

Setelah bahasa Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara, kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dasar itu ialah adanya (1) Ejaan Republik yang sesuai dengan sistem bunyi bahasa Indonesia, (2) istilah Indonesia, (3) daftar kosakata atau kamus, dan (4) tata bahasa yang dapat dipakai sebagai pegangan orang mengajar dan belajar bahasa Indonesia.

Untuk keperluan penyusunan ejaan yang sesuai dengan sistem bunyi bahasa Indonesia, tentulah diperlukan usaha penelitian atau telaah bidang fonologi dan tata bahasa. Begitu juga untuk penyusunan buku tata bahasa diperlukan telaah bahasa, untuk penyusunan kamus diperlukan telaah kosakata, baik secara semantis, fonemis, grafis, morfologis maupun sintaktis. Untuk penyusunan istilah pun diperlukan telaah semantis secara kontrasif, dalam rangka alih konsep dari istilah bahasa Barat (waktu itu bahasa Belanda dan kemudian Inggris) ke istilah bahasa Indonesia.

Sebagai hasil usaha-usaha itu, pada 19 Maret 1947 Ejaan van Ophuijsen diganti dengan Ejaan Republik, yang kita kenal juga sebagai Ejaan Suwandi. Hasil pengkajian peristilahan yang dibukukan waktu itu memang belum ada, tetapi istilah baru sudah mulai diciptakan oleh tokoh seperti Prof. Dr. Ir. Yohanes dan Prof. Sutarmaji.

Usaha yang berupa lembaga tampak dari berdirinya Komisi Istilah yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang dan pada 13 Mei 1950 komisi ini tumbuh menjadi Balai Bahasa di lingkungan Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 1953 sebagai hasil usaha pengkajian di bidang kosakata terbit untuk pertama kalinya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, susunan W.J.S. Poerwadarminta. Kamus besar lain yang sezaman dengan itu adalah *Kamus Modern Bahasa Indonesia* susunan St.M. Zain.

Pada tahun 1950 terbit buku tata bahasa Indonesia buah karya M.G. Emeis, tetapi menggunakan bahasa Belanda. Untuk keperluan proses belajar mengajar bahasa Indonesia para pakar menyusun sendiri buku tata bahasa Indonesia. Pada tahun 1949

terbit buku *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia* karya Sutan Takdir Alisyahbana (1949). Selanjutnya, terbit buku tata bahasa yang ditulis oleh Madong Lubis (1954), I.R. Poedjawijatna dan P.J. Zoetmulder (1955), C.A. Mees (1955), Tardjan Hadidjaja (1956). Setelah para bahasawan mengenal tata bahasa struktural, buku-buku tata bahasa tersebut kemudian disebut sebagai tata bahasa tradisional.

Menyadari kekurangan buku-buku itu, Slametmuljana menyusun tata bahasa yang lebih bersifat teknis, yaitu *Kaidah Bahasa Indonesia* (1959, 2 jilid) dan buku sintaksis karya A.A. Fokker diterjemahkan oleh Djonhar (1960).

Strukturalisme di Eropa sudah muncul sejak Ferdinand de Saussure (1915), tetapi gemanya mulai terasa di Indonesia baru tahun 1960-an, hampir bersamaan dengan munculnya tata bahasa generatif transformasi (1957). Tahun-tahun menjelang pemberontakan G 30 S PKI memang tahun-tahun ekonomi sulit. Oleh karena itu, hasil-hasil kajian bahasa kebanyakan hanya didiktatkan dengan peredaran terbatas. Di sini dapat disebutkan antara lain *Struktur Bahasa Indonesia* karya Umar Junus yang mencoba menerapkan analisis tata bahasa generatif transformasi. Buku panduan *Analisis Bahasa* karya Samsuri yang dulu judulnya berbunyi *Analisa Bahasa* (1978) semula juga beredar dalam bentuk diktat stensilan. Buku yang terbit dalam bentuk cetakan adalah buku M. Ramlan *Ilmu Bahasa Indonesia: Morfologi* (1967) yang menggunakan pendekatan struktural Amerika. Kajian struktural yang terbit kemudian adalah *Tata Bahasa Indonesia* karya Gorys Keraf (1970), tetapi khusus tentang penggolongan kalimat, Gorys Keraf menggunakan teori tata bahasa generatif transformasi. Penelitian kalimat yang menggunakan analisis tata bahasa generatif transformasi secara utuh baru muncul pada dasawarsa 1980, antara lain *Tata Kalimat Bahasa Indonesia* karya Samsuri (1985).

Pada dasawarsa 1960-an perhatian terhadap analisis wacana sudah timbul. Itu tampak, antara lain, dari artikel Umar Junus *Hubungan Antar Kalimat dalam Bahasa Indonesia Tertulis* (1963). Perhatian terhadap analisis wacana itu baru berlanjut pada akhir dasawarsa 1970, yakni dengan ditampilkannya makalah berjudul *Keutuhan Wacana* dalam Konferensi Bahasa dan Sastra Indonesia (1978).

Usaha penelitian bahasa Indonesia tampak lebih maju sejak pertengahan tahun 70-an. Agaknya kemajuan ini sejalan dengan situasi sosial-politik-ekonomi yang mulai mapan. Pada masa itu terdapat beberapa peristiwa penting yang mendorong kemajuan usaha penelitian bahasa Indonesia, yaitu (1) berdirinya proyek kerja sama antara Universitas Leiden dan Lembaga Bahasa Nasional yang dikenal dengan nama RUL (1974); (2) berdirinya proyek kerja sama kebahasaan antara Universitas Leiden dan Lembaga Bahasa Nasional, yang bernama *Indonesian Linguistic Development Project*; (3) masuknya program penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah ke dalam Repelita II; (4) penyelenggaraan program doktor di dalam negeri yang kemudian diperluas menjadi program pascasarjana dan peningkatan tugas belajar ke luar negeri; (6) berdirinya pusat penelitian pada universitas dan institut; (7) meningkatnya penerbitan buku dan majalah ilmiah; (8) meningkatnya penyelenggaraan seminar kebahasaan. Masing-masing diuraikan di bagian berikut secara urut.

1) Kerja Sama antara Universitas Leiden dengan Lembaga Bahasa Nasional (=RUL-18)

Pada tahun 1971 disepakati proyek kerja sama antara Rijksuniversiteit Leiden (RUL) dan Lembaga Bahasa Nasional. Proyek itu dikenal dengan nama RUL-18. Selama dua tahun 13 orang linguist Indonesia mendapat pelatihan dalam penelitian bahasa-bahasa daerah dengan hasil yang cukup memuaskan: 8 orang di antara mereka telah berhasil mencapai gelar doktor di bidang linguistik. Meskipun penelitian yang menyangkut bahasa Indonesia hanya sebuah, yakni penelitian Rusyana (1975), pendoktoran linguist Indonesia itu merupakan modal potensial bagi pengkajian bahasa di Indonesia, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia.

2) Indonesian Linguistics Development Project (= ILDEP)

Mulai tahun 1974 Proyek RUL itu akan diubah menjadi *Indonesian Linguistics Development Project* (ILDEP). Namun, karena kendala administrasi dan birokrasi, baru 1 Januari 1977 secara resmi proyek itu melakukan kegiatan dengan nama ILDEP. Proyek ini mulai tahun 1974 mengadakan pelatihan intensif secara berjenjang kepada para sarjana bahasa dan sastra Indonesia. Pelatihan yang menggunakan tenaga pengajar dari Belanda, Indonesia, dan negara lain itu meliputi pelatihan (1) leksikografi (1974), (2) sosiolinguistik (1975), (3) dialektologi (1976), (4) terjemahan (1977), (5) sastra (1978), (6) morfologi dan sintaksis (1979), (7) linguistik historis komparatif. Setiap angkatan diikuti oleh 30 orang, dan 5 orang di antaranya dipilih untuk melanjutkan studi di Universitas Leiden, Belanda. Sekarang ini 21 di antaranya sudah berhasil meraih gelar doktor. Namun, penelitian mereka itu sebagian besar adalah penelitian bahasa daerah. Penelitian mengenai bahasa Indonesia hanya dua orang, keduanya dari kelompok pelatihan morfologi dan sintaksis tahun 1979. Meskipun demikian, usaha pendoktoran lebih dari dua puluh orang sarjana bahasa Indonesia itu pasti tidak sia-sia bagi usaha memajukan penelitian bahasa Indonesia pada masa mendatang.

Kegiatan ILDEP I dilanjutkan dengan kegiatan ILDEP II. Program ILDEP II ialah (1) membantu mahasiswa S-2 dan S-3 menyelesaikan studinya, khususnya membantu penelitian mereka untuk penyusunan tesis/disertasi, (2) menerjemahkan buku berharga yang dapat menunjang penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, dan (3) menerbitkan hasil-hasil penelitian yang baik tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Disertasi yang telah diterbitkan, antara lain, ialah disertasi Purwo (1982), Simatupang (1983), Sudaryanto (1983), Moeliono (1985), Kridalaksana (1987), Lapoliwa (1989), dan Alwi (1990).

ILDEP juga menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku berharga yang dapat menunjang usaha penelitian bahasa. ILDEP pun menerjemahkan dan menerbitkan hasil penelitian bahasa yang dilakukan oleh pakar lain di luar negeri. Buku itu, antara lain, ialah disertasi Amran Halim tentang intonasi bahasa Indonesia yang diterjemahkan untuk program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan

daerah yang diterjemahkan oleh Y.S. Badudu (1988), dan buku F. de Saussure yang diterjemahkan oleh Rahayu S. Hidayat (1988).

3) Program Penelitian dan Pengembangan Bahasa Masuk ke Repelita II

Dengan Surat Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974, Lembaga Bahasa Nasional diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang berkedudukan di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak Repelita II (1974/1975–1978/1979) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa disertai dua proyek, yaitu (1) Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dan (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baru mulai tahun itu, program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah masuk di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun. Ini berarti perhatian pemerintah terhadap usaha penelitian bahasa dan sastra Indonesia (dan daerah) meningkat.

Proyek penelitian bahasa itu bertujuan mengumpulkan data dan mendeskripsikan struktur dan fungsi bahasa Indonesia dan daerah serta memberikan rekomendasi dan menyediakan sarana untuk pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Ada pun kegiatan yang dilakukan oleh Proyek itu ialah sebagai berikut.

- a) Penelitian dan penyusunan kamus, baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus bahasa daerah. Dari proyek ini dihasilkan terbitan baru *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Poerwadarminta, 1953) dalam ejaan baru bahasa Indonesia yang disempurnakan, kamus-kamus bahasa daerah, dan kemudian oleh proyek lanjutannya disusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988) yang pada tahun ini telah terbit dengan revisi dan tambahan ribuan entri baru.
- b) Penelitian dan penyusunan istilah pada tahun 1975, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* dan kamus istilah berbagai bidang ilmu telah disusun. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* itu kemudian juga direvisi (1988).
- c) Penelitian bahasa dan sastra Indonesia telah menghasilkan (1) data dan deskripsi tentang bahasa Indonesia di Jawa dan di luar Jawa, termasuk yang bertalian dengan pengajaran; misalnya, *Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI Sekolah Dasar di Daerah Gorontalo* oleh Wahidji dkk. (1985) dan *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia* sebagai hasil telaah sejarah asal usul kata, oleh Adiwimarta (1987), dan (2) data tentang tulisan-tulisan berharga mengenai bahasa Indonesia yang perlu diselamatkan, disebarluaskan, atau dikembangkan. Misalnya, naskah disertasi tentang bahasa dan sastra Indonesia di luar negeri perlu dikopi, diterjemahkan, dan diterbitkan di Indonesia.
- d) Penelitian bahasa dan sastra daerah telah menghasilkan (1) data dan deskripsi tentang bahasa-bahasa daerah, termasuk yang bertalian dengan pengajarannya, (2) data tentang tulisan-tulisan berharga mengenai bahasa-bahasa daerah yang perlu diselamatkan, disebarluaskan, atau dikembangkan (Halim, 1984:34).

Dari terbitan yang telah dilakukan kiranya dapat dikatakan bahwa penelitian bahasa daerah jauh lebih banyak daripada laporan penelitian bahasa daerah. Sampai akhir dasawarsa 1970 laporan penelitian bahasa Indonesia yang telah diterbitkan, sejauh yang dapat saya temukan, hanya ada lima buah, yakni (1) penelitian Basri (1977) tentang penggunaan dan prospek pengembangan bahasa Indonesia di kota Bandung; (2) penelitian Basri (1977) tentang keadaan kebahasaan di daerah Kota Bandung; (3) penelitian Tim Peneliti Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia (1977) tentang pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD di Jawa Barat; (4) penelitian Tampubolon (1979) tentang tipe-tipe semantik kata kerja bahasa Indonesia kontemporer; (5) penelitian Sujanto (1979) tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Jawa Timur.

Pada pertengahan dasawarsa berikutnya, jumlahnya meningkat menjadi 12 buah, meliputi penelitian-penelitian interferensi gramatikal, dua buah, yakni penelitian Rinjin (1981) dan Abdulhayi (1985); penelitian tentang kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa SD, SMP, dan SPG enam buah, yakni penelitian Soedjianto (1981), Rasyid (1981), Yusuf (1981), Syafi'ie (1981), Rusyana (1981), dan Wahidji (1985). Selebihnya masing-masing satu buah, yakni tentang bahan ajar bahasa Indonesia dalam buku SMA (Hanafi, 1981); tentang tes prestasi belajar bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984); tentang morfem *me(N)-* dalam bahasa Indonesia (Zulkarnain, 1982); dan tentang pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat Tionghoa di Jawa Timur (Sudja'i, 1986).

Jumlah penelitian bahasa daerah yang lebih banyak bisa terjadi karena jumlah bahasa daerah di Indonesia banyak sekali dan penelitian bahasa daerah pada waktu itu rupanya mendapat prioritas, mengingat adanya kemungkinan bahwa bahasa daerah itu musnah atau berubah setelah bahasa Indonesia dipakai oleh masyarakat bahasa itu. Sebelum musnah atau berubah, bahasa itu perlu didokumentasi lebih dulu. Selain itu, perhatian pemerintah pada waktu itu terutama pada pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, khususnya pada usaha pembakuan bahasa, meliputi (1) pembakuan ejaan, (2) pembakuan kosakata, (3) pembakuan istilah, (4) pembakuan tata bahasa, dan (5) pembakuan lafal.

Untuk semuanya itu telah berhasil disusun dan direvisi ketiga buku berikut.

- a) *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*,
- b) *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, dan
- c) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang memuat petunjuk tentang kata baku dan tidak baku, serta petunjuk ucapan kata, khusus yang ucapannya berbeda dari bacaan tulisannya.

Pada waktu yang bersamaan, telah berhasil disusun buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, namun belum sempat direvisi. Meskipun demikian, buku ini bersama-sama dengan ketiga buku lainnya itu, dapat diambil manfaatnya sebagai penunjang usaha memajukan penelitian bahasa Indonesia.

Selain melaksanakan Proyek Penelitian Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga melaksanakan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah. Dari kegiatannya dapat dipastikan bahwa proyek ini pun menunjang kemajuan usaha penelitian bahasa Indonesia meskipun secara tidak langsung.

Ada pun kegiatan Proyek Pengembangan itu ialah sebagai berikut.

- a) Pengembangan Pusat Informasi Kebahasaan,
- b) Pengembangan ketenagaan teknis, meliputi tenaga bidang penelitian dan perencanaan bahasa, bidang perkamusan, bidang penerjemahan, dan bidang pemetaan,
- c) Pengembangan politik bahasa nasional,
- d) Pengembangan bahasa dan sastra, antara lain dengan penyelenggaraan seminar, lokakarya dan kongres bahasa, serta penyebarluasan hasil seminar, lokakarya, dan kongres tsb. Dengan penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kongres itu para pakar terdorong untuk menyampaikan dan menerima informasi tentang hasil-hasil kajian bahasa Indonesia dan daerah,
- e) Pengembangan kerjasama kebahasaan; antara lain dengan Belanda dan Malaysia. Kerjasama itu kemudian juga dengan Jerman dan Australia, khususnya di bidang ketenagaan,
- f) Pengembangan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan majalah bahasa dan sastra serta pengarangnya. Penerbitan ini merupakan usaha yang mendorong para pakar untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian/kajian, juga merupakan sarana penyebarluasan informasi kebahasaan dan kesusasteraan,
- g) Pengembangan bahasa melalui media masa,
- h) Pengembangan organisasi dan perencanaan (Halim, 1984: 34-35).

4) Program Doktor/Program Pascasarjana dan Penyusunan Disertasi di Luar Negeri

Penyelenggaraan Program Doktor/Pasca Sarjana ternyata ikut menunjang kemajuan penelitian bahasa Indonesia. Pada dasa warsa 1970 belum begitu banyak disertasi tentang bahasa Indonesia yang dapat diselesaikan. Pada masa itu, sejauh yang dapat saya ketahui, ada delapan penelitian tentang bahasa Indonesia yang disusun sebagai disertasi, tiga di dalam negeri dan lima lainnya di luar negeri. Penelitian yang disusun sebagai disertasi di dalam negeri ialah (1) penelitian Rusyana (1975) tentang interferensi morfologi bahasa Indonesia murid-murid SD yang berbahasa pertama bahasa Sunda; (2) penelitian Sri Hastuti (1975) tentang faktor-faktor yang menunjang pengajaran bahasa Indonesia di SD kelas permulaan di Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) penelitian Sudaryanto (1979) tentang keselarasan pola urutan predikat objek dalam bahasa Indonesia. Penelitian yang disusun sebagai disertasi di luar negeri ialah (1) penelitian Halim tentang intonasi dalam bahasa Indonesia yang terbit tahun 1974; (2) penelitian Labrousse (1975) tentang masalah leksikografi dalam bahasa Indonesia;

(3) penelitian Heer (1975) tentang sintaksis bahasa Indonesia; (4) penelitian Tampubolon (1977) tentang afiksasi verba dalam bahasa Indonesia; (5) penelitian Kartomiharjo (1979) tentang etnografi variasi komunikasi di Jawa Timur.

Pada dasawarsa berikutnya (1980 - 1989) jumlah hasil penelitian bahasa Indonesia yang berupa disertasi melonjak dua kali lipat lebih, yaitu 11 di dalam negeri dan 7 buah di luar negeri. Yang di dalam negeri adalah (1) penelitian Parawansa (1981) tentang interferensi morfologi pada murid SD di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan; (2) penelitian Moeliono (1981) tentang pengembangan dan pembinaan bahasa; (3) penelitian Purwo (1982) tentang deiksis dalam bahasa Indonesia; (4) penelitian Siahaan (1982) tentang pengembangan kurikulum bahasa Indonesia dari sudut fungsi bahasa; (5) penelitian Simatupang (1983) tentang reduplikasi morfemis bahasa Indonesia; (6) penelitian Sutomo (1985) tentang telaah sosial budaya terhadap interferensi, alih kode, dan tunggal bahasa dalam masyarakat ganda bahasa; (7) penelitian Harimurti (1987) tentang beberapa prinsip perpaduan leksem dalam bahasa Indonesia; (8) penelitian Ide Said (1987) tentang sumbangan sikap dan motivasi belajar bagi penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di kalangan siswa SLTA; (9) penelitian Lapoliwa (1989) tentang klausa pemerlengkapan dalam bahasa Indonesia; (10) penelitian Suwito (1987) tentang berbahasa dalam situasi diglosik di kota madia Surakarta; (11) penelitian Marat (1983) tentang perkembangan dan kemampuan berbahasa pada anak-anak di lingkungan dwibahasa di Jawa Barat.

Penelitian di luar negeri adalah (1) penelitian Gunarwan (1981) tentang studi sosiolinguistik pada variasi gramatikal dalam bahasa Indonesia; (2) penelitian Dreyfuss (1981) tentang cara pembentukan teks dalam cerita berbahasa Indonesia *Surabaya* karangan Idrus; (3) penelitian Rafferty (1982) tentang struktur tuturan bahasa Indonesia Cina di Malang; (4) penelitian Mccune (1985) tentang struktur internal akar kata bahasa Indonesia; (5) penelitian Kano (1986) tentang hubungan gramatikal dalam bahasa Indonesia; (6) penelitian Wouk (1989) tentang pengaruh tuturan pada tata bahasa: morfologi verba dalam bahasa Indonesia lisan Jakarta; (7) penelitian van Zanten (1989) tentang vokal-vokal bahasa Indonesia, diteliti secara akustik dan perseptual.

5) Pusat Penelitian di Perguruan Tinggi

Kemajuan penelitian bahasa Indonesia ditunjang oleh Pusat Penelitian di perguruan tinggi yang memperoleh biaya penelitian dari SPP/DPP, dana OPF, dari DP3M, Bank Dunia, dan lain-lain. Mengingat banyaknya perguruan tinggi di Indonesia, diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk memperoleh data tentang hasil-hasil penelitian mengenai bahasa Indonesia. Di dalam *Bibliografi Bahasa dan Kesusastraan Indonesia dan Daerah 1945-1988* (Yayasan Idayu, 1988), antara tahun 1971-1979 hanya saya temukan 5 buah dan pada tahun 1980-1988 hanya saya temukan 9 buah penelitian. Saya yakin, masih banyak laporan penelitian di universitas/institut yang belum terjangkau oleh penyusun bibliografi tersebut.

6) Penerbitan Buku dan Majalah Ilmiah

Tidak jarang buku atau artikel dalam majalah ilmiah merupakan hasil penelitian, hanya saja artikel mungkin merupakan hasil penelitian yang dilaporkan secara ringkas bergantung kepada volume majalah yang bersangkutan. Majalah *Nusa*, misalnya, tidak jarang memuat hasil penelitian berupa disertasi yang dilaporkan secara lengkap, seperti disertasi Mccune (1985), dan Kano (1986).

Majalah ilmiah di Indonesia yang khusus memuat artikel tentang bahasa adalah (1) *Bahasa dan Sastra*, (2) *Pengajaran Bahasa dan Sastra*, (3) *Nusa*, (4) *Pembinaan Bahasa Indonesia*, (5) *Majalah ilmiah* yang dikeluarkan oleh Fakultas Sastra dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, misalnya *Majalah Ilmu-ilmu Sastra* dari Fakultas Sastra UI dan *Media* dari FPBS IKIP Semarang.

Buku yang sebenarnya merupakan hasil penelitian atau kajian bahasa Indonesia antara lain adalah buku Dardjowidjojo (1983) tentang beberapa aspek linguistik Indonesia; buku Samsuri (1985) tentang tata kalimat bahasa Indonesia; buku Kridalaksana (1986) tentang kelas kata bahasa Indonesia; buku M. Ramlan (1987) tentang sintaksis bahasa Indonesia; buku Parera (1988) tentang sintaksis; buku Purwo (1989) tentang serpih-serpih telaah pasif bahasa Indonesia; dan buku Kridalaksana (1992) tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia.

Rasanya ada kesejalaran peningkatan hasil penelitian yang berupa laporan penelitian biasa, disertasi, dan buku. Pada dasawarsa 1970 masih belum banyak buku, disertasi, atau laporan penelitian bahasa Indonesia yang dapat diperoleh, namun pada dasawarsa berikutnya meningkat dengan sangat pesat.

Artikel-artikel dan buku-buku tentang bahasa Indonesia itu di samping merupakan penanda juga merupakan pendorong kemajuan penelitian bahasa Indonesia sebab artikel dan buku-buku itu bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

7) Seminar dan Kongres

Selama Pelita Kedua dan Ketiga, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa setiap tahun menyelenggarakan seminar bahasa dan sastra, dan/atau seminar pengajaran bahasa dan sastra, dan setiap lima tahun sekali menyelenggarakan kongres bahasa Indonesia. Dalam seminar atau kongres itu ditampilkan berbagai kajian tentang bahasa dan sastra Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui adanya peneliti-peneliti potensial di bidang bahasa dan sastra dari berbagai daerah di Indonesia. Ini berarti penyelenggaraan seminar dan kongres itu berperan juga dalam usaha memajukan penelitian bahasa dan sastra Indonesia.

Seminar bahasa dan sastra serta pengajarannya juga diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain. Seminar itu bersifat nasional, regional, atau internasional. Seminar-seminar itu pun merupakan penanda dan sekaligus pendorong kemajuan usaha penelitian bahasa Indonesia.

3. Aspek Bahasa yang Telah Diteliti

Aspek bahasa Indonesia yang telah diteliti meliputi (1) aspek-aspek lingual, (2) aspek sosio-psikoetnolinguistik, (3) aspek linguistik terapan, dan (4) aspek historis. Aspek lingual yang telah diteliti meliputi (a) fonologi, (b) ejaan, (c) kosakata, (d) morfologi, (e) sintaksis, (f) semantik, dan (g) tata wacana. Aspek linguistik terapan yang telah diteliti meliputi (1) leksikografi, (2) kemampuan berbahasa, (3) tes prestasi belajar bahasa, dan (4) metode pengajaran bahasa. Aspek-aspek itu meliputi topik-topik penelitian berikut.

1) Fonologi

Bunyi bahasa diberikan menurut artikulasinya di dalam alat ucap. Samarni SP (1984) meneliti artikulasi vokal bahasa Indonesia pada lagu seriosa Indonesia. Van Zanten (1989) mendeskripsikan vokal-vokal bahasa Indonesia secara akustik dan perseptual, sedangkan Feuge (1990) mendeskripsikan vokal khusus pada kata dasar berpola KVKV dan KVKVK dengan menggunakan analisis spektografis.

2) Ejaan

Ejaan bahasa Indonesia meskipun sudah disempurnakan masih mengandung kelemahan. Ini ditelaah oleh Hakim (1978). Kemampuan menggunakan kaidah ejaan banyak diteliti karena kenyataannya sampai sekarang banyak kaidah ejaan belum diketahui orang banyak kesalahan tulisan tanpa disadari. Sehubungan dengan itu, Suyadi dan Ekowardono (1987) meneliti kemampuan karyawan administrasi IKIP Semarang untuk memperoleh informasi bagian ejaan yang mana yang masih perlu disuluhkan kepada masyarakat.

3) Kosakata dan Leksikografi

Telaah tentang makna kata dimanfaatkan secara langsung dalam leksikografi. Masalah leksikografi dalam bahasa Indonesia dibahas secara tuntas oleh Labrousse (1975) dalam disertasinya yang terdiri atas dua jilid. Struktur internal akar kata bahasa Indonesia diteliti oleh Maccune (1985) untuk penyusunan disertasinya. Menurut Maccune secara sistematis sebagian besar akar kata bahasa Indonesia merupakan gabungan submorfem.

4) Semantik

Penelitian semantis yang telah dilakukan meliputi (1) pemakaiannya yang tidak bermakna kata ganti milik orang ketiga pada Hikayat Inderaputera (Agussalim, 1985); beberapa aspek semantis kata sifat bahasa Indonesia (Suhardi, 1980); (3) tipe semantik kata kerja bahasa Indonesia (Tampubolon, 1979); (4) pendefinisian ke-nominaan dalam bahasa Indoneia (Dreyfuss, 1979).

5) Kelas Kata

Penjenisan kata pernah dilakukan oleh banyak bahasawan dengan hasil yang berbeda-beda. Karena itu, Kridalaksana (1986) melakukan penelitian kembali tentang penjenisan kata bahasa Indonesia. Menurutnya, kosakata bahasa Indonesia terbagi menjadi 13 kelas.

6) Perkembangan Bahasa Indonesia

Ihwal perkembangan bahasa Indonesia pernah diteliti oleh banyak pakar. Hasil penelitian itu dihimpun oleh Harimurti (1991). Penelitian Anwar (1980) tentang perkembangan bahasa Indonesia dilengkapi dengan penggunaannya, sebagai bahasa nasional.

7) Morfologi

Kajian morfologi bahasa Indonesia secara struktural taksonomis dilakukan oleh M. Ramlan (1967). Dengan cara itu homomorfem tidak dikenal. Model yang hampir sama dilakukan juga oleh Tim Peneliti Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran (1977). Kridalaksana (1992) menggunakan pendekatan struktur juga, tetapi pendekatannya itu termasuk pendekatan struktural Eropa yang dipadukan dengan teori leksem. Dengan pendekatan struktural, Teeuw (1977) juga mengkaji morfologi bahasa Indonesia, tetapi terbatas pada kelas adjektiva. Aspek lain yang banyak menarik perhatian para pakar adalah morfologi verba. Berbeda dengan yang lainnya, Tampubolon (1977) mengkaji afiksasi verba bahasa Indonesia dengan pendekatan semantik generatif. Analisisnya tentang hambatan-hambatan semantik atas terjadinya afiksasi *meN-* dimuat dalam majalah *Bahasa dan Sastra* Tahun II, no.2, halaman 30. Morfem *meN-* itu pernah diteliti juga oleh Zulkarnain (1982), tetapi dengan pendekatan struktural model I.P. dan I.A. Samsuri (1976) memaparkan hasil penelitian tentang kesejajaran antara *meN-i* dan *meN-kan* dalam majalah *Bahasa dan Sastra* Tahun II, no. 1, halaman 33 - 39. Dalam bahasan itu *meN-i* dan *meN-kan* dipandang sebagai konfiks. Dardjowidjojo (1977) menulis artikel dalam majalah *Bahasa dan Sastra*, berjudul "Sekitar Masalah Awalan *ber-* dan *meN-*". Kemudian Dreyfuss (1978) membahasnya kembali bersama-sama dengan *di-* dan *ber-*. Pembahasan verba bahasa Indonesia yang lengkap dan mendalam masih ditunggu.

Aspek morfologi lain yang mendapat banyak perhatian juga adalah reduplikasi dalam bahasa Indonesia. Ihwal reduplikasi ini pernah dibahas oleh Rosen (1977), hanya saja pembahasannya bersama dengan negasi dalam bahasa Indonesia dan pada artikelnya yang lain yang dibahas Rosen (1977) adalah fungsi reduplikasi. Ihwal reduplikasi dalam bahasa Indonesia juga pernah diteliti dan dijadikan disertasi oleh Simatupang (1989).

Bidang morfologi yang biasanya disebut sebagai pembentukan kata majemuk diteliti dan dijadikan disertasi oleh Kridalaksana (1987), yaitu "Beberapa Prinsip Perpaduan Leksem dalam Bahasa Indonesia". Morfologi verba dalam tuturan Indonesia

Jakarta diteliti oleh Wouk (1989), tetapi yang dikaji sebenarnya adalah pengaruh wacana pada tata bahasa.

8) Tata Wacana

Penelitian tentang aspek wacana lainnya adalah (1) struktur wacana bahasa Indonesia Cina Malang oleh Rafferty (1982) dan (2) cara pembentukan teks dalam cerita berbahasa Indonesia *Surabaya* karangan Idrus oleh Dreyfuss (1981).

9) Sintaksis

Perian sintaksis yang bulat dikerjakan oleh Gorys Keraf (1970), Parera (1988), Ramlan (1987), Heer (1975), Samsuri (1985), dan Sulaiman (1992). Pendekatan struktural digunakan oleh Ramlan dan Heer, Gorys Keraf dan Parera menggunakan pendekatan struktural, tetapi dipadukan dengan pendekatan generatif transformasi. Pendekatan generatif transformasi digunakan oleh Samsuri dan Sulaiman. Peneliti lainnya hanya meneliti aspek tertentu saja, yakni Halim (1974) meneliti intonasi kalimat, Sudaryanto (1979) meneliti pola urutan predikat objek, Kano (1986) meneliti hubungan-hubungan gramatikal, Lapoliwa (1989) meneliti klausa pemerlengkapan, Alwi (1990) meneliti modalitas, Sumadinata (1992) meneliti negasi, Suyono (1992) meneliti pelepasan subjek, Verhaar (1978) dan Purwo (1989) meneliti/menghimpun penelitian tentang verba/kalimat pasif.

10) Sosio-psiko-etnolinguistik

Penelitian di bidang ini meliputi topik berikut.

- a) Penelitian tentang pola, fungsi, kedudukan, dan pemakaian bahasa Indonesia di daerah atau kelompok masyarakat tertentu (Wardhana, 1985; Sujanto, 1979; Tim Peneliti Fakultas Sastra Unpad, 1977; Basri, 1979; Sudja'i, 1986; Utomo, 1990; Kartomiharjo, 1979; Suwito, 1987).
- b) Studi sosiolinguistik mengenai variasi gramatikal (Gunawan, 1981).
- c) Penelitian tentang interferensi (Rusyana, 1975; Rinjin, 1981; Fakultas Sastra Budaya Undip, 1978; Parawansa, 1981; Abdulhayi, 1985; Sutomo, 1985).
- d) Studi tentang perencanaan bahasa (Muliono, 1981; Soedjarwo, 1980).
- e) Penelitian tentang sikap berbahasa (Suhardi, 1993; Said, 1987).
- f) Penelitian tentang kemampuan berbahasa (Marat, 1983; Tadjuddin, 1983; Wahidji, 1985; Rusyana, 1981; Syafi'ie, 1981; Yusuf, 1981; Rasyid, 1981; Sudjianto, 1981).
- g) Penelitian tentang pemakaian kosakata pada murid (Silahidin, 1981, 1982; Tim Peneliti FKSS IKIP Yogyakarta, 1977).
- h) Penelitian tentang komponen PBM, yaitu bahan pelajaran bahasa Indonesia (Hanafi, 1981), Kurikulum (Siahaan, 1982); faktor penunjang (Sri Hastuti, 1975).

- i) Penelitian tentang pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, berdasarkan pendekatan kontrastif.
- j) Penelitian tentang tes prestasi belajar (1984).

3. Gambaran Umum tentang Mutu Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang berupa disertasi bermutu tinggi sebab untuk menyusun disertasi tersedia (1) pembimbing ahli yang selalu bekerja keras bersama peneliti, (2) waktu yang khusus tanpa diganggu oleh berbagai kesibukan; (3) bahan pustaka yang memadai; (4) tempat tinggal di kota besar; (5) biaya hidup dan penelitian yang relatif cukup. Keadaannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan di daerah. Kelima fasilitas itu sangat sulit didapat di daerah. Lebih-lebih jika satu dan lain hal proyek terlambat dimulai, waktu yang seharusnya satu tahun, tinggal paling lama enam bulan.

Keberhasilan penelitian juga bergantung pada keahlian, pengalaman, ketekunan, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, bukannya tidak mungkin bahwa laporan penelitian yang bukan untuk disertasi juga bermutu tinggi.

Begitu pula untuk artikel ilmiah, faktor-faktor tersebut juga berperan. Namun, karena pendeknya, kerap kali keterangan panjang lebar yang dapat memperjelas uraian terpaksa dibuang.

4. Simpulan

Untuk meningkatkan usaha penelitian bahasa Indonesia, kiranya dapat dilakukan upaya-upaya berikut.

- 1) Perlu diupayakan adanya badan yang menggantikan peranan ILDEP; kalau mungkin bahkan ditambah dengan yang lain. Badan pengganti itu hendaklah mampu menyediakan, bukan hanya biaya, tetapi juga tenaga ahli yang dapat membimbing para peneliti kita. Dana dari badan itu tidak hanya untuk membantu para peneliti, tetapi juga untuk membantu pengadaan penataran/ pelatihan profesional dan untuk pengadaan bahan pustaka. Bahan pustaka itu bisa diperoleh dengan penerjemahan, penerbitan, atau pembelian dari dalam dan luar negeri. Secara tidak langsung meningkatkan mutu penelitian badan ini.
- 2) Perlu diusahakan peningkatan kegiatan Proyek Penelitian Bahasa Indonesia. Jumlah biaya penelitian per judul dan jumlah judul yang disetujui untuk diteliti perlu ditingkatkan juga. Dengan demikian, usaha penelitian meningkat. Karena biayanya cukup, mutu penelitian juga meningkat.
- 3) Perlu diusahakan kegiatan konsultasi di tempat-tempat penelitian di daerah dalam waktu yang cukup sehingga ketepatan waktu dan peningkatan mutu hasil penelitian dapat terwujud.
- 4) Perlu diprogramkan kegiatan penataran/ pelatihan penelitian bahasa di daerah-daerah, bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Dengan demikian, kemampu-

an meneliti putra-putra daerah meningkat sehingga para peneliti mampu meningkatkan usaha dan mutu penelitian.

- 5) Perlu diprogramkan penyelenggaraan secara berkala dan teratur seminar nasional dan regional hasil-hasil penelitian bahasa Indonesia. Penyajian makalah didasarkan kepada kompetisi, tidak berdasarkan tunjukkan.
- 6) Perlu diadakan kerja sama resmi antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Pusat-pusat Penelitian di perguruan tinggi. Dengan kerja sama itu, diatur mekanisme
 - a) pelaksanaan penelitian bahasa,
 - b) pelaksanaan penataran/pelatihan penelitian bahasa;
 - c) pelaksanaan penerbitan hasil-hasil penelitian bahasa yang dikerjakan oleh perguruan tinggi;
 - d) pelaksanaan pemberian beasiswa untuk dosen yang kuliah di S-2 dan S-3 yang sedang menyusun tesis/disertasi.

Dengan kerja sama ini, pelaksanaan penelitian yang diserahkan kepada para dosen di perguruan tinggi terhindar dari birokrasi yang selama ini dialami sehingga kegiatan proyek dapat berjalan dengan lancar.

- 7) Perlu diusahakan agar aspek-aspek bahasa Indonesia yang lain yang belum diteliti dimasukkan ke dalam daftar isian proyek tahun depan.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk memajukan usaha dan mutu penelitian bahasa Indonesia. Namun, semuanya itu bergantung pada peneliti itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhayi. 1985. *Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Agussalim, Yuliana. 1985. *Pemakaian akhiran "nya" Yang Bukan Berarti Kata Ganti Milik Orang ketiga dalam Hikayat Inderaputera*. Surakarta: Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret.
- Alieva, N.F. et al. 1991. *Bahasa Indonesia: Deskripsi dan Teori*. Yogyakarta: Kanisius.
- Alwi, Hasan. 1990. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Anwar, Khaidir. 1980. *Indonesia: The Development and Use of a National Language*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Basri, Hasan. 1977a. *Keadaan Kebahasaan di Daerah Jawa Barat Kota Besar Bandung*. Bandung: Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- . 1977b. *Laporan Survei Penggunaan Bahasa Indonesia: Prospek Pengembangannya di Kota Besar Bandung*. Bandung: Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Broto, A.S. 1980. *Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kedua di Sekolah Dasar Berdasarkan Pendekatan Linguistik Kontrastif*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 1977. "Sekitar Masalah Awalan *ber-* dan *meN-*", *Majalah Bahasa dan Sastra* Th. II. no. 1 hl. 2–10.
- . 1983. *Beberapa Aspek Linguistik Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Dreyfuss, Jeff. 1979. "Towards a definition of nouniness in Indonesian". Dalam Halim (Ed.) *Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia*. Part VI. hl. 1–10.
- . 1978. "*MeN-*, *di-*, and *ber-*: [three analysis]". Dalam Verhaar, John W.M. (Ed.): *Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia*. Part V. hl. 1–6.
- . 1981. *Modes of Building in the Indonesian Story "Surabaya" by Idrus*. Ann Arbor: University of Michigan.
- Feuge, Kerstin. 1990. *Spektografische Analyse Indonesischer Vokal in den Wortstrukturen KVKV und KVKVK* Frankfurt am Main: Peter Lang.

- Fakultas Sastra Budaya, Undip. 1978. *Kedwibahasaan dan Interferensi di Kalangan Masyarakat WNI Keturunan Cina di Kota Mada Semarang*. Semarang: Fakultas Sastra Undip.
- Gunarwan, Asim. 1981. *Sociolinguistic Study of Grammatical Variation in Indonesian*. Washington DC: Georgetown.
- Hakim, Lukman. 1978. *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran. 1974. *Intonation, in Relation to Syntax in Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
- Heer, Gerrit Koenraad de. 1975. *Indonesian Syntax*. Ithaca: Cornell University.
- Hanafi, Iman. 1981. *Bahan Pelajaran Bahasa Indonesia dalam buku SMA*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. 1976. *Laporan Hasil Penelitian Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Beberapa Surat Kabar yang Terbit di Semarang*. Semarang: Fakultas Sastra Undip.
- Kano, Marit Ann. 1986. *Gramatical Relations in Bahasa Indonesia*. Ithaca: Cornell Universty.
- Kartomiharjo, Suseno. 1979. *Ethnography of Communication Codes in East Java*. Ithaca: Cornell University.
- Kridalaksana, Harimurti. 1986. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- . 1987. *Beberapa Prinsip Perpaduan Leksem dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- . 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1992. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Labrousse, M. Pierre. 1975. *Problemes Lexicographiques de L' Indonesien*. Paris: Languages et Civilisations Orientales. (2 jilid)
- Lapoliwa, Hans. 1989. *Klasifikasi Pemerangkapan dalam Bahasa Indonesia: Suatu Tinjauan Sintaktik dan Semantik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Marat, Samsunuwiyati. 1983. *Perkembangan dan Kemampuan Berbahasa pada Anak-anak dalam Lingkungan Dwibahasa di Jawa Barat (beberapa Efek Kedwibahasaan Sunda - Indonesia terhadap Kemampuan Berbicara Indonesia pada Anak-anak di Jawa Barat: Suatu Pendekatan melalui Teori Psikolinguistik)*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Mccune, Keith Michael. 1985. *The Internal Structure of Indonesian Roots*. Michigan: University of Michigan. (2 jilid).
- Moeliono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di Dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Parawansa, Paturungi. 1981. *Kajian Interferensi Morfologi pada Dwibahasawan Anak Murid Sekolah Dasar di Daerah Kabupaten Goa, Propinsi Sulawesi Selatan*. Malang: IKIP Malang.
- Parera, Jos Daniel. 1988. *Sintaksis*. Jakarta: Gramedia.
- Purwo, Bambang Kaswanti, 1982. *Deiksis dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1984. *Tes Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMP Jawa Timur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rafferty, Ellen. 1982. *Discourse Structures of the Chinese Indonesian of Malang*. Nusa vol. 12.
- Ramlan, M. 1987. *Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Rayid, Halipani. 1981. *Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas III Sekolah Menengah Pertama Sumatera Barat: Membaca dan Menulis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rinjin, Ketut. 1981. *Interferensi Gramatikal Bahasa Bali dalam Pemakaian Bahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar di Bali*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rosen, Joan M. 1977a. "Reduplication and Negation in Indonesian". Dalam Soepomo Poedjosoedarmo (Ed): *Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia*. Part III. Jakarta: Nusa.
- . 1977. "The Functions of Reduplication in Indonesian". Dalam Ignatius Suharno (ed.): *Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia*. Part IV. p. 1-17.
- Rusyana, Yus. 1975. *Interferensi Morfologi pada Penggunaan Bahasa Indonesia oleh Anak-anak yang Berbahasa Sunda Murid Sekolah Dasar di Daerah Propinsi Jawa Barat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rusyana, Yus. 1981. *Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Sekolah Pendidikan Guru Negeri di Jawa Barat: Mendengarkan dan Berbicara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Said D.M., Ide. 1987. *Sumbangan Sikap dan Motivasi Belajar bagi Penguasaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kedua di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Atas (Sebuah Kajian Sociolinguistik)*. Malang: IKIP Malang.
- Samsuri. 1976. "Kesejajaran antara meN-i dan meN-kan". Dalam *Bahasa dan Sastra* Th. II. No. 1. hl. 33-39.
- . 1985. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Sastra Hudaya.
- Siahaan, Bistok Adrianus. 1982. *Pengembangan Kurikulum: Suatu Analisis Isi Kurikulum Bahasa Indonesia dari Sudut Fungsi Bahasa*. Jakarta: IKIP Jakarta.

- Silahidin, Sofyan. 1981. *Pemakaian Kosakata Bahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar Sumatera Selatan*. Jakarta: Universitas Sriwijaya.
- . 1982. *Pemakaian Kosakata Bahasa Indonesia Murid SMP Kelas III Sumatera Selatan*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Simatupang, M.D.S. 1983. *Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soedjarwo. 1980. *Ilmu dan Pembinaan Bahasa Indonesia* Semarang: Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi.
- Soedjianto, et. al. 1981. *Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas III SPG Jawa Timur: Membaca*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Soetomo, Istiati. 1985. *Telaah Sosial-Budaya terhadap Interferensi, Alih-Kode, dan Tunggal Bahasa dalam Masyarakat Ganda Bahasa*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sri Hastuti, R.H. 1975. *Faktor-Faktor yang Menunjang Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Kelas Permulaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Sudaryanto. 1979. *Keselaran Horizontal dan Vertikal Pola Urutan Predikat Objek dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sudaryono. 1992. *Negasi dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sugono, Dendy. 1992. *Pelesapan Subjek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sujanto. 1979. *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia di Jawa Timur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sumadinata, S. Effendi. 1992. *Adverbial Cara dan Adverbial Sarana dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhadi, R. 1980. "Beberapa Aspek Semantis Kata Sifat Bahasa Indonesia". Laporan Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- . 1993. *Studi Eksploratif tentang Sikap Bahasa Indonesia Masyarakat Jakarta*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Sulaiman, Hanafie. 1992 *Sintaksis Bahasa Indonesia, Hubungan antara Struktur Batin dan Struktur Lahir*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Sumarni, SP. 1984. *Artikulasi Vokal Bahasa Indonesia pada Lagu Seriosa Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Musik Indonesia.
- Suwito, 1987. *Berbahasa dalam Situasi Diglosik: Kajian tentang Kendala Pemilihan dan Pemilahan Bahasa di dalam Masyarakat Tutar Jawa dari Tiga Kelurahan Kotamadya Surakarta*. Surakarta: Universitas Indonesia. Sebelas Maret.
- Suyadi Hs. dan B. Karno Ekowardono. 1987. "Kemampuan Bahasa dalam Bidang Tata Tulis Karyawan Administrasi IKIP Semarang", Laporan Penelitian.

- Sudjadi et al. 1986. *Pemakaian Bahasa Indonesia di Lingkungan Masyarakat Tionghoa Jawa Timur: Sebuah Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia Tulis Siswa Kelas VI SD WNI Keturunan Cina Tiga Kota di Jawa Timur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Syafi'ie, Imam. 1981. *Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar yang Berbahasa Ibu Bahasa Aceh: Mendengarkan dan Berbicara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Tadjuddin, Moh. 1983. *Kemampuan Berbahasa Para Lulusan Perguruan Tinggi*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- Tampubolon, Daulat Purnama. 1977. "Hambatan-Hambatan Semantik atas Terjadinya Afiksasi *meN-*" dalam *Bahasa dan Sastra*. Th. II. no. 2. hl. 22-30.
- , 1979. *Verbal Affixations in Indonesian: A Semantic Exploration*. Washington D.C.: Georgetown University.
- , et al. 1979. *Tipe-tipe Semantik Kata Kerja Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Teeuw, A. 1977. "The Morphological System of the Indonesian Adjective". *Nusa*. V.3. hl. 1-18.
- Thomas, Michael R. 1978. "Indonesian's Unmarked Verbs". Dalam John W.M. Verhaar: *Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia* Part V. hl. 7-10.
- Tim Penelitian Fakultas Keguruan Sastra Seni, IKIP Yogyakarta. 1977. *Penelitian Pemakaian Kosakata Bahasa Indonesia Murid Sekolah Dasar Kelas III di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Universitas Padjadjaran. 1971. *Laporan Penelitian Linguistik, Ethnolinguistik di Daerah Bogor Utara/Bogor Timur*. Bandung.
- , 1977a. *Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar di Sekolah Dasar di Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1977b. *Laporan Penelitian Morfologi Bahasa Indonesia (Lisan)*. Bandung.
- Utomo, Dede. 1990. "The Bahasa Indonesia of the Middle Class". *Prisma, The Indonesian Indicator*. No. 50, hl. 68-79.
- Wahidji, Habu et al.. 1985. *Kemampuan Berbahasa Indonesia (Membaca dan Menulis) Murid Kelas VI Sekolah Dasar di Daerah Gorontalo*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Wardhana, Dian Eka Chandra. 1985. *Pola Pemakaian Bahasa Indonesia di Lingkungan Tenaga Kepegawaian Perguruan Tinggi di Kotamadya Bengkulu*. Bengkulu: FKIP.
- Wouk, Fay. 1989. *The Impact of Discourse on Grammar: Verb Morphology in Spoken Jakarta Indonesian*. California: University of California.

- Yusuf, Husni. 1981. *Kemampuan Berbahasa Indonesia Murid Kelas VI Sekolah Dasar yang Berbahasa Ibu Bahasa Aceh: Mendengar dan Berbicara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Van Zanten, Ellen. 1989. *Vokal-vokal Bahasa Indonesia: Penelitian Akustik dan Pereptual*. (terjemahan Lukman Hakim).
- Zulkarnain. 1982. "Morfem *meN-* dalam Bahasa Indonesia". Naskah Laporan Penelitian. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Kemajuan dalam Penelitian Bahasa Indonesia
Pemakalah : B. Karno Ekowardono
Pemandu : Ramelan
Pencatat : Erlina Sarif
Ekawati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** La Ode Sidu, FKIP Universitas Haluoleo, Sulawesi Tenggara
- Apakah hasil penelitian yang berupa disertasi atau skripsi mahasiswa selalu terbaik?
 - Aspek-aspek bahasa manakah yang perlu diteliti dan siapa yang menentukan pemilihannya?

Jawaban:

- Hal itu relatif. Kemajuan hasil penelitian itu dapat dilihat secara kronologis. Sekarang hasil penelitian lebih maju dari yang lalu.
- Sebaiknya peneliti yang menentukan, kemudian diajukan ke Pusat Bahasa.

2. **Pertanyaan:** F.X. Rahyono, Universitas Indonesia

- Sejauh mana hasil penelitian dimanfaatkan untuk kemajuan pengajaran bahasa?
- Disertasi bukan puncak karya, tetapi merupakan penelitian langkah awal untuk pengembangan selanjutnya.

Jawaban:

- Tidak dapat dijawab di sini karena hal itu perlu diteliti. Pemakalah setuju dengan pendapat Harimurti yang mengatakan bahwa pengajaran bahasa sebaiknya didasarkan pada hasil penelitian.
- Hasil penelitian yang berbentuk disertasi merupakan yang baik, tetapi bukan yang terbaik.
Hasil penelitian proyek akan lebih baik kalau waktu, dana, dan bahan bahasa tersedia secara memadai.

3. **Pertanyaan:** Sriyanto, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

- Apakah ada penelitian khusus tentang ejaan secara ilmiah dan apa yang dijadikan objek untuk itu?

- b. Pernahkah diadakan penelitian tentang ejaan dan buku-buku hasil karya para ahli bahasa.

Jawaban:

- a. Ada, yaitu tentang kemampuan masyarakat menerapkan kaidah-kaidah EYD. Berdasarkan penelitian itu ada lima hal yang belum dikuasai dengan baik, yaitu:
- 1) penggunaan huruf f, v, z,
 - 2) pemenggalan,
 - 3) penggunaan huruf kapital,
 - 4) rangkaian dan pemenggalan, dan
 - 5) tanda baca,
- b. Belum ada

4. **Saran:** Daniel Tulalessy, Pusat Perbukuan

Bahasa Indonesia mempunyai masalah yang cukup banyak dan tidak selesai kalau ditangani secara perseorangan. Sekarang ini perlu ada lembaga penelitian bahasa di Pusat Bahasa, baik di Pusat maupun daerah-daerah.

Jawaban:

Setuju dengan adanya Lembaga Pusat Penelitian Bahasa di samping Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

5. **Saran:** M. Ramlan, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada

- a. Pusat Bahasa hendaknya membuat inventarisasi karya ilmiah kebahasaan, baik yang berupa hasil penelitian maupun bukan.
- b. Makalah sebaiknya dikembangkan lagi menjadi buku.

6. **Usul:** Ramelan, IKIP Semarang

Bahasa nasional sebaiknya dirumuskan dalam bentuk naskah yang bersifat yuridis agar langkah-langkah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia lebih mantap.

KARYA KESASTRAAN SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN BAHASA

Nafron Hasjim

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pendahuluan

Dalam makalah ini, kata *sarana* digunakan dalam arti 'sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan atau maksud' (KBBI, 1991). Pengembangan bahasa diartikan sebagai upaya atau kegiatan yang mencakupi kodifikasi norma yang dinyatakan berlaku untuk tata ejaan, tata bahasa, kosakata, dan norma berbagai ragam fungsional bahasa yang dimekarkan sehingga sandi bahasa itu dapat memenuhi syarat kepadaan (keadekuatan) yang dituntut oleh berbagai jenis wacana (Moeliono, 1985:27). Dengan demikian, pembicaraan yang disajikan di dalam makalah ini berkisar pada masalah karya kesastraan yang berfungsi sebagai alat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam lingkup pengembangan bahasa itu.

2. Sastra dan Bahasa

Pembicaraan mengenai hubungan antara bahasa dan sastra selalu melibatkan dua sudut pandang. Pandangan itu muncul dari dua kubu yang berbeda, yaitu kubu sastra dan kubu linguistik. Kubu sastra memandang bahasa hanya sebagai alat, sedangkan kubu linguistik memandang sastra sebagai sarana pemakaian bahasa.

Sastra adalah salah satu bentuk karya seni yang mempergunakan bahasa sebagai alatnya. Oleh karena itu, pengamatan/penelitian sastra haruslah merupakan penelitian terhadap sebuah karya seni yang otonom, yang sekurang-kurangnya mengandung tiga faktor penting, yaitu (1) konvensi sastra, (2) konvensi budaya, dan (3) konvensi bahasa. Penelitian/pengamatan terhadap sastra harus sampai pada sesuatu yang berada di balik unsur verbal (bahasa) itu. Bahasa, sebelum dipakai oleh sastrawan, sudah merupakan sistem tanda, sistem semiotik. Setiap tanda, unsur bahasa, itu mempunyai arti tertentu, yang secara konvensional disetujui, harus diterima anggota masyarakat. Di dalam sistem tanda itu tersedia perlengkapan konseptual yang sangat sukar dihindari sebab perlengkapan itu merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi yang terpenting antara anggota masyarakat. Bahasa itu memiliki sistem kemaknaan yang lincah, luwes, longgar, malahan licin dan licik dan penuh dinamika sehingga memberikan segala macam kemungkinan

untuk kegunaan kreatif dan original (Teeuw, 1984:96). Pada kesempatan lain, Teeuw (1993) menyatakan bahwa syarat pertama dan utama dalam melakukan penelitian sastra adalah memahami pemakaian kata, struktur, dan konstruksi karya sastra, di samping pendekatan sosial budaya.

Hawkes (1977:96—97) bahkan menganggap bahwa sebuah karya sastra itu sebagai perluasan struktur sebuah kalimat. Ia bertolak dari pemikiran bahwa di dalam sebuah karya sastra terkandung tiga aspek naratif, yaitu (1) *aspek semantik*, (2) *aspek sintaktis*, (3) *aspek verbal*. Aspek semantik adalah isi cerita; aspek sintaktis adalah kombinasi berbagai unit struktural; aspek verbal adalah permainan kata-kata dan frasa tertentu yang membentuk sebuah cerita. Dalam struktur sebuah karya terdapat dua bagian yang mendasar, yaitu *proposisi* dan *sekuen*. *Proposisi*, yang merupakan dasar sintaksis, berisi tindakan (*actions*) yang merupakan bagian naratif yang fundamental. *Seku*en adalah suatu kumpulan hubungan proposisi yang membentuk cerita yang lengkap dan berdiri sendiri. *Proposisi* dan *seku*en masing-masing berfungsi sebagai kalimat-kalimat dan paragraf. Di dalam cerita, *para tokoh* terlihat sebagai *nomina*, *sifat-sifat tokoh* sebagai *adjektiva*, dan *tindakan-tindakan* tokoh sebagai *verba*.

Sejalan dengan pendapat Hawkes itu, Fowler (1979:5—6) juga mengemukakan bahwa teks atau karya sastra itu adalah sesuatu yang berstruktur seperti kalimat. Dengan demikian, penganalisisan sebuah kalimat individual (dalam linguistik) dapat dilakukan juga untuk menganalisis struktur yang lebih besar dalam teks. Sebagai akibatnya, nomina sebagai salah satu unsur struktur kalimat dapat disejajarkan dengan "*nomina*" dalam struktur naratif; *struktur dalam* serta *struktur luar* kalimat dapat disejajarkan dengan *struktur dalam* serta *struktur luar* sebuah teks.

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa bahasa—yang merupakan salah satu unsur struktur karya sastra—memang ditempatkan sebagai sesuatu yang sangat penting dalam penelitian sastra. Akan tetapi, sekali lagi, bahasa bukan merupakan satu-satunya faktor yang perlu diperhatikan dalam penelitian sastra itu. Penelitian sebuah karya sastra belumlah tuntas kalau hanya bahasanya yang diteliti. Hal itu tentu berbeda dari pandangan peneliti bahasa yang mempergunakan sastra sebagai bahan untuk mengamati masalah kebahasaan. Biasanya, karya sastra dijadikan sumber data untuk melihat gejala pemakaian bahasa. Sehubungan dengan hal seperti itulah karya sastra dapat berfungsi sebagai sarana pengembangan bahasa. Dengan mengamati pemakaian bahasa di dalam karya sastra, kita dapat menemukan berbagai gejala kebahasaan, seperti perubahan bentuk dan pembentukan kata serta tata kalimat dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Jika hal itu berkaitan dengan masalah kebahasaan yang sedang berlaku, dapat dilihat sejauh mana penerapan kaidah-kaidah yang berlaku; adakah penyimpangan dan mengapa penyimpangan itu terjadi, dan sebagainya.

3. Sastrawan dan Pengembangan Bahasa

Upaya pengembangan bahasa meliputi norma-norma kebahasaan. Penetapan norma itu dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dipakai dalam masyarakat. Salah satu arena pemakaian bahasa itu adalah karya sastra. Demikian juga

halnya dengan penetapan norma bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Melayu yang disusun oleh Van Ophuysen pada tahun 1901 itu, misalnya, disusun berdasarkan hasil pengamatannya terhadap teks sastra Melayu lama. Mungkin juga C.A. Mees dan A.A. Fokker menggunakan teks-teks sastra Melayu lama itu sebagai sumber atau sebagian sumber data dalam buku tata bahasa yang mereka susun. Hal itu berarti sastrawan atau pujangga telah memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan bahasa.

Sastrawan di beberapa negara ternyata telah memberikan andilnya terhadap perkembangan bahasa mereka. Moeliono (1985:94—95)—mengutip pendapat Guxman (1968)—mengemukakan bahwa sastrawan seperti Pushkin, Lermotov, dan Gogol di Rusia telah ikut memantapkan norma umum bahasanya lewat karya-karya mereka. Demikian juga halnya di Cina dan Jepang yang ternyata tulisan Lu-Sun dan Shimazaki Tozon telah dimanfaatkan dalam upaya pengembangan bahasa di sana. Penyeragaman norma bahasa pustaka di Jerman menggunakan karya Lessing, Goethe, Schiller, dan Hein. Di Prancis, Corneille, Racine, dan Moliere juga telah memberikan saham terhadap perkembangan bahasa mereka yang dapat disejajarkan dengan sumbangan Shakespeare di Inggris.

Bagaimana halnya dengan sastrawan di Indonesia terhadap bahasa Indonesia? Sehubungan dengan itu, Moeliono (1985:14) juga mencatat bahwa sastrawan seperti Chairil Anwar, Sitor Situmorang, Ajip Rosidi, Achadiat Kartamihardja, Rendra, Soebagio Sastrowardojo, Pramoedya Ananta Toer, I.G. Pandji Tisna, dan Usmar Ismail—sekadar untuk menyebut beberapa nama—telah berjasa memberikan saham mereka kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa yang fitriah dan alamiah. Bahasa tanpa sastra mudah dituduh orang sebagai bahasa buatan. Berdasarkan pengamatannya itu, Moeliono (1985:64) lebih lanjut beranggapan bahwa sebagian sastrawan Angkatan 45 yang ingin berlepas diri dari induk bahasa (bahasa Melayu) dalam berkarya merupakan sikap yang kurang menguntungkan. Hal itu terbayang pada sikap sastrawan "Gelanggang" yang menolak pemakaian bahasa yang penuh pepatah dan petitiyah yang agaknya merupakan sindiran terhadap sikap budaya yang tradisional, sebagaimana mereka lakukan juga dengan mengilatkan kedwihartian makna dalam *Tiga Menguak Takdir*.

Dari uraian itu dapat kita lihat bahwa para sastrawan, melalui karyanya, ikut memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa itu dapat berupa penawaran perubahan norma, "norma baru", dan penerapan norma yang telah ditetapkan atau "pelanggaran" atas norma-norma yang ditetapkan itu.

4. Kendala yang Dihadapi

Pembicaraan mengenai kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan karya sastra sebagai sarana pengembangan bahasa dapat dilakukan dengan bertolak dari dua segi, yaitu dari segi peneliti bahasa dan segi sastrawan. Peneliti bahasa, pada satu pihak, memegang peran yang sangat strategis sehubungan dengan masalah itu. Hasil

penelitian yang mereka lakukan merupakan masukan bagi pemegang kebijakan bahasa dalam mengambil keputusan mengenai pengembangan bahasa. Pada pihak lain, sastrawan, sebagai pemakai bahasa, merupakan pemberi data kepada peneliti bahasa.

Berdasarkan situasi dan kondisi kebahasaan di tanah air kita dewasa ini, tampaknya para peneliti bahasa lebih banyak memusatkan perhatian pada masalah bahasa teks nonsastra dan bahasa lisan. Penelitian terhadap bahasa yang digunakan di dalam karya sastra sangat kurang. Oleh karena itu, kita hampir-hampir tidak dapat menjawab jika diajukan pertanyaan, "Sejauh manakah sumbangan sastrawan terhadap upaya pengembangan bahasa Indonesia terhadap upaya pengembangan bahasa Indonesia dewasa ini?" Suara-suara yang banyak terdengar malahan sebaliknya, yaitu "tuduhan" yang menyatakan bahwa sastrawan justru "menodai" bahasa Indonesia. Padahal, "tuduhan" itu didasarkan pada pengamatan sekilas terhadap satu atau dua karya sastra yang diciptakan oleh satu atau dua orang sastrawan. Dan, yang cukup menyedihkan, anggapan atau tuduhan seperti itu dilontarkan karena ketidakmengertian orang terhadap hakikat sastra dan kekurangmampuan orang dalam memahami bahasa Indonesia yang digunakan dalam karya sastra. Hal itu terjadi karena orang-orang membuat jarak yang terlalu jauh dengan sastra. Sastra merupakan karya seni yang harus dinikmati. Penikmatan sastra harus dilakukan dengan mendekati karya sastra secara intim. Melalui keintiman, kita dapat menangkap hakikatnya dan mengetahui berbagai gejala yang terdapat di dalamnya. Tanpa pendekatan seperti itu, kita tidak akan menemukan apa-apa di dalam karya sastra.

Sastrawan adalah kelompok orang pemakai bahasa walaupun pernah muncul kelompok yang menghindari bahasa sebagai alat untuk melahirkan ekspresinya. Karya sastra seperti itu pernah disebut sebagai puisi konkret. Sebagai pemakai bahasa, seharusnya sastrawan memahami kaidah-kaidah bahasa yang sedang berlaku. Setidaknya, sastrawan memahami kaidah ejaan. Kenyataan yang banyak terlihat dewasa ini tidaklah demikian. Di dalam karya sastra cukup banyak ditemukan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah bahasa, antara lain, dalam hal pemakaian ejaan, tata kalimat, pembentukan kata, terutama di dalam novel dan cerita pendek. Keadaan ini tidak jarang dilakukan dengan bersandar pada *licencia poetica*, yang sangat berpengaruh terhadap pembaca-pembaca muda. Bukan tidak mungkin muncul anggapan di antara pembaca-pembaca muda itu bahwa pemakaian bahasa seperti itu dapat dibenarkan.

Masih banyak masalah lain yang dapat dikemukakan sehubungan dengan kendala tersebut. Akan tetapi, pada kesempatan ini kiranya cukuplah pandangan dari dua segi itu yang dibahas. Yang penting untuk dibahas adalah bagaimana mengatasi kendala yang ada.

5. Kesimpulan

Barangkali sebagian orang menganggap bahwa masalah pemakaian bahasa di dalam karya sastra merupakan masalah biasa yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Anggapan seperti itu tentulah tidak benar, apalagi jika dihubungkan dengan masalah perkembangan dan pengembangan bahasa nasional kita.

Bahasa merupakan alat untuk bernalar. Bahasa yang digunakan seseorang membayangkan penalaran orang itu. Pemakai bahasa—dalam berbagai ranah termasuk ranah sastra—hendaklah memakai bahasa secara tepat dan cermat. Dengan demikian, sastrawan sebagai pemakai bahasa hendaknya berupaya secara tepat dan cermat. Kadar seni dalam karya sastra tidak mungkin berkurang dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan norma bahasa. Agar perkembangan bahasa di dalam karya sastra dapat diketahui, para peneliti bahasa hendaknya mulai melirik karya sastra dalam menentukan objek penelitiannya. Hanya dengan melakukan penelitian ilmiah yang sungguh-sungguh, dapat diketahui sumbangan, kelebihan, dan kekurangan para sastrawan dalam hal pemakaian bahasa. Pada gilirannya, masyarakat dapat mengacungkan jempol kepada sastrawan atau menuding mereka menodai bahasa Indonesia. Kita akan terhindar dari praduga yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brakel, L.F. 1975. *The Hikayat Muhammad Hanafiyyah: A Medieval Mushin-Malay Romance: The Haque*. Martinus Nijhoff.
- Fowler, Roger. 1979. *Linguistics and the Novel*. London: Methuen.
- Hasjim, Nafron. 1993. *Kisau l-Anbiya: Karya Sastra yang Bertolak dari Quran serta Teks Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa*. Jakarta: Intermasa.
- Hawkes, Terence. 1977. *Structuralism and Semiotics*. London: Methuen.
- Kompas. 1993. "Teeuw: Menyesal Menulis Buku." Tanggal 1 Juli 1993.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Gejala Kebahasaan di dalam Karya Sastra

Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran untuk melakukan sesuatu sehubungan dengan pembicaraan di dalam makalah ini, berikut disajikan sedikit data kebahasaan yang terdapat di dalam karya sastra.

a. Di dalam Karya Sastra Lama

Data berikut ini diambil dari *Raja-Raja Melayu* (Soedjiman, 1983), *Kisau l-Anbiya* (Hasjim, 1993), dan *The Hikayat Muhammad Hanafiyyah* (Brakel, 1975).

1) Kata dan Bentuk Kata

gumpita	-	gempita
nasik	-	nasi
menengar	-	mendengar
menyunjung	-	menjunjung
mehadirkan	-	menghadirkan
mehukum	-	menghukum
mehimpunkan	}	menghimpunkan
mengimpunkan		
memilang-milang	-	membilang-membilang
memicara	-	membicara(kan)
memunuh	-	membunuh
memuangkan	-	membuangkan
memaca	-	membaca
berbaiki	-	diperbaiki
berkeliling	-	dikelilingi
bermulia	-	dimuliakan
berhadir	-	hadir
berdapat	-	bertemu
berbinasa	-	membinasakan
bersetia	-	setia kepada (pada)
berketahuan	-	mengetahui
bermudahkan	-	mempermudah
berlajar	-	belajar
dipermasaknya	-	dimasaknya
dipercatnya	-	dicatnya
diperdustakan	-	didustakan
terenang-renang	-	berenang-renang

ternati-nanti	-	dinanti-nanti
harang	-	orang
dihuraikan	-	diuraikan
hutak	-	utak, otak
habu	-	abu
tuha	-	tua
guha	-	gua
semuhanya	-	semuanya
lotar	-	lontar
mutah	-	muntah

2) Kalimat

- (1) Adapun yang bernama Muhammad Hanafiyyah itu hambalah menangkap dia.
- (2) Sepuluh tahun usianya dapat dibantunnya dengan akarnya.
- (3) Terpalu belakang hamba oleh cemeti.
- (4) Niscaya perempuan kedua itu terbunuh olehku.
- (5) Maka tatkala Nabi Allah Musa munajat itu ia berkata-kata dengan Tuhan seru sekalian alam. Maka limpahlah firman dijunjungnya.

b. Di dalam Karya Sastra Modern

Untuk melihat gejala pemakaian bahasa di dalam karya sastra modern, kita dapat mengamati pemakaian bahasa di dalam beberapa buah puisi berikut. Sengaja digunakan puisi agar lebih mudah dalam melihat gejala-gejala kebahasaan dan puisi pada umumnya lebih singkat daripada novel atau cerita pendek.

(1) *Kembalikan Indonesia Padaku*

Hari depan Indonesia adalah dua ratus
juta mulut yang menganga

Hari depan Indonesia adalah bola-bola
lampu 15 watt, sebagian berwarna putih
dan sebagian hitam, yang menyala bergantian

Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa
yang tenggelam karena seratus juta
penduduknya

Kembalikan
Indonesia
padaku

Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt

Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya

Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut dan di dalam mulut itu ada bola lampu 15 watt, sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian

Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main pingpong di atas Pulau Jawa yang tenggelam dan membawa seratus juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan

Kembalikan
Indonesia
padaku

Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena seratus juta penduduknya

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian

Kembalikan
Indonesia
padaku

Kembalikan
Indonesia
padaku

Taufiq Ismail

(2) *Padamu Jua*

Habis kikis
segala cintaku hilang terbang
Pulang kembali aku padamu
Seperti dahulu

Kaulah kandil kemerlap
Pelita jendela di malam gelap
Melambai pulang perlahan
Sabar, setia selalu.

Satu kekasihku
Aku manusia
Rindu rasa
Rindu rupa.

Di mana engkau
Rupa tiada
Suara sayup
Hanya kata merangkai hati.

Engkau cemburu
Engkau ganas
Mangsa aku dalam cakarmu
Bertukar tangkap dengan lepas.

Nanar aku, gila sasaran
Sayang berulang padamu jua
Engkau pelik menarik ingin
Serupa dara di balik tirai

Kasihmu sunyi
menunggu seorang diri
Lalu waktu-bukan giliranmu
Mati hari-bukan kawanku

Amir Hamzah

(3) *Solitude*

yang paling mawar
yang paling duri
yang paling sayap
yang paling bumi

samping yang paling
Kau!

(4) *Tragedi Winka & Sihka*

kawin
kawin
kawin
kawin
kawin
ka
win
ka
win
ka
win
ka
win
winka
winka
sihka
sihka
sihka
sih
ka
sih
ka
sih
ka
sih
ka
sih
sih
sih
sih
sih
sih
ka
Ka

Nafron Hasjim

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Karya Kesastraan sebagai Sarana Pengembangan Bahasa
Pemakalah : Nafron Hasjim
Pemandu : Okke K.S. Zaimar
Pencatat : Harlina Indijati
Maini Trisna Jayawati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** M.S. Hutagalung, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Karya kesastraan sebagai bahan pengembangan bahasa dirasa kurang tajam. Bahasa dalam karya kesastraan itu diolah semaksimal mungkin sehingga sangat berguna untuk pengembangan bahasa. Tanpa sastrawan kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya bahasa Indonesia itu. Dengan demikian, kegunaan karya kesastraan dalam pengembangan bahasa tidak diragukan lagi.

C.A. Mees dan A.A. Fokker mengambil contoh dari karya kesastraan karena pada waktu itu tidak ada bahasa yang standar. Jadi, tidak berarti bahwa karya kesastraan itu tidak mempunyai sumbangan pada perkembangan bahasa. Untuk pengembangan bahasa, penelitian sastra dan penelitian bahasa harus searah karena sastra dan bahasa mempergunakan media bahasa.

Pemakaian bahasa dalam karya kesastraan bertujuan estetika. Oleh karena itu, sebelum menjadi sastrawan, terlebih dahulu harus mampu menggunakan bahasa dengan baik. Itulah sastrawan di Indonesia yang berhasil kebanyakan dari kalangan universitas. Kalau ada kekacauan dalam hal bahasa, bukan berarti karya sastrawan yang membuat kekacauan itu. Di bidang agama juga terjadi kekacauan bahasa. Misalnya, "Tuhan yang herar" (padahal maksudnya "Tuhan yang mengherankan")

Jawaban:

Terima kasih atas saran Pak Hutagalung. C.A. Mees dan A.A. Fokker itu membuat kaidah-kaidah bahasa dari gejala-gejala yang ada dalam karya-karya kesastraan. Mereka mempergunakan data-data dari karya kesastraan itu karena data lain sangat sedikit. Jadi, bukan berarti, saya tiba-tiba saja menarik kesimpulan seperti itu. Misalnya, tata bahasa Sutan Takdir Alisyahbana, kalau kita mengukurnya pada saat ini, terasa bahasanya sangat janggal. Perubahan-perubahan yang ada pada karya kesastraan dikatakan sangat wajar jika kita memakai kacamata sastra. Perubahan-perubahan itu dikatakan tidak wajar jika kita memakai kacamata linguistik. Hal itu disebabkan linguistik mempunyai pedoman-pedoman, antara lain, kamus, dan ejaan. Mereka dengan mudah mengatakan bahwa hal itu

salah atau tidak. Menurut saya, belum ada ahli linguistik yang mengomentari sajak-sajak Sutardji C.B. dengan tinjauan bahasa. Karena itu, kita sangat sukar menjawab pertanyaan sejauh manakah sastrawan memberikan sumbangan dalam pengembangan bahasa. Pada kenyataannya, sastrawan itu memberikan sumbangan pada perkembangan bahasa.

2. **Pertanyaan:** Suparno, IKIP Malang

Saya beranggapan bahwa ahli bahasa tidak menempatkan ragam bahasa sastra sebagai ragam bahasa yang aneh. Saya juga menolak anggapan bahwa belum ada kajian linguistik terhadap bahasa karya kesastraan. Saya berpendapat bahwa ada perbedaan kedisiplinan antara sastrawan pada zaman dahulu dan sastrawan pada zaman sekarang. Jadi, menurut saya, tidak semua ragam bahasa sastra itu dapat dipakai dalam pengembangan bahasa.

Jawaban:

Saya mengetahui bahwa ada ahli bahasa yang membedakan ragam bahasa, salah satunya adalah ragam sastra. Akan tetapi, ahli bahasa itu hanya sampai pembedaan ragam bahasa itu saja. Saya setuju bila tidak semua data yang ada dalam karya kesastraan dapat digunakan sebagai pengembangan bahasa. Dalam makalah ini, saya sudah menuliskan bahwa sastrawan itu banyak melakukan kekeliruan dalam menggunakan kaidah bahasa. Bagi kami yang menggauli sastra, sudah sejak awal, mempersiapkan diri untuk memahami linguistik meskipun pemahaman itu tidak terlalu dalam. Teeuw juga memperingatkan kita bahwa yang penting dan utama dalam melakukan penelitian sastra, ada tiga hal, salah satunya adalah bahasa. Selain itu, budaya yang ada di balik karya kesastraan itu juga perlu mendapat perhatian. Tanpa telaah linguistik, sastra itu tidak "berbunyi".

3. **Pertanyaan:** Diding Wahyudin R., FPBS IKIP Surabaya

- a. Dalam makalah Bapak tertulis kata *licencia poetica*, bukankah *licencia poetica* itu sebagai sebuah tirai bagi para sastrawan untuk menghindari dari kesalahan-kesalahannya?
- b. Bapak tidak menyebutkan bagaimana pengembangan bahasa melalui karya-karya sastra. Apakah dengan cara mencatut beberapa kata atau struktur kata dari karya kesastraan kemudian menjadi kata yang baku?

Jawaban:

Licencia poetica itu dijadikan tameng oleh sastrawan. Pengembangan bahasa melalui karya kesastraan bukan dengan cara mencuplik-cuplik beberapa kata lalu dimasukkan ke dalam kamus. Misalnya, kalimat yang dilontarkan Khairil Anwar berikut ini: "Aku ini binatang jalang/dari kumpulannya terbuang/aku ingin hidup

seribu tahun lagi" ungkapan-ungkapan itu akhirnya menjadi ungkapan umum yang tidak denotatif.

Menurut saya, teori linguistik, sekarang ini, ingin mengeksakkan bahasa. Akan tetapi, di hadapan sastrawan, bahasa itu sangat lentur.

4. **Pertanyaan:** Rachmat Djoko Pradopo, Fakultas Sastra
Universitas Gadjah Mada

Apakah *licencia poetica* itu? Menurut saya *Licencia Poetica* itu tidak ada. Penyimpangan kaidah bahasa yang dilakukan oleh sastrawan itu sebenarnya berdasarkan konvensi sastra. Hal itu dilihat dari semiotik tingkat kedua. Apakah puisi Sutarji yang berjudul "Tragedi Winka & Sihka" itu ada sumbangannya terhadap pengembangan bahasa? Menurut saya, sumbangan sastra terhadap pengembangan bahasa itu hanya dalam hal gaya bahasa.

Jawaban:

Licencia Poetica itu ada (dalam sejarah teori sastra). Pada hakikatnya, *Licencia Poetica* itu tidak perlu ada, tetapi kita semua tahu bahwa dalam teori sastra hal itu ada. Kalau menurut pengamatan Anda hal itu tak ada, itu urusan Anda. Kalau bunyi-bunyian seperti puisi Sutarji yang berjudul "Tragedi Sihka & Winka", "Pot", dan sebagainya, tidak ada sumbangannya terhadap bahasa. Namun, dalam estetika, sumbangan itu ada. Kalau dalam hal pembentukan kata, sumbangan itu tidak ada.

PENYERAPAN UNSUR BAHASA ASING DALAM PERS

M. Marcellino

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

1. Pendahuluan

Bahasa Indonesia (BI) yang berasal dari bahasa Melayu dan merupakan bahasa nasional serta bahasa resmi bangsa Indonesia telah mengalami modernisasi dalam pengembangan kosakatanya secara intensif sejak pemerintahan Jepang di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda di tanah air. Akibatnya, komisi bahasa Indonesia banyak menerjemahkan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

Perkembangan kosakata BI dewasa ini tidak dapat terlepas dari pengaruh kontak kebudayaan dan bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan bahasa Inggris. Dalam perjalanannya, perkembangan kosakata BI mengalami banyak hambatan dari berbagai sektor masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan Pusat Bahasa dalam menerapkan kosakata yang diciptakannya mengalami masalah yang serius.

Hambatan pemodernan kosakata BI sebenarnya berikhtwal dari konflik pakar bahasa sendiri tentang sumber bahasa asing yang mana yang akan dijadikan nara sumber untuk mengembangkan kosakata BI. Sekelompok pakar bahasa menyarankan agar narasumber untuk mengembangkan kosakata BI berasal dari bahasa Arab, Sanskerta, dan bahasa-bahasa lokal atau serumpun BI. Kelompok ini mempunyai alasan bahwa bahasa-bahasa tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme, dan bahasa-bahasa ini sudah dikenal dan secara dominan dipakai dalam sejarah BI selama berabad-abad. Kelompok pakar bahasa lain menganjurkan bahasa Barat, khususnya bahasa Inggris, sebagai narasumber dalam mengembangkan kosakata BI dewasa ini dengan alasan bahwa bahasa Barat dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, industri, perdagangan, pendidikan tinggi, dan lain-lain (Alisjahbana, 1976; Abas, 1978; Lowenberg, 1984; Marcellino, 1990 a,b,c, 1991, 1992).

Makalah ini akan membahas hasil analisis penelitian penggunaan bahasa Barat, khususnya bahasa Inggris, selama dua bulan penuh, dari bulan Februari dan Maret 1993, di surat kabar *Kompas* dan *Suara Pembaruan*. Empat register, yaitu (1) *berita utama*, (2) *surat kepada editor*, (3) *bisnis/ekonomi*, dan (4) *iklan*, akan dianalisis secara saksama untuk menyibak alasan penyerapan unsur bahasa asing ke media komunikasi

tersebut. Analisis penyerapan unsur bahasa asing di media tersebut kemudian akan ditelaah dari segi linguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Akhirnya, studi ini akan mencari jalan keluar kepada Pusat Bahasa tentang langkah dan sikap apa yang harus diambil untuk mengembangkan kosakata BI.

2. Penggunaan Kosakata Bahasa Barat dalam Pers

Penulis akan mengamati penggunaan kosakata bahasa Barat, khususnya bahasa Inggris, dalam dua harian, yaitu *Kompas* dan *Suara Pembaruan* selama dua bulan penuh dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 1993. Berikut ini merupakan gambaran rinci kata pinjaman bahasa Barat di dua media massa tersebut menurut registernya.

a. Kata Pinjaman Bahasa Barat di Harian Kompas

Dalam bulan Februari dan Maret 1993, sebanyak 118.713 kata dari 59 artikel telah ditelaah. Selama bulan Februari sendiri, sebanyak 56.007 kata telah disibak dari 28 artikel, sedangkan dalam bulan Maret 1993, sebanyak 62.706 kata telah ditelaah dari 31 artikel. Dari jumlah artikel yang diselidiki selama dua bulan itu, hanya empat register yang merupakan target penelitian studi ini. Jumlah kata yang disibak tiap register sebagai berikut: *berita utama* sebanyak 29.503 kata, *surat kepada editor* 30.204 kata, *ekonomi/bisnis* 29.506 kata, dan *iklan* 29.500 kata (lihat Tabel 1).

Bila setiap register ditelaah lebih lanjut, dapatlah diketahui persentase dan jumlah rata-rata penggunaan kata pinjaman bahasa Barat per artikel per hari menurut registernya. Dalam bulan Februari 1993, setiap artikel *berita utama* yang diteliti meminjam kosakata bahasa Barat rata-rata sebanyak 8.69% (43 kata) per hari, *surat kepada editor* 9.15% (46 kata), *ekonomi/bisnis* 12.86% (64 kata), dan *iklan* 14.40% (72 kata). Dalam bulan Maret 1993, setiap artikel *berita utama* yang diselidiki meminjam kosakata bahasa Barat sebesar 9.18% (46 kata), *surat kepada editor* 8.85% (46 kata), *ekonomi/bisnis* 12.96% (65 kata), dan *iklan* 12.13% (61 kata) (lihat Tabel 2).

b. Kata Pinjaman Bahasa Barat di Harian Suara Pembaruan

Selama dua bulan, Februari dan Maret 1993, sebanyak 119.245 kata dari 59 artikel telah diselidiki. Dalam bulan Februari 1993, sebanyak 57.244 kata telah ditelaah dari 28 artikel, dan di bulan Maret 1993 sebanyak 62.001 kata telah disibak dari 31 artikel. Seperti di harian *Kompas*, empat register yang sama merupakan target penelitian ini. Jumlah kata yang diselidiki tiap register sebagai berikut: *berita utama* sebesar 29.504 kata, *surat kepada editor* 29.494 kata, *ekonomi/bisnis* 30.693 kata, dan *iklan* 29.554 kata (lihat Tabel 3).

Jika setiap register diteliti lebih lanjut, dapatlah dihitung persentase dan jumlah rata-rata penggunaan kosakata bahasa Barat per artikel per hari menurut jenis

registernya. Dalam bulan Februari 1993, setiap artikel *berita utama* yang ditelaah menggunakan kosakata bahasa Barat rata-rata sebanyak 9.11% (46 kata), *surat kepada editor* 9.39% (47 kata), *ekonomi/bisnis* 13.49% (73 kata), dan *iklan* 12.82% (64 kata). Dalam bulan Maret 1993, setiap artikel *berita utama* yang disibak meminjam kosakata bahasa Barat sebesar 9.30% (47 kata), *surat kepada editor* 8.87% (44 kata), *ekonomi/bisnis* 12.19% (61 kata), dan *iklan* 11.48% (57 kata) (lihat Tabel 4).

TABEL 1
JUMLAH KATA YANG DISELIDIKI
DI EMPAT REGISTER DI HARIAN KOMPAS
DARI BULAN FEBRUARI-MARET 1993

Jumlah Kata yang Diselidiki Register	Februari 1993 (28 Hari)	Maret 1993 (31 Hari)
Berita Utama	14.003 kata	15.500 kata
Surat kepada Editor	14.000 kata	16.204 kata
Ekonomi/Bisnis	14.004 kata	15.502 kata
Iklan	14.000 kata	15.500 kata
Jumlah	56.007 kata	62.706 kata

Jumlah kata yang diselidiki selama dua bulan dari *Harian Kompas* sebanyak 118.713 kata.

TABEL 2
PERSENTASE DAN JUMLAH RATA-RATA
PENGUNAAN KOSAKATA BAHASA BARAT PER ARTIKEL/PER HARI
DARI BULAN FEBRUARI-MARET 1993 DI HARIAN KOMPAS

Register	Februari 1993 (28 Hari) % Rata-Rata Jumlah Kata	Maret 1993 (31 Hari) % Rata-Rata Jumlah Kata
Berita Utama	8.69% 43 kata	9.18% 46 kata
Surat kepada Editor	9.15% 46 kata	8.85% 46 kata
Ekonomi/Bisnis	12.86% 64 kata	12.96% 65 kata
Iklan	14.4% 72 kata	12.13% 61 kata

TABEL 3
JUMLAH KATA YANG DISELIDIKI
DI EMPAT REGISTER DI HARIAN *SUARA PEMBARUAN*
DARI BULAN FEBRUARI-MARET 1993

Register	Jumlah Kata yang Diselidiki	
	Februari 1993 (28 Hari)	Maret 1993 (31 Hari)
Berita Utama	13.997 kata	15.507 kata
Surat kepada Editor	13.994 kata	15.500 kata
Ekonomi/Bisnis	15.196 kata	15.497 kata
Iklan	14.057 kata	15.497 kata
Jumlah	57.244 kata	62.001 kata

Jumlah kata yang diselidiki selama dua bulan dari harian *Suara Pembaruan* sebanyak 119.245 kata.

TABEL 4
PERSENTASI DAN JUMLAH RATA-RATA
PENGUNAAN KOSAKATA BAHASA BARAT
PER ARTIKEL/PER HARI DARI BULAN FEBRUARI-MARET 1993
DI HARIAN *SUARA PEMBARUAN*

Register	Februari 1993 (28 Hari) % Rata-Rata Jumlah Kata	Maret 1993 (31 Hari) % Rata-Rata Jumlah Kata
Berita Utama	9.11% 46 kata	9.30% 47 kata
Surat kepada Editor	9.39% 47 kata	8.87% 44 kata
Ekonomi/Bisnis	13.49% 73 kata	12.19% 61 kata
Iklan	12.82% 64 kata	11.48% 57 kata

3. Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Unsur Bahasa Barat dalam Pers

Dari uraian di 2a dan 2b, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosakata bahasa Barat di pers nasional tersebut dapat dikatakan relatif besar jika dibandingkan dengan penggunaan kosakata bahasa Inggris di bahasa Marati (lihat studi Pandharipande,

1981). Dalam empat register yang diteliti, *iklan* dan *ekonomi/bisnis* mempunyai persentase yang relatif seimbang dan memiliki persentase yang lebih besar daripada register *berita utama* dan *surat kepada editor*. Hal ini berlaku di dua media massa yang diteliti. *Iklan* dan *ekonomi/bisnis* mempunyai persentase rata-rata 13.09% selama dua bulan di harian *Kompas* dan 12.50% di harian *Suara Pembaruan*; sedangkan *berita utama* dan *surat kepada editor* hanya mempunyai persentase rata-rata sebesar 8.97% di *Kompas* dan 9.17% di *Suara Pembaruan*.

Menelaah angka persentase di atas, pertama-tama perlu dipertanyakan apa yang mendorong bangsa Indonesia meminjam kosakata bahasa Barat ke BI. Dari literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dikatakan setidaknya-tidaknya penyerapan unsur bahasa asing, khususnya bahasa Barat ke dalam pers Indonesia dapat disibak dari tiga sudut pandang yang mendasar, yaitu (1) linguistik, (2) sosiolinguistik, dan (3) psikolinguistik.

a. Sudut Pandang Linguistik

Dari sudut pandang linguistik, setidaknya-tidaknya ada lima aspek utama penyebab peminjaman unsur bahasa Barat ke dalam pers Indonesia. Kelima aspek itu adalah (1) mengisi kekosongan kosakata BI, (2) memberikan kecukupan arti semantis, (3) memenuhi kebutuhan penggunaan kata secara praktis, (4) mengisi kebutuhan register tertentu, dan (5) memungkinkan kata asing masuk ke dalam sistem BI.

1) Mengisi Kekosongan Kosakata BI

Dalam era globalisasi kontak bangsa dan bahasa merupakan hal yang tak terelakkan, dan hal ini merupakan peristiwa yang wajar. Karena itu, peminjaman kosakata dari bahasa lain yang tak ada dalam perbendaharaan kosakata bahasa tertentu merupakan peristiwa bahasa yang alami. Berkaitan dengan hal ini, Weinreich (1966) menegaskan bahwa peminjaman kosakata dari satu bahasa ke bahasa lain dapat terjadi karena kata asing tersebut merujuk pada barang baru (*newly invented products*), atau barang yang diimpor dari masyarakat lain yang tidak ada di masyarakat peminjam bahasa itu, atau kata asing itu merujuk tempat, orang, dan konsep baru. Akan tetapi, dia lebih lanjut mengemukakan bahwa hal ini tidaklah merupakan satu-satunya penyebab peminjaman kosakata dari satu bahasa ke bahasa lain.

Kay (1986) mengatakan bahwa kata asing dari suatu bahasa dapat dipinjam ke bahasa lain karena kata itu merujuk pada benda yang berkonotasi berbeda secara kultur dengan benda yang ada di masyarakat peminjam bahasa. Selain itu, benda tersebut mempunyai bentuk dan penggunaan yang berbeda. Dia mengambil contoh kata *basu* dalam bahasa Jepang yang berasal dari bahasa Inggris *bath*. *Basu* yang berarti kamar mandi mempunyai bentuk dan penggunaan yang berbeda dengan kamar mandi tradisional Jepang yang biasa disebut *o-furo*. Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa peminjaman kosakata dari satu bahasa ke bahasa lain dapat terjadi karena

keterbatasan perbendaharaan kata masyarakat pemijam bahasa untuk mengekspresikan objek atau gagasan baru yang tidak atau belum ada di masyarakat pemijam bahasa itu.

Dalam penelitian ini banyak dijumpai kata pinjaman bahasa Barat dalam pers bahasa Indonesia untuk tujuan termaksud. Berikut ini beberapa contoh yang dapat dipaparkan.

Kami tiba di Cibulan dan langsung mencari *hotel* atau *cottage* untuk beristirahat. (*Kompas*, 3 Februari 1993)

"Secara *konstitusional*, saya menyadari sedalam-dalamnya, bahwa pertanggungjawaban ini ..." (*Kompas*, 2 Maret 1993)

... bahwa pertempuran yang terjadi sekarang menggunakan *roket* dan *artileri*. (*Suara Pembaruan*, 4 Februari 1993)

Parlemen Rusia menjegal lagi kekuasaan *Presiden* Boris Yeltsin dan memerintahkan suatu *referendum*... (*Suara Pembaruan*, 30 Maret 1993)

Kata *hotel*, *cottage* (alih kode/*codeswitch*), *konstitusional*, *roket*, *artileri*, *parlemen*, *presiden* dan *referendum*, dan masih ribuan lagi di berbagai register, dari segi semantik kata-kata tersebut sangat distingtif sehingga sukar ditemukan padan katanya yang praktis dalam BI. Kata-kata tersebut dipinjam sebagai simbol ungkapan gagasan yang dinilai tepat. Dalam hal ini, Weinreich (1966:57) mengemukakan bahwa penandaan yang sudah siap pakai (*ready-made designations*) jauh lebih ekonomis daripada 'menerangkan benda-benda itu sekali lagi' (*describing things afresh*).

Berkaitan dengan pemijaman atau penyerapan unsur bahasa asing dalam BI, Alisjahbana (1976) menegaskan bahwa lebih dari 321.000 istilah modern telah dimasukkan ke dalam peristilahan BI, dan telah digunakan di sekolah-sekolah, parlemen, dan media massa. Ini berarti bahwa kata-kata asing itu tak dapat terelakkan untuk dipinjam dalam upaya mengembangkan perbendaharaan kata BI.

2) Memberikan Kecukupan Arti Semantis

Kemampuan kata mengungkap, menjelaskan, menggambarkan/memerikan, melukiskan, atau menyatakan gagasan atau objek secara utuh merupakan properti tersendiri bagi kata itu. Karenanya, bila kondisi ini tak terpenuhi, pemijaman dari satu bahasa ke bahasa lain dapat terjadi. Hal semacam ini oleh Weinreich (1966) dianggap sebagai peristiwa bahasa yang alami.

Dalam penelitian ini banyak ditemukan kata pinjaman dari bahasa Barat yang dipakai di pers bahasa Indonesia karena kata-kata tersebut mengandung properti rinci yang utuh tentang konsep objek/referen yang tidak ditemukan dalam padan kata BI. Kata-kata tersebut dapat dilihat dari contoh berikut ini.

Uang kertas baru tersebut diedarkan untuk menunjang kegiatan *transaksi* yang terus meningkat. (*Kompas*, 23 Februari 1993)

Pemerintah Jerman akan membantu mencari cara yang memperbesar kemungkinan Indonesia untuk hadir dalam KTT (*Konferensi Tingkat Tinggi*, pen.) G-7 di Tokyo bulan Juli (*Kompas*, 29 Maret 1993)

Berdasarkan rencana semula tersebut, suatu *delegasi* dari setiap negara yang ditunjuk oleh PBB ... (*Suara Pembaruan*, 31 Maret 1993)

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kata *transaksi*, *konferensi*, dan *delegasi* dipakai dalam pers menggantikan kata bahasa Indonesia yang sudah ada, seperti *urusan bisnis* (Bangun, 1993:649), *pertemuan*, dan *utusan*. Jika kata pinjaman bahasa Barat itu disibak lebih lanjut, kata asing itu tidak dapat begitu saja digantikan dengan kata-kata yang sudah ada dalam BI.

Kata *transaksi* merujuk pada *a business deal* (Bangun, 1993:649), sedangkan *urusan bisnis* tidak harus selalu merujuk pada *deal* bisnis. Kata *urusan* merujuk pada 'yang diurus, perkara, berhubungan atau ada sangkut pautnya dengan' (Tim Penyusun Kamus, 1988:997).

Kata *konferensi* merujuk pada suatu pertemuan yang melibatkan diskusi konsultasi (Sykes, 1982:197). Akan tetapi, kata *pertemuan* tidaklah harus melibatkan diskusi untuk mencari nasihat (*advice*) (Tim Penyusun Kamus, 1988:936). Demikian pula kata *delegasi* yang merujuk pada 'mempercayakan kekuasaan kepada suatu deputi' (*entrusting of authority to deputy*) (Sykes, 1982:252). Namun, kata *utusan* tidaklah harus mengandung pengertian akan pemerolehan mandat. *Utusan* berarti 'seseorang yang ditugaskan melakukan sesuatu'. Tugas ini bahkan dapat dilakukan oleh seorang kurir (Tim Penyusun Kamus, 1988:1000).

Contoh lain yang serupa dengan contoh tersebut ialah sering dijumpainya kata *defisit* dan *teknik* dalam pers Indonesia. Bila kita mencari padan kata dalam BI, dapatlah ditemukan kata *kekurangan* dan *cara*. Namun, bila kata asing tersebut ditelaah lebih rinci dari segi semantiknya, padan kata dalam BI tidak dapat secara tepat menggantikannya. Kata *defisit* hanya digunakan untuk merujuk pada suatu kondisi keuangan yang berstatus kurang (Sykes, 1982:250). Akan tetapi, kata *kekurangan* dapat digunakan di banyak bidang (*domains*), seperti *kekurangan makan* (*lack of food*), *kekurangan tenaga* (*lack of energy*), *kekurangan kertas* (*paper shortage*), dan seterusnya. Dari uraian itu dapatlah disimpulkan bahwa kata *kekurangan* dapat merujuk pada kata bahasa Inggris *lack of* dan *shortage*. Hal serupa berlaku juga untuk kata *teknik*. Dalam bahasa Inggris *teknik* mengandung pengertian tentang pemilihan keterampilan profesional atau mekanis. Akan tetapi, kata *cara* dalam BI, dapat merujuk pada kata bahasa Inggris *ways* atau *procedures*, seperti tercermin dalam frasa *cara berbicara* (*way of speaking*), *cara berpakaian* (*way of dressing*), dan *cara mendapatkan pinjaman* (*procedures of having loans*).

3) Memenuhi Kebutuhan Penggunaan Kata Secara Praktis

Berbicara mengenai penyerapan unsur bahasa asing dalam BI tidak dapat terlepas dari kebutuhan (*needs*) banyak sektor masyarakat dan keterbatasan perbendaharaan kosakata BI itu sendiri. Kata-kata asing yang sudah siap pakai dan tidak ada padan kata tunggalnya (*single correspondance*) dalam BI karena kata itu merujuk pada konsep baru atau keutuhan pengertian dan/atau kekhasan akan objek atau gagasan topik ujaran yang dipinjam begitu saja dalam BI. Hal ini dibenarkan Weinreich (1966:57) dengan mengatakan bahwa penandaan yang sudah siap pakai jauh lebih ekonomis daripada menerangkan benda-benda itu sekali lagi. Khususnya sektor jurnalistik yang sering menggunakan kata yang singkat, padat, jelas, dan tepat, kata pinjaman bahasa asing sangat mendukung kelancaran pers. Hal ini terlihat dalam beberapa contoh berikut ini.

Di lain pihak, *komisi* yang sering diterima oleh *industri asuransi* dari pembayaran ... (*Suara Pembaruan*, 13 Februari 1992)

Ia (Yeltsin, pen.) mengimbau diadakannya suatu pembicaraan lanjutan untuk mengakhiri *krisis konstitusional*... (*Suara Pembaruan*, 28 Maret 1993)

... karena *doktrin* hankam didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 ... (*Kompas*, 12 Februari 1993)

... parlemen memberangus hak rakyat dan berusaha menumpuk kekuasaan untuk memulihkan kejayaan *komunis* (*Kompas*, 16 Maret 1993)

Dari contoh tersebut dapat dikemukakan bahwa kata-kata seperti *komisi*, *industri*, *asuransi*, *krisis*, *konstitusional*, *doktrin*, dan *komunis* merupakan kata-kata asing yang memberikan suatu keutuhan arti yang sangat khas terhadap suatu gagasan atau konsep yang sangat sukar dicarikan padan katanya di BI.

Kata *komisi*, misalnya, merujuk pada 'pembayaran kepada suatu agen/biro jasa atau pialang/makelar dengan memberikan persentasi dari jumlah uang yang terlibat (*pay of such agent, percentage of amount involved*)' (Sykes, 1982)*. Kata ini tidak dapat begitu saja diganti dengan kata *upah* yang telah tersedia dalam BI karena *upah* merujuk pada 'uang dsb. yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan'. Kata *upah* biasanya dikaitkan dengan pembayaran kepada buruh atau pekerja rendah (*unskilled labor*) (Tim Penyusun Kamus, 1988:994). Demikian pula, kata-kata asing lainnya mengalami hal yang sama dalam arti bahwa kata-kata tersebut tidak mudah digantikan dengan kata yang sudah ada dalam BI.

4) Mengisi Kebutuhan Register Tertentu

Dalam era globalisasi komunikasi di semua bidang (*domains*) berpaut dengan cepat, kontak bahasa tidak terelakkan lagi. Pengaruh kuat akan pengenalan bahasa-bahasa lain, khususnya di bidang-bidang yang berkaitan dengan "modernity"

mengakibatkan kontinuitas proses peminjaman kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Kontinuitas peminjaman kata asing ini juga terjadi dalam pers BI (Kaehler, 1978; Marcellino, 1991, 1992).

Dalam penelitian ini peminjaman kata asing tidak hanya dilakukan oleh jurnalis saja, tetapi juga oleh sektor awam lainnya seperti tercermin dalam *Surat kepada Editor* di dua pers yang diselidiki. Berikut ini beberapa contoh kata pinjaman bahasa Barat di dua pers tersebut.

Kabinet kali ini berupaya untuk tidak *moneter sentris*. (*Suara Pembaruan*, 18 Februari 1993)

... *inflasi* yang terjadi sekarang ini akibat *efek* kenaikan gaji dan BBM. (*Suara Pembaruan*, 27 Februari 1993)

... soal *deregulasi*, Rizal yang *alumnus* ITB ini mengatakan *liberalisasi moneter* keuangan ... (*Kompas*, 1 Maret 1993)

Pembelian saham tersebut, kata Suharto, berkaitan dengan upaya *bank* ini untuk *Go International*, sejak menjadi *bank devisa*. (*Kompas*, 4 Maret 1993)

Dari contoh itu, terlihat bahwa kata *moneter*, *inflasi*, *deregulasi*, *liberalisasi*, *bank*, *devisa*, dan masih banyak kata pinjaman lain lagi, sering digunakan dalam register ekonomi/bisnis. Dalam penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kata *politik*, *nasional*, *internasional*, dan *republik*, misalnya, sering digunakan dalam register politik (Marcellino, 1992). Penelitian Stevens (1973) menyibak bahwa kata pinjaman dari bahasa Barat yang ada di pers baru-baru ini digunakan untuk memerikan aspek mistik dari segi pandang psikologi Barat. Kata pinjaman yang dia maksud ialah *irasional* dan *astrologi*.

Sehubungan dengan peminjaman kata untuk mengisi register tertentu, Lowenberg (1984) mengemukakan bahwa kata-kata pinjaman dari bahasa Barat, khususnya Inggris, sering menggeser kata yang sudah ada dan mantap penggunaannya dalam BI, khususnya dalam register bisnis. Kata pinjaman itu biasanya merujuk pada konsep "*modernity*". Kata *bisnis*, *kredit*, dan *manager*, misalnya, sering digunakan bila berkaitan dengan perusahaan komersial modern, seperti perusahaan dagang yang besar, pasar swalayan, pabrik-pabrik, bank, dan salon kecantikan. Kata-kata tersebut menggantikan kata *dagang*, *piutang*, dan *pimpinan* yang telah ada dalam BI. Lowenberg lebih lanjut mengemukakan bahwa kata-kata ini sekarang lebih sering digunakan bila membicarakan perdagangan tradisional yang kecil, seperti KUD (koperasi unit desa), tempat penjahit (*a tailor shop*), atau restoran kecil.

5) Memungkinkan Kata Asing Masuk ke dalam Sistem BI

Sistem BI sangat berbeda dengan sistem bahasa Marati (lihat penelitian Pandharipande, 1981) dalam pengertian bahwa sistem BI sangat terbuka dan reseptif terhadap bahasa asing mana pun. Ini terbukti bahwa BI tidak membedakan proses penyerapan (*nativization*) baik secara fonologi maupun morfologi antara kata asing

dari bahasa Arab, Sansekerta, maupun bahasa serumpun dengan kata asing dari bahasa Barat (Kaehler, 1978; Lowenberg, 1984; Marcellino, 1990, a,b,c; 1992). Sistem semacam inilah yang menyebabkan alir masuk kata asing, khususnya bahasa Barat, dalam pers BI. Beberapa contoh berikut ini memerikan argumentasi di atas.

Suasana tegang sempat muncul ketika Sabam Sirait *menginterupsi* sidang paripurna SU MPR 1993 ... (*Kompas*, 6 Maret 1993)

"Industri berspektrum luas yang menyerap banyak tenaga kerja tetap *diprioritaskan*," (*Kompas*, 22 Maret 1993)

Peningkatan biaya pembelian BBM akan mengurangi laba sebagaimana *diprediksikan* sebelumnya. (*Suara Pembaruan*, 11 Februari 1993)

Dari uraian itu dapat dilihat bahwa sistem BI sebegitu terbuka sehingga kata-kata pinjaman bahasa Barat dapat diafiksasi dengan awalan ataupun akhiran yang ada dalam sistem BI. Sebegitu terbuka dan reseptifnya sistem BI sehingga alih kode pun (*codeswitches*) dapat diberi afiks dan mendapat tempat (*slot*) serta diperlakukan sesuai dengan norma sistem BI. Berikut ini beberapa contoh alih kode yang terdapat dalam pers yang mendapat afiksasi BI.

Merecrut tenaga kerja dalam dunia *perbankan* saat ini ... (*Kompas*, 1 Februari 1993)

Untuk tahun 1992 misalnya, dari 1.000 juta dollar AS yang diperkirakan, *actualnya* hanya 700 juta dollar. (*Kompas*, 2 Februari 1993)

... dan mereka kemudian akan *memotori* anak-anak yang lain yang masih *berstatus* siswa ... (*Suara Pembaruan*, 9 Februari 1993)

Dari contoh itu dapat disimpulkan bahwa sistem BI itu sangat terbuka dan reseptif sehingga hal ini memungkinkan derasnya alir peminjaman kata dari bahasa asing baik dari bahasa Barat maupun bahasa mana pun yang dibutuhkan pemakai BI.

b. Sudut Pandang Sociolinguistik

Haugen (1972) menyatakan bahwa peminjaman kosakata dari satu bahasa ke bahasa lain karena kebutuhan akan kata-kata yang diperlukan peminjam bahasa itu saja. Hal yang lebih mendalam tentang peminjaman kata dari bahasa lain perlu disibak secara saksama. Untuk ini, Weinreich (1966) mengemukakan bahwa peminjaman kosakata dari satu bahasa ke bahasa lain dapat dimengerti dengan baik bila dihubungkan dengan keadaan sosiokultural dan psikologi masyarakat peminjam bahasa itu.

Dari sudut pandang sociolinguistik, peminjaman kata asing ke dalam masyarakat peminjam bahasa sering disebabkan oleh asosiasi simbolik bahasa yang dipinjam dalam kontak pertemuan tertentu (*in a contact situation*) (Marcellino, 1992). Sehubungan dengan hal ini, Weinreich (1966) menegaskan bahwa bila suatu bahasa itu dianggap bergengsi oleh masyarakat peminjam bahasa, ada kecenderungan anggota masyarakat peminjam bahasa menggunakan kata-kata dari bahasa yang bergengsi itu untuk

menunjukkan status sosialnya lewat pengetahuan yang dimilikinya. Haugen (1972:60) menyebut bahasa yang bergengsi ini "*superior language*", sedangkan bahasa meminjam "*subordinate language*". Lebih lanjut, Haugen menyatakan bahwa suatu peristiwa bahasa yang alami bila bahasa "*subordinate*" meminjam kata-kata dari bahasa "*superior*". Berkaitan dengan masalah ini, Rubin (1971) yang mengutip pernyataan Labov mengatakan bahwa nilai-nilai sosial itu begitu sangat berarti sehingga nilai-nilai ini dapat mempengaruhi perubahan bahasa. Akibatnya, sikap dan kepercayaan orang yang berdwibahasa terhadap suatu bahasa tertentu dapat memainkan peran yang sangat penting dalam perubahan bahasa (*language change*).

Dalam penelitian ini, kata pinjaman bahasa Barat dalam pers BI, dari sudut pandang sosiolinguistik, mempunyai setidaknya-tidaknya tiga fungsi utama: (1) menunjukkan identitas personal, (2) menunjukkan "*modernity*", dan (3) memenuhi kebutuhan eufemisme.

1) Menunjukkan Identitas Personal

Weinreich (1966) mengemukakan bahwa asosiasi simbolik bahasa yang dianggap bergengsi sering mempengaruhi orang yang berdwibahasa untuk meminjamnya guna menunjukkan status sosialnya lewat pengetahuannya. Dengan demikian orang yang berdwibahasa ingin menunjukkan identitas personalnya lewat bahasa-bahasa yang dikuasainya. Berikut ini beberapa contoh alih kode yang digunakan untuk maksud itu.

Apa yang terjadi waktu pembayaran *toll fee*? Pengemudi minta Rp 4.000,- untuk *feenya* dengan alasan ... (*Kompas*, 15 Februari 1993)

Yang jelas, *feeling* saya mengatakan akan ada peremajaan ..." kata Sudomo. (*Suara Pembaruan*, 3 Maret 1993)

Rupa-rupanya, kaitan dengan *white color crime* atau tindak-tanduk etika bisnis yang kurang baik juga berlaku di sini. (*Suara Pembaruan*, 8 Maret 1993)

2) Menunjukkan "Modernity"

Dalam penelitian ini banyak dijumpai bahwa kata-kata asing, khususnya bahasa Barat, yang mempunyai padan katanya dalam BI sering digunakan dalam pers BI. Kata-kata ini sudah menggeser penggunaan kata yang sudah ada dan mantap pemakaiannya dalam BI. Dalam hal ini, Lowenberg (1984) juga menemukan banyak kata asing dari register perdagangan yang dipakai dalam BI untuk merujuk pada konsep "*modernity*". Berikut ini beberapa contoh yang dapat dipaparkan dari penelitian ini.

Dikatakan, perlu disadari bahwa *debitur*, bukan selalu berada di pihak yang lemah ... (*Suara Pembaruan*, 2 Februari 1993)

... dapat langsung menghubungi *Manager Customer Service* kami. (*Suara Pembaruan*, 21 Februari 1993)

Seperti dikatakan Lowenberg (1984), kata-kata seperti *manajer*, *kredit*, dan *bisnis*, misalnya, sering digunakan dalam perusahaan komersial modern menggantikan kata *pimpinan*, *piutang*, dan *dagang*.

3) Memenuhi Kebutuhan Eufemisme

Weinreich (1966) mengemukakan bahwa peminjaman kata dari satu bahasa ke bahasa lain karena kebutuhan untuk menghaluskan ungkapan (eufemisme). Alisjahbana (1976) mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kata-kata baru muncul menggantikan kata-kata yang sudah ada dalam BI yang dianggap kasar oleh sekelompok tertentu. Kata-kata itu misalnya *mantan*, *tunasusila*, *tunawisma*, dan *tunakarya* menggantikan kata *bekas*, *pelacur*, *gelandangan*, dan *penganggur*, yang dianggap berkonotasi kasar.

Dalam penelitian ini terungkap kata-kata asing yang dipakai dalam pers BI untuk keperluan eufemisme. Kata-kata asing itu, antara lain, *komisi*, *ajudan*, dan *asisten*.

Bila kata-kata tersebut disibak lebih lanjut, *komisi* merujuk pada pembayaran yang diberikan kepada seseorang dengan persentase jumlah uang yang diberikan (Sykes, 1982:188). Namun, *upah* sebagai padan katanya merujuk lebih pada pengertian akan suatu pembayaran atau imbalan atas terselesainya suatu pekerjaan kasar atau pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan (*unskilled labor*). Demikian pula kata *ajudan* dan *asisten* dapat menghaluskan penggunaan kata *pembantu* karena pengertian kata ini sering diasosiasikan dengan *pembantu rumah tangga* yang berstatus sosial rendah di masyarakat Indonesia.

c. Sudut Pandang Psikolinguistik

Peminjaman dari satu bahasa ke bahasa lain hanya dapat dilaksanakan bila penutur bahasa menguasai setidaknya dua bahasa dengan baik. Karena itu, penelitian tentang peminjaman kata haruslah dimulai dengan penelitian tingkah laku penutur bahasa itu sendiri (Haugen, 1972).

Berkaitan dengan hal itu, Weinreich (1966) mengemukakan bahwa akibat berkemampuan bahasa ganda terhadap penampilan bahasa penutur, bahasa menjadi bervariasi. Hal ini dimungkinkan karena faktor ekstralinguistik, artinya faktor di luar perbedaan-perbedaan struktural ataupun leksikal bahasa yang dipakai si penutur bahasa itu. Dengan demikian, pemakaian satu bahasa di bahasa lain tidaklah harus dikarenakan kebutuhan linguistik masyarakat peminjam bahasa, tetapi juga kebutuhan sosial dan aspek psikologi si peminjam bahasa.

Dalam penelitian ini, kefasihan pengguna bahasa yang tercermin dalam pers yang diteliti menyangkut penggunaan kata pinjaman (*loanwords*) ataupun alih kode (*codeswitches*). Khusus yang terakhir ini juga tampak dalam penelitian Kartomiharjo

(1981) yang menyibak unsur serapan bahasa asing dalam bahasa Jawa. Berikut ini cuplikan dari penelitiannya.

"King ndak pundi Pak Lurah?"

(Dari mana Pak Lurah?)

"King ndherek *upgrading* teng kabupaten."

(Dari ikut *upgrading* di kabupaten.)

Dari contoh itu, dapat dikatakan bahwa alih kode bahasa Inggris pun sudah digunakan dalam bahasa Jawa. Kartomiharjo lebih lanjut mengatakan bahwa kata *upgrading* telah diserap (*nativized*) untuk merujuk pada pengertian "*refresher course*".

4. Faktor Penghambat Penerapan Kosakata Baru Ciptaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Ada lima faktor penghambat penerapan kosakata ciptaan Pusat Bahasa, yaitu (1) konflik antarpakar bahasa untuk menentukan narasumber sebagai dasar memodernkan BI, (2) kepentingan sektor masyarakat pengguna bahasa, (3) penerapan kata ciptaan baru yang terasa dipaksakan untuk menggeser kata yang sudah ada dan mantap penggunaannya, (4) peningkatan peranan bahasa Inggris di negara tetangga Indonesia, dan (5) peningkatan pengaruh Amerika terhadap Indonesia di berbagai sektor.

Pada butir 1 telah diuraikan bahwa sekelompok pakar bahasa menghendaki bahasa Sanskerta, Arab, ataupun bahasa serumpun BI dijadikan narasumber untuk memodernkan BI karena bahasa-bahasa tersebut telah digunakan secara historis dalam BI. Alasan lain ialah bahwa bahasa-bahasa tersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan mempertahankan tradisi serta kultur bangsa Indonesia. Bahasa-bahasa itu juga telah dikenal dan digunakan secara dominan dalam BI sehingga mudah dimengerti sebagian besar bangsa Indonesia. Lebih lanjut kelompok ini menegaskan bahwa penggunaan kata asing dari bahasa Barat dapat mengakibatkan pemisahan linguistik (*linguistic segregation*) antara orang Indonesia elit teknokrat dan kelompok masyarakat non-elit yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Barat (Lowenberg, 1984; Marcellino, 1990c, 1992). Sekelompok pakar bahasa lain beranggapan bahwa bahasa Baratlah, khususnya bahasa Inggris, yang hendaknya dijadikan narasumber untuk memodernkan BI. Alasannya, bahasa-bahasa ini dapat memenuhi kebutuhan kebahasaan untuk bidang ilmu dan teknologi modern, industri, perdagangan, administrasi negara, media massa, dan pendidikan tinggi. Konflik ini masih terjadi sampai saat ini seperti tersibak dalam makalah-makalah yang disajikan pakar bahasa dalam seminar.

Aspek penghambat kedua ialah kepentingan sektor masyarakat pengguna bahasa. Untuk dunia jurnalistik, pemakai jasa iklan, dan kaum awam yang tidak fanatik dengan bahasa-bahasa Barat, penggunaan kata pinjaman dari bahasa asing dirasa lebih

tepat, singkat, dan padat. Khusus bagi pemakai jasa reklame, kata asing digunakan untuk merujuk "*modernity*" (Takashi, 1990).

Aspek ketiga menyangkut penerapan kata ciptaan baru yang terasa dipaksakan dan menggeser atau mengganti kata yang sudah ada dan mantap penggunaannya. Kata-kata baru ini tidak semuanya dapat berhasil diterapkan karena banyak sektor masyarakat yang mempunyai kepentingan lain akan pemakaian bahasa, atau masih banyak pengguna bahasa yang belum mengetahui kata-kata ciptaan baru itu. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sarana informasi dari Pusat Bahasa untuk menyebarkan kata-kata ciptaannya kepada masyarakat.

Aspek keempat penghambat penerapan kata-kata baru ciptaan Pusat Bahasa ialah meningkatnya peranan bahasa Inggris di negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Hal ini sangat berpengaruh terhadap laju derasnya peminjaman kata asing, khususnya bahasa Inggris, ke dalam BI.

Akhirnya, meningkatnya pengaruh Amerika terhadap Indonesia diberbagai sektor, seperti pendidikan dan kebudayaan, perdagangan, ilmu dan teknologi, serta penerangan, sangat berpengaruh dalam proses peminjaman unsur bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam pers BI.

5. Bagaimana Seharusnya Sikap Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pusat bahasa sebagai tempat resmi yang dipercayai pemerintah mengembangkan dan melestarikan BI hendaknya berwawasan luas dan bersikap sangat hati-hati serta bijaksana dalam membuat kebijakan, khususnya kebijakan dalam memodernkan kosakata BI. Sikap sepihak yang ingin memaksakan penggunaan kosakata baru yang diciptakannya untuk mengganti atau menggeser kata yang sudah ada dan mantap pemakaiannya di masyarakat pengguna bahasa perlu dipertimbangkan lagi. Bila Pusat Bahasa ingin berhasil dalam menerapkan kosakata baru yang diciptakannya, diperlukan suatu sarana atau wahana untuk penyebarluasannya secara memadai dan teratur.

Sikap *chauvinistic* tentulah tidak tepat dalam mengembangkan BI, khususnya kosakatanya, dalam dunia yang sekarang ini terus mengarah pada globalisasi di berbagai sektor karena kontak bahasa tidak terelakkan lagi. Dalam mengembangkan kosakata, menurut Weinreich (1966), yang diperlukan ialah perlakuan yang tepat akan kondisi kosakata baru, baik dari bahasa serumpun maupun asing, sehingga dapat dimungkinkan dan diterima oleh masyarakat pemakai bahasa. Masyarakat inilah yang nantinya menentukan dan sangat berpengaruh dalam sukses tidaknya penggunaan bahasa (*language use*) dalam kehidupan bahasa yang nyata.

Karena Pusat Bahasa merupakan wadah resmi pemerintah untuk mengembangkan BI, ia harus membuat kebijakan bahasa. Haugen (1966) yang dikutip Jernudd dan das Gupta (1971:199) berpendapat bahwa dalam pengembangan bahasa perlu dipikirkan tiga aspek berikut ini: *efficiency*, *adequacy*, dan *acceptability*. Ketiga aspek

ini berperan sangat penting agar kosakata baru ciptaan Pusat Bahasa dapat diterima masyarakat pemakai bahasa karena memenuhi berbagai kebutuhan nyata mereka dan selera berbagai macam sektor masyarakat yang berbeda latar belakang pendidikan, keperluan, etnik, sosial, dan budayanya.

Sehubungan dengan konflik antardua kelompok pakar bahasa dalam mengembangkan kosakata BI, saya berpendapat bahwa sikap yang moderatlah yang diperlukan untuk mengatasi kemelut ini. Bila kosakata baru itu merujuk pada pengertian atau objek (referen) yang mempunyai nilai-nilai sosiokultural yang tak terpadankan oleh kosakata dari bahasa Barat, narasumber untuk kata tersebut dapatlah diambil dari bahasa-bahasa serumpun BI, atau bahasa Sanskerta, Arab, juga bahasa asing yang secara dominan dan historis digunakan dalam BI. Namun, bila kosakata ciptaan baru itu merujuk pada pengertian yang modern dan sukar dicarikan padan katanya dalam bahasa serumpun BI ataupun bahasa-bahasa asing yang telah bersejarah dipakai dalam BI, narasumber untuk kata itu hendaknya diambil dari bahasa Barat. Seperti terungkap dalam penelitian ini, kata-kata bahasa Barat dipakai dalam pers BI untuk merujuk pada pengertian modern. Kata-kata pinjaman ini digunakan dalam BI karena padan katanya dalam BI, dari segi semantik, dianggap tidak dapat mewakili nuansa dan *subtlety* kata pinjaman itu dalam memerikan pengertian akan suatu referen tertentu.

Akhirnya, perlu ditekankan sekali lagi bahwa telaah bahasa secara tuntas dapat disibak dengan baik bila telaah itu tidak hanya melibatkan aspek linguistik, melainkan juga aspek sosiokultural dan psikologis. Dengan kata lain, proses penyerapan unsur bahasa asing ke dalam BI dapat secara menyeluruh diungkapkan apabila telaah bahasa melibatkan semua sumber disiplin ilmu yang berkaitan dengan permasalahan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1978. "Bahasa Indonesia as a Unifying Language of Wider Communication: A Historical and Sociolinguistic Perspective". Ateneo de Manila University-Philippine Normal College Consortium Manila. Disertasi yang belum diterbitkan.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1976. *Language Planning for Modernization: the case of Indonesian and Malaysian*. The Hague: Mouton.
- . 1978. "The Concept of Language Standardization and Its Application to the Indonesian Language." Pada A.Q. Perez, A.O. Santiago, dan Nguyen Dang Liem (eds.), *Papers from the Conference on the Standardization of Asian Languages*, (December 1974), 16–21. Canberra: The Australian National University.
- Bangun, Antonius, Drs., M.A. 1993. *Password: English Dictionary for Speakers of Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Kesaint Blanc Indah Corp.
- Haugen, Einar. 1972. *The Ecology of Language*. Stanford: Stanford University Press.
- Jernudd, Bjorn H. dan Jyotirindra Das Gupta. 1971. "Towards a Theory of Language Planning." Pada Joan Rubin dan Bjorn H. Jernudd (Eds.), *Can Language Be Planned?*, 195–215. Honolulu: The University Press of Hawaii.
- Kaehler, Hans. 1978. "Standardization and Development of Newspapers' Bahasa Indonesia." Pada A.Q. Perez, A.O. Santiago, dan Nguyen Dang Liem (Eds.), *Papers from the Conference on the Standardization of Asian Languages*, (December 1974), 16–21. Canberra: The Australian National University.
- Kartomihardjo, Soeseno. 1981. "Ethnography of Communicative Codes in East Java." *Pacific Linguistics*, D, 39. Canberra: The Australian National University.
- Kay, Gillian S. 1986. "The English in Japanese". *English Today*, 2-6, 25–27.
- Lowenberg, Peter H. 1983. "Lexical Modernization in Bahasa Indonesia: Functional Allocation and Variation in Borrowing." *Studies in the Linguistic Sciences*, 13,2, 73–85.
- Lowenberg, Peter H. 1984. "English in the Malay Archipelago: Nativization and its Functions in a Sociolinguistic Area". Urbana: University of Illinois. Disertasi yang belum diterbitkan.

- Marcellino, Marcellinus. 1992. "Kata Pinjaman Bahasa Asing di Media Massa Indonesia: Alokasi Fungsional dan Proses Modernisasi." Dibentangkan di Persidangan Antarbangsa Linguistik Melayu I: Peranan Linguistik Melayu sebagai Asas Pembinaan Tamadun Moden, Kuala Lumpur, Malaysia, 11-13 Agustus 1992.
- . 1991. "Kata Pinjaman Bahasa Barat di Bahasa Indonesia: Suatu Telaah Antardisiplin". Dibentangkan di Konferensi dan Musyawarah Linguistik Indonesia Keenam, Semarang, 7-12 Juli 1991.
- . 1990a. "An Analysis of Lexical Modernization in Indonesian Mass Media." Dibentangkan di The Graduate Linguistics Seminar Series, Georgetown University, Washington, D.C., USA.
- . 1990b. "Processes of Lexical Modernization in Bahasa Indonesia." Dibentangkan di Pre-Sessions of the Georgetown Round Table Meetings, Georgetown University, Washington, D.C., USA.
- . 1990c. "Kata Pinjaman Bahasa Barat di Media Massa Bahasa Indonesia: Suatu Tinjauan Fungsional". DaLAM Kaswanti Purwo (Ed.) *Linguistik Indonesia*, Vol 2, 67-79, Jakarta: Atma Jaya University Press.
- Pandharipande, Rajeshwari. 1981. "On the Nativization of the Lexicon: The Case of Marathi." *Linguistics*, 19:987-1011.
- Richards, Jack, John Platt, dan Heidi Weber. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. London: Richard Clay (The Chauser Press) Ltd.
- Rubin, Joan. 1971. "Evaluation and Language Planning." Pada Joan Rubin dan Bjorn H. Jernudd (eds.), *Can Language Be Planned?*, 217-252. Honolulu: The University Press of Hawaii.
- Stevens, Alan M. 1973. "Bahasa Indonesia: Modernization and Nationalization", *Asia*, 30, 70-84.
- Sykes, J.B. 1982. *The Concise Oxford Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- Takashi, Kyoko. 1990. "A Functional Analysis of English Borrowings in Japanese Adversing: Linguistic and Sociolinguistic Perspectives". Washington, D.C.: Georgetown University. Disertasi yang belum diterbitkan.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Weinreich, Uriel. 1966. *Language in Contact*. The Hague: Mouton.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Penyerapan Unsur Bahasa Asing dalam Pers
Pemakalah : M. Marcellino
Pemandu : Kosasih Kamil
Pencatat : M. Djasmin Nasution
Utari Sadewo

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Harimurti Kridalaksana, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Menuduh Pusat Bahasa (a) menciptakan kata baru *sangkil* dan *mangkus* perlu diluruskan; (b) tidak mempunyai saluran; tidak benar karena semua kata sudah tertera dalam KBBI dan kamus tersebut sudah disebarluaskan. Unsur klasik kita gunakan untuk wacana politik. Di Barat juga begitu.

Jawaban:

Pusat Bahasa mempunyai kebijakan, misalnya dalam *Lembar Komunikasi*, tetapi saluran tersebut belum efisien dan efektif. Misalnya, kata *sangkil* dan *mangkus* setelah diciptakan, banyak orang yang tidak suka memakainya sehingga hilang.

2. **Pertanyaan:** Yohanes Tri Mastoyo J.K., MLI Cabang Yogyakarta

Saya setuju untuk tidak takut menyerap kata asing. Serapan hanya dimungkinkan untuk kalangan tertentu. Apakah sifat bahasa yang menyeluruh dapat dipertahankan?

Jawaban:

Apakah kita tahu bahwa kata serapan itu dari bahasa Sanskerta atau Arab? Unsur-unsur serapan hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Setiap media cetak mempunyai objek sasaran tertentu. Jadi, unsur serapan yang digunakan oleh media cetak berbeda.

3. **Pertanyaan:** Yon Adlis, FKIP Universitas Jambi

Penyerapan bahasa asing cukup mengkhawatirkan. Bagaimana kita membatasi penggunaan bahasa asing dalam media cetak?

Jawaban:

Kekhawatiran kita tidak perlu berlebihan karena kata asing belum sampai 10%. Kemurnian bahasa tidak mungkin dipertahankan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan (politik) bahasa. Setuju adanya kebijakan bahasa.

4. Pertanyaan: Slamet Djabarudi, Majalah *Tempo*

Apakah kata asing dapat kita ciptakan?

Jawaban:

Ada tiga bidang besar dalam kontak bahasa, yakni linguistik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik. Kata asing kadang-kadang digunakan untuk memperlihatkan sikap modern.

PEMETAAN BAHASA (DAERAH): UNTUK APA DAN UNTUK SIAPA?

Ayatrohaédi
Universitas Indonesia

1. Pemetaan Bahasa (Daerah)

Hingga saat ini, belum dapat diketahui dengan pasti, berapa banyak sebenarnya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jumlahnya beragam antara 69 (Salzner), 200 (Esser), 418 (Pusat Bahasa), dan 583 (Wurm) bahasa (Masinambouw 1992: 171-2). Perbedaan jumlah itu disebabkan oleh berbagai hal, baik yang "ilmiah" maupun yang tidak. Penyebab yang ilmiah, misalnya, berdasarkan penelitian (sekurang-kurangnya pengamatan) yang dilakukan sesuai dengan tatacara dan kaidah penelitian kebahasaan. Dari segi ini, mungkin saja "bahasa" Osing yang digunakan oleh sebagian penduduk daerah Banyuwangi, Jawa Timur, dianggap sekedar basapraja (=dialek) bahasa Jawa. Sebaliknya yang terjadi, jika penyebabnya adalah hal yang tidak ilmiah, katakanlah yang lebih didasarkan pada embaran yang diperoleh dari para penutur bahasa itu. Di daerah Sulawesi Tengah, misalnya, para calon pengumpul data bahasa menyebutkan nama sejumlah bahasa yang seolah-olah memang mempunyai hak untuk disebut sebagai bahasa yang mandiri. Setelah dilacak, baik melalui sumber lisan maupun sumber tulis, dapat dikatakan bahwa sebenarnya apa yang mereka anggap sebagai bahasa yang berbeda itu hanyalah nama-nama populer yang disesuaikan dengan nama daerah tempat para penutur bahasa itu tinggal. Akan terlalu banyak contoh yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hal ini.

Dalam pada itu hingga saat ini penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, baik yang dilaksanakan sendiri maupun melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan di daerah, telah menghasilkan banyak sekali laporan penelitian. Laporan-laporan itu ada yang sudah diterbitkan, ada yang masih berupa naskah; dari kelompok ini mungkin ada yang menunggu kesempatan terbit, mungkin ada yang hanya disimpan sebagai dokumen penelitian, tetapi tidak dapat diterbitkan karena berbagai alasan.

Dari sudut Pusat Bahasa sendiri, tentulah penelitian itu dilakukan berdasarkan perencanaan yang cukup matang. Mengapa penelitian mengenai bahasa A dilebihdulkan daripada bahasa B, mengapa penelitian mengenai bahasa X hanya bersifat inventarisasi data, sedangkan mengenai bahasa Y sudah khusus mengenai unsur kebahasaan tertentu. Para peneliti, dalam pada itu, berusaha untuk memenuhi tugas yang

diberikan. Demikianlah, dalam setiap laporan penelitian, misalnya, akan dapat dibaca bagian "perkenalan" yang memberikan gambaran umum mengenai bahasa yang diteliti. Di mana digunakan, berapa jumlah penuturnya, dan tidak jarang dilengkapi dengan peta daerah bahasa dan daerah penelitian dilaksanakan. Dengan demikian, baik dari kepentingan Pusat Bahasa maupun dari kewajiban peneliti, semuanya sudah terpenuhi. Namun, ternyata hal itu tidak cukup. Mengapa?

Penelitian yang dilakukan itu boleh dikatakan masing-masing berdiri sendiri. Jika laporan penelitian itu dibaca, dapat dipastikan bahwa para pembaca akan memperoleh gambaran atau sekurang-kurangnya gambaran yang memadai mengenai bahasa yang diteliti itu. Pembaca akan memperoleh gambaran bahwa bahasa P memperlihatkan struktur tertentu; bahwa dari segi kosakata bahasa S cenderung memperoleh pengaruh dari bahasa asing tertentu; bahwa bahasa K memiliki cara pemakaian tertentu. Lalu, ketika pada kesempatan lain (entah kapan hal itu terjadi) ia menikmati laporan penelitian yang lain, akan diperoleh gambaran bahwa bahasa R memperlihatkan struktur tertentu; bahwa dari segi kosakata bahasa T cenderung memperoleh pengaruh dari bahasa asing tertentu; bahwa bahasa L memiliki cara pemakaian tertentu.

Pembaca yang jeli tentulah kemudian mencoba mencari hubungan yang ada di antara bahasa-bahasa itu. Mengapa terdapat kesamaan (atau kesejajaran) di antara bahasa-bahasa itu? Mengapa kesamaan itu tidak terjadi dengan bahasa lain? Untuk dapat memahaminya lebih jauh, ia akan melihat di mana bahasa-bahasa itu digunakan, bagaimana struktur masyarakat penuturnya, dan bagaimana pula sejarah yang pernah dialami oleh daerah bahasa itu. Tentulah pertanyaan yang kedua dan ketiga, yaitu yang mengenai struktur masyarakat dan sejarah, berada di luar masalah bahasa dalam lingkup yang terbatas. Ia boleh mempercayakan keduanya pada hasil kajian yang dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing saja. Robin (1971) dan Marcellesi (1971), misalnya, pernah membicarakan hal itu. Robin mencoba membicarakan hubungan antara sejarah dan linguistik, sedangkan Marcellesi membicarakan hal yang berkenaan dengan hubungan antara bahasa dan kelompok masyarakat.

Pertanyaan pertama, yaitu di mana bahasa-bahasa itu digunakan, dapat dianggap sepenuhnya masih berada dalam lingkungan kebahasaan. Salah satu alat untuk lebih mudah mengetahuinya adalah peta bahasa. Karena pembaca itu sekarang tertarik untuk mencari kait hubungan yang ada di antara bahasa-bahasa yang memperlihatkan kesamaan dan kesejajaran itu, peta yang ia perlukan pun tidak hanya peta bahasa yang terdapat dalam setiap laporan yang dibacanya. Ia memerlukan peta gabungan, katakanlah semacam "peta rekonstruksi" yang dibuat berdasarkan peta-peta bahasa tertentu itu. Dengan demikian, peta bahasa yang sebenarnya merupakan hasil "keterampilan" itu memegang peranan yang tidak kurang pentingnya dalam kegiatan kebahasaan. Kedudukan dan peranan peta bahasa (terutama dalam kajian lokabasa) merupakan sesuatu yang secara mutlak diperlukan. Melalui peta-peta itu, kita akan memperoleh gambaran, baik mengenai daerah pakai bahasa (atau *basapraja*) maupun

persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara bahasa atau basapraja itu (Ayatrohaédi 1985:58). Sudah sejak awal kelahirannya menjelang akhir abad ke-19, para ahli lokabasa mencoba merumuskan tujuan penelitiannya yang antara lain ditunjang dengan kuatnya oleh "keterampilan" pembuatan peta itu. Tujuan itu, yang sejak tahun 1936 dirumuskan oleh Karl Jaberg, dianggap yang paling sesuai sehingga penelitian yang dilakukan setelah itu pada dasarnya adalah mencoba memenuhi tujuan itu. Tujuan itu adalah untuk mencari dan menemukan hal-hal yang berkenaan dengan biologi kata atau bahasa, sosiologi kata bahasa, dan makna kata atau bahasa, dalam artian mencari hubungan yang ada antara kata dan benda yang dilambangkan oleh kata itu. Tujuan yang ketiga itu muncul berdasarkan kesadaran bahwa adalah hampir mustahil kita dapat mencari sejarah kata tanpa mencari sejarah benda atau hal yang dilambangkannya (Jaberg, 1936).

2. Pemetaan Bahasa: untuk Apa?

Peta bahasa diperlukan untuk kegiatan yang berkenaan dengan kebahasaan. Hal itu sudah dengan sendirinya. Namun, apakah peta bahasa hanya bermanfaat untuk kegiatan kebahasaan? Apakah tidak terbuka adanya kemungkinan lain, yaitu pemanfaatan peta bahasa untuk keperluan atau kepentingan di luar bahasa?

Sebelum berpisah menjadi India dan Pakistan, pewilayahan di anak benua itu batas-batasnya sedapat mungkin ditetapkan secara koekstensif dengan batas-batas etnolinguistik, ras, agama, dan kasta. Itu berarti bahwa negara itu merupakan suatu wilayah administratif yang diwisesa oleh suatu kelompok sukubangsa dan bahasa tertentu (Koentjaraningrat, 1993: 37-8). Hal yang serupa juga dilaksanakan di Belgia: pewilayahan Belgia menjadi daerah bahasa Perancis di sebelah selatan dan daerah bahasa Belanda di sebelah utara dianggap sebagai jalan keluar terbaik untuk mengatasi perselisihan berkepanjangan di antara mereka. Bahkan, penduduk di sudut timur yang hanya sekitar 70.000 orang pun kemudian diberi hak yang sama: mereka menggunakan bahasa Jerman, termasuk dalam hal-hal yang bersifat resmi (Kys:104-6).

Jika dibandingkan dengan kedua negara itu, seberapa jauh keberadaan suatu bahasa dijadikan faktor yang turut menentukan dalam upaya pewilayahan?

- a. Secara umum dapat dikatakan bahwa pewilayahan administratif pada jenjang tingkat pertama (propinsi) di Indonesia selama ini boleh dikatakan sebagai upaya meneruskan apa yang pernah dilakukan Pemerintah Hindia Belanda di masa lampau. Daerah-daerah yang dulu berstatus karesidenan di luar Jawa, misalnya, pada umumnya sekarang menjadi propinsi. Pewilayahan itu rupanya lebih diwisesa oleh kenyataan adanya kekuatan dan kekuasaan politik yang (pernah) ada di daerah-daerah itu. Atau, lebih didasarkan kepada letak geografis daerah-daerah bersangkutan. Ketika Propinsi Sumatra mula-mula dipecah menjadi tiga, misalnya, pewilayahan itu benar-benar didasarkan letak geografis semata: Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Ketika pada tahap berikutnya Propinsi Sumatra Utara dianggap perlu dipecah lagi, barulah masalah kebudayaan (dan

agama) turut diperhitungkan sehingga muncul Propinsi Daerah Istimewa Aceh (bekas Karesidenan Aceh) dan Sumatra Utara (bekas Karesidenan Sumatra Timur dan Tapanuli). Walaupun dengan pola yang sebenarnya sama, pemekaran Propinsi Sumatra Tengah menjadi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi, sedikit-banyak memperlihatkan adanya upaya seolah-olah faktor bahasa dijadikan salah satu pertimbangan. Hanya seolah-olah karena Karesidenan Sumatra Barat yang dibentuk pada masa Hindia Belanda itu tampaknya sudah memperhitungkan hal itu sehingga Pemerintah RI sebenarnya hanya meningkatkan status daerah itu, bukan membuat sesuatu yang baru. Demikian juga halnya dengan daerah lain: Jawa Barat sudah sejak zaman Hindia Belanda berdiri sebagai propinsi yang di masa lampau berada di bawah kekuasaan tradisional Parahiangan yang mayoritas penduduknya berbahasa Sunda walaupun di wilayah Banten dan Cirebon terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa yang "agak" berbeda. Bahkan, peningkatan status Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya merupakan pengakuan akan peranan faktor kekuatan dan kekuasaan di daerah itu, yang juga diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Kecenderungan berpegang pada faktor kekuatan dan kekuasaan itu tampak lebih jelas di daerah Sulawesi. Propinsi Sulawesi Selatan, misalnya, sebagian "masuk" ke jazirah yang menjadi bagian Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, semata-mata karena di masa lampau daerah itu menjadi "milik" atau daerah kekuasaan tradisional raja daerah di Sulawesi Selatan. Pembagian demikian itu ternyata mengakibatkan ketidakjelasan wilayah budaya, termasuk bahasa. Jika peta bahasa yang telah diterbitkan oleh Wurm (1984) dianggap cukup memberikan gambaran yang benar mengenai keberadaan bahasa di daerahnya masing-masing, misalnya, akan diperoleh gambaran bahwa wilayah bahasa tertentu dengan sangat terpaksa tercabik-cabik. Sebagian berada di Sulawesi Selatan, sebagian di Sulawesi Tengah, dan sebagian di Sulawesi Tenggara. Jika bahasa itu bahasa kelompok etnik yang hidup sebagai nelayan, seperti bahasa Wajo dan Bugis, misalnya, mungkin tidak akan terlalu menarik perhatian, mengingat sesuai dengan gaya hidupnya, nelayan hidup tersebar di (hampir) seluruh daerah pantai, di mana pun. Namun, apakah warga kelompok petani juga harus dicabik-cabik, cuma karena di masa lampau mereka berada di bawah suatu kekuasaan? Bukankah itu berarti bahwa walau bagaimanapun, politik (walaupun warisan Pemerintah Hindia Belanda) masih tetap dianggap *wisesa*?

Apakah belum tiba saatnya pemekaran wilayah dilakukan dengan pertimbangan yang lebih memperhitungkan faktor-faktor kebudayaan (termasuk bahasa), dan tidak lagi berdasarkan kekuatan dan kekuasaan di daerah yang bersangkutan?

- b. Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Agar pembangunan

nasional dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta agar segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul dapat dielakkan, ketahanan nasional perlu terus-menerus dipupuk dan dibina dalam segala aspek kehidupan bangsa (GBHN 1983).

Talimarga (=komunikasi) yang terjadi di antara para penutur bahasa (yang mungkin berlainan) merupakan sesuatu yang tidak terelakkan, dan memang tidak perlu dihindari. Talimarga yang kerap dilakukan akan menyebabkan kemungkinan saling pengaruh di antara mereka juga kian besar. Kajian lokabasa, melalui peta bahasa sebagai salah satu hasilnya, memberikan sumbangan mengenai bagaimana terjadinya saling pengaruh itu.

Pengaruh itu dengan sendirinya harus diartikan berasal dari luar lingkungan penutur bahasa yang dikaji. Pengaruh itu sendiri, setelah dikaji dengan teliti, terdiri dari pengaruh yang termasuk pengaruh kebahasaan, dan yang bukan. Dalam kaitannya dengan ketahanan nasional, pengaruh yang merupakan pengaruh luar bahasa itu akan lebih menarik untuk dikaji lebih mendalam. Pengaruh luar bahasa wujudnya memang berupa kosakata juga, tetapi kosakata itu memberikan embaran mengenai berbagai hal yang bagi lingkungan masyarakat bahasa itu merupakan sesuatu yang baru (Ayatrohaédi, 1991).

Himpunan bahan yang dikenal sebagai Daftar Holle, misalnya, dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pengenalan suatu masyarakat bahasa terhadap alam, ekonomi, politik, dan kehidupan sosial budaya. Daftar itu memperlihatkan bahwa penutur bahasa-bahasa di Irian Jaya (yang bukan rumpun Melayu) mengenal rucita (=konsep) yang terbatas mengenai hal-hal tertentu. Dalam pada itu masyarakat Irian juga yang hidup bertetangga, tetapi bahasanya termasuk rumpun Melayu, memberikan embaran yang lebih banyak mengenai hal yang sama. Itu berarti bahwa ada rucita yang dikenal dalam rumpun bahasa Melayu, tetapi tidak atau kurang dikenal dalam rumpun bahasa lain.

Kenyataan demikian juga terdapat di berbagai bahasa yang lain walaupun termasuk rumpun Melayu. Bedanya hanyalah bahwa bahasa yang satu memiliki khazanah yang amat lengkap, sementara yang lain hanya memiliki yang benar-benar mendasar. Pernah seorang kawan Batak terheran-heran karena dari ubi orang Jawa dan Sunda dapat membuat bermacam-macam makanan, sementara di daerah asalnya, katanya, hanya ada empat cara pengolahan, yaitu bakar, rebus, goreng, dan ... makan mentah!

Jika dikaitkan dengan makna ketahanan nasional, pemetaan bahasa dengan demikian dapat memberikan sumbangan untuk digunakan dalam perencanaan pembinaan dan peningkatan ketahanan nasional itu.

Peta bahasa memberikan gambaran, di mana saja kehidupan masyarakat bahasa tertentu, dan dari mana asal pengaruh yang masuk ke dalam masyarakat itu. Dengan bekal itu, dapat direncanakan bagaimana baiknya upaya yang dapat dilakukan terhadap masyarakat bahasa itu agar pembinaan dan peningkatan

ketahanan nasional di situ dapat berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan. Dalam pada itu, peta bahasa juga menampilkan hal-hal yang berkenaan dengan akar dan dasar budaya masyarakat itu. Kenyataan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagaimana pembinaan dan peningkatan ketahanan nasional itu dilaksanakan tanpa merusak atau mencabut masyarakat itu dari akar dan dasar budayanya masing-masing (kys).

- c. Akhir-akhir ini, jika di suatu wilayah yang cukup luas berjangkit wabah penyakit menular, Organisasi Kesehatan Dunia hampir dapat dipastikan akan menggunakan jasa peta bahasa. Tentu saja, di samping peta yang "konvensional" yang memuat data topografi dan politik. Mengapa demikian?

Dengan memperhatikan peta bahasa, akan dapat dilihat wilayah bahasa dari daerah yang dijangkiti wabah itu. Peta-peta itu menampilkan kecenderungan, ke atau dengan daerah mana saja penduduk daerah terjangkit itu biasanya melakukan kegiatan sehari-hari. Dugaan mengenai hubungan keseharian itu dapat ditafsirkan dari data bahasa yang dipetakan. Sebagai contoh, walaupun secara administratif daerah Depok, Bekasi, dan Tangerang termasuk wilayah Jawa Barat, misalnya, peta bahasanya menunjukkan bahwa di ketiga daerah itu digunakan bahasa Melayu yang juga digunakan di daerah Jakarta. Dengan demikian dapat ditafsirkan, dalam kehidupan sehari-hari, penduduk di ketiga daerah itu akan lebih sering bersentuhan dengan penduduk Jakarta daripada dengan penduduk daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, jika-katakanlah misalnya—di daerah Depok berjangkit wabah penyakit, upaya pencegahan penularan akan lebih dulu dilakukan di daerah Bekasi, Tangerang, dan Jakarta sebelum di daerah lainnya karena bukankah kemungkinan penularan itu lebih besar di daerah sekitar itu mengingat secara tradisional mereka lebih sering berhubungan?

- d. Peta bahasa juga dapat digunakan sebagai salah satu "modal dasar" untuk menentukan kebijakan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Peta bahasa yang (hampir) tidak pernah menampilkan kata atau istilah *gedung*, *sekolah*, dan *toko*, misalnya, memberikan petunjuk bahwa di daerah itu benda itu memang tidak dikenal. Dalam kehidupan yang modern, yang menjadikan ketiga hal itu sebagai tolok ukur, misalnya, keadaan daerah yang seperti itu jelas merupakan hal yang sangat menyedihkan. Itu berarti bahwa upaya penyesuaian masyarakat di daerah itu merupakan sesuatu yang sangat mendesak.

3. Peta Bahasa: untuk Siapa?

Demikianlah, secara singkat makalah ini mencoba menengahkan peranan penting yang ternyata dapat dipikul oleh peta bahasa. Keempat butir itu sebenarnya merupakan beberapa peranan saja.

Satu hal yang pasti adalah agar peta bahasa itu dapat memainkan tugasnya dengan baik, sudah sejak awal perencanaan harus diupayakan demikian agar peta bahasa itu tampil menarik, dan menampilkan data yang "benar". Kemudian, agar

data yang "benar" itu bermanfaat, para peneliti lokabasa dan pemetaan bahasa harus membekali diri dengan perangkat ilmu bantu. Tidak cukup dengan pengetahuan mengenai ilmu bahasa saja. Betapapun, pengetahuan mengenai sejarah, adat istiadat, makanan dan minuman, dan segi-segi kemasyarakatan lainnya sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaédi. 1985. *Bahasa Sunda di Daerah Cirebon*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- . 1991. *Pemetaan Bahasa dan Ketahanan Nasional*. Makalah pada Seminar Bahasa dan Ketahanan Nasional, diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bekerja sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional di Jakarta, 11–4 Maret.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1983. *Garis-garis Besar Haluan Negara*.
- Jaberg, K. 1936. *Aspects géographiques du langage*. Conférence faites au College de France (Décembre 1933). Paris: E Droz.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Marcellesi, J-B. 1971. "Linguistique et groupes sociaux: quelques remarques", *Langue Française* 9:119–22.
- Masinambouw, E.K. M. 1992. "Hubungan Timbal Balik antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Daerah", dalam Muhajir dkk. (penyunting), *Transformasi Budaya seperti Tercermin dalam Perkembangan Bahasa-bahasa di Indonesia*:171–88.
- Muhajir (= Muhadjir) dkk. (Penyunting). 1992. *Transformasi Budaya seperti Tercermin dalam Perkembangan Bahasa-Bahasa di Indonesia*. Jakarta–Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Robin, R. 1971. "Histoire et linguistique: premiers jalons", *Langue Française* 9:47–57.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pemetaan Bahasa Daerah: Untuk Apa dan untuk Siapa?
Pemakalah : Ayatrohaedi
Pemandu : Amir Hakim Usman
Pencatat : Utari Sudewa
R. Eko Djumianto

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Fudiat Suryadikara, FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Bahasa Jawa tidak hanya terdapat di Pulau Jawa, tetapi di Sumatera, Sulawesi atau tempat lain, demikian juga bahasa Banjar. Bagaimana cara menentukannya ini? Siapa yang akan terjun ke lapangan?

Jawaban:

Data BPS penutur bahasa di wilayah aslinya (Jateng, Jatim, DIY) hanya 80%, ada 20% orang Jawa tinggal di daerah lain. Dalam pemetaan faktor-faktor ini diperhatikan, tetapi selama kita menganggap orang Jawa sebagai pendatang. Tahap I belum didata, misalnya orang Jawa di Sitiung sebagai pendatang, tetapi orang di Jawa dan Bengkulu dan di Deli lebih 50 tahun tinggal di situ dianggap sudah mempunyai akar dimasukkan sebagai daerah yang ingin diketahui bagaimana masalah kebahasaannya di situ. Siapa yang mengumpulkan data di lapangan? Kami minta bantuan Kanwil untuk mengarahkan para pengajar SMA/SMP dengan syarat mereka mempunyai pendidikan dasar bahasa Indonesia dan pernah belajar linguistik untuk terjun ke lapangan. Itu untuk daerah-daerah yang sampai sekarang ini kami kerjakan, tetapi kalau daerah itu lebih mudah, misalnya katakanlah, lebih homogen dan sebagainya, kami merencanakan untuk seluruh Jawa termasuk Madura dan Bali kemungkinan kami tidak menggunakan tenaga yang ada di SMA, tetapi akan menggunakan tenaga muda di perguruan tinggi karena praktis lebih mudah tidak memerlukan waktu cukup lama. Kalau di Kalimantan di berlakukan hal semacam itu barangkali petugas akan meninggalkan tempatnya bekerja (tinggal) selama setengah bulan atau satu bulan. Kalau di Jawa dari Bandung ke Garut, pagi berangkat sore pulang, apalagi tenaga juga sudah cukup banyak. Mudah-mudahan kalau tidak ada rintangan, giliran Kalimantan tahun depan.

2. **Pertanyaan:** Karsono H. Saputra, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Rasa hormat kepada Prof. Ayatrohaedi dengan penciptaan dan pengeluaran istilah-istilah baru, misalnya *dwiwisesa*, dan *talimarga*. Hal ini mungkin masih bisa saya terima, tetapi istilah *bahasa praja* untuk menggantikan *dialek* saya agak

terganggu. Dari mana etimologinya kata itu? Pada halaman 12, larik 1 subjudul Peta Bahasa: Untuk Siapa sampai larik terakhir tidak saya temukan jawaban dari pemakalah untuk siapa peta bahasa tersebut. Barangkali saya sangat bodoh untuk memahami teks ini.

Jawaban:

Soal istilah yang menyebabkan saya memasukkan istilah-istilah ini sebetulnya kesempatan yang diberikan Pusat Bahasa melalui pedoman pembuatan istilah. Langkah kedua itu atau langkah ketiga mengambil dari bahasa daerah, saya mencoba di dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sunda, ada istilah *pangreh praja*, ada *pamong praja*, jadi dalam hal itu *praja* artinya rakyat sehingga *bahasa praja* adalah bahasa rakyat; itu saya gunakan untuk mengganti dialek. Tadinya, sebelum ini, saya menggunakan *sabda raja*, tetapi kemudian saya ganti bahasa *praja*, itu kira-kira alasannya, dan apakah Anda menerima atau tidak itu urusan Anda bukan urusan saya. Lalu, untuk siapa peta bahasa itu? Memang di sini belum saya masukkan, tetapi secara lisan saya sampaikan bahwa peta bahasa ini untuk kelompok-kelompok tertentu: Depdikbud untuk merencanakan pengembangan bahasa, Depsos untuk mendirikan sekolah, dan sebagainya, termasuk Departemen Pertahanan, dan Depdagri. Jadi, secara singkat, saya katakan bahwa peta bahasa itu dapat bermanfaat untuk siapa saja.

3. Pertanyaan: Usdiyanto, SMA Taruna Nusantara, Magelang

Di berbagai daerah ini ada penutur bahasa yang jumlahnya tidak banyak, mungkin untuk pemetaan bahasa tentunya dicari kesepakatan jumlah berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu harus dibuatkan petanya di suatu daerah itu. Kalau misalnya di suatu daerah ada penutur bahasa daerah A, B, dan C yang penuturnya sedikit-sedikit tentu tidak akan dipetakan, untuk itu perlu kesepakatan.

- Berapa ratus ribu penutur bahasa di suatu daerah yang dapat dipetakan?
- Kalau pendatang di suatu tempat dicontohkan tadi orang Jawa yang di Sitiung tidak dipetakan, kemudian baru dipetakan setelah beberapa tahun bermukim di sana ini juga perlu kesepakatan.
- Di suatu daerah ada masyarakat yang bahasa daerahnya itu dua, contoh bahasa Jawa sekaligus bahasa Madura, mereka bisa bahasa Madura dan bahasa Jawa, dalam pemetaan bagaimana?

Jawaban:

Yang dilakukan oleh Pusat Bahasa adalah pemetaan bahasa bukan pemetaan penutur bahasa. Jadi, kalau ada bahasa penuturnya hanya 10 orang, itu juga akan dicoba dijangkau. Setidak-tidaknya untuk menjadi dokumentasi bahwa pada tahun sekian, katakanlah, peta bahasa ini semacam potret untuk memberikan gambaran

kepada akhir abad 20 di Kalimantan atau Sulawesi di daerah ini masih ada bahasa yang penuturnya 5000 orang. Kalau masalah penutur ini dijadikan patokan untuk dipetakan, katakanlah harus 500.000 ke atas, misalnya, Irian tidak akan dipetakan karena tidak ada satu pun bahasa di Irian yang penuturnya lebih dari 100.000 (seratus ribu). Karena itu, yang dipetakan adalah bahasanya, bukan penuturnya. Masalahnya adalah kalau penuturnya sedemikian banyak seperti orang Jawa, apakah harus di semua tempat diambil. Kita melihat dari segi praktisnya teknologi memotret situasi bahasa tertentu di wilayah tertentu sehingga jika kita tahu sejak awal bahasa Jawa dari Banyumas sampai Banyuwangi itu kira-kira sama, yang berbeda hanya dialek-dialek saja, barangkali dari setiap kabupaten hanya diambil 2/3 titik pengamatan. Sebaliknya, kalau di satu kecamatan seperti di Sulawesi Tengah, misalnya, memiliki 2/3 bahasa, ketiga bahasa itu dipotret. Jadi, kami harapkan informasi yang akurat mengenai bahasa-bahasa yang ada di daerah tertentu. Ada sejumlah calon pengumpul data dari daerah tertentu yang ketika diminta menetapkan 2/3 lokasi dia datang 7/8 lokasi, katanya, bahasa-bahasa di sini berbeda. Tahap pertama kami percaya bahwa di situ bahasanya macam-macam, tetapi kami juga mempunyai daftar bahasa yang disusun dari berbagai sumber. Dari hal ini bahwa 8 bahasa yang dikatakan pengumpul data ini di daftar yang kami miliki hanya terdapat 1 bahasa dengan berbagai dialek. Akhirnya, disepakati hanya 3 bahasa untuk dipetakan. Pemetaan terhadap 2000 barangkali akan dilakukan oleh anak cucu di daerah-daerah demikian, mungkin 96% akan berbeda.

4. Pertanyaan: H. Sjahrudin Kaseng, IKIP Ujung Pandang

- a. Pemetaan/peta bahasa dapat dipakai siapa saja? Ini pasif, saya menginginkan agar lebih aktif, maksudnya, apakah tidak dilihat oleh Pak Ayat bahwa hasil pemetaan bahasa mungkin ada yang kurang sesuai dengan garis-garis pembagian wilayah administratif, misalnya desa, kecamatan atau kabupaten. Kalau, misalnya, tidak sesuai mungkin ada saran pada Depdagri/ Dirjen yang berkaitan. Terutama menghadapi usaha/kerugian suatu daerah yang ingin melakukan suatu reorganisasi/penyusunan kembali terhadap wilayahnya, misalnya ada yang memiliki terlalu banyak kabupaten, sekarang ini akan ditiadakan atau sebaliknya ada yang ingin memekarkan kabupaten mungkin peta bahasa dapat dijadikan salah satu rujukan.
- b. Setiap berapa tahun kira-kira peta bahasa perlu diperbarui?
- c. Di Pare-Pare (Sulawesi Selatan) ada stasiun bumi yang baru diresmikan Presiden untuk mengambil/memetakan potensi alam di Nusantara kita ini dengan satelit/ penginderaan jarak jauh. Apakah bisa teknik pemetaan yang dilakukan oleh para pemakai bahasa ini dikaitkan dengan sarana yang sudah ada ini. Berdasarkan cahaya, misalnya, tanaman yang mengalami wabah hama dapat dipantau melalui satelit itu.

Jawaban:

Pengetahuan Kartografi bekerja sama dengan linguistik akan menghasilkan dengan benar. Dengan peta dasar akan diketahui daerah yang kosong dan rawa hingga tidak usah didatangi. Modal dasar para pemeta ini adalah peta yang berasal dari Bakorsurtanal dan Direktorat Topografi Angkatan Darat. Dari sekilas titik tolak sedang nomor-nomor titik desa yang kami gunakan/nomor desa yang digunakan maksudnya ada kepatuhan kerja BPS dengan pemeta bahasa. Jangan sampai BPS memberi nomor desa 4 pemeta nomor bahasanya 17 (secara nasional). Daftar petanya menampilkan hal-hal yang berlaku di seluruh Indonesia.

Ada dua bagian dan satu bagian yang berhubungan dengan Pak Gorys, Pak Gorys ahli linguistik historis komparatif. Daftar kosakata budaya untuk penelitian dialektologi. Hambatan lebih terasa, yang menyusun 1 Sunda, tidak jelas, 1 orang Flores, 1 orang Dayak, mencoba menyusun kosakata budaya yang mana yang akan muncul. Dengan budaya menunjukkan komunikasi dan mobilitas penduduk. Peta bahasa dapat dijadikan untuk pengambilan kebijaksanaan apakah untuk pemekaran wilayah/membentuk daerah-daerah pertahanan ini yang sepiantas, tetapi belum lebih aktif. Dengan peta bahasa kita tidak hanya mengenal hal-hal politik, tetapi juga bahasa dan budaya.

Orang Prancis membuat patokan 100 tahun sekali harus dibuat penelitian dialektologi yang mirip-mirip dengan yang pernah dilakukan. Atau, tidak usah menunggu 100 tahun, katakanlah 50 tahun, atau setiap orang yang punya gagasan menjelang pensiun.

5. Pertanyaan: R.B. Suprihanto, Ketua HPBI Cabang Timor Timur

Kami ikut dalam pemetaan tersebut, sampai di mana data-data yang sudah kami kirim bersama teman-teman?

Jawaban:

Kita bertemu bulan September tahun lalu sekitar dua minggu. Data NTT dan Timor Timur sekarang ini sedang digarap di komputer, ada beberapa hal teknis dan ilmiah yang muncul. Untuk mengatasi dan memperbaiki penelitian data tahun-tahun berikutnya ternyata tidak dapat terlalu cepat. Yang sulit, pemrogram kurang paham bahasa. Semua lambang dibuat terlebih dulu dan 30% data sudah masuk.

BAHASA INDONESIA, POLITIK, DAN OTORITAS

Mochtar Pabottingi

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

1. Pendahuluan

Bahasa takkan pernah lepas dari politik, betapa *phobia* pun sebagian di antara kita akan kata politik itu. Memilih memakai bahasa atau kata-kata tertentu, menekankan pengertian tertentu atas kata, bahkan memakai dialek tertentu tidak lain dari berpolitik dalam maknanya yang paling dalam dan luas.

Kita tidak mungkin berbicara tanpa memilih posisi atau sikap tertentu, tanpa menyatakan perasaan tertentu sebab berbicara dilakukan dalam rangka berkomunikasi, berbicara tanpa sikap dan perasaan berarti tidak berbicara sama sekali. Berkata—secara lisan atau tertulis—adalah menyampaikan pikiran/perasaan. Pikiran/perasaan secara relatif konsisten kita nyatakan atas masalah-masalah penting dalam kehidupan bersama itulah politik kita.

Tidak sedikit contoh dalam sejarah bangsa kita bahwa bahasa lebih langsung berkaitan dengan politik, antara lain, tampak pada contoh berikut.

- a. M.H. Thamrin secara berani memulai penggunaan bahasa Melayu (BM) dalam sidang-sidang (*Volksraad*, kendati hampir semua wakil lainnya menggunakan bahasa Belanda (BB)).
- b. Seorang terdakwa dalam pengadilan kolonial menolak menggunakan bahasa Jawa (BJ) krama seperti yang dipakai oleh penuntutnya kepadanya dan ia tetap menjawab dengan BJ *ngoko*. Alasan si terdakwa, BJ tidak perlu di-*krama*-kan kepada kolaborator Belanda.
- c. Ketika kekuatan-kekuatan Orde Baru menggunakan kata *Gestapu* untuk mengacu kepada Gerakan 30 September, sisa-sisa kekuatan Orde Lama berusaha bertahan dengan kata *Gestok* untuk menghindari konotasi buruk pada sebutan pertama. Kata *Gestapu* memang memojokkan PKI beserta para simpatisannya, lantaran itu langsung mengingatkan kepada kebiadaban *Gestapo* di Jerman. Nada penghinaan politik terdapat pada kata *Manikebu* yang dipakai *Lekra* kepada para sastrawan yang tidak rela menelan bulat-bulat paham realisme sosialis.

- d. Ketika ungkapan kecemburuan sosial sekarang tampaknya sudah mantap diterima oleh masyarakat kita, saya akan tetap bertahan dengan ungkapan kesenjangan sosial atau kesenjangan ekonomi. Dan, ketika belum lama berselang orang ramai-ramai melontarkan istilah kebangkitan nasional kedua, saya menyatakan bahwa istilah itu bisa menipu, sama sekali tidak berdasar, bahkan bisa menafikan cita-cita kebangsaan kita.

Kaitan antara bahasa dan politik amat jelas pada masa penjajahan. Dalam rangka mengisolasi kita dari dunia luar serta menghambat pencerdasan bangsa kita, Belanda menerapkan politik bahasa yang *paranoid*. Di satu pihak, mereka berusaha menjauhkan mayoritas bangsa kita dari kemungkinan menguasai bahasa mereka, di lain pihak mereka terus berusaha menanamkan superioritas bahasa Belanda (BB) atas bahasa-bahasa pribumi, termasuk BM. Selain itu, politik pecah-belah diteruskan dengan menggalakkan pemakaian dan penerbitan bahasa-bahasa daerah. Dalam hal ini, buku yang banyak diterbitkan dan disebarakan oleh Balai Pustaka adalah buku-buku berbahasa Jawa.

Begitu kesadaran politik bangsa kita makin bertumbuh dan para pemimpin pergerakan berhasil mengangkat BM serta menobatkannya sebagai bahasa persatuan untuk bangsa kita, terjadilah pertarungan *dua politik bahasa*. Kaum penjajah beserta para pendukungnya di kalangan bumiputra tiada hentinya meniupkan bahwa BI adalah bahasa yang tiada memiliki otoritas, bahasa yang "kacau".

Dalam menanggapi tuduhan demikian, S. Takdir Alisjahbana dengan tangkas menulis bahwa jika benar BI kacau, itu adalah "kekacauan yang nikmat". Takdir tidak menerangkan apa yang dimaksudnya dengan kata-kata itu. Akan tetapi, kita dapat menduga bahwa ia mengacu pada kenyataan bahwa yang berkerja dalam perkembangan BI yang tampaknya liar itu tak lain dari suatu kekuatan kreatif, suatu proses transformasi, yaitu kekacauan dalam proses menjadi.

Dijabarkan lebih jauh, tangkisan Takdir itu sebetulnya mewakili rasa percaya diri yang kuat di kalangan para pemuda pelopor kebangkitan nasional kita pada masa itu. Dalam retrospeksi, setidaknya ada enam alasan yang memungkinkan kuatnya rasa percaya diri itu, yaitu sebagai berikut.

Pertama, sudah menjadi kenyataan sejarah yang tak terbantah bahwa BM adalah *lingua franca* yang hidup dan telah ratusan tahun menjembatani pergaulan dan perdagangan antarsuku bukan hanya di Nusantara, melainkan praktis di seluruh Asia Tenggara.

Kedua, penobatan BM menjadi BI ditopang oleh semangat nasionalisme yang kuat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara BI dan paham kebangsaan kita. Kesamaan *lingua franca* antarsuku, yang segera menjadi kesamaan bahasa intrabangsa, turut memicu lahirnya nasionalisme kita, dan sebaliknya, nasionalisme kita memperkuat posisi *lingua franca* tersebut.

Ketiga, eksklusivisme kebudayaan Belanda sebagaimana terwujud dalam politik bahasa serta *societeiten* mereka membuat mayoritas bangsa Indonesia mau tidak mau harus bereksperimen dengan bahasa dan/atau kebudayaannya sendiri. Gairah menggunakan sambil bereksperimen dalam proses pertumbuhan bahasa nasional kita boleh dikata merata di semua kalangan bukan-Eropa.

Keempat, dari kalangan cerdik pandai kita terdapat tokoh-tokoh serta pejuang-pejuang yang sepenuh hati mengarahkan tenaga dan perhatian dalam rangka pembinaan bahasa nasional kita.

Kelima, sifat BM sebagai *lingua franca* itu sendiri sangat istimewa dalam hal watak demokratisnya serta kelenturan berlakunya dalam berbagai kalangan. Katakatanya memiliki apa yang disebut oleh Braj Kachru *vehicular load*--kemampuan menembus berbagai kalangan serta lapisan masyarakat tanpa merusak watak dasarnya sendiri--yang kuat sekali. Dan, sangat krusial bahwa watak BI persis sama dengan watak paham kebangsaan kita sendiri. Dua-duanya terbuka dan demokratis.

Keenam, kita tidak terlepas dengan apa yang dimaksud Takdir sebagai "kekacauan yang nikmat", yaitu kenyataan bahwa dengan memakai bahasa yang berakar dari bumi dan kultur sendiri, kita tidak perlu terjebak dalam BB beserta segenap sistem nilai dan pandangan dunia para pendukung utamanya. Kita tidak perlu mengalami *Uebervremdung*, yaitu alienasi dari kosmologi kita sendiri akibat keterpenjaraan pada kosmologi bahasa dan bangsa Belanda. Keadaan seperti ini, misalnya, banyak dialami oleh kaum cendekiawan Afrika yang alam pikirannya sudah terpenjara dalam BIn atau Prancis.⁹⁾

Keenam faktor inilah--(1) kematapan BM sebagai *lingua franca*; (2) kuatnya semangat nasionalisme; (3) eksklusivisme budaya di kalangan para *trekkers*; (4) tersedianya ahli-ahli bahasa yang penuh dedikasi; (5) sifat demokratis dan mobilitas BM; dan (6) terjaganya pertumbuhan alam pikiran atas dasar kosmologi sendiri--yang menjadi tiang-tiang historis utama yang membuat kita agaknya merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang tetap memiliki bahasa sendiri secara utuh, kendati sudah dijajah selama ratusan tahun. Semua itulah yang memungkinkan Takdir menyebut proses penobatan BM menjadi bahasa nasional kita sebagai "kekacauan yang nikmat".

2. Bahasa dan Politik

Sekarang mari kita melakukan interpolasi. Andaikata orang kembali menuduh bahasa kita kini kacau, rasanya tidak sulit dibayangkan, masih sangguplah kita berkata seperti Takdir dahulu bahwa itu adalah "kekacauan yang nikmat"?

Selama lima tahun terakhir, bahasa yang kita cintai telah bertumbuh secara memprihatinkan. Ada tujuh butir faktor negatif yang dapat kita kemukakan sehubungan dengan perkembangan BI sekarang.

- a. Penggunaan bahasa Inggris (BIn) secara berlebihan atau secara salah kaprah. Ini berlaku pada nama toko dan bioskop, gedung-gedung tinggi, kompleks perumahan

mewah, pusat-pusat hiburan, hingga ke nama usaha-usaha kecil di perkampungan yang tidak ada orang asingnya sekalipun, atau *ceplas-ceplos* dengan kata-kata Inggris di sela-sela pembicaraan para pejabat. Sebutan tepat untuk gejala berbahasa seperti ini diberikan oleh Ben Anderson: *Indoglish*. Mengapa harus bersikap begitu? Mengapa, seperti telah diutarakan oleh Lukman Ali, penamaan *Megaria* harus dikembalikan lagi jadi *Metropole*? Hingga sekarang saya belum mengerti apakah nama *Golden Truly* itu maksudnya menggunakan BIn, yang kira-kira maksudnya "emas murni", atau bahasa apa. Maaf, saya sungguh-sungguh tidak tahu. Mudah-mudahan ada yang bersedia menerangkannya kepada saya. Nama *Summit Mas* juga tidak selesai-selesai dalam benak saya. Apalagi stiker-stiker mobil berbunyi *The Big Family Moslem* atau *Kasih Melanda Indonesia* atau *Allah Is Our Aim*. Rasanya tidak ada lagi pameran kenaifan setelanjang itu! Termasuk di sini ialah penggunaan kata sifat BIn yang bunyinya diindonesiakan, seperti *kelapa hibrida*, *kedokteran veteriner*, yang padanannya dalam BI sebetulnya sudah tersedia.

- b. Pelanggaran kaidah-kaidah BI di media massa ataupun di tempat-tempat umum. Yang paling lazim ialah ketidakmampuan membedakan cara menulis awalan *di* dengan kata depan *di* atau bergandanya kata *walaupun* dan *namun* dalam satu kalimat.
- c. Masuknya pengaruh struktur kalimat bahasa daerah ke dalam BI yang sifatnya tidak pas dengan atau, bahkan, merusak bahasa nasional kita. Misalnya, kata *sepertinya* yang tampaknya lahir dari pengaruh BJ, jelas tidak tepat dipakai sebagai sinonim bagi kata *seolah-olah*. Akhiran *-nya* yang sifatnya tidak pas dengan rasa BI ini juga bisa ditemukan pada baris-baris iklan yang berbunyi, "Segar rasa buahnya. Enak dikunyahnya". Begitu juga dengan penggunaan kata *tak* dari BJ yang bertolak-belakang pengertiannya dengan kata *tak* BI, seperti pada kalimat-kalimat, "Nanti *tak* undang, ya" dan "Semuanya *tak* bereskan minggu depan".
- d. Gejala kemalasan berpikir yang mulai parah tampak dalam kebiasaan membuat predikat kalimat menurut subjeknya, misalnya pada kalimat, "Pengumuman itu akan diumumkan ..." atau "Pelaksanaan proyek itu akan dilaksanakan ..." Gejala yang sama juga dikemukakan oleh Slamet Djabarudi, tetapi dalam bentuk-bentuk lain.¹⁰) Model kalimat pemalas ini banyak dipakai dalam siaran-siaran televisi pemerintah, swasta, atau dalam media massa kita. Ia kita sebut kalimat pemalas sebab sesungguhnya tidak sulit menghindari kedunguan dan kesalahan demikian.
- e. Kecenderungan menggunakan akronim secara sewenang-wenang dan membingungkan khalayak, apalagi kalau dua akronim untuk pengertian yang sama diperlombakan sekaligus untuk merebut tempat dalam bahasa kita. Begitulah akronim *lansia* diketengahkan juga untuk merebut posisi yang sudah cukup lama ditempati *manula*. Akronim *Kloter* bahkan lebih kacau lagi, sebab itu, sudah menyalahi prinsip akronim yang didasarkan pada pemakaian suku-suku kata yang nyata ada dalam kata-kata yang hendak diakronimkan. Kecenderungan produksi akronim secara berlebihan ini harus benar-benar dihentikan dan wewenang untuk

mengesahkan suatu akronim baru diserahkan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- f. Pelecehan yang terjadi atas BI sesungguhnya bukanlah pelecehan yang dimaksudkan harus untuk BI saja, melainkan pelecehan atas bahasa-bahasa yang jumlah penduduknya cukup berarti di negeri kita. Ini terbukti pada kenyataan bahwa yang dirusakkan oleh berbagai praktek bahasa oleh masyarakat kita bukan hanya BI, melainkan juga BIn, termasuk dulu, BB. Ambil, misalnya, kekacauan penggunaan kata-kata BIn yang banyak beredar di kalangan pejabat kita, seperti penggunaan kata *even* untuk *event*, atau di kalangan remaja kita seperti *brengsex* atau *bahari-one*, atau stiker-stiker mobil yang tadi kita sebutkan. Ini benar-benar "Indoglish"—suatu gejala perusakan bahasa yang mungkin tidak ada duanya di dunia. Yang lahir bukanlah BI, juga bukan BIn, melainkan campuran rusak antara keduanya.
- g. Erat kaitannya dengan butir enam, gejala perusakan serta pelecehan BI juga terdorong oleh ideologi pendidikan kita yang cenderung melecehkan ilmu-ilmu bukan-eksakta. Ideologi pendidikan kita ini diam-diam beranggapan bahwa hanya ilmu-ilmu pasti yang bisa mendidik orang berpikir secara benar dan lugas. Ini tentulah suatu pandangan yang sangat keliru, sebab berpikir secara benar dan lugas pertama sekali harus dimulai dari cara berbahasa. Pikiran yang lugas terletak pada bahasa yang lugas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahasa mempunyai matematikanya sendiri.

Karena dari awal jenjang pendidikan dan secara terselubung sudah ditanamkan superioritas ilmu-ilmu pasti atas ilmu-ilmu sosial dan humaniora, tidaklah mengherankan jika anak-anak, kaum remaja, dan masyarakat kita umumnya memakai bahasa-bidang ilmu yang agaknya dipandang paling jauh dari kepastian, seandainya. Kecenderungan pelecehan ini makin marak lagi dengan demam *iptek* yang cenderung berlebihan yang kini melanda bangsa kita, sehingga secara terbuka banyak di antara kita yang ingin begitu saja memasukkan sebanyak mungkin istilah-istilah teknik asing ke dalam BI, seakan-akan bahasa kita sendiri sama sekali tidak punya kosakata untuk itu dan begitu saja dianggap mati.

3. Simpulan

Dengan semua kekacauan berbahasa dalam perkembangan negatif itu, tidak mungkin lagi kita berkata seperti Takdir dulu bahwa ini adalah "kekacauan yang nikmat". Dalam introspeksi, kita bisa mencoba menelusuri apa yang salah pada kita. Jika kita menengok kembali kepada keenam faktor yang membuat pertumbuhan BI dulu menjadi suatu "kekacauan yang nikmat" akan segera terlihat perubahan berarti yang telah terjadi.

Dari keenam faktor yang pernah kebetulan berpadu mendukung lajunya pertumbuhan BI, setidaknya-tidaknya ada tiga yang sudah banyak berubah. Yang

terpenting di antaranya ialah bahwa semangat kebangsaan sudah dianggap tidak perlu lagi atau sudah terdesak ke pinggir oleh struktur ekonomi-politik yang berlaku di masa Orde Baru. Struktur ekonomi-politik inilah yang membuat para ahli bahasa kita tidak mempunyai atau tidak diberi otoritas untuk menjaga tumbuhnya BI secara sehat dan dewasa.

Struktur ekonomi-politik ini pula yang menciptakan *Uebervremdung* baru di kalangan masyarakat luas kita. Struktur ekonomi-politik kita yang sudah menempatkan stabilitas politik serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai tujuan-tujuan pada dirinya sendiri inilah yang membuat praktis ketiga butir pokok Sumpah Pemuda dipandang tidak relevan lagi. Seperti yang sudah begitu kerap terbaca di media massa, apakah artinya *nusa*, *bangsa*, dan *bahasa* bagi mereka yang sudah terbius oleh kata *globalisasi*, atau yang katanya ingin memasukkan sebanyak-banyaknya devisa ke dalam kas negara?

Kembali di sini terbukti betapa tak terpisahkannya politik dengan bahasa, bukan saja tidak ada jarak antara keduanya. Keduanya bahkan selamanya lebur satu sama lain. Politik kita langsung tercermin pada bahasa kita, dan bahasa kita adalah politik kita.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia, Politik, dan Otoritas
Pemakalah : Mochtar Pabottingi
Pemandu : Jos Daniel Parera
Pencatat : Joeslina Azis
Ardi Siti Rosmaladewi

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Anton M. Moeliono, Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Politik bahasa sudah ada hanya perlu dikembangkan tentang keserasian dalam penggunaan bahasa Inggris yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia.

Usul:

- Agar Departemen Kehakiman menulis bahasa Indonesia dalam penamaan PT dan perusahaannya.
- Sumbangan bahasa daerah yang agak Jawanisasi lebih diperhatikan dalam pembinaan bahasa Indonesia.

Jawaban:

Sependapat dengan Pak Anton M. Moeliono bahwa Politik bahasa itu memang ada, hanya tidak ada peraturan yang jelas. Bukannya saya tidak setuju pada bahasa Jawa, malah saya senang kalau itu memperkaya bahasa Indonesia.

2. **Pertanyaan:** Maurits Simatupang, Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Saya kurang sependapat dengan saran Pak Anton M. Moeliono tersebut. Biarkanlah mereka memakai bahasa asing itu sesuai dengan keinginannya, asal selama itu dapat menunjang perkembangan bahasa Indonesia demi memperkaya kosakata bahasa Indonesia.

Jawaban:

Saya tidak menolak bahasa asing kalau masuknya bahasa itu sehat untuk memperkaya bahasa Indonesia.

3. **Pertanyaan:** Badrun, IKIP Bandung
Bahasa Indonesia sangat banyak ragamnya, politik dengan ragamnya, prokem dengan ragamnya, iptek dengan ragamnya, ekonomi dengan ragamnya. Mohon ragam-ragam itu ditata dengan baik jangan sampai membingungkan.

Jawaban:

Saya tidak menekankan bahwa kita berbahasa tanpa politik.

4. Pertanyaan: Eryda Lubis, IKIP Jakarta

- a. Saya mengalami kesulitan mengartikan bahasa wartawan.
- b. Penggunaan istilah pelecehan yang sangat keras maknanya, seolah-olah menghina seseorang. Kalau kata *remeh* agak lunak maknanya. Mohon tanggapan!

Jawaban:

Saya sependapat dengan Elida bahwa janganlah menggunakan istilah *pelecehan*, tetapi hendaknya menggunakan istilah yang lebih lunak, yaitu *meremehkan*.

5. Pertanyaan: Rabiana Badudu, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

- a. Penggunaan papan nama dalam bahasa asing sudah dipermasalahkan dalam Kongres Bahasa Indonesia IV dan V, tetapi belum diindahkan. Jadi, saya sependapat dengan Pak Anton M. Moeliono bahwa hal itu melalui jalur hukum dan kalau perlu melalui jalur DPR.
- b. Ada juga penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat, misalnya kata *tauladan* yang seharusnya *teladan*. Perlu diindahkan!

Jawaban:

Mengenai papan nama kita sependapat dan merupakan imbauan kita semua.

6. Pertanyaan: Berhana Menggang, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

- a. Saya mengusulkan pada Kongres Bahasa Indonesia VII yang akan datang makalah hendaknya dibatasi agar masalah yang terdapat pada setiap makalah dapat dipecahkan lebih tuntas.
- b. Saya mengusulkan agar bahasa asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia hendaknya disesuaikan dengan aturan (kaidah) bahasa Indonesia. Misalnya, istilah *penterjemahan* yang seharusnya *penerjemahan*.
- c. Tetapkanlah lafal yang benar terhadap bahasa asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Dalam papan nama yang menggunakan bahasa asing di atas dan bahasa Indonesia di bawah. Apakah ini akan menonjolkan bahasa Indonesia? Kalau kita akan menonjolkan bahasa Indonesia, maka nama bahasa asing dihilangkan.

Jawaban:

Hal itu merupakan imbauan kita semua.

PERKEMBANGAN PENGARUH BAHASA DAERAH DALAM BAHASA INDONESIA

Inyo Yos Fernandez
Universitas Gadjah Mada

1. Pendahuluan

Bahasa daerah (BD) di Indonesia merupakan suatu aset budaya bangsa yang tak ternilai harganya karena melalui wahana BD itu dapat dilestarikan beraneka ragam budaya daerah yang ada. Keberadaan kebudayaan nasional yang bercorak "bhineka tunggal ika" mustahil dapat dibayangkan dan terwujud tanpa *soko guru* aneka BD, sebagai wahana penyangga keekaan budaya bangsa.

Sebagai wahana komunikasi dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah tanah air, BD mempunyai peran penting, antara lain sebagai simbol identitas komunal masyarakatnya. Peran serupa itu bukan hanya tampak pada sejumlah BD yang besar saja, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Bugis, yang jumlah penuturnya mencapai jutaan, tetapi juga pada berbagai BD lain yang jumlah penuturnya mungkin hanya berkisar antara ratusan hingga puluhan ribu, bahkan hanya ratusan hingga puluhan orang, seperti bahasa Banjar, Ngadha, Tetum, Kedang, dan Madiki.

Pada prinsipnya BD mampu berperan sebagai simbol identitas kelompok masyarakatnya dan senantiasa dihargai dan dipelihara oleh para penuturnya—sesuai dengan UUD 1945, Bab XV, Pasal 36—ada peluang bagi BD untuk hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia (BI) selaku bahasa negara. Hal itu berarti kelangsungan hidup BD dijamin dan sumbangan yang diberikan BD dalam arti luas terhadap perkembangan BI dihargai oleh Pemerintah (Halim, 1980:21).

Walaupun perkembangan BI dewasa ini sangat pesat menjadi bahasa modern, peluang itu masih tetap terbuka. BD masih tetap mendapat peluang untuk berkembang seiring dan sejalan dengan BI, tanpa terhindar dari fenomena umum yang berlaku ketika berlangsung peristiwa kontak antarbahasa. Perubahan bahasa yang mungkin terjadi karena peristiwa itu merupakan akibat pengaruh yang dialami secara timbal balik di antara BI dan BD. Salah satu perubahan yang dialami itu antara lain dapat berupa unsur serapan, baik pada tataran leksikal maupun pada tataran lain. Hal itu pada hakikatnya sudah merupakan hal yang wajar dan lazim dapat diamati dalam perkembangan bahasa pada umumnya (Weinreich, 1970).

Baik dalam perjalanan sejarah perkembangan BI maupun BD fenomena perubahan bahasa seperti itu, dari satu sisi, niscaya dapat memperlihatkan wujud - perkembangan pengaruh BD terhadap BI atau sebaliknya. Di samping itu, bukan mustahil masih ada sejumlah kemungkinan lain yang memperlihatkan perkembangan pengaruh BD terhadap BI, misalnya berdasarkan telaah sejumlah kasus yang dipilih untuk disajikan di sini.

Pertimbangan untuk menampilkan beberapa kasus terbatas seperti itu, selain mengingat peluang (waktu) penyajian yang terbatas, berkaitan pula dengan hal-hal khusus yang dipandang cukup menarik untuk diamati. Tidak dapat disangkal bahwa ada kemungkinan masih terdapat sisi lain dari beragam perkembangan yang luput dari pengamatan. Sehubungan dengan itu, bukan mustahil dapat dipertanyakan keterandalan dari keterwakilan masalah yang seharusnya diungkapkan. Betapapun demikian, makalah ini dimaksudkan untuk menyajikan beberapa ihwal tentang perkembangan pengaruh BD dalam BI, sebatas yang terjangkau pengamatan kami. Selanjutnya, pertimbangan terhadap hal-hal yang dipandang relevan untuk dibicarakan di dalam makalah ini, diselaraskan dengan jalinan pemikiran yang dituangkan dalam beberapa bentuk pertanyaan berikut: (a) seberapa jauh sumbangan BD terhadap BI; (b) faktor apa yang menentukan besarnya sumbangan BD terhadap BI; (c) bagaimana upaya memanfaatkan BD sebagai sumber pengembangan BI sebagai bahasa persatuan.

2. Sumbangan BD terhadap BI

Sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia, BD mengandung unsur-unsur nilai rohani dan kesusilaan yang menjelmakan kebudayaan tradisional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa modern yang mengandung sifat kebudayaan yang modern dapat mengambil manfaat dari materi budaya daerah yang dilestarikan dalam ungkapan BD serta menyesuaikannya dengan kebutuhan kebudayaan nasional. Walaupun telah ada banyak kosa kata dan istilah atau ungkapan BD yang pemakaiannya sudah lazim dikenal dan digunakan di bidang tertentu, ada pula bidang-bidang lain yang masih jarang menggunakan kosa kata dan istilah atau ungkapan BD sebagai sumbangan yang memperkaya BI. Di bidang hukum, misalnya, khususnya di bidang kajian hukum adat, sumbangan bagi pembangunan hukum nasional berwujud kosa kata dan istilah atau ungkapan adat istiadat dari berbagai daerah setempat telah mendapat perhatian khusus (Soekanto, 1978).¹

Di antara berbagai BD itu, bahasa Jawa termasuk yang paling banyak memberikan sumbangan di bidang kosakata dan istilah untuk memperkaya BI dibandingkan dengan BD lain. Tidak dapat disangkal bahwa banyak kosakata dan istilah BI yang dipungut langsung dari bahasa Jawa, seperti dalam contoh: *manunggal*, *misiologi*, *sandang*, *pangan*, *pamrih*, *gentayangan*, dan *lumrah*. Sebagai BD, bahasa Jawa telah melestarikan dan menjelmakan peradaban yang tinggi sejak masa lampau serta dilengkapi oleh pewarisan budaya secara turun temurun, baik lisan maupun tulisan. Pada era berkembangnya komunikasi dan iptek dewasa ini, tampaknya dari

segi posisinya, bahasa Jawa masih mendapat peluang yang jauh lebih besar untuk mempengaruhi BI daripada BD yang lain. Di samping faktor jumlah penutur bahasanya yang jauh melampaui penutur BD di Indonesia yang lain, tampak bahwa tingkat frekuensi pemakaiannya pun tinggi pula. Hal ini tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa BD itu seringkali digunakan oleh kalangan kelompok masyarakat tuturnya yang menguasai jalur kehidupan birokrasi yang luas di tanah air, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga menyebabkan semakin meluas pula pengaruh BD tersebut terhadap BI. Keadaan demikian masih ditunjang pula oleh faktor pengaruh interaksi sosial karena banyak di antara kelompok masyarakat tutur bahasa Jawa berperan di berbagai jalur pelayanan dan jasa bagi masyarakat luas, khususnya kegiatan yang bergerak di bidang komunikasi media massa tulis dan elektronik.

Karena pengaruh situasi dan kondisi yang cukup menguntungkan itu, perkembangan pengaruh bahasa Jawa, sebagai salah satu BD, terhadap BI bukan mustahil tidak goyah dan tetap bermakna. Pengaruh itu tidak terbatas pada pemakaian ragam bahasa lisan belaka, tetapi juga telah menyentuh ragam bahasa tulis. Seberapa jauh kualitas sumbangan itu dapat dikatakan bermakna karena dapat diangkat ke tingkat ragam bahasa baku, sangat tergantung pada frekuensi (kuantitas) pemakaiannya di dalam masyarakat, baik di kalangan para birokrat maupun pers dan media massa.

Dalam pemakaiannya, pengaruh itu tidak hanya terbatas pada wujud kebahasaan yang tampak secara tersurat saja, tetapi dapat pula menyentuh sisi lain yang tidak tampak atau tersirat (Halim, 1978), seperti tata krama berbahasa penutur bahasa. Sebagaimana terealisasi dalam ujaran, adakalanya antara pernyataan verbal dalam bentuk BI yang secara tersurat diujarkan penutur dengan nuansa makna yang memperlihatkan tata krama berbahasa secara tersirat, ada keterkaitan yang erat. Sebagai ilustrasi, amatilah beberapa contoh ujaran berikut ini.

- 1) *Beliau Bapak* Menteri Parpostel telah *berkenan* meresmikan monumen Yogya Kembali yang telah dipugar.
- 2) Bapak Agus Mulyanto *sekeluarga* kami mohon kesediaannya untuk mendampingi kedua mempelai.
- 3) *Paduka* Yang Mulia *Bapak* Gubernur kami mohon kesediaannya *agar berkenan* membuka secara resmi festival kesenian pada malam ini.

Pada contoh-contoh tersebut tampak bahwa ujaran BI penutur berlatar belakang BD bahasa Jawa tidak jarang memperlihatkan hubungan antara pernyataan verbal berbahasa Indonesia, dengan tata krama berbahasa secara tersirat. Walaupun pada satu sisi, pernyataan verbal dalam BI pada contoh 1 dan 2 tidak mengandung kosakata bahasa Jawa, dari sisi lain, tata krama berbahasanya dapat tersirat pada penggunaan frasa *Beliau Bapak* pada contoh 1 dan bentuk seperti *sekeluarga* pada contoh 2. Penggunaan pernyataan verbal berbahasa Indonesia dengan nuansa makna kesantunan atau ketakziman serupa itu mengingatkan kita pada hal yang lazim dijumpai dalam pemakaian tingkat tutur (*unggah-ungguh*) bahasa Jawa. Dalam contoh ke-3, misalnya, tata krama berbahasa itu ditandai oleh pemakaian kata *Paduka* yang

dalam penggunaannya dengan sengaja dipadukan dengan kata *Bapak*. Penggabungan kedua kata itu dengan kata *Yang Mulia* baru akan dipandang selaras membentuk makna kesantunan yang lengkap hanya apabila dijalin dengan penggunaan kata *agar berkenan*. Ujaran serupa itu—yang dapat termasuk reduplikasi semantik (Simatupang, 1983)—mengandung nuansa makna kesantunan atau ketakziman yang dipakai sesuai dengan tata krama berbahasa yang umum. Dalam contoh itu, ada kecenderungan bahwa pernyataan verbal melalui bentuk ujaran berbahasa Indonesia yang berwujud reduplikasi yang bernuansa makna kesantunan itu mungkin bukan hanya pada penutur berlatar belakang bahasa Jawa, melainkan telah lazim dikenal dan digunakan juga penutur berlatar belakang BM; bahkan cenderung merupakan suatu prototipe tata krama berbahasa yang telah lama dimiliki aneka budaya di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam suatu ujaran pernyataan verbal secara tersurat mengambil wujud BI, nuansa makna kesantunan atau ketakziman yang secara tersirat ada di dalamnya diwarnai oleh pengaruh BD.

3. Beberapa Faktor yang Menentukan Besarnya Sumbangan BD terhadap BI

Di antara berbagai faktor yang menentukan besarnya sumbangan BD terhadap BI, telah disinggung beberapa faktor yang secara khas memperlihatkan potensi BD (khususnya Jawa) sebagai bahasa donor (Haugen, 1968) dalam memperkaya BI. Besarnya sumbangan itu, antara lain tergantung pada faktor latar belakang budaya, pengaruh jumlah masyarakat tutur, dan adanya peluang bagi BD tertentu itu untuk mencapai tingkat frekuensi pemakaian yang tinggi dalam kehidupan masyarakat luas. Selain itu, pengaruh keterlibatan hampir sebagian besar di antara anggota kelompok masyarakat tutur dalam interaksi sosial yang berkaitan, baik melalui penguasaan jalur kehidupan birokrasi maupun melalui kegiatan pelayanan dan jasa bagi masyarakat luas, khususnya yang bergerak di bidang komunikasi media massa tulis dan elektronik.

Faktor lain yang perlu diperhatikan pula adalah faktor sejarah bahasa. Alasannya adalah karena sejarah bahasa memainkan peran yang penting dan ikut menentukan sumbangan BD terhadap BI, sebagaimana tampak dalam sejarah BM daerah.

Dilihat dari sisi sejarah bahasa, tidak dapat disangkal kenyataan bahwa BI yang tumbuh dari salah satu bahasa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai bahasa Melayu (BM) mengalami perkembangan yang sangat pesat menjadi bahasa modern justru karena dukungan BD. Hal itu dapat dibayangkan, jika diingat bahwa bahasa Melayu yang tersebar ke berbagai pelosok wilayah tanah air, sudah dikenal masyarakat sejak abad ke-7 Masehi, sekurang-kurangnya sebagai bahasa perdagangan dan teknologi (Collins, 1980). Telah terjadi adaptasi antara BM dan BD di berbagai daerah, yang memungkinkan lahirnya beragam variasi BM daerah, baik yang tersebar di kawasan IBT (misalnya variasi BM daerah yang digunakan di Manado, Ambon, Kupang, dan Dili) maupun di kawasan IBB (misalnya, BM daerah digunakan di Jakarta, Banjar, Palembang, dan Medan. Tersebaranya beragam variasi BM hampir di segenap pelosok

wilayah tanah air dengan beraneka ragam kekhasan ciri yang menyiratkan akulturasi kebudayaan Melayu dan daerah, membawa dampak yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pembinaan BI. Situasi pemakaian BM daerah di berbagai wilayah di Indonesia ikut menyuburkan pertumbuhan BI karena selain merupakan jembatan bagi para penutur bahasa ibu dari berbagai latar belakang BD untuk mengenal dan memahami BI, juga mempermudah mereka untuk berbahasa Indonesia, baik secara reseptif maupun secara produktif. Dengan cara demikian, para penutur beraneka BD yang sudah sejak lama mengenal BM berbagai daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air hampir tidak mengalami banyak kesulitan untuk berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, peranan penting yang dimainkan BM daerah, sebagai salah satu dari sekian banyak BD adalah menjembatani kesenjangan yang ada di antara penutur beraneka macam bahasa daerah di Nusantara pada satu pihak dan BI modern di pihak lain. Sebagai contoh dapat dijelaskan bahwa bagi kebanyakan penutur bahasa ibu bahasa daerah lain yang berdekatan lingkungannya dengan salah satu BM daerah pada umumnya tidak dijumpai kesulitan untuk berkomunikasi dengan media BI karena telah lebih lama mengenal BM di daerah sekitarnya yang sangat banyak kemiripannya dengan BI. Faktor ini dipandang sangat menguntungkan dalam menunjang bukan saja penyebaran BI, melainkan juga pertumbuhan dan perkembangan BI pada umumnya.² Hal ini dipandang sangat menguntungkan BI sebagai bahasa persatuan.

Faktor saling pengaruh, pada satu pihak antara BD dan BM daerah dan pada pihak lain BM daerah serta BD dengan BI mempunyai dampak yang sangat berarti dalam pemakaian BI ragam lisan. Dalam hal ini tampak ada banyak kelonggaran yang berlaku dan terdapat kecenderungan variasinya berimbang antara daerah yang satu dan daerah yang lain. Variasi antardaerah itu pada umumnya agak disederhanakan sehingga timbul perbedaan yang secara populer dikenal sebagai variasi BI Timur dan BI Barat meskipun sebenarnya ada hal yang tumpang tindih dalam pengelompokan itu.³ Bila diamati lebih jauh pemakaian BI ragam lisan itu, ada kecenderungan orang beranggapan bahwa BI ragam lisan adalah BI dengan dialek-dialek (logat) daerah. Meskipun demikian, tentu saja agak kurang tepat beranggapan bahwa BI ragam lisan adalah penjelmaan BD atau BM daerah.

Dari pandangan yang dikemukakan itu, tampak bahwa faktor yang menentukan pengaruh BD terhadap BI dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Yang bersifat langsung, tampak mampu mewujudkan sumbangan yang memperkaya BI baik berupa berbagai bahan kebahasaan yang diserap dari BD maupun berupa tata krama berbahasa yang mengandung nuansa makna tertentu yang dapat diwarnai BD. Adapun yang bersifat tidak langsung, cenderung bertalian dengan faktor sejarah bahasa misalnya ihwal sejarah bahasa yang memperlihatkan arti penting BM daerah sebagai BD yang menjembatani kesenjangan yang ada di antara penutur beraneka macam bahasa daerah di Nusantara pada satu pihak dan BI modern di pihak lain sehingga sangat menunjang penyebaran, pertumbuhan, dan perkembangan BI. Hal ini dipandang penting karena sangat menguntungkan BI sebagai bahasa persatuan.

4. Berbagai Usaha dalam Memanfaatkan BD sebagai Sumber Pengembangan BI sebagai Bahasa Persatuan

Peranan BD dewasa ini tetap penting sebagai sumber pengembangan BI karena tidak dapat disangkal bahwa pada hakikatnya identitas masyarakat tutur BI adalah masyarakat ganda bahasa atau *bilingualism* (Erwin dan Ossgood, 1965). Di beberapa daerah di Indonesia situasi tutur ganda bahasa dalam arti sesungguhnya cenderung belum tercermin karena bagi sebagian besar anggota masyarakat di daerah itu, BI belum merupakan bahasa kedua sesudah bahasa ibu, tetapi sebagai bahasa ketiga. Dengan demikian, situasi tutur kebahasaan di daerah tersebut lebih tepat dinamakan situasi aneka bahasa atau *multilingualism*. Keadaan serupa itu, yang dapat diamati seperti di Timor Timur memberikan peluang dan sekaligus tantangan yang perlu dihadapi dengan sikap hati-hati dan penuh kebijaksanaan.

Berbeda dengan keadaan di berbagai wilayah Indonesia yang lain, masyarakat tutur BI di Timor Timur dengan kondisi dan latar belakang budaya serta pengalaman unik di masa penjajahan selama 450 tahun, memungkinkan timbulnya situasi tutur aneka bahasa di wilayah bekas koloni Portugis itu. Dalam menjalankan hegemoninya atas wilayah tersebut di masa lampau, tampak bahwa Portugis berusaha mempertahankan terciptanya masyarakat plural agar tiap-tiap kelompok suku bangsa dengan aneka bahasanya tetap dibiarkan hidup terisolasi. Keadaan demikian selaras dengan laporan Suparlan (1980) bahwa selain terpecah oleh struktur politik dalam kerajaan-kerajaan kecil, Timor Timur secara tradisional terpecah ke dalam aneka warna suku bangsa dan bahasa.

Dari segi kebahasaannya, ada sebagian BD di Timor Timur yang termasuk rumpun bahasa Austronesia (AN) dan ada pula yang termasuk rumpun bahasa non-AN (Masinambouw, 1980). Sekurang-kurangnya ada enam bahasa yang termasuk rumpun AN di Timor Timur berkerabat dengan bahasa-bahasa yang dikelompokkan ke dalam keluarga bahasa Ambon-Timor.⁴ Pengaruh BD serumpun dengan BI ini di Timor Timur terhadap BI sejauh ini belum diteliti secara khusus. Walaupun demikian, dalam survei mengenai data dasar pendidikan di Timor Timur (Laksono dan Fernandez, 1993) dilaporkan bahwa seringkali terjadi dalam proses belajar-mengajar jika pesan dalam BI tidak dipahami siswa penutur BD lain (baik yang serumpun maupun yang tidak serumpun) sebelum ditemukan padanan makna dalam bahasa ibu mereka lebih dahulu mencari padanan maknanya melalui padanan di dalam bahasa Tetum (Dili). Patut dicatat bahwa bahasa Tetum Dili diperlakukan sebagai *lingua franca* tradisional di Timor Timur.

Contoh itu memperlihatkan bahwa bahasa Tetum Dili, sebagai salah satu BD yang menjadi lambang identitas komunal masyarakatnya mempunyai peranan penting sebagai penjemabatan kesenjangan komunikasi yang ada di antara penutur beraneka ragam BD yang digunakan sebagai bahasa ibu dengan BI. Hal ini terjadi bukan hanya di lingkungan pendidikan, melainkan juga di lingkungan yang lebih luas, khususnya apabila masyarakat di pelosok desa harus dilibatkan dalam komunikasi dengan para petugas yang menggunakan media BI, misalnya dalam rangka memberi

penyuluhan berbagai program pembangunan (Fernandez, 1992). Sehubungan dengan itu, BD yang berperan sebagai kunci untuk membuka wawasan bagi masyarakat (Timor Timur) agar mampu menjadi anggota warga kelompok suku ataupun bangsanya perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang wajar. Demikian pula, menarik untuk diteliti lebih jauh sumbangan BD yang memiliki hubungan kekerabatan lebih erat dengan BI atas dasar kesamaan rumpun (AN) terhadap BI dalam hubungan dengan BD lain yang bukan serumpun, seperti kasus yang ada di propinsi termuda ini. Ada kecenderungan menduga bahwa karena termasuk dalam rumpun yang sama dengan BI, masyarakat tutur BD seperti bahasa Tetum Dili lebih kurang mengalami kesulitan untuk menguasai BI, baik secara reseptif maupun secara produktif dibandingkan dengan masyarakat tutur BD lain yang takserumpun. Demikian pula sumbangan yang diberikan bahasa-bahasa daerah itu untuk memperkaya BI, bukan mustahil bahwa bahasa-bahasa daerah yang serumpun dengan BI lebih mampu atau selaras daripada yang tidak serumpun. Dengan demikian, masalah keserumpunan bahasa dapat termasuk pula salah satu faktor yang menentukan besarnya sumbangan BD terhadap BI.

5. Simpulan

Perkembangan pengaruh BD dalam BI yang ditelusuri melalui telaah beberapa kasus terbatas seperti yang disajikan dalam makalah ini dapat menuntun pemberian beberapa simpulan sebagai berikut.

Dalam era komunikasi dan iptek dewasa ini, pengaruh BD terhadap BI tidak sebatas pengaruh serapan unsur kebahasaannya, tetapi meliputi juga tata krama berbahasa. BI sebagai bahasa modern yang mengandung sifat kebudayaan modern dapat memanfaatkan sumbangan beraneka ragam BD tersebut sesuai dengan kebutuhan kebudayaan nasional.

Berbagai faktor yang menentukan sumbangan BD terhadap BI antara lain bergantung kepada latar belakang budaya, sejarah bahasa, jumlah penutur BD, tingkat frekuensi pemakaian, interaksi sosial para birokrat, masyarakat pers dan media massa yang menggunakan BD tertentu itu. Selain itu, bukan mustahil, pada lingkup wilayah BD tertentu, faktor keserumpunan bahasa diduga ikut menentukan sumbangan BD bagi BI.

Upaya memanfaatkan BD sebagai sumber pengembangan BI sebagai bahasa persatuan, antara lain melalui pertimbangan yang bijak menerima berbagai masukan, baik berupa unsur serapan kebahasaan maupun berupa tata krama berbahasa dengan nuansa makna tertentu yang sangat mungkin diwarnai BD. Nilai-nilai rohani seperti itu perlu dilestarikan sebagai upaya merawat dan menghargai kehalusan budi pekerti manusia Indonesia melalui bahasanya. Pemanfaatan sumbangan BD seperti yang telah dirintis kalangan pakar hukum, melalui pemakaian kosakata, istilah atau ungkapan BD patut dihargai; dan ditindaklanjuti dengan langkah serupa itu pada berbagai bidang lain, misalnya di bidang farmakologi dan biologi yang berkaitan dengan upaya

pelestarian berbagai jenis obat-obatan tradisional dan berhubungan dengan berbagai nama tumbuh-tumbuhan khas daerah dengan label BD. Selain itu, BD yang berperan sebagai kunci untuk membuka wawasan bagi masyarakat agar mampu menjadi anggota warga kelompok suku ataupun bangsanya perlu mendapat perhatian dan pembinaan yang wajar. Perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai seberapa jauh sumbangan BD yang memiliki hubungan kekerabatan lebih erat dengan BI atas dasar kesamaan rumpun (AN) terhadap BI dalam hubungannya dengan BD lain yang bukan serumpun, seperti kasus yang ada di Propinsi Timor Timur.

Butir-butir simpulan yang dikemukakan untuk mengakhiri uraian ini berkaitan dengan upaya menanggapi pokok masalah yang diajukan pada awal makalah ini, yaitu (a) seberapa jauh sumbangan BD terhadap BI; (b) faktor apa yang menentukan besarnya sumbangan BD terhadap BI; dan (c) bagaimana upaya memanfaatkan BD sebagai sumber pengembangan BI sebagai bahasa persatuan.

CATATAN:

1. Sebagai ilustrasi, diperlihatkan beberapa kosakata dan istilah atau ungkapan adat istiadat yang dipungut dari bahasa-bahasa daerah sebagai berikut:

<i>ahori</i> (Ambon)	: disebut juga <i>hakori</i> , <i>pamoi</i> , atau <i>pamana</i> , yaitu upacara memperkenalkan mempelai wanita secara resmi kepada klan suaminya (Soekanto, 1978).
<i>hula-hula</i> (Batak Toba)	: kelompok pemberi wanita (<i>ibid.</i>)
<i>kenotan</i> (Flores Timur)	: hutan muda (<i>ibid.</i>)
<i>angkap</i> (Gayo)	: suatu bentuk perkawinan Dalam, perkawinan serupa itu seorang pria diangkat menjadi menantu tanpa kewajiban memberi mas kawin (<i>ibid.</i>)
<i>kuli</i> (Jawa)	: kadang-kadang disebut juga <i>golgol</i> , yaitu golongan petani di desa yang tak memiliki tanah (<i>ibid.</i>)
<i>hoko</i> (Minahasa)	: mas kawin (<i>ibid.</i>)
<i>buhu</i> (Sumba)	: hadiah untuk ibu mempelai wanita pada bentuk perkawinan tanpa mas kawin (<i>ibid.</i>)
<i>kokolot</i> (Sunda Banten)	: para sesepuh yang mengetuai suatu desa (<i>ibid.</i>)
<i>suwera</i> (Timor)	: tanda larangan di kebun (<i>ibid.</i>)
...	
2. Komunikasi pribadi dengan seorang guru kepala SMP Baucau, penutur bahasa ibu Makasai (sebuah BD di Timor Timur yang tidak serumpun dengan BI), menginformasikan bahwa tidak terlalu sulit baginya belajar BI karena sebelumnya BD Melayu Dili sudah dikenalnya.
3. Dalam contoh berikut tampak sejumlah ciri (*features*) pemarkah kelompok yang disebut sebagai BI Timur. Dalam BM dialek: Ambon, Manado, Irian, Kupang, Dili, dan Larantuka, misalnya, pemarkah ketransitifan kata kerja tidak sama dengan yang lazim ditemukan dalam BI atau sejumlah BM dialek daerah Indonesia Barat. Beberapa contoh berikut memperlihatkan penggunaan konstituen tertentu sebagai pengganti pemarkah ketransitifan.

<i>memanaskan (air)</i>	<i>kasi panas (air)</i>
<i>memecahkan (gelas)</i>	<i>bikin pecah (gelas)</i>
<i>mematikan (lampu)</i>	<i>bikin mati (lampu)</i>
...	

Apabila dinyatakan dalam BM dialek Banjar, bentuknya sebagai berikut.

BI	BM Banjar
<i>memanaskan (air)</i>	<i>memanas akan (air)</i>
<i>memecahkan (gelas)</i>	<i>memecah akan (gelas)</i>
<i>mematikan (lampu)</i>	<i>memati akan (lampu)</i>
...	

Demikian juga, pernyataan pasif yang selaras dengan bentuk pasif *di-* dalam BI dibentuk dengan menggunakan konstituen *dapat* atau *kena* yang dipadukan dengan *sama* (yang didahului bentuk dasar kata kerja), seperti tampak dalam contoh berikut.

BI	BI Timur
<i>dipukul guru</i>	<i>dapat pukul sama guru</i>
	<i>kena pukul sama guru</i>
<i>ditembak pemburu</i>	<i>dapat tembak sama pemburu</i>
<i>dilempar mereka</i>	<i>kena lempar sama dong</i>

Dengan cara yang agak berbeda contoh terakhir itu dikatakan dalam BM Menado sebagai berikut.

BI	BM Menado
<i>dipukul guru</i>	<i>guru (a)da pukul</i>
<i>ditembak pemburu</i>	<i>pemburu (a)da tembak</i>
<i>dilempar mereka</i>	<i>dorang (a)da lempar</i>

- Keenam bahasa itu, yakni Tetum, Galole, Mambai, Waimoa, Tokodede dan BM Dili. Adapun yang termasuk rumpun non-AN antara lain, bahasa Makasai, Bunak, Kemak, Fataluku, Idate, Kairui, dan Madiki. Situasi kebahasaan ini berbeda dengan Timor Barat (di Propinsi Nusa Tenggara Timur) yang hanya terdapat lima bahasa yakni bahasa Tetum, Dawan, Helong, Roti dan BM Kupang) Kelima bahasa itu termasuk rumpun bahasa AN (Masinambow, 1980).

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, James T. 1980. *Ambonese Malay and civilization Theory*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Erwin, S.M. dan C.E Osgood. 1965. "Second Language Learning and Bilingualism". Dalam C.E. Osgood and Th. Sebeok, *Psycholinguistics*, Bloomington: Indiana University Press.
- Fernandez, Inyo Yos, et al. 1992. "Bahasa Tetum Dili, Peranannya sebagai Wahana Informasi Pembangunan yang Efisien di Timor Timur". Jakarta: *Laporan Hasil Penelitian* untuk P4M Dikti.
- Halim, Amran. 1978. "Sikap Bahasa dan Kebijaksanaan Bahasa Nasional". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra* 6 (4), hl.11-26.
- Halim, Amran. 1980. "Fungsi Politik Bahasa Nasional", dalam Amran Halim (ed.) *Politik bahasa Nasional* Jakarta: Balai Pustaka.
- Haugen, Einar. 1966. "Dialect, Language, Nation", dalam J.B. Pride dan J. Holmes (eds.), *Socollinguistics*. Middlesex: Pinguin Books.
- Laksono, P.M. dan Inyo Y. Fernandez. 1993. "Data Dasar Pendidikan di Timor Timur". Jakarta: *Laporan Hasil Penelitian* untuk Litbang PDK.
- Masinambow, E.K.M. 1980. "Bahasa-bahasa di Timor Timur". Dalam *Berita Antropologi* 36 (11), hl. 68-81.
- Simatupang, M.D.S. 1983. *Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Soekanto, Soerjono. 1978. *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Suparlan, Parsudi. 1980. "Orang Timor Timur". Dalam *Berita Antropologi* 36 (11), hl. 37-67.
- Weinreich, Uriel. 1970. *Language in Contact, Findings and Problems* (7 Printing). The Hague: Mouton.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Perkembangan Bahasa Daerah dalam Bahasa Indonesia
Pemakalah : Inyo Yos Fernandez
Pemandu : Suripan Sadi Hutomo
Pencatat : Maryanto
Nurweni Saptawuryandari

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Imam Sukarsono, Staf Ahli Dewan Koperasi Indonesia

Saya sependapat dengan Bapak bahwa bahasa daerah itu mempunyai sumbangan yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Suku bangsa Jawa jumlahnya paling besar sehingga sumbangan bahasa Jawa dalam perkembangan bahasa Indonesia pun sangat besar pula. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan tata krama tadi agaknya perlu dipikirkan lebih jauh. Apakah kita perlu mengkramainggikan bahasa Indonesia? Berikut ini adalah contoh kalimat yang saya anggap berlebihan.

"Dik, apakah nanti komando *indak* ke devisi". Saya kira kalimat seperti itu tidak perlu dan penyerapan itu hendaknya seperlunya saja.

Jawaban:

Contoh kalimat yang Bapak kemukakan itu menurut pendapat saya merupakan laras bahasa yang tidak resmi atau formal. Jadi, dalam hubungan dengan masyarakat penutur, dengan siapa kita berbicara dapat saja hal itu terjadi. Akan tetapi, kalau kita sampai mengkramainggikan bahasa Indonesia, mungkin, itu tidak saya masukkan dalam contoh tadi, artinya, tata krama berbahasa secara halus, seperti pernyataan "mohon sudi bergilir". Pernyataan itu sebetulnya ada satu sisa yang masih tampak. Banyak orang dewasa ini ingin meninggalkan hal seperti itu dalam tata krama berbahasa. Akan tetapi, rasa tata krama itu hilang dari bahasa Indonesia. Contoh lain, pada waktu menulis surat, menurut pendapat saya, gaya bahasanya harus memberi sugesti kepada orang yang membaca. Sugesti ini dapat kita peroleh dengan memperhatikan tata krama berbahasa.

2. **Pertanyaan:** La Ode Sidu, FKIP Universitas Haluoleo

Ketika membaca judul makalah Bapak, saya mempunyai kesan bahwa sumbangan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu ada pengaruh positif dan negatif. Masalah kosakata, kita sependapat bahwa kosakata itu kita terima selama

kosakata daerah itu memperkaya atau menambah jumlah kosakata dalam perkembangan bahasa Indonesia. Akan tetapi, struktur bahasa daerah kadang-kadang juga masuk dalam struktur bahasa Indonesia, misalnya kalimat "saya tidak mau saya" dan "saya tidak mau membeli bukuku saya". Kalimat seperti itu dalam bahasa Indonesia tidak akan kita turunkan. Akan tetapi, dalam struktur bahasa daerah Muna kita temukan, misalnya *inodi akido aoma* (saya tidak mau saya makan). Struktur seperti itu ditransfer ke dalam bahasa Indonesia. Makalah ini tidak menyinggung pengaruh negatif bahasa atau sumbangan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

Jawaban:

Perkembangan bahasa daerah dalam tataran kebahasaan yang lain telah dibicarakan oleh makalah Bapak Amran Halim. Kita belum menyinggung masalah yang lebih luas mengenai satuan-satuan kebahasaan yang lain. Hal-hal seperti itu yang menyangkut masalah pragmatik pengaruh bahasa daerah yang mencerminkan tata krama dan sopan santun berbahasa perlu mendapat perhatian juga.

3. Pertanyaan: Abdul Muthalib, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang

- a. Saya ingin bertanya mengenai sumbangan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Faktor apa saja yang bisa dijadikan dasar agar istilah daerah dapat diterima dalam bahasa Indonesia? Saya melihat dalam masyarakat Sulawesi Selatan/Ujung Pandang, bahasa daerah itu malah dimasuki kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, Sunda, dan Madura banyak sumbangannya dalam bahasa Indonesia. Adakah usaha semacam itu memberikan kesempatan pada bahasa-bahasa daerah yang lain untuk memberikan sumbangan dalam bahasa Indonesia. Dalam kenyataannya suatu istilah daerah dalam bahasa Indonesia itu sangat bergantung kepada siapa yang memopulerkan dan menawarkan istilah itu. Saya kira, yang mempunyai otoritas! Dalam hal-hal tertentu itu yang mempercepat proses masuknya bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, kalau kesempatan untuk memberikan wewenang ini merata ke daerah-daerah saya kira masuknya bahasa daerah juga memungkinkan diterima sebagai bahasa Indonesia.
- b. Sampai di manakah penelitian pemakalah mengenai sumbangan bahasa daerah itu? Misalnya, berapa banyak dalam lima tahun terakhir ini bahasa daerah masuk dalam KBBI. Saya lihat dalam kamus itu belum ada label yang menyatakan bahwa istilah ini berasal dari bahasa daerah tertentu. Saya kira, akan menarik kalau kamus yang ada itu diberi label dari bahasa mana saja sehingga akan jelas bahasa daerah mana yang banyak masuk ke dalam bahasa Indonesia.

Jawaban:

Saya kira, beberapa faktor yang tadi saya kemukakan adalah masalah frekuensi pemakaian bahasa dan juga menyangkut beberapa faktor yang lain, yaitu interaksi sosial para birokrat daerah. Kemarin Bapak Azwar Anas mengatakan bahwa perlu memberi peluang bahasa daerah lain untuk mengisi kosa kata dalam bahasa Indonesia. Barangkali itu mulai juga dengan para birokrat. Tetapi, Bapak B.J. Habibie, misalnya, tidak menggunakan kata-kata bahasa Gorontalo di dalam penjelasan beliau sehubungan dengan tugas beliau dalam bidang Pengembangan Ilmu dan Teknologi di Indonesia atau dalam jabatan beliau sebagai pembantu Bapak Presiden. Demikian juga para masyarakat pers dan media massa sangat menentukan penyebaran unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan bahasa daerah yang disebarkan melalui media massa baik itu media massa cetak maupun media massa elektronik ini sangat mempengaruhi masuknya, bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

3. Pertanyaan: Epon Kurniasih, SMA Negeri 9, Bandung

- a. Mengapa asal-usul kata tidak dicantumkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*?
- b. Adakah kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pembuat kamus?

Jawaban:

Pusat Bahasa mempunyai kebijaksanaan jika semua kata dengan asal-usul kata itu dimuat maka kamus menjadi sangat tebal dan itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Saya kira, ini aspek praktis yang harus dipertimbangkan, sekurang-kurangnya oleh Pusat Bahasa.

5. Pertanyaan: Sri Yaningsih, Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Nusa Tenggara Barat

Saya ingin menyumbangkan pemikiran tentang faktor yang menyebabkan bahasa daerah bisa menyumbang pada bahasa Indonesia, yaitu (1) segi demografi, (2) penutur bahasa itu duduk dalam pemerintahan, dan (3) kebudayaan penutur bahasa itu masih berlaku dalam masyarakat. Kaitannya dengan sumbangan bahasa daerah karena pemeliharaan bahasa daerah diserahkan kepada penutur bahasa masing-masing. Oleh karena itu, harus ada keberanian putra-putra daerah untuk memasukkan unsur bahasa daerah masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam surat-menyurat dan lama-lama akan bisa menyumbang bahasa Indonesia.

Jawaban:

Ketiga faktor yang Ibu sarankan itu sudah tercakup dalam makalah saya. Keberanian untuk memasukkan kata-kata bahasa daerah dalam surat itu saya puji. Akan tetapi, kata-kata yang nantinya dapat menyebar ke wilayah tanah air harus kita teliti lebih lanjut.

6. Pertanyaan: Darmaja

- a. Bagaimana mengatasi dampak negatif kerancuan pemakaian bahasa Indonesia karena pengaruh bahasa daerah itu?
- b. Pembentukan kata dari bahasa daerah atau bahasa serumpun itu bagaimana?
- c. Mengapa kata *bupati*, *camat*, dan *lurah* apabila diberi imbuhan menjadi kabupaten, kecamatan, dan kelurahan? Apakah hal itu konsisten?

Jawaban:

Upaya untuk mengatasi dampak negatif kerancuan pemakaian bahasa Indonesia pengaruh bahasa daerah, antara lain dengan mengontrol diri secara sadar sehingga dapat menghindari kerancuan pemakaian bahasa. Pemakaian kata *kabupaten*, *kecamatan*, dan *kelurahan* tepat atau tidak, tetapi, saya kira, hal ini berdasarkan pemakaian yang sudah lazim dalam bahasa.

KEMAJUAN PENELITIAN BAHASA INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT

James T. Collins
University of Hawaii

1. Pendahuluan

Pada saat Amerika Serikat tampil di pentas politik dunia sebagai negara merdeka pada akhir abad kedelapan belas, warga Amerika sudah melayari lautan Nusantara dalam usaha dagangnya. Bahkan, tepat dua ratus tahun lalu, David Woodard, penduduk Boston, terdampar dan ditawan di Donggala, Sulawesi Tengah, selama hampir dua tahun. Hasil "penelitian" paksanya itu diterbitkan di London pada tahun 1805 dengan suatu kosakata Melayu yang mendokumentasikan pembentukan sejenis bahasa Melayu vehikular di pesisir Sulawesi yang berada di luar jangkauan pengaruh kuasa kolonial (Lihat Vaughn 1803 dan Collins 1986). Namun, sesungguhnya penelitian ilmiah tentang bahasa Melayu serta program pengajarannya di Amerika Serikat hanya mulai dengan ekspansi militer Amerika di Lautan Pasifik yang akhirnya, setelah perang kolonial antara Amerika dan Spanyol selesai, membuahkan tapak teritorial bagi kepentingan Amerika di Asia Tenggara, yaitu Filipina, pada akhir abad kesembilan belas. Karya etimologis Charles Payson Gurley Scott, "The Malayan Words in English", yang diterbitkan dalam *Journal of the American Oriental Society* pada tahun 1896 dan 1897 memperlihatkan suatu derajat keserjanaan yang cukup tinggi. Lebih kurang pada waktu yang sama di Universitas Cornell bahasa Melayu sekali-sekali ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan. Akan tetapi, usaha-usaha yang dini itu tidak terkoordinasi dan tidak berlanjut. Minat sarjana Amerika terhadap penelitian bahasa Indonesia hanya dapat dibangkitkan lagi sesudah perang tercetus lagi di wilayah Pasifik. Pada tahun 1943, Departemen Perang Amerika Serikat menerbitkan *Malay: A Guide to the Spoken Language*, yang dinyatakan dengan tegas sebagai buku pelajaran bahasa Melayu yang digunakan di Pulau Jawa dengan ejaan dan leksikon Hindia Belanda (War Department, 1943:5, 10). Pada waktu itu atas desakan pemerintah Amerika, dua orang sarjana linguistik Indo-Eropa mengalihkan fokus penelitian mereka pada linguistik Indonesia. Baik Profesor Isidore Dyen maupun Profesor John Echols mulai melibatkan diri mereka dalam penelitian bahasa Indonesia pada waktu itu (Dyen, 1945). Ketika Profesor Echols diajak ke Universitas Cornell pada tahun 1952, justru pada persengketaan Amerika-Soviet sedang memuncak. Saat itu studi bahasa Indonesia pada tahap akademis mulai berkembang di Amerika Serikat.

Studi Bahasa Indonesia di Amerika Serikat pada awalnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, politik kolonial, dan perang. Kini penelitian bahasa Indonesia di Amerika sudah lepas dari pertimbangan politik dan ekonomi. Walaupun demikian, sejak Kongres Bahasa Indonesia Kelima diadakan, kita sudah menyaksikan banyak perubahan dalam mandala politik internasional. Kemajuan penelitian bahasa Indonesia seharusnya dilihat dalam konteks global. Perspektif yang luas itu mewarnai laporan yang sederhana ini agar pendengar dan pelapor tidak tenggelam dalam arus orientalisme dan chauvinisme.

2. Penelitian Bahasa Indonesia di Amerika Serikat

Makalah ini terbagi atas tiga topik utama, yaitu (1) penelitian linguistik tradisional, (2) penelitian linguistik sosial, dan (3) penelitian pedagogi bahasa Indonesia.

Sebenarnya ketiga topik itu saling berhubungan dan tidak jarang bertumpang-tindih. Namun, dengan kesadaran akan keutuhan asasi itu, mari kita menelusuri setiap bidang itu dengan ringkas serta melihat kemajuan yang tercapai selama lima tahun terakhir ini.

a. Penelitian Bahasa Indonesia dalam Bidang Linguistik Tradisional

Bidang Linguistik Tradisional meneliti linguistik berkaitan dengan (1) linguistik komparatif historis serta (2) tata bahasa dan leksikon. Sampai lewat tahun 70-an, silabus linguistik menitikberatkan linguistik historis dan linguistik kanonik saja. Perkembangan linguistik modern yang bertalian dengan pendekatan Chomsky tidak mengubah sorotan linguistik dari tatabahasa; malahan sebaliknya jurang yang memisahkan ilmu linguistik dari masyarakat penutur bahasa semakin melebar pada era Chomskyisme. Dalam bagian ini beberapa bidang linguistik yang terkandung dalam konsep linguistik tradisional (kanonik) dilaporkan dulu.

1) Pengkajian Linguistik Komparatif

Sejak tahun 1988 penelitian yang berkaitan dengan linguistik historis oleh sarjana Amerika menjalani kemajuan. Karya Robert Blust (Universitas Hawaii), *Austronesian root theory: An essay on the limits of morphology*, terbit pada akhir tahun 1988. Walaupun teori Blust itu disambut dengan kritis sekali oleh beberapa penulis (Collins, 1989; Nothofer, 1990), sekurang-kurangnya terbitnya buku itu menimbulkan kesadaran baru terhadap masalah metodologi linguistik komparatif dalam studi linguistik Austronesia. John Wolff (Universitas Cornell) juga sering membicarakan rekonstruksi bahasa Austronesia purba dalam beberapa makalah dan tulisannya. Akan tetapi, baik dalam tulisan Wolff maupun Blust, bahasa Indonesia sendiri sebenarnya tidak diteliti. Dalam perkembangan linguistik komparatif historis, bahasa Indonesia

hanya berfungsi sebagai sumber data yang dapat digunakan dalam perbandingan data untuk menghasilkan gambaran tentang silsilah bahasa pada zaman prasejarah. Namun, perlu diakui bahwa sejak upaya Kerni dan Dempwolff, bahasa Indonesia menanggung beban yang berat sebagai salah satu bahasa diagnostik dalam beberapa perangkat perbandingan. Sejak tahun 1990, Blust mengerjakan Kamus Komparatif Austronesia dengan dana dari The National Science Foundation di Washington D.C. Kamus itu direncanakan selesai pada tahun 1994 dan sekarang sudah memuat 1300 halaman entri komparatif. Selain bahasa Indonesia, lebih kurang lima puluh bahasa lain yang dituturkan di Indonesia turut berfungsi sebagai sumber data perbandingan dalam proyek yang besar ini.

2) Ilmu Fonetik dan Fonologi

Walaupun ilmu fonetik merupakan salah satu cabang linguistik modern yang sangat tua, pengkajian linguistik tentang fonetik bahasa Indonesia kurang diperhatikan. Akhir-akhir ini, seorang sarjana linguistik Amerika, Abigail Cohn (Universitas Cornell), sudah melakukan berbagai penelitian tentang fonetik bahasa Indonesia serta bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Selain itu, penelitiannya menyangkut masalah fonologi dan hubungannya dengan morfologi, terutama dalam hal reduplikasi, pola-pola bunyi pepet dan struktur akar kata Indonesia. Tiga tahun lalu, Cohn berceramah di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan topik "Tekanan kata dalam Bahasa Indonesia: Aspek Deskriptif dan Teoretis". Ceramah itu dapat dianggap sebagai lanjutan pada tulisannya yang terbit pada tahun 1989 dalam *Natural Language and Linguistic Theory*, yaitu "Stress in Indonesian and bracketing paradoxes". Pada tahun ini (1993) diterbitkannya juga "The initial dactyl effect in Indonesian", sekali lagi menyoroti masalah tekanan dalam bahasa Indonesia.

Usaha Cohn itu bukan saja melibatkan aspek-aspek fonologi bahasa Indonesia, melainkan juga membuktikan relevansi bahasa Indonesia dalam pembinaan fonologi teoretis. Selain itu, dia juga meneliti beberapa bahasa daerah secara intensif, misalnya nasalisasi dan infiksasi dalam bahasa Sunda, hubungan nasalisasi dengan fonasi konsonan dalam bahasa Madura, serta fonologi vokal dalam bahasa Dayak Ngaju. Penelitian perintis itu memanfaatkan peralatan teknis seperti spektogram dan alat-alat khusus yang diciptanya untuk mengukur aliran udara di saluran nasal dan oral.

3) Sintaksis dan Morfologi

Belum lama berselang beberapa ahli linguistik Amerika, antara lain, Sandra Chung (Universitas California Santa Cruz), terlihat dalam debat yang seru tentang penerapan teori transformasi dan tata bahasa kasus dalam analisis tata bahasa Indonesia. (Lihat, misalnya Chung, 1976; Verhaar, 1988; dan Cartier, 1979.) Gelombang teoretis itu sudah lama reda. Kini alunan penelitian sintaksis bahasa Indonesia meriak kembali karena pendekatan analisis wacana dan tata bahasa

fungsional dalam hubungannya dengan penelitian evolusi sintaksis dalam bahasa Indonesia.

Yang paling penting dalam perkembangan baru ini adalah buku Susanna Cumming (Universitas California Santa Barbara), *Functional Change: The Case of Malay Constituent Order* (1991). Dalam buku yang cukup kompleks itu, perubahan yang terjadi dalam evolusi sintaksis Melayu klasik menjadi sintaksis bahasa Indonesia diselidikinya melalui pengkajian teks, baik dalam bahasa Melayu klasik maupun dalam bahasa Indonesia modern. Inti analisisnya terletak pada peranan argumen-argumen dalam klausa dan ini ditafsirkannya dengan menentukan fungsinya dalam wacana. Meskipun Cumming menyingkapkan sejarah dan evaluasi serta evolusi bahasa Indonesia, pendekatannya membawa berbagai implikasi untuk penafsiran sintaksis dan morfologi bahasa Indonesia kontemporer serta implikasi untuk metodologi penelitian sintaksis. Penentuan peranan fungsional harus berlandaskan pemeriksaan yang cermat terhadap korpus tekstual. Hanya dengan mengolah korpus itu dengan komputer dan program-program tertentu dapat dihasilkan analisis wacana yang meyakinkan.

Dengan Cumming sebagai pelopor, beberapa ahli linguistik Amerika lain telah mengikuti prakarsanya dalam metodologi dan teori fungsional untuk meneliti wacana bahasa Indonesia. Misalnya, Michael Ewing (Universitas California Santa Barbara) menulis hubungan afiks *-kan* dan preposisi *akan* dalam bahasa Indonesia (Ewing 1991). Sepintas lalu, tulisannya, "*The Appearance and Disappearance of a Case Marking Preposition in Malay*", dapat dibaca sebagai sumbangan terhadap sejarah perubahan sintaksis bahasa Indonesia. Karena sebagian korpus yang diolahnya merupakan antologi tulisan yang dipetik dari majalah *Tempo*, dengan sendirinya interpretasi Ewing menyangkut deskripsi beberapa aspek sintaksis bahasa Indonesia kontemporer. Demikian juga penelitian F. Muller-Gotama (Universitas Negeri California) yang diceramahkannya pada tahun 1993 tentang komplementasi dalam bahasa Indonesia harus dilihat dalam hubungannya dengan pendekatan Cumming.

4) Leksikografi

Kemajuan dalam penelitian tata bahasa, khususnya dalam bidang fonologi, morfologi dan sintaksis itu diimbangi dengan peningkatan leksikografi di Amerika Serikat. Pada tahun 1989 di Amerika dan juga di Indonesia *Kamus Indonesia-Inggris edisi ketiga* oleh John Echols dan Hassan Shadily telah terbit. Kamus itu sudah ditanggapi dengan berbagai resensi, baik yang positif (Mintz 1991) maupun yang negatif (Stevens dan Schmidgall-Tellings 1992); edisi ketiga itu dengan 31.000 entri sudah sekitar dua kali lipat lebih besar daripada edisi kedua (tahun 1962). Tentu saja masih banyak yang dapat ditambah dan direvisi, tetapi kalau dibandingkan dengan edisi kedua, hampir setiap entri direvisi dengan definisi baru dan tambahan frasa dan kalimat contoh. Sebagian besar contoh itu dipetik dari dokumentasi tekstual yang diusahakan oleh almarhum Echols (Universitas Cornell) atau dari konkordansi roman

Indonesia yang disusun oleh Rufus Hendon (Universitas Yale). Para editor kamus itu juga memasukkan petunjuk tentang status sosiolinguistik bagi sejumlah entri dengan menandakan penggunaan kasar, arkais, dan kolokial atau yang bersifat regional (Jawa, Jakarta, Ambon dan sebagainya). Edisi ketiga ini akan dapat melandasi usaha leksikografi Indonesia-Inggris selanjutnya bukan saja karena isinya lebih lengkap dan lebih cermat, melainkan juga karena kamus itu sudah dikomputerisasikan sebagai langkah pertama dalam revisinya. Semua tambahan dan perbaikan, bahkan perombakan pun, dapat dilakukan dengan mudah supaya kamus itu tetap mencerminkan perkembangan bahasa Indonesia yang memang dinamis.

b. Penelitian Bahasa Indonesia dalam Bidang Linguistik Sosial

Sungguhpun ilmu linguistik, yang pada mulanya tumbuh dengan kesadaran akan variasi dialek regional dan sosial, sudah lama terbuka terhadap kenyataan bahwa faktor-faktor sosial senantiasa mempengaruhi bahasa, baru sejak tahun 60-an terdapat teori-teori linguistik yang secara eksplisit memperhitungkan faktor-faktor sosial itu. Dampak yang sudah lebih tiga puluh tahun terasa dalam ilmu linguistik itu telah menghasilkan berbagai cabang yang menjalin linguistik dengan masalah sosial, misalnya sosiolinguistik, etnolinguistik, etnografi tuturan, dan juga pembagian cabang linguistik yang lebih khusus lagi fokus dan tekanannya, misalnya pengkajian pijin dan kreol, studi pupusnya bahasa, persaingan bahasa, multilingualisme, diglosia, dan pertukaran kode bahasa. Di Amerika Serikat dampak yang sudah lama mempengaruhi ilmu linguistik pada umumnya itu lambat-laun mulai menggeser penelitian bahasa Indonesia. Dalam bagian kedua makalah ini beberapa contoh penelitian yang membahas kenyataan linguistik dalam hubungannya dengan keadaan sosial diklasifikasikan di bawah dua topik utama saja, yaitu Multilingualisme di Indonesia dan Sejarah Sosial Bahasa Indonesia.

1) Multilingualisme di Indonesia

Istilah multilingualisme ini sangat luas cakupannya. Bukan saja kepelbagaian bahasa yang dimaksudkan melainkan juga dinamika antarbahasa. Para pengkaji linguistik bahasa Indonesia di Amerika agak terlambat menghadapi pokok penelitian linguistik ini walaupun pokok ini memang pernah disinggung secara nonlinguistik oleh Ben Anderson (Universitas Cornell) dua dasawarsa lalu. Secara linguistik, beberapa masalah yang berhubungan dengan multilingualisme diteliti bersama oleh Soepomo Poedjosoedarmo dan John Wolff (Universities Cornell) pada tahun 1982 dan pernah diolah sebagai topik disertasi doctoral oleh Dede Oetomo ketika dia masih belajar di Universitas Cornell (Oetomo, 1987). Bahkan, sebelum itu pun Ellen Rafferty, yang kini menjabat sebagai koordinator program bahasa Indonesia di Universitas Wisconsin, menulis bentuk dan rumus penggunaan bahasa di kalangan nonpribumi di Malang. Akan tetapi, dalam waktu lima tahun terakhir ini perkembangan dalam bidang studi multilingualis me makin menonjol karena pengkajian

multilingualisme kurang bersifat deskriptif dan lebih menjurus ke arah prediktif, malah kadang-kadang polemik.

Penelitian J. Errington (Universitas Yale) tentang bilingualisme bahasa Jawa-bahasa Indonesia sudah menghasilkan tulisan yang berjudul "*On the Ideology of Indonesian Language Development: The State of a Language of State*" (Errington 1992). Tulisan yang agak kritis tentang perencanaan bahasa di Indonesia disusuli dengan konferensi di Universitas Yale dengan tema "*Other Indonesians: Regional Fates of the Language of State*". Selain tulisan lain pada beberapa ahli antropologi, tiga orang linguis Amerika menyajikan makalah yang membahas isu-isu multilingualisme. J. Wolff (Universitas Cornell) membicarakan meluasnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Smith-Hefner (Universitas Massachusetts) memilih topik tentang bahasa Indonesia dan pembentukan kelas sosial yang baru; dia membahas kesalingkaitan etnisitas, agama, dan perubahan bahasa. Makalah J. Errington sendiri mempertimbangkan implikasi pertukaran kode bahasa di Jawa Tengah.

Fenomena pertukaran kode yang disertakan tanda-tanda kepunahan bahasa menarik perhatian ahli linguistik di Amerika. Pada tahun 1990 warga Australia yang pada waktu itu masih belajar di Universitas Hawaii, Margaret Florey, menyelesaikan disertasinya tentang penggantian bahasa yang sedang berlaku di Seram Barat, Propinsi Maluku. Dalam disertasi itu, Florey menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa kelestarian bahasa Alune sekurang-kurangnya satu desa kini terancam akibat pengaruh bahasa Indonesia dan dialek Melayu regional di sana serta pilihan sosial penduduk desa itu sendiri; generasi muda di desa itu sudah tidak sanggup berbahasa daerah (bahasa Alune) lagi. Sebagai sambungan studi yang dirintis Florey itu, di Universitas Hawaii sedang direncanakan proyek penelitian tentang kelestarian dan pemeliharaan bahasa daerah di Maluku serta peranan bahasa supraregional (bahasa Indonesia dan dialek-dialek Melayu regional) dalam wilayah itu.

2) Sejarah Sosial Bahasa Indonesia

Ahli bahasa di Amerika Serikat menyadari bahwa dalam upaya penulisan sejarah bahasa Indonesia sangat dibutuhkan suatu pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial. Secara sinkronis, ilmu sosiolinguistik dan dialektologi melibatkan variabel maka sewajarnya pengkajian sejarah bahasa Indonesia juga mempertimbangkan keadaan sosial. Fenomena, seperti kesan keberaksaraan, bidialektalisme, hierarki pelbagai bahasa dalam masyarakat dan dampak bahasa asing dapat diselidiki dalam sejarah bahasa Indonesia. Sesungguhnya masih banyak data tentang penggunaan bahasa yang belum diperiksa. Hal itu mulai diperhatikan kalangan ahli linguistik Amerika.

Ellen Rafferty (Universitas Wisconsin) sedang meneliti variasi dan perubahan yang tampak dalam bahasa Melayu dari tahun 1880 sampai dengan tahun 1930. Berkat koleksi buku dan bahan cetakan yang memang sengaja dikumpulkan di perpustakaan universitasnya, dia dapat mempelajari sastra Melayu yang diterbitkan di Hindia Belanda pada waktu itu untuk menarik kesimpulan tentang bahasa dan masyarakat

itu. Antara pokok yang ditelitinya terdapat berbagai ragam Melayu dalam pers Melayu Hindia Belanda dan deskripsi bahasa Melayu dalam film *Pareh*, yang disiarkan pada tahun 1935. Dengan menelaah struktur dan leksikon terbitan dan film pada waktu itu, dia dapat merekonstruksi fungsi berbagai bahasa dan dialek dalam masyarakatnya.

Dengan tujuan serupa, suatu proyek kerja sama antara J. Collins (Universitas Hawaii) dan B. Nothofer (Universitas Goethe, Jerman) berjalan sejak tahun 1991. Dengan bantuan dari universitas masing-masing serta tambahan dana dari DAAD dan The American Council of Learned Societies direncanakan penulisan buku sejarah bahasa Indonesia dan sudah diadakan kunjungan kerja di Eropa dan Amerika untuk melaksanakan cita-cita proyek itu. Penulisan buku itu akan memanfaatkan sekian banyak sumber data yang biasanya diabaikan, umpamanya catatan perjalanan, surat-surat dan laporan resmi pemerintah Hindia Belanda, buku pedoman bahasa untuk orang Belanda abad ke-19, terjemahan kitab dan buku rohani Kristen serta dokumen-dokumen pengadilan yang belum diterbitkan. Dengan landasan teori sociolinguistik, bahan-bahan seperti itu, yang sudah lama ditinggalkan begitu saja, dapat dibahas untuk menarik kesimpulan tentang ekologi bahasa pada waktu lampau. Kerja sama antara Collins dan D.J. Prentice (Universitas Leiden) juga bertujuan menerbitkan kembali sebuah dokumen yang dapat menyingkapkan situasi kebahasaan di Nusantara pada zaman awal kolonialisme. Kumpulan khotbah yang dikarang dalam bahasa Melayu oleh Pendeta Francois Caron pada pertengahan abad ketujuh belas dapat dikaji untuk memperoleh gambaran tentang masyarakat dan bahasa-bahasanya pada abad itu.

Semua usaha ini terarah pada deskripsi sejarah bahasa Indonesia yang tidak hanya menerangkan perubahan bunyi atau peminjaman kata-kata. Demi memahami dinamisme bahasa Indonesia, kita harus mengetahui hubungan bahasa itu dengan masyarakat Nusantara sepanjang zaman.

c. Penelitian Pedagogi Bahasa Indonesia.

Di Amerika Serikat tidak ada institut khusus yang meneliti bahasa dan budaya Asia Tenggara, baik dengan dana dari pemerintah maupun dari yayasan swasta. Juga tidak ada fakultas bahasa Asia Tenggara di universitas mana pun di Amerika. Bahkan, di seluruh Amerika tidak ada jurusan bahasa Indonesia. Semua kegiatan penelitian bahasa Indonesia disisipkan di tengah kesibukan mengajar bahasa Indonesia sebagai kuliah pilihan atau kuliah tambahan di beberapa universitas dan institut lain. Di Amerika terdapat sekurang-kurangnya sebelas universitas yang menyelenggarakan kuliah bahasa Indonesia secara tetap, yaitu Arizona State, California (Berkeley), Cornell, Hawaii, Michigan, Northern Illinois, Ohio, Oregon, Washington, Wisconsin, dan Yale. Semua universitas ini menyertai *Consortium for the Teaching of Indonesian*, sebuah badan swadaya yang, melalui mufakat, berusaha meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia di Amerika serta berfungsi sebagai forum bebas untuk membicarakan topik penelitian linguistik dan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Walaupun tenaga dan biaya demikian terbatas, kiranya para pengajar

bahasa Indonesia itu masih dapat menyumbangkan pikirannya ke arah pembinaan penelitian linguistik bahasa Indonesia. Namun, tidak mengherankan kalau sebagian besar upaya mereka itu harus dituangkan dalam acuan pengajaran bahasa karena hampir semuanya berdinamika dalam bidang pengajaran itu. Di bawah ini dilaporkan tiga proyek besar yang sedang berjalan di Amerika. Semuanya bersifat praktis dan bertujuan menghasilkan bahan pengajaran baru atau sistem pengajaran baru.

1) *Pengajaran Bahasa Indonesia Berkomputer*

Sejak tahun 1990 mahasiswa yang mengikuti kuliah asas bahasa Indonesia di Universitas Northern Illinois dapat belajar dengan bantuan komputer karena sudah lama Patricia Henry, dosen bahasa Indonesia di sana, bekerja sama dengan dosen-dosen Jurusan Ilmu Komputer, R. Zerwekh dan G. Henry menciptakan FLIS (*Foreign Language Instruction Station*) yang direncanakan untuk bahasa Indonesia dan bahasa Muangthai. FLIS itu lengkap dengan grafik berwarna dan rekaman audial interaktif. Si mahasiswa ditanyai mengenai rekaman itu atau gambaran yang terdapat di layar komputer. Informasi tambahan dapat dipilih olehnya, misalnya daftar kata yang diperlukan dalam suatu mata pelajaran atau versi rekaman yang diperlambat untuk memperoleh daya tanggap. Karena sifat interaktifnya, dengan FLIS si mahasiswa dapat belajar bahasa Indonesia menurut kesanggupan dan kecepatannya sendiri.

Sistem FLIS itu sedang ditingkatkan agar sistem itu dapat berfungsi dalam program *Microsoft Windows* yang sudah luas digunakan di Amerika. Selain lebih murah, penggantian FLIS dengan program *MS Windows* itu membawa beberapa ciri tambahan, misalnya sebagai berikut.

- a) Kamus bahasa Indonesia multimedia yang interaktif; kamus ini dapat digunakan dengan sistem pengajaran FLIS atau sebagai sumber informasi tersendiri.
- b) Sistem penciptaan yang memungkinkan pengajar bahasa Indonesia mengubah setiap mata pelajaran dengan tambahan dan revisi sesuai dengan keperluan kelasnya.
- c) Sistem pertanyaan yang memanfaatkan segala ciri grafik *Windows* agar pemakai dapat mengubah bentuk gambar atau susunan perkataan di layar dalam usaha menjawab pertanyaan.

Dengan perakitan FLIS dan *Microsoft Windows* penggunaan eksperimental di Northern Illinois ini dijangka meluas ke pusat-pusat pengajaran bahasa Indonesia lain. Baru-baru ini (Mei 1993), K. Carpenter (Universitas Oregon) melaporkan bahwa percobaan pengajaran dengan komputer sedang diadakan di universitasnya dalam proyek kerja sama dengan program pengajaran bahasa Jepang.

2) *Pengajaran Profisiensi Membaca*

Di Universitas Hawaii sejak tahun 1990 proyek penyusunan buku teks profesiensi membaca sudah dikerjakan secara intensif. Profisiensi membaca ini harus memanfaatkan bahan-bahan cetakan Indonesia yang 100% autentik; maka tiada bacaan

yang dibuat-buat oleh pengajar untuk kegunaan kelas seperti lazimnya dalam dunia pengajaran bahasa Indonesia sebelumnya. Pada tahun 1991, Universitas Wisconsin turut serta dalam proyek ini dan dengan dana Departemen Pendidikan AS. Dua jilid buku bacaan dan latihan sedang disusun, dan juga sebuah buku pedoman guru. Peneliti utama dalam proyek ini Ellen Rafferty (Wisconsin) dan J. Collins (Hawaii) dibantu beberapa sarjana lain yang dididik dalam pengajaran bahasa sebagai bahasa kedua, terutama E. Barnard, M. Burns, dan M. Ewing. Jilid pertama yang memuat 12 mata pelajaran sudah siap disusun dan diuji dan sedang menunggu penerbitan pada awal tahun depan. Jilid kedua dengan 25 mata pelajaran juga sudah siap disusun dan diuji, tetapi harus diedit lagi. Proyek ini menarik karena melibatkan dua universitas yang terpisah lebih kurang 8.000 kilometer. Pemanfaatan teknologi modern digunakan untuk meningkatkan kerja sama jarak jauh, yaitu dengan konferensi telepon, faksimile, dan pengiriman data dengan komputer.

3) Peningkatan Keterampilan Mendengar Melalui Video

Sebulan lalu di Universitas Hawaii, proyek pengembangan seri modul keterampilan mendengar bahasa Indonesia mulai berjalan sebagai sebagian proyek yang merangkum bahasa Vietnam dan juga bahasa Tagalog. Dengan menggunakan bahan-bahan autentik yang berupa rekaman siaran televisi Indonesia, film-film Indonesia dan rekaman-rekaman lain seperti video informasi korporat di Indonesia, akan dihasilkan suatu seri mata pelajaran yang berteraskan teori skema dan aktivitas aneka tahap. Setiap modul itu dilengkapi dengan video autentik serta rekaman-rekaman Video yang disusun untuk memperkuat keterampilan mendengar dan memahami video autentik itu. Tingkat keterampilan yang menjadi sasaran adalah tingkat permulaan dan sedang (1+ hingga 2 dalam skala profisiensi). Proyek bahasa Indonesia dipimpin oleh Ny. Erlin Barnard yang memang dilatih dalam teori profisiensi.

Ketiga projek ini bersifat praktis walaupun landasan teoretis bagi setiap projek itu sangat kukuh dan sudah diuji. Harus diakui bahwa hampir semua penelitian dalam bidang pedagogi ini bergerak untuk mencapai penghasilan bahan pelajaran bukan untuk memahami metode pengajaran ataupun daya pembelajaran. Hampir semua projek yang dilaporkan di sini memperlihatkan usaha melibatkan pelajar bahasa dalam dunia dan budaya Indonesia yang sebenarnya. Sudah terlalu lama teks pengajaran bahasa Indonesia menampilkan suatu citra Indonesia yang terlalu mirip dengan keadaan Amerika sendiri atau sebaliknya menyajikan suatu budaya yang begitu eksotis sehingga orang Indonesia sendiri tidak akan mengenalnya. Program pelajaran bahasa Indonesia untuk orang Amerika yang berlokasi di Indonesia banyak agar orang yang belajar bahasa Indonesia itu mendapatkan bahan yang seautentik mungkin dengan keadaan yang akan dialami sehari-hari.

Program yang agak bersifat teoretis adalah percobaan yang dilakukan di Foreign Service Institute (Pusat Pendidikan Para Diplomat Amerika) di Washington.

Instruksi berdasarkan tugas melibatkan para pelajar bahasa Indonesia dalam modul pengajaran yang cukup kompleks serta menuntut perhatian pelajar secara intensif dengan tujuan meningkatkan kesanggupan si pelajar membicarakan topik-topik yang diperlukan dalam tugasnya kemudian di Indonesia. Pengujian terhadap profisiensi pelajar yang dididik dalam pendekatan ini menunjukkan pencapaian yang bertambah baik jika dibandingkan dengan pencapaian pelajar yang tidak belajar dengan sistem itu.

3. Simpulan

Sebagai penutup laporan yang mirip inventaris ini, izinkan saya membicarakan penelitian bahasa Indonesia di Amerika Serikat sekarang ini dalam konteks zamannya, yaitu era pascakolonial. Hanya beberapa tahun lalu dari Washington berkumandangnya slogan angkuh "Orde Dunia Baru". Konon dengan berakhirnya komunisme dan Uni Soviet tinggallah adikuasa tunggal yang sanggup membetulkan segala yang salah dan mampu memelihara keamanan dunia. Angan-angan neokolonial itu lenyap di lembah Kurdistan dan di gang-gang kota Mogadishu. Sekarang kita betul-betul berhadapan dengan dunia pascakolonial dan tanda-tanda kenyataan itu tercermin dalam struktur dan ciri-ciri penelitian bahasa Indonesia di Amerika.

Pertama, dibandingkan dengan beberapa tahun silam, jarang sekali terdapat orang Indonesia yang terlihat dalam penelitian bahasa Indonesia di Amerika. Kalau dulu beberapa sarjana warga Indonesia belajar ilmu linguistik di Amerika menyiapkan penelitian doctoral di sana, bahkan memimpin program pengajaran bahasa Indonesia di beberapa universitas Amerika, sambil mendorong orang Amerika sendiri supaya meneliti isu-isu linguistik Indonesia, kini jumlah peneliti asal Indonesia itu sudah sangat berkurang. Keadaan ini disebabkan oleh banyak faktor. Sekarang sekian banyak universitas di Indonesia sendiri sanggup mendidik generasi muda sarjana linguistik sendiri; menuntut ilmu di Amerika tidak sepenting dulu karena pencapaian perguruan tinggi di Indonesia dalam bidang linguistik sudah bertambah baik. Begitu pula, orang Amerika semakin maju dalam pemerolehan pengetahuan tentang Indonesia, linguistik Indonesia dan pengajaran bahasa Indonesia sehingga keahlian orang Indonesia sendiri kurang dibutuhkan pada saat ini. Keterpisahan pendidikan ini tidak seharusnya melemahkan penelitian bahasa Indonesia. Justru kemandirian akademis pada kedua pihak ini dapat melandasi kerja sama baru yang seimbang dan searah demi memajukan studi linguistik Indonesia seterusnya.

Kedua, perspektif dan sifat era pascakolonial ini terbayang juga dalam pendanaan penelitian bahasa Indonesia di Amerika. Sebagian besar proyek yang dibiayai pemerintah Amerika terfokus pada pedagogi bahasa Indonesia. Misalnya, karena pentingnya kamus dalam pengajaran bahasa Indonesia, sebagian biaya penyusunan *Kamus Indonesia-Inggris* (Edisi ketiga) ditanggung Departemen Pendidikan A.S. Begitu juga proyek pengajaran bahasa Indonesia berkomputer, proyek profisiensi membaca dan proyek keterampilan mendengar melalui video yang dilaporkan di sini didukung

dengan dana instansi pemerintah pusat. Namun, biaya untuk penelitian linguistik Indonesia yang tidak melibatkan pengajaran bahasa Indonesia untuk orang Amerika biasanya terbatas pada beasiswa penelitian lapangan untuk mahasiswa Amerika dalam program doktoral. Proyek penelitian linguistik murni yang dipimpin oleh sarjana yang berkualifikasi dalam pengkajian bahasa Indonesia jarang sekali dibiayai pemerintah Amerika. Universitas masing-masing dan yayasan swasta, malahan ahli linguistik sendiri, harus menanggung anggaran penelitian linguistik murni. Pendanaan yang semata-mata terbatas pada proyek pengajaran bahasa mencerminkan obsesi ekonomi yang sekarang melanda Amerika yang kini mengalami resesi dan penyusutan peranannya dalam sistem pasaran internasional. Kemampuan berbahasa Indonesia hanya dilihat sebagai komoditas komersial yang dapat menguntungkan kedudukan Amerika dan mempertajam upaya Amerika bersaing sebagai kekuatan ekonomis global. Hanya citra Indonesia sebagai *mini-dragon* Asia Tenggara yang menyelamatkan penelitian bahasa Indonesia dan itupun tersekat pada pedagogi bahasa saja. Harus kita insaf: dunia pascakolonial adalah dunia hiperkomersial. Di Amerika penelitian linguistik Indonesia belum memperoleh ruang dalam dunia itu.

Ketiga, pada era ini cakrawala penelitian linguistik telah meluas dan kini melampaui batas-batas linguistik tradisional. Tentu saja, perluasan yang mencakupi aspek-aspek sosial dan budaya ini menandakan sikap yang sehat terhadap masyarakat dan kebudayaan. Etnosentrisisme dan tanggapan bahasa sebagai konsep mental yang monolitik ditinggalkan sedikit demi sedikit. Sekarang berbagai dilema sosial yang mengalir dari kemuskilan yang dihadapi komunitas multilingual dapat diteliti dalam rangka ekologi bahasa. Perkembangan yang memang bersifat pascakolonial ini sudah disambut oleh para linguist Amerika.

Keempat, kini peranan sarjana dan cendekiawan wanita Amerika semakin mantap dan semakin menentukan arah perkembangan itu. Kalau dulu, pada tahun 60-an dan 70-an, tidak ada seorang ahli linguistik wanita Amerika yang bergiat dalam pengkajian Indonesia, sekarang jumlah linguist wanita sudah mengimbangi, kalau tidak melebihi, jumlah linguist pria dalam bidang studi bahasa Indonesia. Sarjana-sarjana wanita ini telah membawa pengkajian bahasa Indonesia di Amerika ke jenjang keberhasilan yang cemerlang, baik dalam bidang pedagogi maupun dalam bidang penelitian linguistik murni.

Kelima, zaman pascakolonial ini bercirikan kadar kerja sama pada tahap nasional dan internasional yang kian intensif. Kerja sama yang sudah terjalin dan universitas-universitas di Amerika sendiri dan antara beberapa universitas itu dan perguruan tinggi di Eropa dan Asia dapat dianggap sebagai pertanda adanya pembentukan suatu jaringan akademis yang akan mengatasi masalah perselisihan remeh-remeh dan hampa yang lazim terjadi pada waktu silam. Globalisasi komunikasi yang melemparkan siaran televisi Beijing dan musik MTV ke ruang tamu kita harus dimanfaatkan dimanipulasikan agar fasilitas itu dapat melipatgandakan kerja sama ilmiah bukan kehebatan hiburan pop saja! Jangan kita menjadi korban teknologi. Seyogianya, kita menerapkan

teknologi itu untuk mengeratkan lagi jaringan pengkajian bahasa Indonesia melalui komputer, satelit, video, dan telepon.

Runtuhnya tembok politik di Eropa menyeret masyarakat internasional ke ambang zaman yang baru. Apakah dampaknya terasa di kalangan ahli bahasa Indonesia?

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Kemajuan Penelitian Bahasa Indonesia di Amerika Serikat
Pemakalah : James T. Collins
Pemandu : Sri Utari Subiyakto Nababan
Pencatat : Buha Aritonang
Menuk Hardaniwati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Ramelan, IKIP Semarang

Apakah tidak ada rencana penelitian bahasa Indonesia kontemporer di Amerika Serikat?

Jawaban:

Memang ada penelitian kontemporer yang dilakukan di Amerika Serikat, misalnya Wolff meneliti sintaksis dengan korpus yang diolahnya (di Jakarta) dari sudut preskriptif

2. **Pertanyaan:** H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran

- Berapa universitas di Amerika Serikat yang mempunyai jurusan bahasa Indonesia?
- Berapa orang--dalam hal ini seperti James T. Collins--menguasai bahasa Indonesia?

Jawaban:

Tidak ada satu pun universitas di Amerika Serikat yang mempunyai jurusan bahasa Indonesia

Belum ada perhitungan mengenai orang Amerika yang menguasai bahasa Indonesia.

3. **Pertanyaan:** I Wayan Bawa, Fakultas Sastra Universitas Udayana

- Tadi sudah dinyatakan bahwa ada kerja sama Northofer dan Collins tentang penelitian sejarah bahasa Indonesia. Sehubungan dengan kerja sama dan hasilnya, bagaimanakah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang?
- Bagaimanakah penelitian persaingan mutualistis bahasa di Amerika Serikat?

Jawaban:

Kedudukan bahasa Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang dititik-beratkan pada faktor sosial dan penelitian persaingan mutualistik bahasa di Amerika Serikat saling menguntungkan, tetapi lebih bersifat kompetisi.

4. **Pertanyaan:** J. Tetelepta, FKIP Universitas Pattimura

- a. Apakah hasil temuan bahasa Melayu Ambon dapat digunakan oleh pemakai bahasa Melayu dalam situasi sosial di Indonesia?
- b. Apakah ada perbedaan antara bahasa Melayu Ambon dan bahasa Tanah?

Jawaban:

Bahasa Melayu Ambon merupakan salah satu variasi ragam bahasa Indonesia sehingga ada keseragaman antara bahasa Melayu Ambon dan bahasa Indonesia. Bahasa Tanah yang ada di daerah Maluku Tengah merupakan salah satu variasi bahasa Ambon. Di sisi lain, sampai saat ini sudah banyak variasi bahasa Melayu Ambon di Maluku Tengah punah. Jadi, bahasa yang tidak punah ada + 30 bahasa daerah.

8. **Pertanyaan:** Myrna Laksman, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

- a. Apakah ada penelitian bahasa Indonesia yang melibatkan ahli bahasa Indonesia?
- b. Data-data yang Bapak sebut tadi apa dapat kami peroleh?
- c. Pengajaran bahasa Indonesia yang diambil melalui siaran TV dan film-film Indonesia, apakah untuk komunikatif atau untuk pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar?

Jawaban:

Penelitian bahasa Indonesia sudah pernah dilakukan dengan kerja sama linguist Amerika Serikat dengan seorang linguist wanita dari Indonesia. Sumber data dapat diperoleh jika makalah ini diterbitkan. Pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru bahasa Indonesia di Amerika Serikat disesuaikan dengan konteks yang ditentukan oleh keadaan. Misalnya, bahasa Indonesia untuk penyiar TV.

6. **Pertanyaan:** Anita K. Rustapa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

- a. Apakah tujuan Collins mempelajari bahasa Indonesia? Dan siapa yang mendanainya?

- b. Apakah Collins hanya mengajar bahasa Indonesia atau dikaitkankah dengan, umpamanya, budayanya?

Jawaban:

- a. Tujuan saya mempelajari bahasa Indonesia karena tertarik pada kebudayaan Indonesia yang begitu beragam, tetapi hanya menggunakan satu bahasa. Ada yang dibiayai oleh LIPI dan ada yang pribadi.
- b. Saya hanya mengajar bahasa Indonesia, tetapi tidak mungkin meninggalkan bidang budaya dan seni karena tidak dapat dilepaskan dari masalah bahasa.

PENELITIAN TATA BAHASA INDONESIA DALAM KONTEKS ILMU BAHASA RUSIA

Natalia F. Alieva

Language Department Institute Oriental Studies, Moscow, Rusia

1. Pendahuluan

Kurang lebih 40 tahun yang lalu studi bahasa dan sastra Indonesia di Moskow dan di Leningrad dimulai. Sudah boleh kiranya kita melihat ke belakang dan meninjau jalan yang kita lalui.

Jelas sekali bahwa isi judul makalah ini tidak mungkin dapat diuraikan dalam sebuah makalah saja. Maksud saya ialah menyinggung beberapa segi yang berkaitan dengannya, yaitu yang khusus berkenaan dengan diterbitkannya sebuah buku pada tahun 1991 oleh Penerbit Kanisius di Jogjakarta berjudul *Bahasa Indonesia Deskripsi dan Teori* yang diciptakan oleh tim pengarang Soviet: N. Alieva, V. Arakin (almarhum), A. Ogloblin, dan Yu. Sirk. Buku tersebut terbit sebagai versi baru dari edisi Moskow tahun 1972, *Grammatika Indoneziyskogo Yazika (Tata Bahasa Indonesia)*, yang diciptakan oleh pengarang yang sama dalam bahasa Rusia dengan suntingan Arakin. Berikut ini saya memakai singkatan Nahu '72 dan Nahu '91. Nahu '91 terbit dalam Seri ILDEP yang terkenal. Boleh dibanggakan bahwa bersama dengan nama redaktur Seri ILDEP W.A.L. Stokhof kita lihat sebagai penasihat nama-nama ahli bahasa Indonesia yang terkemuka A.M. Moeliono, Amran Halim, A. Teeuw, dan H. Steinhauer.

Kedua buku tersebut bersama dengan banyak karya yang lain merupakan hasil penelitian bahasa Indonesia di negeri kami. Pertama-tama saya uraikan dengan pendek mengenai penyelidikan bahasa Indonesia di Moskow dan Leningrad yang mendahului penyusunan Nahu '72, sedangkan uraian yang lebih lengkap terdapat di Nahu '91.

Pelajaran bahasa Melayu bukan merupakan jurusan tradisional dalam ilmu bahasa di Rusia sebelum tahun 1917, apalagi di Republik Soviet lainnya. Pada masa itu bahasa Melayu hanya dikenal dalam bentuk contoh-contoh atau kutipan kecil yang diambil dari sumber-sumber Eropa. Ada seorang diplomat Rusia di Betawi, M. Bakunin (1849—1913), yang menulis buku tentang Hindia Belanda dengan lampiran sebuah daftar kata Melayu yang pendek. Bahan-bahan Melayu itu digunakan oleh seorang pakar bahasa Timur, N. Nevskiy (1892—1945), yang membandingkannya dengan bahasa Tsou yang diselidikinya di Taiwan. Pakar wanita L.A. Merwart yang kemudian

menjadi guru pertama kami pada tahun dua puluhan mulai mempelajari bahasa Melayu.

Baru pada tahun 1945, ketika Republik Indonesia berdiri, atas inisiatif dan usaha-usaha L. Merwart bahasa Melayu yang nanti disebut bahasa Indonesia mulai diajarkan pada sebuah perguruan tinggi di Moskow dilanjutkan dengan yang kedua, yang ketiga, sesudahnya lagi di Universitas kota Leningrad. Pada tahun 1954 di Jakarta diadakan Pekan Raya Ekonomi Internasional dan di Paviliun Soviet para pengunjung mendapat penerangan dalam bahasa Indonesia dari 4 orang pemuda dan pemudi Rusia.

Makin berkembang berbagai hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet, makin banyak juga mahasiswa yang mempelajari bahasa, sejarah, dan sastra negara ini yang sangat menarik simpati rakyat Soviet. Sampai tahun ini di Moskow dan Leningrad tidak kurang dari 40 tesis sarjana dipromosi mengenai bahasa dan kesusastraan di Indonesia dan Malaysia, 5 orang telah mendapat gelar ilmiah Ph.D. dalam bidang ini juga (L. Zubkova, A. Ogloblin, V. Braginskiy, B. Parnikel, dan N. Alieva).

Daftar lengkap karangan sarjana Sovyet mengenai bahasa Indonesia dan Malaysia disusun oleh Yu Sirk dan dilampirkan pada Nahu '91. Daftar itu mengandung 268 titel buku dan makalah yang diciptakan oleh 62 orang dan diterbitkan antara tahun 1953—1988.

Dengan tak ragu-ragu dapat saya tegaskan bahwa walaupun negeri kami dalam keadaan sulit, di antara orang muda Rusia, minat kaum muda Rusia untuk meneliti ilmu-ilmu mengenai Indonesia dan Nusantara masih tetap ada. Ada sebagian yang telah tamat pelajaran tinggi jurusan Indonesia dan ingin sekali melanjutkan studinya secara akademik asal ada kemungkinan dan lowongan saja. Jadi, saya yakin bahwa pada abad ke-21, pemuda dan pemudi Rusia yang berbakat akan terus menyumbang bakat dan kepekerjaannya dalam studi keindonesiaan. Telah didirikan suatu lembaga, Nusantara namanya, yang mempelajari bahasa dan kebudayaan dunia Nusantara (termasuk Semenanjung dan Filipina) dengan mengadakan proyek-proyek penelitian, diskusi dan konferensi, penerbitan karya dan karangan dan berhubungan dengan rekan-rekan di luar negeri.

2. Penelitian Bahasa Indonesia di Rusia

Pada tahun 1960 sebuah deskripsi pendek (60 halaman) dari bahasa Indonesia terbit, karangan A. Teselkin dan N. Alieva. Beberapa kamus kecil Indonesia-Rusia dan Rusia-Indonesia terbit juga, dan pada tahun 1961 disusun sebuah kamus yang besar (45 ribu kata). Kamus itu dilampiri sebuah deskripsi bahasa Indonesia yang singkat karangan A. Teselkin. Dua deskripsi pendek itu tentu tidak mencukupi karena perhatian pada bahasa Indonesia di negeri kami waktu itu sungguh besar, baik antara mereka yang pekerjaannya berhubungan dengan Indonesia maupun antara ahli ilmu bahasa umum. Dengan itu, keperluan untuk mencipta suatu buku tata bahasa yang agak lengkap pun timbul lagi.

Institut Studi Oriental, yakni salah satu lembaga dalam rangka Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet, adalah tempat beberapa sarjana muda bersatu di bawah pimpinan V. Arakin, (pakar bahasa Timur dan Barat). Sebuah rancangan buku disusun dan dibincangkan oleh ahli-ahli linguistik dari lembaga tersebut. Dua sarjana muda –Alieva dan Sirk–diserahi untuk menulis bagian terbesar dalam buku itu. Pengarang keempat A. Ogloblin, guru bahasa Indonesia di Universitas Leningrad, rela menulis bagian tentang fonetik dan fonologi.

Pekerjaan yang kami hadapi itu bukan pekerjaan yang mudah karena itu khusus diperuntukkan bagi pembaca dengan latar belakang bahasa Rusia serta pengetahuan sekolah dan perguruan tinggi Rusia juga. Buku-buku mengenai bahasa Melayu dan Indonesia telah pernah diterbitkan di Eropa dan di Indonesia kami pelajari dengan saksama, tetapi kami bertujuan akan menciptakan deskripsi baru dengan berdasarkan teori ilmu bahasa yang ada di negeri kami. Apa saja yang saya maksudkan dengan ini? Saya mencoba menguraikannya dengan pendek.

Negara Uni Soviet adalah negara yang jumlah suku bangsanya melebihi seratus, masing-masing dengan bahasanya. Bagian terbesar kawasan Soviet terletak di Benua Asia. Bahasa-bahasanya ada yang masuk rumpun Indo-Eropa, Turki, Mongol, Paleoasiatik, Sinitik, Finno-Ugrik, dan Kaukasus. Pakar-pakar linguistik Soviet mempunyai dasar pengalaman sangat luas untuk meneliti dan membandingkan berbagai bahasa. Konsepsi-konsepsi tipologi dibangkitkan dan dikembangkan dengan hasil baik, sedangkan dasar-dasar teori dan metodologi linguistik Eropa dan Amerika dipelajari, dipergunakan, dan dikembangkan pula.

Konsepsi tipologi linguistik di negeri kami berkaitan dengan ide-ide yang sejak dahulu berdominasi dalam pikiran pakar-pakar Orientalistik Rusia yang secara bulat menyangkal dan mengecam keras ide-ide rasialisme. Sebagai salah satu kesimpulan rasialisme, kami anggap penyenaian bahasa-bahasa atas jenis yang maju berkembang dan jenis yang primitif kurang maju. Saya mempelajari beberapa bahasa primitif sehingga yakinlah saya sepenuhnya tentang ketidakbenaran konsepsi tersebut. Meskipun bahasa Rusia sendiri termasuk bahasa yang kaya bentuk morfologinya, bagi tipologi linguistik terdapat variasi morfologi, derajat-derajat sintatisme dan analitisme. Penggunaan bahasa adalah untuk komunikasi antarmanusia. Tujuannya adalah supaya pikiran manusia mendapat pernyataan yang sepadan. Dalam komunikasi tiap-tiap bahasa memenuhi tujuan ini dengan alat, cara, dan upayanya masing-masing.

Satu lagi dasar ilmu bahasa Soviet menjadi nyata, yaitu minat utama kepada isi pikiran dan semantik bahasa, dan bukan semata-mata kepada soal bentuk-bentukan yang formal. Walaupun perhatian utama penelitian pada semantik, tidak berarti minat kepada materi bahasa, segi-segi formal berkurang. Ilmu tata bahasa menyatukan kedua-duanya.

Ilmu bahasa Rusia memperhatikan perimbangan antara bidang lexis dan bidang gramatik suatu bahasa. Perimbangan ini mempunyai wujud khas dalam penelitian, yaitu dengan adanya perangkat pembentuk leksem baru dan perubahan bentuk morfologi leksem sesuai dengan pola infleksi gramatik. Yang berkenaan dengan itu

ialah konsep paradigma morfologi bersama dengan konsep dasar kata. Dasar kata mendukung makna leksikal seluruh kata, sedangkan semua bentuk dalam sebuah paradigma punya makna leksikal yang sama, tetapi makna gramatikal yang berbeda.

Pada bahasa Indonesia hanya dalam morfologi verbal saja kita mengetahui betul-betul batas antara peringkat leksis dan peringkat gramatik, sedangkan perbandingan dengan bahasa Rusia memperlihatkan bahwa pada umumnya sifat perimbangan antara kedua peringkat tadi berbeda dalam kedua bahasa kita. Tiadanya garis pemisah yang jelas antara peringkat leksis dan gramatik merupakan ciri penting pada sistem imbuhan bahasa Indonesia yang menentukan beberapa sifat dan corak dari susunan bahasa ini. Dari segi lain, ciri ini bukan hanya khas untuk bahasa Indonesia, melainkan untuk bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Hal tersebut mendorong saya untuk menyimpulkan tentang adanya tipe perimbuhan aglutinasi istimewa, yakni tipe aglutinasi Indonesia, di samping aglutinasi cara Turki, misalnya. Berkenaan dengan masalah imbuhan perlu ditambahkan bahwa berdasarkan analisis proses-proses imbuhan itu kita dapat alasan penting untuk mengklasifikasi morfem-morfem akar pada beberapa jenis.

Adapun mengenai hal-hwal kata kerja perlu juga ditegaskan bahwa dalam Nahu '72 golongan-golongan kata kerja transitif, kata kerja tak transitif dan kata sifat ketiganya ditakrifkan sebagai tiga subkelas dalam kelas kata predikatif yang berposisi dengan kelas kata nominal. Penjenisan ini adalah hasil penelitian pelbagai bahasa analitis Asia Timur dan Tenggara oleh ilmuwan Soviet. Sirk menulis bagian penjenisan kata dan saya menulis bagian kata kerja dan kata sifat dan menganggap penjenisan ini sangat sesuai dengan susunan tata bahasa Indonesia.

3. Simpulan

Seperti diketahui ilmu bahasa tradisional di Eropa selalu lebih banyak memperhatikan morfologi daripada sintaksis. Akan tetapi, pakar-pakar di Rusia dan eks-Uni Soviet yang mempelajari bahasa-bahasa Timur yang analitis sudah pada tahun 50-an cukup menyadari pentingnya peranan sintaksis dalam penelitian susunan bahasa analitis. Dalam Nahu '72 dan Nahu '91 soal-soal sintaksis diperhatikan. Ada uraian terperinci mengenai pola kelompok kata oleh V. Arakin ditambah uraian tentang jenis-jenis satuan sintaksis, pola kalimat sederhana serta jenis-jenis komunikatif kalimat (oleh N. Alieva) dan uraian kalimat majemuk (oleh Yu. Sirk). Berkenaan dengan hal pola kalimat, terdapat perbedaan dasar antara bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa Eropa yang memiliki satu pola utama saja, yakni kalimat verbal, (*link-verb*). Masalah susunan sintaksis kami uraikan dalam teks Nahu '91. Ilmu linguistik umum mempunyai beberapa aliran dan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan pendekatan, misalnya, tipologi kuantitatif, *text grammar*, *case grammar*, dan tipologi urutan kata.

Satu lingkungan soal yang terutama saya perhatikan itu berkaitan dengan susunan kalimat yang diteliti dari sudut pandangan yang biasanya kurang diminati, yakni

peranan sarana-sarana analitis. Saya pernah mempunyai sejumlah bahasa analitis, seperti bahasa-bahasa Polinesia—dari satu segi, dan bahasa-bahasa pelbagai rumpun di Indo-cina, termasuk Cam yang serumpun dengan bahasa Indonesia—dari segi lain. Saya mendapat simpulan bahwa dapat dikesan dua tipe analitisme, tipe Polinesia dan tipe Indocina. Dapat ditegaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki sarana-sarana analitis yang sepadan dengan kedua tipe tersebut.

Dalam meneliti peranan sarana-sarana analitis dan sintetis, saya menggunakan metode tipologi kuantitatif yang dasar-dasarnya diciptakan oleh J. Greenberg, dengan mengubahnya sedikit. Angka indeks saya bandingkan pada pelbagai bahasa (misalnya, Cam, Maori). Yang menarik perhatian saya—dan mungkin sekali perhatian rekan lain—adalah dekatnya angka yang diterima untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Indeks sintetisme menurut Greenberg - $M/W = 1.42$ untuk kedua bahasa. Indeks sarana analitis dalam menyatakan arti gramatikal = 0.38 bahasa Indonesia dan 0.39 bahasa Inggris (ini menurut cara hitung saya).

Dari sudut sosiolinguistik antara kedua bahasa ini tentu ada persamaan: keduanya menjadi bahasa perantara. Sifat-sifat tipologi bahasa Indonesia, seperti pada bahasa Melayu berperan sebagai bahasa perantara dan bahasa kesatuan nasional.

Kembali kepada susunan dalam bahasa Indonesia, dari sudut perkaitan antara analitisme dan struktur sintaksis, satu masalah lagi yang masih kurang diberi perhatian, yaitu kepredikatifan kalimat, yakni referensi antara isi kalimat terhadap kenyataan objektif yang dicerminkannya. Kepredikatifan kalimat yang meliputi bidang makna-makna temporal - aspektual - modal dalam Nahu '91 diberi uraian panjang-lebar dengan pendekatan baru. Penelitian pada satuan-satuan sintaksis yang analitis dipakai untuk menyatakan makna-makna tersebut. Penakrifan kategori sintaksis waktu sebagai kategori gramatikal waktu relatif.

Bersamaan dengan itu, saya mencoba mempelajari kategori gramatikal dalam kalimat itu dalam hubungannya dengan tipe susunan teks. Saya ingin melanjutkan studi saya pada jurusan ini, tetapi saya belum tahu bagaimana pendekatan-pendekatan itu ditanggapi oleh rekan-rekan saya di sini—di samping kenyataan yang cukup penting sendiri, yaitu diterbitkannya buku kami di Indonesia.

Untuk bernafas perlu hawa. Hawa bahasa Indonesia ada di sini, di Indonesia, dan saya sangat berterima kasih kepada Panitia Penyelenggara yang telah memberikan kesempatan untuk mengambil napas di Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Penelitian Tata Bahasa Indonesia dalam Konteks Ilmu Bahasa Rusia
Pemakalah : Natalia F. Alieva
Pemandu : Moh. Tadjuddin
Pencatat : Cormentya Sitanggang
Djoemingan K.P.

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Ny. Sugira Wahid, IKIP Ujung Pandang

- a. Apa yang melatarbelakangi keinginan Ibu mengadakan penelitian dalam bidang tata bahasa ini?
- b. Apakah Ibu dapat menerangkan konsep/teori yang digunakan dalam melakukan penelitian bidang tata bahasa ini? Apa tujuan dan manfaatnya?
- c. Apakah Ibu memisahkan antara penelitian morfologi dan penelitian bidang fonologi atau hanya bidang sintaksis saja?

Jawaban:

- a. 1) Yang melatarbelakangi keinginan itu adalah karena roda zaman yang terus berubah.
2) Suka mempelajari bahasa asing, pelajaran bahasa Indonesia, termasuk pelajaran yang baru di Soviet sehingga saya sangat senang mempelajarinya
3) Minat studi terhadap negara-negara yang oriental masih banyak sekali dalam masyarakat Soviet
- b. Tujuan penelitian adalah seperti tujuan ilmu semuanya untuk mengetahui tentang alam sekitarnya. Penelitian tentang bahasa Indonesia yaitu keinginan saya mengetahui struktur bahasa Indonesia lebih mendalam. Semakin lama kita belajar, semakin dalam kita ingin mengetahui strukturnya. Dasar-dasar linguistik Soviet untuk pembaca-pembaca Soviet cukup maju dalam pengetahuan sintaksis dan mereka mempunyai pendekatan-pendekatan tersendiri terhadap sintaksis, dan tata bahasa.
- c. Morfologi banyak diuraikan dalam penelitian ini dan pelajaran tentang kata verbal seperti transitif dan intransitif, sufiks *-i* dan *-kan* adalah pangkal pelajaran saya tentang tata bahasa.

2. **Pertanyaan:** Mansoer Pateda, FKIP Universitas Sam Ratulangi

- a. Berapa lama seorang mahasiswa bisa sampai tuntas mempelajari bahasa Indonesia di Universitas dan kalau dia disuruh ke Indonesia berapa lama dia

- bisa tuntas, orang Korea hanya dalam waktu tiga bulan bisa tuntas menguasai bahasa Indonesia (tanpa pendidikan formal), bagaimana mengenai orang Rusia.
- b. Selama Ibu mengadakan penulisan tentang bahasa Indonesia apakah kesulitan utama yang Ibu hadapi, apakah dalam kelas kata kerja, misalnya?
 - c. Apakah ada penerjemahan dari tata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Rusia untuk memudahkan orang Rusia mempelajari bahasa Indonesia.

Jawaban:

- a. Waktu untuk mempelajari bahasa ada lima tahun sebelum itu tidak dianggap tamat dalam pelajarannya. Tidak selalu dalam tiga bulan bisa tuntas menguasai bahasa Indonesia ada juga yang setahun sudah tuntas belajar bahasa Indonesia dan mereka tidak perlu ke Indonesia cukup mempelajari teks-teks bahasa Indonesia.
 - b. Penerjemahan dari tata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Rusia belum ada yang diterbitkan hanya karya-karya orang Rusia di sana. Di beberapa institut dipelajari bahasa Indonesia, di Universitas Leningrad ada jurusan bahasa Indonesia dan sastra Jawa.
3. **Pertanyaan:** H. St. Hawang Hanafie, IKIP Ujung Pandang
- a. Dari mana sumber data yang dipakai dalam menulis penelitian itu, apakah sumber lisan atau tertulis, dalam penelitian bahasa Bugis atau bahasa-bahasa Nusantara?
 - b. Apakah Sirk itu teman baik Ibu karena dalam makalah Ibu nama itu banyak disebut-sebut. Dia menulis dalam satu tulisannya, *Bugisnes Language*, 1984. Dalam buku itu, banyak ditemukan contoh-contoh yang tidak ada lagi dalam bahasa Bugis, juga menyangkut klitika banyak dijelaskan yang kelihatannya tidak berterima di dalam bahasa Bugis. Itulah sebabnya, mengapa saya menanyakan sumber data yang digunakan dalam menganalisis bahasa Bugis.

Jawaban:

- a. Umumnya data yang diperoleh berasal dari buku-buku sastra kesusastraan Indonesia dari pengarang-pengarang yang terkenal dan yang diakui kemahirannya di Indonesia. Linguis Rusia biasanya bekerja dengan menuliskan data pada kartu-kartu. Tiap-tiap gejala bahasa dapat dilihat pada kartu dan disesuaikan/dibenarkan pada tata bahasa yang ada waktu itu. Misalnya, buku yang ditulis C.A.Mees, atau Sutan M. Zein. Kalau ada penyimpangan dalam kartu-kartu itu terhadap kaidah-kaidah tata bahasa akan disebutkan juga. Misalnya, struktur kalimat Abdul Muis sering menggunakan prefiks kosong atau zero prefiks dan dengan pronomina persona ketiga, misalnya yang pernah

orang itu tuliskan. Bentuk-bentuk struktur seperti ini sering juga dipakai penulis-penulis Indonesia yang terkenal. Mungkin saja struktur ini kelak mempengaruhi struktur bahasa Indonesia.

- b. Tentang Sirk, dia bukan linguist, dia mempelajari bahasa Indonesia dari buku Pengetahuannya tentang bahasa Indonesia dan Austronesia luas sekali.

PERANAN PSIKOLOGI DALAM PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA

Fuad Hassan
Universitas Indonesia

1. Penguasaan bahasa dan kemampuan berbahasa adalah manusiawi; keduanya terwujud berangsur-angsur dalam perkembangan manusia. Sejak menjelma kesanggupan manusia sekadar membuat suara hingga suatu saat suara itu berubah menjadi kata dengan rujukan yang pasti, yang selanjutnya dapat dirangkai kalimat dengan muatan arti tertentu, dapat kita saksikan suatu peristiwa yang khas manusiawi. Suara-suara anak bayi memang ada yang sudah dapat menjadi isyarat tentang keadaannya (sakit, senang, nyaman, dsb.), dan isyarat itu dapat membangkitkan sambutan yang sepadan dari orang di sekelilingnya. Namun, suara-suara tersebut tidak lebih dari sekadar pertanda yang mengungkapkan keadaan tertentu; suara-suara itu bersifat simtomatis belaka. Lain halnya manakala pada anak mulai menggejala kesanggupannya menggunakan kata untuk menunjuk pada sesuatu hal, apalagi menyusun kalimat guna menjalin hubungan timbal-balik dengan orang lain. Kalau si bayi melalui berbagai suara yang dihasilkannya semata-mata mengungkapkan "keadaannya" (*zustandlich*), anak yang mulai mengerti kata dan menyusun kalimat pada hakikatnya dapat membuat pernyataan tentang sesuatu di luar dirinya (*gegenstandlich*). Demikianlah peristiwa awal yang teramati dalam perkembangan manusia sebagai makhluk berbahasa.
2. Sebagian besar bahasa yang dikuasai seseorang bermula dengan himpunan kata-kata yang artinya dipahami sama oleh sesama pengguna bahasa itu. Penguasaan kata-kata itu merupakan proses memis yang selanjutnya memungkinkan reproduksi dengan bunyi dan arti yang tetap; ini berlaku bagi sebagian besar kata-kata dalam bahasa yang kita pergunakan, dan dalam hal ini yang kita manfaatkan ialah kekayaan kosakata. Akan tetapi, bahasa yang hidup bukanlah sekadar pengejawantahan proses reproduksi belaka; sebagai gejala manusiawi, bahasa juga menjalani proses evolusi dan dalam proses tersebut—lebih dari sekadar berciri reproduksi—setiap bahasa yang hidup menunjukkan ciri produktif dan konstruktif. Dalam evolusinya itu, bahasa yang hidup sebagai sarana ujaran niscaya makin diperkaya dan dipercanggih, tetapi tidak mustahil juga mengalami proses pemiskinan dan pencemaran; menetapkan kaidah untuk menjadi pedoman bagi pembuatan batas yang jelas antara berbagai kemungkinan termaksud tidaklah mudah. Diperkaya dan dipercanggihnya suatu bahasa dalam perkembangannya

tentu erat kaitannya dengan lingkup wawasan dan kepentingan dalam penggunaannya, baik secara lisan maupun tulisan.

3. Bahasa yang hidup terutama ditentukan oleh fungsinya sebagai medium komunikasi. Oleh karena itu, segar atau layunya suatu bahasa sangat dipengaruhi oleh nilai gunanya sebagai sarana ujaran. Bahasa bertahan hidup karena nilai gunanya sebagai sarana ujaran, tetapi dalam wujud ujaran ini bahasa seringkali dipengaruhi oleh berbagai kecenderungan dalam hubungan interpersonal dan interaksi sosial. Kedua hal ini seolah-olah menampilkan berbagai tuntutan--atau tuntunan--yang harus dipenuhi untuk memelihara kepantasan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehingga berbagai ungkapan dalam ujaran terkendali oleh batasan normatif. Dalam memenuhi tuntutan kepantasan sosial itu, penggunaan bahasa memang terkendali oleh batasan normatif, tetapi tidak merasa terkendala oleh batasan itu. Sebaliknya, dipenuhinya tuntutan kepantasan sosial mungkin justru memberikan rasa nyaman (*comfort*) pada seseorang dalam pergaulan dengan siapa saja yang menjadi mitra bicaranya. Gejala ini kiranya menarik untuk diperhatikan para pakar dan pembina bahasa Indonesia karena dalam kepesatan perkembangannya bahasa Indonesia pun dalam penggunaannya tidak luput dari pengaruh kecenderungan tersebut.
4. Bahasa adalah sarana dialog, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Selalu dalam kesadaran kita berlangsung proses berbahasa, kendatipun kita tidak bersuara. Selama kita sadar proses bahasa menyertai pengamatan dan penghayatan kita; kita mengulas, mengurai, menilai, mempertanyakan, menyimpulkan, memutuskan, berpikir, berkhayal, bersemadi, berdoa, dan sebagainya secara berbahasa, dengan bersuara atau tanpa bersuara. Tepatlah kalau bahasa dinyatakan sebagai sarana dialog; dan jika bahasa menjadi penyerta yang manunggal dengan kesadaran manusia, tidak keliru pula kiranya kita menyatakan bahwa manusia adalah dialog. Pada analisis akhirnya, bahasa sesungguhnya merupakan pengejawantahan yang khas dalam eksistensi manusia dan sebagai kelanjutannya dapat disimpulkan bahwa evolusi bahasa dan manusia berjalan seiring. Dalam hubungan ini menarik sekali untuk menyelidiki sejauh mana perkembangan bahasa ada kesesuaiannya dengan teori rekapitulasi sebagaimana dicanangkan oleh E. Haeckel, yaitu "ontogenesis merupakan rekapitulasi filogenesis"; kalau teori ini mengandung kebenaran, telaah tentang evolusi bahasa dapat diamati--dalam bentuk ringkasnya--melalui perkembangan bahasa anak dalam proses menuju kedewasaannya.
5. Dalam ikhtiar kita untuk membina bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional perlu dipilih cara yang dapat mencapai sebanyak mungkin khalayak sasaran (*target audience*). Untuk keperluan itu, perlu diperhatikan bahasa yang dipergunakan oleh para tenaga pengajar yang secara keseluruhan bergaul dengan sejumlah besar populasi pengguna bahasa--para siswa dan mahasiswa--serta bahasa yang disajikan melalui media massa yang juga sanggup menjangkau khalayak yang amat luas. Keduanya--para pengajar dan media massa--sangat mudah meninggalkan jejaknya

agar terbentuk kebiasaan berbahasa yang baik dan benar serta jelas dan lugas; keduanya berperan sebagai sumber pengaruh atas perkembangan bahasa. Dalam hubungan ini hendaknya para pakar bahasa tidak menunda teguran atau kritik terhadap ketimpangan dan kesembarangan berbahasa; penundaan untuk menegur tidak mustahil bisa berakibat mantapnya kebiasaan yang keliru dalam berbahasa, dan akhirnya apa yang pada mulanya tampak tampil "luar biasa" lambat laun diterima sebagai hal yang "biasa" saja. Dalam kaitan ini pakar bahasa kita dapat berperan sebagai pembina bahasa Indonesia yang tidak tertinggal oleh pesatnya laju perkembangan bahasa Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Peranan Psikologi dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra
Pemakalah : Fuad Hassan
Pemandu : Boen S. Oemarjati
Pencatat : Puji Santosa
Elmi Wiarti

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Romlah Suhadi, IKIP Bandung

Bagaimanakah peranan ibu dalam memperkenalkan bahasa kepada anaknya ketika masih bayi. Padahal, ibu masa kini waktunya banyak tersita oleh pekerjaan di luar rumah? Bukankah ibu orang pertama yang memperkenalkan bahasa kepada anak?

Jawaban:

Memang ibu merupakan orang pertama yang memperkenalkan bahasa kepada anak. Akan tetapi, hal itu hanya sampai pada stadium monosilabik. Ketika itu anak sedang menggunakan bahasa sebagai simptom (tanda-tanda atau isyarat). Perkembangan selanjutnya bergantung pada lingkungan yang mempengaruhinya sebagai sumber lain dan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu, misalnya lingkungan, media massa elektronik, guru, dan teman. Hal-hal tersebut meninggalkan bekas atau kesan bahasa pada anak. Akibatnya, pemakaian bahasa yang keliru oleh lingkungan tersebut menimbulkan pemakaian yang keliru pula pada anak, misalnya kata *emosi* diartikan sebagai *marah*; *isu* diartikan sebagai *kabarnya angin*. Kekeliruan semacam itu tidak boleh dibiarkan para ahli bahasa. Untuk itu, perlu ada teguran dan arahan kepada mereka yang menggunakan bahasa dengan keliru.

2. **Pertanyaan:** Diemron Ichsan, Universitas Sriwijaya, Palembang

Apakah ada proses historis dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sering memunculkan istilah asing?

Jawaban:

Dalam hal ini prinsip yang harus dipegang adalah sejauh istilah atau kata asing itu dapat digunakan dalam bahasa Indonesia. Hal itu tidak haram dalam

bahasa Indonesia karena saya tidak menganut paham *behaviourisme*. Misalnya, kata *produktif* tidak ada salahnya dipakai, demikian juga kata *komunikasi* dan *universal*. Namun, *produk* diartikan *hasil*, *produktif* diartikan sebagai *keberhasilan* merupakan kerancuan. Pegangan saya, selama dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, gunakanlah bahasa Indonesia, kecuali keadaan mengharuskan istilah asing. Kata *komunikasi* dan *universal* tersebut lebih memperkaya bahasa Indonesia karena konsep *universal* lebih mudah dipahami daripada "seantero jagat."

3. **Pertanyaan:** Sri Ummiaty Haroen, IKIP Muhammadiyah, Yogyakarta

Bagaimanakah peran psikologi dalam sastra? Apakah psikologi belum berperan dalam apresiasi sastra sehingga terjadi penafsiran yang berbeda-beda?

Jawaban:

Sastra merupakan wujud karya seni, suatu kreativitas artistik. Materi sastra adalah bahasa atau kata-kata. Setiap karya seni mempunyai dua segi dasar, yaitu materi dan bentuk. Sastra yang medianya bahasa diciptakan sangat subjektif sehingga kebebasan seniman yang menyimpang dari batas-batas yang objektif lebih besar dari kita yang berbicara sebagai pengguna bahasa biasa. Ada seorang begitu hanyut menghayati pembacaan puisi, sedangkan yang lain tidak dapat menghayati, hal itu wajar-wajar saja. Untuk menghayati karya seni, diperlukan kepekaan tersendiri. Perbedaan penghayatan itu terjadi bukan karena kesalahan bahasa.

4. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Bagaimana tokoh idola mempengaruhi anak? Padahal, tokoh itu menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti anak?

Jawaban:

Jika yang dimaksud tokoh idola itu adalah tokoh identifikasi (dalam istilah psikologi), tidak sama dengan tokoh yang disanjung. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki tokoh identifikasi ditekan atau dianggap tidak ada oleh orang yang "menyanjungnya". Tokoh itu dipilih berdasarkan anggapan bahwa tokoh tersebut bersih dari kekurangan sehingga yang menonjol hanya kelebihanannya saja. Kemudian, tokoh idola itu dianggap sebagai manusia yang sempurna. Jika orang sudah mengidolakan sang tokoh sehingga lupa akan kekurangannya, hal itu bisa dibandingkan dengan orang yang sedang jatuh cinta. Segala kekurangannya juga dianggap baik. Seperti kata istilah *love is blind*, cinta itu buta. Tokoh identifikasi atau tokoh yang disanjung pada suatu saat ditonjolkan kedudukannya, dalam pandangan kita bukan berarti tokoh itu bebas dari kekurangannya. Akan tetapi,

kekurangannya sengaja tidak dilihat. Ketika tokoh itu disanjung lebih dari yang lain, ada kecenderungan untuk meniru.

Ada gejala aneh bahwa semakin tokoh itu disanjung, tidak semua perbuatan atau ciri khas yang dimilikinya ditiru. Misalnya, kumis Hitler tidak seorang pun warga Jerman berani meniru kumis Hitler. Tampaknya itu merupakan suatu paradoks. Hal itu aneh, tetapi menarik.

STRATEGI PEMASYARAKATAN HASIL PENGEMBANGAN BAHASA: BEBERAPA POKOK PIKIRAN

Hans Lapoliwa

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

I. Pengantar

Pengembangan bahasa, di dalam sosiolinguistik, diartikan sebagai kegiatan kodifikasi norma yang dinyatakan berlaku untuk tata ejaan, tata bahasa, kosakata, dan norma berbagai ragam fungsional bahasa yang dimekarkan sehingga sandi bahasa itu dapat memenuhi syarat kepadaan yang dituntut oleh berbagai jenis wacana (periksa Moeliono, 1981:27). Dalam bahasa yang lebih sederhana, pengembangan bahasa dapat dirumuskan sebagai upaya untuk menyempurnakan bahasa agar dapat menjadi sarana ungkap yang andal. Hasil usaha pengembangan bahasa itu dapat berupa pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, buku tata bahasa, kamus-kamus, daftar istilah, dan pedoman ragam bahasa. Usaha pengembangan bahasa itu dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, ataupun oleh perseorangan.

Sejarah pengembangan bahasa Indonesia sudah cukup panjang. Setelah bahasa Melayu dikukuhkan sebagai bahasa persatuan dengan nama *bahasa Indonesia* pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan segera melakukan upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar pada waktunya nanti, kalau negara Indonesia sudah terbentuk, bahasa itu dapat menggantikan kedudukan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi negara Indonesia merdeka. Dalam hubungan ini, patut dicatat usaha pengembangan bahasa (dan sastra) Indonesia yang dilakukan melalui majalah *Pujangga Baru* yang terbit pertama pada tahun 1933.

Sejak awal tokoh-tokoh nasional telah menyadari sepenuhnya bahwa masalah bahasa Indonesia itu perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, melalui Kongres Bahasa Indonesia I yang diselenggarakan pada tanggal 25–28 Juni 1938 di Surakarta telah disepakati dasar-dasar dan garis besar pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Dasar dan garis besar pembinaan dan pengembangan bahasa itu dipertegas dan disempurnakan pada Kongres Bahasa Indonesia II yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober–2 November 1954 di Medan.

Hasil pengembangan bahasa Indonesia yang dicapai sejak Panitia Penyempurnaan Bahasa Indonesia tahun 1942 di zaman pendudukan Jepang hingga Pusat Pembinaan

dan Pengembangan Bahasa dewasa ini—badan yang khusus diberi tugas untuk keperluan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia—telah cukup banyak. Belum lagi kalau ditambah dengan hasil pengembangan bahasa yang dilakukan oleh badan-badan lain dan perseorangan.

Usaha-usaha untuk memasyarakatkan hasil-hasil itu telah cukup banyak, baik oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maupun oleh instansi lain atau perseorangan dengan mempergunakan berbagai sarana seperti penyuluhan, penataran, penerbitan, kampanye, dan, tentu saja, pengajaran di sekolah, dan melalui berbagai saluran seperti media massa cetak dan elektronik, pertemuan kebahasaan, surat, dan telepon. Meskipun begitu, masih terasa bahwa hasil-hasil pengembangan bahasa itu masih belum memasyarakat benar. Sistem ejaan yang berlaku sekarang sudah berusia lebih dari 20 tahun, tetapi di sana-sini masih kita temukan kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia. Walaupun telah ada ratusan ribu istilah yang diciptakan sejak Komisi Istilah (1952–1966) hingga Mabbim (1972–sekarang), masih terdapat keragaman dalam pemakaian istilah dalam buku-buku teks dan pelajaran. Puluhan buku tata bahasa Indonesia telah diterbitkan mulai dari *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia* (1949, 1950) hingga *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (1988), tetapi di sana-sini masih sering terdengar atau terbaca kalimat-kalimat yang janggal.

Berbagai penyimpangan dalam pemakaian bahasa Indonesia dari norma-norma yang telah ditetapkan (dikodifikasi) itu dapat terjadi karena ketidaktahuan akan norma-norma tersebut atau karena penolakan terhadap norma-norma tersebut. Penyimpangan karena ketidaktahuan akan norma relatif mudah mengatasinya. Tetapi, penyimpangan karena alasan kedua memerlukan strategi tersendiri untuk mengatasinya. Dalam kaitan ini, dapat dicatat laporan penelitian yang dilakukan oleh Rubin pada tahun 1969 mengenai penggunaan istilah di Indonesia. Dari 24 penyusun buku pelajaran kimia hanya 8 yang mengenal istilah yang dianjurkan Lembaga Bahasa Nasional, dan di antara 8 itu hanya 5 penulis yang memakainya. Di antara 16 penyusun buku tata bahasa hanya 9 yang mengenal istilah tata bahasa yang dianjurkan dan dari 9 itu hanya 8 penulis yang mau memakainya (lihat Moeliono, 1981:28). Lebih lanjut, Lapoliwa dkk. (1991) melaporkan hasil evaluasi pemakaian istilah dalam 29 buku pelajaran dan teks bahwa hanya 70% istilah yang dianjurkan yang digunakan dalam buku-buku itu. Sayang tidak diselidiki lebih jauh apakah perbedaan 30% istilah itu terjadi karena ketidaktahuan atau karena penolakan oleh para penulis.

Dengan memperhitungkan kedua alasan utama yang menyebabkan penyimpangan dalam pemakaian bahasa Indonesia dari norma-norma yang telah dikodifikasi melalui usaha pengembangan bahasa Indonesia selama ini, berikut ini akan dikemukakan beberapa pokok pikiran mengenai strategi atau cara yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia. Apa yang dikemukakan di bawah ini bukanlah hal baru, tetapi dirasakan masih perlu diupayakan demi keberhasilan pengembangan bahasa Indonesia.

2. Peningkatan Kerja Sama

Usaha pengembangan bahasa bukanlah monopoli pribadi atau lembaga tertentu. Akan tetapi, demi keefektifan usaha-usaha tersebut perlulah ada suatu koordinasi agar proses pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia ini lebih cepat. Karena itu, perlu diupayakan jalinan kerja sama di antara para perencana bahasa, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga. Kerja sama kebahasaan yang dilakukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di dalam perencanaan bahasa selama ini tampak masih sangat terbatas. Bahkan, ada kesan seolah-olah kerja sama yang dijalin oleh Pusat Bahasa itu menjurus kepada kerja sama dengan perseorangan. Hal ini tentu sangat menguntungkan dilihat dari kelancaran kerja sama, tetapi dilihat dari sisi pemasyarakatan hasilnya tentulah banyak kelemahannya. Orang atau lembaga yang tidak terlibat dalam kegiatan pengembangan bahasa itu cenderung merasa tidak perlu mematuhi atau memasyarakatkan hasil pengembangan bahasa tersebut.

Kerja sama itu terasa lebih penting lagi kalau sudah sampai pada tahap usaha pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa. Para perencana bahasa dapat saja asyik dengan penciptaan norma untuk penyempurnaan bahasa, tetapi itu semua akan sia-sia jika pemakai bahasa tidak menerapkannya dalam berbahasa. Untuk keberhasilan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa tersebut, perlulah Pusat Bahasa sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab mengadakan dan melakukan koordinasi perencanaan bahasa, perlu membina kerja sama yang harmonis dengan lembaga-lembaga strategis untuk pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa Indonesia. Di antara lembaga-lembaga yang strategis itu perlu dicatat lembaga yang mengurus sistem persekolahan, lembaga yang membawahi media massa, lembaga keagamaan, serta lembaga yang menangani pariwisata. Sistem persekolahan merupakan saluran yang paling penting untuk pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa (Alisjahbana, 1961). Wujud dan mutu bahasa Indonesia di masa depan sangat bergantung pada keberhasilan pengajaran/pemasyarakatan bahasa Indonesia di sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dalam kaitan ini, perlulah para perencana bahasa di bawah koordinasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengambil peranan dalam penetapan kurikulum, pengembangan bahan, serta evaluasi pengajaran bahasa Indonesia.

Media massa, terutama surat kabar, radio, dan televisi, merupakan saluran pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa Indonesia yang paling handal karena jangkauannya sangat luas. Peranan para perencana bahasa sendiri dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui media massa itu kecil sekali; para perencana bahasa lebih banyak berfungsi sebagai pemberi masukan terhadap media massa mengenai hasil-hasil pengembangan bahasa. Karena itu, tanpa terbinanya kerja sama yang baik antara lembaga perencana bahasa dengan badan-badan yang mengelola media massa itu sulitlah diharapkan ketermasyarakatan hasil-hasil pengembangan yang telah dilakukan. Media massa diharapkan tetap merupakan sumber informasi utama untuk berbagai kegiatan pembangunan termasuk pembangunan bahasa.

Pariwisata merupakan salah satu saluran yang strategis dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia. Lembaga pariwisata banyak mengurus tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Keinginan untuk memberikan kemudahan kepada pelancong-pelancong dari manca negara cenderung mengakibatkan bahasa Indonesia dinomorduakan di tempat-tempat umum seperti hotel, restoran, dan objek-objek wisata yang "bergengsi". Pemakaian bahasa asing yang berlebihan di tempat-tempat umum cenderung akan menghambat pemasyarakatan bahasa Indonesia. Dan yang lebih celaka lagi, hal seperti itu dapat memberi kesan seakan-akan bahasa Indonesia ini tetap akan merupakan bahasa yang lebih rendah mutunya dibandingkan dengan bahasa-bahasa barat seperti bahasa Inggris.

Sebagai masyarakat yang beragama, kedudukan lembaga/organisasi keagamaan di tengah masyarakat sangat penting. Pemimpin agama dan tokoh lembaga-lembaga keagamaan merupakan tokoh anutan yang sangat besar pengaruhnya termasuk dalam penggunaan bahasa. Persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan ketokohan mereka itu dalam usaha pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa selama ini.

Masih banyak lagi lembaga dan organisasi yang perlu diajak bekerja sama dalam usaha pemasyarakatan bahasa Indonesia, seperti organisasi profesi dan para penerbit. Yang perlu ditekankan di dalam pembinaan kerja sama itu adalah bahwa usaha pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia itu merupakan tanggung jawab bersama.

3. Peningkatan Kredibilitas Perencana Bahasa

Faktor kedua yang perlu diperhatikan di dalam pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa adalah kredibilitas perencana bahasa, baik sebagai penghasil maupun sebagai penjual hasil pengembangan bahasa. Usaha pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa itu pada dasarnya merupakan upaya untuk mempengaruhi masyarakat luas agar menerima hasil-hasil pengembangan bahasa itu. Laku tidaknya produk-produk bahasa itu akan sangat ditentukan oleh kredibilitas penjual dan pembuatnya. Istilah *kredibilitas* ini dipinjam dari psikologi sosial untuk mengacu pada faktor-faktor yang ada pada pembicara yang menyebabkan ucapannya diterima atau ditolak oleh pendengarnya. Jadi, kredibilitas perencana bahasa di sini mengacu kepada faktor-faktor yang perlu dimiliki oleh para perencana bahasa agar hasil-hasil mereka dapat diterima oleh masyarakat pemakai bahasa.

Sejumlah ahli dalam bidang komunikasi telah mencoba mengidentifikasi ciri khas kredibilitas sumber (komunikator). Menurut Berlo, Lemert, dan Merts di dalam *Applbaum et al.* (1973) ada tiga ciri khas kredibilitas sumber, yaitu keamanan, kualifikasi, dan dinamisme. Faktor keamanan menyangkut kepastian yang dibangkitkan pembicara kepada pendengarnya. Jika dia dianggap aman, adil, ramah, baik dan jujur, pendengarnya akan mempercayainya dan menerima apa yang disampaikannya. Faktor kualifikasi menyangkut kemampuan atau keahlian dalam bidang yang dibicarakan. Pembicara yang terlatih, berpengalaman, berkualifikasi, dan berpengeta-

huan luas akan mempunyai kredibilitas tinggi. Faktor dinamisme menyangkut energi yang digunakan dalam berbicara. Orang yang dinilai agresif, emfatik, keras pendirian, aktif, dan bersemangat dianggap mempunyai kredibilitas yang tinggi.

Tampaknya kunci kredibilitas sumber itu terletak pada kemampuan. Faktor keamanan dan dinamisme akan dengan mudah dilakukan asalkan dia mempunyai modal kemampuan atau keahlian dalam masalah yang dibicarakannya. Dalam kaitannya dengan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa, perlulah diperhatikan faktor kredibilitas penyuluh/pembina bahasa. Setiap penyuluh bahasa perlu mempersiapkan diri dengan baik agar mendapatkan pengakuan dari para pendengarnya dan pada gilirannya, para pendengar akan menerima hasil-hasil pengembangan bahasa yang ditawarkannya.

Kredibilitas berkaitan erat dengan hubungan antara penerima dan sumber. Status sumber yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerima cenderung memberikan kredibilitas yang tinggi kepada sumber itu. Tentu saja kredibilitas sumber yang sesungguhnya akan ditentukan pula oleh hubungannya dengan topik yang dikomunikasikannya. Sumber yang berstatus tinggi yang berbicara tentang topik yang kurang dikuasainya akan dinilai mempunyai kredibilitas rendah.

Dalam kaitan dengan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa, terutama yang bersifat langsung, perlulah diperhatikan masalah hubungan status antara penyuluh dan pesuluh. Akan sulit seorang pembantu pimpinan meyakinkan seorang pejabat eselon II; atau seorang anak muda terhadap seorang yang sudah ubanan.

Kenyataan bahwa Pusat Bahasa sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab menangani perencanaan bahasa mempunyai status eselon II, menimbulkan masalah tersendiri dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia dan dalam membina kerja sama dengan lembaga-lembaga yang statusnya lebih tinggi. Dalam batas tertentu, Pusat Bahasa dapat merekrut tenaga-tenaga kebahasaan perguruan tinggi.

Berkaitan erat dengan hubungan status penerima dan sumber itu, kredibilitas perencana bahasa sebagai pengembang bahasa perlu pula diperhatikan. Merek dagang suatu produk merupakan jaminan mutu produk itu. Oleh karena itu, sangatlah bijaksana apabila para perencana bahasa, pengembang dan pembina bahasa, dipercayakan kepada tokoh-tokoh yang sudah mempunyai nama.

4. Peningkatan Usaha Penerbitan

Sarana yang paling efektif untuk memasyarakatkan hasil-hasil pengembangan bahasa, menurut hemat penulis, adalah bahan-bahan terbitan. Meskipun kemajuan teknologi telah memungkinkan perekaman informasi dalam bentuk gambar dan suara, belum setiap orang dapat menjangkau bahan-bahan informasi demikian itu. Kalaupun Pusat Bahasa selaku lembaga perencana bahasa dapat menyediakan informasi kebahasaan dalam bentuk rekaman audiovisual, sifatnya tetap sebagai bahan sekunder.

Untuk keperluan pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan kegiatan penerbitan. Bahan-bahan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam kaitan penerbitan ini adalah pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, daftar istilah yang dianjurkan, kamus istilah, kamus bahasa Indonesia untuk berbagai kelompok pemakai bahasa, dan bahan-bahan penyuluhan untuk berbagai kelompok sasaran. Pengadaan bahan penyuluhan ini akan menjamin keseragaman dalam bahan yang disampaikan di berbagai tempat di pusat dan di daerah. Ketersediaan bahan penyuluhan demikian juga akan sangat membantu para penyuluh yang mempunyai kredibilitas sedang.

Terbitan lain yang perlu mendapat perhatian khusus adalah majalah. Penerbitan majalah kebahasaan dan kesastraan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hendaklah berorientasi pada usaha peningkatan mutu pengetahuan kebahasaan dan kesastraan para ahli dan peminat bahasa dan sastra serta pembinaan jaringan kerja sama di kalangan para ahli dan peminat bahasa dan sastra. Ini berarti bahwa Pusat Bahasa perlu berusaha mengajak para ahli dan peminat bahasa dan sastra di luar Pusat Bahasa ikut serta dalam penerbitan majalah tersebut.

Usaha penerbitan produk-produk pengembangan bahasa itu bukanlah menjadi tujuan akhir. Yang lebih penting adalah penyebarluasan terbitan itu agar dibaca oleh masyarakat luas. Ini berarti bahwa kendala birokratis dalam penerbitan selama ini perlu diatasi.

5. Evaluasi Berkala

Evaluasi merupakan tahap akhir rangkaian kegiatan perencanaan bahasa. Evaluasi itu perlu guna mendapatkan data balikan dari pemakai bahasa mengenai hasil-hasil pengembangan bahasa yang dimasyarakatkan. Dari data balikan itu para perencana akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Kalau ternyata terdapat kekeliruan dalam hasil-hasil pengembangan bahasa itu, para perencana bahasa harus berlapang dada mengakui kekeliruan tersebut, dan tentu saja, memperbaikinya. Kredibilitas mereka tidak akan melorot karena sikap demikian itu. Bahkan, dengan kejujuran mengakui ketidaksempurnaan mereka itu, mereka akan mendapatkan kredibilitas yang tinggi.

Perlu disadari bahwa soal pengembangan bahasa bukanlah monopoli orang atau lembaga tertentu. Oleh sebab itu, selalu terbuka kemungkinan pendapat pihak luar (masyarakat) mengenai aspek-aspek bahasa tertentu akan lebih baik daripada apa yang dihasilkan oleh badan perencana bahasa yang berwenang.

Evaluasi secara teratur mengenai hasil-hasil pengembangan yang telah dimasyarakatkan itu sangatlah perlu agar jangan sampai terjadi "kekacauan" yang timbul karena pihak perencana bahasa mengotot mempertahankan hal-hal yang ditolak para pemakai bahasa karena alasan yang cukup kuat.

6. Penutup

Di depan telah dikemukakan dua kemungkinan mengapa masih terjadi penyimpangan dari norma-norma yang sudah dikodifikasi dalam pemakaian bahasa. Kalau penyimpangan itu terjadi karena alasan ketidaktahuan tentang adanya norma-norma itu tentulah lebih mudah mengatasinya. Dengan meningkatkan usaha pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa selama ini mereka akan dapat menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan norma-norma yang telah dikodifikasi itu. Lain halnya kalau penyimpangan itu karena alasan tidak mau mengakui norma-norma bahasa yang dikodifikasi oleh para pengembang bahasa. Untuk mengatasi sikap seperti itu mungkin perlu ada usaha pendahuluan, yaitu membangkitkan penghayatan terhadap arti bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Arti bahasa Indonesia dalam hal kelangsungan bangsa ini tidak lebih kecil dari arti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Apa pun alasan penyimpangan dalam pemakaian bahasa Indonesia, usaha pemasyarakatan hasil-hasil pengembangan bahasa, khususnya bahasa Indonesia, perlu dilancarkan terus.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab menangani perencanaan bahasa di Indonesia ini perlu membina kerja sama dengan berbagai pihak, lembaga dan perseorangan, agar pelaksanaan tanggung jawab itu berjalan lancar dan mendapat dukungan yang luas. Tentu saja, usaha Pusat Bahasa mengembangkan dan membina bahasa Indonesia akan dapat berjalan baik bila ada dukungan tenaga yang berkualitas, dana, dan sarana yang cukup. Dan, yang lebih penting tentunya, dukungan masyarakat pemakai bahasa Indonesia - bangsa Indonesia. Perencanaan bahasa bukan untuk kelompok masyarakat bahasa tertentu, tetapi untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perencanaan bahasa tidak dimaksudkan untuk membuat bahasa Indonesia ini homogen, tetapi memelihara ragam-ragam bahasa yang ada sambil mengembangkan ragam umum untuk keperluan yang menyangkut kepentingan komunikasi yang bersifat umum dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Takdir S. 1961. "Language Engineering Molds Indonesian Language". *Linguistic Reporter* 3/3
- Applbaum, Ronald L., Karl Anatol, Ellis R. Hays, Owen O. Jenson, Richard E. Porter, dan Jerry E. Mandel. 1973. *Fundamental Concepts in Human Communication*. New York: Canfield Press.
- Kridalaksana, Harimurti (Ed.). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Lapoliwa, Hans dkk. 1991. "Pemasyarakatan Hasil Mabbim" (Laporan untuk Panitia Kerja Sama Kebahasaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa).
- Moeliono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Strategi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa: Beberapa Pokok Pikiran
Pemakalah : Hans Lapoliwa
Pemandu : Felicia Utorodewo
Pencatat : Cormentya Sitanggang Ekawati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Abudaud Hn., FKIP Universitas Sriwijaya

Saya pernah menyuluh orang Tionghoa keturunan, dari jumlah terlihat berhasil, tetapi setelah selesai tidak ada bekas sama sekali. Bagaimana cara menyuluh agar hasil yang diinginkan tercapai?

Jawaban:

Saya tidak setuju dengan cara memaksa pesuluh. Lebih baik kita berusaha meyakinkan mereka untuk berbahasa dengan baik.

2. **Pertanyaan:** Sumarsono, Universitas Udayana Singaraja

a. Apakah penulisan "Kongres Bahasa Indonesia VI" itu benar?

Apakah tidak "Kongres VI Bahasa Indonesia?" dan, apakah yang pertama itu juga termasuk yang dijual oleh Pusat Bahasa?

b. Penerbit koran/majalah mempunyai pedoman khusus (EYD, dll.) yang tidak selalu sejalan dengan pedoman dari Pusat Bahasa. Bagaimana pendapat Anda?

c. Siaran pembinaan bahasa Indonesia di TVRI, meskipun hanya sebentar, sering memunculkan wajah-wajah angker, siapa yang mau menonton? Apakah tidak ada seleksi untuk menampilkan wajah-wajah yang menarik di TVRI?

Jawaban:

a. Benar dan dijual.

b. Penyusunan buku pedoman bagi penerbit sebaiknya *bekerja sama* dengan Pusat Bahasa. Perlu diingat bahwa Pusat Bahasa tidak berniat memonopoli atau mempersulit para penerbit, tetapi justru membantu mereka.

c. Media massa merupakan sarana yang paling ampuh untuk mengembangkan bahasa. Namun, Pusat Bahasa sebagai perencana bahasa tidak dapat berbuat banyak. Pemilihan penyiar tidak mudah, banyak masalah. Kita juga harus memperhatikan permintaan para pemirsa.

3. **Pertanyaan:** Asni Ajub, FPBS IKIP Padang

Dalam pembentukan istilah, Pusat Bahasa bekerja sama dengan Malaysia dan Brunei. Bagaimana cara kerja sama itu dilakukan? Apakah Indonesia memegang peranan untuk mengatur atau tidak?

Jawaban:

Ketiga negara sepakat untuk mencari entri dari bahasa Inggris lalu ketiga negara itu mencari padanan kata dalam bahasa masing-masing. Pada pertemuan Mabbim dibicarakanlah padanan mana yang disepakati bersama. Kalau tidak ada kesepakatan mengenai padanan kata, kita harus saling mengetahui padanan kata apa yang akan digunakan oleh masing-masing bahasa.

4. **Pertanyaan:** Ahadi Sulissusiawan, Pemimpin Proyek Penelitian dan Pengembangan Bahasa Kalimantan Barat

- a. Dalam pemasyarakatan bahasa, para ahli bahasa saling berbeda pendapat dalam merumuskan satu pedoman. Hal itu sangat membingungkan masyarakat. Apakah Pusat Bahasa tidak dapat berperan sebagai penengah atau pemutus untuk menetapkan pedoman yang dapat digunakan oleh masyarakat atau guru?
- b. Dalam penyuluhan bahasa, tidak dapatkah Pusat Bahasa bekerja sama dengan instansi yang lebih tinggi dan penyuluh dibekali keppres, misalnya, agar mendapat kredibilitas yang lebih tinggi. Hal ini terasa dalam penyuluhan surat-menyurat kedinasan yang dilakukan di instansi pemerintah.

Jawaban:

Pusat Bahasa berstatus eselon II sehingga tidak mempunyai akses langsung kepada Menteri. Jadi usul itu sulit diterapkan. Usaha pembinaan bahasa Indonesia sebaiknya muncul dari kesadaran pemakai bahasa itu sendiri. Mengenai pertikaian antara para ahli bahasa dapat dibenarkan asal dalam forum kebahasaan seperti dalam kongres ini, yang penting ada usaha menjunjung tinggi pemikiran bahasa Indonesia.

5. **Pertanyaan:** H. Rabiana Badudu, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Terjadinya penyimpangan dalam pemakaian bahasa Indonesia bukan hanya disebabkan oleh dua hal. Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, yaitu:

- 1) ketidaktahuan,
- 2) ketidakpedulian, dan
- 3) ketidaktelitian

terhadap kaidah pemakaian bahasa Indonesia. Bagaimana menurut Bapak?

Jawaban:

Pada dasarnya ketidaktelitian dan ketidakpedulian adalah sama. Sama-sama tidak mau tahu terhadap kaidah. Akan tetapi, ketidaktelitian dapat segera diatasi dengan menyadarkan pemakai bahasa untuk menggunakan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Berbeda halnya dengan ketidaktelitian itu, ketidakpedulian cenderung menolak kaidah kebahasaan.

STRATEGI PENYULUHAN SASTRA: SEBUAH PENGANTAR

Leon Agusta
Sastrawan

1. Pengantar

Apakah yang dimaksud dengan strategi penyuluhan sastra?

Di dalam kamus kata *strategi* berarti siasat atau akal.

Strategi penyuluhan sastra kira-kira artinya siasat atau akal yang hendak kita gunakan dalam menyelenggarakan penyuluhan sastra. Kalau demikian halnya, kita memerlukan ruang untuk mempertimbangkan dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyuluhan sastra. Kita memerlukan dasar-dasar pertimbangan yang memadai, mencari berbagai alternatif hingga pada gilirannya kita merasa mampu menawarkan pilihan-pilihan yang cukup meyakinkan.

Ada kesan bahwa topik perbincangan ini merupakan satu selipan saja di antara sejumlah topik yang hendak dipergelarkan dalam forum-forum Kongres Bahasa Indonesia VI ini. Kesan ini muncul mungkin karena dalam buku yang memuat berbagai penjelasan termasuk acara kongres, nama penulis yang ditugaskan untuk membahas topik ini tidak dicantumkan. Mungkin ketika buku tersebut diterbitkan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa belum menetapkan orangnya. Selanjutnya, kesan seperti tersebut di atas muncul karena tidak adanya semacam kerangka acuan yang dapat digunakan penulis agar dapat menyusun sebuah makalah yang kira-kira sesuai dengan yang diharapkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa) selaku lembaga penyelenggara. Akibatnya, penulis merasa sedikit bingung, terpaksa mereka-reka sendiri tanpa pegangan. Dasar dan bahan pertimbangan yang ada hanyalah sebatas pengalaman saya dalam penyuluhan sastra ke sekolah-sekolah yang diselenggarakan Pusat Bahasa beberapa tahun terakhir ini dan beberapa diskusi sehubungan dengan penyuluhan sastra.

Karena forum ini sangat berbeda dengan forum-forum yang pernah diselenggarakan, beberapa hal dan pemikiran yang pernah diungkapkan dalam forum yang lalu perlu diinformasikan lagi agar gambaran permasalahannya lebih jelas.

2. Penyuluhan Sastra

Tidaklah mudah bagi penulis untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan penyuluhan sastra. Pusat Bahasa pernah menyusun Pedoman Penyuluhan Sastra yang

ditulis oleh Lukman Hakim yang disampaikan pada forum diskusi Pertemuan Penyuluh Sastra yang diselenggarakan Pusat Bahasa bulan Februari 1993 yang lalu. Dalam pedoman itu ditegaskan bahwa "penyuluhan sastra bukanlah pengajaran sastra". Penyuluhan sastra merupakan bagian dari pembinaan sastra. Pembinaan sastra adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sikap, wawasan, dan keterampilan seseorang di dalam menghadapi karya sastra. Lebih spesifik, menurut Lukman Hakim, penyuluhan sastra dapat diartikan sebagai penerangan (tentang sastra). Penyuluhan sastra merupakan satu cara untuk mencapai tujuan pembinaan sastra, yaitu menciptakan masyarakat yang apresiatif terhadap karya sastra.

Suatu masyarakat yang apresiatif terhadap karya sastra adalah dambaan "para partisan sastra". Dambaan itu adalah sesuatu yang hanya mungkin ada dalam angan-angan. Sementara itu, dalam kenyataan hidup kita menemukan masyarakat yang lain, yang sama sekali berbeda dengan "masyarakat yang apresiatif terhadap sastra" dalam arti umum. Bila kita masih mau mengungkapkan kenyataan sikap masyarakat kita terhadap sastra, yang akan terdengar pastilah lagu-lagu lama yang penuh keluh kesah, merisaukan, dan menyedihkan. Semuanya sudah merupakan pengetahuan umum, tidak perlu diulang lagi.

Yang kita perlukan lebih kurang adalah ketetapan hati dalam merealisasikan gagasan-gagasan pilihan kita dalam mengupayakan pembinaan sastra dan penyuluhan yang merupakan salah satu cara yang hendak kita tempuh. Dalam hal ini yang pertama perlu kita pertanyakan: apakah kriteria yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang akan melakukan penyuluhan? Pertanyaan ini juga akan berkaitan dengan bentuk atau media yang hendak kita gunakan serta sasaran yang akan menerima penyuluhan.

Kita memerlukan penyuluh yang dapat diandalkan. Bentuk atau media penyuluhan apapun yang kita pilih, kelompok mana pun yang akan menerima penyuluhan, semuanya menuntut kualitas pelaksana yang terpercaya. Untuk ini saya mengusulkan agar Pusat Bahasa melakukan langkah-langkah persiapan yang terencana secara saksama.

Pengalaman dari penyelenggaraan penyuluhan sastra ke sejumlah SLTA di Jakarta beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persiapan baru sangat diperlukan. Banyak hal yang harus dikaji ulang, termasuk perbendaharaan bahan penyuluhan yang pilihan.

Untuk penyuluhan sastra dalam arti luas (bukan sebatas penyuluhan sastra ke sekolah-sekolah) di masa mendatang tentu masalahnya lebih banyak lagi dan akan lebih merangsang untuk melihat keluasan kaitannya.

3. Untuk Siapa?

Siapakah sasaran atau untuk siapakah penyuluhan sastra dilaksanakan? Sebagaimana yang pernah dilakukan, penyuluhan dapat dilakukan ke sekolah-sekolah tingkat atas. Bila selama ini penyuluhan baru untuk beberapa SLTA di Jakarta, di

masa mendatang dapat dilakukan di SLTA seluruh Indonesia. Penyuluhan sastra tentu saja dalam bentuk paket yang tidak semuanya harus sama mengingat banyaknya faktor penting yang mendorong perlunya pengolahan paket-paket penyuluhan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, misalnya faktor sosial budaya lokal.

Bila Pusat Bahasa lebih siap, penyuluhan juga dapat dilakukan bagi kelompok-kelompok yang bersedia menerima atau menginginkan penyuluhan seperti yang sudah dilakukan di bidang bahasa selama ini. Selanjutnya, penyuluhan juga dapat dilakukan untuk masyarakat yang lebih luas, yang tidak homogen, seperti yang dilakukan melalui media elektronik (televisi).

Penyuluhan sastra tidak mungkin dilakukan seperti penataran P4 yang diwajibkan. Sastra memerlukan cinta dan kerelaan. Untuk itu, diperlukan godaan atau rayuan sebagai cara yang lebih mungkin. Gagasan ini pasti tidak begitu mudah untuk dilaksanakan memerlukan seni tersendiri.

Karena penyuluhan bukan pengajaran dan bukan pula penataran, suasananya sangat berbeda. Begitu pula target-targetnya. Misalnya, penyuluhan tidak memerlukan ujian. Dalam penyuluhan yang diperlukan hanyalah disampaikannya semacam "paket cinta dan kerinduan" terhadap sastra dalam suasana yang mengesankan. Kalau dapat secara mendalam penyuluhan itu sebagai "suatu peristiwa dalam suatu hari" yang inspiratif untuk masa-masa selanjutnya. Untuk inilah diperlukan persiapan yang betul-betul baik.

Suasana penyuluhan yang begitu longgar, dialog dan tanya jawab yang bebas sangat terbuka bagi kemungkinan munculnya pertanyaan yang rumit. Misalnya, pertanyaan tentang pelarangan karya-karya Pramudya Ananta Toer di Indonesia, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak dikehendaki atau tidak terduga oleh yang memberi penyuluhan. Jawaban berupa sekedar perkiraan tidak akan memuaskan, bahkan dapat berbalik menjadi bumerang. Pertanyaan itu lebih baik dijawab secara jujur dan beralasan. Bila penyuluh berpendapat bahwa sekarang ini sudah saatnya untuk mengizinkan karya pengarang tersebut dibaca masyarakat, alasannya harus meyakinkan. Alasan lain yang dapat ditambahkan adalah dengan menyarakkan agar masyarakat juga membaca dokumentasi koran-koran lama yang memuat tulisan-tulisan Pramudya di tahun awal 60-an. Maksudnya, tentu saja untuk lebih memahami sosok pribadi, budaya politik, dan sikap yang diperlihatkan Pramudya ketika dia sedang berada "di atas angin". Masalahnya menjadi lebih terbuka melalui cara seperti itu, dan sebagai sejarah dokumentasi seperti itu dapat memberikan pelajaran yang sangat berguna.

Nasib dan perjuangan sastra di tengah sejarah politik dalam berbagai proses pertumbuhan kebudayaan selalu merupakan pertanyaan yang menggoda bagi masyarakat dan akan selalu muncul dalam penyuluhan. Bahkan, pelajar SLTA pun sangat tergoda terhadap masalah demikian. Mereka memerlukan jawaban yang dapat diuji kebenarannya.

Sejalan dengan hal-hal di atas, penyuluhan sastra diharapkan dapat memberikan beberapa pengertian kunci sebagai pegangan dalam peningkatan apresiasi masyarakat, seperti ramalan-ramalan sastra, kesaksian sastra, dan penyelesaian sastra.

Pengertian tentang ketiga hal tersebut cukup menarik dan penting untuk dijelaskan dengan contoh-contoh pilihan, terutama dari prosa dan naskah-naskah drama. Ketiganya bagaikan tiang-tiang penopang bagi kualitas dan kekukuhan karya sastra, sekaligus untuk menegaskan pengertian tentang sifat-sifat spesifik sastra untuk membedakannya dengan yang bukan sastra, selain keindahannya dalam membahaskan perjalanan nasib dan pergumulan hidup manusia.

Suatu ketika, pada suatu *moment* yang tidak diduga, seseorang mungkin menyadari bahwa ramalan sastra itu dapat merupakan ramalannya juga; kesaksian sastra itu juga dapat merupakan kesaksiannya pula; dan penyelesaian sastra itu pun dapat merupakan penyelesaiannya sendiri. Hubungan semuanya itu dalam jalinan keindahan, keindahan bahasa, berarti sebagai ungkapan hati yang indah, dapat membuat seseorang, dengan cara yang nyaris tiba-tiba dan sedikit ajaib, menyadari bagaimana sastra hadir dalam hidupnya sebagai bagian dari kejujuran dan kemuliaan dirinya, yang dirangkul lantas disuntingnya dari taman dunia peradaban.

Bagaimana menyampaikan semuanya ini dalam penyuluhan?

Penyuluhan hanyalah suatu cara pembinaan di samping ada cara lain yang saling berkaitan dan hanya mengungkapkan beberapa hal. Sementara itu, hal-hal lainnya akan menyusul dalam alam pikiran kita masing-masing. Artinya, setiap kita selalu dapat mencoba mengarifi situasi yang kita hadapi. Penyuluhan sastra adalah suatu kerepotan baru yang memerlukan begitu banyak pertolongan dari "keluarga", baik yang jauh maupun yang dekat.

4. Kampanye Sastra?

Untung juga, paling tidak bagi penulis, Pusat Bahasa tidak memberikan kerangka acuan bagi topik ini hingga terasa adanya kebebasan yang cukup luas untuk membawa pembicaraan ini ke berbagai arah. Bagaimana kalau ditanyakan, kampanye sastra, kapan?

Pertanyaan yang mengada-ada begitu mungkin dapat dikatakan. Akan tetapi, kenapa tidak? Kampanye swasembada pangan sudah lama dicanangkan, begitu juga dengan keluarga berencana, undang-undang lalu lintas, dan sebagainya. Apakah sastra tidak atau masih belum bisa dianggap penting? Atau, sastra biar begini-begini saja dulu? Namun, kalau demikian halnya, kenapa Pusat Bahasa menyelenggarakan forum seperti ini? Nah, tampaknya penyuluhan sastra adalah semacam kampanye yang sedang dirancang. Jadi, sekaranglah permulaan itu. Sebagaimana lazimnya suatu kampanye, segala budi daya dikerahkan dan harus ada strategi.

Dengan demikian, kita dapat membuat rekaan baru dengan pengandaian. Kita Indonesia, memiliki Perpustakaan Nasional, perpustakaan di lembaga-lembaga

pendidikan, dan lain-lain. Seterusnya kita, Indonesia, mempunyai Balai Pustaka. Kita, Indonesia, juga mempunyai lembaga yang namanya Pusat Bahasa. Berbagai pertanyaan sekaligus jawaban tentang keberadaan ketiga lembaga di atas, termasuk fungsinya, pastilah mempunyai jawaban. Pertanyaan yang mungkin agak baru adalah, bagaimanakah bentuk kerja sama terbaik antara ketiganya? Di sini, dalam konteks pembinaan sastra di tanah air kita, lebih jauh lagi, mungkin terlalu jauh: mungkinkah atau bagaimana kalau ketiganya disatukan di bawah satu payung, dalam satu kesatuan pengelolaan?

Sebagai bandingan, Malaysia, misalnya, memiliki Dewan Bahasa dan Sastra. Menurut mereka dilembagakan dengan "meniru" Balai Pustaka yang kita miliki di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir ini, peranan Dewan Bahasa sedemikian kuatnya dalam upaya memajukan sastra Malaysia. Ilustrasi tentang ini bisa panjang.

Yang sangat kita perlukan di Indonesia adalah satu lembaga yang seperti itu. Sastra mempunyai "rumah" di tanah airnya sendiri hingga seluruh "keluarga sastra", kreator, apresiator, dan komunikator tidak terlunta-lunta nasibnya.

Dari "rumah keluarga sastra" itulah, antara lain, penyuluhan sastra yang sedang kita gagas mengharapkan "pertolongan". Namun, kita semua tahu harapan itu sedemikian suramnya karena "rumah" itu sendiri kerangkanya pun masih dalam khayalan. Akan tetapi, bukankah angan-angan itu adalah awal dari perwujudan meskipun kemudian perwujudannya menjadi lain.

5. Strategi Permainan

Di atas dataran peradaban, sastra hadir bagaikan satu wilayah yang agak tersendiri, terhampar sentana taman dengan pepohonan serba rimbun yang setiap helai daunnya mencatatkan kisah-kisah dari zaman ke zaman. Taman itu selalu terbuka, menunggu, dan selalu setia pada janjinya untuk memenuhi jiwa-jiwa yang hidup dengan aneka hiburan yang sejati. Melalui karya-karya yang monumental, kita dapat menunjukkan, tanpa perasaan melebih-lebihkan: bagi seseorang yang jiwanya ingin mendapat hiburan yang sejati, tempatnya ada di sana, di suatu dataran peradaban ...! Bermainlah ke sana. Mengasyikkan. Baik dan perlu.

Sastra sebagai seni membahasakan kehidupan, baik dalam teater, prosa maupun puisi, tampaknya memerlukan kesadaran dari jiwa kita untuk menyediakan ruang bagi keindahan dan cinta; suatu ruang untuk me-manusia, tempat seseorang agar dapat dengan khusus memelihara cahaya dan semangat pencerahan kepribadiannya.

Kenikmatan yang diberikannya akan tertangkap oleh hati kita (pada awalnya), seperti bila kita menikmati suatu permainan, kemudian dengan sendirinya, kita tergoda untuk merenungkannya.

Untuk sekadar ilustrasi, dibawah ini dikutip sebuah sajak Abdul Hadi W.M.

Kalau ada tangan yang mengulurkan kenyang dari perut nasi hingga enyah lapar ini, Kaulah tangan itu

Kalau ada kenyang yang meliputi nasi hingga tergerak tangan ini
membukanya, Kaulah kenyang itu

Kalau ada nasi yang menghidupkan kembali jiwa lapar hingga bangkit kekuatan tangan itu, Kaulah nasi itu

Tapi kalau ada lapar yang bergerak menggeliat merebut nasi untuk
sekedar kenyang hingga tergoncang seluruh bumi

Kaulah airmata ini

Amin

Tidak terelakkan kesan bahwa penyuluhan sastra adalah suatu proyek percobaan Pusat Bahasa. Pada awalnya penyuluhan dilakukan ke beberapa SLTA di Jakarta, kini, kalau saya tidak salah tafsir, hendak diteruskan dan diperluas ke sasaran-sasaran baru, mungkin ke kelompok-kelompok yang cukup homogen seperti penyuluhan bahasa selama ini dan mungkin juga hendak diperluas untuk umum, sebagaimana yang dilakukan bidang bahasa lewat televisi.

Saya berani menduga, sebagai satu proyek percobaan, masa percobaannya mungkin akan memakan waktu relatif lama, misalnya lima tahun, sampai Pusat Bahasa memiliki perangkat-perangkat yang dapat dikatakan siap untuk memenuhi seluruh perlengkapannya, terutama sekali yang menyangkut sistem, pelaksana, dan peralatan teknisnya. Semuanya harus saling mendukung, begitulah idealnya. Sementara itu, kini semuanya masih pada titik permulaan.

Karena berbagai pertimbangan tentang waktu, sifat, dan format penyuluhan, saya begitu yakin bahwa penyuluhan sastra akan dapat dilaksanakan dengan menciptakan suasana yang memang dapat dinikmati, dengan kata lain dirancang dengan strategi permainan, jauh dari suasana pengajaran atau penataran.

Dalam penyuluhan; para penyuluh berhadapan langsung dengan penerima penyuluhan, hubungan kedua pihak sebaiknya (anjaran) dinetralkan lebih dulu. Misalnya, dengan suatu asumsi bahwa mereka yang menerima penyuluhan adalah pembaca sastra atau pernah membaca sastra (berpikir positif). Dengan asumsi ini beralasan untuk menawarkan agar mereka mengisahkan kepada forum satu karya atau satu bagian dari karya sastra yang baginya paling mengesankan. Yang lain dapat memberi komentar atau bersaing dengan menyampaikan kisah lain yang lebih menarik, dan seterusnya. Penyuluh melibatkan dirinya dengan cara-cara yang inspiratif dan kreatif hingga forum itu menjadi "satu peristiwa pada suatu hari" yang juga

inspirasi yang memungkinkan mereka pulang dengan membawa satu paket "cinta dan kerinduan" terhadap seni yang bernama sastra, seperti yang sudah diungkapkan pada awal pembicaraan ini.

Untuk penyuluhan yang menggunakan media televisi pun sebaiknya semangat permainan ini juga dijadikan andalan. Betapa pun peliknya tema dan permasalahan yang disediakan sebagai materi penyuluhan dengan suatu permainan yang menampilkan keindahan sastra itu dan pembicaraan dengan seninya sendiri. Dengan demikian tujuan penyuluhan itu akan tercapai secara optimal karena penyuluhan sastra memerlukan "seni menyampaikan seni".

6. Beberapa Catatan

- a. Diperlukan kriteria yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan melakukan penyuluhan yang bergantung kepada bentuk atau media yang digunakan serta sasaran yang akan menerima penyuluhan. Pusat Bahasa menetapkan kriteria dan menyiapkan para penyuluh.
- b. Diperlukan buku panduan penyuluhan sastra.
- c. Diperlukan satu forum kecil yang dilembagakan di bawah naungan Pusat Bahasa yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menampung dan membahas berbagai masalah penyuluhan sastra. Anggota forum ini juga dapat ditugaskan untuk mengamati pelaksanaan penyuluhan sastra di seluruh Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada forum.

Untuk mengakhiri pengantar ini mungkin cukup inspiratif bila kita nikmati lagi kutipan sajak "Catatan Tahun 1946", karya Chairil Anwar di bawah ini.

Kita-anjing diburu-hanya melihat sebagian dari
sandiwara sekarang
Tidak tahu Romeo & Juliet berpeluk di kubur
atau di ranjang

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Strategi Penyuluhan Sastra: Sebuah Pengantar
Pemakalah : Leon Agusta
Pemandu : Myrna Laksman
Pencatat : Lustantini Septiningsih

1. **Pertanyaan:** Yan Husada, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Apakah penyuluhan itu harus dalam bentuk formal saja? Adakah metode nonformal yang tidak berkelompok, tetapi dapat menyusup dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kegiatan itu tidak mulai dari diri kita sendiri, misalnya para penyair dan para guru sastra menyuluh keluarga mereka sendiri. Contohnya, saya mulai menyuluh anak saya tanpa ada kaitan dengan kegiatan sekolah. Saya melatihnya paling sedikit tiga buah karya Chairil Anwar secara intensif untuk perlombaan membaca sajak dalam perayaan 17 Agustus. Pada saat itu, saya tidak memperhitungkan apakah ia akan kalah atau menang yang penting saya sudah menanamkan rasa cintanya pada sastra.

Jawaban:

Yan Husada sangat beruntung karena menyadari pentingnya pembinaan sastra pada anaknya untuk mencintai sastra sehingga sastra dapat tumbuh bersamanya. Cara itu sangat menggembirakan dan dapat dicontoh oleh keluarga lain. Cara lain, orang tua dapat membelikan anaknya buku-buku bacaan yang bersumber pada sastra yang berisi kisah-kisah agung. Hal itu dilakukan agar anak dapat tumbuh dengan baik, terutama dalam seni dan budaya karena orang tua tidak ingin anaknya tergoda oleh hal-hal yang membahayakan.

Pada saat ini, kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan pembinaan anak di sekolah. Akan tetapi, kita harus bekerja sama dengan lembaga itu untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, kita menawarkan Pusat Bahasa mengembangkan proyek penyuluhan sastra Indonesia. Penyuluhan itu harus diolah dan direncanakan bersama dengan matang untuk mendapatkan konsep yang kuat sehingga melahirkan gagasan yang baik untuk operasionalnya nanti. Proyek itu diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sastra Indonesia.

2 **Pertanyaan:** Mahdin, SMP Negeri 2 Kendari

Mengapa sastra lebih kecil perkembangannya daripada tari? Penyambutan tamu dari luar negeri atau tamu pemerintah hampir tidak pernah dengan membaca puisi, tetapi dengan tarian. Pertanyaan saya adalah penyuluhan yang bagaimana yang dapat menembus kalangan seperti itu?

Jawaban:

Untuk penyuluhan sastra, orang dapat mulai dengan cara apa saja yang mereka kuasai. Misalnya, kalau Pusat Bahasa sudah mempunyai staf ahli, mereka harus mempersiapkan lebih dahulu paket-paket dan model-model penyuluhan. Sayangnya, saat ini paket dan model itu terlalu sedikit dan kita belum sempat melakukan percobaan. Penyuluhan yang pernah dilakukan, di antaranya penyair berbicara dan membacakan sajak, misalnya sajak Taufiq. Pembacaan itu memerlukan persyaratan karena pembaca harus menghayati sajak, misalnya sajak Taufiq banyak berisi pikiran yang sangat grafikal sehingga tidak sembarang orang dapat membacanya. Pembaca itu haruslah penyair yang memang juga secara grafikal dapat mengungkapkan bentuk pikiran Taufiq. Hal yang sama juga terjadi pada sajak Sutardji. Sutardji sangat cocok membacakan sajak yang meraung dan melolong. Ia tidak cocok membacakan lirik-lirik dari penyair Minangkabau yang halus dengan nyanyian yang menyayat. Begitu juga dengan orang-orang Bandung, mereka biasa mendengarkan suling dengan suasana tenang. Ketika mereka diminta mendengarkan sajak Sutardji, mereka susah menerimanya. Oleh sebab itu, penyuluh harus menjelaskan bentuk-bentuk sajak, seperti sajak Sutardji, Rendra, dan Taufiq Ismail karena sajak dapat mengungkapkan asal penyairnya. Kalau proyek ini jadi dilaksanakan, saya merasa kita akan banyak mempunyai pekerjaan yang menuntut keahlian yang mendetail.

3. Pertanyaan: Ahmad Darwin Nasution, SMA Negeri 2 Medan

Saya tertarik dengan kata *kampanye sastra*. Oleh karena itu, siapa sebenarnya sasaran penyuluhan ini, apakah masyarakat sebagai penikmat sastra atau siswa agar menjadi sastrawan atau penelaah sastra. Menurut saya, kalau kampanye itu ditujukan untuk siswa dan mereka diharapkan menjadi sastrawan, rasanya hal itu sulit dilakukan karena citra sastrawan di masyarakat kurang baik, berpenampilan seenaknya, dan sering dikucilkan. Akan tetapi, kalau sasaran kampanye itu adalah masyarakat dan tujuannya agar mereka dapat menjadi penikmat sastra yang baik, hal itu dapat dilakukan. Cara yang dapat dilaksanakan adalah memperkenalkan kepada mereka karya-karya sastra "berbobot" yang harganya murah. Namun, masalahnya saat ini kita sukar mendapatkan sastra "berbobot" dengan harga yang murah karena yang banyak ditemukan adalah sastra pop. Hal itu terbukti dengan sumbangan buku ke sekolah. Jika siswa diminta menyumbangkan buku ke perpustakaan, karya yang masuk selalu novel-novel pop. Bagaimana tanggapan Bapak?

Jawaban:

Menurut saya, kunci keberhasilan, di antaranya ada pada penerbit karena sampai saat ini banyak karya sastra yang masih tersimpan di laci penerbit yang

tidak bisa atau yang belum dapat diterbitkan. Penerbit saat ini sangat terbatas dan mereka lebih senang menerbitkan buku sastra yang mudah dijadikan bahan dagangan atau komoditas, seperti karya-karya Rendra. Padahal, selain Rendra, banyak novelis dan penyair lain yang mempunyai karya penting, baik, dan serius, tetapi belum diterbitkan karena tidak dapat dijadikan bahan dagangan.

Sasaran penyuluhan adalah masyarakat, terutama siswa, tetapi bukan menjadikan siswa seorang sastrawan, apalagi penyuluh. Yang dapat kita lakukan adalah hanya memberi sedikit ruang dalam hati mereka untuk menikmati keindahan sastra sehingga semua orang dapat berbicara tentang sastra. Sayangnya, banyak pembaca terjebak pada permasalahan yang ada dalam sastra, seperti pencarian tema. Sebenarnya, kita tidak perlu sukar membaca sastra untuk mencari manfaat atau yang lainnya karena sastra memberikan keindahan. Hanya itu saja yang diminta sastra, tidak ada mesiu, senapan, atau racun di belakangnya, yang ada hanya kesenian.

4. **Pertanyaan:** J. Sujanto, *Majalah Marwas Diri*

Pertanyaan saya sekitar Pramoedya yang sudah diterjemahkan ke dalam 14 bahasa dan diterbitkan di luar negeri. Sayangnya, saya tidak membaca karya itu dalam bahasa aslinya, tetapi dalam bahasa Inggris dan membelinya juga di Singapura. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu, apakah dengan situasi sekarang ini karya Pramoedya masih dilarang untuk dibaca oleh rakyat kita? Kalau Pemerintah khawatir karya-karya Pramoedya berpengaruh negatif terhadap pembacanya, bagaimana kalau sastrawan menilai terlebih dahulu karya itu lalu merekomendasikan kepada Pemerintah?

Jawaban:

Peristiwa yang menimpa Pramoedya bukan hanya Indonesia yang mengalaminya, tetapi juga banyak bangsa lain seperti Andre Brind. Setelah karyanya terbit di Inggris, sepuluh tahun kemudian baru karya itu dapat beredar di Afrika Selatan, negara asalnya. Hal yang seperti itu juga terjadi pada karya yang berjudul *Doktor Zivago*. Kita lebih dahulu membaca karya tersebut daripada orang Uni Soviet sendiri. Berkaitan dengan karya Pramoedya, menurut saya, karyanya itu harus diletakkan dalam konteks yang lebih terbuka, dari satu dekade ke dekade berikutnya, dari satu periode ke periode selanjutnya. Karya itu harus kita letakkan utuh, tanpa terpenggal-penggal sehingga kita dapat merujuk satu dengan lainnya untuk memperjelas pertimbangan dilarang atau tidak. Misalnya, kita seharusnya menyusun dokumentasi yang lengkap tentang Pramoedya: karya-karya sastra, pidato, ceramah, dan esai yang memuat pikiran-pikiran politiknya pada masa sebelum tahun 1966, kemudian semua karya itu kita telaah seobjektif mungkin sehingga kita mendapat gambaran yang jelas tentang Pramoedya—apa dan

bagaimana ia berbicara tentang pengarang, intelektual, dan budayawan lain. Sastrawan yang lain juga boleh kita coba dengan menyusun data yang seperti di atas, di antaranya Sitor Situmorang. Dengan demikian, kita melihat ada pertumbuhan dalam masyarakat dan kita dapat berpikir komprehensif untuk menilai karya sastra seperti itu. Dengan demikian, emosi kita dapat netral dan pikiran bisa jernih untuk melihat permasalahan karena semua data dibebaskan, tidak ada yang tidak jelas atau digelapkan.

5. **Pertanyaan:** Kahrudin, Universitas Hasanuddin

- a. Saya tidak mengerti apa yang disampaikan Pak Leon dalam makalah ini, apa yang disuluhkan, kepada siapa sasarannya, dan apa yang hendak dicapai dari penyuluhan itu? Menurut saya, penyuluhan hendaknya ditujukan pada seluruh masyarakat sehingga sastra dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sebaiknya penyuluhan dimulai sejak anak mulai berbahasa karena sastra adalah bahasa. Jadi, metodenya pun sama dengan pengajaran bahasa. Masyarakat Indonesia pada masa lalu lebih maju bersastra karena pada masa kanak-kanak mereka sudah didengarkan sastra dan didongengi dengan berbagai cerita. Jadi, bukan hanya di sekolah saja mereka mendapatkan pelajaran itu.
- b. Mengenai karya Pramoedya, saya juga membacanya di luar negeri dan saya kira kita tidak berpendapat karena terbitnya di luar negeri, buku itu tentu bagus. Menurut saya karya Pramoedya lebih bagus sebelum ia ke Pulau Buru dibandingkan setelah ia kembali dari pulau itu, bagaimana menurut Bapak?

Jawaban:

- a. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Sayangnya, saat ini, anak-anak sering mendapat tekanan dari berbagai informasi sehingga sangat menyita perhatian mereka. Mereka susah menyiapkan waktu untuk mendengarkan dongeng. Namun, kita harus mengusahakan dan menanamkan sastra pada diri mereka. Sehubungan dengan penyuluhan sastra, saya kira penyuluhan sastra sama dengan penyuluhan bahasa, tetapi penyuluhan bahasa lebih maju. Oleh sebab itu, kita mengajukan proyek penyuluhan sastra.
- b. Saya sependapat dengan Bapak bahwa karya Pramoedya sebelum ke Pulau Buru lebih bagus. Selain itu, saya ingin mengulangi penjelasan saya bahwa kita ingin menempatkan karya Pramoedya dalam sejarah dengan kejelasan, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi serta dipalsukan. Kita melihat dirinya sebagai sastrawan, politikus, budayawan, dan intelektual yang ikut bermain dalam pergolakan sejarah Indonesia.

PEMBINAAN BAHASA INDONESIA MELALUI MEDIA CETAK

Zainuddin Taha
IKIP Ujung Pandang

1. Pendahuluan

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 mencanangkan "satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air, tanah air Indonesia, dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Sejak itu, bahasa Indonesia telah kita pergunakan sebagai bahasa persatuan dalam memperjuangkan, menegakkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta sekaligus kita bina dan kembangkan untuk memenuhi fungsinya sebagai wahana komunikasi nasional di segala bidang kehidupan bangsa.

Pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah pemakai maupun dalam mutu pemakaiannya. Pesatnya perkembangan bahasa Indonesia terutama dalam beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan makin mantapnya kedudukan bahasa persatuan kita itu. Perkembangan cepat dan pesat yang dialami bahasa Indonesia itu dimungkinkan oleh adanya kebijakan nasional kebahasaan sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan setiap lima tahun. Perkembangan itu juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun media massa, termasuk media cetak.

Dalam makalah ini akan dikembangkan upaya-upaya pembinaan bahasa Indonesia melalui media cetak. Media cetak apa saja yang memuat masalah bahasa yang mengarah kepada upaya pembinaan itu, masalah apa saja yang pada umumnya dikemukakan, dan seberapa jauh upaya itu memanfaatkan hasil pengembangan bahasa serta upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia melalui media cetak. Pembahasan masalah ini dirasakan cukup penting lebih-lebih dalam menyongsong pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang akan dimulai 1 April 1994 yang akan datang. Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, dalam PJP Kedua itu nanti pembinaan bahasa Indonesia akan terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat.

Mengingat terbatasnya waktu persiapan penulisan makalah ini, maka data yang dijadikan dasar penulisan terbatas pada beberapa sumber, antara lain *Bahasa dan Sastra dalam Guntingan* oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kliping*

Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 1989-1990, oleh Jolanda Mareyke Hukom, Johariah, dan Supaeni dari Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang 1992/1993, dan klipring kebahasaan penulis sendiri. Kliping tersebut menghimpun sejumlah karangan, tulisan, dan rubrik kebahasaan dan kesastraan yang dimuat dalam media cetak, baik yang mempunyai peredaran luas secara nasional maupun yang terbatas hanya pada daerah tertentu, yang terbit antara tahun 1988 sampai dengan Juli 1993.

Pendekatan yang digunakan mengacu pada pendekatan sociolinguistik dengan perhatian khusus kepada proses perencanaan bahasa, khususnya pada strategi penawaran dan pemantapan hasil pengembangan bahasa melalui media cetak.

2. Pemakaian Bahasa Indonesia dan Media Cetak

Penelitian sociolinguistik dalam beberapa dasawarsa terakhir telah memperdalam pemahaman dan wawasan kita tentang bahasa dan peranannya dalam pola-pola komunikasi di antara anggota-anggota masyarakat, kelompok, atau bangsa. Bahasa tidak lagi dipandang hanya semata-mata sebagai alat komunikasi. Michael Halliday (1973) mengemukakan fungsi bahasa yang meliputi (1) fungsi instrumental, yakni fungsi bahasa yang memungkinkan pemakaian bahasa dapat melayani pengelolaan lingkungannya, yang menyebabkan beberapa peristiwa terjadi; (2) fungsi pengaturan atau regulasi, yakni fungsi yang memungkinkan pengaturan dan pengendalian peristiwa, tingkah laku, hukum, dan kaidah; (3) fungsi representasional, yaitu fungsi membuat pernyataan, meliputi kejadian dan peristiwa, memberi pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan; (4) fungsi internasional, yakni fungsi untuk memantapkan ketahanan dan memelihara hubungan sosial; (5) fungsi personal, yakni fungsi memungkinkan seseorang mengemukakan perasaan dan kepribadian; (6) fungsi heuristik, yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan belajar tentang lingkungan; dan (7) fungsi imajinatif, yakni yang digunakan berimajinasi dan mengembangkan gagasan seperti dalam bahasa sastra (Said, 1993).

Memperhatikan fungsi-fungsi bahasa di atas, agaknya bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu belum sepenuhnya mampu memenuhi fungsi-fungsinya, terutama fungsi representasional dan heuristik yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mengatasi kekurangmampuan bahasa Indonesia memenuhi fungsi-fungsi tersebut, para pakar bahasa telah melakukan upaya rintisan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dapat menunaikan fungsinya sebagai bahasa komunikasi di segala bidang. Dalam hubungan ini, media massa pada umumnya dan media cetak khususnya, telah lama dipandang sebagai pelaksana (*agent*) dalam pembinaan penggunaan bahasa Indonesia. Dalam upaya untuk secara terus-menerus mempergunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, masyarakat pers Indonesia sejak lama telah merumuskan sepuluh pedoman pokok pemakaian bahasa dalam pers, yaitu:

- 1) wartawan hendaknya secara konsekuen melaksanakan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan;

- 2) wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim;
- 3) wartawan hendaknya jangan menghilangkan imbuhan, bentuk awalan atau prefiks; pemenggalan awalan dapat dilakukan dalam kepala berita mengingat terbatasnya ruangan;
- 4) wartawan hendaknya menulis dengan kalimat pendek; pengutaraan pikirannya harus logis, teratur, lengkap dengan kata pokok, dan kata tujuan (subjek, predikat, objek);
- 5) wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau *stereo-type* yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata-kata *sementara itu, dapat ditambahkan, perlu diketahui, dalam rangka, selanjutnya, dan lain-lain*;
- 6) wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir dan bentuk jamak yang tidak perlu diulang;
- 7) wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya supaya jangan mencampurkan kalimat bentuk pasif (di-) dengan bentuk aktif (me-);
- 8) wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah-istilah yang terlalu teknis ilmiah dalam berita. Kalau pun terpaksa menggunakannya, satu kali harus dijelaskan pengertian atau maksudnya;
- 9) wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa;
- 10) wartawan hendaknya mengingat bahwa bahasa jurnalistik ialah bahasa yang komunikatif dan spesifik sifatnya dan karangan yang baik dinilai dari tiga aspek yaitu isi, bahasa, dan teknik persembahan (Harmoko, 1988).

Penerapan pedoman pemakaian bahasa tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh hampir semua media cetak di Indonesia walaupun di sana-sini masih sering dijumpai kesalahan atau penyimpangan dari kaidah yang baku. Penyimpangan berbahasa itu masih terjadi, dapat dipahami karena tuntutan keadaan dalam melaksanakan kegiatan kewartawanan, misalnya penyimpangan yang disebabkan oleh tuntutan teknis kewartawanan, terbatasnya ruang dan waktu untuk menyajikan berita. Dalam bidang kewartawanan, seorang wartawan diharuskan berbahasa yang memenuhi beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

- 1) tepat dan langsung kepada persoalan,
- 2) cepat dimengerti,
- 3) cepat dalam hal waktu (aktualitas),
- 4) hemat dan singkat, dan
- 5) menarik dan jelas dalam penyajian analisisnya (Harmoko:1988).

Dalam upaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, beberapa media cetak malahan secara khusus mengangkat redaktur bahasa yang ditugasi mengolah dan membina bahasa dalam beritanya.

3. Keadaan Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Media Cetak

Dalam pembinaan bahasa, media cetak memainkan peranan yang sangat penting. Hasil pengembangan bahasa seperti pembakuan ejaan dan tata bahasa, pemekaran

kosakata, dan pembentukan istilah apabila tidak disebarluaskan kepada masyarakat akan tinggal menjadi dokumen yang tidak bermanfaat bagi pengembangan bahasa itu. Kata-kata dan istilah-istilah yang baru, frasa, dan klausa baru apabila tidak disebarluaskan akan hanya berupa harta karun. Jika para guru dan murid diharapkan menjadi akrab dengan kosakata dan istilah-istilah baru yang telah dibakukan, maka kosakata dan istilah itu haruslah masuk ke dalam buku pelajaran yang dipakai. Jika ilmuwan diharapkan agar menggunakan istilah yang sudah dibakukan dengan taat asas (konsisten), istilah itu perlu disebarluaskan melalui berbagai cara. Wahana yang paling efektif untuk mencapai tujuan itu adalah pendidikan dan media massa.

Karam (dalam Fishman 1974) memandang peranan media massa sangat penting baik pada proses penciptaan maupun pada proses pemantapan penggunaan bentuk dan pemakaian yang dikehendaki. Malahan, Ray (1963) menunjukkan peran penting media massa tidak hanya terbatas dalam kedua proses itu tetapi juga dalam perannya sebagai model yang sangat berpengaruh terhadap pendengar atau pembacanya. Kata *mantan* menjadi populer ketika semua surat kabar dan media cetak lainnya terus menggunakannya untuk menggantikan kata *bekas*. Begitu juga kata *pantau* dan *canggih* menjadi tidak asing lagi untuk menerjemahkan perkataan *monitor* dan *sophisticated*. Akhir-akhir ini kata *entas* dengan pelbagai variasi bentuknya seperti *mengentaskan*, *pengentasan*, dan sebagainya juga menjadi populer karena pengaruh media cetak.

Walaupun tidak sedikit kritik yang sering dialamatkan kepada pemakai bahasa Indonesia oleh media massa, termasuk media cetak, disebabkan masih seringnya didapati penyimpangan dari kaidah yang baku sehingga setengah orang sering mencap wartawan atau media cetak sebagai "perusak bahasa", tetapi satu kenyataan yang tidak dapat dibantah adalah bahwa surat kabar, majalah atau media cetak lainnya memberi andil yang cukup besar dalam upaya menggalakkan penggunaan bahasa Indonesia dengan benar.

Kliping kebahasaan dan kesastraan tahun 1988–1990 oleh Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang, demikian juga Bahasa dan Susastra dalam Guntingan 1992 dan 1993 oleh Pusat Bahasa memperlihatkan adanya beberapa surat kabar harian dan mingguan serta majalah yang secara teratur menyediakan kolom rubrik khusus pembinaan bahasa Indonesia.

Masalah yang dikemukakan di dalam media cetak itu cukup luas dan bervariasi. Dalam garis besar masalah-masalah itu, antara lain, meliputi kesalahan umum pemakaian bahasa Indonesia, pemakaian kata dan ungkapan yang tidak tepat, pemakaian preposisi *dari* dan *daripada*, kata dan maknanya, pemakaian kata yang sinonim, pilihan kata atau diksi, serapan kata asing, serta masalah yang berhubungan dengan penulisan yang sesuai dengan ejaan yang baku, yakni Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

Penyuluhan tentang masalah yang berkaitan dengan pembentukan kata bahasa Indonesia juga banyak mendapat perhatian dalam media cetak. Antara lain, dikemukakan masalah pembentukan kata dengan imbuhan, peranan analogi dalam pembentukan kata, perulangan, dan pemajemukan.

Masalah yang berhubungan dengan kecermatan dalam penyusunan kalimat yang baik dan benar juga memperoleh tempat yang cukup banyak dalam media cetak. Dalam tataran sintaksis ini, antara lain, dikemukakan unsur-unsur yang berperan dalam pembentukan kalimat bahasa Indonesia, pola-pola kalimat bahasa Indonesia, pola retorika kalimat bahasa Indonesia, merapatkan kalimat, kalimat tidak selesai, kalimat efektif, dan ungkapan penghubung antarkalimat, dan lain-lain.

Selain masalah ejaan, kosakata dan pembentukan kata, serta tata kalimat, seperti telah dikemukakan, masalah paragraf, wacana, dan laras bahasa juga adakalanya mendapat tempat dalam media cetak. Melalui artikel dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, dikemukakan antara lain tentang jenis, fungsi, dan struktur paragraf yang baik, serta petunjuk praktis penataan dan pengembangannya. Demikian pula dalam hal wacana yang memenuhi syarat keruntutan dan kepaduan.

Selain pembinaan yang berkaitan dengan masalah struktur bahasa, dalam media cetak juga dimuat tulisan yang berhubungan dengan pembinaan bahasa dalam hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran, sikap terhadap pemakaian bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa daerah dan bahasa asing, serta masalah-masalah lain dalam upaya mempertinggi mutu pemakaian serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Masalah-masalah yang dikemukakan di dalam media cetak tersebut secara umum dapat kita kelompokkan ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan

- a. tata bunyi dan ejaan,
- b. kosakata dan peristilahan,
- c. struktur bahasa,
- d. paragraf dan wacana,
- e. hubungan bahasa dengan pemakai dan pemakaiannya,
- f. pemerolehan dan pengajaran bahasa,
- g. kontak bahasa Indonesia dengan bahasa lain, dan
- h. hal-hal yang berkaitan dengan kesastraan.

Jika dilihat dari penyajiannya, masalah bahasa yang dikemukakan dalam media cetak pada umumnya berbentuk ulasan, berita, artikel, surat pembaca, dan tanya jawab.

4. Media Cetak dan Hasil Pengembangan Bahasa

Yang menjadi pertanyaan sekarang seberapa jauh isi tulisan yang dimuat di media cetak itu memanfaatkan hasil pengembangan bahasa yang telah ada? Bagaimana pertanggungjawaban ilmiah tulisan-tulisan itu? Untuk menjawab pertanyaan di atas, marilah kita perhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan upaya pengembangan bahasa yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta hasil-hasilnya.

Upaya pengembangan bahasa Indonesia bertolak dari kenyataan bahwa bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, harus dapat

menjalankan perannya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam masyarakat Indonesia yang makin maju dan modern. Bahasa Indonesia juga dituntut untuk dapat menjalankan peran kemasyarakatan yang sebelumnya belum pernah didukungnya. Sebagaimana halnya dalam masyarakat maju dan modern lainnya, bahasa harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pemakainya dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, keamanan, kebudayaan, dan lain-lain (Moeliono, 1985).

Itulah sebabnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) setiap lima tahun mengamanatkan perlunya pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaannya terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar makin menjangkau seluruh masyarakat. Pengembangan bahasa Indonesia melalui upaya pendidikan, pembakuan peristilahan, dan kaidah bahasa serta pemekaran perbendaharaan bahasa dimaksudkan agar bahasa Indonesia mampu menjadi sarana pengungkap cipta, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi (GBHN 1993). Dalam mengemban amanat tersebut, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai lembaga yang disertai kewenangan merencanakan dan melaksanakan usaha pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia telah menghasilkan, antara lain:

- a. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*,
- b. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*,
- c. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*,
- d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- e. kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, dan
- f. hasil penelitian dalam berbagai aspek bahasa Indonesia.

Hasil pengembangan bahasa tersebut sebagian dicetak dalam bentuk buku, sebagian lagi dalam lembaran komunikasi atau bentuk-bentuk lain untuk diketahui oleh khalayak. Hasil pengembangan bahasa tersebut hanya akan berhasil apabila dapat diterima dan dipergunakan oleh masyarakat. Di sini peranan media massa pada umumnya dan media cetak pada khususnya sangat menentukan. Seperti dikatakan oleh Ferguson (1968) dan Ray (1963) media massa memainkan peranan yang penting baik dalam proses maupun dalam pelaksanaan pengembangan bahasa itu disebabkan oleh kemampuannya yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengaruhnya, kaidah baku, model bentuk pemakaian bahasa yang akan ditawarkan, istilah dan kosakata baru yang akan diperkenalkan akan ditiru dan diterima oleh khalayak pemakai bahasa itu.

Apabila kita amati isi tulisan dan rubrik pembinaan bahasa Indonesia yang terdapat dalam beberapa media cetak, isi tulisan dan rubrik tersebut sebagian besar telah memanfaatkan hasil pengembangan bahasa seperti disebutkan di atas. Rubrik pembinaan bahasa Indonesia dan *Mimbar Karya*, M. Arief Mattalitti memanfaatkan Lembar Komunikasi yang diterbitkan Pusat Bahasa dalam menjawab pertanyaan tentang berbagai masalah bentuk kata, makna kosakata, kalimat efektif, kalimat rancu, dan lain-lain.

Masalah penulisan kata dengan huruf F, V, dan PH; pemakaian kata berlebih, masalah pemakaian akhiran *-i* dan *-kan* yang selalu kacau, masalah pengulangan kata, merapatkan kalimat, dan kalimat tidak selesai merupakan sebagian dari sejumlah tulisan rubrik pembinaan bahasa Indonesia dalam *Mimbar Karya* yang diasuh oleh J.S. Badudu. Rubrik tersebut umumnya berisi penjelasan atau uraian tentang berbagai masalah pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang perlu mengacu kepada kaidah atau bentuk yang baku.

Rubrik pembinaan bahasa Indonesia lainnya seperti *Bina Bahasa* dalam *Masa Depan* asuhan E. Zaenal Arifin dan seri pembinaan bahasa Indonesia pada Pedoman Rakyat oleh Abdul Muthalib dan kawan-kawan semuanya berisi penjelasan masalah kebahasaan berdasarkan hasil pengembangan bahasa Indonesia yang diterbitkan dan diedarkan oleh Pusat Bahasa yang berupa Seri Penyuluhan Bahasa.

Rubrik *Santun Bahasa* asuhan Anton M. Moeliono yang pernah termuat di dalam harian *Kompas* setiap hari Rabu pada pokoknya berisi tema-tema pembinaan bahasa berdasarkan hasil pengembangan bahasa Indonesia yang bertujuan membangkitkan kemelitan pembaca untuk mengetahui kata putusnya.

Di samping rubrik dan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembinaan bahasa tersebut, masih dijumpai pula banyak kegiatan yang dapat dipandang sebagai upaya pembinaan bahasa dalam bentuk pendapat, komentar, atau pernyataan yang dimuat dalam media cetak, baik surat kabar dan majalah yang mempunyai peredaran secara nasional maupun yang terbatas hanya dalam daerah tertentu.

Dalam *Bahasa dan Susastra dalam Guntingan* tahun 1992 dan 1993 cukup banyak dijumpai hal semacam itu. Tulisan atau rubrik pembinaan bahasa yang dimuat pada berbagai media cetak Indonesia dalam lima tahun terakhir, isinya ternyata sebagian besar telah memanfaatkan hasil pengembangan bahasa yang ada.

5. Upaya yang Perlu Dilakukan untuk Meningkatkan Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Cetak

Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang diamanatkan oleh MPR dalam GBHN telah menghasilkan seperangkat hasil kodifikasi dan pembakuan dalam berbagai aspek bahasa Indonesia. Sebagian dari hasil pengembangan itu telah berhasil mengangkat bahasa Indonesia untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai bahasa pembangunan di segala bidang sehingga bahasa Indonesia makin memperlihatkan kemampuannya dalam melayani fungsi kemasyarakatan yang belum pernah diembannya. Bahasa Indonesia telah menjelma menjadi bahasa pembangunan di dalam negara yang sedang membangun dirinya menjadi negara maju dan modern. Pada waktu ini hampir tidak ada lagi bidang kehidupan yang tidak dapat diperikan dalam bahasa Indonesia. Tiada perasaan dan pikiran serumit apa pun yang tidak dapat dinyatakan dalam bahasa Indonesia. Dan, tidak ada bidang ilmu dan teknologi yang tidak mampu diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Secanggih atau serumit apa pun bidang rekayasa dan pengembangan teknologi yang ada dewasa ini pada dasarnya

semuanya dapat dinyatakan dengan istilah dan kosakata bahasa Indonesia. Namun, seperti halnya dengan semua bahasa lainnya, bahasa Indonesia pun bisa tertinggal dari kemajuan kebudayaan yang berhasil diciptakan oleh manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkannya sendiri. Oleh karena itulah, upaya pengembangan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi perlu terus-menerus dilakukan. Pembinaan bahasa Indonesia perlu terus-menerus ditingkatkan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun 83 persen atau sebanyak 131,1 juta penduduk Indonesia yang berumur lima tahun ke atas dari sejumlah 158,2 juta dari golongan umur tersebut telah mampu berbahasa Indonesia (sensus penduduk 1990). Dari segi kualitas dan kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, keadaan itu masih cukup memprihatinkan. Penggunaan bahasa asing tertentu dalam reklame, iklan, dan nama-nama tempat atau badan usaha masih dapat dijumpai di mana-mana meskipun hal itu dapat ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar remaja lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) masih belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Juga cukup banyak pegawai pemerintah yang belum mampu membuat laporan dan surat dinas dalam bahasa Indonesia yang benar, padahal sebelum diterima mereka sudah dinyatakan lulus ujian bahasa Indonesia. Dalam kenyataan sehari-hari masih cukup banyak pejabat pemerintah yang belum dapat memperlihatkan contoh yang dapat diteladani dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan akhirnya, walaupun para wartawan sudah mempunyai sepuluh pedoman pokok untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam pers, kita masih tidak sulit untuk mencari penggunaan kata-kata atau kalimat yang tidak tepat pada halaman berbagai surat kabar atau majalah serta media cetak lainnya.

Mengingat keadaan seperti yang dipaparkan di atas, maka untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia melalui media cetak rasanya sudah perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) penerbit media cetak perlu mengangkat redaktur bahasa seperti telah dilakukan oleh beberapa penerbit dewasa ini;
- 2) media cetak perlu benar-benar berpegang pada sepuluh pedoman pokok pemakaian bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam menyusun berita;
- 3) penyediaan rubrik pembinaan bahasa Indonesia pada setiap media cetak perlu dilanjutkan dan ditingkatkan mutu penyajiannya;
- 4) isi rubrik pembinaan bahasa Indonesia pada media cetak perlu senantiasa mengacu pada hasil pengembangan bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga resmi kebahasaan (Pusat Bahasa);
- 5) perlu dijalin kerja sama yang lebih erat antara penerbit media cetak dan lembaga pengembangan bahasa, yakni Pusat Bahasa.

6. Penutup

Sesuai dengan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam GBHN 1993, pembinaan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian bangsa. Dalam kaitan ini media cetak yang mempunyai pengaruh yang luas dalam masyarakat memainkan peranan yang amat penting dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia.

Peningkatan rasa bangga berbahasa Indonesia serta pembinaan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia dapat dilaksanakan dengan mewajibkan penyediaan rubrik pembinaan bahasa Indonesia pada setiap media cetak di Indonesia, minimal sekali seminggu. Pembinaan bahasa Indonesia melalui media cetak perlu terus-menerus dilakukan mengingat peranannya yang begitu besar dalam mempengaruhi pembentukan sikap positif dan rasa bangga bangsa Indonesia terhadap bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia. Agar hal tersebut dapat terlaksana secara berkesinambungan, kerja sama yang lebih erat antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, lembaga pendidikan, dan media cetak perlu terus dijalin dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferguson, Charles A. 1968. "Language Development". dalam Fishman, Ferguson, dan Das Gupta (eds.) *Language Problems of Developing Nations*, 27-35.
- Fishman, Joshua A. 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Garis-garis Besar Haluan Negara 1993, Majelis Permusyawaratan Rakyat: Jakarta.
- Harmoko, 1988. *Peningkatan Komunikasi yang Efektif dengan Bahasa Indonesia untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halliday, Michael. 1973. *Exploration in the Functions of Language*. London: Edward Arnold.
- Karam, Francis X. 1974. "Toward a Definition of Language Planning". Dalam Fishman (ed.) *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Ray, Puny Sloka. 1963. *Language Standardization: Studies in Prescriptive Linguistics*. The Hague: Mouton.
- Said D.M., H.M. Ide. 1993. *Membangun Bahasa Pembangunan: Suatu Upaya dalam Pengentasan Kemiskinan*. Orasi Ilmiah Dies Natalis XXXII IKIP Ujung Pandang.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pembinaan Bahasa Indonesia melalui Media Cetak
Pemakalah : Zainuddin Taha
Pemandu : Mangasa Silitonga
Pencatat : Alma Evita Almanar
Widiyatmoko

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: La Ode Sidu, FKIP Universitas Haluoleo

Saya kira kita sependapat bahwa media cetak sangat penting, tetapi di dalam kenyataan, tadi sudah disinggung oleh Bapak Ishadi bahwa yang memperhatikan atau yang membaca rubrik pembinaan Bahasa Indonesia dalam media cetak itu sangat sedikit. Kenyataan itu juga merupakan pengalaman kami bahwa jarang sekali masyarakat memperbincangkan hasil bacaan mereka dalam pembinaan bahasa Indonesia. Kemudian, kita melihat pembinaan bahasa Indonesia dalam siaran televisi. Sebelum acara pembinaan bahasa Indonesia penonton cukup banyak, misalnya menyaksikan film *Mac Gyver*, dan *Kung Fu*. Tiba saatnya pembinaan bahasa Indonesia mereka bubar. Menurut saya barangkali kita perlu memikirkan apakah pembinaan bahasa Indonesia dalam media cetak atau media elektronik tetap begitu-begitu saja atau kita mencari bentuk lain sehingga masyarakat tertarik dengan acara itu. Misalnya, dalam media cetak disajikan dengan bentuk kuis. Kemudian, pembinaan bahasa Indonesia melalui siaran radio juga barangkali perlu diaktifkan kembali karena saat ini di daerah tidak ada lagi acara ini.

Jawaban:

Saya belum berani memberi jawaban yang pasti seberapa besar dan seberapa kecil peminat terhadap rubrik-rubrik kebahasaan yang biasa dimuat di dalam media cetak. Saya kira hal itu merupakan suatu hal yang sangat menarik dan merupakan lahan yang sangat baik untuk bahan penelitian masa yang akan datang.

Cara lain yang lebih menarik dan lebih efektif dapat kita sarankan pada badan atau lembaga yang terkait atau yang bertanggung jawab. Saya sependapat dengan Saudara bahwa jika keadaan seperti itu terus berlanjut memang akan mengakibatkan bertambah menurun atau bertambah berkurangnya perhatian terhadap upaya pembinaan bahasa melalui media cetak ini. Kalau dapat acara itu disajikan dengan cara-cara yang lebih bervariasi, lebih menarik, dan lebih menantang, bukan hanya semata-mata menyuguhkan suatu informasi kepada pembaca. Sekali lagi saya katakan bahwa kita memerlukan suatu penelitian di masa yang akan datang.

2. **Pertanyaan:** Nusa Tjahja Pratiwi, SMEA Negeri 3 Surabaya

Saya ingin menanyakan pembinaan bahasa Indonesia melalui media cetak. Pada kenyataannya tidak semua media cetak memuat pembinaan itu. Kalau pun ada, ironisnya saya sering melihat masih banyak kesalahan, seperti pemakaian kata, istilah, dan pemenggalan kata. Contoh kesalahan dalam pemenggalan kata adalah huruf *ng* dipenggal menjadi *n* dan *g*. Bagaimana dengan kondisi yang seperti ini?

Jawaban:

Tadi sudah saya katakan bahwa makalah ini tidak membicarakan pemakaian bahasa dalam media cetak, tetapi bagaimana media cetak itu menjadi wahana atau sarana untuk pembinaan bahasa. Saya mengakui dalam makalah saya ditulis bahwa mungkin tidak terlalu sulit bagi kita untuk mendapatkan kesalahan-kesalahan di dalam pemakaian bahasa Indonesia di media cetak itu. Akan tetapi, dalam cuplikan yang saya jadikan data itu, saya menemukan bahwa yang dimuat di media cetak itu sangat beragam dan sangat bervariasi, bukan hanya masalah-masalah yang berhubungan dengan kata, pembentukan kata, atau istilah-istilah, tetapi juga masalah-masalah yang cukup luas, seperti yang berkaitan dengan struktur dan rubrik imbauan untuk lebih meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran akan kebanggaan berbahasa Indonesia. Jadi, hal ini saya anggap penting. Soal kesalahan-kesalahan itu tidak hanya di surat kabar, tetapi juga dalam buku teks pun juga masih ada kesalahan-kesalahan seperti itu.

Saya tidak akan mengatakan bahwa kesalahan itu kita biarkan saja, tidak sama sekali. Kesalahan itu perlu terus kita perbaiki, tetapi jangan sampai kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang seakan-akan mengecilkan peranan atau arti media cetak itu.

Saya mohon maaf kalau jawaban saya tidak tepat seperti yang dimaksudkan oleh penanya.

BAHASA INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN MUTU KEWARTAWANAN

S. Sinansari-ecip
Harian Republika

1. Pengantar

Bahasa yang dipakai oleh wartawan mempunyai fungsi pokok sebagai alat komunikasi. Bahasa mempunyai tugas untuk menyampaikan pesan dari wartawan kepada khalayaknya. Kalau boleh diumpamakan, muatan truk adalah pesan, truk yang mengangkut pesan itu adalah bahasa. Bagaimana pesan tersebut dapat dibawa oleh bahasa untuk mencapai tujuan dengan efisien adalah bergantung pada teknik sajian. Ketiga komponen di atas merupakan unsur-unsur untuk menilai tulisan. Betapa jelas beratnya tugas bahasa di dalam perumpamaan itu. Tanpa truk, isi truk tidak akan sampai ke tujuan. Tanpa truk, tidak ada gunanya sopir yang mahir.

Wartawan tiap hari bergelut dengan berbagai karya tulis. Bahasa tidak dapat dilepaskannya. Penguasaan terhadap kemahiran berbahasa sangatlah penting bagi mereka. Jika kemahiran berbahasa tidak diperoleh dan dikuasai, pesan bagaimanapun besarnya tidak akan sampai sesuai dengan maksudnya.

2. Pengembangan

Menurut data PWI Pusat per Juni 1993, anggota PWI (anggota biasa dan anggota muda) seluruh Indonesia ada 3.686 orang. Jumlah yang belum menjadi anggota cukup besar juga, yaitu 2.355 orang. Mereka itu dalam status sebagai calon anggota. Setelah melalui proses beberapa waktu, calon anggota baru bisa menjadi anggota (muda). Diperkirakan masih ada beberapa ratus wartawan praktik yang belum menjadi calon anggota PWI karena berbagai sebab. Jumlah keseluruhan wartawan di Indonesia kurang lebih 6.500 orang. Sebagian besar di antara mereka sudah menjadi anggota PWI dan ada yang masih calon anggota dengan tingkat pendidikan dasar SLTA. Dari mereka yang masih calon anggota angka persentase yang mempunyai pendidikan dasar sarjana lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah menjadi anggota. Awalnya, pada waktu mereka semua mulai terjun ke dalam dunia kewartawanan dapatlah dipahami jika kemampuannya dalam tugas-tugas jurnalistik masih rendah, termasuk dalam berbahasa.

Sebagian besar wartawan Indonesia yang kini sedang bergiat, tidak langsung begitu saja siap pakai dari awal. Mereka *learning by doing*. Media tertentu tidak jarang

mengundang ahli bahasa untuk mengadakan semacam kursus atau penataran. Dalam pelaksanaan sehari-hari, para redaktur menjadi semacam instruktur kebahasaan bagi para reporter. Hasil bimbingan yang sehari-hari inilah yang lebih bermanfaat. Sayangnya, tidak sedikit para redaktur yang justru perlu lebih dulu ditatar kemahiran berbahasa.

PWI sendiri juga sering mengadakan Karya Latihan Wartawan (KLW) menyangkut berbagai bidang liputan. Khusus menyangkut KLW bidang bahasa, diselenggarakan pada tahun 1978 di Jakarta. Dari KLW itu dihasilkan semacam kesepakatan pedoman dalam menggunakan bahasa (Indonesia ragam jurnalistik).

Secara profesional, pengembangan mutu kewartawanan dalam hubungannya dengan mutu pemakaian bahasa Indonesia, sedikitnya sudah dilakukan. Namun, terus terang hasilnya belum maksimal. Ada tuduhan bahwa bahasa Indonesia wartawan justru merusak. Tentu tidak ada maksud negatif untuk merusak bahasa Indonesia. Kalau pun terjadi kesan yang demikian, penyebabnya adalah waktu kerja wartawan yang sempit. Tiap hari wartawan selalu dikejar-kejar waktu. Tekanan kerja yang demikian berat memerlukan kecermatan kerja dan sayangnya kecermatan di bidang lain (misalnya data, sumber, dan sistematika) sudah mendekati baik, tetapi kecermatan dalam berbahasa jadi anak tiri. Hal itu juga tidak dapat lepas dari anggapan umum bahwa berbahasa Indonesia itu mudah. Sebenarnya, yang tidak mudah adalah berbahasa Indonesia yang baku.

3. Kendala dan Kesalahan

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia di kalangan wartawan lebih pada manusianya. Wartawan, terus terang, seperti menganggap "ringan" dalam menggunakan bahasa Indonesia. Akibatnya, mereka merasa tidak perlu mencermatinya. Oleh karena itu, kesalahan sederhana pun sering dilakukan. Kesalahan tersebut meliputi beberapa hal seperti berikut ini.

a. *Kalimat Tidak Lengkap*

Kita tahu kalimat yang lengkap minimal mempunyai subjek dan predikat. Memang tidak harus seluruh kalimat memenuhi syarat tersebut. Namun, kekeliruan itu sering terjadi seperti sebagai berikut.

Ani tidak masuk kuliah. Sebab, sakit.

Bukankah sebaiknya kita memberi subjek dan membuang kata *sebab* pada kalimat kedua? Contoh di atas menjadi lebih baik, tanpa sama sekali mengurangi gaya wartawan dalam berbahasa Indonesia ragam jurnalistik:

Ani tidak masuk kuliah. Ia sakit.

Contoh itu dapat dijadikan satu kalimat:

Ani tidak masuk kuliah sebab sakit.

Bisa juga kata penghubungnya ditempatkan di bagian depan:

Sebab sakit, Ani tidak masuk kuliah.

Tidak jarang terjadi penggunaan yang berlebihan seperti dua contoh di bawah ini.

Ani tidak masuk kuliah. Sebab ia sakit.

Ani tidak masuk kuliah, sebab ia sakit.

Kata *sebab* pada contoh pertama perlu dibuang dan kata "ia" pada contoh kedua juga perlu dibuang.

Kerancuan itu juga menyinggung klausa. Klausa adalah sekelompok kata, tetapi mempunyai unsur subjek dan predikat. Kalimat *Sebab ia sakit* adalah klausa. Biasanya klausa terjadi karena didahului oleh kata penghubung.

b. Penggunaan Kata Penghubung

Kita mengenal dua jenis kata penghubung, yaitu kata penghubung intrakalimat dan kata penghubung antarkalimat. Pemakaian keduanya sering dikacaukan oleh wartawan.

Ani sakit. Tapi, masuk kuliah.

Penulis setuju penyingkatan kata penghubung antarkalimat *akan tetapi* dan kata penghubung intrakalimat *tetapi* menjadi *tapi*, demi kepraktisan. Akan tetapi, perlu diingat persyaratannya. Kata penghubung intrakalimat berada di dalam satu kalimat, dan menghubungkan bagian kalimat yang satu dengan bagian kalimat yang lain. Kata penghubung antarkalimat menghubungkan kalimat terdahulu dengan kalimat berikutnya. Oleh karena itu, penggunaan kata penghubung antarkalimat jelas memerlukan subjek. Terhadap contoh di atas, diperlukan perbaikan sebagai berikut.

Menggunakan kata penghubung intrakalimat:

Ani sakit, tapi masuk kuliah.

Menggunakan kata penghubung antarkalimat:

Ani sakit. Akan tapi, ia masuk kuliah. (Ada subjek dalam kalimat kedua)

c. Pemakaian Kata Depan

terdiri dari ----> sebaiknya: terdiri atas

antara Ali dengan Ani ---> sebaiknya: antara ... dan ...

d. Pemakaian Kata Depan dan Awalan di dan ke

ke tujuh ---> ketujuh

kemeja ---> ke meja, kecuali bila yang dimaksud adalah baju

e. *Penulisan Judul*

Acap kali huruf pertama pada judul (dan subjudul) kesemuanya berhuruf kapital. Menurut ketentuan, tidak semua huruf awal kata dalam judul berhuruf kapital. Kata depan, kata penghubung intrakalimat, adalah contoh kata-kata yang tidak ditulis kapital dalam judul dan subjudul.

f. *Kerancuan Logika Bahasa*

Contoh:

Menurut Ali mengatakan, ayam yang mati tiga ekor.

Subjeknya *Menurut Ali* ataukah *Ali*?

Jika harus menggunakan *Menurut Ali* maka diikuti oleh:

ayam yang mati tiga ekor. Namun, jika menggunakan subjek *Ali* saja, predikat *mengatakan* perlu ada.

g. *Kekacauan Menggunakan Kalimat Aktif-Pasif*

Oleh Ani mengatakan, ayam yang mati tiga ekor.

Kata *oleh* pada contoh tersebut seharusnya diikuti oleh kata kerja yang berawalan *di*. Akan tetapi, kenyataannya kalimat yang sudah diawali tanda-tanda kalimat pasif justru diikuti predikat kalimat aktif *mengatakan*. Dalam satu kalimat tidak mungkin ada kalimat pasif dan syarat kalimat aktif. Satu kalimat bisa kalimat pasif saja atau kalimat aktif saja.

Sebaik-baiknya kalimat jurnalistik, lebih atraktif, lebih tampak gerakan atau hidup, bila menggunakan kata kerja aktif. Contoh kekeliruan yang sering juga terjadi adalah soal alinea atau paragraf. Sering di dalam satu alinea dijejali oleh lebih dari satu pokok pikiran (topik). Tidak jarang pula, satu alinea hanya diisi oleh satu kalimat panjang, yang berkeinginan untuk tidak berakhir. Karena hal ini menyangkut komposisi atau sistematika tulisan, penulis tidak ingin membahasnya lebih lanjut.

Kendala dan kesalahan wartawan dalam berbahasa sebenarnya tidak terlalu besar. Pemecahannya sangat sederhana: gunakanlah bahasa Indonesia yang baku dengan maksimal. Kesadaran bahwa media massa ikut mendidik bangsa perlu diikuti dengan pemakaian bahasa yang baik dan benar. Untuk itu diperlukan "kemauan politik" dan "keputusan politik" pimpinan media yang taat asas. Artinya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus ketat, tanpa menutup kemungkinan terjadinya improvisasi. Improvisasi itu bisa, misalnya, mengenai lahirnya istilah atau kata-kata baru.

4. *Editor Bahasa*

Puluhan, bahkan sampai ratusan orang, bekerja di bidang redaksi suatu media massa. Mereka itu terdiri atas reporter dan redaktur. Diperlukan waktu yang lama

untuk membuat keseluruhan wartawan di dalam satu media bisa seragam dalam menggunakan bahasa Indonesia, termasuk gayanya. Karena demikian pentingnya waktu dan ketekunan, pelaksana yang dapat merapikan bahasa diperlukan. Tugas penyuntingan (*editing*) ini dilakukan oleh editor bahasa.

Tugas editor bahasa yang utama adalah menyeragamkan bahasa sesuai dengan kebijaksanaan redaksi. Pekerjaannya bisa meliputi perapian sistematika, alinea, kalimat, kata-kata, istilah-istilah, gaya, sampai salah ketik. Kemampuan seorang editor bahasa tiap hari kerja kurang lebih membenahi empat halaman. Jadi untuk surat kabar yang dua belas halaman, sedikitnya diperlukan tiga orang editor bahasa.

Hasil kerja reporter harus melalui proses *editing* atau bahkan *rewriting* oleh editor/redaktur halaman atau redaktur bidang. Tulisan yang sudah dikerjakan oleh redaktur inilah yang kemudian diperiksa bahasa dan sistematikanya lagi. Jika para redaktornya sudah berkualifikasi, editor bahasa tinggal memeriksa penggunaan bahasanya. Jika redaktornya sudah lebih mampu lagi, editor bahasa tinggal membenahi hal-hal kecil bahasa Indonesianya.

Editor bahasa tidak jarang bertugas juga sebagai "pengajar" bahasa di lingkungan kerjanya. Dia akan menghadapi berbagai kesalahan orang dalam berbahasa. Kesalahan paling dasar seseorang dalam berbahasa adalah bila tidak dapat membuat kalimat efektif. Kalimat bukanlah hanya sekumpulan kata begitu saja. Kalimat yang efektif, selain mempunyai struktur yang jelas, juga tiap kata di dalamnya harus mempunyai posisi yang jelas. Umumnya, bila seseorang tidak dapat membuat kalimat yang efektif, dia juga tidak akan dapat membuat alinea yang efektif.

Dari segi manajemen makin berkurangnya peran editor bahasa makin baik pekerjaan tersebut. Tentu saja maksudnya adalah para redaktur halaman/bidang juga sudah mempunyai kualifikasi tertentu setara dengan editor bahasa.

5. Lembaga Kewartawanan

Seperti diterakan di bagian depan makalah ini, PWI pernah menyelenggarakan Karya Latihan Wartawan di bidang bahasa. KLW itu adalah salah satu bagian dari KLW-KLW yang lain dan diselenggarakan pada bulan November 1978 di Jakarta. Hasil rumusannya diberi nama Sepuluh Pedoman Pemakaian Bahasa dalam Pers. Rincian pedoman itu sebagai berikut.

- 1) Wartawan hendaknya secara konsekuen melaksanakan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Hal itu juga harus diperhatikan oleh para korektor karena kesalahan paling menonjol dalam surat kabar sekarang ini ialah kesalahan ejaan.
- 2) Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim. Walaupun ia harus menulis akronim, maka satu kali dia harus menjelaskan tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya tulisannya dapat dipahami oleh khalayak ramai.

- 3) Wartawan hendaknya jangan menghilangkan imbuhan, bentuk awalan atau prefiks. Pemenggalan awalan *me-* dapat dilakukan dalam kepala berita mengingat keterbatasan ruangan. Akan tetapi, pemenggalan jangan sampai dipukulratakan sehingga merembet pula ke dalam tubuh berita.
- 4) Wartawan hendaknya menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Pengutaraan pikirannya harus logis, teratur, lengkap dengan kata pokok, sebutan, dan kata tujuan (subjek, predikat, dan objek). Menulis dengan induk kalimat dan anak kalimat yang mengandung banyak kata mudah membuat kalimat tidak dapat dipahami, lagipula prinsip yang harus dipegang ialah "satu gagasan atau satu ide dalam satu kalimat."
- 5) Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau *stereo-type* yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata-kata *sementara itu, dapat ditambahkan, perlu diketahui, dalam rangka, selanjutnya*. Dengan demikian, dia menghilangkan monoton (keadaan atau bunyi yang selalu sama saja) dan sekaligus dia menerapkan ekonomi kata atau penghematan dalam bahasa.
- 6) Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir seperti *adalah* (kata kerja kopula), *telah* (penunjuk masa lampau), *untuk* sebagai terjemahan *to* dalam bahasa Inggris, *dari* (sebagai terjemahan *of* dalam hubungan milik), *bahwa* (sebagai kata sambung), dan bentuk jamak yang tidak perlu diulang.
- 7) Wartawan hendaknya mendisiplin pikirannya supaya jangan campur aduk dalam satu kalimat bentuk pasif (*di*) dengan bentuk aktif (*me*).
- 8) Wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah-istilah yang terlalu teknis ilmiah dalam berita. Kalaupun terpaksa menggunakannya, satu kali harus dijelaskan pengertian atau maksudnya.
- 9) Wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa.
- 10) Wartawan hendaknya ingat bahwa bahasa jurnalistik ialah bahasa yang komunikatif dan spesifik sifatnya dan karangan yang baik dinilai dari tiga aspek, yaitu isi, bahasa, dan teknik persembahan.

Kesepuluh pedoman di atas masih berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia oleh wartawan pada dewasa ini. PWI seyogianya secara berkelanjutan menyelenggarakan kursus penyegaran di bidang bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Penyegaran ini penting untuk mengingatkan kembali mereka yang lupa. PWI tidak harus selalu menyelenggarakannya di tingkat pusat, cabang-cabang (dan atau cabang persiapan) perlu mengadakannya. Kerja sama penyelenggaraan dapat diperoleh dari perguruan-perguruan tinggi terdekat yang mempunyai pakar bahasa Indonesia.

6. Lain-Lain

Jika kelaziman mengizinkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik menghilangkan awalan untuk judul berita, mengapa tidak untuk memberi simbol tertentu pada kata ulang. Kesederhanaan dan kepraktisan (termasuk penghematan waktu dan ruang) diperoleh jika dibenarkan penggunaan angka 2 untuk kata ulang.

Contoh: banyak2 sebanyak2nya
 bingung2 kebingung2an
 tahun2 bertahun2

Bagaimanapun, bahasa Indonesia berkembang terus. Semua pengguna ragam dibenarkan untuk mengembangkan ragam tersebut, misalnya dalam hal pembentukan istilah baru. Sumbangan tersebut akan memperkaya bahasa Indonesia.

7. Simpulan

Tanpa bahasa, bagi wartawan dan media massa, tidak akan terjadi komunikasi. Bahasa Indonesia sejauh ini sudah berperan besar untuk itu. Penilaian atas media massa tidak bisa lepas tanpa penilaian atas pemakaian bahasanya. Pengayaan bahasa Indonesia oleh media massa akan bermanfaat bagi semua pihak. Akan tetapi, sebelum itu terjadi, lingkungan dalam media massa itu sendiri sudah perlu membenahi dan meningkatkan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. Takdir. 1955. *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia*. Jilid I, Cetakan XII. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Keraf, Gorys. 1977. *Tatabahasa Indonesia*. Ende: Nusa Indah.
- . 1993. *Komposisi*. Cetakan IX. Ende: Nusa Indah.
- Razak, Abdul. 1992. *Kalimat Efektif: Struktur, Gaya, dan Variasi*. Cetakan Kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Samsuri. 1973. *Memilih Kerangka Acuan Tatabahasa Bahasa Indonesia*. Malang: Biro I IKIP.
- Sherman, Theodore A. dan Simon S. Johnson. 1975. *Modern Technical Writing*. Englewood, NJ: Prentice-Hall Inc.
- Wojowasito, S. 1972. *Pengantar Sintaksis Indonesia*. Malang: Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKSS-IKIP.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Mutu Kewartawanan
Pemakalah : S. Sinansari-ecip
Pemandu : Maurits Simatupang
Pencatat : Hani'ah
M. Fanani

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan:

- Upaya apa yang harus dilakukan agar wartawan dapat menggunakan bahasa yang baik (karena umumnya pemakaian alinea tidak disiplin, tidak koheren, dan tanda baca tidak diperhatikan).
- Dalam wawancara, terutama pers tidak menangkap perubahan makna penggunaan bahasa sehingga ia tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ia menerima saja kesalahan bahasa, seperti *acuh* yang berarti *tidak acuh, semakin* yang diucapkan menjadi *semangkin*, dsb.
- Bagaimana jika pers menggunakan jenis bahasa tertentu untuk selera kelompok tertentu?
- Apakah pemakaian editor bahasa cukup efektif untuk mengadakan pembenahan ke dalam?
- Demi bahasa yang menarik, judul dibuat demikian rupa sehingga membingungkan orang. Apakah itu dibenarkan?
- Apa wartawan sudah mempunyai data yang cukup untuk menyampaikan informasi melalui media massa?

Jawaban:

- Diperlukan kemauan dan keputusan politik dari pimpinan media massa yang taat asas.
- Jurnalistik sastra tidak harus mengorbankan kaidah bahasa, tetapi harus diusahakan dengan kesadaran bahwa media massa adalah panutan. Jadi, adalah tugas wartawan untuk memperbaikinya.
- Dalam pers, bisnis juga penting. Wartawan perlu membuat isi sesuai dengan pasar. Untuk itu, diperlukan adanya riset pasar. Jangan sampai muncul iklan-iklan yang menyinggung, yang bisa mengakibatkan kehilangan keuntungan berjuta-juta rupiah.
- Pemakaian editor belum efektif. *Republika* menggunakan tiga editor, *Jawa Pos* tujuh editor, tetapi masih berantakan sebab editor umumnya dianggap berada di bawah wartawan.

- e. Wartawan diperbolehkan menghilangkan awalan demi efisiensi.
- f. Sebaiknya isi berita harus matang. Bila target tidak dicapai, wartawan harus menambah dengan data-data. Dalam hal ini, *Kompas* dan *Tempo* adalah contoh yang baik karena mempunyai dokumentasi yang sangat lengkap.

2. Pendapat:

- a. Berbicara tentang jurnalistik sastra atau ragam jurnalistik adalah mengada-ada. Yang ada adalah ragam sosial, seperti dialek, ragam profesional, dan sebagainya. Semua ragam menggunakan kaidah yang sama.
- b. Yang perlu diajarkan adalah disiplin berbahasa, yang berarti disiplin berpikir.
- c. Dibanding pakar bahasa, wartawan jauh lebih baik. Pakar bahasa tidak bisa menulis dengan baik sebab mereka selalu berpikir tentang bahasanya.

Tanggapan:

Setuju bahwa bahasa adalah alat berpikir. Jadi, bahasa memang harus komunikatif. Artinya, harus dapat diterima dari tingkat SD hingga tingkat profesor. Untuk itu, diperlukan kemahiran wartawan dalam berbahasa, yang memperlihatkan mutu kewartawanannya.

3. Saran/Usul

Disarankan agar sebaiknya semboyan diganti menjadi *Berbahasalah yang benar dan Komunikatif*.

PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Ishadi Sk.
Departemen Penerangan

"Humpuss Group Go Internasional".

Group bisnis yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra itu akan membuka Hak Penguasaan Hutan di Myanmar dengan investasi sebesar Rp160 milyar. Direktur Utama PT Rante Mario, Hery Sumardi dalam jumpa pers di Jakarta mengatakan pihaknya sedang mengadakan pembicaraan final dengan Counterpart mereka di Myanmar. "Terus terang saja kami masih *empot-empotan* menunggu peraturan manakala yang kira-kira diserap oleh pemerintah Myanmar" aku Hery (*Republika*, 21 Oktober 1993).

Contoh ilustrasi di atas pasti tidak akan kita temui di media televisi di Indonesia, paling tidak pada siaran beritanya. Medium televisi secara alamiah akan menghindari tutur bahasa seperti itu. Tentu saja pertama-tama kita harus membedakan antara acara resmi dan acara tidak resmi atau lebih tepat acara berita dan nonberita.

Yang dimaksud dengan acara berita adalah semua mata acara yang dibuat dengan pendekatan jurnalistik, termasuk di antaranya berita, *feature*, laporan khusus, wawancara, siaran olahraga, dan paket-paket informasi lainnya, sedangkan yang termasuk kategori nonberita adalah acara-acara yang sifatnya hiburan, olahraga, dan pendidikan.

Siapa pun yang diwawancarai oleh televisi pastilah mempersiapkan diri untuk bertata bahasa yang benar dan menghindarkan sedapat mungkin kata-kata yang bernada di luar kelaziman. Paling tidak editor televisi berita akan berhati-hati memeriksa yang salah dan berlawanan dengan tata bahasa yang lazim.

Siaran berita televisi di mana pun menjadi patokan, tidak hanya materi dan esensinya, tetapi juga tata cara penampilannya dan tutur bahasanya.

Makalah ini terutama akan mencoba membahas mengenai pendidikan bahasa Indonesia di televisi melalui acara-acara berita. Pada umumnya acara-acara berita televisi formal, tetapi harus dijaga agar komunikatif, dalam arti bisa dimengerti dan bisa dipahami secara mudah.

Karena siaran berita televisi menggunakan pendekatan jurnalistik, dasar susunan kalimat berita televisi harus memenuhi ketentuan jurnalistik 5W dan 1H—*who, what, where, when, why*, dan *how*. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berita apa pun yang disiarkan harus memenuhi kriteria ini.

Untuk memahami mengapa kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi pada siaran berita, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana proses berita itu diproduksi. Di setiap bagian pemberitaan televisi, terdapat Pusat Perencanaan Pengendalian Berita, biasa disebut sebagai *managing editor*. Bagian ini bertugas untuk memonitor kejadian dan peristiwa yang terjadi setiap hari di seluruh dunia. Berdasarkan masukan yang diperoleh, bagian ini akan merencanakan liputan-liputan yang diperlukan pada hari itu, termasuk pembuatan penugasan khusus untuk berita, yang ingin diangkat sebagai berita utama hari itu ataupun hari-hari selanjutnya.

Managing editor yang kemudian memerintahkan *crew* liput televisi untuk membuat berita memerintahkan reporter untuk mewawancarai tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang merupakan sumber berita dan memerintahkan koresponden untuk melaporkan peristiwa yang sedang berlangsung di wilayahnya.

Berita yang mereka peroleh diedit oleh tim editor. Editor gambar akan mengedit gambar dan editor suara, editor naskah akan mengedit naskah sebelum secara keseluruhan materi beritanya dibacakan oleh penyiar. Dengan demikian, sesungguhnya proses produksi berita televisi selalu melewati kegiatan yang berurutan dan panjang, *chek and recheck* mulai dari repoter di lapangan, editor, *desk* berita, pengarah acara, *managing editor*, hingga pembaca berita. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa masih terjadi juga kesalahan-kesalahan dalam ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang acapkali mengganggu.

Paling mudah jawabannya adalah keterbatasan waktu. Persaingan yang semakin ketat antarstasiun televisi, pusat pemberitaan televisi dipacu untuk menyiarkan berita lebih cepat dan lebih lengkap. Kalau perlu dalam bentuk produksi siaran langsung, stasiun-stasiun televisi dalam upaya menarik penonton lebih banyak telah menambah program yang dinamakan *news break*. Program khusus dirancang untuk melaporkan peristiwa yang sedang terjadi di tengah acara televisi yang sedang berlangsung.

Selaan (*interruption*) itu dilakukan agar paling tidak penonton mengetahui berita besar yang sedang terjadi pada suatu ketika sebelum mereka akan menyaksikan berita yang lebih lengkap pada jam berikutnya.

Para redaktur berita dikejar oleh *dead line*, yaitu batas waktu terakhir sebelum siaran berita ditayangkan. Acapkali *dead line* hanya 30 menit sebelum berita. Dapat pula terjadi berita susulan diselakan secara mendadak di tengah-tengah berita yang sedang berlangsung. Pada situasi seperti itu, dapat dipahami seandainya kerap terjadi kesalahan-kesalahan di dalam penggunaan tata bahasa.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah yang "mepet" dan kelaziman untuk menempatkan *dead line* berdekatan dengan waktu siaran berita, dinyatakan sah untuk membuat berita yang menyalahi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Jawab sesungguhnya tentu tidak. Kesalahan bahasa dapat dihindarkan apabila para redaktur menguasai dengan baik tata bahasa jurnalistik televisi. Di sinilah letak permasalahannya. Permasalahan yang mendasar adalah lemahnya penguasaan tata bahasa Indonesia pada sebagian redaktur televisi. Kalau kita urut ke belakang, hal itu tentu berpulang pada tingkat pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah.

Sudah umum diketahui bahwa pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi menurun kadarnya. Dua puluh tahun yang lalu para siswa, SLTP dan SLTA, diwajibkan membaca buku-buku sastra, mengarang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada waktu itu siswa masih akrab dengan buku-buku sastra karya Sutan Takdir Alisjahbana, Suman HS., Nur Sutan Iskandar, Marah Rusli, Hamka, Sanusi Pane, dan lain sebagainya.

Sekarang ini tampaknya kewajiban membaca karya-karya sastra itu sudah tidak ada lagi. Akibatnya, pemahaman bahasa Indonesia di kalangan para siswa SLTA dan mahasiswa serta sumber daya manusia para reporter dan redaktur berita televisi menurun dengan tajam.

Di mana pun pusat pemberitaan media cetak, radio, dan televisi, menjadi acuan dari pengguna bahasa. Itulah sebabnya, para redaktur khususnya surat kabar, kantor berita, stasiun radio, dan televisi yang "prestisius" amat memperhatikan bahasa jurnalistik mereka.

Negara pengguna bahasa Inggris di luar Amerika Serikat, mengacu pada BBC untuk bahasa Inggris yang baku dan mutakhir.

Di Jerman Duetsche Welle yang bekerja erat dengan lembaga pengajaran dan pengkajian bahasa, Goethe Institute menjadi acuan bagi penggunaan bahasa Jerman di jaringan televisi ARD, ataupun di ZDF. Di Amerika Serikat standar bahasa jurnalistik media cetak, radio dan televisi, mengacu pada patokan yang biasa digunakan di dua kantor berita negara tersebut, Associated Press (AP) dan United Press International (UPI). Koran Prancis *Le Monde* merupakan standar di negara itu, sementara Frank Furter *Algemeine Zeitung* dikenal amat hati-hati dalam menggunakan bahasa Jerman yang baik dan benar.

Majalah *Time* dan koran *New York Times* yang juga menerbitkan *New Yorker* amat memperhatikan kata-kata dan susunan bahasa Inggrisnya. Di Indonesia hingga sekarang belum ada standar yang baku untuk penulisan jurnalistik.

Beberapa media memang diakui menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memaksa wartawannya untuk mematuhi patokan itu. Harian *Pedoman* pada masa terbitnya dikenal amat membantu upaya pengembangan dan penggunaan

bahasa Indonesia yang benar. Koran inilah yang memperkenalkan istilah *anda* bagi sapaan terhadap pihak ketiga, yang dipakai kemudian sebagai kata yang baku dalam bahasa Indonesia. Harian *Kompas* dan majalah *Tempo* diakui kadar perhatiannya tinggi terhadap bahasa Indonesia.

Bagaimana sebuah penerbitan atau siaran yang "prestisius" mampu mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

- a. Memili kemauan politik dari pemilik atau pimpinan redaksi yang bersangkutan untuk menetapkan bahwa media yang dikelolanya berketetapan dengan cara apa pun mengibarkan identitas dirinya sebagai pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- b. Menjaring calon wartawan dengan menekankan kemampuan pemahaman bahasa dan kesusastraan Indonesia, sebagai prasyarat utama.
- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terus-menerus terhadap penggunaan bahasa Indonesia dan istilah yang baku medianya.
- d. Menempatkan redaktur khusus yang membina dan melatih redaktornya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Keempat langkah tersebut seyogianya didorong untuk diikuti oleh para pengelola televisi di Indonesia sekarang ini. Pengaruh media televisi terasa lebih besar karena tidak saja jumlah khalayaknya lebih besar, tetapi juga karena media ini menjangkau segmen yang lebih luas dan beragam.

Data penelitian Litbang Deppen memperkuat kesimpulan tersebut, seperti dalam tabel berikut.

DATA TIME USE

No.	Jenis Kegiatan	Waktu yang Digunakan	
		Hari Kerja	Hari Libur
1.	Menonton televisi	1.12'	1.46'
2.	Membaca	0.24'	0.17'
3.	Mendengarkan radio	2.23'	0.33'

Sumber: *Time Use Survey*, Deppen RI & JICA, 1992

ACARA TELEVISI YANG SERING DITONTON (BERITA DAN PENERANGAN)

No.	Jenis Kegiatan	%
1.	Dunia dalam Berita	57.47
2.	Ragam Desa	27.03
3.	Berita Nasional	24.53
4.	Siaran Olahraga	16.36
5.	Siaran Nusantara	14.87
6.	Berita Nusantara	10.64
7.	Laporan Khusus	8.51

Kedua tabel tersebut menunjukkan data besarnya waktu yang digunakan pendudukan Indonesia untuk menonton televisi. Tabel kedua memperlihatkan dari jumlah waktu yang digunakan ternyata bagian terbesar adalah untuk menonton DDB. Produk berita televisi amat dominan pengaruhnya. Dalam alur bahasan kali ini amat besar pengaruhnya dalam pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara itu, tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah melakukan kontak terus-menerus dengan para redaktur televisi. Oleh karena itu, baik juga dilakukan penyusunan standar bahasa jurnalistik yang bisa digunakan oleh redaktur media cetak maupun televisi. Hal terakhir ini barangkali bisa dilakukan bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Di samping itu, terbitan berkala mengenai temuan kata baru dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, perlu diterbitkan agar perbendaharaan kata yang baru tersebut dapat dimasyarakatkan secara luas.

Masih jauh panggang dari api untuk mengharapkan penggunaan bahasa Indonesia pada siaran berita televisi menjadi baik dan sempurna dalam waktu singkat, selama sumber daya manusia untuk redaktur masih menghadapi masalah yang sama, yaitu amat rendahnya mutu pelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SLTA dan perguruan tinggi sekarang ini.

Pada era globalisasi sekarang ketika "transnasional televisi" dan televisi negara tetangga dengan amat gampang merambah wilayah Indonesia, sudah tiba waktunya untuk memacu lebih keras lagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui televisi Indonesia agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tersebut secara luas mengungguli pengaruh bahasa-bahasa lain yang datang dengan amat leluasa sekarang ini.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pendidikan Bahasa Indonesia melalui Media Elektronik
Pemakalah : Ishadi Sk.
Pemandu : Yayah B. Lumintaintang
Pencatat : M. Djasmin Nasution
: Marthalena A.M.

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Prahastoeti Adhitama, Majalah *Eksekutif*

Saya setuju dengan semua yang dikemukakan pemakalah. Namun, menurut saya, ada beberapa hal yang masih diperdebatkan atau dikaji lebih lanjut, seperti *mengangkat hal sama* pada kongres bahasa yang dibakukan lima tahun sekali *tidak merugikan* (pendapat ini dikemukakan untuk mendebat pernyataan pemakalah bahwa kita jangan mengangkat hal yang sama pada kongres-kongres bahasa).

Kalau diadakan evaluasi, surat kabar *Pos Kota* bukan yang terburuk, dalam hal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. *Pos Kota* sama buruknya dengan yang lain, dengan majalah *Eksekutif*, *Tempo*, dan surat kabar *Kompas*. Yang berbeda adalah pilihan materinya. Jadi, antara pemilihan materi dan penggunaan bahasa harus dibedakan.

Ancaman bahasa asing itu bukan pada kosakata bahasa Indonesia, tetapi pada *struktur* dan *pengucapannya*. Untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, justru, kita harus lebih terbuka menerima kosakata bahasa asing. Bahasa Inggris menjadi unggul di dunia adalah juga karena bahasa Inggris terbuka dan menampung semua bahasa dunia. Kita tidak harus menerjemahkan semua bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia karena adakalanya padanannya dalam bahasa Indonesia sulit dicari. Untuk mendapat padanannya seringkali kita mencari-cari ke dalam bahasa Jawa Kuno atau Sanskerta. Padahal, walaupun tidak banyak yang tahu, bahasa Sanskerta itu adalah "saudara" atau "nenek moyang" bahasa Inggris. Lalu, kenapa yang muda kita tolak, yang tua justru kita terima?

Saya mengusulkan agar Pusat Bahasa memperhatikan dengan cermat bahasa yang digunakan oleh media massa, khususnya media elektronik. Hal itu mengingat hasil penelitian yang diungkapkan oleh Ishadi tadi bahwa Dunia dalam Berita adalah acara yang paling sering ditonton orang.

Jawaban:

Saya setuju dengan pendapat Toeti Adhitama bahwa tidak semua bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hanya yang diinginkan, jika ada bahasa asing yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia seharusnya Pusat

Bahasa memberi tahu redaktur atau editor surat kabar dan majalah mengenai kata asing yang dibakukan itu, mengenai penulisannya, dan pengungkapannya. Inilah yang disebut sebagai satu mekanisme, yaitu saluran komunikasi antara Pusat Bahasa dengan redaktur, editor surat kabar, dan majalah. Kebetulan, tanggal 3 Desember 1993 ada Kongres PWI di Lampung, bagaimana kalau Pusat Bahasa "berbicara" di kongres tersebut untuk menjalin kerja sama. Menurut saya, hal itu tidak sulit asalkan mekanismenya sudah disusun sehingga bulan Januari yang akan datang programnya sudah bisa berjalan. Contoh lain untuk membiasakan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah cerita mengenai pembicaraan pramugari sebuah penerbangan Malaysia. Bahasa yang digunakan oleh pramugari untuk mengumumkan suatu hal di dalam penerbangan baik sekali. Menurut pramugari tersebut, dia menggunakan bahasa yang standar. Bahasa standar itu diperolehnya dari pimpinannya. Akan tetapi, ia tahu persis bahwa pimpinannya sudah berkonsultasi dengan lembaga bahasa Malaysia. Apakah itu sudah dilakukan Garuda? Menurut pemakalah, hal itu mudah. Pusat Bahasa tinggal meminta teks yang akan dibacakan oleh pramugari, dikoreksi, lalu kirim surat kepada Pak Wage Muliono agar disebarakan kepada seluruh *crew* agar menggunakan teks yang sudah dikoreksi itu. Cara ini sangat besar manfaatnya.

2. **Pertanyaan:** Tomo, RRI Jakarta

Menurut saya, kesalahan-kesalahan dalam pembacaan warta berita, baik di radio maupun di televisi, adalah kesalahan pada struktur bahasanya. Misalnya, penggunaan kata depan yang salah, penghilangan kata sambung, dengan alasan untuk efisiensi dan penghilangan subjek. Mengenai intonasi, memang sulit diseragamkan berhubung Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, yang masing-masing mempunyai "lagu" nya sendiri. Jadi, sejauh penggalan katanya masih benar, menurut saya, hal itu tidak perlu dikhawatirkan.

Dalam rangka Bulan Bahasa, redaktur RRI mengadakan pertemuan. Di dalam pertemuan itu terbetik keinginan untuk meminta jasa Pusat Bahasa untuk mendampingi redaktur berita RRI. Hal itu muncul karena redaktur berita kewalahan menyajikan berita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebab latar belakang pendidikan redaktur berita itu bukanlah dari jurusan bahasa Indonesia. Masalahnya, dalam satu hari ada enam periode berita dengan redaktur yang berbeda. Apakah mungkin, dalam satu hari ada enam orang dari Pusat Bahasa yang mendampingi redaktur berita RRI?

Jawaban:

Saya setuju mengenai kesalahan struktur yang dikemukakan oleh Pak Tomo. Menurut saya, memang sangat tidak mungkin mengharapakan redaktur haruslah sarjana bahasa Indonesia sebab tuntutan lain yang juga sangat penting adalah bahwa redaktur harus menguasai bidangnya. Misalnya, redaktur ekonomi

sebaiknya sarjana tamatan Fakultas Ekonomi dan redaktur iptek sebaiknya sarjana dari ITB. Jadi, menurut saya, sumber daya manusianya yang perlu ditingkatkan. Di samping itu, redaktur selalu diburu-buru oleh *dead-line*, semua redaktur harusnya adalah redaktur yang *instant*, maksudnya penguasaan bahasa Indonesia itu harus sudah mendarah daging. Jika redaktur *instant* ini sulit didapatkan, sebagai langkah terobosan adalah menciptakan, kalau mungkin, komputer yang bisa memperbaiki struktur bahasa Indonesia. Jadi, redaktur tinggal menuliskan beritanya dan komputer mengubahnya menjadi sebuah berita yang sudah tersusun dalam struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. **Pertanyaan:** Suyanto

Saya setuju bahwa pengaruh kebudayaan Barat tidak bisa dibendung. Namun, untuk membendungnya, apakah majalah dan surat kabar dapat menyediakan kolom khusus bahasa Indonesia yang dimuat seminggu sekali?

Jawaban:

Saya mengkhawatirkan efektivitas kolom-kolom bahasa tersebut. Majalah *Intisari*, misalnya, selalu memuat kolom bahasa Indonesia pada tiap terbitannya. Akan tetapi, dari hasil penelitian saya, walaupun penelitian yang sangat sederhana, di antara sepuluh yang membaca *Intisari* hanya satu orang yang membaca masalah bahasa itu. Jadi, menurut saya, cara yang paling efektif untuk mendidik pembaca menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan menulis yang benar pada setiap beritanya. Untuk dapat mewujudkan hal itu, kembali terpolung pada masalah bahwa media massa harus mempunyai redaktur yang *instant*.

4. **Pertanyaan:** Soenardji, FPBS IKIP Semarang

- a. Inti makalah Pak Ishadi dapat dijadikan rumusan kongres.
- b. Instruksi Menteri No. 20 Tahun 1990 perlu ditingkatkan menjadi undang-undang karena instruksi tersebut berkenaan dengan pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui pemerintah daerah sampai ke kecamatan. Salah satu teknis pelaksanaannya adalah seperti yang diusulkan Pak Ishadi, yakni perlahan, tetapi pasti.

Jawaban:

Cara perlahan tapi pasti ini memang baik. Misalnya, kuis CNN setiap habis berita selalu disajikan kuis selama sepuluh detik. Pertanyaan yang diajukan, misalnya, di mana letak Amazone? Tiga detik kemudian, muncul jawaban Amazone terletak di Brazilia. Kalau TVRI atau RCTI mau menayangkan kuis seperti ini, saya yakin, hasilnya akan baik sekali, efektif.

Kuis dibuat dengan format yang menarik, seperti apakah padanan kata *performance*. Tiga detik kemudian, muncul jawaban padanan kata *parforman* adalah *kinerja*. Masalahnya, siapakah yang akan memulai?

5. **Pertanyaan:** Imam Sukarsono, Staf Ahli Dewan Koperasi Indonesia

Bahasa Indonesia tidak terancam oleh bahasa Inggris, tetapi terpolusi. Misalnya, pada peristiwa-peristiwa ulang tahun atau peresmian-peresmian, dibuat ucapan *congratulation*. Padahal, yang ulang tahun dan yang mengucapkannya sama-sama orang Indonesia. Contoh lain, pejabat menulis surat resmi kepada pejabat lain dengan menggunakan kertas surat resmi yang menggunakan bahasa Inggris. Mengapa? Saya bukan anti bahasa Inggris. Sebaliknya, saya adalah penganjur agar orang menguasai bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris akan terasa lebih mudah menambah pengetahuan. Akan tetapi, semangat mempelajari bahasa asing jangan lebih tinggi daripada semangat mempelajari bahasa Indonesia. Nanti malah bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua.

Jawaban:

Orang yang menguasai bahasa Inggris separuh-separuh memang biasanya lebih suka menggunakan bahasa Inggris agar kelihatan lebih hebat. Namun, ada yang perlu diperhatikan. Dari pengalaman saya sebagai redaktur, saya berpendapat ada kalanya bahasa asing lebih terasa tepat digunakan daripada padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, *sport* lebih tepat daripada *olahraga*. Kata *olahraga* terasa panjang. *Sport studio* juga kedengarannya lebih pas, keren, dan lebih laku daripada *studio olahraga*. Juga kata *news* 'berita'. Dalam bahasa Indonesia, *news* mau disebut apa? berita, berita-berita, atau siaran berita? Lalu, *news office*, apakah menjadi *kantor berita* atau *kantor pemberitaan*? Rasanya, lebih praktis kata *news*. Saya juga tidak setuju dengan pemakaian kata *stasiun* untuk *stasiun televisi*. Karena apa bedanya antara *stasiun televisi* dan *stasiun Gambir*? Apakah itu sama? Jadi, menurut saya, ada kalanya bahasa asing dipertahankan. Begitu juga dengan kata *pub*, apakah kata *pub* ini harus dibuat menjadi *kedai kopi* atau *kedai teh*? Menurut saya ada baiknya *kepentingan bisnis* juga menjadi bahan pertimbangan. Mengenai anutan yang menggunakan bahasa asing untuk urusan resmi, memang, sebaiknya tidak terjadi. Bagaimana pun, andil anutan sebagai pendidik bahasa besar fungsinya.

STRATEGI PENYULUHAN BAHASA: SUATU PEMIKIRAN

A. Latief

Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa

1. Pengantar

Secara umum mungkin tidak salah kalau kita katakan bahwa semua putusan, simpulan, atau saran yang dihasilkan dalam Kongres Bahasa Indonesia I-V, langsung atau tidak langsung pasti ada kaitannya dengan upaya pembinaan atau pengembangan bahasa Indonesia. Dalam hubungan itu, pemakalah berasumsi bahwa peserta Kongres Bahasa Indonesia VI mempunyai pemahaman yang sama terhadap istilah pembinaan dan pengembangan bahasa, yaitu pembinaan bahasa bertumpu pada pembinaan pemakai atau penutur bahasa, sedangkan pengembangan bahasa dititikberatkan pada pengembangan bahasa itu sendiri. Bertolak dari pengertian tersebut, pemakalah yakin bahwa sejak Kongres Bahasa Indonesia I pun atau bahkan mungkin jauh sebelumnya, kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia sebagai bagian dari upaya pembinaan telah dilakukan walaupun tidak menggunakan istilah yang sama (lihat putusan Sumpah Pemuda 1928).

Makalah ini tidak berupaya untuk memberikan suatu strategi penyuluhan bahasa yang "siap pakai", tetapi akan mencoba melihat permasalahan pokok penyuluhan bahasa Indonesia itu secara lebih menyeluruh dan mencari kemungkinan pemecahan masalah tersebut melalui pendekatan tertentu.

Seperti kita ketahui bersama, upaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sering kali dinilai oleh masyarakat hanya berdasarkan informasi sesaat yang diperoleh dari penyuluhan yang dilakukan oleh Pusat Bahasa. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat itu ada yang sangat positif, tetapi banyak juga yang bernada negatif. Berdasarkan kenyataan ini, tampaknya Pusat Bahasa perlu memberikan perhatian yang lebih besar dan lebih bersungguh-sungguh terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukannya. Di samping itu, untuk masa yang akan datang pun penyuluhan masih akan sangat menentukan citra Pusat Bahasa.

2. Keadaan Penyuluhan Sekarang

Berdasarkan informasi yang ada, penyuluhan bahasa yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan cabang-cabangnya di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang yang

bernama Balai Penelitian Bahasa dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyuluhan langsung melalui kegiatan : a. tatap muka
b. telepon
2. Penyuluhan tidak langsung melalui : a. surat-menyurat
b. terbitan
c. radio/TV

Penyuluhan melalui kegiatan tatap muka pada umumnya berlangsung atas permintaan instansi atau kelompok tertentu dan dapat berlangsung di Pusat Bahasa/Balai Penelitian Bahasa atau di tempat lain atas kesepakatan bersama. Penyuluhan bahasa melalui telepon merupakan salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang boleh dibanggakan dalam upaya pembinaan bahasa, tetapi masih perlu dan dapat ditingkatkan.

Penyuluhan tidak langsung yang paling banyak dikomentari, baik yang positif maupun yang negatif, ialah penyuluhan melalui TVRI.

Sejak tahun 1990 Pusat Bahasa mulai melakukan penyuluhan di ibu kota propinsi dan berangsur-angsur menyelenggarakan penataran penyuluh.

Pada tahun 1993 ini Pusat Bahasa telah menggalang kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah tingkat satu, antara lain, guna memperluas jangkauan dan mempercepat keberhasilan penyuluhan.

Informasi lain yang dapat disampaikan ialah bahan penyuluhan yang digunakan sekarang untuk kegiatan tatap muka boleh dikatakan sudah "standar" yang meliputi politik bahasa nasional, bentuk dan pilihan kata, tata bahasa, dan surat-menyurat. Selain itu, jumlah penyuluh Pusat Bahasa kini sudah cukup banyak dan "penampilan" mereka pada saat bertugas pun sudah lebih baik daripada sepuluh tahun yang lalu.

3. Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya mungkin timbul kesan bahwa penyuluhan bahasa yang dilakukan selama ini sudah cukup memuaskan. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa hal ini merupakan salah satu penyebab mengapa kita tidak berusaha lebih keras lagi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Terlepas dari kebenaran "ramalan" itu, kita tentu sepakat untuk memikirkan dan merencanakan, berbagai langkah yang dapat ditempuh agar bahan penyuluhan itu lebih efektif dan efisien.

Langkah yang dapat dilakukan untuk tujuan ini ialah mendaftarkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan penyuluhan itu yang selama ini dianggap sebagai masalah atau sebagai penyebab timbulnya masalah.

Biasanya, kegiatan ini muncul dengan nama evaluasi. Pertanyaan pertama yang timbul ialah sudahkah Pusat Bahasa melakukan *evaluasi secara menyeluruh, terencana, dan bersungguh-sungguh*. Pertanyaan kedua yang dapat dikemukakan ialah bagaimana

ruang lingkup dan *prioritas* kegiatan penyuluhan bahasa pada waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang?

4. Pembahasan

Jika evaluasi secara menyeluruh, terencana, dan bersungguh-sungguh itu belum dilakukan dan tidak akan dilakukan, tampaknya kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bahasa yang benar-benar efektif dan efisien akan merupakan mimpi yang indah saja. Tidak akan ada orang yang menyangkal bahwa "evaluasi" kecil-kecilan dan dilakukan sekali-sekali kalau sempat memang pernah, bahkan beberapa kali dilakukan. Akan tetapi, evaluasi seperti yang dimaksudkan di atas merupakan satu-satunya pilihan, yang mutlak perlu dilakukan, kalau kita memang menginginkan hasil yang lebih baik (dalam menjelang tahun 2000 seperti yang tersurat dan tersirat dari tema Kongres Bahasa Indonesia VI ini).

Masalah ruang lingkup dan prioritas penyuluhan juga tak kalah pentingnya dengan masalah evaluasi itu. Artinya, selama kegiatan penyuluhan bahasa itu belum jelas ruang lingkup dan prioritasnya dari tahun ke tahun, sampai tahun 2000 sekurangnya, selama itu pula kita akan tetap terselimuti rasa kekurangpuasan (ramalan?). Guna mengurangi ketebalan selimut tersebut, kita perlu mempertimbangkan hal-hal berikut dalam merencanakan penyuluh.

- 1) Siapa yang akan dijadikan sasaran (pesuluh)?
- 2) Mengapa mereka yang dipilih?
- 3) Apa kebutuhan mereka?
- 4) Apakah bahan yang tersedia dapat menjawab atau memenuhi kebutuhan mereka?
- 5) Bagaimana tingkat keberterimaan dan kegunaan bahan yang akan disuluhkan?
- 6) Siapa yang akan memberikan penyuluhan itu (penyuluh)?
- 7) Media penyuluhan apa yang akan digunakan?
- 8) Teknik penyuluhan yang bagaimana yang tepat untuk sasaran itu?

Di samping pertanyaan di atas, masih perlu ditambahkan beberapa pertanyaan lagi guna mengatasi kendala motivasi dan tingkat kepedulian pesuluh terhadap tujuan informasi yang disuluhkan dan kemahiran pesuluh menggantikan informasi yang disuluhkan.

- 9) Berapa kali dan berapa lama seseorang sebaiknya diberikan penyuluhan?
- 10) Paket penyuluhan dengan kemasan yang bagaimana yang perlu "dipasarkan"?
- 11) "Pemasaran" yang bagaimana yang perlu dilakukan oleh Pusat Bahasa agar penyuluhan itu lebih berhasil dan lebih memasyarakat?

Makalah ini tidak bermaksud memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan di atas. Kita semua dapat memberikan masukan yang saling melengkapi untuk menentukan strategi yang tepat bagi kegiatan penyuluhan bahasa untuk masa yang akan datang (menjelang tahun 2000).

5. Penutup

Secara singkat kita dapat mengatakan bahwa keberhasilan penyuluhan bahasa lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor sosial daripada faktor bahasa itu sendiri. Walaupun demikian, mengingat pesan utama yang disuluhkan itu adalah informasi/kaidah kebahasaan, kesahihan dan kegunaan informasi itu juga sangat penting. Salah satu faktor sosial yang sangat perlu dipertimbangkan dan diterapkan dalam upaya peningkatan keberhasilan penyuluhan bahasa ialah prinsip manajemen, terutama manajemen strategik.

Dengan menerapkan prinsip tersebut masalah lain seperti perencanaan daya manusia dan dana pun akan terjawab pula.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Strategi Penyuluhan Bahasa
Pemakalah : A. Latief
Pemandu : Suparno
Pencatat : Utjen Djusen Ranabrata
Ani Mariani

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Apakah silabus mata kuliah penyuluhan seperti (1) sasaran, (2) bahan suluhan, dan (3) strategi sudah dianggap benar atau tidak.

Jawaban:

Teruskan apa yang telah dilakukan dan yang penting bagaimana caranya agar mereka (pesuluh) merasa perlu untuk disuluh.

2. **Pendapat:** Ahadi Sulissusiawan, Pemimpin Proyek Penelitian dan Pengembangan Bahasa Kalimantan Barat

Saya sependapat dengan kriteria penyuluhan yang dikemukakan pemakalah. Hanya menurut saya, perlu diprioritaskan sasarannya, yakni mengutamakan para pejabat atau orang-orang yang berpengaruh lebih dahulu.

3. **Tanggapan:** Hein Steinhauer, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Selama ini siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI tidak menarik karena (1) penonton seakan-akan diperlakukan seperti anak kecil dan (2) kurang penghargaan terhadap penonton.

4. **Saran/Usul:** J.D. Parera, IKIP Jakarta

- a. Perlu evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan yang sudah berjalan.
- b. Perlu ada tolok ukur untuk suatu penyuluhan yang berhasil.
- c. Perlu ada angket mengenai penyuluhan bahasa Indonesia di TVRI.
- d. Perlu ada program siaran secara tahunan.

PENINGKATAN APRESIASI SASTRA KLASIK INDONESIA: SUATU MASALAH

I. Kuntara Wiryamartana

Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada

1. Pengantar

Judul makalah ini sebenarnya merupakan masalah. Apakah yang dimaksud dengan istilah "sastra klasik Indonesia"? Samakah itu dengan "sastra lama" atau "sastra tradisional"? Misalnya, sastra Melayu, Jawa Kuna, Batak, Minangkabau, dan Makasar yang sedikit banyak terikat pada suku budaya tertentu? Jika memang demikian, pernahkah aneka ragam sastra itu diapresiasi serentak di seluruh Indonesia? Hal ini pun dapat diragukan.

Masalah lain yang lebih umum adalah apa yang dimaksud dengan "sastra klasik" itu? Sastra yang diapresiasi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang? Sastra yang mengalami transformasi dalam berbagai bentuk, termasuk berbagai seni, seni rupa, seni tari, seni suara, dsb.? Sastra yang mengurus pandangan hidup dan mentalitas? Dalam hal itu pun tidak bisa ditunjuk sastra yang bersifat demikian untuk seluruh Indonesia.

Untuk membahas persoalan itu, sesuai dengan studi yang kami geluti, kami memutuskan untuk bertolak dari sastra Jawa Kuna, yang oleh Teeuw (1983:79) disebut sebagai "sastra pramodern Indonesia yang unggul" dan "menjadi sumber dan tempat asal dari banyak hasil sastra Nusantara lainnya, yang pada umumnya terselamatkan dalam sastra Bali, Sunda, Sasak, Melayu, dan lain sebagainya". Secara khusus akan kami ajukan sebagai contoh apresiasi terhadap *Kakawin Arjunawiwaha*, salah satu karya sastra yang mempunyai kedudukan penting dalam berbagai kurun waktu dan berbagai wilayah di Indonesia. Contoh serupa dapat pula diajukan oleh wilayah-wilayah sastra lainnya.

Pembahasan ini lebih merupakan telaah kepustakaan sebagai rangsangan untuk diskusi lebih lanjut.

2. Kehidupan Sastra Jawa Kuna di Bali

Di Bali bahasa Jawa Kuna merupakan bahasa religius dan bahasa sastra. Sampai abad ini masih ditulis kakawin dalam bahasa Jawa Kuna (Pradotokusumo, 1986). Sastra Jawa Kuna merupakan sastra yang masih hidup: disalin, dibaca dalam *mabasan*,

diterjemahkan (ke dalam bahasa Bali, Indonesia, dan Inggris), disadur, diciptakan kembali ke dalam seni rupa, seni pertunjukan, dsb. Pembacaan kakawin (teks Jawa Kuna beserta pengartiannya) direkam dalam kaset dan dijual di toko-toko. Naskah-naskah direkam dalam komputer dan dapat dicetak secara bersih menurut format yang diinginkan.

Tidak semua bentuk pemeliharaan sastra tersebut pernah kami teliti. Akhir-akhir ini dilakukan penerbitan berbagai kakawin beserta pengartiannya dalam bahasa Bali dalam aksara Bali. Dalam hal *Kakawin Arjunawiwaha* dapat disebut beberapa terbitan. Terbitan yang dilakukan oleh I Gst. Bagus Sugriwa (1961) berupa terbitan teks lengkap dalam aksara Bali dengan transliterasi Latin, disertai dengan terjemahan dalam bahasa dan aksara Bali dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terbitan ini berwujud stensilan dalam 8 jilid. Terbitan lain adalah *Kakawin Arjunawiwaha: Dengan Arti dan Keterangan* oleh Made Menaka (1983). Terbitan ini memuat transliterasi Latin, *teges* (arti dalam bahasa Bali), *katerangan* (penjelasan arti kata dengan bahasa Bali), dan *wirasa* (tafsir dalam bahasa Bali). Oleh Dinas Pendidikan Dasar, Propinsi Daerah Tingkat I, Bali diterbitkan *Arjunawiwaha: Kakawin miwah Tegesipun* (1988) dalam aksara Bali.

Di Bali sastra Jawa Kuna merupakan bagian integral dari kebudayaan. Di situ sastra Jawa Kuna merupakan "sastra klasik" yang sesungguhnya. *Mutatis mutandis* hal itu berlaku untuk berbagai sastra di berbagai wilayah budaya di Indonesia.

3. Di Wilayah Budaya Jawa

Di Jawa sastra Jawa Kuna tidak hidup lagi. Kehidupan sastra Jawa Kuna kiranya terhenti sejak zaman Surakarta dengan munculnya gubahan-gubahan dalam *tembang macapat*, seperti *Serat Rama*, *Serat Bratayuda*, *Serat Wiwaha Jarwa*, dll. Karya-karya sastra ini menggantikan kedudukan karya-karya sastra Jawa Kuna dari zaman sebelumnya. Teks-teks yang tersimpan dalam naskah-naskah Merbabu-Merapi, yang berasal dari zaman Kartasura, menunjukkan bahwa pada zaman itu sastra Jawa Kuna masih dipelihara: disalin dan diterjemahkan (Wiryamartana, 1990). Dengan munculnya karya-karya gubahan zaman Surakarta dapat dikatakan sastra Jawa Kuna hilang untuk selama-lamanya. Di sini ada keterputusan yang tidak tersambung lagi. Dalam hal *Arjunawiwaha*, selain dalam *Serat Wiwaha Jarwa* gubahan Pakubuwana III yang jarang dibaca dalam *macapatan*, kehidupannya melekat pada seni pertunjukan, misalnya pentas wayang kulit atau wayang orang dengan lakon *Mintaraga* atau *Bagawan Ciptowening/Suciptahening* (Wiryamartana, 1990).

Dalam kaitannya dengan sastra Jawa Kuna dan masalah "sastra klasik" dapatlah dipertanyakan: apakah sastra Jawa Kuna merupakan "sastra klasik" bagi wilayah budaya Jawa? Pemeliharaan dan pengkajian sastra Jawa Kuna tidak lagi menjadi bagian integral dalam wilayah budaya Jawa. *Mutatis mutandis* pertanyaan serupa dapat diajukan untuk karya-karya sastra lain di berbagai wilayah budaya di Indonesia.

4. Dalam Rangka Se-Indonesia

Dalam khazanah sastra Melayu dikenal karya-karya saduran dari karya sastra Jawa Kuna, seperti *Hikayat Pandawa Lima*, dan *Hikayat Sang Boma*. Dengan demikian, sastra Jawa Kuna memasuki wilayah yang lebih luas daripada Bali dan Jawa saja.

Dalam hal *Kakawin Arjunawiwaha* tidak terdapat sadurannya dalam bahasa Melayu. Disebut-sebut adanya hikayat yang bernama *Hikayat Dati Kuaca*. Mungkin sekali hikayat ini saduran dari *Kakawin Arjunawiwaha*. Namun, belum diketahui apakah naskah itu masih tersimpan, dan di mana.

Dalam rangka se-Indonesia terbitan teks *Kakawin Arjunawiwaha* dan terjemahan dalam bahasa Belanda yang dikerjakan oleh Poerbatjaraka (1926) memegang peranan penting. Atas dasar teks terbitan Poerbatjaraka itu Sanoesi Pane mengerjakan terjemahannya, *Ardjoena Wiwaha Mpoe Kanwa* (1940), dengan pertolongan terjemahan Poerbatjaraka, tetapi pada beberapa bagian membuat pilihannya sendiri. Pada akhir "Kata Pendahoeloean"-nya Sanoesi Pane menulis, "Penjalin berbahagia dapat kesempatan menjampaikan warisan kesoesasteraan Djawa Koenoe sebahagian kepada angkatan sekarang" (Pane, 1940:5). Lewat terjemahan Sanoesi Pane sastra Jawa Kuna masuk ke dalam sastra Indonesia. Kalau tidak salah, terjemahan Sanoesi Pane ini pula dimuat dalam bunga rampai sastra ASEAN. Terjemahan baru atas dasar teks Jawa Kuna, khususnya menurut tradisi Jawa, telah dikerjakan oleh Wiryamartana (1990) dalam rangka kajian ilmiah.

Selain terjemahan-terjemahan itu, terdapat karya Sunardi D.M., *Arjunawiwaha* (1986), yang juga diterbitkan oleh Balai Pustaka. Menurut penulisnya, karya itu digubah berdasarkan *Serat Wiwaha Jarwa* karya Pakubuwana III. Ada pula karya Dakman Mudyadi, *Ardjuna Wiwaha* (1972), yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Buku ini termasuk dalam seri cerita untuk anak-anak dan remaja, berbahasa sederhana dengan saduran yang sesuai untuk pembaca sasarannya. Yang berwujud komik adalah karya R.A. Kosasih, *Arjunawiwaha* (1978). Meskipun mempunyai jalurnya sendiri, semua karya itu masih dapat dirunut sumbernya dalam khazanah sastra Jawa. Gebrakan yang menyimpang dari sastra Jawa dan pewayangan adalah *Arjunawiwaha-haha...!*, karya A.N.M. Massardi (1984). Semakin nyata bahwa *Arjunawiwaha* memasuki kancah sastra Indonesia.

Tentang karya-karya itu sepengetahuan kami belum pernah diadakan penelitian dalam rangka sambutan pembaca. Dari rentetan karya tersebut, yang kiranya baru sebagian saja tercatat, dapatkah *Arjunawiwaha* disebut sebagai salah satu karya "sastra klasik Indonesia"?

5. Simpulan dan Saran

Dari kasus di atas kiranya cukup sulit untuk menemukan batasan "sastra klasik Indonesia". Masih banyak jalur sastra lain se-Indonesia, yang perlu dirunut perannya dalam kancah sastra Indonesia. Jika "sastra klasik" dimengerti dalam kaitan dengan

sastra tradisional atau sastra daerah (berhadapan dengan sastra Indonesia yang dianggap sastra nasional), interaksi antarsastra se-Indonesia dengan segala transformasinya, termasuk perwujudannya dalam berbagai cabang seni, perlu diteliti dengan cermat.

Tidak kalah pentingnya adalah penelitian tentang sambutan pembaca terhadap semua karya sastra yang bersumber pada karya sastra tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Peningkatan apresiasi baru mungkin dilakukan bila yang ada sudah diketahui pemanfaatannya. Untuk sebagian sebenarnya para gurulah yang kompeten untuk mengurai masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakman, Mudyadi. 1972. *Ardjuna Wiwaha*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Dinas Pendidikan Dasar, Propinsi Daerah Tingkat I Bali. 1988. *Arjunawiwaha: Kakawin mīwah Tegesipun* (dalam aksara Bali).
- Kosasih, R.A. 1978. *Arjunawiwaha*. Bandung: Yayasan Karya Bhakti.
- Massardi, Yudhistira A.N.M. 1984. *Arjuna Wiwahahaha...!*. Jakarta: Garuda Metropolitan Press.
- Menaka, Made. 1983. *Kakawin Arjuna Wiwaha: Dengan Arti dan Keterangan*. Singaraja: Yayasan Kawi Sastra Mandala.
- Pane, Sanoesi. 1940. *Ardjoena Wiwaha Mpoē Kanwa*. Batavia-C: Balai Poestaka.
- Poerbatjaraka, R.M.Ng. 1926. *Arjuna-Wiwaha: Teks en Vertaaling*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Pradotokusumo, Partini Sardjono. 1986. *Kakawin Gajah Mada: Sebuah Karya Sastra Kakawin Abad Ke-20: Suntingan Naskah serta Telaah Struktur, Tokoh, dan Hubungan Antarteks*. Bandung: Binacipta.
- Sugriwa, I Gst. Bagus. 1961. *Kakawin Arjuna-Wiwaha*. 8 Jilid. Denpasar: Pustaka Balimas.
- Sunardi D.M. 1986. *Arjuna Wiwaha*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Teeuw, A. 1983. *Membaca dan Menilai Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Wiryamartana, I. Kuntara. 1990. *Arjunawiwaha: Transformasi Teks Jawa Kuna Lewat Tanggapan dan Penciptaan di Lingkungan Sastra Jawa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Peningkatan Apresiasi Sastra Klasik Indonesia: Suatu Masalah
Pemakalah : I. Kuntara Wiryamartana
Pemandu : Yus Rusyana
Pencatat : Ani Mariani

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Latifah Ratnawati, FKIP Universitas Sriwijaya

Makalah ini berjudul "Peningkatan Apresiasi Sastra Klasik Indonesia: Suatu Masalah". Ketika pertama kali membaca judul itu, saya berharap akan memperoleh *input* bagaimana upaya peningkatan apresiasi sastra klasik Indonesia itu dan masalah-masalah apa yang dihadapi untuk upaya peningkatan apresiasi sastra klasik Indonesia itu. Akan tetapi, setelah saya membaca makalah ini, *input* yang semula akan saya terima, terlepas dari harapan saya.

Mengapa kira-kira demikian? Kemudian Bapak sebutkan sebagai gebrakan yang menyimpang dari sastra Jawa dan pewayangan seperti *Arjuna Wirwaha* yang ditulis oleh Yudhistira A.N.M. Sebelumnya, saya juga telah membaca *Arjuna Mencari Cinta* dan saya juga memperhatikan masih banyak karya-karya Indonesia sekarang yang dimodifikasi dari cerita pewayangan. Akan tetapi, justru bentuk modifikasi ini amat jauh menyimpang dari bentuk yang semula sehingga mungkin justru bukan meningkatkan apresiasi sastra klasik Indonesia, melainkan penyimpangan dari apresiasi sastra klasik itu sendiri.

Mungkin apa yang dilakukan oleh sastrawan kita itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Teeuw bahwa sastra mempunyai modal yang amat berharga bagi pengembangan sastra Indonesia dewasa ini. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?

Jawaban:

Saya mempersoalkan judul makalah yang diberikan pada saya karena masih ada soal bagi saya. Kita belum sepakat sastra klasik Indonesia itu yang mana? Mungkin sastra seperti *Arjunawirwaha* sebagai sastra klasik Jawa, tetapi apakah ini bisa kita masukkan jadi sastra klasik Indonesia. Ini merupakan masalah bagi saya. Jadi, kalau saya telah menyebut sastra-sastra lain, saya kira sudah tercakup dalam *mutatis mutandis*, karya sastra yang berlaku untuk Jawa bisa berlaku untuk sastra lain. Saya tidak menolak bahwa karya sastra yang dianggap karya sastra pada wilayah tertentu hendaknya kita pikirkan kembali seluruh masalah yang dulu ada supaya kita sungguh-sungguh meletakkannya di dalam suatu kerangka keindahan yang bisa kita terima bersama-sama. Oleh karena itu, saya juga tidak *mengklaim* bahwa *Arjunawirwaha* itu juga karya sastra klasik Indonesia. Saya malah bertanya apakah

ini yang termasuk sastra klasik Indonesia. Ini sebenarnya yang mau saya diskusikan di sini.

2. **Penanya:** Ny. Sugira Wahid, IKIP Ujung Pandang

Judul makalah yang Bapak bawa adalah "Peningkatan Apresiasi 'Sastra Klasik Indonesia' Suatu Masalah". Agar tidak menjadi masalah, saya kira pertemuan sore ini kita perlu menetapkan bersama-sama apa sastra klasik Indonesia itu. Hal ini saya ajukan karena, kalau tidak salah, pada tahun 1984 salah satu seminar sastra di Jakarta telah memilah-milah sastra itu atas sastra Indonesia, daerah, dan terjemahan. Selain itu, ada indikator-indikator yang dikatakan, mana sastra Indonesia dan mana sastra daerah, hal itu dulu yang kita pertegas. Jika kita berbicara tentang peningkatan apresiasi, berarti ada sesuatu yang kita lakukan sekarang dan apa yang dapat kita lakukan dalam peningkatan apresiasi sastra klasik yang Bapak inginkan itu?

Jawaban:

Terus terang, saya tidak pernah membagi sastra atas sastra Indonesia, daerah, terjemahan, dan saya juga belum pernah mendengar ada pembagian seperti itu. Saya kira, pembagian seperti itu kerap kali membuat gamang untuk masuk. Kalau saya melihat terjemahan, langsung pikiran saya jalan. Wah, ini terjemahan. Jadi, pembagian seperti itu kadang-kadang malah membuat orang tidak yakin. Orang malah tidak membaca karena karya itu hanya terjemahan, bukan aslinya. Seperti *idiot* dalam terjemahan Inggris, Perancis, malah lain-lain nilainya. Oleh karena itu, malah sebaiknya kita baca karya apa saja.

3. **Saran/Usul:** Achadiati Ikram, Universitas Indonesia

Saya ingin menekankan bahwa sastra itu merupakan khazanah spiritual yang harus ada pada setiap bangsa karena bangsa yang tidak mempunyai sastra adalah bangsa yang kerdil. Bangsa Indonesia terdiri atas begitu banyak etnik, maka saya kira suatu pijakan sastra harus direkayasa bersama. Jadi, saya pikir yang disebut klasik itu adalah sastra yang dianggap kelompok etnik sebagai suatu khazanah yang berharga. Pengenalan sastra klasik harus dimulai sejak SD, misalnya dimulai dengan pengenalan saduran. Kita harus mengumpulkan khazanah karya-karya dari seluruh Indonesia dan dibuat karangan antologi yang bisa dipakai di lingkungan sekolah. Karya itu perlu diperkenalkan sebab bagi anak dari Irian misalnya, belum tentu mengerti *Arjunawiwaha*.

4. **Saran/Usul:** Siti Chamamah Soeratno, Universitas Gadjah Mada

Setelah membaca judul makalah Bapak, saya kira yang perlu diperhatikan adalah tentang penghayatan apresiasi. Apresiasi yang akan ditingkatkan itu bagaimana? Apresiasi tentang apa? Tentang sastra klasik Indonesia. Tampaknya konsep yang ada di balik sastra klasik Indonesia saya kira sama. Apakah itu *Ramayana*, *Arjuna Wiwaha*, atau *Iskandar Zulkarnain*. Bagi saya klasik sesuatu yang lama, tetapi mengandung nilai tinggi, agung, dan sebagainya, seperti pada karya-karya orang Yunani.

Saya juga mengusulkan kepada Pusat Bahasa untuk memperhatikan mengenai pandangan apresiasi.

5. **Pertanyaan:** A. Sudewa, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Bagaimana kita mengaktualkan karya yang sudah kita anggap *out of game* meskipun itu baru kemarin atau minggu yang lalu?

6. **Pertanyaan:** Abdul Muin

Saya membaca buku berjudul *Ulagaligo* cerita sastra Bugis kuno. Apakah ini termasuk sastra klasik atau bukan?

Saya pernah berbicara dengan Prof. Dr. Corrin A. Dia mengatakan dengan menggebu-gebu bahwa karya adalah klasik. Kalau Bapak tahu mengapa tidak Bapak sebutkan sebagai pelengkap, dan kalau tidak tahu, mengapa gejala ini terjadi?

Jawaban:

Peningkatan apresiasi mungkin baru terjadi apabila sudah diketahui manfaatnya, misalnya buku *Ulagaligo* sudah memasyarakat di Indonesia; apakah karya yang sudah dicetak itu memang dibaca. Biasanya orang membaca buku pada bagian-bagian tertentu.

Pengapresiasian sangat sulit apabila kita tidak mengalaminya sendiri. Peningkatan apresiasi tidak mungkin tanpa membaca. Jadi, kita harus berulang-ulang membaca buku itu sampai kita dapat merasakan pengapresiasian itu karena memasuki dunia sastra lama membutuhkan bacaan yang lama, sebaiknya kita baca apa saja.

PERAN PENYUNTINGAN DALAM MENINGKATKAN MUTU BAHASA INDONESIA

Adjat Sakri

Fakultas Seni Rupa dan Desain, ITB
dan Kepala Penerbit ITB

1. Makna Kata *Penyuntingan*

Profesi penyunting belum banyak dikenal di Indonesia. Banyak orang mengira bahwa pekerjaan menyunting ialah memperbaiki bahasa sebuah naskah. Beberapa kali saya disertai naskah dengan permintaan agar disunting. Pemesan mengira bahwa orang dapat memperbaiki struktur kalimat yang salah atau memperbaiki struktur paragraf tanpa harus memahami isinya. Ada penulis yang menyerahkan naskah tentang cara menyunting naskah untuk diterbitkan sebagai buku. Dengan melihat daftar pustakanya, dapat disimpulkan bahwa penyuntingan bagi penulis hanyalah pekerjaan memperbaiki bahasa sebuah naskah. Semua pustaka dalam daftar itu mengenai tata bahasa, teknik mengarang, cara menulis paragraf, dan sejenisnya, tetapi tidak ada satu judul pun tentang penyuntingan, penerbitan buku, atau pembuatan buku. Latar belakang pengetahuan tentang bahasa Indonesia dan minat kepada bahasa pada umumnya memang perlu dimiliki oleh seorang penyunting buku, tetapi pengetahuan bahasa saja tidak cukup.

Sering penilaian buku sekolah dilakukan dengan cara memisah-misah unsurnya dan diperiksa oleh pihak yang berlainan. Segi bahasanya dinilai oleh pakar bahasa, terlepas dari segi rancang buku. Segi rancang buku dinilai mutu cetaknya oleh pakar dalam bidang percetakan, terlepas dari kaitan mutu cetak dengan isi buku; dan isi buku dinilai oleh pakar untuk bidang ilmu yang dibahas. Penilaian seperti itu mencerminkan pendapat seakan-akan ketiga unsur buku itu tidak berkaitan. Oleh karena itu, masing-masing dapat dinilai secara terpisah.

Barangkali atas dasar pengertian yang sempit itulah kata *sunting* diangkat sebagai padanan kata bahasa Inggris *to edit*, yakni bahwa menyunting itu tidak lain dari memperbaiki bahasa untuk memperindah sebuah tulisan. Makna kata *sunting* yang mula-mula ialah perhiasan rambut seperti bunga, tusuk kondai, bunga-bunga daripada emas atau perak (St. Moh. Zain). Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *menyunting* ialah menyiapkan naskah siap cetak atau siap untuk diterbitkan dengan

memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, dan struktur); mengedit

Kata kerja *to edit* sendiri bentukan balik dari kata *editor*, yang berasal dari kata Latin *edere* dan berarti 'menerbitkan'. (Bentukan balik, maksudnya dari kata *editor* dibentuk kata *to edit*, jadi terbalik dari pembentukan kata yang lazim). Menurut John P. Dessauer (1974, h. 208), *mengedit* ialah

- a. memilih, mencipta, atau mencari bahan untuk diterbitkan;
- b. mengolah naskah hingga siap untuk direnteng (*merenteng* = merangkai huruf berbaris-baris).

Henry Jacob (1976) mendefinisikan kata *mengedit* itu sebagai berikut.

"mengusahakan sedapat-dapatnya, dan terutama dengan bekerja sama dengan pengarang, agar gagasan asli pengarang atau penerbit tersajikan dalam bentuk yang paling sesuai".

Pekerjaan penyunting dimulai dari pencarian naskah atau penerimaan naskah yang masuk, kemudian menilainya, dan jika naskah diterima untuk diterbitkan, dilanjutkan dengan menggarapnya sampai naskah itu siap untuk dikirimkan ke percetakan untuk dirakit (*merakit* ialah proses merenteng dan dilanjutkan dengan menyusun hasilnya menjadi halaman buku sehingga siap untuk dibuat film di bagian foto reproduksi).

2. Proses Penyuntingan

Kiranya jelas bahwa memperbaiki bahasa sebuah naskah dalam dunia penerbitan buku hanyalah sebagian dari pekerjaan penyuntingan. Memang benar masalah kebahasaan penting kedudukannya dalam menentukan apakah sebuah naskah layak untuk diterbitkan atau tidak. Sebelum sampai kepada penilaian isi dan langkah selanjutnya, pertama-tama penyunting akan menilai bahasa naskah yang diterimanya. Kalimat yang tidak benar atau paragraf yang tidak tertib sudah cukup bagi penyunting untuk menolak naskah tersebut. Penyuntingannya akan lebih banyak membimbing penulis tentang cara menulis karangan daripada membantunya menyiapkan naskah untuk diterbitkan. Dengan kata lain, naskah seperti itu belum *layak suntung*.

Sebetulnya, dari segi bahasanya saja, kita dapat melihat bahwa banyak buku yang beredar sekarang, khususnya buku ajar, belum layak untuk diterbitkan. Pada satu pertemuan penilaian buku sekolah bidang kesenian, yang akan dibeli oleh Pemerintah, hampir semua buku yang ditawarkan oleh beberapa penerbit sudah ditolak pada taraf penilaian pertama, yakni pada penilaian bahasanya. Kekacauan bahasa dalam sebuah buku sudah cukup untuk menolak buku itu untuk dipakai di sekolah. Kalimat yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia tidak melatih anak didik untuk berpikir dengan tertib. Tulisan yang tidak tersusun menurut paragraf yang tertib tidak mudah-bahkan sering tidak dapat-ditangkap maksudnya sehingga mendorong anak didik untuk menghafalkan isi buku di luar kepala tanpa memahami maksudnya. Dari segi perkembangan pikir anak didik khususnya, masyarakat penutur bahasa Indonesia pada

umumnya, buku yang tidak tertib bahasanya turut mematikan cara berpikir dengan nalar.

Ada beberapa sebab mengapa banyak buku, terutama buku sekolah, yang terbit tanpa melalui proses penyuntingan. Pertama, banyak penerbit di Indonesia tidak memiliki penyunting. Kelemahan itu, tampaknya, lebih banyak bersifat umum daripada kekecualian. Karena tidak memiliki tenaga penyunting, penerbit hanya mengalihkan apa yang tercantum dalam naskah ke dalam bentuk tercetak. Tidak ada keterlibatan penerbit dalam pembuatan naskah itu sendiri. Dengan kata lain, fungsi penerbit hanya menerima naskah, kemudian mencetaknya menjadi buku, dan selanjutnya menjualnya.

Adakalanya penulis kurang paham akan kedudukan dan peranan penyunting. Pengetahuannya terbatas pada citra umum bahwa penyunting itu orang yang suka mencoret-coret tulisan orang lain tanpa memahami pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Berdasar pada anggapannya itu, ia tidak bersedia menyerahkan naskahnya untuk disunting karena khawatir akan terjadinya salah tafsir pada penyuntingan sehingga karya tersunting menyimpang dari maksud penulis. Di pihak lain, dapat pula terjadi sebuah naskah disunting oleh penyunting yang pendidikannya terlalu rendah untuk pekerjaan itu. Penyunting mengira bahwa orang dapat memperbaiki bahasa sebuah naskah tanpa harus memahami isinya.

Anggapan seperti itu rupanya dianut oleh sejumlah penyunting terjemahan. Hasilnya bukan naskah yang tertib bahasanya, melainkan tambahan kerja bagi penulis untuk meluruskan kembali naskah tersunting itu. Dalam keadaan seperti itu, dapat dipahami jika penulis berkeberatan untuk membiarkan naskahnya disunting oleh penerbit.

Tidak jarang pula dijumpai penyunting yang tidak berani menyunting karya seseorang seperti naskah dosen, apalagi naskah seorang guru besar atau ahli bahasa. Menurut anggapannya, dosen pastilah pandai menulis.

Ahli bahasa mustahil membuat kesalahan bahasa. Penyunting ini lupa bahwa menerbitkan buku bukan cuma masalah bahasa saja.

Bagian penyuntingan sebuah penerbit mewakili penerbitnya untuk mencari dan menerima naskah yang masuk. Bagian ini melaksanakan kebijakan penerbit dalam mempertimbangkan apakah sebuah naskah dapat diterima atau harus ditolak untuk diterbitkan. Penerbit yang mengkhususkan diri di bidang kedokteran, misalnya, akan menolak naskah mengenai pertanian, betapapun baiknya. Itu sebabnya, naskah yang ditolak oleh sebuah penerbit tidak selalu berarti bahwa naskah itu tidak baik atau tidak layak untuk diterbitkan. Jika penerbit tidak menjelaskan alasan penolakannya, penulis dapat mencoba menawarkan karyanya kepada penerbit lain.

Bagian penyuntingan bertanggung jawab atas mutu buku yang diterbitkan, baik mutu isi, bahasa maupun jasadnya. Bagian ini akan meminta bantuan seorang ahli atau pakar untuk menilai apakah isi naskah itu benar dan mutakhir, ataukah perlu diperbaiki sebelum dapat diterbitkan. Mungkin juga pakar tidak diperlukan jika

diketahui bahwa naskah ditulis oleh seseorang yang kepakarannya dalam tulisan itu tidak diragukan.

Setelah lolos dari penilaian bahasa, isi, dan kesesuaiannya dengan kebijakan penerbit barulah naskah digarap untuk diterbitkan. Penyunting akan bekerja sama dengan penulis menyiapkan naskah tersebut. Tugas penyunting ialah membantu penulis agar pesan yang hendak disampaikan oleh penulis terungkap dengan jelas sehingga mudah ditangkap oleh pembaca. Penyunting akan berusaha sedapat-dapatnya untuk memahami gagasan penulis. Di dalam benaknya ia mencoba mengolah informasi yang diterimanya ke dalam bentuk buku. Mungkin ia akan menyaran penulis agar menulis kembali bagian tertentu karena dipandang kurang imbang dengan bagian yang lain. Mungkin juga ia akan menyarankan teknik ilustrasi atau diagram yang cocok untuk mendukung gagasan penulis.

Ia akan memberikan petunjuk kepada bagian perancangan tentang rancang buku yang cocok agar pesan penulis terungkap dengan jelas. Rancang buku harus menunjang peran penulis. Banyak orang mengira bahwa fungsi rancang buku hanyalah untuk memperindah rupa buku. Banyak pula orang yang mengartikannya secara sempit sebagai perancangan sampul buku, yang biasa disebut *perwajahan buku*. (Istilah itu keliru; seharusnya *perwajahan buku* jika yang dimaksud prosesnya).

Pengalaman menggarap berbagai naskah dimanfaatkan oleh penyunting untuk membantu penulis sebaik-baiknya. Dengan demikian, penerbit terlibat dalam pembuatan naskah. Jadi, tidak hanya memindahkan apa yang disodorkan oleh penulis ke dalam bentuk buku. Kerja sama yang baik antara penulis dan penyunting sangat besar peranannya dalam usaha menerbitkan buku yang baik mutunya. Jelas kiranya bahwa, pada akhirnya, penerbitan sebuah buku merupakan hasil kerja sama antara penulis dan penerbit.

Bagi penerbit, penyunting merupakan perantara yang mempertemukan kepentingan penulis dan penerbit. Seperti dikatakan, penyunting membantu penulis agar buku yang diterbitkan itu benar-benar mengungkapkan pesan penulis dengan baik. Pada pihak lain, penyunting mewakili penerbit dalam memilih dan mengolah naskah sesuai dengan kebijakan penerbit. Penyunting juga berusaha agar naskah mengikuti gaya selingkung penerbitnya. Setiap penerbit yang baik memiliki *gaya selingkung* masing-masing, baik dituangkan secara tertulis maupun sebagai kebiasaan yang sudah mapan.

Taraf terakhir dari penyuntingan ialah penyuntingan bahasa dan pemarkah-cetakan naskah. *Markah cetak* ialah markah atau tanda sebagai petunjuk bagi percetakan mengenai cara merenteng (menyusun huruf cetak) naskah, bagian mana yang harus dicetak tebal, dicetak miring, berapa jarak baris nas (teks), dsb. Penyunting yang khusus bertugas menangani penyuntingan bahasa disebut *penyunting nas* atau dalam bahasa Inggris disebut *copy editor*. Penyunting nas menerapkan gaya selingkung penerbit ke dalam naskah.

3. Peranan Penyunting dalam Pembinaan Mutu Bahasa Indonesia

Penerbitan buku mengembangkan bahasa tulis. Karena bahasa tulis harus tertib dan mengikuti kaidah bahasa yang baku, bahasa tulis berperan dalam memantapkan bahasa Indonesia yang tertib. Banyaknya terbitan dalam sebuah negara akan mempercepat perkembangan bahasa yang tertib. Tulisan yang bahasanya tertib dan susunannya logis akan menanamkan cara berpikir yang tertib dan logis pada pembacanya. Pada gilirannya, cara berpikir yang tertib dan logis akan melahirkan bahasa yang tertib. Antara bahasa yang tertib dan cara berpikir yang tertib terjadi proses pengaruh-mempengaruhi.

Banyak orang berkata bahwa masyarakat Indonesia masih dikuasai oleh budaya lisan. Bahasa lisan tidak perlu lengkap, bahkan sering sudah cukup dengan satu dua kata saja. Banyak bagian kalimat yang dihilangkan jika orang berkomunikasi dengan lisan. Hal itu wajar karena lawan bicara sudah mengetahui sebagian pikir yang hendak dikatakan oleh pembicara. Jika orang berkata, *Hujan?* sambil menengok ke luar, lawan bicaranya mengerti bahwa orang tadi menanyakan apakah hari hujan. Lagu suara dan perilaku pembicara serta tautan ucapan itu dengan situasi lingkungan ketika itu membantu menjelaskan maksud kata *hujan* itu.

Kedudukan bahasa tulis berbeda dengan kedudukan bahasa lisan. Sebuah tulisan tidak terikat oleh tautan situasi saat karya itu dibuat. Karya tulis dapat dibaca pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang dan di tempat yang berlainan dari situasi ketika karya itu ditulis. Ketika hendak membaca sebuah tulisan, pembaca tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh penulis. Dari judul tulisan, pembaca tahu sedikit tentang perkara yang akan dibacanya, tetapi selanjutnya ia bergantung pada satu-satu informasi yang digelarkan dalam tulisan itu; informasi baru ditafsirkan berdasar informasi sebelumnya. Dengan kata lain, tautan sebuah kalimat dalam karya tulis adalah seluruh nas (teks) yang sudah dibaca dan yang akan dibaca selanjutnya. Itulah sebabnya sebuah tulisan harus tertib susunannya dan bahasanya harus benar sesuai dengan kaidah yang baku.

Di sinilah masuk peranan penyunting dalam usaha menertibkan bahasa sebuah tulisan. Ejaan tak kurang pentingnya untuk diperhatikan. Pengejaan kata atau nama yang tidak taat asas akan membingungkan pembaca. Jika terdapat nama Suyoko pada satu halaman dan pada halaman lain terdapat nama Sujoko (ejaan lama?), pembaca akan mempertanyakan apakah kedua nama itu merujuk orang yang sama ataukah yang berlainan. Penyunting tidak akan berkeberatan jika penulis bersikeras untuk menggunakan kata *metoda* daripada *metode* yang baku menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, selama ia taat asas menggunakannya dalam seluruh bukunya. (Kata *metode* diserap dari kata bahasa Belanda *methode*. Jika kita taat pada aturan untuk mendahulukan penyerapan kata dari bahasa Inggris, seharusnya dipilih kata "metod" dari kata *method*. Akan tetapi, sementara kata *analisa* "diterbitkan" menjadi *analisis*, *subyek* dan *obyek* [dari bahasa Belanda] menjadi *subjek* dan *objek*, kata *proyek* dan *metode* tetap diserap dari bahasa Belanda).

Kadang-kadang penulis tidak tegas dengan istilah yang digunakannya, yang membuat pembaca ragu-ragu akan pendapat penulis, seperti contoh berikut.

Istilah *buku teks* yang digunakan dalam buku ini terjemahan atau padanan *textbook* dalam bahasa Inggris. Walaupun dalam kamus *textbook* diterjemahkan dengan *buku pelajaran*, demi kepraktisan dan untuk menghindarkan salah paham, istilah buku teks tetap digunakan dalam buku ini.

Pada halaman yang sama, penulis mengatakan bahwa dari berbagai pendapat ahli dapatlah penulis simpulkan bahwa

Buku teks itu selalu merupakan buku pelajaran yang ditujukan bagi siswa pada jenjang pendidikan tertentu, dst.

Apa maksud penulis dengan mengatakan "untuk kepraktisan dan untuk menghindarkan salah paham" sementara pada baris lain "buku teks itu selalu merupakan buku pelajaran"? Penyunting akan mengingatkan hal itu dan meminta penulis untuk memperbaikinya.

Penyunting akan berusaha meyakinkan penulis agar menerjemahkan kutipan asing ke dalam bahasa Indonesia jika bukunya ditujukan kepada siswa atau mahasiswa yang pada umumnya tidak menguasai bahasa asing. Kadang-kadang penulis memberikan alasan bahwa kutipan itu tidak dapat diterjemahkan karena sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia, sedangkan kutipan itu dengan tepat merumuskan konsep yang diterangkan. Andaikan benar apa yang dikemukakan oleh penulis, apakah dengan memuat kutipan di bawah ini, misalnya, apakah pembaca yang tidak mengerti bahasa Belanda akan memahami konsep itu dengan tepat seperti yang diharapkan oleh penulis:

Dikatakan oleh Reichling bahwa kita akhirnya dapat mendefinisikan *kata* sebagai *een volstrekt vormelijke bepaald taalbouwsel, dat t.o.v. de gelijksortige bouwsel waarmee het in onmiddelijke verband voorkomt*, dst.

Penyunting mencoba menempatkan diri sebagai pembaca yang teliti, dan akan meminta penulis agar menerjemahkan kutipan itu atau menghapuskannya sama sekali karena tidak akan membantu membuat pembaca lebih paham akan konsep yang dimaksud oleh penulis.

Perkara yang sering diperdebatkan tanpa berakhir menyangkut pilihan antara menyerap istilah asing atautkah mereka cipta istilah dari kosakata Indonesia. Sejumlah penulis mengemukakan alasan bahwa penyerapan istilah Inggris akan memudahkan mahasiswa dalam membaca buku berbahasa Inggris. Sulit untuk meyakinkan penulis ini bahwa istilah serapan tidak akan dapat memudahkan mahasiswa dalam membaca buku berbahasa Inggris selama mahasiswa itu tidak menguasai bahasa itu. Kalaupun membantu, istilah serapan akan membantu mahasiswa yang menguasai bahasa Inggris. Oleh karena itu, alasan membantu mahasiswa tadi tidak berdasar jika sebagian besar pembaca Indonesia tidak memahami bahasa Inggris.

Penulis lain berpendapat bahwa istilah Indonesia kurang tepat melambangkan konsep yang dimaksud jika dibandingkan dengan istilah bahasa Inggris padanannya. Untuk beberapa istilah barangkali alasan itu ada benarnya. Akan tetapi, jika hal itu berlaku umum, tentulah istilah *wave* dalam fisika lebih tepat daripada *gelombang*, dan istilah *root* dalam matematika lebih tepat daripada *akar*. Jika alasan itu benar, tentulah istilah *diskursus* dari *discourse* lebih tepat daripada *wacana*. Jika alasan itu benar, bagaimanakah kedudukan istilah asing lainnya seperti dalam bahasa Jerman, Rusia, atau Belanda, apakah juga kurang tepat jika dibandingkan dengan istilah bahasa Inggris? Apakah istilah *straal* dalam bahasa Belanda kurang tepat daripada *ray* dalam bahasa Inggris; istilah *Kunst* bahasa Jerman kurang tepat daripada *art*?

Penulis lain sedang rajin mereka cipta istilah dari kosakata Indonesia untuk mengganti semua istilah asing sehingga beberapa istilah menjadi lebih sulit daripada istilah yang diserap dari bahasa asing.

Dalam sejarah perkembangannya, bahasa Indonesia tidak pernah menolak masuknya kata asing ke dalam kosakatanya. Baik menyerap istilah asing maupun mereka cipta istilah dari kosakata Indonesia dapat dilakukan dengan wajar. Yang perlu mendapat perhatian ialah kenyataan bahwa banyak orang Indonesia yang menguasai bahasa asing masih berpikir dalam bahasa asing itu ketika menulis dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, aturan tata bahasa Indonesia dikalahkan oleh aturan bahasa asing sehingga yang tertuang adalah struktur asing dalam bahasa Indonesia. Orang lebih suka mengatakan *nasalisasi* (selain menyerap kata *nasal*) daripada *penasalan* sebagai kata turunan dari kata *nasal* berdasar kaidah bahasa Indonesia. Sementara orang tidak merasa janggal menggunakan kata *daerah tropika*, tetapi yang lain lebih suka mengatakan *daerah tropis*. Ungkapan *bentuk gramatika* dirasakan taksa. Oleh karena itu, orang memilih ungkapan *bentuk gramatikal*. Hampir tidak ada orang yang mencoba memecahkan masalahnya berdasar aturan bahasa Indonesia, misalnya, dengan mengatakan *dari segi gramatika*, dan *menurut teori*. Alasannya, cara itu membuat ungkapan menjadi panjang.

Sikap tadi berbeda dengan sikap masyarakat negara maju. Mereka lebih patuh kepada kaidah bahasanya dan memilih bentuk yang lebih panjang daripada menyerap kata asing dengan segala bentukannya. Sebagai contoh, bahasa Belanda menyerap kata kerja *to run* dari bahasa Inggris menjadi *runnen*, *runde*, *heeft gerund* menurut bentuk kata bahasa Belanda. Dari bahasa Indonesia diserap kata benda *batik* dengan ejaan yang sama. Kata itu selanjutnya dibentuk menjadi *batikken*, *batikte*, *heeft gebatikt* (membatik), *batikker* (pembatik pria), *batikster* (pembatik wanita), *batikkerij* (pembatikan). Begitu pula bahasa Inggris menyerap kata *batik* dengan ejaan yang sama. Penutur bahasa Inggris tidak mempersoalkan bahwa ungkapannya menjadi lebih panjang, dan memilih ungkapan *to make a batik* daripada menyerap kata *membatik* yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris sebagai kata kerja.

Jadi, masalahnya tidak terdapat pada alasan ketaksamaan atau alasan lain, tetapi kita tidak percaya akan kemampuan sendiri untuk mengungkapkan pikiran kita sendiri, tanpa menggantungkan diri pada konsep orang asing. Ketidakpercayaan itu terungkap

dalam tulisan seperti berikut, yang memperlihatkan seakan-akan kata Indonesia tidak jelas jika tidak disertai kata asing sebagai lambang konsep asing yang kita pelajari:

Tata bahasa tradisional telah membedakan empat macam tipe kalimat berdasarkan fungsinya seperti pernyataan atau berita (*statement*), tanya (*question*), seru (*exclamation*), dan perintah (*command*).

Ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri itu tampak jelas pada tulisan berikut:

Paparan atau eksposisi bertujuan memberikan informasi, penjelasan, atau pemahaman ...

Paparan ekspositoris yang jelas dapat disaksikan Belajar menulis karangan ekspositoris yang efektif, mungkin dst.

Penulis memberikan kata Indonesia *paparan*, tetapi tidak yakin bahwa *paparan* dapat melambangkan konsep *exposition*; maka, ia masih menambah sinonimnya *eksposisi* sebagai kata serapan. Selanjutnya kata *paparan* tidak dibiarkan berdiri sendiri, tetapi diikuti dengan kata *ekspositoris*, dan selanjutnya dalam tulisan itu digunakan kata *eksposisi* dan *ekspositoris*. Dengan kata lain, penulis memperkenalkan istilah Indonesia *paparan*, tetapi ia tidak menggunakannya karena merasa konsep yang diterangkannya adalah *eksposisi*?

Itulah beberapa masalah yang dihadapi penyunting sehari-hari dalam usaha membantu penulis menertibkan bahasa dalam naskahnya. Kiranya jelas bahwa peran penyuntingan buku tidak sedikit dalam usaha meningkatkan mutu bahasa Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Peranan Penyuntingan dalam Peningkatan Mutu Bahasa Indonesia
Pemakalah : Adjat Sakri
Pemandu : Bakhrum Yunus
Pencatat : Ebah Suhaebah
Ellya Iswati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Daniel Tulalessy, Pusat Perbukuan

- a. Apakah istilah *penelaah* itu berarti *commissioning editor*?
Di Indonesia, penerbit besar belum memiliki tata organisasi yang lain seperti yang diungkapkan pemakalah. Mungkin hal itu merupakan titik lemah penerbitan di sini. Bagaimana saran pemakalah terhadap hal itu?
- b. Masalah *copy editor* ini meliputi dua masalah, yaitu masalah menyunting isi dan menyunting bahasa. Menurut pemakalah, masalah isi dipulangkan kepada para pakar, (di samping editor bahasa). Apakah editor itu hanya mengurus bahasa? Di sini timbul masalah penyimpangan setelah naskah dibedah oleh penyunting; di sini akan kelihatan betapa peran seorang penyunting. Saat ini, Pusat Perbukuan sedang berusaha menggabungkan keduanya. Akan tetapi, hal ini memerlukan waktu sekitar 10 tahun agar mereka dewasa dalam kedua hal tersebut.
- c. Posisi editor buku itu sangat penting, tetapi mengapa dalam setiap buku nama editor tidak pernah tampil?

Jawaban:

- a. *Penelaah* adalah pakar dalam bidang yang bersangkutan dan bukan penyunting. Dunia penyuntingan di Indonesia masih baru sehingga yang ada hanya penyunting muda, sedangkan yang diperlukan penyunting yang mempunyai latar belakang yang luas yang mencakup:
 - (a) penguasaan bahasa, terutama bahasa Indonesia;
 - (b) penguasaan bahasa asing;
 - (c) pengetahuan umum, termasuk untuk penyunting buku SD. Menyunting itu berat sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk dapat menjadi penyunting yang memiliki ketiga keterampilan tersebut.Penyunting itu harus sensitif terhadap hal-hal kecil sekalipun, misalnya terhadap kata *menyambung* dan *menghubung*. Dalam bahasa sehari-hari kedua

kata itu bersinonim, tetapi dalam bidang tertentu kedua kata tersebut bisa berbeda.

- b. Di Indonesia penyuntingan merupakan hal yang langka sehingga segala sesuatunya bisa digabung atau dipegang sekaligus. Penerbit Mac Graw Hill memiliki *cross editor* untuk buku yang diterbitkannya. Di situ yang menulis buku itu adalah editor, pengarang cukup menceritakannya dan direkam, kemudian ditulis oleh editor.
- c. Editor itu hanya merupakan pegawai. Jadi, kalau editor dimasukkan, berarti pencetak, perancang, dan sebagainya juga harus ditulis karena sama-sama menentukan mutu terbitan.

2. Pertanyaan: Usdianto, SMA Taruna Nusantara Magelang

- a. Buku yang dianjurkan oleh Depdikbud sering menampilkan beberapa perbedaan yang merepotkan guru bahasa di daerah. Sebagai contoh, pada satu pokok bahasan dalam buku disebut *prosa deskripsi*, tetapi pada tingkat yang lain disebut *prosa eksposisi*. Jadi, bagaimana menerangkan hal itu kepada murid. Untuk itu, kami mohon buku-buku yang ditulis itu ditingkatkan penyuntingannya agar jelas bagi murid-murid.
- b. Kami minta petunjuk tentang penyuntingan pidato karena begitu protektifnya lembaga kami sehingga anak-anak menjadi frustrasi karena merasa ide-idenya terkekang. Jadi, apa yang harus kami lakukan?

Jawaban:

- a. Banyak buku sekolah yang belum layak terbit. Pernah ada naskah yang masuk ke Pusat Perbukuan yang menggunakan istilah-istilah asing, termasuk buku-buku untuk SD, SLP, dan SLA. Setelah dibaca Dr. Harsja Bachtiar buku tersebut harus ditulis kembali dengan mengganti istilah-istilah asingnya.

Banyak penulis yang ragu-ragu terhadap ejaan, bahkan kadang-kadang ragu-ragu terhadap istilah yang digunakannya sehingga dipakailah istilah asing. Sebagai contoh, untuk kata *paparan* dipakai pula *eksposisi* dan ini menunjukkan keraguan penulis atas makna 'paparan' itu. Penulis merasa bahwa kata tersebut belum menjadi miliknya. Di sinilah terlihat mengapa penyunting itu perlu memiliki dan keterampilan penguasaan bahasa Indonesia.

- b. Penyuntingan bahasa pidato merupakan hal yang sangat berat. Struktur pidato sering hanya berupa ungkapan-ungkapan yang tidak berstruktur. Jadi, sulit sekali bila harus disunting. Sebagai jalan keluarnya, tulisan siswa itu tidak perlu disunting isinya, tetapi perbaiki bahasanya sehingga tulisan itu menjadi lebih logis.

SUMBANGAN MEDIA DALAM MEMASYARAKATKAN SASTRA

Darmanto Jatman
Universitas Diponegoro

Buang saja semua koran
Kuncikan pintu-pintu
Bukalah catatan diri sendiri
Di sanalah hati nurani
(Yudhistira A.N.M. Massardi: Hari ini telah terbaca).

1. Pengantar

Kebebasan relatif segera sesudah tahun 1966 telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para sastrawan untuk mencoba berbagai kemungkinan. Majalah *Horison* dan Taman Ismail Marzuki telah menjadi wahana dan saksi dari penjelajahan baru para sastrawan ini dalam penulisan puisi, cerita pendek, novel, drama serta bagaimana menyajikannya. *Poetry Reading* menjadi salah satu peristiwa sastra yang penting, juga acara pembacaan cerita pendek, novel, dan drama. Namun, penerbit buku dan para guru masih ragu-ragu memasukkan apa yang disebut "sastra kontemporer" itu dalam jadwal kegiatan mereka. Belum ditemukan kriterianya. Bahkan, orang pun masih ragu akan berbagai kritik sastra yang ditulis oleh para ahli teori ataupun kritik yang mereka sebut sebagai kaum akademisi. Otoritas wacana dalam sastra sama sekali dikuasai oleh para sastrawan itu sendiri. *Boro-boro* sarjana sastra, mereka yang mutu sastranya dianggap tak memadai pun tak punya hak untuk berbicara, apalagi awam, dan para peminat sastra itu. Pada masa itulah muncul isu keterpencilan sastra "yang bukan penyair, tidak ambil bagian", begitu baris sajak gubahan Chairil Anwar yang sering dikutip. Pada masa itulah lahir karya-karya sastra yang dianggap sangat berarti lengkap dengan penulisnya tentu saja. Gunawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, Sutardji Calzoum Bachri, dan tentu saja Rendra dalam puisi; sementara nama Umar Kayam, Budi Darma juga mulai marak dalam penulisan cerita; Arifin C. Noer, Putu Wijaya dalam penulisan sandiwara, dan nama-nama lainnya. Koran-koran pun *getol* menulis tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sastra ini, di antaranya yang sangat berpengaruh *Kompas* dan *Sinar Harapan* di samping koran-koran lain yang juga memberi ruang bagi karya-karya sastra itu. Mulailah berlaku pepatah "indah kabar dari rupa". Orang lebih tahu tentang pengarangnya daripada karangannya.

Sutardji Calzoum Bachri jadi terkenal bukan karena sajak-sajaknya pada masa itu, tetapi karena kebiasaannya untuk mabuk ketika membacakan sajak-sajaknya. Juga Rendra, tentu saja, yang sangat memukau pembaca sajak-sajaknya. Para siswa dan mahasiswa tahu tentang Rendra, tetapi tak banyak yang pernah membaca karya-karya sajaknya. (Kelak, tokoh ini muncul lebih sebagai selebritis atau legenda karena pemberitaan tentang dirinya yang jauh melebihi publikasi karya-karyanya - Dmt).

Awal tahun 70-an mulailah novel-novel pop ditulis dan dimuat di koran-koran serta majalah-majalah. *Kompas* mulai dengan cerita bersambung dari Marga T., *Karmila*; Marga T. bersama Ashadi Siregar menulis *Cintaku di Kampus Biru*, kemudian jadi model bagi pengarang-pengarang lain yang muncul kemudian, baik di majalah-majalah wanita yang semakin merebak pada masa itu, maupun koran-koran yang semakin meriah. Nama-nama seperti La Rose, Ike Supomo, Titie Said Sadikun, Titiek W.S. muncul berkali-kali. Karya-karya mereka tersebar di *Femina*, *Kartini*, *Sarinah*, serta majalah wanita lain. Sementara majalah-majalah remaja, seperti *Gadis*, *Puteri*, kemudian juga *Hai*, ikut meramaikan penulisan novel pop Indonesia. Seakan-akan zaman bisnis media sudah mulai dan novel menjadi bagian dari industri hiburan yang kemudian dikenal sebagai budaya pop. Menurut catatan Jakob Soemardjo, novel-novel pop para wanita itu mengungkapkan kehidupan wanita yang tak lepas dari hubungan mereka dengan pria. Percintaan yang romantis sentimental serta bersih dari bau seks--amat berbeda dengan novel-novel serius yang ditulis oleh Pramudya Ananta Toer, Umar Kayam, Budi Darma, dan N.H. Dini. Agaknya kode etik para pembaca wanita yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga kelas menengah itu sangat mempengaruhi pilihan keharuan yang hendak ditampilkan para pengarang wanita tersebut.

Pada masa itu orang secara diskriminatif membedakan antara karya sastra serius dan karya sastra pop. Karya-karya sastra pop ini bukan hanya tidak dibicarakan oleh para kritikus sastra yang cuma segelintir itu, tetapi juga tidak pernah disebut dalam pelajaran sastra di sekolah-sekolah. Hal ini tidak berarti hanya bentuk buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Djambatan, Pustaka Jaya dan lain-lain penerbit serius yang dianggap layak untuk didiskusikan, tetapi berbagai buku yang kemudian jadi *best seller* seperti *Karmila* dan *Cintaku di Kampus Biru* pun tak mendapat tempat. Muncul tata nilai dan tata selera sastra yang melecehkan masyarakat awam. Ketika berbagai eksperimen yang dilakukan oleh pengarang-pengarang serius ternyata juga tidak mendapat tempat, muncullah apa yang disebut Pengadilan Puisi di Bandung pada tahun 1974 yang menggugat kemapanan nilai yang diterapkan oleh redaksi majalah *Horison* pada masa itu. Cara itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Remy Sylado, yang pada waktu itu menjadi redaksi majalah hiburan *Aktuil*, yang kemudian melancarkan puisi alternatif yang suka meledek puisi mapan dalam apa yang disebut Puisi Mbeling. Puisi-puisi ini tidak berperilaku halus, penuh sopan santun, dan tata krama, malah tidak jarang meleceh berbagai kaidah keindahan puisi liris, imajis dengan kecanggihan berbahasa yang mengharukan. Yudhistira A.N.M. Massardi termasuk salah seorang penyair andal dari rombongan ini; dan sebelumnya

ia juga sudah ikut kelompok Persada di Yogya yang *dipandegani* oleh Uumbu Landu Paranggi. Satu kelompok pelajar puisi yang juga telah melahirkan nama-nama seperti Linus Suryadi AG, dan Emha Ainun Najib.

Nyatalah bahwa kesemarakan kehidupan kesastraan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari penerbitan luar buku, termasuk tentu saja pemuatan di koran dan majalah serta berbagai kegiatan luar penerbitan seperti *poetry reading*, seminar, bahkan kemudian juga radio dan televisi.

Peranan radio dalam pemasyarakatan puisi, tak boleh dilupakan, seperti kegiatan dari kelompok Kusas di Semarang yang sudah dimulai sejak masa Orde Lama melalui RRI Semarang yang juga melakukan berbagai kegiatan *off air*. Kegiatan-kegiatan ini telah membentuk "kantong-kantong kesastraan" dalam masyarakat yang sebagian besar masih repot dengan kehidupan sehari-hari yang bisa dibilang "bebas kontemplasi". Dengan adanya televisi, televisi pun mulai berperan dalam menciptakan "kantong kesastraan" yang lain, seperti yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Yogyakarta dengan acara sastra budayanya. Melalui televisi, sastra bisa menjangkau khalayak yang lebih luas daripada sekedar orang sekolahan serta komunitas-komunitas sastra kreatif yang ada. Sampai pada masa dua dekade setelah G.30 S/PKI, masih juga sastrawan enggan berorganisasi karena pengalaman pada masa Orde Lama, berbagai organisasi sastra hanyalah menjadi alat saja dari berbagai kekuatan politik (partai) yang ada.

Bersamaan dengan itu, mulailah muncul profesionalisme di kalangan para sastrawan, sejalan dengan proses transformasi budaya dari masyarakat feodal agraris menjadi masyarakat urban demokratis; bahkan sudah mulai muncul gejala toleransi terhadap pluralisme yang menyejajarkan posisi produsen dan konsumen (pengarang dan pembacanya - Dmt) sehingga makna bukan lagi *privilege* dari para pengarang, tetapi merupakan ciptaan bersama pengarang dengan khalayaknya. Artinya, munculnya profesionalisme di negeri kita ternyata bersamaan dengan surutnya otoritas pengarang dalam hal pemaknaan karya. Ini semua tidak bisa dipahami tanpa memahami lahirnya budaya pop yang merupakan anak dari bisnis media yang memang merebak pada akhir tahun 80-an. Sesuatu yang mengingatkan kita pada masa kesastraan Melayu Tionghoa di awal abad ke-20 ini yang semula hanya jadi karya bahasa murahan menjadi karya bahasa terhormat lewat media massa koran pada waktu itu. Bila Lim Kim Hok dianggap sebagai orang yang berjasa menaikkan derajat bahasa Melayu Tionghoa menjadi bahasa sastra—masih disebut sebagai sastra rendah sastra hiburan—maka pada pertengahan tahun 80-an telah muncul berbagai pendekar yang mencoba membela hak hidup sastra pop sebagai sesuatu yang berharga dalam dirinya sendiri dan bukan sastra serius yang prematur—di antaranya Ignas Kleden. Sampai sekarang belum tampak apa yang disebut sastra massa yang merupakan pengejawantahan dari sastra rakyat yang dimediasi—sekalipun gejala-gejalanya juga cukup jelas seperti cerita bersambung "Nagasasra-Sabuk Inten" karangan S.H. Mintardja di koran *Kedaulatan Rakyat*, Yogya atau berbagai cerita bersambung dari Kho Ping Hoo alias Asmaraman yang berupa cerita silat.

Sampai di sini mulailah satu dekade baru, ketika kehidupan sastra mulai terbuka dan menjadi lebih demokratis *sembari* memperkaya dirinya dengan sastra pop maupun sastra massa sambil tidak kehilangan kesadaran akan nilai-nilai literer dan humanioranya.

2. Pengembangan Apresiasi

Untuk waktu yang cukup lama, tugas pengembangan apresiasi dianggap sebagai tugas kultural yang mulia, jadi bebas dari gemerincing uang, apalagi pamrih yang bersifat bisnis. Selain para sastrawan, dahulu banyak juga pihak ketiga yang merasa ikut berkepentingan akan pengembangan apresiasi masyarakat akan kesastraan, di antara mereka tentu saja guru, apalagi guru yang juga sastrawan seperti Piek Ardijanto Soeprijadi, yang tekun mendidik cantrik-cantriknya menjadi penyair sehingga kita kenal kemudian penyair seperti Kurniawan Junaedhi atau Eko Tunas. Namun, agaknya darma guru sebagai pengajar sastra kelak jadi terasa lebih teknis sehingga perannya sebagai pengembang apresiasi sastra terasa mundur, sekalipun secara kuantitatif lebih banyak lagi guru bahasa dan sastra yang terlibat dalam pengenalan siswa terhadap kesastraan Indonesia. Malang, banyak pemberitaan tentang kegiatan sastra membuat mereka justru ragu-ragu untuk masuk lebih dalam, apalagi mengajak siswa-siswa mereka. Munculnya Sutardji Calzoum Bachri dalam panggung sastra Indonesia, baru mulai disebut oleh para guru sewaktu mereka ditanya oleh siswa-siswa mereka perkara "puisi Indonesia kontemporer", seperti yang mereka baca di koran-koran dan telah dibicarakan di Taman Ismail Marzuki dalam Pertemuan Sastrawan 1974. Artinya, pihak ketiga, yang diharap mampu dan mau mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap kesastraan lebih sering tertodong oleh pemberitaan media massa tentang kegiatan kesastraan, tetapi tidak memperoleh informasi yang memadai dan membuat mereka merasa aman, bila mereka mau menyampaikan itu kepada siswa mereka.

Transformasi kebudayaan yang kita alami telah mengubah pola pengembangan apresiasi yang semula bagai tugas mulia kaum terpelajar, jadi manajemen bisnis yang menjanjikan. Jose Rizal Manua, misalnya, telah melakukan langkah awal untuk menyelenggarakan acara baca sajak bagi pejabat dan konglomerat di depan patung Chairil Anwar di Taman Monas, Jakarta. Dengan memperoleh peliputan media yang luar biasa, acara itu jadi amat dikenal masyarakat. Artinya, lebih banyak lagi orang bisa mendengar sajak-sajak yang mereka baca dibandingkan sebelumnya. Media bukan hanya jadi ajang publikasi dan promosi sajak, tetapi juga menjadi penyumbang informasi walaupun hanya seserpih-seserpih. Jose Rizal Manua bukan saja menjadi seorang pengembang apresiasi ketika ia membacakan sajak-sajak para penyair di berbagai kota di Indonesia, tetapi ia juga membuat satu terobosan baru, acara baca sajak yang dihadiri dan diminati banyak orang, di antaranya ketika ia membaca sajak-sajak humor Indonesia. Jose Rizal Manua telah menjadi PR (*public relations*) bagi puisi Indonesia. Apabila manajemen ke-PR-an ini tepat, berarti baca sajak bisa jadi bisnis yang menjanjikan, sekalipun tidak menjanjikan prospek keuntungan yang besar. Acara

lomba baca sajak yang dikelola oleh Jose Rizal Manua sering diikuti oleh ratusan orang, bahkan lomba penulisan puisinya diikuti oleh lebih seribu orang. Sayang, peliputan media tentang acara itu sendiri kurang, sekalipun publikasi akan adanya lomba itu amat memadai. Ini tentu berkaitan dengan hukum-hukum media itu sendiri berikut hukum-hukum bisnisnya yang tidak memungkinkan pemberitaan peristiwa-peristiwa yang kurang *kumedol* dimuat berkali-kali. Itulah sebabnya *push* pada pemberitaan sering tidak hanya merugikan bisnis media itu sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan khalayak bila yang diberitakan memang tidak laik dikabarkan. Hal itu terjadi pada berbagai peristiwa seni yang memang dipromosikan secara profesional, tetapi mutunya atau paling tidak daya tariknya pada penonton sedang-sedang saja. Demikianlah kita sering mendengar pemberitaan yang merugikan dan pemberitaan yang menguntungkan, juga dalam kesastraan. Berbagai pemberitaan tentang sensasi pembacaan sajak Rendra atau Sutardji sering membuat bulu kuduk para guru bergidik bila harus memperkenalkan sajak-sajak itu kepada siswa mereka karena memang tidak setiap sajak bisa diapresiasi oleh siswa yang berbeda-beda usia serta kematangan jiwa mereka. Karenanya sering media juga mendapat kesulitan untuk menyiarkan karya-karya sastra yang tidak "umum" sifatnya.

Belum adanya lembaga *public relation* untuk kesastraan tidak berarti belum ada lembaga-lembaga dalam media itu sendiri yang tidak mau bertindak sebagai PR. Televisi RI Stasiun Yogyakarta—terutama pada masa kepemimpinan Ishadi Sk.—amat memperhatikan acara budaya ini. Khalayak penonton TVRI stasiun Yogyakarta bisa menyaksikan sendiri bagaimana Rendra, Emha Ainun Najib, dan Linus Suryadi membacakan karya-karya mereka. Apresiasi pun tidak hanya terbatas pada siswa-siswa, tetapi juga berbagai kelompok profesi lain seperti dokter, arsitek, dan lain-lain. Kesediaan media, baik elektronika maupun cetak untuk mempublikasikan dan mempromosikan hasil-hasil karya sastra, amat membantu apresiasi masyarakat terhadap sastra. Tanpa itu, agaknya mustahil berbagai acara sastra—seperti diskusi atau baca puisi—dihadiri oleh begitu banyak orang. Hanya perlu diingat bahwa publikasi yang sistematis sering mengguncangkan penilaian umum terhadap sastra. Lihatlah bagaimana berjubelnya orang untuk mendengar sajak-sajak yang kena sensor atau dilarang baca oleh pejabat yang ditugasi. Tidakkah mengherankan bila Rendra kemudian mengakui kecerdasan khalayak serta minta agar khalayaklah yang dianggap berwenang menilai sebuah karya—dan bukan hanya segelintir ahli sastra yang telah mapan. Artinya, makna sebuah karya sastra—makna kulturalnya maksud saya—sudah bukan sekedar jadi otoritas sastrawannya, tetapi sudah mulai bergeser ke arah khalayak. Satu gejala yang membesarkan hati sebetulnya, tetapi juga mengecutkan karena bukankah *public opinion* itu subjek manipulasi dari media?! Siapakah sebenarnya kekuatan di balik orang-orang media ini?!

3. Konsekuensi Budaya Media

Media mempunyai budayanya sendiri, memiliki tujuan, misi, nilai, ilmu, seni, dan teknologinya sendiri. Untuk media cetak, koran, misalnya, muatan yang tersiar

di koran itu mesti memiliki sifat aktual, menarik perhatian banyak orang, dan berpengaruh luas. Sekalipun banyak memang koran yang mulai meninggalkan sifat "instan"-nya, bahkan kadang muatannya amat layak untuk dilestarikan, tetapi pada umumnya koran (harian) memiliki sifat-sifat tersebut di atas. Tidaklah mengherankan bila banyak orang semula menduga akan adanya sastra koran, yakni sastra yang memiliki sifat keaktualan serta keumuman koran. Bahkan, banyak redaksi yang percaya bahwa cerita bersambung di koran itu berbeda dengan novel karenanya tidak selayaknya novel buku dimuat sebagai cerita bersambung dalam koran. Namun, agaknya perbedaan itu semakin lama semakin tidak nyata karena koran pun punya halaman-halaman yang lebih lestari sifatnya yang diisi *features*, *human interest*, *feuilleton* dan sebagainya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada watak media yang melekat pada karya-karya yang memang dimaksud untuk diterbitkan sebagai sajian dalam media. *Science fiction*, misalnya, banyak yang memiliki segenap syarat untuk menjadi sajian dalam media koran. Ia aktual, menarik, berpengaruh, sehingga tidak jarang memanfaatkan resep-resep pop ala Hollywood: sensasional, kolosal, glamor dan tentu saja seksi!

Budaya media koran berbeda dengan majalah—apalagi majalah khusus, seperti majalah wanita—berbeda pula dengan radio dan televisi. RRI Yogyakarta, misalnya, selain sering memancarkan acara pembacaan sajak, juga pembacaan cerita pendek. Tidak semua cerita pendek layak dibacakan lewat radio. Berbagai unsur *audial* perlu diperhatikan bila ingin pembacaan sajak atau cerita pendek itu jadi "hidup". Berbagai karakter yang berbeda, perlu dibaca secara berbeda sesuai dengan karakternya. Berbagai suasana perlu tampil *audial* meyakinkan untuk menciptakan suasana dalam imajinasi pendengarnya. Membaca bunyi tembakan senjata, bisa *bang, bang*, bisa *dor, dor*, tetapi dalam membaca cerita di radio, bisa saja animasi suara yang disajikan. Begitupun televisi, sekalipun *poetry reading* sudah sering ditampilkan dalam televisi, tetapi pembacaan karya sastra atau drama agak jarang, bahkan bisa dikatakan jarang sekali. Risiko ditinggal pemirsanya amat besar, apalagi sekarang berbagai jalur televisi ada dengan berbagai sajian yang bersaing mutunya. Namun, agaknya belum ada penyair yang menulis sajak khusus untuk dibacakan lewat televisi—sekalipun sudah banyak penyair yang dengan sengaja menulis sajak untuk dibacakan di depan umum secara teatral.

Namun, sekarang agaknya, orang lebih memperhatikan ketersediaan berbagai macam karya sastra yang bisa disajikan lewat berbagai macam media sehingga hampir bisa dikatakan tak ada pengarang spesialis koran, majalah, radio, atau televisi—kecuali barangkali untuk naskah drama. Untuk sandiwar radio, misalnya, Soemardjono dulu dianggap sebagai dedengkotnya. Namun, kini tak banyak lagi orang membaca atau mendengarkan karya-karyanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan memang, apa yang biasa disebut sebagai efek media, termasuk *multiplying effect*-nya. Sesuatu yang dibisikkan secara pribadi akan berbeda akibatnya bila diutarakan melalui media massa (kali ini diungkap lengkap "media massa" - Dmt). Sebuah surat yang ditulis secara pribadi untuk seseorang yang

khusus tidak laik disajikan melalui koran. Itulah sebabnya, pernah seorang pembaca mencoba menuntut seorang pengarang karena cerita pendek karangan sastrawan itu ternyata merupakan kisah nyata, kisah sang pembaca. Di sinilah muncul perlunya tata krama pemfiksian sebuah kisah nyata. Di negara lain, bahkan tak jarang cerita pendek yang dimuat di suatu majalah dicuri dan dimuatkan di majalah lain dengan tidak perlu terlalu takut ketahuan karena banyaknya majalah. Di Indonesia, setiap harinya beredar sekitar 4,7 juta media cetak untuk hampir 200 juta penduduk. Sayangnya, tak terinci berapa dari sekian yang beredar itu memuat karya sastra. Namun, jelas, jumlah edar itu jauh melebihi jumlah edar majalah sastra satu-satunya, paling tidak sampai hari ini di Indonesia, yakni *Horison*. Tidaklah mengherankan bila seseorang ingin karyanya dibaca oleh lebih banyak orang dengan uang imbalan yang lebih banyak pula, mereka tidak mengirimkan karyanya ke *Horison*. Tidak banyak yang tulus mengungkapkan perbedaan kultural antara majalah *Horison* dengan majalah-majalah lain—majalah remaja, misalnya—ebagai sebab kenapa mereka memilih untuk menyiarkan karya mereka ke *Horison*, justru karena jumlah edar *Horison* yang kurang dari 5.000 eksemplar itu.

Karakter tambahan lain dari sastra media tak bisa dilepaskan dari bisnis media itu sendiri yang secara kompetitif selalu mengembangkan pasarnya, serta "mengerek" citranya melalui kegiatan PR. Munculnya karya-karya *best seller* memang pas untuk budaya bisnis, tetapi munculnya karya-karya bermutu *master pieces* yang mestinya juga pas untuk budaya bisnis, sering diingkari karena sifat elitis dari karya *master piece* itu yang menyenjangkannya dari khalayak pembaca pada umumnya. Justru inilah kunci yang bisa menjelaskan, kenapa keterpencilan sastra, kesenjangan kultural antara para elit seniman dengan masyarakat sisa lainnya kini serasa bisa diatasi begitu saja—yakni merebaknya bisnis media lengkap dengan budaya medianya yang tak henti-henti berusaha memenangkan persaingan dengan keunggulan kompetitifnya.

Demikianlah budaya sastra dan budaya media semakin akrab saja!

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Sumbangan Media dalam Memasyarakatkan Sastra
Pemakalah : Darmanto Jatman
Pemandu : Nirwan Dewanto
Pencatat : Siti Zahra Yundhiafi
Muhammad Jaruki

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** P.C. Sutisno, Staf Pimpinan Pustekom, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Saya ingin menyatakan bahwa media massa tidak akan sebegitu jauh penghapusannya sebab media massa mempunyai karakteristik yang ingin menyampaikan sesuatu secara apa adanya, kecuali kalau karya sastra itu memang baru. Namun, kalau kita akan mengangkat karya sastra seperti *Siti Nurbaya*, orang yang ada di belakang karya itu akan mencoba mendalami nilai-nilai, norma-norma, dan nuansa-nuansa yang ada pada karya sastra itu. Jadi, tidak ada klasifikasi. Seperti kemarin, Bapak Kuntara bingung juga pada klasifikasi sastra klasik. Klasifikasi mulai dari mana, dari *Siti Nurbaya* atau *Arjuna Wiwaha*. Jadi, saya kira media massa, khususnya televisi, mempunyai karakteristik yang ingin menampilkan apa adanya, seperti Rendra bagus di pentas, tapi tidak bagus di film karena unsur teatral dimainkan oleh alat-alat bukan oleh pembawanya. Jadi, penghapusan tidak begitu saja ada, tetapi ada *distance* tertentu sesuai dengan karakter media.
- b. Secara kualitas sastra media meningkat mendekati sastra yang bermutu. Selama ini ada yang mengatakan sastra bermutu itu yang menyesuaikan dengan media massa. Saya tidak yakin bahwa pada tahun 2000 atau pada masa yang akan datang, Budi Darma atau Umar Kayam akan mencoba menciptakan sastra yang layak dikonsumsi masyarakat dan layak dimuat di media massa. Mereka akan bertahan seperti itu dan walaupun berkembang, tidak akan berkembang menyesuaikan pembacanya atau dengan sastra yang ada di media.

Jawaban:

Semula ada perbedaan antara sastra serius, sastra pop, dan sastra media massa, bahkan ada sastra rakyat (*folk literature*). Dengan berkembangnya budaya media, perbedaan itu tidak penting lagi (*irrelevant*). Untuk kajian ilmu sastra, agar fakultas sastra mempunyai hak hidup, perbedaan ini harus dicari. Misalnya, Pak Subagio S. mencari gelar doktor karena ia percaya kepada ilmu sastra dan ilmu

itu mencari-cari. Kalau tidak ada yang dianalisis, akan mencari yang dianalisis. Hal itu berarti ada analisis sehingga akan tetap ada perbedaan ragam, sastra majalah, sastra koran, sastra radio, dan sastra televisi. Dengan berkembangnya budaya media, yang didukung oleh kapitalisme, *postkapitalism*, *poststructuralism*, dan *bussinesism* yang begitu kuat dengan ideologi posmodernisme yang berarti bahwa makna tidak bergantung pada otoritas pengarangnya, tetapi bergantung pada penafsiran tiap-tiap pembacanya. Oleh karena itu, mau tidak mau budaya media itu kita terima.

2. **Pertanyaan:** Subagio Sastowardajo, Sastrawan, Jakarta

Saya yakin bahwa Darmanto tidak banyak membaca sastra pop yang juga mengungkap masalah seks. Batas antara sastra pop dan sastra serius tidak jelas. Sastra serius dan sastra pop itu sebenarnya menunjukkan nilai yang luhur atau tinggi. Ada pandangan negatif bahwa sastra yang bermutu adalah sastra yang dibuat oleh kalangan yang tingkat pendidikannya tinggi dan oleh orang-orang jenius yang dipakai sebagai ukuran. Pandangan sekarang lebih demokratis bahwa sastra massa mendapat penghargaan yang tegas. Jadi, tidak ada sastra rendah. Ketoprak dan ludruk sekarang mulai menjadi bahan penelitian serius yang berarti sudah ada perhatian yang meluas dan standar yang dahulu dipakai sebagai pedoman.

Struktur kebudayaan itu lebih meluas, bukan saja di kalangan kaum borjuis, melainkan juga di kalangan rakyat. Saya kurang setuju bahwa kita hanya memberi perhatian pada "sastra tinggi". Orang yang membaca sastra majalah dan koran, berarti membaca sastra juga. Mereka juga mempunyai perhatian terhadap sastra. Oleh karena itu, tidak perlu lagi adanya perbedaan sastra tinggi dan sastra rendah.

Jawaban:

Pembaca mempunyai hak demokratis terhadap penulisnya. Otoritas kebenaran tidak berada di tangan penyair, tetapi juga di tangan pembaca. Hal itu menunjukkan bahwa proses *postmodernism* mulai muncul dengan adanya kedemokrasian itu. Seseorang mungkin senang membaca sastra pop, sedangkan yang lain senang membaca jenis sastra yang lain.

3. **Pertanyaan:** Usdianto, SMA Taruna Nusantara, Magelang

Kondisi sastra kita sekarang menjadi bumerang bagi para pengajar. Teori yang dipelajari di perguruan tinggi tidak diperhatikan anak. Jika guru memberi kebebasan siswa untuk memilih puisi untuk lomba baca puisi, misalnya, mereka jarang yang memilih puisi karya Pujangga Baru atau Balai Pustaka yang harus

diajarkan sesuai dengan kurikulum. Bagaimana implikasinya terhadap pengajaran atau apresiasi sastra?

Jawaban:

Pada waktu otoritas kesusastraan berada di tangan para penyair, yang mengatakan kebenaran itu adalah para penyair menyebabkan guru kesusahan memahami karya Rendra.

Untuk memahami puisi Rendra, perlukah guru tersebut pergi ke tempat pelacuran atau tidak? Hal itu adalah tugas guru apresiasi sastra. Sekarang otoritas tidak hanya pada tangan penyair. Hal itu bukan pengaruh media melainkan budaya media. Jadi, budaya kita sudah disusun secara tersurat dan dibentuk oleh budaya media. Kita mengetahui sesuatu, misalnya Kongres Bahasa Indonesia VI ini, karena kita membaca koran. Hal itu berarti bahwa kita telah mengikuti budaya media. Siswa mengetahui Rendra dari informasi yang dibaca melalui media, bukan dari puisi atau karya dramanya. Mereka tidak membaca sajak Rendra karena adanya budaya media. Yang ditulis di koran menjadi fakta yang lebih kuat daripada yang di luar koran. Objektif realitas di luar itu sudah diperkuat oleh motif lain yang sesudah dipublikasikan di koran fakta yang ada itu menjadi faksoid, bukan human atau humanoid.

4. Pertanyaan: H. Imam Syafi'ie, FPBS IKIP Malang

Walaupun sastra tersebar luas ke seluruh pelosok melalui media, kita akan tetap memilih karya sastra yang berbobot.

Jawaban:

Benar apa yang Anda katakan. Adanya pilihan terhadap karya sastra yang luhur, justru karena adanya pengaruh budaya media. Yang disebut puisi ialah yang oleh penyairnya disebut puisi.

5. Pertanyaan: Subroto, SMA Negeri 2, Banjarmasin

Di belakang teori *postmodernism* otoritas sastra terjadi dalam pembaca atau kejujurannya, apa yang terjadi jika tafsiran atau pendapat murid dan guru berbeda?

Jawaban:

Postmodernism menghargai pluralisme. Perbedaan pendapat antara guru dan murid itulah yang diuji. Setiap murid mempunyai hak menyuarakan isi hatinya.

PENGEMBANGAN SIKAP POSITIF DALAM BERBAHASA INDONESIA

Basuki Suhardi
Universitas Indonesia

1. Bahasa Indonesia sebagai Penanda Mutu Penuturnya

Tidak dapat disangkal bahwa jumlah pemakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat kita lihat dari hasil dua kali sensus penduduk yang terakhir. Meskipun jumlah mereka yang dapat berbahasa Indonesia turun 0,8%, yakni dari 60,8% (89 juta dari 147 juta penduduk Indonesia, menurut Sensus Penduduk tahun 1980) menjadi 60% (107 juta dari 179 juta jiwa, menurut Sensus Penduduk tahun 1990), jumlah mereka yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari naik 1%, yakni dari 12% (17,5 juta dari 147 juta pada tahun 1980) menjadi 13% (24 juta dari 179 juta jiwa pada tahun 1990). Dapat diperkirakan bahwa dalam waktu 7 tahun mendatang (Sensus Penduduk tahun 2000) jumlah pemakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari akan meningkat lagi sekitar 1—2%. Kemajuan di bidang ilmu, komunikasi (termasuk pengangkutan dan media massa), pendidikan, dan banyaknya perkawinan campuran (antaretnis) mau tidak mau mendorong tersebarnya pemakaian bahasa Indonesia di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan benar-benar telah memperdekat jarak sosial antarkelompok etnis di tanah air kita.

Meluasnya pemakaian bahasa Indonesia memungkinkan pemakainya memperluas pengetahuan dan wawasan dan ini berarti meningkatkan mutu mereka sebagai warga negara Indonesia. Salim (1983) menghubungkan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia dengan kemakmuran suatu daerah. Daerah yang tinggi pemakaian bahasa Indonesianya tingkat kemakmurannya juga tinggi dan begitu pula sebaliknya. Tjiptoherijanto (1985) melihat adanya kemungkinan bahwa pemakaian bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan mutu modal manusia. Pendapatnya itu didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa Indonesia memudahkan komunikasi dan pengalihan pengetahuan di antara sesama warga Indonesia.

Sangatlah wajar apabila pemerintah, dalam hal ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, terus-menerus menganjurkan agar kita selalu memakai bahasa

Indonesia dengan baik dan benar. Anjuran ini dapat kita katakan sebagai upaya menjunjung tinggi bahasa persatuan sebagaimana diamanatkan oleh para cendekiawan-cendekiawati kita 65 tahun yang lampau.

2. Lain yang Dianjurkan Lain yang Dilaksanakan

Anjuran yang dilontarkan oleh pemerintah itu sebenarnya bertujuan mulia. Anjuran itu dimaksudkan agar kita, penutur bahasa Indonesia, luwes di dalam memakai bahasa nasional. Artinya, kita diminta berbahasa Indonesia sewajar mungkin tanpa meninggalkan kaidah kebahasaan yang berlaku, sesuai dengan waktu dan tempat yang kita hadapi. Anjuran itu ada yang mengamini dan juga yang menentangnya. Di dalam kenyataannya—baik di kalangan yang mendukung maupun di kalangan yang menolak—anjuran itu sering disalahartikan. Dari berbagai pengamatan terhadap berbagai golongan diperoleh kesan bahwa anjuran itu diartikan sebagai fatwa yang ditujukan kepada para penutur bahasa Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia dengan tata bahasa yang tertib dan terpelihara dengan baik. Tafsiran ini menempatkan mereka pada suatu keadaan yang seolah-olah memaksa mereka untuk selalu terus-menerus memakai bahasa Indonesia ragam baku secara ketat dan kaku. Tafsiran kedua yang timbul dari anjuran itu adalah bahwa penutur bahasa Indonesia wajib berhati-hati di dalam memakai bahasanya karena, menurut tafsiran ini, kata-kata yang mereka pakai mestilah kata-kata yang sopan, indah, dan terpilih. Di samping itu, masih ada tafsiran lain yang cenderung mengartikan anjuran di atas sebagai anjuran untuk berbahasa secara lugas, tidak bertele-tele. Tafsiran yang mana pun yang kita pakai dari ketiga tafsiran di atas tidak memberikan peluang kepada penutur bahasa Indonesia untuk bertutur secara wajar. Dari anjuran itu mereka beranggapan bahwa bukannya kemudahan yang mereka peroleh melainkan beban berat yang harus mereka pikul. Mereka merasa terikat oleh kaidah, ragu-ragu dalam memilih kata, atau bahkan sama sekali enggan melaksanakan anjuran yang sebenarnya mulia itu, khususnya jika mereka berhadapan dengan ahli bahasa. Sering suatu percakapan dimulai dengan permintaan maaf karena mereka merasa tidak atau belum dapat berbahasa dengan baik dan benar.

Mereka yang menolak anjuran itu mengutamakan daya komunikatif suatu percakapan. Yang dipentingkan adalah bahwa lawan atau kawan bicara mereka mengerti apa yang mereka maksud sehingga tidak ada salah paham di antara mereka.

Salah tafsir itu timbul karena di antara penutur bahasa banyak yang tidak menyadari bahwa menurut kodratnya bahasa itu beragam-ragam. Setiap ragam mempunyai kaidahnya masing-masing. Kaidah yang berlaku di dalam ragam lisan tidak selalu harus berlaku pula di dalam ragam lisan; kaidah yang terdapat di dalam ragam resmi belum tentu ditemukan di dalam ragam santai sehari-hari. Dekatnya jarak sosial antara pemakainya ikut berpengaruh di dalam pemakaian suatu ragam tertentu. Kerancuan di dalam menerapkan ragam yang satu yang sebenarnya untuk ragam yang lain menimbulkan kesan sikap yang negatif terhadap bahasa Indonesia seperti yang terlihat dalam dua contoh berikut. Contoh pertama diambil dari percakapan antara

seorang mahasiswa dengan dosennya di sebuah perguruan tinggi di wilayah Jakarta Barat, sedangkan contoh kedua adalah pengalaman penulis pada waktu mengajar di sebuah perguruan tinggi di wilayah Jakarta Pusat.

I

- A: Maaf, Pak. Di sini tidak ada penjelasannya.
B: Lihat petanya *aja*. Lihat sebelah kanan bawah.
Di situ ada titik hitam kecil, *nggak*?
Itu, yang *ditandain pake* tanda panah!
Ada, *nggak*?

II

- C: Maaf, Pak. Boleh *ngomong* sebentar?
D: Ya, boleh saja. Ada apa?
C: Begini, Pak. Saya belum pernah ikut kuliah Bapak.
Saya sakit, Pak. *Nggak* ada yang *dimintain* tolong *ngasih* tahu ke sini.
Ini surat dokternya, Pak.

Banyaknya tukar kode baik dengan bahasa daerah maupun asing, khususnya Inggris, juga merupakan tanda lain lagi bagi sikap bahasa yang negatif seperti yang terlihat dalam contoh III dan IV di bawah ini.

III

- E: Sudah seperempat jam kita di sini.
Belum ada randa-tanda kita akan dilayani.
Lebih baik dibatalkan saja.
F: Ee, jangan *pundung* (merajuk) begitu.
Sing sabar urang, teh. (Kamu harus sabar.)
(Percakapan di sebuah kantor biro perjalanan di Jakarta Pusat.)

IV

- G: Siapa saja yang memiliki kartu kredit ini otomatis menjadi bertanggung dalam *personal accident insurance* (asuransi kecelakaan diri) ini. Sekarang kita hitung saja biayanya.
Death (kematian) berapa; *loss of both hands* (kehilangan kedua tangan) berapa. Begitu seterusnya. Harus diperinci satu per satu.
(Dari kuliah di sebuah perguruan tinggi di wilayah Jakarta Timur.)

Di dalam ragam tulis sikap negatif ini tercermin dari banyaknya penerapan kaidah ejaan atau tata bahasa yang berlaku, misalnya:

di bawa; dibawah; me-ngalami

Pada polis ini tidak menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai santunan.

Contoh di atas dapat ditambah dengan banyaknya papan nama, kain rentang, atau pengumuman yang tertulis di dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang tidak selalu ditulis dengan betul, misalnya:

This office open everyday.

Closed.

Happy with us: Cipayunk, Sunday, April 7th.

(Dari perguruan tinggi di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.)

3. Mengembangkan Modal yang Baik

Alhasil, anjuran yang baik tidak selalu terwujud dalam perilaku bahasa yang baik pula. Padahal, kita semua tahu betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dan kita semua sangat menghormati bahasa Indonesia sebagai lambang persatuan. Kita tentu tidak rela jika ada usaha untuk mengganti bahasa persatuan dengan bahasa lain. Rasanya kita semua akan membela bahasa kita mati-matian seandainya ada usaha ke arah itu. Inilah sikap kita yang benar-benar positif terhadap bahasa dan inilah juga sebenarnya modal yang amat berharga yang perlu kita kembangkan lebih lanjut di dalam wujud perilaku bahasa. Sayangnya modal kita itu tidak berkembang. Sikap positif itu, yang berupa rasa hormat kepada bahasa kita sendiri, hanya berhenti sampai pada rasa hormat saja, tidak diwujudkan dengan semangat yang sama di dalam perilaku bahasa. Contoh-contoh di atas, terutama pemakaian bahasa asing (yang dapat ditambah dengan banyak contoh lain) menunjukkan perilaku bahasa kita yang kurang menghargai bahasa sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, keluhan semacam itu sudah sering dilontarkan orang di dalam berbagai kesempatan, mulai dari keluhan yang dikemukakan secara perseorangan (Kridalaksana, 1974) sampai dengan keluhan yang diajukan secara bersama-sama melalui konferensi, lokakarya, seminar, dll. Sudah waktunya kita secara sungguh-sungguh berbenah diri dengan pemakaian bahasa sehingga kita dapat dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga memakai bahasa kita. Rasa bangga ini harus dapat mengatasi pertimbangan komersial (di samping adanya unsur perasaan "gagah"), misalnya, yang mendorong para pengusaha memasang papan nama perusahaannya dengan nama atau semboyan asing sehingga jika kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, kita dengan cepat dan tanpa ragu-ragu dapat memutuskan untuk memilih nama atau semboyan dalam bahasa kita sendiri.

4. Usaha Apa yang Dapat Kita Lakukan?

Menurut pertimbangan penulis, pengembangan sikap positif di dalam berbahasa Indonesia ini dapat dilakukan melalui berbagai usaha, baik yang menyangkut lembaga-

lembaga seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pers, dan badan hukum maupun perseorangan, seperti tokoh-tokoh masyarakat.

a. *Pedoman yang Jelas*

Adanya kesan bahwa pemakaian bahasa Indonesia tidak tertib kiranya perlu diatasi dengan sebuah pedoman yang jelas dan tegas. Sarana untuk itu sudah ada. Peraturan daerah yang mengatur pemakaian bahasa Indonesia untuk nama badan usaha (seperti yang diumumkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan DKI Jakarta Raya) perlu diangkat ke tingkat nasional sehingga "rimba raya bahasa asing" dapat dihilangkan. (Sebagai perbandingan, dapat diingat kembali keadaan pada tahun 1960-an. Pada waktu itu Presiden Soekarno melarang semua badan usaha memakai nama atau kata asing. Larangan itu dipatuhi dan selama beberapa tahun kita tidak menyaksikan nama-nama asing di seluruh Indonesia.) Sudah barang tentu ekses yang berlebihan sebagai penerapan peraturan sejenis itu harus dihindari.

b. *Tugas Tambahan untuk Pusat Bahasa*

Apa yang sudah dirintis oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selama ini (penyuluhan, penataran, dan kerja sama bahasa) perlu diteruskan tanpa kenal lelah dan rasa putus asa. Barangkali hasilnya belum dapat dinikmati sekarang, tetapi rintisan tersebut jelas merupakan usaha yang tidak dapat diragukan lagi manfaatnya. Yang perlu ditingkatkan dari usaha itu adalah pemanfaatan semaksimal mungkin hasil kerja yang berupa kamus istilah. Hendaknya usaha ini tidak hanya berhenti sampai pada penerbitan kamus saja, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk penerapannya melalui buku-buku pelajaran. Dengan demikian, istilah-istilah itu secara langsung dapat dimanfaatkan oleh mereka yang bekerja di lapangan, khususnya guru dan dosen. Untuk itu, tugas Pusat Bahasa perlu ditambah dengan usaha menjalin kerja sama dengan guru, dosen, atau kalangan lain. Melalui kerja sama itu diharapkan dapat dihasilkan buku-buku pelajaran dari berbagai disiplin ilmu lengkap dengan seperangkat istilah yang siap pakai. Mudah-mudahan tugas guru menjadi lebih ringan sehingga mahasiswa dan siswa dapat belajar lebih seperti halnya kita dulu memakai istilah *belah ketupat*, *jajaran genjang*, dan *kerucut*, tanpa kesukaran yang berarti. Untuk keperluan yang mendesak barangkali Pusat Bahasa perlu membuka saluran khusus yang melayani pertanyaan kebahasaan dari berbagai kalangan masyarakat.

c. *Peranan Pers*

Tidak dapat diragukan lagi peranan pers sangat besar di dalam pengembangan bahasa kita. Di samping tugasnya untuk memberitakan peristiwa-peristiwa penting yang mutakhir, secara tidak langsung sebenarnya surat kabar memberikan pendidikan jarak jauh kepada pembacanya. Ada baiknya apa yang dilakukan oleh surat kabar *Kompas* pada tahun 1960-an, kolom kecil yang berisi panduan atau keterangan

mengenai pemakaian kata-kata sukar (semacam kamus) dihidupkan kembali. Kolom ini besar manfaatnya bagi siapa saja yang ingin memperkaya perbendaharaan kata. Yang berangkutan dapat memakainya di dalam kegiatan berbahasanya dan sekaligus juga mendidik kita berbahasa yang baik dan benar. Kolom semacam ini dapat menjadi pengimbang dari berita yang harus segera disiarkan yang, siapa tahu, mengandung cacat kebahasaan karena penyunting (yang terbatas jumlahnya) harus berpacu dengan waktu agar hasil pekerjaannya dapat menjadi saham yang lebih positif lagi bagi perkembangan bahasa, alih-alih yang sebaliknya seperti, *sesuai dengan* untuk *sesuai*.

d. Peran Guru Bahasa

Di kalangan yang lebih terbatas, guru bahasa disiapkan terutama untuk meningkatkan kemampuan anak didiknya. Sebenarnya, di samping itu, dia juga dituntut untuk ikut menanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, tidak saja di kalangan anak didik, tetapi juga di kalangan sesama guru. Yang dapat diusahakan barangkali bagaimana agar pelajaran yang diasuhnya disajikan dalam bentuk yang menarik sehingga tumbuh kecintaan anak didik kepada bahasa Indonesia dan kesan bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu kurang menarik dapat hilang. Hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Banyak tantangan yang dihadapi para guru bahasa ini. Selain bahan atau sarana yang belum mencukupi, juga kenyataan kebahasaan di luar sekolah seringkali berbeda dengan yang diajarkan di ruang kelas.

e. Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat seperti budayawan, cendekiawan, dan pemimpin pemerintahan sering berperan besar di dalam mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Secara tidak langsung sebenarnya mereka melaksanakan pendidikan yang bersifat massal karena gagasan-gagasan yang mereka lontarkan melalui media massa dijadikan teladan oleh banyak orang. Dalam kaitan dengan pembahasan ini, para tokoh masyarakat dituntut untuk selalu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan cara ini masyarakat juga akan tergugah untuk selalu memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jika hal itu terjadi, berarti bahwa kita bangga memakai bahasa Indonesia tanpa merasa rendah diri bahasa Indonesia benar-benar menjadi jati diri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarwan, Asim. 1983. "Reaksi Subyektif terhadap BIB dan NB: Sebuah Pengkajian Sikap Bahasa". Kertas kerja dalam Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta.
- Halim, Amran. 1978. "Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijakan Bahasa Nasional". Kertas kerja dalam Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta.
- Kridalaksana, Harimurti. 1974. *Sikap dan Fungsi Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Moeliono, Anton M. 1988. "Sikap Bahasa yang Bertalian dengan Usaha Pengembangan dan Pembinaan Bahasa". Kertas kerja dalam Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengembangan Sikap Positif dalam Berbahasa Indonesia"
Pemakalah : Basuki Suhardi
Pemandu : Djantera Kawi
Pencatat : Sri Winarti
Elmi Wiarti

TANYA JAWAB

1. Peertanyaan: Indiyah Imran, FPBS IKIP Bandung

Ada dua kata yang dipakai secara berdampingan yang artinya sama bisa menumbuhkan sikap negatif terhadap bahasa Indonesia, contoh *rumah* mempunyai konotasi kurang bagus atau sangat sederhana dibandingkan dengan *vila* dan *apartemen* yang bermakna rumah yang harganya mahal, juga mengenai kata sapaan seperti pada *mak*, *ibu*, *ayah*, *papi*, *mami*. Sapaan *papi* dan *mami* kedengarannya lebih hebat dari *mak*, *ibu*, dan *ayah*, demikian juga nama orang. Kosakata tersebut dapat menumbuhkan sikap negatif terhadap bahasa Indonesia dan guru tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dua kosakata itu. Barangkali Pak Suhardi mempunyai pemikiran, bagaimana cara menghilangkan sikap negatif terhadap bahasa Indonesia.

Jawaban:

Dalam makalah itu saya menyebutkan ada berbagai ragam bahasa, yakni ragam lisan, ragam tulis, dan ragam baku. Dalam hal ini, yang perlu kita kembangkan adalah kesadaran akan ragam-ragam itu. Selama ragam yang disebutkan itu sesuai dengan pemakaiannya, saya kira tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ragam itu tidak dipakai sesuai dengan situasinya. Pemakaian kata seperti *vila*, *bungalow*, di samping *rumah* sebetulnya mirip dengan pemakaian kata-kata atau nama Inggris untuk toko yang ada di Indonesia. Jadi, kelihatannya segi komersial lebih dipentingkan oleh pengusaha dari segi kebakasaannya, dalam hal ini rasa kebanggaan berbahasa Indonesia. Barangkali kita harus meyakinkan bahwa bukan nama itulah yang mendatangkan keuntungan dana. Akan tetapi, meskipun kita memakai nama *rumah*, *gubuk*, atau *pondok* yang semua itu lebih berbau Indonesia, akan tetap mendatangkan uang jika dilengkapi dengan pelayanan yang baik, apakah kebersihannya, pelayanannya dalam menerima tamu, dan seterusnya. Kelihatannya sifat kebahasaan tidak dapat berdiri sendiri dipisahkan dari sifat yang lain, dalam hal ini unsur komersial. Soal nama sangat pribadi sifatnya dan dapat dipakai dalam lingkungan kecil itu saja. Peranan guru di sini adalah memberi arahan pemakaian kata yang baik.

2. **Penanya:** Asim Gunarwan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Saya ingin menanggapi pertanyaan Ibu Indiyah bahwa sikap bahasa tidak dapat timbul terhadap kata atau istilah. Sikap bahasa adalah sikap terhadap bahasa secara keseluruhan. Pertanyaan saya, di dalam makalah Bapak ada sikap kurang menghargai bahasa Indonesia. Saya dapat membuktikan dari data dengan teknik samaran terbanding. Setidak-tidaknya ada petunjuk yang mengisyaratkan memang orang Indonesia cenderung tidak menghargai bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris. Kekurangan menghargai bahasa Indonesia itu dapat memberi implikasi yang jauh. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu (*social glue*/perekat sosial). Kalau orang Indonesia kurang menghargai bahasa Indonesia alat sebagai perekat bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu menjadi kurang, artinya kesatuan bangsa Indonesia juga akan menurun. Kalau hal itu terjadi lama, kepribadian kita akan *terjejas*. Setujukah Bapak dengan pendapat saya.

Jawaban:

Hasil penelitian Pak Asim sesuai benar dengan hasil penelitian saya di tempat lain. Sikap terhadap bahasa Indonesia dalam hal segi konatifnya kalau kita bicara soal sikap segi kognitif, afektif, dan konatif. Di dalam segi kognitif, afektifnya bahasa Indonesia atau bahasa orang Indonesia positif. Akan tetapi, di dalam segi konatifnya ini ternyata jika dibandingkan dengan bahasa Inggris lebih positif sikap bahasanya terhadap bahasa Inggris. Jika dihadapkan pada pemilihan nama-nama toko atau semacamnya ternyata mereka lebih suka memakai nama-nama dengan bahasa Inggris. Penelitian saya menggunakan sampel para mahasiswa dan orang-orang perguruan tinggi. Hasilnya sama dengan hasil penelitian Pak Asim yang memakai responden yang lain. Kecenderungan kurang menghargai bahasa Indonesia bisa membawa implikasi jauh terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Saya tidak berani menjawab *ya* atau *tidak*. Walaupun ada, kecenderungan kurangnya persatuan bangsa itu barangkali faktornya tidak hanya kebahasaan saja, tetapi ada juga unsur-unsur lain yang membawa kekhawatiran akan kurangnya persatuan bangsa di Indonesia. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi.

3. **Pertanyaan:** Zakiah Agus Kusasi, FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Saya sependapat bahwa tokoh masyarakat dan media dalam pemakaian bahasa amat mempengaruhi pemakai bahasa yang lain. Pertanyaan saya berhubungan dengan makalah yang berjudul "Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Mutu Kewartawanan" yang dibatalkan kemarin. Pertanyaan ini berkaitan dengan penawaran demi kepraktisan dan waktu sehingga penulisan bentuk ulang memakai angka dua tidak mengikuti pedoman ejaan. Anak saya yang duduk di kelas II SD menemukan tulisan seperti itu di surat kabar. Kata *sebanyak-banyaknya* yang ditulis dengan angka dua, dibaca *sebanyak duanya*. Kata *buku-buku* yang ditulis dengan angka dua juga, dibaca *buku dua*. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut

Bapak terhadap sikap pemakalah "Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Mutu Kewartawanan" tersebut? Apakah sikap positifnya terhadap bahasa Indonesia membantu di dalam pengembangannya?

Jawaban:

Di kalangan wartawan ada suatu lembaga yang bernama PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Lembaga ini mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan tersendiri yang menyangkut, antara lain bahasa. Bagaimana mereka menulis bahasa Indonesia dengan cara menghemat sesuai dengan kolom yang terbatas. Di situ diputuskan berbagai cara menulis bahasa Indonesia yang sehemat-hematnya, yaitu antara lain dengan menggunakan angka dua untuk bentuk pengulangan. Kasus seperti itu sesuai dengan apa yang saya sebutkan, menghilangkan *dengan* dalam frasa *sesuai dengan*. Kesepakatan ini berlaku di antara anggota-anggota PWI. Perlu ditingkatkan kerja sama PWI dengan Pusat Bahasa sampai hal-hal semacam ini bisa dihindarkan. Akan tetapi, kita bisa juga melihatnya dari segi lain, yaitu melihat adanya ragam-ragam yang hidup di masyarakat ini maka dari segi ragam kewartawanan cara penulisan seperti itu boleh saja, tetapi tidak boleh dipakai di luar dunia kewartawanan. Hanya saja, kalau tetap dipakai, hal ini akan mempengaruhi masyarakat pembacanya.

Anjuran saya, pertemuan yang periodik antara Pusat Bahasa dan PWI barangkali dengan cara ini sedikit demi sedikit kebiasaan tadi dapat dihilangkan.

4. Penanya: Zainuddin Thaha, IKIP Ujung Pandang

Dalam *Megatrend* 2000 ada pernyataan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan bahasa Inggris disenangi penuturnya di mana-mana karena bahasa Inggris paling mudah digunakan secara salah. Bahasa Inggris di Singapura lain dengan bahasa Inggris di Malaysia, Hongkong dan Inggris. Orang tidak takut disalahkan atau tidak bersikap positif terhadap bahasa Inggris. Bagaimana jika keadaan ini dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Mungkin sebagian besar kita selama beberapa hari ini sering kali mendengar bahasa yang menyimpang dari bahasa Indonesia yang dianggap "baik dan benar". Hal itu dapat membuat orang takut menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, masih banyak orang Indonesia belum paham menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah kita bisa menerima, pernyataan biarlah bahasa Indonesia digunakan seperti apa adanya sesuai dengan konteks atau situasi seperti yang tadi dikemukakan.

Jawaban:

Ketakutan orang untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar karena salah tafsir mengenai arti *baik* dan *benar* sehingga orang selalu berupaya minta maaf. Orang itu minta maaf karena ia bukan ahli bahasa, jadi merasa boleh

berbicara tidak baik dan tidak benar. Padahal, yang dimaksud sebenarnya maaf karena tidak memakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi, sebetulnya ia tak perlu minta maaf jika berbicara dalam situasi santai. Akan tetapi, dalam situasi resmi seperti sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia yang baku dituntut setinggi-tingginya. Kalau sampai ada satu kata yang tidak baku dipakai pada kesempatan ini, berarti pembicara ingin meredakan suasana tegang untuk membuat suasana menjadi santai. Dalam masalah bahasa Inggris, seperti yang Bapak maksud, barangkali kita harus ingat bahwa mereka sadar bahwa bahasa Inggris bukan bahasanya. Jadi, kalau terjadi kesalahan dibiarkan saja karena bukan bahasanya. Sebaliknya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa miliknya, mereka (penuturnya) akan merasa takut kalau sampai membuat kesalahan.

5. Pertanyaan: Ahadi Sulissusiawan, Pemimpin Proyek Penelitian dan Pengembangan Bahasa Kalimantan Barat

Apakah kriteria sikap positif atau sikap negatif yang Bapak bicarakan? Yang saya ketahui, sikap positif dilihat dari kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran terhadap bahasa yang tidak Bapak sebutkan. Pertanyaan saya, adakah kriteria lain tentang sikap positif, selain yang sudah disebutkan di atas sehingga dapat dibuat suatu kebijaksanaan dalam penggunaan bahasa Indonesia? Contoh yang tadi dikemukakan, tentang permintaan maaf karena tidak berbahasa Indonesia dengan baik, termasuk sikap positif atau negatif?

Jawaban:

Sebenarnya secara sepintas ukuran sikap positif sudah disinggung dalam makalah saya, yaitu rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Jika kita dihadapkan pada pilihan apakah harus memakai bahasa Inggris atau Indonesia, kita harus pilih memakai bahasa Indonesia. Hal itu adalah contoh sikap positif. Hendaknya kata-kata asing yang sudah mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia dipakai semaksimal mungkin. Jadi, itulah yang saya pakai di sini sebagai ukuran.

BAHASA INDONESIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Yayah B. Lumintintang

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

"Tugas kita semua di dalam era tinggal landas nanti tidak meniru begitu saja masyarakat industri maju yang telah ada sekarang ini. Kita membangun masyarakat industri maju yang tetap mengungkapkan kepribadian dan cita-cita perjuangan nasional kita sendiri, seperti yang telah kita abadikan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45."

(Presiden Republik Indonesia, Soeharto, 1993:8)

1. Pendahuluan

Pembahasan tentang bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah luas. Ini dapat meliputi semua konteks dan situasi pemakaian bahasa Indonesia, yang di dalam forum kongres ini, dibahas oleh peserta yang lain; misalnya pemakaian bahasa dalam media elektronik/cetak, dalam penyelenggaraan negara, dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, dalam ilmu pengetahuan teknologi, dan dalam kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, saya sangat membatasi permasalahannya, yakni hanya menyoroti pemakaian bahasa Indonesia di dalam lingkungan masyarakat terkecil, yakni masyarakat rumah tangga, yang menurut hemat saya, wadah ini merupakan wadah yang sangat berperan di dalam peningkatan pemakaian bahasa Indonesia.

Untuk topik tersebut, pembahasan akan berkisar pada jawaban atas seperangkat pertanyaan dari Panitia Kongres Bahasa Indonesia VI tentang (1) kondisi pemakaian bahasa Indonesia dalam masyarakat dewasa ini berikut proyeksinya menjelang tahun 2000, (2) berbagai kendala yang dihadapi di dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia, baik kini maupun menjelang tahun 2000, dan (3) upaya yang perlu dilakukan untuk memantapkan pemakaian bahasa Indonesia di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kondisi Pemakaian Bahasa Indonesia

Gambaran yang diperoleh tentang kondisi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di rumah, secara kuantitatif, dari sensus ke sensus

penduduk di seluruh Indonesia menunjukkan perubahan; contohnya, Sensus Penduduk Tahun 1980 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia yang berbahasa Indonesia sehari-hari hanyalah 17,5 juta (12%) dari 146,8 juta orang. Kecenderungan persentase tertinggi tampak pada pemakaian Bahasa Jawa dan Sunda (masing-masing 40% dan 15%). Bahasa daerah yang lainnya adalah bahasa Madura, bahasa Minang, Bugis, Batak, Banjar, dan bahasa Bali. Menurut hemat saya, kondisi pemakaian bahasa daerah di dalam interaksi antaranggota dalam masyarakat rumah tangga tidaklah mengherankan karena ranah (*domain*) rumah tangga (keluarga) merupakan ranah yang cenderung diwarnai oleh situasi pemakaian bahasa yang santai.

Gambaran yang dikemukakan di atas tampak pula pada hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Penutur yang berbahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari di lingkungan rumah tangga mereka cenderung meninggi persentasenya. Dengan kata lain, pemakaian bahasa Indonesia secara kuantitatif lebih tinggi daripada pemakaian bahasa daerah. Menurut Sensus Penduduk Tahun 1990 itu, penduduk Indonesia yang berbahasa Indonesia sebanyak 130.868.836 (65%) meskipun hanya 23.802.520 orang (18%) saja yang memakai bahasa Indonesia itu dalam kegiatan sehari-hari. Yang tidak menguasai bahasa Indonesia adalah sebanyak 27.055.488 orang (17,13%) dari 157.924.324 orang .

Dari komposisi tersebut di atas, jika disoroti wilayahnya, yang paling tinggi **persentase penduduk tidak dapat berbahasa Indonesia**, secara berturut-turut, adalah Propinsi Sulawesi Tenggara (45,84%), NTB (30,74%), Jawa Timur (25,39%), dan Bali (23,92%). Namun, **persentase yang dapat berbahasa Indonesia tetapi tidak memakainya** di lingkungan rumah tangga itu (di atas rata-rata 50%) adalah Propinsi DKI (6,8%), Riau (80,30%), Sumatra Barat (83,99%), Sumatra Selatan (82,73%), Kalimantan Selatan (82,45%), Kalimantan Tengah (80,38%), Kalimantan Barat (77,12%), Lampung (79,25%), DI Yogyakarta (76,94%), Jawa Tengah (77,12%), Jambi (71,93%), Bengkulu (79,25%), Jawa Barat (68,76%), Kalimantan Barat (61,25%), dan Sulawesi Tengah (66,29%). Yang patut disoroti adalah Propinsi DKI Jakarta yang tampak dengan angka 93,11% mengaku berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Sementara itu, temuan penelitian Lumintaintang, 1976; Muhadjir, 1979, Grijns, 1983 (dalam Muhadjir *et al.*, Editor, 1988) melaporkan bahwa bahasa Melayu Jakarta disadari benar oleh responden sebagai bahasa yang tidak sama dengan bahasa Indonesia. Pertanyaan yang timbul adalah mungkinkah dalam waktu yang relatif singkat itu telah terjadi pergeseran bahasa dari bahasa Betawi ke bahasa Indonesia. Sementara itu, saya yang kebetulan masih tinggal di daerah yang lingkungan bahasanya terbesar bahasa Melayu Betawi sehari-hari masih mendengar anggota masyarakat Betawi yang masih memakai bahasa Melayu Betawi.

Untuk melihat proyeksi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari pada tahun 2000-an, saya merujuk perhitungan Abas (1988:262-263) yang tampak dalam tabel berikut.

**TABEL JUMLAH PENUTUR BAHASA INDONESIA
MENURUT TAHUN 1981, 1991, 2001**

No.	Pulau	1981	1991	2001
1.	Sumatra	76,32%	90,04	96,79
2.	Jawa	40,12	47,76	57,10
3.	Kalimantan	64,11	77,72	92,98
4.	Sulawesi	55,79	66,55	75,25
5.	Pulau-Pulau yang lain	48,73	56,69	65,61
6.	Jumlah Ind.	49,66	59,47	69,01

Sumber sudah diolah kembali dari Abas (1988) atas dasar Biro Statistik, 1982. Seri E.

Proyeksi keadaan penutur berbahasa Indonesia dari tahun 1980–2000 yang tertera dalam tabel di atas memperlihatkan persentase kenaikan jumlah penutur bahasa Indonesia di Kepulauan Indonesia ini. Yang tampak mencolok adalah keadaan di Pulau Sumatra dan Kalimantan yang secara berturut-turut memperlihatkan angka 96,79% dan 92,98%, dan Sulawesi Tengah 75,25%. Pulau Jawa sebanyak 57,10% dan pulau-pulau yang lainnya hanya sebanyak 65,6%. Keadaan tersebut perlu dicatat karena hubungannya erat bagi keperluan penataan prioritas pelaksanaan kegiatan pembinaan bahasa yang baik dan benar oleh Pusat Bahasa.

Dari tabel tersebut juga dapat disimpulkan sementara bahwa menjelang tahun 2000 anggota masyarakat bahasa Indonesia belum sepenuhnya (100%) menjadi dwibahasawan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada konteks dan situasi pemakaian bahasa yang seyogianya menuntut pemakaian bahasa Indonesia sepenuhnya, tetapi menggunakan bahasa daerah. Hal ini penting diangkat ke permukaan karena datanya berguna bagi para pelaksana kegiatan program pembangunan nasional yang nonbahasa (tidak menyampaikan pesan pembangunan dengan bahasa yang belum dimengerti oleh mereka).

Kondisi pemakaian bahasa Indonesia seperti dikemukakan pada uraian di atas baru ditinjau dari segi kuantitatif. Dari segi kualitatifnya, terutama jika kita menyoroti komponen-komponen ragam bahasa Indonesia yang dipakai di rumah tangga, tentu kita akan berhadapan dengan ragam bahasa Indonesia yang sangat tepat dengan situasi dan konteksnya. Seperti telah dikemukakan, rumah tangga merupakan wadah yang cenderung didominasi oleh pemakaian ragam bahasa Indonesia baku (ragam rendah). Data pemakaian bahasa seperti "*Apakah yang sedang engkau masak, Bi?*" "*Masak apa, Bi?*". Namun, sekalipun ranahnya rumah tangga, tidak tertutup bagi kemungkinan adanya pemakaian ragam bahasa Indonesia baku. Ini telah terbukti pada temuan-

temuan para peneliti, seperti Suwito (1985) dan Lumintintang (1990), yang memperlihatkan topik pembicaraan yang resmi dan oleh peserta tutur yang berjarak mendominasi pemakaian bahasa Indonesia baku.

Saya masih ingin menyoroti kualitas ragam bahasa Indonesia yang tampak pada konteks dan situasi yang lain. Ini jika kita sepekat bahwa rumah tangga merupakan wadah yang para anggotanya diharapkan dapat percepatan tercapainya sasaran Bidang Pengembangan Jangka Panjang Kedua (*yakni terwujudnya kehidupan masyarakat yang, antara lain, makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, hakikat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri serta kepribadian bangsa*) melalui bahasa Indonesia.

Kita tahu bahwa selama ini rumah tangga cenderung dianggap sebagai kambing hitam di dalam menghadapi kegagalan pengajaran bahasa Indonesia, di samping lingkungan-lingkungan lainnya di luar sekolah. Dari segi ini tepatlah kiranya jika efektivitas pemakai bahasa Indonesia (yang senantiasa berkunjung menemani para anggota rumah tangga dengan berbagai topik: IPA, IPS, dan IPB) melalui ragam bahasa media massa elektronik, khususnya televisi dan radio, dan media cetak, seperti surat kabar dan majalah, memberikan model-model yang terbaik (sesuai dengan dan situasi pemakaian dan peristiwa berlangsungnya komunikasi. Dengan kata lain, media massa menampilkan model-model langsung yang dengan efektif dapat diacu sebagai ragam bahasa yang baik dan benar untuk komunikasi lewat media massa. Televisi ("*semua stasiun milik bangsa Indonesia*") memberikan model-model nyata secara audio, visual, atau audiovisual tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar: tidak lagi ada yang hanya merasa berfungsi sebagai saluran informasi dan hiburan.

Demikian pula halnya dengan media radio; sudah saatnya semua media radio itu (pemerintah atau swasta) memberikan model-model pemakaian bahasa Indonesia baik dan benar yang dapat dipakai acuan oleh para anggota masyarakat rumah tangga seluruh Indonesia secara baik dan benar. Di samping itu, ragam bahasa iklan yang tampil dengan fisik tersendiri, seperti berupa iklan niaga dan iklan berita yang menggunakan media luar ruang, media massa, atau media elektronik. Semuanya itu senantiasa hadir dan akrab dengan para anggota rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan pembicaraan di atas, tidaklah dapat ditunda-tunda lagi waktunya untuk membantu secara penuh para anggota rumah tangga Indonesia itu sehingga mereka tidak hanya dianggap menjadi bagian "lingkaran setan" terhadap masalah kualitas bahasa Indonesia yang kita hadapi.

3. Kendala Pemasyarakatan Pemakai Bahasa Indonesia

Gambaran kebahasaan atas dasar sensus penduduk tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia, baik secara perseorangan maupun secara sosial, merupakan dwibahasawan (*multilingual*). Sehubungan dengan itu, kendala yang akan muncul di dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia tetap akan didominasi oleh

faktor sikap bahasa penutur terhadap bahasa-bahasa yang dikuasainya, khususnya terhadap bahasa Indonesia (Bandingkan Halim, 1976). Di samping itu, sejauh mana kadar bilingualitas para penutur bahasa itu terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau dengan bahasa yang lainnya. Kedua faktor itu, menurut hemat saya, merupakan faktor yang paling dominan di dalam pencapaian target PJP II, khususnya bagi bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kendala di atas merupakan kendala terbesar yang kita hadapi pada masa kini maupun pada tahun 2000-an. Amatan saya menunjukkan bahwa pembangunan fisik lebih sulit daripada pembangunan sikap bahasa. Misalnya, dalam kurun waktu dua tahun kita dapat membangun jembatan layang sepanjang 30 km dengan teknologi Sostrobahu ala Indonesia dan saya bisa menikmati hasil pembangunan itu. Namun, begitu melihat tulisan yang terpampang pada papan petunjuk nama jalan itu, baik ketika masuk maupun keluar, tidak satu pun penulisannya yang sesuai dengan kaidah EYD, padahal usia EYD sudah menjelang 21 tahun. Oleh karena itu, langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi kendala di atas harus segera diwujudkan.

4. Peningkatan Upaya Pemantapan Pemakaian Bahasa Indonesia

Dengan bertolak dari uraian di atas, langkah-langkah yang konkret untuk memantapkan pemakaian bahasa Indonesia baik dari segi kuantitas pemakai maupun kualitas pemakaiannya dapat dilakukan sebagai berikut.

- 1) Untuk peningkatan kuantitas dapat dilakukan kegiatan pemberantasan buta bahasa Indonesia. Kegiatan ini dapat dilaksanakan seperti halnya mengelola kegiatan P-4 (seperti pernah disebut-sebut oleh Asim Gunarwan pada Kongres Bahasa Indonesia V).
- 2) Untuk peningkatan kualitas ragam bahasa Indonesia, media massa (baik elektronik: audio, visual, audiovisual, maupun media massa: surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya) serta media lain, seperti film dan seni suara, yang memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai mediumnya, seyogianya tampil sebagai model-model yang efektif sebagai acuan oleh masyarakat rumah tangga.
- 3) Untuk peningkatan sikap bahasa terhadap bahasa Indonesia, catatan Moeliono (1985:150), yang menganjurkan sistem perangsang yang dapat mendorong penutur mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sudah mulai terwujud. Namun, itu belum mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Contoh nyata strategi pembinaan nonbahasa Indonesia dapat kita nikmati dengan berbagai hadiah "yang aduhai".

Masih tentang peningkatan sikap bahasa, para pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan swasta diharapkan menjadi model pemakai bahasa Indonesia yang bermutu sehingga jerih payah sementara orang yang merasa sia-sia di dalam upaya meningkatkan mutu bahasa Indonesia mereka terobati. Ini dapat dilakukan bukan hanya dengan memperlihatkan mutu pemakaian bahasa, melainkan juga dengan "mengurangi/mengikis kekuasaan semantik (*semantic power*)" yang kini

menjalar ke dalam seluruh komponen bahasa, seperti dalam laras bahasa surat dinas. (Brown dan Gilman, 1968, memandang pemakaian pronomina *to* dan *vou* sebagai unsur yang berkaitan dengan kekuasaan semantik).

- 4) Karena mengatasi permasalahan bahasa Indonesia merupakan tugas nasional, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seyogianya meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, lebih erat lagi, termasuk dengan organisasi-organisasi profesi kebahasaan dan nonkebahasaan.

5. Penutup

Keadaan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat memperlihatkan keadaan yang positif, terutama dari segi kuantitas. Dari sensus ke sensus, termasuk proyeksinya menjelang tahun 2000-an, keadaan kebahasaan yang masih akan memperlihatkan adanya penutur yang belum mampu berbahasa Indonesia, dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat Indonesia sedang menuju ke arah masyarakat multilingual yang stabil (*stable multilingualism*).

Dengan hikmah Oktober, Sumpah Pemuda 1928, saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan mengajak peserta Kongres Bahasa Indonesia VI untuk bersama-sama memotong "lingkaran setan" yang selama ini menghantui sikap sementara penutur bahasa Indonesia (salah orang tua, salah guru, salah koran, dan salah iklan).

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 1990. *Hasil Sensus Penduduk 1990*. Seri S2 dan S2.01-S2.27. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Brown, R. dan A. Gilman. 1970. "The Pronouns of Power and Solidarity". Dalam J.A. Fishman. Editor. *Readings in the Sociology of Language*: The Hague; Mouton. (Hlm. 252-275)
- Ferguson, C.A. 1991. "Diglossia". Dalam Anwar S. Dil. Editor. *Language Structure and Language Use*. Stanford. California: Stanford University Press. (Hlm. 26)
- Greenfield, L. 1972. "Situational Measures of Normative Language View in Relation to Person, Place and Topic among Puerto Rican Bilinguals". Dalam J.A. Fishman. Editor. *Advances in the Sociology of Language*. Jilid II. The Hague: Mouton. (Hlm. 17-35)
- Halim, Amran. Editor. 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Ketetapan-Ketetapan MPR-RI dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 1993. Jakarta: CV Mini Jaya Abadi.
- Lauder, Multamia dan Basuki Suhardi. 1990. "Sikap Kebahasaan Kaum Wanita". Dalam Muhadjir. Editor. *Bilingualisme dan Variasi Bahasa*. Depok: FSUI. (hlm. 209-216)
- Lumintaintang, Yayah B. 1990. "Pola Pemakaian Bahasa dalam Perkawinan Campuran: Telaah terhadap Keluarga Jawa-Sunda Karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan". Disertasi. Universitas Indonesia.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Seri ILDEP. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Muhadjir et al. Editor. 1988. *Bahasa Indonesia Tahun 2000*. Kumpulan Makalah Seminar Sosiolinguistik I. (23-24 Oktober 1987). Depok: FSUI.
- Nababan, P.W.J. 1984. "Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Komunikasi Masyarakat". Dalam Murad dan S.R.H. Sitanggang. Penyunting. *Kongres Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat. 16 Agustus 1993. Dalam *Kompas*. dan 16 Agustus 1991.

- Suhardi, B.P. 1989. "Perkembangan Pemakaian Bahasa Indonesia menurut Sensus Penduduk 1971 dan Sensus Penduduk 1980. Dalam Muhadjir *et al.* Editor. Kumpulan Makalah Seminar Sociolinguistik I (23-24 Oktober 1987). Depok: FSUI.
- Suwito. 1987. "Berbahasa dalam Situasi Diglosik: Kajian tentang Kendala Pemilihan dan Pemilahan Bahasa di dalam Masyarakat Tutur Jawa di Tiga Kelurahan Kotamadya Surakarta". Disertasi. Universitas Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat
Pemakalah : Yayah B. Lumintaintang
Pemandu : Sudaryanto
Pencatat : Atisah
Syamsarul

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Susetio, Universitas Bengkulu

- a. Siapa yang dominan dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkungan rumah tangga?
- b. Apakah letak geografis berpengaruh dalam pemakaian bahasa Indonesia?

Jawaban:

- a. Tidak didominasi oleh ayah atau ibu, tetapi tergantung pada topik pembicaraan dan kadar situasinya.
- b. Secara teori letak geografis berpengaruh terhadap pemakaian bahasa Indonesia anggota rumah tangga setidaknya-tidaknya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. **Pertanyaan:** Tomo, RRI Jakarta

Tidak sependapat dengan pemakalah mengenai ibu rumah tangga sebagai sasaran karena di rumah tangga sudah lazim digunakan bahasa ibu.

Status Pusat Bahasa perlu ditingkatkan dan perlu dibuat Undang-Undang Bahasa Indonesia. Di mana kita harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar?

Jawaban:

- a. Topik pembicaraan dalam anggota rumah tanggalah yang berperan dalam meningkatkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- b. Setuju dan sudah ada Perda DKI, misalnya mengenai papan petunjuk, iklan, kain rentang.
- c. Karena komunikasi dalam rumah tangga berbeda, perlu diperhatikan konteks dan situasi pembicaraan.

3. **Pertanyaan:** Masrurah Mochtar, Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang
- Dapatkah diperhitungkan bahasa baku lokal, (misalnya, ragam Bahasa Indonesia-Bugis)
 - Apa batasan bentuk-bentuk bahasa ragam rumah tangga, misalnya kosakatanya atau kalimatnya.

Jawaban:

- Yang patut diperhitungkan bila orang Bugis berbahasa Indonesia di tingkat nasional, orang itu harus meninggalkan kelokalannya.
- Penggunaan bahasa Indonesia dalam rumah tangga cenderung diwarnai oleh keadaan rumah tangga masing-masing karena kedominan topik pembicaraan. Biasanya diwarnai oleh kosakata atau kalimat yang tidak lengkap.

4. **Pertanyaan:** Supriyanto, Timor Timur

Pemakaian bahasa Indonesia di Timtim sudah menggeser bahasa Timor Timur.

Usul:

Minta buku-buku bahasa Indonesia

Jawaban:

Usul dicatat

5. **Pertanyaan:** Hartati Budiman

Bagaimana penggunaan ragam dialek rumah tangga?

Jawaban:

Dalam rumah tangga pemakaian bahasa Indonesia cenderung diwarnai oleh penggunaan kata-kata yang tidak resmi, seperti kata *lu* dan *gue*. Yang penting kita dapat menempatkan fungsinya.

6. **Pertanyaan:** Lalamentik, Universitas Samratulangi

Bagaimana memotivasi kelompok penutur yang merasa tidak membutuhkan bahasa Indonesia. (misalnya kelompok bawah)

Jawaban:

Memotivasi kelompok tersebut lebih susah kalau dikaitkan dengan kepentingan ekonomi.

TERBITAN ILMIAH DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

H.J. Koesoemanto
Sebelas Maret University Press

1. Pendahuluan

Sesuai dengan permintaan Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia VI Tahun 1993, makalah ini akan membahas "Peran Terbitan Ilmiah dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia". Makalah ini sengaja tidak mencakup teknologi modern karena alasan dan pertimbangan tertentu. Selain itu, makalah ini bermaksud untuk memperoleh jawaban atas beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut.

- 1) Apa saja peran terbitan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia?
- 2) Bagaimana perkembangan usaha pengadaan terbitan ilmiah dewasa ini?
- 3) Bagaimana mutu bahasa Indonesia dalam terbitan-terbitan ilmiah itu?
- 4) Upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan terbitan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia?

Yang menjadi fokus tulisan ini adalah peran terbitan ilmiah. Oleh karena itu, sangatlah relevan dan perlu untuk terlebih dahulu dibicarakan tentang hakikat karakteristik dan sifat ilmiah suatu terbitan ilmiah. Agar diperoleh suatu gambaran yang jelas apa terbitan ilmiah itu serta macamnya.

Yang akan diulas pertama adalah apa atau yang bagaimana yang ilmiah itu?

Ilmiah adalah sifat dari ilmu. Oleh karena itu, biasanya pembicaraan secara ilmiah (sifat) tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang ilmu. Banyak sarjana yang menegaskan bahwa ilmu itu selalu berkaitan dengan sifat ilmiah atau sebaliknya *science* dan *scientific*, baik sarjana Indonesia maupun asing.

Hatta (1964) memberi batasan ilmu sebagai pekerjaan hukum sebab dan akibat atau kausalitas yang senantiasa mengemukakan pertanyaan *bagaimana* (duduknya) dan apa *sebabnya*, dan keterangan ilmu berbunyi: kalau begini jadinya, begitu kelanjutannya (akibatnya) dengan syarat yang tidak berubah (*ceteris paribus*). Senada dengan yang dikemukakan oleh Hatta, Goode, dan Hatt (1952) menyatakan bahwa

ilmu adalah suatu metode (cara) pendekatan terhadap dunia empirik seluruhnya, bukan untuk menemukan kebenaran akhir (*ultimate truth*), melainkan hanya sekadar metode analisis yang memungkinkan seorang ilmuwan membuat suatu pernyataan dalam bentuk *jika ..., maka ...* (*if ..., then ...*).

Yang juga senada, tetapi lebih tegas dan secara tersurat (eksplisit) menyatakan bahwa yang ilmiah selalu terkait dengan suatu prediksi adalah Marshall Walker. Ia yang menyatakan bahwa dalam setiap pemunculan kata *ilmu* atau *ilmiah* selalu terkait ide tentang prediksi, baik secara eksplisit maupun implisit.

Ada yang menekankan bahwa sifat ilmiah terkait dengan ada atau tidaknya metode dan ini membedakan suatu ilmu dengan pemikiran yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Suriasumantri (1978).

Yang juga menekankan pada metode adalah Townsend. Ia menyatakan bahwa definisi ilmu tidak terletak pada *apa* yang dicapai, tetapi pada *bagaimana* mencapainya. Faktor penting yang menentukan ada atau tidaknya ilmu adalah berpikir ilmiah (*scientific thinking*). Untuk menyatakan bahwa suatu pengetahuan adalah ilmiah (ilmu pengetahuan) -- yang dicapai melalui suatu metode penelitian yang sistematis -- yang penting adalah metode penelitiannya dan bukan materi yang diteliti.

Poejowijatna (1967) menyatakan bahwa sifat ilmiah mengandung empat hal, yaitu berobjektivitas, bermetode, universal, dan bersistem. Adapun The Liang Gie (1982) menyatakan bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang mencoba merumuskan hukum (aturan) yang bersifat umum. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa struktur pengetahuan yang ilmiah secara sistematis terdiri atas lima hal yaitu adanya objek, pernyataan, proposisi, ciri-ciri yang menonjol, dan pembagian yang sistematis.

Dari rumusan dan pendapat sarjana-sarjana yang disebutkan di muka tampak bahwa Walker secara tegas dan eksplisit menonjolkan prediksi (*prediction*) walaupun pada Hatta, Goode, dan Hatt juga ada, sedangkan rumusan yang menekankan pada metode adalah Goode-Hatt, Jujun, Poejowijatna, dan Townsend.

Rumusan-rumusan tersebut penting untuk mengupas bagaimana peranan terbitan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, rumusan itu belum cukup karena belum ada rumusan yang menyangkut keterkaitan sifat ilmiah dengan bahasa Indonesia untuk dapat dijadikan pegangan atau alat analisis untuk mengetahui bagaimana peran terbitan ilmiah dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa pendapat yang mengandung unsur bahasa dalam rumusan, khususnya bahasa Indonesia. Berikut ini akan disajikan beberapa pendapat para pakar atau sarjana dari berbagai bidang. Menurut Halim (1981) bahasa dalam karangan/terbitan ilmiah digunakan jenis bahasa keilmuan yang mempunyai karakteristik antara lain, adanya penggunaan istilah tertentu, tegas dan tidak bertele-tele, jelas, tunggal, serta lengkap.

Jacob (1993), seorang ahli antropologi ragawi dan dokter, menyatakan bahwa karya tulis dikatakan ilmiah jika mengandung hal-hal atau unsur-unsur sistematis,

logis-koheren, evolusi persoalan, presisi, autoritatif, mutakhir, original, gaya bahasa, dan peristilahan.

Johannes (1979), seorang ahli fisika dan mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, menyatakan bahwa bahasa karangan ilmiah selain harus memenuhi kaidah-kaidah umum bahasa Indonesia, juga harus memenuhi syarat-syarat khusus sehingga mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tertentu itu di antaranya adalah tulisan ilmiah berbeda dengan susastra dalam hal digunakannya istilah-istilah khusus. Bahasa yang dipakai adalah bahasa resmi bukan bahasa biasa. Bentuk prosa yang digunakan adalah pemaparan (*exposition*), sedangkan perbincangan, pelukisan, dan penceritaan adalah pelengkap. Dalam tulisan ilmiah dihindari bahasa usang, kolot, dan basi, dihindari pula kata-kata yang mubazir (*redundant*). Bahasa keilmuan lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Kalimatnya tidak terlalu panjang dan mekanika gaya mengenai tanda baca, singkatan, rujukan, dan lainnya sangat utama dalam karangan ilmiah.

2. Peran Terbitan Ilmiah dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

Dalam bagian ini pembahasan akan dibagi menjadi dua. Yang pertama menyangkut pengembangan ilmu pengetahuan dan yang kedua menyangkut pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Namun, sebelum sampai pada bagian masing-masing, terlebih dahulu akan diuraikan apa sebenarnya hakikat karya tulis ilmiah dan karakteristiknya. Hal itu akan dijadikan landasan atau pedoman dalam mengetahui apa peran terbitan ilmiah dalam pengembangan kedua bidang itu.

Karya tulis ilmiah atau terbitan ilmiah pada hakikatnya merupakan:

- 1) Suatu sarana pelestarian atau konservasi dari karya ilmiah yang telah dihasilkan, terutama karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian, karena dengan diterbitkannya sebagai terbitan ilmiah, karya ilmiah tersebut akan terekam dengan baik dan tidak hilang dan merupakan suatu aset yang tersimpan di beberapa lembaga seperti perpustakaan atau dalam koleksi pribadi, yang mungkin juga dalam wujud perpustakaan pribadi. Pencatatan dan perekaman dalam wujud terbitan ilmiah itu akan memungkinkan karya ilmiah tersebut tersimpan untuk jangka waktu lama dan akan berguna untuk waktu mendatang atau untuk generasi mendatang karena sifat ilmu tidak terikat oleh waktu (dan juga tempat). Kalau hasil karya ilmiah itu tidak diterbitkan, karya ilmiah tersebut akan hilang dalam waktu dekat dan semua hasil kerja yang memakan waktu, dana, dan energi, serta pemikiran akan terbuang dengan percuma. Hakikat pelestarian atau konservasi hasil karya ilmiah itu pada dasarnya merupakan suatu rangkaian dalam proses penelitian yang panjang yang seharusnya berakhir dengan diterbitkannya karya tulis ilmiah berupa terbitan ilmiah dan tidak berhenti sampai pada penyusunan laporan, apalagi hanya laporan administratif. Jadi, terbitan ilmiah merupakan aset ilmiah yang abadi atau lestari dan dengan bertambahnya terbitan ilmiah, aset ilmiah akan

bertambah. Dengan berjalannya waktu, penambahan terbitan ilmiah merupakan akumulasi yang akan memperbesar secara terus-menerus aset ilmiah yang sudah ada. Dengan demikian, terbitan ilmiah merupakan suatu warisan kultural dari ilmuwan terdahulu kepada ilmuwan generasi berikutnya.

- 2) Suatu sarana komunikasi ilmiah di antara para ilmuwan sehingga dapat terjadi komunikasi atau dialog (baik lisan maupun tertulis) di antara sesama rekan ilmuwan. Dengan adanya terbitan ilmiah, pada hakikatnya seorang ilmuwan telah memberikan informasi kepada sesama ilmuwan tentang apa yang telah dilakukan. Terbitan ilmiah dapat menembus jarak waktu dan jarak tempat, dalam arti terbitan ilmiah dapat dijadikan sarana komunikasi antara ilmuwan yang berjauhan tempatnya dan juga antara waktu lampau, sekarang, dan masa yang akan datang, atau antargenerasi, dalam arti terbitan ilmiah dapat merupakan sarana komunikasi antara ilmuwan yang sekarang menghasilkan karya tulis dan mereka di kemudian hari, baik dalam waktu dekat maupun waktu lama. Dengan membuat suatu perbandingan dengan meminjam semboyan Coca Cola, *kapan saja dan di mana saja* terbitan ilmiah merupakan sarana komunikasi antara ilmuwan yang berbeda tempat dan berbeda waktu, antara ilmuwan di Amerika Serikat dan di Indonesia dan antara ilmuwan sekarang dan ilmuwan abad yang lalu atau dengan generasi mendatang. Perlu ditambahkan bahwa komunikasi ilmiah ini tidak saja terbatas antara sesama ilmuwan dalam bidang tertentu, tetapi juga merupakan sarana komunikasi ilmiah yang interdisipliner dan bahkan yang transdisipliner. Dengan adanya komunikasi ilmiah yang berupa terbitan ilmiah, akan terjadi dialog yang saling memberikan masukan, terutama masukan balik (*feedback*) di antara para penghasil terbitan ilmiah sehingga merupakan bahan bagi peningkatan mutu atau perbaikan terbitan ilmiah berikutnya. Tanpa komunikasi sulit diharapkan adanya suatu dialog dan tanpa dialog sulit dicapai suatu perkembangan karena kemampuan individu sangat terbatas. Karena terjadi pengujian terhadap terbitan ilmiah, materi atau substansi yang ditulis akan diuji, dikaji, diulas oleh sesama ilmuwan: apakah dapat dipertanggungjawabkan, ataukah perlu perbaikan dan penyempurnaan.
- 3) Suatu penyebaran informasi ilmiah bagi mereka yang membutuhkan informasi ilmiah dalam profesi mereka. Informasi ilmiah harus disebarluaskan kepada pengguna sehingga tidak menjadi *idle* dan penyebaran informasi ilmiah dalam bentuk atau wujud terbitan ilmiah (tercetak) merupakan suatu sarana yang paling sederhana dan praktis penggunaannya sampai saat ini dan juga untuk masa mendatang walaupun sekarang ada kekhawatiran tersaingi atau terdesak oleh sarana elektronik komputer.

Terbitan ilmiah dalam jurnal ilmiah akan sangat bermanfaat bagi sesama peneliti karena apa yang sudah dan sedang dilakukan dapat diketahui sehingga tercegah adanya duplikasi yang merupakan pemborosan, atau sebaliknya, merupakan inspirasi apa yang dapat dilakukan dan diteliti sebagai kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan sehingga penelitian akan berlanjut, proses dan perkembangan

penelitian akan bergulir. Informasi ilmiah yang berwujud buku teks sangat berguna bagi mereka yang sedang mempelajari bidang ilmu tertentu walaupun buku teks sebagai terbitan ilmiah bukan merupakan satu-satunya informasi dalam memahami suatu cabang ilmu tertentu karena masih ada terbitan ilmiah lain yang juga memberikan informasi. Terbitan ilmiah populer akan merupakan informasi bagi mereka yang akan memanfaatkan hasil karya ilmiah, oleh kalangan industri baik oleh kalangan usaha lain yang akan memanfaatkannya dalam usaha mereka.

Di samping hakikat terbitan ilmiah, masih ada hal yang perlu disampaikan dalam hubungannya dengan peran terbitan ilmiah, yaitu apa yang menjadi ciri atau karakteristik terbitan ilmiah. Karakteristik yang patut untuk diketengahkan paling tidak berjumlah lima, yaitu sebagai berikut.

(a) Sistematis

Karya tulis ilmiah harus sistematis. Artinya, karya ilmiah harus ada pembagian, ada pengelompokan dan ada urutan. Sistematis tidak cukup hanya ada pembagian dalam bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi harus disertai dengan pengelompokan yang sejenis dan keduanya juga belum cukup karena harus ada urutan, yaitu mana yang lebih dahulu ditulis atau diuraikan dan mana yang kemudian dan terakhir, misalnya pendahuluan harus di muka, atau kesimpulan harus merupakan bagian yang terakhir. Yang umum harus lebih dahulu daripada yang khusus.

(b) Logis-Nalar

Karya tulis ilmiah harus logis, harus berdasarkan penalaran yang tercermin, antara lain, harusurut, tidak meloncat, tidak mengambil jalan pintas, disertai dengan bukti/data, dan didasarkan pada suatu cara/metode tertentu, induksi atau deduksi.

(c) Ringkas-Jelas

Karya tulis harus ringkas dan tidak bertele-tele, tidak boleh melantur dan melingkar-lingkar. Apa yang ditulis hanya seperlunya saja, tetapi harus jelas. Artinya walaupun ringkas unsur-unsur yang ada harus tercakup, tidak ambigu dan tidak ditafsirkan bermacam-macam.

(d) Cermat-Presisi

Karya tulis harus merupakan satu karya yang cermat dalam arti bagian-bagian yang ditulis harus rinci, tepat dan semuanya pada tempatnya. Presisi keadaan apa yang ditulis menggambarkan secara persis. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang menyimpang. Semuanya pas dan persis seperti keadaannya.

(e) Etis

Karya tulis ilmiah harus etis. Artinya, karya ilmiah harus mengikuti suatu tata cara dalam penulisan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tidak merugikan orang, tidak mencaci serta menghormati orang, dan menyebutkan sumber-sumber yang digunakan dalam karya tulis itu.

a. Peran Terbitan Ilmiah dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Salah satu cara mengembangkan ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penelitian (riset). Pada hakikatnya penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan meminjam apa yang diuraikan oleh Townsend, manusia dalam sejarah pencarian penjelasan yang penuh arti atas kejadian dan peristiwa menunjukkan seperti yang digambarkan dalam gambar yang dikutip di bawah ini.

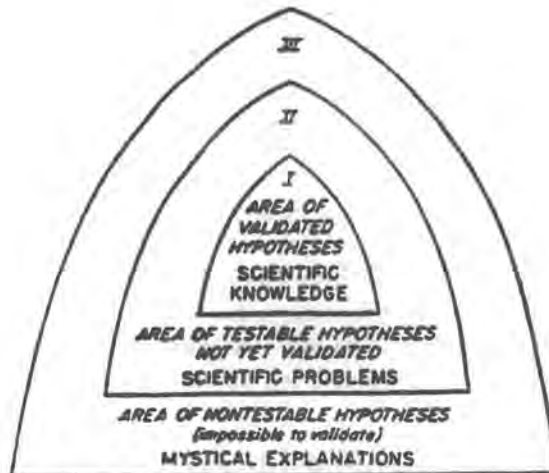


FIG. 1.1. The relationship of scientific knowledge, scientific problems, and mystical explanations.

Dengan penelitian yang dilakukan untuk mencari "kebenaran" dan "penjelasan", "tubuh" ilmu pengetahuan yang digambarkan dengan daerah I akan terus bertambah besar dan sebaliknya daerah III akan menjadi semakin kecil, tetapi daerah II yang menunjukkan ketidaktahuan manusia akan sebab-sebab kejadian juga menjadi lebih besar karena ada : satu, pengetahuan manusia yang tergambar pada daerah I membuat manusia menjadi sadar akan kebutuhannya mencari penjelasan atas daerah II yang lain, dan dua, jawaban atas satu masalah menimbulkan masalah yang lain. Contoh kedokteran dengan penyakit baru.

Terbitan ilmiah--dan juga terbitan lain--adalah suatu publikasi, yang dalam bahasa Inggris terkait dengan kata *published* atau *publication* yang pada hakikatnya adalah *make known to the public*. Hal itu berarti terbitan ilmiah diumumkan kepada publik dan kemudian menjadi milik umum sehingga setiap orang boleh memiliki (dengan meminta atau membeli), membaca, memberi komentar, menyangkal atau mendukung, dan juga mengutip (dengan menyebut sumbernya) untuk berbagai kepentingan baik akademis maupun nonakademis.

Dalam hubungannya dengan terbitan ilmiah ini perlu diketahui bahwa terbitan ilmiah--yang merupakan karya tulis tercetak dan dipublikasikan--terdiri atas karangan

berkala (dalam jurnal atau buletin, seri penerbitan), disertasi, tesis (S2 dan S1), monografi, dan buku teks.

Hasil-hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal, dalam wujud buku yang berisi monografi atau disertasi mempunyai peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperbesar "tubuh" ilmu pengetahuan. Dengan diterbitkannya suatu karya ilmiah berupa hasil penelitian, hasil penelitian itu akan dikomunikasikan dengan sesama peneliti dan dengan komunikasi itu akan terjadi suatu proses yang menuju hasil yang lebih baik, yaitu hasil yang akan mendekati "kebenaran" yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu ilmu pengetahuan. Bahkan bukan hanya berhenti di situ saja sebab dengan hakikat terbitan ilmiah yang berupa pelestarian atau konservasi itu, hasil penelitian itu terrekam, tersimpan, dan dengan demikian terjadi suatu akumulasi ilmu pengetahuan.

Perlu disadari bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki sekarang ini adalah suatu akumulasi dari apa yang dicapai dan disumbangkan oleh para pendahulu kita mulai dari Socrates, Aristoteles, Newton, Galileo, Louis Pasteur, John Lock, Ricardo, Adam Smith, Malthus. Semua itu terjadi karena ada terbitan yang terlestarikan dan merupakan suatu akumulasi dari proses yang lama dan terus-menerus sehingga terjadi suatu perkembangan. Dengan adanya terbitan ilmiah, suatu karya ilmiah dapat dikomunikasikan antarsesama peneliti, dengan harapan akan mendapat tanggapan yang merupakan suatu penyempurnaan yang akan mendekatkan apa yang terdapat di dalam terbitan ilmiah kepada "kebenaran" yang akan dicapai oleh ilmu pengetahuan. Dalam tingkat berikutnya, karya itu akan dilestarikan dan akan terakumulasi karena diterbitkan dalam suatu terbitan ilmiah yang mempunyai hakikat sebagai pelestarian atau konservasi suatu karya ilmiah. Dengan adanya konservasi dan akumulasi itu berarti adanya suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan semakin menjadi lebih berkembang atau lebih besar. Sekali lagi ini terjadi pada terbitan ilmiah yang berupa jurnal, buku yang berisi monografi, atau disertasi, atau tesis, sedangkan pada terbitan ilmiah berupa buku teks dan ilmiah populer, hakikat yang menonjol adalah penyebaran informasi kepada mereka yang membutuhkan, baik mereka yang belajar formal maupun masyarakat di luar dunia ilmu pengetahuan.

Dalam hubungan ini, yaitu antara jurnal dan buku, perlu dicatat adanya kecenderungan yang disinyalir oleh Nakayama (1984), yaitu beralihnya buku ke artikel (dalam jurnal ilmiah) atau adanya perubahan dalam bentuk publikasi ilmiah (*scholarly publication*). Menurut Nakayama, menulis buku untuk mengumumkan hasil penemuan baru (*new discovery*) merupakan tugas yang sangat berat dan tidak praktis karena buku biasanya (substansial) lebih panjang. Kalau kecenderungan ini benar, kedudukan dan peran terbitan ilmiah, khususnya yang berwujud jurnal, akan semakin penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekarang dan di masa mendatang. Ini tidak berarti bahwa buku yang berisi monografi dan disertasi serta tesis lain tidak penting karena tidak semua karya tulis ilmiah bisa "diperas" sedemikian rupa sehingga menjadi singkat, padat, dan dapat termuat dalam suatu jurnal. Jadi, perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dengan adanya komunikasi,

konservasi dan akumulasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan ini terpenuhi oleh terbitan ilmiah yang hakikatnya mencakup hal-hal tersebut.

b. Peran Terbitan Ilmiah dalam Pengembangan Bahasa Indonesia

Setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, mempunyai ragam dalam pemakaian. Ada bahasa ragam sehari-hari, bahasa pers atau surat kabar, bahasa resmi, bahasa hukum/perundang-undangan.

Menurut Martin Joos, bahasa Inggris membedakan lima gaya berdasarkan tingkat koresmian, yaitu *Frozen*, *formal*, *consultative*, *causal* dan *intimate*. Subroto (1993) lebih lanjut menjelaskan bahwa ragam resmi itulah yang disebut ragam baku, dan ragam ini yang juga digunakan dalam buku-buku ilmu pengetahuan/pelajaran, termasuk tulisan ilmiah yang lain. Dalam bahasa tulis, kebakuan itu mencakup kebakuan bidang ejaan, ketepatan pemilihan kata, ketepatan pembentukan kata dan kalimat serta alinea atau paragraf.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, terbitan ilmiah harus mempunyai karakteristik dan sifat ilmiah seperti yang dikemukakan oleh beberapa sarjana sehingga dapat dikategorikan sebagai yang ilmiah.

Ragam bahasa keilmuan, meskipun termasuk dalam ragam resmi atau ragam baku, mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda dengan bahasa baku lain seperti laporan resmi dan perundang-undangan sehingga pada hakikatnya bahasa keilmuan merupakan suatu bagian dari ragam bahasa baku yang hanya dipakai di kalangan mereka yang berkecimpung dalam dunia ilmu pengetahuan.

Dalam karya tulis apalagi yang bersifat ilmiah ada pengertian yang harus dikemukakan dengan menggunakan istilah yang tepat sehingga tidak selalu harus diterangkan secara panjang lebar. Dalam ilmu pengetahuan yang terus menerus berkembang dibutuhkan suatu istilah untuk mengomunikasikan dengan sesama ilmuwan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang tidak terhindarkan memanfaatkan dan mengambil apa yang telah dikembangkan oleh dunia maju (Barat) dalam ilmu pengetahuan yang begitu cepat perkembangannya, peristilahan merupakan suatu hal yang sangat penting (Moeliono, 1989). Ini terbukti dengan adanya *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, yang disusun (dan kemudian diterbitkan) secara khusus di samping *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, pada tahun 1975. Khusus yang menyangkut pengertian yang kita ambil dari budaya asing timbul persoalan yang menyangkut istilah yang akan kita pakai. Apakah akan diambil begitu saja dengan sedikit modifikasi atau mencari padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Banyak contoh yang dapat dikemukakan di sini yang menyangkut pengertian dan istilahnya.

Untuk memberikan gambaran betapa penting dan mendesaknya masalah itu, akan diberikan beberapa contoh yang perlu mendapat perhatian kita misalnya istilah/pengertian *purpose*, *aim*, *objective*, dan *goal* yang "terpaksa" diterjemahkan dengan satu kata *tujuan*. Padahal, dalam ilmu administrasi (negara ataupun niaga) istilah itu

dibedakan karena istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu.

Hal yang demikian kita temui dalam banyak bidang ilmu, ambil saja bidang kedokteran. Gradasi atau variasi penyakit perut dan sakit kepala yang dalam bahasa Jawa terlukis dengan baik seperti *mbedhedheg*, *mules*, *mlilit*, *muneg-muneg* dan *ngelu*, *puyeng*, *pet-petan*, *mumet*, tidak ada atau belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Pengertian seperti *nyangking* dan *nyengkiwing* yang semuanya berarti membawa, tetapi punya konsep yang lain dan istilah untuk menunjukkan gerak atau sikap seperti *gedandaban*, *pethakilan*, *grobyakan*, *pethenthengan*, *mbagusi*, *peteta-petete* yang semuanya barangkali penting untuk psikologi juga belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahkan, istilah *bojo* dalam bahasa Jawa atau *spouse* dalam bahasa Inggris, tidak terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Padahal, ini penting untuk sosiologi, hukum, ataupun untuk pengertian umum atau sehari-hari karena *bojo* bisa berarti suami atau istri. Belum lagi dalam bidang biologi, khususnya botani proses pertumbuhan buah kelapa mulai dari *cengkir* sampai menjadi buah kelapa mempunyai nama tiap fase pertumbuhannya. Juga biji setiap buah yang dalam bahasa Jawa selalu ada istilah, seperti *kecik* (sawo), *beton* (angka), *pongge* (durian), *pelok* (mangga) dan *kenthos* (salak). Belum lagi istilah untuk anak setiap binatang, seperti *belo* (kuda), *gudel* (sapi), *kirik* (anjing), *cindhil* (tikus).

Ilustrasi tentang peristilahan itu memberi petunjuk kepada kita bahwa masalah istilah masih harus mendapat perhatian kita yang cukup banyak karena istilah merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Peristilahan merupakan salah satu segi atau aspek dalam suatu karya tulis sehingga dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah. Kita sudah berusaha mengembangkan istilah ke arah yang lebih baik, yaitu dengan adanya *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* dan juga terbentuknya Panitia Istilah. Bahkan ada pula orang yang sangat prihatin terhadap hal itu seperti almarhum Prof. Dr. Ir. H. Johannes. Menurut Kridalaksana (1991) sejarah peristilahan dalam bahasa Indonesia telah dimulai lebih dari setengah abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1938. Saat ini telah dihasilkan sebanyak 321.719 istilah dalam 17 bidang ilmu pengetahuan, baik eksakta maupun noneksakta.

Sebagaimana dikemukakan oleh Halim, Johannes, Subroto, Moeliono, dan Kridalaksana, gaya bahasa keilmuan berbeda dengan gaya bahasa yang lain karena adanya karakteristik yang harus dipenuhi agar dapat mengomunikasikannya dengan tepat (persis), cermat, ringkas, padat, logis, sistematis, tidak emosional, tidak mubazir (*redundant*) dan masih banyak lagi yang harus dipenuhi. Ciri-ciri inilah yang membedakan bahasa keilmuan dengan ragam bahasa yang lain.

Karena begitu luas dan kompleksnya hal-hal yang berkaitan dengan sifat dan karakteristik tertentu yang membedakan diri dengan ragam bahasa yang lain, bahasa keilmuan mempunyai banyak persoalan, kendala yang dihadapi dan menuntut penyelesaian dengan segera, apalagi ilmu pengetahuan begitu cepat berkembang, lebih-

lebih dalam bidang-bidang tertentu seperti teknologi, komunikasi, komputer, dan kedokteran.

Sepanjang yang diketahui oleh penulis--dan mudah-mudahan ini salah--belum ada sebuah buku yang lengkap yang membahas dan memberikan pedoman tentang ragam keilmuan bahasa Indonesia, yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh para ilmuwan Indonesia dalam membuat karya tulis ilmiah dan diterbitkan dalam terbitan ilmiah dalam bahasa Indonesia *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang sangat penting dalam pengembangan bahasa Indonesia yang dapat dipakai sebagai pegangan dan pedoman para penggunanya baru terbit pada tahun 1988 bertepatan dengan Kongres Bahasa Indonesia V.

Memang dalam bentuk makalah, dan ulasan, kedua buku itu sudah banyak dibahas oleh sejumlah pakar dan pemerhati. Namun, penyebarannya belum luas sehingga belum dapat menjadi saran komunikasi yang dapat menjadi ajang pertukaran pendapat dan adu argumentasi menuju ke suatu pengembangan atau pembakuan ragam bahasa keilmuan. Di kalangan ilmuwan sendiri, penggunaan bahasa keilmuan juga belum mantap sehingga sebuah universitas yang besar dan berbobot yang menyadari hal itu telah mengambil langkah untuk mengikutsertakan pakar bahasa Indonesia dalam pemeriksaan setiap tesis yang diajukan (S-2 dan S-3), begitu juga sebuah penerbit universitas harus mempunyai editor bahasa di samping editor substansi untuk memeriksa naskah yang diajukan untuk diterbitkan.

Jurnal ilmiah yang biasanya memuat persyaratan ilmiah, tidak memuat ketentuan tentang bahasa keilmuan baik yang menyangkut peristilahan maupun gaya bahasa keilmuan, begitu juga hampir semua penerbit baik penerbit umum maupun penerbit universitas (*university press*)--hampir tidak mencantumkan dan memberikan pedoman tentang bahasa keilmuan yang harus dipakai sehingga apa yang terjadi adalah bahwa tidak ada dorongan atau motivasi yang kuat bagi para penulis/ilmuwan untuk menggunakan bahasa keilmuan dalam karya tulisnya. Dengan menyadari hakikat terbitan ilmiah sebagai media komunikasi antar ilmuwan, terbitan ilmiah dapat juga berfungsi sebagai media komunikasi dalam usaha mengembangkan bahasa Indonesia, khususnya bahasa keilmuan. Misalnya, dalam melontarkan pemakaian istilah baru dalam bidang ilmu tertentu, apalagi bidang ilmu yang begitu cepat berkembang. Setelah terjadi, "dialog tertulis" dalam berkomunikasi, akan terjadi perkembangan dan akhirnya akan terjadi penerimaan secara luas dan kemudian dibakukan. Langkah ini dapat dilakukan oleh terbitan ilmiah yang pada hakikatnya melestarikan dan mengonservasi hasil-hasil dialog dan komunikasi dalam bidang kebahasaan, yaitu bahasa keilmuan.

Karena tidak menggunakan terbitan ilmiah sebagai media untuk komunikasi dan konservasi tentang bahasa keilmuan, mengingat fungsi dan hakikatnya, kini tidak terdapat lagi media yang dapat dipakai untuk hal itu. Ini terlihat dengan jelas dalam media surat kabar dan media massa yang lain. Introduksi istilah dan gaya bahasa pers terjadi dalam surat kabar itu membutuhkan waktu yang terkadang cukup lama untuk kemudian diterima sebagai istilah dan gaya bahasa persuratkabaran. Ini pun terkadang

disertai dengan pro dan kontra, perdebatan sengit, ejekan, tetapi akhirnya dapat diterima sebagai ragam bahasa surat kabar seperti yang dapat kita lihat sekarang ini. Jadi, dengan kata lain, bahasa pers atau surat kabar berkembang melalui surat kabar, dalam surat kabar dan oleh surat kabar itu sendiri, bahasanya dan sangat komunikatif walaupun diperlukan suatu proses yang terkadang cukup lama.

Dengan menyadari hakikat terbitan ilmiah berupa sarana komunikasi, konservasi, dan penyebaran informasi ilmiah, peran yang dapat dijalankan dan seharusnya dilakukan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia adalah pengembangan/pembinaan suatu bagian dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa keilmuan. Dalam hubungan ini, perlu juga disadari bahwa pengembangan ragam bahasa keilmuan jika dibandingkan dengan pengembangan ragam bahasa pers sebetulnya dalam keadaan yang lebih menguntungkan karena adanya pakar bahasa (Indonesia) yang merupakan bagian dari masyarakat ilmiah. Namun, dalam kenyataannya ragam bahasa surat kabar (pers) berkembang lebih cepat dan dapat dikatakan lebih mapan dan lebih dapat diterima daripada ragam bahasa keilmuan.

3. Perkembangan Usaha Pengadaan Terbitan Ilmiah Dewasa Ini

Terbitan pada umumnya dengan sendirinya termasuk juga terbitan ilmiah mempunyai proses yang panjang menyangkut berbagai aspek dan melibatkan banyak pihak.

Terbitan dimulai dengan gagasan apa yang akan diterbitkan, dilanjutkan dengan penulisan, pekerjaan editorial, pengandaan, dan diakhiri dengan distribusi agar sampai ke tangan sidang pembaca. Ia menyangkut aspek idil, pedagogik (buku teks), editorial, akademis, teknis-grafis, dan ekonomi. Selain itu, juga melibatkan pengarang, editor, penerjemah, pencetak, distributor, toko buku dengan penerbit sebagai figur sentral, dan *grandstrategist* (Smith, 1966).

Sampai saat ini, data statistik tentang perbukuan di Indonesia tidak ada. Yang ada hanya taksiran sangat kasar, misalnya tentang jumlah judul yang diterbitkan setiap tahun, ada yang mengatakan 4.000, ada yang 5.000, dan ada yang 6.000. Begitu juga tentang tiras (*oplaag*) yang dicetak, juga tentang pemakaian kertas untuk buku (padahal untuk koran diketahui kebutuhannya), jumlah penerbit (walaupun ada IKAPI), begitu juga jumlah toko buku pernah diterbitkan yang ternyata menyesatkan karena tidak jelas dibedakan antara toko buku dan toko alat-alat tulis (*stationaries*) (Koesoemanto, 1975). Hal yang demikian juga berlaku untuk terbitan ilmiah. Baik perguruan tinggi, proyek-proyek, dan direktorat-direktorat. Semuanya tidak mempunyai angka statistik yang eksak dan akurat tentang penerbitan ilmiah, baik, jurnal, berupa laporan riset, buku teks maupun penerbitan lain seperti monografi. Hal ini juga yang menimbulkan kesulitan di kalangan mereka yang bertanggung jawab dalam penerbitan ilmiah seperti penerbit universitas (*university presses*) yang sekarang jumlahnya mendekati 50 buah (di lingkungan Depdikbud) dan $\pm$ 1.050 buah di lingkungan PTS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, dengan anggaran dari perguruan tinggi, proyek atau direktorat banyak yang menumpuk dan tidak/belum diterbitkan. Jurnal yang seharusnya berfungsi sebagai wadah dan penampung karya penelitian susah untuk berkembang karena tidak tersedia biaya yang cukup. Bahkan, jurnal kurang/tidak mendapat respons dari perguruan tinggi dan perpustakaan sehingga ada yang hanya sempat terbit beberapa kali saja. Padahal, di negara-negara maju penerbitan jurnal, buletin, dan lainnya sangat banyak.

Menurut sebuah *national enquiry* tentang *scholarly communication*, di Amerika Serikat terbit sekitar 100.000 *serials*, 60.000 di antaranya adalah *periodical*, pada tahun 1983 dicatat oleh *Ulrich's International Periodical Directory* jumlah *periodical* adalah 64.000 yang mencakup 556 *subject area*, dan di Inggris terbit sekitar 8.000 (*Scholarly Communication*, 1979). Sebagian karya tulis sebagai laporan penelitian tidak memenuhi syarat untuk dipublikasikan dan sebagian lagi disebabkan oleh kurangnya editor atau dewan redaksi memilih dan mengedit naskah agar layak terbit. Satu hal yang sangat mendasar yang menjadi suatu anggapan adalah bahwa riset dianggap selesai kalau telah dibuat laporan—terutama laporan administratif—tanpa harus dipublikasikan. Padahal, riset yang benar dan tuntas harus dipublikasikan karena harus dikomunikasikan dan dilestarikan sebagai suatu usaha pengembangan ilmu pengetahuan (Djokomoejanto, 1992). Hal ini tampak juga dalam pengajuan anggaran untuk penelitian yang sebagian besar tidak pernah mencantumkan biaya untuk mempublikasikan hasil penelitian sehingga ribuan hasil penelitian menjadi mubazir dan menumpuk. Akibatnya, kemungkinan terjadi duplikasi sangat besar dan hasilnya pun tidak bisa dimanfaatkan. Walaupun tidak terdapat angka jumlah kasar, apalagi yang akurat, dari pengamatan dapat dipastikan bahwa hasil penelitian yang diterbitkan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang tidak diterbitkan.

Pencarian data tentang jurnal lewat PDIN juga belum pasti berhasil karena tidak semua jurnal (ilmiah) sudah ber-ISSN, sebagaimana juga belum semua buku sudah ber-ISBN (Koesoemanto, 1993). Jenis terbitan kedua yang keadaannya hampir sama dengan jurnal ilmiah ialah terbitan disertasi. Keadaannya bahkan jauh lebih memprihatinkan karena sangat sedikit (jauh lebih sedikit dari hasil penelitian) disertasi yang diterbitkan. Ambil saja sebagai contoh sebuah universitas besar dan berbobot yang boleh dikatakan representatif kira-kira 250 disertasi yang ada, tidak lebih dari 10% yang sudah diterbitkan dalam wujud buku sehingga tersebar luas untuk komunikasi dan tersimpan baik di perpustakaan sebagai wujud konservasi. Memang telah ada usaha untuk menerbitkan hasil disertasi, baik disertasi yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Gadjah Mada University Press pada akhir tahun 70-an dan sepanjang tahun 1980-an, tetapi respons terhadap hasil penerbitan juga tidak besar. Sebagai catatan atau perbandingan dapat disebutkan bahwa kewajiban untuk menerbitkan dalam wujud buku seperti di negeri Belanda tidak atau belum ada di Indonesia.

Di negeri Belanda hampir setiap minggu kita dapat membaca disertasi yang telah menjadi buku (*Nieuwsblad Voor de Boekhandels*, 1971). Kendala yang dialami adalah

sikap atau ketentuan bahwa disertasi tidak perlu diterbitkan, cukup dibuat rangkap sekian untuk para pembimbing, penguji dan arsip senat, dan juga keengganan promovendus untuk mengedit sedikit sehingga *publishable* untuk kalangan yang lebih luas. Profesor Sartono Kartodirdjo secara sinis mengatakan bahwa banyak ilmuwan (dokter) seperti pohon pisang, sekali berbuah (menghasilkan disertasi) lalu mati, tidak menulis lagi. Terbitan berupa monografi dan buku teks lain lagi masalahnya. Hal itu terungkap dalam suatu sarasehan sehari yang diadakan dalam rangka ulang tahun XV Yayasan Obor Indonesia (penerbit) tanggal 12 Juli 1993 lalu di Jakarta ternyata kendala dalam penulisan adalah waktu yang sangat terbatas karena terlalu banyak dibebani tugas nonakademis sehingga kurang bisa berkonsentrasi dengan baik (*Kompas*, 1993). Adapun yang menyangkut buku teks, perlu dibedakan usaha yang telah dilakukan, yaitu buku teks yang ditulis oleh pengarang Indonesia dan buku terjemahan dari beberapa buku teks asing yang sebagian besar dari bahasa Inggris, tetapi ada juga dari bahasa Jerman, Perancis, dan Belanda.

Untuk mencukupi kebutuhan buku teks pendidikan tinggi yang mempunyai ratusan jurusan/program studi dibutuhkan ribuan bahkan beberapa puluh ribu buku teks karena setiap program studi terdiri atas minimal 8 semester dan setiap semester terdiri atas 6 (minimal) mata kuliah. Yang ideal adalah terdapat buku teks dalam bahasa Indonesia dalam jumlah yang banyak. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa penguasaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa tidak mencukupi untuk memahami apa yang tertulis dalam buku teks dalam bahasa Inggris yang telah dipelajari sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun. Baik penerbit universitas maupun penerbit umum telah banyak menghasilkan buku teks. Bahkan, sejumlah penerbit umum (swasta) penerbitannya pun didominasi oleh buku teks untuk perguruan tinggi. Yang dihasilkan oleh penerbit universitas jumlahnya setiap tahun terbilang puluhan kalau mencapai lebih dari seratus, kelebihan hanya sedikit saja karena dari sejumlah penerbit universitas, hanya dalam hitungan jari yang produktif. Penerbit umum/swasta jumlahnya hanya terbilang ratusan saja karena dari sekitar 300 penerbit yang diketahui, tidak terlalu banyak yang menerbitkan buku (teks) untuk perguruan tinggi. Dari hasil pengamatan terhadap buku teks asli (bukan terjemahan) hal yang menarik adalah bahwa sedikit sekali buku teks asli yang dalam daftar pustakanya menggunakan jurnal, terutama jurnal luar negeri sebagai sumber literatur. Kebanyakan hanya menggunakan buku teks dalam bidang tersebut, baik terbitan dalam negeri maupun luar negeri. Padahal, jurnal yang memuat hasil penelitian merupakan usaha untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Sampai saat ini kebutuhan buku teks dalam bahasa Indonesia memang masih belum terpenuhi. Secara konsepsional sebenarnya telah dilakukan berbagai usaha, antara lain, berupa penataran menulis buku teks untuk para dosen yang secara intensif telah dimulai sejak tahun 1980. Sampai sekarang pun masih berlangsung walaupun terkadang terlihat seperti "sporadis", bahkan ada yang dilakukan dalam wujud *internship* dengan hasil yang baik (Koesoemanto, 1989).

Dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan buku teks bukan terjemahan tidak

mencukupi, buku teks hasil terjemahan adalah suatu alternatif yang tepat. Hal ini bukan saja karena penguasaan bahasa Inggris para mahasiswa yang sangat kurang, melainkan yang lebih penting adalah kemutakhiran (*up to date*) buku-buku teks yang diterjemahkan yang menunjukkan perkembangan terakhir dalam bidangnya. Gagasan untuk menerjemahkan secara intensif dan besar-besaran timbul pada awal 80-an. Beberapa penerbit universitas, dengan dukungan Dikti dan dengan *loan* dari Bank Dunia, telah mulai menerjemahkan buku teks dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu yang belum banyak bukunya seperti teknik, kedokteran, farmasi, dan pertanian. Kegiatan ini masih berlangsung sampai sekarang dengan hasil yang sudah mencapai ratusan. Langkah ini pun diikuti oleh sejumlah penerbit swasta.

Walaupun tersedia dana pinjaman, "proyek" tetap mengalami kendala. Kendala yang pertama adalah tersedianya katalog dari luar yang sangat minim karena banyak yang belum memanfaatkan kunjungan ke *Franfurter Buchmesse* (Frankfur Book Fair) sebagai pusat dan sumber untuk mencari hak terjemahan (Koesoemanto, 1978). Di samping masalah meminta hak terjemahan dan juga royalti yang harus dibayar, hal yang sangat mendasar adalah masalah penerjemah hasil terjemahan dan editor. Harus disadari bahwa menerjemahkan apalagi buku ilmiah (teks) bukan menerjemahkan kata atau kalimat, melainkan menerjemahkan ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya sehingga yang diperlukan adalah penerjemah yang memahami kedua bahasa-bahasa yang akan diterjemahkan dan bahasa Indonesia dengan baik dan memahami atau ahli dalam substansi/bidang yang akan diterjemahkan. Jika tidak, terjemahan yang dihasilkan adalah terjemahan yang harfiah sehingga sulit untuk dicerna, apalagi oleh mahasiswa. Untuk mencari pakar/dosen yang memenuhi kedua persyaratan tersebut sangat sulit karena kecuali keterbatasan jumlah, juga kesibukan mereka. Dalam upaya penerjemahan ini yang sangat dirasakan adalah perlunya kamus istilah yang baik dan lengkap. Masalah peristilahan dalam penerjemahan karya tulis/buku ilmiah sangat penting kalau ingin dicapai hasil yang memuaskan, terutama dalam "keterbacaan".

Di lingkungan penerbit swasta, tampak ada usaha untuk menerbitkan buku-buku untuk perguruan tinggi yang lebih banyak dan intensif dibandingkan dengan dekade lalu, apalagi dekade 70-an, tetapi konsentrasinya hanya pada buku teks, terutama pada bidang tertentu seperti ekonomi, hukum, dan politik, sedangkan bidang kedokteran, sangat kurang. Di kalangan perguruan tinggi, usaha mengadakan penerbitan dengan mendirikan penerbit universitas dimulai pada awal tahun 70-an dengan dipelopori oleh lima perguruan tinggi negeri sebagai generasi pertama yang kemudian diikuti oleh 26 lainnya pada tahun 80-an, kemudian juga diikuti oleh beberapa PTS. Namun, dari jumlah itu yang produktif dapat dihitung dengan jari. Akhir-akhir ini produk yang berupa *scholarly publication* cenderung sangat menurun dan ini sebenarnya merupakan *reason d'être* dari sebuah *university press*.

Dapat dikatakan bahwa upaya pengadaan terbitan ilmiah dewasa ini masih banyak mengalami kendala, baik berupa dana maupun sumber daya manusia (penulis, pener-

jemah, dan editor), apalagi penerbitan yang bersifat *scholarly* yang sangat penting dan esensial bagi kehidupan akademis dan intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

4. Mutu Bahasa Indonesia dalam Terbitan Ilmiah Dewasa Ini

Berbicara tentang mutu—terhadap apa pun—seyogianyadicari dan dipakai beberapa kriteria, baik sudut pandang maupun gradasi. Namun, harus disadari bahwa hal itu tidak selalu mudah. Begitu juga dalam mengkaji mutu bahasa Indonesia dalam terbitan ilmiah. Belum lagi terbitan ilmiah karena adanya beberapa macam terbitan ilmiah.

Terhadap suatu terbitan ilmiah, sudut pandang atau aspek yang dapat diukur atau dinilai adalah yang menyangkut ejaan yang sudah disempurnakan dan peristilahan keduanya sudah dalam bentuk pedoman resmi dan gaya bahasa keilmuan. Dalam proses produksi penerbitan yang panjang dan terkadang sangat panjang, bagian yang memakan waktu terbanyak untuk terbitan ilmiah adalah proses editorial. Proses ini sangat menentukan waktu terbit dan bagian ini pula yang terkait dengan mutu terbitan pada umumnya, termasuk terbitan ilmiah, selain juga mutu bahasa Indonesia yang dipergunakan.

Harus diakui dan bukan merupakan rahasia bahwa dalam proses penerbitan, terdapat sejumlah (besar) terbitan yang proses editorialnya tidak lengkap atau diabaikan, yaitu kurang mendapat perhatian. Secara lebih konkret dapat dikatakan bahwa naskah itu tanpa disunting, baik penyuntingan substansi maupun bahasa. Akibatnya, substansi dan bahasanya sulit dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, unsur yang sangat esensial dalam terbitan pada umumnya—apalagi terbitan ilmiah—adalah keterbacaan, kabur, atau sama sekali tidak ada. Jadi, mutu terbitan—termasuk mutu bahasa Indonesianya—sangat tergantung pada proses editorial. Secara umum dapat dikatakan bahwa terbitan (ilmiah) yang melalui proses editorial yang wajar dan baik pada umumnya mutunya baik, termasuk mutu bahasa Indonesianya.

Terbitan ilmiah berupa jurnal ilmiah yang naskahnya harus memenuhi persyaratan seperti apa yang dipersyaratkan oleh dewan redaksi dan biasanya tercantum secara ringkas dan jelas pada halaman *cover* jurnal, biasanya diperiksa oleh redaksi apakah persyaratannya sudah dipenuhi. Karena jurnal ilmiah pada umumnya berisi laporan penelitian yang sangat dibatasi panjangnya, pada umumnya mutu bahasa Indonesianya memadai. Pemeriksaan terhadap naskah ini boleh dikategorikan lebih intensif daripada yang lain.

Terbitan ilmiah berupa disertasi S-3 dan tesis S-2, juga mengalami proses pemeriksaan yang panjang dan intensif dan bahkan sekarang sudah dimulai oleh beberapa perguruan tinggi yang menyertakan pakar bahasa dalam memeriksa (menguji) sehingga mutu terbitan juga memadai.

Kategori yang ketiga adalah terbitan berupa buku teks yang merupakan tulisan asli (bukan terjemahan). Terbitan kategori ini, yang diterbitkan oleh penerbit bukan penerbit universitas, banyak yang tidak melalui proses penyuntingan yang biasa dilakukan sebab oleh terbatasnya editor yang tersedia pada penerbit dan sebagian juga

karena tidak menyadari pentingnya editor. Bahkan, ada yang tidak menyadari bahwa sebuah naskah sebelum diterbitkan seyogianya diperiksa oleh editor agar terjamin kebenaran substansi dan terjamin keterbacaannya. Ada hal yang sangat esensial yang sering tidak atau kurang disadari, yaitu naskah ditulis dan diterbitkan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri/penulis. Oleh karena itu, penyunting sangatlah esensial, untuk memeriksa dan mengetahui apakah naskah yang ditulis dan diterbitkan mempunyai keterbacaan untuk orang lain/pembaca, apalagi terbitan ilmiah, yang mempunyai karakteristik tertentu untuk dikategorikan sebagai sesuatu yang ilmiah.

Terbitan ilmiah yang paling menjadi persoalan dan mempunyai masalah adalah terbitan karya terjemahan, terutama terjemahan karya ilmiah. Pada hakikatnya terjemahan bukan menerjemahkan kata atau kalimat, melainkan menerjemahkan suatu ide atau gagasan, suatu konsep, atau suatu pengertian. Dengan demikian, yang diperlukan bukan hanya keahlian atau ketrampilan dalam kedua bahasa, bahasa sumber dan bahasa sasaran, tetapi juga penguasaan materi atau substansi yang hendak diterjemahkan. Jika hal itu tidak dipenuhi, bisa terjadi bahwa walaupun menguasai kedua bahasa, tanpa penguasaan materi atau substansi yang diterjemahkan, yang diperoleh adalah terjemahan harfiah dan substansinya tidak bisa dimengerti. Tidak tertutup kemungkinan bahwa naskah yang disunting oleh pakar bahasa—yang sama sekali tidak menguasai substansinya—malahan hilang keterbacaannya. Persoalan yang timbul dalam terjemahan ini bertambah kalau menyangkut suatu konsep yang terkait dengan sistem atau aspek kultural yang berbeda atau yang tidak dipunyai, ambil saja sebagai contoh *go public* dalam bidang ekonomi, atau kebiasaan yang sering kita jumpai dalam permintaan untuk tidak merokok yang berbunyi *Thank You for Not Smoking*.

Karena adanya perbedaan konsep, sistem, dan aspek kultural, dan karena belum adanya istilah yang baku yang diterima secara umum, tidak jarang terjadi ada semacam dan karena pemaksaan sehingga yang terjadi adalah bahwa struktur bahasa Indonesia menjadi korban, kalimatnya menjadi panjang dan gaya bahasanya kaku dan menunjuk pola asing daripada pola Indonesia. Berdasarkan apa yang diuraikan di muka, dapat dinyatakan bahwa terbitan ilmiah berupa terjemahan—dalam peringkat—menduduki tempat yang terbawah karena begitu banyak kendala yang ada dalam proses editorialnya.

Dalam hubungan dengan masalah penilaian mutu bahasa Indonesia atas terbitan ilmiah itu perlu dijelaskan dan disadari bahwa hal tersebut dilakukan tidak berdasarkan data kuantitatif karena data perbukuan di Indonesia sulit untuk di peroleh, apalagi yang akurat dan aktual. Penilaian ini merupakan suatu pengamatan secara garis besar. Jika dianggap sebagai suatu kesimpulan, kesimpulan yang ditarik bukan suatu yang bersifat induktif, melainkan bersifat deduktif atau *hypotetik* berdasarkan proses penerbitan, khususnya proses editorial yang sangat terkait erat dengan mutu terbitan, termasuk mutu bahasa Indonesia.

Hasil terjemahan dalam bidang sastra dan biografi ternyata juga mengalami banyak kendala dalam mengungkapkan, aspek kultural yang berbeda. Akibatnya, sulit

untuk mencari istilah dan ungkapan yang tepat sehingga penggunaan bahasa daerah tidak terhindarkan lagi (Morgan, 1993).

5. Upaya untuk Meningkatkan Peranan Terbitan Ilmiah dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan/Pembinaan Bahasa Indonesia

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di muka, yaitu keterkaitan antara terbitan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia, sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan. Namun, perlu disadari bahwa implementasinya tergantung pada banyak faktor dan banyak pihak sehingga kemauan keras berbagai pihak dan *political will* akan sangat menentukan keberhasilan dalam meningkatkan peran terbitan ilmiah dalam pengembangan kedua bidang tersebut.

Yang sangat mendasar adalah upaya untuk menuntaskan setiap penelitian yang dilakukan dengan menghilangkan kebiasaan/anggapan bahwa penelitian sudah dianggap selesai setelah adanya laporan administratif, tanpa menerbitkan hasil penelitian dalam bentuk terbitan yang dikenal sebagai *research report*. Tanpa terbitan ilmiah, akan tidak terjadi komunikasi, pelestarian, dan penyebaran hasil penelitian. Langkah ini sebaiknya dipelopori oleh lembaga-lembaga penelitian yang dibiayai oleh negara, seperti lembaga penelitian perguruan tinggi, LIPI dengan unit-unitnya, balitbang (semua departemen), dan lembaga negara nondepartemen dengan memasukkan anggaran untuk menerbitkan hasil penelitian dan menentukan bahwa penelitian baru dinyatakan selesai jika sudah diterbitkan dalam wujud terbitan ilmiah yang disimpan dalam perpustakaan dan distribusikan secara luas, terutama di kalangan sesama peneliti.

Yang sekarang terjadi adalah bahwa banyak sekali naskah hasil penelitian yang menumpuk di instansi peneliti dan mubazir sehingga terjadi duplikasi dan pemborosan. Yang lebih penting dan esensial adalah penelitian yang dilakukan tidak mempunyai peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Mengingat jumlah karya tulis ilmiah masih sangat kurang, sudah saatnya mulai upaya dan pengembangan suatu tradisi yang dikenal dengan sebutan *sabbatical leave* bagi staf pengajar di perguruan tinggi dan staf peneliti untuk menulis. Sebuah keputusan pemerintah yang secara resmi memungkinkan seseorang mengambil cuti (*leave*) selama jangka waktu tertentu untuk menulis tanpa dibebani tugas lain dan tanpa kehilangan segala haknya, sudah saatnya diterbitkan sehingga peneliti dapat secara penuh mencurahkan segala perhatian untuk menulis dan menyelesaikan karya ilmiahnya dalam waktu yang telah ditentukan.

Sudah tiba saatnya pula untuk membangun sarana fisik yang berupa bangunan yang dilengkapi dengan perpustakaan serta sarana lain seperti komputer di tempat yang "terpencil" dan penyediaan dana yang cukup selama menulis. Langkah ini bisa juga dilakukan oleh perseorangan, lembaga nonpemerintah, atau yayasan seperti apa

yang terdapat di NIAS (Negeri Belanda), di *East West Center* (Hawaii) dan suatu tempat di Tokyo (Jepang).

Sekarang sudah dirasakan *urgensi* tersedianya sebuah buku pedoman/pegangan tentang ragam bahasa keilmuan atau gaya bahasa keilmuan--sebagai salah satu ragam dalam bahasa Indonesia--yang dapat dijadikan pegangan/pedoman (walaupun masih sementara dan harus terus dikembangkan) sehingga mutu bahasa Indonesia dalam terbitan ilmiah dapat ditingkatkan.

Pusat Perbukuan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka yang semuanya bernaung di bawah satu atap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI serta beberapa penerbit universitas (*university press*) sudah saatnya mengambil prakarsa untuk membuat penulisan buku pedoman tersebut. Setelah naskah selesai dan sebelum diterbitkan, perlu diuji dalam suatu seminar sehingga lebih banyak bahan dan perbaikan yang bisa diharapkan.

Buku pedoman itu disebarluaskan di kalangan perguruan tinggi agar dipakai sebagai pedoman. Sementara itu, juga diharapkan masukan dari para pengguna untuk penyempurnaan buku tersebut. Di samping buku pedoman di atas, keempat lembaga ini perlu juga mengaktifkan kembali penerbitan kamus istilah dalam berbagai cabang/bidang ilmu dengan menggunakan bahan kamus istilah yang pernah diterbitkan pada tahun 1978, 1984, dan 1985 lalu. Bahkan, menurut Kridalaksana (1991) masih terdapat naskah siap cetak di beberapa bidang seperti kesenian, ilmu bumi, sosiologi, psikologi, dan hukum.

Penerbitan kamus istilah itu sangat *urgen* kalau kita hendak mengembangkan ragam bahasa keilmuan. Penerbitan kamus ini hendaknya dilandasi sikap yang pragmatis dan luwes mengingat sifat ilmu yang universal dan globalisasi yang sedang terjadi, terutama di akhir abad ini dan awal abad mendatang (Joesoef, 1983).

Hal lain yang perlu dipertimbangkan secara masak dan lebih mendalam adalah penerjemahan jurnal ilmiah dari berbagai bahasa sesuai dengan kemajuan dan kebergunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan bahasa Indonesia, mengingat bahwa jurnal ilmiah sangat mahal.

Dalam upaya itu, kecuali melibatkan keempat lembaga yang disebutkan di muka, sebaiknya juga melibatkan Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII).

Tujuan penerjemahan jurnal ilmiah bersifat ganda, yang pertama untuk menyebarkan informasi ilmiah kepada kalangan ilmuwan, dan yang kedua untuk mendorong pembentukan istilah dalam berbagai bidang/disiplin ilmu sehingga merupakan salah satu upaya pengembangan bahasa Indonesia karena sifat khas yang dimiliki oleh PDII--sebagai pusat dokumentasi dan informasi--penyebaran hasil terjemahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu diterbitkan sebagai jurnal, atau hanya diberikan atas permintaan sebagaimana yang berlaku sekarang. Akhirnya, perlu pula dikaji kemungkinan pembentukan pusat penerjemahan yang mempunyai tugas mencari dan memperoleh hak terjemahan dari luar negeri (bertindak sebagai penghubung/*liason*), menerjemahkan naskah agar dapat bertindak sebagai bursanaskah

hasil terjemahan untuk diterbitkan di Indonesia, mengadakan pelatihan penerjemahan, dan mempersiapkan perangkat lunak (penerjemah profesional) dan perangkat keras (buku pedoman penerjemah serta kamus istilah) yang sangat diperlukan. Hal itu, mengingat kebutuhan buku ilmiah yang sangat mendesak, sedangkan produksi dalam negeri belum mencukupi di samping kenyataan bahwa banyak kalangan yang penguasaan bahasa asingnya terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Amran dan Yayah B. Lumintaintang (Ed.). 1983. *Kongres Bahasa Indonesia III*. Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moeliono, Anton M. 1989. *Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar*. Jakarta: Gramedia.
- Lim Beda (Ed.) 1975. *Scholarly Publishing in South-East Asia*. Kuala Lumpur Association of South-East Asian Institution of Higher Learning.
- Curwen, Peter J. 1981. *The UK Publishing Industry*, Oxford: Pergamon Press.
- Goode, William J & Hatt, Paul K. 1952. *Methods in Social Research*, New York Toronto London: Mc. Graw-Hill, Book Company, Inc.
- Kridalaksana, Harimurti (Ed.). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia : Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hatta, Mohammad. 1964 *Pengantar ke Djalan Ilmu dan Pengetahuan*. Djakarta: PT Pembangunan.
- Hornby, AS, 1986 *Oxford Advance Learner Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 1992. *Daftar Buku 1992*. Jakarta.
- Johannes, Herman, 1979 "Gaya Bahasa Keilmuan", Universitas Gadjah Mada.
- Hopkins John 1979. University Press. Scholarly Communication, The Report of The National Enquiry., Baltimor & London.
- Suriasumantri, Jujun S. (Ed.) 1978. *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*. Jakarta: Gramedia-Yayasan Obor Indonesia dan Leknas-LIPI.
- Koesoemanto, H.J. 1978. *A Report on the Visit to Frankfurt Book Fair, and Discussions with University Presses in the Netherlands and England*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koesoemanto, H.J, 1989 *Gadjah Mada University Press, di Tahun 1988 dalam Usia 17 Tahun* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poedjowijatna 1967. *Tabu dan Pengetahuan*. Djakarta: Obor.
- Haree Rom. 1989. *Eksperimen-eksperimen Agung Yang Mengubah Wajah Dunia*. Jakarta:, Yayasan Obor Indonesia.

- Nakayama Shigeru. 1984 *Academic and Scientific Traditions in China, Japan and the West*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Smith, Datus C. 1966. *A Guide to Book Publishing*. New York & London: R.R. Bowker Co.
- Gie The Liang. 1982 *The Inter-relationships of Science and Technology, A Systematic Clarification for the Development of Science and Technology Policy in Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi.
- Townsend, John C, *Introduction to Experimental Method, For Psychology and Social Science*, Mc Graw-Hill Book Company, Inc, New York-Toronto-London & Kogakusha Company, Ltd, Tokyo.
- Ulrich's International Periodical Directory*, Edisi XXII, 1983.
- Walker, Marshall, *The Nature of Scientific Thought*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J.
- Halim, Amran. 1981. "Bahasa Keilmuan". Makalah Penataran Menulis Buku Pelajaran Untuk Perguruan Tinggi, Bandung, Jawa Tengah.
- Subroto, Edi. 1993. "Bahasa Indonesia dalam Penulisan Buku Ilmiah dan Pemanfaatan Pustaka". Bahan Penataran Penulisan Buku Ilmiah, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta.
- Jacob, T. 1993. "Hakikat dan Karakteristik Karya Tulis Ilmiah". Bahan Penataran Penulisan Buku Ilmiah, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta.
- Koesoemanto, H.J. 1993. "Sewindu ISBN dalam Dunia Perbukuan di Indonesia, Apa yang Masih Harus Dilakukan Bersama". Makalah Seminar dan Evaluasi Penerapan KDT dan ISBN, Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Majalah dan Surat Kabar

- Intisari*, Majalah Bulanan, Jakarta, Oktober 1980, No.207.
- Kompas*, Jakarta, 13 Juli 1993.
- Nieuwsblad Voor De Boekhandels*, Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandel, Amsterdam, Tahun ke-137 No. 34-50 dan Tahun-138, 1971, No.1.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Terbitan Ilmiah dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia
Pemakalah : H.J. Koesoemanto
Pemandu : Pamusuk Eneste
Pencatat : Lukman Hakim
Joslina Azies

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Rita Johan, FKIP Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

Apakah tidak sebaiknya mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi diberikan pelajaran menulis? Bagaimana tanggapan pemakalah?

Jawaban:

Saya setuju dengan pendapat Sdr. Rita Johan tadi. Memang perlu diberikan pelajaran mengarang mulai dari SD sampai perguruan tinggi.

2. **Pertanyaan:** J.D. Parera, FPBS IKIP Jakarta

- Dari pengalaman pemakalah, manakah yang lebih baik, karangan ilmuwan asli atau karya seorang penerjemah?
- Manakah yang lebih parah bahasanya, tulisan yang dibuat ilmuwan atau karya penerjemah?
- Menurut pengamatan saya, di Indonesia ada dua kelompok penulis, yaitu penulis alami dan penulis yang dibayar. Bagaimana tanggapan Bapak?

Jawaban:

- Buku atau terbitan ilmiah yang baik adalah yang dapat menimbulkan polemik, artinya yang mendorong untuk penelitian lebih lanjut, baik pada karangan asli maupun pada terjemahan.
- Sulit dibedakan pada karangan asli atau terjemahan. Akan tetapi, tulisan yang dibuat seorang penerjemah yang baik, biasanya hasilnya pun baik, baik mengenai substansinya maupun mengenai bahasanya.
- Di dalam dunia perguruan tinggi, seorang dosen harus menulis untuk kenaikan pangkat atau pengembangan ilmu. Tanpa tulisannya, orang tidak dapat melihat bukti bahwa seseorang itu meneliti.

3. Pertanyaan: Muljanto Sumardi, Universitas Indonesia

- a. Berapa lamakah dapat menghabiskan sebuah terbitan ilmiah?
- b. Apakah buku pelajaran bahasa Indonesia di SD, misalnya, dapat disebut karya ilmiah?
- c. Masih perlukah pedoman menulis. Bukankah menulis itu bersifat universal, dan buku mengenai itu sudah banyak?

Jawaban:

- a. Sulit dijawab mengenai masa penjualan terbitan ilmiah. Ada yang cepat, ada yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Justru, tujuan diadakannya penerbitan universitas adalah untuk mengatasi hambatan tersebut, dengan mencari dana dari yayasan-yayasan.
- b. Sulit menyatakan apakah buku di SD dapat dimasukkan terbitan ilmiah atau tidak. Yang jelas, di perguruan tinggi, dengan tridharmanya, ada terbitan ilmiah yang berupa buku teks, hasil penelitian, dan tesis atau skripsi.
- c. Yang saya maksudkan adalah pedoman mengenai bahasa keilmuan, bukan pedoman bagaimana menulis karangan. Pedoman menulis karangan memang sudah banyak, apalagi yang berbahasa Inggris.

4. Pertanyaan: Leonardo Lumbanbatu, ASM Sriwijaya, Palembang

Saya mendapat keterangan bahwa di Brunei Darussalam tidak mungkin berkembang bahasa Melayu jika tidak disertai dengan terbitan ilmiah, di dalam persaingannya dengan bahasa Inggris. Tampaknya, hal itu dapat terjadi juga dengan bahasa Indonesia. Bagaimana mengatasinya? Apakah bergantung pada sekolah atau memang hal itu berakar kepada kebudayaan feodal, tradisional yang tak rasional?

Jawaban:

Memang benar, kita belum punya tradisi menulis, kebudayaan kita lebih banyak bersikap kebudayaan bicara.

5. Pertanyaan: Kharis Soehoed, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia

Apa yang Bapak harapkan dari kongres ini sehubungan dengan kemauan politik dari berbagai pihak?

Jawaban:

Saya berharap, kongres ini dapat memikirkan dan menunjukkan tindakan nyata, misalnya, tentang pelajaran menulis dari SD sampai perguruan tinggi, atau bayaran yang cukup bagi penulis atau penerjemah, atau hukuman yang berat bagi pembajak buku.

6. **Pertanyaan:** H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran

Saya baru dari Brunei dan tampaknya apa yang terjadi di negeri itu tak dapat kita jadikan bandingan. Yang berkembang di sana hanyalah bahasa sastra/budaya. Di sana tak ada pertanian atau industri, semuanya diimpor. Di negeri kita, tampaknya penulis buku ilmiah atau penerjemah kurang mendapat rangsangan. Menulis buku pelajaran untuk SD atau SMP lebih memberikan keuntungan. Begitu pula, penerjemahan menghadapi kendala lain, yaitu banyaknya pembajak buku.

Jawaban:

Memang, tentang penerbitan ilmiah saya tidak terlalu optimistis, tetapi kita harus tetap berusaha. Pasaran cukup luas, tinggal lagi perlu dihidupkan tradisi membaca/menulis, dan tradisi membeli buku. Ternyata, ketika Yayasan Obor Indonesia mengobrol bukunya di Yogyakarta, laris terjual. Hal itu memperlihatkan bahwa soal daya beli perlu kita perhatikan pula.

7. **Saran/Usulan:** Harimurti Kridalaksana, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Saya sebenarnya hanya ingin mendengarkan. Akan tetapi, karena diminta, saya ingin memberi sedikit komentar. Tampaknya, kegiatan menulis sekarang ini terbuka luas, hanya tidak dimanfaatkan. Saya sering mengatakan bahwa sarjana kita mempunyai dua tipe. Pertama, tipe Sokrates. Ia cendekia dan mampu berargumentasi, tetapi tidak pernah menulis. Kedua, tipe Aristoteles, yang cendekia dan mau menulis. Boleh menjadi tipe Sokrates, tetapi harus ada tipe Plato yang mau menuliskan pikiran-pikiran tersebut.

TERBITAN SEBAGAI SARANA PEMASYARAKATAN BAHASA DAN SASTRA Antara Harapan dan Kenyataan

Sumardi
Pusat Perbukuan

1. Pendahuluan

Telah banyak orang yang berbicara tentang masalah terbitan, dalam hal ini buku, di Indonesia. Pembicara yang paling menggebu-gebu adalah Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Hal ini sangat wajar sebab Ikapi adalah organisasi sektoral yang paling pantas bertanggung jawab atas sehat sakitnya, hidup matinya dunia penerbitan di Indonesia. Repotnya, masalah penerbitan yang dihadapi Ikapi dari tahun ke tahun yang itu-itu pula. Masalah pembajakan sesama anggota, masalah harga buku yang mahal, pajak ganda. Masalah minat baca yang belum subur sehingga berakibat tiras terbitan kecil. Itulah contoh sederet masalah yang dihadapi Ikapi.

Pihak luar seringkali sulit memahami masalah yang dihadapi Ikapi yang melilit sepanjang waktu. Kekurangpahaman itu sering melahirkan gurauan (joke). Akronim Ikapi dipanjangkan sebagai Ikatan Pengeluh Indonesia. Lepas dari setuju atau kurang setuju, gurauan itu membuktikan adanya perhatian, adanya atensi, dari *joker* terhadap masalah terbitan atau perbukuan di Indonesia. Adanya perhatian itu pertanda bagus. Sesungguhnya, masalah perbukuan bukan hanya masalah Ikapi. Masalah perbukuan adalah tanggung jawab semua pihak, masyarakat dan individu, swasta dan pemerintah.

Mengapa masalah perbukuan menjadi tanggung jawab banyak pihak? Jawaban atas pertanyaan itu akan terlihat kalau masalah perbukuan diletakkan dalam konteks yang lebih luas, yakni konteks pembangunan nasional. Sekarang ini makin disadari bahwa buku merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pada giliran lebih lanjut, keberhasilan pengembangan SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional.

Bila informasi dan pemikiran perbukuan dari Ikapi telah cukup banyak, ada baiknya kini dilengkapi dengan informasi dan pemikiran dari orang yang kebetulan bekerja di lembaga pemerintah yang menangani perbukuan. Tujuan penyajian informasi dan pemikiran itu adalah untuk meyakinkan semua pihak betapa tidak sederhananya masalah perbukuan, terutama kalau ia diberi beban khusus sebagai sarana pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra. Tujuan lebih jauh,

karena masalah perbukuan itu tidak sederhana, penyajian informasi dan gagasan ini dapat menggelitik pihak-pihak yang selama ini kurang bersungguh-sungguh menanganinya.

Ada kemungkinan penyajian informasi dan pemikiran tentang perbukuan ini akan bernada minor dalam konteks orkestra perbukuan nasional. Hal itu memang sulit dihindari kalau kita ingin melihat kelemahan masalah perbukuan. Di pihak lain, kelemahan itu harus kita sadari kalau kita ingin mencari terapinya. Oleh karena itu, harap diarifi bila pembicaraan tentang kelemahan itu terasa menyudutkan.

Berkenaan dengan maksud itu, beberapa isu menonjol yang perlu dibahas antara lain sebagai berikut.

- 1) Apa dan di mana posisi hasil pengembangan bahasa dan sastra?
- 2) Siapa pengembang bahasa dan sastra?
- 3) Siapa sasaran utama masyarakat hasil pengembangan bahasa dan sastra?
- 4) Jenis buku apa yang dapat dimanfaatkan sebagai media masyarakat?
- 5) Bagaimana keadaan industri buku media itu?
- 6) Apa yang perlu dan dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan peran buku sebagai sarana masyarakat itu?

Sederet pertanyaan di atas akan dijawab pada pembahasan selanjutnya.

2. Apa dan di Mana Posisi Hasil Pengembangan?

Apa yang dimaksudkan dengan hasil pengembangan bahasa dan sastra? Yang dimaksudkan dengan hasil pengembangan bahasa di sini adalah semua hasil atau produk usaha meningkatkan dan meluaskan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Produk langsung dari usaha pengembangan itu misalnya pedoman ejaan, pedoman penyusunan istilah, tata bahasa, kamus umum, dan kamus istilah. Produk tidak langsung adalah buku-buku yang memanfaatkan atau menerapkan hasil-hasil kodifikasi bahasa tersebut, misalnya buku-buku iptek dan buku-buku pelajaran. Adapun hasil pengembangan sastra memiliki rumusan yang sedikit berbeda dengan hasil pengembangan bahasa. Selain aspek kebahasaan, pengembangan sastra terutama diartikan sebagai pengembangan sastra sebagai karya seni.

Setelah pengertian hasil pengembangan bahasa dan sastra dibatasi, hal penting lainnya yang perlu disepakati adalah di mana posisi atau kedudukan hasil pengembangan bahasa dan sastra itu? Jawaban atas pertanyaan itu akan memperlihatkan kerangka berpikir dalam pembahasan selanjutnya.

Terbitan hasil pengembangan bahasa dan sastra, dalam pembahasan ini, dibatasi pada jenis buku, dipandang sebagai salah satu sarana dalam proses pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Secara sederhana, posisi itu dapat digambarkan seperti berikut.



Dari gambar sederhana di atas, terlihat bahwa buku merupakan salah satu sarana utama pengembangan sumber daya manusia. Bertolak dari gagasan itu, jelas tidak tepat kalau ada pengembang bahasa dan sastra berpikir bahwa pengembangan bahasa dan sastra hanya demi bahasa dan sastra itu sendiri.

Kita dengan mudah dapat membuktikan bahwa ada pengembang bahasa dan sastra yang berpikir hanya demi bahasa dan sastra itu sendiri. Salah satu indikatornya, misalnya, mereka hanya sibuk memproduksi buku hasil pengembangan bahasa dan sastra tetapi lupa menyebarkannya. Lebih celaka lagi, produksi buku itu kurang berorientasi kepada kebutuhan konsumen serta perkembangan iptek, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat. Ingin bukti? Coba cari kamus pelajar dalam seri yang lengkap untuk jenjang SD, SLTP, dan SLTA! Tidak ada bukan?

Kalau kita sepakat bahwa buku hasil pengembangan bahasa dan sastra itu merupakan salah satu sarana penting dalam pengembangan SDM, kita memang perlu segera melakukan reorientasi dalam pengembangan bahasa dan sastra serta penerbitannya. Sekarang ini waktunya sangat tepat untuk melakukannya karena kita akan segera memasuki PJP II.

3. Siapa Pengembang Bahasa dan Sastra?

Bertolak dari kedudukan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara serta sastra Indonesia sebagai mahkotanya, pengembang bahasa dan sastra Indonesia adalah seluruh bangsa Indonesia. Hanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kehidupan modern, ada pembagian tugas siapa yang harus menangannya secara khusus.

Salah satu lembaga pemerintah yang mendapat tugas mengembangkan bahasa dan sastra adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pusat Bahasa). Adanya lembaga pemerintah yang

bertanggung jawab atas pengembangan itu merupakan faktor yang positif. Akan tetapi, di pihak lain, ada segi negatifnya. Dewasa ini ada salah kaprah anggapan bahwa penanggung jawab pengembangan bahasa hanya Pusat Bahasa. Salah kaprah itu dapat membunuh kompetisi dan kreativitas dalam pengembangan bahasa.

Terlalu berat bagi Pusat Bahasa kalau ia dipandang sebagai penanggung jawab tunggal. Lembaga-lembaga lain yang punya kaitan erat dengan masalah bahasa, seperti perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa dan sastra, harus ikut bertanggung jawab. Bila dewasa ini Pusat Bahasa baru dapat berkonsentrasi pada pengembangan norma bahasa ragam baku (ilmiah), lembaga atau kelompok lain dapat mengembangkan norma ragam bahasa lain, misalnya ragam sastra. Yang terjadi dewasa ini adalah suatu kepincangan. Karena norma ragam sastra belum dikembangkan, norma ragam baku yang terkenal dengan semboyan "baik dan benar" dipaksakan untuk ragam sastra. Yang dimaksudkan dengan pengembangan norma ragam bahasa sastra di sini tentu saja terbatas pada aspek-aspek kebahasaan yang bersifat umum. Adapun aspek kebahasaan yang bersifat gaya berada di luar kodifikasi itu. Lebih jauh, pengembangan sastra sebagai karya seni adalah wilayah para sastrawan. Lembaga kebahasaan dan kesastraan, lembaga pendidikan, serta pusat kesenian cukup bertindak sebagai penunjang kreativitas para sastrawan tersebut.

4. Siapakah Sasaran Pemasyarakatan?

Sasaran pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra adalah masyarakat umum, masyarakat profesi, pelajar, dan mahasiswa. Dari keempat kelompok ini, kelompok pelajar atau siswalah yang terbesar. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan dipusatkan pada kelompok ini.

Berikut ini data siswa SD, SLTP, dan SMTA.

No.	Jenjang	Jumlah Siswa
1.	SD	26.325.701
2.	SLTP	5.604.515
3.	SMTA	3.840.983
	Total	35.771.983

Dengan melihat jumlah siswa yang sebesar itu, wajarlah kalau pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra memberi perhatian khusus ke sana. Wajar pula kalau para penerbit memusatkan perhatiannya ke sana sebab jumlah itu merupakan pangsa pasar yang pantas diperebutkan atau diperhitungkan.

Lebih jauh, selain jumlahnya besar, kelompok pelajar itu juga memiliki posisi yang strategis. Kelompok itulah yang kelak akan menentukan kualitas SDM Indonesia. Sehubungan dengan posisi pelajar yang strategis itu, pertanyaan yang relevan adalah apakah para pengembang bahasa dan sastra telah memberi perhatian cukup kepada mereka? Adakah produk-produk pengembangan bahasa untuk mereka? Misalnya, adakah kamus pelajar untuk siswa SD dan kamus pelajar untuk siswa SLTP?

5. Jenis Buku Apa?

Jenis buku apa yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra? Pengembangan dan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra dapat melalui beberapa jalur. Pertama, melalui terbitan buku-buku bahasa dan sastra. Kedua, melalui terbitan buku-buku nonbahasa dan nonsastra.

Jalur pertama ditangani oleh orang-orang yang berprofesi di bidang bahasa dan sastra. Di dalamnya dapat dimasukkan guru-guru serta para pakar bahasa dan sastra. Terlihat selama ini kreativitas mereka cukup tinggi. Banyak lahir buku pedoman, buku sumber, dan buku pelajaran dari tangan mereka. Beberapa di antaranya dikeluarkan atas nama lembaga pemerintah, dalam hal ini Pusat Bahasa. Sebagai contoh dapat disebutkan (1) *Pedoman Ejaan yang Disempurnakan*, (2) *Pedoman Pembentukan Istilah*, (3) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, dan (4) *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Di samping itu, juga telah dikeluarkan puluhan daftar istilah dan beberapa kamus istilah.

Sayangnya, buku-buku tersebut pemasyarakatannya kurang menggembirakan. Tidak aneh kalau muncul gurauan dari masyarakat buku, "Kita pandai memproduksi buku, tetapi lemah menjual atau memasyarakatkannya." Mungkinkah buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa itu dijadikan *public domain*? Bila hal itu memungkinkan, dengan senang hati para penerbit swasta akan membantu menerbitkan dan menjual atau menyebarluaskannya.

Jalur kedua, yakni buku-buku nonbahasa dan nonsastra, ditangani oleh para penulis dari berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, biologi, ekonomi, dan sejarah. Buku-buku nonbahasa dan nonsastra itu sangat dominan dalam perkembangan iptek. Sayangnya, buku-buku tersebut dan para penulisnya sering dipandang sebelah mata oleh orang-orang bahasa. Ungkapan-ungkapan bahwa mereka merusak bahasa sering muncul dan memojokkan mereka.

Ungkapan-ungkapan seperti itu tidak diperlukan. Kini lebih diperlukan adanya sikap yang lebih positif dari orang-orang bahasa. Pewujudan sikap positif itu misalnya adanya pelatihan bahasa, bukan penyuluhan, untuk para penulis dan editor buku-buku nonbahasa dan nonsastra. Itu berarti diperlukan banyak pelatih yang memiliki latar belakang kebahasaan, perbukuan, dan disiplin ilmu tertentu. Tersediaah pelatih seperti itu?

Bila para penulis buku nonbahasa dan nonsastra telah diperkaya melalui pelatihan bahasa itu, besar kemungkinan mereka akan tumbuh menjadi pengembang bahasa yang produktif dan "membumi" (Ada pengembang bahasa, dalam hal ini pengembang istilah, yang produknya sering bersifat artifisial, terasa mengada-ada). Bila para penulis buku nonbahasa dan nonsastra telah menjadi pengembang bahasa, sekaligus mereka akan menjadi masyarakat yang andal sebab masyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra yang kuat adalah lewat buku, terutama buku-buku puncak, baik itu buku-buku iptek maupun buku-buku karya sastra.

6. Bagaimana Terbitan Buku Kita?

Barangkali kita masih sulit berbicara tentang buku-buku puncak sebab berbicara dari segi jumlah pun kita masih sulit. Kita selalu mengalami kesulitan untuk mencari data yang sah tentang jumlah terbitan buku di Indonesia. Di lingkungan orang atau lembaga yang bergerak dalam perbukuan masih ada sikap yang meremehkan data. Namun, sebagai ancar-ancar ada angka-angka yang dapat kita pegang. Berikut ini angka yang dapat kita kutip dari UN-Year Book, 1985.

No.	Negara	Buku	Penduduk
1.	Indonesia	4.187	160 juta
2.	Malaysia	2.107	16 juta
3.	Korea Selatan	18.588	43 juta
4.	Jepang	32.744	121 juta

Data di atas memang berbeda tahunnya, yakni tahun 1982 untuk Malaysia dan Jepang serta tahun 1983 untuk Indonesia dan Korea Selatan. Namun, jika jumlah terbitan buku tersebut dikaitkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, angka-angka dapat menggambarkan peta kekuatan terbitan sebenarnya. Sehubungan dengan jumlah penduduknya, kekuatan terbitan buku Indonesia ternyata hanya seperlima Malaysia.

Angka di atas adalah jumlah terbitan menyeluruh. Bagaimana dengan jumlah terbitan untuk lingkungan sekolah? Seperti telah dikemukakan di depan, konsumen yang potensial untuk terbitan buku adalah para siswa. Benarkah potensi pasar ini telah digarap secara optimal? Berikut ini indikator untuk menjawab pertanyaan itu.

No.	Kelompok	1989	1990	1991
1.	Buku-buku SD	241	137	111
2.	Buku-buku SLTP	143	127	167
3.	Buku-buku SLTA	110	100	195
	Jumlah	494	364	473

Produk buku tahunan untuk sekolah yang masih di bawah 500 buah terasa semakin kecil kalau kita hubungkan dengan jumlah siswa yang berjumlah 35.771.983 anak itu.

Sekedar untuk mengurangi rasa prihatin terhadap jumlah terbitan buku itu, di sini dapat disebutkan bahwa masih ada penerbit yang bukan anggota Ikapi dan penerbit pemerintah. Penerbit-penerbit pemerintah misalnya Direktorat Sarana dan Pusat Perbukuan. Buku-buku terbitan penerbit yang bukan anggota Ikapi itu belum masuk ke dalam angka yang masih di bawah 500 judul itu.

Berikut ini jumlah buku bacaan anak yang diterbitkan oleh Direktorat Sarana.

No.	Tahun Angg.	Judul	Tiras	Dana
1.	1989/1990	146	4.081.300	3.100.000.000
2.	1990/1991	194	6.000.000	6.000.000.000
3.	1992/1993	270	12.500.000	18.000.000.000
4.	1993/1994	273	22.179.200	34.802.756.000
	Jumlah	883	44.760.500	61.902.756.000

Apa yang dapat kita baca dari angka-angka ketiga tabel di atas? Banyak hal yang dapat kita ungkap. Misalnya, angka produksi buku kita memang masih rendah dibanding negara lain, terutama dengan negara yang sangat pantas dibandingkan, yaitu Malaysia. Namun, usaha mempercepat pertumbuhan kuantitatif itu kelihatannya tidak mudah. Banyak faktor di luar dunia perbukuan yang sangat berpengaruh yang berada di luar kendali orang-orang perbukuan. Beberapa faktor itu misalnya kekuatan ekonomi masyarakat dan tingkat kesadaran baca masyarakat.

Di pihak lain, jumlah bacaan anak-anak SD yang dapat disediakan Direktorat Sarana sungguh menggembirakan. Dalam empat tahun anggaran jumlah judul, tiras, bahkan dananya sangat besar. Barangkali ada orang yang kurang puas dengan mutunya. Buktinya, kata mereka, belum ada dari bacaan Inpres itu yang menjadi buah

bibir anak-anak. Bahkan, kata mereka lebih jauh, banyak di antara buku bacaan itu yang menyajikan dunia orang dewasa dengan bahasa orang dewasa pula.

7. Apa yang Perlu dan Dapat Kita Lakukan?

Kita telah melihat peran buku yang amat strategis dalam konteks pengembangan SDM Indonesia. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas lagi, yaitu pembangunan nasional. Kita juga telah melihat bahwa buku merupakan media yang amat baik bagi pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra. Kita telah pula melihat siapa pengembang bahasa dan sastra yang dominan dan kita juga telah melihat siapa yang dapat diharapkan turut serta lebih giat dalam pengembangan itu. Kita juga telah melihat sasaran pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra yang hendaknya memperoleh prioritas. Selanjutnya, kita juga telah melihat keadaan penerbitan buku kita serta perbandingannya dengan penerbitan buku di beberapa negara Asia.

Dari beberapa uraian singkat tersebut ada beberapa pokok pikiran yang perlu digarisbawahi. Pertama, rasanya tidak sulit untuk mencapai kesepakatan bagaimana kondisi perbukuan yang kita harapkan sehingga mampu menjadi sarana yang andal bagi pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra. Buku dalam jumlah yang besar dengan mutu yang baik dan dibaca oleh masyarakat itulah yang kita cita-citakan. Untuk mencapai harapan itu rupanya tidak mudah. Banyak faktor penghambat, baik faktor intern maupun faktor ekstern, yang menghadangnya.

Kedua, pengembangan bahasa dan sastra serta buku harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas, yakni pengembangan SDM Indonesia. Pada jenjang selanjutnya, pengembangan SDM Indonesia itu pun harus diletakkan dalam konteks pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan bahasa dan sastra yang terlalu berorientasi kepada bahasa dan sastra itu sendiri harus segera dihentikan.

Ketiga, orientasi pengembangan bahasa dan sastra yang bersifat umum, misalnya laras baku, sekarang tidak memadai lagi. Perlu segera dimulai pengembangan laras lain, misalnya "bahasa pelajaran", khususnya bahasa yang dipakai dalam buku-buku pelajaran. Kekosongan pengembangan laras bahasa pelajaran itu menyebabkan laras bahasa baku mendominasi buku-buku pelajaran. Akibatnya, mudah diduga. Bahasa buku pelajaran menjadi kering, monoton, dan membosankan.

Keempat, populasi penduduk Indonesia itu sangat besar. Tidak mungkin jumlah yang sangat besar itu sekaligus dijadikan sasaran pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra. Perlu diambil prioritas. Bila sistem prioritas ini dipegang, para siswa SD, SLTP, dan SLTA-lah yang perlu mendapat perhatian khusus. Para pengembang bahasa dan sastra perlu segera melahirkan buku-buku pedoman, kamus-kamus, dan buku acuan lainnya untuk mereka. Mengapa kita tidak berpikir mengadaptasi pedoman ejaan untuk siswa SD? Mengapa pula kita tidak berpikir untuk membuat kamus pelajar bergambar untuk siswa SD kelas-kelas awal?

Kelima, pengembangan bahasa dan sastra dewasa ini lebih berat berangkat dari titik tolak bahasa dan sastra itu sendiri. Misalnya, diciptakan sejumlah istilah suatu bidang ilmu tertentu. Silakan masyarakat, khususnya masyarakat bidang ilmu itu, memakainya. Pemasyarakatan dengan sistem *dropping* ternyata kurang efektif. Cara itu perlu diperkuat dengan cara lain. Misalnya, lewat bengkel-bengkel pelatihan penulisan buku dan editorial (bukan penataran, apalagi penyuluhan bahasa).

Keenam, sudah tiba saatnya para pengembang dan masyarakat hasil pengembangan bahasa dan sastra kini memberikan prioritas kepada kelompok siswa yang jumlahnya luar biasa itu. Pemberian prioritas tersebut misalnya dapat dimulai lewat penataan kelembagaan dan reorientasi program penulisan buku.

Ketujuh, langkah awal yang perlu segera disiapkan adalah peningkatan kemampuan tenaga pengembang bahasa dan sastra yang mengambil spesialisasi perbukuan. Selama ini kita sudah banyak memiliki tenaga kebahasaan dan kesastraan andal dalam bidang ilmu murni mereka. Namun, tenaga dalam bidang terapan, misalnya bahasa dan sastra untuk buku-buku pelajaran, sangat langka.

Ketujuh hal yang digarisbawahi di atas hanyalah sebagian kecil contoh masalah perbukuan yang dikaitkan dengan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa dan sastra. Di luar itu, masih banyak masalah lain yang tidak kalah pentingnya yang dapat kita siangi.

Sumber Data:

1. United Nation Year Book, 1985
2. Daftar Buku Ikapi 1989
3. Daftar Buku Ikapi 1990
4. Daftar Buku Ikapi 1991
5. Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-Anak SD, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Terbitan sebagai Sarana Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra: Antara Harapan dan Kenyataan
Pemakalah : Sumardi
Pemandu : J. Akun Danie
Pencatat : Siti Zahra Yundhiafi
Sulistiyati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Ukun Suryaman, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran

Kongres Ikapi (Juli 1993) mengemukakan masalah senada tentang perbukuan, yaitu nada negatif. Jika ada buku swasta yang terjual sebanyak 3000 buah dalam setahun, itu sudah tergolong hebat. Dari jumlah penduduk Indonesia yang 180 juta, yang paham bahasa Indonesia diperkirakan 30 juta dan yang gemar membaca 1% yaitu 30.000 orang. Yang membeli buku 1% sehingga diperoleh jumlah 3.000 orang.

Kenyataan membuktikan bahwa buku terbitan Depdikbud berlabel tidak diperdagangkan, tetapi di pasaran gelap banyak. Begitu pula buku-buku UT. Mengapa hal ini terjadi.

Jawaban:

Sekarang ini buku-buku Pemerintah boleh diterbitkan oleh swasta dengan syarat ada pembagian royalti sebanyak 6% -> 2% untuk penulis; 2% untuk sekretariat, 2% untuk lembaga.

Tahun terakhir Pusat Perbukuan mencetak 20 juta eksemplar sedangkan tahun yang akan datang direncanakan 60 juta eksemplar dan dana tahun lalu sebesar Rp34 milyar. Mudah-mudahan hal ini dapat mengatasi kesenjangan itu.

2. **Pertanyaan:** Kristina Sumarni, Guru SMA Negeri 6, Jakarta

Guru SMA mereka sebagai tertuduh karena adanya keluhan di masyarakat mengenai mutu pengajaran bahasa Indonesia di SLTA. Dikatakan bahwa guru SMTA kurang berhasil dalam membekali siswa. Kenyataan lain memperlihatkan bahwa ada anak SD kelas IV yang menanyakan, kalimat ini terdiri atas berapa morfem? Bagaimana dengan kenyataan ini? Siapa yang salah?

Dalam keyataannya memang belajar bahasa Indonesia di SMA bukan untuk mencintai bahasa, melainkan untuk mencari nilai karena terbitan bukanlah sarana belajar yang positif.

Jawaban:

Kesalahan mungkin terletak pada kita semua. Jika perbaikan diawali dari kurikulum, itu memang baik. Perbaikan selanjutnya meningkat ke buku. Semboyan "Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar" harus kita dobrak karena tujuan pelajaran bahasa Indonesia di SD adalah bahasa Indonesia nonbaku yang tujuannya untuk bermain-main.

3. Pertanyaan: Sucipto, SMA Negeri 3, Bandarlampung

- Sudahkah dipikirkan buku teks untuk pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri?
- Buku terbitan daerah juga sudah mendapat pengesahan. Di mana letak kekurangannya?
- Apakah buku manajemen sudah lebih baik ditinjau dari pengembangan bahasa Indonesia.

Jawaban:

Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam buku terbitan daerah mengenai pengenalan huruf untuk kelas 1 SD. Semua buku memulai dengan pengenalan huruf *a, i, m, n*. Selanjutnya, *k, r, t, s*. Penulis tidak mempertimbangkan tingkat kesulitan terutama pelafalan. Mengapa tidak diawali dengan huruf-huruf bilabial? Buku acuan tentang hal itu tidak ada sehingga kita harus menoleh ke luar negeri.

4. Pertanyaan: Suhendar, FPBS IKIP Bandung

Kenyataan bahwa siswa sekolah lanjutan sekarang kurang membaca karya sastra, mereka hanya membaca ringkasan atau menonton sinetron. Ada jalan pintas untuk membaca karya sastra. Minat baca masyarakat kurang. Ternyata para pengarang menggunakan kata-katanya sendiri, tidak menggunakan bahasa (kosakata) dalam kamus. Adakah obat mujarab untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Jawaban:

Pemakalah hanya mengimbau agar para peminat/pengarang menulis sebanyak mungkin karya yang enak dibaca (baik) dan Pusat Perbukuan bersedia menampung/menerbitkannya.

GATRA BAHASA TEKS DALAM PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI

Mien A. Rifai

Herbarium Bogoriense Puslitbang Biologi, LIPI, Bogor

1. Pendahuluan

Sudah umum diakui bahwa bahasa merupakan salah satu media pengungkapan bermacam bentuk pengejawantahan kebudayaan sesuatu bangsa. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti jika penguasaan dan pengembangan ilmu dan teknologi oleh bangsa yang bersangkutan akan sejalan dengan kemampuan warganya berabstraksi dan berkomunikasi. Berdasarkan kenyataan itu sangat tepatlah jika dalam rangka pembangunan nasional telah pula dimasukkan kebijakan memprioritaskan pengembangan bahasa melalui program-program terpilih dan terencana. Sehubungan dengan itu, dalam berbagai kesempatan terdahulu (Rifai, 1985; 1988) telah diperlihatkan kesejajaran dan kesalingtergantungan laju rekayasa dan pencendekiaan bahasa Indonesia dan upaya pengembangan penguasaan ilmu dan teknologi yang dilakukan orang di Indonesia selama ini.

Jarang orang menyadari bahwa pemberlakuan sistem ejaan baru bahasa Indonesia yang dicanangkan pemerintah pada tahun 1972 tidaklah semata-mata mengubah ejaan *dj* menjadi *j* atau *tj* menjadi *c* saja. Ketika tata aturan lengkap sistem ejaan baru itu dituangkan menjadi *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dalam tahun 1975, secara terperinci diatur pulalah pemakaian huruf dan angka, penulisan kata, akronim, istilah dan lambang, penanganan unsur serapan serta seluk-beluk penggunaan tanda baca. Dengan demikian, untuk keperluan penulisan bahasa teknis dalam karya ilmiah sudah tersedia sarana untuk memungkinkan terjadinya pembakuan yang menjadi persyaratan ketepatan komunikasi ilmiah. Tidak hanya itu saja dukungan kebahasaan yang disediakan untuk membina ilmu dan teknologi sebab, secara serempak, pada tahun 1975 itu diterbitkan pula *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang memang sangat diperlukan dalam proses membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa keilmuan yang terandalkan.

Seperti sudah ditandaskan dalam Kongres Bahasa Indonesia V (LIPI 1988), program pembangunan bidang bahasa yang dimotori Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menghasilkan bahasa Indonesia yang sudah bisa dipakai sebagai sarana komunikasi semua disiplin ilmu dan teknologi yang ada di muka bumi. Jadi, sebenarnya kita sekarang tinggal meraih dan menikmati hasil panen upaya

penguasaan dan pengembangan ilmu dan teknologi oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, beberapa kendala memperlambat pencapaian tujuan tersebut sehingga penyediaan kemudahan kebahasaan itu telah mencatat kemajuan yang lebih cepat dibandingkan keberhasilan penggalian, pembinaan, pengajian dan penerapan ilmu dan teknologi sendiri. Jika selama ini derap pembangunan fisik dan ekonomi Indonesia sering dianggap tidak diimbangi perkembangan sosial budaya yang selaju, dalam kaitan program pembangunan bahasa ilmiah terjadi keadaan sebaliknya.

Berikut ini beberapa segi yang bertalian dengan pengembangan penguasaan ilmu dan teknologi dalam kaitannya dengan bahasa teks akan diulas. Pemaparannya didasarkan pada hasil sekumpulan pengamatan tak berstruktur yang diperoleh dalam mengikuti genesis karya tulis tugas akhir mahasiswa pelbagai perguruan tinggi ketika menyelia karyawan peneliti beberapa pusat penelitian, dan ketika ikut menyunting majalah dan risalah pertemuan ilmiah, serta pengalaman menjadi pembaca pertama sekumpulan naskah yang dipertimbangkan penerbitannya oleh beberapa badan penerbit Indonesia.

2. Kelangkaan Terbitan Ilmiah

Salah satu kendala yang dihadapi pengembangan dunia ilmu di Indonesia ialah kecilnya jumlah dan rendahnya mutu karya ilmiah yang diterbitkan orang setiap tahunnya. Produksi buku atau pun majalah ilmiah di negara kita tidaklah sepadan dengan jumlah sarjana yang ada, serta sangat tidak berimbang dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Hubungan penerbit – penulis – pembaca yang merupakan segitiga tertutup bertimbal balik, seringkali menjadi lingkaran setan bila satu di antaranya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jika dunia perbukuan Indonesia kini tengah mengalami kesulitan besar tersendiri, kambing hitam masalah yang dihadapi penerbitan ilmiah lebih banyak teracu ke pundak peneliti yang dianggap belum berdampak hasil kegiatannya. Dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu dan teknologi yang menjadi tiang pancang kemajuan kebudayaan, para ilmuwan memang dituntut untuk berkarya, berkreasi, mencipta, dan menelurkan gagasan-gagasan baru yang memfungsikan ilmu menjadi teknologi serba guna. Ilmuwan memang merupakan salah satu kelompok pembentuk budaya bangsanya, karena bersama-sama para pandit (*scholars*), seniman, perekayasa, dan perajin, mereka giat berupaya membuat kehidupan di muka bumi ini layak dan enak dijalani. Kini keberhasilan ilmuwan secara universal biasa diukur dari keberhasilan mereka berkomunikasi mengumumkan hasil temuan kegiatan penelitian dan pemikirannya. Pada gilirannya semuanya lalu ditakar dari publikasi atau karya tulis ilmiah yang diterbitkan secara terlaksana. Untuk keperluan itu, naskah ilmiah harus ditulis dan disediakan dalam bentuk yang siap terbit dan siap cetak.

Bagi Indonesia di sinilah justru bertumpu segala bentuk masalah karena ternyata naskah ilmiah bermutu yang siap terbit masih merupakan komoditas langka. Seperti sudah seringkali diperbincangkan dan ditulis orang, kelangkaan naskah bermutu itu

berhubungan dengan kelambanan perkembangan penguasaan ilmu dan teknologi oleh bangsa Indonesia. Hasil pengukuran indikator kemajuan penguasaan ilmu dan teknologi di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di barisan paling belakang. Pengalaman pendidikan sarjana kita rupanya belum memungkinkan mereka untuk langsung bisa membaca dan memahami terbitan mutakhir majalah atau buku dan bahan pustaka keilmuan internasional lainnya. Selain penguasaan bahasa asing yang sangat tidak memadai, bagi sebagian besar sarjana Indonesia, majalah dan kepastakaan ilmiah tersebut memang merupakan khasanah tertutup karena istilah-istilah yang dimunculkan ilmuwan luar negeri dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir banyak yang belum pernah didengarnya. Karena tidak cukup kedalaman penyampaian materi pendidikan menengah untuk bekal belajar selanjutnya, dalam sejarah penggemblengannya di perguruan tinggi, para sarjana Indonesia belum sempat diantar ke tapal batas *terra incognita* ilmu. Mereka sudah kehabisan waktu di tengah jalan untuk mengisi ketertinggalan yang semakin melebar. Dengan demikian, sulitlah bagi ilmuwan Indonesia untuk dapat bersaing dalam membina serta memajukan ilmu dan teknologi sebab mereka tidak disiapkan untuk menguak tabir penutup misteri temuan baru yang penuh keorisinalan. Untuk berinovasi juga terhambat oleh kelangkaan sarana peralatan modern, sedangkan untuk mengadaptasikan hasil orang lain dinilai rendah perolehan angka kreditnya.

Karena kurang membaca untuk mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terakhir--sebab buku dan majalah ilmiah mutakhir memang tidak pernah lengkap tersedia--jarang sarjana kita yang mampu memformulasikan projek penelitian untuk memecahkan masalah penelitian tulin (*genuine research problem*) yang sedang hangat-hangatnya. Kekurangmampuan melihat masalah yang layak diteliti itu merupakan salah satu faktor kekuranglantangan sarjana peneliti kita bersuara di forum internasional. Banyak masalah khas Indonesia yang diteliti orang asing dan menyebabkan mereka menjadi autoritas dan tokoh dunia ilmu yang disegani. Kita di Indonesia sudah puas dengan hanya mengutip pendapat mereka, entah itu mengenai kandungan senyawa kimia tempe yang baik untuk mengurangi bahaya kolesterol, atau tentang peramalan iklim karena badai El Nino, ataupun yang hanya menjelaskan fenologi kayu soja batik.

Mereka yang sudah dipersiapkan dengan bekal ilmu yang cukup (misalnya karena melanjutkan pendidikan di universitas terbaik luar negeri) biasanya sudah dilatih untuk mendeteksi, mendeterminasi, membatasi, dan merumuskan masalah penelitian yang berprioritas tinggi. Namun, lingkungan yang disarati kebudayaan Melayu yang lebih menyukai komunikasi lisan bertatap muka menyebabkan daya kreasi mereka yang sudah sempat membesar menjadi kendur sehingga kurang produktif. Apalagi karena tekanan lingkungan belum mensyaratkan penuangan hasil kegiatan penelitian yang dihasilkannya dalam bentuk terbitan yang mapan.

Ketiadaan keharusan terbit tersebut menyebabkan kader peneliti mungkin tidak mengetahui bahwa melakukan penelitian--terutama yang disandang dananya oleh anggaran biaya negara yang berasal dari pajak rakyat--sebenarnya dibebani tuntutan

moral untuk menerbitkan hasilnya. Bagaimana *leluri* menerbitkan bisa tumbuh mapan kalau para peneliti senior yang menjadi panutan dan cermin dapat bertahan pada kedudukan yang dikenyamnya tanpa keharusan menerbitkan apa-apa? Padahal seniornya tadi tidak menghasilkan terbitan mungkin karena kegiatan proyek penelitian yang dilakukannya mengalami kegagalan sebab tidak pernah dipantau pelaksanaannya oleh sang penyandang dana. Sudah bukan rahasia lagi bahwa belum banyak lembaga yang mengevaluasi kegiatan proyek penelitiannya secara teknis ilmiah. Pengawasan yang biasa dilakukan sekarang baru terbatas pada ketertiban administrasi, terutama pertanggungjawaban keuangannya. Kesesuaian hasil kegiatan penelitian dengan usulan proyeknya tidak pernah dipermasalahkan secara konsekuen. Kalaupun kegiatan penelitian tadi berhasil, kewajiban yang dituntut hanyalah laporan formal yang sering dipersiapkan seadanya. Umumnya, laporan itu memang tidak pernah dibaca orang untuk ditelaah kelebihan atau kekurangannya sehingga sering hanya tertumpuk dalam arsip dan untung kalau masih dapat diperiksa di perpustakaan lembaga yang bersangkutan. Dapatlah dimengerti jika jumlah hasil penelitian ilmiah yang dapat diterjemahkan menjadi teknologi yang diterapkan di lapangan sangatlah sedikit persentasinya.

Sebenarnya para ilmuwan sangat berkepentingan agar hasil karyanya diterbitkan sehingga dapat dipergunakan untuk pelbagai tujuan, misalnya untuk mempercepat kenaikan pangkat, memperoleh royalti, mendapatkan kedudukan, atau nama harum. Oleh karena itu, dapat timbul asumsi salah bahwa sebagai penulis mereka akan menyiapkan naskah sebaik-baiknya dengan bercermin pada contoh atau model yang sudah terbit sebelumnya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa naskah yang disodorkan kepada penerbit sebenarnya tidak siap terbit karena umumnya memang belum sempurna analisis dan sintesis kesimpulan serta perampatannya sehingga masih perlu dimatangkan. Penerbitan naskah mentah seperti itu, terutama bila tidak disunting baik dari segi isi maupun bahasanya, pasti akan menyebabkan pembaca menjadi enggan membaca apalagi membeli buku. Langkanya naskah ilmiah bermutu yang dihasilkan ilmuwan memang telah menyebabkan diterbitkannya karya kelas dua sehingga pembaca semakin kecewa dan menjauhi toko buku. Keadaan ini dapat mengakibatkan penerbit gulung tikar sehingga untuk mengatasinya mereka memilih menerbitkan terjemahan karya ilmuwan asing yang kenamaan.

Kenyataan itu menyebabkan pasaran buku di Indonesia—terutama buku teks pelajaran—diwarnai oleh buku-bukuberisikan bahan yang sering kurang terkait dengan keadaan lingkungan Indonesia. Sekalipun keadaan ini sangat mencolok di peringkat perguruan tinggi, keadaan serupa ditemukan pula dalam buku-buku pelajaran sekolah. Buku jenis terakhir memang bukan terjemahan, namun dalam menyadur bahan untuk buku pelajaran di kelas, para penulisnya sering menyadap begitu saja materi dari belahan bumi beriklim sedang yang contohnya tidak akan pernah terimpikan akan dapat disaksikan kebanyakan pelajar Indonesia. Keadaannya lebih gawat dalam buku pengetahuan populer yang bersifat siklopedia yang ditujukan untuk bacaan remaja yang umumnya secara harfiah diterjemahkan dari sumber asing. Penerbit diuntungkan

dalam memproduksi buku-buku itu karena untuk menerbitkan buku semacam itu sudah tersedia klise ilustrasi dan foto berwarna yang sangat memikat walaupun yang digambarkan adalah keadaan alam lingkungan dan kebudayaan yang sama sekali asing bagi pembaca Indonesia.

Untuk beberapa disiplin ilmu seperti biologi keadaan seperti itu dapat bersifat fatal karena kita secara tak sengaja telah mematri dalam benak anak didik Indonesia konsep-konsep keilmuan berikut tata istilahnya yang tidak selamanya bersifat universal. Pengaruh buku seperti itu sulit sekali menghapus tertanamnya konsep yang membingungkan tentang tanaman atau tumbuhan tahunan—yang di daerah beriklim sedang berarti tumbuhan berumur pendek dan muncul sekali hanya pada musim tertentu—yang secara harfiah diterjemahkan dari *annual plants*. Padahal, kita di Indonesia sudah mempunyai konsep tumbuhan semusim dengan cakupan makna serupa. Padi adalah contoh tanaman semusim yang di Indonesia bisa ditanam sampai dua atau tiga kali dalam setahun sehingga amat janggal untuk dikatakan sebagai tanaman tahunan.

Ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan penelitian berbobot yang berhasil telah mengakibatkan kelangkaan naskah bermutu. Pada gilirannya, keadaan ini menyebabkan majalah ilmiah Indonesia sulit mempertahankan mutu isi kandungannya serta keteraturan keberkalaannya. Sekitar 3.000 proyek penelitian yang pembiayaannya dikelola Ditjen Pendidikan Tinggi beberapa tahun terakhir ini tidak sampai 600 yang menghasilkan makalah yang dibacakan dalam pelbagai pertemuan ilmiah. Kemudian, lebih kurang 400 di antaranya diterbitkan sebagai risalah pertemuan atau dalam majalah ilmiah bersirkulasi lokal. Hanya sebagian kecil saja naskah hasil penelitian tadi yang diterbitkan dalam majalah yang beraspirasi nasional, sedangkan yang berhasil sampai terbit dalam majalah internasional dapat dihitung dengan jari tangan. Oleh karena itu, peningkatan bobot penelitian yang akan menghasilkan naskah bermutu mutlak diperlukan, terutama kalau kita ingin menggalakkan produksi terbitan ilmiah yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan penguasaan ilmu dan teknologi modern oleh bangsa Indonesia.

3. Bank Naskah yang Tersedia dan Sumber Lain yang Tersedia

Dalam menghadapi kenyataan kelangkaan naskah yang layak terbit, bank naskah yang dari semula sudah lama tersedia di lingkungan perguruan tinggi dan badan-badan penelitian dan pengembangan seharusnya dimanfaatkan. Skripsi sarjana, tesis magister, dan disertasi doktor merupakan sumber naskah yang memang tak akan pernah kering selama perguruan tinggi masih membuka pintunya. Masalah utama yang dihadapi oleh setumpuk naskah itu ialah kementahan bahan yang disajikan karena dari semula memang tidak dipersiapkan untuk diterbitkan. Mematangkannya tidak mudah karena mahasiswa penulisnya telah meninggalkan kampus sehingga tidak dapat lagi dipaksa untuk merevisi naskahnya menjadi tulisan siap terbit. Untuk itu, ada beberapa jalan

yang dapat ditempuh guna meningkatkan nilai tambah kegiatan mahasiswa yang sudah menyita begitu banyak waktu, tenaga, dana, pikiran, dan entah apa lagi.

Dalam jangka pendek perlu dikerahkan suatu kelompok pemilah dan penyeleksi naskah yang layak diterbitkan berdasarkan pelbagai pertimbangan (keorisinalan ilmiah, temuan, nilai inovasi, sumbangan, kemanfaatan hasil dan dampak ekonomi, faktor komersial, dan lain-lain). Naskah yang terseleksi diserahkan kepada tim penyunting untuk diolah menjadi naskah siap cetak.

Selain penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, di perguruan tinggi banyak kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen yang seharusnya sudah menghasilkan laporan dan naskah yang siap terbit. Beberapa laporan penelitian sosial oleh pengajar perguruan tinggi yang diterbitkan secara semipopuler ternyata dapat mengalami cetak ulang. Di masa mendatang kegiatan penelitian para dosen itu diharapkan mengalami peningkatan mencolok karena diadakannya program yang secara khusus dibiayai oleh projek hibah bersaing. Selanjutnya, di pusat-pusat penelitian berbagai departemen setiap tahun dihasilkan laporan penelitian dalam jumlah banyak yang umumnya juga sangat bervariasi tahap kesiapan terbitnya. Peningkatan mutu penelitian dan laporan yang dihasilkan kegiatan tersebut sedang digalakkan oleh kebijakan baru Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui program riset unggulan terpadu yang ditangani Dewan Riset Nasional.

Bank naskah yang tersedia dalam jumlah banyak merupakan kumpulan makalah yang dibacakan dalam puluhan seminar, lokakarya, simposium, kongres, dan segala bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Seperti dapat diduga, sarana komunikasi lisan yang sangat membudaya di kalangan peneliti Indonesia selalu diselenggarakan orang setiap tahunnya hampir seperti suatu ritual. Dengan sendirinya, mutu ilmiah naskahnya sangat bervariasi sebab jarang sekali panitia penyelenggara kegiatan itu melakukan seleksi penyertaan makalah yang dapat disajikan. Oleh karena itu, seleksi dan pengolahan yang ketat akan sangat diperlukan sebab penyuntingan penerbitan risalah pertemuan ilmiah yang dilakukan sekarang hanya bersifat proforma saja. Sudah lama dirasakan bahwa risalah pertemuan ini tidak pernah menjadi *best seller* sehingga penerbitannya harus betul-betul melalui evaluasi keterjualan yang teliti. Jika penyeleksian dan penyuntingan dilakukan dengan cermat, lama kelamaan penerbitan risalah akan ikut menanamkan saham dalam membina kehidupan keceandekaan yang sehat. Ini terjadi karena penerbitan tersebut ikut menentukan macam naskah yang layak ditulis sarjana sehingga secara tidak langsung ikut pula menentukan mutu penelitian yang pantas dilakukan orang.

Penerbitan kumpulan karangan seorang ilmuwan yang menjadi kolumnis terkenal dan berpengaruh karena sudah banyak menerbitkan buah pengalaman dan pemikirannya dapat merupakan daya pikat tersendiri bagi pembaca sehingga penerbitannya dijamin tidak akan merugikan. Beberapa ilmuwan dan sosok masyarakat ternama yang ditokohkan sudah menulis memoar, autobiografi, atau biografi dan kupasan topik lain yang kini ternyata merupakan ladang yang sudah sering digarap penerbit Indonesia. Dari seorang pengajar yang bereputasi baik dapat

pula diminta menulis naskah buku teks bidang ilmunya. Banyak naskah buku teks untuk mahasiswa yang diterbitkan orang di luar negeri diperoleh penerbitnya dengan cara ini. Oleh karena itu, kita sering menemukan adanya seri buku pelajaran yang digarap dan diterbitkan dengan format yang hampir seragam yang dikeluarkan oleh suatu penerbit besar. Adanya seorang penyunting rumah tangga penerbit yang bekerja sama dengan seorang penyunting pakar bidang di luar lingkungan penerbit merupakan syarat utama upaya sedemikian itu. Dalam kaitan ini, perlu dicatat bahwa pekerjaan menyunting buku umumnya merupakan karya anonim. Hanya karena keperluan angka kredit, gejala yang dibudayakan di Indonesia sekarang terasa kurang etis sebab orang yang sebenarnya tidak punya hak kepengarangan, namanya ikut dimunculkan secara mencolok di samping pengarang buku termaksud.

Pengadaan naskah mungkin pula diupayakan melalui penyelenggaraan perlombaan penulisan suatu topik yang sedang mendapat sorotan hangat masyarakat. Kegiatan ini sekarang sering dilakukan badan-badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan sesuatu bidang serta menginginkan naskah dalam waktu relatif cepat. Buku pengayaan terhadap suatu pokok bahasan mata pelajaran sekolah pun sekarang ada yang ditempuh melalui pendekatan ini.

4. Bahasa Teks sebagai Bagian Ragam Bahasa Tulis

Karena sampai beberapa tahun terakhir ini tekanan untuk menerbitkan tidak ada, ragam bahasa ilmiah belum berkembang dengan baik. Laporan lisan dan komunikasi tatap muka yang banyak dilakukan orang dalam berbagai macam bentuk pertemuan ilmiah memang sering hanya didasarkan pada tulisan seadanya (yang acap kali terasa berbau ragam bahasa lisan). Semuanya dikerjakan sekadar memenuhi persyaratan sehingga umumnya dipersiapkan dengan ditulis langsung sekali jadi tanpa mengalami revisi atau perbaikan dan penulisan kembali. Lama-kelamaan keadaan ini akan mengakibatkan kemampuan menulis menjadi mundur sehingga sarjana kita sekarang banyak yang tidak dapat menulis secara efektif. Mungkin tidak banyak di antara mereka yang memahami bahwa tulisan ilmiah itu harus menggunakan ragam bahasa yang bersendikan kalimat-kalimat yang tepat, singkat, jelas, resmi, dan baku. Jarang sekali sarjana kita yang menyadari adanya ragam bahasa tulis di samping ragam bahasa lisan sebab tidak diketahui bahwa dalam bahasa Indonesia tidak dimungkinkan penerapan nasihat yang disarankan kepada calon penulis Inggris agar "*... write as you speak ...*", terutama karena ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis Indonesia seperti langit dengan bumi bedanya.

Tidaklah mengherankan jika sekalipun sudah 65 tahun dijadikan alat perjuangan sehingga diikrarkan untuk dijunjung tinggi sebagai sarana pemersatu bangsa, banyak orang yang mengeluhkan bahwa perkembangan bahasa teks Indonesia tidaklah begitu menggembirakan keadaannya. Mereka yang pernah membimbing mahasiswa atau menjadi penyunting terbitan ilmiah akan merasakan kerawanan penguasaan bahasa nasional oleh kader peneliti dan ilmuwan Indonesia. Gejala kekurangpedulian

kalangan cerdik pandai untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar telah menyebabkan suburnya pemakaian bahasa substandar yang kurang mencerminkan kecendekiaan yang diharapkan dari kaum terpelajar itu. Mereka kurang bertaat asas dalam mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sehingga sampai sekarang pemisahan kata depan *di* dan *ke* dari kata yang mengikutinya masih menjadi masalah karena dikacaukan dengan awalan *di-* dan *ke-*. Kekurangcermatan penerapan pedoman ejaan yang disempurnakan tersebut juga terjadi dalam menuliskan istilah serapan, seperti *khronologi* (dari *chronology*) dan bukannya *kronologi* hanya karena mereka mengira bahwa penyerapannya cukup dengan mengubah *c* menjadi *k*.

Karena dalam kegiatan harian sering bersinggungan dengan bahasa asing, bahasa Indonesia para cerdik cendekiawan biasanya terkontaminasi unsur asing dalam kadar yang sudah melampaui batas kewajaran. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pencemaran kebahasaan ini terasa pula dalam bahasa teks yang dihasilkan mereka. Penerapan kaidah yang benar untuk tata bahasa Inggris dalam menjamakkan (*kunjungan ke berbagai laboratoria* dan bukannya *berbagai laboratorium, suku yang terdiri atas 12 genera* alih-alih mengatakan *12 genus* atau lebih baik lagi *12 marga*), penerjemahan ungkapan asing secara harfiah (*as soon as possible* menjadi 'secepat mungkin' dan bukannya 'secepat-cepatnya'. *At the laboratory where the research was performed* menjadi 'di laboratorium di mana penelitian dipentaskan' dan bukannya 'di laboratorium tempat penelitian dilaksanakan'), dan kejanggalan lain yang merupakan contoh perusakan bahasa yang dibawa oleh para cendekiawan itu.

Hampir semua buku pedoman penulisan karya ilmiah untuk ilmuwan barat menekankan keharusan penggunaan ragam bahasa yang memenuhi syarat *abc* (*accurate, brief, and clear*) yang secara cerdik oleh almarhum Prof. Dr. Ir. H. Johannes (1981) diindonesiakan menjadi *andak* (*brief*), *bayan* (*clear*) dan *cermat* (*accurate*). Petunjuk ini mengharuskan dikuasainya kosakata umum serta perangkat peristilahan bidang ilmu yang ditekuni, berikut tata perlambangan, akronim, dan singkatan beserta satuan pengukuran yang lazim dipakai di bidang spesialisasinya. Pemakaian kosakata dan peristilahan menentukan corak dan mutu keteknisan tulisan. Semakin tinggi jumlah kosakata yang dipakai semakin ilmiah sifat tulisan. Jumlah kosakata yang dipakai dalam tulisan ilmiah populer (surat kabar atau majalah hiburan) jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tulisan serupa yang bertaraf semiteknis (buku pegangan), apalagi bila dibandingkan dengan majalah ilmiah spesialis.

Kata memiliki kekuatan (*word power*) yang setara dengan warna dalam lukisan, nada dalam musik, atau bentuk dalam ukiran. *Salah, kurang tepat, tidak benar*, dan *keliru* semuanya memiliki makna yang serupa, tetapi pengaruh pemakaiannya amat berlainan. Pemekaran jumlah kosakata yang dikuasai seseorang akan memungkinkan mengatasi salah satu kendala utama menulis, yaitu menemukan kata yang tepat. Kalau dijumpai kesulitan (*masalah, persoalan, problem, keraguan, dilemma* ...) alternatif yang tersedia dapat dicantumkan seperti dilakukan di sini. Dalam memperbaiki naskah nanti akan dapat dipilih (*dicari, diambil, diseleksi, diganti, dipertimbangkan* ...) kata yang paling sesuai. Oleh karena itu, kemampuan mengukur kekuatan kata, ketelitian

memilih, dan kepiawaian menyusunnya akan menghasilkan tulisan ilmiah yang bisa menjadi adiknya. Pemilikan atau akses terhadap kamus bahasa dan kamus istilah yang paling tebal merupakan persyaratan mutlak untuk memperbaiki modal dasar penulisan karya ilmiah dengan menggunakan bahasa teks yang tangguh. Kedua macam buku acuan tersebut akan dapat membantunya mencari kelas sesuatu bentuk kata atau istilah, mengetahui maknanya, serta menemukan sinonim yang dapat diselangkannya. Kemampuan mencari pilihan kata lain itu akan menyebabkan tulisan seseorang hidup dan tidak membosankan sebab sekalipun ragam bahasa tulis untuk keperluan teks ilmiah mengisyaratkan kesingkatan dan ketepatan, namun segi keindahan tidak boleh diabaikan begitu saja.

Dengan penguasaan kosakata dan peristilahan yang baik, dapat disusun kalimat yang efektif sehingga maksudnya tidak meragukan karena makna unsur-unsurnya tidak mendua. Sesuai dengan persyaratan ilmiah yang meminta ketepatan yang tinggi, bahasa teks lebih tegas menekankan bahwa kalimat yang baik itu haruslah mampu berdiri sendiri terlepas dari konteksnya, ada kesatuan pikiran yang bulat dan utuh, serta terdapat koherensi di antara unsur-unsurnya. Namun, bahasa teks yang dihasilkan ilmuwan kita masih dironai penyimpangan terhadap ketentuan kalimat bahasa Indonesia baku yang selalu konsisten dan tegas dalam memakai awalan *ber-* dan *me-*, fungsi tata bahasa, konjungsi *bahwa* dan *karena*, pola aspek + agens + verba, konstruksi sintaksis, partikel *-kah* dan *pun*, serta bersih dari unsur dialek daerah.

Suatu perkembangan baru yang menarik dapat disaksikan pada perubahan ciri kalimat Indonesia yang umumnya berbentuk pasif menjadi berbentuk aktif. Para cerdik cendekiawan tampak semakin berkecondongan untuk lebih menyukai bentuk kalimat aktif dalam bahasa teks mereka. Sebagaimana diketahui pola ini membudaya di dunia barat, apalagi karena untuk setiap temuan dalam kancah pemacuan laju pengembangan ilmu dan teknologi modern, hak cipta, hak kepengarangan, dan hak kepemilikan intelektual penemunya betul-betul ditonjolkan. Seberapa jauh hal itu akan dapat mempengaruhi pemacuan pola berkreasi orang Indonesia dalam tulis-menusulis perlu dipantau dan diteliti lebih lanjut.

Perkembangan lain yang terlihat pada tata kalimat bahasa teks ialah ditinggalkannya susunan sederhana dan pendek—seperti banyak dipakai dalam karya-karya sastra—yang dalam bahasa teks ilmiah umumnya menjadi lebih panjang. Anehnya, pemanjangan tersebut terjadi justru karena bertujuan meningkatkan penyajian dengan jalan memasukkan anak kalimat sebagai batasan atau penjelasan sesuatu unsur kalimat. Pola ini memang menghasilkan tulisan yang lebih lugas dan ekonomis serta tidak memboroskan tempat karena dapat mengurangi pengulangan yang tidak diperlukan. Keefektifan kalimat memang ditingkatkan dengan menggabungkan beberapa kalimat yang setara, atau mempertentangkan dan memperbandingkannya sesuai keadaan. Hal ini akan memberi peluang untuk membuat kalimat-kalimat suatu tulisan menjadi segar dan menarik serta berseni sehingga enak dibaca. Harus diakui bahwa penyajian tulisan ilmiah tidaklah dimaksudkan untuk menghasilkan karya sastra, tetapi itu bukan alasan untuk membuat tulisan yang kering dan membosankan. Berkenaan dengan itu, lalu

timbul ekses-ekses yang memprihatinkan sebab sekarang sering muncul kalimat berkepanjangan yang untuk memahaminya harus dibaca dua-tiga kali baru terselami maksudnya. Kekurangcermatan penguasaan penggunaan tanda baca menyebabkan tidak berfungsinya sarana kemudahan yang tersedia untuk mengefektifkan tulisan ilmiah seseorang. Karena panjangnya rentetan kata-kata yang dihasilkan, acapkali terjadi kalimat mengisi satu paragraf tersendiri.

Kejanggalan sedemikian itu menunjukkan kurang dipahaminya fungsi paragraf sebagai penampung sederetan pernyataan yang saling mendukung dan terpumpun untuk mengukuhkan suatu gagasan atau tema yang menyatu. Begitu pula kegagalan penempatan secara tepat kalimat yang menjadi inti gagasan (apakah di awal, tengah atau akhir) dalam suatu paragraf, tidak berhasil untuk membuat satuan pikiran yang ingin diungkapkan menjadi kesatuan yang bermakna. Kesulitan seseorang menulis efektif juga disebabkan oleh tidak diketahuinya adanya fungsi paragraf pembuka, paragraf penghubung serta paragraf penutup. Seperti dapat diduga, semuanya sangat ditentukan oleh kerapian penempatan kalimat yang cermat dalam sesuatu paragraf itu.

Jika persyaratan pola dan kerangka baku tulisan ilmiah yang cenderung bersifat universal diterapkan dalam mengevaluasi bahasa teks yang dipakai di Indonesia sekarang, akan terlihat kerawanan yang lebih parah lagi. Patokan tulisan ilmiah yang menyatakan bahwa judul karangan berbahasa Indonesia jangan melebihi dua belas kata (atau maksimum sembilan puluh ketuk mesin tik) agar sekali baca langsung bisa dimengerti orang, sekarang jarang dipatuhi. Pemakaian kata klise yang tidak berfungsi informatif seperti penelitian, studi, pengaruh, hubungan, telaah, dan sejenisnya pada awal judul telah mengurangi keefektifan judul tersebut. Akibatnya, judul tidak mampu memikat pembaca untuk membujuk agar menelaah karangannya lebih lanjut. Jarang peneliti menyadari bahwa karya yang bersusah payah dipersiapkan mungkin hanya judulnya saja yang dibaca orang, untuk seterusnya dilewati begitu saja. Kata-kata kunci yang diperlukan untuk memudahkan pemayaran isi karangan dengan komputer belum dipahami fungsi kegunaannya sehingga tidak disusun dan dipersiapkan para peneliti kita secara efektif. Kode etik pengacuan dan pengutipan pustaka serta pendokumentasian sumbernya tidak dilakukan dengan bertaat asas, dengan akibat gelar akademik terkadang ikut tercantum dalam daftar kepustakaan (dan juga dapat muncul dalam baris hak pengarang!). Tabel sering dipakai bukan untuk mengefektifkan penyajian, tetapi untuk mengulang pemaparan yang ditulis dengan bahasa yang tidak cermat (Tabel 3 memperlihatkan bahwa ...) sehingga tujuan pemuatannya menjadi meragukan.

Suatu hal yang menggembirakan ialah kenyataan bahwa gaya bahasa teks yang dipakai orang pada umumnya sudah menunjukkan kematangan dalam menghadapi kondisi lingkungan yang membatasi ruang gerak seseorang. Sebagaimana diketahui, macam media atau wadah pemuat tulisan, sasaran pembaca, tingkat keteknisan tulisan, corak dan lingkup tulisan itu sendiri, semuanya ikut menentukan gaya yang harus dipakai. Oleh karena itu, gaya imperatif untuk menyatakan kemauan yang disenangi

orang yang merasa memiliki otoritas, serta gaya emosional yang biasa dipakai dalam meluapkan ungkapan perasaan tak terkendali, hampir tidak pernah dipergunakan orang dalam bahasa teks ilmiah. Kerasionalan yang memungkinkan dilakukannya penalaran dalam mengambil kesimpulan secara objektif dan penuh kewajaran, sudah mengakar dalam gaya bahasa tulisan-tulisan ilmiah yang diterbitkan orang. Ilmu dan teknologi modern memang menghendaki keteraturan dan kemapanan penalaran yang mengharuskan dilakukannya perumusan konsep-konsep secara ketat sehingga terjadi pengertian tunggal. Namun, sekalipun gaya beremosi selalu disarankan untuk dihindari dalam karya ilmiah, ungkapan seperti *kesimpulan amat berarti, temuan maha penting, hasil sangat menarik*, dan semacamnya sesekali muncul juga.

Bahasa Indonesia yang sedang direkayasa untuk dicendekiakan agar menjadi bahasa ilmiah itu sekarang sedang mengalami pertumbuhan pesat. Kecepatan perkembangannya jauh melebihi kepesatan perubahan yang juga sedang dialami oleh bahasa-bahasa lain di dunia ini. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karya Poerwadarminta yang semula hanya berisi lebih kurang 22.000 lema (*entry*) dalam empat puluh tahun terakhir telah dimekarkan menjadi sekitar 70.000 dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Di samping itu, masih harus ditambahkan puluhan ribu istilah ilmiah yang dibentuk secara khusus dan sudah resmi diterima sebagai kosakata bahasa Indonesia. Kenyataan ini menimbulkan kesulitan yang tak sedikit pada orang yang menganggap bahasa Indonesia itu mudah penguasaannya secara baik dan benar. Anggapan yang keliru itu menyebabkan orang enggan berlatih dan tidak membiasakan diri menulis dalam bahasa Indonesia secara tertib dan efektif. Untungnya, tidaklah pernah terlambat bagi ilmuwan untuk mulai berbenah diri meningkatkan penguasaan ragam bahasa tulis ilmiah yang berciri tepat, singkat, jelas, teratur, dan resmi. Penguasaan atas kosakata dan istilah, kemahiran menyusun kalimat secara sempurna serta kecekatan menyatukannya dalam paragraf-paragraf yang efektif sehingga menjadi karangan yang baik memang mutlak diperlukan. Ini diharapkan akan menampilkan sosok ilmuwan yang berkemampuan cermat memilih kata, teliti menyusun kalimat sehingga teratur dan tidak ceroboh jalan pikirannya yang pada gilirannya menjadi prasyarat guna berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah ciri kehidupan keterpelajaran dan kecendekiain.

5. Pembinaan Sarana Pendukung

Dengan melihat berbagai keadaan seputar perkembangan bahasa teks yang serba tidak menggembirakan dapatlah disimpulkan bahwa pembinaan sarana untuk mempercepat proses penerbitan karya ilmiah di Indonesia harus diutamakan. Untuk itu, dirasakan perlunya menata pranata yang terkait secara menyeluruh, mulai dari lembaga pelindung organisasi dan penyandang dana, dewan penyunting yang berfungsi baik karena memiliki waktu dan kemauan serta kemampuan (dalam urutan prioritas demikian), para mitra bestari (*peer groups*) yang bertindak sebagai penelaah yang bersama-sama para penyunting menjadi penentu laju pacu dan mutu terbitan, serta kelompok pendukung yang mengatur distribusi dan pemasaran. Kelembagaan

yang difungsikan untuk mengelola penerbitan belum menunjukkan keprofesionalan seperti yang diharapkan.

Faktor penyunting di sini sangat vital peranannya dalam menentukan kelangsungan hidup tegar badan penerbit dan produknya, terutama terbitan yang bersifat berkala. Memang salah satu kelemahan dunia penerbitan Indonesia ialah belum dimilikinya penyunting rumah tangga (*in house editor*) yang tangguh, serta tiadanya gaya selingkung penerbit yang dipatuhi secara bertaat asas. Buku-buku terbitan Indonesia yang diijarkan di rak perpustakaan akan memperlihatkan ukuran yang sangat beraneka ragam yang menunjukkan tiada dipatuhinya patokan standardisasi nasional dan internasional yang berlaku. Bahkan, suatu majalah ilmiah yang merupakan terbitan berseri dan dikeluarkan secara berkala pun adakalanya berubah ukuran. Kalau tipografi, tipe huruf, gaya penyajian serta tata letak majalah tersebut disimak, akan terlihat ketidakpedulian pengelola majalah termaksud akan kemantapan mutu karyanya tadi. Oleh karena itu, mungkin sudah tiba waktunya untuk memberi pengakuan khusus bagi kedudukan para penyunting agar kelompok manusia langka ini dapat berfungsi dengan lebih efektif dalam mempercepat proses penguasaan ilmu dan teknologi modern oleh bangsa Indonesia.

Disepakatinya suatu buku pegangan gaya penerbitan nasional (*Indonesian style manual*) yang sekarang sedang dalam tahap penyusunan yang akan mengukuhkan adanya pedoman rumah tangga atau gaya selingkung setiap majalah ilmiah, atau terbitan lain sesuatu badan penerbit, diharapkan akan mempercepat proses pemaparan penerbitan karya ilmiah di Indonesia. Gaya penerbitan yang ditujukan baik kepada para penulis, maupun kepada para penyunting dan pengelola badan penerbitan itu dimaksudkan untuk memperkenalkan seluk-beluk mempersiapkan naskah mulai dari perencanaan penulisan buram naskah sampai keluar dari percetakan dalam bentuk terbitan. Selain itu, buku tersebut dimaksudkan pula untuk memaparkan kode etik penulis dan kode etik penyunting dalam mengisi fungsinya masing-masing berkarya memajukan penguasaan ilmu dan teknologi modern di Indonesia. Kemapanan ini akan mempermudah pelaksanaan akreditasi mutu penerbitan Indonesia, serta akan memungkinkan pemilihan majalah ilmiah yang akan dapat diangkat sebagai wadah nasional untuk sesuatu cabang ilmu. Penelaahan pendahuluan terhadap mutu majalah ilmiah yang diterbitkan perguruan tinggi negeri di Indonesia memperlihatkan bahwa pada saat ini hanya terdapat sekitar tiga puluh majalah ilmiah yang sudah menunjukkan kemapanan yang dipersyaratkan secara minimum. Padahal, sekarang terdaftar hampir lima ratus judul majalah bercorak ilmiah (dari sekitar 4.500 judul terbitan berkala yang ada di Indonesia), tetapi banyak di antaranya yang distribusinya sangat bersifat lokal—karena hanya diterbitkan untuk lingkungan sendiri oleh suatu perguruan tinggi, suatu fakultas, suatu jurusan, suatu laboratorium, atau bahkan suatu program studi (Guhardja dkk 1993). Keadaan itu tidaklah mempercepat upaya kita menjadi penguasa ilmu dan teknologi yang mampu bersaing secara global di abad XXI nanti. Sekarang banyak orang terbiasa—dan mungkin diharuskan—menerbitkan karya ilmiahnya dalam wadah yang dikelola sendiri, demi keterkenalan almamater atau

karena kecintaan berlebihan pada kelompoknya. Dapat dipastikan bahwa akan diperlukan terobosan khusus untuk membuat para dosen dan peneliti menjadi lebih loyal kepada disiplin ilmu yang ditekuninya, alih-alih kepada kampus dan golongannya. Jika dambaan ini tercapai, akan terjadi pengalihan loyalitas yang akan memungkinkan mereka mau mengirimkan naskah ke majalah berspesialisasi yang diterbitkan oleh bukan lingkungannya sendiri, tetapi berakreditasi dan beraspirasi nasional ataupun internasional.

Kelangkaan terbitan ilmiah ini harus segera diatasi dalam rangka pengejaran ketertinggalan penguasaan ilmu dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, pembinaan pembaca memang harus dilakukan secara bersistem untuk membuat mereka bersikap kondusif guna mendukung industri penerbitan. Pembaca tidak bisa dibiarkan pasif, tetapi harus dirangsang minatnya melalui iklan, temu penulis, jumpa pers dalam upacara peluncuran terbitan baru, pameran dan bursa buku, serta kegiatan lain yang bertujuan menggiring calon pembaca ke kasir toko buku. Kerja sama penerbit dan penulis harus digalang dalam menggerakkan psikologi massa agar mau membaca terbitan, serta mau membayangkan kerugian yang akan diderita kalau tidak membaca sebuah terbitan ilmiah.

Dalam kaitannya dengan terbitan ilmiah, sangatlah ironis jumlah dosen di perguruan tinggi negeri mendekati 45.000 orang, tetapi kesulitan untuk menjual habis suatu nomor majalah ilmiah yang bertiras lima ratus eksemplar. Kenyataan ini membuat kita tidak dapat keluar dari kesimpulan (yang mungkin sangat naif) bahwa membaca majalah ilmiah belum atau tidak merupakan kebutuhan bagi dosen yang berarti bahwa mengikuti kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi juga tidak diperlukan mereka dalam mempersiapkan kuliah. Ada kalanya timbul pertanyaan mengusik, kalau dosen sebagai masyarakat pembina ilmu bersikap demikian, bagaimana mereka menggalang mahasiswa dan masyarakat luas lainnya agar berkebudayaan membaca? Ataukah majalah ilmiah kita memang sangat tidak bermutu sehingga dapat dianggap betul-betul tidak perlu dibaca untuk menambah pengetahuan seseorang?

Salah satu kendala pembinaan pembaca adalah terjadinya trauma karena orang secara terpaksa setiap tahun membeli buku yang disebabkan oleh keharusan mengeluarkan uang tambahan gara-gara terjadinya penggantian buku pelajaran di sekolah yang sama. Untuk mengatasi hal itu, perlu diambil kebijakan agar penggantian buku pelajaran tidak begitu mudah dilakukan. Tersedianya buku pelajaran terbitan swasta yang mirip buku paket yang hanya kadang-kadang bermutu lebih baik dibandingkan buku resmi, memang merangsang beberapa orang untuk mengupayakan penggantian dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan finansial seseorang dan keuntungan komersial penerbit.

Sebagaimana diketahui, buku teks yang diperbolehkan memasuki ruang kelas adalah buku pengayaan yang sudah lolos saringan yang salah satu persyaratannya adalah keharusan bersesuaian dengan kurikulum yang berlaku. Kelonggaran yang terbuka ini dimanfaatkan oleh penerbit untuk menerbitkan buku-buku tandingan

dan bukannya buku pengayaan yang diharapkan. Oleh karena itu, disarankan agar dalam menilai buku terbitan swasta yang akan diizinkan dipakai di ruang kelas haruslah yang hanya mengupas satu pokok bahasan. Yang disajikan dan dikupas tidak seperti pelajaran, tetapi betul-betul hanya untuk memperluas cakrawala murid dalam mengikuti penyajian pokok bahasan termaksud—terutama dengan menyuguhkan bahan yang bermuatan lokal. Bila ada buku yang mencoba memberikan keseluruhan isi pelajaran seperti dituntut kurikulum, buku tersebut harus diberi nilai angka mati. Dengan demikian, buku paket—yang memang perlu direvisi dan disempurnakan dengan mengundang banyak pihak dari waktu ke waktu sesuai perkembangan ilmu dan teknologi—tidak akan disaingi secara tidak sehat sehingga tidak akan terjadi lagi penggantian buku setiap tahun. Untuk itu, kerja sama penerbit swasta setempat untuk ikut bersaham dalam menerbitkan buku paket harus dikembangkan.

6. Jurusan Pendidikan yang Perlu Dilangkahkan

Untuk mengatasi semua kepincangan perlu dobrakan yang mendasar dan menyeluruh yang harus dikembangkan dari awal, mungkin tidak dapat ditawar lagi kalau hasil positif yang diinginkan. Agaknya tidaklah terlalu mengada-ada jika setiap siswa yang memasuki sekolah menengah umum diwajibkan menuliskan pengalaman atau pengamatannya minimum dua ratus kata seminggu. Dengan demikian, mereka akan dapat belajar dan terlatih menulis secara efektif sehingga mampu menuliskan dan mempertelakan segala sesuatu dengan kata-katanya sendiri. Pelajaran mengarang yang mengutamakan penguasaan penggunaan bahasa dan bukan ilmu bahasa memang mutlak harus dikembalikan dalam kurikulum sekolah mendatang.

Mengingat belum siap terbitnya naskah skripsi sarjana, tesis magister, dan disertasi doktor yang semakin hari semakin menumpuk, pendekatan mendasar harus dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempunyai kewenangan di perguruan tinggi. Agaknya sudah waktunya ditekankan keperluan mengajarkan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang efektif kepada mahasiswa. Artinya, kita harus mempersyaratkan bahwa yang akan diterima sebagai suatu skripsi, tesis, atau disertasi hanyalah tulisan yang sudah siap diterbitkan. Dengan demikian, selama dalam masa penggodokan, para sarjana akan dilatih tertib menulis sehingga setelah meninggalkan ruang kuliah, mereka terbiasa menulis karya ilmiah yang dapat diterima untuk diterbitkan.

Karena itu wajarlah kita menggarisbawahi imbauan yang disampaikan LIPI (1988) dalam Kongres Bahasa Indonesia V yang menginginkan agar skripsi S-1, tesis S-2, atau disertasi S-3 cukup ditulis seperti naskah yang diajukan untuk diterbitkan dalam majalah ilmiah yang mapan. Untuk itu, pola penulisan tugas akhir mahasiswa harus diselaraskan dengan majalah ilmiah bidang ilmu terkait sehingga petunjuk kepada penulis yang dikeluarkan majalah termaksud dapat dipakai sebagai pedoman menulis penyajian dan isi skripsi, tesis, atau disertasi itu. Hal itu berarti bahwa karya tulis mahasiswa akan menjadi pendek, tetapi padat dan sesuai dengan persyaratan ragam tulis bahasa teks ilmiah yang menghendaki derajat ketepatan, kesingkatan, dan

kejelasan yang tinggi. Secara empiris dapatlah dikatakan bahwa tulisan berbobot yang dihasilkan suatu penelitian cukup dituangkan dalam 1.500–3.000 kata saja (atau sekitar 7–15 halaman tik spasi ganda) yang pada umumnya merupakan persyaratan ketebalan maksimum naskah yang dapat diterima majalah ilmiah. Disertasi yang disusun seorang mahasiswa bercakupan luas, disertasi itu pantas ditulis menjadi dua atau tiga terbitan. Harus dibenarkan pula bila mahasiswa bersangkutan menyusun disertasinya dalam bab-bab yang terdiri atas naskah yang siap dikirim ke majalah ilmiah.

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari pemadatan karya tugas akhir ini, misalnya dosen pembimbing dapat cepat menyelesaikan pemeriksaan naskah laporan penelitian mahasiswa asuhannya secara cepat. Lemari penyimpanan skripsi, tesis, dan disertasi di perpustakaan fakultas tidak cepat penuh, biaya penggandaan yang harus ditanggung mahasiswa tidak terlalu berat. Akan tetapi, manfaat utama yang dapat diraih dari pendekatan ini ialah bahwa mahasiswa mendapat tuntunan menulis efektif yang siap terbit, siap cetak, dan siap pakai. Karya ilmiah seperti itu harus diupayakan untuk diterbitkan agar dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa ilmuwan Indonesia juga ikut berkiprah dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Sekarang baru FMIPA IPB yang mengharuskan calon sarjananya memadatkan skripsinya dengan membatasi jumlah kata dan halaman yang disesuaikan dengan kelayakan terbitnya dalam majalah ilmiah. Selain itu, ada juga bidang studi Program Pascasarjana IPB merintis pengefektifan karya tugas akhir magister sehingga hanya sebatas yang layak diterbitkan dalam majalah ilmiah yang mapan saja.

Dengan sendirinya penyusunan skripsi sarjana, tesis, magister, dan disertasi doktor yang siap terbit itu menuntut dilakukannya penelitian berbobot sebagai dasar pijakannya. Untuk itu, pembenahan sistem pendidikan di perguruan tinggi perlu dilakukan secara drastis untuk mengejar 20–30 tahun ketertinggalan penguasaan ilmu dan teknologi kita. Banyak ilmu dan teknologi mutakhir yang serba canggih yang berpendekatan molekular atau superrenik untuk mendasari informatika harus dijadikan sarapan pagi calon ilmuwan dan perekayasa Indonesia. Kenyataan bahwa segelintir manusia Indonesia yang berkesempatan belajar di perguruan tinggi kelas satu luar negeri berhasil dan mampu bersaing dengan otak-otak terbaik dunia dalam menguasai dan mengembangkan ilmu-ilmu modern. Hal itu membuktikan bahwa mahasiswa Indonesia juga siap dan mampu menerima mata ajaran serba muskil asalkan para dosennya siap pula mengajarkannya dengan baik. Hanya dengan keberanian membanting kemudi di tengah jalan guna mengubah haluan kebijakan, bangsa kita bisa menjadi pesaing tangguh di abad XXI yang harus dicapai melalui peningkatan penguasaan ilmu dan teknologi yang dibuktikan dengan membanjirnya terbitan hasil penelitian dan pengembangan yang ditulis dengan bahasa teks yang baku, di samping terbukti dan teruji kemanfaatannya. Akan tetapi, seperti dikatakan Shakespeare, "*... thereby hangs another tail ...*"

DAFTAR PUSTAKA

- Guhardja, E. dkk. 1993. *Analisis Kinerja Majalah Ilmiah Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Johanes, H. 1981. *Kamus Istilah Ilmu dan Teknologi*. Jakarta: Indira.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1988. "Bahasa Indonesia sebagai Faktor dalam Pengembangan Ilmu dan Teknologi di Indonesia". Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rivai, M.A. 1985. "Berlakukan Pepatah 'Sambil Menyelim Minum Air' dalam Pembinaan Ilmu dan Teknologi melalui Pembakuan Istilah?" *Risalah Kongres Bahasa Indonesia IV*. Bahasa, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1988. "Memperindonesiakan Biologi". Dalam Adjat Sakri (penyunting). *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia. Menyambut 60 Tahun Sumpah Pemuda 1928 - 1988*, Bandung: ITB.

CATATAN TAMBAHAN

Makalah Prof. Dr. Anton M. Moeliono berjudul "Bahasa yang Efisien dan Efektif dalam Bidang IPTEK" yang dibacakan dalam Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi, ITB Bandung 2 Oktober 1993, terlambat saya terima untuk dijadikan pustaka acuan dalam menulis makalah ini. Namun, segala gagasan dan kesimpulan beliau ternyata didukung oleh temuan lapangan yang dilaporkan dan dibahas di atas tadi.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Gatra Bahasa Teks dalam Pengembangan Ilmu dan Teknologi
Pemakalah : Mien A. Rifai
Pemandu : Taufik Abdullah
Pencatat : Anita K. Rustapa
Slamet Riyadi Ali

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Yoyok Gandung Priyana, Majalah *Dharma Wanita*, Jakarta
 - a. Ada seorang doktor ITB yang tulisannya disunting. Setelah disunting, warna tulisan aslinya berubah. Doktor tersebut tidak mau menerima/tidak rela tulisannya diperlakukan seperti itu. Penyunting pun merasa sungkan apabila hasil kerjanya tidak diperhitungkan seperti itu.
 - b. Jadi, bukan hanya salah ilmuwan yang bahasa tulisnya tidak tertib, melainkan juga sungkannya para penyunting apabila hasil kerjanya itu tidak dianggap, jika banyak tulisan yang tidak terbit. Bagaimana menurut Pak Mien?

Jawaban:

- a. Menurut pengalaman saya, penyunting harus berani menjadi pengarang. Kalau tidak demikian, tulisan itu tidak akan diloloskan. Maksudnya, jika si penulis menolak pekerjaan penyunting, tulisan itu tidak diterbitkan.
 - b. Soal pelecehan terhadap penyunting sudah umum, selalu terjadi, karena kode etik penyuntingan di Indonesia belum berkembang. Penyunting tidak menuntut agar namanya dimuat, tetapi tidak mau dilecehkan.
2. **Pertanyaan:** Suhendar, IKIP Bandung
 - a. Apa pengertian gatra menurut Bapak?
 - b. Apa pula arti memperindonesiakan biologi?

Jawaban:

- a. Gatra berarti aspek (ini bahasa penyuntingan dalam pengembangan ilmu)
 - b. Memperindonesiakan biologi berarti membuat biologi itu berakar di Indonesia. Oleh karena itu, istilahnya memperindonesiakan biologi bukan mengindonesiakan biologi.

3. **Pertanyaan:** I Wayan Bawa, Fakultas Sastra Universitas Udayana

- a. Perlu ditegaskan wewenang penyunting. Apakah penyunting berhak mengubah maksud tulisan yang disuntingnya. Menurut saya penyunting hanya memperbaiki wadahnya, bahasanya, bukan isinya. Jika mengubah isinya/maksudnya, salah. Bagaimana tanggapan Pak Mien?
- b. Bagaimana agar naskah tidak banyak jumlah halamannya, padahal isinya sedikit? Sebaiknya tulisan itu ringkas, tepat, padat. Peraturan pembatasan jumlah halaman perlu dikembangkan, terutama untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi.

Jawaban:

- a. Penyunting itu ada dua jenis, yaitu penyunting bahasa dan penyunting isi. Kode etik penyunting memang belum ada. Penyunting sama sekali tidak boleh memasukkan gagasannya, tidak boleh mengubah maksud pengarangnya, dan lain-lain. Peraturan ini sedang disusun dan naskahnya akan diseminarkan di Cisarua, Desember yang akan datang.
- b. Sebenarnya yang saya harapkan adalah skripsi yang sudah siap terbit. Untuk itu mahasiswa dikeraskan membuat skripsi siap terbit itu cukup empat halaman saja. Ini merupakan penulisan skripsi yang dapat memeras keringat. Jadi, kelayakan terbitnya yang utama, bukan halaman.

Di IPB jumlah maksimum majalah skripsi itu dua puluh halaman. Untuk S-2 dan S-3 digunakan majalah internasional sebagai pegangan. Mereka harus menggunakan penulisan artikel dalam majalah itu sebagai pegangan untuk meningkatkan kualitas mereka. Dalam hal ini, IPB memang bekerja sama dengan luar negeri yang sumbernya adalah dari Belanda.

4. **Pertanyaan:** Krisanjaya, FPBS IKIP Jakarta

Dari pembicara beberapa hari ini, saya melihat bahwa kita berpikir terlalu dikhotomis. Kalau kita berbicara tentang bahasa Indonesia yang baku itu adalah bahasa yang tunggal sehingga orang biologi harus mengakui adanya satu bahasa Indonesia yang baku sama dengan bakunya orang-orang sosial.

Skripsi di IPB dan FMIPA berjumlah dua puluh halaman itu tidak dapat diterima untuk semua. Hal itu tidak dapat merata di semua fakultas, tergantung pada bidang ilmunya. FMIPA adalah ilmu eksakta yang dapat dijelaskan dalam dua halaman, sedangkan ilmu sosial dan biologi tidak dapat dijelaskan dalam satu atau dua halaman.

Jawaban:

Bukan jumlahnya yang penting, melainkan siap terbitnya. Pedomannya harus ada, yaitu jurnal. Jumlah halamannya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada pada salah satu majalah atau jurnal itu. Jadi, tujuan saya adalah membuat manusia Indonesia menulis sesuatu untuk diterbitkan.

Sebagai contoh, IPB sudah melakukan hal itu. Tentang jumlah kosakatanya tidak harus sama, tetapi layak terbitnya yang utama.

5. Pertanyaan: Purbo Hadiwidjojo, Editor Penerbit ITB

Yang menghambat penulisan adalah:

- a. Kemampuan terbatas, tuntutan sangat tinggi.
- b. Daya nalar sangat kurang, seperti yang saya alami ketika harus menatar para dosen dalam penerjemahan. Dari situ ia dapat mengambil simpulan bahwa menulis bagi mereka sangat sulit. Keterampilan menulis itu tak mungkin timbul secara tiba-tiba. Mereka harus dilatih menulis lebih dulu. Karena orang teknik, mereka lalu berkata, "Pekerjaan menulis adalah pekerjaan orang bahasa. Kami orang teknik, yang mau menulis hanya dengan rumus". Akan tetapi, itu hanya dalih untuk menutup-nutupi saja. Misalnya, dalam sebuah pidato pengukuhan tidak terdapat daftar bacaan.
- c. Daya ungkap yang rendah. Ini sudah ditulis dalam harian *Kompas*, misalnya tentang pemakaian kata *antisipasi* yang dipakai berulang kali. Ini karena keterbatasan bacaan penulisnya.
- d. Gairah menulis sulit dibangkitkan, seperti dalam majalah-majalah ilmiah hanya nama itu-itu saja yang tercantum.

Jawaban:

- a. Suasana sekarang akan berubah karena adanya sistem *kum*. Akan tetapi, seolah-olah ada paksaan. Sebaiknya kita mulai membenahi ilmu yang kita tekuni karena kita harus bersaing dengan luar negeri, sedangkan kita tidak membaca majalah-majalah mutakhir dari luar negeri.
- b. Untuk merangsang penulisan sebenarnya sudah ada wadah, seperti majalah *Ekonomi*, tinggi sekali honorariumnya, yaitu Rp750.000,00 per artikel.
- c. Kita coba pula skripsi S-1, tesis S-2, dan disertai S-3 harus dibuat layak terbit. Jadi, sebenarnya sudah banyak tekanan lingkungan yang dikembangkan dan akan menyuburkan terbitan Indonesia. Tetapi, diupayakan agar tidak terjadi penyuburan yang tidak sewajarnya.

6. **Pertanyaan:** Wagu Padlyati, Departemen Perindustrian

Apakah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penyunting sudah mempunyai kuasa yang didukung oleh Surat Keputusan Menteri atau Direktur Jenderal Kebudayaan?

Di Departemen Perindustrian, hal itu tidak demikian. Kemudian, penyunting tidak mengubah total tulisan itu asal angka dan arahnya tidak salah. Untuk tulisan yang terlalu panjang, dibuat subjudul.

Jawaban:

Ingin kita kembangkan bahwa bekerja di Indonesia ini tidak perlu memakai surat keputusan. Penyunting itu hendaknya bekerja secara naluriah sebagai penyunting. Jadi, karena keyakinan kita sendiri. Akan tetapi, penyunting harus bekerja sungguh-sungguh.

Biasanya tiap departemen menerbitkan majalah sendiri-sendiri karena ada tekanan *kum* itu. Ini Tidak sehat. Oleh karena itu, ada saran agar nantinya LIPI akan mengikuti aturan seperti di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sehingga nanti ada standar sosial mengenai mutu dan bagaimana penyunting harus bersikap. Pada dasarnya, penyunting harus menjadi jembatan antara pembaca dan penulis.

PERANAN ORGANISASI PROFESI DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Sjamsul Basri
Persatuan Wartawan Indonesia

1. Pengantar

Panitia Kongres Bahasa Indonesia VI ini meminta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menyumbangkan pembahasan mengenai apa peran organisasi profesi dalam pembinaan bahasa Indonesia. Pembahasan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut.

- 1) Seberapa jauh peran organisasi profesi (dalam hal ini PWI) dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa.
- 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh organisasi-organisasi profesi (PWI) dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia?
- 3) Upaya dan peran apa saja yang dapat dilakukan oleh organisasi profesi (PWI) dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa?

Dalam kerangka acuan ditetapkan bahwa tujuan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VI ini adalah memantapkan tiga peran utama bahasa Indonesia, yaitu

- 1) bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa,
- 2) bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- 3) bahasa Indonesia sebagai sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa.

Untuk menjawab tiga pertanyaan yang diajukan melalui kerangka acuan dalam kaitannya dengan upaya untuk memantapkan tiga peran utama bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa, serta peran PWI dalam pembinaan bahasa Indonesia, saya ingin menguraikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

2. Peranan Media Massa

Masih cukup banyak perbedaan pendapat di antara para ahli, pengamat, dan pelaku komunikasi mengenai peran media massa dalam suatu lingkungan kehidupan

masyarakat, entah lingkungan masyarakat yang bernama bangsa, ataukah lingkungan masyarakat yang lebih kecil dan terbatas. Pada umumnya para ahli dan pengamat komunikasi berpendapat bahwa peran media massa sangat menentukan tata nilai dan perilaku masyarakat di mana media massa itu berada, sedangkan para pelaku komunikasi boleh dikatakan belum begitu yakin terhadap peran media massa yang sangat menentukan, seperti diasumsikan oleh para ahli dan pengamat itu.

Dalam masyarakat yang sudah maju yang menganggap media massa menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat, media massa memang mempunyai peranan yang cukup dominan. Akan tetapi, dalam masyarakat yang menganggap media massa belum dianggap sebagai kebutuhan pokok—bisa karena kondisi sosial ekonomi, bisa karena tata kemasyarakatan yang masih mengutamakan komunikasi tatap muka—dominan tidaknya media massa sebagai sarana komunikasi masih bisa dipertanyakan.

Sebagai sarana komunikasi, pada dasarnya, media massa berfungsi untuk menyampaikan informasi. Di samping itu, juga berfungsi sebagai instrumen sosialisasi segala sesuatu yang menyangkut perkembangan yang terjadi di sekitar kehidupan dan perilaku masyarakat dan manusia anggotanya.

Menurut Dominick (1987), media massa juga memainkan peranan penting dalam menyebarkan sikap atau pendirian (*attitudes*), persepsi, dan kepercayaan. Malah, medium televisi dikatakan sebagai agen sosialisasi sikap yang diterminan bagi anak-anak muda.

Rivers dan Wilbur Schramm (1969) mengatakan bahwa pada umumnya kita tergantung kepada media massa mengenai bagian terbesar informasi yang kita terima mengenai tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang bersifat publik (*public figures and public affairs*). Kunczik (1985) mengatakan bahwa semua sistem sosial media massa merupakan faktor yang istimewa pentingnya dalam sosialisasi (maksudnya *social change*). Namun, peran media massa yang oleh para ahli di negara-negara maju dianggap begitu penting sebagai media komunikasi, dalam kenyatannya, di negara-negara berkembang belum sepenuhnya seperti itu karena masih cukup banyak daerah-daerah kantong (*enclaves*) di Indonesia sendiri, misalnya, yang belum terjangkau oleh media massa, baik karena kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun nilai-nilai paternalistik yang sedikit banyak masih menguasai masyarakat kita khususnya di daerah pedesaan. Akan tetapi, sejalan dengan kemajuan-kemajuan yang kita capai dengan pembangunan, tiba saatnya nanti media massa akan menjangkau kalangan *audience* yang semakin lama semakin luas sehingga peranannya semakin diterima dalam kehidupan bangsa kita.

Cepat atau lambatnya peningkatan peranan itu akan ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat yang memungkinkan mereka menjadikan media massa (cetak dan elektronik) bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu, ada ukuran minimal yang ditetapkan oleh Unesco Minima, yaitu dalam hal media cetak, minimal satu surat kabar untuk sepuluh penduduk dan media elektronik, satu radio untuk dua puluh penduduk. Mengenai radio, ketentuan Unesco

Minima sudah tercapai pada tahun tujuh puluhan. Saya tidak berhasil memperoleh angka yang akurat mengenai televisi, tetapi dengan jumlah pesawat televisi yang terdaftar pada tahun 1989 sebanyak 5.930.471 buah dan dengan jumlah penduduk sekitar 180 juta jiwa (Sensus 1990-180,38 juta) mestinya Unesco Minima sudah tercapai (satu pesawat televisi untuk setiap lima puluh penduduk).

Faktor kedua yang menentukan meningkatnya peran media massa adalah besar kecilnya koridor keterbukaan informasi dari semua sumber, baik di jajaran supra maupun infrastruktur. Sejalan dengan berkembangnya era informasi dan komunikasi serta meningkatnya proses demokratisasi secara global, dalam masyarakat Indonesia, keterbukaan informasi juga berkembang. Namun, ada kesan bahwa persepsi mengenai keterbukaan informasi masih mendua. Sikap mendua mengenai keterbukaan informasi itu disebabkan oleh adanya semacam tarik menarik antara nilai-nilai tradisional yang dianggap luhur dan nilai-nilai modern yang menuntut dikembangkannya transparansi dalam sistem yang demokratis. Jika ditinjau dari tata kehidupan berdasarkan semangat dan prinsip gotong royong yang kita kembangkan, mestinya keterbukaan (transparansi) merupakan keharusan, sepanjang hal itu menyangkut kepentingan publik.

Masih adanya sikap mendua menyebabkan media massa ditempatkan pada posisi yang-katakanlah-terjepit. Di satu pihak, media massa dituntut untuk menyampaikan informasi yang obyektif dan edukatif kepada masyarakat, di pihak lain sikap mendua mengenai keterbukaan amat menyulitkan media massa untuk memenuhi tuntutan itu. Fenomina ini menyebabkan media massa, dalam kasus-kasus tertentu, tidak jarang menghadapi pengerdilan kredibilitas. Kemungkinan berkurangnya kredibilitas media massa ini menyebabkan masyarakat kita mulai cenderung mencari informasi melalui media massa asing baik cetak maupun elektronika. Terlepas dari informasi yang disajikan oleh media massa asing itu benar dan akurat atau tidak, namun dari sumber itu masyarakat merasa memperoleh informasi pelengkap, bahkan bisa dianggap sebagai informasi "tandingan" dari informasi yang mereka peroleh dari media massa dalam negeri.

Satu-satunya kiat menghadapi informasi yang disajikan oleh media massa asing, yang tidak jarang mengalami distorsi, adalah mendorong makin berkembangnya proses keterbukaan informasi sehingga media massa nasional benar-benar dijadikan acuan yang terpercaya. Keterbukaan itu akan mempertinggi kredibilitas media massa di mata masyarakat.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merasa bersyukur bahwa keterbukaan informasi sudah ditetapkan oleh GBHN 1993 untuk dikembangkan. Antara lain, ditegaskan bahwa sasaran pembangunan lima tahun ke enam (Pelita VI) dalam bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa adalah penata kehidupan politik yang didukung oleh suasana yang memungkinkan berkembangnya budaya politik yang mengarah pada perwujudan sikap keterbukaan yang bertanggung jawab dalam komunikasi antar dan antara suprastruktur dan infrastruktur politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Apa yang ditetapkan oleh GBHN menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya. Mungkin untuk memilih dan mewujudkan format yang dianggap *pas* bagi apa yang disebut *keterbukaan yang bertanggung jawab*. Format itu masih memerlukan penyamaan persepsi. Namun, dengan itu media massa boleh dikatakan mempunyai landasan konstitusional yang tidak boleh diingkari oleh mitra interaksinya di kalangan suprastruktur dan infrastruktur untuk mengembangkan keterbukaan informasi dengan tetap dilandasi oleh tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Dalam kaitannya dengan pembinaan bahasa Indonesia, keterbukaan informasi merupakan salah satu kunci untuk mempertinggi kredibilitas media massa. Dengan tingginya kredibilitas media massa diharapkan bahasa Indonesia yang disajikannya akan dijadikan masyarakat sebagai acuan. Akan tetapi, berhasil tidaknya media massa ikut serta dalam memantapkan peran bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa, sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa, amat sangat tergantung dari masukan (*input*) yang diperoleh media massa dari pelbagai unsur yang bergerak di bidang-bidang bersangkutan.

Untuk memantapkan peran bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, faktor yang paling menentukan adalah sampai berapa jauh unsur-unsur yang terjun dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan masing-masing bidang pembangunan itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu pula, untuk memantapkan peran bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa, amat ditentukan oleh mereka yang menggeluti bidang-bidang tersebut. Namun, pemantapan peran bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan di bidang apa pun tergantung pula pada tinggi rendahnya efektivitas bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.

3. Bahasa Bersifat Dinamis

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan mengenai apa yang dipikirkan, dikehendaki, dan yang ingin diinformasikan oleh orang seorang atau kelompok orang kepada orang atau kelompok lain dengan bahasa sebagai alat. Semakin maju dan semakin berkembang suatu masyarakat, semakin maju dan berkembang pula pemikiran dan gagasan yang bersifat dinamis sehingga bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi pun juga bersifat dinamis. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi para pekerja komunikasi massa adalah bagaimana menyelenggarakan komunikasi yang efektif. Padahal, bahasa Indonesia masih kekurangan istilah yang tepat untuk melakukan komunikasi yang efektif. Kekurangan istilah itu semakin menyulitkan perkembangan bahasa Indonesia karena masyarakat bangsa kita sedang dalam proses perubahan dari masyarakat yang berkebudayaan agraris menuju masyarakat yang berkebudayaan industri. Proses perubahan itu menyebabkan tata kehidupan dan keadaan sosial budaya sedang *dalam pembentukan*. Menurut Susanto (1972) tata kehidupan dan keadaan sosial budaya yang sedang dalam pembentukan itu tidak hanya terjadi di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, tetapi

juga di seluruh dunia. Semuanya menuju pembentukan masa depan yang lebih maju. Pembentukan masa depan tergantung kepada harapan dan interpretasi masing-masing masyarakat tentang masa depan tersebut. Oleh karena itu lah, bahasa Indonesia pun juga akan selalu berkembang secara dinamis sebagai alat komunikasi.

Untuk mengatasi kekurangan (istilah) dalam bahasa Indonesia dan agar bahasa Indonesia dapat menjadi alat komunikasi yang efektif, apalagi dalam era globalisasi informasi sekarang ini, mau tidak mau di dalam perkembangan bahasa Indonesia akan terus berlangsung proses adaptasi (kata-kata atau istilah-istilah) entah yang berasal dari bahasa daerah entah dari bahasa asing. Banyak contoh tentang bahasa daerah dan bahasa asing yang diadaptasi menjadi bahasa Indonesia.

Dinamisme bahasa tentu harus tetap berpedoman pada bahasa baku. Oleh karena itu, apa yang disebut bahasa baku (standar) juga bersifat dinamis. Artinya, bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis. Selain itu, bahasa baku juga memiliki sifat kecendekiaan, atau dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Proses pembakuan bahasa berarti proses penyeragaman kaidah. Bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku merupakan bahasa yang benar dan baik (Moeliono dkk., 1989).

Ditinjau dari sudut media massa pemakaian bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, menurut pengalaman (tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain sesuai dengan bahasanya masing-masing) terjadi semacam tarik-menarik antara upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa baku dengan keharusan untuk menampung dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam kaitan itu, sangat menarik untuk dicatat, BBC (*The British Broadcasting Corp*), misalnya, pada bulan Juli 1993 lalu mengeluarkan buku panduan (*The Style Guide*) yang terdiri dari lima puluh halaman. (*Evening News*, 8 Juli 1993). BBC mengeluarkan buku panduan yang pertama kalinya selama 67 tahun usianya. Buku itu bertujuan untuk meningkatkan mutu bahasa (Inggris) siaran-siarannya dan mendorong pembicaraan mengenai penggunaan bahasa (baku).

"We may not wish to be regarded as guardians of how the nation should speak, but many of our viewers and listeners regard us in that way", kata Tony Hall, *Managing Director BBC*. (Kita tidak menginginkan agar dianggap sebagai pengawal terhadap bagaimana seharusnya bangsa berbicara, tapi banyak penonton dan pendengar kita menganggap kita seperti itu).

Bagi generasi muda khususnya, peran media massa dalam penggunaan bahasa baku (bahasa yang benar dan baik) menjadi semakin penting karena media massa merupakan alat proses pemasyarakatan (sosialisasi). Di Amerika Serikat, misalnya, banyak bukti menunjukkan bahwa media massa merupakan sumber informasi yang semakin penting mengenai topik yang semakin luas mulai dari topik politik sampai dengan topik yang mengangkut kepentingan umum.

Menurut hasil penelitian tahun terakhir 1970-an, pelajar sekolah dasar pada tingkat keenam dan ketujuh, delapan puluh persen di antaranya, mengatakan bahwa salah satu media massa merupakan sumber dari sebagian besar informasi yang diperolehnya mengenai presiden dan wakil presiden. Sekitar delapan puluh persen dari pelajar sekolah menengah mengatakan bahwa televisi sebagai sumber utamanya mengenai informasi tentang pemerintah federal dan presiden.

Saya tidak berhasil memperoleh data mengenai peran media massa di Indonesia sebagai sumber informasi bagi generasi muda (pelajar), tetapi sesuai dengan ketentuan Unesco Minima yang disinggung di atas (satu radio untuk dua puluh penduduk dan satu televisi untuk lima puluh penduduk), jumlah pesawat radio yang sudah memenuhi kriteria Unesco Minima pada tahun 1970-an dan jumlah pesawat televisi hampir enam juta pada tahun 1989 berarti Unesco Minima sudah tercapai. Bahkan, diperkirakan bahwa radio dan televisi juga merupakan sumber utama, atau paling tidak salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat termasuk generasi muda.

4. Media Massa dalam Posisi Terjepit

Dengan kedudukan media massa sebagai sumber utama atau salah satu sumber utama informasi, wajar jika mereka dituntut ikut aktif dalam pembinaan bahasa Indonesia. Namun, keikutsertaan media massa itu menghadapi problema yang mendorongnya ke suatu posisi yang katakanlah "terjepit". Saya katakan "terjepit" karena keikutsertaan media massa, di satu pihak harus memperhitungkan perkembangan budaya bangsa kita yang masih dalam proses transisi dari budaya agraris menuju budaya industri, di pihak lain media massa berhadapan dengan perkembangan globalisasi informasi yang menuntut keterbukaan. Keterbukaan itu tidak hanya menyangkut akses informasi, tetapi juga kelugasan dan kelengkapan informasi serta sikap masyarakat yang rasional dalam menerima informasi.

Dalam kaitannya dengan PWI sebagai organisasi profesi, peran yang dapat dilakukannya boleh dikatakan sangat terbatas karena tugas pokok PWI adalah pembinaan wartawan dan kewartawanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam AD/ART PWI dan Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia. Namun, Kode Etik Jurnalistik dalam Pasal 2 secara implisit pada hakikatnya juga mengandung upaya pembinaan bahasa.

Dalam Pasal 2, ayat (1) ditetapkan bahwa wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya suatu berita, lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya disiarkan. Pasal 2, ayat (2) menetapkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyiarkan hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat merugikan negara dan bangsa; dapat menimbulkan kekacauan; dapat menyinggung perasaan susila, agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang, atau suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang. Yang diatur dengan ketentuan itu adalah substansi pemberitaan atau tulisan, tapi bukan bahasa yang digunakan. Namun, dengan dinamika bahasa Indonesia yang relatif cukup tinggi,

bahasa yang digunakan dapat memberikan warna dan nuansa tertentu pada apa yang diberitakan atau diinformasikan.

Dalam kasus-kasus yang dianggap bersifat pornografi oleh masyarakat, bahasa kiasan dapat digunakan media massa yang sedikit banyak dapat menumpulkan sifat kepornografiannya itu. Begitu pula dalam kasus-kasus bersifat politis atau keamanan dan ketertiban masyarakat, bahasa yang tidak terlalu lugas sedikit banyak dapat membantu meredam kemungkinan dampak yang meledak-ledak dari terjadinya kasus-kasus tersebut.

Jika ditinjau dari tolok ukur yang rasional, semua itu dapat menimbulkan penilaian berkembangnya hipokrasi. Akan tetapi, dalam suatu kebudayaan yang mengalami proses peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan kesan hipokratis mungkin sulit dielakkan. Apalagi, dalam proses transformasi suatu sistem nilai bagi media massa umumnya cukup sulit membedakan mana yang hipokratis dan mana yang konsisten karena tolok ukurnya juga mengalami perubahan. Pendeknya, bagi PWI sebagai organisasi profesi dengan tugas pokok pembinaan wartawan dan kewartawanan, keikutsertaannya dalam pembinaan bahasa Indonesia boleh dikatakan terbatas. Keterbatasan itu ditambah lagi dengan hambatan yang timbul karena proses transformasi sistem nilai yang mencerminkan terjadinya tarik menarik antara sistem nilai lama dengan sistem nilai baru. Apalagi, persepsi mengenai sistem nilai baru itu terkesan bahwa sistem nilai baru itu belum dihayati substansinya. Sungguhpun demikian, melalui tugas pokok pembinaan wartawan dan kewartawanan, secara tidak langsung PWI juga berusaha melakukan pembinaan bahasa Indonesia, sedangkan pembinaan langsung dilakukan oleh masing-masing medium massa tempat wartawan bekerja. Pada umumnya setiap medium massa (cetak dan elektronika) melakukan pembinaan bahasa kepada para wartawannya walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda.

Pembinaan bahasa yang bersifat internal itu pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian. Pertama, pembinaan yang terprogram yang direncanakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu misalnya untuk wartawan pemula atau untuk kepentingan penyegaran. Kedua, pembinaan rutin yang melekat pada mekanisme kerja keredaksian sehari-hari.

Pembinaan bahasa yang terprogram dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut.

- 1) **Tes bahasa bagi calon wartawan.** Hasil tes bahasa merupakan faktor yang paling menentukan diterima atau tidaknya calon wartawan.
- 2) **Penataran bahasa.** Penataran ini diberikan kepada wartawan lama maupun baru secara periodik sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengundang pakar bahasa Indonesia.
- 3) **Mengundang pembimbing khusus bahasa.** Untuk pembinaan secara intensif diundang seorang yang dinilai sebagai pakar bahasa dengan tugas khusus membina bahasa para wartawan setiap hari. (*Harian Suara Karya* pernah mengundang

Dr. Ayatrohaedi—sekarang Prof. Dr. Ayatrohaedi—untuk membimbing wartawan surat kabar itu dalam berbahasa benar dan baik). Ada pula surat kabar yang menugaskan wartawannya untuk memperdalam pengetahuan mengenai bahasa Indonesia (*Tempo*). Tujuannya tidak hanya sekedar melakukan pembinaan bahasa baku, tetapi juga untuk mengembangkan gaya penulisan tersendiri.

- 4) **Pembentukan tim bahasa.** Untuk memantau seberapa jauh penggunaan bahasa yang baik dan benar (baku) dalam penyajian berita atau tulisan sehari-hari, surat kabar (antara lain *Suara Karya*) membentuk tim bahasa. Tim bahasa terdiri atas sejumlah wartawan yang dinilai memiliki kemampuan berbahasa Indonesia (tulisan) yang baik dan benar. Hasil pemantauan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sebagai masukan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Tim bahasa *Harian Suara Karya* berada di bawah bagian penelitian dan pengembangan (Litbang).
- 5) **Pengadaan buku-buku bahasa Indonesia.** Pengadaan buku-buku terutama buku-buku yang dapat dijadikan pegangan atau panduan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (antara lain, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Tata Bahasa Baku*, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbitan mengenai kumpulan makalah dan hasil seminar serta lokakarya mengenai bahasa Indonesia).

Pembinaan bahasa secara rutin dilakukan melalui suatu mata rantai kegiatan koreksi bahasa sebagai berikut:

- 1) Koreksi bahasa dilakukan mulai dari koreksi penulisan huruf, penulisan kata, tanda baca, penyusunan kalimat, sampai ke masalah alinea, dan wacana.
- 2) Kegiatan koreksi dilakukan secara berjenjang yang dimulai oleh penulis berita/tulisan sendiri. Koreksi selanjutnya dilakukan oleh redaktur, redaktur pelaksana, dan redaktur malam sebagai tapisan terakhir.
- 3) Dalam mekanisme kerja keredaksian (terutama pada surat kabar-surat kabar khususnya yang merasakannya sebagai kebutuhan) salah seorang dari jajaran pemimpin ditugasi untuk meneliti bahasa Indonesia yang tersaji setiap hari. Hasil penelitian berikut koreksi terhadap kelemahan dan kekurangan yang ditemukan itu dikemukakan dalam rapat evaluasi yang biasanya sekaligus dijadikan rapat perencanaan harian.

Gambaran mengenai pembinaan bahasa secara internal yang saya kemukakan tersebut tentu bukan merupakan gambaran umum untuk semua surat kabar di Indonesia. Namun, surat-surat kabar yang menganggap dirinya ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan bahasa Indonesia yang benar dan baik, biasanya melakukan pembinaan dengan rasa kepedulian yang cukup tinggi. Bahkan, ada surat kabar yang melakukan pembinaan bahasa secara lebih intensif dengan mengadakan redaktur bahasa. Namun, hambatan bagi kelancaran usaha dan kegiatan pembinaan bahasa tetap saja ada, terutama hambatan yang bersifat eksternal. Seperti saya singgung di atas tadi, masyarakat kita sedang dalam proses perubahan dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri sehingga kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia

sedang dalam proses pembentukan (Susanto, 1972). Hal ini menyebabkan kegiatan peliputan dan pencarian informasi oleh wartawan berhadapan dengan kondisi kultural masing-masing sumber informasi.

Jika kondisi kultural sumber informasi masih dipengaruhi oleh peninggalan tata nilai lama yang menganggap kelugasan informasi belum sepenuhnya bisa diterima, wartawan yang melakukan peliputan akan sulit menyajikan hasil peliputannya dengan bahasa yang sederhana, lugas, dan segera dapat ditangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Malah, menurut pengalaman, tidak jarang terjadi kasus pemberitaan/penulisan yang kemudian dibantah oleh sumber berita. Padahal, informasi yang dikutip dari sumber berita itu telah direkam dengan alat perkam (*tape recorder*) yang sekarang ini sudah menjadi bagian dari alat kelengkapan wartawan pada umumnya.

Ada wartawan yang memang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan apa yang dituduhkan sebagai "pemutarbalikan" atau yang mengungkapkan fakta secara sepotong-sepotong. Kalau hal itu terjadi dengan kesengajaan, ini jelas bertentangan dengan kode etik profesi wartawan. Akan tetapi, kalau terjadi dengan tidak sengaja, kasus seperti itu bisa timbul karena kurang dikuasainya permasalahan yang diliput oleh wartawan yang bersangkutan, atau bisa pula karena sumber informasi tidak mampu menjelaskan dengan lugas kejadian-kejadian yang diliput oleh wartawan. Untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan seperti itu, sumber informasi dapat atau malah harus menggunakan apa yang disebut "hak jawab" yang wajib diberikan setiap surat kabar.

5. Penutup

Demikianlah uraian saya sebagai wakil PWI Pusat. Dari uraian itu, ada beberapa kesimpulan yang ingin saya garis bawahi.

Pertama, PWI mempunyai kewenangan dan peluang yang terbatas dalam melakukan pembinaan bahasa Indonesia kepada para wartawan anggotanya. Namun, pembinaan tidak langsung dapat juga dilakukan PWI melalui upaya pentaatan kode etik wartawan Indonesia oleh para wartawan.

Kedua, pembinaan bahasa langsung dilakukan oleh masing-masing media massa dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda. Ada pembinaan yang dilakukan secara terprogram, ada pula secara rutin. Kedua jenis pembinaan itu dilakukan oleh masing-masing media massa sesuai dengan kebutuhan serta kadar kepeduliannya terhadap pembinaan bahasa yang benar dan baik.

Ketiga, pembinaan bahasa ikut dipengaruhi (dihambat) oleh kondisi kultural bangsa Indonesia yang masih dalam proses transisi dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Hal itu menyebabkan wartawan--katakanlah--terdorong ke posisi penggunaan bahasa yang kurang lugas.

Keempat, harus diakui ada juga wartawan yang dengan sengaja melakukan apa yang disebut "pemutarbalikan" fakta informasi. Wartawan jenis ini jelas melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesinya. Kewajiban kita untuk mengatasinya karena pada akhirnya media massa adalah cermin dari masyarakat di mana ia berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dominic, Joseph R. 1987. *"The Dynamics of Mass Communication"*. Second Edition., New York.
- Kunczik, Michael. 1985. *Communication and Social Change*. Bonn.
- Moeliono, Anton M. dkk. 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1993. *Garis-garis Besar Haluan Negara*, Jakarta.
- Persatuan Wartawan Indonesia, Pusat. 1990. "Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik". Jakarta.
- Rivers, William L. dan Wilbur Schramm. 1969. *Responsibility in Mass Communication*. Revised Editoan. New York.
- Shepherd, Leslie. 1993. *BBC to Cleanse English*. London: The Evening News.
- Susanto, Astrid S. 1972. "Sumbangan Peneliti Bahasa untuk Pengembangan Komunikasi". Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

PERANAN PROFESI KEDOKTERAN DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Kartono Mohamad
Ikatan Dokter Indonesia

Pendidikan bidang kedokteran di Indonesia dimulai pada tahun 1951 dengan dibukanya Sekolah Dokter Jawa atas prakarsa Willem Bosch yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Hindia Belanda (1845–1853). Meskipun belum diberikan status "disamakan" dengan pendidikan kedokteran di Belanda sendiri, kurikulum di Sekolah Dokter Jawa sudah mencakup enam belas mata pelajaran. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa dalam Sekolah Dokter Jawa, semua siswa diwajibkan mempelajari bahasa Melayu, bahkan Direktur Sekolah Dokter Jawa yang pertama, Pieter Bleeker, menerbitkan diktat-diktat dalam bahasa Melayu yang merupakan penerjemahan dari buku-buku pelajaran berbahasa Belanda.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa usaha untuk mengindonesiakan istilah-istilah biologi, botani, kimia, dan kedokteran sudah dimulai pada tahun 1851 tersebut. Sayang sekali kita tidak lagi dapat menemukan diktat-diktat yang diterbitkan oleh Pieter Bleeker tersebut sehingga kita tidak dapat melacak perkembangan bahasa Indonesia dalam bidang ilmu-ilmu tadi. Meskipun demikian, dengan semakin banyaknya siswa Indonesia yang mahir berbahasa Belanda sejak mereka masih di tingkat sekolah menengah, pendidikan kedokteran di masa GHS (*Geneeskundige Hoogeschool*) kembali menggunakan bahasa Belanda dan upaya untuk menerbitkan diktat-diktat atau buku-buku kedokteran dalam bahasa Indonesia tidak terdengar lagi. Usaha penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan kedokteran muncul lagi semasa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang itu, Dr. R.D. Asikin W.K. dan Drs. Ahmad Ramali misalnya, telah menerbitkan buku teks kedokteran berbahasa Indonesia yang berjudul *Diagnosa Kimia dan Tafsir Kliniknya*. Barangkali buku yang diterbitkan oleh *Gunseikanbu Kokumin Tosyokyoku* (Balai Pustaka) di tahun Jepang 2605 itu merupakan buku teks kedokteran berbahasa Indonesia yang pertama.

Dalam buku tersebut, kedua penulis nampak berupaya untuk sedapat mungkin menerjemahkan berbagai istilah kimia dan kedokteran ke dalam bahasa Indonesia, misalnya:

- (a) azat telur untuk protein (sekarang ini protein lebih lazim diterjemahkan sebagai zat putih telur);
- (b) kena-hama untuk infeksi;

- (c) hati untuk *liver*;
- (d) otot untuk *musculus (muscle)*;
- (e) sakar susu untuk *lactose*;
- (f) hamud empedu untuk *bilirubin*.

Akan tetapi, upaya kedua dokter di atas nampaknya tidak segera diikuti oleh yang lain sehingga banyak istilah yang mereka usulkan itu tidak pernah dikenal lagi di kalangan kedokteran pascakemerdekaan. Meskipun demikian, peranan kalangan profesi kedokteran dalam pengembangan bahasa Indonesia tetap masih berlanjut, terutama karena bahasa Indonesia makin banyak digunakan dalam pengajaran kedokteran di tahun-tahun sesudah kemerdekaan. Ini mendorong banyak dokter pengajar yang mencoba menggunakan istilah Indonesia untuk pengganti istilah kedokteran yang semula masih dalam bahasa Belanda atau Latin. Kita catat misalnya Prof. Zuidema dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang memperkenalkan istilah "baji mati jantung" untuk *myocard infarct* meskipun kemudian istilah tersebut tidak pernah dipakai lagi di kalangan kedokteran saat ini. Di Universitas Indonesia, almarhum Prof. Dr. Sutomo Tjokronegoro merupakan pengajar kedokteran yang paling aktif memperkenalkan istilah Indonesia untuk pengganti istilah asing, terutama di bidang patologi. Dari beliau kita mengenal istilah "radang" sebagai pengganti *inflammation*, "serbukan" untuk *infiltration*, "pasca" untuk pengganti *post* yang berarti 'sesudah', "pewarnaan" untuk *staining*, dan sebagainya.

Peranan profesi kedokteran dalam pengembangan bahasa Indonesia tersebut masih akan berlanjut karena selain ilmu kedokteran masih terus berkembang, juga karena di kalangan kedokteran dikenal adanya pendidikan kedokteran berkelanjutan (*Continuing Medical Education*). Selama bahasa Indonesia untuk kepentingan sains belum mapan benar, usaha untuk memperkenalkan istilah-istilah baru di kalangan kedokteran masih akan berlanjut. Di awal tahun 60-an, misalnya, beberapa pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memperkenalkan istilah "air kemih" sebagai penghalus istilah "air kencing", "sawar" untuk *barrier* (sawar darah otak untuk *blood brain barrier*), "jasad renik" untuk *mikroba*. Di tahun 80-an, beberapa dokter memperkenalkan istilah "renjatan" untuk pengganti *shock* yang bukan berarti 'kejutan' tetapi *shock* dalam arti keadaan ketika tekanan darah mendadak turun sampai sangat rendah yang menyebabkan penderita kehilangan kesadaran.

Dari pengamatan di atas terlihat bahwa tidak semua istilah kedokteran Indonesia yang dicoba diperkenalkan kemudian diterima dan dipergunakan oleh kalangan yang lebih luas. Misalnya, istilah "baji mati jantung" yang diperkenalkan oleh Prof. Zuidema, atau "hamud empedu" dan "sakar susu" yang diperkenalkan oleh Dr. Asikin dan Ahmad Ramali. Adakalanya dua istilah yang berbeda untuk satu hal yang sama dapat diterima kedua-duanya sekaligus sehingga kita mendengar, misalnya, istilah "payah jantung" dan "gagal ginjal" untuk pengganti istilah *failure* dalam hal *heart failure* dan *renal failure*, atau "jaras" dan "saluran" untuk pengganti *tract*. Dalam ilmu neurologi, *tract* diterjemahkan sebagai 'jaras', dan dalam ilmu penyakit dalam

diterjemahkan sebagai 'saluran'. Penerjemahan istilah *medisch* (Belanda) dan *medic/medical* (Inggris) para dokter tampak kebingungan dan tidak tahu kapan harus menggunakan kata *medis* dan kapan harus *medik*.

Diperkenalkannya Ejaan Baru atau Ejaan yang Disempurnakan akhir-akhir ini ternyata banyak menimbulkan kerancuan dalam upaya pengindonesiaan bahasa tulisan di kalangan kedokteran Indonesia, terutama untuk istilah-istilah yang semula menggunakan bahasa Latin yang kemudian sudah diadaptasikan ke bahasa Inggris. Adakah kita harus kembali ke bahasa Latinnya atautkah kita langsung mengindonesiakan dari istilah Inggrisnya? Misalnya, asam salisilat (dari *salicylic acid*) atautkah asidum salisikum (dari *acidum salicylicum*). Pedoman yang baku untuk pengindonesiaan istilah Latin untuk bidang kedokteran ini belum ada, atau kalau telah ada belum dimasyarakatkan di seluruh fakultas kedokteran. Selanjutnya, haruskah *c* yang dibaca sebagai *s* (misalnya dalam *acidum* di atas) selalu harus ditulis dengan *s*? Lalu, bagaimana harus menulis *caesaria* dalam EYD? Bagaimana pula menuliskan *labioschisis* menurut EYD? Beberapa dokter menulisnya *labioskisis*, yang lain lagi *labioskhis*. Demikian pula untuk pengindonesiaan *bronchus* ada yang menuliskannya sebagai *bronkus* dan ada yang *bronkhus*. Terhadap istilah *medical record* saat ini ada berbagai terjemahan, yaitu 'rekam medis (atau medik)', 'catatan medis (atau medik)', dan 'dokumen medis (atau medik)'.

Di masa-masa yang akan datang, kerancuan ini akan semakin besar jika pedoman yang baku tidak disebarkan dan dilatihkan di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, karena semakin banyak fakultas kedokteran dengan staf pengajar yang datang dari berbagai angkatan dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Apakah peranan profesi kedokteran dalam pengembangan bahasa Indonesia akan bersifat positif atau negatif (yaitu menambah kerancuan) bergantung pada hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Lauw, G.M., *De Dokter Djawaschool*, Institut voor Geschiedenis der Geneeskunde, KU Nijmegen, 1987.
- 's-Rijksweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865)*, Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26 September 1987 onder redactie van D. de Moulin.
- Naskah Lengkap Kursus Penjagar dan Penambah Ilmu Kedokteran IV, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Djakarta, 28 November-9 Desember 1966.
- Kursus Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran ke-8, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Naskah Lengkap, Jakarta 1974.
- KPPIK-X FKUI, Jakarta 1979.

BAHASA INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Prijono Tjiptoherijanto
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Sasaran utama dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap I yang dimulai secara terencana dan sistematis sejak Pelita I adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di dalam pelaksanaannya, proses pembangunan yang berlangsung tersebut harus dapat meningkatkan pendapatan nasional dan sekaligus harus menjamin pembagian pendapat yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan.

Mengingat bahwa peningkatan pendapatan nasional menjadi tujuan utama pembangunan nasional, pembangunan ekonomi tidak dapat dielakkan menjadi titik berat pembangunan nasional selama 25 tahun terakhir yang akan segera berakhir pada tanggal 31 Maret 1994. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional tersebut, proses pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada yang menuju terwujudnya industrialisasi dengan sektor pertanian sebagai pendukungnya. Karena hanya dengan pertumbuhan sektor industri yang makin berkembang, percepatan peningkatan pendapatan nasional dapat dilakukan. Sementara itu, sektor pertanian tetap perlu mendapat perhatian karena kehidupan tenaga kerja yang cukup besar masih tergantung pada sektor ini.

Proses industrialisasi sudah barang tentu akan membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, bukan saja perubahan di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang kehidupan sosial budaya masyarakat. Seperti pernah diingatkan oleh Douglas North, pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 1993 dari Washington University, dalam bukunya, *Institutions and Economic Theory*, hubungan antarwarga masyarakat, baik perilaku individu maupun kelembagaan dan pranata sosial lainnya dalam masyarakat mengalami perubahan dan ikut berperan dalam upaya menggapai proses kemajuan yang dibawa oleh semangat industrialisasi yang menjadi jiwa pembangunan ekonomi suatu negara.

Proses pembangunan yang tengah berlangsung tersebut tidak kebal dari pengaruh-pengaruh dunia luar. Arus globalisasi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi telah menyeret masyarakat setiap negara untuk menerima kenyataan dan perubahan. Bukan saja bergesernya tingkah laku individual, melainkan

juga cara berpikir masyarakat dan juga proses pengambilan keputusan agaknya ikut menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Produktivitas dan efisiensi merupakan kata kunci yang sering terdengar. Setiap langkah dan kebijakan disesuaikan dengan keinginan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tersebut. Bahkan, kehidupan sehari-hari juga mengacu pada kata kunci itu.

Berbagai pengaruh tersebut membekas pada kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan komunikasi. Keinginan agar setiap pesan yang disampaikan bisa diterima dengan lengkap menyebabkan adanya penyesuaian dalam menggunakan saluran komunikasi dan sekaligus mengenal pendengarnya. Penggunaan kata-kata yang menjadi asing dalam perkembangan bahasa nasional, pemakaian isyarat-isyarat yang mungkin ganjil dalam kehidupan berbudaya suatu masyarakat, menjadi syah, atas nama pembaruan dan globalisasi. Keperluan akan adanya komunikasi yang produktif dan efisien memaksa penggunaan singkatan yang belum sempat dibakukan dalam kehidupan bahasa nasional. Upaya untuk memahami kemajuan dunia luar, seringkali mengorbankan tatanan kalimat yang *apik* dan sederhana. Agaknya, revolusi komunikasi akibat perkembangan teknologi komunikasi telah memperkosa penggunaan bahasa nasional dalam komunikasi global.

Upaya untuk mengembalikan bahasa nasional kepada masyarakat pemiliknya, berpulang pada prioritas yang diletakkan dalam setiap strategi dan tahap pembangunan nasional. Sementara itu, stabilitas politik dan ekonomilah yang diharapkan. Jangan terlalu bermimpi stabilitas budaya, apalagi bahasa, mendapat perhatian selayaknya. Budaya dan bahasa harus mengikuti, selaras dan serasi (seperti istilah-istilah yang populer saat ini) dengan perkembangan politik dan ekonomi. Upaya untuk menjaga bahasa nasional dan sekaligus budaya bangsa, bukan merupakan urutan pertama seperti yang diusahakan masyarakat serta pemerintah Jepang setelah Perang Dunia II. Oleh karena itu, akan sia-sialah keinginan untuk menempatkan bahasa nasional dalam kedudukan utama, seperti pada saat mengikrarkan Sumpah Pemuda 1928, bila tidak diserasikan dengan perkembangan politik dan pembangunan ekonomi yang terjadi. Kebangkitan nasional yang kedua bukan lagi diwarnai oleh semangat kebangsaan dan kemerdekaan, tetapi merupakan antisipasi dari proses industrialisasi dan pengaruh globalisasi. Ini yang perlu disadari.

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME DAN BAHASA INDONESIA

Imam Sucipto Umar
Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia

Dalam forum diskusi panel kali ini, menurut saya, paling tidak kita akan mempermasalahkan (a) nilai-nilai ekonomi dan industrialisasi pada umumnya dan (b) sarana/prasarana yang mendukung kegiatan industrialisasi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi rancang bangun dan rekayasa (*engineering*) dari bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Permasalahan ini akan tetap relevan dan merupakan hal yang selalu aktual, dalam proses industrialisasi yang akan kita tingkatkan secara besar-besaran dalam Pembangunan Jangka Panjang II. Demikian juga dalam proses globalisasi yang dinamis dan sangat cepat, yang dalam hal ini *geo-economics* acapkali mengalahkan *geopolitics*.

Penguasaan dan pendalaman bahasa Indonesia di lingkungan kegiatan industrialisasi dalam hubungannya dengan luar negeri/luar Indonesia harus "digandengkan" dengan penguasaan bahasa internasional yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Tanpa penguasaan bahasa Inggris, terutama istilah dan kata-kata yang digunakan dalam kegiatan bisnis, industri, teknologi, dan perdagangan, hubungan/komunikasi dan interaksi dengan mitra luar negeri tidak akan berjalan dengan mulus dan lancar. Untuk kegiatan industrialisasi di dalam negeri, penguasaan bahasa Indonesia dengan baik idealnya dibarengi dengan penguasaan mengenai (a) aspek budaya dan filosofi hidup bangsa dan rakyat Indonesia dan (b) aspek budaya dan filosofi dari berbagai ragam suku bangsa Indonesia.

Untuk kegiatan industrialisasi di dalam negeri, penguasaan mengenai berbagai aspek budaya dan filosofi hidup ini sangat diperlukan karena:

- (a) masih lebarnya kesenjangan dalam pendidikan, padahal pendidikan cenderung untuk meningkatkan kemampuan berusaha dan/atau keterampilan;
- (b) kesenjangan dalam status sosial-ekonomi masyarakat (adanya lapisan-lapisan konglomerat dan pengusaha besar yang masih sangat besar perbedaannya (secara sosial-ekonomi) dengan pengusaha kecil, pengusaha menengah, kegiatan informal, pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan sebagainya);
- (c) perbedaan kemajuan industrialisasi di daerah-daerah, di kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, dan sebagainya;
- (d) tantangan perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis;

- (e) bahasa adalah alat (*tool*) dan budaya adalah keseluruhan cara berpikir; apabila kita hanya mempelajari bahasa saja, kita akan mengalami kesulitan dalam mengomunikasikannya dan menerapkannya dalam upaya meningkatkan kemajuan rakyat.

Banyak istilah dalam bidang teknik, teknologi, dan rekayasa (*engineering*) berasal dari luar. Sebagian telah dapat diambil alih, atau ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Namun, dengan cepat banyak sekali tumbuh istilah atau kata baru, apalagi dengan tumbuhnya *information technology* (IT) dan keterbukaan (*opening-up*) negara dan bahasa Indonesia. Akibatnya, istilah-istilah yang baru muncul sering terpaksa ditelan mentah-mentah, atau diindonesiakan apa adanya.

Contoh yang dewasa ini berkembang di Indonesia dan di dunia internasional: *laptop computer, computer aided design, computer integrated manufacturing, benchmarking, concurrent engineering, reverse engineering, optic fiber, laser, liquid-crystal flat panel displays, intelligent manufacturing, artificial intelligence, vision and scanning, prestressed, robotic, fluidised, dan sustainable development.*

Di samping itu, ada istilah asing yang sering digunakan atau yang sudah diindonesiakan, misalnya *universitas, industri, teknologi, sains, profesional, insinyur, riset, ekosistem, informasi, simulasi, inovasi, video-recorder, nuklir, energi, agribisnis, satelit, entropi, dan masa*

Dalam melakukan kegiatan ekonomi internasional dan dalam kegiatan kemitraan (*partnership*) dengan dunia usaha luar negeri, kita dapat menyewa konsultan atau pengacara dan mungkin juga penerjemah. Akan tetapi, dalam mengambil keputusan akhir, dengan mutu yang baik, penguasaan bahasa internasional (baca bahasa Inggris) tampaknya sangat diperlukan oleh profesional dan manajer.

Peranan sumber daya manusia dalam proses industrialisasi pada masa mendatang akan semakin penting. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengembangan kemampuan profesionalnya, organisasi profesi dapat melakukan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya spesifik, maupun yang bersifat umum. Dalam menjalankan peranan dan fungsinya tersebut, organisasi profesi harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dan dengan pihak dunia usaha. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi profesi Persatuan Insinyur Indonesia, dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme, adalah dengan mengembangkan sistem registrasi sarjana teknik/insinyur dan sistem akreditasi perguruan tinggi teknik bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan menyelenggarakan kegiatan registrasi dan akreditasi tersebut, diharapkan dapat ditumbuhkan motivasi bagi sarjana teknik untuk meningkatkan profesionalismenya, keterampilannya, dan kemampuan inovatifnya.

Dengan meningkatnya kemampuan profesionalisme, diharapkan kesenjangan komunikasi intradisiplin dan antardisiplin teknik, dapat dikurangi. Bahkan, mungkin dapat dihindari. Penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik, pembakuan istilah dan pembinaannya sekaligus dapat dilaksanakan dalam kegiatan komunikasi, baik lisan dan dialog langsung, maupun melalui media cetak dan media elektronik.

Komunikasi dengan lapisan masyarakat lainnya barangkali masih menghadapi permasalahan yang dapat ditanggulangi dengan, misalnya, menyusun petunjuk pelaksanaan (*manual*), seperti dalam kegiatan (a) pendidikan, (b) latihan, (c) penyuluhan, dan (d) instruksional yang mudah dimengerti dan dikomunikasikan. Kemudian, disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya setempat, serta forum dan sifat kegiatannya.

Dalam penyusunan petunjuk teknis itu organisasi profesi Persatuan Insinyur Indonesia dapat dilibatkan, di pusat, di daerah-daerah, tentu saja tergantung dari kebutuhannya

Kondisi yang sangat menguntungkan bagi negara-negara tetangga kita, terutama Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam adalah kemampuan para pengusaha dan tenaga profesionalnya dalam berkomunikasi dengan mitranya, di dalam negeri dan di luar negeri, yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris. Koreksi telah dilaksanakan oleh pimpinan negara Filipina dan Malaysia sejak 2-3 tahun terakhir akibat upaya *nation building*, bahasa Tagalog dan bahasa Melayu menjadi bahasa negara dan bangsa yang semakin mengemuka. Sementara itu, dalam percaturan internasional sangat dibutuhkan kemampuan dalam bahasa Inggris. Koreksi tersebut terutama dilakukan terhadap kurikulum di sekolah lanjutan dengan menekankan pentingnya bahasa Inggris agar dikuasai secara memadai oleh generasi muda.

Proses *nation building* memang merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Timbul pertanyaan tentunya pada diri kita "apa sesungguhnya esensi dari kebangsaan itu (yang tumbuh secara bertahap, memakan waktu lama, dalam proses *nation building* tadi)?" Para ahli dan negawaran pada umumnya bersepakat bahwa esensi paham kebangsaan adalah hasrat yang kuat untuk ke bersamaan. Dari pemahaman terhadap hakikat kebangsaan itu, kita dapat bergerak satu langkah lagi, yaitu mewujudkan kebersamaan itu ke dalam kenyataan, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam.

Kebersamaan yang merupakan ciri khas konsep kebangsaan harus merupakan realitas yang konkret dan bukan yang abstrak. Kenyataannya sekarang adalah bahwa bangsa Indonesia relatif masih harus mengejar ketertinggalannya dari bangsa lainnya. Tingkat pendapatan per kapita Indonesia sekarang ini, sekitar US\$ 650, masih termasuk kategori "bawah". Kesenjangan sosial masih merupakan pekerjaan rumah yang harus kita atasi. Kondisi ketertinggalan itu juga tercermin dengan rendahnya tingkat konsumsi kertas per kapita per tahun (1992):

Indonesia	9,6 kg;
Filipina	8,9 kg;
Thailand	27,1 kg;
Malaysia	61,2 kg;
Singapura	217,4 kg;
Jepang	228,4 kg;
USA	311,4 kg.

(Sumber: Paper Mr. Suresh Kilam pada Rakon IKD, 13-14 Oktober 1993 di Batam)

Kertas sangat penting, karena melalui media ini banyak dilakukan interaksi antarmanusia dan sangat berperan dalam semua kegiatan kehidupan termasuk ekonomi dan budaya.

Tidaklah mengherankan bahwa untuk mengatasi kesenjangan sosial, dan untuk pertumbuhan kita memprioritaskan pembangunan dalam bidang ekonomi, di samping pengembangan sumber daya manusia. Pusat perhatian kita adalah membangun dan mengoperasikan lembaga serta pranata yang dapat menjadi andalan dalam tahapan pembangunan selanjutnya. Meskipun pada dasarnya kita menganut paham evolusi dan *incremental* yang kita hadapi adalah perubahan dan gejolak yang sangat cepat dan dinamis. Kalau pengembangan bahasa Indonesia dan pembinaan bahasa Indonesia tidak seirama dan tidak selaras dengan kebutuhan lembaga dan pranata-pranata yang menjadi andalan kita dalam pembangunan, saya khawatir upaya untuk mewujudkan kebersamaan ke dalam kenyataan menghadapi kendala dan permasalahan yang cukup serius di masa mendatang. Kekhawatiran saya ini timbul karena kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi, meskipun telah mengalami kemajuan-kemajuan, masih terasa sangat berat. Terbukti misalnya adanya rencana Proyek Inpres Desa Tertinggal, yang akan dimulai pada Repelita VI yang akan datang. Kesenjangan tersebut dengan sendirinya akan membersihkan dampak pula pada perasaan kebangsaan: persamaan kepentingan hari ini serta persamaan aspirasi ke masa depan.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : 1. Peran Organisasi Profesi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia
2. Peranan Profesi Kedokteran dalam Pembinaan Bahasa Indonesia
3. Pengembangan Profesionalisme dan Bahasa Indonesia

Panelis : 1. Syamsul Basri (PWI)
2. Kartono Mohammad (IDI)
3. Iman Sucipto Umar (PII)

1. **Tanggapan:** Iman Sucipto Umar dari PII

- Istilah/sebutan *insinyur* bukan sebagai gelar akademik.
- Lulusan fakultas teknik mendapat gelar sarjana teknik.
- Gelar profesi *insinyur* diberikan setelah yang bersangkutan menghasilkan karya-karya sesuai bidangnya.
- Bahasa Indonesia harus cepat mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.
- Kalau mau mengembangkan profesionalisme, seseorang harus menguasai sekaligus bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya.

2. **Tanggapan:** Syamsul Basri dari PWI terhadap PII dan IDI

- Media massa mengalami kesulitan menggunakan istilah-istilah kedokteran yang belum dibakukan.
- Pusat Bahasa seharusnya lebih banyak berperan dalam memperkenalkan istilah-istilah baru dalam berbagai disiplin ilmu.
- Pembinaan bahasa Indonesia memang harus berlandaskan kepada wawasan kebangsaan.

3. **Tanggapan:** Kartono Muhammad dari IDI terhadap PWI dan PII

- Media massa memang sangat berperan dalam pembinaan bahasa Indonesia, baik untuk bahasa lisan maupun tulisan. Namun, pembinaan tersebut belum dirasakan efektif karena banyaknya pemakaian istilah asing oleh media massa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya "polisi bahasa" pada setiap media massa.
- Dunia kedokteran mengalami kesulitan dalam menerjemahkan istilah-istilah bidang itu ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, istilah AIDS, bidang kedokteran belum mendapatkan istilah Indonesia yang tepat untuk penyakit tersebut.
- Pembinaan wawasan kebangsaan akan mengalami kesulitan jika tidak ada bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan bahasa Indonesia harus sejalan dengan pemantapan wawasan kebangsaan, mengingat

sebagian besar penduduk Indonesia masih menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka.

- d. Pemasyarakatan kembali kebiasaan menulis dengan bahasa Indonesia yang benar khususnya kepada para mahasiswa jurusan eksakta.
- e. Gelar akademik bagi lulusan fakultas kedokteran adalah sarjana kedokteran. Dokter adalah sebutan profesi.

4. **Tanggapan:** Kusnadi Hardjasumantri, Jakarta

- a. Diperlukan adanya istilah-istilah dalam bahasa Indonesia dalam bidang hukum nasional, khususnya perdata dan hukum adat. Persahi hendaknya dilibatkan dalam pembentukan istilah hukum di Indonesia.
- b. Peranan media massa sangat penting. Pemakaian istilah oleh wartawan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Banyak istilah lingkungan yang rancu digunakan oleh pers. Jurnalisme lingkungan penting dikuasai oleh wartawan yang bertugas meliput bidang lingkungan. Misalnya, pelestarian lingkungan dan pelestarian kemampuan lingkungan. Keduanya merupakan istilah yang berbeda.

Jawaban: dari PWI

- a. PWI sering mengadakan sarasehan bagi wartawan yang meliput bidang lingkungan.
- b. Di kalangan wartawan ada keinginan agar masyarakat dapat mengoreksi bahasanya sendiri.
- c. Media massa merasakan sulitnya mencari padanan kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

5. **Tanggapan:** Ahmad Darwin Nasution, SMA Negeri 2, Medan

- a. Profesi dokter sangat berpengaruh pada anak-anak. Tulisan tangan mereka banyak yang tak terbaca dan kalau ditegur oleh guru, mereka menjawabnya "ini tulisan dokter".
- b. Media massa banyak melakukan kesalahan dalam pemenggalan ejaan.
- c. Penulisan gelar *dokter* harap dibetulkan.

6. **Usul:** Muhammad Ramlan, Universitas Gadjah Mada

- a. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa agar segera menangani istilah-istilah kedokteran.
- b. Penulisan ejaan dalam bidang kedokteran dan nama-nama obat terdapat dua aliran, yaitu (1) aliran yang memakan bahasa latin dan (2) aliran yang memakai bahasa Indonesia.

7. **Pertanyaan:** Indiyah Imran, FPBS IKIP Bandung
 - a. Manakah yang benar penulisan gelar *dokter*. Apakah *Dr.* atau *dr*? Usul agar penulisan dokter --> *Dr.* dan doktor --> *DR*.
 - b. Setuju dengan pencarian istilah kedokteran dalam bahasa Indonesia?
 - c. Hendaknya media massa jangan membuat istilah-istilah yang membingungkan masyarakat. Misalnya, pelajar dan pembelajar atau pun penggunaan kata "jebolan" bagi lulusan suatu sekolah?
8. **Usul:** Boyke Sukapdjo, Kantor Berita Antara/KNI
 - a. Kongres PWI yang akan datang agar juga membicarakan masalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - b. Dewan Pers harus memiliki staf untuk meneliti bidang kebahasaan.
 - c. PWI harus berani menegur media massa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
9. **Kesan:**
 - a. Organisasi profesi agak lambat dalam memberi masukan istilah-istilah kepada media massa.
 - b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kurang siap dalam memenuhi permintaan masyarakat. Istilah *jebolan* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* baru: ialah 'lulusan suatu sekolah; keluaran suatu sekolah (*droup out*)'.

Jawaban: dari PII

Setuju kerja sama antara organisasi profesi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Jawaban: dari IDI

- a. Dokter bukan gelar akademik, melainkan nama profesi. Gelar lulusan fakultas kedokteran --> Sarjana Kedokteran, disingkat S. Ked.
 - b. IDI sedang menyusun penulisan gelar profesi bidang kedokteran dan spesialisasinya.
 - c. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hendaknya menyebarluaskan buku panduan istilah-istilah kedokteran ke seluruh fakultas kedokteran di Indonesia.
 - d. Istilah "bayi tabung" diperkenalkan oleh media massa. Di USA disebut *test tube baby*, sedangkan istilah kedokterannya adalah "pembuahan infiltro" (?)
10. **Pertanyaan:** Bruce Frederick Jarvis, Penerjemah dan Editor, Jakarta
 - a. Pimpinan harus memberi contoh pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- b. Masalah kebahasaan dalam organisasi profesi sangat luas. Mengapa dalam penggunaan takaran/keterangan pada etiket obat masih banyak yang berbahasa Inggris?
- c. Usaha apa yang dilaksanakan oleh organisasi profesi untuk menggunakan bahasa Indonesia ragam tulisan yang benar?

Jawaban: dari IDI

- a. Aturan pemakaian obat dalam bahasa Inggris hanya untuk gengsi karena masyarakat masih senang dengan yang berbau asing. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, takut dikira obatnya buatan dalam negeri.
- b. Dimasyarakatkan kembali kebiasaan menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada mahasiswa eksakta. Misalnya, ujian esai.

PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERNALAR, KREATIVITAS, DAN BUDAYA TULIS MELALUI JALUR PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sabarti Akhadijah M.K.
IKIP Jakarta

"Tiada kemanusiaan tanpa bahasa,
tiada peradaban tanpa bahasa tulis.
Manusia berpikir tidak melulu
dengan otaknya"
(Laird, 1953)

1. Pendahuluan

Pendidikan diselenggarakan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi-pribadi anggota masyarakat yang mandiri. Pribadi yang mandiri adalah pribadi yang secara mandiri mampu berpikir, menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, melihat permasalahan serta menemukan cara pemecahan baru yang bernalar dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kemandirian itu, mereka diharapkan bukan saja mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat serta mampu mengarahkan perubahan sesuai dengan tujuannya sendiri (Sudjatmoko dkk., 1986), melainkan juga mampu melakukan perubahan dan menciptakan sesuatu yang baru. Kemandirian ini terbentuk melalui kemampuan berpikir nalar (kemampuan bernalar) dan kemampuan berpikir kreatif yang mewujudkan kreativitas.

Dengan akal budi, kemampuan berbahasa, dan kemampuan belajar yang dianugerahkan Tuhan, manusia secara potensial memiliki kemampuan bernalar dan kreativitas. Namun, kedua kemampuan itu tidak dengan sendirinya berkembang dengan baik. Lingkungan sosial termasuk sekolah yang tidak menunjang bahkan dapat menghambat atau mematikkannya. Jika hal itu terjadi, anak didik tidak akan sampai pada kemandirian.

Dengan demikian, jelas bahwa perlu ada upaya yang terencana dengan baik untuk mengembangkan kemampuan itu. Upaya itu hanya mungkin dilakukan secara efisien melalui pendidikan. Namun, pendidikan di berbagai jenjang dan jalur sampai sekarang masih belum menganggap kedua kemampuan itu secara baik dan terencana.

Kemandirian yang dalam konteks ini dibatasi pada kemandirian secara mental, juga mencakup kemandirian dalam menyerap, mengolah, serta mengomunikasikan

gagasan dan pengetahuan. Kemandirian dalam hal ini terwujud sebagai kemampuan bahasa tulis yang pengembangannya merupakan dasar pengembangan budaya tulis. Secara nyata, kemampuan bahasa tulis mencakupi kemampuan membaca dan menulis yang bukan hanya berhenti pada "kemelekhurufan", melainkan mencakupi juga kemampuan merenungi, mengolah, menanggapi gagasan dan pengetahuan secara logis, kritis, dan analitis, serta kemampuan mengomunikasikannya secara jernih dan kreatif melalui bahasa tulis. Dengan pengertian kemampuan bahasa tulis seperti itu, seyogianya pengembangan kemampuan membaca dan menulis melalui jalur pendidikan juga akan mengembangkan kreativitas dan kemampuan bernalar. Namun, lagi-lagi proses pendidikan yang terjadi di dalam kelas belum mencerminkan pengembangan kemampuan bahasa tulis dengan pengertian dalam konteks tulisan ini.

2. Pengembangan Kemampuan Bernalar, Kreativitas, dan Budaya Tulis

Keadaan yang tidak membahagiakan yang kita lihat di bidang pendidikan itu perlu segera dibenahi. Pembinaan itu harus dirancang dan dilaksanakan secara sistemis dan sistematis. Dalam hal ini, perlu diperhatikan hal-hal berikut sebagai landasan berpikir.

- a. Kegiatan bernalar dan kreativitas tidak terjadi dalam keadaan hampa, tetapi terikat pada materi yang disusun sesuai dengan keadaan peserta didik dan kondisi lingkungan.
- b. Pengembangan kemampuan bernalar dan kreativitas melalui jalur pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral setiap program pembelajaran.
- c. Wahana utama pengembangan kemampuan bernalar dan kreativitas ialah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang tepat untuk pengembangan itu ialah proses pembelajaran aktif dan kreatif. Terjadinya proses pembelajaran aktif bergantung kepada kemampuan guru sebagai fasilitator, sedangkan pembelajaran kreatif hanya terjadi bila ada kebebasan berpikir.
- d. Pengembangan itu harus dilakukan secara bertahap, terarah, dan terencana, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, serta tujuan, jenjang, dan jalur pendidikan.

Pengembangan melalui jalur pendidikan formal dapat digambarkan sebagai berikut.

I Pendidikan Dasar : SD - Pengembangan kemampuan intelektual, sikap, dan nilai-nilai dasar sebagai landasan pengembangan pada pendidikan dasar penggalan kedua. SLTP - Pengembangan perasaan dan penalaran yang lebih kompleks, dikaitkan dengan lapangan kerja.

II Pendidikan Menengah: Pengembangan kemampuan bernalar dan kreativitas secara lebih formal, sebagai dasar pengembangan di pendidikan tinggi, dikaitkan dengan lapangan kerja.

III Pendidikan Tinggi : Pelibatan dengan aktivitas nyata di dalam dan di luar kampus, bersifat akademis dan profesional.

- e. Pengembangan melalui jalur pendidikan nonformal dilakukan melalui penyuluhan atau program pendidikan luar sekolah untuk berbagai lapisan masyarakat.
- f. Bernalar adalah berpikir secara *konvergen*, menuju kepada satu kebenaran, bersifat logis dan analitis, serta menggunakan pola berpikir tertentu. Berpikir kreatif adalah berpikir secara bebas, *divergen*, lancar, orisinal, terperinci, dan sensitif.
- g. Pengembangan budaya tulis yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak pengiring yang positif terhadap perkembangan kemampuan bernalar dan kreativitas yang sangat berperan dalam pengembangan kemandirian.

3. Lembaga Pendidikan Formal sebagai Pusat Pembudayaan

Pendidikan yang mencakup pendidikan di sekolah dan di luar sekolah harus mampu memberikan bekal kepada peserta didiknya agar dapat bertahan dan mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan mandiri. Pembentukan kemandirian melalui pengembangan budaya tulis yang menurut pengertiannya akan memacu kemampuan bernalar dan memacu kreativitas lewat jalur pendidikan, sangat tergantung pada proses pendidikan yang terjadi di lembaga tersebut. Proses pendidikan itu selanjutnya terkait dengan kondisi peserta didik sebagai subjek, kemampuan/integritas guru sebagai fasilitator, sarana penunjang, serta proses pembelajaran yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Dalam hal ini, peranan guru dalam mengelola dan mengarahkan terjadinya proses pembelajaran yang kondusif untuk pengembangan budaya di atas, banyak menentukan keberhasilannya.

Kemampuan/integritas guru sangat ditentukan oleh pengalaman pendidikan yang dialaminya. Hal itu tidak lepas dari kurikulum yang digunakan, proses pembelajaran yang dilaksanakan, kemampuan dosen pada lembaga penghasil guru dan upaya mereka dalam mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Ini berarti, diperlukan pembenahan di lembaga pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) dan pendidikan guru sekolah menengah (PGSM). Dengan demikian, upaya pengembangan budaya tulis harus bermula dari lembaga pendidikan yang dikelola oleh IKIP dan FKIP, kemudian dilanjutkan dengan upaya pengembangan diri oleh para guru.

4. Pengembangan Melalui Jalur Pendidikan Nonformal

Pengembangan budaya tulis melalui jalur pendidikan nonformal dilakukan lewat program kewajiban belajar serta penyuluhan yang sudah ada. Pengembangan ini harus dirancang dan dilaksanakan dengan cermat sesuai dengan keadaan peserta didik.

5. Berbagai Permasalahan

Dari uraian terdahulu dapat dikenali berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dalam upaya pengembangan budaya tulis melalui jalur pendidikan formal, khususnya pendidikan dasar. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah kurikulum yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan secara terarah dan eksplisit cukup mendorong tumbuhnya budaya tulis?
- 2) Apakah kondisi sosial-budaya peserta didik cukup menunjang tumbuhnya budaya tersebut?
- 3) Bagaimana kemampuan bernalar dan berkreaitivitas serta kemampuan dasar membaca dan menulis yang dimiliki peserta didik?
- 4) Bagaimana kemampuan para guru dan penyuluh dalam mengembangkan kemampuan budaya tulis?
- 5) Cukupkah sarana penunjang yang diperlukan untuk pengembangan budaya tulis pada lembaga pendidikan dasar maupun pada lembaga penghasil guru?
- 6) Materi yang bagaimana yang cocok untuk pengembangan budaya tulis melalui jalur formal dan nonformal?
- 7) Proses pembelajaran bagaimana yang kondusif untuk pengembangan budaya tersebut?

6. Peranan HPBI dalam Pengembangan Budaya Tulis

Sebagaimana organisasi profesi yang bergerak di bidang pembinaan bahasa, HPBI dapat berperan serta melalui berbagai kegiatan, di antaranya melalui kegiatan seminar/lokakarya bagi para guru/dosen serta program latihan bagi para pelaksana kewajiban belajar. Selain itu, HPBI juga dapat melakukan studi/penelitian untuk memecahkan permasalahan sehubungan dengan pengembangan budaya tulis itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiah M.K., Sabarti. "Alternatif Pengembangan Kreativitas dan Kemampuan Bernalar". Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Bahasa dan Seni IKIP Jakarta.
- . 1988. "Pengembangan Kemampuan Penalaran Ilmiah Siswa SD melalui Pelajaran Membaca". Laporan Penelitian IKIP Jakarta.
- . 1990. "Kemampuan Membaca Siswa SD di Wilayah DKI: Ke Arah Peningkatan Kemampuan 3-R". Laporan Penelitian IKIP Jakarta.
- . 1983. "Pengembangan Kemampuan Berpikir Kreatif melalui Kegiatan Kelas: Contoh Penerapan Pengembangan Model Treffinger dalam Pengajaran Bahasa Indonesia".
- Creighton, J.B. 1975. "Reasoning of Interrence". Dalam *Encyclopedie Americana*. Vol. XXIII.
- Flavell, John H. 1985. *Cognitive Development*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Halliday, M.A.K. 1976. *Exploration in the Functions of Languages*. Edward Arnold (Publishers) Ltd.
- Labuda, Michael (Ed). 1986. *Creative Reading for Gifted Learners: A Design for Excellence*. Newark, Delaware: International Reading Association.
- Laird, Charlton. 1953. *The Miracle of Language*.
- McCandless, Boys R. dan Robert J. Trotter. 1977. *Children: Behavior and Development*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Siegler, Robert S. 1986. *Children's Thingking*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Soedjatmoko, dkk. 1986. *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sund, Robert B. dan Artur Carin. 1978. *Creative Questioning and Sensitive Listening Techniques*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Stauffer, Russell G. 1969. *Teaching Reading as a Thinking Process*. New York: Harper & Row, Publishers.

PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Bambang Kaswanti Purwo
Masyarakat Linguistik Indonesia

Kalau kita berbicara mengenai peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia merupakan suatu tindakan yang "tak boleh tiada" (*indispensable*). Melalui bahasalah manusia dapat saling berbagi gagasan dan pendapat. Melalui bahasalah manusia dapat saling mengajukan dan menanggapi kritikan. Melalui bahasalah gagasan pembaharuan dapat dibentangkan. Dengan demikian, melalui bahasalah pintu gerbang ke arah kemajuan dapat terbuka.

Kalau sekarang kita berbicara mengenai pembinaan bahasa Indonesia, lazimnya hal itu dikait-kaitkan dengan bahasa Indonesia yang **baik dan benar**. Di balik pernyataan itu tersembul kesan umum bahwa yang dikutik-kutik di situ adalah ihwal seperti pemakaian titik koma, pemakaian EYD, atau pemakaian kalimat yang sesuai dengan kaidah yang berlaku (atau, lebih tepatnya: yang diberlakukan). Pada saat ini memang sudah tersedia banyak bahan yang disusun untuk mengajarkan hal seperti itu; sudah ada buku pedomannya bahkan sudah banyak yang mengembangkan latihan-latihannya.

Saya kira sudah waktunya kita mengayunkan langkah pembaharuan, meningkat setapak lebih tinggi di dalam kegiatan pembinaan bahasa. Sudah saatnya kini kita meningkatkan isi atau bahan dari pembinaan bahasa menjadi suatu kegiatan atau pelatihan kemampuan berkomunikasi, khususnya bahasa tulis, yang sungguh diperlukan oleh masyarakat kita yang tidak dapat menghindarkan diri dari keberadaannya di dalam era abad informasi. Era ini mensyaratkan masyarakatnya tidak hanya *literate* dalam pengertian 'melek huruf', tetapi *literate* dalam tingkat yang lebih tinggi, yakni 'mahir wacana', wacana sebagai rentetan kalimat, dan paragraf.

Kemahirwacanaan (*literacy*) sudah semakin dirasakan perlunya oleh banyak orang yang bekerja di perkantoran yang jalur komunikasinya akan jauh lebih efisien jika stafnya benar-benar menguasai bahasa tulis. Saya mendengar akhir-akhir ini banyak instansi, baik swasta maupun pemerintah, yang sudah merasakan perlunya kemampuan stafnya untuk dapat menulis memo, surat, usulan, dan laporan di dalam bahasa Indonesia yang **enak dibaca dan mudah dipahami**. Gagasan atau isi pikiran tertuang ke dalam rentetan kalimat yang tertata dan terencana secara baik.

Saya mendengar bahwa ada sebuah instansi pemerintah yang saat ini sedang merencanakan sebuah program pembinaan bahasa Indonesia untuk stafnya. Lama program sepuluh minggu, enam jam sehari untuk tatap muka dengan pengajar dan empat jam sehari untuk pelatihan menulis (memo, surat, usulan, dan laporan). Akan tetapi, prakarsa pembinaan bahasa Indonesia seperti itu menghadapi dua hambatan besar. Hambatan pertama ialah tidak tersedianya saat ini bahan ajar siap pakai yang dapat memenuhi kebutuhan seperti itu. Tidak hanya bahan ajar untuk memenuhi program sepuluh minggu seperti itu yang tidak ada, bahkan buku-buku acuan atau panduan untuk keperluan seperti itu pun tidak tersedia di pasaran, apalagi bahan ajar yang sudah diarahkan untuk tujuan khusus, misalnya, untuk mereka yang mengecimpungi bidang keuangan, perbankan, atau pertanian secara khusus.

Hambatan kedua ialah kelangkaan akan tenaga pengajar yang dapat menangani pembinaan bahasa Indonesia seperti itu. Apabila bahan ajarnya adalah ihwal perbaikan pemakaian titik koma, EYD atau perbaikan kesalahan kalimat, saya kira akan banyak tenaga pengajar yang serta-merta dapat memenuhi lowongan ini. Akan tetapi, mencari tenaga pengajar untuk mengajar menulis di dalam bahasa Indonesia yang enak dibaca dan mudah dipahami bukanlah hal yang mudah. Untuk menemukan tenaga pengajar yang sesuai dengan program seperti ini, perlu dicari di antara mereka yang bukan semata-mata pernah menulis, melainkan mereka yang suka dan biasa menulis. Sayangnya, manusia jenis ini termasuk makhluk yang relatif tidak banyak jumlahnya. Usaha pencarian dipersulit lagi karena di antara mereka itu tidak semuanya tertarik (barangkali lebih tepat dikatakan "tidak sempat") untuk mengajar menulis, apalagi menghasilkan bahan ajar untuk pelatihan menulis.

Di dalam masyarakat sudah jamak terdengar bahwa surat-menyurat yang berasal dari instansi pemerintah cenderung untuk memperoleh tanggapan lama dan lambat. Apa kiranya yang menjadi penyebabnya? Kurangnya keterampilan menulis di dalam bahasa Indonesia yang enak dibaca dan mudah dipahami. Seorang kepala biro yang diminta membuat buram surat oleh atasannya akan melimpahkan tugas itu ke kepala bagian, kepala bagian lalu melimpahkan tugas itu ke kepala seksi, dan seterusnya sampai ke yang lebih bawah. Sesudah buram surat berhasil dituliskan, prosesnya mengikuti arus balik: buram surat dikoreksi oleh kepala seksi, lalu diserahkan ke kepala bagian. Setelah dikoreksi lagi oleh kepala bagian, buram itu diserahkan ke atasannya lagi, dan seterusnya sampai ke yang paling atas.

Kiranya para peserta diskusi panel ini setuju bahwa yang menjadi penyebab tumbuhnya pola penulisan surat yang bertamasya dari satu meja ke meja lain itu bukanlah sekadar bahwa pejabat yang bersangkutan tidak mempunyai waktu untuk menulis, tetapi bahwa mereka tidak mampu dan terbiasa menulis.

Kalau pada Kongres Bahasa Indonesia VI sekarang ini kita tanyakan apa yang merupakan tantangan bagi kita menyangkut pembinaan bahasa Indonesia menjelang tahun 2000 ini, jawabannya ialah kita perlu membaharui pembinaan bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan menulis para penuturnya. Pembaharuan bahan ajar ini sudah barang tentu mutlak

diserentaki dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkemampuan menangani program pelatihan menulis.

Apa yang dapat kita lakukan untuk menuju ke langkah pembaharuan itu? Barangkali kita dapat berpaling ke lembaga pendidikan yang sudah ada saat ini, yang berpeluang untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dapat mendukung upaya pembaharuan di dalam pembinaan bahasa Indonesia itu. Salah satu di antaranya yang dapat kita andalkan ialah program sarjana bahasa dan sastra Indonesia di perguruan tinggi. Untuk menilik peluang-peluang itu, marilah kita telusuri bagaimana program pengajarannya. Jenis mata kuliah yang saya soroti di sini ialah yang berkaitan dengan linguistik, baik secara langsung maupun tak langsung. Penelusuran ini saya rumuskan ke dalam pertanyaan berikut. "Setakat ini bahan ajar apakah yang tersedia untuk diambil oleh mahasiswa di program sarjana bahasa dan sastra?"

Untuk menghindari kerumitan, saya sempitkan penelusuran ini pada Jurusan Bahasa Indonesia (JBI). Bahan mengenai JBI ini saya peroleh dari Universitas Udayana dan Universitas Indonesia.

Jenis-jenis mata kuliah—yang berkaitan dengan linguistik—yang saya daftar di sini saya pilah atas tiga besar: wajib, pilihan, dan praktis. Dari segi isinya, sebenarnya lebih tepat apabila saya bagi dua, yaitu "pengetahuan" (yang terdiri atas "wajib" dan "pilihan") dan "praktis". Yang saya maksudkan dengan "praktis" ialah mata kuliah yang sedikit atau banyak mengarah ke pembekalan keterampilan berbahasa.

1. Wajib

Universitas Udayana dan Universitas Indonesia

- 1) Pengantar Linguistik Umum
- 2) Fonologi I dan II
- 3) Morfologi I dan II
- 4) Sintaksis I dan II
- 5) Semantik (leksikal) I dan II

2. Pilihan

a. *Universitas Udayana dan Universitas Indonesia*

- 1) Kapita Selekta Linguistik
- 2) Seminar Linguistik
- 3) Sociolinguistik
- 4) Struktur Bahasa Daerah
- 5) Sejarah Kajian Bahasa Indonesia
- 6) Linguistik Historis
- 7) Linguistik Komparatif
- 8) Metode Penelitian Bahasa

- 9) Metode Pengajaran Bahasa dan Sastra
- 10) Bahasa Arab

b. *Universitas Udayana*

- 1) Linguistik Abad ke-20
- 2) Struktur Bahasa Daerah
- 3) Bahasa Sanskerta

c. *Universitas Indonesia*

- 1) Struktur Bahasa Sunda
- 2) Struktur Bahasa Lamalera
- 3) Struktur Bahasa Jawa
- 4) Struktur Bahasa Batak Toba
- 5) Bahasa Jawa Kuno
- 6) Pengantar Leksikografi
- 7) Pengantar Dialektologi

3. Praktis

a. *Universitas Udayana*

- 1) Teori Terjemahan
- 2) Kemahiran Bahasa Indonesia I s.d. VI

b. *Universitas Indonesia*

- 1) Retorika Indonesia I dan II
- 2) Penulisan Populer I dan II

Paparan jenis mata kuliah di atas memperlihatkan bahwa sedikit sekali bahan yang disediakan yang dapat menunjang kemampuan mahasiswa untuk dapat menulis, apalagi untuk dapat menghasilkan bahan bagi program pelatihan menulis. Barangkali kecilnya porsi itu memang disengaja karena asumsi bahwa penguasaan keterampilan itu sudah diandaikan diperoleh di jenjang sekolah menengah. Akan tetapi, dari karya tulis dan skripsi mereka terungkap bahwa penguasaan yang diasumsikan itu sesungguhnya belum tercapai.

Atau, kesengajaan itu barangkali didasari oleh asumsi bahwa lulusan yang dihasilkan diharapkan untuk menjadi pengajar atau peneliti di bidang yang berkaitan dengan linguistik? Untuk menanggapi jalan pikiran ini perlu kita lanjutkan penelusuran kita dengan menjawab pertanyaan berikut. "Setakat ini menjadi apakah atau bekerja sebagai apakah mahasiswa lulusan program sarjana JBI?"

Saya mencoba mencari ke Universitas Indonesia dan Universitas Udayana data mengenai jenis pekerjaan apa sajakah yang disandang oleh lulusan Fakultas Sastranya dan berharap dapat memperoleh pula data (hasil penghitungan kuantitatif) mengenai jenis pekerjaan apakah yang paling banyak memikat mereka? Dari Universitas Indonesia, yaitu dari Ikatan Alumni Fakultas Sastra Indonesia, saya peroleh data mentah (dalam bentuk disket, *D-Base*) yang belum diolah. Saya tidak sempat mengolahnya, tetapi di situ saya jumpai daftar nama lulusan jurusan bahasa-bahasa yang ada di Fakultas Sastra UI dengan alamat tempat mereka bekerja. Akan tetapi, dengan membaca alamat tempat mereka bekerja itu tidak semuanya dapat saya tebak jenis pekerjaan apa-apa yang mereka rasuki. Dari Universitas Udayana, saya dapatkan keterangan bahwa Jurusan Bahasa Inggrisnya memiliki data yang mirip dengan yang di Universitas Indonesia itu, tetapi juga belum diolah. Mengenai JBI-nya saya peroleh keterangan secara lisan dari I Made Madia dan Ni Made Dhanawaty. Oleh karena itu, berdasarkan sumber yang terbatas seperti itu, saya mencoba menyimpulkan jenis-jenis pekerjaan yang dirasuki oleh lulusan JBI. Nomor urut di sini tidak menunjukkan urutan jenjang dari yang terbanyak sampai ke yang tersedikit diminati.

- 1) Pengajar
- 2) Peneliti (Pusat Bahasa, Balai Bahasa)
- 3) Pegawai
 - (a) perpustakaan
 - (b) kantor pemerintah daerah
 - (c) kantor depdikbud
- 4) Pewicara (penyiar radio, televisi)
- 5) Penulis (wartawan, editor/penyunting, penyusun naskah)

Setakat ini belum ada data kuantitatif yang dapat menyingkapkan bidang pekerjaan apa yang paling banyak diminati oleh lulusan JBI itu. Akan tetapi, keterampilan menulis tetap akan meningkatkan mutu lulusan JBI, sebagai apa pun mereka, di antara kelima jenis pekerjaan itu. Peranan mereka sungguh diperlukan sebagai pasukan pembaharu, sebagai sumber daya pembaharuan di dalam "pembinaan bahasa Indonesia". Kehadiran tenaga seperti itu tak boleh tiada karena manusia di abad informasi ini dituntut untuk menjadi "mahir wacana" (*literate*).

Apabila data kuantitatif ternyata menunjukkan bahwa sebagian besar lulusannya menuju ke jenis pekerjaan (3), (4), atau (5), penyediaan bahan ajar demi meningkatkan keterampilan berbahasa – khususnya yang menuju ke "kemahirwacanaan" (*literacy*) – mutlak harus ada, sekurang-kurangnya sebagai mata kuliah pilihan.

MENUMBUHKAN KEBEBASAN KREATIVITAS DAN MEMBEBASAKAN MASYARAKAT DARI KEJUMUDAN TRADISI

A.A. Navis
Sastrawan

1. Pendahuluan

Perkembangan kesusastraan suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh sebab dan akibat perilaku bangsa itu sendiri. Menurut ilmu sosial, diidentifikasi bahwa bangsa Indonesia suka beringas, suka mengamuk, dan suka mengeroyok. Dalam sejarah politik, Belanda menamakan perilaku tersebut sebagai **amok partij**. Misalnya peristiwa tahun 1918, dimulai dari Solo meruyak ke seluruh Jawa, terjadi pengamukan pribumi atas masyarakat Cina. Peristiwa semacam itu terus berulang sampai beberapa waktu yang lalu. Dalam skala yang lebih kecil, pengamukan penduduk dari suatu kota terhadap perantau atau pendatang, atau pengamukan tukang becak terhadap suatu etnik, golongan atau profesi lain dapat terjadi dengan mudah.

Di Sumatera pengamukan atau pengeroyokan juga sering terjadi. Yang terkenal ialah pengamukan barisan revolusi terhadap kaum bangsawan Sumatera Timur pada awal perang kemerdekaan Indonesia tahun 1946. Puluhan kaum bangsawan terbunuh, termasuk *Raja Penyair Amir Hamzah*. Peristiwa pengamukan itu dicatat dengan rasa bangga dalam buku sejarah sebagai *revolusi sosial*. Di Sumatera Barat pengeroyokan pun bukan barang yang aneh, contohnya saya kemukakan nanti.

Perilaku suka mengamuk atau mengeroyok itu selalu dilakukan oleh golongan kuat terhadap golongan lemah, tetapi tidak sebaliknya. Menurut pendapat Belanda, pemberontakan politik di Indonesia tidak akan berhasil dan mudah dipadamkan karena bersifat *amok partij*. Jika memakai teori Belanda itu, revolusi Indonesia dimulai bukan oleh suatu pemberontakan, melainkan merupakan pertahanan rakyat atas kedaulatan bangsa dan negara yang mereka ambil alih selagi kekuasaan pemerintahan sedang vakum. Akan tetapi, *amok partij* ini tidak berlaku terhadap tukang becak yang terkenal berperilaku beringas kalau mengamuk ketika pemerintah melarang becak beroperasi di Jakarta. Mereka hanya pasrah karena pemerintah terlalu kuat.

Dalam perilaku sosial ataupun individual penyakit suka mengeroyok itu begitu sering terjadi. Misalnya pengeroyokan seks oleh banyak laki-laki terhadap seorang perempuan; pengeroyokan atas laki-laki pezina yang tertangkap basah; pengeroyokan atas tukang copet sebelum dibawa ke polisi; pengeroyokan dengan senjata tajam atau mengubur hidup-hidup atas tersangka dukun teluh atau santet; atau pengeroyokan

oleh polisi atau tentara atas tersangka atau tahanan. Semua kasus pengamukan atau pengeroyokan itu bukan masalah buta atau melek hukum, bukan masalah mengerti undang-undang dan Pancasila, melainkan masalah tradisi, masalah kebudayaan. Masalah budaya bangsa yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya kesusasteraan Indonesia.

2. Pengeroyokan atas Kesusasteraan

Posisi kesusasteraan di Indonesia sama saja dengan posisi makhluk lemah yang empuk dikeroyok oleh siapa saja oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh individu, oleh kritisi, oleh sarjana sastra, oleh redaksi mass media, dan juga oleh penerbit.

Ambil saja contohnya, semenjak awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1947 Parada Harahap menulis kritik dalam surat kabar tentang permainan kasar klub sepak bola tentara di Bukittinggi. Ia yang selagi mengenakan celana kolor dan baju singlet, diculik dan dimasukkan ke dalam sel oleh komandan tentera tersebut. Tahun 50-an seorang penulis, Sjafei Sulin, mengkritik sandiwara murid SMA Padang yang eks tentara pelajar dalam surat kabar *Haluan*. Malamnya waktu penulis itu keluar dari bioskop, ia dikeroyok babak-belur. Parada Harahap dibebaskan Adinegoro. Akan tetapi, penulis itu dipersalahkan oleh semua orang. Hukum dan undang-undang mulai dikubur semenjak itu.

Pada tahun 1957 cerita pendek saya yang berjudul *Man Rabbuka* dimuat oleh majalah *Siasat*. Tulisan itu diprotes oleh kelompok pemuda Islam. Pada penerbitan berikutnya redaktur meminta maaf dan menyatakan agar cerita pendek itu dianggap tidak ada. Akan tetapi, pada tahun 1968, majalah *Sastra* memuat cerita pendek "Langit Makin Mendung". Kantor redaksinya diobrak-abrik massa, majalah disita dan dilarang terbit dan HB Jassin selaku penanggung jawab dihukum oleh pengadilan, sedangkan pengeroyok bebas dari hukuman. Dari peristiwa itu terlihat betapa berbeda perilaku masyarakat dalam jarak waktu 10 tahun saja.

Di zaman orde lama, ketika kaum komunis berada di atas angin, semua karya sastra anti komunis dilarang beredar. Karya Hamka, St. Takdir, Idrus, Akhdiat, dan berlanjut dengan karya golongan *manifest kebudayaan* seperti Trisno Sumardjo, dan HB Jassin dilarang beredar. Ajaibnya lagi, karya Soewardi Idris *Isteri Seorang Sababat* dan *Di Luar Dugaan* ditarik sendiri oleh penerbitnya setelah orang PRRI memprotes lisan. Padahal, PRRI musuh PKI dan Orde Lama nomor satu di masa itu. Akan tetapi, setelah pemberontakan PKI dipatahkan, giliran sastra kaum komunis dilarang beredar, tanpa kecuali apakah sastra itu berbau komunis atau tidak.

Sebelum ada penjelasan tentang status dari karya sastrawan yang ikut PKI, pada tahun 1980 Pramudya menerbitkan empat novelnya berturut-turut. Akan tetapi, keempat novel tersebut kemudian dilarang beredar pemerintah. Bahkan, 10 tahun kemudian seorang pemuda dihukum penjara di Yogya karena mengedarkan buku-buku tersebut. Pramudya sendiri tidak diapa-apakan. Bandingkan kasus Pramudya ini dengan kasus Maisir Thaib pada masa penjajahan dulu.

3. Cermin Perbandingan

Tampaknya di Indonesia terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap berbagai kebebasan dan kemerdekaan berpendapat dan berkarya. Perubahan sikap masyarakat itu pun menumbuhkan perubahan sikap pejabat, yang selanjutnya dijadikan sebagai kebijaksanaan politik pemerintah. Akan tetapi, dapat juga dipahami kebalikannya, yaitu kebijaksanaan pemerintah dalam memahami kebebasan dan kemerdekaan berkarya telah mengubah sikap masyarakat dalam mengantisipasi perbedaan pendapat tersebut. Namun, apabila pandangan atau sikap cendekiawan itu paralel dengan sikap masyarakat yang beringas, dapat diartikan bahwa sesungguhnya sikap budaya masyarakat adalah anti kebebasan dan kemerdekaan berkarya.

Perubahan sikap yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau baik sekali diambil sebagai contoh. Oleh karena itu, menurut ilmu antropologi, Minangkabau dinilai sebagai masyarakat yang berbudaya demokratis, menganut sistem dikotomi dan dialektika. Perbedaan dan pertentangan paham atau pendapat dibutuhkan untuk menyalakan kehidupan.

Sekitar 80 sampai 50 tahun yang lalu, tegasnya pada masa penjajahan Belanda, di Minangkabau sudah sangat biasa orang berpolemik. Berpolemik dalam media massa maupun dalam buku. Polemik antara ulama aliran lama dan ulama aliran baru, atau antara ulama dan kaum adat. Bahkan, dirasakan sangat ganjil apabila surat kabar tidak memuat polemik. Mimbar mesjid pun dipakai untuk menyatakan perbedaan pendapat para ulama. Orang awam pun berdebat tentang apa saja di lepau kopi, dan tidak terjadi perkelahian atau pengamukan. Padahal, saat itu mereka belum banyak yang bersekolah apalagi menjadi sarjana.

Ketika saat Ahmadiyah aktif berkampanye, ayah Hamka, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, menantang ulama Ahmadiyah itu berdebat di bioskop di kota Padangpanjang. Dalam perdebatan itu mereka saling adu argumentasi tentang kebenaran kepercayaan masing-masing dan tidak terjadi perkelahian. Lima puluh tahun kemudian, sekitar tahun 70-an, Nazwar Syamsu, keluaran Madrasah Thawalib, menerbitkan buku *Isa di Venus*. Ulama di Medan ribut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyita buku tersebut tanpa dilanjutkan untuk diproses pengadilan. Di Minangkabau sendiri, tempat pengarang dan penerbit berdomisili, para ulamanya tenang-tenang saja. Mereka hanya menyatakan jika buku itu menyesatkan, terbitkan buku yang membantahnya. Islam tidak melarang umatnya berijtihad, malah menganjurkan, kata mereka. Pandangan dan sikap ulama itu karena mereka belajar pada madrasah di masa lalu yang memasukkan *ilmu mantik*, ilmu logika, pada kurikulumnya. Akan tetapi, 20 tahun kemudian ketika Darul Arqam menyebarkan ajarannya di Minangkabau, para ulama generasi sekarang yang tidak lagi memperoleh pelajaran *ilmu mantik*, seperti terkena histeria. Mereka tidak mengajak ulama Darul Arqam itu berdebat atau menulis bantahan yang argumentatif, baik pada media media maupun menulis buku. Mereka hanya minta agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk melarang ajaran Darul Arqam disebarkan di Sumatera Barat. Majelis Ulama pun mengeluarkan fatwa larangan. Lalu, pemerintah mengukuh-

kannya. Bahkan, pemilik rumah yang menyewakan rumahnya kepada pengikut Darul Arqam itu dihukum oleh pengadilan dengan tuduhan tidak melaporkan ada orang asing yang menumpang inap. Tampaknya, lembaga ijtihad dalam Islam telah mati semenjak ilmu mantik tidak lagi diajarkan dalam pendidikan agama atau sekolah agama. Pola budaya Minangkabau yang demokratis seolah hanya tinggal dalam cerita kaba atau mitologi.

Dalam sejarah kesusasteraan Indonesia dapat juga terlihat bahwa perilaku dan sikap budaya masyarakat Minangkabau itu pun telah berubah. Pada awal sejarahnya, hampir seluruh karya sastra yang ditulis sastrawan Minangkabau memaki adat atau setidak-tidaknya menganjurkan agar adat itu ditinggalkan. Tidak ada reaksi apa pun dari masyarakat. Akan tetapi, ketika Maisir Thaib menulis novel *Ustazd A. Masyuk* dan Hamka menulis novel *Angkatan Baru* yang mengisahkan perilaku rendah guru agama pada madrasah di Minangkabau, para ulama kaum tua mengadakan rapat umum untuk menyatakan protes. Sebaliknya, ulama kaum muda mendukung kedua novel itu dalam berbagai media massa. Mereka saling adu argumentasi, sedangkan pemerintah kolonial Belanda bersikap netral, selama tidak terjadi keributan fisik dan memang tidak terjadi keributan fisik.

Menurut tradisi Minangkabau, perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan, harus diselesaikan dengan rundingan. Namun, apabila masih tidak dapat titik temu, masalahnya diletakkan dulu sampai keadaan dan waktu yang datang menguji pendapat mana yang paling benar.

Ketika Maisir Thaib menulis novel *Mr. Leider Semangat* yang bernada insinuasikan terhadap kekuasaan pemerintah, terkena delik dan pengarangnya dijatuhi hukuman penjara dan bukunya disita. Namun, penerbit dan percetakan yang juga ikut berperan dalam proses kehadiran buku tersebut boleh terus menjalankan usahanya. Karya sastra menjadi tanggung jawab pengarangnya semata. Jika yang satu kena delik, buku yang lain tidak ikut menanggung dosa.

Perilaku orang Minangkabau, seperti juga pada umumnya bangsa Indonesia, telah berubah banyak ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat atau pandangan hidup. Semenjak pemerintahan militer Jepang yang fasistis, perilaku suka mengamuk dan mengeroyok yang semula terbatas karena alasan etika dan norma adat tersinggung, kini berkembang menjadi liar, melampaui pagar-pagar kecendekiaan yang seyogianya bersikap rasional itu.

Apa yang dialami oleh Parada Harahap di Bukittinggi tahun 1947 atau Sjafei Sulin di Padang tahun 1950 menunjukkan bekas pengaruh superioritas militer fasis Jepang kepada perilaku pemuda bersenjata semenjak perang kemerdekaan Indonesia. Perilaku menguat semenjak pemerintahan orde lama sehingga seluruh kekuatan dalam masyarakat menganut sikap yang sama. Setiap perbedaan pendapat, apalagi kritik, dilibas dengan kekerasan. Perilaku beringas bukan lagi milik orang tak berakal semata-mata, melainkan juga sudah menjadi milik bangsa.

Dengan adanya gelagat yang kronis itu, orang berpendapat bahwa bangsa Indonesia tidak suka pada kritik. Para ahli ilmu sosial pun berpendapat demikian sehingga demi menghindari keributan fisik, pemerintah melarang masyarakat berpolemik yang bertema slogan SARA. Kebijakan itu sering ditafsirkan bermacam-macam, antara lain pelarangan atas perbedaan pendapat secara terbuka sampai kepada pelarangan untuk berkumpul sehingga banyak orang lebih suka tutup mulut meskipun suatu kesalahan fatal sedang terjadi di hadapan mata mereka. Eufemisme menjadi alat komunikasi terpakai meskipun tidak dipahami atau tidak diperdulikan sama sekali. Padahal, jika dilihat yang berlaku di zaman penjajahan Belanda, polemik antara Sukarno dan dengan Natsir, antara Sukarno dan Hatta, antara A. Hassan dan para ulama tradisional, antara golongan Islam dan golongan nasionalis, tidak menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan keributan fisik. Malah, masyarakat umum mendapat manfaatnya untuk mengasah akal-budi mereka sendiri. Meskipun dalam polemik masa itu adakalanya menggunakan bahasa yang kasar. Dalam kondisi masyarakat yang tidak lagi menghormati akal-budi, apa yang dapat dilakukan oleh sastrawan?

4. Dilema Politik Pembangunan

Pemerintah memang tidak mengambil kebijaksanaan agar karya sastra harus teracu mendukung dan memantapkan idiologi negara, seperti yang lazim dilakukan oleh pemerintah diktator. Karena alasan menghindari aksi-aksi budaya bringas, Pemerintah tidak/belum berpihak pada adanya pola perbedaan atau keragaman pendapat. Namun, sebaliknya kelihatannya pemerintah seolah-olah toleran terhadap sikap budaya beringas sehingga peranan akal budi dan intelektual yang didambakan sastrawan dikalahkan.

Di luar alasan idiologis, seperti yang dilakukan terhadap karya sastra berbau komunis, pemerintah juga melarang peredaran karya yang berbau pertentangan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang kriterianya sangat semu sehingga arti pertentangan bercampur baur dengan perbedaan. Sementara itu, Pemerintah pun mentoleransi semangat dan sikap superioritas sementara golongan dalam masyarakat, seperti tentara, polisi, ulama, pendeta, pejabat tinggi, dan berbagai golongan yang memiliki kekuatan moral dan material.

Dengan kondisi demikian, posisi kreativitas mengandung *risiko tinggi*. Oleh karena itu, perusahaan penerbitan buku dan media media ikut mengebiri kreativitas dengan menyensor karya sastra dengan ketat agar tidak terkena kemungkinan tercabut SIUP-nya atau mengalami bencana pengamukan massa. Para sarjana dan kritikus membatasi diri dalam penulisan atau kajian agar aman. Kajian didominasi oleh teori struktural lama atau baru yang dipinjam dari ahli asing sehingga kajian tentang masalah, tema, dan sikap budaya yang esensial dan apresiatif dihindarkan. Semua orang lebih suka memilih lahan-lahan yang aman untuk digarap.

Jika setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan 500 sarjana sastra, dalam masa 10 tahun terakhir jumlah mereka menjadi 5000 orang. Jadi, semenjak tahun 1950 jumlah sarjana sastra sudah 10.000 orang. Sampai di mana tingkat perkembangan yang telah dicapai dunia kesusastraan Indonesia dengan 10.000 sarjana sastra itu? Bulanan *Horison* dengan oplah 3.000 eksemplar tidak habis terjual. Buku sastra yang dicetak 3.000 eksemplar belum tentu habis terjual dalam masa 3 tahun. Kondisi dan situasi ini sama dengan penduduk Indonesia sewaktu berjumlah separuh dari yang sekarang. Oleh karena itu, penerbit buku atau media massa lebih mengembangkan sastra pop dan vulgar.

Apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini dan apa yang bakal dihadapi oleh kesusastraan di masa datang jika kondisi seperti ini terus berlanjut?

5. Apa yang Dapat Dilakukan?

Dalam kondisi dan situasi kesusastraan yang serba tidak menyenangkan ini, hampir semua sastrawan beralih atau menyambi ke profesi lain untuk menopang hidupnya yang kian lama kian mahal sehingga seolah-olah berkarya hanya cocok bagi sastrawan pemula. Manakala sudah "jadi", mereka beralih pula ke profesi lain. Bagi yang tetap setia kepada kreativitas, bentuk karya yang dituliskan berkisar pada karya *absurd*, abstrak atau imajiner dengan tema yang kecil-kecil, yang disebut Abdurrahman Wahid sebagai sastra eufemistik sehingga tidak muncul karya sastra yang bertema peristiwa perang dengan peranan prajurit apalagi jenderal; tidak ada tema peristiwa ritual keagamaan yang agung seperti *ibadah Haji di Mekah*; tidak ada tema sejarah seperti *Lahirnya Orde Baru* serta tema-tema lain yang lahir dari sejarah pergolakan bangsa dalam mengatasi kebodohan dan vandalisme.

Sastrawan memerlukan iklim yang cocok untuk mencipta, sama seperti iklim yang diperoleh konglomerat dalam mengembangkan usaha. Iklim yang dibutuhkan bukan berupa subsidi, melainkan kejelasan hukum dan undang-undang di atas kebijakan politik dalam menjamin hak berkarya.

Demikian juga halnya para pakar sastra atau kritikus, sama-sama membutuhkan kebebasan akademis yang lebih luas. Janganlah lagi ada larangan atau insinuasikan untuk melakukan kajian atas karya-karya karena pengarang digolongkan "Gestapu" atau karena pengarangnya "orang yang tidak disukai". Dampak berbagai macam pelarangan itu bukan hanya terasa bagi perkembangan kesusastraan, tetapi juga bagi pengamalan demokrasi dan sistem hukum. Namun, proses untuk mencapai iklim yang *favorable* bagi kebebasan berkarya tidak mudah memang. Ia masih memerlukan perjuangan. Tidak hanya oleh sastrawan semata, tetapi juga oleh semua pihak yang berkepentingan secara moral dan ideologis, secara strategis dan filosofis.

Perjuangan sastrawan seharusnya sama dengan perjuangan para konglomerat dalam kebebasan mengembangkan usaha dengan menggunakan motto *demokrasi pembangunan ekonomi* itu. Kebebasan yang sinonim dengan liberalisasi telah berhasil

mereka capai, sedangkan kebebasan sastrawan dalam mencipta karyanya masih panjang jalannya.

6. Simpulan dan Saran

Penyempitan atau pemasungan kebebasan kreativitas pengarang yang disebabkan oleh beberapa hal sudah waktunya dilawan melalui kampanye yang terus menerus. Penyempitan dan pemasungan kebebasan kreativitas itu antara lain dalam dua bentuk. Pertama tradisi budaya "amok partij" yang hakikatnya paralel dengan kebijaksanaan pemerintah yang meletakkan kepentingan politik di atas hukum. Yang satu bersifat liar, sedangkan yang lain terorganisasi rapi. Kebijakan itu telah menyebabkan pengembirian atau *self censor* oleh pengarang serta penerbit terhadap karya sastra. Kedua, kurikulum pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di sekolah menengah yang didominasi oleh materi *ilmu murni*, telah memacetkan perkembangan apresiasi kesusastraan dan juga kesenian para cendekiawan bangsa semenjak satu generasi yang lalu sehingga kelahiran ribuan sarjana sastra tidak otomatis meningkatkan kualitas dan kuantitas karya sastra.

Kesalahan menetapkan materi kurikulum pelajaran bahasa dan sastra di sekolah tersebut, sesungguhnya berakibat lebih buruk bagi bangsa dan generasi berikutnya daripada faktor kebijaksanaan politik yang keliru. Kebijaksanaan politik dapat saja berganti, tetapi kemandekan nalar pikiran kecendekiawan karena tidak memperoleh kesempatan mengembangkan apresiasi di masa sekolahnya, telah menyebabkan kemelorotan kadar kecendekiawan bangsa kita seperti yang terlihat dewasa ini. Bahkan, telah menghilangkan kepiawaian bangsa kita umumnya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik lisan maupun tulisan.

Sebagai penutup, saya sarankan agar kongres mengusulkan kepada Pemerintah agar:

- (a) mengganti materi kurikulum bahasa dan sastra Indonesia di sekolah menengah, dari materi pendidikan "ilmu murni" menjadi "pendidikan apresiasi";
- (b) mengganti kebijakan dalam pelarangan atau pembredelan karya sastra atas dasar hukum yang berlaku dan bukan lagi atas dasar kekuasaan politik agar sastrawan atau pengarang dan karyanya dapat pembelaan di hadapan mahkamah pengadilan;
- (c) melakukan imbauan yang terus menerus kepada partai politik, organisasi massa, dan golongan lainnya agar toleran terhadap perbedaan pendapat dan berijtihad dalam menemukan kebenaran serta membuang tradisi "mengamuk" demi memenangkan pendapat sendiri.

POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG PUISI INDONESIA TAHUN 70-AN SAMPAI KINI

Sutardji Calzoum Bachri
Sastrawan

Bersamaan dengan munculnya Orde Baru menjelang tahun 70-an, perpuisian Indonesia melepaskan dirinya dari subordinasi politik. Otonomi puisi tampil kembali. Perpuisian Indonesia meraih kembali kebebasannya. Dalam memanfaatkan atau mengisi kebebasannya itu semaksimal mungkin muncullah dengan marak berbagai corak atau credo perpuisian yang menimbulkan beragam corak puisi. Oleh karena itu, kita mengenal puisi konkret, puisi *mbeling*, puisi yang tak memakai kata (sajak "Petak Sembilan"-nya Danarto), sajak hanya satu kata ("Doa Terakhir Seorang Musafir" karya Hamid Jabbar), puisi dengan bahasa prosa, puisi yang kembali ke akar tradisi, puisi improvisasi, puisi yang membubuhkan bahasa asing (sajak-sajak awal Darmanto Yatman), dan sebagainya. Kebebasan perpuisian begitu tinggi sehingga apa saja kreasi yang diniatkan penyair sebagai puisi adalah sah disebut puisi meskipun sangat di luar kelaziman. *Poet can do no wrong* dan di pertengahan tahun 80-an muncul sajak-sajak gelap.

Bersamaan dengan tegaknya otonomi puisi, para penyair melakukan sendiri depolitisasi puisi. Dunia perpuisian dipisahkan dari politik. Ini sebagai reaksi dari pengalaman pahit di masa Orde Lama, saat itu politik mengganggu sastra (puisi). Di samping itu, juga disebabkan oleh faktor kedewasaan perpuisian Indonesia di masa Orde Baru sudah sampai pada suatu tahap tertentu. Masalah nasionalisme yang dipersoalkan dan diperjuangkan sejak Pujangga Baru sudah dianggap selesai dan berhasil mapan. Segala konsepsi dan produksi perpuisian Indonesia tidak perlu lagi mengacu pada nasionalisme karena ketahanan nasionalisme sudah dianggap mapan dalam pribadi tiap-tiap penyair. Depolitisasi puisi muncul bukan demi ketahanan nasional, melainkan karena sudah dianggap tangguh ketahanan nasionalnya, puisi melakukan depolitisasi terhadap dirinya sendiri.

Ketahanan nasional perpuisian Indonesia sejak tahun 70-an sudah begitu tinggi sehingga upaya kembali ke akar budaya atau tradisi seperti yang dilakukan Linus Suryadi dengan sajak-sajaknya yang penuh dengan ungkapan Jawa serta Darmanto Yatman dengan puisi-puisinya yang memasukkan ungkapan berbahasa Inggris dan Jawa tidak dicemaskan akan merusak kesadaran nasional. Wawasan kultural para penyair sudah lebih dewasa dan luas. Dalam perluasan wawasan kultural kreatif tidak

hanya difokuskan pada Barat (tidak seperti halnya Chairil Anwar dengan "Surat Kepercayaan Gelanggang" yang menyeru "Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia" yang dalam prakteknya dunia yang dimaksudkan lebih dititikberatkan pada Barat). Dalam perluasan wawasan kulturalnya, para penyair sejak sekitar tahun 70-an secara kritis mengambil Barat maupun Timur sesuai dengan keakraban pribadi masing-masing. Pengambilan wawasan itu tanpa mengacu demi mengisi kebudayaan (perpuisian) nasional, tetapi merupakan upaya tiap-tiap pribadi dengan keakrabannya sendiri-sendiri. Begitu pula kembali ke akar tradisi juga dianggap upaya pilihan tiap-tiap pribadi penyair sesuai dengan keakrabannya dan bukan demi nasionalisme.

Meski berbeda titik tolak dan tujuannya, depolitisasi yang dilakukan pemerintah di tahun 70-an dan depolitisasi yang dilakukan penyair di dunia puisi berjalan dengan harmonis. Paham sastra berkadar politik "sastra kontekstual" yang dipromosikan oleh sekelompok intelektual (1984) ditolak oleh para penyair.

Konflik antara penyair (puisi) dan penguasa muncul ketika penguasa lewat kebijakan "demi stabilitas dan keamanan" melarang acara-acara pembacaan puisi dan bahkan menahan penyair (Rendra). Namun, konflik ini tidak menggoda para penyair untuk melepaskan depolitisasinya dalam puisi. Depolitisasi puisi tetap dipertahankan. Hal itu secara jelas terwakilkan dalam sikap Rendra yang sering menyatakan sajak-sajak protesnya. Sikap Rendra itu bukan suatu aksi politik, melainkan timbul dari kewajaran akal sehatnya sebagai manusia.

Ketika berhadapan dengan *policy* "demi stabilitas dan keamanan", para penyair diperkirakan melakukan eufemisme. Pada lazimnya puisi lebih sering eufemistik dibanding dengan blak-blakan. Bahkan, eufemisme itu menyebabkan puisi bisa menjadi lebih halus lebih dalam dan penuh nuansa.

Keakraban terhadap Barat ataupun Timur bagi para penyair sejak tahun 70-an hingga kini telah sampai pada taraf otentik, seperti halnya tampak pada penyair Darmanto Yatman yang mengambil pengucapan Inggris. Sejak tahun 70-an tidak ada lagi "manusia perbatasan" atau "manusia terasing" seperti yang pernah disinyalir Subagio Sastrowardojo terhadap para sastrawan penyair tahun 50-an dan 60-an, yaitu manusia (penyair/sastrawan) yang pikiran dan pandangan hidupnya lebih ke Barat, tetapi tidak *betah* hidup di Barat maupun di tanah kelahirannya Indonesia.

Gegap gempitanya pembangunan yang dilaksanakan pemerintah menimbulkan "manusia terasing" yang lain dalam perpuisian kita, yakni manusia yang terasing atau tertinggal dari pembangunan, seperti yang sering ditampilkan Rendra dalam puisinya. Di samping itu, muncul "manusia terasing religius" sebagai dampak pembangunan. Yang saya maksudkan ialah manusia yang dengan kadar kereligiuserannya merasa asing dan terluka oleh pembangunan, atau manusia yang ingin mengimbangi pembangunan yang dianggapnya sangat materialistik dengan aspirasi religius yang dimilikinya. Faktor "kembali ke akar budaya/tradisi" inilah yang memacu maraknya puisi-puisi religius sosial dan sufistik pada tahun 70-an dan

80-an hingga kini. Sejak tahun 70-an perpuisian Indonesia mulai diperkenalkan dengan "manusia terasing karena *gender*" seperti kelihatan pada sajak-sajak feminis Toety Herati.

KEHIDUPAN SASTRA KITA Beberapa Catatan

Hamid Jabbar
Sastrawan

Kehidupan sastra kita, mungkin dapat disimpulkan sebagai, lumayan, tetap bergairah, menggeliat-geliat di tengah tumpukan permasalahannya. Baru saja kita telah mendengar beberapa permasalahan sastra kita sebagaimana diungkapkan Ali Akbar Navis, dan termasuk beberapa pencapaian sastra kita, khususnya puisi, yang telah diulas Sutardji Calzoum Bachri. Dan dalam beberapa hari ini telah bicara pula antara lain Emha Ainun Nadjib, Darmanto Yatman, Leon Agusta, dan Goenawan Mohamad.

Kalau kita simak beberapa keputusan Kongres Bahasa Indonesia (KBI), sejak KBI I di Solo (1938) s.d. KBI V di Jakarta (1988), cakupan permasalahan sastra kita cukup luas. Sejak dari perkara penciptaan, sampai ke pemasyarakatan, pengajaran, dan penelitian sastra. Kalau KBI I menyebut perlunya didirikan Perguruan Tinggi Sastra, maka KBI V, 5 tahun yang lalu, menyinggung secara lebih terperinci bahwa *prosa, puisi, drama dan karya sastra pada umumnya, selain dapat dijadikan wahana pengembangan dan penyebaran bahasa Indonesia yang kreatif dan dinamis, dapat pula meningkatkan kecerdasan dan memanusiakan manusia. Karena itu pula diupayakan cara konkret untuk menaikkan mutu dan jumlah karya sastra; perlu dikembangkan pendidikan intelektual secara terencana dan terarah agar dapat menumbuhkan selera intelektual dan sekaligus melahirkan minat baca sastra; perlu dirintis pemasyarakatan sastra melalui forum pertemuan ilmiah, pementasan drama, serata pembacaan sajak dan novel; perlu dikukuhkan kembali keberanian mengajak semua lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengenal karya sastra; perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengembangan sastra dalam menentukan arah perkembangan sastra di Indonesia; perlu disusun buku teori dan kritik sastra yang relevan dengan karya sastra Indonesia, yang dapat dipakai sebagai acuan bagi para guru sastra dan peneliti sastra; perlu ditingkatkan penelitian sastra (dan karena itu diperlukan pola penelitian sastra yang menyeluruh, terpadu dan bertahap, dengan program yang terperinci yang dapat memberikan gambaran kesastraan Indonesia); perlu dididik dan dikembangkan wawasan para peneliti sastra; kritikus sastra perlu diikutsertakan dalam penyusunan kurikulum sekolah lanjutan untuk ikut menentukan karya-karya yang cocok bagi pengajaran; juga disebut perlu menerbitkan buku "Wajah Indonesia dalam Sastra" yang merupakan hasil penelitian sastra Indonesia, dan penerbitan "Sastra Budaya Bangsa", yang merupakan hasil*

penelitian sastra daerah. Mengenai pengajaran sastra, KBI V menyimpulkan 9 simpulan umum beserta 6 usulan tindak lanjut.

Kalau menyimak keputusan KBI itu, rasanya sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada perhatian kita (termasuk masyarakat dan pemerintah) terhadap kesusastraan Indonesia. Ada, tetapi masih amat kurang, dan masih amat sedikit dari keseluruhan masyarakat bangsa kita ini yang cukup sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan dunia sastra kita. Oleh karena itu, secara menyeluruh, sulit pula menolak kesimpulan Emha Ainun Nadjib bahwa kultur pembangunan (berupa "lima serangkai": materialisme, ekonomisme, kapitalisme, industrialisme, dan hedonisme) kait-mengait dengan politik pembangunan (yang sampai hari ini masih berada pada tahap fanatisme terhadap keamanan dan stabilitas), dua hal itulah yang menjadi sebab musabab keterpinggiran sastra dalam kehidupan masyarakat kita masa kini. Atau, seperti yang telah disinggung Navis, sejak dari ihwal pengeroyokan terhadap sastra sampai ke dilema politik pembangunan itu, juga sulit untuk dibantah.

Dari semua harapan yang dicetuskan dalam ke-6 kongres bahasa ini, berikut kenyataan-kenyataan di luar Kongres maka saya menganggap bahwa yang sedang berlangsung sebenarnya adalah PELECEHAN TERHADAP SASTRA. Pelecehan itu, minimal dalam bentuk sikap dan pandangan yang merendahkan sastra, atau rendahnya apresiasi sebagian masyarakat kita terhadap sastra. Dan maksimal, pelecehan itu, berbentuk pemerkosaan terhadap sastra. Tingkat pelecehan terhadap sastra ini—dari satu masa ke masa lain—saya kira berbanding lurus dengan tingkat pelecehan terhadap manusia, manusia yang bukan hanya sekadar daging dan tulang, tetapi yang lengkap dengan jiwa, dengan roh; yang totalitasnya kita yakini bahwa manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah!

Kalau kini dicanangkan pengentasan kemiskinan, saya kira, kemiskinan apresiasi terhadap sastra itu sama menyedihkannya dengan kemiskinan pangan, sandang, dan papan. Saya pikir, kita memang sedang berada dalam kemiskinan yang berlapis-lapis, 27 juta orang yang di bawah garis kemiskinan itu adalah menyedihkan. Hanya beberapa belas dan atau mungkin beberapa puluh (atau beberapa ratus) konglomerat itu adalah juga sebetulnya kemiskinan kita yang menyedihkan. Kredit macet yang entah berapa jumlahnya itu juga sebetulnya kemiskinan yang menyedihkan. Mabuk kepayang dengan medali di Olimpiade itu, tanpa sempat memikirkan, merancang dan melaksanakan program terpadu untuk melahirkan—dari warga republik ini—calon-calon penerima hadiah Nobel bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan perdamaian dunia, yaah saya kira juga sebetulnya kemiskinan yang menyedihkan.

Maaf, hadiah Nobel itu memang bukan tujuan, tetapi yang inti adalah bagaimana kita memberi kepada manusia dan kemanusiaan sejagat-raya ini sesuatu yang lebih berarti dari hanya sekadar permainan kelas bulu! Hidup memang mengolah, tetapi bukan sekadar mengolah-raga! Hidup mengolah-jiwa-raga, membangun manusia seutuhnya, ya, kan, sebagaimana yang kita sepakati bersama!

Adanya pelecehan terhadap sastra (termasuk pelecehan terhadap bahasa) ini saya kira tidaklah dengan sendirinya membuat kita harus melakukan tindakan *over-*

acting, misalnya dengan membentuk polisi sastra (polisi bahasa). Semua pelecehan itu hanya mungkin berlangsung karena sebagian besar dari bangsa kita memang sedang berada dalam kemiskinan yang berlapis-lapis itu. Mungkin 50 atau 100 tahun lagi kita terbebas dari kemiskinan yang berlapis-lapis ini.

Sambil tetap bekerja pada bidang masing-masing dengan upaya memberikan yang terbaik, maka kalau kita bicara tentang sastra ini dan menuntut agar sastra jangan dilecehkan, itu bukanlah berarti suatu tuntutan agar sastra dianak-emaskan oleh bangsa ini. Yang diinginkan oleh sebagian besar kita yang hadir di sini, saya kira, tentulah suatu apresiasi yang wajar-wajar saja, tidak sangat kurang, juga tidak sangat berlebih.

Saya kira tidak ada di antara kita yang ingin memberhalakan sastra dan bahasa kita! Tauhid kita telah mengajarkan kita agar tidak menyembah apa dan siapa pun juga, kecuali hanya Allah semata! Kita tidak akan memberhalakan karya-karya kita! Tapi, tolong juga jangan mempersetan dunia sastra dan bahasa kita!

BAHASA ASING SEBAGAI KENDALA PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Asim Gunarwan

Universitas Indonesia/OTO Bappenas

1. Pendahuluan

Menurut dimensi sasarannya, perencanaan bahasa dapat dipecah menjadi dua, yaitu perencanaan korpus dan perencanaan status (Kloss, 1969; Moeliono, 1985). Yang pertama itu mengacu pada perencanaan bahasa sebagai sandi, dan tujuannya adalah mengembangkan (termasuk memodernkan dan membakukan) bahasa agar bahasa itu dapat dipakai sebagai wahana modern yang efektif dan efisien, seiring dengan laju perkembangan zaman, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perencanaan status, merujuk pada perencanaan bahasa di dalam hubungannya dengan bahasa-bahasa yang lain; tujuannya adalah membina orang-orang yang menjadi sasaran perencanaan itu agar mereka mau menggunakan bahasa yang dikehendaki perencana (kalau perlu dengan meninggalkan bahasa yang lain yang "tidak dikehendaki") dan agar yang sudah menggunakannya meningkatkan mutu bahasa mereka.

Makalah ini, dengan pendekatan yang sedikit kuantitatif dan sedikit kualitatif, mencoba membahas pembinaan bahasa Indonesia di dalam hubungannya dengan bahasa-bahasa asing di Indonesia. Istilah *pembinaan* di dalam makalah ini dipakai dalam makna yang lebih luas daripada yang disinggung di atas. Di sini pembinaan bahasa Indonesia diartikan sebagai merujuk pada empat sasaran yang bertingkat, yaitu: (1) penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia (BI); (2) peningkatan mutu penggunaan BI; (3) penumbuhan sikap yang baik terhadap BI agar warga negara Indonesia menjunjung BI (seperti yang kita ikrarkan setiap kali kita memperingati Sumpah Pemuda); dan (4) pemupukan rasa cinta dan kesetiaan pada BI (yang di dalam bentuknya yang paling sublim maujud di dalam apa yang oleh Kelman (1971) disebut *sentimental attachment*).

Keempat sasaran itu dikaitkan dengan bahasa-bahasa asing di Indonesia, yang definisi operasionalnya di dalam makalah ini adalah bahasa-bahasa yang berasal dari luar bumi Nusantara. Pokok masalahnya adalah apakah bahasa asing (BA) merupakan kendala pembinaan BI, dalam arti apakah BA merintangai usaha-usaha untuk mencapai keempat sasaran tersebut. Pembahasan akan berkisar pada pokok masalah ini. Landasan kerjanya adalah pemikiran bahwa pembinaan BI akan terkendala jika dan

bila ada persaingan dari BA di dalam salah satu (atau lebih) dari keempat bidang sasaran pembinaan di atas.

2. Penggunaan BA: Gambaran Umum

Dengan definisi operasional di atas, bahasa-bahasa Arab, Cina (seperti Hokkian, Hakka, Tiucu, Kanton, dan Mandarin), Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan bahkan bahasa Sansekerta, walaupun yang terakhir ini sudah berada di sini lebih dari 1.000 tahun, adalah bahasa asing di Indonesia. Penggunaan bahasa-bahasa asing itu berkisar dari amat terbatas sampai dengan cukup luas, dan tingkat perintangannya terhadap pembinaan BI pun, tampaknya, berbeda-beda.

Penggunaan bahasa Sansekerta terbatas pada moto-moto tertentu, penamaan gedung dan anugerah kenegaraan, seni wayang serta pemberian nama kepada anak di kalangan yang relatif terbatas. Bahasa ini tidak menjadi kendala pembinaan BI terutama karena bahasa itu sudah mati dan, tentu saja, karena tidak bersaing dengan BI. Bahkan, sebaliknya, bahasa ini bermanfaat sebagai "sumber galian" bagi pengembangan sandi BI, terutama di dalam elaborasi leksikal atau penciptaan istilah baru. Di antara penutur BI yang beragama Hindu pun bahasa ini tidak bersaing dengan BI karena ia hanyalah dipakai di dalam upacara-upacara keagamaan.

Bahasa Arab juga tidak merupakan kendala pembinaan BI, terutama sekali dalam hal penggunaan, karena tidak ada persaingan penggunaan di antara kedua bahasa ini. Mungkin sekali karena bahasa Arab tidak mempunyai daya tarik ekonomi yang kuat bagi orang Indonesia pada umumnya (kecuali bagi mereka yang ingin bekerja di Timur Tengah). Minat orang Indonesia pada umumnya untuk mempelajari bahasa ini relatif kecil walaupun bagian terbesar penduduk negara ini beragama Islam. Sekadar gambaran kasar, di sebuah SMA di Jakarta yang menawarkan bahasa Arab sebagai mata pelajaran elektif pada suatu tahun ajaran, hanya 8 orang, dari hampir 200 orang siswa, mengambilnya.

Dari beberapa narasumber yang merupakan pakar pengajaran bahasa Arab di Jakarta, diperoleh keterangan bahwa penggunaan bahasa Arab di ranah (*domain*) rumah sangatlah terbatas. Paling-paling, menurut mereka, orang-orang yang berbahasa Arab di ranah rumah adalah mereka yang pernah tinggal (bersama keluarga) di Timur Tengah untuk belajar, dan jumlahnya pun sangat kecil. Di luar itu, bahasa Arab dipakai di pesantren-pesantren tertentu karena diwajibkan, ada yang dengan sanksi: santri yang tidak berbahasa Arab didenda dan bahkan digunduli. Tidak diketahui seberapa jauh bahasa ini benar-benar dipakai di lingkungan pondok pesantren dan bagaimana mutu bahasanya, terutama di antara santri-santri yang baru. Yang jelas, pengharusan seperti itu menyebabkan penggunaan bahasa yang sangat terbatas lingkupnya, sebatas pada apa yang di dalam kepustakaan pembelajaran bahasa disebut *speech island*. Oleh karena itu, penggunaan BA tersebut tidak sampai menimbulkan persaingan dengan penggunaan BI, seperti yang disebutkan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar-pakar tersebut dapat diinferensikan bahwa bagi masyarakat Indonesia, terutama anggota masyarakat yang muslim (mayoritas), ada pemisahan fungsi di antara bahasa Arab dan BI. Bahasa Arab mempunyai fungsi agama (*religious function*) (Stewart, 1968) dan BI mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi yang lebih luas. Karena ada pemilahan fungsi, kedua bahasa itu tidak bersaing. Walaupun demikian, karena bahasa Arab dikaitkan dengan agama, mungkin saja bahasa ini "dijunjung" lebih tinggi daripada BI, yang diasosiasikan dengan hal-hal yang sekuler. Namun, hal ini hanyalah terbatas pada ranah agama dan pada kalangan orang-orang Indonesia muslim yang kadar kesantrianya memang pekat. Atas dasar ini, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa bahasa Arab tidak merupakan kendala pembinaan sikap masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap BI.

Untuk mengetahui apakah bahasa-bahasa Cina (BC) merupakan kendala pembinaan BI di kalangan orang-orang Indonesia keturunan Cina, sebuah survei diadakan dengan tujuan mencari petunjuk seberapa jauh BC, alih-alih BI, dipakai oleh mereka. Survei ini dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) dengan melakukan pengamatan nonpartisipan ("manunggal") atas peristiwa-peristiwa tutur yang pesertanya adalah orang-orang Indonesia keturunan Cina, dan (2) dengan menyebarkan kuesioner anonim mengenai penggunaan BC dan BI di ranah rumah.

Pengamatan itu, yang tujuannya adalah mengetahui bahasa apa yang dipakai, dilakukan di pelbagai tempat di Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan lembar pengamatan yang berisi kolom-kolom tanggal pengamatan, tempat (latar), peserta peristiwa tutur (jenis kelamin, kelompok umur), topik dan, yang paling penting, bahasa apa yang dipakai, yakni BC ataukah BI (termasuk dialek Melayu Betawi atau bahasa daerah yang lain). Dari 93 pengamatan, ternyata ada 12 (atau 12.9%) peristiwa tutur yang menggunakan BC (tanpa campur kode), 5 di antaranya dijumpai di daerah perbelanjaan di Jakarta Utara yang paling padat penduduk keturunan Cinanya. Yang patut dicatat dari hasil pengamatan ini adalah (1) yang menggunakan BC di Jakarta Utara itu tampaknya sudah berumur 40 tahun ke atas, dan (2) dari penggunaan BI oleh peserta-peserta sejumlah peristiwa tutur dapat diinferensikan bahwa makin muda penuturnya, makin tidak tampak interferensi BC pada BI mereka. Kedua hasil pengamatan itu mengisyaratkan adanya korelasi positif di antara usia penutur dan probabilitas penggunaan BI serta di antara usia penutur dan mutu (setidak-tidaknya di dalam hal lafal) BI subjek-subjek pengamatan.

Tertakluk pada hasil penelitian yang lebih canggih, hal tersebut tampaknya menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia keturunan Cina mau menerima BI sebagai alat komunikasi mereka sehari-hari. Apakah kemauan ini timbul karena kesadaran berbangsa ataukah karena proses pergeseran bahasa (*language shift*) yang wajar yang disebabkan oleh situasi dan kondisi, misalnya keterpajanan, tidak adanya sekolah dengan pengantar BC. Hal ini perlu diteliti. Yang juga mungkin adalah bahwa pergeseran BC itu tampaknya disebabkan oleh kemauan orang tua untuk menggunakan BI (atau Melayu Betawi) kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa

tidak ada pemertahanan BC di antara mereka walaupun, tentu saja, perkecualian tentu ada, mengingat bahwa sikap bahasa dan keterikatan sentimental kepada bahasa tidaklah monolitik.

Kebenaran dugaan bahwa ada kemauan orang tua untuk tidak menggunakan BC kepada anak-anak mereka itu masih harus diuji. Namun, adegan yang teramati di Jakarta Timur berikut ini tampaknya mendukung dugaan itu. Seorang pria Indonesia keturunan Cina (sekitar 40-an) sedang bercakap-cakap di dalam salah satu BC dengan dua orang yang lain yang tampaknya lebih tua di depan sebuah toko kelontong. Tiba-tiba seorang anak laki-laki (kira-kira berumur 5 tahun) berlari mendekati si pria itu. Si kecil itu sedang dikejar oleh anak laki-laki lain yang sedikit lebih tua dan tampaknya si kecil itu hendak mencari perlindungan dari si pria tadi. Apa yang terjadi kemudian tentulah membuat pembina BI merasa senang. Dengan spontan dan lancar, si pria beralih ke BI ketika ia berbicara dengan si kecil, "Beri *koko* permennya. Satu aja."

Dipilihnya ranah rumah untuk kuesioner survei itu adalah atas dasar penalaran bahwa tanda-tanda pergeseran bahasa, jika memang ada, akan tercermin pada "kebocoran" ranah rumah itu. Artinya, jika pada suatu waktu dahulu hanya dipakai (salah satu) BC di ranah rumah, dan sekarang dipakai juga BI (atau bahasa daerah), meski secara variabel sekalipun, hal ini menunjukkan bahwa BC sudah mulai bergeser dan mulai diganti oleh BI.

Kuesioner tersebut meminta responden secara anonim mengisi data pribadi mereka (jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan), bahasa-bahasa yang mereka kuasai, dan bahasa yang mereka pakai di rumah ketika berbicara dengan kakek/nenek, ayah/ibu, abang/kakak, adik, atau anak. Untuk penggunaan bahasa dipakai skala penilaian 1 s.d. 5.

- 1) 5: selalu (atau hampir selalu) BI;
- 2) 4: lebih sering BI daripada BC;
- 3) 3: kadang-kadang BI, kadang-kadang BC;
- 4) 2: lebih sering BC daripada BI; dan
- 5) 1: selalu (atau hampir selalu) BC.

Dari 161 kuesioner, yang kembali 159, dan dipakai sebagai sumber data survei. Jumlah ini meliputi 115 dari Jakarta dan sekitarnya, 20 dari Ujung Pandang, dan 24 dari Palembang. Tabulasi data antara lain menghasilkan gambaran kasar mengenai persentase responden yang masih dapat menggunakan BC: Jakarta 18%, Ujung Pandang 25% dan Palembang 37%. Yang perlu dicatat adalah bahwa karena kecilnya jumlah responden dari Ujungpandang dan Palembang, persentase untuk kedua kota itu hendaklah dianggap sangat tentatif. Yang patut dicatat adalah bahwa kemampuan menggunakan BC itu cenderung mengecil dari kelompok yang lebih tua ke kelompok yang lebih muda. Jika kecenderungan ini dapat diverifikasikan, serta berkelanjutan, dapat diproyeksikan bahwa pada suatu waktu kelak, pengguna BC di Indonesia akan mengalami penyusutan yang signifikan. Tentu saja ada faktor x yang dapat mengubah

arah proyeksi itu. Salah satunya adalah adanya gerakan untuk melestarikan BC sebagai lambang kepribadian etnis, satu hal yang sah di negara yang demokratis.

Gambaran seperti yang tercermin pada angka-angka tersebut tentu akan berlainan jika data juga dijamin di daerah Bangka, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat, yang penduduknya banyak sekali dari keturunan Cina. Karena kendala waktu (dan dana), kuesioner tidak disebarkan di kedua daerah itu. Namun, dari wawancara dengan seorang narasumber keturunan Cina dari Kalimantan Barat, yang menjadi dosen di Jakarta, diketahui bahwa di daerah itu BC dipakai secara luas, baik di rumah maupun di pasar-pasar. Selanjutnya, dari hasil wawancara itu dapat diinferensikan hal-hal yang berikut untuk dewasa ini: (1) Sampai dengan ambang (menurun) umur sekitar 20 tahun, makin muda seorang Indonesia keturunan Cina di Kalimantan Barat, makin besar kemungkinan BI-nya lebih baik; dan (2) Makin jauh ke pedalaman di Kalimantan Barat, makin sering penduduk keturunan Cina menggunakan BC (yakni bahasa Tiocio) sesama mereka.

Gejala (1) tersebut mungkin sekali juga berlaku di daerah Bangka, yang BC-nya terutama adalah bahasa Hakka. Sedikit-banyak mungkin sekali hal itu disebabkan ditutupnya sekolah-sekolah BC sejak akhir dasawarsa 50-an atau permulaan dasawarsa 60-an. Mungkin yang sedang terjadi di antara penutur BC di kedua daerah tersebut adalah bahasa Indonesia (atau bahasa Melayu setempat) mula-mula menjadi bahasa pijin (terutama di antara yang tua-tua), kemudian bahasa pijin ini menjadi bahasa kreol (seperti dahulu pernah ada bahasa kreol Melayu Hoakiau), dan kemudian bahasa kreol itu mengalami dekreolisasi melalui pendidikan sekolah, yang bahasa pengantarnya adalah BI.

TABEL 1
SKALA IMPLIKASIONAL PENGGUNAAN BI DAN BC
OLEH RESPONDEN (N= 159) MENURUT INTERLOKUTOR
DAN MENURUT KELOMPOK UMUR

Interlokutor Kelompok Umur	Kakek/ Nenek	Ayah/ Ibu	Abang/ Kakak	Adik	Anak
50+	t.a.d.	3.6	*3.1	3.9	4.3
41-50	2.2	3.8	*3.2	*3.6	4.7
31-40	3.4	4.3	4.6	4.8	5.0
21-30	4.1	4.8	4.9	5.0	5.0
-20	5.0	5.0	5.0	5.0	t.a.d.

(t.a.d. = tidak ada data)

Analisis data kuesioner (termasuk kuantifikasinya) menghasilkan skala implikasional atau skalogram (Bickerton, 1975), seperti yang terlihat pada Tabel 1. Dengan hanya tiga perkecualian (yang di dalam tabel diberi tanda bintang), angka skalabilitas tabel ini tinggi (87%) dan dengan demikian penafsirannya pun cukup dapat dipercaya.

Skala implikasional itu menunjukkan perbandingan yang terbalik dari yang lebih tua ke yang lebih muda, dan angkanya cenderung makin besar. Demikian pula dengan yang berkaitan dengan interlokutor: dari kerabat yang lebih tua ke kerabat yang lebih muda. Implikasinya adalah bahwa penurunan generasi (dari yang lebih tua ke yang lebih muda) beriringan dengan peningkatan penggunaan BI, satu hal yang mendukung hasil pengamatan di atas. Inferensi yang dapat ditarik adalah bahwa tidak ada pemertahanan bahasa di kalangan orang-orang Indonesia keturunan Cina. Kalau pun ada, skala implikasional itu tidak menunjukkan bahwa usaha itu membawa hasil. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa pembinaan BI, dalam arti penyebarannya ke orang-orang Indonesia keturunan Cina, tidak terkendala oleh BC. Bahwa mutu, sikap, dan rasa cinta mereka terhadap BI perlu ditingkatkan, hal ini perlu diteliti.

Mengenai bahasa Jepang, Prancis, dan Jerman, dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa ini tidak akan merupakan kendala pembinaan BI. Peluang penggunaan bahasa-bahasa itu di antara orang-orang Indonesia sangatlah kecil, kalau pun tidak dapat dikatakan tidak ada. Bahasa Belanda masih cukup banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia kelas menengah yang sempat mengenyam pendidikan dengan pengantar bahasa Belanda di zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya mereka ini sudah berumur 60 tahun ke atas dan tidak mengajarkan bahasa ini kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, dengan surutnya penutur-penutur bahasa Belanda itu akan surut pula penggunaan bahasa asing ini.

3. Bahasa Inggris dan Pembinaan Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris (BI_{ng}) dibahas tersendiri di sini bukan saja karena bahasa ini adalah BA pertama menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967, melainkan juga karena BA ini, seperti yang akan dikemukakan di bawah ini, mempunyai potensi yang paling besar yang dapat merintangi pembinaan BI, khususnya pada tataran peningkatan mutu BI, penumbuhan sikap yang baik terhadap BI, dan pemupukan rasa cinta kepada BI bagi orang Indonesia pada umumnya.

Pada tataran penyebarluasan BI, tidak ada petunjuk yang mengisyaratkan bahwa BI_{ng} bersaing dengan BI. BI_{ng} tidak dipakai secara luas di negara ini walaupun bahasa ini adalah bahasa yang paling banyak dipelajari orang di sini. Penggunaan BI_{ng} yang sangat terbatas itu, antara lain, terbukti dari tidak (belum?) adanya istilah *Indonesian English* yang berterima, yang mempunyai ciri-ciri khas Indonesia, yang kira-kira sebanding dengan *Singapore English* ("Singlish") atau *Tagalog English* ("Taglish"). Kalau ada orang-orang Indonesia berbahasa Inggris, lebih tepat "ragam" mereka ini disebut BI_{ng} Minang, BI_{ng} Batak, BI_{ng} Jawa, BI_{ng} Madura, dan seterusnya, bukan BI_{ng} Indonesia.

Lepas dari hal tersebut, *pada umumnya* BIng orang Indonesia tidak dapat dikatakan baik. Lebih tepat lagi, *pada umumnya* penguasaan orang Indonesia atas BIng masih rendah. Pada umumnya pula, keterampilan baca BIng mereka rendah dan keterampilan bicara mereka lebih rendah lagi, bahkan di kalangan sarjana (non-BIng) sekalipun. Sekadar gambaran, dari 713 orang sarjana yang mengambil TOEFL pada 1992, menurut catatan OTO Bappenas hanya 39 orang (5.4%) yang mendapat nilai di atas 550 (nilai 550 adalah nilai batas yang menunjukkan bahwa peraihny sudah dapat diterima di universitas ukuran sedang di Amerika Serikat). Selebihnya, masih harus mengambil kursus intensif BIng dari 3 sampai dengan 14 bulan sebelum mereka dapat dicarikan universitas berbahasa Inggris di luar negeri.

Banyak orang mengaitkan rendahnya penguasaan sarjana Indonesia (pada umumnya) atas BIng itu dengan kegagalan pengajaran BIng di SMP dan SMA. Asumsi ini masih harus dibuktikan. Kalau benar, kegagalan itu tampaknya menguntungkan pembinaan BI karena BIng dan BI dengan demikian tidak bersaing. Seandainya orang-orang Indonesia pandai bercakap dengan BIng, ada kemungkinan mereka cenderung memilih BIng alih-alih BI karena bagi mereka BIng dapat merupakan lambang status.

Ada asumsi beberapa pakar bahasa bahwa BI orang yang dapat menggunakan BIng dengan baik cenderung lebih baik daripada BI orang yang BIng-nya jelek. Ini masih perlu diuji kebenarannya. Akan tetapi, sekiranya benar, tampaknya hal itu disebabkan oleh kesadaran berkaidah bahasa yang dipunyai oleh orang-orang yang dapat menggunakan BIng dengan baik.

Ada pula pengamatan bahwa orang Indonesia yang tahu BIng cenderung menggunakan kata, frasa, bahkan kalimat BIng pada waktu bertutur di dalam BI. Dari sudut pandang sosiolinguistik, alih kode dan campur kode di dalam bertutur adalah satu hal yang biasa. Saville-Troike (1982:68-70) menyebutkan lebih dari sepuluh alasan mengapa orang beralih kode. Namun, jika hal itu dilakukan untuk *sok*, yaitu menunjukkan bahwa si penutur tahu BIng, ini bukanlah hal yang baik dilihat dari pembinaan BI karena alih atau campur kode yang seperti itu merupakan manifestasi dari sikap yang menjunjung tinggi BIng dan merendahkan BI. Alih dan campur kode seperti itu juga menunjukkan kurangnya disiplin berbahasa si penutur.

Untuk mengetahui apakah orang Indonesia cenderung menilai BIng lebih tinggi daripada BI, sebuah survei dilakukan dengan menggunakan teknik samaran terbanding (*matched guise*) (Lambert dll, 1968). Untuk survei itu seorang dwibahasawan BIng-BI yang seimbang diminta bertutur dua kali, pertama di dalam BI dan kemudian di dalam BIng. Tuturan itu direkam dan di antara tuturan BIng dan BI itu disisipi musik yang fungsinya adalah agar subjek tidak mengenali lagi warna suara penutur BI ketika ia bertutur di dalam BIng. Subjek memang "ditipu" seolah-olah kedua tuturan itu dilakukan oleh dua orang yang berbeda (padahal sebenarnya oleh *satu* orang). Setelah mendengarkan tuturan di dalam BI, subjek diminta menilai penutur menurut skala penilaian 1 s.d. 5. Ciri-ciri yang dinilai adalah, misalnya, kepandaian, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan keramahan. Demikian pula, setelah mendengarkan tuturan di

dalam BIng, subjek diminta menilai penuturnya dengan cara dan menurut ciri-ciri yang sama.

Karena variabel independennya hanyalah bahasa, yaitu BI dan BIng, di dalam menilai si penutur itu pada dasarnya subjek menilai bahasanya, berdasarkan stereotip penuturnya. Dari 126 subjek (69 dari Jakarta, 25 dari Bandung, dan 32 dari Palangkaraya, semuanya tamatan SMA ke atas) dijarah data yang setelah dikuantifikasi disajikan pada Tabel 2.

TABEL 2
ANGKA RATA-RATA PENILAIAN SUBJEK (N= 126)
ATAS PENUTUR BAHASA INDONESIA
DAN PENUTUR BAHASA INGGRIS MENURUT 11 CIRI

Ciri	(Penutur) BI	(Penutur) BIng
1. Kepandaian	3.02	3.91
2. Kebijaksanaan	3.68	4.33
3. Kejujuran	2.73	3.66
4. Keterpelajaran	3.14	4.52
5. Rasa humor	3.85	3.04
6. Kepercayaan diri	3.55	3.98
7. Kedudukan	2.87	3.76
8. Keramahan	4.03	3.12
9. Kepemimpinan	3.26	3.94
10. Disiplin	2.91	4.22
11. Rasa tanggung jawab	3.41	3.87
Rata-rata	3.31	3.85

Tampak di dalam tabel itu bahwa secara keseluruhan BIng dinilai lebih tinggi daripada BI. Ini mengisyaratkan bahwa subjek pada umumnya lebih "menjunjung" tinggi BIng daripada BI, dan hal ini bukanlah sesuatu yang baik bagi pembinaan BI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan sikap dan keterkaitan sentimental. Jadi, ada petunjuk bahwa BIng dapat menghalangi pembinaan sikap dan rasa cinta kepada BI.

Yang menjadi soal adalah salah siapakah bahwa subjek survei ini dan, implikasinya, orang-orang Indonesia pada umumnya, menilai BIng lebih tinggi daripada BI. Mungkin ini kesalahan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; mungkin pula itu adalah kesalahan sekolah yang tidak menanamkan sikap yang baik terhadap BI kepada murid-muridnya. Atau, mungkin pula itu bukanlah salah siapa-siapa, melainkan salah keadaan.

Untuk memahami kemungkinan yang terakhir itu, ada baiknya kita menengok sejenak buah pikiran Mackey (1973) dengan tiga konsep geolinguistiknya. Menurut pakar ini, fisibilitas kebijakan bahasa suatu negara tergantung pada penggunaan optimal kekuatan-kekuatan bahasa (*language forces*) dan bahwa kebijakan itu haruslah berdasarkan analisis kekuatan-kekuatan bahasa yang ada. Kekuatan bahasa itu, katanya, berasal dari tiga hal, yaitu kekuasaan bahasa (*language power*), daya tarik bahasa (*language attraction*), dan daya tekan bahasa (*language pressure*). Artinya, jika sebuah bahasa tinggi di dalam ketiga hal itu, tinggi pula kekuatannya, dan dengan sendirinya prestise atau gengsinya pun tinggi. Sebaliknya, bahasa yang rendah di dalam ketiga hal itu, rendah pula kekuatannya dan, implikasinya, rendah pula prestisenya. Secara psikologis, orang cenderung tertarik mempelajari bahasa yang bergengsi daripada bahasa yang kurang bergengsi.

Masih menurut Mackey, kekuatan yang dimiliki oleh sebuah bahasa dapat diukur dan ada rumusnya. Kekuasaan bahasa dapat diukur dengan menggunakan enam indikator, yaitu indikator demografi, dispersi, mobilitas, ekonomi, ideologi, dan kebudayaan. Daya tarik bahasa dapat dikuantifikasikan menurut daya tarik status, daya tarik teritorial, dan daya tarik interlingual. Daya tekan bahasa dapat diukur berdasarkan ciri perilaku (*behavioral traits*) dan akulturasi konsep (*concept acculturation*).

Tanpa harus membuat kajian pengukuran kekuatan BIng dan BI di Indonesia, tampaknya dapat dikatakan bahwa kekuatan BIng memang lebih besar daripada kekuatan BI. Yang sedikit menguntungkan BI adalah bahwa daya tekan BIng atas BI relatif kecil, berbeda dengan daya tekan BIng atas bahasa Melayu di Singapura, misalnya. Di negara jiran ini kontak BIng dan bahasa Melayu sudah begitu rapat dan tekanan BIng atas bahasa Melayu sudah begitu besar sehingga bahasa kebangsaan itu tampaknya sudah mulai terdesak.

Konsep geolinguistik Mackey, yang diuraikan secara sangat singkat di atas, kiranya dapat menjelaskan mengapa subjek-subjek survei ini menilai BIng lebih tinggi daripada BI. Di bawah ambang sadar mereka tampaknya mereka "mengetahui" bahwa di dalam hal kekuatan bahasa, BIng menang dari BI.

4. Beberapa Implikasi

Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada BA yang menjadi perintang bagi penyebaran BI kepada orang-orang Indonesia yang setakat ini belum menggunakan BI atau yang menggunakannya secara sangat terbatas. Hal yang sama tampaknya juga berlaku bagi orang-orang Indonesia keturunan Cina: BC tidak menghalangi penyebaran BI di antara mereka. Apakah mereka menggunakan BI karena alasan instrumental ataukah karena alasan integratif, hal ini patut dikaji lebih jauh. Jika ternyata alasan atau motivasi mereka hanyalah instrumental, ini pun sudah cukup sebagai modal pertama pembinaan BI. Lama-lama motivasi instrumental dapat berubah menjadi motivasi integratif, tanpa disadari oleh penggunanya.

BC tampaknya merupakan kendala peningkatan mutu penggunaan BI di antara orang-orang Indonesia keturunan Cina. Terutama di antara yang tua-tua, interferensi dari BC terdengar pekat di dalam pelafalan BI. Hal itu sukar diperbaiki, lebih-lebih lagi jika pelafalan itu sudah mengalami apa yang di dalam pembelajaran bahasa disebut fosilisasi.

Masalah peningkatan mutu penggunaan BI tampaknya adalah masalah orang Indonesia pada umumnya, bukan masalah yang keturunan Cina saja, dan hal ini bukan karena BA. Di samping kekurangtahuan mereka mengenai kaidah BI yang baku serta istilah-istilah baru, tampaknya "rendahnya" mutu BI orang-orang Indonesia pada umumnya itu juga disebabkan oleh kurangnya disiplin berbahasa. Kurangnya disiplin berbahasa itu tampak misalnya di dalam kalimat-kalimat "resmi" seperti yang berikut ini.

Garis-garis besar haluan negara adalah haluan negara dalam garis besar.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia lebih tinggi *dibandingkan* dengan Pilipina.

Sebagaimana kita ketahui *bahwa* harga adalah fungsi daripada permintaan dan persediaan.

Gubernur Oka dilantik *sejak* 20 September 1993.

Pengkajian bahasa tanpa mengaitkannya dengan masyarakat akan *mengenyampingkan* beberapa aspek penting.

Tapi penyebaran informasi itu, perlu dilakukan.

Bagi yang berminat, diminta mendaftarkan diri.

Masalah rendahnya mutu penggunaan BI, baik yang berkaitan dengan kekurangtahuan pengguna mengenai hasil-hasil pengembangan BI maupun yang berkaitan dengan rendahnya disiplin berbahasa mereka, tampaknya juga bukan karena kendala BA. Pemecahannya memerlukan waktu dan kesabaran. Satu cara adalah melalui gerakan meningkatkan mutu dan disiplin berbahasa. Sasaran yang paling baik adalah lembaga pendidikan, dari SD sampai dengan perguruan tinggi, dan implikasinya adalah (1) penyuluhan BI (termasuk pemasaran hasil-hasil perencanaan BI) lebih ditingkatkan agar mencapai guru-guru dan dosen-dosen, dan (2) disiplin berbahasa dikampanyekan di antara guru dan dosen, kalau perlu melalui gerakan yang di Britania dinamakan *Language Across the Curriculum*. Inti gerakan bahasa melintasi kurikulum yang diusulkan ini adalah bahwa pengajaran bahasa (di dalam hal ini BI) bukanlah tanggung jawab guru (dan dosen) BI saja, melainkan juga tanggung jawab *semua* guru (dan dosen). Karena itulah penyuluhan BI harus sampai pada mereka. Lebih baik jika sasaran ini diperluas sehingga menjangkau para penulis buku ajar.

Sasaran yang juga baik adalah para wartawan dan penulis serta penyunting artikel berita media cetak dan media elektronik. Implikasinya adalah penyuluhan BI dan kampanye disiplin menggunakan BI harus lebih ditingkatkan di antara mereka.

Mereka pun perlu diimbau agar berlapang dada untuk menerima dan mempraktikkan apa yang disuluhkan dan dikampanyekan.

Masalah sikap bahasa dan rasa cinta kepada BI lebih sukar dipecahkan. Satu cara adalah dengan menanamkan, sejak dini, sikap yang baik terhadap BI dan rasa menghargai BI, misalnya dimulai di TK dan di SD. Pelajaran BI di sekolah-sekolah (SD, SMP dan SMA) hendaklah tidak mementingkan ranah kognitif semata-mata; ranah afektif pun perlu diberi porsi. Ini juga berlaku bagi pengajaran kesusastraan Indonesia. Apresiasi sastra harus dibiasakan sejak anak-anak di SD agar mereka dapat mulai merasakan dan menikmati keindahan BI. Hanya dari orang-orang yang dapat merasakan dan menikmati keindahan BI-lah dapat lebih banyak diharapkan sikap yang baik terhadap BI dan rasa cinta kepada BI. Yang harus dijaga adalah jangan sampai anak-anak kita membagi cintanya kepada BA, apalagi sampai mereka mencintai BA lebih mendalam daripada mencintai BI.

Tentu saja rasa cinta kepada BI itu tidak dapat diharapkan tumbuh dari apresiasi sastra Indonesia saja. Dengan menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anak kita pun kita dapat, secara tidak langsung, menanamkan dan memupuk rasa cinta mereka kepada BI. Rasa nasionalisme yang kuat akan maujud di dalam bentuk sikap yang positif terhadap BI, rasa cinta yang mendalam kepada BI, dan rasa keterkaitan sentimental yang erat dengan BI. Di dalam bentuknya yang sangat kuat, rasa nasionalisme itu dapat maujud di dalam pendirian bersedia mati demi membela BI. Masalahnya adalah di mana dan bagaimana rasa nasionalisme itu ditanam dan dipupuk. Melalui pelajaran sejarahnya? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pakar-pakar pendidikan. Yang perlu dijawab di dalam makalah ini, sesuai dengan judulnya, ialah apakah BA menjadi kendala pembinaan BI, terutama di dalam hal penanaman sikap yang baik dan rasa cinta kepada BI.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya memang ada BA yang mempunyai potensi menjadi kendala pembinaan BI pada tataran ini. Salah satunya, tampaknya, adalah BC, *sebatas di daerah-daerah yang konsentrasi penduduk keturunan Cinanya tinggi*. Hal ini didasarkan kepada asumsi, tertakluk kepada pembuktian yang nyata, bahwa kesetiaan (loyalitas) mereka kepada BC memang terkenal kuat dan secara tradisional ada anggapan di antara mereka, sisa-sisa soviniisme kebudayaan, bahwa yang Cina itu lebih baik daripada yang bukan. Cara pemecahan masalah ini, jika memang ada, adalah dengan merangkul mereka serta menghindarkan hal-hal yang dapat ditafsirkan diskriminatif. Dengan membuat mereka merasa benar-benar keluarga bangsa, dapat diharapkan mereka juga akan mempunyai sikap positif dan rasa cinta kepada BI.

Yang rupanya mempunyai potensi menjadi kendala penanaman sikap positif dan rasa cinta kepada BI adalah bahasa Inggris (BIng). Asumsi ini didasarkan kepada argumentasi di atas, yang menunjukkan bahwa bahasa ini cenderung dinilai lebih tinggi daripada BI. Hal ini rupanya ada kaitannya dengan kecenderungan yang kuat di antara orang Indonesia pada umumnya bahwa yang dari "sana" itu dinilai lebih daripada yang dari "sini", apakah itu film, musik, tari-tarian, mode pakaian, mode rambut, dan bahkan makanan. Yang harus kita cegah adalah, seperti yang disinggung

di atas, jangan sampai anak-anak kita lebih menghargai BIng daripada BI. Pada kadar yang rendah, penjunjungan BIng yang lebih tinggi daripada BI itu sebenarnya mengingkari Sumpah Pemuda. Pada kadar yang lebih tinggi, hal itu akan menimbulkan sikap keinggris-inggrisan atau keamerika-amerika yang jika menebal akan melunturkan warna BI sebagai lambang kepribadian bangsa. Lunturnya warna BI sebagai lambang kepribadian bangsa dapat mengubah warna kebudayaan Indonesia, dan akhirnya kebudayaan nasional pun dapat terjejas. Pada kadar yang lebih tinggi lagi, penjunjungan BIng yang lebih tinggi daripada BI dapat mengurangi rasa kebangsaan kita. Jika diingat bahwa BI adalah alat pemersatu bangsa dan merupakan perekat kebangsaan, berkurangnya penghargaan kepada BI dapat berimplikasi sangat jauh, yaitu merosotnya rasa nasionalisme. Mudah-mudahan hal ini hanyalah perhitungan teoretis belaka. Walaupun demikian, perlu diusahakan agar pengajaran BIng di Indonesia dibatasi pada tujuan instrumental saja, jangan sampai lebih daripada itu.

Sehubungan dengan hal di atas, agaknya cukup relevan jika kita singgung di sini ketentuan baru bahwa BIng *boleh* diajarkan di SD sebagai mata pelajaran tambahan. Pada waktu ini sudah ada SD yang mengajarkan BIng, mendahului Kurikulum 1994. Di Kota Malang, misalnya, sekitar 9% dari SD swasta sudah mengajarkan BIng (Kasbolah dan Anugerahwati, 1993). Mengingat bahwa bahasa ini bahasa bergengsi, tidaklah mengherankan jika akan ada lebih banyak lagi SD yang mengajarkannya.

Rupanya ide untuk mengajarkan BIng di SD itu didasarkan, antara lain, pada asumsi bahwa anak-anak yang masih muda lebih reseptif belajar bahasa (karena mereka masih di bawah usia kritis). Benarkah asumsi itu? Ini masih belum terbukti secara meyakinkan. Satu pendapat adalah bahwa anak-anak memang pandai di dalam pemerolehan bahasa, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka juga pandai di dalam pembelajaran bahasa.

Di dalam makalah ini, posisi yang diambil adalah *tidak* menentang ketentuan tersebut. Yang menjadi soal adalah apakah kita benar-benar sudah siap dalam pengadaan guru, bahan pengajaran, dan alat-alat belajar-mengajar yang lain, terutama di dalam kaitannya dengan jumlah murid per kelas yang rata-rata besar. Bagaimanapun, pelaksanaan pengajaran BIng itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu gagal atau berhasil.

Jika pengajaran BIng di SD gagal, akibatnya jelas tidak baik karena usaha-usaha perbaikan akan lebih sukar di sekolah berikutnya, ibarat usaha meluruskan benang yang sudah kusut. Di samping itu, secara psikologis, kegagalan itu akan memberikan anak-anak di usia formatif itu pengalaman gagal terlalu dini. Ini pun jelas tidak baik karena kegagalan dini itu dapat menyebabkan kegagalan lain. Kegagalan itu juga dapat membuat anak membenci BIng. Ini sebenarnya menguntungkan pembinaan BI, tetapi di dalam konteks yang lebih luas, rasa benci anak-anak kepada BIng itu berarti mengalahkan maksud dan tujuan pengajaran BIng itu sendiri.

Jika pengajaran BIng berhasil, akibatnya adalah anak-anak menyenangi BIng. Karena ada kecenderungan bahwa yang dari "sana" itu dinilai lebih baik, mungkin

sekali akibatnya adalah bahwa anak-anak yang masih sangat muda itu "jatuh cinta" kepada BIng dan kurang mencintai BI. Implikasinya adalah seperti yang diuraikan di atas: dapat ringan dan dapat berat. Karena itu, pelaksanaan ketentuan bahwa BIng *boleh* diajarkan di SD itu hendaklah dilakukan dengan sangat berhati-hati.

5. Penutup

Makalah ini, seperti yang dikatakan di dalam "Pendahuluan", mencoba membahas pembinaan BI di dalam hubungannya dengan BA. Inferensi yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah (1) di dalam penyebaran BI kepada orang-orang Indonesia yang belum menggunakannya atau yang masih menggunakannya secara sanga terbatas, BA tidak merupakan kendala; dan (2) karena BIng mempunyai kekuatan yang lebih besar (yakni mempunyai kekuasaan, daya tarik, dan daya tekan yang lebih besar) daripada BI, BIng mempunyai potensi menyaingi BI di dalam pembinaan BI pada tataran yang lebih sublim, yaitu penanaman dan pemupukan sikap yang positif dan rasa cinta kepada BI.

Inferensi yang kedua itu, jika benar, berimplikasi bahwa penanaman dan pemupukan sikap yang positif dan rasa cinta kepada BI menjadi sukar. Salah satu usaha yang dapat mengurangi kesukaran itu adalah menanamkan serta memupuk rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Penalarannya adalah bahwa rasa nasionalisme Indonesia yang kuat dapat menumbuhkan cinta kepada apa saja yang bernama *Indonesia*. Yang perlu dijaga adalah penanaman dan pemupukan nasionalisme itu tidak menjurus ke ultranasionalisme yang sempit.

Akhirnya, barangkali tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa makin tinggi kesejahteraan rakyat, makin besar pula kita dapat berharap rakyat Indonesia bersikap positif terhadap bahasa Indonesia dan kemudian mencintainya. Penalarannya adalah bahwa jalan menuju hati seseorang, kata sebuah peribahasa bahasa Inggris, adalah melalui perutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Bickerton, D. 1975. *Dynamics of a Creole System*. London: Cambridge University Press.
- Kasbolah, Kasihani dan M. Anugerahwati. 1993. "English for Elementary School: A Challenge for Teacher Training Program (*sic*)". Makalah yang disampaikan pada Seminar Ke-41 TEFLIN. Padang, 9-11 September.
- Kelman, H.C. 1971. "Language as an Aid and Barrier to Involvement in the National System", Dalam Rubin, J dan B.M. Jernudd [Penyunting]. *Can Language be Planned?* Honolulu: University of Hawai, East-West Center. 21-51.
- Kloss, H. 1969. *Research Possibilities on Group Bilingualism: A Report*. Quebec: International Center for Research on Bilingualism.
- Lambert, William E dll. 1968. "A Study of the Roles of Attitudes and Motivation in Second-Language Learning". Dalam Fishman, Joshua (Penyunting). *Readings in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton. 473-491.
- Mackey, William F. 1973. *Three Concepts for Geolinguistics* (Manuskrip). Quebec: Centre international de recherches sur le bilinguisme.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Saville-Troike, Muriel. 1982. *The Ethnography of Communication: An Introduction*. Oxford: Basil Blackwell.
- Stewart, William. 1968. "A Sociolinguistic Typology for Describing National Multilingualism. Dalam Fishman, Joshua [penyunting]. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton. 531-545 .

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Asing sebagai Kendala Pembinaan Bahasa Indonesia
Pemakalah : Asim Gunarwan
Pemandu : Jan Hoesada
Pencatat : Artanti
Dedi Puryadi

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Yali, Mantan Dosen Universitas Gadjah Mada

Huruf *oe* sekarang ini masih digunakan, misalnya, pada penulisan Anton M. Moeliono. Sesuikah *oe* ini dalam bahasa asing? Judul makalah seharusnya diganti menjadi "Bahasa Asing sebagai Teman Bahasa Indonesia"?

Jawaban:

Masalah *oe* akan dibahas di luar forum. Usul Anda mengenai judul kata *kendala* pada makalah ini diganti dengan *teman*, terlambat, sayang usulan ini baru sekarang, tidak dua bulan yang lalu.

2. **Pertanyaan:** Bruce Frederick Jarvis, Penerjemah dan Editor, Jakarta

Apakah salah satu prasyarat bagi guru bahasa Inggris sebelum sampai di lapangan agar menjaga tingkat mutu bahasa Indonesiannya termasuk praktik di bidang?

Jawaban:

Pemakai bahasa Indonesia yang baik dan benar belum dibuktikan. Contoh, bahasa Indonesia yang digunakan oleh pemakalah dipandang baik oleh Bapak Anton M. Moeliono.

3. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Bagaimana pendapat Bapak Asim tentang ungkapan kalimat yang tidak menunjang? Bagaimana struktur bahasa Cina sesuai dengan penelitian Bapak?

Jawaban:

Penelitian bahasa Cina pernah dilakukan di Jakarta. Idealnya pengamatan penelitian ini adalah masyarakat keturunan Cina yang ada di seluruh Indonesia.

termasuk di Bangka dan Kalimantan Barat. Sebagian besar masyarakat keturunan Cina di Kalimantan Barat memakai bahasa Tiu Chu. Bahasa Tiu Chu tinggi pemakaiannya. Akan tetapi, kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masalah biaya. Masalah ungkapan kalimat bahasa asing perlu diperhatikan. Misalnya, dalam bahasa iklan, pengaruh iklan cenderung salah.

Contoh:

- 1) *Kopiko gantinya ngopi, seharusnya, makan kopiko gantinya ngopi.*
- 2) *Cita-cita saya ingin jadi ABRI.* Yang benar kalimat ini adalah *Saya ingin menjadi ABRI.*

4. **Pertanyaan:** Leonardus Lumbanbatu, Kopertis Wilayah III Palembang

Saya melihat bahwa kendala bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia adalah dari struktur bahasa Inggris yang mendominasi struktur bahasa Indonesia sehingga struktur bahasa Inggris diterjemahkan bulat-bulat dan struktur itu dipolakan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, *Inilah kantor di mana ia bekerja.* Struktur kalimat bahasa Inggris tersebut dapat disederhanakan menjadi struktur bahasa Indonesia. *Inilah kantor tempat ia bekerja.*

Jawaban:

Saya melihat dominasi bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia tidak hanya secara mikro, strukturnya saja, tetapi bahasa secara makro.

5. **Pertanyaan:** Siti Aminah, Pusat Pelatihan Niaga, Departemen Perdagangan

- a. Pada penutup makalah Bapak dikatakan "penalarannya" adalah bahwa *Jalan menuju hati seseorang adalah melalui perutnya.* Maksudnya apa?
- b. Hal itu bila dikaitkan dengan pembinaan terhadap rasa kepemilikan bahasa karena penataran di Diklat Niaga, Departemen Perdagangan, yang dilaksanakan tiga dan empat bulan mata sajian bahasa Indonesia hanya 8 jam. Padahal, pada ujian akhir mata sajian bahasa Indonesia menjadi "hantu" yang menakutkan bagi karyawan menghadapi ujian ini. Mengapa hanya 8 jam?

Jawaban:

- a. Yang dimaksud dengan peribahasa tersebut dapat saya jelaskan bahwa kalau rakyat Indonesia merasa sejahtera karena hasil pembangunan, rakyat akan mencintai apa saja yang berbau Indonesia, misalnya kebudayaan Indonesia, apalagi bahasa Indonesia. Sebaliknya, apabila kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi, sudah dipastikan bahwa rakyat akan membenci semua hal yang berbau Indonesia dan kemungkinan mereka juga membenci bahasa Indonesia.

b. Saya tidak berkuasa mengubahnya.

6. **Pertanyaan:** S. Eryda Lubis, Mahasiswa Pascasarjana S-3 IKIP Jakarta

Sejauh mana pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia dan bagaimana cara pengajaran bahasa Indonesia di lapangan? Saya tidak merasakan bahwa bahasa Inggris mempengaruhi bahasa Indonesia saya. Selain itu, pelajaran bahasa Inggris sudah mulai diajarkan di tingkat SD di IBT dan hal ini tidak mengganggu bahasa Indonesia.

Jawaban:

Kalau ada, hal itu merupakan suatu perkecualian. Akan tetapi, bila bahasa Inggris diajarkan terlalu dini, misalnya di tingkat SD, ditakutkan si anak akan lebih mencintai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tanamkan sikap kepada anak

dalam hati —> Indonesia

berpikir —> universal

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH

Sutarto

SMP Negeri 67 Jakarta

1. Pengantar

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia pada setiap jenjang pendidikan telah ditetapkan di dalam kolom tujuan kurikuler Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Rumusan tujuan kurikuler itu adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa SD/SMP/SMA.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada kolom berikutnya telah pula ditetapkan tujuan instruksional umum (TIU). TIU ini dirumuskan sesuai dengan uraian materi, pokok bahasan, sekaligus diikuti waktu yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya, dalam Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar dikemukakan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dipersiapkan oleh guru dan diikuti oleh siswa bertolak pada kegiatan kurikuler. Asas pelaksanaannya didasarkan pada tujuan instruksional khusus (TIK) yang ingin dicapai. TIK yang ingin dicapai ini dijabarkan dari TIU yang disesuaikan dengan uraian materi pelajaran dan alokasi waktu yang telah ditetapkan.

Setelah guru berusaha dengan segala kemampuannya untuk mencapai TIK yang telah ditentukan, dan apabila pada akhir tahun pelajaran siswanya dinyatakan naik kelas atau lulus ujian akhir, bahagialah hatinya. Kebahagiaan yang dinikmati oleh guru itu juga kebahagiaan sekaligus kebanggaan para orang tua yang anak-anaknya naik kelas dan telah lulus ujian akhir. Ucapan terima kasih yang tulus pun disampaikan para orang tua kepada guru yang telah membimbing anak-anaknya menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Kebahagiaan dan kebanggaan orang tua itu mendadak berubah menjadi kekecewaan manakala anaknya yang lulus SD belum bisa menyampaikan pidato sambutan pada pesta hari ulang tahunnya. Sementara itu, anaknya yang telah lulus SMP tidak bisa membuat surat undangan dan kakaknya yang telah lulus SMA juga belum bisa memandu acara pada hari ulang tahun adiknya itu.

Apa yang terjadi kemudian? Bergemalah berbagai keluhan akan rendahnya keterampilan berbahasa Indonesia lulusan SD, SMP, dan SMA. Bahkan, di kalangan perguruan tinggi pun bergaung hal yang sama. Mahasiswa kurang terampil menyampaikan pendapat, gagasan, dan perasaannya, baik secara lisan maupun tertulis.

Berbagai upaya dilakukan untuk memecahkan masalah seperti yang diungkapkan di atas. Pertemuan-pertemuan ilmiah telah menemukan penyebabnya, bahkan saran dan keputusan yang baik dan konstruktif telah dirumuskan. Akan tetapi, keluhan-keluhan itu masih tetap bergema sampai saat ini. Mengapa? Hal itu karena saran dan keputusan tersebut baru merupakan langkah awal pemecahan masalah. Ibarat seorang dokter yang akan mengobati penyakit pasiennya baru sampai pada tahap diagnosis. Jenis penyakit pasiennya telah ditentukan berdasarkan pemeriksaan atau penelitian terhadap gejala-gejala atau penyebabnya. Penyakit pasien itu akan sembuh apabila telah diberi obat yang tepat. Tentu saja pasien tersebut harus memakan obat yang telah diberikan dokternya sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Oleh karena itu, langkah awal yang telah dilakukan dengan baik untuk mengatasi masalah pengajaran bahasa Indonesia itu harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Saya kira, kita sependapat bahwa variabel penentu keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia itu banyak dan saling berkaitan. Oleh karena itu, para penentu kebijakan, guru, siswa, lingkungan keluarga serta masyarakat hendaklah bersikap seperti pasien yang dengan tekun memakan obat sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokternya.

Beberapa langkah nyata telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah. Di antaranya untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru, sekarang sedang dilaksanakan Program Penyetaraan D-II Guru SD dan akan diikuti dengan Program Penyetaraan D-III Guru SMP. Kita berharap langkah nyata ini meniupkan angin segar pada pengajaran bahasa Indonesia di sekolah.

2. Situasi Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah

Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah (SD, SMP, SMA) berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini terdiri atas tiga komponen berikut:

- 1) landasan program pengembangan;
- 2) garis-garis besar program pengajaran (GBPP);
- 3) petunjuk pelaksanaan.

Di antara tiga komponen tersebut yang langsung berhubungan dengan tugas guru sehari-hari di sekolah adalah komponen 2 dan 3. Hal itu sejalan dengan pendahuluan GBPP bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa GBPP adalah salah satu komponen dari perangkat kurikulum yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di sekolah.

Pada bagian akhir GBPP bahasa Indonesia dikemukakan juga bahwa GBPP merupakan pedoman mengajar bagi guru yang berisikan materi minimal yang perlu dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kolom tujuan kurikuler dan kolom TIU. Hal itu mengisyaratkan bahwa seluruh bahan pengajaran yang dituangkan dalam GBPP harus habis diajarkan kepada siswa. Dengan kata lain, target kurikulum harus seratus persen. Target kurikulum untuk semester ganjil bagi SMP dan SMA atau cawu satu dan dua bagi SD tidak terlalu sulit dicapai karena alokasi waktu yang ditentukan oleh kurikulum untuk melaksanakan KBM masih seimbang dengan waktu yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan. Akan tetapi, untuk semester genap atau cawu tiga, target kurikulum itu tidaklah mudah dicapai karena banyaknya hari libur sehubungan dengan bulan puasa, Idul Fitri, dan pelaksanaan EBTA/Ebtanas bagi kelas III. Misalnya, alokasi waktu untuk semester genap untuk kelas I dan II SMP berdasarkan GBPP adalah 80 jam pelajaran. Waktu yang ada berdasarkan kalender pendidikan setelah dikurangi libur, waktu untuk melaksanakan tes subsumatif dan sumatif, dan cadangan, hanya 70 jam pelajaran. Belum lagi selama bulan puasa satu jam pelajaran hanya 30 menit. Hal itu merupakan hambatan bagi guru untuk menyelesaikan materi semester genap. Untuk mengatasi hal itu, penyusunan program semester genap harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia berdasarkan kalender pendidikan. Sudah barang tentu hal itu dapat mempengaruhi kualitas KBM. Namun, target kurikulum tetap harus tercapai agar siswa tidak banyak mengalami kesulitan pada saat menghadapi ujian akhir.

Berdasarkan penomoran pokok bahasan dalam GBPP, materi pengajaran dikelompokkan dalam unit-unit yang dalam setiap unit umumnya terdiri atas enam pokok bahasan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) membaca,
- 2) kosakata,
- 3) struktur,
- 4) menulis,
- 5) pragmatik, dan
- 6) apresiasi bahasa dan sastra Indonesia.

Untuk memudahkan pengontrolan agar tidak ada pokok bahasan yang tertinggal, urutan penyajian bahan pengajaran dalam buku pelajaran yang beredar saat ini umumnya mengikuti urutan yang ada dalam GBPP. Urutan penyajian dalam KMB di kelas juga mengikuti urutan GBPP: selesai membahas unit 1, dilanjutkan unit 2, dan seterusnya sampai unit terakhir. Demikian juga urutan pokok bahasan sehingga pola urutan penyajiannya terasa monoton.

Berhasilkah pengajaran bahasa Indonesia selama ini? Jawaban pertanyaan itu secara umum telah dikemukakan di depan. Akan tetapi, di sini perlu dikemukakan tolok ukur keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia.

Dalam buku *Petunjuk Proses Belajar-Mengajar* dikemukakan bahwa suatu KBM tentang suatu materi pelajaran dinyatakan berhasil apabila TIK yang telah ditetapkan

dapat tercapai. Tolok ukur keberhasilan itu adalah daya serap terhadap materi pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun klasikal. Tingkat keberhasilan KBM itu adalah 85/75 persen. Artinya, suatu KBM dinyatakan berhasil jika 85 persen atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti KBM telah menguasai materi pelajaran yang diajarkan 75 persen atau lebih. Daya serap siswa ini dihitung berdasarkan tes formulir. Sementara itu, berdasarkan tes subsumatif dan sumatif, siswa dinyatakan berhasil dalam bidang studi/subbidang studi tertentu selama satu semester apabila nilai rapor bidang studi/subbidang studi tersebut sekurang-kurangnya 6.

Apabila tolok ukur keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia adalah daya serap dan nilai rapor yang diperoleh siswa seperti dikemukakan di atas, pengajaran bahasa Indonesia sudah berhasil. Hasil pengamatan saya pada saat mengadakan kunjungan kelas terhadap peserta Pemantapan Kerja Guru (PKG) dan data yang saya peroleh dari kepala sekolah peserta PKG, daya serap selalu dapat dicapai. Siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus ujian karena nilainya kurang dari 6 juga jarang sekali terjadi.

Keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia, berdasarkan tolok ukur seperti yang dikemukakan di atas, khususnya di SMP dan SMA tidak terlepas dari semakin banyaknya guru yang telah mengikuti penataran dengan pola PKG yang telah dirintis sejak tahun 1986. Materi penataran dengan pola PKG itu secara umum mencakup sikap, pengetahuan, dan praktik dengan perbandingan sebagai berikut.

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1) Sikap | 9 % (Program Umum) |
| 2) Pengetahuan | 28 % (Program Pokok) |
| 3) Praktik | 63 % (Program Praktik) |

Dengan pola semacam itu, sikap guru terhadap profesinya akan semakin positif, pengetahuannya semakin bertambah, dan wawasannya pun semakin luas, dan semakin terlatih mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi KBM. Dengan kondisi semacam itu, tujuan yang telah ditetapkan dalam persiapan KBM akan tercapai.

Dalam perkembangannya sampai saat ini penataran dengan pola PKG itu menimbulkan dampak positif yang sangat menggembirakan. Banyak guru termotivasi untuk menambah pengetahuannya dan memperluas wawasannya dengan berbagai cara. Guru yang latar belakang pendidikannya semula hanya PGSLP atau diploma setelah mengikuti PKG termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya sampai jenjang S-1. Berbagai pertemuan ilmiah yang membahas pengajaran bahasa Indonesia diikuti, sudah tentu tanpa harus mengorbankan tugas pokoknya.

Dengan semakin bertambahnya pengetahuan dan luasnya wawasan, semakin mantap pulalah para guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari karena para guru semakin mandiri dalam menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi KBM. Tidak hanya terhenti sampai di situ, pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki juga ditularkan kepada teman seprofesinya dalam berbagai kesempatan, misalnya, dalam

pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa Indonesia yang diselenggarakan di tingkat sekolah, kecamatan, koda/kabupaten, ataupun tingkat propinsi. Bahkan, persiapan dan pengalamannya mengajar selama ini telah banyak dituangkan dalam buku pelajaran. Menurut pengamatan saya, ada sejumlah guru yang menulis buku pelajaran setelah mereka mengikuti PKG. Kondisi semacam itu tentu akan banyak memberikan sumbangan yang berharga bagi kemajuan pengajaran bahasa Indonesia.

Saat ini banyak buku pelajaran bahasa Indonesia yang beredar di pasaran ditulis oleh guru. Buku-buku itu telah beberapa tahun menyemarakkan dunia pengajaran bahasa Indonesia, sementara buku pelajaran diterbitkan oleh Pemerintah belum ada. Baru pada tahun-tahun terakhir ini, khususnya di SMP, pengajaran bahasa Indonesia semakin semarak dengan diterbitkannya buku pelajaran bahasa Indonesia oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu kita sependapat bahwa tidak ada buku pelajaran yang sempurna. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu buku pelajaran yang sudah ada, pembinaan terhadap para guru agar tidak kendur semangatnya dalam menulis sangat diharapkan. Di sisi lain, banyaknya buku pelajaran yang beredar saat ini memberi peluang kepada guru untuk memilih buku pelajaran yang terbaik untuk siswanya. Bagi guru, ia dapat memadukan kelebihan setiap buku untuk diramu menjadi sajian yang menarik untuk siswanya di kelas sehingga KBM akan semakin menarik, semakin bervariasi, dan semakin memotivasi siswa dalam belajar, akhirnya semakin meningkat pula prestasinya.

Menurut Sumardi (1988), "pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang kurang disenangi, membosankan, tetapi juga ditakuti karena merupakan salah satu mata pelajaran yang menentukan seorang siswa naik kelas atau tidak naik kelas dan lulus atau tidak lulus." Untuk membuat siswa senang dan tidak bosan terhadap pelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan buku pelajaran, Kongres Bahasa Indonesia V mengamanatkan agar isi dan cara penyajian buku pelajaran bahasa harus menarik dan menunjang pembinaan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar. Tindak lanjut sebagai langkah nyata terhadap amanat kongres tersebut buku pelajaran bahasa yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah dasar dan menengah perlu segera ditingkatkan isi, mutu, serta cara penyajiannya. Untuk memenuhi amanat itu tidaklah mudah. Isi dan urutan penyajian materi pelajaran sangat berkaitan dengan kurikulum yang berlaku. Sementara itu, yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan cara penyajian (perwajahan). Dalam hal yang terakhir itu, sepanjang yang saya tahu, buku pelajaran bahasa Indonesia yang perwajahannya sudah ditingkatkan dibandingkan buku pelajaran yang lain adalah terbitan PT Widya Utama Jakarta.

Buku pelajaran bahasa Indonesia yang menunjang pembinaan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar, menurut Neville Grant, adalah buku pelajaran komunikatif. Buku pelajaran semacam itu banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, sehingga para siswa merasakan manfaat belajar bahasa karena dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan komunikasi mereka. Beberapa karakteristik buku pelajaran komunikasi (BPK) sebagai berikut.

- 1) BPK menekankan pada fungsi komunikatif.
- 2) BPK mencoba merangsang siswa agar merasa membutuhkan dan tertarik.
- 3) BPK menekankan keterampilan dalam menggunakan bentuk bahasa sehingga harus didasarkan pada aktivitas siswa.
- 4) BPK biasanya mempunyai keseimbangan yang baik di antara 4 keterampilan berbahasa.
- 5) BPK menekankan pada spesifikasi dalam mengarahkan definisi.
- 6) BPK berisi metode percakapan sehari-hari.
- 7) BPK menganjurkan siswa bekerja dalam kelompok dan berpasangan serta mampu membuat organisasi.
- 8) BPK menekankan pada kelancaran di samping ketelitian.

Saya kira setiap siswa senang kuis. Pemanfaatan permainan kuis dengan berbagai variasi dalam buku pelajaran bahasa Indonesia akan menambah daya tarik buku tersebut. Idenya dapat kita gali dari berbagai sumber, misalnya dari kuis humor yang ditanyakan oleh TPI. Tema dan materi kuis kita sesuaikan dengan materi dalam GBPP, misalnya dalam pokok bahasan pragmatik. Permainan ini, kecuali melatih keterampilan berbicara, juga melatih mengembangkan daya imajinasi, kekritisian, kekreatifan, dan keresponsifan siswa dalam menghadapi pelajaran dan kehidupan. Dengan demikian, buku pelajaran pun akan lebih mengarah ke buku pelajaran komunikatif.

Salah satu masalah yang harus kita hadapi dalam rangka menunjang keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia saat ini adalah kurang luwesnya kurikulum yang berlaku sekarang. Meskipun hanya salah satu variabel penentu keberhasilan pengajaran, kurikulum tergolong variabel yang sangat penting karena kurikulum besar pengaruhnya terhadap variabel-variabel lain, seperti guru, buku pelajaran, sarana, dan evaluasi.

Langkah nyata untuk mengatasi ketidakluwesannya kurikulum ini sedang dilakukan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Dikbud. Berdasarkan buram GBPP bahasa Indonesia yang saya baca pada pameran pendidikan bulan Agustus yang lalu, materi pembelajaran bukan urutan yang harus diikuti dan alokasi waktu hanya ditentukan per catur wulan, sedangkan untuk setiap unit kegiatan belajar-mengajar ditentukan oleh guru. Apabila kurikulum itu nanti telah diresmikan penggunaannya di sekolah, salah satu butir keputusan Kongres Bahasa Indonesia V, yaitu kurikulum bahasa harus luwes dan dapat mengembangkan kreativitas guru dalam kegiatan belajar-mengajar telah diwujudkan dalam langkah yang nyata.

Salah satu keluhan yang sering muncul selama ini adalah pengajaran bahasa Indonesia kurang mengembangkan keterampilan berbahasa dan memberi peluang siswa untuk mengembangkan daya imajinasi, kekritisian, kekreatifan, dan keresponsifan. Bagaimana mengembangkan latihan agar siswa terampil berbahasa dan

berpeluang mengembangkan daya imajinasinya, kekritisannya, kekreatifannya, dan koresponsifannya? Latihan yang hanya memberikan satu kemungkinan jawaban yang benar dikembangkan menjadi latihan yang memberikan peluang jawaban lebih dari satu. Berikut ini contohnya.

Latihan menyusun kalimat berdasarkan gambar. Kepada siswa disajikan gambar seekor monyet sedang duduk di dahan. Posisi duduknya bersandar pada pokok pohon dengan kedua lutut ditekuk mendekati perutnya. Kedua tangannya memegang makanan yang diarahkan ke mulutnya yang menganga. Siswa disuruh menyusun kalimat berdasarkan gambar tersebut. Kalimat yang diharapkan dari siswa sebenarnya hanya satu, yaitu *Monyet itu duduk*.

Latihan semacam ini dapat kita kembangkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun kalimat sebanyak-banyaknya berdasarkan gambar yang diamatinya. Beberapa kemungkinan kalimat yang disusun oleh siswa, misalnya sebagai berikut.

- 1) Monyet itu sedang duduk.
- 2) Monyet itu bengong.
- 3) Monyet itu sedang bengong.
- 4) Monyet itu makan.
- 5) Monyet itu sedang makan.
- 6) Monyet itu makan pisang.
- 7) Monyet itu sedang makan pisang.

Tentu saja masih banyak lagi kemungkinan kalimat yang disusun oleh siswa. Kecuali itu, ada juga kemungkinan siswa tidak menggunakan kata *monyet*, tetapi *kera*. Latihan itu tidak hanya mengembangkan imajinasi dan kreativitas siswa, tetapi juga mengembangkan kosakatanya. Apabila banyak berlatih dengan pola itu, siswa berpeluang memahami pola kalimatnya tanpa harus mempelajari terlebih dahulu teori tentang pola kalimat. Jadi, secara tidak langsung pengetahuannya tentang pola kalimat akan bertambah.

Contoh lain seperti berikut ini. Contoh ini saya ambil dari Kaswanti Purwo (1992).

Rangkaikan keempat kalimat berikut menjadi satu kalimat.

- a) Wasit meniup peluit.
- b) Wasit memanggil kapten kesebelasan.
- c) Wasit membuang undi.
- d) Wasit memulai pertandingan.

Sekurang-kurangnya ada empat kemungkinan rangkaian yang dapat disusun, misalnya sebagai berikut.

- 1) Wasit meniup peluit, memanggil kapten kesebelasan, dan kemudian membuang undi untuk memulai pertandingan.

- 2) Sesudah meniup peluit dan memanggil kapten kesebelasan, wasit membuang undi, dan memulai pertandingan.
- 3) Pertandingan dimulai sesudah wasit meniup peluit, memanggil kapten kesebelasan, dan membuang undi.
- 4) Sesudah meniup peluit, wasit memanggil kapten kesebelasan dan membuang undi kemudian memulai pertandingan.

Bagaimana melatih siswa terampil menyampaikan pendapat, gagasan, atau perasaannya? Rubrik "Uji Imajinasi" dalam majalah *Bobo* atau rubrik "Opini Anak" dalam majalah *Ayah Bunda* memberikan contoh bagaimana melatih siswa terampil menyampaikan pendapat, gagasan, atau perasaan. Kecuali itu, siswa juga berpeluang untuk mengembangkan imajinasi, kekritisian, kekreatifan, dan keresponsifannya.

Contoh dari *Bobo* Nomor 24, 24 September 1992.

Soal

Teman-teman, saya sudah duduk di bangku SMP kelas I, tapi tinggi badan saya hanya 143 cm. Kecil, ya? Karena kecilnya, saya dikira anak kelas III SD. Saya jadi malu, *deh!* Apakah teman-teman punya saran agar tinggi badan saya bisa bertambah? Saran dari teman-teman saya tunggu!

E. Jakarta

Berikut ini contoh jawabannya.

- 1) Kamu tidak perlu berkecil hati karena banyak orang badannya kecil, tapi punya nama. (Astrid Rizky A.S.)
- 2) E, seharusnya kamu bersyukur pada Tuhan karena, meskipun kecil, tubuhmu sempurna. Lihatlah di sekelilingmu. Banyak orang yang kurang sempurna, tetapi mereka tidak merasa malu. Bila ada orang mengejek kamu sebagai murid SD, *cuekin aja!* Nanti mereka juga merasa bosan.

Contoh dari *Ayah Bunda*, No.22/1992.

Pertanyaan

Menurutmu, perlukah anak sekolah diberi uang saku?

Contoh jawaban

- 1) Uang saku penting karena anak perlu mandiri. (Karen A. kelas VI)
- 2) Uang saku perlu untuk keperluan mendadak, misalnya ada teman sakit, kita dapat memakai uang itu untuk biaya kendaraan, misalnya bajaj atau taksi. (Annisa kelas VI)

Latihan-latihan dengan cara seperti itu yang harus dipupuk dan dikembangkan agar siswa terampil berbahasa. Siswa di kelas lebih banyak aktif sehingga mereka tidak bosan karena dirangsang asyik berpikir dan berbuat.

Keberhasilan atau kegagalan pengajaran bahasa Indonesia ditentukan oleh sejumlah variabel yang saling berkaitan. Salah satu variabel yang juga ikut menentukan keadaan pengajaran bahasa Indonesia, seperti dikemukakan di atas, adalah evaluasi. Hasil evaluasilah yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya pengajaran.

Di atas telah dikemukakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi (tertulis) dikatakan berhasil, tetapi siswa kurang terampil berbahasa. Ini suatu indikasi bahwa alat evaluasi yang digunakan belum mengevaluasi keterampilan berbahasa, terutama keterampilan lisan. Sampai saat ini bentuk tes untuk ujian akhir lebih banyak menggunakan bentuk pilihan ganda. Sementara itu, menyusun butir soal berbentuk pilihan ganda untuk mengevaluasi keterampilan berbahasa tidaklah mudah.

Menurut hemat saya, masalah ini perlu segera dicarikan pemecahannya agar hasil evaluasi memberikan gambaran yang sama dengan keterampilan berbahasa siswa karena sistem evaluasi yang diterapkan selama ini besar pengaruhnya terhadap arah KBM dan minat belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 1988. *Bahan Pengajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 1984*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Keputusan Kongres*. Kongres Bahasa Indonesia V.
- . 1987. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA): Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*.
- . 1986. *Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP): Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*.
- . 1986. *Kurikulum Sekolah Dasar (SD): Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*.
- . 1987. *Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP): Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar*.
- . 1987. *Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP): Petunjuk Pelaksanaan Penilaian*.
- Grant, Neville. 1989. *Making The Most of Your Textbook*. London New York: Longman.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa: Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1992. *Pengajaran Bahasa Indonesia dengan Pendekatan Komunikatif: SMP*. Makalah Temu Wicara dengan Guru-guru SMP di Jakarta dan Surabaya.
- Hami Seno, Winarno. 1987. *Pemantapan Kerja Guru (PKG) Bahasa Indonesia di SMP dan SMA*. PPPG Bahasa Jakarta.
- Sumardi, Mulyanto. 1988. *Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah: Gramatika atau Komunikasi?* Makalah Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah
Pemakalah : Sutarto
Pemandu : Dendy Sugono
Pencatat : S. Amran Tasai
Erlita Burhanuddin

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Arifin Usman, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin

Beberapa orang dosen mengeluh karena mereka sulit sekali mengajarkan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Hal itu, antara lain, terjadi karena lulusan SMA itu sangat minim pengetahuan bahasa Indonesianya. Menurut saya, kurikulum SMA itu sangat tinggi karena tujuan yang dicapai itu mengambang. Kita tidak dapat mengetahui apakah tujuan pengajaran bahasa Indonesia itu dan bagaimanakah metode pengajarannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana teknik atau metode pengajarannya?

Jawaban:

Keluhan yang Bapak katakan itu sudah saya singgung di dalam makalah saya. Seharusnya kita tidak mengajarkan teori. Misalnya, kita akan mengajarkan *ejaan*. Kita ambilkan wacana dari koran atau majalah, dan wacana itu tidak diberi tanda baca apa pun atau tanpa huruf kapital. Para siswa kita minta untuk melengkapinya. Jadi, kita tidak mengajarkan teori, tetapi langsung praktik.

2. **Pertanyaan:** Subroto, SMA Negeri 2 Banjarmasin

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu (1) saya mendukung sepenuhnya apa yang Bapak tuliskan di dalam makalah Bapak dan (2) saya kurang sependapat kalau Bapak mengatakan, dari segi keterampilan, kita menemui kegagalan dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Jawaban:

Yang pertama tidak perlu saya tanggapi, tetapi yang kedua saya jawab sebagai berikut. Kita melihat dengan kacamata yang berbeda. Kacamataanya dilihat dari, terutama, kalangan di luar SMA, SMP, atau SD. Jadi, penilaian keluhan yang muncul dari perguruan tinggi yang mengemukakan bahwa lulusan SMA ternyata belum mampu menerapkan *ejaan* dengan baik, misalnya. Akan

tetapi, kalau dilihat dari kacamata kita sebagai pengajar bahwa di SMA dan SMP lebih banyak diajarkan mengarang, saya setuju bahwa kita sudah berhasil.

3. **Pertanyaan:** Dra. Kerarin Bangun, SMA Negeri 17 Jakarta

Saya berpengalaman hampir sepuluh tahun mengoreksi Ebtanas untuk SMA. Soal-soalnya terdiri atas pilihan ganda 60% dan mengarang 40%. Yang ingin saya kemukakan ialah teori dari pembuat soal terlalu muluk, tetapi pada praktiknya, menurut pengalaman saya, karangan yang diminta itu paling tidak satu setengah halaman. Namun, guru jarang mengoreksi karangan itu mulai dari kalimat pertama sampai akhir sehingga hampir setiap mengoreksi saya merasa kesal dan frustrasi. Jadi, saya usul untuk evaluasi keterampilan siswa atau pengungkapan pikirannya tidak usah sampai satu karangan penuh, cukup 2-3 paragraf saja.

Jawaban:

Saya sependapat dengan usul Ibu.

4. **Pertanyaan:** Daniel Tulalessy, Pusat Perbukuan

Saya melihat kelemahan di lapangan yang barangkali bisa direkomendasi dari kongres ini. Pertama, kurikulum itu tidak pernah diuji coba sehingga sangat perlu diadakan pelatihan penataran terhadap kurikulum secara intensif. Kedua, pelatihan yang ada seperti sekarang ini diintensifkan menjadi pola yang sudah dianggap bagus. Ketiga, belum adanya satu sistem supervisi. Sistem pengawas yang ada sekarang ini belumlah pengawas bidang studi sehingga guru sulit melihat kelemahannya.

Jawaban:

Sejauh yang saya ketahui, di setiap kantor wilayah akan dibentuk satu tim calon perekrutan kurikulum. Saya dengar berita terakhir untuk kurikulum 94 itu, menurut programnya, bulan Januari sudah harus dimasyarakatkan ke propinsi sampai ke tingkat sekolah. Jadi, pemasyarakatan kurikulum, seperti yang Bapak sarankan, saya lihat sudah akan dilaksanakan lebih intensif. Kedua, saya setuju. Ketiga, saya sependapat dengan Bapak.

5. **Pertanyaan:** Surono, Ketua MLI Cabang Semarang

Pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang pandangan umum yang mengatakan bahwa peserta didik itu pandai dalam bidang, misalnya, biologi atau matematika, otomatis bahasa Indonesianya baik. Akibatnya, nilai bahasa Indonesia itu bisa diatur. Kedua, jika Kurikulum 94 itu sudah jadi, bagaimana

pendapat Bapak seandainya mata pelajaran bahasa Indonesia itu di tingkat dasar dan lanjutan pertama lebih menekankan keterampilan atau kemampuan berbahasa dan bukan pengetahuan berbahasa?

Jawaban:

Pertama, saya tidak sependapat dengan pandangan itu karena, pengalaman saya, beberapa anak nilai eksaktanya tinggi, tetapi kurang memperhatikan bahasa Indonesia. Bahkan, pernah saya tidak mau mengubah nilai 5 menjadi 6 meskipun nilai eksaktanya tinggi. Kedua, sejauh yang saya tahu –saya mengamati beberapa Bapak yang berkecimpung dalam kurikulum 94–kurikulum yang akan datang lebih menitikberatkan keterampilan daripada pengetahuan.

6. **Pertanyaan:** Annasiyah Chamid, SMP Negeri 5 Surabaya

Kalau kita melihat norma-norma yang telah dicanangkan di dalam Ebtanas itu sederhana, mengapa kita tidak mengikutinya agar guru bahasa Indonesia tidak dicemooh karena tidak mampu mengajar. Sebenarnya, selama ini tuntutan kita yang terlalu tinggi. Seharusnya, anak diberi keleluasaan untuk mengarang. Tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu isi, komposisi, dan bahasa. Saya menganggap perlu bahwa di perguruan tinggi sampai satu semester harus mengulang ejaan.

Jawaban:

Saya sependapat.

7. **Pertanyaan:** Ladiman, SMP Negeri 2 Kragan, Rembang

Hendaknya ada semacam piagam penghargaan atau klasifikasi c, a, atau b, yang diberikan kepada siswa, seperti pada mata pelajaran olahraga. Misalnya, klasifikasi keterampilan. Di dalam piagam keterampilan ada klasifikasi berbicara, siswa A mendapat klasifikasi C untuk mengarang.

Jawaban:

Pada prinsipnya, saya setuju. Akan tetapi, hal ini barangkali menjadi PR kita bersama untuk memikirkan bagaimana membuat penilaian keterampilan itu.

BAHAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)

Sumarsono
STKIP Singaraja

1. Prakata

Judul tulisan ini sudah ditentukan oleh panitia kongres, juga ruang lingkup persoalannya. Bahan pengajaran yang dibahas terbatas pada bahan yang ada di LPTK, dan LPTK yang dimaksud tentulah IKIP/FKIP. Ruang lingkup bahasan dalam makalah ini terbatas pada empat butir, yaitu (1) kondisi bahan pengajaran, (2) kendala dalam pelaksanaan pengembangan bahan, (3) faktor yang menentukan pengembangan pengajaran bahasa Indonesia di LPTK, dan (4) upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan bahan itu untuk menunjang tercapainya tujuan pengajaran bahasa Indonesia di LPTK.

Karena semua sudah dipatok dan diatur, bahasan ini lebih banyak didasarkan pada pengalaman empiris daripada konsep teoretis. Oleh karena itu, dalam kongres ini sebaiknya semua pihak (LPTK) dapat menyumbangkan pengalamannya.

2. Bahan Pengajaran di LPTK Dewasa Ini

Sebelum membicarakan pokok masalahnya, ada baiknya kita ingat bahwa dalam dasawarsa 1980 kita mengenal berbagai surat keputusan, baik dari Mendikbud maupun dari Dirjen Dikti, baik yang menyangkut pendidikan tinggi pada umumnya maupun yang hanya untuk LPTK. Beberapa SK yang sangat menentukan kurikulum LPTK dan mekanisme pelaksanaannya a.l. adalah yang berikut:

- 1) SK Mendikbud No. 039/U/1980 tentang Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan;
- 2) SK Mendikbud No. 0212/U/1982 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
- 3) SK Dirjen Dikti No. 20/DJ/Kep/1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Tenaga Kependidikan;
- 4) Surat Edaran Dirjen Dikti No. 583/D/T/1986 tentang Perubahan Kurikulum LPTK.

Berdasarkan SK yang ada, struktur kurikulum LPTK mencakupi (a) Mata Kuliah Dasar Umum, (b) Mata Kuliah Dasar Kependidikan, (c) Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS), dan (d) Mata Kuliah Proses Belajar-Mengajar (MKPBM). Jika kita berbicara tentang bahan pengajaran bahasa Indonesia di LPTK, yang diacu adalah MKBS, ditunjang langsung oleh sebagian MKPBM. MKBS bertujuan untuk memberikan penguasaan materi yang menjadi kewenangan mengajar calon guru bahasa Indonesia plus materi pengayaan atau pendalaman atas bidang studi yang menjadi kewenangannya itu. Besarnya porsi MKBS sekitar 110 SKS dari antara 146–160 SKS untuk program S-1. MKPBM bertujuan memberikan bekal kepada calon guru berupa metodologi mengajar (dalam arti luas) secara umum dan khusus bidang studi. Porsinya sekitar 20 SKS.

Mata kuliah yang tergolong MKBS itu sebenarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok inti dan kelompok penunjang. Yang saya maksudkan dengan kelompok inti adalah mata kuliah *keterampilan berbahasa*, yakni menyimak (2 SKS), berbicara (3 x 2 SKS), membaca (3 x 2 SKS), menulis (3 x 2 SKS, yang porsi SKS-nya mungkin bervariasi di berbagai LPTK. Kelompok itu dimaksudkan untuk menyiapkan calon guru supaya mereka lebih dahulu berkemampuan berbahasa yang memadai sebelum mereka sendiri kelak "menjadikan" muridnya terampil berbahasa Indonesia. Itulah sebabnya, untuk menempuh mata kuliah ini mahasiswa harus banyak berlatih menerampilkannya diri dalam **penggunaan bahasa** (*language use*), bukan mengutak-atik teori dan **kaidah bahasa** (*language usage*). Masalah teori menjadi tanggung jawab kelompok penunjang.

Kelompok penunjang dapat pula dibagi menjadi dua subkelompok. Subkelompok pertama adalah sejumlah mata kuliah yang materinya kelak **diajarkan**, seluruhnya atau sebagiannya, kepada murid sekolah menengah. Tercakup di dalamnya adalah mata kuliah fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, semantik, wacana, pragmatik, dan beberapa mata kuliah kesastraan (teori, sejarah, apresiasi), dengan catatan bahwa **pragmatik** mungkin belum secara merata dikuliahkan di semua LPTK (di Singaraja diberikan sejak 1987). Subkelompok kedua mencakupi mata kuliah yang bersifat teori tentang bahasa dan kesastraan, dengan fungsi untuk memperdalam dan memperluas wawasan mahasiswa terhadap subkelompok pertama. Termasuk ke dalam subkelompok ini adalah mata kuliah linguistik umum, linguistik komparatif, linguistik deskriptif, retorika, sosiolinguistik, psikolinguistik, kajian bukuteks, analisis kesalahan berbahasa, filsafat bahasa, teori puisi dan prosa, teori drama, kritik sastra, sastra bandingan, sosiologi sastra, dan sastra kontemporer.

Kelompok penunjang dengan dua subkelompok tersebut masih didampingi dua mata kuliah "praktikum", yaitu sanggar bahasa dan sanggar sastra. Di sini mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berkarya nyata dalam bahasa dan sastra: berdiskusi, berpidato, membaca puisi, berdrama mini, dan sebagainya. Jadi, sepanjang menyangkut sekian banyak mata kuliah di atas, "bahan pengajaran" bahasa Indonesia boleh dikatakan cukup memadai untuk mempersiapkan guru bahasa Indonesia yang terampil berbahasa Indonesia dan sekaligus mampu mengalihkan keterampilan dan pengeta-

huannya kepada murid-muridnya kelak. Masalahnya menjadi lain kalau kita melihat penjabaran dan pengembangan mata kuliah itu di lapangan.

3. Pelaksanaan Pengembangan dan Kendalanya

Harus dikatakan lebih dahulu bahwa LPTK pernah mempunyai kurikulum inti. Karena sifatnya yang "inti" itu, setiap LPTK tentu harus "mengembangkan" supaya dapat terlaksana, tetapi juga harus disesuaikan dengan, antara lain, jumlah staf, kemampuan, dan persepsinya terhadap kurikulum berikut konsep pengembangannya. Atas dasar hal itu, wajar sekali jika jumlah, jenis, dan sebaran mata kuliah di atas bisa berubah di setiap LPTK. Sayang sekali, selama ini tidak pernah ada upaya mengumpulkan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (atau jurusan di IKIP) seluruh Indonesia untuk menengok kembali kurikulum secara menyeluruh. Bisa ditebak bahwa departemen kita pun belum tentu mempunyai data akurat mengenai jumlah, jenis, dan sebaran mata kuliah tersebut. Apalagi yang menyangkut isi materi mata kuliah.

Isi bahan pengajaran (atau perkuliahan) sangat bergantung pada dua faktor penting, yakni sumber dan dosen. Sumber bahan yang pokok tentulah buku, kemudian jurnal dan majalah ilmiah. Kita semua maklum bahwa masalah buku sumber atau acuan ini merupakan salah satu titik lemah dalam pengembangan bahan pengajaran, dalam arti bahwa jumlah dan jenis untuk setiap mata kuliah boleh dikatakan belum memadai untuk tingkat pendidikan tinggi seperti LPTK. Belum lagi kalau kita lihat tahun awal penerbitannya kemudian, kalau ada, tahun akhir penerbitannya, banyak kita jumpai buku acuan yang terbit di atas lima tahunan, dan kalau ada yang beberapa kali diterbitkan isinya biasanya tidak berubah. Kadang-kadang kita jumpai sumber (dalam bahasa Indonesia) yang langka, padahal kebutuhan terhadap sumber itu pasti ada, bahkan mungkin mendesak. Contoh konkret adalah masalah *pragmatik*. Ketika Kurikulum 1984 muncul dan memuat pokok bahasan Pragmatik, banyak orang bingung karena petunjuk mengenai pragmatik itu tidak ada. Guru bertanya kepada orang-orang LPTK, dan yang terakhir ini kebanyakan tidak dapat menjawab dengan baik karena memang tidak memiliki sumber yang akurat. Tahun 1987 barulah terbit, secara terbatas, buku pragmatik karangan Prof. Dr. P.W.J. Nababan. Pada tahun itu juga Universitas Katolik Atmajaya Jakarta menyelenggarakan seminar tentang pragmatik, yang makalahnya kemudian dibukukan dengan judul PELLBA I, dieditori oleh Prof. Soenjono Dardjowidjojo, tahun 1988. Dua tahun kemudian, 1990, muncul buku pragmatik karangan Dr. Bambang Kaswanti Purwo.

Hal lain yang perlu dicatat mengenai buku-buku sumber berbahasa Indonesia adalah kenyataan bahwa buku-buku yang banyak dipakai sebagai pegangan dosen dan mahasiswa tadi pada umumnya, kalau bukan seluruhnya, bukanlah *babon* (Jawa: *induk*), melainkan *olahan* dari *babon-babon* dari luar. Kita memang belum memiliki khazanah *babon-babon* dalam bentuk terjemahan. Oleh karena itu, gagasan Prof. Takdir Alisjahbana agar kita menuntut kepada Pemerintah untuk menerjemahkan ratusan buku asing (yang *babon*) patut kita dukung.

Upaya Pemerintah untuk mengisi terbatasnya buku sumber sudah pernah dilakukan pada dasawarsa lalu, melalui program apa yang dikenal dengan program *refreshing*. Program ini mengirim sejumlah dosen LPTK ke mancanegara dan mengharuskan mereka untuk menyusun buku. Hasilnya sudah cukup banyak memenuhi rak perpustakaan LPTK. Menurut pengamatan saya, buku-buku sebagai produk program ini cukup mewakili perkembangan ilmu kebahasaan yang diperlukan oleh LPTK, tetapi jumlah dan jenisnya terasa masih kurang juga. Akan sangat bermanfaat jika program ini bisa diselenggarakan secara berkelanjutan atau setidaknya secara periodik, misalnya lima tahun sekali, agar kita bisa memantau perkembangan ilmu mengenai **pengajaran bahasa** (*language teaching*) dan **belajar bahasa** (*language learning*). Saya pikir kajian dalam bidang ini sangat vital bagi staf dosen di LPTK yang memang khusus mencetak calon guru bahasa. Namun, kita sering ketinggalan kereta. Contoh nyata dapat kita lihat, misalnya, sepuluh tahun yang lalu kita sering masih berkuat tentang pengajaran dan belajar bahasa dengan landasan psikologi. Padahal, pokok bahasan mengenai hal itu di mancanegara sudah cukup banyak memperoleh masukan dari **neurologi**. Di Indonesia, informasi yang agak meluas di kalangan bahasawan muncul dalam Kongres Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) di Ujungpandang (1988), dengan munculnya penyaji makalah Dokter Sudiarto beserta nyonya. Lalu, 1990, kembali Universitas Atmajaya menggelar seminar, kali ini dengan topik **linguistik neurologi**, yang hasilnya sudah dibukukan setahun kemudian (Dardjowidjojo, 1991).

Berdasarkan buku-buku sumber yang relatif terbatas itulah si dosen kemudian mengembangkan bahan perkuliahan mereka. Salah satu model pengembangan yang diwajibkan ialah penyusunan satuan acara perkuliahan (SAP). Di dalam SAP, antara lain tercantum penjabaran suatu mata kuliah menjadi pokok-pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan dijabarkan ke dalam beberapa subpokok bahasan. SAP juga mencantumkan sumber-sumber bahan yang menjadi acuan, sekadar mencantumkan buku ini dan itu. Ini berarti bahwa kontrol, walaupun ada, dari pihak atasan terhadap bahan yang akan dikuliahkan oleh dosen hanya bisa sampai pada pokok bahasan dan subpokok bahasan itu, sementara bahan yang sebenarnya disajikan di depan kelas tetap menjadi wewenang dan otonomi dosen, lepas dari kontrol siapa pun. Mahasiswa pun tidak bisa mengontrol karena SAP hanyalah dipegang oleh dosen (dan kadang-kadang atasannya), mahasiswa tidak pernah bisa mengetahui isi SAP itu. Kita tentu masih berharap adanya perkuliahan dengan cara tim (*team teaching*), yang bekerja sejak penyusunan SAP sampai pada pelaksanaan di dalam kelas, tetapi saya khawatir harapan itu tidak pernah terwujud di banyak LPTK. Dengan kata lain, kendali terhadap pelaksanaan pengembangan bahan pengajaran menjadi teramat longgar. Sebagai ilustrasi terhadap kurang (inovatif)-nya sumber, dan mungkin juga ditambah dengan "terisolasi"-nya dosen atau LPTK dari informasi ilmu mutakhir, pada tahun 1991 saya masih menemukan, di sebuah LPTK di wilayah Indonesia bagian timur, isi bahan mengenai kebenaran teori *interferensi* (yaitu masuknya unsur bahasa ibu ke dalam bahasa kedua atau bahasa asing yang digunakan oleh dwibahasawan), padahal

teori itu sudah dianggap ketinggalan zaman (Richards, 1974; Sumarsono, 1979). Kontrol internal (pada diri sendiri) dan eksternal menjadi sangat lemah.

Pengembangan bahan pengajaran yang sekaligus bisa terkontrol secara langsung ialah dengan meminta dosen untuk menyusun apa yang disebut **buku ajar**, yang struktur dan isi komponennya mirip dengan bahan untuk UT, dan yang berbeda dengan apa yang disebut BPKM (Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa) sebagaimana disarankan oleh Ad. Rooijakres (1990). Buku ajar ini setidaknya-tidaknnya dapat dipakai untuk MKBS yang nonketerampilan berbahasa. Buku ajar berisi, antara lain, bahan bacaan pokok yang harus dipelajari mahasiswa, tujuan instruksional (umum dan khusus), dan latihan. Bahan bacaan itu dapat diambil dari sumber, seluruhnya atau sebagiannya, atau dapat berupa hasil olahan dosen. Biaya reproduksi dapat dikoordinasi oleh lembaga. Karena sudah merupakan buku, kontrol terhadap bahan kuliah menjadi terbuka. Sayangnya, banyak dosen yang kurang terpanggil untuk menyusun buku ajar ini.

Dari paparan singkat di atas dapat disimpulkan adanya dua kendala pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan bahan pengajaran bahasa Indonesia di LPTK. **Pertama**, buku sumber atau buku acuan. Buku sumber ini terasa kurang jumlah, variasi, dan mungkin juga mutu dan kebaruan isinya. Kendala ini tampaknya dipengaruhi oleh situasi perbukuan secara nasional, khususnya buku ilmiah, baik dari segi penerbitan maupun segi penerjemahan. **Kedua**, dosen. Sepuluh tahun yang lalu kita mungkin masih ramai berbicara tentang besaran dan mutu dosen sekaligus. Sekarang, sejumlah LPTK, khususnya IKIP, mungkin tidak berbicara lagi soal besaran karena tenaga memang sudah cukup banyak. Akan tetapi, mengenai mutu, khususnya di FKIP dan STKIP, masih memerlukan perhatian. Semangat yang menggebu dari para dosen untuk melanjutkan ke S-2 dan S-3 di dalam negeri ternyata kadang-kadang terbentur pada terbatasnya dana TMPD; sementara untuk melanjutkan ke mancanegara, mereka terbentur pada kemampuan berbahasa Inggris. Kendala lain yang patut diperhatikan pula ialah *pengawasan*, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (di dalam kelas), dan evaluasi produk.

4. Bahan LPTK dan Kurikulum Sekolah

Sudah kita maklumi bahwa LPTK itu mendidik dan memproduksi guru sekolah menengah. Sebagian mata kuliah yang diperoleh mahasiswa di LPTK akan diajarkan kembali kepada murid di sekolah menengah. Jadi, proses pengembangan bahan untuk mata kuliah jenis ini sebenarnya perlu dilihat dari dua tahapan, yaitu tahap dari dosen ke mahasiswa, dan tahapan dari mahasiswa (guru) ke murid.

Apa yang saya paparkan di depan adalah pengembangan pada tahap pertama, dan itu pun tidak terkait dengan mahasiswa. Kalau dikaitkan dengan mahasiswa, ada hal menarik yang barangkali juga sudah menjadi isu nasional. Andaikata bahan perkuliahan sudah disusun dengan bagus berdasarkan sumber yang juga bagus, lalu bahan ini disajikan kepada mahasiswa. Andaikata pula, bahan tadi betul-betul bisa

dengan baik diajarkan oleh dosen (*teachable*), masih ada pertanyaan, apakah bahan tadi juga bisa dipelajari (*learnable*), dalam arti bisa diserap, dipahami, dan disimpan di benak mahasiswa dalam jangka panjang. Hal ini kita perhatikan, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa mutu masukan ke LPTK tidaklah sebaik yang ke non-LPTK. Bagaimanapun bagusya bahan kalau yang menerima bahan kurang mampu menyerapnya, hasil dan proses pengembangannya juga kurang. Salah satu akibat dari semua ini adalah *lamanya studi* mahasiswa di LPTK. Sekadar contoh, menurut penelitian Rindjin (1991) terhadap lama studi mahasiswa di Universitas Udayana, lama studi untuk mahasiswa FKIP (LPTK) di Singaraja adalah 4,7 tahun untuk program S1 yang dirancang untuk 4 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa lamanya studi mahasiswa ini semata-mata hanya disebabkan oleh mahasiswa sendiri, tetapi andil mahasiswa dalam hal ini tentulah cukup besar.

Sekarang, andaikata bahan tadi bisa diserap oleh mahasiswa, lalu bagaimana pengembangannya pada tahap kedua, yaitu ketika mahasiswa menyampaikan bahan itu kepada murid. Saya akan menyampaikan pengalaman saya selama 7 tahun terakhir dalam menangani mahasiswa berpraktik mengajar berdasarkan Kurikulum 1984. Untuk praktik mengajar, mahasiswa biasanya dilatih dulu di LPTK. Sesuai dengan misi LPTK untuk mendorong murid mampu *menggunakan* bahasa Indonesia atau terampil *berbahasa* Indonesia dengan baik dan benar, saya dan rekan-rekan berupaya keras agar dalam praktik di kampus mahasiswa membuat persiapan (satuan pelajaran) yang ketika disajikan kelak (dalam latihan antarteman) akan mengarah ke kegiatan penggunaan bahasa dan bukan ke arah belajar *kaidah* bahasa. Salah satu caranya ialah mahasiswa harus memadukan pokok bahasan *struktur* (yang ada dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran, GBPP) dan *kosakata* dengan *pragmatik* (sebagai pendekatan, sebagaimana disarankan oleh B. Kaswanti Purwo, 1990). Dengan demikian, murid tidak belajar kaidah bahasa dan kosakata lepas dari penggunaannya. Saya pikir, inti jiwa yang terkandung di dalam Kurikulum 1984 tentulah keterampilan berbahasa atau penggunaan bahasa tadi.

Kalau mereka sudah cukup berlatih di kampus, mahasiswa dilepas ke sekolah-sekolah dan di sana mereka dibimbing oleh guru bahasa Indonesia. Di sinilah saya melihat kendala yang rasanya sulit ditembus oleh LPTK sendirian. Menurut pengalaman, ternyata inovasi dan kreativitas pengembangan bahan pengajaran yang menjadi porsi latihan di kampus menjadi kandas karena tidak bisa diterapkan di sekolah tempat mereka berlatih. Mereka harus kembali ke GBPP "formal", kembali harus mengajarkan arti dan fungsi awalan *ber-*, *me-*, *ke-an*, *pe-*, dsb.; kembali harus mengajarkan subjek, predikat, objek, dalam kalimat; kembali harus mengajarkan periodisasi sastra, beda puisi dan prosa, dan aliran-aliran dalam sastra. Saya tidak bermaksud untuk memojokkan rekan-rekan guru yang mengajar di sekolah menengah karena saya juga tahu betul sistem dan mekanisme proses pembelajaran, dari perencanaan sampai dengan evaluasinya, tampaknya memang menyulitkan rekan-rekan guru keluar dari lilitannya. Persoalan klasik yang selalu muncul adalah ini: bagaimana atau untuk apa mengajarkan keterampilan berbahasa kalau soal-soal Ebtanas dan UMPTN masih menanyakan kaidah-kaidah bahasa; bagaimana hendak mengajarkan

keterampilan berbicara atau menulis kalau kelasnya berkisar antara 40–50 orang; siapa yang mau mengoreksi karangan murid sebanyak itu untuk beberapa kali dalam satu semester. Persoalan demikian sudah banyak muncul dalam Kongres Bahasa Indonesia V, 1988, sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan sekarang. Apalagi masalah ini bukanlah topik pokok yang harus saya bahas.

Yang ingin saya kemukakan hanyalah bahwa pengembangan bahan pengajaran bahasa Indonesia di LPTK tidak bisa dilepaskan dari kurikulum (dan pelaksanaannya) di sekolah menengah, tidak pula bisa dipisahkan dari kebijakan perencanaan pengembangan bahasa oleh Pusat Bahasa. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar penyusunan kurikulum sekolah lebih banyak melibatkan Pusat Bahasa dan LPTK, syukur kalau rekan-rekan guru di lapangan juga dapat dilibatkan. Pengalaman dengan Kurikulum 1984 dengan GBPP-nya berikut penjelasan-penjelasan yang menyusul kemudian sebaiknya tidak terulang lagi. Informasi akurat tentang kurikulum sebaiknya segera kami peroleh di LPTK. LPTK akan menyampaikan informasi kepada mahasiswa melalui pengembangan bahan agar mahasiswa kelak tak terlalu asing di sekolah.

5. Faktor Penentu Pengembangan

Faktor-faktor yang menentukan pengembangan sebagian sudah tersirat dalam paparan di atas dan sebenarnya berkisar pada pertanyaan-pertanyaan berikut: apa yang akan dikembangkan, akan dibawa ke mana pengembangannya, siapa yang mengembangkan, bagaimana cara mengembangkannya. Jawaban atas pertanyaan tersebut boleh dikatakan faktor-faktor yang dimaksud.

Faktor pertama adalah **bahan pengajaran**, sebagai jawaban atas pertanyaan, "apa yang akan dikembangkan". Bahan ini berhubungan dengan dua hal, yaitu mata kuliah dan silabusnya. Mata kuliah inti (keterampilan) dan penunjang dalam kelompok MKBS yang jumlahnya di atas 20 itu dapat dianggap "terlalu" banyak, dan jumlah mata kuliah ini dapat menentukan arah pengembangan: terpusat atau tersebar. Kemudian, setiap mata kuliah akan dikembangkan dalam bentuk silabus, pemerian singkat atas mata kuliah, yang kemudian dikembangkan secara terurai dan terperinci dalam bentuk sajian di depan kelas, atau mungkin dalam bentuk buku ajar. Pengurangan beberapa mata kuliah penunjang dalam MKBS, dan memindahkan jam (SKS) ke kelompok keterampilan, tentu akan berpengaruh terhadap mutu keterampilan berbahasa mahasiswa.

Yang terakhir itu berkaitan dengan faktor kedua, yaitu **tujuan**. Jika tujuan pendidikan guru bahasa Indonesia di LPTK kita tekankan kepada "guru yang terampil berbahasa Indonesia" lebih dari "guru yang mempunyai wawasan yang luas tentang bahasa Indonesia", implementasinya adalah lebih banyak memberikan latihan dan pembiasaan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk itu, beberapa mata kuliah nonketerampilan harus diikhlasakan untuk dihapus. Bahan

pengajaran memang sangat layak "mengabdikan" kepada tujuan pengajaran atau tujuan pembelajaran.

Faktor ketiga pastilah **manusia** yang terlibat dalam proses pendidikan (secara makro) dan dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Manusia yang terlibat dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran adalah **dosen** dan **mahasiswa**, dan kalau kita harus memilih mana yang lebih penting dan dipentingkan, pilihan harus jatuh ke mahasiswa. Ini berarti bahwa dalam proses belajar-mengajar dan pendidikan mahasiswa bukan sekadar menjadi sasaran atau objek pengembangan, melainkan lebih menjadi subjek, yakni subjek didik dan subjek belajar. Dalam menyusun rancangan instruksional (*instructional design*), misalnya, dosen harus memperhatikan kebutuhan mahasiswa, pengetahuan dan keterampilan "awal" mahasiswa, dsb. Di sepanjang masa studinya di LPTK mahasiswa harus lebih banyak dilibatkan dalam pengembangan bahan pengajaran, sesuai dengan kondisi individual mereka. Proses instruksional atau proses pembelajaran bukan hanya proses **transfer** sesuatu dari dosen ke mahasiswa, melainkan juga proses **transaksional** antara dosen dan mahasiswa, karena mahasiswa juga mempunyai potensi untuk belajar. Justru potensi inilah yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan tadi. Namun, ini juga tidak berarti bahwa mutu bahan harus tunduk pada potensi tersebut karena ada upaya **remedial** bagi yang kurang dan **pengayaan** bagi yang cukup dan berlebih. Jadi, siapa yang mengembangkan bahan pengajaran? Ya, tetap dosen yang memegang kendali, tetapi mahasiswa juga dilibatkan, baik pada tataran orientasi, gagasan, maupun pelaksanaan pengembangan.

Akhirnya, faktor cara pengembangan bahan. Banyak orang berpikir bahwa pengembangan selalu identik dengan pembesaran atau pembengkakan jumlah (ukuran) sehingga satu mata kuliah dikembangkan menjadi beberapa mata kuliah, berkecil-kecil dan berjenis-jenis. Akibatnya, kemampuan yang diperoleh mahasiswa memang banyak, tetapi masing-masing serba sedikit dan mungkin mengambang. Pengembangan yang diperlukan saat ini barangkali adalah mengacu pada tujuan "keterampilan berbahasa" sehingga aspek keterampilan itulah yang menjadi inti sasaran. Jika ini disepakati, pengembangan harus diartikan pendalaman dan intensitas pelatihan keterampilan berbahasa. Strategi semacam ini berdampak pada dua hal. Pertama, sejumlah "ilmu" bahasa dan "ilmu" sastra harus menyingkir untuk memantapkan keterampilan dan apresiasi. Kedua, cara pengembangan **berkuliah** diganti dengan pengembangan **berlatih**.

6. Upaya

Setelah melihat kendala dan berbagai faktor yang mungkin berpengaruh dalam pengembangan bahan pengajaran secara menyeluruh, upaya penting yang perlu segera dilakukan adalah meninjau kembali **kurikulum** secara keseluruhan. Kesegeraan itu tampak masih memungkinkan sepanjang yang ditinjau tidak berbenturan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang saya maksud dengan "menyeluruh" itu adalah bukan saja bahan pengajaran, melainkan juga hal-hal lain yang bertali-temali

dengan itu, karena kurikulum memang tidak hanya menata bahan. Tujuan pada tataran LPTK, jurusan atau program studi, harus ditegaskan kembali dan kita benahi jika tidak sesuai dengan kebutuhan. Mengurangi jumlah SKS untuk S-1 memang sulit, begitu pula jumlah SKS untuk jatah MKDU dan MKDK. Akan tetapi, jumlah jenis (bukan SKS) MKBS (dan mungkin juga MKPBM) tampaknya masih mungkin bisa diubah. Berikutnya adalah mekanisme pengembangan dari "judul" mata kuliah ke Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), sampai ke satuan acara perkuliahan (SAP) dan evaluasinya. Sampai tingkat GBPP mungkin masih bisa diatur konsorsium atau departemen. Dari SAP sampai ke proses belajar-mengajar dan evaluasi tentu menjadi tanggung jawab LPTK, khususnya dosen. Lagu klasik bertema peningkatan mutu dosen masih perlu kita upayakan agar terus dimainkan sehingga paling tidak mereka menguasai empat keterampilan berbahasa: mendengarkan (kritik, inovasi, penemuan baru), berbicara (di depan forum ilmiah), menulis (artikel ilmiah, buku ajar, buku ilmiah), dan membaca (literatur berbahasa asing).

7. Penutup

Upaya di jalur internal LPTK tampaknya akan sia-sia manakala tidak didukung oleh kerja sama dengan institusi lain, terutama yang mengurus pendidikan dasar dan menengah. Hubungan LPTK dan sekolah, yang sering diserupakan sebagai hubungan produsen-konsumen, pada tingkat pengembangan bahan pengajaran haruslah dimulai dari hulu di departemen sampai ke lapangan.

Akhirnya, patut pula dipikirkan kembali peran Pusat Bahasa dalam pengembangan bahan ini. Selama ini terasa ada dikotomi: bahasa diurus oleh Pusat Bahasa dan pengajaran bahasa diurus instansi lain. Bahkan, tampaknya tidak ada kerja sama antara Pusat Bahasa dengan instansi yang mengurus LPTK sehingga peran Pusat Bahasa dalam hal pengembangan bahan di LPTK terasa minim. Alangkah wajarnya jika kebijakan mengenai bahasa dan pengajarnya berada di tangan lembaga yang bernama "Pusat" ini meskipun kebijakan itu mungkin hanya pada tingkat umum dan pokok saja. Rasanya masih pada batas kewajaran jika Kongres Bahasa ini menyuarakan pasal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dardjowidjojo, Soenjono. 1988. *PELLBA 1*. Jakarta: Arcan.
- , 1991. *PELLBA 4, Linguistik Neurologi*. Yogya: Kanisius.
- Nababan, P.W.J. 1987. *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: P2LPTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa, Menyibak Kurikulum 1984*. Yogyakarta: Kanisius.
- Richards, J.C. 1974. *Error Analysis, Perspective on Second Language Acquisition*. London: Longman.
- Rindjin, I Ketut. 1991. "Produktivitas dan Efektivitas Proses Belajar-Mengajar di Universitas Udayana, Bali". Laporan Penelitian.
- Rooijackers, Ad.1990. *Mengajar dengan Sukses*. Jakarta: Gramedia.
- Sumarsono. 1979. *A Critique of the Interference Hypothesis: the Use of Bahasa Indonesia by Balinese Children*, M.Ed. Thesis, La Trobe University, Melbourne.
- , 1990. "Memanfaatkan Penelitian Neurologis untuk Ancangan Pengajaran Bahasa Indonesia". Pidato Pengukuhan Guru Besar, FKIP Universitas Udayana, Singaraja.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahan Pengajaran Bahasa Indonesia di LPTK
Pemakalah : Sumarsono
Pemandu : T. Fatimah Djajasudarma
Pencatat : Anita K. Rustapa
Siti Mulyati

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Soenardji, FPBS IKIP Semarang

Ada pendapat mahasiswa dan peserta didik SMA bahwa bobot bahan ajar bahasa Indonesia untuk tingkat pendidikan tinggi dan menengah itu kurang menantang. Untuk mengatasi hal itu sebaiknya dilakukan penelitian eksperimen untuk menetapkan bobot bahan ajar bahasa Indonesia, baik bagi tingkat pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan menengah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui seberapa besar bahan ajar yang harus dikuasai dan seberapa besar volume bahan ajar yang harus diraih mereka.

Jawaban:

Dari segi kosakata, pemakalah pernah melihat jumlah kosakata dalam buku *Bahasaku* yang sangat mengerikan, yaitu 4000 kata dan ini masih terus bertambah. Demikian pula kalimat yang terdapat dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas tiga belum menggunakan kalimat majemuk. Namun, buku kelas IV IPA kalimatnya sudah bukan hanya kalimat majemuk, tetapi kalimat yang sudah beranak dan bercucu. Ini satu kalimat yang tidak mungkin.

2. **Pertanyaan:** Usdiyanto, SMA Taruna Nusantara, Magelang

Memang ada kesenjangan antara LPTK dan para guru yang berada di lapangan. Pada akhir SPKT yang diikuti pembicara ia mendapat materi kurikulum 1994 yang isinya bahwa hanya akan diajarkan pengetahuan bahasa dan sastra, tanpa pragmatik.

Pembicara khawatir jika pihak pendidikan tinggi belum memantau hal itu sehingga apabila lulusan Bapak nanti masuk ke SMA akan menjadi bingung.

Jawaban:

Pemakalah merasa tidak perlu menanggapi karena keadaanya memang demikian dan ia belum pernah menerima kurikulum seperti tersebut di atas.

3. **Pertanyaan:** H.M.E. Suhendar, FPBS IKIP, Bandung

Setuju dengan pembagian mengenai keterampilan, pengetahuan bahasa, dan mengenai sastra karena itu pembagiannya. Hanya masing-masing terbagi lagi atas satuan kredit semester yang terdiri atas 120 SKS. Yang perlu dibicarakan di sini mungkin pengembangan bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang mengarah pada pengaruh pengembangan bahasa Indonesia di SMA sehingga betul-betul akhir STKIP Jurusan Indonesia itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh siswa di SMA. Demikian juga para lulusan STKIP tidak kaku lagi jika terjun ke lapangan karena sudah dibekali terjun ke lapangan.

Jawaban:

Tidak ada perbedaan pendapat.

4. **Pertanyaan:** Tomo, RRI Jakarta

Para pegawai RRI, terutama yang menulis dalam bahasa Indonesia, sama sekali bahasa Indonesianya tidak tertib. Gejala apa atau di mana kesalahan cara belajar mereka itu sehingga terdapat hal seperti itu. Apakah kesalahan mereka atau pendidikannya.

Jawaban:

Pertanyaan itu tidak relevan dengan isi makalah. Mungkin bobot keterampilan tidak muncul. Ini masih perlu dievaluasi.

5. **Pertanyaan:** Kusmanto, Universitas Palembang

- a. Materi dan guru bagaimana yang relevan dengan kurikulum yang akan datang menurut Bapak?
- b. Apakah Pusat Bahasa membawahkan LPTK bahasa perguruan tinggi? Mengapa demikian?

Jawaban:

Maksud pemakalah bukan LPTK itu harus di bawah Pusat Bahasa, tetapi seluruh kebijakan kebahasaan dan pengajaran di bawah kontrol Pusat Bahasa agar dapat menyatukan langkah.

PERGURUAN TINGGI SEBAGAI JALUR PEMASYARAKATAN HASIL PENGEMBANGAN BAHASA

T.A. Ridwan

Universitas Sumatera Utara

1. Pendahuluan

Pembahasan ini hanya didasarkan pada observasi terhadap beberapa fenomena perilaku bahasa dalam lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Sumatera Utara, baik negeri maupun swasta. Walaupun "sikap menara gading" tidak dapat berterima dalam wawasan kampus di Indonesia, dalam kenyataannya perguruan tinggi, termasuk warganya, merupakan anutan bagi masyarakat sekeliling, dalam hal pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa. Dalam konteks perannya, perguruan tinggi mempunyai kewajiban memasyarakatkan bahasa Indonesia agar bahasa itu semakin berkembang sehingga mampu mewujudkan (a) fungsi komunikasi untuk membentuk wawasan kebangsaan, (b) fungsi informasi untuk membentuk wawasan peradaban dalam hal ini meningkatkan kecerdasan, dan (c) fungsi menyejahterakan masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam konteks kemajuan dan pembaharuan, perguruan tinggi mengemban kewajiban untuk memasyarakatkan hasil pengembangan bahasa untuk dapat mencerdaskan dan memajukan bangsa melalui penginformasian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala tantangan dan persyaratan yang datang bersamanya. Dengan demikian, pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa juga bermakna untuk lebih meningkatkan fungsi informatif-komunikatifnya sehingga akan dapat lebih berperan membuka diri dari ketergantungan, mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan, serta membantu pemahaman dan pendalaman yang membantu peningkatan kecerdasan. Selanjutnya, hal itu akan membentuk wawasan yang lebih luas, maju, dan modern, untuk dapat memenuhi persyaratan tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman.

Dalam hubungan dengan kedudukan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat, warga kampus perlu menyadari peran bahasa dalam kehidupan manusia. Hal ini perlu digarisbawahi sebab kenyataan masih adanya warga kampus yang menganggap "membuang-buang waktu" membicarakan masalah bahasa, pengembangan, ataupun pemasyarakatannya. Perlu disadari sesungguhnya hampir keseluruhan kegiatan manusia, baik dalam kegiatan sehari-hari, kegiatan peningkatan kemampuan

dan keterampilan maupun kegiatan kesenian dan budaya, memerlukan kemampuan dan kecendekiaan bahasa.

Dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, pemasyarakatan bahasa Indonesia terkait erat dengan perannya dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan. Hal itu terkait erat pula dengan kedudukannya sebagai bahasa negara serta dalam perannya sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk kepentingan bangsa. Pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa karenanya harus diberikan peran yang lebih nyata dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penulisan dan penerjemahan buku dan karangan ilmiah, baik oleh lingkungan perguruan tinggi maupun melalui sarana-sarana di luar, tetapi bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi perlu mengkaji ulang kedudukan bahasa Indonesia seperti yang tertera dalam Sumpah Pemuda 1928, Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN dari satu masa ke masa lainnya, serta keputusan Kongres Bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. Secara khusus, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional, dan bahasa negara.

Kedudukan perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat merupakan jalur yang cukup potensial dalam pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa khususnya bahasa Indonesia. Untuk itu, warga perguruan tinggi perlu menyadari dan melaksanakan keberhasilan pelaksanaan fungsi bahasa Indonesia sebagai

- 1) *alat komunikasi resmi* dalam bentuk surat-menyurat, pengumuman, peristilahan, dan peraturan;
- 2) *wacana teknis*, seperti laporan resmi, dan karangan ilmiah;
- 3) *pembicaraan di depan umum* dan di *forum resmi*, seperti pidato, ceramah, dan kuliah; dan
- 4) *pembicaraan di dalam lingkungan* dan *semasa* kedinasan.

2. Peran dan Upaya Perguruan Tinggi dalam Pemasyarakatan Bahasa

Perguruan tinggi merupakan salah satu unsur yang mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Seperti dikatakan di atas, hubungan yang saling mengisi inilah yang menyebabkan perguruan tinggi bersama warganya selalu dirasakan sebagai anutan yang diharapkan memberikan contoh teladan termasuk dalam sikap, kemampuan, dan kecendekiaan bahasa. Dalam hal ini, pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa juga merupakan harapan dan dambaan masyarakat. "Ke-elite-an" seorang belumlah merupakan jaminan bahwa seorang lulusan perguruan tinggi secara otomatis telah memiliki penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti yang sesungguhnya harus dicontohkan.

Pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa di kalangan perguruan tinggi harus dikaitkan dengan Tridrama Perguruan Tinggi. Ketiga tugas pengabdian ini merupakan suatu jaringan yang unsur-unsurnya tidak dapat dipisah-pisahkan untuk berdiri sendiri-sendiri. Kebulatan hati untuk memasyarakatkan hasil pengembangan bahasa yang

didukung oleh kesadaran dan tanggung jawab disertai tersedianya bahan dan kebijaksanaan, penelitian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan maupun kendala yang perlu diatasi, serta pendidikan untuk peningkatan kualitas, akan dapat mendukung terwujudnya peran dan kecendekiaan bahasa Indonesia sebagai gerbang peningkatan kemampuan berilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga ikut serta dalam pencapaian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa prestise dan bahasa yang melambangkan status sosial budaya. Pengembangan bahasa Indonesia sebenarnya telah cukup berhasil dalam memperkaya istilah-istilah teknis yang digunakan berbagai disiplin ilmu dalam lingkungan perguruan tinggi, melalui unsur-unsur yang dipungut, baik dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Tinggal sekarang adalah penentuan kebijakan penggunaannya secara nyata, khususnya di lingkungan perguruan tinggi yang dilandasi rasa bangga terhadap eksistensi dan peran bahasa Indonesia.

Perguruan tinggi perlu bersikap menjadikan bahasa Indonesia dan hasil pengembangannya dengan sasaran, antara lain, sebagai berikut.

- 1) *Semakin efektif dan efisien* sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa komunikasi. Norma, kaidah, dan konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar, demikian pula istilah dan kata sebagai hasil pengembangan harus benar-benar dimanfaatkan untuk memudahkan saling memahami dan berpikir dengan efisien.
- 2) Memanfaatkan bahasa dalam *konteks integrasi masyarakat dan kebudayaan*. Pengembangan bahasa yang melahirkan sejumlah konsep, kata, dan istilah harus dimanfaatkan khususnya untuk komunikasi dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembakuan konsep, kata, dan istilah, demikian pula aturan bahasa perlu dipedomani untuk tercapainya kerja sama dan solidaritas ilmiah, khususnya sesama warga perguruan tinggi.
- 3) *Semakin terbinanya bahasa Indonesia* sebagai bahasa persatuan dalam lingkungan perguruan tinggi yang warganya berbilang suku dan latar belakang budaya. Dalam lingkungan perguruan tinggi bahasa Indonesia harus dijadikan ragam resmi, sedangkan bahasa daerah tetap berfungsi sebagai komunikasi akrab sesama penuturnya sepanjang penggunaan di luar lingkungan dan tempat kedinasan.

Peran dan kedudukan bahasa asing dalam memperdalam dan memperkaya ilmu pengetahuan menyebabkan pada taraf tertentu terdapatnya suasana kedwibahasaan di perguruan tinggi. Dari satu sudut suasana ini berdampak positif sebab selain dapat mendukung upaya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dapat merupakan sumber memperkaya bahasa Indonesia. Namun, dari sudut lainnya, karena kekurangjelian, sering pula timbul dampak yang kurang menguntungkan, antara lain, kerancuan bahasa, demikian pula hambatan di dalam upaya pengembangan bahasa Indonesia.

Dalam pemakaian bahasa Indonesia hingga kini masih sering ditemukan kata ganti penghubung seperti *di mana*, *yang mana*, *hal mana*, *di depannya*, dan *yang di dalamnya*. Kata ganti penghubung itu sesungguhnya berasal dari atau dipengaruhi oleh bahasa asing, umpamanya *waar*, *waaraan*, *waarnaar*, *met wie*, dan *aan wie*. Dalam struktur kalimat, kata itu mempengaruhi bentuk kalimat relatif. Contoh, *The house*

where I live in, yang diterjemahkan menjadi *Rumah di mana saya diam*, yang sebenarnya cukup dengan *Rumah yang saya tempati (diami)*; *The post office where Syahron worked*, yang diindonesiakan dengan *Kantor pos di mana Syahron bekerja*, yang sebenarnya cukup dengan *Kantor pos tempat Syahron bekerja*.

Dalam kaitan dengan pengaruh asing, J.S. Badudu dalam bukunya *Pelik-Pelik Bahasa Asing* mengemukakan, "Dalam bahasa tutur/pergaulan, mungkin kita tidak menemukan kesukaran bila kita ingin mempertahankan struktur yang asli. Akan tetapi, dalam bahasa ilmiah, lebih-lebih bila kita akan menterjemahkan sebuah kalimat asing yang sukar, maka kadang-kadang kita terlalu bebas menentukan pilihan ... sebaiknya kita membentuk kalimat sesuai dengan struktur asli kalimat Indonesia".

Memang dewasa ini terdapat variasi dalam menentukan yang asli atau tidak asli. Jalan yang perlu ditempuh adalah selalu mengikuti perkembangan dan mendalami berbagai pedoman yang dihasilkan dan dikenalkan oleh lembaga resmi bidang bahasa.

Kemungkinan hambatan dalam memberhasilkan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa Indonesia di perguruan tinggi, antara lain, sebagai berikut. Pertama, masih kurang atau lemahnya motivasi bagi pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam bentuk bahasa percakapan maupun tulisan. Dalam bentuk tulisan, karya tulis yang akan disajikan pada sebuah forum yang dihadiri oleh penutur bahasa Indonesia rasanya kurang bergengsi jika tidak menyelipkan istilah dalam bahasa asing yang sebenarnya telah tersedia padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh lain ialah masih ditulisnya skripsi dari jurusan/program studi bahasa asing dalam bahasa asing. Hal itu selain memperlemah kedudukan bahasa Indonesia, juga menyebabkan tidak dapat diinformasikannya ilmu pengetahuan yang juga diperlukan oleh jurusan/program studi lainnya. Kedua, dalam suasana keanekaan bahasa daerah, seperti di Sumatera Utara, kenyataannya di sementara kalangan, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa kedua khususnya dalam percakapan. Keadaan ini sering terlihat malahan di dalam lingkungan dinas dan pekerjaan masih terdapat manusia-manusia yang tidak memahami sebuah bahasa daerah pun atau yang berbeda latar belakang budaya dan bahasa daerahnya. Ketiga, masih adanya anggapan bahwa bahasa Indonesia, karena merupakan bahasa sendiri, merupakan bahasa yang mudah sehingga tidak perlu dipelajari. Akibatnya, masih sering terdapat kesalahan penggunaan kaidah dan aturan bahasa ataupun ejaan. Keempat, kurang menyadari keberhasilan pengembangan bahasa sehingga masih ada pandangan seakan bahasa Indonesia masih lemah, miskin, dan kurang berdaya dalam menginformasikan dan mengomunikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keadaan ini semakin menonjol dalam lingkungan mereka yang berada dalam jajaran kajian bahasa asing, termasuk pula yang pernah melaksanakan studi lanjutannya di negara-negara asing. Keberadaan di negara-negara tersebut menyebabkan sebagian dari mereka, setelah kembali, seakan "pindah dan berada dalam lingkungan budaya dan bahasa" tempat mereka berada sepenggal waktu.

Perguruan tinggi dalam perannya sebagai jalur pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa memerlukan kesadaran dan ikut bertanggung jawab dalam pencapaian

keberhasilan. Untuk itu, diperlukan sikap (Pembinaan Bahasa Nasional, 1984: 15–18) sebagai berikut.

- 1) Ikut serta dalam peningkatan pengembangan bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga semakin dapat memenuhi persyaratan sebagai bahasa kebudayaan, keilmuan, dan teknologi atas dasar pembakuan bahasa termasuk istilah-istilah teknis keilmuan.
- 2) Ikut serta dalam peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia pada semua tingkat dan jenis pendidikan.
- 3) Ikut serta dalam kampanye peningkatan penguasaan bahasa Indonesia melalui ceramah, diskusi atau lainnya, demikian pula melalui kerja sama dengan media massa, khususnya dalam kaitan dengan darma pengabdian untuk masyarakat.
- 4) Ikut serta dalam peningkatan motivasi bagi penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan jalan menjadikannya salah satu syarat pokok di dalam penilaian ujian, penerimaan pegawai baru, baik administratif maupun edukatif, penilaian kenaikan pangkat administratif dan edukatif, demikian pula dalam penulisan skripsi pada masa akhir pendidikan mahasiswa termasuk untuk jurusan/program studi bahasa asing.
- 5) Ikut serta dalam upaya pengembangan bahasa untuk lebih memperkaya dan melengkapi khususnya kata dan tata-teknis keilmuan yang diperlukan. Terkait pula standarisasi disebabkan kenyataan masih adanya kerancuan baik dalam bentuk maupun makna.
- 6) Ikut serta dalam pemantapan kaidah, norma, dan ejaan bahasa Indonesia. Dalam kenyataannya masih terdapat "kesimpangsiuran pemakaian", umpamanya *analisa-analisis*, *hipotesa-hipotesis*, dan *dianalisa-dianalisis*. Selain itu, tidak jarang masih terdapat keluhan termasuk dalam lingkungan perguruan tinggi mengenai istilah-istilah teknis yang seakan terkesan asing apabila digali kembali dari kata-kata lama termasuk yang terdapat di dalam bahasa daerah daripada istilah-istilah asing yang digantinya. Contoh, *berdaya guna* dan *berhasil guna* yang kalah popularitasnya dibanding *efektif* dan *efisien*, *aje* yang dikalahkan oleh *konsisten*, dan sebagainya.

Selanjutnya, sekarang ini merupakan kenyataan pahit karena masih terdapat sebagian warga perguruan tinggi yang berpendapat bahwa bahasa terbawa sejak lahir seperti bagian-bagian tubuhnya manusia kemampuan mempergunakannya tidak perlu terlalu dirisaukan. Pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kecendekiaan bahasa, menurut mereka, akan datang dan berkembang dengan sendirinya seperti perkembangan bagian tubuh yang mengikuti perkembangan usia manusia. Demikian pula terhadap bahasa Indonesia yang kemampuan, pemilikan, dan perkembangannya dianggap menyertai kelahiran dan perkembangan usia manusia sehingga bahasa Indonesia tidak perlu dipelajari dan didalami terkecuali bagi orang yang secara khusus membidangnya.

Khusus dalam konteks berbangsa, bernegara, dan berbudaya Indonesia, pemikiran seperti ini perlu diluruskan, termasuk untuk kalangan warga perguruan tinggi. Perkembangan bahasa Indonesia demikian cepat dengan mengalami pula berbagai perubahan dan pertambahan yang seakan tak mau kalah dengan pacuan waktu dalam

pembangunan dan pembaharuan. Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian pula era komunikasi dan informasi, kedudukan dan peran bahasa Indonesia harus semakin diperkokoh dan diperkuat.

Pesan GBHN, termasuk GBHN-1993 adalah menciptakan manusia-manusia Indonesia yang lebih berkualitas yang bersehati dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga masyarakat bahasa Indonesia yang baik dan benar seharusnya ikut bersamanya.

Berlatar belakang sejarah dan kenyataan hingga kini bahasa Indonesia memiliki daya juang dan daya perekat yang sangat ampuh dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia telah membuktikan ketepatan dirinya dalam peran sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi negara, bahasa pergaulan resmi di antara berbagai suku-bangsa dan kelompok etnis yang berbilang suku dan latar belakang budaya. Dari hari ke hari bahasa Indonesia semakin memantapkan diri dan kemampuannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Rasa sadar akan kenyataan inilah yang seharusnya mendasari perguruan tinggi beserta seluruh warganya dengan pembinaan para pimpinan dan pengambil keputusan yang perlu mendorong keikutsertaan dan tanggung jawab dalam memasyarakatkan hasil pengembangannya, termasuk dalam memberikan suri-teladan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejalan dengan itu, kita perlu memahami kebijakan bahasa berlandaskan UUD 45, GBHN, dan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia, khususnya mengenai kedudukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dalam lingkungan pekerjaan, keluarga, dan pergaulan bermasyarakat. Dengan demikian, akan semakin terwujud jati diri perguruan tinggi di Indonesia sehingga tidak merupakan sebuah "menara gading".

3. Motivasi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa di Perguruan Tinggi

Bagian ini, terkait dengan uraian-uraian di atas, mencoba merangkum permasalahan yang saling terkait, yakni peran yang diharapkan, apa yang telah dilaksanakan, kendala yang ada, dan cara yang sebaiknya dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa.

Upaya perlu memiliki motivasi dengan memahami sepenuhnya kedudukan dan peran bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928 telah meletakkan dasar mufakat dalam bentuk tiga pilar kesatuan dan persatuan bangsa, yaitu (a) mengaku bertanah air satu, (b) mengaku berbangsa satu, dan (c) menjunjung bahasa persatuan. Kata *mengaku* mencakup keterpaduan makna bersepakat, berjanji setia, menerima serta menyatakan megah dan berbangga diri (KBBI-II: 20). Sementara itu, *menjunjung* mengandung keterpaduan makna memuliakan, menghargai, menaati, menghormati, serta memiliki kesediaan dan kesiapan berkhidmat (KBBI-II: 422). Dengan demikian, perguruan tinggi dalam konteks kewajiban dalam pembinaan sikap berbangsa dan bernegara tidak mempunyai pilihan selain berkhidmat secara setia apa yang telah diikrarkan dan ditekadkan secara nyata dalam berbagai aktivitas yang dilaksanakannya.

Berdasarkan kehendak UUD 45 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah lebih ditegaskan

bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan dan pengajaran adalah bahasa Indonesia. Pelaksanaannya telah lama berlangsung dan telah nyata pula keberhasilannya sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara luas telah pula dimaklumi peraturan bahwa di lingkungan pendidikan tinggi bahasa Indonesia berperan sebagai sarana komunikasi ilmiah, bahasa asing sebagai sarana keterampilan, demikian pula kedudukan bahasa daerah.

Ketaatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai pengantar telah mewujudkan rasa kebanggaan atas milik sendiri. Bahasa Indonesia telah nyata, tepat, dan berhasil membuktikan kemampuannya sebagai media dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk para ilmuwan. Yang masih perlu ditingkatkan adalah "suasana berbahasa Indonesia" yang memperlihatkan beberapa gejala yang perlu diluruskan. Apalagi dalam suasana budaya anutan yang terdapat dalam masyarakat bangsa Indonesia, dan perguruan tinggi, sarjana, bahkan mahasiswa pun memperoleh kedudukan sosial "khusus". Dari lingkungan ini diharapkan contoh dan teladan karena tidak jarang, dan merupakan kenyataan, apabila warga perguruan tinggi sekalipun tidak berbahasa secara baik dan benar akan sering diikuti masyarakat banyak karena dianggap paling tepat dan sempurna. Hal itu disebabkan perguruan tinggi bersama warganya, sekalipun ada yang kurang sempurna, akan selalu dianggap masyarakat sebagai "guru" dan anggota masyarakat dalam kedudukan sebagai "murid" seperti dalam konteks ungkapan lama "jika guru kencing berdiri murid kencing berlari".

Selanjutnya, perlu diberikan contoh mengenai berbagai gejala yang perlu diluruskan dan diperbaiki. Masih terdapat anggapan yang merasakan bahwa bahasa Indonesia "masih lemah" terutama dalam bidang istilah berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Walaupun proses pemerlengkapan masih akan terus berlangsung, pengembangan bahasa Indonesia tidak dapat dibantah telah membuktikan keberhasilannya dengan telah tersedianya buku-buku istilah yang dipilih. Tinggal sekarang memilikinya dan terutama kesediaan untuk membiasakan penggunaannya.

Terdapat pula kebiasaan seseorang yang menyandang gelar kesarjanaan merasa kurang bonafide jika dalam berceramah, sekalipun keseluruhan yang menghadirinya adalah penutur bahasa Indonesia, tidak menyelipkan beberapa istilah atau kata dalam bahasa asing yang tidak jarang pula kurang sempurna penggunaan dan cara ujarannya. Masih terdapat pula jurusan/program studi bahasa asing yang skripsi akhir pendidikan mahasiswanya ditulis dalam bahasa asing dengan pertimbangan pengujian keterampilan. Apakah pengujian keterampilan tidak cukup melalui kuliah dan pengujian dalam berbagai cabangnya? Bandingkan juga dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, umpamanya di Australia dan Amerika Serikat, skripsi atau disertasi sekalipun mengkaji bahasa dan sastra non-Inggris tetap harus ditulis dalam bahasa Inggris. Kita memerlukan suatu gerak dan sikap bahwa alasan pendidikan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berpikir, memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat internasional tidak akan menjadi lemah pembinaan dan pengembangannya, dengan menempatkan bahasa Indonesia dalam posisi derajat keilmuan secara lebih proporsional.

Sewaktu bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia, terdapat kekhawatiran di sementara kalangan bahwa bahasa daerah akan mati dan hapus sebagai akibatnya. Sejarah membuktikan bahwa apa yang tadinya dikhawatirkan tidak demikian keadaannya. Bahasa daerah terus hidup dan digunakan oleh penutur dan pemiliknya. Namun, masih terdapat kenyataan dalam lingkungan kedinasan termasuk di perguruan tinggi terdengar percakapan dalam bahasa daerah sekalipun di antara yang hadir atau berada dalam ruang kantor kedinasan itu ada yang tidak mengetahui bahasa daerah yang digunakan dalam percakapan. Suasana seperti ini, sekalipun sebenarnya tidak ada yang bersifat rahasia, akan dapat menyebabkan suasana yang kurang "bersahabat" dan saling mencurigai, khususnya sesama pelaksana pendidikan tinggi. Memelihara suasana komunikasi dalam bahasa Indonesia khususnya selama berada di lingkungan kerja dan waktu kedinasan perguruan tinggi tidak akan menyebabkan terganggunya pembinaan bahasa daerah dalam sasarannya untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia, memperkaya khazanah kebudayaan nasional, dan membina unsur kepribadian bangsa.

Perguruan tinggi dalam bidang penggunaan bahasa Indonesia memang cukup konsisten memanfaatkannya sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam kenyataan yang tak perlu ditutup-tutupi masih cukup banyak kesalahan penggunaan kaidah dan aturan, ejaan, dan lainnya, baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Kelemahan ini bukannya tidak dapat diperbaiki asal saja kesadaran yang dilandasi "di mana ada kemauan, di sana ada jalan".

Perguruan tinggi secara menyatu dan terpadu, bukannya hanya terbatas pada fakultas, lembaga, dan program studi bidang bahasa, harus ikut terpanggil untuk memasyarakatkan hasil pengembangan bahasa. Kedudukan, peran, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu selalu memperoleh tempat dan perhatian perguruan tinggi dan warganya.

Dalam konteks pengungkapan dan pencerminan kebudayaan bangsa, pemasyarakatan bahasa Indonesia, khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi, mempunyai keterkaitan dengan taraf pembangunan nasional dalam berbagai segi kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan bermasyarakat. Kiranya rumpang jika mengharapakan masyarakat banyak berbahasa Indonesia secara baik dan benar, sedangkan manusia-manusia Indonesia yang berpendidikan tinggi tidak berbuat sama.

Pengembangan bahasa akan semakin meningkat urgensinya karena berbagai perubahan dan pembaharuan sebagai akibat, umpamanya, urbanisasi, imigrasi, dan modernisasi. Perguruan tinggi mengemban tugas untuk mengembangkan bahasa agar sesuai dengan tuntutan kehidupan baru, perubahan, dan pembaharuan. Proses pembangunan cenderung menciptakan jaringan komunikasi berdasarkan suatu kesatuan bahasa demi menghambat dan menghindarkan kerenggangan, maupun kecemburuan sosial. Bahasa berperan sebagai sarana utama, dalam hal ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam arus komunikasi dan informasi, demikian pula di bidang manajemen untuk terus dibinakembangkan menjadi bahasa pembangunan yang dominan.

Upaya perguruan tinggi dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia adalah untuk dapat semakin berperan sebagai wahana komunikasi sosial, wahana ilmu pengetahuan, tindakan memperkuat kesatuan dan persatuan, gerak mendukung pembangunan bangsa, dan upaya mengembangkan dan memperkaya bahasa dan kesusasteraan Indonesia (GBHN-1993). Dengan demikian, pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan dan pengajaran adalah untuk mempertinggi mutu pemakaian, mempertinggi sikap positif, serta untuk lebih mengembangkan kemampuannya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi (GBHN 1993).

Untuk lebih meningkatkan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa, perlu dirumuskan *kebijakan bahasa* dalam lingkungan perguruan tinggi dan jajarannya. Perlu disadari tidak selamanya sama antara satu perguruan tinggi dan lainnya karena berbeda kesukaran dan urgensi pemasyarakatan. Kebijakan yang dirumuskan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan rencana dalam pelaksanaan bidang bahasa. Langkah ini didasarkan pula pada *kebijakan bahasa* dengan sasaran untuk memiliki ketajaman pemahaman mengenai kaidah dan aturan yang baik dan benar.

Pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa memerlukan pula bekal kecendekiaan dalam usaha pencermatan pemakaian dan sikap positif di kalangan warga perguruan tinggi. Pencermatan pemakaian tidak mengacu pada kerumpangan dalam perilaku berbahasa, dan bukan pula dalam sistem bahasa. Oleh karena itu, usaha yang perlu dilakukan adalah mencapai sasaran peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar bermodalkan hasil pengembangannya sehingga mampu menimbulkan sikap positif yang mencakup rasa kebanggaan dan kesetiaan terhadap, serta kesadaran akan norma bahasa Indonesia.

Perlu pula adanya penekanan atas peningkatan sikap bahasa yang positif dengan perilaku berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Untuk itu, perlu lebih dikembangkan lingkungan kebahasaan Indonesia yang positif, baik tulisan maupun lisan, dalam lingkungan perguruan tinggi. Pemasyarakatan secara lebih intensif perlu rumusan langkah operasional, antara lain, sebagai berikut.

- 1) Menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu syarat keprofesian bagi tenaga edukatif, umpamanya dalam penilaian kenaikan pangkat akademik dan penerimaan calon tenaga edukatif;
- 2) Menjadikan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu syarat kepegawaian, baik untuk kenaikan pangkat maupun penerimaan calon pegawai;
- 3) Menugasi para ahli bahasa secara maksimal untuk meningkatkan hasil pengembangan bahasa dalam berbagai keperluan seperti penerbitan kaidah dan aturan bahasa dalam teks ceramah, pidato ilmiah, dan laporan sebelum dicetak dan disebarluaskan;
- 4) Menjadikan lembaga atau balai bahasa dalam lingkungan perguruan tinggi untuk berfungsi selain memberikan latihan keterampilan berbahasa asing, juga dalam berbahasa Indonesia, melakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman yang masih lemah dan cara mengatasinya, demikian pula dalam memperoleh temuan-temuan baru yang bersumber pada bahasa asing maupun bahasa daerah di sekitar

tempat, daerah, dan lingkungan suatu perguruan tinggi berada untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia, khususnya dalam upaya lebih melengkapi istilah ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dan belum ditemukan;

- 5) Menjabarkan ketentuan untuk jurusan/program studi bahasa asing yang belum melaksanakan menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi pada masa akhir pendidikan suatu jenjang pendidikan;
- 6) Menjadikan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar, demikian pula pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa berpotensi budaya. Pemberian tekanan pada prinsip anutan dengan sikap positif dalam membudayakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lisan dan tulisan, oleh seluruh warga perguruan tinggi, akan merupakan contoh teladan bagi masyarakat.

Arahan, tujuan, pedoman, dan sasaran yang akan dituju dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia sebenarnya telah semakin nyata dan jelas dijabarkan dalam UUD 45, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, GBHN, dan Keputusan-Keputusan Kongres Bahasa Indonesia. Sekarang tinggal menunggu sikap positif dan rasa tanggung jawab seluruh lapisan dan jajaran perguruan tinggi dalam mengembangkan dan memasyarakatkan identitas, kebanggaan, dan kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaannya haruslah dengan satunya kata dan perbuatan sehingga, dengan demikian, perguruan tinggi akan merupakan jalur untuk, antara lain:

- 1) menjadikan semakin mantapnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan pendidikan nasional sesuai dengan pokok-pokok kebijakan dalam GBHN;
- 2) mengatasi pencampuradukan pemakaian bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara baik dan benar khususnya dalam lingkungan kerja dan kegiatan perguruan tinggi;
- 3) meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam komunikasi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga, dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin berperan dalam upaya peningkatan kualitas dan sumber daya manusia-manusia Indonesia;
- 4) memperlancar dan mempercepat pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa di tengah-tengah masyarakat dalam kedudukan perguruan tinggi dan warganya sebagai pemberi contoh, teladan, dan "anutan" masyarakat.

4. Penutup: Perguruan Tinggi dan Tugas Pembinaan

Tata nilai sosial-budaya menyangkut nilai-nilai yang diprioritaskan dan dihajatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia dan pemakaiannya secara baik dan benar merupakan pendukung pembinaan sikap berbahasa dan berbudaya yang mencerminkan budaya persatuan dan kesatuan. Dalam kaitan dengan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa, peran perguruan tinggi, antara lain ialah:

- 1) mengembangkan bahasa agar semakin sejalan dengan kebutuhan nyata, khususnya sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- 3) mewujudkan tipe ideal warga kampus yang mampu mengadakan penyesuaian perkembangan bahasa Indonesia dengan perkembangan dan hasil pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam tugas pembinaan pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa di kalangan perguruan tinggi, perlu dikaji beberapa aspek *pembinaan* yang mempunyai *sasaran* untuk

- 1) mewujudkan kemantapan hubungan antara kepentingan individu warga perguruan tinggi dan masyarakat sekeliling melalui penggunaan secara nyata hasil pengembangan bahasa;
- 2) mewujudkan kemantapan perilaku berbahasa yang baik dan benar dalam kaitannya dengan perilaku kehidupan sosial-kemasyarakatan;
- 3) mewujudkan kehidupan sosial (keluarga, kelompok, masyarakat, bangsa) dalam suasana bahasa persatuan yang mendukung pembinaan sikap hidup bernilai budaya Pancasila dan berwawasan kebangsaan.

Pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa serta berbahasa yang baik dan benar khusus di kalangan perguruan tinggi, memerlukan orientasi bukan hanya masa kini, melainkan juga ke masa depan. Orientasi ini perlu mengkaji berbagai kemungkinan permasalahan dengan memperbandingkan sesuatu yang berperingkat kolektifistik-kooperatif-realistik dengan yang individualistik-kooperatif-idealistik. Hal itu mengingatkan bahwa bahasa sesungguhnya bukan sesuatu yang sederhana. Bahasa tidak hanya mengandung kata dan kalimat, tetapi juga mencakup teks dan konteks. Tantangan yang dihadapi selain eufemisme yang mencakup kenyataan baru, dapat juga melibatkan konsensus penggunaan dan pemasyarakatan, erosi leksikal, kaidah bahasa realitas, dan sebagainya.

Bahasa sebagai bagian paling dominan dalam kebudayaan memiliki gagasan, konsep, dan nilai utama (*vital values*) yang dalam pengembangannya merupakan hasil daya nalar dan kreativitas manusia. Bahasa adalah perangkat yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Bahasa dapat membekali pemakainya dengan kemampuan berkreasi dan memecahkan persoalan. Apabila bahasa tidak dibina secara baik dan benar akan dapat mengakibatkan kerancuan komunikasi termasuk pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui perguruan tinggi, sebagai jalur pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa, diharapkan akan dapat tercapai

- 1) situasi bahasa yang menunjukkan bangsa, seperti yang tercermin pada
 - a) sikap sopan santun;
 - b) sikap persaudaraan dan rasa kekeluargaan;
 - c) budaya tanggung jawab, keterkaitan, dan rasa kebersamaan;

- d) budaya ketelitian, kecermatan, hemat, dan bijaksana;
- 2) kecendekiaan bahasa yang mendukung pembinaan budaya akademik, yang dapat dibina melalui pemahaman dan kesadaran terhadap pola keilmuan mengingat bahwa
 - a) ilmu adalah pembawa dan pencipta perubahan dan pembaharuan;
 - b) ilmu adalah kekuasaan dan kekuatan;
 - c) ilmu adalah unsur budaya dan peradaban
 - d) ilmu adalah unsur pemelihara dan peningkat harkat dan martabat manusia.

DAFTAR BACAAN

- Austin, J.L. 1975. *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Badudu, J.S. 1980. *Membina Bahasa Indonesia Baru*. Bandung: Pustaka Prima.
- Condon, J.C. 1985. *Semantics and Communication*. New York: Macillan.
- Moliono, Anton M. 1992. "Catatan dan Butir Pokok Penyuluhan Bahasa". Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1985. *Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa*. Jakarta: Depdikbud.
- Ridwan, T.A. 1989. *Bahasa dan Linguistik*. Medan: Fajar Rezeki.
- , dkk. 1990. *Prosiding Seminar Nasional Peranan Perguruan Tinggi dalam Memasuki Era Pembangunan Abad XXI*. Medan: USU Press.
- Slamat, Ahmad, dan M.E. Suhendar. 1986. *Buku Materi Pokok Kebahasaan I*. Jakarta: Penerbit Karunika Universitas Terbuka.

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Perguruan Tinggi sebagai Jalur Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa
Pemakalah : T.A. Ridwan
Pemandu : Dali S. Naga
Pencatat : Isti Nureni
Eny Anggraeni

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Jalinus Syah, Wakil Ketua Ipindo

Bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua dan bahasa daerah merupakan bahasa utama atau induk. Hal itu wajar karena jika orang dari kecil biasa menggunakan bahasa daerah, sampai dewasa pun dia akan terbiasa menggunakannya.

2. **Pertanyaan:** Kusnadi Hardjasumantri, Kompleks Depdikbud Pejaten

- Para dosen, khususnya dosen pembimbing skripsi atau karya tulis lainnya, perlu diberi pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar mengingat sebagian besar mahasiswa yang sedang menyusun skripsi kemampuan berbahasa Indonesiannya tidak memadai. Jika para dosen yang membimbing juga demikian, hasil skripsi mahasiswa itu akan hancur.
- Pusat Bahasa diharapkan memberikan informasi secara cepat jika ada istilah-istilah yang diperlukan agar perkembangan ilmu di perguruan tinggi tidak terhambat.

Sejauh mana peran perguruan tinggi dalam memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. **Pertanyaan:** Ramelan, IKIP Semarang

Bahasa Indonesia diharapkan agar dipakai sebagai salah satu bahan ujian untuk kenaikan pangkat para dosen.

4. **Pertanyaan:** Muslim Tuwi, FKIP Universitas Sriwijaya

Para dosen diharapkan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menyajikan mata kuliah kepada mahasiswanya.

5. **Pertanyaan:** S. Djawanai, Fakultas Sastra UGM

- Guru nonbahasa dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi diberi penataran bahasa Indonesia agar anak didik lebih mencintai bahasa Indonesia.

- b. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi diharapkan menduduki posisi yang jelas, yaitu dijadikan MKDU.

6. Pertanyaan: Leonardo, ASM Sriwijaya, Palembang

Di perguruan tinggi diharapkan ada sajian mata kuliah khusus untuk membuat karya ilmiah.

7. Pertanyaan: Drs. Darwis Mustafa, FKIP Universitas Tadulako

Bagaimana dan apa usaha-usaha yang dilakukan perguruan tinggi dan Pusat Bahasa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bagi para dosen agar dosen tersebut dapat memberikan contoh pada mahasiswanya dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar?

8. Pertanyaan: (tidak menyebutkan nama)

Pusat Bahasa diharapkan memberikan informasi mengenai istilah-istilah ke perguruan-perguruan tinggi untuk peningkatan berbahasa.

9. Pertanyaan: Nurhayati

Unhas sudah mengadakan penataran bahasa Indonesia untuk pegawainya karena ini dianggap perlu.

10. Pertanyaan: Yasingh Yadov, India

Untuk mengatasi secara cepat masalah kebahasaan di kampus, diusulkan supaya didirikan klinik-klinik bahasa.

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SEBAGAI JALUR PEMASYARAKATAN HASIL PENGEMBANGAN BAHASA

Yus Rusyana
IKIP Bandung

1. Pemasyarakatan Bahasa

Kegiatan pengembangan bahasa Indonesia, berupa pengaksaraan, pembakuan, dan pemodernan bahasa, telah menghasilkan kodifikasi pada bidang tata ejaan, tata bahasa, kosakata, dan norma berbagai ragam fungsional bahasa (lihat Moeliono, 1985:27). Produk-produk pengembangan bahasa itu merupakan bahan untuk memajukan bahasa Indonesia, yaitu berkembangnya kode bahasa serta terbinanya para penutur bahasa dan terbinanya pemakaian bahasa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan memajukan bahasa itu masih diperlukan kegiatan lain, yaitu menyampaikan bahan-bahan hasil pengembangan itu kepada masyarakat agar terjadi perubahan pemakaian bahasa di masyarakat, yaitu menjadi pemakaian bahasa dengan lebih baik, lebih benar, dan lebih kreatif. Bahan-bahan itu dimasyarakatkan, yaitu dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga terjadi respons dari masyarakat, untuk mengenalinya, memahaminya, mengoreksinya, dan, pada akhirnya, menggunakan hasil pengembangan itu di dalam kegiatan berbahasa.

Sasaran pemasyarakatan bahasa itu ialah seluruh masyarakat Indonesia. Pengembangan dan pembinaan bahasa selalu tercantum dalam GBHN dan menjadi bagian dari arah dan kebijaksanaan pembangunan pada bidang pendidikan dan bidang kebudayaan. Dalam pemasyarakatan bahasa itu kita masih menghadapi masalah sebab sangat besar jumlah orang Indonesia yang belum dapat berbahasa Indonesia (56 juta orang lebih, menurut Sensus 1980). Padahal, karena kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang begitu penting, penguasaan bahasa Indonesia merupakan tuntutan mutlak bagi semua warga negara. Di samping itu, orang yang sudah dapat berbahasa Indonesia pun (90 juta lebih, menurut *Sensus Penduduk 1980*) masih pula memerlukan pembinaan dalam hal pemakaian bahasanya.

Di antara sasaran pembinaan bahasa, ada kelompok-kelompok yang strategis, mengingat kegiatan berbahasa mereka berhubungan dengan publik, seperti para pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, guru, wartawan, sastrawan, penyiar, seniman, penyuluh, dan para penulis. Pembinaan bahasa kepada mereka akan menjadikan mereka itu sebagai pelaku dalam meneruskan pembinaan bahasa kepada masyarakat luas.

Cara pemasyarakatan bahasa bermacam-macam, melalui pengajaran, penyuluhan, penataran, dan, tidak kurang pentingnya, melalui praktik mendengarkan tuturan dan membaca tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dijadikan contoh penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Jalur-jalur pemasyarakatan bahasa meliputi jalur sekolah dan jalur di luar sekolah, yaitu di rumah dan di berbagai lingkungan masyarakat, misalnya di lingkungan pekerjaan, keagamaan, dan hiburan. Jika di suatu masyarakat sudah digunakan bahasa Indonesia, seorang individu dalam masyarakat tersebut, sejak kanak-kanak sampai dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya, di antaranya dalam hal penggunaan bahasa. Ia memperoleh kemampuan berbahasa Indonesia melalui proses sosialisasi itu (bandingkan dengan Koentjaraningrat, 1962:120). Di kota-kota besar yang penduduknya sudah bercampur dan dalam pengadaaan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, proses pemerolehan bahasa seperti itu telah terjadi. Akan tetapi, mengingat besar pula jumlah penduduk yang pada kehidupan sehari-hari memakai bahasa-bahasa daerah, di antaranya ada yang tidak dapat berbahasa Indonesia, kebanyakan orang menguasai bahasa Indonesia dengan jalan mempelajarinya terutama di sekolah.

2. Peran yang Dapat Dimainkan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Memasyarakatkan Hasil Pengembangan Bahasa

a. Pengaksaraan dan Penguasaan Bahasa Tulis

Sebagai hasil pengembangan bahasa Indonesia, kita memiliki sistem pengaksaraan bahasa Indonesia dengan huruf Latin, berupa tata ejaan. Dengan menggunakan tata ejaan tersebut, terdapatlah bahasa Indonesia ragam tulis. Terlebih dahulu, bahasa Indonesia (Melayu) telah pula menggunakan huruf Arab Melayu.

Di sekolah dasar, menurut *Kurikulum SD 1975*, yang berorientasi pada tujuan, terdapat tujuan kurikuler "Murid memiliki pengetahuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menulis dalam bahasa Indonesia", meliputi pengetahuan tentang ejaan yang disempurnakan, kalimat bahasa Indonesia, paragraf atau alinea, pikiran pokok, gaya bahasa, dan karangan. Dalam *Kurikulum SD selanjutnya* (1986), tujuan menulis itu (tujuan instruksional umum) ialah "Siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan dapat mengomunikasikan pesan secara tertulis", meliputi menulis huruf, menulis ejaan, menulis prosa narasi, menulis deskripsi, argumentasi, persuasi, menulis berbagai surat, menulis laporan, mengisi formulir, menulis telegram, pengumuman, iklan, dan pidato.

Dari kurikulum itu tampak bahwa di sekolah dasar, para siswa sudah pada saat-saat permulaan diperkenalkan dengan sistem tulisan untuk menuliskan kata, kalimat, dan karangan. Pelajaran menulis ini serempak dilakukan dengan kegiatan membaca, dimulai dengan membaca permulaan, diteruskan dengan membaca pemahaman. Dari kurikulum itu tampak bahwa di sekolah dasar, para siswa sudah pada saat-saat

permulaan diperkenalkan dengan sistem pengaksaraan dan penggunaan bahasa tulis. Bagi para siswa yang berbahasa ibu bahasa daerah, berarti pula pada saat-saat permulaan belajar berbahasa Indonesia, mereka sudah berkenalan dengan bahasa tulis.

Di sekolah menengah pertama, pelajaran tulis baca ini berlanjut. Dalam *Kurikulum SMP 1975*, untuk pelajaran menulis itu terdapat bahan mengenai ejaan, tata bentukan kata, kosakata, tata kalimat, gaya bahasa, paragraf, dan penyaduran bentuk prosa dan puisi. Dalam *Kurikulum SMP (1987)*, pelajaran menulis itu meliputi menulis surat dan menulis karangan/gubahan, yang di dalamnya tercakup uraian bahan tentang ejaan; topik; paragraf; narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi; fiksi, nonfiksi; dan prosa, puisi. Sementara itu, pelajaran membaca, dalam *Kurikulum SMP 1976*, meliputi kegiatan membaca teknis, membaca dalam hati, membaca indah, dan membaca buku perpustakaan. Dalam *Kurikulum SMP (1987)*, pelajaran membaca itu berupa membaca pemahaman, yang tujuannya memahami dan menafsirkan isi wacana narasi, eksposisi, persuasi, drama, dalam bentuk prosa dan puisi, baik yang berupa fiksi maupun yang nonfiksi.

Dari kedua kurikulum itu (1975, 1987) tampak bahwa di SMP penggunaan sistem tulis dan penggunaan bahasa tulis itu mendapat perhatian, yang tujuannya memberikan keterampilan bagi siswa untuk mengutarakan pikiran dan perasaannya dalam bahasa tulis dengan menggunakan jenis, bentuk, dan sifat karangan yang bermacam-macam, dan untuk memahami serta menafsirkan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam bahasa tulis, yang menggunakan berbagai jenis, bentuk, dan sifat karangan.

Di SMA, menurut *Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975*, terdapat pelajaran menulis yang bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik, dalam menulis dengan bahasa Indonesia yang betul, tepat, dan menarik. Di samping itu, di SMA para siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menulis karangan ilmiah. Untuk itu, terdapat bahan tentang ciri karangan ilmiah, pola karangan ilmiah, dan isi karangan ilmiah. Dalam *Kurikulum SMA (1987)*, pelajaran menulis itu meliputi penggunaan berbagai jenis karangan dan bentuk karangan. Begitu pula halnya dengan membaca, pada *Kurikulum SMA 1975* terdapat bahan pelajaran berkenaan dengan jenis-jenis membaca serta unsur kebahasaan yang terlibat di dalamnya, dan pada *Kurikulum SMA (1987)* terdapat membaca pemahaman terhadap berbagai jenis karangan.

Demikianlah, di SMA terdapat kemungkinan untuk secara intensif melibatkan siswa ke dalam penggunaan bahasa tulis, yaitu dalam kegiatan menulis dan membaca.

Secara keseluruhan, di sekolah, mulai SD sampai dengan SMA, dapat dilakukan penyampaian produk pengembangan bahasa berupa pengaksaraan dan bahasa tulis.

b. Penyampaian Hasil Pembakuan

Hasil pembakuan berupa kodifikasi norma bahasa, yaitu buku tata bahasa, pedoman pembentukan istilah, berbagai jenis kamus, pedoman surat-menyurat, dan

berbagai pedoman ragam wacana, dapat disalurkan melalui sekolah. Di dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, terdapat pelajaran yang berkenaan dengan itu.

1) Tata Bahasa

Di sekolah dasar digunakan bahan berkenaan dengan ketatabahasaan, malah dalam *Kurikulum SD* (1986) secara eksplisit terdapat pokok bahasan struktur (misalnya, susunan fonem dalam suku kata, morfologi, dan sintaksis). Di SMP terdapat pokok bahasan ketatabahasaan, seperti tata bunyi, bentukan kata, tata kalimat, yang dalam *Kurikulum SMP 1975* tercakup dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada *Kurikulum SMP* (1987) dieksplicitkan dalam aspek struktur, meliputi struktur fonem dalam suku kata, tata bentukan kata, jenis kata, frasa, dan kalimat. Di SMA pokok bahasan ketatabahasaan meliputi tata bunyi, tata bentukan kata, tata kalimat (1975), yang dalam *Kurikulum SMA* (1987) dieksplicitkan dalam aspek struktur, meliputi struktur fonem, tata bentukan kata, jenis kata, frasa, dan kalimat.

2) Kosakata

Di sekolah dasar, secara eksplisit, kosakata menjadi pokok bahasan (1986). Sebelumnya pun kosakata sudah mendapat perhatian, tetapi tercakup dalam pokok bahasan lain. Di SMP, kosakata menjadi pokok bahasan yang tercakup dalam keterampilan berbahasa (1975), yang kemudian dieksplicitkan sebagai pokok bahasan kosakata (1987). Di SMA kosakata menjadi pokok bahasan yang tercakup dalam keterampilan berbahasa (1975), yang kemudian dieksplicitkan sebagai pokok bahasan kosakata (1987).

Istilah pun sudah menjadi perhatian. Di sekolah dasar, salah satu tujuan instruksionalnya berbunyi "Murid memiliki pengetahuan tentang istilah sebagai dasar untuk menjadikan bahasa Indonesia bahasa ilmu pengetahuan" (1975). Pada sekolah menengah istilah tetap menjadi perhatian, seperti dalam kaitan pembahasaan bahasa ilmu pengetahuan atau dalam pembahasan bahasa baku.

3) Pemodernan Bahasa

Berkenaan dengan hal ini dalam kurikulum sekolah terdapat pokok bahasan mengenai penggunaan istilah dan pemekaran kosakata, dan penggunaan ragam bahasa keilmuan.

c. Pembinaan Penutur Bahasa

Di sekolah, dengan menyampaikan bahan pelajaran bahasa itu, dilakukan pembinaan terhadap penutur bahasa. Bahan-bahan sudah dipilih, dan cakupan serta urutannya pun disusun menurut asas-asas kurikulum. Metode penyampaian sudah

tertentu sehingga pembelajaran diharapkan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hasil kegiatan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kekurangan.

Jadi, peran sekolah dalam pembinaan penutur sangat besar. Hal itu pun jelas dari kenyataan bahwa sebagian besar penutur bahasa Indonesia menguasai bahasa Indonesia sebagai hasil belajar di sekolah. Selanjutnya, melalui kegiatan berbahasa para lulusan sekolah, pembinaan itu meluas juga ke masyarakat.

Demikianlah, telah dicoba dijelaskan tentang peran yang dapat dimainkan oleh pendidikan dasar dan menengah dalam memasyarakatkan hasil pengembangan bahasa dalam kegiatan kurikuler.

3. Upaya yang Telah Dilakukan pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa dan Dampaknya

Dalam uraian terdahulu telah ditunjukkan bahwa secara kurikuler di sekolah tersedia pokok-pokok bahasan dalam bidang studi bahasa Indonesia untuk pembelajaran siswa mengenai hasil pengembangan bahasa. Secara formal semua pokok bahasan itu diajarkan dan hasilnya dievaluasi pada setiap semester, serta dalam bentuk ebtan dan ebtanas.

Apa yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya, terutama membekas pada diri siswa di dalam keterampilannya menggunakan bahasa dan di dalam pengetahuannya tentang penggunaan bahasanya itu, juga membekas di dalam diri para lulusannya.

Sebetulnya, saluran yang dapat digunakan untuk pemasyarakatan hasil pengembangan itu bukan hanya bidang studi bahasa Indonesia, melainkan semua bidang studi yang menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan istilah keilmuan IPA, misalnya, tentulah lebih kena di dalam bidang studi IPA, tetapi dalam tulisan ini hal itu tidak dibahas.

Untuk mendapatkan gambaran tentang beberapa hal mengenai apa yang telah dilakukan di sekolah dan bagaimana hasilnya, di bawah ini dikemukakan beberapa hasil penelitian.

a. Kosakata

Berkenaan dengan kosakata, terdapat hasil penelitian mengenai produksi kosakata bahasa Indonesia dalam karangan murid kelas V SD yang berbahasa ibu Aceh di kotamadya Aceh (Yusri Yusuf, 1991). Para siswa memproduksi kosakata yang memadai, meliputi kosakata dasar dan kosakata bidang. Kata-kata berimbuhan lebih dominan dari kata bentuk lain, kata yang konkret lebih dominan daripada yang abstrak. Produksi kosakata Indonesia makin tinggi pada siswa yang rendah frekuensi pemakaian bahasa Acehnya. Juga, produksi itu makin tinggi pada siswa yang makin tinggi intensitas membacanya.

Berkenaan dengan penguasaan kosakata dalam kaitan pemahaman informasi pembangunan, terdapat penelitian terhadap anggota masyarakat di Aceh Utara yang berpendidikan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi (Ramli, 1993). Kosakata yang digunakan dalam informasi pembangunan sulit bagi responden yang berpendidikan SLTP, tidak begitu sulit bagi responden yang berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi. Responden yang berpendidikan SLTP lebih menguasai bidang sosial budaya, sedangkan yang berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi lebih menguasai bidang ekonomi. Secara umum, responden lebih menguasai (mudah) bidang ekonomi, diikuti bidang sosial budaya, politik, dan yang paling sulit bidang hankam. Tampak pula bahwa penguasaan kosakata mempengaruhi pemahaman informasi. Ternyata pula pemahaman seseorang lebih besar dipengaruhi oleh penguasaan kosakata daripada struktur kalimat.

b. Sintaksis

Berkenaan dengan sintaksis, terdapat hasil penelitian mengenai pola kalimat dasar bahasa Indonesia dalam karangan murid SMP di Tapanuli Selatan (Daulay, 1992). Murid-murid sudah menguasai pola kalimat dasar, dan mereka memahami kaidah penyusunan pola kalimat dasar.

c. Membaca

Berkenaan dengan bahan membaca, terdapat hasil penelitian mengenai bacaan cerita ditinjau kesesuaiannya dengan perkembangan kognitif anak usia 6-12 tahun di kotamadya Bengkulu (Ariesta, 1991). Anak-anak usia 6-8 tahun lebih dapat memahami cerita fantasi; usia 8-10 tahun cerita realistik kontemporer; dan usia 10-12 tahun cerita sejarah. Aspek kognitif yang diperiksa adalah membandingkan, mengklasifikasikan, menghipotesiskan, mengorganisasikan, mengikhtisarkan, menerapkan, dan mengkritik. Usia 6-8 tahun mendapat kesulitan dalam menghipotesiskan; usia 8-10 sulit dalam aspek mengorganisasikan dan mengikhtisarkan. Diketahui pula bahwa setiap SD mendapat kiriman buku cerita dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi hanya beberapa sekolah yang merawat dan meminjamkan buku itu kepada para siswa; lainnya menyimpan buku di gudang.

Berkenaan dengan tingkat pemahaman bacaan, terdapat penelitian mengenai pemahaman bacaan oleh dwibahasawan Sunda Indonesia murid kelas VI SD, di Kecamatan Garut Kota (Hermawan, 1993). Nilai rata-rata seluruh responden memuaskan (75 pada skor ideal 100). Tingginya pemahaman bacaan bahasa Indonesia selalu disertai oleh tingginya pemahaman bacaan bahasa Sunda, dan begitu pula sebaliknya. Terjadi transfer keterampilan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya, khususnya yang berkaitan dengan keberaksaraan. Tingginya pemakaian bahasa Indonesia oleh siswa disertai oleh tingginya pemahaman bacaan bahasa Indonesia.

d. Pragmatik

Berkenaan dengan pragmatik dalam pengajaran bahasa Indonesia, terdapat hasil penelitian mengenai kurikulum, buku teks, dan proses belajar mengajar tentang pokok bahasan pragmatik di SMA Kodya Surabaya (Yohanes, 1991). Menurut penelitian ini, perumusan tujuan dan pengembangan materi pragmatik dapat berkontribusi pada pembelajaran kemampuan pragmatik. Di antara dua buku pelajaran yang dipakai, walaupun penjabaran materi pada keduanya tidak berbeda, perbedaan dalam penyusunan tugas dan latihan dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pembelajaran. Dalam proses belajar-mengajar ada guru yang berkontribusi pada kemampuan pragmatik atau komunikatif, ada pula yang membawanya kepada pelajaran yang berpusat pada tata bahasa.

e. Pendekatan Komunikatif

Berkenaan dengan pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa Indonesia, terdapat hasil penelitian mengenai penerapan pendekatan itu oleh para guru SMA Negeri di Kotamadya Palembang (Yunus, 1991). Menurut hasil penelitian ini, para guru kurang memahami konsep pendekatan komunikatif, yaitu tentang pengertian, ciri, dan prosedurnya. Guru sudah menyadari bahwa dalam pendekatan komunikatif itu siswa lebih aktif, sedangkan guru berperanan sebagai pembimbing. Beberapa prosedur pengajaran pragmatik sudah ditempuh, beberapa lainnya tidak. Di antara guru itu ada juga yang sudah menggunakan pendekatan komunikatif secara penuh.

Berkenaan dengan pendekatan komunikatif ini, terdapat pula penelitian yang membandingkannya dengan pendekatan kognitif, dalam mengajarkan struktur bahasa Indonesia (Moeslim, 1991). Menurut hasil penelitian ini, kedua pendekatan itu sama efektifnya dalam pengajaran di SMP dan SMA, sedangkan di SD, pendekatan komunikatif lebih efektif. Ada murid yang lebih mudah belajar dengan prinsip pendekatan komunikatif sebagai sarana untuk menanamkan kebiasaan berbahasa, dan ada pula murid yang memerlukan pengertian tentang kaidah-kaidah bahasa dahulu sebelum melakukan latihan bahasa.

f. Sikap, Minat, dan Motivasi Siswa

Berkenaan dengan sikap, minat, dan motivasi siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia, terdapat penelitian mengenai siswa SMA di Kotamadya dan Kabupaten Bandung (Sanusi, 1993). Menurut hasil penelitian ini, sikap, minat, dan motivasi siswa SMA negeri dan swasta terhadap pengajaran bahasa Indonesia cenderung ke arah positif, dengan alasan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang harus dikuasai oleh segenap warga negaranya; alasan lainnya adalah untuk keperluan komunikasi dan sebagai pembuka kunci ilmu pengetahuan. Kemampuan berbahasa Indonesia siswa dari lima sekolah yang diteliti sebagian besar belum memuaskan karena yang berkategori tinggi baru tiga orang dari 128 siswa, 54 orang sedang, 63 orang rendah,

dan lima orang rendah sekali. Di antara guru, ada yang begitu patuh pada GBPP, tidak berani melakukan pengembangan.

Demikianlah, gambaran tentang apa yang terjadi mengenai berbagai segi pengajaran bahasa Indonesia.

4. Cara yang Sebaiknya Ditempuh dalam Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah

Upaya pemasyarakatan hasil pengembangan bahasa Indonesia melalui jalur persekolahan sudah dilakukan dan sudah pula ada hasilnya. Hasil itu belum optimal sebab kendala yang menghadang tidak selalu dapat diatasi. Oleh karena itu, patutlah terus dicari cara yang lebih baik agar usaha pengembangan bahasa itu dapat diterima oleh masyarakat, khususnya oleh para guru dan murid.

Produk-produk pengembangan bahasa tidak selalu dapat langsung digunakan di sekolah. Produk itu mesti diolah lebih dahulu. Misalnya, buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (1988), terlalu sulit untuk digunakan oleh guru waktu mengajar di sekolah. Buku itu hendaknya diolah bagi keperluan pengajaran menjadi buku tata bahasa pendidikan. Buku tata bahasa pendidikan itulah yang dijadikan sumber oleh guru dan oleh penulis buku pelajaran bahasa Indonesia. Begitu pula halnya produk-produk yang lain, kamus bahasa Indonesia untuk pelajaran di sekolah dasar dan di sekolah menengah disusun dengan bersumber pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988), disesuaikan dengan keperluan pengajaran pada setiap jenjang pendidikan. Bahkan, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, perlu pula pengolahan (misalnya untuk keperluan penyuntingan naskah, seperti dilakukan oleh Adjat Sakri (1993).

Buku-buku atau publikasi lainnya tidak selalu sampai ke sekolah, adakalanya juga sampai ke sekolah, tetapi tidak sempat digunakan. Buku-buku hasil proyek, yang tidak boleh diperjualbelikan, menimbulkan kesulitan untuk memperolehnya. Oleh karena itu, buku demikian yang dinilai berfaedah untuk pengajaran, hendaknya segera diterbitkan untuk diperjualbelikan secara bebas jika tidak mungkin disebarkan secara cuma-cuma dan merata.

Hasil-hasil pengembangan bahasa agar dapat masuk ke jalur sekolah, haruslah diusahakan masuk ke dalam sistem yang berlaku. Oleh karena itu, usaha koordinasi di antarlembaga yang terkait sangat perlu. Jika berada di luar sistem, belum tentu para guru merasa terdorong untuk menggunakannya.

Keberanian dan kemampuan guru untuk mengambil inisiatif dalam mengolah dan mengembangkan bahan pengajaran harus didorong dan didukung dengan fasilitas yang memadai.

Soal-soal ebtanas hendaknya semakin relevan dengan pokok bahasan dan pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum agar para guru yang sudah mengalami kemajuan melalui penataran dan lainnya, tidak dihantui kewaswasan seolah-olah

mereka akan merugikan siswa apabila mengajar dengan cara-cara yang lebih baik.

Usaha penataran guru yang sudah berjalan diteruskan agar makin banyak guru yang mendapat kesempatan beroleh kemajuan, dan programnya diusahakan makin menunjang kepada keperluan mengajar.

Pembaruan di bidang pengajaran hendaknya dilakukan bertahap secara berencana, dan mempertimbangkan apa yang sudah berlangsung selama ini agar terjadi kesinambungan antara pembaruan dan tradisi. Hasil pengembangan bahasa sebagai unsur pembaruan hendaknya mempertimbangkan apa yang sudah terbina di bidang pengajaran bahasa selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Ria. 1991. "Bacaan Cerita yang Sesuai dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia 6-12 Tahun". Tesis. Bandung: Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.
- Daulay, Syahnan. 1992. "Pola Kalimat Dasar Bahasa Indonesia Murid SMP di dalam Karangan bebas dan Karangan Terbimbing". Tesis. Bandung: Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1976. *Kurikulum Sekolah Dasar 1975*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 1976. *Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1975*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 1976. *Kurikulum Sekolah Menengah Pertama 1975*. Jakarta: Balai Pustaka.
- . 1986. *Kurikulum Sekolah Dasar*. Jakarta.
- . 1987. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas*. Jakarta.
- . 1987. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama*. Jakarta.
- . 1993. *Kurikulum Pendidikan Dasar*. Jakarta.
- . 1993. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum*. Jakarta.
- Hermawan, Wawan. 1993. "Hubungan antara Tingkat Pemakaian Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia dengan Tingkat Pemahaman Bacaan oleh Dwibahasawan Sunda Indonesia". Tesis. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Koentjaraningrat. 1962. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara.
- Moeliono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Moeslim, A. 1991. "Efektivitas Pendekatan Kognitif dan Komunikatif dalam Pengajaran Struktur Bahasa Indonesia". Tesis. Bandung: Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.
- Biro Pusat Statistik. *Penduduk Indonesia, Sensus Penduduk 1980*. Jakarta.
- Ramli. 1993. "Tingkat Penguasaan Kosakata dan Struktur Kalimat dalam Kaitannya dengan Pemahaman Informasi". Tesis. Bandung: Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Rusyana, Yus. 1990. *Bakuperan antara Pendidikan Bahasa dengan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Upaya Mencerdaskan Bangsa*. Bandung: IKIP Bandung.
- Sakri, Adjat. 1993. *EYD dan Tanda Baca*. Bandung: Penerbit ITB.

- Sanusi, Achmad. 1993. *Laporan Hasil Penelitian Mutu dan Keterampilan Pendidikan di Provinsi Jawa Barat*. Bandung.
- Yohanes, Budinuryanta. 1991. "Pragmatik dalam Pengajaran Bahasa Indonesia". Tesis. Bandung: Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.
- Yunus, Naisan. 1991. "Penerapan Pendekatan Komunikatif dalam Pengajaran Bahasa Indonesia oleh Guru SMA". Tesis. Bandung: Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.
- Yusuf, Yusri. 1991. "Pemerolehan Bahasa Indonesia Tulis Anak-Anak Dwibahasawan Aceh Indonesia Hubungannya dengan Intensitas Membaca dan Latar Belakang Bahasa Ibu". Tesis. Bandung: Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Jalur Pemasayaran
Hasil Pengembangan Bahasa
Pemakalah : Yus Rusyana
Pemandu : Soenardji
Pencatat : Tri Saptarini
Cepi Suwangga

TANYA JAWAB

1. Peertanyaan: Sri Hardjo, Dewan Perwakilan Rakyat

Kami senang sekali terhadap masalah yang telah Bapak paparkan, dan apa yang telah Bapak tuliskan merupakan konsep-konsep. Namun, masih ada keinginan kami untuk mendapat penjelasan. Kalau dilihat dari judulnya, Pendidikan Dasar dan Menengah Jalur Pemasayaran Hasil Pembangunan Bahasa, berarti sudah ada hasil pengembangan, lalu pendidikan dasar dan menengah ini adalah sebagai jalur. Yang ingin kami tanyakan hasil-hasil penelitian Bapak ini, mengenai guru, guru bahasa khususnya, dari segi kualitas dan kuantitasnya, bagaimana guru dari 27 propinsi itu. Menurut penelitian Bapak, apakah ini sangat kurang, kalau kurang, kurangnya berapa, karena sudah diteliti dan untuk mencukupi langkah-langkah terobosannya bagaimana. Berikutnya adalah kurikulum, silabus, dan buku karena hasil-hasil pengembangan bahasa ini dalam pendidikan dasar dan menengah, perlu disusun dalam satu kurikulum. Konsep kurikulum 94 ini sudah ada, bahkan mengetahui bahwa di SD sampai kelas 3 itu 10 jam, kelas 4-6 SD, 8 jam, SLTP 6 jam, SLTA itu 5 jam (kelas 3, 3 jam). Dari kurikulum 94 ini, menurut pandangan Bapak, apakah ini telah mencukupi untuk mengetahui atau mengembangkan bahasa untuk anak-anak itu, lalu bagaimana mengaturnya, jamnya sudah ada, tetapi materinya harus ada kesesuaian antara jam dan materi, dari silabus, baru bukunya tentunya disesuaikan dengan jamnya. Kalau waktunya hanya setengah jam atau 1 jam per minggu, ini bagaimana materi atau bukunya tebal sekali, jelas tidak mungkin guru untuk menyampaikan seperti apa yang Bapak pesankan tadi. Buku pegangan ini jelas tidak, jangan sampai setiap tahun ganti buku, dan sebagainya, lalu mengenai konsep Bapak mengenai guru dan kurikulum tadi bagaimana.

Jawaban:

Kehadiran Bapak di sini juga penting untuk menyalurkan pikiran-pikiran yang ada di forum ini melalui DPR. Hasil pengembangan bahasa itu, katakanlah dalam batas tertentu, sudah ada di Pusat Bahasa, lalu mengenai guru bahasa, mengenai kualitas dan kuantitasnya. Mengenai kualitas agak mudah dicari sebetulnya. Di

sini tidak dikemukakan, tetapi di tiap kanwil sebetulnya ada beberapa kekurangan mata kuliah tertentu. Pada umumnya kekurangan itu masih saja ada, katakanlah produksi di jurusan bahasa Indonesia, dalam hal guru-guru bahasa Indonesia, banyak yang belum diangkat. Jadi, masalahnya upaya ini sudah bukan masalah bahasa, melainkan masalah DPR, jadi kami minta dukungan mengenai kekurangan guru-guru itu. Walaupun saya di sini, kalau diperlukan, barangkali bisa disampaikan kepada Bapak. Berapa kekurangan ini, kualitasnya saya kira. Kita menghadapi kekurangan di dalam kualitas itu, tetapi cara-cara mengatasi sebetulnya sudah di singgung juga oleh Pak Miryadi, dan saya juga mempunyai kesempatan melihat dari dekat, yaitu ada PKG dan sebagainya. Para guru dari setiap propinsi setiap tahunnya dipanggil, lalu diadakan penataran yang rasanya cukup intensif juga, kemudian mereka dikembalikan ke daerah masing-masing di tiap propinsi. Kemudian, mereka menatar teman-temannya walaupun kita bisa membayangkan banyak ibu guru yang sebetulnya dihadapi oleh 2,3,4 orang dari setiap propinsi. Jadi, memang kegiatannya lama rasanya. Kalau dilihat dari kesabaran, tidak sabar lagi, usia kita akan habis, kapan semua sekolah akan dapat dijamah oleh pembaharuan-pembaharuan itu. Bahkan, hal itu sudah dilakukan dengan mendatangkan guru-guru itu.

Pada kurikulum 75, keluhan masih ada juga, terlalu banyak bahan. Kemudian, mungkin karena keluhan-keluhan itu, dalam kurikulum 94 barangkali pokok bahasan lebih sedikit, tetapi saya sedang menantikan keluhan, harus apa yang diajarkan tidak begitu jelas karena kurikulum 75 begitu rinci sehingga mereka begitu terikat. Biasanya saya mencoba memandang dengan sederhana saja kurikulum atau, dalam hal ini, apa yang disebut GBPP itu tidak lebih dari resep masakan saja. Menurut hemat saya, guru adalah pemasak profesional. Jadi, menurut GBPP, guru yang profesional sebagai guru, menurut hemat saya, walaupun ada buku paket yang diwajibkan, guru tetap guru masak yang profesional, artinya dia mempunyai tanggung jawab sendiri dan memilih bahan-bahan yang cocok bagi kelas karena dialah yang paling tahu, lebih dari Pak Menteri. Dialah yang paling tahu mengenai keadaan setiap kelas itu. Oleh karena itu, menurut hemat saya, di dalam jumlah bahan dan sebagainya akan ada variasi meskipun kita diharuskan mencapai target, tidak tercapai secara sama. Seperti Pak Tampobolon katakan, di kelas IV masih ada anak yang belum bisa membaca.

Variasi banyak, tentu sewaktu-waktu kita menginginkan standardisasi di dalam pendidikan, tetapi barangkali sementara ini harus juga realistis menghadapi masyarakat kita yang bermacam-macam itu. Jadi, kalau begitu, mungkin ujian secara nasional yang sama juga mungkin tidak tepat, dan menjadi bumerang yang memukul guru-guru yang penuh ketakutan untuk mengajarkan sesuai dengan apa yang dihadapi karena mereka dihantui dengan target, targetnya apa lulus ujian seperti itu. Tentu saja guru tidak salah karena sebagai keberhasilan dia mendidik itu, anak-anak lulus ujian, begitu.

Barangkali, Pak Tampubolon, di Amerika atau di Australia mereka lebih merdeka. Setiap guru tidak mau didikte bahwa harus memakai suatu kebijaksanaan yang begitu ketat dari pusat. Di negara orang lain tidak begitu, tetapi di negara kita ada kecenderungan begitu, mesti ada juklaknya. Artinya, harus dijelaskan kepada guru-guru di lapangan karena mereka banyak sekali mendapat rasa takut bahwa Anda itu merdeka dan betul-betul hal itu dipenuhi, waktu ujian juga ada kemerdekaan untuk bervariasi.

Mengenai bagaimana waktu, itu cukup? Bagi saya waktu itu bisa dicukupkan. Jadi, seandainya mereka sudah bisa, dan diberikan kesempatan untuk berbelanja, pada waktu memasak itu, dia bisa bergeser, misalnya ini harus disatukan walaupun dalam GBPP tercantum dalam semester II, ini bisa diambil atau dimasak di semester I. Misalnya, guru-guru mengeluh dalam pengajaran sastra, bagaimana bisa mengajarkan novel, cerita pendek, hikayat? Saya katakan, itu bisa disatukaliguskan. Kita bisa mengajarkan cerita rekaan kalau anak sudah mempelajari cerita pendek. Dalam cerita pendek kita bisa mengajarkan cerita novel. Kalau sekadar teori-teorinya, kita dasarnya pada pengalaman mengapresiasi cerita pendek, malahan kita sudah bisa mengajarkan cerita novel. Seperti cerita pendek, novel itu hanya lebih panjang sehingga cerita nya juga akan lebih banyak. Dalam cerita pendek, yang kita baca hanya peristiwa satu hari saja. Dalam novel bisa seribu hari atau beberapa ribu hari. Hal seperti itu bertitik tolak dari pengalaman itu.

Jadi, menurut hemat saya, waktu yang ada sekarang sudah dapat dimanfaatkan tentunya. Oleh karena itu, mata pelajaran lain juga tidak kurang pentingnya. Jadi, harus kita penuhi, dan sampai murid-murid, kita menyayangnya. Dengan begitu, banyak materi yang diberikan dan tidak mempunyai kesempatan lagi bagi anak-anak karena begitu banyak pekerjaan rumah. Saya dari kelas I s.d. VI tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dari guru-guru saya. Itu yang sempat saya kembangkan seterusnya. Kepada Pak Sri Hardjo, mohon Bapak menjadi corong kami untuk kepentingan-kepentingan bahasa khususnya, dan soal pendidikan pada umumnya.

2. Pertanyaan: T. Miryadi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pertama-tama usaha dalam rangka memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memang barangkali jalur yang paling dominan adalah melalui pendidikan dasar-menengah SLTP dan selanjutnya. Kemudian, di dalam hal ini barangkali masalah-masalah yang terjadi di lapangan, agar siswa dan guru dapat dikatakan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar yang baik, mereka dapat menguasai dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Barangkali, pertama, masalah pengadaan buku-buku itu pun perlu ada semacam, katakanlah, standarnya. Katakanlah sekarang ini banyak sekali buku yang beredar atau dipakai di lapangan, artinya di sekolah, tetapi yang diterbitkan oleh penerbit yang mungkin belum ada persetujuan Depdikbud; ini mohon perhatiannya. Kemudian, masalah pelajaran

membaca yang mungkin ada kaitannya dengan tambahnya jam atau alokasi waktu di dalam bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia, barangkali mendapatkan prioritas yang agak tambah lumayan. Oleh karena itu, hendaknya buku-buku perpustakaan di setiap sekolah mohon juga dilengkapi. Kami pernah melihat ke Australia. Di Sidney satu sekolah yang namanya SMA itu, beberapa ruang untuk ruang perpustakaan saja, dengan serba tertib, serba lengkap sistem katalognya, sedangkan di negara kita, barangkali belum semua sekolah mempunyai ruang perpustakaan, yang katakanlah standar begitu. Kemudian, khusus untuk pembaca, dulu waktu kami sekolah, ada semacam bunga rampai mengenai membaca itu, sekarang barangkali tidak ada. Ini mohon perhatiannya.

Kemudian, dalam rangka pembinaan profesional guru, saya kira jalurnya sudah cukup baik, bahkan dalam rangka meningkatkan profesional guru, ada semacam PKG, juga LKG, dan ada juga MGMP sejenis, khususnya bahasa Indonesia. Hanya barangkali mudah-mudahan itu perlu dikoordinasikan dengan Pusat Bahasa.

Jawaban:

Pak Miryadi, yang berkenaan dengan kegiatan pengajaran dan pengadaan buku, dahulu ada seperti buku paket itu, dan sekarang Pusat Perbukuan juga menyusun buku-buku dengan bergantinya kurikulum. Ada buku-buku yang naskahnya sudah selesai, mungkin juga sudah dibayar untuk para penulis, tetapi mungkin terpaksa tidak diterbitkan karena diubah, disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang. Akan tetapi, benarliah barangkali bahwa mesti ada sebuah buku yang kira-kira dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, ternyata bagi guru, ada perubahan-perubahan di dalam buku. Jadi, kalau begitu, harus hati-hati membuat buku dengan sebaik-baiknya, ada buku standar, ada juga buku-buku yang lainnya juga sebagai pelengkap dan sebagainya. Bagaimana kita bisa melindungi sekolah dari persaingan bisnis dari penerbit. Itu juga berat, ada kalanya kepala sekolah didatangi sehingga martabatnya sebagai kepala sekolah agak digoncangkan. Jadi, kita juga harus melindungi guru-guru dan sebagainya karena kalau godaan besar untuk ini bisa memberatkan para siswa umpamanya. Jadi, saya setuju ada standarisasi, tetapi juga kita harus memberikan kesempatan untuk tumbuhnya penulis-penulis yang baik, untuk menulis buku-buku pengajaran.

Buku perpustakaan, barangkali perlu sekali, dan harus masuk jalur sistem sekolah. Jadi, ada perpustakaan sekolah. Balai Pustaka zaman kolonial dulu melakukan suatu hal yang tepat sebetulnya. Jadi, tidak seperti perpustakaan wilayah dulu, yang mereka hadapi adalah perpustakaan sekolah. Karena anak membawa buku ke rumah, orang tua di rumah juga ikut membaca.

Oleh karena ada Pak Sri Hardjo, kita juga mengusulkan soal perpustakaan sekolah menjadi keputusan politik karena untuk pemerataan di antaranya ke SD-SD. Paling tidak untuk guru-guru, mestinya guru-guru jangan dibiarkan berjuang tanpa senjata. Mestinya ada sejumlah buku pintar untuk guru agar mereka bisa

mengolah berdasarkan itu. Kemudian, juga buku bunga rampai dan sebagainya. Kita, generasi yang lalu, adalah generasi buku tertentu. Apakah itu buku *Matahari Terbit*, dan sebagainya sehingga ada kesamaan budaya juga di antara kita.

3. **Pertanyaan:** Tampubolon, IKIP Medan

Saya hanya ingin menambahkan informasi, dan kemudian ingin bertanya kepada Pak Yus, apakah ada kaitannya dengan penyebaran bahasa Indonesia ini. Saya kira kita sependapat bahwa semua keterampilan bahasa itu berhubungan erat satu sama lain. Bercakap-cakap itu tidak terlepas dari membaca, dan menulis khususnya.

Saya kurang tahu, kaitan ini semua adalah direfleksikan dalam susunan materi kurikulum di sekolah-sekolah kita. Kita yang sudah pernah meninjau sekolah di negara-negara maju, di sekolah dasar itu sepertinya tidak ada tata bahasa secara formal, yang paling banyak waktu yang dihabiskan adalah untuk pelajaran bercakap-cakap. Murid-murid berkumpul 10 orang atau 6 orang berkelompok, di situ ada guru, lalu praktik menceritakan apa yang dilihat kemarin. Beberapa SD kita yang saya kunjungi, saya tanya, apa sebab tidak ada ini; jawabnya, bagaimana kita sempat, Pak, waktunya sudah sekian.

Kemudian, beberapa waktu yang lalu di daerah Medan, Sumatera Utara, ada SD yang mempunyai murid-murid kelas VI belum bisa membaca. Di daerah pedesaan itu, apakah kemampuan guru atau memang kesempatannya kurang, saya belum tahu. Ini perlu mendapat perhatian Depdikbud.

Kira-kira dua tahun yang lalu di salah satu SMA Negeri, termasuk di Medan, saya datang untuk melaksanakan tes kecepatan membaca rata-rata dari semua jurusan di SMA itu. Saya ambil sampel kira-kira 138 orang, hanya beberapa kata per menit, dan pemahaman 58%. Di negara maju seperti Amerika dan Australia, anak SMA dituntut harus 250 kata dan pemahaman 70%. Apakah unsur ini, untuk membaca efektif dan efisien itu, termasuk dalam kurikulum di sekolah kita. Paling tidak, dari kelas 5 SD unsur ini harus sudah diperkenalkan karena bagaimanapun pada masa yang akan datang ini, kecepatan membaca dibutuhkan. Itu yang paling penting dalam penelitian saya kira. Mohon penjelasan dari Pak Yus, apakah di dalam Kurikulum 94 sudah masuk unsur-unsur itu. Apakah unsur keterkaitan seluruh keterampilan bahasa itu tergambar dalam kurikulum.

Kedua, apakah aspek penelitian kecepatan membaca, yang menjadi dasar, juga pengembangan minat, ada di dalam kurikulum.

Jawaban:

Pak Tampubolon, saya kira memberikan contoh yang konkret. Formalnya memang keterampilan itu ada dalam Kurikulum 75. Dalam Kurikulum 94 saya lihat dengan istilah penggunaan bahasa maksudnya untuk terampil menggunakan

bahasa itu. Jadi, dalam praktik di dalam kelas, karena ada target-target atau penafsiran yang salah dari guru atau pengawas mengenai target itu, kebebasan itu untuk bersenang-senang dengan murid-murid. Membaca, bercerita, dan berbicara yang berhubungan dengan keadaan di kelas, mungkin sulit terjadi. Sebetulnya lahan itu sudah ada dalam kurikulum, hanya saja barangkali mesti diberikan pengertian kepada seluruh yang terkait dengan masalah-masalah itu, termasuk kepada para pengawas dan juga penyusun soal-soal ujian. Ujian jangan secara nasional seperti itu.

Kemudian, kecepatan membaca, saya kira begitu. Kecepatan membaca merupakan salah satu aspek yang harus kita latih pada zaman sekarang.

4. **Pertanyaan:** Ny. S. Suryono (Bu Kasur), Ketua Yayasan Setia Balita Jakarta

Kami dari pengajar TK berpendapat bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu memang harus kita mulai sejak dini. Walaupun TK tidak termasuk jalur pendidikan formal, guru TK, kelompok bermain, dan sebagainya adalah motivator juga dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar yang paling dini. Guru harus banyak berkomunikasi dengan anak-anak didiknya walaupun kami terpaksa harus menggunakan bahasa ibu kepada anak-anak, dan guru TK secara nasional sudah tergabung dalam IGTKI. Jadi, hanya itu yang saya sampaikan.

Jawaban:

Benar demikian, justru di TK itu kemungkinan untuk tumbuhnya penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang digambarkan oleh Pak Tampubolon dan Emha. Di TK bisa langsung, anak-anak bisa kreatif, bermain fantasi, dan sebagainya. Dan juga ternyata bahwa khususnya barangkali di kota-kota besar, ada penelitian mengenai kosakata TK, ternyata anak-anak di TK itu sudah menguasai bermain-main dengan tetangganya itu, sejumlah kosakata yang menurut hemat saya cukup besar. Akan tetapi, tentu saja ibu jangan, walaupun diharuskan, jangan turuti anjuran agar anak-anak TK harus diajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita mengajari mereka untuk berkomunikasi dengan bahasa yang cocok dengan anak-anak saja. Bahkan, ragam wanita ada, ragam anak-anak juga ada, jadi berlaku saja terus seperti apa yang sudah berlaku. Barangkali nanti dengan peningkatan-peningkatan tertentu, mungkin dengan merencanakan konsep-konsep hal apa yang harus ditanamkan pada anak-anak. Umpamanya, giat bekerja, giat belajar, baik itu konsep dalam arti verbal maupun melalui praktik-praktik di dalam TK itu. Saya kira kita harus memilih atau sudah melakukan pemilihan-pemilihan konsep kreatif, umpamanya konsep bekerja sama sehingga barangkali sejumlah kosakata akan kita celupkan pada anak-anak itu sejak dini. Sejumlah kosakata yang menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, besar sekali pengaruh guru TK kepada anak-anaknya. Kalau kita mempunyai anak kecil, memberitahukan ini sebetulnya salah, jawabannya, kata ibu guru juga begitu.

Biasanya tidak saya betulkan, bagi saya lebih penting penghormatan dia terhadap gurunya.

Dalam jangka waktu itu nanti dia akan tahu bahwa itu salah. Kepada ibu, barangkali kepada seluruh guru TK, saya mau menitipkan pesan, jangan sampai anak-anak kehilangan masa anak-anaknya. Jangan sampai anak TK terlalu dibebani dengan segala yang ada di luar ini. Biarkan mereka seperti rumput yang sedang segar, tidak ditindih yang macam-macam, biarkanlah mereka segar mumpung muda karena, kalau sudah tua seperti kita, terlalu banyak kewajiban yang harus ditaati.

5. **Pertanyaan:** Lilis, Jakarta

Berangkat dari keterlibatan saya, saya melihat dalam makalah Bapak ada penelitian tentang kosakata. Walaupun itu dikatakan di suatu daerah, tetapi mungkin ini juga berlaku untuk daerah lain. Masalah penggunaan kosakata untuk siswa, baik SD, SMP, SMA maupun mungkin perguruan tinggi. Apakah sudah ada standar kosakata yang harus dikuasai oleh siswa mulai SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi sehingga, kalau sudah ada standar, apa yang diharapkan akan mempengaruhi pemahaman. Apakah itu informasi atau yang tadi Bapak contohkan menangkap informasi pembangunan. Kesulitan siswa SMP menangkap informasi tersebut karena mereka kurang menguasai kosakata

Jawaban:

Ada penelitian, yang sebetulnya besar-besaran, barangkali juga dengan biaya tinggi, yaitu dilakukan Balitbang Ditgu, dalam hal ini, Pusat Kurikulum. Jadi, pada waktu penelitian dimulai, dulu ada sebuah provinsi (Jawa Barat) sebagai model. Lalu, diadakan penelitian kosakata dari buku-buku yang macam-macam. Lalu dikeluarkan, dan dicobakan kepada murid-murid SD di Jawa Barat, lalu diketahui bahwa kosakata bisa diklasifikasikan, ada yang sulit, ada yang sedang, dan ada yang mudah. Kemudian, penelitian yang sama dilakukan di seluruh Indonesia dan hasilnya sudah ada dalam buku yang diterbitkan oleh Balitbang Ditgu dan Puskur. Buku itu tidak dijual sehingga sulit untuk diketahui semua orang. Jadi, itu kesulitannya, tetapi itu sudah dilakukan, dan upaya ini tidak masuk di dalam sistem persekolahan, dalam arti untuk kepentingan menulis buku pelajaran misalnya. Si pengarang barangkali tidak sempat, juga penulis kurikulum, dan penyusun kurikulum, untuk menghitung berapa ribu kata andaikata dirujuk misalnya. Jadi, distandarkan juga sulit, tetapi biasanya atau, berdasarkan itu juga, bisa kita lihat wilayah kosakata SD berapa ribu atau SMP berapa ribu, sudah bisa ditarik dari itu.

Sementara dalam bahasa Inggris sudah lebih jelas melalui penelitian-penelitian itu. Kemudian, apa yang ada di bagian 3 itu bukan hasil penelitian saya, melainkan penelitian para mahasiswa S-2, kemudian ada hasil penelitian Prof. Sanusi dan kawan-kawan, juga Ibu Entin dan kawan-kawan.

PENGAJARAN MENGARANG SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA

Gorys Keraf
Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pengajaran mengarang dewasa ini, khususnya untuk menghadapi Kurikulum 1994, digiatkan dalam semua tingkat pendidikan. Kebijakan ini didasarkan pada penalaran bahwa mengarang menuntut atau memaksa seseorang untuk menguasai kosakata, kaidah-kaidah morfologis, dan kaidah-kaidah sintaksis yang dijamin dalam penalaran secara dinamis. Artinya, semua komponen itu harus direalisasi secara terpadu dalam kegiatan karang-mengarang ini. Karena kegiatan mengarang harus menggunakan bahasa sebagai sarana pengungkap penalaran seseorang, makalah ini diarahkan pada usaha menyoroti *Pengajaran Mengarang sebagai Sarana Pengembangan Kemampuan Berbahasa Indonesia*. Semakin giat seseorang terlibat dalam kegiatan karang-mengarang, semakin mantap pula penguasaan semua komponen bahasa itu. Di samping itu, sekaligus ia mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penalarannya secara terus-menerus.

Karang-mengarang bukan hanya menjadi masalah di bangku sekolah, melainkan juga menyangkut penulis-penulis di luar bangku sekolah. Sekolah diharapkan meletakkan dasar-dasar kemampuan tersebut secara mantap, selanjutnya kemampuan itu dikembangkan lebih lanjut setelah seseorang meninggalkan bangku pendidikan. Dengan mengembangkan kemampuan itu berarti penulis harus tetap menguasai bahasa secara aktif, mengikuti semua perkembangan yang terjadi dalam bahasa, dan secara terus-menerus mengembangkan penalarannya agar tulisannya dapat diterima dan dinikmati para pembacanya, termasuk mereka yang masih duduk di bangku sekolah.

Karang-mengarang bukan hanya menyangkut masalah kemampuan berbahasa, melainkan juga sejumlah faktor lain, baik yang merangsang maupun yang menghambat kegiatan ini. Oleh karena itu, makalah ini akan menyoroti pula hal-hal yang mempunyai kaitan erat dengan kegiatan karang-mengarang, terutama di luar kegiatan sekolah. Kegiatan karang-mengarang bukan hanya berakhir pada saat pengarang menyelesaikan naskahnya, melainkan juga menyangkut masalah bagaimana supaya karangannya itu sampai kepada pembaca. Bila sebuah tulisan dari seorang pemula,

satu atau dua kali ditolak oleh penerbit, jelas hal itu akan membawa pengaruh yang sangat negatif bagi penulisnya. Oleh karena itu, semua persoalan sebelum seseorang dapat memahirkannya secara mantap dalam karang-mengarang harus pula dipertimbangkan.

b. Situasi Umum

Dari pengalaman memberi pelatihan di beberapa kanwil Depdikbud, tampaknya ada semangat yang berapi-api dan semacam kegairahan yang besar di antara para peserta. Dengan mengikuti penataran ini mereka berharap untuk menghasilkan sebuah karya. Pusat Perbukuan, sebagai instansi yang menyelenggarakan kegiatan ini, diharapkan dapat menerbitkan tulisan mereka untuk keperluan pendidikan. Keinginan ini dapat dipahami karena untuk kenaikan pangkat seorang guru, masalah tulis-menulis atau karang-mengarang ini turut menentukan. Namun, tampaknya kemampuan para pendidik tidak begitu memuaskan. Penalaran sering tidak berjalan mulus, bahasanya tidak memperlihatkan asas yang baik dan benar, gagasan-gagasan tidak dikembangkan secara terperinci, struktur pengalineaan kurang jelas, dan kalimat-kalimat sering tidak jelas hilir dan muaranya. Jangan berbicara mengenai penggunaan tanda-tanda baca. Saya sendiri heran. Sudah berapa puluh tahun diperkenalkan *Ejaan Yang Disempurnakan*, dan yang ditatar adalah para guru dan pengajar, yang harus mengajar anak didik mengenai ejaan ini. Bila para guru dan pengajar memperlihatkan ketidakterampilan mereka dalam menggunakan ejaan dan tanda-tanda baca, bagaimana bisa mengharapkan sesuatu yang baik dari mereka untuk anak didik mereka. Ini kenyataan yang pahit.

Masalah karang-mengarang menjadi sangat aktual sekarang ini, dan pada tahun-tahun yang akan datang, karena diangkat sebagai satu bidang yang harus dikuasai anak didik, seperti yang terungkap dalam kurikulum 1994 untuk tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas.

Pemerintah, melalui kurikulum ini, mengharapkan manusia Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan mampu mengembangkan cara berpikir yang kritis dan kreatif. Anak didik sejak SD hingga SLTA dilatih untuk menyusun karangan dengan bermacam-macam tema sebagaimana dirumuskan dalam butir-butir pembelajaran mengenai karang-mengarang dari tingkat dasar hingga tingkat sekolah menengah umum (SLTA). Apa yang diletakkan di tingkat pendidikan dasar dan menengah diharapkan dapat dikembangkan lanjutkan dalam pendidikan tinggi. Pendidikan tinggilah yang menjadi barometer utama untuk menilai kemajuan ilmu dan teknologi bangsa kita dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Barometer itu akan tampak dari karya-karya ilmiah yang ditulis bangsa kita dari hasil penelitian yang dilakukan oleh putra-puteri kita. Slogan yang umum dibesar-besarkan dalam kaitan ini adalah "*Kita harus menjadi tuan di rumah kita sendiri*." Menjadi tuan di rumah kita sendiri bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, melainkan juga dalam bidang bahasa. Bidang bahasa akan memberi sumbangan pada dunia ilmu pengetahuan kalau kita

menghasilkan temuan-temuan ilmiah sendiri, yang mau tidak mau, akan diungkapkan dengan menggunakan istilah-istilah yang khas Indonesia.

Kurikulum 1994 menghendaki anak didik terampil menulis. Bila para pendidik sendiri tidak menguasai dan menghayati setiap kaidah ejaan dan tanda baca, bagaimana mereka bisa memberi petunjuk yang benar, dan bagaimana mereka bisa menilai dan memberi umpan balik yang benar dan terus-menerus pada anak didik mereka.

Anak didik juga akan sangat dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan media massa kita. Lihatlah bagaimana teks-teks yang ditayangkan di televisi, baik swasta maupun pemerintah, sering tidak mengindahkan soal ejaan. Harian dan majalah, demi kecepatan kerja menyerahkan penyukukataan pada komputer sehingga begitu banyak kesalahan penyukukataan yang dapat ditunjukkan dari hasil kerja komputer. Andaikata para guru sudah membuat yang paling baik bagi anak didiknya, hasilnya dirusakkan lagi oleh media massa kita ini.

Suatu saat saya membela guru-guru bahasa, yaitu bahwa kesalahan yang dibuat anak-anak didik bukan semata-mata tanggung jawab atau kesalahan mereka. Karena guru-guru mata pelajaran lain yang tidak mengindahkan masalah kebahasaan akan merusak apa yang telah diluruskan guru bahasa. Selain itu, apa yang telah dibangun oleh para guru bahasa, diruntuhkan lagi oleh media massa kita. Namun, melalui penataran-penataran di pelbagai tempat, saya memperoleh kenyataan bahwa guru-guru kita, khususnya guru bahasa, belum memperlihatkan perilaku ideal yang diharapkan.

2. Pengajaran Mengarang di Lembaga Pendidikan

Di perguruan tinggi pengajaran mengarang diberikan dengan alasan ketidakmampuan mahasiswa untuk mengungkapkan pikiran mereka secara ilmiah dalam tugas-tugas yang diberikan, baik berupa karya tulis, laporan, tugas akhir, maupun skripsi sarjana. Penalaran atau jalan pikiran biasanya tidak bersinambung, sistematika pemecahan masalah tidak jelas dan sering tidak tuntas. Di samping itu, masalah bahasa yang menjadi sarana utama untuk mengungkapkan pikiran itu menjadi kendala yang menimbulkan persoalan tersendiri.

Celakanya adalah dalam kurikulum perguruan tinggi biasanya mata kuliah ini dicantumkan sebagai salah satu mata kuliah dasar umum (MKDU), seperti halnya agama, budaya dasar, dan sosial dasar. Semua mata kuliah ini mempunyai tujuan umum yang sama, yaitu menanamkan sistem nilai mengenai bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu, kalau mata kuliah bahasa Indonesia ditempatkan sebagai mata kuliah dasar umum, tujuannya adalah menanamkan rasa cinta berbahasa Indonesia, menanamkan rasa bangga berbahasa Indonesia, dan dengan demikian akan menanamkan rasa kesatuan dan persatuan pada warga Indonesia. Bila demikian halnya, tidak ada persoalan karang-mengarang dalam mata kuliah ini.

Pimpinan fakultas nonbahasa, sadar atau tidak, lalu memasukkan mata kuliah ini sebagai mata kuliah untuk memberikan dasar-dasar keterampilan membuat karya ilmiah di fakultasnya, meletakkan dasar pengetahuan komposisi ilmiah pada

mahasiswa. Bagi pengajar mata kuliah bahasa Indonesia tentu hal ini mempunyai konsekuensi yang berbeda. Sebagai mata kuliah dasar umum, mata kuliah ini dapat diselesaikan dalam satu semester dan pelaksanaannya akan jauh lebih ringan walaupun strategi untuk menanamkan aspek afektif bahasa tidak selalu mudah. Sebaliknya, memberi kuliah komposisi, pelaksanaannya jauh lebih berat, sarat dengan latihan, dan banyak aspek yang harus tercakup di dalamnya.

Karena itu, memberi kuliah ini dengan tujuan yang berbeda akan menuntut strategi yang berlainan, serta materi perkuliahan juga akan berbeda. Memberi kuliah bahasa Indonesia, sebagai sebuah mata kuliah MKDU, akan lebih condong pada kuliah-kuliah yang bersifat umum dengan tujuan utama menanamkan rasa kebanggaan dan kecintaan itu. Seorang pengajar yang mengasuh mata kuliah ini merasa lebih "enteng", lebih mudah menyusun dan menyajikan mata kuliah ini. Sebaliknya memberi kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah komposisi, secara khusus komposisi ilmiah, tidak semudah memberi kuliah MKDU.

Kesulitan memberi mata kuliah ini adalah bahwa kuliah mengarang sebenarnya bersifat interdisipliner, mencakup beberapa bidang pengetahuan dan keterampilan, dan memerlukan pula latihan-latihan. Sebagai mata kuliah yang bersifat interdisipliner, kuliah mengarang akan mencakup

- 1) bidang kebahasaan;
- 2) bidang penalaran umum;
- 3) bidang penalaran khusus (bidang ilmu jurusan atau fakultas);
- 4) bidang retorika (dasar-dasar mengarang);
- 5) masalah pernaskahan (yang bersifat teknis).

Dalam realisasinya, mata kuliah ini diberikan dalam waktu satu semester dengan jumlah 2 SKS. Karena waktu terbatas, sementara tuntutananya banyak, pengajar akan cenderung menyajikan materi perkuliahan dalam bentuk kuliah-kuliah umum, dengan sedikit latihan.

Bila gambaran untuk perguruan nonpendidikan demikian, di perguruan tinggi kependidikan situasinya tidak akan jauh berbeda. Perguruan tinggi kependidikan menyiapkan lulusannya sebagai guru atau pengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Namun, kuliahnya tidak diarahkan untuk menanamkan keterampilan mengarang para lulusannya.

Pengajar atau guru di pendidikan menengah dan dasar selalu dituding sebagai "kambing hitam" dalam kemampuan siswa dalam karang-mengarang. Sistemlah yang harus dipersalahkan. Calon guru yang dibina di perguruan pendidikan tidak diberi bekal dan keterampilan khusus dalam karang-mengarang. Terlalu banyak bidang yang harus diambil. Dan semuanya dalam porsi sedikit-sedikit untuk dapat memperoleh gelar sarjana pendidikan dan sebuah akta mengajar.

Dalam Kurikulum 1994 yang akan dilaksanakan pada tahun 1994 nanti, masalah mengarang merupakan satu dari empat keterampilan yang harus dimiliki siswa. Kurikulum Bahasa Indonesia dibelokkan dari pendekatan pragmatik ke pendekatan

komunikatif. Siswa diarahkan secara ketat untuk memperoleh empat macam keterampilan, yaitu keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Bukan hanya itu. Keterampilan membaca tidak akan lepas dari keterampilan lainnya. Selesai membaca, siswa dilatih untuk mendiskusikan isi bacaan, disuruh untuk menulis kembali, dan memberi komentar mengenai isi bacaan. Demikian juga, sesudah disuruh membuat karangan, siswa diminta membahas isi karangan dalam diskusi kelas, dan sekali lagi menulis risalah pembahasan kelas. Dengan mendengarkan sebuah wacana lisan (menyimak), siswa disuruh membahas wacana yang didengarnya, menulis ringkasan wacana lisan, menulis laporan pembahasan mengenai diskusi atas wacana lisan tadi.

Bila seluruh program pengajaran bahasa dijalankan secara baik, kita mengharapkan sebuah perubahan. Di samping itu, gurunya juga harus memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi dalam keempat bidang kemampuan itu. Bila tidak, dalam pelaksanaan kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama dengan sedikit perbedaan, yaitu murid-murid tetap diberi beban yang begitu padat dan berat sesuai dengan amanat kurikulum 1994. Namun, guru tidak sanggup memeriksa, menilai, dan menjadikannya sebagai umpan balik bagi siswa untuk menyempurnakan semua kemampuan itu.

Bila guru-guru melaksanakannya, dapatlah dibayangkan suatu beban tugas yang sangat berat menanti para guru. Berapa puluh, bahkan ratusan karangan, betapapun kecil formatnya, sudah menanti para guru untuk memeriksa, menilai, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas karangan siswanya.

Apakah mengarang hanya menjadi beban tugas mata pelajaran bahasa Indonesia? Apakah guru sejarah, ilmu bumi, ilmu alam, biologi, dan sebagainya tidak juga diharuskan untuk menyuruh siswa-siswanya membuat karangan dalam bidang-bidang tersebut? Bila demikian, makin saratlah beban tugas siswa untuk mengerjakan sekian banyak karangan dari semua mata pelajaran lainnya itu. Akibatnya, tidak heran bila banyak siswa terpaksa harus dirawat oleh psikiater karena terganggu jiwa dan sarafnya karena beban tugas ini.

Lalu masih ada masalah lain. Apakah guru-guru nonbahasa itu juga dibekali secukupnya dengan teori-teori atau dasar-dasar karang-mengarang untuk melayani pendidikan menengah dan dasar itu?

Dewasa ini ada usaha yang sangat membantu para guru yang dilakukan oleh Pusat Perbukuan Depdikbud. Sudah sejak tiga tahun ini, melalui program Pusat Perbukuan, diadakan penataran pelatihan penulisan di pelbagai Kanwil Depdikbud. Minimal ada empat penataran untuk empat kanwil, yang mengikutsertakan sekitar 25 guru SD, SLTP, dan SLTA dari pelbagai bidang ilmu. Berarti hanya ada 100 guru yang dapat ditatar tiap tahun. Ada kanwil yang dengan usaha sendiri dapat mengikutsertakan lebih dari 25 orang. Itu pun hanya beberapa kanwil saja. Bila program ini berjalan lancar, baru dalam waktu 7 tahun tiap kanwil memperoleh kesempatan satu kali penataran bagi 25 orang gurunya. Bila program ini sudah selesai, akan diperoleh 27×25 guru, atau sebanyak 675 orang, yang sudah memperoleh

keterampilan dasar untuk karang-mengarang. Padahal, ada berapa guru SD, SLTP, dan SLTA di seluruh Indonesia? Sementara itu, ada guru yang sudah pensiun sehingga tidak dapat mengalihkan kemampuan yang sudah diperolehnya itu pada anak didiknya. Syukur kalau mereka masih menulis untuk kepentingan pendidikan. Akan tetapi, Pusat Perbukuan bukan lembaga pendidikan guru untuk bidang karang-mengarang. Tugas utamanya adalah menyediakan buku-buku untuk proses belajar-mengajar di pendidikan menengah dan dasar. Tindakan yang diambil oleh pusat ini hanyalah semacam *crash program* untuk mendidik tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan untuk menulis buku-buku ajar dan buku-buku penunjang bagi pendidikan, bukanlah mengambil alih tugas lembaga yang harus menyediakan tenaga pendidik untuk pendidikan menengah dan dasar.

3. Prasyarat Dasar

a. Kemampuan Berbahasa

Bahasa adalah sarana utama manusia untuk mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan kepada orang lain. Bahasa merupakan saluran yang utama karena bahasa memberi kemungkinan yang tak terbatas jika dibandingkan dengan sarana lainnya, seperti isyarat atau lambang-lambang fisik lainnya, misalnya, asap dan bunyi tong-tong. Padahal unit terkecil pembentuk bahasa hanya ada sekitar 30 unit bunyi. Namun, dari beberapa unit kecil ini dibentuklah kata-kata yang tidak terbatas jumlahnya, yang diperkaya lagi dengan unit-unit terikat (morfem terikat) yang mampu melipatgandakan lagi jumlah kata dalam sebuah bahasa.

Penguasaan kosakata, unit morfem terikat beserta kaidah gramatikal untuk membentuk kata-kata baru, serta penguasaan kaidah-kaidah sintaksis untuk mengubah sebuah struktur kalimat menjadi sejumlah kalimat yang memiliki nuansa semantik yang berbeda merupakan prasyarat untuk menciptakan tulisan yang bernilai dengan bahasa yang baik. Karena semua anggota masyarakat bahasa terikat dengan segala macam kaidah tersebut, baik kaidah fonologis, morfologis, sintaksis maupun semantis yang mengatur pemakaian bahasa yang baik dan benar, ketaatan seseorang menggunakan semua kekayaan bahasa itu akan memudahkan pula penerimaan gagasan yang hanya berada dalam pikiran pembicara atau penulis.

Kontak dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama bangsa yang sudah maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mempengaruhi bahasa kita. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Indonesia tidak bisa bersifat statis, tetapi harus terus-menerus mengikuti semua perkembangan. Dalam hal ini, peranan media massa sangat menentukan. Mereka yang tidak mengikuti semua perkembangan itu akan ketinggalan, baik ketinggalan dalam penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang berkembang cepat maupun ketinggalan dalam konsep baru yang diungkapkan melalui kata-kata tersebut. Menjadi seorang pengarang atau penulis, terutama penulis karangan ilmiah atau ilmiah populer, harus berkenalan akrab dengan konsep-konsep baru yang dinyatakan dalam pelbagai kata baru itu.

b. Kemampuan Penalaran

Penalaran merupakan proses yang terjadi dalam pikiran manusia untuk menghubungkan-hubungkan semua hal yang ada di sekitar, semua yang dialami, dan untuk menurunkan sebuah kesimpulan. Dalam komunikasi sehari-hari, kita juga menggunakan logika. Namun, logika yang praktis, yang singkat-singkat. Dalam karang-mengarang, juga dalam wacana-wacana lisan seperti ceramah, pidato, dan diskusi ilmiah, diperlukan logika yang lebih luas dan mendalam.

Dalam karang-mengarang, penulis mencoba menghimpun sejumlah besar data, kemudian menilai data-data tersebut, merangkainya dalam sebuah sistematika yang dapat diterima orang-orang lain menuju suatu kesimpulan atau pendapat yang dapat disepakati orang lain. Proses penalaran yang baik, tidak dapat tidak, harus ditunjang oleh bahasa. Bahasa yang menunjang penalaran harus tampak dari pilihan kata yang tepat dan sesuai, serta struktur kalimat yang jelas, bervariasi, dan mudah dipahami.

Ada penalaran yang bersifat umum, seperti yang tampak dalam corak berpikir yang induktif dan deduktif. Akan tetapi, ada pula penalaran yang khusus sebagai yang tampak dalam karangan-karangan ilmiah, yang berkaitan dengan bidang ilmu. Penalaran khusus ini bertalian dengan teori-teori khusus dalam tiap bidang ilmu. Sebuah tulisan yang menentang teori tertentu dalam bidang ilmunya harus membuktikan kelemahan teori yang sudah dikenal dan menunjukkan kekuatan teorinya yang baru. Walaupun demikian, dasarnya tetap penalaran umum, yang berbeda hanyalah data atau fakta baru.

c. Dasar Retorika

Dasar-dasar retorika di sini mencakup dua hal, yaitu kemampuan dasar retorika serta pengetahuan dan penerapan syarat penaskahan dalam karangan sebagai dikemukakan di bawah ini.

Setiap penulis harus menguasai juga dasar-dasar retorika yang mencakup cara bagaimana memilih topik karangan yang dapat menarik para pembacanya, cara merumuskan tema karangan, menyusun kerangka karangan yang kelak akan menjadi dasar organisasi karangan, dan metode-metode atau teknik penyajian yang akan digunakan untuk menggelarkan gagasan-gagasannya dengan terperinci dan jelas. Unsur-unsur retorika juga mencakup bagian-bagian yang harus dikembangkan dalam sebuah karangan, seperti isi kata pengantar, pendahuluan, kesimpulan, dan lampiran-lampiran.

Dengan memperhatikan perincian unsur retorika sebagai dikemukakan di atas, sebenarnya dasar-dasar retorika ini juga mencakup masalah penalaran, bahasa sebagai alat pengungkap penalaran itu, dan objek yang menjadi materi penalarannya. Orang tidak hanya sekadar menulis, tetapi menulis sesuatu secara baik dan teratur dan bermanfaat bagi banyak orang dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Mengenal konvensi naskah merupakan persyaratan khusus untuk wacana tertulis. Bila wacana lisan memerlukan sarana penunjang seperti gerak-gerik, mimik, dan intonasi, wacana tertulis memerlukan seperangkat ketentuan untuk kemudahan bagi para pembacanya. Ketentuan semacam itu, yang secara singkat disebut *konvensi penaskahan*, meliputi, antara lain, cara menulis judul-judul dalam karangan tersebut, pengalineaan, penggunaan tanda baca, cara mengutip, cara membuat catatan kaki, cara membuat daftar pustaka, dan bagaimana menyusun daftar indeks.

4. Mental Seorang Penulis

Seorang penulis yang baik di samping memiliki kemampuan-kemampuan dasar sebagai dikemukakan di atas, ia harus memiliki pula beberapa sifat di bawah ini.

a. Berjiwa Eksploratif

Seorang penulis harus memiliki sifat eksploratif, yaitu memiliki jiwa untuk mengadakan penyelidikan atau mengadakan eksplorasi atas objek-objek yang ada di sekitarnya. Jiwa eksploratif akan mendorong seseorang untuk mengadakan perjalanan guna menemukan sesuatu yang baru untuk dijadikan bahan tulisannya. Jiwa eksploratif juga berarti dia selalu berjiwa ingin tahu. Dia memiliki jiwa untuk selalu berusaha menemukan sesuatu yang baru.

Sesuatu yang baru dapat berarti suatu objek yang memang belum dijumpai atau dikenal orang sebelumnya, minimal oleh para pembacanya. Oleh karena itu, ia akan mengadakan perjalanan-perjalanan jauh untuk menemukan sesuatu. Objek temuan dengan sendirinya akan sangat menarik sebagai bahan tulisan.

Pengertian sesuatu yang baru dapat juga diartikan sesuatu objek yang sehari-hari dikenal banyak orang, tetapi ia berhasil menampilkan sebuah makna baru, suatu interpretasi khusus. Atau, ia berhasil melihat objek tadi dari sudut lain yang tidak pernah dipikirkan atau dibayangkan oleh banyak orang. Misalnya, menunjukkan sebuah objek sebagai termasuk dalam sebuah kelas baru yang tidak konvensional, atau menganalisis suatu objek ke dalam sebuah struktur yang tidak lazim, tetapi dapat diterima secara logis.

b. Berjiwa Diskoveri

Pengertian diskoveri mirip dengan eksplorasi. Namun, diskoveri menekankan masalah proses yang dilakukan dengan menerapkan asas-asas tertentu. Misalnya, seorang yang mengadakan eksperimen-eksperimen laboratoris menemukan suatu unsur atau suatu bahan baru. Penemuan ini adalah hasil diskoveri, bukan hasil eksplorasi.

Dengan demikian, seorang yang berjiwa diskoveri akan selalu berusaha untuk melakukan percobaan-percobaan atau eksperimen-eksperimen untuk memperoleh suatu temuan. Apa yang akan terjadi bila seorang mencampurkan dua bahan kimia

tertentu, atau mencampurkan dua logam, dan sebagainya. Atau, usaha untuk mengobati suatu penyakit dengan zat-zat tertentu. Semuanya termasuk dalam penemuan pengertian ini.

Perbedaan antara kedua hasil penemuan di atas dapat dirumuskan secara sederhana: eksplorasi merupakan proses kegiatan yang didasarkan pada jiwa petualangan untuk menemukan sesuatu yang baru, sementara diskoveri didasarkan pada prinsip ilmiah.

c. *Berpengalaman*

Seorang penulis juga bisa memanfaatkan pengalamannya sebagai bahan tulisannya. Para pembaca yang tidak mengalami hal-hal tersebut tentu akan sangat tertarik mengenai apa yang dialami oleh penulis dan orang-orang lainnya sebagaimana digambarkan dalam karangan itu.

Pengalaman yang dijadikan dasar penulisan adalah apa saja yang diperoleh seseorang dalam hidupnya, tanpa disengaja atau dengan sengaja untuk dicapai. Seorang penulis yang baik akan mengangkat pengalaman sehari-harinya sebagai topik karangannya, dijalin dalam bahasa dan penyajian yang menarik. Namun, di balik semua itu, pengalaman yang dituangkan dalam tulisan akan sangat bermanfaat bagi para pembaca kalau penulis dapat menemukan nilai atau makna dari pengalamannya itu.

Pendekatan ilmiah dapat dibedakan dari pengalaman karena yang satu dengan sengaja mencari data dan informasi untuk menurunkan kesimpulan yang rasional. Pengalaman, sebaliknya, hanya menunggu timbulnya peristiwa atau kejadian dalam hidup seseorang atau kehidupan masyarakat, pada umumnya. Dari peristiwa atau kejadian yang muncul, entah dalam jangka waktu singkat atau lama, akhirnya manusia juga dapat menurunkan kesimpulan. Biasanya kesimpulan yang diperoleh dari pengalaman, karena diketahui dan dihayati oleh seluruh anggota masyarakat disebut sebagai pengetahuan umum, kebiasaan, tradisi, dan sebagainya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebaliknya, kesimpulan yang diturunkan oleh seorang yang mengadakan penelitian khusus mula-mula menjadi "hak" individu tadi. Lambat laun dengan membaca dan mempelajari kesimpulan itu, akhirnya anggota masyarakat lainnya berangsur-angsur menerimanya sebagai kebenaran ilmiah, yang menjadi kekayaan masyarakat umum.

d. *Cinta Kebenaran*

Baik pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian maupun melalui pengalaman haruslah diterima dan diyakini sebagai kebenaran. Bila anggota masyarakat lainnya suatu saat melihat bahwa apa yang dikemukakan atau yang disimpulkan itu tidak benar atau tidak dapat diterima karena bertentangan dengan sistem nilai yang dianut, akan timbul reaksi, yang dengan sendirinya akan menolak apa yang ditulis.

Oleh karena itu, apa pun yang diungkapkan dalam sebuah tulisan selalu harus sesuai dengan kebenaran dan sejalan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai kebenaran selalu dapat diuji secara universal. Oleh karena itu, kebenaran ilmiah selalu dapat diuji oleh siapa pun, tidak peduli dia seorang Indonesia, Negro, atau Eropa. Namun, sistem nilai tergantung pada pengalaman yang berhubungan erat dengan situasi dan kondisi setempat. Dengan demikian, sistem nilai masyarakat Eropa dapat saja tidak sesuai dengan sistem nilai masyarakat Indonesia, dan akan berbeda dari sistem nilai masyarakat Afrika, dan seterusnya.

Oleh karena itu, topik tulisan dari pengalaman bisa saja berakhir pada dua muara yang berbeda, yang condong atau bernada ilmiah, dan yang condong atau bernada sistem nilai. Seorang penulis yang baik sudah tahu ke mana arah yang akan ditempuhnya. Apakah ia akan menulis sesuatu yang bersifat ilmiah, ilmiah populer, hanya sekadar kisah pengalaman, sudah menyentuh sistem nilai, atau secara murni mempersoalkan sistem nilai yang dianut sebuah bangsa atau masyarakat.

5. Faktor Perangsang

Karang-mengarang tidak mungkin timbul tanpa rangsangan. Sudah dikemukakan bahwa dalam kurikulum pengajaran bahasa Indonesia ada empat hal yang akan menjadi titik sentral dalam pengajaran bahasa: membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Tiap keterampilan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu ada relasi timbal balik. Yang satu akan merangsang keterampilan yang lain.

a. Kegairahan Membaca

Suatu hari, ketika saya melintasi sebuah jalan di kota Manado terbacalah oleh saya sebuah poster besar yang berbunyi, "*Tiada Hari Tanpa Membaca.*" Di sana memang lagi ada pameran buku. Tujuan slogan jelas: merangsang para pengunjung dan mereka yang membaca slogan itu untuk banyak membaca. Hari-hari mereka hendaknya tidak dilewati begitu saja, tetapi harus diisi dengan membaca karena dengan membaca seseorang akan memperluas pengetahuannya, seorang akan mengetahui banyak peristiwa yang terjadi di dunia dewasa ini. Dengan membaca kita mengenal bermacam-macam pengetahuan baru, dengan membaca proses berpikir kita dirangsang.

Menurut mereka yang banyak bepergian, orang-orang Jepang adalah bangsa yang gemar membaca. Kegemaran membaca mereka begitu tinggi sehingga di mana saja mereka membaca. Anak-anak sekolah dan mahasiswa gemar membaca. Orang-orang dewasa juga gemar membaca. Selagi menunggu kereta api atau bus di stasiun atau di halte, mereka membaca. Dalam kereta api, dalam bus, atau pesawat mereka membaca. Di mana-mana, selagi tidak bekerja, mereka sibuk membaca. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa bangsa Jepang begitu cepat maju, begitu cepat membangun negara mereka dari puing-puing Perang Dunia II.

Bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Orang-orang mengeluh bahwa anak-anak kita kurang bergairah membaca. Mahasiswa kita kurang bersemangat membaca. Para dosen kita tidak bisa membaca. Apalagi orang-orang biasa.

Banyak alasan yang diajukan untuk menanggapi situasi ini. Andaikata ada kegairahan membaca, yang akan dituding adalah mahalnya harga buku. Bila setiap orang sudah mempunyai kesenangan membaca, ia harus menyediakan anggaran yang cukup banyak untuk membeli buku. Dalam hal ini, belum memungkinkan kalau tingkat penghasilan masyarakat Indonesia masih seperti sekarang ini. Andaikata masyarakat Indonesia sudah mempunyai penghasilan yang cukup tinggi, belum ada cukup pengarang atau penulis yang dapat mengarang dan menulis buku-buku yang perlu dibaca. Andaikata ada cukup banyak penulis, mereka tidak cukup bergairah karena honorinya kecil, pembajakan merajalela, yang tampaknya sulit diatasi walaupun sudah ada undang-undang hak cipta. Andaikata cukup ada banyak pengarang, ternyata tidak cukup banyak penerbit di Indonesia yang dapat menangani sekian banyak tulisan dari sekian banyak pengarang dan penulis.

Seperti sudah di singgung di atas, Pusat Perbukuan Depdikbud sudah coba merangsang penulisan buku pelajaran di setiap propinsi. Akan tetapi, dalam penataran-penataran ini selalu muncul pertanyaan, andaikata kami sudah menghasilkan naskah buku yang baik siapa yang akan menerbitkannya?

Penerbit-penerbit yang perkasa dewasa ini hanya terdapat di ibu kota republik ini, tetapi di ibu kota ini juga berserakan penerbit-penerbit kelas teri. Ibu kota-ibu kota provinsi di Jawa boleh mengusap dada karena masih memiliki penerbit yang tergolong baik. Namun, bagaimana dengan daerah luar Jawa? Sulit menemukan penerbit yang dapat diandalkan. Bagaimana menyalurkan kegairahan menulis beberapa gelintir manusia di daerah, yang belum punya nama sebagai pengarang, yang belum punya nama sebagai ahli yang memiliki reputasi nasional? Pusat Perbukuan Depdikbud mungkin dapat mengatasi hal ini. Namun, terbatas hanya pada buku pelajaran dan buku penunjang pelajaran, dan itu pun tidak semua dapat ditampung. Oleh karena itu, hanya dapat dilaksanakan melalui sayembara tahunan.

b. Imbalan Penulis

Mereka yang baru ingin muncul dalam dunia penerbitan atau perbukuan tidak banyak mempersoalkan honorarium tulisannya. Mereka sudah sangat bergembira bila karyanya dapat diterbitkan. Berarti mereka sudah mendapat pengakuan, mendapat nama. Akan tetapi, untuk penerbitan karya berikutnya, dia akan mulai berpikir karena menciptakan suatu karya, suatu buku, memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan tenaga, dan sebagainya. Mereka mulai mempersoalkan besarnya honorarium yang akan diterimanya.

Honorarium yang akan diterima begitu kecilnya dewasa ini, belum lagi beban pajak yang harus dipikul para penulis. Bandingkan berapa besar jumlah yang diberikan pada toko buku atau distributor.

c. Peranan Pemerintah

Peranan Pemerintah dalam menggairahkan masyarakat untuk rajin membaca harus mencakup semua. Bukan hanya pembacanya, melainkan juga harus dimulai dari pengarangnya. Bila pengarang tidak mendapat kegairahan untuk menulis atau mengarang, tidak akan ada naskah buku yang akan diproses untuk diterbitkan, dan tidak akan ada buku yang dijual oleh toko buku, dan tak ada orang yang akan membeli dan membaca buku.

Peranan Pemerintah bersama aparatnya dalam hal ini, antara lain, adalah melindungi hak cipta pengarang. Aparat pemerintah harusnya sigap memberantas pembajakan buku-buku oleh penerbit atau percetakan yang tak bertanggung jawab. Pembajakan yang merajalela akan menurunkan kegairahan para pengarang untuk menciptakan karya-karya baru. Dengan pembajakan, negara juga turut dirugikan karena kas negara tidak menerima pajak dari peredaran buku-buku yang dibajak: pajak pengarang, pajak perusahaan, pajak penjualan dari toko buku, dan entah pajak apa lagi yang ada kaitannya dengan buku. Hal ini menjadi lebih tragis lagi karena buku yang dibajak adalah buku-buku yang termasuk *best-seller*. Berarti kerugian negara dari segi perpajakan tidak sedikit jumlahnya. Namun, setelah berlakunya undang-undang hak cipta dengan segala sanksinya, masalah pembajakan buku tampaknya tidak ditangani dengan serius.

6. Simpulan

Secara singkat karang-mengarang merupakan sebuah sarana yang efektif untuk menyajikan gagasan penulis untuk para pembacanya. Penyajian bagaimanapun juga diungkapkan dalam bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar mencakup semua unsur atau tataran bahasa, dari fonologi hingga struktur sintaksisnya. Namun, semua tataran ini harus muncul dalam sebuah unit yang disebut wacana yang berbentuk karangan.

Keberhasilan sebuah karangan mencerminkan kemampuan berbahasa, kemampuan penalaran, dan kemampuan melihat objek secara lebih cermat. Akan tetapi, karang-mengarang perlu diajarkan, perlu dilatih. Memberikan peran yang penting karang-mengarang dalam proses pembelajaran dari sekolah dasar hingga sekolah menengah umum, merupakan kebijaksanaan yang tepat. Namun, karang-mengarang tidak selesai di bangku sekolah. Anak-anak yang menamatkan pelajarannya diharapkan mengembangkan kemampuannya itu di kemudian hari agar mereka dapat menciptakan karya baru untuk merangsang kembali anak-anak didik. Untuk mengarang juga perlu ada faktor perangsang agar kegairahan mengarang tidak akan padam begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Keraf, Gorys. 1993. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.
- , *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum 1994: Sekolah Dasar (SD), Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP): Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum 1994: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP): Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum 1994: Sekolah Menengah Umum (SMU), Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP): Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum 1994: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP, Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP): Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Mackey, W.F. 1965. *Language Teaching Analysis*. Longman.
- Widdowson, H.G. 1981. *Teaching Language as Communication*. Oxford: Oxford University Press.

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Pengajaran Mengarang sebagai Sarana Pengembangan Kemampuan Berbahasa Indonesia
Pemakalah : Gorys Keraf
Pemandu : Sakura H. Ridwan
Pencatat : S. Amran Tasai
Poppy Dewi

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Imam Syafe'ei, IKIP Malang
 - a. Kalau kita tekankan pernyataan seperti apa yang Bapak Gorys katakan tadi kepada guru, justru akan membuat guru takut pada pelajaran mengarang, persoalannya hanya masalah metodologi dan teknik. Kita sepakat bahwa mengajarkan mengarang bagi guru tidak harus dia mengoreksi karangan dalam jumlah yang ratusan lembar. Beberapa cara dapat dilakukan dalam mengoreksi. Bisa dengan cara mengelompokkan kelas.
 - b. Mengarang di sini dalam pengertian yang bagaimana? Menurut pikiran saya, dalam pengertian yang luas (*creative writing*), mulai dari menulis. Menulis mengisi formulir, menulis surat, menulis laporan ilmiah, dan sebagainya.

Jawaban:

Mengarang seperti yang dirumuskan dalam kurikulum artinya mengarang merupakan prasyarat yang harus dikuasai oleh anak. Akan tetapi, kalau kita melihat dalam kurikulum, misalnya, anak itu mengarang soal dongeng. Dia mencatat apa yang diberikan oleh orang tua dalam bercerita itu. Dengan demikian, walaupun tidak terlalu panjang, siswa telah membuat jalinan bermacam ide sehingga bisa dimasukkan dalam bentuk tertulis dilisankan. Pada masalah lain siswa disuruh melihat hal-hal yang ada di tempat cerita, melihat hal-hal yang nyata. Setelah itu, mereka memberikan laporan dan memberikan pendapat mereka mengenai hal itu dalam bentuk tulisan. Jadi, siswa dibawa kepada situasi yang terpadu dan mereka melaporkan dalam kalimat-kalimat terpadu. Di sini peran guru tetap sebagai pemberi umpan balik. Bagaimana siswa tahu bahwa karangannya itu baik atau kurang baik. Di mana salahnya, kosakata, tanda baca. Guru bukan sekadar memberi nilai, melainkan memeriksa karangan. Satu hari satu karangan yang dapat diperiksa, itu sudah bagus sekali. Jika seorang guru sudah berani memberikan pelajaran mengarang, guru tersebut harus mampu memeriksa.

2. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Memberikan evaluasi terhadap dua ratus pekerjaan siswa dengan waktu yang singkat rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, penilaian hanya dapat dilakukan

secara *skor* sekian sampai sekian. Menurut Pak Gorys, bagaimana teknik penilaian oleh guru sebagai orang yang bekerja di lapangan. Apalagi porsi mengarang sekarang lebih dibesarkan.

Jawaban:

Mengarang bukan seperti ilmu sejarah, ilmu bumi, dan sebagainya. Mengarang itu menyangkut sejumlah disiplin sebenarnya. Bahasa harus dapat memberi petunjuk. Di samping itu, ada pula pedoman, jalan pikiran yang benar. Penalaran ini juga dipertanyakan apakah hanya tugas guru bahasa yang memperkenalkannya, sedangkan masalah lingkungan hidup, masalah fisik, atau apa saja. Oleh sebab itu, guru bahasa Indonesia juga harus tahu sedikit mengenai hal itu agar pekerjaan siswa dapat diperiksanya betul-betul dari segi penalaran. Walaupun pendekatan komunikatif dimulai dengan yang besar lalu turun pada yang kecil-kecil, kenyataan siswa harus tahu yang kecil-kecil dulu. Dia mesti tahu struktur kalimat dulu, ejaan dulu, diksi dulu, dan sebagainya. Baru kemudian dia dapat membuat komposisi yang berarti. Pendekatan sekarang adalah pendekatan komunikatif. Dalam hal ini anak harus tahu dulu topik apa yang mau ditulis. Apa yang hendak ditulis tentang topik ini. Kalau dia sudah bisa menjawab, sebetulnya dia sudah mulai mengungkapkan sebuah tema karangan itu. Dari tema itu anak tentu sudah dapat merumuskan tema itu dan rincian-rinciannya dalam karangannya nanti. Kira-kira pelajaran mengarang itu dimulai dari kelas IV SD sampai dengan kelas III SMA (9 tahun). Tentu setiap tingkat tidak sama cara mengarangnya.

3. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)

Mohon bekal dalam hal membuat buku teks di daerah kami. Aspek apa yang akan dimasukkan dalam bahan buku teks itu? Apakah aspek apresiatif masih perlu diperhatikan?

Jawaban:

Mengarang memang ada bermacam-macam. Mengarang buku pelajaran tidak sama dengan mengarang yang menyangkut buku pelajaran. Dalam menyusun buku pelajaran, saya tidak dapat membuat sesuka hati kecuali harus mengikuti pedoman GBPP. Dalam kurikulum 84 diperinci semua yang akan diajarkan sampai sekecil-kecilnya. Umpamanya pelajaran IPA, dikatakan, misalnya, *pahlawan* sehingga terlihat tidak ada kesinambungan antara materi yang ada di GBPP itu. Oleh karena itu, kendali yang kita dapatkan pada Kurikulum 84 itu dilepaskan sama sekali. Kurikulum sekarang itu hanya menyangkut pembelajaran, yaitu tujuan belajar-mengajar. Hal ini membuat para penulis buku lebih bebas menulis. Hal-hal yang lain seperti mengenal struktur itu disinggung hanya yang umum-umum saja. Perlu juga diketahui, hanya yang penting-penting saja. Semua yang dipelajari itu diambil dari bacaan. Pola yang tepat diambilnya dari bacaan itu. Dengan membaca

suatu wacana, kita coba mengambil beberapa unsur untuk dikembangkan oleh siswa dalam karangan.

Dalam menyusun teks daerah terlebih dahulu kita mengumpulkan cerita-cerita rakyat, suatu wacana dengan hal-hal yang nyata dituangkan ke dalam bahasa ibunya. Dari bahasa itu lahirlah beberapa hal seperti struktur kata benda dari bahasa itu, struktur kata kerja dalam bahasa itu untuk orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, bisa kita susun rencana dari yang mudah ke yang sulit.

4. **Pertanyaan:** Sarwidji, FKIP Universitas Sebelas Maret

Sebetulnya ada dua pertanyaan, tetapi pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Pak Gorys. Pertanyaan kedua adalah sebagai berikut. Kekurangberhasilan pengarang mengarang disebabkan oleh belum terintegrasikan aspek keterampilan berbahasa yang satu dengan keterampilan berbahasa yang lain. Pengajaran pokok bahasan itu masing-masing berjalan sendiri-sendiri, kurang adanya kaitan antara yang satu dan yang lain. Ini terdapat pada Kurikulum 84. Sebelumnya pokok-pokok bahasan itu diintegrasikan.

Jawaban:

Dalam mempelajari kosakata di suatu kalimat, misalnya, tarik hubungan dengan apa yang ada dalam bacaan. Sekarang itu tidak berlaku. Sekarang harus berhubungan. Sekarang kendalanya dilonggarkan, tarik pokok-pokok bahasan. Paling-paling ada tema-tema seperti ekonomi, pemerintahan, pariwisata. Di bawah itu ada mengarang, membaca, berdiskusi, dan sebagainya. Jadi, bacaannya dicari sendiri asal menyangkut tema.

5. **Pertanyaan:** Ny. S. Suryono (Bu Kasur), Yayasan Setia Balita Jakarta

Kalau Pusat Bahasa dapat mengajak para seniman yang mengarang lagu, terutama lagu anak, dan sinetron di TVRI atau layar lebar untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam dialog-dialognya, tentu lagu dan sinetron yang menggunakan bahasa Indonesia baku berubah menjadi tuntunan, bukan hanya tontonan.

Jawaban:

Memang lirik dalam lagu-lagu, sandiwara, ada satu makna pelajaran bahasa. Dengan menghafal teks-teks, dia sudah mulai terangsang menerima kalimat-kalimat yang seperti itu, terutama untuk anak-anak. Anak-anak itu dibimbing untuk mengembangkan bahasa seperti itu.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI PERGURUAN TINGGI: MENOLEH KE BELAKANG, MELIHAT KE DEPAN

Liberty P. Sihombing
Universitas Indonesia

Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi telah dijadikan topik sejumlah karangan, misalnya Affandi (1971) dan Sihombing (1991), dan juga pokok seminar dan simposium, seperti "Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi", yang diselenggarakan di Tugu, Bogor, pada tahun 1974, dan simposium dengan nama yang sama, yang diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan Konferensi Nasional Masyarakat Linguistik Indonesia di Semarang pada tahun 1991. Selain daftar itu, tentu masih banyak lagi yang dapat ditambahkan, baik yang berupa karangan yang telah terbit maupun makalah yang disajikan di depan seminar yang bersifat lokal atau nasional. Beberapa di antara karangan atau makalah itu mengemukakan sejumlah masalah menyangkut penyelenggaraan program itu sendiri atau hasilnya—khususnya tentang kemampuan mahasiswa berbahasa Indonesia tulis sebagaimana tercermin pada karya tulis mereka, seperti skripsi dan tesis. Tidak jarang pula, ada di antaranya yang mengemukakan masalah yang sama, misalnya betapa masih kurang memadainya penguasaan bahasa Indonesia mahasiswa.

Hampir tiga dasawarsa yang lalu, Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Oktober 1966, menyimpulkan, antara lain, bahwa pengajaran bahasa Indonesia di sekolah menengah belum memuaskan dan penguasaan bahasa para lulusannya tidak memenuhi kebutuhan mereka. Sebelum itu pun, pada tahun 1957, Prof. Leeman di ITB Bandung telah mengemukakan kecamannya atas penguasaan bahasa Indonesia mahasiswa-mahasiswanya (Affandi, 1971: 207). Atas dasar kesadaran itu, dan juga kesadaran tentang kurangnya bekal lulusan sekolah lanjutan memasuki perguruan tinggi umumnya, pada tahun 1969 Ditjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan instruksi tentang pengadaan kelas matrikulasi, yang juga mencakup pelajaran bahasa Indonesia, bagi mahasiswa tahun pertama perguruan tinggi. Sebagian kalangan perguruan tinggi beranggapan bahwa beban itu tidak selayaknya dipikulkan kepada mereka, tetapi dikembalikan ke sekolah menengah. Ada juga yang berpikiran bahwa kalau program itu memang harus dilaksanakan, hendaknya lama pendidikan sarjana muda, yang ketika itu berlangsung

tiga tahun, dijadikan empat tahun. Akhirnya, setahu penulis, hanya ITB yang melaksanakan program itu.

Sebelum keluarnya instruksi Ditjen Pendidikan Tinggi itu, di perguruan tinggi tertentu, beberapa fakultas, atau jurusan, atas prakarsa pimpinannya memang menyelenggarakan mata kuliah bahasa Indonesia, misalnya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia¹ dan Departemen Teknologi Kimia, ITB (Purbo-Hadiwidjono, 1981:27). Barangkali terasa aneh bahwa Fakultas Sastra Universitas Indonesia—termasuk Jurusan Sastra Indonesia—sendiri pun tidak menyelenggarakannya.

Perubahan sistem pendidikan di perguruan tinggi, yakni peralihan ke sistem kredit dan perubahan program sarjana (lengkap) menjadi program S-1, yang terjadi pada tahun 1970-an, telah membuka jalan bagi mata kuliah bahasa Indonesia masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Perubahan kurikulum perguruan tinggi yang terjadi pada tahun 1980-an makin memantapkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah dasar di perguruan tinggi meskipun ada fakultas yang tidak memasukkannya ke dalam kurikulumnya² dengan alasan bahwa beban SKS-nya sudah terlalu padat.

Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi, baik sebagai bagian dari program matrikulasi maupun sebagai mata kuliah dasar dalam kurikulum yang baru, sebenarnya dapat dianggap sebagai usaha remedial yang pada hakekatnya diharapkan hanya bersifat sementara. Artinya, kegiatan ini merupakan langkah "tambal-sulam" yang terpaksa ditempuh untuk menutupi kekurangan bekal mahasiswa dari sekolah lanjutan, yang diharapkan dapat dihapuskan apabila pengajaran bahasa Indonesia di sekolah lanjutan telah menjadi baik. Namun, rupanya, harapan akan membaiknya hasil pengajaran bahasa Indonesia di sekolah lanjutan itu masih tetap jadi harapan.

Sudah beberapa kali kurikulum sekolah dasar dan sekolah lanjutan diubah, tetapi hasilnya belum memuaskan juga. Penulis ini belum berhasil menemukan evaluasi menyeluruh dan bersinambung atas pelaksanaan kurikulum-kurikulum yang pernah diberlakukan. Namun, penelitian Burhan (1983) atas kemampuan berbahasa Indonesia—membaca dan menulis—murid-murid kelas VI Sekolah Dasar (di DKI Jakarta), dan kajian Samsuri (1991) atas pelaksanaan kurikulum 1975 di beberapa SMP (di Malang, Jawa Timur) selayaknya mendapat perhatian. Dari penelitian Burhan, yang memakai 1.179 orang murid kelas VI SD sebagai percontohan, ternyata bahwa kemampuan membaca dan menulis mereka sangat rendah³ (lihat Tabel 1 di bawah). Dari kajiannya, Samsuri menemukan, antara lain, tidak sinkronisnya bagian-bagian suatu unit pelajaran, misalnya kosakata dan pragmatik dengan teks bacaan sebelumnya.

TABEL 1
PERSENTASE KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA
MURID-MURID KELAS VI SD DI DKI JAKARTA

Kategori	Kisaran Nilai	Kemampuan	
		Membaca	Menulis
sangat memuaskan	90--100		
memuaskan	70--89	10,51	9,33
cukup	55--69	50,21	47,49
kurang memuaskan	40--54	26,04	37,4
tidak memuaskan	10--39	12,8	5,25
sangat tidak memuaskan	0--9	0,4	0,51

Sumber: Burhan (1983: 188--89)

Kajian yang saksama atas hasil belajar bahasa Indonesia atau atas kemampuan berbahasa Indonesia para mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi agaknya belum banyak dilakukan. Di antara yang sedikit yang pernah dilaporkan, penelitian Sadtono (1976) patut mendapat perhatian. Dari penelitiannya atas sejumlah skripsi dan tesis, ia menemukan bahwa kesalahan yang paling banyak dibuat ialah kesalahan kalimat, yakni 39,47% dari seluruh korpus. Berikutnya ialah kesalahan penyusunan paragraf, yakni 15,37%. Penulis ini belum berhasil memperoleh hasil penelitian mutakhir tentang hal yang sama, hasil pengamatan "sepintas" yang pernah dilaporkan memperlihatkan kekurangan kemampuan mahasiswa berbahasa Indonesia, khususnya dalam menyusun kalimat (lihat, misalnya, Kartasasmita, 1993).

Di dalam laporannya itu Sadtono menyertakan sejumlah contoh kalimat yang salah yang dibuat oleh penulis skripsi atau tesis, misalnya yang tidak lengkap atau yang tidak jelas logikanya. Kesalahan seperti itu agaknya umum dijumpai. Jika dipajankan dengan sebuah kalimat, tidak jarang mahasiswa tidak dapat menunjukkan fungsi-fungsinya. Ini hal yang kelihatannya sepele, tetapi sangat mendasar. Tidaklah mengherankan jika seorang mahasiswa tidak dapat membuat kalimat kalau dia tidak mengenal fungsi-fungsi kalimat. Dari pengalaman mengajarkan bahasa Inggris kepada mahasiswa Jurusan Sastra Indonesia di Universitas Indonesia, penulis menemukan bahwa tamatan SMA belum secara mantap menguasai konsep-konsep tata bahasa, seperti subjek dan predikat. Ini membuat mereka mengalami kesukaran memahami kalimat, bahkan yang sederhana sekalipun. Akan tetapi, setelah dijejali dengan banyak latihan menemukan gagasan utama kalimat bahasa Inggris, sambil dibekali dengan pengetahuan tentang kaidah persesuaian kata kerja (*verb agreement*), mahasiswa dapat menyusun kalimat bahasa Indonesia (!) dengan lebih baik, sebagaimana terlihat pada hasil terjemahannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Muncul pertanyaan, mengapa kesalahan mendasar seperti itu masih dibuat oleh mahasiswa, yang sudah memperoleh konsep-konsep tata bahasa di sekolah lanjutan, malahan di SD? Ada beberapa jawaban yang dapat disebutkan di sini. Pertama, ada kemungkinan bahwa uraian tentang tata bahasa, khususnya kalimat, terlepas dari konteks pemakaiannya sehingga terasa tidak wajar, atau malahan mengada-ada. Latihan membaca, misalnya, sebuah cerita, atau menulis sebuah cerita—boleh pendek saja, misalnya yang terdiri dari beberapa kalimat—dan kalimat itu layak dipakai, mungkin sangat kurang, sehingga siswa tidak disadarkan bahwa kalimat itu hanyalah salah satu satuan yang bersama-sama dengan satuan lain membentuk satuan yang lebih besar secara utuh dan padu. Kedua, ada kemungkinan bahwa siswa kurang dibekali dengan kesadaran bahwa ada perbedaan di antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dua ciri bahasa tulisan yang terpenting ialah (1) tidak bersemuka dan (2) searah. Tidak bersemuka diartikan bahwa bahasa yang digunakan harus dengan jelas mengungkapkan hal yang hendak disampaikan, tidak boleh mengandung ketaksaan, misalnya. Searah diartikan bahwa bahasa yang digunakan harus memuat informasi selengkapnyanya. Di samping itu, khususnya dalam bahasa Indonesia tulis, terutama untuk keperluan ilmiah, tata bahasanya harus baku.

Kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan yang diperoleh dengan berlatih. Latihan ini rupanya yang sangat kurang di sekolah menengah dan rendah. Dr. Sapardi Djoko Damono pernah menceritakan sebuah pengalaman yang menarik. Dalam salah satu kuliahnya, ia meminta mahasiswa mengamati sebatang pohon kelapa lewat jendela ruang kuliah lalu menceritakannya. Ia terperanjat mendengar salah seorang mahasiswa yang memulai ceritanya dengan kalimat "Kelapa berguna untuk ..."⁴ Penulis ini sendiri pernah terkejut ketika ia menemukan di salah satu buku pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas IV SD disebutkan jenis-jenis karangan, yakni narasi, deskripsi, eksposisi, dan narasi. Ia terkejut karena itu juga yang diajarkannya kepada mahasiswanya. Barangkali, salah satu keengganan siswa belajar bahasa Indonesia ialah pengulangan pokok bahasan yang sama di semua jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

Di antara fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bahasa Indonesia, fungsinya sebagai alat integrasi sosial, khususnya sebagai alat pemersatu bangsa, agaknya tidak perlu dipersoalkan. Setiap kali kita merayakan Hari Sumpah Pemuda, kita selalu bersyukur sebagai satu bangsa. Kita mensyukuri kenyataan bahwa, misalnya, kita tidak pernah mengalami pertumpahan darah karena mempermasalahkan bahasa nasional. Akan tetapi, rupanya, kita belum dapat bersyukur atas penggunaan bahasa nasional kita itu sebagai alat komunikasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengelu-elukan masyarakat industri, seperti yang dikatakan oleh Samsuri (1991: 621), hendaknya kita menyadari bahwa suatu masyarakat industri tidak akan berjalan dengan baik apabila penduduknya belum dapat memanfaatkan informasi dalam bahan cetakan, seperti koran, pamflet, buku petunjuk, majalah profesi, majalah ilmiah, laporan hasil penelitian, monograf, dan buku. Untuk itu, diperlukan kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan itu ditanamkan pada anak sejak ia

masuk sekolah. Apabila pengajaran bahasa Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga sekolah lanjutan terselenggara dengan baik, tentulah murid-murid akan dapat menyerap dan menyampaikan informasi dengan baik. Dengan kemampuan itu, mereka akan memperoleh manfaat yang besar, baik dalam melanjutkan pelajarannya di perguruan tinggi--jika mereka melanjutkan pelajarannya ke sana--maupun dalam pekerjaannya sehari-hari--kalau mereka langsung bekerja. Apabila kemampuan membaca dan menulis itu tidak dimiliki oleh murid--apalagi sarjana--tentulah kita tidak dapat berharap dapat mengayunkan langkah dengan tegap menuju masyarakat industri yang diinginkan.

Berdasarkan kenyataan bahwa keterampilan berbahasa para lulusan sekolah lanjutan masih kurang, dan bahwa pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi belum memuaskan, kuliah bahasa Indonesia itu perlu ditata kembali. Untuk itu, langkah-langkah berikut perlu diupayakan. Pertama, dilakukan pengkajian atas kemampuan berbahasa calon mahasiswa. Model penelitian Sadtono, dengan modifikasi, dapat dimanfaatkan untuk keperluan ini. Kedua, berdasarkan hasil kajian itu, disusunlah silabus mata kuliah bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Dengan silabus seperti itu diharapkan bahwa kepincangan di antara asumsi tentang kemampuan yang telah dimiliki oleh mahasiswa dan kenyataan yang sesungguhnya tidak terdapat atau, sekurang-kurangnya, tidak besar lagi. Kepincangan seperti itu jelas sangat menghambat proses belajar-mengajar. Sebagai contoh, agaknya diasumsikan bahwa calon mahasiswa telah menguasai tata kalimat sehingga di dalam buku-buku teks komposisi, misalnya karangan Keraf (1980), sedikit sekali uraian tentang kalimat. Ketika pengajar menghadapi kenyataan yang sesungguhnya, ia sering harus memakai banyak jam pelajar untuk membicarakan kalimat. Untuk mengatasi hal itu, satu pilihan lain ialah membuat satu kelas khusus untuk tata bahasa. Akan tetapi, apakah ini dimungkinkan di dalam kurikulum? Ketiga, para pengajar mata kuliah bahasa Indonesia hendaknya meningkatkan kemampuannya. Siapa yang selayaknya mengajarkan mata kuliah itu masih perlu dipersoalkan. Selama ini, di Universitas Indonesia, pengajar-pengajar dari Jurusan Sastra Indonesia lah yang mengajarkannya di seluruh fakultas yang menyelenggarakannya. Namun Kartasmita (1993:8) mengusulkan agar pengajarnya--di ITB--yang "berpendidikan sarjana matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu teknik dan seni yang berbakat bahasa dengan minat yang tinggi yang kemudian dilatih pengajaran bahasa, linguistik, dan keterampilan komunikasi." Prof. Anton Moeliono pun berpendapat bahwa sebaiknya pengajar komposisi ialah dosen dari jurusan yang bersangkutan,⁵ tetapi, hingga sekarang, hal itu belum terjadi.

CATATAN:

1. Prof. Harimurti Kridalaksana (komunikasi pribadi).
2. Sebagai contoh, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Indonesia.
3. Penilaian ini, berdasarkan temuan Burhan, ialah dari penulis karangan ini.
4. Dr. Sapardi Djoko Damono (komunikasi pribadi).
5. Prof. Dr. Anton M. Moeliono (komunikasi pribadi).

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A.M. 1971. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi". Dalam Harimurti Kridalaksana dan Djoko Kentjono (Ed.) *Seminar Bahasa Indonesia* 1968. Ende, Flores: Nusa Indah, 206-7.
- Burhan, Yasir. 1983. "Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia". Dalam Amran Halim dan Yayah B. Lumintaintang (Ed.) *Kongres Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 175-194.
- Kartasmita, Bana G. 1993. "Tinjauan Sekilas dan Harapan atas Kuliah Bahasa Indonesia di Institut Teknologi Bandung". Makalah disajikan dalam Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi, Bandung, 2 Oktober 1993.
- Keraf, Gorys. 1980. *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Ende, Flores: Nusa Indah.
- Moeliono, Anton M. 1993. "Bahasa yang Efisien dan Efektif dalam Ragam Iptek". Makalah Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi, Bandung, 2 Oktober 1993.
- Purwo-Hadiwidjoyo, M.M. 1981. "Membenahi Secara Menyeluruh Pengajaran Bahasa Indonesia". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra* VII, 2 (1981): 27-36.
- Sadtono, E. 1976. "Bahasa Indonesia Tertulis Golongan Terdidik (Sarjana) di Indonesia". Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra* I, 5 (1976): 12-27.
- Samsuri. 1991. "Berbagai Masalah Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Kita". Dalam S.R.H. Sitanggang, Siti Zahra Yundiafi, dan S. Amran Tasai (Ed.), *Kongres Bahasa Indonesia IV: Menunjang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 621-632.
- Sihombing, Liberty P. 1991. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi". Makalah Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya, Medan 29-30 Oktober 1991.

No.	Tujuan Instruksional Umum	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasa	Subpokok Bahasan	Minggu Ke-	Est. Waktu	Sumber Kepustakaan
	1	2	3	4	5	6	7
I.	MAHASISWA MAMPU MENYUSUN KARYA ILMIAH	Mahasiswa mampu menyusun tema karangan	1. Tema karangan	a) Topik karangan	1		Kerol. Komposisi Komaruddin. <i>Metode Penulisan Skripsi dan Tesis</i> Surakhmad. <i>Metodologi Riset</i>
				b) Tujuan penulisan	2		Kerol. Komposisi Komaruddin. <i>Metode Penulisan Skripsi dan Tesis</i> Surakhmad. <i>Metodologi Riset</i>
				c) Tesis karangan	3		Kerol. Komposisi Komaruddin. <i>Metode Penulisan Skripsi dan Tesis</i> Surakhmad. <i>Metodologi Riset</i>
	II. Mahasiswa mampu menyusun ragangan atau kerangka karangan dengan sistematis	Mahasiswa mampu menyusun ragangan atau kerangka karangan dengan sistematis	3. Struktur paragraf	a) Ragangan atau kerangka karangan	4		Kerol. Komposisi Komaruddin. <i>Metode Penulisan Skripsi dan Tesis</i> Surakhmad. <i>Metodologi Riset</i>
				b) Pola susunan pokok pembicaraan	5		Kerol. Komposisi Komaruddin. <i>Metode Penulisan Skripsi dan Tesis</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" Surakhmad. <i>Metodologi Riset</i>
				c) Perpautan antarparagraf	6		Kerol. Komposisi Komaruddin. <i>Metode Penulisan Skripsi dan Tesis</i> Moeliono. "Karang-Mengarang"

No.	Tujuan Instruksional Umum	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasa	Subpokok Bahasan	Minggu Ke-	Est. Waktu	Sumber Kepustakaan
	1	2	3	4	5	6	7
III.	Mahasiswa mampu menyusun paragraf	1) Mahasiswa (a) mengenal paragraf dan kalimat pokoknya (b) mampu menyusun kalimat pokok dan mengembangkannya menjadi paragraf 2) Mahasiswa (a) mengenal ilustrasi dan analisis (b) mampu membuat dan menyusun ilustrasi dan analisis 3) Mahasiswa (a) mengenal keutuhan dan perpautan paragraf (b) mampu menyusun kalimat yang utuh dan berpaut dalam paragraf	3. Struktur paragraf	a) Kalimat pokok dan pengembangan paragraf b) Ilustrasi dan analisis c) Keutuhan dan perpautan	7 8 9		Keraf. <i>Komposisi</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" Keraf. <i>Komposisi</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" Keraf. <i>Komposisi</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" Kentjono. "Pola-pola Kalimat Bahasa Indonesia" Keraf. <i>Komposisi</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" +)
IV	Mahasiswa mampu menyusun gagasan di dalam kalimat yang efektif	1) Mahasiswa (a) mengenal gagasan gagasan dalam kalimat (b) mampu mengembangkan gagasan menjadi kalimat yang efektif 2) Mahasiswa (a) mengenal pelbagai jenis kalimat (b) mampu menggunakan pelbagai jenis kalimat	4. Penyusunan kalimat	a) Gagasan utama dan gagasan bawahan b) Irama dan perselingan	10 11		Kentjono. "Pola-pola Kalimat Bahasa Indonesia" Keraf. <i>Komposisi</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" +) Kentjono. "Pola-pola Kalimat Bahasa Indonesia" Keraf. <i>Komposisi</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" +) +) Ditambah dengan buku-buku tata bahasa Indonesia

No.	Tujuan Instruksional Umum	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasa	Subpokok Bahasan	Minggu Ke-	Est. Waktu	Sumber Kepustakaan
	1	2	3	4	5	6	7
V	Mahasiswa mampu menyusun penelitian	1) Mahasiswa (a) mengenal bahan sumber (b) mampu menggunakan bahan sumber 2) Mahasiswa (a) mengenal catatan dan kutipan (b) terampil membuat catatan (c) mampu mengutip dan menempatkan kutipan di dalam karangan 3) Mahasiswa (a) mengenal pustaka (b) terampil menyusun pustaka kerja	5. Laporan penelitian	a) Bahan sumber b) Pembuatan catatan dan kutipan c) Pustaka kerja	12 13 14		Keral. <i>Komposisi Koenijaraningrat. "Penulisan Laporan Penelitian"</i> Komaruddin. <i>Metode Penulisan Skripsi dan Tesu</i> Moeliono. "Karang-Mengarang" Surakhmad. <i>Metode Riset</i>
VI	Mahasiswa mampu menggunakan ejaan dan pengtuan	Mahasiswa (a) mengenal aturan ejaan dan pengtuan bahasa Indonesia (b) mampu menggunakan cara penulisan yang benar dan tepat dan tanda-tanda baca yang tepat	6. Ejaan pengtuan		15		sda. sda. <i>Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan</i> <i>Pedoman Pembentukan Istilah</i>

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi: Menoleh ke
Balakang, Melihat ke Depan
Pemakalah : Liberty P. Sihombing,
Pemandu : Midar Arsyad
Pencatat : Saksono Priyanto
Haslina Erlina

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** H. Jusuf Sjarif Badudu, Universitas Padjadjaran
- Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi harus mencakupi beberapa unsur, yaitu (a) dosen/pengajar; (b) materi, dan (c) metode penyajian.
 - Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi harus disajikan secara khusus, berbeda dengan di sekolah agar mahasiswa tidak bosan. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini ialah (a) bahan dan (b) metode penyajiannya. Di samping itu, perlu ditekankan pelatihan, dan jangan lupa berikan motivasi!

Jawaban:

Setuju, tetapi perlu diketahui bahwa pada umumnya mahasiswa yang masuk jurusan bahasa Indonesia bukan bibit unggul.

2. **Pertanyaan:** Kusnadi Hardjasumantri, Kompleks Depdikbud Pejaten, Jakarta
- Pada umumnya, kemampuan bahasa Indonesia mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 Fakultas Hukum di Universitas Indonesia memprihatinkan!
Padahal, bahasa hukum harus cermat.
 - Di Fakultas Hukum UI, terutama Program S-2, setiap mahasiswa wajib menulis makalah yang akan ditanggapi oleh 3 orang rekannya, yang ditanggapi ialah (1) substansi dan (2) bahasa Indonesia yang mereka gunakan.
 - Pada umumnya, mereka tidak mengetahui fungsi kalimat (SPOK).

Jawaban:

- Pengalaman saya demikian juga. Bahkan, di fakultas sastra kemampuan mahasiswa berbahasa Indonesia lebih jelek daripada di jurusan/fakultas lain.
- Bagi saya, pelatihan menguraikan kalimat tetap penting.
- Jarang dosen yang memeriksa pekerjaan mahasiswa, terutama dari segi bahasa.

3. **Pertanyaan:** Suryati B. Azharie, FKIP Universitas Tanjungpura
- Penguasaan bahasa Indonesia yang kurang baik mungkin dipengaruhi oleh lingkungan.
 - Pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi kurang sesuai karena diberikan di tingkat I, padahal penulisan skripsi di tingkat terakhir.
 - Jika ada pengulangan penyajian bahan seperti di SMA, hal ini wajar karena merupakan konsekuensi dari kemampuan dasar yang mereka kuasai.
 - Hendaknya ada keseragaman dalam penyusunan mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi.

Jawaban:

Saya justru lebih menghargai kreativitas dosen. Penyeragaman saya anggap kurang baik.

4. **Pertanyaan:** Jos Daniel Parera, FPBS IKIP Jakarta
- Kita jangan saling menyalahkan karena setiap jenjang punya tanggung jawab, justru tugas dosen adalah membuat mahasiswa yang bodoh menjadi pandai.
 - Menurut saya, metode mengajar dosen pada umumnya jelek (70% jelek).
 - Di IKIP Jakarta ada suatu mata kuliah *Basarkomil* yang bertujuan meningkatkan motivasi mereka dalam berbahasa Indonesia.

Jawaban:

Kita harus mengakui bahwa dalam pengajaran bahasa Indonesia banyak faktor yang menghambat, seperti (a) kualitas mahasiswa dan (b) kualitas dosen.

5. **Pertanyaan:** Agus Suriamiharja, FPBS IKIP Bandung
- Apa penyebab mahasiswa belum dapat menyusun kalimat?
 - Pengajaran bahasa apa pun akan berhasil jika bahasa itu sudah berwibawa. Sudah berwibawakah bahasa Indonesia?

Jawaban:

- Saya tidak berwenang menjawab pertanyaan (b).
- Menurut saya, mahasiswa kurang pelatihan dan tidak biasa mengamati kalimat secara cermat!

6. **Pertanyaan:** La Muhiddin, Universitas Hasanuddin
- Apa arti *menoleh ke belakang* dan *melihat ke depan* pada judul?

Jawaban:

Menoleh ke belakang berarti mencari sebab yang menghambat pengajaran bahasa Indonesia dan berupaya memperbaiki. Jadi, jelasnya melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dan mengapa diberikan di perguruan tinggi. *Melihat ke depan* berarti menyongsong masyarakat industri (istilah Prof. Samsuri).

7. Pertanyaan: Mansur Pateda, IKIP Manado

- a. Tujuan pengajaran Bahasa Indonesia mencakupi tiga aspek, yaitu (a) politis; (b) linguistik, dan (c) praktis.
Aspek politis: fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia,
Aspek linguistik: bahasa Indonesia ragam tulis,
Aspek praktis: bahasa Indonesia ragam lisan.
- b. Metode yang baik dilakukan dalam pengajaran bahasa Indonesia ialah (a) metode ceramah dan (b) metode pelatihan.

Jawaban:

Saya kurang sependapat dengan Bapak, mengenai aspek tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Mengenai metode, saya kira memang dua metode itulah yang selama ini digunakan.

Saran:

Perlu dibentuk forum khusus untuk memprogramkan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi agar ada keseragaman dalam garis besarnya sebab *contoh* jelas tidak dapat diseragamkan (disiplin ilmu mahasiswa berlainan).

PENGEMBANGAN PENGUJIAN BAHASA DI SEKOLAH

Jahja Umar

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengantar

Pendidikan biasanya dimaksudkan sebagai usaha untuk mengembangkan diri peserta didik yang meliputi aspek-aspek intelektual, keterampilan, dan kepribadian peserta didik. Aspek kemampuan intelektual yang dikembangkan melalui program pendidikan jalur sekolah umumnya dinamakan kemampuan akademis. Kegiatan untuk mengembangkan kemampuan ini di sekolah selalu ditandai oleh adanya guru yang mengajarkan suatu mata pelajaran tertentu kepada sekelompok murid. Jadi, sifatnya adalah pengajaran pengetahuan. Di samping itu, ada beberapa mata pelajaran yang memuat pelatihan keterampilan tertentu. Bahkan, ada pelajaran yang isinya lebih banyak pelatihan keterampilan daripada pengajaran pengetahuan. Mengenai pengembangan aspek kepribadian, meskipun sering tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan, jarang ada program yang khusus dirancang untuk itu. Yang ada biasanya adalah pengajaran tentang sifat pribadi dan perilaku yang perlu dimiliki atau dihindari (jadi sifatnya pengetahuan), dan kadang-kadang disertai dengan latihan melakukan perilaku yang diinginkan itu (keterampilan). Sementara proses terbentuknya kebiasaan, keyakinan, dan sebagainya biasanya diyakini lebih ditentukan oleh lingkungan di luar sekolah.

Program pengajaran pengetahuan dan pelatihan keterampilan melalui sekolah umumnya terdiri dari satuan program yang lebih kecil. Misalnya, program suatu jenjang sekolah yang memerlukan waktu tiga tahun dapat diuraikan menjadi program per tahun, semester, dan bahkan program pengajaran atau latihan untuk satu pokok bahasan. Setiap kali suatu program telah selesai dilaksanakan, baik itu menyangkut satuan program yang lebih kecil maupun keseluruhan dari program itu, biasanya diperlukan penilaian atas tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan program tersebut. Bahkan, sering pula dilanjutkan dengan penilaian terhadap tingkat efisiensi dari upaya mencapai tujuan program. Dalam hal program pengajaran, yang perlu dinilai ada dua, yaitu tingkat keberhasilan guru mengajar dan tingkat keberhasilan murid belajar. Untuk kedua jenis penilaian ini, diperlukan data yang sama, yaitu prestasi belajar murid. Jika sebagian besar dari murid dapat memahami sebagian besar

dari yang diajarkan, berarti guru cukup berhasil dalam mengajar. Selanjutnya, jika seorang murid dapat menguasai sebagian besar dari isi pelajaran yang diikutinya, dapat dikatakan ia telah cukup berhasil dalam belajar. Begitu pula sebaliknya.

Untuk mendapatkan data dalam rangka penilaian terhadap keberhasilan murid belajar ataupun guru mengajar di atas, dilakukan pengukuran terhadap pengetahuan/keterampilan yang telah dimiliki murid. Salah satu bentuk kegiatannya adalah ujian. Dalam pengukuran pengetahuan ada ujian lisan dan ada ujian tertulis, sedangkan untuk pengukuran tingkat keterampilan dilakukan ujian praktik. Di dalam penilaian hasil belajar-mengajar, kadang-kadang diperlukan satu saja dari ketiga jenis ujian tersebut, tetapi kadang-kadang diperlukan ketiga-tiganya. Pada setiap jenis ujian ini pun terdapat berbagai cara untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, ujian tertulis dapat dilaksanakan dengan cara meminta murid memilih jawaban yang telah disediakan, atau dengan meminta mereka menuliskan jawaban berupa kata atau kalimat pendek, dan dapat pula dengan meminta mereka menuliskan jawaban dalam bentuk uraian, hitungan, dan sebagainya. Namun, perlu diingat bahwa ada satu ciri khas dari setiap ujian, terlepas dari apa pun bentuk penyajiannya, yaitu bahwa setiap ujian memerlukan satu atau sehimpunan soal, dan untuk setiap butir soal pasti telah ditetapkan satu atau sehimpunan jawaban yang dianggap benar.

Telah disebutkan di atas bahwa satuan program pengajaran dapat meliputi hanya satu atau beberapa pokok bahasan, atau satu semester/caturwulan, satu tahun ajaran, dan dapat pula meliputi satu jenjang persekolahan. Dengan demikian, ujian pun ada yang dilaksanakan di setiap berakhirnya pengajaran satu atau beberapa pokok bahasan, ada yang di setiap akhir semester/caturwulan, dan ada pula yang berupa ujian akhir dalam rangka sertifikasi bagi murid yang telah menyelesaikan suatu jenjang persekolahan. Hasil ujian pada satuan program pengajaran yang kecil (meliputi satu atau beberapa pokok bahasan) tidak saja digunakan sebagai masukan bagi penilaian di akhir semester atau akhir tahun, tetapi dapat pula digunakan oleh guru sebagai masukan bagi perbaikan/penyempurnaan cara mengajar. Di samping itu, soal-soal memang dapat dijadikan alat mengajar. Sebagai contoh, guru dapat mengajar dengan menerangkan mengapa jawaban seorang murid dinilai salah setelah ia mencobanya. Dalam kaitannya dengan hal ini adalah penting bahwa setiap guru maupun pengambil kebijakan pendidikan dapat membedakan penggunaan butir soal sebagai alat mengajar dan sebagai alat pengujian. Dengan demikian, kecenderungan untuk menganggap sistem pengujian (bukan proses pengajaran) sebagai penyebab rendahnya tingkat pengetahuan atau keterampilan murid, dapat dihindari. Namun, memang ada beberapa ujian tertentu yang hasilnya begitu menentukan masa depan seseorang, seperti ujian saringan masuk ke perguruan tinggi. Jenis ujian seperti ini sering mempengaruhi perilaku guru mengajar ataupun murid belajar. Orang lebih mementingkan lulus dalam ujian tersebut sehingga mengabaikan sebagian isi dari apa yang sebenarnya diprogramkan. Kesimpulannya, pengembangan sistem pengujian haruslah mempertimbangkan pula dampaknya terhadap perilaku guru dalam mengajar ataupun murid

dalam belajar. Tak terkecuali dalam hal ini pengembangan pengujian bahasa di sekolah.

2. Pengujian Bahasa Saat Ini

Pengujian saat ini, khususnya ujian akhir (untuk semua mata pelajaran), adalah mengacu pada isi kurikulum yang berlaku, sedangkan pada ujian yang dilakukan oleh guru di kelas, isinya lebih mengacu pada apa yang telah diajarkan di kelas tersebut. Jika program pengajaran berjalan sebagaimana mestinya, seluruh isi kurikulum akan diajarkan sehingga isi ujian akhir pun benar-benar berkenaan dengan apa yang telah diajarkan. Persoalannya adalah besarnya variasi antarsekolah di seluruh tanah air, baik itu menyangkut fasilitas belajar-mengajar maupun mutu gurunya, sehingga terselenggaranya pelaksanaan kurikulum pun berbeda-beda. Dengan demikian, suatu ujian yang spesifikasi isinya (kisi-kisi) ditetapkan secara sentral di pusat dapat memuat butir soal yang menanyakan pokok bahasan yang belum diajarkan di suatu sekolah, atau sekurangnya belum diajarkan dengan semestinya. Dalam keadaan ini, selain ujian itu tidak adil, juga butir soal yang dimaksud tidak akan menghasilkan informasi yang diinginkan tentang pengetahuan orang yang menempuhnya. Pada saat ini, ujian untuk mata pelajaran yang diebtanaskan menggunakan kisi-kisi tunggal yang disusun di pusat, sedangkan untuk mata pelajaran yang tidak diebtanaskan kisi-kisi ujiannya disusun secara lokal. Khusus untuk mata pelajaran bahasa, yang termasuk dalam ebtanas adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk SMA program A4 (bahasa), termasuk pula mata pelajaran bahasa asing lain yang dipilih seperti bahasa Jerman, Perancis, Arab dan Jepang. Selanjutnya, kebijakan di bidang ujian akhir berbeda-beda pula pada jenjang sekolah yang berbeda. Untuk tahun ajaran 1993/1994 ini, rencana kebijakannya adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk sekolah dasar, kisi-kisinya disusun di wilayah, kalau dapat di tingkat kabupaten/kotamadya, atau bahkan rayon, dengan menggunakan model kisi-kisi yang telah disusun oleh suatu tim di pusat. Penyusunan soal sepenuhnya merupakan kegiatan di wilayah dengan menggunakan kisi-kisi yang dihasilkan di sana.
- 2) Untuk SLTP dan SLTA, kisi-kisi ebtanas disusun oleh sebuah tim di pusat, sedangkan penyusunan soal dilakukan oleh suatu tim di propinsi. Jadi, hanya ada satu kisi-kisi yang berlaku secara nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan dalam ebtanas. Soal yang dihasilkan di wilayah merupakan usulan soal dari wilayah tersebut untuk kemudian ditelaah oleh suatu tim di pusat, yang akhirnya dipilih sebagai soal ujian yang nantinya disediakan dari pusat. Pada tahun sebelumnya, penulisan, penelaahan, dan pemilihan butir soal untuk SLTP dilakukan di wilayah dan hanya kisi-kisinya saja yang disediakan dari pusat. Dengan kata lain, kalau sebelumnya hanya ujian SLTA saja yang sepenuhnya bersifat nasional, mulai tahun depan direncanakan hal yang sama berlaku pula untuk ujian akhir SLTP. Juga direncanakan penyiapan bahan ujian untuk ebtanas SMP mulai tahun ajaran ini

menggunakan bank soal sebagai sumber di samping usulan soal dari wilayah seperti disebutkan di atas.

Aspek kemampuan berbahasa yang diujikan dalam ebtanas, khususnya pada bahasa Indonesia, adalah membaca, menulis, dan pengetahuan kebahasaan. Untuk ujian mendengarkan dan kemampuan berbicara, masih sulit dilakukan pada ujian akhir yang bersifat massal dan diharapkan dapat dilakukan di kelas. Untuk menguji kemampuan dalam hal membaca dan pengetahuan kebahasaan digunakan tes bentuk objektif, sedangkan untuk kemampuan menulis digunakan tes mengarang. Penggunaan utama dari skor (angka nilai) ebtanas selama ini adalah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kelulusan (50%) dan untuk seleksi murid baru di SLTP dan SLTA. Selain itu, perlu pula diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan lulus seorang murid harus mendapatkan nilai bahasa Indonesia sekurang-kurangnya enam pada skala nol sampai dengan sepuluh.

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam sistem pengujian bahasa saat ini adalah sebagai berikut.

- 1) Kurang atau tidak adanya ujian kemampuan mendengarkan dan berbicara yang dilakukan oleh guru di kelas. Kalaupun ada, peranannya dalam penentuan kenaikan kelas amatlah kecil karena yang lebih dominan dalam hal ini adalah hasil ujian akhir semester yang sama sekali tidak memuat butir soal yang berkenaan dengan kemampuan ini. Karena kedua jenis kemampuan lisan ini kurang dilatihkan maupun diujikan, tidaklah mengherankan jika para lulusan kurang memiliki kemampuan dalam menangkap isi ceramah, pidato, dsb., serta kurang mampu menjawab pertanyaan secara lisan sesuai dengan apa yang ditanyakan.
- 2) Isi kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai dengan SLTA adalah sama, yaitu terdiri dari enam komponen: (a) membaca, (b) kosakata, (c) struktur, (d) menulis, (e) pragmatik, dan (f) apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Ada dua permasalahan mengenai hal ini. Pertama, apakah klasifikasi isi pengajaran bahasa seperti itu sudah tepat? Kedua, mengenai aspek "pragmatik" yang di dalam kurikulum dinyatakan sebagai hal amat penting. Misalnya, dalam buku kurikulum dituliskan "... Dengan memasukkan bagian pragmatik dalam kurikulum, semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan penilaian pengajaran bahasa mempunyai pedoman yang tegas dan jelas tentang keterampilan bahasa yang dituju" ... dan ... "Di sinilah letak pentingnya belajar bahasa Indonesia sebagai keterampilan pragmatik berbahasa dan menghargai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi secara nasional bangsa Indonesia". Kalau melihat hal ini, semestinya yang dijadikan ukuran akhir keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia adalah kemampuan pragmatik. Dengan kata lain, ujian-ujian, baik lisan maupun tertulis, haruslah sebagian besar menyangkut kemampuan pragmatik dan bukan sekedar pengetahuan kebahasaan.
- 3) Pada kolom "penilaian" dalam buku GBPP amat banyak tertulis perlunya tes lisan dan tes uraian, tetapi pada kenyataannya untuk pekerjaan rumah pun guru

menggunakan soal tes bentuk objektif. Kalau pada ujian, seperti Ebtanas, hal ini dapat dimengerti karena sifatnya yang komprehensif (mencakup sangat banyak pokok bahasan) padahal waktunya terbatas, peserta ujian bersifat massal, dan penggunaan hasilnya pun menuntut tingkat objektivitas yang tinggi (misalnya untuk seleksi murid baru).

- 4) Dari segi mutu bahan ujian (soal-soal), baik yang menyangkut soal bentuk objektif maupun bentuk uraian, baik yang digunakan oleh guru pada ujian bulanan atau semester maupun soal ujian akhir seperti ebtan dan ebtanas, masih memprihatinkan. Dalam hal ini yang memerlukan perhatian khusus adalah mutu soal-soal ebtanas karena dijadikan landasan satu-satunya bagi keputusan penting seperti seleksi. Belum semua penyusun soal untuk ujian ini telah mengikuti latihan khusus di bidang penyusunan soal ujian. Selain itu, karena penyelenggaraannya yang bersifat *ad hoc*, soal ujian yang disusun oleh tim yang dibentuk panitia akan langsung digunakan tanpa pengujian mutu soal secara empirik, khususnya yang menyangkut validitas dari soal tersebut dalam menghasilkan informasi yang diharapkan. Juga, penyusunan soal dilakukan dalam waktu yang singkat dan tergesa-gesa.
- 5) Hasil ujian, khususnya yang dilakukan oleh guru di kelas, belum banyak digunakan untuk mengambil keputusan tentang murid. Sebagai contoh, seorang murid yang menurut hasil ujiannya belum menguasai pokok bahasan X_1 diizinkan untuk mengikuti pengajaran pokok bahasan X_2 yang merupakan kelanjutan dari X_1 . Akibatnya, murid makin lama makin menjadi frustrasi dalam menghadapi pelajaran, dan akhirnya bahkan tak menyukai mata pelajaran yang bersangkutan. Karena hal ini berjalan terus, murid pada umumnya lulus dan tamat, tetapi tidak menguasai materi yang diajarkan. Hal ini terlihat sekali pada mata pelajaran bahasa Inggris. Walaupun mereka telah mengikuti pengajaran selama enam tahun sejak SMP sampai dengan SMA dan naik kelas/lulus terus, amat sedikit di antara mereka yang menguasai bahasa Inggris pada tingkat yang diharapkan. Keadaan ini sebenarnya berkaitan dengan dua hal, yaitu (a) struktur kurikulum/GBPP yang kurang fleksibel dan menimbulkan tekanan (*pressure*) pada guru untuk melaksanakan program pengajaran sesuai dengan urutan dan jadwal yang ditetapkan, dan (b) tidak adanya tekanan agar guru mencapai tingkat keberhasilan dalam mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 6) Sistem pengujian yang ada belum memungkinkan diperbandingkannya statistik hasil ujian dari tahun ke tahun, baik pada tingkat/kelas yang sama maupun pada tingkat/kelas yang berbeda. Sebagai contoh, jika rata-rata nilai ebtanas bahasa Indonesia di sebuah sekolah atau propinsi tahun lalu adalah 6.5 dan angka rata-rata tahun ini adalah 8.5, belum tentu menunjukkan peningkatan pencapaian belajar di sekolah/propinsi tersebut. Hal itu mungkin karena soal-soal ujian tahun ini jauh lebih mudah. Begitu pula halnya dengan perbandingan antartingkatan/kelas. Penyelenggara pendidikan tak dapat mengetahui berapa banyak pengetahuan murid di akhir kelas tiga telah bertambah jika dibanding dengan pengetahuan rata-rata murid kelas dua atau kelas satu.

3. Sistem Pengujian yang Diinginkan

Pengembangan sistem pengujian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah hendaknya merupakan upaya pemecahan terhadap masalah yang dikemukakan di bagian sebelumnya. Dengan kata lain, sistem pengujian yang diinginkan kiranya dapat memiliki beberapa karakteristik berikut.

- 1) Lebih banyak dilakukan ujian lisan oleh guru di kelas dan hasilnya ikut menentukan secara lebih dominan nilai akhir dari seorang murid dalam mengikuti pengajaran.
- 2) Isi bahan ujian, baik pada ujian akhir maupun yang dilaksanakan oleh guru di kelas, lebih banyak merupakan pengujian terhadap keterampilan pragmatik dalam berbahasa seperti yang digariskan dalam kurikulum pengajaran bahasa Indonesia. Ini berarti perlu ujian praktik di kelas, dan ujian akhir pun sebaiknya banyak menanyakan tentang bagaimana seorang harus menggunakan bahasa dengan tepat dan benar sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Soal ujian yang menyangkut struktur bahasa, misalnya, tetaplah penting, tetapi proporsinya agar sesuai dengan yang terdapat di dalam kurikulum.
- 3) Ujian mengarang dan penggunaan soal bentuk uraian lebih banyak dilakukan di kelas, khususnya pada ulangan harian dan ujian akhir semester. Penggunaan hasilnya agar "cukup menentukan" di dalam penilaian akhir terhadap hasil belajar murid.
- 4) Soal ujian disusun oleh guru yang telah dilatih dalam hal penyusunan dan pengujian mutu bahan ujian. Di samping itu, soal ujian akhir yang bersifat komprehensif dan dilaksanakan secara massal (misalnya ebtanas), yang hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan yang menyangkut keadilan (*fairness*), seperti seleksi murid baru, agar menggunakan soal yang telah divalidasi (diuji mutunya) secara empirik. Dalam hal ini, yang tepat untuk digunakan adalah soal bentuk objektif. Untuk menjamin bahwa hanya soal yang telah divalidasi saja yang akan digunakan, perlu dikembangkan suatu bank soal yang jaringannya dapat dijangkau oleh para perancang ujian di wilayah. Di samping itu, isi soal ujian pun hendaknya dibuat pada tingkatan yang menuntut penalaran dalam menjawabnya. Sebagai contoh, butir-butir soal ujian pemahaman terhadap bacaan dapat disusun menurut enam jenis subpemahaman dalam membaca (Djiwatampu, 1993), yaitu pemahaman terhadap gagasan utama, fakta, hubungan, terminologi, penarikan kesimpulan, dan elaborasi dari suatu bahan bacaan.
- 5) Untuk jenis ujian yang bersifat komprehensif dan massal seperti ebtanas, hasilnya harus merupakan statistik yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, baik pada tingkatan/kelas yang sama maupun antartingkatan/kelas yang berbeda. Hal ini hanya dapat dilakukan jika sumber bahan ujian adalah suatu bank soal yang telah dikalibrasi (distandardisasikan skalanya). Keunggulan dari sistem pengujian yang berlandaskan suatu bank soal yang terkalibrasi ialah skor dari hasil ujian yang berbeda (misalnya dari tahun atau tingkatan/kelas yang berbeda) dapat

diperbandingkan pada skala yang sama meskipun tak ada butir soalnya yang sama. Dengan demikian, mutu pencapaian (prestasi) belajar dapat dipantau dan perkembangannya dapat dilaporkan. Selain itu, ujian akhir dapat didesentralisasikan tanpa mengorbankan keterbandingan hasilnya. Uraian tentang bank soal yang dikalibrasi, manfaatnya, cara pengembangan dan pengelolaannya serta berbagai penggunaannya, dapat dibaca pada tulisan Umar (1987, 1990, 1993a, 1993b). Contoh penggunaan soal yang dikalibrasi untuk membandingkan kemampuan membaca murid kelas 5, 6, 7, dan 8 secara nasional di negeri Belanda, misalnya, dapat dilihat pada laporan penelitian oleh Staphorsius, Kleintjes, dan Verhelst (1993).

- 6) Hasil ujian yang dilakukan oleh guru di kelas benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan tentang program belajar murid orang per orang. Jika ada murid yang belum menguasai pokok bahasan X_1 , misalnya, ia sebaiknya tak diperbolehkan mengikuti pengajaran pokok bahasan X_2 yang merupakan kelanjutannya. Murid tersebut harus diberi kesempatan untuk memperbaiki pemahamannya, dan jika mayoritas murid belum menguasai topik X_1 tersebut, guru sebaiknya mengajarkan kembali topik itu dan tidak melanjutkan ke topik X_2 . Pendekatan belajar seperti ini dikenal dengan istilah belajar tuntas (*mastery learning approach*) dan telah diterapkan di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, khususnya di pondok pesantren dan perguruan silat. Jika cara seperti ini diterapkan di sekolah, tidak akan terjadi keadaan bahwa mayoritas lulusan SMA tak menguasai bahasa Inggris seperti dicontohkan sebelumnya dalam tulisan ini.

Selain memiliki karakteristik seperti yang digambarkan di atas, sistem pengujian secara umum (tidak hanya bahasa) hendaknya dikembangkan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi secara positif perilaku guru mengajar dan murid belajar. Menurut Umar (1993c), hal ini dapat diharapkan terjadi, antara lain, jika (a) terdapat suatu standar yang jelas tentang tingkat dan jenis kompetensi yang harus dicapai oleh para murid sebagai hasil guru mengajar dalam satuan waktu tertentu, dan (b) adanya sistem ujian yang menimbulkan tekanan (*pressure*) agar guru mengajar lebih baik dan murid belajar lebih bersungguh-sungguh. Sebenarnya, bahwa terlepas dari faktor lain seperti mutu guru, fasilitas belajar, dsb., peningkatan mutu hasil pengajaran hanya terjadi jika guru mengajar lebih baik dan para murid belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Saran-saran tentang bagaimana kebijakan di bidang sistem pengujian harus dikembangkan agar dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik serta murid terdorong untuk belajar lebih serius, misalnya, dapat dijumpai dalam buku yang ditulis oleh Capper (1993). Seperti telah disinggung di bagian muka dari tulisan ini, untuk tujuan sertifikasi dan seleksi, kegiatan ujian (khususnya yang dilakukan oleh guru di kelas) dapat pula dijadikan sebagai alat bantu mengajar (*teaching tools*).

DAFTAR PUSTAKA

- Capper, J. 1993. *Using Examinations and Assessments to Promote Better Teaching and Learning: A Guide Educational Policymakers (Working Title)*. Buku, yang atas permintaan pengarangnya, saat ini sedang di-review oleh penulis, dan akan diterbitkan oleh ABEL tahun 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1984. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP): Bidang Studi Bahasa Indonesia*.
- Djiwatampu, Meithy. 1993. *Representasi Mental Dalam Pemahaman Membaca*. Jakarta: Universitas Indonesia. (Disertasi).
- Staphorius, G., F.G.M. Kleintjes, and N.D. Verhelst. 1993. *Predicting the Likelihood, That Subjects Can Comprehend Prose Varying By Difficulty: An Application of the One Parameter Logistic Model (OPLM)*. CITO: The National Center for Educational Measurement, Arnhem, The Netherlands.
- Umar, Jahja. 1987. "Desentralisasi Ebta dengan Rasch Model." Dalam *Suara Pembaruan*, 7 Oktober 1987.
- . *Development of an Examination System Based on Calibrated Item Bank Networks*. Study project report submitted to SIDEC, Stanford University, USA, Summer 1990.
- . "Item Banking in Testing and Assessment." Dalam Torsten Husen and T.N. Postlethwaite (Eds.). *The International Encyclopedia of Education* (2nd Edition), Supplementary Volume 2. Oxford: Pergamon Press.
- . "Assessment in Indonesian Schools." Makalah disampaikan pada Invitational Conference of Experts on Assessment *International Center For Research In Assessment*, London Institute of Education, University of London.
- . "Keterkaitan Antara Upaya Peningkatan Mutu, Pengembangan Sistem Pengujian, dan Pengembangan Kurikulum." Makalah Seminar Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun Untuk Abad ke-21, 13 s.d. 15 Oktober 1993. Dilaksanakan oleh Balitbang Dikbud bekerja sama dengan ODA The British Council.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengembangan Pengujian Bahasa di Sekolah
Pemakalah : Jahja Umar
Pemandu : Imam Syafei
Pencatat : Ebah Suhaebah
D. Wilda Siregar

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Abdul Kadir M., Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

- Apa sesungguhnya tujuan evaluasi tingkat nasional, seperti ebtanas dan UMPTN itu. Ini ditanyakan karena banyak orang berpendapat bahwa soal bahasa kurang dapat mengukur aspek pragmatik. Selama ini, kita hanya mengukur kemampuan bahasa?
- Pandangan bahwa ujian akhir itu tidak dapat dijadikan bahan bandingan. Kalau ini memang mempunyai alasan yang rasional, perlu dimediasasikan karena beberapa daerah merasa terpojok dan terbelakang?
- Melalui kongres ini perlu diusulkan upaya tindak lanjut menyangkut pengajaran bahasa dan sastra dengan segala aspeknya. Mungkin kegiatan ini dapat berbentuk lokakarya. Saya kira di sini dapat disusun berbagai aspek yang lingkupnya nasional?

2. Pertanyaan: Sri Yaningsih, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat

Proses belajar itu adalah proses yang berkesinambungan. Jadi, Bapak katakan bahwa untuk mengetahui kedalaman dan keluasan belajar terhadap pelajaran itu, itulah yang terdapat dalam keseharian. Ini menyebabkan orang atau guru mengejar keluasan itu, bagaimana caranya dapat menempuh ujian itu?

3. Pertanyaan: Sugit Waluyo, IKIP Malang

Soal UMPTN harus dikerjakan oleh lulusan SMA dari seluruh Indonesia. Ini dirasakan tidak adil karena kita tahu bahwa kondisi pengajaran tiap-tiap daerah itu tidak sama. Kita tahu bahwa soal UMPTN itu ditentukan dengan standar yang sama di seluruh daerah. Bagaimana pendapat Bapak terhadap hal seperti ini?

Jawaban:

- Mengenai aspek pragmatis, memang itu sesuai dengan keinginan saya. Hanya masalahnya, penyusunan soal itu belum ditangani secara profesional, tetapi

melalui panitia. Kemudian, panitia menyusun kembali kisi-kisi, soal-soal yang menyangkut apa yang akan dijadikan soal. Panitia membentuk tim-tim yang berasal dari guru-guru yang dapat menentukan soal-soal yang bagaimana. Kita tidak dapat memaksakan aspek-aspek apa yang harus diujikan. Oleh karena itu, pernah diusulkan ada lembaga khusus menangani soal-soal ujian. Di Malaysia, Australia, dan Belanda, misalnya, murid-murid dan guru-guru ditekankan untuk belajar dan mengajar sungguh-sungguh karena yang menilai adalah orang dari luar.

- b. Masalahnya, sekarang ini di sini, terlihat pada sistem penyajian. Diusulkan bila ujian itu merupakan hasil penelitian. Semestinya ada yang disebut *comment item* sehingga dapat dilakukan *equiting system*. Hal ini pernah dicoba, tetapi ini pun menimbulkan keresahan mengingat standar yang digunakan berbeda-beda. Untuk membuat soal yang *comparable* itu susah. Lain halnya dengan TOEFL yang memiliki standar yang tetap. Soal-soal dibuat *comparable*. Di mana pun dan kapan pun, TOEFL dilakukan, hasilnya dapat diperbandingkan. Membuat soal seperti ini dapat dilakukan di Indonesia, tetapi memerlukan waktu yang sangat panjang.
- c. Tidak ditanggapi (ditujukan kepada Panitia Kongres)
- d. Mengenai belajar berkesinambungan, sifatnya keluasan dan kedalaman. Menurut saya, kedalaman itu dapat diperoleh melalui guru juga dan memang kenyataannya begitu. Kalau dikatakan ebtanas itu sangat penting, itu tidak benar. Sekarang ini ebtanas itu hanya menentukan sekitar 50% untuk kelulusan, yang 50% berasal dari guru. Akan tetapi, yang terjadi guru sering memalsukan nilai agar hasil akhirnya tinggi. Pada saat mengajar di SMA, saya dikontrak mengajar selama 20 jam. 4 jam untuk kuliah, 6 jam *reading*, dan 10 jam *office hour* untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah sehingga murid dapat mengikuti kuliah selanjutnya.
- e. Soal UMPTN memang tidak adil. Skor tiap daerah tentu berbeda. Pembuatan soal biasanya didominasi oleh kepentingan-kepentingan golongan UI dan ITB yang selektivitasnya sangat tinggi. Tentu saja untuk ini diperlukan soal-soal yang memiliki tingkat yang cukup tinggi untuk membedakan yang superior dan bukan. Target setiap perguruan tinggi itu berbeda dalam pencapaian nilainya. Soal untuk UI dan ITB mungkin sangat sulit dikerjakan oleh universitas di Jambi atau Bengkulu. *Rangking* yang didapat adalah *rangking random*. Jadi, *rangking* yang tinggi di Bengkulu atau di Jambi mungkin menjadi terbalik di UI atau ITB. Begitu pula sebaliknya.

UPAYA MENINGKATKAN APRESIASI SASTRA SISWA LEWAT PENGAJARAN SASTRA DI SMA

B. Rahmanto

Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

1. Pengantar

Lima tahun yang lalu, apabila kita menengok kembali beberapa butir keputusan Kongres Bahasa Indonesia V, 1988, pada bagian Pengajaran Sastra, baik pada simpulan umum maupun tindak lanjutnya, antara lain, akan dijumpai hal-hal seperti berikut ini. (1) Tujuan pengajaran sastra adalah menumbuhkan dan mengembangkan akal budi peserta didik melalui kegiatan apresiasi, ekspresi, dan penelaahan karya sastra agar tumbuh kegemaran membaca dan menghargai karya sastra sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan; (2) Bahan pengajaran sastra selayaknya mencakup hasil sastra dan pengetahuan sastra (teori dan sejarah sastra); (3) Tugas mengajarkan sastra yang dirangkap dalam mengajarkan bahasa tidak dapat dijalankan dengan leluasa, karenanya, hendaknya diadakan pembagian tugas di antara guru yang bertugas sebagai pengajar sastra dan guru yang bertugas sebagai pengajar bahasa; (4) Para peserta didik diwajibkan membaca karya sastra yang sudah terpilih, dan diberi keleluasaan melahirkan pendapatnya sendiri; (5) Di setiap sekolah hendaknya tersedia buku sastra dengan jumlah yang cukup; (6) Perlu dilakukan penelitian dan penyusunan bahan pengajaran sastra untuk setiap jenis dan jenjang persekolahan.

Setelah lima tahun itu berlalu, sebagai bahan refleksi muncullah beberapa pertanyaan yang seyogyanya kitalah yang semestinya sibuk berupaya mencari alternatif jalan keluarnya dan bukan malah saling "meledak" dan apalagi mulai mencari kambing hitamnya. Pertanyaan itu, antara lain, seberapa jauh kegemaran membaca karya sastra dan menghargai karya sastra di kalangan para peserta didik; "gerakan apa yang menjadi kendalanya" pembagian tugas pengajar sastra dan bahasa sulit untuk dilaksanakan; seberapa jauh para peserta didik benar-benar membaca cipta sastra yang diwajibkan oleh Kurikulum 1984; bagaimanakah keadaan perpustakaan sekolah sehubungan dengan pengadaan buku-buku sastra yang menunjang pengajaran sastra; dan bagaimana kabar penelitian dan penyusunan bahan pengajaran sastra untuk setiap jenis dan jenjang persekolahan?

*Menjawab dan mencari alternatif jalan keluar dari beberapa pertanyaan tersebut di atas, selain tidak mudah karena kompleksnya masalah tersebut, juga

lantaran selalu munculnya problem tersebut sepanjang tahun, dan seharusnya lewat suatu penelitian yang suntuk yang tidak terbatas hanya dalam sekali hentak, tetapi terus berkelanjutan lewat semacam badan penelitian dan pengembangan yang disiapkan untuk mengantisipasi masalah seperti itu. Dengan demikian, usaha jalan keluarnya tidak hanya terlontar lewat makalah ke makalah dan dari seminar yang satu ke pertemuan ilmiah yang lain.

Dalam kesempatan ini, bertolak dari masalah yang pada dasarnya masih tetap sama dari tahun ke tahun, di seputar pengajaran sastra yang menyangkut penghargaan karya sastra di kalangan pelajar, guru sastra dan guru bahasa, kurikulum, pengadaan buku-buku sastra di sekolah, masalah yang akan dibahas akan dipusatkan pada upaya meningkatkan apresiasi sastra siswa lewat pengajaran sastra di sekolah menengah atas.

2. Tingkat Apresiasi Sastra Masyarakat dan Hubungannya dengan Kondisi Pengajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas

Jika setiap hari Minggu kita ada waktu untuk membolak-balik semua surat kabar yang terbit di kota-kota besar di seluruh persada nusantara kita yang tercinta ini, hampir dapat dipastikan setiap surat kabar itu memuat cerita pendek (dari yang berjenis populer sampai yang berbobot sastra). Bahkan, surat kabar *Kompas* sejak tahun 1992 merasa perlu untuk melibatkan para pakar sastra untuk memilih cerpen-cerpen terbaik yang terbit setiap hari Minggu selama satu tahun, dan dipergunakan untuk hadiah ulang tahun surat kabar tersebut setiap tahunnya (cerpen pilihan *Kompas* 1992 terbit dengan judul *Kado Istimewa*, dan tahun 1993 dengan judul *Pelajaran Mengarang*). Begitu juga jika kita membaca majalah-majalah hiburan yang terbit, baik mingguan maupun bulanan, tak ada yang tidak menurunkan rubrik cerita pendek setiap terbit (majalah *Femina* dan *Sarinah* misalnya, selain memuat novel secara bersambung, selalu menyelenggarakan sayembara penulisan novel setiap tahunnya). Belum lagi terbitnya novel-novel populer dan novel-novel terjemahan yang membanjiri pasaran lewat penerbit-penerbit swasta sehingga dapat saja dikatakan sebagai "tiada minggu tanpa cerpen dan novel".

Sehubungan dengan hal semacam itu, agakny dapat dilontarkan pertanyaan dengan logika yang sangat sederhana, misalnya, "Pers kita yang pelan-pelan meninggalkan visi awalnya dan bergeser ke arah bisnis pun masih menyisihkan halamannya yang barang tentu sangat berharga tinggi jika ditinjau dari kemungkinan iklan yang dapat mengganti kedudukan rubrik cerpen jika yang belakangan ini ditiadakan saja, tetapi mengapa ruang untuk cerpen dan novel masih ada? Benarkah cerpen tidak ada nilai bisnisnya?" Benarkah cerpen tidak ada peminatnya? Yang terang, dalam rangka temu wicara dengan para penulis surat kabar ibu kota, sang pemimpin redaksi berucap jujur bahwa kadang-kadang cerpen dengan sangat tajam dan jitu memaparkan dan menafsirkan isu-isu dengan tepat dan pas, dan mengalahkan tajuk rencana yang paling bagus serta ditulis oleh seorang wartawan yang paling senior pun.

Sementara itu, isu rendahnya tingkat apresiasi sastra masyarakat terhadap karya sastra, masih terdengar cukup santer. Isu ini pernah diangkat oleh Sastrowardoyo (1988) dan Sumardjo (1988) dalam Kongres Bahasa Indonesia V. Dengan nada sangat getir, Sastrowardoyo berucap bahwa dewasa ini di tengah masyarakat kita kesusastraan tidak dibaca orang. Dari 160 juta lebih penduduk Indonesia diperkirakan hanya ada lebih kurang sepuluh ribu orang yang masih asyik membaca karya sastra. Rendahnya tingkat apresiasi sastra masyarakat, atau menurut Sastrowardoyo (1988:3) ketidakpedulian masyarakat pada karya sastra itu berpangkal pada kurang adanya keyakinan akan manfaat kerja dan hasil karya sastra di tengah suasana hidup *utilitarian* yang mementingkan ekonomi dan politik dengan pengutamaan efisiensi, rasio, kekuasaan, ketertiban dan keamanan sehingga kesastraan menjadi perhatian dan kesibukan tak berarti.

Rendahnya minat membaca karya sastra pada masyarakat kita dirasakan oleh sementara sastrawan kita sebagai merasa terus-menerus bersalah dan disalahkan karena seakan-akan sebuah komplotan yang terpenclil, tidak berhubungan dengan orang banyak, sebagai "minoritas yang tak tepermanai" (Mohamad, 1993:6). "Jeritan" itu juga dilengkingkan oleh cabang seni lain, yakni seni lukis dan tari. Seni lukis dengan aneka ragam gaya (Supangkat, 1993:44) mengacu ke satu bingkai: memperlihatkan keindahan yang mengikuti prinsip keindahan umum, mudah dipahami, dan mengikuti selera masyarakat yang terhitung masih sederhana apresiasinya. Seni tari yang berkembang adalah yang berorientasi pada pasar (Murgiyanto, 1993:18-19). Seni tari harus menyesuaikan diri dengan "format TV". Ilustrasi gerak untuk musik video sangat laku dan dibayar tinggi. Seni tari sebagai buah pencarian yang panjang dan berliku tak laku. Kesenian tak lagi dihayati sebagai peristiwa bermakna, tetapi hanya sebagai hiburan. Nilai-nilai lahiriah menggantikan nilai-nilai rohani (kejujuran, ketulusan, dan integritas). Agar tidak dianggap elit dan di awang-awang, dalam seni sastra pun berkembang jenis yang mengikuti selera masyarakat. Damono (1983), Sumardjo (1979), dan Kayam (1981) telah banyak membicarakan jenis sastra populer yang laris di pasaran ini, yang bersifat menghibur dan *eskapisme* (kecenderungan menghindari kenyataan dengan mencari hiburan dan ketenteraman di alam khayal). Dengan sedikit meledek Sumardjo berucap (1988:2-3) bahwa bangsa Indonesia juga membaca sastra, hanya sayangnya yang mereka baca kebanyakan karya sastra yang tidak mewakili perkembangan kebudayaan bangsanya, yang sama dan sebangun dengan jenis seni lukis, tari, dan bahkan musik yang sedang laku di pasaran.

Dalam pada itu, rendahnya minat baca sastra pada masyarakat kita berimbas juga pada rendahnya minat baca sastra para peserta didik kita di tingkat sekolah menengah atas. Dalam diskusi sastra antarsiswa SLTA se-DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa (*Kompas*, 28/10/1992) dilaporkan keterusterangan para siswa SLTA berkaitan dengan pengajaran sastra, khususnya menyangkut minat baca sastra mereka. Berikut kita kutipkan secara utuh pendapat mereka.

"Sering karya sastra yang dikatakan baik oleh para pakar atau sastrawan, justru kita tidak mengerti isinya. Karya-karya itu ditulis dengan bahasa yang susah, atau jalan ceritanya yang sulit kita mengerti"

"Bagaimana kita diajak tertarik membaca *Salah Asuhan* atau *Siti Nurbaya* kalau permasalahan yang ditampilkan sama sekali tidak berarti apa-apa buat kita sekarang?"

"Saya tahu membaca *Lupus* tidak membantu saya mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan tidak menambah pengetahuan, tetapi saya memilih membacanya karena saya bisa mengerti isinya dan membuat saya tidak bosan".

"Jangan kami diberi karya sastra yang sama sekali tidak kita minati, misal karena latar belakang budaya yang ada dalam cerita sama sekali asing buat kami. Atau, latar belakang waktunya yang sangat jauh dengan kami yang besar di zaman ini"

"Sering juga karya yang sedang dibahas di sekolah sudah tidak ada lagi di pasaran sehingga kami tidak mungkin membacanya. Dan yang terjadi biasanya, bukunya baru ada di semester berikutnya"

Lontaran spontan yang cukup memerahkan telinga khususnya para guru bahasa Indonesia yang di dalamnya termasuk juga pengajar sastra, menggelisahkan para guru, dosen, sastrawan, pembuat kurikulum; pendeknya siapa saja pemerhati pengajaran sastra dari tahun ke tahun, sebut misalnya Oemarjati (1978, 1980, 1983, 1988, dan 1991); Gani (1980 dan 1988); Damono (1987); Rusyana (1984 dan 1988); Aminuddin (1992); Rustapa (1990 dan 1992); Syafi'ie (1992); Soemanto (1993); dan masih banyak lagi. Sementara itu, yang paling sering ditunjuk sebagai "biang keladi"nya berkisar pada guru, tiadanya minat siswa, minimnya buku, alokasi waktu, tes masuk perguruan tinggi, dan kurikulum.

Sehubungan dengan itu, masiakah kita akan menambah rentetan "keluhan dan kesahan" yang berkaitan dengan masalah runyamnya pengajaran sastra kita di sekolah menengah? Apakah tidak lebih baik jika kita memikirkan alternatif yang lebih baik ke arah pengajaran sastra yang sama-sama kita inginkan?

3. Upaya Meningkatkan Apresiasi Sastra Siswa

Seperti telah kita ketahui, keberhasilan suatu pembelajaran (termasuk di dalamnya pembelajaran sastra) banyak ditentukan oleh keterkaitan beberapa faktor, antara lain, guru-siswa-kurikulum. Oleh karenanya itu, tidaklah mengherankan apabila ketiganya sering menjadi bulan-bulanan sorotan. Di antara sorotan terhadap kurikulum yang sekarang masih berlaku di sekolah menengah atas, agaknya ada satu sisi yang masih relevan untuk diangkat ke permukaan, yaitu yang menyangkut tujuan kurikuler pengajaran sastra Kurikulum SMA Tahun 1984. Tujuan kurikuler pengajaran sastra (diandaikan antara tujuan kurikuler bahasa dan sastranya dipisahkan)

Kurikulum SMA 1984 adalah siswa dapat menghayati sastra Indonesia sesuai dengan tingkat pengalaman siswa SMA. Tujuan itu dijabarkan ke dalam enam buah tujuan instruksional umum sesuai dengan pokok bahasannya. Pokok bahasanya disebut Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia. Jika apresiasi bahasa kita sisihkan terlebih dahulu, sehingga dapat difokuskan pada TIU Apresiasi Sastra Indonesia yang disesuaikan dengan subpokok bahasan yang disajikan, akan berbunyi, "Siswa mengenal, memahami, dan mengapresiasikannya secara lisan/tulisan". Dalam pada itu, dalam pelaksanaan pengajaran, TIU-TIU itu harus dijabarkan oleh para guru sendiri ke dalam rumusan tujuan yang bersifat lebih khusus (dan ini biasanya telah dilakukan oleh para penulis buku paket). Misalnya, untuk subpokok bahasan Prosa Baru (7.6.1 Mengartikan unsur ekstrinsik sebuah roman/novel), sesuai dengan TIU-nya, siswa paling tidak mengenal/memahami unsur ekstrinsik sebuah roman, khususnya prosa baru dalam sastra Indonesia (misalnya *Belenggu*) dan dapat mengapresiasikannya serta dapat mengomunikasikannya secara lisan/tulisan. Jika itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, itu artinya para siswa harus *mengetahui* novel *Belenggu*, *memahami* novel *Belenggu* terlebih dahulu sebelum mereka dapat mencari unsur ekstrinsiknya, dan mengomunikasikannya secara lisan maupun tulisan. Lepas dari bagaimana mencari unsur ekstrinsik dan mengomunikasikannya, *mengetahui* dan *memahami* suatu novel bukanlah mudah. Jika kita ingin mengetahui sebuah novel, dibutuhkan upaya seperti membaca, mendengar bacaan orang lain, atau mungkin menonton sinetron *Siti Nurbaya*, misalnya. Pertanyaan mudah dapat dilontarkan, dapatkah kita mengetahui *Siti Nurbaya* tanpa membaca sendiri atau menonton sendiri tayangan sinetronnya? Berikut *memahaminya*.

Apabila kita membuka buku *Petunjuk Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia* (1985:5), tujuan memahami dapat dihubungkan dengan menafsirkan (mengartikan, mempromosikan, mencari hubungan, menemukan pola, menarik kesimpulan, menggeneralisasi). Pertanyaannya, dapatkah kita mengartikan, mencari hubungan, menemukan pola, menarik kesimpulan, dan menggeneralisasikan sebuah novel tanpa membaca karya sastra itu sendiri? Selanjutnya *mengapresiasi* hasil karya sastra Indonesia, jika kita masih mengikuti buku petunjuk, para siswa harus menghubungkan hal-hal yang dilakukannya dalam menafsirkan dengan mengaitkannya dengan kemampuan menikmati dan menghargai nilai-nilai yang dikandung dalam cipta sastra tersebut. Bagaimana dapat menikmati dan menghargai nilai-nilai yang dikandung oleh suatu karya sastra tanpa membaca sendiri karya sastra yang dimaksudkan? Mungkinkah atau cukupkah jika para guru-siswa hanya bersandarkan buku-buku ringkasan roman dan novel yang banyak beredar di pasaran bebas? Akhirnya, *mengomunikasikan* karya sastra Indonesia yang dapat ditempuh dengan jalan mendiskusikan, mendeklamasikan, mendramakan, dan merekreasikan (mengarang secara kreatif). Mendiskusikan, mendramakan, dan mendeklamasikan suatu karya sastra jelas harus berhubungan langsung dengan karya sastra itu sendiri. Tidak bisa lain, sedangkan agar dapat menulis karya kreatif yang berbentuk cerita pendek, puisi, atau naskah drama, bagaimanapun dibutuhkan keakraban dengan karya sastra itu sendiri.

Jika petunjuk pelaksanaan tersebut benar-benar diikuti, sebenarnya tak ada alasan untuk ribut-ribut runyamnya pengajaran sastra dengan berpedoman Kurikulum 1984. Apa yang dicita-citakan oleh Boen Oemarjati (1980; 1988) untuk membina keakraban antara guru-murid dengan karya sastra seharusnya dapat menjadi suatu kenyataan, tetapi mengapa ini tak kunjung terjadi? Mengapa penyuluhan apresiasi sastra yang dilakukan oleh Pusat Bahasa (Rustapa, 1972:3) di enam puluh buah SMTA di Jakarta sejak tahun 1991 masih melontarkan keluhan sangat memprihatinkan?

Terlepas dari kritikan terhadap alokasi waktu, tiadanya buku, dan minimnya minat baca, agaknya perlu kita tengok kembali tujuan kurikuler pengajaran sastra yang menyangkut *memahami* dan *mengapresiasi* karya sastra. Kata *memahami* menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988:636) diartikan sebagai (1) mengerti benar (akan); (2) memaklumi; mengetahui. Sementara itu, kata *memahamkan* diartikan sebagai (1) mempelajari baik-baik supaya paham; (2) mengartikan; (3) menanamkan pengertian tentang. Dengan demikian, jika kita menuntut para siswa memahami *Harimau! Harimau!* karya Mochtar Lubis, berarti para siswa harus mengerti benar akan *Harimau! Harimau!* Untuk dapat mengerti benar memang dibutuhkan, antara lain, kemampuan untuk mengartikan, memproposisikan alias membuat rancangan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dapat dibuktikan benar tidaknya; mencari hubungan; menemukan pola; menarik kesimpulan; dan membuat generalisasi. Apabila subpokok bahasan Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia uraiannya menyangkut unsur intrinsik novel, tak bisa lain yang dilakukan para siswa adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik novel *Harimau! Harimau!* untuk menemukan polanya, lalu dibandingkan dengan novel-novel Mochtar Lubis yang lainnya, taruhlah *Jalan Tak Ada Ujung* atau *Tak Ada Esok* (ketiga novel tersebut memang menjadi bahan pengajaran sastra menurut Kurikulum 1984), agar para siswa dapat mencari hubungan serta dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan, misalnya jenis alur yang bagaimana yang digemari dan merupakan ciri khas Mochtar Lubis.

Analisis seperti tersebut di atas jelas bukan pekerjaan yang ringan untuk anak didik setingkat SMA. Untuk dapat berbuat seperti itu, minimal setiap anak memiliki ketiga buah novel itu, membacanya dengan teliti, dan kemampuan menerapkan pengetahuan menganalisis fiksi dari sudut unsur yang membangunnya dari dalam. Akan tetapi, jika yang terjadi (seperti yang selalu dikeluhkesahkan selama ini) ... lebih menyenangi *Lupus*, buku sulit didapat, bahan terlalu banyak sementara waktunya sangat terbatas, tujuan yang bagus itu akan sulit untuk dilaksanakan. Pekerjaan menganalisis memang lebih bersifat penalaran, atau lebih bersifat keilmuan. Tentu saja ini tidak salah, hanya untuk taraf SMA pengajaran sastra yang setingkat itu barangkali perlu kita pikirkan kembali.

Selanjutnya, perihal 'mengapresiasi' karya sastra. Kata *apresiasi* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1988:46) diartikan sebagai kesadaran terhadap nilai-nilai seni dan budaya. Pengertian *apresiasi* ini senada dengan Oemarjati (1988:58) bahwa kata *apresiasi* mengandung arti 'tanggapan sensitif terhadap sesuatu'. Dengan demikian, menurutnya apresiasi sastra berarti tanggapan sensitif terhadap karya sastra. Kata

sensitif mengacu pada aspek *afektif* seseorang (bukan aspek kognitif) terhadap nilai-nilai yang dikandung dalam karya sastra. Hal demikian sejalan dengan Damono (1987), Sumardjo (1983), dan Soemanto (1983). Pendek kata pengajaran apresiasi sastra cenderung menyangkut sikap siswa terhadap karya sastra. Jika para siswa bersikap 'ogah-ogahan' terhadap karya sastra, bagaimana akan dapat mengapresiasi karya sastra?

Sementara itu, jika kita membolak-balik bahan pengajaran sastra Indonesia yang termuat dalam GBPP Kurikulum SMA 1984 tercakup subpokok bahasan yang berupa hasil sastra, unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, periodisasi sejarah sastra Indonesia modern, kritik sastra secara sederhana, dan ekspresi bersastra. Dengan demikian, beralasan pula apabila dalam petunjuk pelaksanaannya, apresiasi ditekankan pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni menafsirkannya setelah melalui tingkatan mengenal dan menikmatinya.

Masalahnya sekarang adalah sampai Kurikulum 1994 akan diberlakukan cita-cita pengajaran sastra yang apresiatif ternyata masih dipenuhi dengan kendala yang dari tahun ke tahun kurang lebih sama. Pertanyaannya, akankah dalam Kurikulum 94 tujuan pengajaran sastranya masih seperti itu?

Terlepas dari bagaimana wujud pengajaran sastra dalam Kurikulum Sekolah Menengah Umum 1994; mengingat alokasi waktu, pengadaan buku, dan sikap para siswa masih belum sepenuhnya bersikap sebagaimana yang dituntut dalam mengapresiasi suatu karya seni; agaknya dalam petunjuk pelaksanaan perlu ditekankan perihal apresiasi yang lebih bersifat mengenal, menghayati, dan menikmati cipta sastra terlebih dahulu.

Untuk mengajak para siswa mengenal karya sastra pun bukanlah perkara yang mudah (ini dibuktikan oleh tim penyuluhan sastra yang dilakukan oleh Pusat Bahasa). Keluhan yang sering terucap adalah isinya kurang menarik, jalan ceritanya sulit dimengerti, bahasanya bergaya lama, latar belakang budayanya asing bagi siswa, dan masih banyak lagi. Untuk mengatasinya, berbagai macam jalan dapat ditempuh, misalnya dengan mencari novel populer yang digemari para remaja pada saat tertentu yang tema dasarnya sama kemudian dilakukan suatu perbandingan antara dua novel tersebut (Oemarjati, 1988:61); memilih novel yang permasalahannya serta latar belakang budayanya tidak terlalu asing dengan para siswa tempat ia tinggal (untuk siswa yang sekolahnya di kota-kota kabupaten dapat dipilihkan novel berjudul *Pulang* karya Toha Mochtar atau *Sang Guru* karya Gerson Poyk), sedangkan untuk anak-anak yang sekolahnya di kota-kota dapat dipilihkan novel *Hati Yang Damai* karya Nh. Dini atau *Canting* karya Arswendo Atmowiloto atau *Raumanen* karya Mariane Katoppo atau *Astuti Rahayu* karya Iskariah Sumarto. Untuk memancing agar anak tertarik membaca novel tersebut, tak ada jalan lain kecuali guru telah membaca novel itu terlebih dahulu sehingga memungkinkan guru dapat mengutipkan terlebih dahulu bagian-bagian yang menarik dari novel yang akan digunakan sebagai bahan pelajaran. Untuk novel *Sang Guru* misalnya, guru dapat mengawali dengan mengisahkan betapa beratnya kehidupan yang harus dijalani sebagai guru muda di rantau, belum memiliki apa-apa sehingga dapat terjadi seperti kutipan di bawah ini.

"Baiklah," kataku, "dan di manakah tempat saya bernaung, kalau boleh saya tanyakan sekarang?" tanyaku. "Sebenarnya saya datang bersama ibu kandung saya yang sedang menanti di pelabuhan."

Aku betul-betul sangat mengharap pertolongannya. Ia tercenung mendengar bahwa aku membawa serta ibu kandungku. Sambil mendetak-detak kukunya ke meja, ia berkata: "Begini saja," kemudian ia berpikir agak panjang. "Ada sebuah tempat yang baik. Baiknya adalah karena rumah itu sangat dekat dengan sekolah. Buruknya adalah karena rumah itu sebuah gudang. Saudara setuju?"

"Setuju," jawabku tanpa berpikir panjang.

Kepala sekolah berdiri. Diajaknya aku menuju ke sebuah ruangan yang disebutnya tadi. (Poyk, 1971:18).

Dalam pada itu, mengajarkan novel memang membutuhkan waktu yang lama, di samping tentu saja novel itu harus ada. Agaknya, sebagai jembatannya, dibutuhkan prosa rekaan yang lebih pendek, yakni yang berbentuk cerita pendek. Pemilihannya pun disesuaikan pula seperti halnya dalam pemilihan novel. Untuk sekolah-sekolah di pelosok, misalnya, dapat dipilih cerpen seperti "Robohnya Surau Kami" karya A.A. Navis, "Di Tengah Padang" karya A. Bastari Asnin, "Mutiara di Tengah Sawah" karya Gerson Poyk atau "Ke Solo, ke Njati ..." karya Umar Kayam. Siswa yang sekolahnya di kota-kota besar dapat dipilihkan terlebih dahulu misalnya cerpen berjudul "Jakarta" karya Totilawati Tjitrawasita, "Pelajaran Mengarang" karya Seno Gumira Ajidarma, "Kejetit" karya Putu Wijaya, "Rumah Dara" karya Titis Basino, "Jatayu" karya Nh. Dini, "Tinggul" karya Trisnoyuwono, dan "Kado Pekawinan" karya Hamsad Rangkuti.

Untuk pengajaran puisi, karena relatif pendek, guru dapat melibatkan siswa ke dalam pengalaman sastra (Soemanto, 1993). Maksudnya, guru tidak hanya berhenti pada mendiskusikan apa maksud puisi tersebut, tetapi juga mengajak para siswa untuk berdialog dengan puisi tersebut (bandingkan pula dengan teknik pemecahan masalah secara kreatif yang dikembangkan oleh William J.J. Gordon). Puisi-puisi yang dipilih dan yang memungkinkan dipergunakan untuk mengajak para siswa berdialog dengan puisi tersebut, misalnya "Perasaan Seni" karya J.E. Tatengkeng, "Bukan Beta Bijak Berperi" karya Rustam Effendi, "Menuju ke Laut" karya Sutan Takdir Alisjahbana, "Aku" karya Chairil Anwar, "Derai-Derai Cemara" karya Chairil Anwar, "Surat dari Ibu" karya Asrul Saní, "Surat Cinta" karya Rendra, dan "Rakyat" karya Hartojo Andangjaja.

Sementara itu, untuk pengajaran drama, agar apresiasi sastra siswa menjadi meningkat, seyogyanya tidak hanya terbatas pada membaca dan mendiskusikan naskah drama, tetapi hendaknya sampai pada mementaskan drama. Drama-drama yang menarik dan sesuai dengan siswa SMA, misalnya lakon "Joko Tarub" karya Akhudiat, "Bila Malam Bertambah Malam" karya Putu Wijaya, "Puti Bungsu" karya Wisran Hadi, atau "Petang di Taman" karya Iwan Simatupang.

Dengan demikian, upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan apresiasi siswa di sekolah menengah atas seyogyanya memperbanyak pengenalan karya sastra

kepada para siswa. Dengan banyak membaca karya sastra, akan tumbuh pula minat untuk mencipta sastra, di samping juga kemungkinan untuk menangkap dan menemukan nilai-nilai yang dikandung dalam cipta sastra tersebut menjadi lebih banyak dan bervariasi. Sementara, pengetahuan sastra porsinya dapat dikurangi, cukup diberikan yang pokok-pokok saja.

Sementara itu, di samping pengadaan buku pegangan siswa dan guru, perlu diupayakan bunga rampai cerita pendek, puisi, dan drama. Agaknya buku semacam ini mendesak untuk diadakan agar tak lagi muncul keluhan bahan pengajaran yang berwujud buku ini tidak lagi menjadi kendala terutama bagi sekolah yang berada di pelosok-pelosok. Sementara, buku-buku yang berwujud novel merupakan tantangan tersendiri bagi penentu kebijakan pendidikan untuk menerbitkan dan menyebarkan ke sekolah-sekolah dalam jumlah eksemplar yang dapat mencukupi setiap kelas pada setiap SMA dalam perpustakaan sekolah mereka. Tanpa ini, dari tahun ke tahun, keluhan yang sama akan selalu muncul.

4. Penutup

Akhirnya, salah satu upaya di antara berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan apresiasi sastra siswa di tengah-tengah kondisi tingkat apresiasi sastra masyarakat kita dewasa ini adalah menengok kembali pada tekanan tujuan pengajaran sastra di sekolah menengah atas. Keluhan para pengajar sastra akan banyaknya bahan pengajaran sastra seperti yang terdapat di dalam Kurikulum SMA 1984, sementara alokasi waktu yang relatif sedikit, agaknya perlu diantisipasi dengan memikirkan kembali porsi memperoleh pengetahuan sastra yang dirasakan cukup banyak dalam kurikulum tersebut. Keluhan para siswa terhadap pilihan bacaan karya sastra, baik yang berupa cerita pendek maupun terlebih yang berwujud novel, perlu pula dicarikan jalan keluar dengan memilih bacaan yang dekat dengan persoalan di sekitar anak didik kita dengan tidak lupa mempertimbangkan latar budaya yang mereka kenal pula. Yang tak kalah penting pula, perlu dipertanyakan kepada pembuat soal ujian masuk perguruan tinggi mengapa soalnya sama untuk setiap bidang studi, baik eksakta maupun noneksakta? Mungkinkah soal-soal UMPT, baik negeri maupun swasta, dibedakan antara yang eksakta dan tidak, agar pertanyaan yang menyangkut apresiasi sastra dimungkinkan ada sehingga tiada alasan lagi untuk berkilah bahwa soal yang bersifat apresiatif tak pernah dijumpai dalam soal ujian masuk perguruan tinggi. Di samping itu semua, upaya yang sangat perlu segera dilakukan adalah memperbanyak buku-buku sastra atau menerbitkan antologi, baik prosa maupun puisi, dalam jumlah yang cukup agar dapat didistribusikan di sekolah-sekolah sehingga keluhan tiadanya buku, tidak ada, atau minimal dikurangi. Semoga itu semua terealisasi dalam PJPT II dengan Kurikulum 1994 sebagai titik awalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. 1993. "Metodologi Pengajaran Sastra Konsep Dasar dan Prosedur Penerapannya". Makalah Lokakarya Pengajaran Sastra Guru SD, SMTP, SMTA. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- Damono, Sapardi Djoko. 1983. *Kesusastraan Indonesia Modern Beberapa Catatan*. Jakarta: Gramedia.
- , 1987. "Sumbangan Sastra terhadap Pembinaan, Pengembangan, dan Pengajaran Bahasa". *Horison*, No. 12 Tahun XXII Desember.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1987. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) GBPP Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- , 1985. *Petunjuk Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jakarta: Proyek Pemantapan Implementasi Kurikulum, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Gani, Rizanur. 1980. "Pengajaran Apresiasi Puisi". *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. Tahun VI, No. 3.
- , 1988. *Pengajaran Sastra Indonesia Respons dan Analisis*. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kayam, Umar. 1981. *Seni, Tradisi, Masyarakat*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Moehammad, Gunawan. 1993. "Dengan Minoritas yang Tak Tepermanai" *Horison*, No. 7 Th. XXVII. Juli.
- Murgiyanto, Sal. 1993. "Tari Indonesia 1990-1993: 'Hanoman Naik Vespa'", *Horison*, No. 7 Th. XXVII. Juli.
- Oemarjati, Boen Sri. 1978. "Pengajaran Sastra dan Pembinaan Apresiasi Sastra". Makalah Kongres Bahasa Indonesia III. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1980. "Pengajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Lanjutan Atas: Keakraban Guru-Murid dengan Karya Sastra". *Majalah Pembinaan Bahasa Indonesia*. 1.3.
- , 1983. "Pengajaran Sastra dan Peningkatan Buku Teksnya". Makalah Pameran Buku Indonesia. Juli.
- , 1988. "Pembinaan Apresiasi Sastra dalam Proses Belajar Mengajar". Makalah Bulan Bahasa IKIP Jakarta. Oktober.
- Rusyana, Yus. 1982. *Metode Pengajaran Sastra*. Bandung: Gunung Larang.

- . 1988. "Pengajaran Sastra Indonesia di SMA". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sastrowardojo, Subagio. 1988. "Mengatasi Kekosongan Hidup Sastra". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sumardjo, Jakob. 1988. "Masalah Pemasyarakatan Sastra". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 1979. *Novel Indonesia Mutakhir Sebuah Kritik*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- . 1993. "Mengajarkan Perkembangan Sastra Indonesia Lewat Apresiasi Sastra". Makalah Lokakarya Pengajaran Sastra Guru SD, SMTP, SMTA. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- Soemanto, Bakdi. 1993. "Apresiasi Sastra di SMA Proses Belajar untuk Lebih Jujur". *Kompas*, 11/2.
- Supangkat, Jim. 1993. "Seni Rupa Kontemporer, Sebuah Risiko". *Horison*. No. 7 Th. XXVII. Juli.
- Syafi'ie, Imam. 1993. "Problematika Pengajaran Apresiasi Sastra Indonesia di SMA". Makalah Pilnas V HISKI. Bogor: HISKI dan Fakultas Sastra Universitas Pakuan.
- Rustapa, Anita K. 1993. "Penyuluhan Sastra: Salah Satu Upaya Peningkatan Apresiasi Sastra". Makalah Pilnas V HISKI. Bogor: HISKI dan Fakultas Sastra Universitas Pakuran.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Upaya Meningkatkan Apresiasi Sastra Siswa Lewat Pengajaran Sastra di SMA
Pemakalah : B. Rahmanto
Pemandu : Tresnati S. Sholichin
Pencatat : Suryo Handono
Sri Mulyati

TANYA JAWAB

1. Pertanyaan: Epon Kurniasih, SMA Negeri 9 Bandung

Bagaimana seandainya guru bahasa Indonesia yang sekaligus guru sastra mengubah kurikulum yang menekankan karya sastra angkatan 45 menjadi karya sastra baru agar siswa tidak jenuh dan tertarik mengapresiasi sastra.

Jawaban:

Kita tidak perlu mengubah kurikulum itu karena sudah disusun Kurikulum 94 yang lebih menekankan pada apresiasi. Di samping itu, kita perlu mengubah cara atau sistem, yaitu dengan mengajarkan apa (sastra) yang dekat dengan budaya anak didik, dalam arti dapat menggunakan hasil karya sastra baru sebagai objeknya.

2. Pertanyaan: Sutjipto, SMA Negeri 3 Bandar Lampung

Perlukah atau setujuakah pemakalah dengan pengajaran bahasa Indonesia dan sastra agar dipisahkan sesuai dengan keputusan Kongres Bahasa Indonesia VI?

Jawaban:

Tidak perlu adanya pemisahan antara pengajaran bahasa Indonesia dan sastra. Akan tetapi, perlu dicari sistem pengajaran sastra yang cocok dengan budaya siswa.

3. Pertanyaan: Subroto, SMA Negeri 2 Banjarmasin

Dalam pengajaran sastra perlu kita carikan pendekatan karya sastra yang lebih dekat dengan hati daripada otak sehingga dapat lebih memanusiakan manusia (dalam hal ini siswa).

4. **Pertanyaan:** Rangkuti

Perlu dilakukan penyederhanaan sistem penyampaian apresiasi sastra kepada siswa didik tanpa memperhitungkan atau mempermasalahkan jenis ataupun bobot karya sastra itu sendiri.

5. **Pertanyaan:** J.S. Sande, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang

- a. Orang tua harus ikut memotivasi anak terhadap apresiasi sastra.
- b. Perlu penyesuaian alokasi waktu antara pelajaran bahasa Indonesia dan sastra. Bila perlu, alokasi pelajaran bahasa Indonesia sama dengan pelajaran sastra.

Jawaban:

Pada dasarnya saya setuju dengan pendapat tersebut.

PENGKAJIAN BAHASA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Khaidir Anwar
Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Pengkajian bahasa Melayu/Indonesia di luar negeri sudah cukup lama dilakukan. Sewaktu Nurrudin Ar Raniri tiba di Aceh dari India, dia sudah pandai berbicara bahasa Melayu. Ini terbukti karena belum lama tinggal di Aceh dia sudah menulis kitab yang tebalnya lebih dari seribu halaman, suatu pekerjaan yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh orang yang belum mendalam mempelajari bahasa Melayu. Ar Raniri tentulah sudah mempelajari bahasa Melayu di India Selatan sebelum berangkat ke Aceh. Proses belajar-mengajar bahasa Melayu sudah dikenal di India dalam abad kelima belas Masehi.

Pengkajian bahasa Melayu yang dilakukan oleh orang Barat juga sudah cukup lama berlangsung. Dalam tahun 1602, ketua perutusan Kerajaan Aceh yang bernama Abdul Hamid berangkat ke negeri Belanda. Di negeri Kincir Angin itu ia dapat menggunakan bahasa Melayu dengan pejabat-pejabat Belanda, baik melalui penerjemah maupun adakalanya secara langsung dengan orang-orang tertentu. Duta Besar Kerajaan Bantam berangkat ke London beberapa puluh tahun kemudian, dan di ibu kota kerajaan Inggris itu dia berbicara dalam bahasa Melayu dan diterjemahkan oleh penerjemah dari Belanda. Namun, salah seorang dari anggota rombongan itu sudah ada yang bisa berbahasa Inggris.

Dalam tahun 1614 sudah terbit sebuah buku tentang bahasa Melayu di kota London, yang berjudul *Dialogues in the English and Malaiane languages or Certaine Common Formes of Speech, first Written in English, Malaian, and Madagaskar tongues, by the diligence and painfull endeavour of Master Gotardus Arthusius, a Dantisker, and now faithfully translated into the English*. Cukup panjang judul buku itu, tetapi pada masa itu memang orang biasa memberi judul yang panjang pada buku, terutama buku yang dimaksud buku ilmiah.

Para penyebar agama Islam di Nusantara jelas lebih banyak tergantung pada penggunaan bahasa Melayu dalam mengajarkan pemahaman terhadap agama Islam. Sebelum penuntut ilmu menguasai bahasa Arab, mereka diajarkan pengetahuan agama

melalui salah satu bahasa di Nusantara, tetapi terutama bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebelum agama Islam masuk pun sudah dipakai *lingua franca* dalam perniagaan yang mulai ramai di Asia Tenggara semenjak zaman Kerajaan Sriwijaya. Apakah agama Hindu, dan kemudian agama Buddha, disebarkan juga terutama melalui bahasa Melayu, tidak dapat kita pastikan, tetapi sekurang-kurangnya bahasa Melayu sudah dipakai sebagai salah satu bahasa pengantar. Orang-orang Melayu yang belajar agama Hindu-Buddha pasti memakai bahasa Melayu di samping bahasa-bahasa lain.

Sampai di abad ketujuh belas di Eropa, orang-orang berilmu biasanya sangat menghargai bahasa Latin dan cenderung kurang menghargai bahasa ibunya sendiri. Penyair Inggris John Dryden diberitakan menulis karya-karya pentingnya lebih dahulu dalam bahasa Latin dan kemudian baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Menurutnya, bahasa Inggris belum dapat diandalkan sebagai alat menyatakan pikiran-pikiran yang sudah canggi.

Namun, seperti kita lihat di atas, pada masa itu sudah ada orang yang tertarik dalam mempelajari bahasa Melayu. Kita boleh mengatakan bahwa mereka mempelajari bahasa Melayu semata-mata hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan dalam bentuk materi. Andaikata ini seluruhnya benar, sikap seperti itu dapat dipahami. Akan tetapi, bila kita memperhatikan karya-karya mereka tentang pengkajian bahasa Melayu, terlihat bahwa motivasinya tidak seluruhnya bersifat materi seperti itu. Semenjak awal-awal sudah terlihat keingintahuan yang lebih mendalam, ketertarikan atas pengkajian suatu bahasa asing eksotik. Dan, sebagaimana yang sering terlihat dari pantulan budaya Barat semenjak zaman Renaissance, terdapat kesungguhan mengkaji sesuatu secara bebas dan mendalam. Manusia mulai membebaskan dirinya dari kungkungan kepercayaan dan tahayul serta prasangka yang berlebih-lebihan. Mereka memandang rendah bahasa Melayu sebagaimana ada mereka yang memandang rendah bahasa ibunya sendiri, tetapi ada pula orang menganggap bahwa bahasa Melayu dan bahasa-bahasa orang kulit berwarna lain pantas pula dipelajari secara sungguh-sungguh. Orang Melayu sendiri sampai abad kesembilan belas banyak yang tidak mau mempelajari bahasa Melayu sebab pada keyakinan mereka Bahasa Arab jauh lebih tinggi. Orang Arab dan orang Islam dulu menganggap bahasa Arab sebagai bahasa yang paling mulia. Mungkin karena alasan itu mereka jarang yang mau mempelajari bahasa Melayu secara sungguh-sungguh.

2. Zaman Penetrasi Barat

Selama hampir tiga ratus tahun semenjak abad keenam belas, orang-orang Barat mula-mula berdagang dan selanjutnya mulai kekuasaan semakin intensif berhubungan dengan bumiputra di Nusantara. Baik orang Portugis, Belanda maupun Inggris semakin merasakan betapa pentingnya menguasai bahasa penduduk yang hendak dikuasainya. Mereka menyadari betul bahwa tidak mudah menguasai seluruh bahasa yang tersebar di antara banyak suku bangsa di kepulauan Indonesia ini. Oleh karena itu, mereka mempelajari bahasa Melayu yang dapat dipakai sebagai *lingua franca*.

Mereka juga menemukan bahwa bahasa Melayu selain relatif mudah dipelajari, juga merupakan bahasa yang bisa dan mudah menerima pengaruh dari bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Tamil, Arab, dan Cina.

Bila para pedagang dan kelompok penguasa ingin mempelajari bahasa Melayu untuk keperluan praktis mereka, para ilmuwan mulai menaruh perhatian dalam mempelajari bahasa Melayu secara lebih bersifat akademik. Sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Eropa terutama Eropa bagian barat memberikan semacam otonomi kepada para ilmuwan untuk mengembangkan kajian mereka. Mereka dibantu secara keuangan dan fasilitas, tetapi urusan mereka tidak dicampuri, baik oleh pemerintah maupun oleh para pengusaha. Di negeri Belanda kelompok militer menaruh minat dalam mempelajari bahasa Melayu dan, untuk itu, mereka mendidik ahli-ahli bahasa yang nanti digunakan sebagai instruktur. Orang Inggris yang kemudian menguasai daerah dan penduduk yang besar dan bermacam-macam mendirikan lembaga-lembaga untuk mempelajari bahasa-bahasa Afrika dan bahasa-bahasa Timur. Pengkajian bahasa Melayu mulai dikembangkan secara bersungguh-sungguh. Sewaktu pemerintah jajahan sudah berdiri secara kokoh, mereka sudah mempunyai ahli bahasa-bahasa Timur. Ahli-ahli bahasa Melayu sudah dihasilkan di negeri Belanda, Inggris, Prancis, dan bahkan juga di negara-negara Skandinavia yang tidak mempunyai jajahan di Asia ataupun di tempat lain.

Di atas sudah disinggung tradisi otonomi ilmu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang di Eropa. Para ilmuwan bahasa mengkaji bahasa Melayu tanpa banyak memikirkan kepentingan perdagangan atau penjajahan, tetapi lebih mengutamakan kepentingan perkembangan ilmu bahasa pada umumnya. Sungguh besar sumbangan para ahli bahasa Melayu di Eropa terutama yang berkebangsaan Belanda dan Inggris dalam mengembangkan pengkajian bahasa Melayu secara ilmiah. Tidak sedikit kamus penting yang diterbitkan, kitab-kitab tentang gramatika, karya-karya tulis tentang filologi, kesusastraan, perbandingan bahasa, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan bahasa Melayu. Ini dapat terjadi terutama karena telah berkembangnya ilmu bahasa modern pertengahan abad kesembilan belas. Kajian filologi Melayu yang dilakukan para ilmuwan bahasa berkebangsaan Belanda, Inggris, Jerman, dan lain-lain mempunyai mutu kelas satu berdasarkan penelitian-penelitian yang amat seksama dan mendalam.

Pada zaman penjajahan, semenjak abad kesembilan belas dan kedua puluh, pusat-pusat kajian bahasa Melayu/Indonesia di negeri Belanda, Inggris, Prancis, dan lain-lain menjadi terkenal karena hasil-hasil karya tulis yang diciptakannya. Cukup banyak ilmuwan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang mula-mula didirikan untuk kepentingan penjajahan. Pengkajian bahasa Melayu secara mendalam tidak dapat melupakan peranan dan kepeloporan yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat yang terkemuka. Saya tidak hendak menyebut nama dalam makalah yang singkat ini. Cukup disebut Universitas Leiden di Belanda, Universitas London di Inggris sebelum perang dunia kedua sebagai pusat kajian bahasa Melayu yang terkemuka di zaman kolonial. Sumbangan utama dari ilmuwan-ilmuwan Barat besar

bila dilihat dari perkembangan pengkajian bahasa Melayu secara ilmiah. Penyusunan kamus dan penulis tata bahasa yang sesuai dengan ilmu bahasa modern tak terbayangkan tanpa usaha-usaha kepeloporan para ilmuwan barat tersebut. Namun, saya ingin menekankan di sini bahwa hampir tak ada ilmuwan bahasa Barat yang tidak mempunyai guru orang Melayu/Indonesia. Raffles belajar bahasa Melayu kepada orang Melayu, begitu pula ahli-ahli bahasa Melayu/Indonesia di kemudian hari mula-mula diajar oleh guru Melayu/Indonesia. Memang kadang-kadang orang Barat agak degil bila diajar oleh orang Melayu, seperti dilaporkan oleh Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi. Akan tetapi, murid degil itu ternyata kemudian tidak menjadi ahli bahasa Melayu yang terkemuka. Saya diberi tahu oleh Profesor Drewes bahwa beliau selalu atau cenderung mengikuti pendapat guru-guru bahasa Melayu atau koleganya orang Melayu, dalam hal ini orang Melayu Minangkabau, bila menentukan mana yang benar dan mana yang salah mengenai suatu bentuk kata atau kalimat dalam bahasa Melayu. Seperti diketahui, Profesor Drewes dulunya adalah direktur Balai Pustaka.

3. Zaman Kemerdekaan

Pengkajian bahasa Indonesia menjadi amat penting di luar negeri setelah Indonesia menjadi negara merdeka. Ini karena, dalam Undang-undang Dasar negara kita, bahasa Indonesia yang dulu berasal dari bahasa Melayu menjadi bahasa negara, bahasa resmi di Republik Indonesia ini. Jadi, jelas terlihat bahwa politik sangat besar pengaruhnya pada bahasa dan sebagai kelanjutannya pada kajian bahasa. Ilmuwan bahasa tidak dapat mengingkari hal ini walaupun barangkali satu dua orang ada yang tidak setuju dengan pendapat ini.

Semenjak mulai kedatangan bala tentara Jepang di Nusantara, kedudukan bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Ini adalah sebagai akibat politik bahasa penguasa Jepang yang ingin memaksakan pemakaian bahasa Jepang di daerah-daerah yang sudah dikuasainya. Orang Jepang itu menyadari bahwa penggantian bahasa itu memerlukan masa tenggang, dan dalam masa tenggang itu di Indonesia dan Malaya bahasa Melayu berperan sebagai pengganti bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Bahasa Jepang diajarkan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Administrasi pemerintahan dilaksanakan terutama melalui penggunaan bahasa Melayu. Akibat langsung dari peristiwa ini ialah meningkatnya pengkajian bahasa Melayu di luar negeri, yaitu di Jepang dan di negara-negara sekutu, terutama di Belanda. Orang Belanda bermaksud kembali ke Indonesia sebagai penguasa yang akan berhadapan dengan bangsa Indonesia yang secara intensif mulai menggunakan bahasa Melayu/Indonesia sebagai salah satu akibat kebijakan politik bahasa pemerintah militer Jepang.

Semenjak tahun 1950 Republik Indonesia sudah mendapat pengakuan internasional. Pengkajian bahasa Indonesia tambah berkembang termasuk di Amerika Serikat, Rusia, Australia, dan di beberapa negara lain. Salah satu ciri pengkajian bahasa pada tahun lima puluhan ialah kuatnya dominasi linguistik struktural dalam kajian bahasa.

Jika dilihat dari perkembangan kajian bahasa Indonesia, baik di luar maupun di dalam negeri, tampak bahwa para ahli kajian bahasa Indonesia agak terlambat kena pengaruh aliran linguistik modern tersebut. Baik di Leiden maupun di London, bahasa Indonesia dipelajari secara tradisional saja. Kalau di Leiden, orang mulai mengkaji sastra Indonesia modern di samping sastra lama, di SOAS Universitas London para peneliti belum menaruh minat pada bahasa atau sastra modern, perhatian ditujukan kepada mempelajari filologi Melayu seperti yang sudah-sudah. Bahkan, di Belanda pada awal tahun lima puluh masih terdapat orang yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu masih bersifat bahasa resmi saja, bahasa pidato dan bahasa anak sekolah.

Akhirnya cahaya linguistik struktural mulai menembus ke dalam pengkajian bahasa Indonesia. Pentingnya bahasa sehari-hari sebagai unsur bahasa yang penting sudah disadari orang juga semenjak lebih awal. Demikianlah, umpamanya, Dr. van Ronkel yang menyelesaikan disertasinya pada tahun dua puluh tujuh memberitakan pengalamannya yang menarik di atas kapal yang membawanya ke Batavia ketika dia akan bertugas sebagai pejabat bahasa di pemerintahan Hindia Belanda. Beliau menggunakan bahasa Melayu klasik dalam membuat pengumuman kepada penumpang kapal yang dalam perjalanan pulang dari tanah suci Mekah. Tak seorang pun yang memberikan reaksi terhadap pengumuman itu sehingga kapten kapal menyuruh seorang kelasi membuat pengumuman. Sang kelasi menggunakan bahasa Melayu rendahan dan semua orang memahaminya dan memberikan reaksi yang cocok.

Setelah linguistik struktural berpengaruh pada ahli bahasa Melayu, timbul berbagai reaksi yang agak negatif dari banyak orang, terutama dari kalangan kaum guru. Banyak orang mengira bahwa linguistik modern membolehkan penggunaan bahasa seenak perut orang yang berbicara. Seperti diketahui, linguistik struktural bersifat deskriptif dan tidak normatif. Jadi, dari sudut pandang pengajaran bahasa Indonesia, baik di luar maupun di dalam negeri, ada baiknya pengaruh linguistik modern terlambat masuknya ke dalam pengkajian bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui, bahasa Indonesia sedang mengalami perubahan yang besar sebagai akibat meluasnya pemakaian bahasa Indonesia. Bila bahasa Indonesia digoyang kaidah-kaidah normatifnya, dikhawatirkan akan timbul kekacauan dalam penggunaan. Para pengkaji asing ingin tahu mana bahasa Indonesia yang benar, mana pula yang tidak benar atau salah. Barang siapa yang terlibat dalam pengajaran bahasa Indonesia kepada orang asing akan menyadari betapa pentingnya pengetahuan normatif mengenai kaidah-kaidah bahasa Indonesia, dan betapa tidak banyaknya sumbangan praktis yang diperoleh dari kajian linguistik struktural dalam bidang ini.

Pengkajian bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka yang dilakukan di berbagai universitas terkenal, baik di Barat maupun di Jepang dan Korea, cukup besar sumbangannya dalam penyebaran bahasa Indonesia di antara orang-orang asing. Andai-kata di luar negeri pengkajian dan pengajaran bahasa Indonesia tidak dilakukan, dapat diduga tingkat penyebaran bahasa Indonesia di antara orang asing tidak akan seluas sekarang. Hal yang tidak kurang pentingnya, gengsi bahasa Indonesia juga dibawa

ke tingkat yang lebih tinggi, dan penulisan tata bahasa serta unsur-unsur kajian bahasa lainnya ikut dipercanggih.

Salah satu ciri pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri sesudah Indonesia merdeka ialah ikut sertanya tenaga pengajar dari Indonesia menjadi staf jurusan bahasa Indonesia di luar negeri, bukan hanya sebagai informan atau asisten dosen, melainkan juga sebagai dosen berkualifikasi penuh. Dalam pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri akhir-akhir ini semakin bertambah pula jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar untuk mencapai gelar yang lebih tinggi di universitas-universitas luar negeri. Para peneliti dari Indonesia itu biasanya ikut memberi sumbangan terhadap pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri dalam bentuk karya-karya tulis dan disertasi yang mereka hasilkan. Mahasiswa Indonesia yang dikirim belajar untuk gelar yang lebih tinggi ke luar negeri, biasanya terdiri dari mahasiswa yang mempunyai prestasi di atas rata-rata mahasiswa dalam negeri karena sudah melampaui seleksi kompetitif yang keras. Mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di universitas luar negeri pada umumnya mempunyai motivasi yang tinggi serta kemampuan akademik yang bagus. Secara kasar dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di SOAS, The University of London, umpamanya, lebih tinggi daripada kemampuan akademik mahasiswa Indonesia yang belajar pada jurusan bahasa Indonesia umpamanya di sebuah universitas di propinsi. Kenyataan ini terbawa ke tingkat pendidikan keserjanaan yang lebih tinggi dengan arti bahwa karya tulis mahasiswa di luar negeri mempunyai bobot yang lebih tinggi dari sudut isi karangan, walaupun di sana-sini terdapat kekurangan-kekurangan penguasaan bahasa secara teknik, seperti salah ejaan, atau salah pemakaian awalan. Pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri cenderung menaruh alergi terhadap penggunaan kata-kata pinjaman dari bahasa-bahasa Barat bila untuk kata yang sama terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, para pemakai bahasa Indonesia di tanah air lebih cepat menggunakan kata pinjaman dari Barat walaupun untuk menyatakan ide yang sama terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia pada umumnya ingin menggunakan kata-kata Indonesia daripada menggunakan kata-kata Barat yang agak dipaksakan masuknya ke dalam bahasa Indonesia. Gejala seperti ini ada baiknya untuk perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri merupakan hal yang positif bagi perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, dan saya hampir tidak melihat hal yang negatif dalam pengkajian bahasa Indonesia oleh para ilmuwan asing. Hal ini jelas berbeda dari suatu sikap berbahasa orang-orang berjiwa kolonial yang bangga menggunakan bahasa Melayu yang buruk bila berbicara kepada penduduk bumiputera. Sikap berbahasa seperti itu datang dari orang-orang yang menganggap bahwa bahasa Melayu hanya pantas dipakai kepada tukang kebun atau jongos. Saya pernah melihat sikap berbahasa seperti itu dari orang Perancis yang bangga benar menggunakan bahasa Inggris yang jelek, baik tentang ucapannya maupun tentang kata-kata, atau aturan bahasa lainnya.

Dalam mempelajari bahasa Indonesia di luar negeri terlihat menonjol kemampuan yang ditunjukkan oleh orang Belanda dan Jerman bila dibandingkan, umpamanya, dengan orang Inggris. Secara umum dapat dikatakan bahwa prestasi mahasiswa Amerika dalam menguasai bahasa Indonesia lebih di bawah sedikit daripada prestasi mahasiswa Eropa Barat, lebih-lebih kalau mahasiswa Amerika tadi belum pernah mempelajari bahasa asing secara baik.

Dalam mengkaji bahasa Indonesia di luar negeri akhir-akhir ini terlihat kemajuan-kemajuan dalam berbagai aspek pengajaran bahasa. Kita di Indonesia mungkin kurang menyadari masalah lafal bahasa Indonesia yang baik, baik banyak orang Indonesia yang tidak dapat latihan khusus dalam melafalkan bahasa Indonesia yang baik. Oleh karena pengajaran bahasa Indonesia merupakan pengajaran bahasa asing di luar negeri, seperti di Australia, perhatian sudah diberikan kepada pelatihan pengucapan bahasa Indonesia yang baik. Sebagai model, dipilih instruktur yang berasal dari Indonesia dan penggunaan laboratorium bahasa sudah merupakan suatu keharusan. Ini nantinya dapat berdampak positif terhadap usaha pembinaan bahasa Indonesia dalam aspek pengucapan. Para penyiar radio luar negeri dalam bahasa Indonesia juga memilih penyiar yang dianggap mempunyai ucapan bahasa Indonesia yang baik dan terlihat bahwa asal suku si penyiar diperhatikan pula. Radio luar negeri yang besar-besar cenderung memilih para penyiar dari berbagai suku bangsa Indonesia. Pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri belum terlihat membahas masalah ini dengan serius, tetapi nanti mungkin akan mengarahkan pula penelitiannya dengan masalah penyiar-penyiar radio. Di Rusia pada waktu yang baru lalu penyiar cenderung diambil dari antara orang Rusia sendiri.

Walaupun pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri sudah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap bahasa Indonesia modern, kekuatan penelitian di luar negeri, di pusat-pusat kajian Indonesia yang terkemuka, seperti Leiden dan London, masih menonjol di bidang filologi. Ini terutama disebabkan tersedianya ahli-ahli yang cukup dan tidak kurang pentingnya tersedianya manuskrip Melayu di perpustakaan universitas serta di perpustakaan kajian Timur lainnya. Kalau boleh kita singgung sedikit, bidang filologi di Tanah Air masih agak lemah karena langkanya terdapat manuskrip yang akan dipelajari, terutama di universitas-universitas biasa di luar Universitas Indonesia dan Gadjah Mada.

Pengkajian bahasa Indonesia, terutama di Tanah Air, mengalami banyak kendala untuk mempelajari etimologi bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui, perbendaharaan kata bahasa Indonesia amat diperkaya dengan masuknya kata-kata yang berasal dari bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Inggris, dan Belanda. Kamus besar yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa tidak menyinggung sama sekali asal-usul kosakata bahasa Indonesia. Di bidang etimologi ini sumbangan pengkajian Bahasa Indonesia di Eropa besar sekali karena mulai tahun 1973 telah berdiri *Indonesian Etymological Project* yang melibatkan para ahli di Paris, Napoli, dan London, dan semenjak tahun 1977 masuk pula para ahli dari Leiden. Proyek penting itu telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya, antara lain, kata-kata Indonesia yang

berasal dari bahasa Arab, kata-kata yang berasal dari Bahasa Belanda dan Eropa, dan tulisan-tulisan lain. Anggota panitia etimologi itu terdiri Denys Lombard dari Paris, Luigi Santa Maria dari Napoli, C.D. Grijns dari Leiden, Russell Jones dari London. Publikasi yang telah mereka hasilkan mempunyai nilai akademik yang amat tinggi dan jelas amat berguna bagi para peneliti leksikon Indonesia. Mereka juga merencanakan penyusunan *Kamus Etimologi Indonesia* yang lengkap dan, untuk keperluan ini, para ilmuwan terkemuka, seperti J.G. de Casparis dari Leiden, J.C. Anceaux juga dari Leiden, G.E. Marrison dari London, serta Bausani dari Roma. Semua ini dengan jelas menunjukkan kesungguhan para ilmuwan di Eropa dalam meningkatkan kegiatan pengkajian bahasa Indonesia. Para peneliti dari Indonesia tidak akan rugi bila dapat mengambil manfaat dari ilmuwan Eropa tersebut di samping akan dapat pula memberikan sumbangan pengetahuan terhadap proyek tersebut.

Pengkajian bahasa Indonesia di Eropa dan luar negeri pada umumnya terbantu pula dengan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia kepada orang asing, seperti yang sudah berjalan di beberapa universitas di Indonesia. Di Fakultas Sastra Universitas Andalas, umpamanya, telah berlangsung kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa Belanda selama enam tahun berturut-turut dan diharapkan akan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Di Rusia pengajaran dan pengkajian bahasa Indonesia dilakukan secara sangat baik. Ilmuwan bahasa Indonesia kadang-kadang menyumbangkan artikel-artikel yang bermutu, yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik pada jurnal seperti *Archipel* yang terbit di Paris. Di Australia pengajaran bahasa Indonesia diberikan pula di sekolah menengah sebagai mata pelajaran pilihan. Menurut berita, jumlah siswa yang memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing cukup banyak. Ini tentu dapat dimengerti mengingat Indonesia adalah sebuah negara tetangga Australia. Dewasa ini orang Indonesia yang berurusan ke kantor penerbangan Qantas, umpamanya, di kota London, atau kota besar dunia lainnya jangan heran bila dilayani atau disapa oleh petugas yang ternyata bisa berbicara bahasa Indonesia.

4. Beberapa Masalah

Seperti kita ketahui, sebuah negara yang sudah maju ingin mengajarkan bahasanya ke negara asing. Untuk keperluan itu, didirikan badan seperti *Goethe Institut* untuk penyebaran bahasa dan kebudayaan Jerman, *The British Council* yang mempromosikan bahasa Inggris, *Alliance Francaise* yang menyebarkan bahasa Perancis. Pada negara yang tidak mempunyai badan-badan seperti itu, biasanya kedutaannya ikut membantu mengajarkan bahasanya di negeri asing. Kedutaan Jepang, misalnya, banyak bantuannya dalam mengajarkan bahasa Jepang di luar negeri, negeri Mesir sering mengirimkan dosen Bahasa Arab ke luar negeri. Dalam hal ini, setahu saya, Pemerintah Indonesia belum berbuat banyak. Lembaga-lembaga swasta yang bersifat otonomi pun tidak ada untuk keperluan ini. Orang Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri pada umumnya kurang mendapat bantuan dari

Pemerintah Indonesia. Kedutaan Indonesia di luar negeri tidak melihat perlunya membantu tenaga pengajar Indonesia di luar negeri baik dalam bentuk buku-buku atau dalam bentuk-bentuk lain. Sebaliknya kadang-kadang terlihat bahwa bantuan itu seolah-olah diperlukan oleh kedutaan dari guru-guru bahasa Indonesia untuk kepentingan pekerjaan kedutaan. Memang semua itu tentu secara sukarela, tidak ada paksaan, dan sama sekali tidak memberatkan buat dosen-dosen Indonesia yang bertugas di luar negeri. Saya cenderung berpendapat bahwa kedutaan sebaiknya memberikan bantuan ala kadarnya dalam memajukan pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri.

Pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri menghendaki tenaga pengajar dari Indonesia yang berpengetahuan luas di samping mempunyai keahlian di bidang kajian bahasa Indonesia pada khususnya, dan kajian bahasa pada umumnya. Selanjutnya, pengajar dituntut menguasai sekurang-kurangnya bahasa Inggris serta dasar-dasar peradaban Barat yang memadai. Pengajar bahasa Indonesia diharapkan bergaul dan bertukar pikiran dengan dosen-dosen di universitas tempat dia mengajar, bukan hanya dengan dosen bahasa Indonesia, tetapi juga dengan para akademikus di bidang humaniora dan ilmu sosial pada umumnya. Ini perlu bila dia ingin dihargai sebagai orang akademik, baik oleh mahasiswanya maupun oleh para koleganya. Persyaratan ini mungkin dirasakan berat buat kebanyakan dosen pengajar bahasa Indonesia di Tanah Air. Akan tetapi, mengingat cukup banyaknya tempat tersedia untuk mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, barangkali kita sudah harus memikirkan pemecahan masalah ini.

Seorang dosen ilmu humaniora atau ilmu sosial di universitas di Eropa atau Amerika biasanya amat banyak bacaannya dan luas serta dalam ilmunya. Bila dosen bahasa Indonesia kurang kuat latar belakang ilmunya, seperti disinggung di atas, secara pribadi dia mungkin akan menderita sebagai orang universitas, dan ini akan mempengaruhi mutu pengajarannya. Di waktu yang sudah-sudah banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dari Indonesia yang latar belakang pendidikannya adalah bidang bahasa Inggris atau bahasa barat modern lainnya. Hal seperti ini tentu ada cacatnya sebab berkemungkinan penguasaan kajian bahasa Indonesiannya agak lemah. Seorang yang berlatar belakang seperti itu dituntut untuk belajar sendiri dalam meningkatkan penguasaannya terhadap kajian bahasa Indonesia dengan segala alat bantu. Jadi, ini juga jadi masalah dan seharusnya kita carikan penyelesaiannya.

Hal lain yang bisa juga menjadi kendala ialah masalah karier dalam negeri. Seorang ahli dari Indonesia yang sudah berprestasi baik di universitas luar negeri, bila kembali ke Indonesia, mungkin akan menemui kesulitan dalam kepangkatannya. Pada umumnya dosen di Indonesia diangkat dari pangkat terbawah, dan jarang ada kemungkinan menempatkan seorang ahli yang sudah di pertengahan karier. Saya sudah mendengar cerita entah benar entah tidak bahwa seorang yang sudah menjadi *associate professor* di sebuah universitas di luar negeri setelah pulang ke Indonesia hanya ditawari pangkat golongan tiga a. Ini tentu amat menyedihkan. Barangkali juga harus dicari cara mengatasinya. Mudah-mudahan.

Mengenai ragam bahasa Indonesia mana yang akan diajarkan, kadang-kadang menimbulkan masalah juga. Di Universitas Cornell di Amerika Serikat diterbitkan buku pelajaran bahasa Indonesia yang menitikberatkan penggunaan ragam bahasa Jakarta. Ini baik juga tapi kadang-kadang ragam tersebut sulit dipahami orang di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Namun, pemilihan ragam tersebut dapat mengimbangi buku-buku lain yang juga dipakai di Eropa yang terlalu berorientasi Melayu. Seorang pengajar bahasa Indonesia di luar negeri jelas dituntut menguasai berbagai ragam bahasa Indonesia, serta mempunyai pengetahuan sosiolinguistik. Harus diingat bahwa ragam bahasa Indonesia itu, bila digunakan pada waktu atau tempat tertentu atau suasana tertentu yang sesuai, tak ada ragam yang salah. Hal yang mengenai penggunaan awalan dan akhiran sering menjadi persoalan bagi pelajar bahasa Indonesia di luar negeri, dan guru cenderung memberikan keterangan secara linguistik saja dengan melupakan unsur sosiolinguistik yang tidak kurang pentingnya.

Demikianlah uraian saya tentang pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri. Terima kasih.

CATATAN

Mengenai sejarah pengkajian bahasa Indonesia di luar negeri, saya banyak memperoleh informasi dari Dr. Russell Jones, pakar filologi Melayu dari Inggris, yang telah banyak mengadakan penelitian tentang perkembangan pengkajian Indonesia/*Malay Studies in Europe*. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau.

KEPUSTAKAAN

- Berg, C.C. 1951. *De Problematiek van Het Bahasa Indonesia Experiment*. Groningen-Jakarta.
- Bodenstedt, Adolf Andreas. 1951. *Sprache und politik in Indonesien Entwicklung und Funktion einer neuen Nationalsprache*. Hannover
- Drewes, G.W.J. 1966. *De Biografie van Een Minangkabausen Peperhandelaar in de Lampongs*. S'Gravenhage, Martinus Nijhoff.
- Emeis, M.G. 1945. *Vorm en Functie in Klassiek en Modern Maleisch- de Verbale*. Constructies, Utrecht.
- Grijns, C.D. JW de Fries and Luigi Santa Maria: 1983. *European Loan-words in Indonesian*, KITLV. Leiden.
- Hoed, Benny. 1973. "La politique linguistique ses problemes dan une Indonesie." Dalam *Archipel* No. 5. Paris.
- Johns, Yohani. 1985. "Politeness in the Indonesian Language-Knowing the right thing to say." *The Indonesia Circle* No. 38. London.
- Jones, Russell. 1982. "The first Indonesian mission to london," *The Indonesia Circle*, No. 28. London.
- Murphy, M.J. 1968. "The Influence of some Western Languages on Modern Bahasa Indonesia." Disertasi Ph.D. pada Universitas London.
- Mulyadi, S.W.R. 1983. *Hikayat Indraputra: A Malay Romance*. KITLV. Leiden.
- Reijn, E. van. 1983. "Amir Hamzah and Hamzah Fansuri." *The Indonesia Circle*. No. 32. London.
- Sutherland, Heather. 1983. "Indonesia Studies and Sources on Indonesia in the Netherlands." *The Indonesia Circle*, No. 31. London.
- Teeuw, A. 1972. "The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature" Dalam *BSOAS*, volume XXXV. London.
- Watson, C.W. 1972. *The Sociology of Indonesia Novel 1920-1955*. University of Hull, Hull.
- . 1982. "A New Introduction to Modern Indonesian Literature." Dalam *The Indonesia Circle*, No. 29. London.

PENINGKATAN PERAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ASING

Soenjono Dardjowidjojo
Universitas Katolik Atma Jaya

1. Pendahuluan

Waktu diminta menulis mengenai topik ini, saya mempunyai perasaan yang bercampur: di satu pihak, saya memang orang yang mempunyai banyak pengalaman mengajarkan bahasa Indonesia (BI) di luar negeri, tetapi di pihak lain, sudah lebih dari sepuluh tahun saya menjadi mantan dalam bidang ini sehingga rasanya sudah tidak terlalu mutakhir lagi. Kendala yang kedua, bahan-bahan literatur untuk topik ini juga sangat langka karena memang pada umumnya orang hanya mendeskripsikan pengajaran BI di negara masing-masing (lihat, misalnya, Chung, 1988; Kwee, 1988; Liang, 1988; Shigeru, 1988; Soedjiarto, 1988; Soemarmo, 1988—yang semuanya disajikan dalam kongres yang lalu). Oleh karena itu, saya akan banyak melandaskan makalah ini pada pengalaman atau pengetahuan masa lalu dan mencoba meninjaunya secara makro terutama dari empat segi yang diminta oleh panitia: (1) gambaran singkat tentang peran pengajaran BI sebagai bahasa asing, (2) tujuan pengajaran sebagai upaya menginternasionalkan BI atau penyebaran budaya Indonesia, (3) kendala yang dihadapi, dan (4) langkah ke depan yang perlu diambil.

2. Sekilas Peran Pengajaran Bi sebagai Bahasa Asing

Kalau ditinjau dari segi penyebarluasannya, BI sebagai bahasa asing telah diajarkan hampir di seluruh benua. Hampir tiap kontinen memiliki institusi yang mengajarkan bahasa ini. Di negara Amerika, misalnya, terdapat sembilan universitas yang mengajarkan BI; di Jerman ada lebih dari enam (Soedjiarto, 1988); di Jepang ada dua puluh delapan (Shigeru, 1988); di Australia bahkan BI diajarkan tidak hanya di tingkat universitas, tetapi sudah meresap ke SLTA. Dalam program yang dinamakan LOTE (*Languages Other Than English*), BI merupakan salah satu dari enam bahasa asing yang bisa dipilih.

Di Selandia Baru dua universitas terkemuka, Victoria dan Auckland, mengajarkan BI, dan cukup banyak pula SLTA yang mengajarkannya meskipun masih berupa

kegiatan ekstrakurikuler. Secara periodik politik juga menyelenggarakan kursus-kursus pendek BI untuk kelompok-kelompok tertentu. Universitas juga mengajarkan BI pada malam hari untuk anggota masyarakat yang berminat.

Jumlah mahasiswa pada umumnya tidak dapat dikatakan besar, kecuali di negara-negara tertentu yang berdekatan dengan negara kita. Kelas rata-ratanya kecil, berkisar antara lima sampai dengan dua puluh orang. Karena jumlah yang kecil ini, jumlah dosennya pun terbatas pula—umumnya terdiri dari pengajar setempat dengan penutur asli Indonesia. Pada umumnya pengajar yang bukan penutur asli memiliki gelar akademik yang tinggi, yakni Ph.D., sedangkan penutur aslinya kebanyakan tidak memiliki gelar ini.

Di kebanyakan negara tempat BI diajarkan, bahasa ini umumnya diajarkan sebagai alat keterampilan dan sebagai ilmu. Bila sebagai ilmu, bahasa ini mempunyai status sebagai salah satu jurusan di universitas tersebut untuk memperoleh suatu gelar. Hal ini berbeda dengan di Amerika yang umumnya BI semata-mata diajarkan sebagai alat keterampilan belaka. Tidak ada, misalnya, orang yang mendapat gelar B.A., M.A., atau Ph.D. dalam bidang BI di Amerika.

Buku-buku teks ditulis, baik oleh orang asing maupun oleh orang Indonesia, dan hampir semuanya berdasarkan metode audiolingual (lihat White, 1989). Pada saat ini buku untuk tingkat pemula dan menengah sudah ada beberapa pilihan (antara lain, Danoesoegondo, 1976; Dardjowidjojo, 1978; Hilgers-Hesse, 1970; Y. Johns, 1978; Sarumpaet, 1977; Wolff, 1980), tetapi untuk tingkat lanjut baru ada satu dua buah saja (Dardjowidjojo, 1983; Wolff, 1978).

3. Tujuan Pengajaran Bahasa Indonesia

Seperti dinyatakan di atas, ada dua macam tujuan pengajaran BI di mancanegara: (a) untuk keperluan pamrih (*utilitarian*) dan (b) untuk peningkatan ilmu pengetahuan bahasa dan sastra Indonesia. Keperluan pamrih memfokuskan pengajaran hanya sebagai alat belaka untuk mencapai tujuan yang lain. Hampir semua universitas di Amerika dan sebagian di Jepang, mengajarkan BI untuk tujuan seperti ini. Hal ini tampaknya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu yang terkuat di antaranya adalah bahwa minat kaum intelektual di negara tersebut terbatas pada kebutuhan jangka pendek. Para pembelajar, yang sebagian besar adalah mahasiswa pascasarjana, memerlukan BI semata-mata sebagai piranti dalam upaya mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lain, seperti pekerjaan di instansi internasional atau diplomatik, data-data untuk riset mereka, pengetahuan mengenai tata budaya bangsa Indonesia, atau hal-hal lain yang sifatnya penting. Kalau pun ada yang berminat pada bahasa atau sastra Indonesia, minat itu berupa produk sampingan seperti terjemahan novel atau cerpen (lihat, misalnya, Morgan, 1975; Dardjowidjojo & Lamoureux (Ed.), 1983) atau tesis dan disertasi bidang linguistik dengan BI sebagai bahasa yang dianalisis (misalnya, Ikranagara, 1975; Rose, 1970).

Di luar negara Amerika tampaknya pembelajaran BI sebagai bahasa asing lebih mengarah pada pendalaman pengetahuan mengenai bahasa atau sastra Indonesia. Universitas-universitas yang berbobot di Jepang, misalnya, mengajarkan BI tidak hanya sebagai keterampilan, tetapi juga sebagai ilmu untuk memperoleh gelar, yang umumnya masih pada tingkat sarjana (B.A.) (Shigeru, 1988). Oleh Karena itu, status BI sejajar dengan bidang-bidang lain juga dan mahasiswanya pun mahasiswa tingkat sarjana (*undergraduate*). Hal yang sama juga kita temukan di kebanyakan universitas di Australia dan Selandia Baru (Kwee, 1988).

Barangkali "kota sucinya" pengajaran bahasa Indonesia, terutama sastranya, ada di Leiden karena universitas ini tidak hanya merupakan universitas tertua yang mengajarkan bahasa ini, tetapi juga memiliki tenaga-tenaga ahli yang menjadi semacam "empu" studi susastra. Di samping itu, sampai akhir-akhir ini, Leiden, melalui ILDEP-nya, juga merupakan tempat bahasawan dari Indonesia mematangkan diri untuk menyelesaikan gelar doktor mereka.

Dengan tersebarluasnya BI diajarkan di pelbagai mancanegara, banyak orang yang lalu mengharapakan bahwa BI suatu saat akan menjadi bahasa Internasional. Karena harapan ini didambakan oleh kita semua, marilah kita lihat kemungkinan itu dari pelbagai segi.

Pertama-tama, kita kaji dahulu pengertian "internasional" dalam kaitannya dengan bahasa. Kalau bahasa "internasional" diartikan sebagai bahasa yang dipakai di dua (atau lebih) negara yang merdeka, BI jelas sudah menjadi bahasa internasional karena pada saat ini saja BI, dalam berbagai variasinya, sudah dipakai di empat negara ASEAN. Akan tetapi, kalau "bahasa internasional" ini diartikan sebagai bahasa yang dipakai pula oleh sejumlah besar penutur tak-asli agar bisa menjalin komunikasi internasional (Brumfit, 1982), BI belum mencapai tingkat tersebut.

Kalau kita menengok sejenak sejarah pertumbuhan bahasa Inggris yang umumnya telah dianggap sebagai bahasa internasional, benar sekali pernyataan Brumfit (1982:1) bahwa ada tiga unsur yang menyebabkan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional: (1) imperialisme negara Inggris pada abad ke-19 yang sangat luas (ingatlah akan pepatah *Britain rules the waves*), (2) pengaruh ekonomi Amerika pada abad ke-20 yang dominan, dan (3) jumlah penutur tak-asli yang memakai bahasa ini yang besar.

Sejarah Indonesia memang menunjukkan bahwa kita pun pernah *rules the waves* pada masa keemasan Sriwijaya dan Majapahit, tetapi supremasi ini mendahului adanya suatu bahasa nasional seperti BI ini. Dengan demikian, supremasi kerajaan-kerajaan kita tidak dibarengi dengan penyebaran BI kecuali dalam bentuk *lingua franca* di pelbagai daratan dekat pantai. Di samping itu, cakupan supremasi ini tidak cukup luas sampai ke benua-benua lain di luar Asia.

Dari segi pengaruh ekonomi dan teknologi, kiranya tidak perlu dibicarakan bagaimana negara adikuasa seperti Amerika dan negara-negara berbahasa Inggris lainnya mendominasi negara-negara berkembang. Karena perkembangan ekonomi dan teknologi menyangkut pula wahana yang dipakai untuk menyampaikannya, dan

wahana tersebut adalah bahasa Inggris, bahasa ini boleh dikatakan secara otomatis menjadi bahasa antarnegara. Demikian pula kemajuan ilmu pengetahuan dunia pada saat ini dikuasai oleh literatur yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris. Tidak usah terlalu jauh kita memandang, dari program magister dan doktor dalam bidang mana pun di Indonesia dewasa ini, persentase bahan perkuliahan hampir 100% masih terdapat dalam bahasa Inggris.

Kekuatan ekonomi, teknologi, dan ilmu ini masih perlu pula didukung oleh dominasi politik karena hanya negara yang ekonomi, teknologi, dan ilmunya kuatlah yang dapat berbicara banyak dalam penentuan banyak ihwal keduniaan. Kenyataan yang sekarang ada, betapa pun pahitnya, menunjukkan bahwa negara-negara adikuasalah yang boleh dikatakan menentukan warna serta arah politik dunia. Negara-negara berkembang harus membentuk persekutuan bersama terlebih dahulu sebelum mereka bisa ikut menyuarakan pandangannya. Itu pun tidak mudah.

Jumlah penutur asli Inggris tahun 1983 diperkirakan ada 300.000.000 orang dan jumlah penutur tak-aslinya dikatakan "jauh melebihi penutur aslinya" (Claiborne, 1983:1). Para penutur tak-asli ini memakai bahasa Inggris dalam hubungan internasional mereka. Bahasa Inggris telah menjadi *lingua franca* bagi ilmuwan, pilot, dan pengontrol lalu lintas udara semua negara.

Dari gambaran di atas tampaklah bahwa naiknya peringkat suatu bahasa menjadi bahasa internasional ditopang oleh pelbagai faktor, yang kebanyakan terdiri atas faktor luar linguistik. Dari segi ini saja, kalau BI ditargetkan untuk menjadi bahasa internasional, prasarana-prasarana yang disebutkan di atas perlu diperhatikan benar dan dipupuk untuk tumbuh.

Masalah lain untuk BI menjadi bahasa internasional datang dari keadaan sosio-politik masing-masing negara. Kalau cakupan kita sementara ini kita batasi pada negara-negara ASEAN saja, secara formal sebenarnya BI telah menjadi bahasa internasional karena di Brunei dan Malaysia BI dalam variasinya masing-masing bahkan telah menjadi bahasa nasional mereka. Di Singapura BI dalam bentuknya tersendiri merupakan pula salah satu bahasa resmi mereka.

Meskipun demikian, sejarah sosio-politik negara-negara ini sangat berbeda dengan Indonesia sehingga, kalau kita berbicara soal bahasa nasional sebagai bahasa tunggal untuk berkomunikasi antarkelompok etnis dan dalam pendidikan tinggi, hanya Indonesialah yang telah berhasil memiliki bahasa nasional dalam arti yang sebenarnya (lihat Dardjowidjojo, 1981). Di negara-negara tetangga kita sedikit banyak masih ada kecemburuan sosial antarkelompok etnis untuk secara sepenuh hati mendukung tumbuhnya bahasa nasional yang bukan bahasa etnis mereka. Di samping itu, ada pula semacam kekhawatiran politis dari pelbagai kelompok etnis bila ada bahasa kelompok etnis lain yang dijadikan bahasa nasional. Begitu besarnya kekhawatiran ini sehingga mendorong cendekiawan Filipina, Leonardo Mercado, untuk menyarankan BI sebagai bahasa nasional Filipina hanya demi untuk menghindari terpilihnya Tagalog (atau bahasa etnis lain) menjadi bahasa nasional mereka (Mercado, 1972). Dari

segi ini, menargetkan BI (dengan variasinya masing-masing) menjadi bahasa internasional di ASEAN juga masih menghadapi pelbagai kendala yang sifatnya internal di negara-negara yang bersangkutan.

Kalau sekarang kita lihat kurikulum pengajaran BI sebagai bahasa asing di pelbagai negara, akan tampak bahwa tujuan utama mereka adalah untuk mengajarkan (a) keterampilan, atau (b) keterampilan dan ilmu bahasa dan susastra Indonesia. Karena bahasa tidak lepas dari budaya, secara otomatis pengajaran BI sebagai bahasa asing menyangkut pula pelimpahan budaya. Di perguruan tinggi tempat BI diajarkan biasanya ada pula mata kuliah-mata kuliah lain mengenai sejarah, budaya, ekonomi, atau politik Indonesia—yang umumnya tercakup dalam Program Studi Asia atau Asia Tenggara.

Dengan demikian, penginternasionalan BI melalui pengajaran BI berjalan secara tidak langsung—dengan makin banyaknya penutur tak-asli yang memakai bahasa ini, paling tidak makin tersebarluasnya bahasa kita. Namun, dampak yang paling penting bagi kita adalah bahwa pembelajaran BI oleh warga asing memberikan kepada mereka suatu wawasan—atau lebih tepatnya—kacamata yang lain daripada yang biasa mereka pakai. Manusia melihat fenomena dalam masyarakat berdasarkan pandangan dan pengalaman hidup dari masyarakatnya sendiri. Dengan adanya kacamata lain, segala aspek kehidupan masyarakat kita bisa mereka lihat dari segi yang kita alami dan bukan dari segi mereka. Perselisihan atau friksi-friksi yang sering muncul antarmasyarakat (seperti, misalnya, tulisan Peter Jennings di Australia beberapa tahun yang lalu) muncul karena yang satu menempatkan barometer pada tata sosial-budaya yang lain. Harapan kita tentunya adalah bahwa makin dalam kita saling mengenal tata sosial-budaya masing-masing akan makin besar pulalah toleransi kita. Pengajaran BI sebagai bahasa asing—didampingi dengan pengajaran di bidang-bidang lain—memegang peranan yang penting untuk menumbuhkan saling pengertian dan toleransi ini.

4. Kendala yang Dihadapi

Kendala BI dalam perannya sebagai bahasa internasional telah dibahas di Bagian 2; karena itu, tidak akan dibicarakan lagi di sini.

Bahasa Indonesia dalam peran sebagai bahasa asing mempunyai berbagai kendala yang perlu kita soroti. Pertama, pemilihan BI ragam apa yang seyogianya diajarkan hendaknya diperhatikan. Pada saat ini ada dua macam buku teks yang beredar: (1) buku yang mulai dengan bahasa formal (misalnya, Danoesoegondo, 1976; Dardjowidjojo, 1978; Johns, 1978; McGarry, 1982), dan (2) buku yang mulai dengan bahasa informal (Wolff, 1980). Kelompok yang pertama ini merupakan kelompok mayoritas, sedangkan kelompok kedua, meskipun hanya diawali oleh satu penulis, sangat berpengaruh luas di Amerika. Perbedaan titik tolak ini tampaknya berkaitan dengan pandangan filosofis para penulisnya mengenai apa yang sebaiknya diajarkan kepada siswa. Yang menarik perhatian di sini adalah adanya semacam pemisah antara penutur asli dan tak-asli. Semua buku yang ditulis oleh penutur asli mulai dengan

bahasa yang formal, kemudian melangkah ke yang informal. Penulis bukan penutur asli juga kebanyakan berpandangan demikian, kecuali Wolff-- yang bukunya dipakai hampir di semua universitas di Amerika.

Pemilihan bahasa formal oleh penulis penutur asli mungkin dilandasi oleh perasaan pribadi bahwa bahasa informal, yang meskipun banyak dipakai sehari-hari, bisa dengan mudah keliru dipakai oleh penutur asing sehingga menyinggung perasaan orang yang diajak bicara. Oleh karena itu, bentuk informal ini hanya diajarkan setelah yang formal dikuasai. Sebaliknya, pendukung bahasa informal lebih menekankan bahasa yang memang nyatanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari sehingga ragam itulah yang diutamakan.

Kendala kedua, kebanyakan buku teks baru sampai pada tingkat pemula, atau paling tinggi tingkat menengah. Buku teks tingkat lanjut masih sangat langka, padahal pada tingkat lanjut inilah kita bisa menyajikan lebih banyak unsur sosio-budaya kita. Mungkin karena kendala seperti inilah ada negara-negara yang mempunyai program BI di Indonesia, misalnya, program kerja sama Cornell-Malang dan Sydney-Satya-wacana.

Kendala lain mengenai buku teks ini adalah bahwa sebagian besar buku ini terbitan tahun yang lalu sehingga tertinggal dalam hal metodologinya. Penerbitan buku-buku teks yang baru sangat lamban. Kelambanan ini mungkin disebabkan oleh faktor komersial, dan mungkin juga oleh kelangkaan penulis--yang berkaitan dengan kendala berikutnya, yakni kendala dosen.

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, pada umumnya pengajaran BI sebagai bahasa asing dilakukan oleh dosen-dosen secara berpasangan. Biasanya penutur tak-asli BI menjadi dosen utamanya, sedangkan penutur asli Indonesiannya menjadi asistennya; atau, dosen penutur tak-asli lebih tinggi pangkatnya daripada dosen penutur asli. Keadaan seperti ini terjadi karena--di samping faktor-faktor lain-- persyaratan akademik di perguruan tinggi negara maju menghendaki dosen memiliki gelar yang tinggi, umumnya Ph.D. Kebanyakan dosen penutur asli BI yang bekerja di luar negeri tidak memiliki gelar ini. Bahkan, tidak sedikit penutur asli BI, yang umumnya bekerja sebagai *lecturer* (di Amerika) atau tutor (di Inggris, Australia, Selandia Baru), yang gelarnya bukan dalam bidang bahasa dan, karenanya, bertindak sebagai semacam *informant* belaka.

Di pihak lain, dosen penutur tak-asli BI kebanyakan memiliki gelar Ph.D., tetapi cukup banyak yang kemampuan berbahasa Indonesiannya belum mendekati kemampuan asisten dosennya. Dalam keadaan seperti inilah sering terjadi konflik karena yang satu merasa lebih pintar daripada yang lain.

Penutur asli BI yang mengajar BI secara mandiri, artinya bukan hanya sebagai *informant*, rata-ratanya menunjukkan prestasi akademik yang bisa dibanggakan. Mungkin karena dunia akademik negara maju berlandaskan pada semboyan *publish or perish*, banyak dari mereka yang telah menghasilkan buku-buku teks yang cukup handal. Namun, kehidupan akademik di negara maju sangat kompetitif sehingga

untuk bisa "duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi" dengan rekan-rekan penutur tak-asli sukarlah bisa dilakukan tanpa memiliki gelar akademik yang sama dengan mereka.

Kendala keempat adalah birokrasi Indonesia yang berkepanjangan untuk memanfaatkan hasil pembelajaran BI. Sebagian besar dari mereka yang belajar BI ingin atau harus pergi ke Indonesia. Mereka yang tidak melakukan riset ingin menyaksikan sendiri bagaimana tata sosial-budaya Indonesia yang mereka pelajari di kelas itu benar-benar terwujud dalam masyarakat. Golongan ini pada umumnya tidak menemui kesulitan untuk masuk ke Indonesia. Mereka dapat memperoleh visa kunjungan dengan mudah. Akan tetapi, mereka yang belajar BI sebagai alat keterampilan harus melakukan penelitian di Indonesia untuk merampungkan tesis atau disertasinya. Dalam kasus-kasus seperti ini proses untuk memperoleh visa makan waktu yang lama sekali. Sementara itu, mereka terikat oleh batas waktu dari sponsor ataupun universitas.

5. Upaya Penanggulangan

Dalam hal penanggulangan, akan dikemukakan upaya-upaya secara optimal yang perlu dilakukan meskipun disadari bahwa sebagian dari saran-saran ini mungkin belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat.

Selama ini pengajaran BI sebagai bahasa asing merupakan kegiatan yang pelaksanaan dan pendanaannya boleh dikatakan 100% menjadi tanggung jawab penyelenggaranya. Negara-negara tersebut memang berkepentingan terutama untuk tujuan-tujuan ekonomi dan politiknya. Namun, kalau sudah diterjemahkan ke dalam pelaksanaan di lapangan, biaya penyelenggaraan program ini mau tidak mau harus dipikul di pundak masing-masing universitas. Pengalaman pribadi saya sebagai Ketua Jurusan di Universitas Hawaii menunjukkan bahwa Ketua Jurusan boleh dikatakan tiap tahun harus membuktikan bahwa eksistensi program ini perlu dipertahankan meskipun jumlah mahasiswanya sangat kecil. Kecilnya jumlah mahasiswa di beberapa negara merupakan masalah besar karena dari segi biaya universitas menderita kerugian finansial yang tidak sedikit.

Di negara federasi seperti Amerika, pemerintah pusat tidak ikut campur dalam soal pendanaan program. Pemerintah memberikan beasiswa (yang dulu dikenal dengan nama NDFL dan kemudian FLAS), tetapi dana ini diberikan kepada mahasiswa; jadi, institusi tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Demikian pula bantuan dari (dulu) *Department of National Education and Health* (NEH) dan kini diteruskan oleh *Department of Education* pada musim panas hanyalah untuk penyelenggaraan perkuliahan musim panas atau untuk *Overseas Studies Program*. *South East Asian Studies Summer Institute* (SEASSI), misalnya, adalah program yang dengan bantuan biaya dari pemerintah federal.

Bantuan lain dari pemerintah federal adalah dalam bentuk *grant*, yakni biaya untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini institusi tempat penerima *grant* ini mengajar memang mendapat dana *overhead*, tetapi jumlahnya maksimal hanya sekitar 50% dari biaya keseluruhan.

Indonesia sebagai negara yang ingin lebih luas dikenal dalam masyarakat internasional juga mempunyai kepentingan di sini, tetapi bantuan yang selama ini bisa diberikan—kalau pun ada—masih sangat terbatas sekali. Beasiswa memang konon ada, tetapi jumlahnya sangat tidak berarti (untuk tahun 1988, Rp100.000.000 per bulan untuk mahasiswa di Jerman) (Soedijarto, 1988), dan tampaknya juga tidak untuk semua negara.

Bantuan lain dari Indonesia adalah dalam bentuk penyediaan tenaga pengajar. Namun, hal ini juga masih bersifat sporadis antara universitas mancanegara dengan salah satu universitas negeri di tanah air (UI dengan Hankuk di Korea; IKIP Surabaya dengan Universitas Papua New Guinea). Tenaga pengajar yang dikirim oleh universitas di Indonesia ini dananya menjadi tanggungan universitas yang meminta bantuan.

Meskipun dalam waktu beberapa tahun mendatang ini tampaknya belum bisa dilaksanakan, suatu saat tentu harus dipikirkan bantuan dari pemerintah Indonesia yang lebih signifikan untuk ikut menyebarluaskan bahasa dan budaya kita.

Mungkin cara lain yang perlu dipertimbangkan oleh universitas mancanegara dalam usaha mencari kerja sama pertukaran tenaga dosen adalah dengan melebarkan sayapnya ke universitas swasta—seperti halnya kerja sama programatik yang telah terjalin antara Universitas Sydney dengan PTS Satyawacana. Di Indonesia hanya ada 49 PTN, tetapi ada sekitar 1035 PTS. Karena sudah cukup banyak PTS yang memiliki dosen-dosen yang berbobot, dan karena birokrasinya pada umumnya sangat sederhana, pertukaran dosen dengan PTS merupakan salah satu kemungkinan yang perlu dijajaki.

Bantuan dari pihak pemerintah Indonesia yang bisa lebih cepat direalisasikan adalah bantuan dalam pengurusan visa. Keluhan lamanya proses pemerolehan visa merupakan hal yang terdengar di mana-mana (lihat Chung, 1988, misalnya). Banyaknya pos yang harus dilalui, meskipun sebagiannya adalah untuk alasan keamanan nasional, sering mematahkan semangat dan menumbuhkan sikap yang negatif. Bila prosedurnya bisa disederhanakan dan prosesnya dipercepat, pada akhir analisis kita pulalah yang akan ikut memetik buahnya.

Upaya lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualifikasi dosen. Dosen bukan penutur asli BI kebanyakan adalah dari bidang linguistik dengan gelar Ph.D. Dengan beberapa pengecualian, minat akademik mereka lebih banyak terfokus pada linguistik atau linguistik yang diterapkan pada bahasa-bahasa di Indonesia; yang minat utamanya **pengajaran BI** tidaklah banyak. Karena pengajaran BI menjadi semacam "cara untuk memperoleh pekerjaan", cinta pertamanya bukan pada bidang ini, pengajaran BI hanya menjadi pekerjaan rutin yang "terpaksa" dikerjakan. Akibat dari itu, pendalaman mengenai BI, baik dalam bentuk peningkatan keterampilan

pemakaiannya maupun penelitian mengenai bahasa ini, tidak cukup banyak dilakukan. Banyak dosen penutur tak-asli yang karya ilmiahnya banyak, tetapi kebanyakan adalah mengenai bahasa daerah di Indonesia. Sebaliknya, dosen penutur asli BI tentu saja menguasai keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan menyelami serta memahami latar belakang budayanya, tetapi hampir semuanya belum tuntas dalam ilmu linguistik yang menjadi dasarnya. Status seperti ini tidak hanya kurang memiliki landasan akademik yang kuat, tetapi juga membuat mereka kurang bisa bersuara jika dibandingkan dengan rekan penutur tak-asli mereka. Sekali lagi dengan beberapa perkecualian, mereka juga tidak bisa menduduki jabatan yang menentukan arah program. Karena latar belakang teoretisnya belum tuntas, penelitian yang mendalam dan berdasarkan teori yang mutakhir juga belum bisa dilaksanakan.

Rasanya tidak berlebihan bila di sini diserukan bahwa apabila seseorang telah memutuskan untuk menetap di luar negeri sebagai dosen BI, dia tidak mempunyai pilihan lain kecuali untuk memenuhi syarat akademik yang berlaku di negara tersebut sehingga hanya langitlah yang akan menjadi batas kenaikan kariernya.

6. Penutup

Dari gambaran singkat di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh institusi luar negeri dalam mengajarkan BI adalah untuk mengembangkan keterampilan atau keterampilan dan ilmu bahasa atau sastra. Kedua, peningkatan peran BI menjadi bahasa internasional di luar beberapa negara ASEAN memerlukan dukungan dari sektor-sektor nonlinguistik. Ketiga, bila keadaan telah memungkinkan, pemerintah Indonesia perlu memikirkan pemberian bantuan secara lebih konkret agar kendala-kendala yang dihadapi penyelenggara pengajaran BI di luar negeri bisa teringankan. Keempat, proses perizinan untuk penelitian hendaknya disederhanakan dan dipercepat. Kelima, dosen bukan penutur asli perlu meningkatkan kemampuan keterampilannya; dosen penutur asli perlu mengasah senjatanya lebih tajam. Keenam, diperlukan buku-buku teks baru dengan pendekatan yang lebih mutakhir. Untuk tingkat lanjut, diperlukan buku-buku tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brumfit, Christopher. 1982. "English as an International Language I: What do We Mean by 'English'?" Di Brumfit (Ed.), *English for International Communication*. Oxford: Pergamon Press.
- Claiborne, Robert. 1983. *The Life and Times of the English Language*. London: Bloomsbury.
- Chung, Young-Rhim. 1988. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing Hankuk, Seoul, Korea". Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia V.
- Danoesoegondo, Poerwanto. 1976. *Bahasa Indonesia: Indonesian for Beginners*. Sydney: Sydney University Press.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 1978. *Sentence Patterns of Indonesian*. Honolulu: The University Press of Hawaii.
- . 1981. "The Impact of Colonialism in National Language Development". Dalam Halim (Ed.), *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 1984. *Vocabulary Building in Indonesian: An Advanced Reader*. Athens, Ohio: Monograph in International Studies, Southeast Asia Series, No. 64, Ohio University.
- , & Lamoureux, Florence. 1983. *In the Surau: Seven Islamic Short Stories from Indonesia*. Honolulu: Southeast Asian Paper No. 21, University of Hawaii.
- Hilgers-Hesse, Irene. *Introducing Indonesian*. London: Lund Humphries.
- Johns, Yohani. 1978. *Bahasa Indonesia: Langkah Baru*. Canberra: Australian National University Press.
- Ikranagara, Kay. 1974. "Jakarta Dialect." Honolulu: Ph.D. Dissertation.
- Kwee, John B. 1988. "Bahasa dan Sastra Indonesia di Selandia Baru". Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia V.
- Liang, Liji. 1988. "Pengajaran dan Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia di Tiongkok". Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia V.
- McGarry, J.D. dan Sumaryono. 1982. *Learn Indonesian*. Chatswood, N.S.W.: Modern Indonesian Publications.

- Mercado, Leonardo. 1972. "Filipino Thought." di *Philippine Studies*, No. 20.
- Morgan, M. 1975. "The Darkening Sky." Honolulu: Southeast Asian Studies Monograph.
- Rose, James H. 1970. "Relational Variation and Limited Productivity in Some Indonesian and English Verbal Derivations." Ann Arbor: Ph.D. Dissertation.
- Sarumpaet, J.P. 1977. *The Structure of Bahasa Indonesia*. Melbourne: Sahata Publications.
- Shigeru, Morimura. 1988. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Jepang". Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia V.
- Soedjiarto. 1988. "Pembinaan Bahasa Indonesia di Luar Negeri sebagai Upaya Diplomas Kebudayaan: Sebuah Pengalaman dari Republik Federal Jerman". Kongres Bahasa Indonesia V.
- Soemarmo, Marmo. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Amerika Serikat". Jakarta: Kongres Bahasa Indonesia V.
- White, Ian J. 1989. *Bahasa Tetanggaku: A National-Functional Course in Bahasa Indonesia*. Melbourne: Longman Cheshire.
- Widdowson, G. 1982. "English as an International Language II: What Do We Mean by 'International'?" Di Brumfit (Ed.).
- Wolff, John U. 1980. *Beginning Indonesian*. New York: Cornell University Southeast Asia Program.
- . 1978. *Indonesian Readings*. New York: Cornell University Southeast Asia Program.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Peningkatan Peran Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing
Pemakalah : Soenjono Dardjowidjojo
Pemandu : Muhadjir
Pencatat : Samsarul
Farida Ariani

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Noerzisri A. Nazar, Institut Teknologi Bandung

Bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing, apakah nonbaku atau baku dulu?

Jawaban:

Pengajaran bahasa Indonesia pada orang asing harus mencakup bahasa lisan dan tulisan. Ini tergantung pada waktu kita bercakap-cakap sehari-hari, baik itu ilmiah maupun tidak ilmiah. Dahulukan bahasa baku, kemudian nonbaku.

2. **Pertanyaan:** Kunardi Hardjoprawiro, Fakultas Sastra Universitas Negeri Surakarta

Bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing?

Jawaban:

Sama dengan nomor satu.

3. **Pertanyaan:** Rachmat Djoko Pradopo, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
Bagaimana cara mengajarkan kalimat tanya dengan kata *apa*.

Jawaban:

Dalam bahasa Indonesia baku sebaiknya kata *apa* dipergunakan dalam kalimat tanya dengan menambahkan akhiran *-kah*. Contoh: *apakah dia sudah datang?*

4. **Pertanyaan:** Dameria Nainggolan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Manakah kata yang baku *yang mana* atau *di mana*?

Jawaban:

Kata *yang mana* dan *di mana* adalah terjemahan dari bahasa asing, yaitu *in which* dan *in where*. Ini disesuaikan dengan buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*.

5. **Pertanyaan:** Jas Singh Yadav, *Indian Council Cultural Relation*, New Delhi

Komentar:

Koreksi dalam makalah Pak Soenjono yang tertulis beasiswa untuk orang asing berjumlah Rp100.000,00 per bulan untuk satu orang. Sekarang beasiswa tersebut sudah berubah menjadi Rp175.000,00.

Beasiswa sebaiknya diberikan kepada calon dosen atau guru yang lebih lama. Misalnya, untuk program S-1 dan S-2.

- a. Apakah ada kebijakan untuk mahasiswa asing menulis tesis dalam pengajaran bahasa dan sastra?
- b. Bagaimana peran Pusat Bahasa dalam menyumbangkan bahasa Indonesia di negara berkembang?

Jawaban:

- a. Dianjurkan agar melihat tesis mengenai pengajaran bahasa dan sastra yang telah banyak ditulis oleh mahasiswa IKIP.
- b. Selama ini pemerintah Indonesia belum menyediakan dana untuk mahasiswa asing di luar negeri.

6. **Pertanyaan:** James T. Collins, University of Hawaii USA

Bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia dalam situasi formal dan informal pada mahasiswa asing?

Komentar:

Pengajaran bahasa Indonesia formal dan informal dapat dibedakan menurut situasinya.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI AUSTRALIA¹

James Sneddon

Universitas Griffith, Brisbane, Australia

1. Pengantar

Bahasa Indonesia dipelajari sebagai bahasa asing oleh lebih banyak orang di Australia daripada di negara lain mana pun di dunia. Dewasa ini bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa asing utama yang diajarkan di Australia, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat universitas. Pemerintah Federal dan pemerintah negara-negara bagian sekarang menyediakan makin banyak dana untuk pendidikan guru dan untuk pengembangan bahan-bahan pengajaran.

Makalah ini akan membahas secara ringkas sejarah pengajaran bahasa Indonesia di Australia. Naik turunnya jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia, alasan mereka untuk mempelajarinya, serta usaha-usaha pemerintah dan universitas untuk mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia juga akan dibicarakan. Akhirnya, makalah ini akan membahas bahan-bahan pengajaran bahasa Indonesia yang dipakai di Australia.

2. Jumlah Mahasiswa yang Mempelajari Bahasa Indonesia di Australia

Pengajaran bahasa Indonesia dimulai di Australia pada pertengahan tahun lima puluhan. Meskipun pada mulanya jumlah siswa sangat sedikit, pengajaran bahasa Indonesia berkembang hingga sekarang kira-kira 50.000 siswa belajar bahasa itu di tingkat sekolah dasar dan menengah serta universitas.

Bahasa Indonesia pertama kali diajarkan di beberapa sekolah menengah di negara bagian Victoria sekitar tahun 1955. Pada tahun 1957 bahasa Indonesia mulai diajarkan di tiga universitas, yaitu Universitas Sydney, Universitas Melbourne, dan Universitas Nasional Australia (ANU) di Canberra (waktu itu ANU masih bernama Canberra University College).

Pada tahun 1991 terdapat 45.000 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah yang belajar bahasa Indonesia dan ada 22 universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia dengan jumlah mahasiswa kira-kira 2.000 orang.

Belakangan ini jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia meningkat dengan cepat pada setiap tingkat dan di semua negara bagian di Australia. Selama dasawarsa

delapan puluhan pemerintah Australia makin menekankan pentingnya pengajaran bahasa-bahasa asing dan pemerintah negara-negara bagian yang langsung bertanggung jawab membiayai pendidikan di tingkat sekolah, juga memberikan dukungan mereka dan ikut menggiatkan pengajaran bahasa asing. Bahasa Indonesia termasuk salah satu bahasa utama yang diberi dana untuk pengembangannya.

a. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Statistik yang menunjukkan jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia pada tahun-tahun permulaan tidak tersedia, tetapi seperti terlihat pada tabel di bawah ini jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia di sekolah menengah meningkat dari 3.431 orang pada tahun 1969 menjadi 28.815 orang pada tahun 1991. Data untuk sekolah dasar pada tahun 1969 tidak dapat ditemukan, tetapi pasti jumlah murid tidak begitu besar. Yang jelas jumlah ini meningkat dari 2.557 orang menjadi 16.682 orang pada tahun 1991:

TABEL I
JUMLAH SISWA DI SEKOLAH

Tahun	Sekolah Dasar	Sekolah Menengah	Jumlah Keseluruhan
1969	-	3.431	-
1975	2.577	10.895	13.472
1988	5.938	18.987	24.925
1991	16.682	28.815	45.497

Tidak ada data statistik untuk tahun-tahun antara tahun 1975 dan 1988. Akan tetapi, laporan yang ada menunjukkan bahwa jumlah siswa mencapai puncaknya pada tahun 1983 dan kemudian menurun sampai tahun 1988. Dari tahun 1988 hingga tahun 1991 jumlah siswa meningkat dengan mecolok, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah dan sampai sekarang jumlah siswa terus meningkat.

Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dimulai di negara bagian Victoria dan negara bagian New South Wales (NSW) pada tahun lima puluhan. Kemudian, pengajaran itu menyusul di negara bagian lain, tetapi jumlah siswanya tidak begitu banyak hingga tahun delapan puluhan. Di negara bagian Queensland dan di Northern Territory bahasa Indonesia baru mulai diajarkan pada tahun tujuh puluhan. Data siswa yang belajar bahasa Indonesia di sekolah menengah di tiap negara bagian dapat terlihat dalam tabel kedua berikut. Ibu kota masing-masing negara bagian disebutkan di sini hanya sebagai pedoman, dan sebenarnya pengajaran bahasa Indonesia tidak terbatas pada kota-kota itu saja.

TABEL II
SISWA SEKOLAH MENENGAH MENURUT NEGARA BAGIAN

Negara Bagian	1969	1975	1988	1991
NSW (Sydney)	1.077	3.850	3.694	4.393
Victoria (Melbourne)	1.964	4.241	9.746	12.921
Queensland (Brisbane)	-	249	733	1.903
South Aust. (Adelaide)	139	1.170	1.115	1.339
Western Aust. (Perth)	157	732	665	1.290
Tasmania (Hobart)	94	146	783	2.926
ACT (Canberra)	-	486	1.135	934
Nth Territory (Darwin)	-	21	1.116	3.109
Jumlah	3.431	10.895	18.987	28.815

Dalam tabel kedua itu dapat dilihat bahwa perkembangan pengajaran bahasa Indonesia yang paling lambat ialah di New South Wales, yaitu jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia turun dari 31% pada tahun 1969 menjadi hanya 15% pada tahun 1991. Sementara itu, di negara bagian Victoria persentase siswa tetap tinggi.

Seperti telah dibicarakan, pertumbuhan jumlah siswa tetap meningkat sejak tahun 1988 meskipun di NSW pertumbuhan itu agak sedikit. Tabel III menunjukkan pertumbuhan pengajaran bahasa Indonesia di semua negara bagian dari tahun 1988 hingga tahun 1991. Jumlah ini termasuk siswa di sekolah dasar dan menengah, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta.

TABEL III
JUMLAH SISWA BAHASA INDONESIA DI SEMUA SEKOLAH

Negara Bagian	1988	1991
NSW	3 862	4.723
Victoria	10 571	16.434
Queensland	1 003	4.189
South Aust.	2 995	5.473
Nth Territory	2 317	7.161
West Aust.	1 288	2.147
Tasmania	981	2.962
ACT	1 908	2.444
Jumlah	24 925	45.497

Tabel III menunjukkan kenaikan jumlah siswa di semua negara bagian di Australia. Perkembangan yang paling cepat ditemukan di Queensland, yaitu jumlah siswa meningkat empat kali lipat. Di Tasmania dan Northern Territory juga mengalami perkembangan yang cepat, yaitu jumlah siswa meningkat tiga kali lipat. Perkembangan yang paling lambat ditemukan di New South Wales. Sejak tahun enam puluhan persentase siswa yang belajar bahasa Indonesia di negara ini terus menurun. Salah satu alasannya ialah bahwa hingga tahun 1991 NSW adalah satu-satunya negara bagian, selain Tasmania, yang tidak mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sebaliknya, di Queensland² pada tahun 1988 hanya 270 siswa sekolah dasar (semuanya sekolah swasta) yang belajar bahasa Indonesia. Jumlah itu meningkat menjadi 2.286 pada tahun 1991 dengan dua pertiga dari jumlah tersebut di sekolah-sekolah dasar negeri.

Angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia di Australia belum dapat ditemukan. Di Queensland hanya ada beberapa sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun 1980 dan semuanya sekolah swasta termasuk empat sekolah di kota Brisbane. Selama tahun delapan puluhan pengajaran bahasa Indonesia di Queensland meningkat terus, terutama di sekolah-sekolah negeri, yang mulai mengajarkannya pada tahun 1983. Sekarang bahasa Indonesia merupakan bahasa asing terbesar yang keenam di sekolah-sekolah di Queensland. Tabel IV menunjukkan jumlah sekolah yang mengajarkan keenam bahasa asing yang terbesar dan jumlah siswa yang mengikutinya masing-masing pada tahun 1992. Angka-angka ini hanya menunjukkan jumlah siswa di sekolah negeri.³

TABEL IV
JUMLAH SEKOLAH YANG MENGAJARKAN BAHASA ASING DI
NEGARA BAGIAN QUEENSLAND DAN JUMLAH SISWA

Bahasa Asing yang Diajarkan	Sekolah Dasar	Siswa	Sekolah Menengah	Siswa	Jumlah Keseluruhan
Bahasa Jepang	48	16.770	82	14.418	31.188
Bahasa Jerman	213	12.352	83	11.237	23.589
Bahasa Prancis	143	8.716	91	9.150	17.866
Bahasa Italia	104	10.328	17	1.630	11.958
Bahasa China	50	5.030	16	1.968	6.998
Bahasa Indonesia	41	2.591	11	1.342	3.933

Statistik untuk jumlah sekolah dan muridnya masing-masing di negara-negara bagian lain tidak ada, tetapi kedudukan bahasa Indonesia di sana kira-kira sama dengan di Queensland.

b. *Universitas*

Prakarsa untuk memulai pengajaran bahasa Indonesia di tingkat universitas berasal dari pemerintah Australia sendiri. Pada tahun 1957 Departemen Pengkajian Indonesia dan Melayu dibuka di Universitas Sydney, Universitas Melbourne dan di Canberra University College (kemudian menjadi Universitas Nasional Australia) di ibu kota Canberra.

Perkembangan jumlah mahasiswa pada mulanya agak lambat. Pada tahun 1964 universitas yang keempat, yaitu Universitas Monash di kota Melbourne, memulai pengajaran bahasa Indonesia. Pada tahun itu jumlah mahasiswa di keempat universitas itu adalah 566 orang, dan dari jumlah tersebut 364 orang adalah mahasiswa di Universitas Sydney.

Pada awal tahun tujuh puluhan, di seluruh Australia didirikan "Colleges of Advanced Education (CAE)" yang peranannya kira-kira sama dengan IKIP di Indonesia. Pada tahun 1975 bahasa Indonesia diajarkan di lima universitas dan tujuh CAE, dengan jumlah mahasiswa 1.041 orang. Pada 1981 jumlahnya mulai menurun meskipun jumlah perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia bertambah. Pada pertengahan tahun delapan puluhan CAE digabungkan dengan universitas. Pada akhir dekade itu jumlah mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia mulai meningkat kembali. Pada tahun sembilan puluhan jumlah itu meningkat terus dengan sangat cepat. Tabel berikut menunjukkan jumlah mahasiswa sejak tahun 1964 ketika data mulai dikumpulkan.

TABEL V
JUMLAH PERGURUAN TINGGI DAN MAHASISWA

Tahun	Universitas	CAE	Jumlah Siswa	Jumlah Perguruan Tinggi
1964	566	-	566	4
1975	649	392	1.041	12
1981	607	337	944	17
1983	492	168	660	-
1986	495	216	711	16
1988	-	-	951	-
1990	-	-	1.258	20
1992	-	-	1.978	22

Hal itu terlihat bahwa perkembangan di perguruan tinggi sejajar dengan perkembangan di sekolah. Pengajaran bahasa Indonesia mulai pada akhir tahun lima puluhan. Pada tahap pertama, yaitu hingga tahun 1975, jumlah siswa bertambah, tetapi dengan agak lambat. Pada tahap kedua, yaitu dari tahun 1975 hingga tahun

1986, jumlah siswa menurun meskipun jumlah perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia meningkat. Pada tahap ketiga, dari tahun 1986, jumlah siswa meningkat kembali. Ada kemungkinan kenaikan jumlah mahasiswa sejak tahun 1986 sebagian disebabkan oleh makin banyaknya perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia. Sejak tahun 1990 tidak dapat diragukan bahwa jumlah mahasiswa bahasa Indonesia memang meningkat dengan sangat pesat.

Pada tahun 1988, seperti halnya di sekolah menengah, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing terbesar keenam yang diajarkan di perguruan tinggi. Namun, harus diakui bahwa jumlah mahasiswa bahasa Indonesia jauh lebih rendah daripada jumlah yang belajar bahasa Jepang dan bahasa-bahasa Eropa. Di negara bagian Queensland bahasa Jepang sejak semula lebih populer daripada bahasa Indonesia, baik di sekolah maupun di universitas. Di negara bagian lain jumlah mahasiswa bahasa Jepang baru mulai meningkat pada tahun delapan puluhan, tetapi sejak itu perkembangannya cepat. Bahasa Cina juga mulai dipelajari oleh sejumlah kecil mahasiswa sebelum tahun delapan puluhan, tetapi pada dasawarsa itu jumlahnya juga meningkat dengan agak cepat.

Pada tahun 1988 10% dari mahasiswa yang belajar salah satu bahasa Asia pada perguruan tinggi di seluruh Australia memilih bahasa Indonesia. Yang memilih bahasa Jepang berjumlah 65% dan bahasa Cina 22%.

Seperti halnya di sekolah menengah dan sekolah dasar, jumlah mahasiswa yang paling banyak mempelajari bahasa Indonesia terdapat di Victoria, dan bahasa itu diajarkan di tujuh universitas. Jumlah mahasiswa bahasa Indonesia terbesar kedua sesudah Victoria sekarang terdapat di Queensland.

Jumlah terbesar mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia di universitas mana pun di Australia sekarang terdaftar di Universitas Griffith di kota Brisbane. Tabel III di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa sekolah meningkat paling cepat di Queensland dan hal yang sama juga terjadi pada tingkat universitas. Ada kemungkinan bahwa kenaikan jumlah mahasiswa bahasa Indonesia sebagian disebabkan oleh turunnya jumlah mahasiswa bahasa Jepang. Hal itu akan dibicarakan pada bagian lain dalam makalah ini.

Di Fakultas Asian and International Studies di Universitas Griffith semua mahasiswa tingkat satu harus mempelajari salah satu bahasa Asia yang diajarkan. Jumlah siswa yang memilih bahasa Indonesia biasanya mencapai 25%. Namun, pada pertengahan tahun delapan puluhan bahasa Cina dan bahasa Jepang meningkat kepopulerannya dan pada waktu itu jumlah mahasiswa bahasa Indonesia menurun. Jumlah terkecil tercatat pada tahun 1989. Sejak itu jumlahnya meningkat secara teratur. Hal itu ditunjukkan pada tabel berikut. Angka-angka ini hanya untuk mahasiswa baru, yaitu yang masuk tingkat satu. Jumlah menunjukkan jumlah semua mahasiswa tingkat satu untuk seluruh fakultas dan % menunjukkan persentase mahasiswa tingkat satu yang memilih bahasa Indonesia.

TABEL VI
JUMLAH MAHASISWA TINGKAT SATU BAHASA INDONESIA
DI UNIVERSITAS GRIFFITH

Tahun	Jumlah	Bhs. Indonesia	%
1989	350	35	10
1990	333	51	15,3
1991	331	85	25,7
1992	303	84	27,7
1993	468	148	31,6

Kenaikan jumlah mahasiswa bahasa Indonesia di Australia pada tahun 1992 dan 1993 berlangsung di semua universitas yang mengajarkan bahasa itu. Di sebagian universitas, seperti Universitas Griffith, kenaikan itu terlihat mecolok sekali, sedangkan di universitas lain, seperti Universitas Sydney, peretumbuhannya hanya sedikit.

3. Tujuan Mempelajari Bahasa Indonesia

a. Prakarsa Pemerintah

Pada tahun 1957 tiga universitas di Australia mulai mengajarkan bahasa Indonesia. Pemerintah Australialah yang mendorong hal itu dengan menganjurkan kepada ketiga universitas itu untuk mendirikan departemen Studi Indonesia. Pemerintah juga menjanjikan bahwa pemerintah bersedia untuk membiayainya. Usaha itu khususnya didorong oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kebijakan itu, tetapi rupanya alasan pentingnya Australia untuk mengerti lebih baik tentang negara tetangganya merupakan alasan utama.

Usaha tersebut bukan prakarsa dari universitas sendiri. Sebenarnya, ada cukup banyak pertentangan dari dalam fakultas-fakultas sastra dan dari pihak yang tidak menyetujuinya. Mereka merasa bahwa hanya bahasa dan kebudayaan Eropalah yang pantas untuk dipelajari. Perlu diingat bahwa pada waktu itu pentingnya bahasa asing untuk meningkatkan hubungan antarnegara, perdagangan, dan saling pengertian belum tertanam di kalangan universitas. Tujuan pengajaran bahasa yang utama adalah untuk memahami kesusastraan dalam bahasa itu. Namun, pemerintah Australia mempunyai prioritas lain dan dari semula selalu ada orang yang menyadari pentingnya pengajaran bahasa untuk menjalin hubungan dan saling pengertian. Dengan berdirinya Departemen-departemen "Indonesian and Malayan Studies" di ketiga universitas itu, tantangan dari kelompok yang tidak menyetujui usaha itu makin berkembang.

Di tingkat sekolah menengah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, keputusan untuk mengajarkan bahasa Indonesia ditentukan oleh kepala sekolah sendiri. Hingga tahun enam puluhan hanya sedikit sekolah di NSW dan Victoria yang mengajarkan bahasa Indonesia dan di negara bagian lain hampir tidak ada sama sekali. Keputusan untuk mengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah menengah di kota Sydney dan Melbourne barangkali dipengaruhi oleh adanya Departemen Pengkajian Indonesia dan Melayu di universitas utama di setiap kota itu. Kenaikan jumlah sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia di kota itu juga mencerminkan pertumbuhan jumlah mahasiswa dan makin tersedianya guru yang telah belajar bahasa itu di universitas tersebut.

b. Sikap Masyarakat terhadap Indonesia

Jumlah mahasiswa meningkat dengan cepat di kedua universitas itu sejak sekitar tahun 1964 ketika masyarakat Australia mulai tertarik pada Indonesia. Ini terjadi pada masa "konfrontasi". Pada waktu itu Indonesia dianggap oleh pemerintah dan masyarakat Australia sebagai tetangga yang agresif, pro-komunis, dan tidak stabil. Banyak orang Australia menganggap Indonesia sebagai ancaman terhadap Australia dan inilah sebenarnya yang menyebabkan meningkatnya keinginan orang untuk mengetahui lebih banyak tentang Indonesia. Faktor itu juga dapat menjelaskan makin meningkatnya jumlah siswa yang ingin mempelajari bahasa Indonesia serta sejarah dan politik Indonesia.

Dengan terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang lebih stabil serta berkembangnya hubungan yang makin baik antara Indonesia dan Australia, minat terhadap studi Indonesia mulai menurun. Indonesia tidak lagi menjadi bahan pembicaraan sehari-hari dalam media pemberitaan. Kalau ada berita tentang Indonesia, biasanya berita itu sekarang tentang kemajuan dan pembangunan, bukan tentang demonstrasi atau pembakaran kedutaan asing. Demikianlah, dengan makin tenang keadaan politik, Indonesia tidak lagi menjadi sorotan masyarakat Australia. Menurunnya minat untuk mempelajari bahasa Indonesia mulai terlihat di negara bagian NSW pada awal tahun tujuh puluhan, sedangkan penurunan jumlah siswa di Victoria lebih lambat.

Selama jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia masih rendah di sekitar tahun delapan puluhan, tidak jarang terdengar keluhan dari ahli-ahli di bidang studi Indonesia yang tidak puas dengan makin menurunnya minat terhadap studi Indonesia. Secara bergurau ada yang menyesali bahwa hubungan Australia dengan Indonesia dewasa ini terlalu baik. Namun, sebenarnya tidak ada penjelasan yang dapat digunakan untuk memahami sebab-sebab menurunnya minat siswa terhadap studi Indonesia. Beberapa alasan sudah dikemukakan, tetapi tidak ada yang berdasarkan penelitian yang saksama. Kadang-kadang ketika hubungan antara Indonesia dan Australia tidak begitu baik, orang akan mengatakan bahwa jumlah mahasiswa akan meningkat seandainya ada hubungan baik antara kedua negara. Bagaimanapun juga,

tidak ada data yang dapat membuktikan bahwa keadaan hubungan politik antara Australia dan Indonesia berpengaruh terhadap jumlah orang yang ingin belajar tentang Indonesia.

Jumlah siswa mulai meningkat dari tahun 1988, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, di seluruh Australia. Hal itu sebagian disebabkan oleh makin meluasnya kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia, dengan makin banyak sekolah dan universitas yang mengajarkan bahasa itu. Ada juga golongan yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi makin populer sebab makin baiknya hubungan antara kedua negara ini dan berkembangnya sikap yang lebih positif terhadap Indonesia. Ini adalah suatu kemungkinan, tetapi saya mengacu pada dua kenyataan: (1) jumlah mahasiswa meningkat pada tahun enam puluhan ketika citra Indonesia di Australia tidak baik dan masyarakat Australia khawatir bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis; (1) ketika terjadi "peristiwa Dili" pada tahun 1991, para dosen yang mengajar tentang Indonesia merasa khawatir bahwa jumlah mahasiswa akan merosot sebab luasnya berita yang memberikan kesan yang negatif terhadap Indonesia (mengingat menurunnya jumlah mahasiswa bahasa Cina sesudah "insiden Beijing" pada tahun 1989). Akan tetapi, sebenarnya jumlah mahasiswa bahasa Indonesia tidak menurun, malah terus meningkat. Rupanya sikap masyarakat Australia terhadap Indonesia, positif atau negatif, tidak memainkan peranan yang langsung dalam menentukan jumlah orang yang ingin belajar tentang Indonesia.

c. Persyaratan Masuk Universitas dan Jumlah Bahasa yang Diajarkan

Sesungguhnya terdapat beberapa faktor lain yang juga tidak kalah penting. Sampai tahun enam puluhan, untuk dapat mendaftar di universitas siswa sekolah menengah harus lulus dalam salah satu bahasa asing dalam ujian akhir mereka. Ketika peraturan itu dihapuskan, jumlah siswa yang mengikuti kuliah bahasa asing mulai menurun, baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Di antara tahun 1967 dan 1976 persentase siswa yang mengikuti ujian bahasa asing pada ujian akhir menurun dari 40% menjadi 14%. Sebetulnya sangat mengesankan bahwa dalam situasi seperti itu jumlah siswa bahasa Indonesia pada waktu itu tidak menurun terlalu mecolok.

Jumlah siswa yang mempelajari bahasa asing di seluruh Australia tetap kira-kira 14% sampai dengan tahun 1986 ketika jumlahnya mulai meningkat kembali. Pada tahun 1988 terdapat 20% siswa yang mengikuti ujian bahasa asing dalam ujian akhir sekolah menengah.

Jumlah mahasiswa yang mempelajari bahasa asing di tingkat universitas juga menurun. Pada tahun 1964 dari seluruh mahasiswa yang belajar untuk memperoleh gelar B.A. terdapat 29% yang mempelajari satu bahasa asing atau lebih. Pada tahun 1975 jumlah itu menurun menjadi 23%.

Juga pada tahun enam puluhan tidak banyak bahasa asing yang diajarkan di sekolah dan universitas. Bahasa asing yang utama pada waktu itu adalah bahasa Prancis, Jerman, dan Latin. Sejak akhir tahun enam puluhan jumlah bahasa asing yang diajarkan di sekolah menengah meningkat dan jumlah siswa yang belajar bahasa Prancis dan bahasa Latin menurun secara mencolok. Pada tahun 1988 terdapat 40 bahasa asing yang diajarkan di sekolah menengah dan 36 di tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, untuk mendapat perhatian siswa, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa asing lain karena makin banyak bahasa asing yang diajarkan.

d. Kebijakan Pemerintah

Meningkatnya jumlah bahasa yang dapat dipilih siswa mulai tahun tujuh puluhan dan meningkatnya jumlah siswa yang belajar bahasa asing pada tahun delapan puluhan pada dasarnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

Masalah pengajaran bahasa asing di Australia pertama kali diungkapkan dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Penelitian Ilmu Sosial Australia (*Australia Humanities Research Council*) pada tahun 1966. Dalam laporan tersebut (*The Wykes Report*) diungkapkan bahwa rasa apatis (tidak tertarik) mempelajari bahasa asing tersebar luas di kalangan masyarakat Australia. Banyak orang menganggap bahwa pengetahuan tentang bahasa asing tidak ada gunanya.

Keadaan itu mendorong pemerintah untuk segera bertindak dan melakukan usaha-usaha yang diperlukan seperti mendirikan Dewan Penasihat Pengajaran Bahasa dan Kebudayaan Asia (*The Advisory Committee on the Teaching of Asian Languages and Cultures*). Dalam laporannya pada tahun 1970 (*The Auchmuty Report*) dewan tersebut mengemukakan bahwa masyarakat Australia sudah makin menyadari pentingnya kawasan Asia untuk kepentingan ekonomi dan keamanan Australia. Ditemukan pula bahwa minat masyarakat makin meningkat dan makin banyak permintaan untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan Asia di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Namun, kesempatan untuk mempelajari bahasa dan kebudayaan ini tidak banyak sebab hanya sedikit sekolah dan universitas yang mengajarkannya.

Laporan Auchmuty selanjutnya juga mendapati bahwa banyak pengusaha yang terlibat dalam perdagangan dengan negara-negara Asia masih merasa bahwa penguasaan bahasa Asia tidak penting, dan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa resmi untuk perdagangan di Asia.

Juga dalam laporan itu dikemukakan keprihatinan akan makin menurunnya pengajaran bahasa asing. Pemerintah dianjurkan untuk mengutamakan pengajaran bahasa Cina, Jepang, dan Indonesia/Melayu. Usaha itu dianggap sangat penting dilihat dari konteks hubungan politik, industri, dan perdagangan yang makin berkembang antara Australia dan Asia. Malah dianjurkan juga agar Australia menjadi pusat studi Asia pada tingkat perguruan tinggi. Meskipun pemerintah mengikuti saran-saran dewan itu dengan menyediakan dana untuk pelaksanaannya, tidak banyak kemajuan yang dicapai pada tahun-tahun tujuh puluhan.

Terdorong oleh kekhawatiran akan makin menurunnya minat terhadap bahasa-bahasa Asia, menjelang akhir tahun tujuh puluhan Perhimpunan Pengkajian Masalah Asia (*Asian Studies Association of Australia*) memutuskan untuk mengadakan penyelidikan. Hasilnya berupa laporan Fitzgerald yang disampaikan pada tahun 1980. Ditegaskan bahwa studi bidang Asia penting, baik karena letak geografis Australia maupun untuk pengembangan hubungan politik, ekonomi, dan pertahanan dengan negara-negara di Asia. Dalam laporan itu dinyatakan bahwa studi tentang masyarakat Asia telah mencapai puncaknya dan sudah mulai menurun kembali. Diusulkan agar studi tentang Asia digairahkan lagi pada setiap tingkat pendidikan dan supaya guru-guru memperoleh pendidikan lanjut untuk melaksanakan tugas ini.

4. Kebijakan Nasional mengenai Bahasa

Kebijakan pemerintah Australia mengenai bahasa (*The National Policy on Languages*) baru diumumkan pada tahun 1987. Kebijakan yang utama dalam hal ini adalah untuk memperluas pengajaran bahasa asing di kalangan masyarakat Australia. Alasan yang dikemukakan termasuk makin multibudaya sifat masyarakat Australia. Dikemukakan pula bahwa ini juga akan banyak memberi keuntungan dalam segi ekonomi bagi pengusaha Australia yang terlibat dalam perdagangan dengan negara-negara lain. Kebijakan itu menekankan kedudukan Australia di kawasan Asia-Pasifik, yang merupakan salah satu kawasan dunia yang ekonominya bertumbuh paling cepat.

Dalam kebijakan itu diusulkan pula agar semua siswa sekolah mempelajari salah satu bahasa asing. Sembilan bahasa ditentukan untuk diajarkan secara luas di sekolah-sekolah, termasuk bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, dianjurkan supaya perhatian khusus diberikan kepada pendidikan guru bahasa. Kemudian, pemerintah negara-negara bagian mulai merumuskan kebijakan dan strategi bagaimana kebijakan itu dapat diterapkan, berdasarkan *National Policy on Languages*. Di kebanyakan negara bagian, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing yang penting untuk Australia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia di Australia perlu diperluas, baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah.

Di Northern Territory bahasa Indonesia sudah merupakan bahasa asing utama yang diajarkan di sekolah-sekolah. Hal itu terutama disebabkan oleh dekatnya lokasi daerah itu dengan Indonesia dan makin meluasnya hubungan perdagangan dan kebudayaan di antara kedua wilayah tersebut.

Kebijakan nasional mengenai bahasa merupakan langkah yang sangat penting dalam sejarah pengajaran bahasa asing di Australia. Hal itu menandai permulaan tahap perkembangan pesat dalam studi bahasa-bahasa asing. Faktor-faktor utama yang mendorong perkembangan tersebut termasuk kebijakan pemerintah, penyediaan dana untuk melatih guru-guru, dibukanya pengajaran bahasa asing di sekolah-sekolah, dan tersedianya penasihat untuk guru-guru sekolah yang mengajarkan bahasa asing.

5. Prakarsa untuk Memperluas dan Meningkatkan Pengajaran Bahasa Indonesia

Sudah banyak usaha yang dilakukan untuk memperluas pengajaran bahasa Indonesia, tetapi tidaklah mungkin untuk dibicarakan satu per satu di sini. Pembahasan ini akan dibatasi pada beberapa prakarsa. Kebanyakan, di antaranya, dibiayai oleh *Department of Education, Employment and Training* (DEET).

Pada tahun 1988 sebuah proyek nasional untuk pengembangan kurikulum bahasa Indonesia (*National Indonesian Language Curriculum Project*) yang berpusat di Darwin (Northern Territory) dan Adelaide (Australia Selatan) dimulai. Tujuannya adalah untuk menyiapkan kurikulum nasional untuk pengajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar dan menengah. Di samping kurikulum, disediakan pula bahan-bahan pengajaran seperti video dan kaset. Proyek tersebut sudah selesai dan hasilnya sudah siap untuk dapat dipakai di sekolah seluruh Australia.

Pada tahun 1992 DEET menyediakan dana sebanyak Aus \$100.000 untuk proyek yang akan menghasilkan bahan bacaan autentik yang dapat dipakai di kelas dan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh proyek tersebut di atas. Proyek itu berpusat di Universitas Northern Territory di Darwin. Diharapkan bahan-bahan itu akan siap pada akhir tahun 1994.

Sebuah proyek tingkat nasional untuk pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing (*Teaching Indonesian as a Foreign Language* atau TIFL) dimulai pada tahun 1991 dengan dana sebanyak \$1.500.000 dari DEET. Kegiatan proyek ini cukup luas, termasuk (1) pengembangan tes profisiensi untuk mengukur tingkat kemampuan siswa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua; proyek TIFL itu dilaksanakan di Universitas Griffith di kota Brisbane; (2) proyek pengembangan bahan pengajaran untuk kursus tiga tahun pada tingkat perguruan tinggi; proyek itu cukup besar dan melibatkan pengajar dari tiga universitas di Sydney (Universitas Sydney, New South Wales, dan Western Sydney), serta Universitas Griffith di Brisbane; (3) proyek penelitian bahan pengajaran bahasa Indonesia untuk tujuan khusus; proyek itu mencakup bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat, hukum, dan perdagangan; tujuannya ialah untuk menyediakan bahan dasar bagi guru yang ingin mengembangkan kursus dalam bidang tersebut; kegiatan itu berpusat di Universitas Flinders di Adelaide; (4) proyek penentuan kebutuhan guru-guru bahasa Indonesia dan menyiapkan bahan untuk penataran dan kursus penyegaran; kegiatan itu berpusat di Universitas Northern Territory di Darwin; (5) penulisan tata bahasa acuan bahasa Indonesia; buku tersebut dirancang khusus untuk guru dan mahasiswa bahasa Indonesia yang tidak mempunyai latar belakang linguistik; proyek itu dilaksanakan di Universitas Griffith di Brisbane.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Proyek TIFL menerima masukan dan saran dari pakar bahasa dari Indonesia. Bagian-bagian proyek tersebut berdasar pada putusan yang diambil dalam serangkaian pertemuan yang pertama kali diadakan di Universitas Indonesia pada bulan November 1991. Selain mengambil bagian dalam pertemuan itu, Profesor Harimurti Kridalaksana mengunjungi Australia pada tahun 1991 dan

menyampaikan laporan kepada Konsorsium TIFL. Pada bulan September 1993 Profesor Yus Badudu meng-hadiri lokakarya yang diadakan oleh konsorsium di Sydney.

Lembaga Australia-Indonesia (*Australia Indonesia Institute*), yang berkantor di Departemen Luar Negeri, memberi bea siswa kepada, antara lain, guru-guru sekolah untuk tinggal di Indonesia selama setahun guna memperlancar bahasa Indonesia mereka. Guru-guru itu biasanya melaksanakan studi di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

Sejumlah pemerintah negara bagian ikut memegang peranan yang penting dalam menggalakkan pengajaran bahasa-bahasa asing. Misalnya, Pemerintah Queensland menargetkan bahwa pada tahun 2000 semua siswa sekolah akan belajar salah satu bahasa asing. Bahasa Indonesia ditentukan sebagai satu dari lima bahasa utama. Dalam rangka perjanjian antara Pemerintah negara bagian Queensland dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan pertukaran guru. Pertukaran guru yang pertama sudah berlangsung pada tahun 1993 dan sekarang lima orang guru dari Jawa Tengah sedang bertugas di Queensland. Di samping itu, Departemen Pendidikan juga melaksanakan program penataran setiap tahun untuk guru-guru bahasa Indonesia.

Pemerintah Northern Territory juga aktif melancarkan kegiatan untuk mempromosikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dan melaksanakan program pertukaran guru dengan daerah Indonesia bagian timur.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kesadaran, yaitu supaya pengajaran bahasa asing dapat berlangsung dengan efisien, guru-guru bahasa harus mendapat latihan yang baik dan menguasai bahasa yang mereka ajarkan. Pada masa lalu hal itu tidak selalu terjadi. Kurangnya jumlah guru yang kompeten merupakan salah satu alasan mengapa cukup banyak kepala sekolah segan memulai pengajaran bahasa Indonesia di sekolahnya.

Salah satu inovasi yang penting yang berlangsung baru-baru ini adalah kursus *immersion*. Di sekolah yang melaksanakan program itu, siswa tidak hanya belajar bahasa asing, tetapi juga mengikuti mata pelajaran yang lain dalam bahasa asing itu. Sampai sekarang hanya ada dua sekolah di seluruh Australia yang melaksanakan program *immersion* untuk bahasa Indonesia. Yang pertama dimulai di sekolah Rowville di Melbourne, Victoria pada tahun 1992 dan yang kedua dimulai di sekolah Park Ridge di Brisbane, Queensland pada tahun 1993. Kursus di Brisbane diikuti oleh 28 siswa kelas 8. Mereka belajar bahasa Indonesia dan tiga mata pelajaran yang lain dalam bahasa Indonesia selama 16 pelajaran seminggu (masing-masing 45 menit). Tidak mengherankan kemampuan mereka berbahasa Indonesia meningkat dengan cepat. Juga menyenangkan bahwa siswa-siswa tersebut tetap senang belajar bahasa Indonesia dan semuanya bermaksud untuk terus mempelajarinya. Sayang, sangat mahal untuk membiayai kursus *immersion* seperti itu dan jumlahnya selalu akan terbatas.

Pada tingkat universitas juga ada banyak kegiatan untuk meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia belakangan ini. Universitas Griffith sudah mengadakan

perjanjian pertukaran dengan tiga universitas di Indonesia. Nilai yang dicapai mahasiswa dalam mata kuliah yang diikutinya di universitas itu digunakan untuk mendapat kredit di Universitas Griffith. Pada tahun 1993 enam mahasiswa akan belajar selama satu semester di Indonesia.

Beberapa universitas belakangan ini juga melaksanakan program sarjana empat tahun termasuk belajar selama satu tahun di Indonesia. Program semacam itu dilaksanakan, misalnya, oleh Universitas Nasional di Canberra, yang mengirim mahasiswa mereka ke Universitas Gadjah Mada dan Universitas Murdoch di Perth yang mengirim mahasiswanya ke IKIP Malang.

Mahasiswa juga didorong untuk mengikuti kursus intensif di Indonesia. Meskipun mahasiswa harus mengeluarkan biaya sendiri, jumlah yang mengikuti kursus intensif pada bulan Desember-Januari setiap tahun cukup banyak. Sekarang nilai yang dicapai mahasiswa dalam kursus intensif dapat digunakan untuk memperoleh kredit di beberapa universitas. Misalnya, mahasiswa Universitas Sydney dan Griffith dapat memperoleh kredit kalau mengikuti kursus intensif di Universitas Satya Wacana, Salatiga, sedangkan Universitas Nasional Australia di Canberra dan Universitas Monash di Melbourne memberikan kredit untuk kursus di Universitas Gadjah Mada. Staf pengajar bahasa Indonesia di Universitas Northern Territory bekerja sama dengan Universitas Pattimura untuk mengadakan kursus intensif setiap tahun di Ambon. Sejumlah universitas lain juga sudah memulai kegiatan sejenis ini atau sedang dalam tahap perundingan dengan universitas di Indonesia.

6. Bahasa Indonesia, Kesempatan Kerja, dan Perdagangan

Sampai tahun 1970 Australia sudah dua puluh tahun tidak mengalami masalah pengangguran. Pada masa itu sedikit sekali orang yang menghubungkan pengajaran bahasa asing dengan kesempatan kerja. Hampir tidak ada pekerjaan yang memerlukan penguasaan bahasa asing, kecuali pekerjaan mengajar bahasa tersebut! Pada masa imigran dan pengusaha-pengusahadari negara lain yang mengadakan hubungan dengan Australia diharapkan menggunakan bahasa Inggris, tidak banyak daya tarik bagi siswa untuk belajar bahasa asing. Sesudah dihapuskan syarat bahwa hanya siswa yang lulus dalam bahasa asing boleh melanjutkan ke universitas, jumlah siswa yang belajar bahasa asing menurun dengan cepat, seperti dibicarakan di atas.

Pada waktu itu juga tidak banyak perusahaan Australia yang mengadakan hubungan dagang dengan negeri lain. Dengan banyaknya kesempatan kerja serta kemakmuran yang berlangsung terus, tidak ada dorongan untuk meningkatkan perdagangan. Perusahaan yang kebetulan mempunyai kegiatan di luar negeri juga tidak menunjukkan minat agar pegawai mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa negara yang berhubungan dengan mereka.

Dengan meningkatnya pengangguran selama tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan, pemuda dan pemudi Australia mulai memilih bidang studi yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan. Pada mulanya hal itu tidak menguntungkan-

kan pengajaran bahasa asing. Kebanyakan siswa waktu itu belajar bahasa asing hanya untuk kepentingan pribadi, seperti untuk bepergian ke luar negeri atau membaca buku dalam bahasa asing. Dengan makin sulitnya memperoleh pekerjaan, siswa mulai lebih memusatkan perhatian mereka pada bidang studi yang akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan yang baik dan mereka tidak begitu berminat mempelajari hal-hal yang hanya untuk bersenang-senang. Itulah yang ikut menyebabkan menurunnya jumlah siswa yang mempelajari bahasa asing.

Ketika mulai disadari bahwa kemampuan dalam bahasa asing berguna untuk memperoleh pekerjaan, jumlah siswa yang mempelajari bahasa mulai meningkat. Pada mulanya hanya bahasa Jepang yang menerima keuntungan dari situasi tersebut sehingga pada pertengahan tahun delapan puluhan jumlah siswa yang belajar bahasa Jepang, baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi meningkat cepat.

Dengan dibukanya hubungan perdagangan dengan RRC, jumlah siswa yang belajar bahasa Cina juga meningkat. Bahasa lain yang juga berkaitan dengan kesempatan kerja adalah bahasa Jerman dan baru-baru ini bahasa Korea.

Pada awalnya, ketika siswa menghubungkan bahasa asing dengan kesempatan kerja, kedudukan bahasa Indonesia dirugikan. Sementara bahasa Jepang dianggap, pada tahun delapan puluhan, sebagai bahasa yang dapat memberi kesempatan kerja paling luas, bahasa Indonesia dianggap tidak begitu berguna untuk tujuan itu. Menurunnya jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia pada pertengahan tahun delapan puluhan, sebagian disebabkan oleh makin populernya bahasa Jepang.

Seperti yang dibicarakan di atas, para pengusaha tidak begitu menyadari pentingnya kemampuan berbahasa asing. Baru pada tahun 1986 mulai disadari sepenuhnya oleh kalangan itu akan adanya hubungan antara penguasaan bahasa asing dan ekonomi Australia. Dalam sebuah konferensi pada tahun itu Profesor David Ingram dari Universitas Griffith menunjukkan dengan jelas kurangnya kemampuan berbahasa asing di kalangan pengusaha Australia dan banyaknya kerugian yang diderita Australia dalam persaingan internasional karena hal tersebut.

Pandangan Profesor Ingram itu adalah salah satu faktor penting dalam penentuan kebijakan nasional untuk bahasa, yang diumumkan pada tahun 1987. Sejak itu makin banyak pengusaha yang menyadari bahwa kemampuan berbahasa asing dapat menguntungkan dunia usaha mereka.

Meningkatnya jumlah siswa yang belajar bahasa Indonesia sejak akhir tahun delapan puluhan sebagian disebabkan oleh makin disadarinya bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berguna untuk dipakai selama liburan di Pulau Bali, tetapi juga dapat memberi kesempatan kerja yang lebih luas. Pihak-pihak yang berusaha untuk menarik siswa untuk mempelajari bahasa Indonesia sekarang dapat menunjukkan makin berkembangnya perdagangan antara Australia dan Indonesia dan makin dibutuhkan-nya pegawai yang mampu berbahasa Indonesia.

7. Bahan dan Metode Pengajaran Bahasa Indonesia

Pengembangan bahan pengajaran bahasa Indonesia jauh terbelakang dibanding kan dengan yang sudah dikembangkan untuk bahasa internasional, seperti bahasa Prancis, Jerman, Italia, dan baru-baru ini bahasa Jepang. Banyak inovasi dalam metode pengajaran yang dilakukan untuk bahasa-bahasa Eropa pada tahun tujuh puluhan dan baru sekarang mulai dilakukan untuk pengajaran bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, perlu disadari bahwa pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing tidak begitu penting di dunia internasional. Setahu saya, pada tingkat sekolah dasar dan menengah, bahasa ini diajarkan hanya di Australia. Bahkan, di Australia jumlah yang mempelajari bahasa Indonesia jauh lebih sedikit daripada jumlah yang mempelajari sejumlah bahasa lain. Dengan mempertimbangkan hal itu, dapat dikatakan bahwa jumlah dan mutu bahan pengajaran bahasa Indonesia yang sudah dikembangkan di Australia cukup memuaskan.

Pada mulanya guru-guru harus menciptakan sendiri bahan pengajaran yang akan digunakan mereka. Sampai sekarang masih ada universitas yang mengembangkan bahan pengajaran mereka sendiri dan di sekolah dasar dan menengah guru tetap harus menciptakan sebagian bahan yang dipakai di kelas.

Buku pelajaran bahasa Indonesia yang pertama yang diterbitkan di Australia adalah *Introducing Indonesian*, karangan T.S. Lie, diterbitkan pada tahun 1965. Buku itu mengikuti metode tata bahasa-terjemahan (*grammar-translation method*). Buku itu disusun pada tahun 1966 dengan judul *Bahasa Indonesia for Beginners*, yang ditulis oleh Poerwanto Danusugondo. Buku pertama yang disusun khusus untuk dipakai di sekolah adalah karangan Vern Turner dengan judul *Indonesian for Schools*, diterbitkan pada tahun 1967.

Periode antara akhir tahun enam puluhan dan awal tahun tujuh puluhan merupakan tahun-tahun yang produktif dari segi pengembangan bahan pengajaran bahasa Indonesia. Sayang, buku-buku itu mengandung kelemahan, yaitu bahasa dan percakapan yang digunakan tidak mencerminkan situasi sehari-hari yang sebenarnya. Kalimat-kalimat yang dipakai tidak saling berhubungan dan hanya digunakan untuk menjelaskan hukum tata bahasa. Sesuai dengan metode tata bahasa-terjemahan, buku-buku itu menitikberatkan pada kegiatan membaca dan menulis. Kehidupan sehari-hari orang Indonesia tidak banyak dibicarakan dan siswa tidak dilatih untuk menggunakan bahasa dalam situasi kehidupan yang sebenarnya.

Buku pertama yang berdasarkan metode *audio-lingual* adalah *Lantjar Berbahasa Indonesia* oleh Ichsan, Baker, dan Lane, pada tahun 1968. Buku itu dilengkapi dengan kaset. Dalam kursus itu yang diutamakan adalah kemampuan mendengar dan berbicara. Sejumlah buku lain yang berdasar pada metode *audio-lingual* diterbitkan hingga tahun 1972. Pada waktu itu juga diterbitkan sejumlah bahan bacaan, misalnya *A Modern Reader in Indonesian* oleh Sarumpaet dan Hendrata (1968) dan *Melawat ke Negara Tetangga* oleh Yohanni Johns (1969).

Antara tahun 1973 dan 1987 sedikit sekali bahan pengajaran yang diterbitkan dan hal itu terjadi pada masa jumlah siswa menurun, baik di sekolah maupun di universitas. Hanya satu buku penting yang diterbitkan pada masa itu, yaitu *Bahasa Indonesia: Langkah Baru* oleh Yohanni Johns pada tahun 1977. Buku itu juga berdasar pada metode audio-lingual. Seperti kursus *audio-lingual* lainnya, buku itu dilengkapi dengan rekaman dan siswa harus mendengarkan serta mengulang kalimat-kalimat dengan menyulih salah satu kata dalam kalimat dengan kata lain (*substitution drills*). Metode itu ternyata tidak berhasil menarik minat siswa dan gagal mengembangkan kemampuan mereka untuk menggunakan bahasa secara aktif.

Baru pada tahun 1988, ketika jumlah siswa bahasa Indonesia mulai meningkat kembali dan Pemerintah mulai memberikan perhatian penuh pada pengajaran bahasa asing, muncullah karya baru yang penting. Pada tahun 1988 diterbitkan *Bahasa Tetanggaku* Jilid Satu karangan Ian White. Jilid kedua dan ketiga menyusul pada tahun 1989 dan 1990. Buku itu merupakan buku bahasa Indonesia pertama yang menganut pendekatan *functional-notional* dan komuni-katif. Perlu dicatat bahwa walaupun baru untuk pengajaran bahasa Indonesia, metode itu sudah mulai digunakan dalam buku-buku pengajaran bahasa Eropa sejak sepuluh tahun sebelumnya.

Bahasa Tetanggaku juga merupakan buku pertama yang memakai format yang menarik dan menggairahkan, yaitu dengan menggunakan banyak gambar dan foto serta dilengkapi dengan keterangan tentang segi-segi kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kursus itu dimaksudkan untuk dipakai di sekolah dan segera menjadi sangat populer karena memenuhi kebutuhan untuk bahan pengajaran yang menarik dan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi.

Buku terbaru, yang ditulis khusus untuk pemakaian di sekolah, *Ayo!*, muncul pada tahun 1991. Menurut penulisnya, Victoria Taylor dan Michael Sedunary, buku itu menggabungkan unsur-unsur yang paling berguna dari metode tata bahasa-terjemahan, *audio-lingual*, dan *functional-notional*. Buku itu juga bertujuan menyenangkan dan menghibur siswa selama mereka belajar, yaitu dengan dihiasi foto, gambar, dan karikatur yang berwarna.

Tekanan buku-buku baru adalah pada kemampuan berkomunikasi dan perbedaan gaya jelas tampak antara metode baru dan yang lama.

8. Masa Depan Bahasa Indonesia di Australia

Sikap masyarakat Australia terhadap bahasa asing sedang mengalami perubahan. Tidak lagi kebanyakan orang merasa bahwa kemampuan berbahasa asing tidak ada gunanya. Kesadaran bahwa penguasaan bahasa asing dapat membawa keuntungan ekonomi makin meluas di masyarakat Australia. Namun, masih banyak pengusaha Australia yang belum menerima konsep tersebut dan masih banyak juga yang belum menyadari keuntungan meng-ekspor hasil-hasil Australia ke pasaran luar negeri. Dengan makin banyaknya perusahaan yang akan memperluas kegiatan mereka ke luar negeri, kebutuhan akan staf yang mampu berbahasa asing akan meningkat.

Perdagangan antara Australia dan Indonesia pasti akan meningkat pada masa depan dan hal itu tentu akan menguntungkan pengajaran bahasa Indonesia di Australia.

Prakarsa pemerintah dan universitas untuk menggalakkan studi bahasa Indonesia akan terus digiatkan. Pada masa depan siswa-siswa akan lebih mampu berbahasa Indonesia daripada pada masa lampau. Dengan adanya pengajaran yang memakai pendekatan komunikatif yang baru, guru-guru lebih terlatih dalam mengajar bahasa Indonesia dan lebih banyak mendapat kesempatan untuk belajar di Indonesia.

CATATAN

1. Semua data statistik dalam makalah ini diambil dari tulisan P.J. Worsley *Unlocking Australia's Language Potential - Profiles of Nine Key Languages in Australia: Indonesian/Malay* (laporan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Pendidikan, 1992). Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Worsley yang telah mengizinkan penulis menggunakan data dari laporan tersebut. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Indrawati Zifirdaus dan Musnarti Dickenson yang membantu menyunting makalah ini.
2. Angka-angka ini dari Departemen Pendidikan Queensland.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia
Pemakalah : James Sneddon
Pemandu : Soeseno Kartomihardjo
Pencatat : Endang Nilla
Titiek Indiyastuti

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Abah Sri, Yogyakarta

- a. Bagaimana cara mengajarkan percakapan bahasa Indonesia kepada para siswa di Australia?
- b. Media apa yang digunakan untuk mengajarkan percakapan tersebut?

Jawaban:

Pada mulanya, sekitar tahun 50-an tujuan pengajaran bahasa Indonesia bukan untuk berkomunikasi, melainkan lebih ditekankan pada kemampuan menerjemahkan teks karena metode yang dipakai adalah *grammar-translation*.

Percakapan hanya diberikan satu kali seminggu dengan jumlah siswa 20–25 orang. Australia mempunyai budaya (*culture*) *non foreign language learning* 'tidak perlu belajar bahasa asing'. Akan tetapi, sejak tahun 1988 pemerintah Australia mengharuskan siswa-siswa sekolah menengah untuk mempelajari bahasa asing, terutama untuk baca, tulis, dan bicara. Hambatan pada masa itu ialah pengajar bahasa Indonesia.

Guru menyarankan kepada siswa-siswanya untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia di luar kelas ataupun berkunjung ke Indonesia dan mengadakan pertukaran pelajar.

Di universitas-universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia terdapat *Indonesian Student Club*.

2. **Pertanyaan:** Moh. Tadjuddin, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran

- a. Berapa lama program sarjana untuk mata kuliah bahasa Indonesia dilaksanakan?
- b. Bagaimana jumlah persentase mata kuliah bahasa Indonesia dari seluruh mata kuliah yang ada?
- c. Bagaimana kemampuan para mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia pada akhir tahun pelajaran mereka? Apakah sudah bisa membaca novel yang berbahasa Indonesia?

- d. Apakah para mahasiswa tersebut diharuskan membuat skripsi dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lain?

Jawaban:

- Program sarjana lamanya tiga tahun, sedangkan untuk mendapat gelar B.A. (*honour*) lamanya empat tahun. Sistemnya tidak sama pada semua universitas.
- Di Griffith University, pelajaran Bahasa Indonesia mencakup 25% dari seluruh mata kuliah pada tahun I, 50% pada tahun II, dan 50% pada tahun III.
- Kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia pada akhir pelajaran mereka selalu berlainan.
- Pembuatan skripsi hanya diharuskan bagi mahasiswa yang mengambil gelar B.A. (*honour*), sedangkan yang tidak mengambil program gelar, pada tahun III harus menulis menggunakan bahasa Indonesia dengan 2.000–3.000 kata. Pada tahun III mahasiswa sering mengalami kesukaran dalam penggunaan *clause relative*.

Contoh: orang yang *ditolong* oleh mereka dalam bahasa Inggris:
the person they help --> verba dalam bentuk aktif

Mereka mengalami kesukaran dalam memakai bentuk pasif (bentuk awalan *di-* --> sering tertukar antara pemakaian bentuk aktif dan bentuk pasif.

Contoh: Presiden RI *melahirkan* di suatu tempat.
Maksudnya, *dilahirkan*.

Kesukaran itu terjadi karena sejak SD–SMA siswa tidak belajar tata bahasa dan baru mempelajarinya di tingkat universitas.

3. Pertanyaan: Djalinus Syah

- Berapa lama Anda mempelajari bahasa Indonesia?
- Apakah orang Australia mengalami kesulitan dalam melafalkan bunyi *sengau ng*?
- Mana yang sukar: orang Indonesia dalam mempelajari bahasa Inggris atau orang asing dalam mempelajari bahasa Indonesia?

Jawaban:

- Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Sydney dan sering mendapat kesempatan datang ke Indonesia, sampai sekarang masih belajar bahasa Indonesia.
- Orang Australia mengalami kesukaran dalam melafalkan *ng* pada awal kalimat. Sering itu kata *dengan* dilafalkan *dengang*. Hal itu dipengaruhi oleh bentuk *ing* dalam bahasa Inggris yang lebih banyak terletak pada akhir kata.

- c. Banyak orang asing berpendapat bahwa bahasa Indonesia itu mudah dipelajari, tetapi pernyataan ini tidak benar.

4. **Pertanyaan:** Veeramalla Anjaiah, Mahasiswa Asing (India),
Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Seberapa jauh bahasa Indonesia berpengaruh dalam mendapatkan pekerjaan khususnya dalam pemerintah/birokrasi Australia?

Jawaban:

Makin banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintah yang sadar akan pentingnya pengetahuan bahasa asing.

5. **Pertanyaan:** S. Eryda Lubis, KIP Jakarta

Apakah tujuan pengajaran bahasa di tingkat SD di Australia?

Jawaban:

Di tingkat SD bahasa asing hanya diajarkan satu jam seminggu, tetapi ada anggapan kalau sejak kecil sadar akan pentingnya dan adanya bahasa asing hal itu dapat membantu kelak jika mereka belajar bahasa asing di sekolah menengah (4--5 jam seminggu)

6. **Pertanyaan:**

Apakah di Australia ada jurusan pendidikan untuk guru bahasa Indonesia?

Jawaban:

Mereka yang ingin menjadi guru, harus mengikuti *Diplome of Education*, dengan mengambil metodologi bahasa sebagai mata kuliah.

PERKEMBANGAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI JERMAN

Bernd Nothofer
Universitas Frankfurt

Penelitian tentang bahasa Melayu/Indonesia dan pengajaran bahasa Melayu/Indonesia pada universitas Jerman dimulai oleh sarjana Jerman, Otto Dempwolff, yang juga dikenal sebagai pelopor ilmu linguistik historis bahasa-bahasa Austronesia (Melayu-Polinesia). Otto Dempwolff bekerja sebagai guru besar di Universitas Hamburg dan menjadi kepala *Seminar für Indonesische und Sudseesprachen* (Jurusan Bahasa-Bahasa Indonesia dan Lautan Teduh yang dibentuk pada tahun 1931 di Hamburg). Otto Dempwolff menyusun tata bahasa Melayu/Indonesia pertama yang ditulis dalam bahasa Jerman (*Einführung in die Malaiische Sprache*, Berlin, 1941). Bukunya tentang perbandingan dua belas bahasa Austronesia pada masa itu masih dianggap sebagai karangan terpenting di bidang linguistik bandingan Austronesia (*Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes*. Tiga jilid, Berlin, 1933–1938).

Sesudah Perang Dunia Kedua, Jerman dibagi dua dan perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Jerman perlu dibicarakan di dalam dua bab yang berbeda, yaitu perkembangannya di RFJ dan di RDJ. Perlu ditekankan di sini bahwa batas antara RFJ dan RDJ sering bukan hanya batas atau tembok politik, melainkan juga akademis, yaitu sarjana RFJ jarang memperhatikan/menggunakan terbitan RDJ dan sebaliknya. Makalah ini akan mulai dengan perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di RFJ. Perlu saya akui bahwa makalah saya tentang perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Jerman yang saya sajikan pada Kongres Bahasa Indonesia VI sama sekali tidak memerikan perkembangan di RDJ.

Di RFJ ada tiga mahasiswa Dempwolff yang meneruskan tradisi mengajarkan bahasa Melayu/Indonesia sesudah universitas mulai dibuka kembali pada akhir tahun empat puluhan, yaitu Aichele, Kähler, dan Hilgers-Hesse. Aichele memimpin jurusan Bahasa-Bahasa Indonesia dan Lautan Teduh dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954. Pada tahun 1954 hingga 1978 Kähler menggantikan Aichele yang tidak menulis bahan pengajaran bahasa Indonesia. Hilgers-Hesse mulai mengajar bahasa Indonesia di Universitas Köln (*Malaiologischer Apparat*) pada tahun 1953. Kähler mengkhususkan diri dalam linguistik Indonesia dan Austronesia, Hilgers-Hesse dalam sastra Indonesia.

Kähler menerbitkan beberapa buku tentang bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah (misalnya tentang bahasa Nias, Enggano, dan Simalue). Buku tentang tata bahasa Indonesia (*Grammatik der Bahasa Indonesia 2*, revidierte Auflage, Wiesbaden, 1956 [1965]) yang terdiri atas penjelasan gramatikal yang diikuti latihan kalimat kurang berguna untuk pengajaran bahasa. Kursus bahasa Indonesia pada umumnya diajarkan oleh seorang lektor Indonesia yang menggunakan bahan yang dikumpulkannya sendiri.

Hilgers-Hesse agak giat di bidang penyusunan kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia-Jerman RFJ yang pertama diterbitkan oleh Karow (lihat di bawah) dan Hilgers-Hesse pada tahun 1962 (Karow/Hilgers-Hesse. *Indonesisch-Deutsches Wörterbuch*, Wiesbaden.). Edisi keduanya dari 1978 masih menggunakan ejaan yang lama. Dalam pengajaran bahasa Indonesia Hilgers-Hesse menggunakan sebuah naskah yang disusunnya sendiri dan fotokopinya dibagikan kepada mahasiswanya (*Indonesisch*, Köln, 1956). Pada waktu itu belum ada penutur asli sebagai lektor di Köln.

Hilgers-Hesse juga mengajarkan bahasa Indonesia bersama seorang lektor Indonesia di *Seminar für Orientalische Sprachen* pada Universitas Bonn (mulai 1959) dengan memakai bahan pengajaran yang tersebut di atas. Seminar ini didirikan untuk mengajarkan bahasa Arab, Persia, Cina, Jepang, dan Indonesia kepada staf diplomatik RFJ. Mahasiswa Universitas Bonn juga diizinkan mengikuti kursus bahasa. Poetzelberger yang juga menjadi anggota staf pengajar di Bonn menulis sebuah tata bahasa (*Einführung in das Indonesische*, Wiesbaden, 1965) yang kurang berguna sebagai bahan pengajaran. Bukunya terdiri atas empat bab, yaitu (1) ikhtisar gramatikal tanpa kalimat contoh; (2) bahasa sehari-hari: teks Indonesia dengan terjemahan interlinear atau teks Indonesia dan Jerman yang berhadapan, di bawah setiap teks ada catatan kaki yang merujuk pada bab gramatikal; (3) bahasa sastra: teks prosa dan puisi; (4) daftar kata Indonesia-Jerman dan Jerman-Indonesia.

Karow, guru besar linguistik dan sastra Asia Timur di Frankfurt sampai akhir tahun 70-an, sebenarnya merupakan ahli bahasa dan sastra Jepang meskipun dia ikut menerbitkan kamus bahasa Indonesia-Jerman (lihat di atas) dan mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia dalam program magister di bidang Sejarah dan Kebudayaan Asia Timur. Di Frankfurt pada tahun 70-an bahasa Indonesia diajarkan oleh seorang lektor Indonesia yang menggunakan bahan pengajaran yang disusunnya sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa antara tahun 50-an dan 70-an ada empat pusat pengajaran bahasa Indonesia di RFJ, yaitu Hamburg, Köln, Bonn, dan Frankfurt. Di semua universitas, kecuali Bonn, studi bahasa dan sastra Indonesia merupakan bagian dari program magister (S-2). Di semua universitas, kecuali di Köln, bahasa Indonesia diajarkan oleh penutur asli dan dosen Jerman. Pada waktu itu bahan pengajaran biasanya terdiri atas catatan yang disusun oleh dosen atau lektor setempat dan tidak pernah dibukukan.

Dengan penerbitan buku pengajaran oleh John U. Wolff (*Beginning Indonesian*, Ithaca,) dan Yohanni Johns (*Bahasa Indonesia. Langkah Baru*, Canberra) antara tahun 1975 dan 1978 periode baru dimulai dalam pengajaran bahasa Indonesia di Jerman. Buku yang dimaksudkan untuk pelajar yang berbahasa Inggris itu juga digunakan di universitas Jerman. Setiap pelajaran di dalam kedua buku tersebut terdiri atas percakapan, penjelasan gramatikal yang tidak terlalu teknis dan latihan kelas dan latihan laboratorium bahasa mengenai soal gramatikal yang dijelaskan. Yang dititikberatkan bukan lagi bahasa tulis, melainkan bahasa lisan. Dengan menggunakan salah satu atau kedua buku itu, laboratorium bahasa akhirnya juga menjadi bagian integral dalam pengajaran bahasa Indonesia.

Karena adanya bahan pengajaran yang baru itu, Universitas Köln untuk pertama kalinya (1976) mengadakan kursus intensif bahasa Indonesia yang pesertanya berasal dari pelbagai perguruan tinggi di RFJ. Kebanyakan pelajarnya bermaksud mengunjungi Indonesia untuk mengadakan riset lapangan di bidang antropologi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Peminatnya begitu banyak sehingga kursus intensif ini diulangi setiap tahun selama tiga tahun. Pada waktu itu sarjana Köln menyimpulkan bahwa sebuah buku pengajaran bahasa Indonesia untuk orang Jerman sangat diperlukan. Alasannya, tiga yaitu (1) sebuah buku pengajaran harus mengontraskan bahasa sasaran dan bahasa ibu si pelajar, yaitu bahasa Jerman; (2) ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam Wolff dianggap kurang formal (mulai dengan Pelajaran 7); (3) kosakata yang terdapat dalam buku Johns dianggap kurang cocok dengan maksud kunjungan mahasiswa Jerman ke Indonesia. Proyek itu dimulai pada awal tahun 80-an dengan bantuan Yayasan Volkswagen. Buku pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur bahasa Jerman yang disusun dalam rangka proyek Volkswagen itu diterbitkan pada tahun 1985 (jilid 1) dan 1987 (jilid 2) dengan judul *Bahasa Indonesia. Indonesisch für Deutsche* (sampai akhir 1992 dijual 5.000 buah buku). Pada tahun 1990 buku itu diterbitkan juga di Indonesia oleh Katalis, Jakarta. Buku itu terdiri atas dua puluh pelajaran. Setiap pelajaran mengandung tujuh bagian, yaitu percakapan, catatan kebudayaan, tata bahasa, latihan kalimat, latihan kosakata, dan percakapan bebas (lihat Lampiran 1). Rekaman percakapan dan latihan kalimat digunakan dalam laboratorium bahasa. Perlu dicatat bahwa kosakata buku itu mengutamakan perbendaharaan kata yang diperlukan untuk mahasiswa dan sarjana yang bermaksud mengunjungi Indonesia dalam rangka melakukan riset lapangan. Itu sebabnya karya tersebut pasti kurang berguna untuk pelajar umum seperti turis. Buku yang baru itu digunakan dalam beberapa kursus intensif yang diadakan di Frankfurt pada pertengahan tahun 80-an.

Pada waktu yang sama terjadi perkembangan yang baru di Jerman: bukan hanya di keempat universitas yang pengajaran/pelajaran bahasa Indonesianya merupakan bagian inti dari studi bahasa dan sastra Indonesia sebagai mata pelajaran pokok (Hamburg [sastra Indonesia], Köln [sastra Indonesia], Frankfurt [linguistik Indonesia]), melainkan juga di universitas yang mengkhususkan diri dalam studi sosiologi, sejarah, dan antropologi Indonesia mulai dilaksanakan kursus bahasa

Indonesia dengan lektor Indonesia dan dengan menggunakan *Bahasa Indonesia, Indonesisch für Deutsche* dan/atau karya Johns sebagai bahan pengajaran (Bremen [sejarah], Bielefeld [sosiologi], Göttingen, Mainz, Tübingen dan München [antropologi]).

Keadaan khusus mulai berlaku untuk *Seminar für Orientalische Sprachen* di Universitas Bonn pada 1983: bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran sampingan untuk mahasiswa yang mengikuti program penerjemah yang baru. Staf diplomatik tidak mengikuti lagi kursus di seminar tersebut.

Pada tahun yang sama pusat studi Asia Tenggara dibuka di Passau (yang didirikan pada 1977). Mahasiswanya mengkhususkan diri dalam sejarah Asia Tenggara dan bahasa Indonesia atau bahasa Vietnam.

Pertengahan tahun 80-an juga merupakan waktu penerbitan kamus yang sangat diperlukan untuk membantu meningkatkan mutu pengajaran bahasa Indonesia di Jerman: Heuken 1987, *Kamus Jerman-Indonesia*, Jakarta merupakan kamus Jerman-Indonesia pertama yang bermutu. Kamus Jerman-Indonesia yang ditulis Darje Rahajoekoesoemah di sekitar dua puluh tahun sebelumnya kurang memuaskan karena banyak kesalahan terjemahan dan banyak entri Jerman yang berasal dari bermacam-macam dialek Jerman. Pada 1985 Wulffen menerbitkan kamus istilah ekonomi (*Wörterbuch wirtschaftlicher Begriffe. Indonesisch-Deutsch, Deutsch-Indonesisch*) yang jumlah entrinya agak terbatas. Kamus istilah sangat diperlukan untuk bidang yang lain juga. Damshauser dan Gucci sedang menyusun sebuah kamus istilah hukum Jerman-Indonesia/Indonesia-Jerman yang tidak lama lagi akan dicetak di Bonn (lihat Lampiran 2). Dengan munculnya program studi yang baru di Passau pada tahun 1989 dan di Frankfurt pada tahun itu yang menggabungkan studi daerah Asia Tenggara/Indonesia dengan ekonomi (ekonomi perusahaan dan nasional) perlu dilaksanakan kursus intensif tentang istilah bidang tersebut. Sayangnya, sampai sekarang agak sulit mencari lektor yang menguasai istilah itu, baik dalam bahasa Jerman maupun dalam bahasa Indonesia.

Terjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa Jerman yang mulai dihasilkan pada awal tahun 80-an sekarang sering dipakai sebagai bahan pengajaran, misalnya terjemahan Pramoedya Ananta Toer (*Bukan Pasar Malam* atau *Bumi Manusia*), Mochtar Lubis (*Senja di Jakarta*), Armijn Pane (*Belenggu*), sajak Rendra, dan Subagio Sastrowardoyo. Sebagai contoh kegiatan penerjemahan lihatlah Lampiran 2 yang mengandung daftar terjemahan yang dilakukan di Universitas Bonn.

Di bawah ini terdaftar semua universitas di bagian barat Jerman yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/latihan wajib untuk mahasiswa programnya atau yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam kursus khusus yang tidak wajib untuk mahasiswa antropologi, sosiologi, dan lain-lain.

a) Bahasa Indonesia sebagai kursus/latihan yang wajib

<i>Universitas</i>	<i>Mata Pel. Utama</i>	<i>Program</i>	<i>Kepala Jurusan</i>	<i>Jumlah Mahasiswa</i>
Bonn	bahasa Indonesia penerjemah (minor) BI: sekitar 35 jam (terutama latihan penerjemahan)	diploma	Damshäuser	130 orang
Passau	1) Sejarah Asia Tenggara/Indonesia BI: 6 kursus = 16 jam [2 kursus: 4 jam seminggu, 4 kursus: 2 jam seminggu] (Lihatlah Lampiran 3) 2) studi daerah Indonesia dan ekonomi/hukum BI: 5 kursus = 14 jam [2 kursus: 4 jam seminggu, 3 kursus: 2 jam seminggu]	magister diploma	Dahm	40 orang
Hamburg	bahasa dan sastra Indonesia BI: 11 kursus = 26 jam [2 kursus: 4 jam seminggu, 9 kursus: 2 jam seminggu]	magister	Carle	140 orang
Frankfurt	1) linguistik Indonesia 2) studi daerah Indonesia dan ekonomi (Lihatlah Lampiran 4) BI untuk 1) dan 2): 7 kursus = 26 jam [1 kursus: 6 jam seminggu, 4 kursus: 4 jam seminggu, 2 kursus: 2 jam seminggu]	magister magister	Nothofer	40 orang
Köln	bahasa dan Indonesia BI: 5 kuliah = 16 jam [2 kursus: 5 jam seminggu, 3 kursus: 2 jam seminggu]	magister	Pink	25 orang

b) Kursus bahasa Indonesia yang tidak wajib

<i>Universitas</i>	<i>Mata Pel. Utama</i>	<i>Program</i>	<i>Kepala Jurusan</i>	<i>Jumlah Mahasiswa</i>
Bremen	sejarah	magister	Wagner	5 orang
Göttingen	antropologi	magister	Hauser-Schäublin	20 orang
München	antropologi	magister	Laubscher	15 orang
Bielefeld	sosiologi	diploma	Evers	10 orang
Mainz	pembangunan antropologi	magister	Kohl	15 orang

(Tübingen) untuk sementara tidak diadakan kursus bahasa Indonesia

Di RDJ didirikan tiga perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Indonesia sesudah Perang Dunia Kedua, yaitu Berlin, Jena, dan Leipzig. Pengajaran bahasa Indonesia dan publikasi tentang bahasa Indonesia dimarkahi oleh tiga fakta yang khusus.

- 1) Kebanyakan dosen bahasa Indonesia dari RDJ yang mendapat pendidikan sebelum 1965 hanya menguasai bahasa Indonesia yang dipakai sebelum peristiwa tanggal 30 September 1965. Sesudah kejadian itu, sarjana RDJ tidak diizinkan lagi mengunjungi Indonesia. Itulah sebabnya, baik bahan pengajaran maupun publikasi yang diterbitkan sesudah 1965 tidak atau hanya secara terbatas mengandung unsur yang memasuki bahasa Indonesia antara tanggal itu dan penyatuan Jerman. Kekurangan yang sama juga berlaku untuk lektor Indonesia yang bekerja di RDJ karena sesudah 1965 tidak ada lagi penutur asli bahasa Indonesia yang bisa diundang menjadi lektor di Jerman Timur.
- 2) Dosen bahasa Indonesia di RDJ yang mendapat pendidikan sesudah 1965 tidak pernah diberi kesempatan berkunjung ke Indonesia untuk memakai bahasa Indonesia dengan orang Indonesia. Tidak perlu ditekankan bahwa bahasa Indonesianya pada umumnya kurang lancar dan juga kurang mencerminkan perkembangan sesudah 1965.
- 3) Karena kebanyakan sarjana RDJ tidak diizinkan meninggalkan negaranya, mereka pada umumnya tidak pernah dapat menghadiri simposium/kongres bahasa Indonesia yang diadakan di negara barat, terutama sesudah didirikannya tembok antara RFJ dan RDJ pada 1963.

Ketiga pengamatan itu menjelaskan bahwa sarjana RDJ terpaksa bekerja secara terisolasi dari negara barat dan dari Indonesia selama hampir 30 tahun. Sesudah penyatuan Jerman, cukup banyak mahasiswa dan dosen dari bekas RDJ datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia yang modern. Kerja sama antara pengajar bahasa dari bagian barat dan timur Jerman sekarang sudah mulai agak erat meskipun perlu dicatat di sini bahwa—karena kekhawatiran tentang jaminan tempat kerjanya—dosen dari bagian timur Jerman belum bisa bekerja

dengan sepenuh hati. Diharapkan bahwa keputusan tentang penempatan pengajar bahasa Indonesia di ketiga universitas tersebut di atas bisa diambil dengan segera.

Pengajaran bahasa Indonesia di Jena dimulai oleh Harry Spitzbart pada 1958. Selain mengajarkan bahasa Indonesia, ahli bahasa itu juga meneliti pengaruh bahasa Sanskerta atas bahasa Indonesia dan mengadakan studi leksiko-gramatikal. Sekarang ini Jurusan Bahasa Indonesia terdiri atas seorang dosen dan seorang asisten. Kedua sarjana ini mengkhususkan diri dalam penelitian tentang verba dan afiksasinya (pasif, awalan *ber-*, dan lain-lain). Bahan pengajarannya terdiri atas buku Hendrata dan Nothofer/Pampus. Jumlah mahasiswa terbatas sekali (empat/lima orang). Perpustakaan jurusan ini sangat kecil (kira-kira 400 buku).

Di Leipzig bahasa Indonesia tidak bisa dipelajari sebagai mata pelajaran utama atau sampingan meskipun pengajarannya sudah dimulai pada tahun 50-an dan meskipun dosennya menerbitkan beberapa buku pengajaran dan kamus bahasa Indonesia. Sarjana yang paling produktif adalah Kahlo yang menerbitkan kamusnya yang pertama pada tahun 1950 *Malayisch-Deutsches und Deutsch-Malayisches Wörterbuch*, Berlin) yang dilengkapi oleh sebuah suplemen dengan judul yang sama (Leipzig, 1956). Buku pengajarannya dengan judul *Grundriss der malayischen und indonesischen Sprache* (Leipzig, 1957) merupakan pengantar bahasa Indonesia yang kurang dikenal di negara Barat. Patut diperhatikan bahwa salah satu teks latihannya terdiri atas riwayat hidup Aidit. Bersama Simon-Bärwinkel disusunnya Kahlo/Simon Bärwinkel, 1963. *Wörterbuch Indonesisch-Deutsch*, Leipzig, 1967, *Deutsch-Indonesisches Wörterbuch*, Leipzig, Kamus yang terakhir itu dicetak ulang di Leipzig (RDJ) dan di München (RFJ) pada 1985. Kahlo digantikan di Leipzig oleh Krause yang menulis sebuah buku pengajaran (*Lehrbuch der Indonesischen Sprache*, Leipzig, 1978), sebuah buku percakapan (*Deutsch-Indonesisches Gesprächsbuch*, Leipzig, 1983) dan sebuah kamus (*Wörterbuch Indonesisch-Deutsch*, Leipzig dan München, 1985). Kamus Indonesia-Jerman yang disusun dengan bantuan Simon-Bärwinkel tidak begitu berbeda dari kamus Kahlo/Simon-Bärwinkel 1963.

Mahasiswa bahasa Indonesia belum pernah lebih dari lima orang. Lektor Indonesia belum pernah ada. Perpustakaan Indonesia juga belum ada.

Pengajaran bahasa Indonesia di Humbolt-Universität dimulai tahun 1958 (Huber). Jurusan Asia Tenggara sampai penyatuan Jerman menawarkan program diploma penerjemah bahasa Indonesia dan studi Asia Tenggara dengan titik berat linguistiknya pada bahasa, seperti bahasa Vietnam dan bahasa Indonesia. Bahan pengajaran terdiri atas naskah yang ditulis oleh dua asisten Jerman bersama seorang Lektor Indonesia. Sesudah 1990 ada dua program magister, yaitu studi Indonesia (Indonesistik) dan studi Asia Tenggara seperti sudah ada sebelum penyatuan Jerman. Kedua program itu diikuti oleh sekitar 40 mahasiswa. Sekarang karya Nothofer/Pampus melengkapi bahan pengajaran bahasa Indonesia.

Dua skripsi sarjana bekas RDJ tentang istilah ekonomi dan seni yang belum saya lihat mungkin merupakan bahan yang penting untuk pengajaran bahasa

Indonesia (Teichert, U. 1988. *Fachwortschatz auf dem Gebiet des Außenhandels Deutsch-Indonesisch*. Diplomarbeit. Berlin.; Wehden, E. 1955. *Sachgebietswortschatz Deutsch und Indonesisch auf dem Gebiet der Kunst*. Diplomarbeit. Berlin.)

Universitas	Mata Pel. Utama	Program	Kepala Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Berlin	1) sejarah dan kebudayaan Asia Tenggara BI: 8 kursus = 36 jam [2 kursus: 6 jam seminggu, 6 kursus: 4 jam seminggu] 2) studi Indonesia (Indonesistik) BI: 8 kursus = 38 jam [1 kursus: 8 jam seminggu, 1 kursus: 6 jam seminggu, 6 kursus: 4 jam seminggu].	magister	Kubitschek	40 orang
Jena	linguistik Indonesia jumlah jam kursus belum ditentukan	magister	Carstens	4 orang
Leipzig	bahasa Indonesia	—	(Krause)	5 orang

Hanya dengan pengajaran bahasa Indonesia yang intensif bisa dihasilkan karya berbagai aspek kebudayaan dunia Melayu seperti terlihat dalam daftar penelitian yang diselesaikan di Universitas Hamburg sejak 1991 (lihat Lampiran 5). Temanya ialah, antara lain, sastra modern Indonesia dengan akar Bali, sastra modern Indonesia dengan tema alam hutan, karikatur Malaysia modern, dan sastra modern Malaysia.

2.3.7	<i>Negative Befehlssätze (Verneinter Imperativ)</i>	40
2.3.8	sudah, belum, sedang	42
2.3.9	<i>Futur: akan, mau</i>	44
2.3.10	<i>Die Fragepromen siapa und apa</i>	45
2.3.11	<i>Verdopplung von Wortformen</i>	46
2.3.12	<i>Das Suffix-lah als Höflichkeitselement</i>	48
2.4	LEXIKON	
2.4.1	mari, silakan	49
2.4.2	<i>Geographische Namen (Länder, Völker, Sprachen)</i>	50
2.4.3	siap, sedia, selesai	51
2.5	STRUKTURÜBUNGEN	52
2.6	PHONETIK: <i>Das indonesische Schriftzeichen e</i>	55
2.7	ÜBERSETZUNGSÜBUNG	57
2.8	FREIE DIALOGE	58

LEKTION III

3.0	DIALOG: <i>Klaus meldet sich bei den Behörden an</i>	59
3.1	ZUSATZLICHES VOKABULAR	62
3.2	KULTURELLE NOTIZEN	
3.2.1	<i>Behördenbesuche</i>	63
3.3	GRAMMATIK UND ÜBUNGEN	
3.3.1	<i>Ini und itu als Attribut</i>	65
3.3.2	<i>Markierung des Artikels</i>	66
3.3.3	<i>Fragenbildung mit apa (Fortsetzung)</i>	69
3.3.4	<i>Fakultativer Gebrauch von Verben</i>	70

3.4	STRUKTURÜBUNGEN	72
3.5	PHONETIK: <i>Indonesisch /p/, /t/, /k/</i>	75
3.6	ÜBERSETZUNGSÜBUNG	76
3.7	FREIE DIALOGE	77

LEKTOR IV

4.0	DIALOG: <i>Klaus will nach Yogyakarta</i>	78
4.1	ZUSATZLICHES VOKABULAR	82
4.2	KULTURELLE NOTIZEN	
4.2.1	<i>Reisen</i>	83
4.3	GRAMMATIK UND ÜBUNGEN	
4.3.1	<i>Wortbildung mit ber-</i>	84
4.3.2	<i>Die Zahlen</i>	87
4.3.3	<i>Die Uhrzeit</i>	89
4.3.4	<i>Zeitadverbien</i>	92
4.3.5	<i>Zeitbegriffe und Zeitangaben</i>	94
4.3.6	<i>yang als Bindeglied zwischen Nomen und Adjektiv</i>	99
4.4	LEXIKON	
4.4.1	<i>(ada) banyak</i>	100
4.4.2	<i>Verneinung mit bukan</i>	100
4.5	STRUKTURÜBUNGEN	103
4.6	PHONETIK: <i>Der Stimmritzenverschluß /ʔ/</i>	107 107
4.7	ÜBERSETZUNGSÜBUNG	107
4.8	FREIE DIALOGE	108

LEKTOR V

5.0	DIALOG: <i>Klaus will Dr. Harsono in Bulaksumur aufsuchen</i>	110
5.1	ZUSÄTZLICHES VOKABULAR	113
5.2	KULTURELLE NOTIZEN	114
5.2.1	<i>Gesundheitswesen</i>	114
5.3	GRAMMATIK UND ÜBUNGEN	116
5.3.1	<i>Transitive und intransitive Verben</i>	117
5.3.2	<i>Verben mit der Vorsilbe me-</i>	119
5.3.3	<i>Erkennen des Wortstammes</i>	119
5.3.4	<i>sakit + Körperteil vs. Körperteil + sakit</i>	120
5.3.5	<i>lama als Zeitadverb</i>	121
5.3.6	<i>Bruchzahlen</i>	123
5.3.7	<i>Rechenoperationen</i>	123
5.4	LEXIKON	
5.4.1	<i>Berufsbezeichnungen</i>	124
5.4.2	<i>Die Modalverben bisa und dapat</i>	126
5.4.3	<i>Die Adjektive lama und tua</i>	127
5.5	STRUKTURÜBUNGEN	127
5.6	PHONETIK: /H/	130

Anfänger I 1. Semester	G r u n d s t e i n	Einführung	Propädeutikum I	4	kein Scheinerwerb möglich I Voraussetzung für Schein im Anfänger II auf Wunsch nur eine Teilnahmebescheinigung
Anfänger II 2. Semester		Vertiefung	Propädeutikum II	4	MA: Sprachschein I Dipl: Sprachein
Fortgeschrittene 3. Semester		Konversation u. Aufsätze	Präseminar	2	MA: Sprachschein II Dipl.: Sprechschein
MA: Zwischenprüfung			Dipl.: Vordiplom		
Übersetzung I Hauptstudium		Konversation und Übersetzungen Indonesisch => Deutsch	Hauptseminar Teil I	2	kein Scheinerwerb möglich I Voraussetzung für Schein im Übersetzung II auf Wunsch nur eine Teilnahmebescheinigung
Übersetzung II Hauptstudium		Konversation und Übersetzungen Deutsch => Indonesisch	Hauptseminar II	2	MA: SOA als Hauptfach: 1 Schein MA: SOA als Nebenfach: 1 Schein Dipl.: 1 Schein
Lektürekurs Hauptstudium		Textzusammenfassungen	Übung	2	MA: SOA als Hauptfach: 1 Schein MA: SOA als Nebenfach: freiwillig Dipl.: freiwillig

Auslandsaufenthalt:

Einsemestriger Studienaufenthalt im malaiischsprachigen Raum (erwünscht)

Wirtschaftsenglisch:

Die Teilnahme an der z.Zt. stattfindenden Veranstaltung Wirtschaftsenglisch FB 02) wird dringend empfohlen.

LEHRVERANSTALTUNGEN*Südostasienwissenschaften**Fächergruppe A: Sprachvermittlung**Grundstudium:*

Indonesisch für Anfänger I	6 SWS Schein
Indonesisch für Anfänger II	4 SWS Schein
Indonesisch für Fortgeschrittene I (Aufsatzübungen)	4 SWS Schein
Indonesisch für Fortgeschrittene I (Sprechübungen/Konversation)	4 SWS Schein

Hauptstudium:

Übersetzungsübung Indonesisch-Deutsch	2 SWS Schein
Übersetzungsübung Deutsch-Indonesisch	2 SWS Schein
Wirtschaftsindonesisch	2 SWS Schein

26 SWS

7 Schein

DAMSHAUSER, B.:

- "Bemerkungen zum literarischen Werk Trisno Sumardjos", in: Nothofer, B./Pampus, K.-H. (Hrsg.): Die deutsche Malaiologie, Heidelberg 1988, S. 37—58.
- "Sajak-sajak Jerman" (*Deutsche Gedichte*), in: Horison XXIII-8, August 1988, S. 270—272. [Übersetzung gemeinsam mit Ramadhan K.H.]
- *-- "Gedichte aus Indonesien: Rendra und Trisno Sumardjo", in: Orientierungen 1/1989, S. 179—198.
- *-- "Gedichte und poetische Texte des indonesischen Dichters Sapardi Djoko Damono", in: Orientierungen 2/1989, S. 199—210.
- *Malam Biru di Berlin* (Blauer Abend in Berlin), Zweisprachige Anthologie deutscher Lyrik aus achthundert Jahren, herausgegeben und übersetzt von Ramadhan K.H. und Berthold Damshäuser, Jakarta 1990, 285 Seiten.
- *-- "Moderne indonesische Lyrik: Gedichte von Chairil Anwar und Taufik Ismail", in: Orientierungen 1/1990, S. 41—52.
- "Sajak-sajak Hermann Hesse" (Gedichte von Herman Hesse), in: Horison XXV-8, August 1990, S. 702-704. [Übersetzung gemeinsam mit Ramadhan K.H.]
- *Am Rande des Reisfelds*, (Pinggir Sawah), Zweisprachige Anthologie moderner indonesischer Lyrik, herausgegeben von Ramadhan K.H. und B. Damshäuser, übersetzt von B. Damshäuser, Jakarta (Pustaka Jaya) 1990, 383 Seiten
- "Priangan Si Jelita-Lyrik von Ramadhan K.H.", in: Orientierungen 2/1990, S. 61—74.
- "Perminus-Ladang yang dipanen orang rakus", Rezension des Romans "Ladang Perminus" von Ramadhan K.H., in: Kompas (Jakarta), 23.12.1990.
- "Naturmagie und Sufismus-Gedichte des indonesischen Lyrikers Abdul Hadi W.M.", in: Orientierungen 1/1991, S. 113—122.
- "Dichter zweier Welten-der malaysische Lyriker Muhammad Haji Salleh", in: Orientierungen 2/1991, S. 143—153.
- "ORIENTIERUNGEN" -Zeitschrift zur Kultur Asiens (Neue Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen der Universität Bonn), herausgegeben von Wolfgang Kubin und Berthold Damshäuser.

- *Amatan para ahli Jerman tentang Indonesia*, herausgegeben von Ramadhan K.H. und B. Damshäuser, (Aufsätze deutscher Indonesienexperten über Indonesien; Beiträge von: Roeder, Siebert, Mertes, Nothofer, Pampus, Dahm, Uhlig, Stüber, Magnis-Suseno, Gramich, Seltmann, Königsmann, Kleinsteuber, Sandersleben, Wessel, Diehn, Heuken, Damshäuser), Jakarta 1992 (Sinar Harapan), 247 Seiten.
- Magnis-Suseno, Gramich, Seltmann, Königsmann, Kleinsteuber, Sandersleben, Wessel, Diehn, Heuken, Damshäuser), Jakarta 1992 (Sinar Harapan), 247 Seiten.
- "Indonesia sudah menjadi sebagian dalam diriku", in Ramadhan K.H./B. Damshäuser: *Amatan para ahli Jerman*, Jakarta 1992, S. 30—39.
- *Indonesien-Analysen und Betrachtungen aus deutscher und indonesischer Sicht*, mit Beiträgen von: Sutan Takdir Alisjahbana, Franz Magnis-Suseno, B.J. Habibie, R.O.G. Roeder, Bernhard Dahm, Niels Mulder, Rudolf Gramich, Ajip Rosidi, Lioba Lenhart, Mochtar Lubis, Ingo Wandelt und Soemitro, Sonderheft 1992 der Zeitschrift "Orientierungen", herausgegeben von Berthold Damshäuser, 150 Seiten.
- "Neo-Nazi dan Penyakit Peradaban", in: "Tempo" (Jakarta), 30. Januari 1993, S. 95.
- "Ladang Permis by Ramadhan K.H. - the novel of the acculturalised corruption", in: *Tenggara 30* (Kuala Lumpur), S. 146—149.
- *-- *Priangan Si Jelita*. Gedichtsammlung von Ramadhan K.H., deutsche Übersetzung von B. Damshäuser, Pustaka Jaya (Jakarta), im Druck.
- Anthologie deutscher Lyrik des 20. Jahrhunderts in indonesischer Sprache, Herausgeber und Übersetzer: Ramadhan K.H. und B. Damshäuser, Balai Pustaka (Jakarta), im Druck.
- *Gebt mir Indonesien zurück*, Anthologie moderner indonesischer Lyrik, herausgegeben von Ramadhan K.H. und B. Damshäuser, übersetzt von B. Damshäuser, in Vorbereitung.
- *Impian dalam biru muda* (Anthologie deutscher Lyrik in malaysischer Sprache), herausgegeben und übersetzt von Muhammad Haji Salleh, Ramadhan K.H. und B. Damshäuser, in Vorbereitung.

DENKER, A.:

- *-- "Schwäzer als schwarz" (Übersetzung einer Kurzgeschichte von Iwan Simatupang), in: *Orientierungen* 2/1993, im Druck.

POETZELBERGER, H.A.:

- "Verständigung in Südostasien", in: Südostasien-Institut (Hrsg.): Brücken nach Südostasien, Heidelberg 1990, S. 19-33.

RANADIPOERA, S.:

- "Land, Geschichte und Kultur der Sundanesen", in: Pampus/Nothofer (Hrsg.): Die deutsche Malaiologie, Heidelberg 1988, S. 151-167.

STEMMER, G.:

- *-- "Wenn er noch einmal wählen könnte" (Übersetzung einer Kurzgeschichte von Putu Wijaya), in: Orientierungen 1/1992, S. 147-152.

STREBE, J.:

- *-- "Das Kind" (Übersetzung einer Kurzgeschichte von Budi Darma), Orientierungen 2/1992, S. 75-84.

ZIMMER, Th.:

- "Töte den Tiger in dir." Romane und Kurzgeschichten des indonesischen Schriftstellers Mochtar Lubis, in: Orientierungen 1/1990, S. 13-40.
- "Die Diebe vom Bromo", (Übersetzung einer Kurzgeschichte von Mochtar Lubis), in: Orientierungen 2/1990, S. 75-82.
- "Theorien wider das Übersetzen. Dargestellt am Beispiel einer Übersetzung aus dem Indonesischen", in: Orientierungen 1/1992, S. 61-76.
- Tiger! Tiger! (Übersetzung des Romans "Harimau! Harimau!") von Mochtar Lubis, Bad Honnef (Horlemann verlag) 1992, 288 Seiten.

FORSCHUNSPROJEKT:

DAMSHÄUSER, B./GUCCI, Rizal, S.H.:

Kamus Istilah Hukum Bahasa Indonesia-Jerman/Jerman-Bahasa Indonesia
(*Wörterbuch rechtssprachlicher Begriffe: Indonesisch-Deutsch/Deutsch-Indonesisch*)

WEITERE PROJEKTE:

DAMSHÄUSER, B. (Hrsg.):

- *Soeharto-Gedanken, Worte und Taten*, deutsche Fassung der Autobiographie des indonesischen Präsidenten Soeharto, Übersetzer: Thomas Zimmer, Verlag: PT. Citra Lamtoro Gung Persada (Jakarta), das Erscheinen ist für 1994 vorgesehen.
- Anthologie indonesischer Kurzgeschichten. (Antologi cerpen Indonesia modern)
- *Javanische Weisheit-Pituduh und Wewaler* (Arbeitstitel), aus dem Javanischen übersetzt von Dian Apsari und Berthold Damshäuser, Verlag: PT. Citra Lamtoro Gung Persada (Jakarta), das Erscheinen ist für 1995 vorgesehen.

Magisterarbeiten (seit 1991)

Jan Stark

Die Muhammadiyah-Bewegung des Reformislam in Indonesien. Entwicklung und Selbstverständnis (1991).

Arndt Graf

Indonesische Einstellungen zum Regenwald im Literarischen Werk von Mochtar Lubis (1992).

May Evers-Ludwig

Vision und Wirklichkeit im Comic des Malaysischen Cartoonisten Lat (1992).

Karin Wijayaratnam-Kraus

Entwürfe zur malaiischen Identität in Prosatexten von Shahnnon Ahmad (1993).

Karen Engelmann

Erziehungswerte und Bildungsideale in Vorkriegsromanen indonesischer Schriftstellerinnen (1993).

Annett Bormann

Werk des indonesischen Filmemachers Slamet Rahardjo und seine Rezeption in der Presse.

Elke Dittmer

"Hulubalang Raja": Textentwicklung und Kontext des historischen Romans von Nur St. Iskandar.

Gundi George

zur Darstellung Borneos in der modernen malaio-indonesischen Literatur

Michael Koch

Tahutete Tamari'i (Nuku Hiva): "In jenen vergangenen Nächten." Identität durch erlebte Geschichte (Marquesas-Inseln).

Jaser Kosasih

Hamkas adabiyah-Konzeption.

Michaela Meyer

Das populäre Lied von Iwan Fals. Textanalyse und Rezeption .

Corinna Schulz

Textanalyse ausgewählter ozeanischer Dramen.

(vorläufig)

Susanne Vahldiek

Europäische Jugendliteratur der indonesischen Kolonialzeit.

(vorläufig)

Markus Voss

Sangiresen in Manado: Migration und Kultutransformation.

Dissertationen (seit 1991)

Martina Heinschke

Angkatan 45: Literaturkonzeptionen im gesellschafts-politischen Kontext. Zur Funktionsbestimmung von Literatur im postkolonialen Indonesien (1991).

Doris Jedamski

Die Institution Literatur und der Prozeß ihrer Kolonisation. Entstehung, Entwicklung und Arbeitsweise des Kantoor voor de Volkslectuur/Balai Poestaka in Niederländisch-Indien zu Beginn dieses Jahrhunderts (1991).

Matthias Diederich

Indonesische Arbeitsmigranten in den Golfstaaten (1993).

Karl-Heinz Bußkamp

Das Liegut der Toba-Batak

Beate Carle

Das Groteske und Absurde in der modernen indonesischen Literatur.

Aendt Graf

Industrialisierung und Kulturtransformation der Soeharto-Ära in indonesischen Pressekommentaren.

Herbert Jardner

"Die Herre des Waldes": Orale Literatur als Medium zur Überlieferung regionaler Geschichte am Beispiel von Amanuban, Westtimor (Indonesien).

Uli Kozok

Die Klageliedtradition der Batak.

Emma Nababan

Pustaha Sang Maima (Toba-Batak)

Hans Schmidt

Sprachgeschichte des Rotuma.

Günter Spitzing

Interkulturelle Imagination am Beispiel Balis.

Karen Stadtlander

Anak Agung Pandji Tisnas Romane der 30er Jahre.

Jan Strak

Islam und Staat in öffentlichen Diskurs Malaysias.

Marion Struck-Garbe

Reflexion über Identität und Fremdbestimmung in der ozeanischen Literatur seit 1960.

Dami N. Toda

Neubewertung der regionalen Geschichte von Flores.

Werner Wasmuth

Übersetzen als interkulturelle Praxis-dargestellt am Beispiel Deutsch/Indonesisch. Eine kulturvergleichende Studie.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia di Jerman
Pemakalah : Bernd Nothofer
Pemandu : Samsuri
Pencatat : Andi St. Rosamaladewi
Erlis Nur Mujiningsih

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Soenardji, Semarang
 - a. Berapa lama belajar bahasa Indonesia dengan mahir?
 - b. Dapatkah pemakalah menerjemahkan karya-karya pujangga Jerman ke dalam bahasa Indonesia, antara lain karya Wilhelm van Humboldt, *Das Kawiesprache auf der Inseln Jawa*?
 - c. Bagaimana caranya mempelajari bahasa Jerman?

Jawaban:

- a. Pemakalah belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1967 dan pemakalah sering ke Indonesia serta pernah tinggal di Banten Selatan dan Jawa Tengah.
 - b. Penerjemahan karya Jerman ke bahasa Indonesia sudah dilakukan, misalnya oleh Ibu Suprpto (orang Jerman yang hidup di Indonesia). Akan tetapi, menurut saya akan lebih baik apabila ada orang Indonesia yang mahir berbahasa Jerman yang mau menerjemahkan karya-karya tersebut karena orang Indonesia lebih mengerti serta memahami kebudayaan Indonesia.
 - c. Apabila Anda ingin mempelajari bahasa Jerman, ada buku yang dapat dipakai, yaitu *The Deutsches fur Slender* karya Hueder yang diterbitkan Dimension yang ada di Goethe Institut.
2. **Pertanyaan:** Ningrum, Jakarta
Bagaimana Anda menyiapkan alat bantu?

Jawaban:

Untuk dapat belajar bahasa Indonesia diperlukan guru orang Indonesia. Di samping itu, belajar Bahasa Indonesia di Jerman saja tidak akan pernah lancar. Sebaiknya mahasiswa langsung terjun ke lapangan. Mahasiswa saya semester II atau III banyak yang datang ke Indonesia sendirian dan akan lebih baik apabila dapat mengikuti kursus bahasa Indonesia di Indonesia, seperti di Salatiga, Yogyakarta, Bali, dan Malang. Semua mahasiswa yang terjun ke lapangan akan lancar berbahasa Indonesia.

3. **Pertanyaan:**

Materi pengajaran bahasa Indonesia di Jerman tidak sama sebab tujuan penyusunan materi tersebut berlainan. Dengan demikian, ragam bahasa dan metodenya tidak sama. Misalnya mahasiswa yang berasal dari Hamburg, mereka lebih menitikberatkan pada materi sastra. Apakah dalam pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan di Jerman Barat disesuaikan dengan situasi dan kondisi institusi yang bersangkutan ataukah karena di Hamburg ada Dami N. Toda?

Jawaban:

Pada saat menyusun sebuah buku pengajaran bahasa Indonesia, ada tiga pertanyaan yang harus diajukan, yaitu sebagai berikut.

- a. Mana kosakata yang akan dipakai?
- b. Tujuan penulisan buku ini untuk apa?
- c. Siapa yang akan memakai?

Contoh:

Buku yang ditujukan untuk orang Jerman yang akan datang ke Indonesia sebagai turis akan berbeda dengan buku yang diperuntukkan bagi mahasiswa Jerman yang akan mengadakan penelitian di Indonesia. Akan tetapi, pengalaman saya adalah yang mengikuti kursus bahasa Indonesia sebagian besar adalah mahasiswa-mahasiswa yang akan mengadakan penelitian. Karlé di Hamburg beranggapan bahwa kosakata sastra itu penting sebab sesuai dengan minatnya. Jadi, dapat dinyatakan bahwa bentuk pengajaran juga ditentukan oleh minat pengajarnya.

4. **Pertanyaan:** T. Fatimah Djasudarma, Universitas Padjadjaran

Apakah guru-guru bahasa Indonesia di RDI dan RFJ sudah bergabung atau masih sendiri-sendiri?

Jawaban:

Pertanyaan ini sulit dijawab sebab penyatuan Jerman baru terjadi di tahun 1989 serta di dalamnya masih ada permasalahan ekonomi, gaji, dan tempat kerja. Jerman Timur masih sibuk dengan hal-hal nonakademis sehingga kontak baru dilaksanakan, antara lain dengan diselenggarakannya 2 atau 3 kali kongres tentang bahasa dan sastra yang dilaksanakan di Jerman Timur. Sarjana-sarjana Jerman Barat banyak yang hadir, tetapi sebenarnya bukan hanya tertarik dari segi temanya saja, melainkan karena ingin menunjukkan kerja sama.

KEADAAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI KOREA

Chung Young-rhim

Department Malay-Indonesian

Hankuk University of Foreign Studies Seoul, Korea

1. Sekilas Hubungan Korea dengan Indonesia

Hubungan antara Korea dan Indonesia mulai terjalin dengan pembukaan kantor Konsulat Jenderal di Seoul pada 1 Juni 1968. Mengingat akan pentingnya hubungan yang perlu dipertahankan bersama untuk mencapai tujuan konkret, pada tahun 1973 hubungan kedua negara ini secara resmi ditingkatkan lagi menjadi kantor kedutaan besar untuk melayani kepentingan pemerintahan masing-masing.

Orang-orang Korea memandang negara-negara Asia dan Afrika tidak penting, kecuali Cina dan Jepang, sebagai akibat dari dinasti Chosun (1392–1910) yang memegang kebijakan negara secara tertutup. Dengan dibukanya pelabuhan negara pada tahun 1876 atas desakan dari negara-negara Barat dan Jepang, kebudayaan Barat menerobos masuk. Akan tetapi, orang-orang Korea hanya mementingkan hubungan dengan Amerika dan negara-negara Barat dan buta dalam hal keadaan negara-negara yang berkembang. Ada suatu contoh yang menunjukkan kepicikan pandangan para pemimpin Korea sekitar 40 tahun yang lalu.

"Dalam tahun 1952 Sumatera membentuk suatu pemerintahan tersendiri dengan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pada waktu itulah Syngman Rhee, Presiden pertama Korea Selatan, mengemukakan keinginannya untuk bekerja sama dalam bidang politik dan sanggup mengirimkan suatu pasukan tentara bagi kepentingan Islam yang fanatik di Sumatera atas dasar *Negara Autonomy Principle* (Hanjohng, 1981:34). Atas dasar itulah pemerintah Soekarno mempunyai alasan untuk bersifat anti-Korea (Selatan). Oleh sebab itu, hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan makin bertambah beku dan putus sehingga menimbulkan suatu kelemahan dan ketidakpedulian yang berkepanjangan.

Secara singkat boleh dikatakan bahwa orang Korea yang berpaham konfusianisme dan ajaran filsuf Chu-tzi China (1130-1200) mengutamakan ilmu-ilmu nonpraktik. Itulah yang menghalangi orang Korea untuk merantau ke luar negeri. Keadaan seperti itu ibarat "seekor katak di dalam tempurung" yang tidak memperkenalkan pemikiran baru dan luas tentang keadaan Indonesia.

Suasana masyarakat Korea pada pertengahan tahun 60-an dan awal 70-an masih penuh kecurigaan terhadap orang-orang Indonesia yang penuh gambaran tidak baik dengan menganggap Indonesia merupakan negara komunis dan moralnya kurang baik mengingat buku Cindy Adams yang diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, dan orang Indonesia mempunyai banyak istri.

Pembukaan Perwakilan Indonesia di Seoul pada tahun 1968 mengubah suasana gelap itu. Korea mengakui pentingnya peranan Indonesia sebagai suatu negara yang kaya raya akan sumber alam dan luasnya wilayah serta rakyatnya yang besar jumlahnya sehingga mereka berusaha untuk menciptakan persahabatan dengan Indonesia, terutama di bidang ekonomi sebagai alat perekat yang paling ampuh untuk memupuk tali persahabatan kedua negara.

Selama hampir dua tahun setelah pembukaan perwakilan Indonesia di Seoul, perkembangan hubungan ekonomi telah berjalan pesat dan banyak modal yang ditanam di Indonesia terutama di bidang kehutanan sehingga semakin banyak tulisan yang serba baik menghiasi lembaran surat-surat kabar di sini sehingga semakin lenyap prasangka buruk mengenai Indonesia. (Sajidiman, 1975:131)

Sejak tahun 1970 Indonesia menempati urutan kedua belas sebagai teman dalam dunia perdagangan Korea sesudah Jepang, Amerika Serikat, Arab Saudi, Kuwait, dan Iran (Hanjoong, 1981:81.) Dengan kebangkitan Korea dalam industri di Asia, yang kedua setelah Jepang, Korea mempunyai alasan untuk mendekati Indonesia mengingat bahwa bahan-bahan mentah Korea sangat terbatas. Penanaman modal Korea makin bertambah di Indonesia sebagai perkembangan untuk mengisi kekurangan modal serta keterampilan teknik (*knowhow*) di Indonesia. Jumlah penanaman modal Korea di Indonesia mencapai US\$ 73.4 juta pada akhir 1980. Penanaman modal itu menunjukkan kecenderungan yang meningkat karena perusahaan-perusahaan Korea semakin banyak tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Hanjoong, 1981:102). Perusahaan-perusahaan Korea di Indonesia itu memerlukan tenaga kerja orang Korea yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan pekerja-pekerja Indonesia. Keadaan seperti itu menambah gairah dan memberi motivasi untuk mengadakan jurusan bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Hankuk (Kampus Yongin dibuka pada tahun 1964; Kampus Yongin dibuka pada tahun 1982) dan Universitas Bahasa-Bahasa Asing Pusan membuka jurusan Malay-Indonesia pada tahun 1982 dan Akademi (*College*) Bahasa-Bahasa Asing Sungshim di Pusan pada tahun 1992.

2. Sejarah Ringkas Jurusan Malay-Indonesia di Universitas Hankuk

Universitas Bahasa Asing Hankuk yang berlokasi di kota Seoul didirikan pada tahun 1954 dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kepada para calon sarjana agar dapat menguasai bahasa-bahasa asing dengan mengenal politik, sosial-ekonomi, dan kebudayaan melalui bahasa yang dipelajarinya. Maka, para tamatan dari universitas itu diharapkan dapat menjadi duta untuk persahabatan antarbangsa di

dunia. Universitas kami merupakan salah satu universitas bahasa asing yang terbesar di Korea. Universitas tersebut mempunyai 11 fakultas, di antaranya ada Fakultas *Occidental studies*, *Oriental Studies*, *European and American Studies*, dan *Asian and African Studies* yang terdiri dari atas 24 jurusan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Spanyol, Italia, Portugis, Belanda, Swedia, Polandia, Rumania, Cekoslovakia, Honggaria, Yugoslavia, Cina, Jepang, Malay-Indonesia, Arab, Thai, Vietnam, India, Turki, Iran, dan Swahili,

Jurusan Malay-Indonesia yang terdapat di kampus Seoul di dalam Fakultas *Oriental Studies* dibuka pada tahun 1964, sedangkan di kampus Yongin yang termasuk dalam Fakultas *Asian and African Studies* dibuka pada tahun 1982. Jurusan Malay-Indonesia di kampus Seoul menerima 30 orang mahasiswa. Saat ini yang tengah belajar bahasa di Universitas Bahasa Asing Hankuk mencapai kurang lebih 200 mahasiswa. Mereka harus menempuh pendidikan selama empat tahun untuk dapat memperoleh gelar B.A. Jumlah tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Korea. Mahasiswa yang belajar bahasa Melayu-Indonesia di Universitas Pusan berjumlah 160 orang (satu tahun 40 orang) dan Akademi Sungshim mempunyai sebanyak 160 orang (satu tahun 80 mahasiswa) sehingga jumlah mahasiswa yang sedang mempelajari bahasa Melayu-Indonesia besar sekali, yaitu kurang lebih 500 orang.

Mula-mula ketika Jurusan Malay-Indonesia dibuka pada tahun 1964, nama Jurusan itu bukan Jurusan Malay-Indonesia, melainkan Jurusan Indonesia. Sebenarnya, waktu itu Korea Selatan belum ada hubungan dengan Indonesia. Malah sebaliknya, hubungan antara Indonesia dan Korea Utara lebih mendapat bantuan secara intensif dan maju sejak Soekarno menyelenggarakan Ganefo dan akhirnya Kim Il-Sung datang ke Indonesia pada tahun 1965 sebelum jatuhnya Orde Lama dalam pemerintahan Soekarno. Keadaan itu mencemaskan hati pihak universitas kami yang sebelum dibuka jurusan sudah ada rencana mengundang seorang guru dari Indonesia, hal ini tidak terlaksana. Mahasiswa-mahasiswa yang masuk Jurusan Bahasa Indonesia ini belajar dari guru-guru orang Korea yang pernah diangkut ke negara-negara Asia Tenggara secara paksa oleh tentara Jepang. Tentara Korea yang pernah tinggal di Indonesia ataupun di Malaysia sebelum Perang Dunia II rata-rata kurang berpendidikan sehingga mereka kurang ilmiah walaupun mereka dapat menuturkan bahasa Indonesia. Mahasiswa memboikot guru yang tidak terpelajar ini dan meminta kepada universitas supaya seorang guru yang berkualifikasi datang. Pihak universitas terpaksa menambah nama jurusan menjadi Malay-Indonesia dan mengundang seorang guru dari Malaysia.

Sejak itu mahasiswa belajar bahasa Melayu dan kesusastraan Melayu dari orang Malaysia serta belajar politik dan keadaan Indonesia dari orang Amerika Serikat yang pernah memegang jabatan sebagai Direktur Jenderal USIS di Jakarta selama 3 atau 5 tahun. Baru pada 1967 sesudah jatuhnya pemerintahan Soekarno, kami dapat mengundang seorang dosen dari Universitas Gajah Mada.

3. Jurusan Malay-Indonesia antara Harapan dan Kenyataan

Jurusan Malay-Indonesia di Universitas Hankuk Universitas Pusan pada tahun pertama dan kedua menitikberatkan pada bidang pelajaran bahasa Indonesia yang meliputi bacaan, tata bahasa, dan laboratorium bahasa. Sebagai bahan-bahan bacaan bahasa Indonesia untuk tahun pertama dan kedua digunakan buku teks yang berisi tentang sejarah, kebudayaan, dan kesusastraan Indonesia yang menarik.

Untuk tahun ketiga dan keempat para dosen menggunakan bacaan surat kabar (*Kompas*), majalah (*Tempo*), dan sebagainya untuk mata pelajaran peringkat lanjut. Di samping ada kuliah bahasa Indonesia, diadakan juga kuliah dan seminar tentang kebudayaan politik dan lain-lain ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia seperti ditunjukkan dalam Lampiran I. Mahasiswa kami banyak menaruh minat terhadap kebudayaan, sejarah, politik, ekonomi, dan masalah-masalah sosial. Pengetahuan tentang Indonesia itu akan menambah kemahiran mereka dalam bidang pekerjaan setelah tamat dari Universitas.

Di samping bahasa Indonesia, para mahasiswa jurusan Malay-Indonesia wajib mengambil salah satu bahasa asing lain, seperti bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Spanyol, Cina, dan Jepang sebagai bahasa asing kedua. Sejalan dengan ketentuan tersebut, bahasa Malay-Indonesia pun dapat dipilih sebagai bahasa asing kedua oleh para mahasiswa dari jurusan lain. Pada semester II tahun 1988 terdapat 40 mahasiswa dari jurusan lain yang memilih bahasa-Indonesia sebagai bahasa asing kedua, tetapi selanjutnya tidak ada mahasiswa yang melamar untuk mempelajari bahasa Indonesia walaupun ada juga satu atau dua orang sehingga pada saat ini tidak dibuka lagi kuliah pilihan bahasa Indonesia. Untuk mata kuliah pilihan, para mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar bidang bahasa, seperti filsafat, pendidikan, komunikasi massa, ekonomi, perdagangan, hukum, dan komputer.

Kurikulum Universitas Hankuk itu dicontoh Universitas Pusan sehingga tidak banyak perbedaan di antara kedua universitas tersebut, tetapi Akademi Sungshim di Pusan lebih mementingkan bahasa saja. Mahasiswa yang masuk ke akademi tersebut pada tahun I belajar bacaan Indonesia, percakapan Indonesia, tata bahasa Indonesia dan laboratorium. Pada tahun II mereka mengikuti pelajaran Laboratorium, Akuntansi, Bahasa Niaga, dan percakapan Bahasa Indonesia.

Di Korea para dosen yang mengajar bahasa Melayu-Indonesia dapat dibagi menjadi tiga golongan:

- 1) dosen yang mendapat pendidikan bahasa Melayu-Indonesia di Korea;
 - 2) dosen yang mendapat pendidikan bahasa Melayu-Indonesia di Malaysia;
 - 3) dosen yang mendapat pendidikan bahasa Melayu-Indonesia di Indonesia;
- dosen-dosen yang mendapat pendidikan bahasa Melayu-Indonesia di Korea itu terdiri dari yang lulus jurusan Malay-Indonesia di Universitas Hankuk dan Departemen Asing Regional Studies, *Graduate School* di Universitas

Hankuk; tiga orang dosen termasuk golongan ini di Universitas Hankuk dan dua orang dosen di Universitas Pusan;

- 4) dosen yang mendapat pendidikan bahasa Melayu-Indonesia di Malaysia ada dua orang di Korea, masing-masing memperoleh gelar *Ph.D.* dari Malaysia;
- 5) Dosen yang mendapat pendidikan bahasa Melayu/Indonesia di Indonesia berjumlah tiga orang.

Walaupun dosen-dosen yang mengajar bahasa Melayu-Indonesia terdiri dari tiga golongan yang disebutkan tadi, mula-mula bahasa yang dipelajari olehnya adalah bahasa Indonesia dari dosen tamu dari Indonesia sehingga logat bahasa Indonesia tetap turut mempengaruhinya.

Selain dosen yang berasal dari Korea, tenaga pengajar orang Malaysia dan Indonesia juga diundang oleh ketiga institut selama 29 tahun ini, di antaranya dari UI, UGM, Universitas Pajajaran, IKIP Jakarta, dan Unas.

Kegiatan mahasiswa Korea, antara lain, adalah membuat *Kabar* (Seoul) bertabloid, *M-In Wolbo* - Berita bulanan (Youngin), dan membuat buku hasil kumpulan karangan mahasiswa yang bernama *Matahari* (Seoul), *Merdeka* (Youngin). Ada juga kelompok yang membaca majalah *Tempo* dan mendiskusikannya setiap minggu dan mengadakan pertunjukan tari-tarian Malaysia dan Indonesia dan menyanyikan lagu Indonesia dan lagu Korea yang diubah ke dalam bahasa Indonesia. Dapat kami tambahkan di sini bahwa pada tahun 1975 telah diadakan *Cultural Exchange Programme* antara universitas kami dan Universitas Indonesia, sebagai realisasi dari program itu. Selain kami mempunyai dosen tamu dari UI, kami pernah menerima rekaman video dan menghadiri kursus Bahasa Indonesia Khusus, sebanyak 45 orang dari jurusan kami, yang diselenggarakan di Universitas Indonesia atas kerja sama dengan Prof. Harimurti, ketika itu Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di FSUI pada tahun 1989.

Tamatn Jurusan Indonesia, Universitas Hankuk sampai dengan tahun 1991 sebanyak 692 mahasiswa dan 90 mahasiswi dari Kampus Seoul, serta 252 mahasiswa dan 101 mahasiswi dari Kampus Youngin. Dari sekian banyak jumlah mahasiswa tersebut hanya 10-15 persen mahasiswa bekerja di kantor yang ada hubungannya dengan pengetahuan bahasa Indonesia yang telah dimiliki (4 orang diplomat, 3 orang di KOTRA, KBS, pelajar di luar negeri, 80 orang di perusahaan Korea di Indonesia, dll.). Bahkan, banyak di antara mereka yang bekerja di bank, komunikasi massa (wartawan), guru di SMA (guru bahasa Inggris), perdagangan, perusahaan pribadi, dan lain-lain. Mahasiswi dari jurusan kami hanya 2 orang bekerja di perusahaan Korea di Jakarta dan baru-baru ini Samsung, sebuah perusahaan Korea yang terbesar di Korea, menerima 2 orang mahasiswi dari jurusan kami sebelum mereka tamat universitas. Keadaan ini memberi harapan kepada mahasiswi kami supaya mereka juga rajin belajar bahasa Indonesia.

Pada tahun 1985 jurusan kami mengadakan kuliah S-2 (*Graduate School*) dan sampai sekarang telah tamat 9 orang, dan 2 orang sedang mengikuti kuliah dalam bidang kesusastraan dan linguistik. Judul skripsi mereka masing-masing terlampir.

Tamatan dari jurusan kami yang sedang belajar di Indonesia sebanyak 6 orang, seorang di S-3 (UGM-kesusastraan), dan yang lainnya mendapat gelar sarjana atau sedang di S-2 (UI-linguistik). Di Malaysia juga ada seorang yang sedang mengikuti program *Ph.D.*, seorang memperoleh gelar *Ph.D.* dari Amerika Serikat, dan seorang sedang menjadi S-3 di Amerika Serikat juga. Dengan demikian, tahun depan jurusan kami yang akan merayakan hari ulang tahun yang ke-30 akan meningkatkan kualitas guru dan kami akan berusaha terus untuk mengembangkan jurusan kami.

4. Masalah yang Dihadapi di Jurusan Malay-Indonesia, Khususnya di Universitas Bahasa Asing Hankuk

a. Kekurangan Motivasi untuk Mempelajari Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia menjadi salah satu mata ujian untuk Departemen Luar Negeri dan *Korea Trade Center*. Perusahaan Korea yang besar juga meminta rekomendasi mahasiswa tamatan jurusan Indonesia dengan jalan ujian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Akan tetapi, ada pula perusahaannya yang tidak memberi kesempatan untuk ujian masuk yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut karena mahasiswa kami adalah tamatan jurusan Malay-Indonesia, bukan dari jurusan Ekonomi, Inggris, dan lain-lain. Berkenaan dengan sulitnya mendapat lapangan pekerjaan bagi mereka setelah tamat dari jurusan Malay-Indonesia, para mahasiswa tahun ketiga dan keempat biasanya lebih memusatkan perhatiannya kepada bahasa Inggris dan mata kuliah pilihan, yaitu perdagangan, ekonomi, dan sebagainya.

Sampai sekarang permintaan tenaga tamatan jurusan Malay-Indonesia dari kantor-kantor yang berkedudukan di Indonesia atau Malaysia selalu dalam jumlah terbatas (setiap tahunnya hanya berkisar 4–6 sarjana). Dalam 23 tahun ini kantor-kantor yang berkedudukan di Indonesia lebih terbatas menerima mahasiswa kami karena kebijakan Pemerintah Indonesia, yaitu menghalangi masuknya pekerja dari luar negeri.

Dengan bertambah eratnya hubungan ekonomi antara Pemerintah Korea dan Pemerintah Indonesia, kantor-kantor Korea di Indonesia menerima mahasiswa tamatan jurusan kami, dan diharapkan adanya jalan ke luar untuk menanggulangi masalah tersebut sehingga hal itu dapat menyatakan menjadi titik terang bagi mereka yang kini tengah belajar bahasa Indonesia di jurusan Malay-Indonesia.

b. Kekurangan Bahan Pelajaran

Di bawah ini kami uraikan bahan-bahan audio-visual yang disediakan di laboratorium di universitas kami. Dari uraian ini dapat dilihat cukup atau kurangnya bahan pelajaran kami dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain.

Keadaan bahan-bahan Audio-Visual (Catatan, 1993:470)

BAHAN AUDIO-VISUAL DI LABORATORIUM BAHASA

Department	Kaset			Piringan Hitam			Film			Video		
	Seoul	Y.	J.	Seoul	Yongin	Jumlah	S.	Y.	J.	S.	Y.	J.
Inggris	2.882	3.479	6.379	145		145	469		469	776	44	820
Perancis	998	1.062	2.060	85		85	47	60	107	418	104	522
Cina	224	181	605	20		20						
Jerman	929	773	1.702	85		85	47	194	241	133	128	161
Rusia	378	264	542	78		78		130	130	106	203	408
Spanya	419	434	853	128		128		721	721	93	19	112
Jepang	153	599	1.352	6		6	3	1	8	197	25	222
Italia	169	194	363	33		33		152	152	247	38	285
Indonesia	120	150	270						60	6	4	10
Arab	330	237	567	18		18			68	32	16	48
Portugal	247	470	717	33		33		60	16	37	26	73
Thais	130	318	448	9		9		88		46		46
Vietnam	104		204				16			47	8	55
India	181	168	349	16		16				3	3	6
Turki	117		117	1		1				64		64
Swedia	160		160	29		29				6		6
Iran	160		160	1		1					8	8
Swahili		219	219							4	2	6
Rumania		65	65							2	37	39
Polandia		101	101							14	23	37
Cekoslovakia		108	108							18	15	33
Yugoslavia		25	25						71	6	18	24
Hongaria		102	102							2635	586	3221
Itl.	701	45	746	534		534	534					

Dari tabel tersebut di atas, kita memperoleh gambaran betapa kurangnya bahan audio-visual di jurusan kami.

c. Ada Hambatan untuk Melanjutkan Studi di Indonesia

Minat para mahasiswa jurusan kami untuk dapat melanjutkan studi di Indonesia cukup besar. Pada umumnya setelah tamat belajar selama empat tahun, mereka ingin memperdalam pengetahuannya di Indonesia atau di Malaysia untuk bidang bahasa ataupun disiplin lain, seperti sejarah politik, ekonomi, dan antropologi. Untuk dapat melanjutkan studi di Indonesia, mereka sebelumnya harus memproses surat-surat, antara lain, melalui jalur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kami terlalu lama menunggu surat-surat dari Indonesia sehingga kadang-kadang perasaan enggan dan harapan bercampur menjadi satu. Kami ingin mendapat informasi untuk menyalurkan keinginan para mahasiswa kami untuk melanjutkan studi di Indonesia.

d. Ketidakmudahan untuk Mempraktikkan Bahasa Indonesia

Karena adanya liburan musim panas dan musim dingin yang panjang di Korea, para mahasiswa jurusan Malay-Indonesia ingin memanfaatkan waktu liburan mereka dengan belajar bahasa dan kesenian, seperti membatik, menari, main gamelan, dan memasak.

Kegiatan semacam itu tentu berguna bagi mereka yang ingin mengetahui lingkungan hidup di Indonesia dan ingin mempraktikkan bahasa Indonesia.

5. Saran

Kami ingin mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Korea sebagai berikut.

- 1) Pihak Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diminta menyusun sebuah buku teks untuk mahasiswa asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Buku teks ini akan menjadi buku pedoman bahasa Indonesia di seluruh universitas di luar negeri. Kami selalu ingin mendapat informasi dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pengajaran bahasa dari Indonesia.
- 2) Untuk kemudahan praktik bahasa Indonesia bagi mahasiswa, kami mengharapkan lembaga yang menyelenggarakan kursus bahasa dan kebudayaan Indonesia janganlah menentukan biaya yang tinggi dan menyediakan tempat penginapan dengan ongkos yang sederhana. Kami berharap adanya kunjungan rombongan kesenian dari Indonesia.
- 3) Kunjungan rombongan kesenian Indonesia di universitas kami akan membangkitkan minat mahasiswa kami tentang kesenian Indonesia.
- 4) Terjemahan sastra Indonesia merupakan suatu jalan yang baik untuk memperkenalkan manusia dan kebudayaan Indonesia bagi orang Korea. Ternyata, masalah yang kami hadapi waktu menerjemahkan itu adalah masalah perizinan dari pengarang Indonesia (hak cipta). Di Korea hanya sastra Indonesia yang belum mendapat sambutan yang baik dari kalangan pembaca Korea. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia, pemerintah dan pengarang Indonesia perlu menaruh perhatian terhadap masalah hak cipta ini.
- 5) Istilah dan kata-kata baru (diambil dari bahasa awal khususnya) serta singkatan-singkatan sangat menyulitkan kami, dosen bahasa Indonesia orang Korea. Kalau ada buku pedoman baru harap diberitahukan kepada kami.
- 6) Dosen tamu, orang Indonesia, pada umumnya mengajar di laboratorium, bahasa dan percakapan. Mereka yang menggunakan bahasa ibunya kadang-kadang teknik mengajarnya kurang mengambil minat atau perhatian mahasiswa kami. Saya menyarankan supaya ada satu lembaga yang memberi kursus bahasa Indonesia bagi tenaga pengajar orang Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.

Profil

Prof. Dr. Chung Young-rhim

Dept. of Malay-Indonesian

Hankuk University of Foreign Studies.

- 1968 : Memperoleh gelar B.A. dari Dept. Malay-Indonesian di Hankuk University of Foreign Studies
- 1969-1971 : Mengikuti kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan memperoleh gelar yang disamakan dengan sarjana.
- 1979-1980 : Studi di University of Leiden, Holland.
- 1984-1985 : Diundang sebagai "penulis tamu" Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia dan menerjemahkan cerpen-cerpen Korea.
- 1987 : Diangkat *full professor*.
- 1992 : Memperoleh gelar *Ph.D.* dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada bulan Agustus.

Anggota P.E.N. Korea

- Karya tulis : Dasar Bahasa Indonesia percakapan Bahasa Indonesia I & II
Sejarah Kesusastraan Indonesia Modern dll.
- Terjemahan : novel *Senja di Jakarta* (Mochtar Lubis)
Salina (A. Samad Said)
Keluarga Gerilya (Pramodya Ananta Toer)
puisi "Kumpulan puisi Rendra"
cerita rakyat *Kumpulan Cerita Rakyat Indonesia*
Kumpulan Cerita Rakyat Malaysia
Cerpen "Kebun Pohon Kastaneya", "Anak Revolusi", "Kisah Sebuah Celana Pendek", *Robohnya Surau Kami*

Senarai Kuliah di Jurusan Malay-Indonesia, Hankuk University of Foreign Studies

Tahun I	Kuliah
Seminggu	
(wajib) 1. Bacaan Bahasa Malay-Indonesia A.	3
2. Bacaan Bahasa Malay-Indonesia B.	2
3. Tata Bahasa I	2
4. Lab. Bahasa A	2
5. Lab. Bahasa B	2
Tahun II	
(wajib) 1. Bacaan Lanjutan Bahasa Melayu-Indonesia A	3
2. Bacaan Lanjutan Bahasa Melayu B	2
3. Tata Bahasa II	2
4. Lab. Bahasa IIA	2
5. Lab. Bahasa IIB	2
Tahunan III	
(wajib) 1. Komposisi Bahasa Malay-Indonesia	3
2. Percakapan Bahasa Malay-Indonesia	3
pilihan 3. Keadaan Politik Indonesia-Malaysia	3
4. Linguistik Malay-Indonesia	3
5. Praktek Terjemahan Bahasa	3
6. Kebudayaan Malaysia-Indonesia	3
7. Kesusastraan Indonesia Modern	3
8. Seminar ASEAN	3
Tahun IV	
pilihan 1. Keadaan Mutakhir di Malaysia-Indonesia	3
2. Ekonomi Malaysia-Indonesia	2
3. Politik Malaysia-Indonesia	2
4. Korespondensi Niaga dalam Bahasa Malaysia-Indonesia	2

JUDUL SKRIPSI

Judul Skripsi, Dept. of Malay-Indonesia, Graduate School of H.U.F.S.

1. Kim Yong-soo, "Satu Pembicaraan Novel Keluarga Gerilya", 1987.
2. Shon Hyun-sook, "A study on the passive of the Indonesian Language", 1987.
3. Kim Jae-hyun, "A study on the Indonesian Basic Sentences Patterns", 1987.
4. Park Jae-bong, "A study of the Indonesian poet Chairil Anwar", 1987.
5. Jeong Sang-yeop, "Kata Ulangan Bahasa Indonesia", 1988.
6. Sim Kyong-sook, "Nh. Dini's Feminisme on her Works", 1992.
7. Choi Soon-hwa, "A study on the Allomorphs of the Indonesian Affixes", 1992.
8. Choi In-he, "A study on the Discourse Analysis of Indonesian", 1993.
9. Choi Sin-yong, "A study of Resistant Consciousness Expressed in Indonesia Short Stories", 1993.

Judul Skripsi, Dept. of Asian Regional Studies, Graduate School of H.U.F.S.

1. Hong Sung-one, "A Study Indonesia Communist p'Party", 1982.
2. John Tae-hyun, "Indonesia and the Birth of ASEAN", 1982.
3. Koh Yong-hun, "On Pramoedya Ananta Toer laying stress on Perburuan (Persuit)", 1983.
4. Hong-Soon-hee, "A Study on 'Twilight in Jakarta', by Mochtar Lubis with Reference to Interrelationship of Literature with Politics, 1985.
5. Lee Youn-young, "A Study of the New Economi Policy in Malaysia", 1985.
6. Park Sang-hyun, "A Study of the Miliraty Intervention in Politics in Indonesian", 1985.
7. Park Sung-kwan, "Determinants of the Failure of the Indonesian Communist Movement", 1952-1965, 1986.
8. Kwon yong-kuk, "A Study of the New Order in Indonesia", 1987.
9. Kim Jang-gyeum, "A Study of Rendra's Poetry", 1988.

Judul Skripsi dari Luar Negeri

1. Yo han-jhong, "Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan periode 1970-1980 (Suatu Studi Komparatif)", Sarjana Ilmu politik, Universitas Nasional, Fakultas Ilmu politik, 1981.
2. Kim Sung-jin, "The Narrative of Siam (Tjarita Siam Supplemented by Hikayat Raja-raja Siam)", Dept. of Indonesia & Malay at Manash University, 1987.
3. Koh Yong-hun, "Mitos Kekalahan dan Imej-Imej Pemberontakan dalam Drama Modern Malaysia", Universiti Malaya, M.A. 1989.
4. Kim Jang-gyeum, "Novel Harimau-Harimau Karya Mochtar Lubis-Suatu Telaah Struktural Semiotik", Universitas Gajah Mada, S2, 1991.
5. Chung Young-rhim, "Novel-Novel Awal Semenanjung Melayu dan Korea: Pernyataan Identitas dan Kemanusiaan", Ph.D. Dissertation, Universiti 1993.
6. Soh Byung-kuk, "From Parochial to National Outlook: Malay Society in Transition 1920-1948", Ph.D. Dissertation, Ohio University, Athens, 1993.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Keadaan Pengajaran Bahasa Indonesia di Korea
Pemakalah : Chung Young-rhim
Pemandu : Djoko Kentjono
Pencatat : Marthalena A.M.
Sutiman

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Mahdin, Sulawesi Tenggara

- a. Apakah bahasa Indonesia diajarkan di tingkat SMP atau SMA?
- b. Bagaimana menarik minat lulusan SMA agar masuk ke jurusan Indonesia. Jika mereka masuk jurusan bahasa Indonesia, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mereka berbahasa Indonesia? Misalnya, apakah ada pengiriman mahasiswa yang berprestasi ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Jawaban:

- a. Tidak. Lulusan SMA yang baru masuk ke universitas sama sekali belum mengenal bahasa Indonesia. Mereka baru belajar setelah masuk universitas.
- b. Di samping mengajarkan bahasa Indonesia kepada para mahasiswa, para dosen juga mengajarkan kebudayaan dan kesusastraan Indonesia dan memanggil para pakar dari Indonesia untuk memberikan ceramah atau mengajar mereka. Untuk menarik minat lulusan SMA agar masuk jurusan Indonesia, mereka diberi informasi tentang kerja sama Korea dengan Indonesia lewat surat kabar sehingga mereka mengetahui bahwa ada jurusan bahasa Indonesia.

2. **Pertanyaan:** Zulkarnain, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pada waktu saya ke Korea untuk melatih para pemuda calon sukarelawan berbahasa Indonesia, saya mengalami kesulitan sebab buku-buku yang digunakan berorientasi ke bahasa Melayu (Malaysia). Oleh karena itu, saya menyarankan agar buku-buku pelajaran yang digunakan dalam pengajaran itu berorientasi ke Indonesia yang dapat diperoleh lewat Pusat Perbukuan atau IKIP.

Jawaban:

Buku-buku yang digunakan di universitas kami berorientasi ke bahasa Indonesia. Namun, masih ada satu dua buku yang berorientasi ke bahasa Malaysia.

3. **Pertanyaan:** Mirna Laksman, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Banyaknya istilah dan singkatan yang tidak dipahami oleh para pengajar bahasa Indonesia di Korea mungkin disebabkan oleh tidak adanya pengiriman tenaga pengajar ke negara asal bahasa Indonesia itu secara berkala. Belajar bahasa asing tanpa mendatangi negara asal bahasa itu tidak akan berhasil dengan baik.

Tentang pendirian lembaga yang memberikan pelatihan kepada para pengajar bahasa Indonesia di Korea, apakah yang dimaksudkan pengajar dari Indonesia didatangkan ke Korea atau orang Korea dikirim ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dan kemudian mengajarkan bahasa Indonesia itu di Korea. Jika yang mengajarkan bahasa Indonesia di Korea itu orang Indonesia tentu akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan lokakarya atau *workshop* untuk menyelesaikan masalah ini.

Jawaban:

- Bahasa Indonesia memang banyak mengalami penambahan istilah terutama yang berasal dari bahasa Jawa sehingga kami sangat sulit untuk memahami kata-kata dan istilah baru itu.
- Yang saya maksudkan adalah orang Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia di Korea. Seperti orang Belanda atau lainnya yang mengajarkan bahasa mereka kepada orang asing. Biasanya, mereka setiap tahun melakukan pertemuan untuk menyelenggarakan kursustentang bahasa itu sehingga mereka selalu mengajarkan bahasa yang sesuai dengan perkembangan di negerinya.

4. **Pertanyaan:** Caca Sudarsa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

- Apakah tenaga pengajar yang didatangkan ke Korea itu lafalnya sudah dianggap baik?
- Usaha apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Korea untuk melapangkan jalan para mahasiswa itu untuk memperoleh pekerjaan?

Jawaban:

- Lafal daerah memang sulit dicerna, tetapi para mahasiswa berusaha menyesuaikan dan memahaminya; lafal bagi kami tidak begitu penting.
- Upaya Pemerintah Korea adalah meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia sehingga banyak kesempatan yang diberikan kepada para mahasiswa lulusan jurusan Malay-Indonesia walaupun Pemerintah Indonesia membatasi jumlah pekerja asing di Indonesia.

5. **Pertanyaan:** Yus Rusyana, IKIP Bandung

Adakah mahasiswa jurusan di luar jurusan Malay-Indonesia meminta kuliah bahasa Indonesia, misalnya kuliah itu diberikan dalam satu semester?

Jawaban:

Dulu diberikan kursus bahasa Indonesia selama dua tahun kepada mereka yang menginginkannya. Namun, sekarang kursus itu sudah tidak ada sehingga jika ada satu atau dua mahasiswa lain dari jurusan lain yang meminta kursus biasanya mereka diikutkan pada jurusan Malay-Indonesia.

6. Pertanyaan: Sudrajat, Tasikmalaya

- a. Apakah kedudukan dan fungsi bahasa Korea di Korea sama dengan kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia?
- b. Saya menduga bahasa Korea berbeda karakteristiknya dengan bahasa Indonesia. Untuk memudahkan orang Korea mempelajari bahasa Indonesia, kita harus bertolak dari mana; apakah dari lafal, kosakata, atau struktur?

Jawaban:

- a. Bahasa Korea bagi orang Korea sama pentingnya dengan bahasa Indonesia bagi orang Indonesia. Bahkan, orang Korea menjadikan bahasa Korea sebagai simbol nasionalisme. Mereka tidak suka menggunakan bahasa asing (Inggris) walaupun mereka lancar menuturkannya. Namun, di Indonesia ada kecenderungan orang suka menggunakan bahasa asing untuk menunjukkan intelektualitas.
- b. Untuk mempelajari bahasa, semuanya (lafal, kosakata, dan struktur) penting.

Saran/Usul: Dameria Nainggolan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Kesulitan Ibu untuk memperoleh buku-buku atau *bahan audio visual* tentang pengajaran bahasa dapat diatasi dengan mencarinya di toko-toko buku di Jakarta atau pada Prof. Lau Ko di Singapura yang banyak menulis buku pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan, ada bukunya yang berupa pengajaran bahasa Indonesia dalam tiga minggu.

Saran Ibu agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyusun buku teks untuk mahasiswa asing mungkin sulit dilaksanakan. Akan tetapi, jika bekerja sama dengan Universitas Indonesia mungkin bisa dilaksanakan, sedangkan informasi tentang singkatan atau akronim dapat dilihat di *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

BAHAN PENGAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK PEMBELAJAR ASING

Soeseno Kartomihardjo
IKIP Malang

I. Pendahuluan

Dengan perkembangan pembangunan yang pesat di hampir segala bidang pembangunan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, nama Indonesia sebagai negara dan bangsa yang berdaulat semakin dikenal di dunia internasional. Kalau dahulu Indonesia dianggap sebagai bagian dari Pulau Bali oleh orang asing dari banyak negara, kini sudah lebih banyak yang memahami bahwa Bali hanyalah sebagian kecil dari negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kini makin banyak kaum terpelajar asing sebagai usahawan, diplomat, cendekiawan, atau bahkan wisatawan, yang ingin mengenal Indonesia lebih dekat. Banyak di antara mereka sebelum tiba di Indonesia telah mempelajari sedikit banyak tentang Indonesia, termasuk daerahnya, suku-suku bangsa yang mendiaminya, pemerintahannya, agama anak negeri, budaya, dan bahasanya. Mereka yang serius lalu berusaha untuk dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mereka. Di samping itu, mereka belajar pula berbagai aspek kehidupan di Indonesia yang biasanya termasuk di dalam *Asian Studies* seperti di beberapa perguruan tinggi di Australia atau bahkan berdiri sendiri sebagai *Indonesian Studies* seperti yang di selenggarakan di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat.

Pada saat ini di Amerika Serikat lebih dari selusin perguruan tinggi besar kecil yang memberikan pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, dan beberapa perguruan tinggi di sana memberikannya sudah sejak tahun 60-an. Di Australia bahasa Indonesia, sebagai bahasa asing, diajarkan tidak hanya di beberapa perguruan tinggi, tetapi bahkan di banyak sekolah menengah di berbagai negara bagian.

Mengingat minat yang cukup besar dari kalangan bangsa asing untuk belajar berbahasa Indonesia, alangkah baiknya bila pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing ditangani dengan lebih serius agar hasilnya dapat lebih dipertanggungjawabkan, baik menurut kaidah bahasa maupun penggunaannya di masyarakat. Dengan demikian, nantinya tidak ada lagi pejabat pemerintah yang ketika ditanya oleh orang asing dalam bahasa Indonesia berbalik bertanya dalam bahasa Inggris, "*Who did you learn bahasa Indonesia from?*" karena menurut pejabat tersebut bahasa Indonesia yang didengarnya itu tidak layak digunakan untuk berbicara dengan seorang pejabat

Indonesia. Hal itu dapat saja terjadi karena orang asing itu belum menguasai (kaidah) bahasa Indonesia atau menggunakan variasi bahasa yang terlalu informal, yang tidak sesuai dengan status sosial pejabat yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa orang asing, terutama penutur asli bahasa Inggris sangat terbiasa dengan hidup yang serba informal termasuk penggunaan bahasa mereka, terutama di kalangan kaum terpelajar di perguruan tinggi. Di Australia dan di Amerika seorang mahasiswa dapat memanggil dosennya, terutama yang masih muda, dengan nama kecil tanpa titel apa pun. Hal semacam itu tidak mungkin terjadi di Indonesia karena dapat berakibat fatal bagi sang mahasiswa, yaitu menjadi mahasiswa abadi atau di-*drop-out*.

Dalam makalah singkat ini dibicarakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing agar dapat sesuai dengan pilihan kaidah tata bahasa dan penggunaannya dalam konteks sosial. Dengan demikian, bahasa yang diajarkan itu tidak terdengar terlalu kaku karena menggunakan kaidah tata bahasa terlalu ketat, tetapi juga tidak kedengaran seperti diucapkan seandainya oleh sang pembicara.

2. Bahasa dan Masyarakat

Bahasa yang digunakan di dalam masyarakat sangatlah erat hubungannya dengan masyarakat pengguna bahasa itu. Oleh karena itu, bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keduanya saling mempengaruhi dan saling bergantung. Bahasa akan lenyap, terutama sebagai bahasa lisan, bila masyarakatnya lenyap. Bahasa akan berkembang bila masyarakatnya pun berkembang. Sebaliknya, masyarakat pemakai suatu bahasa dapat berkembang dalam beberapa aspek kehidupannya berkat pengaruh bahasa yang digunakannya.

Bahasa sebagai suatu sistem memang perlu diteliti dan dikembangkan agar bahasa itu menjadi bahasa yang sempurna, sesuai dengan sistem yang dianut oleh penelitinya. Dengan studi semacam ini keluarlah sistem bahasa yang biasa dikenal dengan nama tata bahasa. Tata bahasa selalu dapat digunakan sebagai acuan ketika acuan yang lain tidak terdapat atau tidak mampu menjelaskan suatu unit bahasa. Tata bahasa yang digunakan sebagai acuan pokok dalam pertemuan resmi, dokumen resmi, dan berbagai kegiatan formal dalam kehidupan bermasyarakat disebut tata bahasa baku. Sampai di manakah kebakuan suatu bahasa itu? Secara teoretis dapat dijawab, tetapi secara kenyataan sangat sukar. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Suatu pidato resmi yang dibacakan oleh seorang pejabat daerah di Palu untuk memperingati hari jadi kota itu, misalnya, akan berlainan dengan pidato resmi yang dibacakan oleh seorang pejabat daerah di Sibolga untuk hal yang serupa. Tanpa melihat atau mendengarkan perbedaan aksen yang digunakan oleh kedua pejabat itu, kita akan mengetahui adanya beberapa pilihan kata yang berbeda, sedangkan di sana-sini digunakan pula susunan kalimat yang lazim digunakan di Palu, tetapi tidak lazim di Sibolga, dan sebaliknya.

Perbedaan kecil yang terdapat pada kedua bahasa itu dianggap biasa oleh masyarakat penggunanya masing-masing. Bahasa baku semacam itulah yang dianggap cocok untuk mereka masing-masing. Bagi mereka hal itu kedengarannya luwes, tidak kaku seperti seandainya menggunakan bahasa baku 100%. Perbedaan itu akan lebih banyak terjadi bila pertemuan yang diadakan itu bersifat informal sehingga bahasa yang digunakan pun bahasa informal atau variasi bahasa Indonesia informal yang digunakan, yaitu yang satu di Sibolga dan yang lain di Palu. Perbedaan itu tidak asal saja dibuat atau diucapkan, tetapi ada aturan yang oleh para pengguna bahasa masing-masing dipatuhinya dengan baik. Aturan-aturan itu lebih menyangkut tata aturan sosial daripada hanya aturan di dalam bahasa atau lebih tepat lagi aturan sosial yang direfleksikan ke dalam bahasa. Dell Hymes menemukan sekitar 16 atau 17 faktor sosial yang berpengaruh itu yang dikemukakan di dalam akronimnya yang terkenal *speaking* (1972). Di dalamnya termasuk, antara lain, *setting* atau tempat dan waktu, partisipan, termasuk pembicara, orang yang diajak bicara, dan pendengar. Sebagai orang Indonesia (Jawa), saya menggunakan istilah *empan-papan* untuk menjelaskan semuanya itu, yang secara singkat dapat dikatakan bahwa bertingkah laku dan berbahasa itu perlu disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan konteks pada waktu suatu interaksi itu berlangsung.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat kata-kata yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berikut: "Seorang individu akan memperoleh penghargaan yang tinggi di dalam masyarakat bila dia dapat menggunakan bahasa yang baik." *Baik*, dalam hal ini berarti penggunaan tata bahasa dan pilihan variasinya sesuai dengan kondisi, situasi, dan konteks terjadinya unit bahasa yang diucapkan oleh individu itu. Di samping itu, terdapat pula pepatah yang dapat diartikan bahwa pakaian seseorang dapat mencerminkan tinggi rendahnya budaya yang dimiliki oleh seseorang itu, termasuk tingkah lakunya. Seperti kita ketahui, di seluruh pelosok tanah air kita ini pilihan dan penggunaan pakaian mempengaruhi pula tingkah laku pemakainya karena pakaian merupakan bagian yang integral dari budaya kita. Seorang wanita yang memakai kain kebaya pastilah menghindari diri dari gerakan-gerakan dinamis yang dimungkinkan seperti pada waktu dia memakai blus dan celana panjang.

Penguasaan bahasa dan tingkah laku yang serba sesuai dengan tuntutan masyarakat itu diajarkan kepada seorang anggota masyarakat semenjak dia dilahirkan, dalam waktu yang cukup lama, lebih kurang lima sampai enam tahun karena pada waktu itulah seorang anak dapat dianggap telah menguasai bahasa ibunya walaupun belum begitu sempurna.

Kemudian setelah si anak bersekolah, bahasa itu disempurnakan, baik di sekolah maupun di rumah, dengan ditambah adanya kemungkinan dia mulai belajar bahasa kedua, bahasa Indonesia, terutama bagi anak-anak yang dilahirkan dari kalangan orang tua yang bukan berbahasa ibu bahasa Indonesia. Setiap kata yang diucapkan si anak membawa makna tertentu yang berkaitan dengan kata-kata lain, dan keseluruhannya itu tidak terlepas dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat, tempat si anak dilahirkan dan tumbuh menjadi dewasa.

Penguasaan bahasa oleh anak dalam proses yang lama dan dengan cara sedikit demi sedikit itu menyebabkan si anak kurang merasa bahwa dia diajar untuk mengerti sesuatu. Apa yang diterimanya itu dirasakannya sebagai sesuatu yang terjadi secara wajar dan diperolehnya tanpa bersusah payah.

Proses pembelajaran dan pemerolehan semacam itu berlangsung terus sampai seseorang menjadi dewasa. Bahkan, setelah dewasa pun seseorang masih mungkin menambah pengetahuan bahasanya, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Bagi sebagian besar anak Indonesia, yang dipelajari sedemikian ini adalah bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Bagi sebagian yang lain mungkin setelah belajar bahasa ibu mereka belajar pula bahasa kelompok etnik yang lain dan kemudian baru bahasa Indonesia. Hal ini banyak terjadi di daerah perbatasan seperti di daerah Cirebon yang penduduknya banyak yang menguasai bahasa Sunda, Jawa, dan Indonesia.

Penguasaan bahasa ibu dan bahasa Indonesia yang dimulai sejak dini ini membawa dampak positif bagi para pembelajar. Setelah mereka dewasa, bila kesempatan perkembangan kedua bahasa itu seimbang hingga cukup kesempatan untuk mengembangkan penguasaan keduanya bagi pembelajar, mereka akan menjadi dwibahasawan yang sempurna atau hampir sempurna. Mereka menguasai dua bahasa itu dengan amat baik. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia yang dikuasanya itu sangat dipengaruhi oleh bahasa ibu, baik secara fonologis maupun dalam pilihan kata. Sementara itu, pengaruh morfologis dan sintaksis tidak sebanyak pengaruh kedua bidang di atas. Demikian pula, pengaruh kebiasaan, tata cara pergaulan, sopan santun, dan sebagainya yang merupakan budaya mereka sangat dipengaruhi oleh budaya bahasa ibu, atau bahkan budaya bahasa ibulah yang digunakan pada waktu mereka berbahasa Indonesia ataupun bahasa ibu. Hal itu terjadi karena budaya Indonesia sebagai budaya bangsa Indonesia masih dalam taraf pembentukan. Secara implisit memang sering disebutkan oleh para pemimpin kita bahwa budaya Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai budaya daerah di Indonesia yang satu sama lain tidak bertentangan dan dapat diterima dengan mudah oleh berbagai kelompok etnik di Indonesia.

Dalam praktik hal itulah yang tidak mudah dipilah-pilah, yang mana yang Indonesia dan yang mana yang daerah. Setiap anggota kelompok suatu etnis akan cenderung memilih budaya daerahnya yang paling cocok untuk dijadikan budaya Indonesia.

3. Variasi Bahasa Indonesia bagi Pembelajar Asing

Di Malaysia diajarkan bahasa Malaysia, di Indonesia bahasa Indonesia, di Inggris bahasa Inggris, di Australia bahasa Inggris Australia serta di Amerika bahasa Inggris Amerika, dan sebagainya. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semudah seperti yang kita dengar itu. Saya yakin bahwa orang-orang Amerika di Boston akan mengatakan bahwa bahasa Inggris yang diajarkan di sana adalah bahasa Inggris Amerika baku. Demikian juga, guru-guru di Atlanta dan Chicago, semuanya mengaku telah

mengajarkan bahasa Inggris Amerika baku. Namun, kenyataan membuktikan bahwa bila kita mendengarkan tiga orang terpelajar yang masing-masing datang dari Boston, Atlanta, dan Chicago, kita akan sadar bahwa bahasa Inggris mereka itu berbeda, pertama-tama tentang aksennya, kemudian lafal, pilihan kata, dan juga beberapa struktur frasa ataupun kalimatnya. Yang dari Boston kedengaran seperti orang yang baru tiba dari London, yang dari Atlanta seperti orang yang baru bangun tidur, sedangkan yang dari Chicago kedengaran seperti suara seorang penyiar radio di Amerika pada umumnya. Bila demikian kenyataannya, sebenarnya masing-masing menggunakan bahasa Inggris Amerika baku yang digunakan di Boston, yang lainnya di Atlanta, dan yang lain lagi di Chicago. Yang terakhir itu, oleh banyak kalangan terpelajar di Amerika, dianggap paling baku dari semuanya yang baku, yang sering disebut *Mid West Dialect of American English*.

Banyak kaum terpelajar di Amerika Serikat yang berusaha keras untuk berbicara seperti orang-orang terpelajar dari Mid West ini. Namun, bagaimanapun kerasnya usaha itu pengaruh variasi bahasa dari daerah tertentu itu tidak dapat hilang sama sekali. Setiap pembicara di sana memiliki kebanggaan tersendiri terhadap variasi bahasa Inggris di daerahnya. Walaupun mereka sering diperolok-olokkan oleh teman-teman mereka dari daerah lain, mereka tidak merasa sedih ataupun sedikit berkecil hati.

Bagaimana sikap kita terhadap pilihan variasi bahasa Indonesia yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, termasuk mereka yang datang dari luar negeri? Sebaiknya kita mengambil sikap seperti apa yang terjadi di Amerika dengan sedikit perbaikan. Khusus bagi guru dan dosen bahasa Indonesia, mereka harus berusaha keras untuk menghilangkan pengaruh bahasa daerah yang sangat mencolok, terutama aksan dan lafal. Guru bahasa Indonesia dari Jawa Tengah dan Jawa Timur harus dapat mengatakan Bandung, bukannya *Mbandung* sehingga perguruan tinggi yang terkenal di sana betul-betul ITB, bukannya ITM karena diucapkan Institut Teknologi *Mbandung*. Guru bahasa Indonesia dari daerah Sunda harus dapat menghilangkan bunyi glotal pada setiap akhir kata yang berakhiran dengan bunyi vokal, misalnya. Kata *tidak* sama dengan *katak*, dan *mangga* tidak sama dengan *manggak*. Demikian juga, guru dari Bali dan daerah Aceh perlu belajar mengucapkan alveolar /t/ untuk mengganti retroflek /t/ yang biasa mereka gunakan dalam bahasa daerah mereka masing-masing. Demikian juga, para guru dan dosen bahasa Indonesia perlu menghilangkan penggunaan kata-kata dari daerah mereka bila kata-kata itu telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Mereka pun perlu mengurangi penggunaan bentuk-bentuk morfologis dan sintaksis yang terlalu berbau kedaerahan. Guru Sunda tidak lagi mengatakan, "Bukunya telah diambil oleh saya", guru Jawa tidak memilih, "Anaknya Pak Sastra lima", dan guru dari daerah Indonesia Timur berusaha mengurangi kalimat-kalimat seperti, "Kitorang perlu kumpul sebentar malam di Bapa punya rumah", dan sebagainya.

Dengan tekad semacam itu kita tak perlu ragu untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam materi pengajaran perlu nantinya diberikan contoh-contoh bahasa resmi yang diucapkan oleh para pemimpin kita dari daerah-

daerah yang berbeda di Indonesia di dalam suatu pidato resmi yang dibaca dari suatu teks. Contoh-contoh juga perlu diberikan, bila mungkin dari orang-orang yang sama di atas pada waktu mereka berbincang-bincang di luar pertemuan resmi. Pada tingkatan lanjut perlu pula dikemukakan contoh-contoh variasi bahasa informal atau bahkan kasual yang sering terdapat di dalam suatu kelakar yang dihadiri oleh sekelompok rekan sekerja atau sekelas di sekolah menengah atau di perguruan tinggi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, penggunaan bahasa Indonesia yang terpengaruh oleh bahasa dan budaya daerah sering ditonjolkan untuk mendapatkan efek kelucuan. Perlu pula disajikan video yang menggambarkan keadaan di atas, yang tidak hanya dapat didengarkan bahasanya dengan berbagai variasi yang ada, tetapi juga sikap, tingkah laku, dan berbagai gerakan yang mengiringi atau melengkapi bahasa verbal.

Banyak pakar bahasa, termasuk Birdwhistell (1970), mengatakan bahwa sikap terhadap sesuatu atau seseorang 90% lebih dinyatakan dengan bahasa nonverbal, raut muka, gerakan bagian badan, dan sebagainya. Karena bahasa nonverbal ini banyak yang bersifat lokal dan sangat bergantung pada budaya pemilik bahasa, pastilah bahasa nonverbal kita banyak yang berbeda dengan bahasa nonverbal yang digunakan oleh bangsa asing. Oleh karena itu, bahasa nonverbal ini perlu diajarkan bersamaan dengan bahasa verbal yang mengiringinya.

4. Situasi Formal dan Informal

Formalitas biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang resmi di masyarakat yang pelaksanaannya berhubungan erat dengan adanya status sosial berdasarkan pangkat, jabatan, profesi, kekayaan, dan sebagainya. Adapun informalitas menyangkut hal-hal yang tidak resmi dan hal-hal yang tidak memerlukan penonjolan status sosial. Namun, batas antara formalitas dan informalitas bagi sekelompok manusia yang satu tidak sama dengan sekelompok manusia yang lain. Perbedaan tersebut akan menjadi lebih nyata bila kita membandingkan kebiasaan dua bangsa. Oleh karena itu, variasi bahasa dan bahasa nonverbal yang mengiringi setiap situasi itu perlu diajarkan kepada pembelajar asing.

a. Situasi Formal

Dalam suatu pertemuan resmi di Indonesia, misalnya rapat kepala-kepala dinas suatu instansi pemerintah dari seluruh Indonesia, bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia (baku), dan sapaan yang lazim digunakan adalah *Bapak* dan *Ibu*. *Saudara*, kadang-kadang juga digunakan sebagai pengganti *Bapak/Ibu*, terutama oleh seseorang yang yakin bahwa dirinya berstatus sosial lebih tinggi daripada status sosial orang yang disapa. Tak ada seorang pun di dalam rapat itu yang menggunakan panggilan atau sapaan dengan nama kecil saja. Hal ini sangat berbeda dengan yang biasa terjadi di Amerika dan Australia, misalnya.

Dalam suatu konferensi yang dihadiri oleh para dekan fakultas seni, sosial dan humaniora dari seluruh perguruan tinggi negeri di Australia baru-baru ini, misalnya, sebutan *profesor, doctor, dean*, dan sebangsanya, hanya digunakan pada waktu ketua panitia memperkenalkan mereka masing-masing. Setelah itu, sebutan tersebut tidak pernah digunakan lagi, sedangkan para peserta selalu menggunakan nama kecil saja pada waktu mereka menyapa seorang peserta. Bahasa yang digunakan pun sangat informal tanpa basa-basi. Bila seseorang dipersilakan mengemukakan pendapatnya, dia cukup mengatakan *Thank you* kepada moderator. Sementara itu, peserta yang ingin mengemukakan pendapatnya cukup mengacungkan tangannya tanpa menunggu diatur dalam sistem *termijn* seperti yang terjadi di dalam suatu seminar di Indonesia. Demikian pula, perasaan setuju atau tidak setuju langsung dikemukakan tanpa malu-malu dan suatu kritik pun disampaikan dengan terus terang.

Dari penggunaan sapaan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang Australia sangat demokratis, yaitu setiap orang dapat menggunakan pronomina *you* kepada siapa pun, seolah-olah mereka tidak memiliki perbedaan status sosial. Di Indonesia hal itu tidak terjadi. Para peserta rapat seperti di atas di Indonesia menggunakan Bapak/Ibu untuk mengganti pronomina kedua. Dalam pengajaran bahasa Indonesia kepada orang asing, penggunaan *Bapak* dan *Ibu* sebagai pengganti pronomina kedua ini perlu ditekankan dan para pembelajar asing itu perlu dilatih terus-menerus penggunaannya. Demikian juga, penggunaan *Bapak* dan *Ibu* di depan nama. Biasanya, nama kecil digunakan untuk sebarang pria dan untuk wanita yang belum menikah, sedangkan bagi yang telah menikah biasanya digunakan nama suami, kecuali bila terdapat kebiasaan tersendiri bagi wanita tertentu yang menggunakan nama kecil atau nama panggilan sehari-hari di belakang sebutan Ibu.

Untuk mengurangi penggunaan *kamu* bagi orang asing memang tidak begitu mudah sebab di samping hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka di negaranya, dengan menggunakan padanannya, di Indonesia terdapat kecenderungan orang-orang Indonesia menggunakan *kamu* kepada orang asing yang kira-kira sebaya dengan pembicara, atau kepada yang lebih muda. Hal itu perlu adanya sikap yang bijaksana dari guru untuk menjelaskan seandainya terdapat siswa asing yang *protes* terhadap penggunaan *kamu* yang demikian.

Sapaan *Mas* dan *Mbak* sangat lazim digunakan dalam bahasa Indonesia di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga keduanya perlu diajarkan penggunaannya, baik di dalam maupun di luar kelas. Namun, padanan *Kang* dan *Ceuk* di Jawa Barat atau *Udo* dan *Uni* di daerah Minang, perlukah diajarkan pula? Secara demokratis, iya, tetapi benarkah keempatnya frekuensi pemakaiannya dalam bahasa Indonesia sama benar dengan yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Hal itu perlu dipikirkan masak-masak.

Penggunaan sapaan di dalam suatu dialog perlu dibuat seasli mungkin. Seorang tukang becak atau seorang penjual panganan biasanya menyapa orang asing dengan sapaan *Om (oom)* atau *Tuan* kepada pria asing dan *Nyonya* atau *Nona*, juga *Non* kepada wanita asing. Di dalam dialog seharusnya juga digunakan sapaan semacam itu,

dan bukannya *Dik* atau *Jeng* yang ditujukan kepada wanita asing sekalipun terjadinya di Yogya, misalnya. Sebaliknya, banyak anak muda terpelajar yang menyapa teman akrab mereka hanya dengan nama kecil atau nama sendiri saja dan menggantikan nama-nama itu dengan pronomina *kamu*, dalam suatu percakapan. Jika hal itu diajarkan, guru perlu waspada untuk memberikan ketentuan yang memungkinkan pemunculan *kamu* dalam suatu interaksi sosial. Pada dasarnya setiap ada penyimpangan bentuk dari ketentuan penggunaan bahasa formal atau bahasa baku, guru perlu memberikan keterangan se jelas mungkin.

Dalam kehidupan keseharian, formalitas memiliki suatu gradasi yang walaupun tidak tertulis, formalitas tersebut dipahami oleh anggota masyarakat. Formalitas antara kota besar dan kota kecil biasanya berbeda. Demikian juga, terdapat perbedaan antara situasi formal di kantor pemerintah dan di kantor swasta, antara instansi militer dan sipil, dan sebagainya.

Dalam undangan resmi kini biasa dicantumkan pakaian yang harus atau seyogianya dikenakan bagi pria, wanita, sipil, dan militer. Demikian juga, kartu atau surat undangan sering harus dibawa untuk memudahkan pengaturan penempatan para tamu sesuai dengan pangkat atau status sosial mereka masing-masing tentunya. Tingkah laku di dalam situasi resmi tidak begitu sulit diikuti sekalipun oleh para pembelajar asing karena selain terdapat informasi atau aturan yang tertulis, juga terdapat petugas yang mengatur tingkah laku itu. Yang lebih sulit dilaksanakan biasanya ialah tingkah laku dalam situasi informal karena di samping tanpa aturan tertulis variasinya jauh lebih besar daripada tingkah laku dalam situasi formal. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang sedikit menyimpang yang biasa dilakukan oleh istri pejabat atau pejabat wanita di dalam upacara resmi pemberian ucapan selamat. Bagi ibu-ibu yang merasa akrab, kecuali bersalaman, mereka juga saling mencium kedua pipi mereka, misalnya.

Penggunaan bahasa di dalam situasi resmi sudah disinggung di atas. Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah kecenderungan orang Indonesia untuk menulis surat yang bersifat pribadi atau tidak resmi dengan bahasa resmi sehingga sering mengejutkan teman-teman asing yang mengira bahwa teman-teman Indonesia mereka kini telah berubah menjadi tidak akrab lagi. Demikian juga, penggunaan kata-kata pembukaan di dalam pertemuan resmi biasanya terlalu bertele-tele karena pembicara menyebutkan sederetan nama orang-orang yang berstatus sosial tinggi sebagai basa-basi sopan santun yang agak menjemukan. Saya pribadi memilih menyebutkan pejabat yang paling tinggi status sosial saja kemudian diikuti dengan ucapan "dan para hadirin yang saya hormati".

b. *Situasi Informal*

Penggunaan bentuk-bentuk tertentu dalam pembicaraan informal antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga banyak berbeda. Oleh karena itu, perlu dihindari terjemahan bentuk-bentuk tertentu semacam itu. Orang Amerika, termasuk yang

terpelajar, banyak menggunakan umpatan *shit* di berbagai interaksi, sedangkan di Indonesia padanan kata itu hampir tidak pernah dipakai di dalam interaksi kaum terpelajar yang serupa. Di daerah sekitar Jakarta mungkin digunakan *busyet*, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih banyak digunakan kata lain, seperti *edan* dan *semprul*. Walaupun orang Jawa Timur terkenal "pandai" mengumpat, umpatan itu hanya ditujukan kepada teman akrab dari daerah yang sama atau daerah yang dianggap sama.

Sikap yang cepat menjadi akrab, oleh orang Indonesia, perlu mendapat perhatian pula dari para guru, terutama dalam interaksi informal. Hal serupa pun terjadi di Amerika, misalnya, walaupun sifatnya agak berbeda. Di sana keakraban itu hanya sedalam kulit luar. Sementara itu, di Indonesia basa-basi ajakan, misalnya, bila diikuti benar ajakan itu, orang akan tetap dapat menerimanya dengan senang hati. Ajakan *Please drop by*, misalnya, tidak sama betul dengan *Silakan mampir*. Yang pertama, bila kita ingin melaksanakannya, kita harus menelepon dulu atau janji dulu. Jangan kecewa bila orang yang mengajak itu lupa siapa kita karena baru pertama kali bertemu, sedangkan yang mungkin terjadi di Indonesia orang yang diajak itu dapat saja sekonyong-konyong sudah berada di depan rumah orang yang mengajak singgah. Bila ini terjadi, hukum tak tertulis masyarakat kita mengatakan sebaiknya orang yang kita ajak itu kita terima dengan baik. Di Jawa bila kita memang sedang repot, kita dapat mengisyaratkan kerepotan kita itu sehingga sang teman baru itu tidak mengobrol di rumah kita berlama-lama. Bila beberapa kali isyarat semacam itu tidak diterima dengan baik, barulah kerepotan yang sebenarnya diutarakan sambil meminta maaf karena tidak dapat menemuinya dengan tenang.

Banyak juga bentuk basa-basi yang perlu dijelaskan latar belakang budayanya agar pembelajar dapat memahaminya secara baik. Misalnya, ajakan *Jangan kapok, ya*, tidak cukup dengan diberikannya padanan *Please, come again* saja kepada para pembelajar, tetapi dengan penjelasan situasi, kondisi, dan sebagainya, yang menyebabkan munculnya bentuk basa-basi itu. Dengan demikian, di samping memahami makna basa-basi itu, pembelajar dapat pula menggunakannya dengan tepat. Sebaliknya, pujian yang sering sangat berfungsi di dalam pergaulan orang Barat, perlu dibatasi penggunaannya dalam bahasa Indonesia sebab padanan *You look very pretty to night*, misalnya, tidak memiliki distribusi pemakaian yang sama luasnya seperti yang terjadi di Amerika. Di Indonesia, pada umumnya pujian semacam itu hanya disampaikan kepada anggota keluarga yang sangat akrab, istri, dan anak perempuan atau teman wanita dari teman yang sejenis.

Sederetan basa-basi yang di Indonesia berfungsi sebagai pengakrab pergaulan, di dunia Barat sering tidak ada padanannya. Misalnya, *Mari makan, Pak*, suatu sopan santun yang diucapkan oleh seseorang yang sedang makan di restoran kepada kenalan yang baru saja masuk ke restoran yang sama dan lewat di dekatnya. Demikian juga, jawaban basa-basi tersebut seperti *Selamat makan*, juga tidak terdapat di sana.

Pada umumnya orang Barat menghendaki pernyataan atau jawaban yang tegas, bukannya yang terselubung. Padahal, di Indonesia untuk menolak suatu ajakan, misalnya, orang sering merasa tidak sampai hati untuk menyatakannya secara terusterang. Sebaliknya, bila ditawarkan sesuatu orang Indonesia tidak langsung menerimanya, tetapi menunggu sampai dua tiga kali ditawarkan, baru menerima tawaran itu. Pernyataan atau ujaran terselubung, seperti *Terima kasih, Bu, nanti saja*, yang maknanya menolak sesuatu yang ditawarkan, penggunaannya perlu diberi keterangan tentang latar belakang budaya agar mereka dapat memahaminya dengan baik sebab di negara asal mereka, *Thank you* berarti menerima suatu tawaran.

Informalitas di Indonesia pada umumnya direfleksikan ke dalam bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Seperti contoh-contoh di atas, bahasa informal penuh dengan basa-basi, pernyataan atau ujaran yang terselubung, implikatur, bentuk-bentuk "slang", campur kode, dan sebagainya. Oleh karena itu, walaupun orang Amerika dikatakan lebih menyukai informalitas, isi informalitas itu tidak sama dengan informalitas yang digunakan oleh orang Indonesia. Hal itu perlu sekali diajarkan kepada pembelajar asing dan mungkin bahkan diberikan penekanan di sana-sini agar mereka paham betul tentang bentuk dan makna yang digunakan dalam interaksi sosial di Indonesia. Dalam hal ini tingkah laku yang mengiringi informalitas pun perlu disampaikan dan diajarkan kepada mereka. Orang Barat senang memakai celana pendek terutama di musim panas hampir di mana saja, misalnya, sedangkan di Indonesia orang yang ke mana saja memakai celana pendek itu tukang becak, buruh kasar, dan sebagainya. Kalau orang terpelajar memakai celana pendek, biasanya dia sedang berkebun di rumah atau sedang berolah raga di lapangan atau sedang berpiknik dengan keluarga sendiri.

Pilihan basa-basi, baik verbal maupun nonverbal yang perlu diajarkan seyogianya disusun menurut prioritas sesuai dengan keseringan penggunaannya dalam situasi dan daerah tertentu. Menunjuk sesuatu atau seseorang termasuk kegiatan yang sering terjadi di dalam percakapan. Oleh karena itu, perlu diajarkan bilamana atau di mana orang menunjuk dengan telunjuk, dengan ibu jari atau dengan tangan kanan terbuka. *Ayo* di Jawa sering digunakan sebagai ajakan atau berpamitan di antara kawan akrab, sedangkan *mari* penggunaannya serupa, tetapi ditujukan kepada orang yang dihormati. Demikian juga, urutan tanya jawab yang lazim disampaikan di dalam suatu percakapan perlu diajarkan karena di Indonesia orang sering menanyakan sesuatu yang oleh orang asing dianggap terlalu pribadi dan tidak pernah ditanyakan. Cuaca tidak biasa dijadikan sebagai pembuka percakapan, kecuali bila cuaca yang sedang dihadapi sangat buruk atau sangat menyenangkan. Sementara itu, di dunia Barat hal ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Menanyakan keadaan keluarga, suami, istri, anak, dan sebagainya merupakan pilihan objek percakapan yang sangat lazim. Di Amerika pun hal itu agak biasa dilakukan, tetapi jangan kaget bila kita mendapat jawaban, *O, baik-baik saja. Kita baru saja selesai mengurus perceraian kita*.

Di Indonesia orang sering "berbohong sedikit" di dalam percakapan demi kelanjutan percakapan, tetapi bukannya orang betul-betul senang berbohong. Sapaan,

Mau ke mana, Bu? misalnya, sering dijawab asal saja. Tidak perlu dijawab senyatanya termasuk, *Mau pinjam uang di kantor suami saya*, misalnya. Tentulah berbohong sedikit ini ada aturannya, antara lain, agar isi bohong itu masuk akal dan tidak terlalu tampak bohongnya, seperti *ke situ, ke pasar, jalan-jalan saja*. Namun, kalau jalan-jalan saja memakai pakaian bagus juga tidak wajar atau membawa tas besar yang biasanya berisi pakaian. Di Amerika ada istilah *white lies* yang dapat digunakan untuk hal yang sama, tetapi distribusi keseluruhannya tentulah tidak sama. Karena nantinya pembelajar asing akan menghadapi orang-orang Indonesia di masyarakat, hendaknya hal itu diingatkan supaya mereka tidak kaget dan marah bila nantinya banyak orang yang bertanya, yang bagi mereka di negaranya dianggap sangat pribadi, seperti tentang umurmu berapa, sudah menikah, bekerja di mana sekarang, berapa gajimu, dan suamimu sekarang di mana. Sulit kiranya bagi mereka untuk menahan diri, tetapi mereka perlu membiasakan diri dengan pertanyaan seperti itu dan bila perlu dijawab saja dengan *white lies*.

Sebagai telah diutarakan terdahulu, perlu disusun berbagai macam basa-basi yang dipergunakan di dalam percakapan sesuai dengan urutan prioritas keseringan pemakaiannya serta sesuai pula dengan penggunaannya di dalam suatu kelompok masyarakat dan daerah.

5. Penampilan Budaya Indonesia di dalam Bahan Pengajaran

Pemunculan basa-basi dan segala unsur budaya kita perlu ditampilkan di dalam setiap bahan pengajaran, tetapi pemunculan itu senantiasa perlu disusun agar tampak wajar. Bila perlu, keterangan-keterangan yang berhubungan dengan unsur budaya itu dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa ibu pembelajar. Kewajaran itu dapat dilihat dari pemunculan unsur budaya itu di dalam konteks situasional ataupun linguistik (Ellis, 1987). Agar pembelajar tidak bingung, pemunculan itu perlu bertahap, yaitu dari yang paling sering digunakan sampai kepada yang sesekali saja munculnya. Dalam hal ini, mungkin juga unsur yang sering muncul itu menggunakan struktur bahasa yang agak lanjut atau agak sukar bagi pembelajar, tetapi hal itu perlu didahulukan agar pembelajar langsung belajar menggunakan bahasa secara komunikatif.

Menurut pengalaman pribadi, pembelajar asing menganggap afiksasi dalam bahasa Indonesia sulit dipahami. Untuk mengurangi hal itu, guru perlu menghindari bentuk komunikatif yang nantinya akan menimbulkan kesulitan dalam perkembangan bahasa pembelajar. Bentuk komunikatif *ayo jalan*, misalnya, sebaiknya diganti dengan *ayo berangkat*. Demikian juga, pertanyaan seperti, *Dia sudah bawa buku itu belum?* sebaiknya diganti dengan, *Dia sudah membawa buku (atau) belum?* Pilihan *ber-* atau *meng-* bagi penutur asli tidak sulit, tetapi bagi pembelajar asing hal itu merupakan masalah besar. Oleh karena itu, sebaiknya kepada mereka diperkenalkan bentuk-bentuk yang benar. Nantinya, persoalan afiksasi ini akan bertambah sulit bila mereka sudah sampai kepada pilihan *-i* atau *-kan*. Walaupun bentuk *mengurus* dipakai dalam

bahasa Indonesia, bentuk yang lebih luas distribusinya adalah *mengurus*, sedangkan kata dasar yang lain memiliki distribusi yang seimbang, tetapi berbeda pemakaiannya seperti *mengirim*, *mengirimi*, dan *mengirimkan*. Untuk bentuk-bentuk seperti itu pembelajar perlu diberi contoh yang cukup banyak di dalam konteks sebab dengan keterangan verbal saja mungkin mereka malah bingung.

Agar konteks dapat membantu pembelajar dalam mengembangkan bahasanya, perlu diperhatikan empat proses yang merupakan dimensi yang saling berkaitan, yaitu (1) skema, (2) kerangka interpretatif, (3) pengelolaan wacana, dan (4) penguasaan sistem bahasa. Pemahaman *American football* amat sulit bagi orang Indonesia pada umumnya karena tidak sama dengan "sepak bola" yang dikenal di Indonesia. Namun, permainan *cricket* lebih sulit lagi dipahami karena sama sekali tidak ada perbandingannya di Indonesia. Jadi, untuk memahami sesuatu itu perlu adanya skema, seperangkat praanggapan (*presupposition*) tentang pengetahuan dunia dan tentang segala sesuatu yang berjalan menurut aturannya masing-masing. Setiap orang paham bahwa sesuatu itu berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang diharapkan (Tannen, 1979). Jadi, mengapa orang Indonesia pada umumnya menganggap tangan kiri tidak sebaik tangan kanan, hal itu perlu suatu penjelasan agar mereka mendapatkan *knowledge of the world* tentang pemakaian tangan kiri di Indonesia.

Pengertian skema itu penting sekali di dalam suatu percakapan karena kurang pengertian tentang skema dapat menghasilkan kekeliruan di dalam kerangka interpretatif. Lebih-lebih, bila kelak mereka telah belajar menggunakan pernyataan yang terselubung. Pelajar Indonesia mudah menerima mengapa dia harus bangun pukul 5 pagi bila dia harus mengikuti upacara pukul 7 pagi karena skema yang ada padanya ialah bahwa dia harus mandi dulu, bersembahyang subuh bila dia seorang muslim dan kemudian makan pagi supaya tidak pingsan di dalam upacara yang biasanya di bawah terik matahari pagi. Skema semua ini tidak terdapat di dalam benak pembelajar asing sebab mereka sudah mandi sebelum tidur sehingga pagi hari tidak perlu mandi lagi; juga mereka tidak biasa mengikuti upacara yang sampai dua jam atau lebih di bawah terik matahari; makan pagi pun dapat selesai dalam lima menit, kalau perlu sambil berjalan menuju ke sekolah, terutama bila yang dimakan apel, jeruk, atau buah-buahan lain. Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengapa di Indonesia perlu bangun pagi-pagi sebelum mengikuti upacara bendera, misalnya, agar kerangka interpretatif pembelajar tidak keliru. Selanjutnya, setiap pembicara memiliki maksud tertentu di dalam memilih kata-katanya (Goffman, 1974). Apakah pertanyaan yang diajukan itu suatu pertanyaan biasa, sindiran, kelakar, atau lainnya. Hal itu semuanya bergantung pada skema yang sudah dimiliki bersama oleh para peserta interaksi.

Suatu percakapan dapat berlangsung dengan baik bila di samping memperhatikan kedua proses di atas, para partisipan juga memahami adanya aturan tentang pengelolaan wacana, yaitu bahwa setiap pembicara mengetahui kapan dia dapat mengemukakan pendapatnya, tidak memotong pembicaraan partisipan lain, dapat mengontrol topik pembicaraan dan kesempatan yang tidak selalu sama dalam suatu

percakapan, misalnya antara orang tua dan anak-anak sebagai partisipan di dalam suatu percakapan di Indonesia pada umumnya.

Setiap pembelajar berusaha mengembangkan pemerolehan bahasanya dengan berbagai cara untuk menguasai sistem bahasa yang dipelajarinya, termasuk fonologi, kosakata, sintaksis, prosodi, dan sebagainya. Proses tersebut cukup lama karena pemerolehan sistem bahasa diinternalisasi ke dalam benak pembelajar dari sedikit demi sedikit < memerlukan daya ingatan dan kemampuan menyimpan segala sesuatu yang telah diperolehnya, mengingat kembali yang sering diganggu oleh kelupaan, dan sebagainya. Keempat proses itu perlu diperhatikan di dalam pemilihan dan penyusunan bahan pengajaran agar konteks dapat memberikan kemudahan kepada pembelajar dalam pemerolehan bahasa yang dipelajarinya.

Sesuai dengan proses di atas tentulah pembelajar tidak diberi sajian tentang pedoman hidup bangsa Indonesia serta nilai-nilai luhur yang menjadi petunjuk dalam hidup bermasyarakat di Indonesia sehari-hari secara sekaligus. Seyogianya diberikan sajian aspek budaya yang menyangkut kehidupan di dalam ranah atau domain yang merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat, yaitu keluarga. Bagaimana para anggota keluarga menerapkan *empan-papan*, gotong-royong, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan sebagainya, yang tiada lain juga merupakan unsur-unsur penting dalam pedoman hidup yang disebutkan di atas. Unsur-unsur itu kemudian dijabarkan refleksinya ke dalam bahasa yang digunakan di dalam keluarga, yaitu bagaimana mereka menggunakan sapaan, pronomina apa saja yang dapat digunakan, bagaimana mengemukakan pendapat, bertanya dan menjawab sesuai dengan sopan santun dalam keluarga terpelajar, bagaimana mereka menyatakan persetujuan dan penolakan, meminta pertolongan, memohon bantuan, siapa yang boleh menyuruh, dan sebagainya.

Penyajian itu tentulah tidak ditumpahkan sekaligus, tetapi perlu disesuaikan dengan perkembangan kompetensi komunikatif pembelajar, yaitu (1) kompetensi gramatikal, (2) kompetensi wacana, (3) kompetensi sosiolinguistik, dan (4) kompetensi strategi menggunakan bahasa pada umumnya. Keempat unsur kompetensi komunikatif itu saling berkaitan sehingga perlu mendapatkan perhatian penyajiannya oleh para pengajar (Canale dan Swain, 1980).

Dalam percakapan para anggota keluarga terpelajar di pagi hari, misalnya, sang ibu bertanya kepada putrinya yang duduk di kelas empat SD, *Sudah mandi?* dapat diinterpretasikan sebagai perintah halus agar putrinya lekas mandi sebab sang ibu kemudian melanjutkan, *Bapak dan kakak-kakakmu sudah siap untuk makan pagi bersama.* Ujaran kedua ini merupakan ajakan dan sekaligus peringatan agar putrinya bergegas. Perhatian sang ibu kepada putrinya itu, dan tentunya kepada semua anggota keluarga, merupakan kepedulian sosial yang dimulai dari unit masyarakat terkecil di samping pernyataan kasih sayang ibu. Dari ujaran-ujaran itu pun tercermin adanya unsur saling menghormati di dalam keluarga, yaitu adanya usaha dari sang ibu untuk menanamkan pengertian hak-hak asasi karena sang ibu tidak otoriter, tidak memerintah walaupun dia berkuasa sebagai wakil kepala di dalam keluarga itu. Kepada

putrinya, Rina, yang sudah remaja, sang ibu minta agar Rina menyajikan minuman untuk ayahnya dengan mengatakan, *Kopi (untuk) Ayah, Rina*. Rina mengetahui maksud Ibu walaupun perintah halus itu tidak diucapkan dalam kalimat utuh. Di sinilah kompetensi sosiolinguistik pembelajar mendapatkan umpan bahwa di antara partisipan yang memiliki skema yang sama tidak perlu menggunakan kalimat utuh dan bahwa sopan santun itu dapat diwujudkan dalam berbagai cara dan bentuk.

Budaya makan pagi dan minum kopi juga terdapat di Indonesia yang mirip dengan budaya pembelajar. Namun, perbedaan-perbedaan tentulah segera tampak, misalnya air buah atau *fruit juice* tidak biasa dihidangkan di pagi hari, dan bila mereka makan roti tentulah tanpa *bacon* dan selai; yang dihidangkan mungkin jauh lebih enak daripada selai yang biasa dimakan oleh pembelajar karena selai Indonesia yang dibuat sendiri oleh Ibu tidak dicampuri pengawet dan agar-agar, tetapi selai nanas asli, misalnya. Bila keluarga itu makan nasi goreng, hal itu perlu dijelaskan bahwa kecuali praktis dan mudah dikerjakan di pagi hari juga mengandung makna bahwa orang Indonesia biasa menyediakan makanan lebih setiap kali makan karena mereka selalu berpikir, *Jangan-jangan ada teman atau saudara yang berkunjung dan perlu diajak makan*. Hal itu juga menunjukkan adanya rasa setia kawan dan kepedulian sosial di kalangan bangsa kita yang, antara lain, ditunjukkan dengan mengajak makan teman yang datang tanpa diundang. Hal itu sangat kontras dengan situasi di Amerika, misalnya, bahwa makanan yang tersedia di meja biasanya pas betul bagi anggota keluarga sehingga bila secara tiba-tiba datang orang lain, dia biasanya tidak diajak makan. Orang Barat sering mengajak makan di rumah mereka untuk mengeratkan persahabatan atau untuk saling mengenal. Mereka mengundang teman baru dan teman akrab mereka, misalnya, cukup enam orang saja. Akan tetapi, mereka hampir tidak pernah mengajak makan bila kita mendadak datang dan mereka sedang makan karena mereka tidak biasa memasak sedikit berlebih seperti kita.

Ranah keluarga dapat diperluas dengan sahabat dan kenalan keluarga yang tentunya datang dari berbagai lingkungan status sosial. Dengan demikian, berbagai macam situasi dengan berbagai ragam dan variasi bahasa dapat disajikan bagi pembelajar, berikut bahasa nonverbal yang mengiringinya. Orang asing tertarik akan cara orang Indonesia bersalaman, yaitu dengan satu tangan, dengan dua tangan, dengan menyentuhkan ujung-ujung jari saja, dengan menyembah, dengan menyentuhkan kedua tangan ke dada setelah bersalaman, dengan dua tangan seperti menyembah, tetapi tanpa menyentuh tangan orang lain, dan sebagainya.

Orang Amerika memiliki berbagai cara untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan orang lain kepada orang lainnya lagi. Cara itu ditunjukkan dengan bahasa verbal dan nonverbal, dari yang formal sampai dengan yang informal. Di Indonesia, orang yang memperkenalkan diri mula-mula menyebutkan namanya, bersalaman, disambut oleh orang yang diajak berkenalan sambil menyebutkan namanya. Walaupun biasanya nama-nama itu tidak terdengar dengan jelas, hanya orang-orang yang berstatus sosial tinggi yang berani menanyakan nama orang yang baru saja berkenalan.

Sikap, cara berdiri, ke mana arah pandangan mata sebaiknya ditujukan dan sebagainya, pada waktu berbicara setelah berkenalan perlu disampaikan kepada pembelajar agar tidak terjadi salah pengertian.

Ranah dalam pekerjaan atau sekolah dengan segala pilihan topik pembicaraan, pilihan ragam bahasa sesuai dengan situasi interaksionalnya merupakan kelanjutan dari bahan pengajaran yang disajikan. Dalam hal ini perlu disampaikan adanya perbedaan antara hubungan dinas dan pribadi, hubungan kolegal antara sesama pria, sesama wanita dan hubungan kolegal antarjenis yang direfleksikan dalam bahasa, baik verbal maupun nonverbal. Di dalam pergaulan, orang Indonesia sering menggunakan kedua tangannya untuk mengiringi pembicaraan mereka dan kadang-kadang juga menepuk atau menyentuh teman bicara mereka. Siapa yang layak menyentuh siapa perlu dijelaskan sebab orang Barat pada umumnya tidak senang disentuh dalam suatu interaksi.

Sesama mahasiswa atau teman sekerja di Indonesia sering melakukan pinjam-meminjam buku, bolpoin, uang dalam jumlah yang sangat terbatas, dan sebagainya. Hal itu juga perlu diberi contoh karena orang Barat tidak suka pinjam-meminjam, terutama uang. Demikian juga tentang bantu-membantu. Hal apa saja yang biasanya dapat saling membantu sebab mahasiswa di Amerika, misalnya, tidak biasa belajar bersama dan saling membantu seperti di Indonesia karena rasa bersaing yang sangat ketat dan sudah membudaya. Seorang mahasiswa yang pulang dari meneliti di suatu daerah, pada waktu melaporkan hasil penelitiannya dengan tegas menyatakan, *Inilah hasil penelitian saya*. Dia akan menuntut sampai ke pengadilan bila ada orang lain yang mengemukakan hasil serupa tanpa menyebutkan sumbernya secara tegas. Di sana hampir tidak ada *surat sakti* yang dapat memberikan kesempatan bekerja atau bersekolah kepada seseorang yang diberi *surat sakti* itu. Persaingan di sana selalu secara bebas. Yang dipilih selalu orang yang benar-benar mampu dan bukan anak siapa. Hubungan kolegal antarteman sekerja di Indonesia sangat baik, tetapi terdapat sedikit perbedaan hubungan serupa itu bagi kolega yang berbeda jenis kelamin. Di dunia Barat terdapat sistem berkencan sejak usia muda atau *dating system* yang direstui oleh para orang tua. Oleh karena itu, mereka terbiasa dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan yang bagi kita dapat dianggap sebagai rayuan. Bila hal itu terjadi antara mereka dan kita, mungkin saja hal itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin seorang pemuda atau pemudi Barat menganggap bahwa orang Indonesia sangat gampang jatuh cinta. Padahal, karena kata-kata mereka yang telah mereka lontarkan tanpa menyadari perbedaan maknanya, hal itu menimbulkan tafsiran di antara kita dan mereka.

Mentraktir merupakan suatu hal yang sering terjadi antara kawan akrab di Indonesia. Biasanya, kawan yang mentraktir ini cukup mengajak kawan-kawan mereka pergi makan dan minum di warung atau restoran dengan biaya kawan yang mengajak itu. Hal serupa sering pula terjadi di dunia Barat, tetapi mereka tegas-tegas mengatakan bahwa seseorang yang akan mentraktir itu yang mengajak; namun kalau mereka mengajak makan siang di kafetaria sebagai kegiatan rutin, mereka harus

membayar sendiri-sendiri. Hal tersebut juga dapat mengecohkan teman Indonesia karena kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan kita.

Suami istri merupakan dwitunggal yang sukar dipisahkan di dunia Barat. Ke mana mereka pergi selalu berdua, seperti memancing, menonton sepak bola, dan menonton adu tinju. Di Indonesia tidak demikian. Oleh karena itu, bila kita bertemu dengan mereka sebaiknya suami istri kita undang semua untuk berbagai kegiatan yang biasanya hanya dilakukan oleh pria, misalnya.

Pembagian tugas antar anggota keluarga di Indonesia tidak sama dengan yang terjadi di Amerika atau dunia Barat pada umumnya. Di Indonesia banyak ibu yang tidak senang dibantu suaminya di dapur karena menurut mereka, bapak-bapak itu hanya mengganggu saja. Di Indonesia bapak-bapak melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga, seperti memanjat dan membetulkan atap yang bocor. Hal itu dapat juga dikerjakan oleh kaum wanita di dunia Barat, termasuk mengganti ban mobil, mengecat tembok, dan sebagainya. Sementara itu, pria di sana juga tidak keberatan mengambilkan minuman untuk istrinya, mencuci pakaian keluarga, berbelanja makanan dan minuman, dan sebagainya. Untuk penampilan di dalam bahan pengajaran, tentunya dipilihkan yang paling wajar meskipun tidak sama dengan yang terjadi di negara pembelajar.

Pemilihan pekerjaan merupakan pilihan masyarakat karena masyarakatlah yang sebenarnya mengevaluasi dan menghargai serta menghubungkan setiap pekerjaan itu dengan status sosial. Di mana pun di dunia ini pekerjaan kasar dianggap rendah, tetapi di dunia Barat pekerjaan semacam itu sering dilakukan oleh para mahasiswa tanpa malu-malu, termasuk mereka yang orang tuanya kaya atau berstatus sosial tinggi. Menjual koran bagi seorang anak sekolah dasar yang orang tuanya menjadi profesor di perguruan tinggi bergengsi bukan hal yang hina. Mahasiswi calon dokter melayani pengunjung di bar juga hal yang biasa. Namun, untuk pekerjaan tetap, masyarakat Amerika pada umumnya memilih empat profesi yang menjadi favorit mereka, yaitu dokter, hakim, pembela, arsitek dan insinyur aeronotika, sedangkan empat profesi yang tidak disenangi adalah pekerja tambang, pekerja kasar di pabrik tekstil dan buruh tani, pelayan rumah tangga, nelayan, dan sopir taksi. Dalam hal bagaimana memilih pekerjaan, memilih kawan akrab yang berhubungan dengan pekerjaan masing-masing, dan sebagainya akan merupakan topik yang sangat menarik dalam bahan pengajaran. Hal itu erat hubungannya dengan budaya kita dan budaya pembelajar, dalam cara memilih kawan dan pekerjaan. Demikian juga, semuanya ini dapat dihubungkan pula dengan sikap orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Di Indonesia, terdapat sikap latah, yaitu semua anak keluarga kelas menengah harus berpendidikan tinggi, tanpa menyadari akan keinginan dan kemampuan anak. Sementara itu, di dunia Barat lulusan sekolah menengah atas kebanyakan mencari pekerjaan, bila perlu, dengan magang. Bila mereka telah mempunyai cukup uang, sebagian mereka melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan pilihan mereka. Hanya sebagian kecil lulusan sekolah menengah yang langsung melanjutkan ke perguruan tinggi, dan hanya sekitar 10 sampai 15 persen yang nantinya melanjutkan ke program pascasarjana. Topik itu

pun akan sangat menarik karena sangat berpengaruh kepada bagaimana masyarakat bersikap terhadap suatu profesi, bagaimana mereka mengatur pendidikan anak-anak mereka, bagaimana mereka bersikap terhadap pendidikan pada umumnya, bagaimana masyarakat pada umumnya membantu lembaga pendidikan dengan bersemangat atau dengan tidak acuh, dan sebagainya.

Suatu hal yang perlu pula diketengahkan ialah bagaimana bangsa Indonesia yang terdiri dari beratus kelompok etnis yang memiliki budaya dan kepercayaan mereka masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat hidup rukun. Perbedaan suku yang dahulu dimanipulasikan oleh penjajah untuk saling bertengkar, kini sering digunakan untuk bahan kelakar yang mengakrabkan anggota antaretnik, dan perlu pula disadari bahwa penyebaran makna dan praktek nyata Pancasila perlu mendapatkan acungan jempol, dan bila ada yang menyeleweng itu harus dituding sebagai perseorangan dan bukan kelompok etnis. Suatu kenyataan membuktikan bahwa seorang anggota kelompok etnis tertentu yang bekerja di suatu daerah jauh dari lingkungan kelompok dan budayanya sendiri senantiasa berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan budaya setempat. Anak-anak orang Barat yang bersekolah di Jawa umumnya pandai berbahasa Jawa dan dapat *ngapurancang*, sedangkan anak-anak Jawa yang dibesarkan di lingkungan etnis Batak dapat berbahasa Batak dengan lancar dan pandai *ngotot* seperti para anggota etnis yang ketempatan. Oleh karena itu, prinsip *empan papan* benar-benar berlaku di Indonesia dan meskipun sesekali terdapat pertengkar kecil di sana-sini, tampaknya masyarakat kita lebih mengenal *cultural adjustment* daripada *cultural conflict*. Dengan demikian, topik semacam itu tentu akan menarik diketengahkan agar pembelajar yang datang dari negara-negara yang mengaku kampiun demokrasi dan pembela hak-hak asasi dapat belajar dari kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama seperti yang terjadi di Indonesia.

Bila para pembelajar sudah menguasai bahasa Indonesia dengan baik seperti orang-orang Indonesia, dan bukan seperti cara-cara para penjajah dahulu berbahasa Melayu dengan anak pribumi, mereka dapat diperkenalkan dengan berbagai tata cara adat dari berbagai daerah, seperti upacara perkawinan, khitanan, kelahiran, pemberian nama, inisiasi ke kedewasaan terutama bagi anak laki-laki, pembagian warisan, tanggung jawab anggota keluarga terhadap adik-adik dan para keponakan, serta pemeliharaan orang tua lanjut usia yang biasanya menjadi "rebutan" anak cucu, terutama di Jawa, karena seorang ibu yang sudah lanjut usia dan menjanda dianggap membawa berkah keluarga yang ketempatan.

6. Penutup

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya dalam hal ini adalah berbagai aspek kehidupan yang dilaksanakan oleh setiap keluarga dan para anggotanya sesuai dengan berbagai aturan yang umumnya tidak tertulis, tetapi ditaati oleh para anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat sehari-hari.

Semuannya itu ternyata direfleksikan di dalam bertutur kata dan bertingkah laku dalam interaksi sosial antaranggota masyarakat, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat luas pada umumnya.

Kemampuan gramatikal perlu diajarkan seperti kemampuan-kemampuan lainnya secara integratif sehingga pembelajar nantinya memperoleh kemampuan berkomunikasi yang wajar. Seperti kita ketahui, para penulis iklan senantiasa berusaha menarik perhatian calon konsumen dengan menggunakan bahasa yang menarik dan sering menyimpang dari aturan gramatikal. Demikian juga, papan pemberitahuan di tepi jalan atau di tempat-tempat umum sering sangat fragmental, yang wacananya harus dicari sendiri oleh para pembaca agar pemberitahuan yang sangat singkat karena sesuatu hal itu dapat dimengerti dengan baik, seperti *Hati-hati banyak anak, Belok kiri jalan terus, Terima kasih untuk tidak merokok, Jangan mengeluarkan anggota badan, dan Siram setelah dipakai*.

Bila pembelajar sudah dapat berdiskusi dan banyak mengetahui dasar-dasar pemikiran budaya kita, diskusi tentang perbedaan dan kewajiban serta tugas wanita dan pria dapat disampaikan kepada mereka, tetapi kesemuanya itu perlu pengertian tentang budaya Indonesia yang mendasar sebab sangat sulit bagi para wanita yang tergabung dalam *women's lib* untuk memahami peranan suami dalam setiap kesuksesan wanita yang berkeluarga, dan sebaliknya.

Bila pembelajar belajar di Indonesia, suatu perjalanan singkat untuk mengenal berbagai aspek kehidupan di suatu desa atau kota kecil perlu diadakan. Diskusi setelah itu akan sangat menarik karena hal yang sama akan dilihat dengan mata dan pandangan lain dari para pembelajar. Bila mereka belajar di negerinya sendiri, suatu video tentang berbagai hal yang serupa dapat menggantikannya.

Akhirnya, perlu diketengahkan di sini bahwa usaha kita dengan teknik dan metode penyampaian yang cocok serta dengan bahan-bahan yang sesuai dengan maksud kita agar pembelajar memahami budaya kita sangat bergantung pada individu pembelajar dan mereka akan tetap mengevaluasi segala sesuatu yang telah mereka terima itu dengan ukuran atau standar evaluasi mereka karena banyak di antara pembelajar asing itu yang belum pernah belajar bahasa dan budaya lain kecuali bahasa ibu dan budayanya sendiri. Jadi, bapak dan ibu guru atau dosen tidak usah kecewa bila setelah bersusah payah mendidik mereka, mereka masih saja berbicara dengan bertolak pinggang, lupa membuka alas kaki ketika masuk rumah yang berpermadani, atau bahkan masih menempatkan kaki mereka di meja kecil di hadapan kita, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bialystock, Ellen. 1990. U.K: Basil Blackwell Inc.
- Canale, M & M. Swain. 1980. "The Theoretical Bases of Communicative Language Teaching and Testing" di dalam *Applied Linguistics*, 1 (1) 1—47.
- DeVito, Joseph. 1991. *Human Communication*. N.Y.: Harper Collins Publishers.
- Draine, C dan Barbara Hall. 1986. *Culture Shock Indonesia*. Singapore: Times Book International.
- Ellis, Rod. 1987. *Second Language Acquisition in Context*. Prentice-Hall International (UK) Ltd.
- Hatch, Evelyn. 1992. *Discourse and Language Education*. Cambridge Language Teaching Library.
- Kamajaya. 1980. *Lima Karya Pujangga Ranggawarsita*. Jakarta: Depdikbud.
- Kartomihardjo, Soeseno. 1988. *Bahasa Cermin Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Dikti Depdikbud.
- Kaswanti Purwo, Bambang, 1990. *Pragmatik dan Pengajaran Bahasa*. Kanisius.
- Levine, Deena R. dan Mara B. Adelman. 1982. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, N.J.
- McCarthy, Michael. 1991. *Discourse Analysis for Language Teachers*. Cambridge University Press.
- Naremore Rita C. dan Robert Hopper. 1990. *Children Learning Language*. N.Y.: Harper & Row Publishers.
- O'Malley, J. Michael, dan Anna Uhl Chamot. 1990. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wierzbicka, Anna. 1991. *Cross-Cultural Pragmatics*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Wolfson, Nessa. 1989. *Perspectives: Sociolinguistics and Tesol*. N.Y.: Newbury House Publishers.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahan Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing
Pemakalah : Soeseno Kartomiharjo
Pemandu : E.K.M. Masinambow
Pencatat : Junaiyah H.M.
Widiyatmoko

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Dameria Nainggolan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Bagaimana dengan bentuk sapaan yang berbeda-beda, seperti *Pak*, *Bu*, *Mas*, dan *Dik*?

Jawaban:

Saya setuju dengan perbedaan bentuk sapaan tersebut karena yang disapa itu pun berbeda-beda sesuai dengan siapa yang disapa, misalnya sapaan *Pak* dan *Bu* sesuai untuk orang yang lebih tua, tetapi untuk orang yang lebih muda kata sapaan *Pak* dan *Bu* terdengar risih di telinga yang disapa.

2. **Pertanyaan:** (tidak menyebutkan nama)
a. Apakah judul makalah sesuai dengan isi sebab judulnya tentang bahan, sedangkan isinya tentang nilai-nilai budaya?
b. Apakah kalimat *Buku yang diambil oleh saya* itu merupakan contoh yang salah?

Jawaban:

Isi ini memang tidak sesuai dengan judul, tetapi yang dipentingkan adalah bagaimana mengajarkan bahasa dengan nilai budaya. Kalimat yang dikemukakan itu memang merupakan kalimat yang salah.

2. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia
a. Kalimat *Buku itu diambil oleh saya* menurut hemat saya adalah kalimat gramatikal, tetapi memang tidak berterima (*acceptable*).
b. Mengapa ragam bahasa itu dipilih hanya *dua* tidak *lima* karena, menurut Martin Joos, ragam bahasa ada lima ragam.

Jawaban:

- a. Saya setuju kalimat itu gramatikal, tetapi tidak berterima.
- b. Ragam yang lain tidak dipilih karena tidak diperlukan dalam pengajaran bahasa.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ASING

S. Sugino

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

1. Pendahuluan

Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa di dunia yang berkembang pesat di abad ke-20 ini. Pengajaran bahasa ini terus mengalami peningkatan di dalam negeri kita sendiri; bahkan, karena bahasa Indonesia (BI) semakin dikenal di dunia, pengajaran BI di luar negeri juga menunjukkan peningkatan. Penulis makalah ini ingin membatasi pembahasan pada pengajaran BI sebagai bahasa asing yang dilaksanakan di dalam negeri kita sendiri. Dari sejarah kita mengetahui bahwa sebenarnya BI sudah dipelajari atau diajarkan kepada orang asing sejak lama, sejak zaman kolonial Belanda, dan zaman penjajahan Jepang, tetapi perkembangan yang cukup besar terjadi sesudah 1945, bahkan dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini perkembangannya boleh dikatakan cukup pesat.

2. Perkembangan Jumlah Pembelajar dan Jenis Pengajaran

Sebagai konsekuensi dari kemerdekaan serta program pembangunan bangsa dan negaranya, Indonesia telah membuka diri terhadap hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain. Para diplomat dan pengusaha asing yang datang atau tinggal di Indonesia perlu belajar BI sehubungan dengan tugas mereka. Dengan perkembangan hubungan dalam bidang-bidang lain seperti pendidikan, kerja sama militer, penelitian, ekonomi, budaya, dan pariwisata, makin besar dirasakan perlunya orang asing belajar BI. Orang asing yang datang ke Indonesia pun makin banyak; mereka belajar BI melalui berbagai jalur, misalnya, secara pribadi atau dalam rombongan, melalui lembaga pemerintah ataupun swasta, melalui pengelola di bidang pendidikan, ekonomi, industri, pertanian, pembangunan daerah, dan agama.

Jenjang dan jenis pendidikan atau kursus pun semakin beragam. Ada kursus-kursus intensif dengan jangka waktu tertentu setiap hari sampai 6 jam belajar; ada juga yang nonintensif, misalnya yang satu minggu hanya enam jam dengan tatap muka tiap dua hari, yaitu sekali. Kursus intensif, biasanya diadakan karena keterbatasan waktu yang dimiliki orang asing untuk tinggal di Indonesia. Pendekatan dan jenis pengajaran bisa bersifat umum (BI umum), ada juga yang bersifat khusus, misalnya

BI untuk bidang ekonomi, teknik, dan lain-lain yang diperlukan oleh kelompok khusus.

Jenjang pengajaran diberikan mulai dari BI tingkat dasar, menengah, sampai lanjut; dapat juga dengan istilah atau variasi lain, seperti pemula, dasar, menengah, menengah lanjut, dan lanjut. Ada juga BI untuk anak-anak sekolah dasar (misalnya di sekolah-sekolah internasional), sekolah menengah ataupun untuk pemuda/remaja, sampai untuk orang dewasa/tua, kelompok profesional, dan lain-lain.

Di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pengajaran BI untuk orang asing pernah mulai dengan 20 peserta; tetapi sekarang lebih kurang 100 peserta dapat ditampung. Contoh lain, di Universitas Kristen Satya Wacana, di kota kecil Salatiga, sudah ada program pengajaran BI yang diberi nama *The Salatiga Program* sejak tahun 1973 dengan jumlah pembelajar yang dapat dilihat dalam grafik terlampir. IKIP Malang juga sudah bertahun-tahun menangani program BI untuk orang asing melalui COTI dan yang lain.

Latar belakang peserta juga sangat bervariasi, yaitu ada guru, mahasiswa, pegawai pemerintah, angkatan bersenjata, akuntan, dokter, pekerja sosial, insinyur, peneliti, ahli hukum, ahli komputer, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Latar belakang negara asal yang terbesar berasal dari Australia. Hal ini dapat kita maklumi karena Australia dekat dengan Indonesia dan ada perubahan persepsi orang Australia terhadap diri mereka sendiri dan terhadap hubungan dengan negara-negara Asia Pasifik. Ada juga peserta berasal dari Amerika; peserta berasal dari Asia yang meliputi Jepang, Singapura, dan Korea; peserta Eropa, yaitu Jerman, Belanda, Norwegia, dan Italia.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pembelajaran suatu bahasa yang ideal ialah bila proses itu diadakan dalam suatu budaya/negara/tempat bahasa itu digunakan. Inilah faktor pendukung yang sangat kuat untuk berhasilnya pembelajaran itu: orang asing belajar BI di Indonesia. Pembelajar bisa menghayati budaya tempat bahasa itu dipakai. Demikian juga mengenai pengembangan bahan pelajaran, akan dapat dengan mudah diperoleh bahan-bahan yang otentik. Berbeda dengan keadaan jika bahasa itu diajarkan dalam konteks asing; ini sering tidak jauh berbeda dengan situasi anak-anak Indonesia yang belajar bahasa Inggris di Indonesia; walaupun sudah lulus SMA dan belajar bahasa Inggris selama 6 tahun, banyak yang belum bisa menggunakan bahasa tersebut untuk komunikasi lisan ataupun tertulis dengan memadai. Saya pernah bertemu dengan seorang asing yang sudah belajar BI selama dua tahun, tetapi di negara asalnya tidak ada orang yang bisa diajak berbicara BI. Proyek pengajaran bahasa di Australia (ALL) berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dengan membuat kelas aktif dan produktif. Belajar BI di Indonesia, kontak dengan masyarakat pemakai bahasa tersebut sangat mempengaruhi pengalaman belajar karena masyarakat merupakan laboratorium bahasa yang alami.

Memang ada faktor yang dapat menghambat perkembangan pengajaran BI ini. Wawasan orang asing terhadap Indonesia sangatlah penting. Ketidaktahuan mereka tentang Indonesia; atau adanya persepsi yang negatif bisa merupakan hambatan. Banyak juga orang asing yang tidak melihat pentingnya belajar bahasa Indonesia sehingga apabila mereka diberi kesempatan belajar, motivasi dan tujuannya kabur. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang Eropa, yang entah dari mana mereka mendapat informasi, yang masih mempunyai kesan Indonesia itu kotor, tidak aman dan mencurigakan, pokoknya serba negatif.

Ada juga faktor penghambat yang sifatnya lebih internal, misalnya kurangnya sarana dan prasarana pengajaran, yang dipakai hanya buku dengan strategi yang terlalu berpusat pada guru, tanpa ada variasi kegiatan belajar dan media. Di samping itu, pengajar sering kurang memahami gaya dan kebiasaan belajar orang asing.

4. Usaha Peningkatan

Kenyataan yang menunjukkan makin banyaknya peminat atau pembelajar serta makin luasnya hubungan dengan luar negeri perlu ditanggapi dengan usaha peningkatan, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas pengajaran.

a. Program

Ada dua macam program yang dapat didesain, yaitu BI umum dan BI khusus. Sebagian besar program pengajaran BI untuk orang asing bersifat umum. Walaupun pembelajar hanya ingin belajar bahasa, pengalaman menunjukkan bahwa program yang terpadu antara bahasa dan budaya akan lebih menarik. Unsur budaya dapat diintegrasikan dalam materi pengajaran; kemudian pembelajar diberi kesempatan untuk terjun menggunakan apa yang telah dipelajari dalam komunikasi dengan masyarakat pemakai bahasa. Kegiatan ini dapat terstruktur, dapat pula agak bebas untuk meningkatkan kreativitas pembelajar. Dalam program intensif yang diselenggarakan oleh lembaga dengan kelompok besar dapat juga dipakai alternatif lain, yaitu dengan penyajian pilihan budaya, baik yang bersifat lebih akademis seperti kehidupan beragama, kehidupan pedesaan maupun yang bersifat keterampilan, seperti gamelan, tari-tarian, pencak silat, dan memasak.

Keterpaduan program dapat juga diatur sampai ke tempat tinggal atau akomodasi peserta. Sekarang sudah ada banyak program *homestay*, yaitu peserta tinggal dalam keluarga-keluarga Indonesia, sedangkan bagi yang tinggal di asrama dapat selalu diadakan semacam supervisi agar peserta sebanyak mungkin berlatih selalu menggunakan BI. Untuk jumlah yang tidak terlalu besar, ada pengalaman yang cukup efektif, yaitu dengan memberi teman Indonesia di luar kelas, khususnya program untuk remaja dan mahasiswa.

Untuk menampung kreativitas peserta, dalam program satu bulan atau lebih lama dapat diselenggarakan semacam buletin mingguan yang isinya ditulis oleh peserta sebagai sarana komunikasi dan ajang latihan serta membagi pengalaman.

Untuk program BI khusus perlu sungguh-sungguh diidentifikasi kebutuhan pembelajar, sebagai dasar pengembangan bahan. Memang selalu ada pembelajar atau kelompok pembelajar yang praktis ingin langsung mengaitkan pelajaran BI dengan profesi atau tugasnya. Dari pengalaman, para konsultan, pengusaha (*businessman*), diplomat, dan peneliti banyak yang menginginkan pelayanan BI khusus ini. Dalam hal ini prinsip keterpaduan bahan pelajaran, kontak dengan orang lapangan, kunjungan ke lembaga atau tempat kerja yang relevan, dan latihan berbahasa sangat diperlukan. Satu kemungkinan keterpaduan yang lain ialah mengaitkan program ini dengan wisata, yang perlu digarap dengan lebih baik.

b. Proses Belajar Mengajar

Belajar bahasa asing berbeda dengan belajar bahasa sendiri atau bahasa ibu; oleh sebab itu, strategi serta metode dan teknik mengajarkan bahasa asing harus disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan latar belakang pembelajar. Ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar: faktor pelajar, faktor guru, faktor program, serta faktor masyarakat dan lingkungan. Walaupun ada pembelajar yang belajar dengan sikap setengah akademis dan setengah wisatawan, sebagian besar pembelajar selama ini memiliki motivasi yang cukup tinggi, mereka datang ke Indonesia atas pilihan mereka sendiri. Hal itu sudah merupakan keuntungan yang sangat menentukan; oleh sebab itu dalam proses belajar mengajar faktor guru sangat penting. Faktor guru di sini mencakupi komitmen guru, kemampuan profesional guru, pendekatan yang dipakai guru, serta metode dan teknik yang dipakai guru. Guru perlu menerapkan teknik-teknik yang menarik serta bervariasi. Penggunaan media juga sangat penting tidak hanya untuk peserta pemula, tetapi sampai tingkat lanjut pun media itu diperlukan.

Di beberapa lembaga sudah dikembangkan alat-alat bantu pandang-dengar, termasuk juga program-program dengan video, poster-poster, dan peta. Pemanfaatan kemajuan teknologi masih perlu terus ditingkatkan. Dengan pendekatan terpadu seperti disebutkan pada bagian Program (a), kreativitas dan kepekaan guru sangat diperlukan dalam kegiatan belajar-mengajar. Yang tidak boleh dilupakan ialah mengajarkan keterampilan menggunakan kamus, misalnya kamus Indonesia-Inggris dan Inggris-Indonesia bagi pembelajar, serta menggunakan sumber belajar yang lain seperti surat kabar dan televisi.

c. Materi dan Evaluasi Pengajaran

Sebenarnya sudah cukup banyak materi pengajaran BI yang disiapkan untuk orang asing, yaitu dari bahan yang sangat umum, dari yang ditulis untuk pengajaran BI di luar negeri (seperti di Australia), sampai yang dikembangkan oleh lembaga atau perseorangan di dalam negeri, serta bahan yang bersifat khusus. Ada buku yang ditulis

untuk kelompok pembelajar tertentu, seperti buku teks karangan I.S. Partorejo, Ian White, dan John Wolff.

Ada buku yang menekankan keterampilan tertentu, seperti latihan membaca, atau latihan mendengarkan dan berbicara, atau tata bahasa, atau beberapa keterampilan terpadu.

Ada bahan-bahan yang disertai rekaman audio; ada yang sifatnya *self-instructional* (untuk belajar sendiri). Menurut pendapat penulis, ada beberapa buku yang cukup baik. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa buku apa pun yang dipakai masih perlu pengembangan bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Alternatif lain ialah buku yang ada ditambah bahan suplemen yang dikembangkan oleh guru; dapat ditambah dengan buku kerja (*workbook*). Evaluasi pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran, dan juga konsisten dengan pendekatan yang dipakai. Misalnya, jika pendekatan yang dipakai ialah pendekatan komunikatif, evaluasi tidak hanya komunikasi tulis (apalagi dengan hanya menekankan tata bahasa), tetapi harus ada evaluasi atau ujian berkomunikasi lisan.

d. Pelatihan Pengajar

Untuk meningkatkan keberhasilan pengajaran BI perlu adanya pelatihan pengajar yang lebih serius. Memang sudah ada pelatihan untuk guru BI yang diintegrasikan dalam kurikulum lembaga pendidikan formal seperti IKIP dan Fakultas Sastra. Walaupun demikian, jalur pelatihan khusus dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pengajar dalam penguasaan kebahasaan, keterampilan mengajar, psikologi belajar-mengajar, dan mengembangkan bahan pengajaran serta media.

e. Publikasi dan Seminar

Adanya banyak penyelenggara pengajar BI untuk orang asing di Indonesia menunjukkan bahasa Indonesia semakin dikenal dan ada kebutuhan nyata untuk dipelajari serta disebarluaskan ke seluruh dunia. Makin banyaknya penyelenggara perlu ditanggapi positif, dan tidak perlu menimbulkan rasa persaingan yang negatif, bahkan satu kerja sama yang positif diperlukan saat ini dan pada masa mendatang.

Salah satu kelemahan yang masih ada ialah masih langkanya publikasi serta seminar atau lokakarya yang diadakan di Indonesia dalam bidang ini. Banyak di antara kita sudah mengenal atau mendengar adanya organisasi TEFLIN (*The Teaching of English as A Foreign Language in Indonesia*) yang merupakan badan kerja sama antarlembaga penyelenggara pengajar bahasa Inggris dengan kegiatan seminar rutin, bahkan sudah memiliki jurnal. Apakah tidak mungkin pengajaran BI melakukan hal serupa?

Betapa pentingnya publikasi tidak diragukan lagi. Di Australia sudah sering dipublikasikan hal-hal yang berhubungan dengan pengajaran BI. Memang, dalam hal ini tidak hanya publikasi di dalam negeri, tetapi penyebarluasan informasi melalui media di luar negeri sangat perlu. Kerja sama dengan lembaga luar negeri sangat diperlukan. Pengalaman penulis sendiri setelah mengirim brosur ke Pameran Bahasa di Paris tahun lalu, banyak surat-surat datang meminta informasi lebih lanjut tentang kursus di lembaga kami, bahkan, ada kunjungan rombongan dari Norwegia. Seminar untuk bertukar pengalaman sangat diperlukan.

f. Peranan Pemerintah dan Swasta

Peranan Pemerintah untuk menggalakkan kerja sama antarlembaga di Indonesia dengan luar negeri sangat dibutuhkan. Sekarang sudah semakin banyak kerja sama untuk menyelenggarakan program BI di Indonesia, yang membantu melicinkan jalan orang asing datang dan belajar di Indonesia. Peranan swasta sebagai mitra pemerintah juga diperlukan untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia luar, agar dunia luar dapat mengerti Indonesia. Sehubungan dengan itu, ucapan *Dengan Bahasa Kita Meningkatkan Pemahaman dan Saling Pengertian Antarbangsa* memang tepat.

Melalui lembaga perguruan tinggi sudah ada kerja sama Universitas Gadjah Mada dengan Monash University dan Universitas di California, IKIP Yogyakarta dengan University of Western Sydney, IKIP Malang dengan Cornell University, Universitas Nusa Cendana Kupang, dan Universitas Pattimura Ambon dengan University of Northern Territory, Universitas Hasanuddin dengan La Trobe University, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan Sydney University dan QUT, dan masih banyak lagi.

Ada juga kerja sama antara negara bagian Queensland dan Jawa Tengah serta Brisbane dan Semarang. Rupanya semakin terbuka luas kemungkinan kerja sama semacam itu sehingga cukup besar harapan akan perkembangan pengajaran BI pada masa mendatang.

Peranan pemerintah untuk meningkatkan kepariwisataan akan mendorong datangnya orang asing ke Indonesia, yang pada gilirannya akan belajar BI ataupun belajar BI lebih dulu agar dapat berwisata.

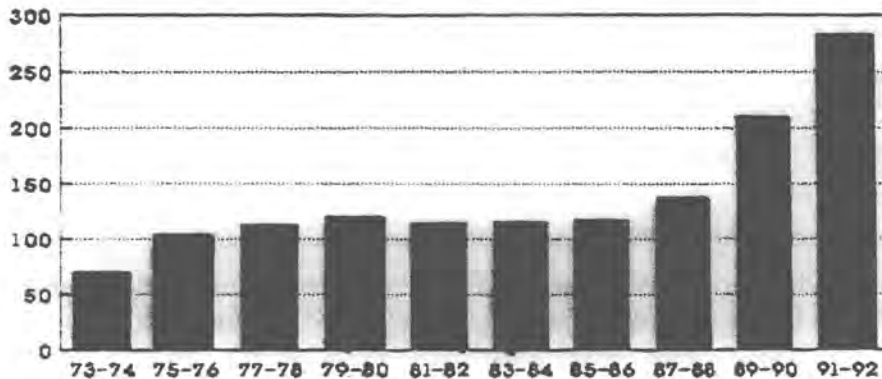
5. Penutup

Bahasa Indonesia telah berkembang menjadi satu kekayaan yang menarik perhatian internasional sehingga ada kebutuhan orang asing untuk belajar BI. Efektivitas pengajarannya di Indonesia perlu ditingkatkan; kerja sama penyelenggara pengajaran BI perlu diusahakan.

DAFTAR PUSTAKA

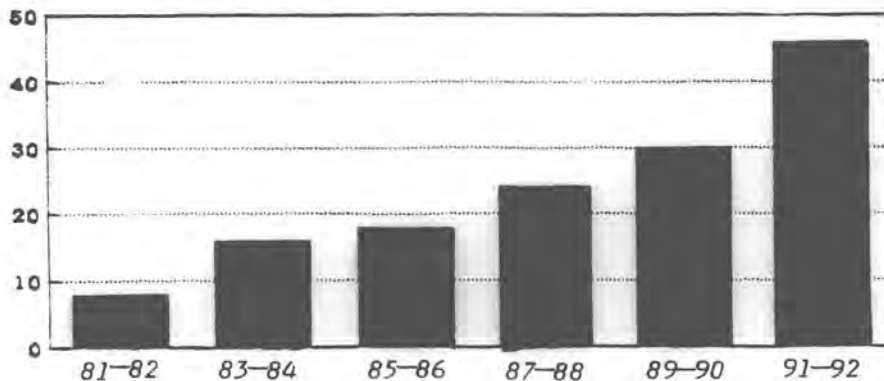
- Aliesa, N.F. *et al.* 1991. *Bahasa Indonesia: Deskripsi dan Teori*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suarthama, Putu. 1993. "Katsujiro Ueno, Guru Bahasa Indonesia dari Jepang". *Suara Pembaharuan*, Jakarta.
- Sugino, S. 1993. *Data Peserta The Salatiga Program*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Tarigan, Henri Guntur. 1988. *Pengajaran Kedwibahasaan*. Bandung: Angkasa.
- Zifirdaus, Indrawati. 1989. "Beberapa Faktor Penyebab Kurang Berkembangnya Bahasa Indonesia". *Indonesian Studies Vol. 6, No. 2*, Bundoora Vic.

JUMLAH PESERTA PIBBI THE SALATIGA PROGRAM UKSW-SLTG



■ Series 1

JML.PESERTA PIBBI KHUSUS DI UKSW-SLTG (di luar PIBBI)



■ Series 1

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing
Pemakalah : S. Sugino
Pemandu : Rahayu S. Hidayat
Pencatat : Nantje Harijati Widjaja
Wilda Siregar

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Diemroh Ihsan, Ketua MLI Cabang Palembang

Bahasa apakah yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran ini?

Jawaban:

Bahasa pengantar pada kelas pemula adalah bahasa Inggris yang digunakan sesedikit mungkin, sedangkan pada kelas menengah dan lanjut adalah bahasa Indonesia.

2. **Pertanyaan:** Bistok A. Siahaan, IKIP Jakarta

Parameter apakah yang digunakan untuk menyediakan materi dalam pengajaran ini?

Jawaban:

Selama ini parameter yang digunakan pada umumnya berdasarkan intuisi sehingga perlu dikembangkan dan harus didukung oleh teori.

3. **Pertanyaan:** Hasanuddin H.B., SMP Negeri 5 Palembang

Usaha apakah yang digunakan untuk memacu agar bahasa Indonesia tetap diminati oleh orang asing?

Jawaban:

Salah satu usaha untuk memacu peminat bahasa Indonesia ialah peran pemerintah, misalnya, mengadakan pameran mengenai Indonesia. Hal itu akan menambah wawasan mereka untuk belajar bahasa Indonesia. Bila tidak mengenal, mereka tidak akan sayang. Selain itu, saat ini telah ada bahan pengajaran yang berupa kaset video dengan latar Indonesia.

4. **Pertanyaan:** T. Miryadi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru bahasa Indonesia yang mengajar, baik di dalam maupun di luar negeri dengan dibekali pengetahuan bahasa Inggris yang baik?

Jawaban:

Sepengetahuan saya telah ada pertukaran guru-guru sehingga mereka yang dikirim ke luar negeri selain mengajar juga belajar. Kalau ada pengalaman yang demikian, saya yakin bahwa kemampuan bahasa Inggris mereka akan meningkat. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris ini dapat dilakukan secara pribadi atau lembaga, tetapi yang lebih penting adalah motivasi guru-guru tersebut untuk mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing selain yang sudah diprogramkan. Hal itu dapat membantu karena mereka berlatar belakang belajar bahasa.

Saran/Usul:

- a. Mohon segera atau sudah waktunya diadakan penelitian karena parameter yang akan digunakan sebagai dasar harus didukung oleh teori sehingga penyusunan bahan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Mohon bahan-bahan tersebut diperbanyak frekuensinya agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam menyebarkan bahasa Indonesia di negara mereka.

KERJA SAMA KEBAHASAAN ANTARNEGARA

Liek Wilardjo

Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga

1. Pengantar

Sudah lebih dari 20 tahun Indonesia dan Malaysia menjalin kerja sama kebahasaan, tepatnya sejak MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia) dibentuk pada tanggal 29 Desember 1972 di Kuala Lumpur. Bahkan, sebenarnya kerja sama itu sudah dimulai sejak tahun 1967 sebab pada tanggal 27 Juni 1967 di Kuala Lumpur ditandatangani bersama oleh pihak Indonesia dan pihak Malaysia kesepakatan tentang Ejaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu.

Pada tanggal 4 November, dalam sidang ke-24 di Jakarta, nama MBIM diubah secara resmi menjadi Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia) sebab Brunei Darussalam yang semula berstatus sebagai pemerhati telah diterima sebagai anggota penuh. Maka, sejak itu tinggal Singapura yang masih tetap berstatus sebagai peninjau.

Uraian ringkas berikut ini akan berusaha melihat kerja sama kebahasaan itu, manfaatnya dari segi pengembangan ilmu dan teknologi, faktor-faktor yang menyebabkan kurang lancarnya kerja sama itu, dan upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kerja sama itu.

2. Manfaat Kerja Sama bagi Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Ilmu adalah suatu cara untuk mengetahui, yang didasarkan pada tafsiran manusia atas data penginderaan yang diperolehnya melalui interaksinya dengan alam. Ilmu adalah kegiatan sosial yang berusaha melukiskan gejala dan peristiwa alam, menyediakan model untuk menggambarkan gejala ini, dan menyarankan pandangan untuk menjawab penanya tentang bagaimana gejala-gejala ini terjadi. Tujuan utamanya ialah untuk mengetahui dan, dengan demikian, dapat menjelaskan gejala-gejala alam. Terkait dengan tujuan utama itu adalah tujuan untuk meramalkan dengan derajat kementakan tertentu peristiwa yang belum terjadi berdasarkan teori yang dibangun dengan sejumlah asumsi dasar dan ditopang hukum-hukum empiris yang telah diketahui, serta dijalin dengan konsep-konsep yang membuat teori itu menjadi pangkah (konsisten), koheren, dan komprehensif (Barbour).

Karena akal budi manusia terbatas, sedangkan alam itu sangat rumit dan pada dasarnya memang misterius, maka melalui kegiatan keilmuannya manusia tidak dapat mengetahui alam sebagaimana adanya. Yang dapat dicapai hanyalah gambaran yang sangat disederhanakan kalau dibandingkan dengan realitas yang sebenarnya. Jadi, kebenaran keilmuan adalah tidak mutlak, tetapi tentatif. Ilmu senantiasa terbuka untuk dicermati (*scrutinized*), diuji-ulang, disempurnakan, dan bahkan disangkal serta dicampakkan dari khazanah pengetahuan keilmuan!

Teknologi ialah siasat untuk menimbulkan perubahan yang terbaik dalam situasi yang tidak menentu atau tidak sepenuhnya dipahami dan dalam batas-batas kendala keterbatasan sumber daya (Koen, 1987). Siasat ini dibangun di atas landasan ilmu terapan dan perubahan itu dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang dihadapi manusia dalam interaksinya dengan lingkungan (alam dan sosial)nya.

Karena teknologi berakar dalam ilmu, dan ilmu adalah kegiatan sosial yang kebenarannya tentatif dan terbuka bagi kritik dari siapa pun, ilmu harus dapat dikomunikasikan dengan baik antarilmuwan. Untuk itu, diperlukan tidak saja tata istilah, tata nama, dan tata lambang, tetapi juga bahasa dengan ragam keilmuan yang khas, yang dengan jelas dan ringkas serta secara tersurat (eksplisit/denotatif) dapat mengungkapkan pernyataan-pernyataan keilmuan.

Dari sini jelas bahwa kerja sama kebahasaan antara Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Keselarasan tata istilah, tata nama, dan tata lambang, dikembangkan secara bersama dengan ragam keilmuan yang sesuai dengan tuntutan komunikasi keilmuan sehingga pastilah akan memperlancar kerja sama dan pertukaran di bidang ilmu dan teknologi. Jurnal-jurnal keilmuan yang diterbitkan negara masing-masing akan dapat dipahami dengan mudah dan dengan benar oleh para ilmuwan di kedua negara lainnya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk menerbitkan jurnal keilmuan itu secara bersama sehingga tidak saja dana dapat dihemat, tetapi sidang pembaca yang lebih luas pun dapat dijangkau.

Memang, gambaran klasik tentang ilmu sebagai produk dan sebagai proses yang pengembangannya diatur oleh keempat imperatif etika menurut paradigma Merton sekarang sudah tidak, atau setidaknya tidak sepenuhnya, berlaku. Kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan militer telah melunturkan asas universalisme dan komunalisme, dan dengan ketertutupan yang disebabkan oleh tiadanya lagi universalisme dan komunalisme itu skeptisisme tidak mungkin direalisasikan (Wilardjo, 1993). Namun, sebagai bangsa serantau yang merupakan satu keluarga dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pantaslah kita saling terbuka dan bekerja sama. Apalagi kalau diingat bahwa ilmu hanya dapat berkembang dalam suasana kebebasan dan keterbukaan, dan justru melalui penyangkalan (falsifikasi)-lah ilmu yang sejati dimantapkan dan ilmu yang salah ditumbangkan.

Pengembangan tata istilah, tata nama, dan tata lambang, serta ragam keilmuan itu barang tentu dapat dikerjakan sendiri oleh Indonesia, tanpa harus bekerja sama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia. Namun, hasil yang lebih baik dan langkah

kerja yang lebih cepat dan lebih mudah dicapai ialah dengan memadukan kreativitas. Lagi pula, dengan menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia dan bahasa Melayu Brunei Darussalam beserta semua bahasa dan logat daerah ketiga negara ini, terciptalah kosakata yang sangat kaya, yang merupakan lahan subur tempat kata-kata yang hendak diangkat menjadi istilah dapat digali.

Sebagai sekadar contoh, dapat disebutkan beberapa kata Malaysia yang dipungut pihak Indonesia dalam rangka penyusunan istilah, misalnya *senarai* (*list*), *darab* (*product*), *punar* (*etch*), dan *sepub-lindap* (*anneal*).

Terutama sebagai *verba*, *senarai* lebih baik daripada *daftar* walaupun sedikit lebih panjang pula. *Menyenaraikan* pastilah merupakan padanan *to list*, sedangkan *mendaftar(kan)* dapat menimbulkan kekacauan antara *to list* dan *to register*. Padahal, di antara kelima patokan pembentukan istilah, yakni *ketepatan makna*, *kesingkatan*, *kesedapan didengar* dan *kemudian dilafalkan*, *kebebasan dari konotasi buruk*, dan *kebenaran secara tata bahasa*, yang pertamalah yang paling penting.

Darab sebagai padanan *product* jelas lebih singkat daripada *hasil kali*, sedangkan *etsa* sebagai transkripsi *to etch* terdengar lebih "keinggris-inggrisan" daripada *punar*.

Annealing ialah proses pemanasan bahan padat selama jangka waktu tertentu dan pendinginan bahan itu kemudian secara perlahan-lahan. Dengan proses ini keadaan metamantap yang terdapat dalam bahan itu, seperti *regangan terperangkap* (*frozen-in strains*), *longsoran* (*dislocations*), *lowongan* (*vacancies*) dapat masuk ke dalam keseimbangan termodinamik. Tanpa *annealing*, logam yang telah lama terpajan terhadap penyinaran neutron akan menjadi *getas* (*brittle*). Padanan istilah itu dalam bahasa Indonesia sulit sekali dicari, padahal kata *anneal* itu sendiri kurang luwes untuk dialih-ejekan ke dalam ejaan yang disempurnakan. Oleh karena itu, *sepub-lindap* yang ditawarkan oleh Malaysia kita terima. Sebaliknya, Malaysia juga memakai padanan istilah yang berasal dari Indonesia. Misalnya, semula Malaysia memakai *seraktumpun* sebagai padanan *aberration*, tetapi kemudian menggantinya dengan istilah yang lebih pendek yang ditawarkan oleh pihak Indonesia, yakni *lanturan*. Istilah *gabar* (*volatile*), *karah* (*flange*) dan *lesan* (*target*), yang diangkat pihak Indonesia dari bahasa Jawa, juga dapat diterima oleh Malaysia.

3. Faktor Penghambat Kelancaran Kerja Sama

Ada tiga faktor yang dapat dituding sebagai penyebab kurang lancarnya kerja sama kebahasaan antarnegara. Faktor-faktor itu ialah (1) *ketidakselarasan hubungan vertikal di masing-masing negara*, (2) *miskomunikasi administratif*, dan (3) *perbedaan kepentingan pendidikan/pengajaran*.

Di Malaysia, khususnya, hubungan vertikal antara kelompok pakar dalam JKTBM dan Dewan Bahasa dan Pustaka tampak cukup berjenjang (*hierarchical*) sehingga wewenang pakar untuk membuat keputusan secara autonom terasa terbatas. Di Indonesia, hubungan itu lebih merupakan hubungan kemitraan. Para pakar mempunyai keleluasaan yang cukup besar untuk berkreasi dalam perekapiatan istilah.

Dari kelima pedoman pembentukan istilah yang telah disebutkan di muka, hanya yang kelima yang wewenang untuk menilainya secara ketat dipegang oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Penilaian kata yang dijadikan calon istilah berdasarkan keempat patokan lainnya lebih ditentukan oleh kelompok pakar dalam Pakersa walaupun para pakar itu dengan iktikadnya sendiri sering berkonsultasi dengan bahasawan di Pusat Bahasa mengenai patokan yang pertama (*ketepatan makna*).

Karena hubungan yang berjenjang itu, kadang-kadang kesepakatan penyelarasan yang dicapai dalam sidang pakar urung dilaksanakan sebab keputusan pakar Malaysia diveto oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Misalnya, kesepakatan bahwa Indonesia akan meninggalkan *gaya* dan Malaysia akan membuang *daya* sebagai padanan *force*, dan kedua pihak akan memakai *kakas* sebagai padanan istilah itu, hanya dilaksanakan oleh pihak Indonesia sebab Dewan Bahasa dan Pustaka bersikeras untuk tetap menggunakan istilah *daya*.

Para pakar Indonesia dan Malaysia dalam Kelompok Fisika ingin menyelaraskan istilah itu sebab *gaya* yang di Indonesia juga berarti *style* kurang menyarankan makna yang terkandung oleh istilah *force*. Selain itu, terkandung harapan bahwa bila "*daya*" Malaysia dan *gaya* Indonesia dapat diselaraskan menjadi *kakas*, akan terbuka kemungkinan penyelarasan selanjutnya. Misalnya, barangkali Malaysia lalu mau memakai *daya* sebagai padanan *power* sehingga selaras dengan pihak Indonesia, atau sebaliknya mau memakai *kuasa* sebagai padanan *power* sehingga juga dicapai keselarasan. Dari kedua kemungkinan ini Indonesia cenderung memilih yang pertama sebab *kuasa* di Indonesia, walaupun juga tepat sebagai padanan "*power*", mempunyai konotasi politik/agama. *Daya* juga diutamakan sebab kata tersebut lebih pendek daripada *kuasa*, jadi lebih sesuai dengan patokan yang kedua.

Kakas diusulkan dan akhirnya dapat diterima kedua pihak, setelah *forsa* ditolak pihak Malaysia karena dianggap "keinggris-inggrisan", dan *kuat*, *kukuh*, dan *sasa* dinilai tidak sesuai dengan patokan pertama (*ketepatan makna*). Ketiga kata yang terakhir itu mempunyai makna pokok yang sama, dan memang tepat sebagai padanan *kracht* (Belanda) atau *Kraft* (Jerman). Akan tetapi, makna pokok *force* bukan *kuat*, dan bahkan ada *force* yang sangat lemah!

Karena *force* berarti sesuatu yang memaksakan perubahan keadaan gerak (Wilardjo, 1990), perubahan itu lebih ke kata yang maknanya *memaksa*. Kata *paksa* sendiri sempat diusulkan, tetapi tidak jadi dipakai sebab kata itu telah dibebani kelaziman sebagai *verba*, padahal kata yang dicari-cari itu harus berupa *nomina*. Kata *perkosa* juga ditolak dengan alasan yang sama, ditambah ketidaksesuaiannya dengan patokan kedua (*kesingkatan*) dan keempat (*tidak mengandung konotasi buruk*). Akhirnya, sampailah proses perekapiptaan istilah itu pada kata *kakas*. Sayang, perburuan panjang yang mengasyikkan itu harus menjadi mubazir karena terkena veto Dewan Bahasa dan Pustaka!

Karena di Indonesia istilah *kakas* itu sudah terlanjur dilontarkan ke masyarakat pemakai, para pakar Indonesia dalam Kelompok Fisika tidak berniat kembali ke

istilah lama, yakni *gaya*. Langkah semacam itu akan memberikan kesan "plin-plan" atau "main-main" di mata para pemakai istilah, yang sebagian sudah mau beralih dari *gaya* ke *kakas*. Ketika Suzuki mengeluarkan model yang diberi nama "Forsa", istilah ini dihidupkan lagi sehingga untuk *force* sekarang dipasarkan dua istilah, yakni *kakas* sebagai istilah yang diutamakan, dan *forsa* sebagai istilah yang diselangkan. Masyarakat pemakailah yang nanti menentukan, istilah yang mana yang hendak dimantapkan.

Yang dimaksud dengan *miskomunikasi administratif* ialah kesalahan dan keterlambatan komunikasi dan pertukaran bahan antara sekretariat Pakersa dan urusetia JKTBM. Miskomunikasi itu kadang-kadang menyebabkan tiadanya bahan pertukaran yang sedianya hendak dibahas bersama dalam sidang pakar. Terjadi pula ketaksesuaian penggarapan antara Pakersa dan JKTBM. Misalnya, sesuai dengan keputusan sidang Mabbim di Hotel Puncak Raya (Februari 1993), Kelompok Filsafat di Pakersa untuk sidang pakar di Bandar Seri Begawan (November 1993) menyiapkan taksonomi Filsafat dan senarai istilah Filsafat Ilmu beserta padanan Indonesianya. Ternyata, kesepakatan itu tidak tertambat sehingga pihak JKTBM menyiapkan senarai istilah Aksiologi. Maka, tipis sekali kemungkinannya bahwa dapat terjadi proses penyelarasan dalam sidang pakar itu nanti. Bahkan, diragukan, apakah akan ada manfaatnya bagi kedua pihak untuk bertemu di Bandar Seri Begawan.

Faktor ketiga yang menghambat kelancaran kerja sama, yakni perbedaan kepentingan pendidikan/pengajaran, terutama menyangkut Brunei Darussalam. Dari segi pendidikan/pengajaran, kepentingan Indonesia dan Malaysia kira-kira sama. Kalau pun ada perbedaan, perbedaan itu hanya pada tekanannya, dan pada kelonggaran anggaran yang dinikmati pihak Malaysia. Karena perbedaan prioritas dan kemampuan anggaran itu, pihak Indonesia belum memutuskan apakah dapat menerima usul pihak Malaysia untuk meneruskan penggarapan istilah ilmu dasar dengan menggarap ilmu terapan. Maka menjadi tidak jelas, apakah beberapa bidang Fisika Terapan yang penggarapannya sudah dimulai (misalnya Optika Serat dan Laser, Elektronika dan Optoelektronika, dan Teknologi Nuklir) akan terus digarap bersama, atau digarap sendiri-sendiri di masing-masing negara, atau tidak/belum akan digarap oleh Indonesia, sementara itu pihak Malaysia terus melaju di bidang "Fizik Gunaan" ini.

4. Upaya untuk Meningkatkan Kerja Sama Kebahasaan

Untuk meningkatkan kerja sama kebahasaan, faktor penghambat itu harus dihilangkan atau setidaknya tidaknya dikurangi. Pengurangan keberjenjangan hubungan antara para pakar iptek Malaysia dan para bahasawan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka adalah urusan dakhil (internal) JKTBM sendiri. Tidak pantas pihak luar menggurui. Apalagi kalau hubungan antara para pakar iptek Indonesia dan para bahasawan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dinilai terlalu demokratis sehingga otoritas yang diperlukan untuk mempercepat proses pembakuan terasa kurang kuat.

Faktor miskomunikasi pastilah dapat dikurangi, misalnya dengan membenahi tata arsip, membuat kesempatan tentang batas-waktu pengiriman bahan pertukaran, serta lebih dini mengatur dan menyebarluaskan agenda pertemuan. Tanggung jawab utama dalam urusan itu sebaiknya tetap ditempatkan pada Pakersa/JKTBM, dan tidak pada koordinator kelompok/subbidang sebab Pakersa/JKTBM-lah yang memiliki dukungan administratif, seperti staf, anggaran, sarana komunikasi (telepon, faks, dsb.) dan paling dekat dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa/Dewan Bahasa dan Pustaka. Keputusan yang diambil berdasarkan komunikasi itu harus segera diteruskan kepada koordinator yang penad (*relevant*), dan kalau ada masalah atau ketakjelasan, para koordinator juga perlu dimintai pendapat/sarannya.

Kendala anggaran di pihak Indonesia dapat dikurangi pengaruhnya dengan meniadakan pertemuan antarpakar dan menggantikannya dengan penyerempakan (sinkronisasi) penggarapan bidang ilmu terapan dan teknologi dan pertukaran hasilnya. Dengan saling menyimak hasil itu pastilah terjadi proses saling belajar, dan sampai batas-batas tertentu juga terjadi penyelarasan. Kalau ada masalah yang cukup mendasar yang perlu dipecahkan bersama, saran pemecahannya dapat dititipkan kepada perutusan yang menghadiri sidang Mabbim.

Hasil yang telah dicapai dalam ilmu-ilmu dasar tentu saja harus dimanfaatkan dalam penggarapan ilmu terapan dan teknologi itu. Dengan demikian, kepanggahan (konsistensi) dapat diperoleh. Salah satu caranya ialah dengan mengikutsertakan barang seorang pakar ilmu dasar dalam kelompok pakar ilmu terapan/teknologi itu. Dengan penyertaan itu, barangkali pendamping bahasa dapat ditiadakan sehingga dalam kelompok itu hanya ada sejumlah pakar ilmu terapan/teknologi, seorang pakar ilmu dasar, dan seorang sekretaris-cum-bahasawan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Masalah kebahasaan yang tidak dapat diatasi oleh kelompok ini masih dapat dikonsultasikan dengan pakar bahasa dalam kelompok umum/eksekutif.

Dapat juga dipertanyakan apakah tidak perlu dimulai pengembangan dan pembakuan ragam keilmuan? Bahasa Inggris, misalnya, mempunyai ragam khusus yang dipakai dalam komunikasi ilmu, terutama secara tertulis. Oleh karena itu, di negara-negara yang berbahasa Inggris dan juga di universitas-universitas di Indonesia ada mata ajaran *English for Science and Technology*. Dalam EST diajarkan tidak saja tataistilah tata nama, dan tata lambang keilmuan, tetapi juga kata-kata dan frasa-frasa khusus yang lazim dipakai dalam bentuk tulisan di bidang iptek. EST juga lebih banyak menggunakan bentuk pasif dan statif daripada bentuk aktif, dan cenderung menyingkirkan subjek/aktor dari pernyataan keilmuan. Pernyataan-pernyataannya denotatif, tidak konotatif, dan gaya argumentatif dan analitis lebih diutamakan daripada gaya deskriptif. Klausa akhir berakhiran *ing* (*final ing-clause*) definisi dalam bentuk "*terminus definiendum* = *genus proximum* + *differentia specifica* (Wilardjo, 1976), dan *nomina* perampat niskala (*abstract, generalizing nouns*) juga lazim dipakai. *Verba frasal* (*phrasal verbs*) sedapat-dapatnya dihindari dan diganti dengan *verba formal* (*formal verbs*) yang sama maknanya (Herbert, 1971).

Apakah dalam bahasa Indonesia/Malaysia/Melayu tidak akan dikembangkan ragam keilmuan seperti itu? Kalau ditempuh hampiran deskriptif murni, akan munculkah dengan sendirinya ragam keilmuan itu, yang sanggup memenuhi kebutuhan komunikasi di bidang iptek dengan kejelasan dan kepanggahan yang memadai? Kalau arahan preskriptif perlu diberikan, siapa yang berkemampuan dan berwewenang untuk memberikan arahan itu, dan bagaimana caranya?

Pertanyaan di atas barangkali dapat dijawab bersama kalau dalam kerja sama antarnegara dilakukan pengembangan ragam keilmuan. Pada masa Prof. Ir. S. Pramutadi menjadi direktornya, Direktorat Pembinaan Sarana Akademik bersama dengan penerbit perguruan tinggi negeri pernah memberikan perhatian pada ragam keilmuan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbour, Ian G. (T.T.). "The Method of Science". Dalam Cossman, George W. (Ed.). *Meaning of Science*. Des Moines: Science Education Center, University of Iowa.
- Herbert, A.J. 1971. *The Structure of Technical English*. London: Longman Group Ltd.
- Koen, Billy V. 1987. *Definition of the Engineering*. Metho. WASHINGTON D.C.; American Society for Engineering Education.
- Wilardjo, Liek. 1976. "Reflection of a Scientist on Teaching the English of Science". Dalam Richards, Jack C. (Ed.): *English for Science and Technology*, RELC. Singapore: Singapore University Press.
- . 1990. "Meaning its precision in technical terms coinage and the feel' of it in phrases used in science training". Dalam Boeker, E. (Ed.): *The Communication of Science Concepts*. Amsterdam: VU University Press,
- . 1993. "Peranan Ilmu dan Teknologi dan Panggilan Cendekiawan dalam PJP-II". Makalah disajikan dalam seminar HUT ke-58, Gereja Protestan Maluku, di Ambon.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DI SINGAPURA

(Mas) Haji Muhammad Ariff Ahmad

Singapura

1. Pendahuluan

Singapura [sekarang] ialah sebuah negara republik bandaraya kosmopolitan seluas 625,6 kilometer persegi, terletak di selatan Semenanjung Malaysia dan di utara kepulauan Riau [sebuah propensi Indonesia]. Rakyatnya sejumlah 2.690.000 jiwa [menurut banci (cacah jiwa) pada tahun 1990], terdiri dari berbilang keturunan bangsa; majoritinya orang Cina, kemudian baru orang Melayu, orang India dan bangsa-bangsa lain. Dari jumlah 2.7 juta jiwa rakyat itu, orang Melayu Singapura hanya 382.656 jiwa; 14% merupakan rakyat Singapura.

Singapura mengamalkan hidup berbilang bangsa, berbilang agama, *berbilang bahasa* dan berbilang budaya. Singapura berbicara dalam empat bahasa rasmi iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Mandarin dan Tamil, dengan pengertian bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa kerja (bahasa pertadbiran pemerintah) dan bahasa-bahasa lainnya ialah bahasa ibunda sebagai pelestari kebudayaan warisan masing-masing bangsa yang membentuk bangsa Singapura.

Lagu kebangsaan Singapura ialah lagu "Majulah Singapura",¹ dinyanyikan dalam bahasa Melayu tinggi tetapi mudah, sesuai dengan pengangkatan bahasa Melayu menjadi *bahasa Kebangsaan*² pada 2 Jun 1959. Selain daripada menjadi bahasa rasmi kepada lagu Kebangsaan, bahasa Melayu adalah bahasa pertuturan umum di pelbagai situasi tidak formal bagi rakyat biasa Singapura; terutama bagi mereka yang tidak berpendidikan Inggeris.

Sejarah Singapura menunjukkan bahawa:

1300-1392: Singapura tua dibuka dan diperintah raja-raja Melayu/Hindu. Bahasanya *bahasa Melayu jati*.³

1811-1824: Singapura merupakan sebahagian daerah Johor.

1824-1858: Singapura dikuasai East India Company.

1858-1942: Singapura dijadikan tanah jajahan Inggeris.

1942-1945: Singapura diduduki tentera Jepun.

1945-1954: Singapura kembali dikuasai penjajah Inggeris.

1954-1963: Singapura berpemerintahan sendiri [dalam negeri].

1963-1965: Singapura bersama-sama membentuk Malaysia.

1965-kini: Singapura merdeka [keluar dari Malaysia] sebagai negara Republik.

Semenjak menjadi sebahagian dari daerah Johor pada tahun 1811, bahasa Melayu yang dituturkan orang Singapura ialah *bahasa Melayu Johor-Riau*. Namun, apabila Maktab Perguruan SITC (Sultan Idris Training College) ditubuhkan di Tanjung Malim, Malaya pada tahun 1922, dan para graduannya pulang ke negeri masing-masing mengajarkan bahasa Melayu yang seragam tata bahasa dan gaya bahasanya, maka bahasa Melayu Johor-Riau yang dituturkan orang Singapura itu tidak mutlak lagi.⁴

Aspek bahasa Johor-Riau yang masih digunakan orang Singapura sehingga 1992 hanyalah 'bunyi bahasa'nya, iaitu vokal /a/ terbuka pada akhir kata disebut /e/, misalnya *saya* disebut *saye* dan sebagainya. Bagaimanapun, hal itu telah dipertikaikan orang dalam Kongres Persuratan dan Bahasa Melayu Malaya ke-3, yang telah diadakan di Singapura, pada tahun 1956 dahulu.⁵ Mulai dari awal 1993 ini, Singapura sudah mulai berbahasa Melayu baku dengan sebutan baku pula.

2. Perkembangan Bahasa Melayu

a. Menerusi (Lewat) Sekolah

Pengajaran bahasa Melayu kepada anak-anak Melayu Singapura baru bermula apabila Rev. G.H. Thomson dan isterinya tiba di Singapura pada tahun 1822. Di sebuah rumah di simpang North Bridge Road dan Bras Basah Road, reverend itu mengajar 12 orang kanak-kanak Melayu. Reverend itu sendiri mengajar enam orang kanak-kanak lelaki, dan isterinya mengajar enam orang kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak itu diajarkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.⁶

Dalam tahun 1855, Temenggung Ibrahim [Johor] yang berkediaman di Teluk Blangah dan gabenor Singapura, E.A. Blundell, masing-masing berderma sebanyak \$1,500 untuk menggalakkan pelajaran Melayu. Pada tahun 1856 telah didirikan sekolah rendah [*vernacular*] Melayu di Teluk Blangah, kemudian diikuti dengan pembinaan sekolah Abdullah di Kampung Glam. Semenjak itu banyakkah juga sekolah *vernacular* Melayu ditubuhkan, dan melalui sekolah-sekolah itulah perkembangan bahasa Melayu dirancang dan dilancarkan.⁷

Pada tahun 1875, berdasarkan laporan *Isemonger Committee* yang menunjukkan sambutan masyarakat Melayu terhadap persekolahan tidak menggalakkan dan kerana kemerosotan pendapatan pemerintah [Inggeris] sebanyak 22 buah sekolah *vernacular* Melayu telah ditutup.⁸

Pada 1876, sekolah yang di kawasan Maharaja Johor di Singapura telah dijadikan sekolah tinggi [lanjutan]⁹ untuk menampung murid-murid lulusan darjah IV dari sekolah Teluk Blangah dan Teluk Saga. Pada 1878 pelajaran di kedua-dua sekolah itu dinatarkan ke darjah VI dan sekolah tinggi di kawasan Maharaja tadi

dijadikan Maktab Perguruan¹⁰ untuk melatih guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah *vernacular* antara 1878 hingga 1895.

Bagaimanapun, Maktab Perguruan itu telah ditutup pada 1895, dibuka pula maktab perguruan di Melaka pada 1901, kemudian pada 1922 maktab itu telah dipindahkan ke SITC di Tanjung Malim, Malaya. Semua guru Melayu dari seluruh Malaya dilatih di situ. Guru Melayu Singapura yang terakhir dilatih di SITC ialah pada tahun 1956 apabila Singapura menubuhkan maktab perguruan sendiri.¹¹

Sehingga tahun 1956, persekolahan vernacular Melayu ini tidak memberikan ganjaran ekonomi yang cemerlang kepada para lulusannya. Hanya segelintir para lulusan yang sangat cemerlang terpilih untuk menjadi guru pelatih, yang kemudiannya dihantar pula belajar ke SITC dan pulang menjadi guru Melayu yang bertauliah. Sebahagian kecil lulusan yang baik di hantar ke *police depot* dilatih untuk menjadi anggota polis. Sebahagian lagi mungkin terpilih untuk menjadi posmen, manakala yang selebihnya untuk menjadi peon atau yang lain-lain.¹²

Bagaimanapun, apabila persuratan [sekarang disebut *kesusasteraan*] Melayu mula berkembang di Singapura dalam tahun 1930-an, selain daripada pengarang surat khabar yang datang dari luar Singapura, terdapat beberapa orang penulis/sasterawan Melayu lulusan dari sekolah vernacular itu. Sasterawan seperti novelis Harun Aminurrashid, novelis Sufar Idris, budayawan Mahmud Ahmad dan beberapa penulis musiman adalah lulusan sekolah itu.

Dalam tahun 1950-an, Pengasas Angkatan Sasterawan 50: Muhammad Ariff Ahmad, Masuri S.N. dan Rosmera, kemudian Muhibbah Asmara, Matahati, Suradi Parjo, Suratman Markasan, Noor S.L., Alias Husainy, Wancu, Fatimah Murad, Abd Kadir Ahmad, dan beberapa lagi, sama ada yang anggota mahu pun yang di luar Angkatan Sasterawan 50, adalah para lulusan sekolah itu.

Hasil perjuangan masyarakat Melayu menerusi MPM (Majlis Pelajaran Melayu) mulai dari 1954, baru pada tahun 1959 pemerintah mengadakan pelajaran Menengah dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pada 1961 didirikan Sekolah Menengah (Melayu) Sang Nila Utama; 1962 didirikan pula Sekolah Menengah (Melayu) Tun Seri Lanang. Melalui pendidikan Sekolah Menengah itu pengajaran bahasa Melayu dipernatar dan pengajaran kesusasteraan diperkenalkan.

Selain daripada mengajarkan Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu, buku-buku novel dari Indonesia seperti *Salah Asuhan* dan *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*, yang dari Malaysia seperti *Ranjau Sepanjang Jalan* dan *Rentong*, yang dari Singapura seperti *Panglima Awang*, *Darah Kedayan* dan *Mail Mau Kawin*, pernah digunakan sebagai pelajaran kesusasteraan.

Pada akhir 1963, angkatan pertama pelajar sekolah menengah Melayu lulus SPM (Sijil Pelajaran Malaysia); dan pada 1966 sudah terdapat pelajar sekolah menengah yang lulus STPM (Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia), setaraf dengan SMA di Indonesia.

Tahun 1966, sistem pendidikan Nasional [pendidikan dwibahasa] telah diperkenalkan. Sistem ini menentukan semua pelajaran disampaikan menerusi bahasa Inggeris dengan tiga bahasa rasmi Singapura yang lainnya [bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil] wajib diajarkan sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua berfungsi melestari dan memantapkan tradisi dan budaya bangsa penuturnya.

Tahun 1979, sistem pelajaran Baru menekankan *ke arah usaha meningkatkan taraf bahasa kedua sebagai bahasa rasmi negara*.¹³ Menerusi pelajaran bahasa kedua itu, memang ada unsur-unsur (nukilan atau petikan karya) kesusasteraan dan kebudayaan dijadikan bahan pengajaran. Namun, pelajaran Kesusasteraan Melayu tidak lagi diajarkan sebagaimana pelajaran itu diajarkan di sekolah Menengah Melayu 1966-1978 dahulu.¹⁴

Menyampaikan ucapannya merasmikan pembukaan Bulan Bahasa 1990 sambil melancarkan buku *Bahasa Jiwa Bangsa* pada 2 Mac 1990, Menteri Penerangan dan Kesenian Singapura, Brig-Jen George Yeo Yong-Boon telah berkata bahawa *bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, sekarang bukanlah semata-mata berfungsi sebagai pemantap kebudayaan Melayu sahaja, tetapi juga akan menjadi bahasa hubungan ekonomi di rantau Asean*.

Mulai persekolahan tahun 1992, nama *bahasa kedua* bagi pelajaran bahasa ibunda tidak dipakai lagi. Tiga peringkat pelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah telah diperkenalkan, iaitu:

- a) *bahasa Melayu Asas*: bagi 15% ke 20% pelajar berkebolehan rendah,
- 2) *bahasa Melayu*: bagi pelajar-pelajar biasa,
- 3) *bahasa Melayu Lanjutan*: bagi 10% pelajar cemerlang.

Selain daripada tiga peringkat pengajaran bahasa itu ditawarkan pula *bahasa Melayu Pilihan* kepada pelajar-pelajar di Menengah I hingga Menengah IV. *Bahasa Melayu Pilihan* ini ditawarkan kepada 10% pelajar cemerlang bukan Melayu yang tidak pernah belajar bahasa Melayu di peringkat sekolah *primary*.

b. Menerusi Percetakan

1) Surat Khabar dan Majalah

Walaupun *Nujum-ul-Fajar* dikatakan sebagai surat khabar Melayu yang mula-mula diterbitkan di Singapura, iaitu terbit pada 4 September 1872, namun banyak pengkaji yang tidak mengambil kira penerbitannya, malah mengesahkan *Jawi Peranakan* yang terbit dalam tahun 1876 itu adalah surat kabar Melayu yang pertama terbit di Singapura.

Jawi Peranakan yang diterbitkan pada tiap Isnin itu memuat sedikit berita dan banyak iklan. Surat khabar itu menyiarkan berita diiringi dengan kecaman terhadap orang yang bertanggung jawab terhadap perkara yang diberitakan. *JP* dikatakan

bukan semata-mata dibaca orang Singapura, tetapi ia mempunyai wakil pengedarnya di Sarawak, di Sumatera, di Riau dan di Paris.¹⁵

Selain daripada *JP*, terbit pula di Singapura surat-surat khabar *Sekola Melayu* pada tahun 1888, *Taman Pengetahuan* pada 1904, *Al-Imam* pada 1906, *Utusan Melayu* [Warta Free Press] pada 1907, *Lembaga Melayu* pada 1914, *Warta Malaya* pada 1930, *Perkhabaran Dunia* pada 1932 dan *Utusan Melayu* pada tahun 1939.¹⁶

Tumbuhnya kegiatan percetakan dan persuratkhabaran di Singapura itu, telah disifatkan Prof Ismail Hussein sebagai permulaan Singapura dianggap sebagai pusat perkembangan kesusasteraan Melayu di Malaya.¹⁷ Anggapan itu memang dapat dianggap benar kerana dengan adanya percetakan itu majalah-majalah *Kemajuan Melayu* [1932], *Lembaga Melayu* [1934], *Cahaya Singapura* [1934], *Pemuda Melayu* [1935], *Dewan Perempuan* [1935], dan majalah *Tanah Melayu* [1936] telah terbit di Singapura.¹⁸

Dalam zaman pendudukan tentara Jepun [1942-1945], oleh tekanan Nipon-Go, bahasa Melayu tidak berkembang. Dalam pada itu di Singapura [yang pada waktu itu dipanggil *Syonan-to*] masih menerbitkan sebuah akhbar Melayu: *Marai Syibun*, dan dua buah majalah Melayu *Semangat Asia* dan *Fajar Asia*. Menerusi kedua-dua majalah itulah bentuk puisi yang sekarang kita sebut *sajak* itu kita berkembang; mula-mula dengan nama *syair moden*, kemudian kita sebut *sanjak*, akhirnya, kita sebut *sajak*.

Selepas perang Dunia II, kepentingan Singapura sebagai pusat percetakan Melayu meningkat tinggi. *Utusan Melayu* menjadi surat khabar yang paling berpengaruh dan majalah bulanan *Mastika* menjadi penerbitan kesusasteraan yang terpenting pada masa itu. Sehingga 1965, banyak percetakan dan penerbit Melayu yang tumbuh dan berkembang di Singapura.

Utusan Melayu Press, *Royal Press* dan *Al-Ahmadiyah Press* memang sudah wujud semenjak sebelum perang dunia II. *Qalam Press*, *Bintang Press*, *Geliga Limited*, *Semenanjung Press*, *Al-Azhari Press* dan *Gelanggang* baru timbul semenjak selepas perang. Dalam pada itu, ada pula berpuluh-puluh lagi penerbit Melayu kecil-kecil yang timbul hanya untuk beberapa ketika, kemudian lenyap.¹⁹

Dengan adanya kemudahan percetakan itu, telah lahirlah di Singapura majalah-majalah yang pelbagai corak dan ragam untuk memenuhi kehendak dan selera pembacanya. Untuk pembaca yang gemar berhibur dengan cerita, Singapura menawarkan majalah-majalah *Hiburan*, *Kencana*, *Mastika*, dan *Mutiara*. Untuk mereka yang suka tahu tentang perfileman diterbitkan majalah-majalah *Filem*, *Filem Raya*, *Bintang*, *Utusan Filem dan Sport*, *Hiburan Filem*, *Gelanggang* dan *Kisah Bintang*; sementara pembaca kanak-kanak belia dan orang muda pula, Singapura menyuguhkan *Tunas*, *Utusan Kanak-kanak*, *Remaja*, *Belia* dan *Asmara*.

Utusan Melayu, *Utusan Zaman*, *Utusan Kanak-kanak* dan *Utusan Filem dan Sport* bertahan di Singapura hingga 1965 sebelum berpindah ke Kuala Lumpur. Di

Singapura terbit akhbar *Berita Harian* dan mingguannya *Berita Minggu* pada 1 Julai 1957 sebagai kembaran akhbar *Berita Harian Malaysia*; tetapi kemudiannya, *Berita Harian* berpisah dengan BHM pada tahun 1977.

Walaupun ada beberapa majalah mingguan/bulanan dan beberapa tabloid telah diterbitkan di Singapura, tetapi umur majalah-majalah itu tidak panjang. Malah majalah *Mekar* terbitan Kementerian Pelajaran pada tahun 1980, yang dianggap *strong* itupun sempat terbit 12 keluaran sahaja.

Berita Harian Singapura yang sekarang bukanlah lagi hanya membawa berita dan iklan semata-mata, tetapi ia merupakan semi-majalah dengan menyediakan beberapa ruangan untuk rencana-rencana khas mengenai agama, sastera dan budaya, ruangan belia, kanak-kanak, forum terbuka dan yang sebagainya. Dengan demikian, bahasa yang digunakan akhbar itu bukanlah semata-mata bahasa wartawan yang "tangkap saat", tetapi juga bahasa susastera yang baik menurut tata bahasa dan nilai-nilai bahasa yang lain.

2) Buku Pengetahuan/Karya Susastera

Selain daripada majalah-majalah yang menyiarkan karya sastera berbentuk sajak, cerpen, esei dan kritik sastera, banyak juga novel dan buku-buku pengetahuan bahasa Melayu yang telah dihasilkan para pengarang dan sasterawan setempat telah dicetak di Singapura.

Antara tahun 1930 dengan 1946, selain dari novel terjemahan *Setia Asyik kepada Meksyuknya* [1924] oleh Syed Sheikh Alhadi, Singapura telah menghasilkan 3 buah novel iaitu *Melur Kuala Lumpur* [1930] karya Harun Aminurrashid, *Bernang di Lautan Rahsia* [1936] karya Sufar Idris [Singapura] bersama Yusof Awang [Pontian] dan sebuah kisah dalam bentuk "puisi bertele" *Kasih Anak Kepada Ibu* [1939] karangan Ahmad Din Idris.

Antara tahun 1947 dengan 1958, ada 53 orang pengarang/sasterawan yang menulis di Singapura. Bukan semua penulis itu berasal Singapura; kebanyakan mereka datang dari Semenanjung, ada juga yang dari Sumatera. Dalam tempoh 11 tahun itu telah mereka hasilkan 81 buah buku [5 kupasan politik dan pendidikan, 3 kisah *travelogue*, 9 sejarah Islam dan 63 buah novel].²⁰

Apabila bahasa Melayu diangkat menjadi *bahasa Kebangsaan* pada 1959, para penerbit lebih giat menerbitkan buku-buku pelajaran bahasa, terutama untuk pelajar bukan Melayu. Walaupun agak terbatas, namun semenjak tahun 1959 itu, banyak juga buku-buku antologi cerpen, antologi puisi sama ada karya perseorangan atau karya bersama telah diterbitkan di Singapura, sama ada oleh pertubuhan yang aktif dalam kegiatan susastera mahu pun oleh penerbit profesional. Novel, ada juga diterbitkan sekali sekala.

Pada 1963 terbentuk negara Malaysia, kemudahan-kemudahan pengembangan kesusasteraan [termasuk penulis, sasterawan dan percetakan] berhijrah ke ibukota

Malaysia, Kuala Lumpur; kemudian Singapura keluar dari Malaysia pada 1965, maka pada saat itu dunia kesusasteraan Melayu Singapura telah mengalami semacam kejutan (*shock*) yang menyebabkan perkembangan menjadi agak macet untuk sementara waktu.

c. Menerusi Pertubuhan (Organisasi)

1) Kegiatan Persuratan

Kegiatan persuratan di Singapura mula menyerlah semenjak 1936 apabila terbentuk kumpulan penulis-penulis budiman dengan nama *Persaudaraan Sahabat Pena Singapura*. Anggota kumpulan ini menulis secara sukarela dan menyiarkan karya sastera mereka di surat-surat khabar dan majalah.

Pada 2 Jun 1948, telah terdaftar 4PM [Persatuan Persuratan Pemuda Pemudi, Singapura] dengan hasrat hendak memajukan bahasa dan persuratan Melayu di samping memajukan pelajaran anak-anak Melayu di Singapura. Pada 6 Ogos 1950 tertubuh pula *Asas 50* [Angkatan Sasterawan 50] dengan hasrat hendak memperkembang "kesusasteraan Melayu moden", dan pada 1 Oktober 1950 *LBM* [Lembaga Bahasa Melayu] ditubuhkan dengan tujuan hendak memajukan bahasa Melayu Singapura.²¹

Asas 50 dengan kerjasama 4PM, LBM, *KGMS* [Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura] dan *TRENGKAS* [Trenkas Melayu Institute] telah membentuk panitia persidangan persuratan Melayu se-Malaya. Persidangan itu telah diadakan di Singapura pada 12-13 April 1952. Persidangan itu telah membentuk *KPMM* [Kongres Persuratan Melayu se-Malaya].

KPMM telah mengikutsertakan wakilnya ke Kongres Kedua Bahasa Indonesia di Medan pada 28 Oktober–2 November 1954, kemudian mengundang para bahasawan dan sasterawan Indonesia menyertai KPBMM ketiga yang diadakan di Singapura pada 16-21 September 1956. KPMBB telah berjaya mengajak dan bekerjasama dengan team bahasa Indonesia menyekatakan sistem ejaan. Singapura menyertai panitia ejaan itu sehingga sempurna *ejaan Melindo*.

Semenjak keluar dari Malaysia pada 1965, Singapura menakat sendiri dalam semua bidang kehidupannya. Dalam kegiatan kebahasaan, LTK [Lembaga Tetap Kongres] telah mengadakan Kongres Bahasa Kebangsaan pada 16-19 Ogos 1966. Kongres itu membincangkan masalah yang mengenai perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu di Singapura, termasuk masalah ejaan dan pengajaran bahasa Melayu.

Selain daripada kegiatan sastera yang berbentuk studi, deklamasi dan aprisiasi menerusi nadwah, majlis-majlis ceramah, forum, simposium dan sebagainya ada pula kegiatan yang berbentuk kursus dan bengkel untuk membimbing calon-calon penulis dan sasterawan. Ada organisasi seperti *Badan Kesenian Melayu*, *Kumpulan Angkatan*

Muda Sastera (KAMUS) dan lain-lain yang membimbing anggotanya ke arah penulisan dan kesasterawanan demikian itu.

Untuk menggalakkan penulisan kesusasteraan Melayu di Singapura, pada tahun 1973, Asas 50 telah mengetuai 19 pertubuhan budaya Singapura membentuk Jawatankuasa Bersama Hadiah Sastera. Hadiah Sastera bagi kali yang pertama telah disampaikan pada 12 Oktober 1975. Namun, disebabkan beberapa hal teknikal Jawatankuasa Hadiah Sastera itu telah bertukar beberapa kali, sehingga akhirnya, Hadiah Sastera yang disampaikan pada 21 Februari 1993 itu telah diselenggarakan Majlis Bahasa Melayu Singapura.²²

Ekoran dari keturutsertaan beberapa orang sasterawan Melayu Singapura dalam Pertemuan Sasterawan Indonesia II di TIM Jakarta pada 1976, Asas 50 telah mengundang sasterawan-sasterawan Brunei, Indonesia dan Malaysia bertemu di Singapura. Pertemuan itu dikenal dengan nama PSN1 [Pertemuan Sasterawan Nusantara, yang pertama]. PSN1 telah merumuskan bahasa *PSN adalah forum pertukaran pengalaman sasterawan Singapura-Malaysia-Indonesia-Brunei*.

2) Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura

Pada tahun 1981, setelah empat tahun Singapura menggunakan *Ejaan Baru*, Kementerian Kebudayaan Singapura telah menubuhkan suatu *Jawatankuasa Ejaan Melayu*. Jawatankuasa itu diberi tugas memastikan semua ejaan bahasa Melayu yang digunakan di Singapura ditulis dengan betul menurut kaedah baru ejaan rumi yang dipakai di Malaysia dan Indonesia.

Pada tahun 1983, Jawatankuasa Ejaan itu dipinda menjadi *Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura*. Mula-mula jawatankuasa itu dipengerusikan (diketuai) seorang Setiausaha Parlimen, tetapi sekarang oleh seorang Menteri Negara. Mula-mula jawatankuasa itu diletakkan di bawah Kementerian Kebudayaan, tetapi kemudian dipindahkan ke Kementerian Pelajaran [sekarang: Pendidikan] dan sekarang ke Kementerian Penerangan dan Kesenian.

Daripada memantau penggunaan ejaan, fungsi jawatankuasa ini diperluas kepada mengembang dan memajukan bahasa Melayu di Singapura. Jawatankuasa ini telah dipertanggungjawabkan mengawasi bahasa Melayu di Singapura ini. Untuk memenuhi tuntutan ini JBMS menerbitkan *journal* bahasa dua kali setahun. Dengan nama *sekata* *journal* itu tidak menyiarkan karya sastera [sajak, cerpen, kritik sastera dsb]; ia khusus membincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa semata-mata.

Untuk memasyarakatkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dengan baik,²³ kempen bulan bahasa telah dipilih sebagai pendekatan yang sesuai. Kempen Bulan Bahasa Melayu [atas nama bahasa Kebangsaan] yang pertama dan yang kedua telah diadakan dalam tahun 1965. Kempen itu dianjurkan Kementerian Kebudayaan dan

diselenggarakan LTK dengan kerjasama pertubuhan-pertubuhan sosial Melayu dan bukan Melayu.

Majlis Pusat Pertubuhan-pertubuhan Budaya Melayu Singapura dengan kerjasama kerabatnya telah mengadakan Bulan Bahasa Melayu dalam tahun 1982. Pada tahun 1988, 1990 dan 1992, JBMS dengan kerjasama pertubuhan-pertubuhan Melayu setempat telah melaksanakan Bulan Bahasa Melayu dengan slogan *gunakanlah bahasa Melayu yang betul*.

Untuk menyekinikan pengetahuan tentang perkembangan bahasa Melayu yang semakin canggih, JBMS telah menghantar wakil-wakilnya sebagai pemerhati ke persidangan MABBIM [Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia] semenjak sidangnya yang ke-24 di Jakarta dalam tahun 1985.

Memenuhi hasrat memasyarakatkan *sebutan baku* bahasa Melayu, JBMS telah menghantar wakil-wakilnya ke Kuala Lumpur dan ke Jakarta pada Ogos 1992 untuk meninjau perkembangan pelaksanaan sebutan baku di sana. JBMS telah menganjurkan seminar pada September 1992 dan simposium pada November 1992. Seminar itu dikhususkan bagi guru-guru bahasa Melayu di sekolah-sekolah, dan simposium itu terbuka kepada masyarakat pengguna umum.

Pada simposium 29 November 1992 itu, Menteri Negara Pendidikan, Haji Sidek Saniff telah mengisytiharkan penukaran nama Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura itu menjadi *Majlis Bahasa Melayu Singapura*. Perubahan nama itu dirasakan perlu kerana peluasan tugas jawatankuasa itu, dan kebetulan di Kementerian Pendidikan pun ada Jawatankuasa Bahasa Melayu juga.

Tugas baru yang pertama disempurnakan MBMS [Majlis Bahasa Melayu Singapura] ialah mengiktiraf jasa dan kemampuan para sasterawan Melayu Singapura memperkembang dan memajukan bahasa dan kesusasteraan Melayu di sini, dengan mengurniakan *Anugerah Persuratan* (Anugerah Tun Seri Lanang), menganugerahkan *Hadih Sastera* berdasarkan nilai karya sastera yang dihasilkan sepanjang dua tahun, dan memberikan *Hadih Sayembara Sastera* kepada pemenang-pemenang peraduan (perlumbaan) yang diadakan pada tahun penganugerahan itu.²⁴

3. Kesimpulan

Singapura adalah negara berbilang bahasa dengan empat bahasa rasmi [Inggeris, Melayu, Mandarin dan Tamil] yang rakyatnya bertutur dalam dwibahasa [Inggeris + salah satu bahasa rasmi]. Bahasa Inggeris merupakan bahasa negara, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa cari makan dan status kehidupan, manakala bahasa rasmi ialah bahasa ibunda, bahasa pelestari dan pengembang budaya, bahasa jiwa bangsa.

Orang Melayu berbahasa Inggeris dan Melayu. Bahasa Inggeris untuk mendapatkan hak hidup yang setara dengan hak yang diperolehi rakyat Singapura dari keturunan lain, dan bahasa Melayu dihayati sebagai jiwa bangsa. Kebudayaan pusaka dinikmati perantaraan bahasa Melayu, kesusasteraan Melayu diperkembang

dengan bahasa Melayu, bimbingan moral dan hayatan agama Islam disempurnakan dengan bahasa Melayu.

Kesusasteraan Singapura diperkembang perantaraan keempat-empat bahasa rasmi. Jadi, bahasa Melayu bukan sahaja berperan dalam pengembangan kesusasteraan Melayu, tetapi berperan juga dalam kesusasteraan Islam dan kesusasteraan nasional Singapura. Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dengan tugas seperti yang dinyatakan di nota kaki No. 2, masih begitu.

Walaupun kesusasteraan Melayu diperkembang dengan bahasa Melayu, namun semenjak penekanan pendidikan dwi-bahasa pada 1979, bahasa Melayu diajarkan sebagai bahasa kedua dan pelajaran kesusasteraan Melayu tidak diajarkan lagi di sekolah-sekolah; malah sampai ke fakulti Pengajian Melayu di Universiti Nasional Singapura *kesusasteraan Melayu* tidak dijadikan satu daripada cabang pengajiannya.

Dalam dua dekad (dasawarsa) kebelakangan ini, perkembangan kesusasteraan Melayu di Singapura semata-mata ditangani sasterawan dan beberapa organisasi budaya/sastera, sedangkan pendidikan formal tidak membantu secara aktif menyemarakkan semangat kesusasteraan itu menerusi sistemnya. Hal ini telah menjadikan kebanyakan pelajar Melayu mendapati sukar untuk kenal akan kesusasteraan ibundanya, apalagi untuk menikmatinya! Lain halnya dengan sikap mereka terhadap kesusasteraan Inggeris.

Sebenarnya bahasa Melayu sudah pun menjadi bahasa perhubungan di rantau ini. Bahasa itu telah digunakan dalam pertemuan Sasterawan se-Nusantara, pertemuan wartawan se-Nusantara, guru-guru se-Nusantara, dan dalam sidang-sidang Mabbim [mengenai bahasa] dan Mabbim [mengenai agama]. Peserta-peserta dari Singapura dengan bahasa Melayu Singapuranya tidak berasa kekok atau kaku berbicara dan berbincang dalam pertemuan-pertemuan itu.

Namun, apabila perkataan Menteri [seperti yang dinyatakan pada para 20 kertas kerja ini] bahawa *bahasa Melayu akan menjadi bahasa hubungan ekonomi di rantau Asean* itu hendak dilaksanakan maka para ekonomis Singapura harus sudah sedia memahami istilah-istilah ekonomi dalam bahasa Melayu, kerana di Singapura, semua ilmu pengetahuan [termasuk ekonomi] disampaikan menerusi bahasa Inggeris.

Selama ini, kelompok pengguna bahasa Melayu yang menggunakan segala istilah dalam bahasa Melayu hanyalah wartawan Melayu kerana mereka harus menerjemahkan semua berita dan istilah ke bahasa Melayu untuk pembaca-pembaca akhbaranya. Demikian pula dengan pengacara dan penyiar berita di radio dan televisyen bahagian Melayu.

CATATAN

1. Senikata lagu Kebangsaan ialah: Mari kita rakyat Singapura ... sama-sama menuju bahagia;
Cita-cita kita yang mulia: berjaya Singapura;
:[Marilah kita bersatu, dengan semangat yang baru;
semua kita berseru: **majulah Singapura-majulah Singapura**]:
2. Pengertian *bahasa Kebangsaan* di Singapura ialah *bahasa rakyat* iaitu bahasa perhubungan antara rakyat-sama ada antara Melayu dengan bukan-Melayu atau antara bukan-Melayu dengan bukan-Melayu yang tidak sama keturunan bangsanya, misalnya antara orang Cina dengan India dsbg.
3. Baca: Abdul Hadi Hassan, *Sejarah Alam Melayu I*, MPH Ltd Singapore 1949, halaman 84.
4. Baca makalah Muhammad Ariff Ahmad, *Penggunaan Bahasa Melayu di Singapura -masa dini, masa kini dan masa lini* yang disampaikan kepada Seminar Baku, anjuran Majlis Bahasa dan PERGAS, Singapura 22 Ogos 1993.
5. Baca *Memoranda Angkatan Sasterawan 50*, terbitan Pustaka Pedoman, Oxford University Press, Kuala Lumpur 1962, halaman 265.
6. Baca *150 Yers of Education in Singapore*, terbitan Teachers' Training College, Singapore 1969, halaman 16.
7. Baca *150 Years of Education in Singapore*, 1969, halaman 105.
8. Baca makalah Hadijah Rahmat, *Pelajaran Melayu dalam Zaman Penjajahan (1819-1959)* dalam majalah MEKAR terbitan Kementerian Pelajaran Singapura, Oktober 1980, halaman 15.
9. 'Sekolah Tinggi' itu ialah sekolah vernacular (primary) juga, hanya persekolah-annya diteruskan dua tahun lagi sampai ke darjah VI (sekarang: Primary 6).
10. Persamaan Indonesiannya ialah IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan).
11. Baca makalah Muhammad Ariff Ahmad, *Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu di Singapura* yang disampaikan kepada bengkel 'Perkembangan Bahasa Melayu di Pelbagai Kota, di Kuala Lumpur Malaysia, pada November 1992, halaman 16-21.
12. Baca makalah Muhammad Ariff Ahmad, *Peranan Bahasa Melayu di Sekolah Rendah dan Menengah, dalam Memoranda Angkatan Sasterawan 50*, terbitan Pustaka Pedoman, Oxford University Press, Kuala Lumpur 1962, halaman 74-79.
13. Baca kertas kerja: Selamat Haji Omar, *Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan Dwibahasa* di sampaikan kepada "Pertemuan Guru-guru Nusantara ke-5", anjuran Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura, 24-25 November 1989.
14. Baca makalah: Muhammad Ariff Ahmad, *Pengajaran Kesusasteraan di Sekolah-sekolah Menengah*, kumpulan kertas kepada Kongres Bahasa Kebangsaan Singapura 15-19 Ogos 1966 [kk No 10] halaman 122-132.

15. Baca: Wiliam R Roff PhD, *Sejarah Sura-surat Khabar Melayu*, monograf Persatuan Bahasa Melayu University Malaya, terbitan Saudara Sinaran Berhad, Pulau Pinang 1967, halaman 9-10.
16. Baca: Mohd Taib Osman, *Bahasa Rencana Pengarang Akhbar-akhbar Melayu Hingga ke Tahun 1941*, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur 1964, halaman 80-85.
17. Baca: Ismail Hussein, "Pengarang-pengarang Melayu di Singapura Selepas Perang Dunia II", dalam *bahasa* terbitan Persatuan Bahasa Melayu University Malaya No. 7, 1965, halaman 4.
18. Baca: Nadwah Sastera, *Dinamika Budaya*, terbitan Majlis Pusat Pertubuhan-pertubuhan Kebudayaan Melayu Singapura 1991, halaman 292.
19. Baca: Ismail Hussein, "Pengarang-pengarang Melayu Singapura Selepas Perang Dunia II" dalam *bahasa* terbitan Persatuan Bahasa Melayu University Malaya No. 7 1965, halaman 4.
20. Baca: Ismail Hussein, "Pengarang-pengarang Melayu Singapura Selepas Perang Dunia I" dalam *bahasa* terbitan Persatuan Bahasa University Malaya No. 7 1965, halaman 6-7.
21. Baca: Republic of Singapore *Government Vol VIII No. 42* terbit 29 April 1966.
22. Baca: makalah Suradi Parjo, "Sejarah dan Pencapaian Hadiah Sastera Melayu Singapura", dalam *Dinamika Budaya* terbitan Majlis Pusat pertubuhan-pertubuhan budaya Melayu Singapura 1991, halaman 133-174.
23. Sistem pendidikan nasional Singapura dengan penekanan dwibahasa-bahasa Inggeris & bahasa ibunda-dengan pendedahan yang tidak seimbang, mendorong pelajar dan para lulusan dari sistem itu lebih terdedah dan lebih suka berbahasa Inggeris walaupun dengan mereka yang sekebudayaan. Ini menyebabkan kemahiran mereka berbahasa ibunda kelihatan tersekat-sekat.
24. Penganugerahkan pertama kalinya telah disempurnakan pada 21 Februari 1993. Anugerah itu akan diberikan tiap dua tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Haji, Raja. 1928. *Pengetahuan Bahasa*, terkarang 1275H (1858M), Singapura: Matba'ah Al-Ahmadiyah.
- Buyong Adil. 1949. *Sejarah Alam Melayu IV*. Singapura: Malaya Publishing House.
- Buyong Adil, Haji. 1972. *Sejarah Singapura*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
- Ch van Ophuijsen: [terjemahan T W Kamil] 1983. *Tata Bahasa Melayu*. Jakarta: Djambatan.
- Hadi Haji Hassan, Abdul. 1949. *Sejarah Alam Melayu II*. Singapura: Malaya Publishing House.
- Harun Aminurrashid. 1966. *Kajian Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*. Singapura: Pustaka Melayu Press.
- Mahmud Ahmad. 1966. *Kertas-Kertas Kerja Kongres Bahasa Kebangsaan Singapura 1966*. Singapura: Lembaga Tetap Kongres.
- Mohd Taib b Osman. 1964. *Bahasa Rencana Pengarang Akhbar-akhbar Melayu Hingga ke Tahun 1941*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.
- T D Situmorang dkk. 1952. *Sejarah Melayu*. Djakarta: Djambatan.
- T R Doraisamy. 1969. *150 Years of Education in Singapore*. Singapore: Teachers' Training College.
- William R Roff Ph D. 1967. *Sejarah Surat-surat Khabar Melayu*, monograf Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya, Sauda Sinaran Bros, Pulau Pinang.
- . 1952 *Cetera XXII dalam Pelbagai Cetera Melayu*. London : Macmillan & Co Ltd.
- . 1962. *Musyawarah Penulis-penulis Malaya di Singapura*. Singapura: Dewan Bahasa & Kebudayaan.

Makalah

- Hadijah Rahmat. 1980. "Pelajaran dalam Masyarakat Melayu Tradisional". Dalam majalah *Mekar*, Kementerian Pelajaran Singapura.

- Hadijah Rahmat. 1980. "Pelajaran Melayu Dalam Zaman Penjajahan (1819-1959)", Dalam majalah *Mekar*, Kementerian Pelajaran Singapura.
- Ismail Hussein. 1965 "Pengarang-pengarang Melayu di Singapura Selepas Perang Dunia II", dalam *Bahasa*, terbitan Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya No 7, Kuala Lumpur.
- Mas. 1948. "Bahasa Melayu Akan Datang", dalam majalah *Kencana*, Mibs, Singapura, keluaran Disember 1947 & Februari.
- Mas. 1952. "Mengenal Kongres Persuratan Melayu se-Malaya dari Dekat", dalam akhbar *Mingguan Melayu*, 20 April.
- Mas. 1966. "Sekelumit Pengalaman Tentang Penubuhan Angkatan Sasterawan 50", dalam *Cenderamata Pameran Asas 50* di Kongres Bahasa Kebangsaan Singapura.
- Muhammad Ariff Ahmad. 1992. "Tata Bahasa Melayu Sejak Za'ba Hingga Mutakhir", dalam *Resan dan Kesan*, terbitan Jawatankuasa Bahasa Melayu Singapura.
- Muhammad Ariff Ahmad. 1992. "Peranan Bahasa Melayu di Sekolah Rendah dan Menengah", dalam *Memoranda Asas 50*, Oxford Universiti Press, Kuala Lumpur.
- Muhammad Ariff Ahmad. 1992. "Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa Melayu", dalam *Resan dan Kesan*, terbitan J'kuasa Bahasa Melayu Singapura.
- Muhammad Ariff Ahmad. 1988. "Pelibatan Guru-guru dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Penggunaan Bahasa Melayu Yang Betul", kertas kerja kepada Seminar Pendidikan Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura.
- Selamat b Osmar. 1989. "Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan Dwibahasa", kertas kerja kepada *Pertemuan Guru-guru Nusantara* di Singapura.

Lain-Lain

- Cenderamata 25 tahun KGMS - Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura* 1972.
- Minit Persidangan Kongres Persuratan Melayu se-Malaya kedua* 1954.
- Laporan ringkas mengenai *Rapat Ahli-ahli Bahasa Malaya-Indonesia* yang dikemukakan Kongres Kecil KPMM2, 17 Nov 1954.
- Penyata Asas 50 (2952-53)* yang dikemukakan kepada Mesyuarat Agung Asas 50 pada 1 November 1953.
- Republic of Singapore Government Gazette*, vol VIII, No 42, terbit pada 29 April 1966.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Perkembangan Bahasa Melayu di Singapura
Pemakalah : (Mas) Haji Muhammad Ariff
Pemandu : P.W.J. Nababan
Pencatat : Farid Hadi
Tri Saptarini

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Yus Rusyana, IKIP Bandung

- a. Bagaimana kedudukan bahasa Melayu di antara keanekaan bahasa di Singapura?
- b. Di dalam sekolah non-Melayu, apakah bahasa Melayu diajarkan?

Jawaban:

- a. Keempat bahasa yang berada di Singapura, yaitu bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Cina, dan bahasa Tamil, kedudukannya setaraf. Di antara keempat bahasa itu, bahasa Inggris yang menonjol karena bahasa Inggris merupakan bahasa kerja dan bahasa pertemuan ekonomi, sedangkan ketiga bahasa yang lain adalah sebagai bahasa ibu, bahasa pelestari dan pengembang budaya. Fungsi bahasa Melayu diharapkan dapat menjadi bahasa lalu lintas ASEAN.
- b. Sekolah yang ada di Singapura adalah sekolah nasional yang berdwi-bahasa dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, sedangkan bahasa kedua ialah bahasa ibu pelajar bahasa Melayu bagi yang bukan berbahasa ibu adalah sebagai bahasa pilihan.

2. **Pertanyaan:** Samsudin, IKIP Bandung

Berdasarkan pengalaman pribadi di Singapura, jika kita bertanya dengan memakai bahasa Melayu kepada seseorang non-Melayu, selalu dijawab dengan bahasa Inggris. Jika ditanya mengapa ia menjawab dengan bahasa Inggris, jawabannya adalah bahwa ia bukan orang Melayu.

Jawaban:

Generasi muda di Singapura cenderung menggunakan bahasa Inggris dengan alasan bahwa bahasa mereka berkedudukan yang sama, yaitu sebagai bahasa resmi negara. Oleh karena itu, mereka berhak memilih di antara keempat bahasa

di Singapura itu, bahasa Inggris atau bahasanya sendiri. Bagi generasi tua hal itu tidak berlaku.

3. **Pertanyaan:** Indiah Imran, IKIP Bandung

- a. Apakah keempat bahasa yang berada di Singapura itu masing-masing digunakan dalam kehidupan sehari-hari?
- b. Generasi muda Singapura kurang dalam berbahasa Melayu. Hal itu sangat dikhawatirkan kepunahannya. Jika demikian, mengapa tidak bahasa Inggris saja yang menjadi bahasa nasional, mengingat bahwa generasi muda Singapura kurang dalam berbahasa Melayu.

Jawaban:

- a. Keempat bahasa di Singapura dipakai secara bergantian dalam berbagai hal, misalnya dalam rekening telepon, berita radio.
- b. Pada tanggal 28 Mei 1959 telah diikhtiarkan membuat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Lagu kebangsaan Singapura pun berbahasa Melayu. Generasi tua masih berpegang teguh kepada bahasa Melayu, sedangkan generasi muda orang Melayu yang berdwibahasa masing-masing memakai bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Kekhawatiran bahasa Melayu mati memang menjadi kekhawatiran ramai di Singapura. Untuk menghindari hal itu diadakan kegiatan sastra dan bahasa. Kekhawatiran itu hanya sebagai ramalan. Jadi mungkin dapat terjadi, mungkin pula tidak. Ia tidak percaya kepada ramalan, tetapi ia lebih percaya kepada usaha, yaitu usaha untuk lebih menggiatkan bahasa dan sastra.

4. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia

Anak-anak muda di Singapura lebih pandai berbahasa Inggris daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggris telah dipakai pula di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Lama-kelamaan bahasa Melayu menjadi tersisih. Keadaan seperti ini dalam ilmu sociolinguistik disebut kebocoran ranah (*domain*). Mudah-mudahan keadaan ini tidak berkelanjutan yang berakhir dengan kematian bahasa, dan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Di Singapura, bahasa kebanyakan secara *de jure* ialah bahasa Melayu, tetapi secara *de facto* bahasa Inggris. Daya tarik bahasa Inggris memang lebih kuat daripada bahasa Melayu karena dengan berbekal bahasa Inggris, orang menjadi lebih mudah mencari kerja. Mohon penjelasan.

Jawaban:

Dibutuhkan *kesadaran* untuk berbahasa Melayu seperti yang dilakukan oleh generasi tua. Sejak awal Januari 1993 telah dibuat istilah baku dalam bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah rendah, yang bertujuan agar anak-anak dapat berbahasa Melayu dengan baik dan agar anak-anak lebih gemar dengan bahasa

baku. Jangan menunggu sampai tahun 1999 nanti karena perancang-perancang bahasa sudah mengumumkan bahwa pada tahun 1999 yang akan datang akan digalakkan bahasa Melayu. Kita tunggu saja bagaimana tahun 1999 yang akan datang.

5. **Pertanyaan:** Sri, Mahasiswi IKIP Muhammadiyah Jakarta

Bahasa apa yang dipakai dalam iklan media massa dan media elektronik?

Jawaban:

Seperti juga pada rekening telepon dan berita radio, iklan pun menggunakan empat bahasa secara bergantian.

6. **Pertanyaan:** Ahmad Darwin Nasution, SMA Negeri 2 Medan

- a. Mengapa Singapura tidak menciptakan bahasa Singapura, seperti halnya Indonesia mempunyai bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu?
- b. Mengapa orang-orang Singapura tidak minta bantuan orang Indonesia dalam menangani bahasa Melayu?

Jawaban:

- a. Jika menciptakan bahasa Singapura, namanya menjadi bahasa Melayu supra, jika hal ini dilakukan berarti mundur ke belakang. Padahal, Singapura telah ikut dalam pertemuan-pertemuan sastra, dan bahasa yang diusahakan oleh Mabbim.
- b. Pemakalah tidak mempunyai wewenang menjawab pertanyaan b.

PERANAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DALAM PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DI MALAYSIA

Farid M. Onn

Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia

1. Pendahuluan

Wawasan 2020 yang bermula pada tahun pertama dekad ini, tahun 1991, membuat kita melihat segala-galanya semula dengan kebijaksanaan baru. Tahun 1991 mempunyai erti yang tertentu kerana bukan sahaja tahun ini memulakan dasawarsa 1990-an, tetapi juga tahun ini memulakan dekad terakhir bagi abad kedua puluh. Sepuluh tahun di muka yang akan kita tempoh amat singkat tempohnya bagi kita melihat perubahan yang besar dan historis sifatnya berbanding dengan enam abad perkembangan dan pertumbuhan tamadun bangsa dan negara yang telah kita lalui. Namun, tidak mustahil peristiwa yang mengejutkan dapat berlaku sehingga mengubah pemikiran dan sudut pandangan kita terhadap masa depan peradaban bangsa dan negara kita di tengah-tengah pergolakan dan perkembangan dunia moden "order baru" dan pembinaan tamadun manusia sejagat.

Dalam konteks Malaysia, tahun 1991 ialah tahun bermulanya Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995); manakala pada akhir dekad ini, akan berakhir pula Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000). Tahun 1991 menandakan berlalunya 33 tahun Persekutuan Tanah Melayu yang terlepas daripada cengkaman penjajah dan, semenjak kemerdekaan, Malaysia berusaha dan berjaya membangun dan menjadi sebuah negara yang terkenal dengan keteguhan ekonomi kerana kekayaan sumber alam semula jadi dan usaha pembangunan yang gigih, negara berbilang kaum yang unik tetapi harmoni, negara bertradisi kebudayaan agung dan bersusila tinggi, dan negara yang mengamalkan dasar luar yang berkecuali dan tegas yang disegani dan dihormati oleh dunia antarabangsa. Tahun 1991 memulakan tekad baru yang membawa kita ke dalam Rancangan Malaysia Keenam (RME) dan Rancangan Malaysia Ketujuh (RMT) yang menjanjikan kemakmuran negara, kesejahteraan rakyat, keteguhan ekonomi, keadilan untuk semua, dan kemajuan dalam serba hal.

Salah satu faktor pembina utama yang secara langsung atau tidak langsung menjayakan segala perancangan korporat negara Malaysia termasuklah aspek bahasa, sastera dan budaya. Bahasa Melayu telah berkembang dan maju dengan pesatnya menjadi bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa pendidikan dan bahasa budaya tinggi di Malaysia pada masa ini. Sejarah pertumbuhannya secara terancang yang berlangsung

selama 35 tahun yang lepas memperlihatkan perubahan bahasa Melayu daripada kedudukannya yang amat kerdil ketika menjelang kemerdekaan kepada statusnya yang begitu terserlah pada penghujung dekad yang lalu.

Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu secara terancang itu berlaku melalui pimpinan Dewan Bahasa dan Pustaka, sebuah badan berkanun dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berfungsi sebagai satu-satunya agensi perancangan bahasa yang diberi kuasa melalui Akta Parlimen. Kebijaksanaan perancangan bahasa melalui DBP ini ditopang dan diperkuat oleh pusat-pusat pengajian tinggi dan badan-badan sukarela. Pelaksanaannya didokong oleh sistem pendidikan kebangsaan, saluran media massa, dan pelbagai peraturan dan aktiviti jabatan di sektor awam dan beberapa sektor swasta. Khalayak pengguna bahasa umum pula telah menerima dan menggunakan bahasa Melayu sebagaimana yang ditetapkan oleh kerajaan.

2. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka

Dewan Bahasa dan Pustaka (yang ditubuhkan pada 22 Jun 1956) ialah sebuah Badan Berkanun di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang secara khusus bertanggungjawab melaksanakan beberapa matlamat tertentu *Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67* (Pindaan 1971, Pindaan 1990) sebagaimana yang termaktub dalam *Akta Dewan Bahasa dan Pustaka* (Ordinan 1959, Pindaan 1978). Matlamat-matlamat korporat DBP yang dimaktubkan dalam Akta DBP itu diperturunkan seperti yang berikut:

- 1) memajukan dan memperkaya bahasa kebangsaan;
- 2) memajukan bakat kesusasteraan terutama dalam bahasa kebangsaan;
- 3) mencetak atau menerbitkan atau membantu usaha percetakan atau penerbitan buku-buku, risalah-risalah dan bentuk-bentuk persuratan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain;
- 4) menyamakan ejaan dan bunyi sebutan serta menggubal istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan.

Matlamat tentang bahasa dan kesusasteraan yang begitu jelas menjadi asas bagi penubuhan dan penentuan bentuk dan fungsi DBP. Dari segi organisasi fungsi, dalam konteks perancangan negara dan pendidikan, DBP dikategorikan sebagai "badan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera kebangsaan Malaysia", iaitu sebuah perbadanan yang dipertanggungjawabkan usaha membina dan mengembangkan bahasa Melayu dan kesusasteraan kebangsaan (Melayu).

Peranan yang diletakkan di bahu DBP ini tidak lain daripada peranan "perancangan bahasa" yang, secara teori, merujuk kepada perubahan dalam sistem kod bahasa atau ujaran atau kedua-duanya yang dirancang oleh organisasi yang ditubuhkan bagi maksud-maksud tersebut atau diberi mandat melaksanakan maksud-maksud tersebut. Dengan demikian, DBP sebagai sebuah organisasi yang ditubuhkan untuk melaksanakan maksud-maksud tersebut memainkan peranan untuk menyelesaikan

kan masalah-masalah bahasa yang dicirikan oleh perumusan dan penilaian terhadap alternatif-alternatif untuk membuat keputusan yang terbaik bagi penyelesaian masalah-masalah bahasa tersebut. Peranan ini ialah tugas perancangan korpus yang difokuskan kepada program kodifikasi dan peluasan bahasa Melayu serta pengembangan kesusasteraan Melayu melalui penyebaran dan penerbitan.

Untuk mencapai matlamat-matlamat Akta DBP dan melaksanakan peranan DBP, Lembaga Pengelola yang bertanggung jawab membuat dasar-dasar tertinggi DBP, dari semasa ke semasa, telah menggubal matlamat-matlamat yang lebih khusus dengan cara mentafsirkan matlamat-matlamat dalam Akta DBP itu berdasarkan perkembangan semasa untuk dilaksanakan dalam Rancangan-rancangan Malaysia (bagi tempoh setiap lima tahun) dan setiap tahun. Antaranya, tafsiran bagi matlamat penerbitan buku yang termaktub dalam Akta SBP telah diperluas sebagai matlamat sokongan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bahasa Melayu. Manakala matlamat tentang kebudayaan (yang dimaksudkan di sini) tidak tersurat secara nyata dalam Akta DBP tetapi ditafsirkan daripada pengertian bahawa bahasa Melayu adalah asas bagi segala pergerakan kebudayaan kebangsaan dan wahana bagi pengembangan ilmu.

Kami akan mencuba meneliti peranan dan pencapaian DBP dari awal hingga akhir dekad yang lalu dengan tujuan untuk melihat sama ada DBP telah dapat melaksanakan matlamat-matlamat Akta DBP secara khusus, dan matlamat Akta Bahasa Kebangsaan secara umumnya, serta permasalahan yang dihadapinya. Penelitian ini akan dihubungkan dengan gagasan untuk mencetuskan pembinaan wawasan tentang perancangan bahasa dan pelaksanaannya dalam tempoh menjelang abad kedua puluh satu, khususnya dalam memenuhi matlamat Wawasan 2020.

Perancangan program, pelaksanaannya dan prestasi dalam tempoh tiga puluh lima tahun yang lalu memperlihatkan dengan jelas bahwa DBP telah berfungsi sebagai organisasi perancangan bahasa dalam erti yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk mencapai empat matlamat utama, iaitu (a) matlamat perancangan bahasa, (b) matlamat perancangan kesusasteraan, (c) matlamat pengembangan ilmu, dan (d) matlamat perancangan kebudayaan. Pelaksanaan bagi mencapai keempat-empat matlamat ini diperlakukan secara bersepadu dengan maksud bahawa program dan aktiviti pembinaan dan pengembangan bahasa diperlakukan dalam hubungan dengan program dan aktiviti pembinaan dan pengembangan kesusasteraan kebangsaan, penerbitan buku bagi pengembangan ilmu, dan pembinaan dan pengembangan kebudayaan kebangsaan. Perancangan yang bersepadu itu dihubungkan pula dengan dasar dan pelaksanaan dasar bahasa di sektor-sektor lain, iaitu bahasa pengantar dan bahasa ilmu dalam istem pendidikan kebangsaan, bahasa rasmi di sektor awam, bahasa komunikasi dalam media, dan bahasa perubangan di kalangan masyarakat Malaysia keseluruhannya.

a. Perancangan Bahasa Melayu

Dalam lebih tiga dekad yang lepas, perancangan untuk mencapai matlamat bahasa oleh DBP bertujuan untuk memaju dan mengembangkan bahasa Melayu baku supaya mencapai status fungsi bahasa yang berikut.

- 1) Bahasa rasmi yang cekap dan berkesan dalam semua urusan pentadbiran negara;
- 2) Bahasa pengantar pendidikan bagi semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan dan semua bidang ilmu di semua peringkat pendidikan tinggi;
- 3) Bahasa kebangsaan yang dapat digunakan dengan cekap dan bangga dalam semua kegiatan dan kehidupan harian serta komunikasi umum di kalangan semua lapisan masyarakat warga Malaysia serta menjadi lambang identiti negara Malaysia;
- 4) Bahasa ilmu pengetahuan tinggi dan budaya tinggi dan canggih yang menjadi asas pembentukan negara bangsa yang berteknologi;
- 5) Bahasa pengucapan kesusasteraan, kebudayaan, dan kesenian yang indah.

Dari sudut struktur bahasa, perancangan bahasa di DBP bertujuan untuk membina dan memantapkan bahasa Melayu baku, iaitu pembinaan bahasa untuk memperlengkap dan memantapkan aspek-aspek bahasa supaya bahasa Melayu menjadi bahasa baku yang lengkap dan mantap dalam sistem sebutan, sistem ejaan (Rumi dan Jawi), sistem tata bahasa (sistem morfologi dan sintaksis), perbendaharaan kata umum dan istilah pengetahuan tinggi, laras dan gaya bahasa, serta aturan penggunaan bahasa yang sopan.

b. Perancangan Sastera Kebangsaan

Perancangan dalam bidang kesusasteraan Melayu adalah bermatlamat dan bertujuan yang berikut.

- 1) Memantapkan kesusasteraan Melayu sebagai teras kesusasteraan nasional;
- 2) Menjadikan kesusasteraan Melayu sebagai kesusasteraan yang dapat diterima oleh masyarakat berbilang kaum di Malaysia;
- 3) Meningkatkan dan membina mutu penulisan kreatif pengarang Malaysia;
- 4) Memelihara dan memperkenalkan sastera rakyat.

c. Perancangan Penerbitan Ilmu

Matlamat bidang penerbitan ialah untuk meningkatkan dan menyebarkan ilmu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya. Untuk tujuan ini, dasar penerbitan DBP adalah bertujuan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya buku dan bahan bacaan dalam bahasa Melayu baku yang dapat menyebarkan ilmu pengetahuan dalam segala bidang bagi kegunaan semua peringkat pendidikan formal dan tidak formal serta bagi kegunaan umum. Dalam hubungan ini, DBP berfungsi sebagai penerbit dan pencetak dalam erti kata menjadi penerbit dan pencetak yang menerbitkan dan mencetak buku dan bahan bacaan yang hampir kesemuanya diusahakan menurut perancangan DBP sendiri. Selain itu, sebagai penerbit dan pencetak, DBP juga membantu usaha menerbitkan atau mencetak buku yang diusahakan oleh pihak lain di samping berfungsi membantu memajukan industri penerbitan dan percetakan buku di Malaysia.

Secara khusus, jenis penerbitan DBP tergolong yang berikut.

- 1) Karya bahasa untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa Melayu;
- 2) Karya kesusasteraan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang kesusasteraan kebangsaan;
- 3) Karya umum untuk memperluas pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu dan perkara di kalangan masyarakat;
- 4) Karya peringkat bacaan kanak-kanak yang bertujuan menggalakkan pembacaan di kalangan pembaca lepasan sekolah dan pembaca umum;
- 5) Buku teks sekolah menurut keperluan sistem pendidikan negara;
- 6) Karya asli dan terjemahan sebagai buku atas dan rujukan pengajian tinggi;
- 7) Karya agung atau klasik daripada tamadun Islam dan karya-karya besar yang lain sebagai bacaan ilmu laras bahasa Melayu budaya tinggi;

d. Perancangan Budaya

Perancangan kegiatan budaya atau kesenian oleh DBP tidak berlaku sebagai perancangan tersendiri, tetapi tercakup sebagai kegiatan dalam perancangan kesusasteraan. Kegiatan yang diatur pun kebanyakannya berupa kegiatan sokongan kepada proyek pengembangan kesusasteraan, terutamanya aktiviti kegiatan sastera. Hal ini berlaku kerana matlamat kebudayaan atau budaya tidak termaktub secara khusus dalam Akta DBP.

3. Pelaksanaan Rancangan Dewan Bahasa dan Pustaka

Perancangan bahasa di Malaysia secara rasmi sudah berlaku selama 35 tahun melalui DBP. Dalam tempoh yang agak lama itu, perkembangan bahasa Melayu telah melalui dua tahap pelaksanaannya. Pertama ialah tahap peningkatan status yang memperlihatkan usaha-usaha kempen dan menggalakkan untuk memperkenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi (tahun 1956-1967). Kedua ialah tahap pembinaan korpus bahasa, iaitu pembakuan ejaan, peristilahan, tata bahasa dan kosakata, sehingga akhir tempoh RML (tahun 1956-1990). Bermula awal RME (tahun 1991), perancangan bahasa dan sastera Melayu akan melalui tahap ketiga, iaitu pemantapan seterusnya, khususnya dalam pembentukan laras-laras bahasa ilmu tinggi, serta perluasan dan pengembangan secara yang lebih menyeluruh sehingga akhir dekad ini (tahun 2000).

Perancangan dan pelaksanaan fungsi bahasa di DBP diletak di bawah Jabatan Bahasa. Empat bahagian di Jabatan Bahasa yang menyelenggarakan fungsi-fungsi bahasa DBP ialah: (1) Bahagian Penyelidikan Bahasa, (2) Bahagian Peristilahan, (3) Bahagian Perkamusan, dan (4) Bahagian Pelaksanaan Bahasa. Perancangan dan pelaksanaan fungsi bahasa ini bagi Sabah dan Sarawak ialah oleh DBP Cawangan Sabah dan DBP Cawangan Sarawak.

Matlamat untuk "memperkembang dan memperkaya bahasa kebangsaan" sebagaimana yang termaktub dalam *Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959* (Disemak 1978) telah dilaksanakan oleh DBP melalui kegiatan-kegiatan pembinaan korpus bahasa dan pengembangan penggunaannya melalui pelbagai jenis penerbitan dan proses penyebaran maklumat bahasa. Pembinaan korpus bahasa yang diasaskan kepada penyelidikan ilmiah terhadap bahasa dan penggunaannya di kalangan masyarakat bertujuan untuk membakukan dan memantapkan aspek-aspek bahasa, iaitu sebutan, ejaan, pengertian dan penggunaan kata dan istilah, tata bahasa serta laras dan gaya bahasa. Hasil kajian linguistik ini menjadi input bagi pembinaan istilah, kodifikasi kata melalui penyusunan dan penerbitan kamus, pembakuan tata bahasa, perumusan pedoman laras dan gaya bahasa, serta perancangan pembinaan dan pengembangan bahasa secara menyeluruh.

Daripada sudut kesan perancangan bahasa itu ke atas masyarakat akhir dekad yang lalu, usaha perancangan bahasa DBP telah berjaya memantapkan dan memperluas penggunaan bahasa Melayu baku dengan lebih berkesan sebagai bahasa rasmi yang digunakan di sektor pentadbiran negara, bahasa pengantar di semua peringkat pendidikan formal, bahasa budaya dan ilmu tinggi yang termasuk bidang sains dan teknologi, serta bahasa komunikasi umum (bahasa kebangsaan) di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia.

a. Penyelidikan dan Pembangunan bagi Pemantapan Aspek-aspek Bahasa

Bahagian Penyelidikan Bahasa berfungsi mengadakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) linguistik bahasa Melayu, iaitu kajian terhadap semua aspek bahasa, dan penilaian, iaitu kajian sosiolinguistik terhadap penggunaan bahasa.

Pembakuan aspek-aspek bahasa Melayu telah mencapai tahap kejayaan yang membanggakan pada penghujung dekad yang lalu.

Pembakuan ejaan telah selesai dengan terbitnya *Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia* (1981, 1988) yang diasaskan kepada sistem ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tahun 1972. *Ejaan Jawi yang Disempurnakan* (Pedoman 1986, Daftar 1988) ialah hasil pembakuan yang menjadikan sistem ejaan Jawi lebih selaras dan kemas.

Usaha pembakuan tata bahasa terlaksana dengan terbitnya dua jilid buku tata bahasa, iaitu *Tatabahasa Dewan Jilid I Ayat* (1987) dan *Tatabahasa Dewan Jilid II Perkataan* (1989) yang diterima sebagai tatabahasa pegangan di sektor pendidikan.

Kegiatan untuk mempertimbangkan penggunaan laras dan gaya bahasa telah menghasilkan beberapa buah buku pedoman penggunaan laras bahasa, termasuk bahasa surat rasmi, bahasa laporan, bahasa dalam borang, bahasa saintifik, bahasa pengiklanan, dan bahasa diraja.

Pembakuan aspek bahasa yang baru diusahakan oleh DBP, sesuai dengan matlamat penubuhannya, ialah dalam bidang sebutan yang menghasilkan *Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu* pada tahun 1988. Sebutan baku dilaksanakan

dalam komunikasi rasmi di semua sektor pendidikan bermula pada tahun 1988. *Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu* diterbitkan pada awal tahun 1991.

Program penyusunan dan penulisan sejarah bahasa Melayu yang bermula pada tahun 1086, dan yang dijangka selesai seluruhnya menjelang akhir Rancangan Malaysia Ketujuh, baru dapat menghasilkan lima buah monograf. Seramai 45 orang penyelidik kini mengusahakan 32 judul kajian asas dalam bidang rekonstruksi bahasa, sejarah struktur bahasa, sejarah sosial bahasa, dan sejarah kajian bahasa Melayu.

Program penilaian penggunaan bahasa yang dibuat melalui projek-projek kaji selidik tentang pemasyarakatan bahasa telah menghasilkan laporan kajian pemasyarakatan korpus bahasa Melayu DBP (1987) dan laporan penggunaan bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi (1989). *Laporan Kaji Selidik Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Rasmi dan Bahasa Kebangsaan dalam Bidang Kehakiman dan Undang-undang* (1989-1991) diterbitkan pada awal tahun 1992. Kini, kaji selidik penggunaan bahasa Melayu dalam bidang kewangan dan bank pula diusahakan (1992-1993) untuk meneroka kemungkinan penggunaan bahasa Melayu di sektor awam, iaitu di jabatan kerajaan, telah dibuat khusus di Sarawak dan laporannya diterbitkan pada tahun 1988; dan rancangan sudah dibuat untuk melaksanakan satu lagi kajian di sektor awam secara menyeluruh.

b. Integrasi Nasional melalui Bahasa

Hasrat kerajaan untuk mewujudkan integrasi nasional menerusi bahasa dijayakan oleh DBP dengan projek penyerapan kata-kata bahasa sukuan di Sabah dan Sarawak serta istilah budaya setempat ke dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu baku (1987-1990). Penyediaan kamus bagi bahasa sukuan di Sarawak dan Sabah bermula dengan penerbitan *Kamus Bahasa Iban-Bahasa Malaysia* (1989). Yang sudah diterbitkan termasuk *Glosari Bahasa Malaysia-Bahasa Melanau*, *Glosari Bahasa Malaysia-Bahasa Melayu Sarawak*, dan *Kata Bahasa Sukuan untuk Perbendaharaan Kata Bahasa Malaysia* (1987). Usaha seperti ini akan diteruskan dengan penerbitan pelbagai buku glosari kata dan kamus bahasa sukuan dan istilah yang lain di samping kegiatan-kegiatan sastera dan budaya yang menurutsertakan masyarakat di Sabah dan Sarawak.

c. Pusat Peristilahan Kebangsaan

Fungsi yang dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Peristilahan ialah berusaha membina dan mengembangkan peristilahan untuk memperkaya dan memperlengkap bahasa Melayu baku sebagai bahasa pendidikan, bahasa budaya dan ilmu pengetahuan tinggi, sains dan teknologi, bahasa pentadbiran negara, dan bahasa komunikasi umum. Istilah yang cukup dan tepat menjadi unsur penting dalam pembentukan gaya dan laras bahasa ilmu tinggi.

Sebagai pusat peristilahan kebangsaan, DBP telah berhasil membina, menyelaraskan dan membakukan istilah sesuai dengan permintaan dan keperluan

semasa, termasuk untuk memudahkan kerja penulisan dan penerjemahan karya ilmu pengetahuan tinggi yang kian berkembang.

Perancangan peristilahan pada peringkat awal bertujuan menyediakan istilah-istilah yang sesuai bagi membolehkan bahasa Melayu mengambil alih fungsi bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dalam sektor awam bermula pada tahun 1957. Pada peringkat kedua, perancangan peristilahan berlaku untuk memenuhi keperluan pendidikan peringkat menengah apabila sistem pendidikan menengah dengan mengantar bahasa Melayu bermula pada tahun 1958. Penyelarasan istilah-istilah dalam bidang sains untuk sektor persekolahan berlaku pada awal tahun 1980-an. Fasa ketiga bermula selepas tahun 1972 dan berkembang dengan pesat untuk tujuan menyediakan istilah bagi keperluan pengajian tinggi yang menghendaki semua kuliah tahun satu di pusat-pusat pengajian tinggi menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya bermula tahun 1983. Kini, tumpuan diberikan kepada pembinaan peristilahan bidang profesional.

Istilah-istilah rasmi keluaran DBP sudah tersebar luas dalam penggunaan sejak tahun 1957, dan kini dapat dirujuk dalam 108 buah buku daftar, glosari dan senarai istilah. Sejumlah lebih daripada 350.000 istilah yang terbentuk sehingga kini, termasuk yang disepakati melalui MBIM dan Mabbim, sudah dikemaskinikan dan dapat digunakan dan dirujuk melalui komputer apabila dikehendaki.

Pembentukan dan penyelarasan istilah di DBP sebagai pusat bagi semua kegiatan peristilahan di Malaysia sebelum tahun 1975 dibuat berpedomankan dasar yang dibentuk pada awal tahun 1960-an. Selepas tahun 1975, pembentukan dan penyelarasan istilah mengambil dasar yang lebih radikal dan sesuai dengan dasar perancangan peristilahan baru, iaitu *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang dirumuskan oleh Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. Semenjak pertengahan tahun 1980-an, pembinaan istilah di DBP dilakukan sesuai dengan amalan peristilahan antarbangsa kerana DBP menjadi ahli badan peristilahan antarbangsa, Termnet, yang berpusat di Vienna (Austria). Persidangan Perancangan Peristilhan Antarbangsa, Termplan, yang diselenggarakan oleh DBP di Kuala Lumpur pada 20-22 November 1990 menjadi titik tolak bagi wawasan pembinaan istilah bahasa Melayu yang lebih bersifat antarbangsa.

d. Kerja Sama Kebahasaan Serantau

Kerjasama perancangan bahasa Melayu serantau peringkat kerajaan yang ditangani oleh DBP bermula dalam bidang penyatuan ejaan Rumi bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia pada tahun 1959 yang hasilnya, iaitu Ejaan Melindo, tidak dilaksanakan kerana sebab-sebab tertentu. Kerja sama selanjutnya ialah persetujuan yang menghasilkan Sistem Ejaan Rumi Baru bersama bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pada tahun 1967 yang dirasmikan penggunaannya pada tahun 1972 dan perasmian buku *Pedoman Umum Ejaan* pada tahun 1975. Sistem ejaan Rumi yang kita gunakan sekarang sudah begitu mantap dan tidak harus menimbulkan masalah lagi.

Penubuhan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada tahun 1972 memulakan era baru dalam kerja sama kebahasaan di rantau ini dengan tujuan untuk mengeratkan persefahaman dan mewujudkan persamaan aspek-aspek perancangan bahasa antara kedua-dua buah negara, Malaysia dan Indonesia. Dengan penyertaan negara Brunei Darussalam dalam kerja sama ini, MBIM diperluas menjadi Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) pada tahun 1985. Semenjak tahun 1983, pihak Singapura sering diundang mengikuti sidang MBIM dan Mabbim. Dalam tempoh satu dasawarsa yang lalu, kerjasama ini telah menghasilkan penyeragaman pedoman ejaan dan transliterasi, penyeragaman pedoman pembentukan istilah dan pedoman penyusunan kamus istilah, di samping penyeragaman istilah-istilah ilmu pengajian tinggi dan profesional yang berjumlah lebih daripada 134,000 dalam pelbagai bidang. Selain itu, melalui kerja sama dan hasil kesepakatan MBIM dan Mabbim, dapat diterbitkan 12 buah kamus istilah dalam tempoh tahun 1989-1992 ini, dan beberapa yang lain sedang dikerjakan.

Dalam perayaan menyambut 20 tahun Mabbim, DBP menerbitkan sebelas judul penerbitan hasil kerja MBIM dan Mabbim yang dilancarkan oleh Y.B. Menteri Pendidikan pada 10 November 1992. Dalam majlis tersebut, kita menyatakan harapan untuk memperluas fungsi Mabbim, dan usaha kerja sama serantau ini akan diperluas kepada bidang-bidang bahasa yang lain seperti penyelarasan tata bahasa.

e. Pusat Perkamusan Kebangsaan

Kodifikasi bahasa Melayu diteruskan oleh DBP dengan program penyusunan dan penerbitan kamus ekabahasa Melayu, kamus dwibahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, dan kamus istilah dalam pelbagai disiplin ilmu. Tahun 1992, DBP berjaya menerbitkan lapan jenis/judul kamus umum, iaitu:

- 1) *Kamus Dewan* (1970)
- 2) *Kamus Dwibahasa Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu* (1975).
- 3) Cetakan kedua dan ketiga dengan pembaikan *Kamus Dewan* (1984, 1986)
- 4) *Kamus Pelajar* (1987)
- 5) *Kamus Dewan Edisi Baru* (1989)
- 6) *Kamus Bahasa Iban-Bahasa Melayu* (1989)
- 7) Kamus besar *Kamus Inggeris-Melayu Dewan* yang disusun semenjak tahun 1979 yang terbit pada tahun 1992.

Selain itu, tesaurus yang pertama diterbitkan pada tahun 1990, yaitu *Tesaurus Umum Bahasa Melayu*, hasil usaha sama antara DBP dengan University Sains Malaysia.

Penerbitan kamus yang pertama, *Kamus Dewan*, pada tahun 1970 adalah sebagai memenuhi matlamat terakhir yang termaktub dalam Ordinan DBP tahun 1959.

Sejumlah 11 buah kamus istilah sudah diterbitkan, termasuk *Kamus Istilah Hidrogeologi* (1992). *Kamus Istilah Hidrologi* (1986) dan *Kamus Istilah Hidrometeorologi* (1992) sebagai hasil kerjasama Malaysia dan Indonesia dengan bantuan UNESCO. Kini perhatian sedang diberikan kepada penyusunan 20 judul kamus istilah bidang ilmu

pengajian tinggi dan profesional yang lain yang dijadualkan terbit dalam tahun 1992-1994.

Keperluan kepada sebuah kamus umum bahasa Melayu yang komprehensif amat dirasakan. Untuk ini, usaha sudah dimulakan untuk menyusun *Kamus Besar Bahasa Melayu Dewan* yang dijangka terbit menjelang akhir Rancangan Malaysia Ketujuh. Kamus ini dirancang dapat merakamkan semua perkataan yang pernah digunakan dalam bahasa Melayu dari dahulu hingga kini.

f. Perancangan Pemasyarakatan Bahasa

Usaha pengembangan bahasa Melayu dilaksanakan melalui program pelaksanaan bahasa Melayu dengan tujuan untuk memperingkatkan taraf penguasaan dan memperluas penggunaannya di kalangan semua sektor dan peringkat masyarakat pengguna bahasa di Malaysia. Program ini dilakukan melalui kegiatan penggalakan, penataran, pemulihan, pengawasan, khidmat nasihat, penyemakan dokumen, dan penyebaran bahan pedoman bahasa. Program ini merupakan kegiatan yang berterusan tahun demi tahun yang mendapat sambutan dan permintaan yang kian bertambah daripada pengguna bahasa, terutamanya daripada sektor swasta, yang semakin sedar tentang keperluan penggunaan bahasa Melayu baku yang betul dan bermutu tinggi.

g. Gerakan Cintailah Bahasa Kita

Program Gerakan Cintailah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11 Disember 1987 adalah bertujuan, antara lain, untuk membina kesedaran dan mewujudkan budaya berbahasa kebangsaan di kalangan masyarakat pengguna bahasa di Malaysia. Gerakan yang diadakan pada peringkat pusat dan peringkat negeri ini telah memberikan kesan yang positif kepada beberapa golongan masyarakat pengguna bahasa di negara kita, termasuk sektor perundangan dan kehakiman yang, secara langsung atau tidak langsung, menghasilkan pindaan kepada *Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67* yang menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu di mahkamah bermula pada Jun 1990.

Isu-isu bahasa semasa yang menarik perhatian pelbagai golongan masyarakat dalam beberapa waktu akhir-akhir ini telah memberi kesan kepada perancangan dan pelaksanaan Gerakan Cintailah Bahasa Kita. Oleh itu, DBP akan meneruskan tahap kedua Gerakan Bahasa ini pada tahun 1993-1997 yang akan bertumpu kepada usaha ke arah memperluas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam erti kata yang sebenar-benarnya di samping meneroka kemungkinan memperluas penggunaannya di sektor swasta. Gerakan Bahasa ini perlu dilaksanakan dengan lebih menyeluruh kerana kita percaya bahwa bahasa kebangsaan akan tetap berfungsi sebagai wahana perpaduan nasional dan pembinaan bangsa yang sangat berkesan. Persiapan ke arah ini sedang diusahakan.

h. Perancangan Pengkomputeran Bahasa

Kemajuan dalam bidang teknologi maklumat dan pengkomputeran membawa DBP ke dalam era perancangan dan pemrosesan bahasa melalui komputer. Dengan memulakan projek pengkomputeran istilah pada tahun 1982, kini DBP membina sebuah Pangkalan Data Linguistik Bahasa Melayu yang bertujuan untuk menumbuhkan sebuah pusat dokumentasi bahasa Melayu yang ulung dan terbesar di negara ini.

Pangkalan Data Linguistik Bahasa Melayu dirancang mengandungi tiga komponen utama, iaitu (i) Pangkalan Data Korpus, (ii) Pangkalan Data Leksikon Bahasa Melayu, dan (iii) Pangkalan Data Daftar Induk Bahasa Melayu. Pangkalan Data Korpus menyimpan data teks terpilih dan bersampel yang dapat digunakan bagi kajian linguistik tentang tata bahasa dan laras bahasa Melayu melalui kemudahan sistem analisis teks berkomputer. Pangkalan Data Leksikon Bahasa Melayu menyimpan data memproses maklumat linguistik dan ekstralinguistik tentang setiap kata (kata umum dalam istilah) dalam hubungannya dengan sintaksis, semantik dan logik bahasa Melayu untuk keperluan pembinaan sistem penerjemahan berkomputer. Pangkalan Data Daftar Induk Bahasa Melayu pula menyimpan dan memproses maklumat linguistik dan ekstralinguistik tentang setiap kata (kata umum dan istilah) dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu untuk keperluan kajian linguistik serta pembinaan dan kondifikasi kata dalam perkembangan bahasa Melayu semasa, serta keperluan penyediaan penerbitan pelbagai daftar ejaan, sebutan, kata terbitan, kelas kata, jenis kata, asal kata, sinonim, antonim, ensiklopedia dan tesaurus umum yang kemaskini. Pembinaan sistem dan perisian bersepadu bagi mewujudkan dokumentasi Pangkalan Data Linguistik Bahasa Melayu ini dan proses-proses kerjanya dilaksanakan semenjak tahun 1985 dan dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang akhir dekad 1990-an ini.

Selain itu, proses-proses kerja pembinaan dan pengembangan bahasa yang lain juga dipermoden dengan menggunakan kemudahan komputer. Perancangan Pengkomputeran Bahasa DBP bagi tempoh RME (1991-1995) sudah disediakan yang akan mempercepat dan mempermoden proses-proses kerja penyelidikan dan pendokumentasian bahasa, pembentukan dan pendokumentasian istilah, pendokumentasian data dan penyusunan pelbagai jenis kamus, dan penerbitan pelbagai buku bahasa. Untuk mencapai matlamat pengkomputeran bahasa ini, DBP (Jabatan Bahasa dan Bahagian Komputer) mengadakan kerja sama dengan institusi-institusi pengkomputeran bahasa yang lain di negara ini, khususnya dengan Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia.

Di samping itu, usaha-usaha juga sedang dibuat untuk menjadikan perpustakaan DBP sebagai pusat dokumentasi bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu yang ulung di rantau ini dengan menggunakan sistem berkomputer sepenuhnya.

Satu projek pengkomputeran bahasa yang sudah siap untuk dimasyarakatkan ialah Bank Istilah Berkomputer dalam Talian, atau dikenali dengan nama BIKOMTA, yang mengandungi maklumat padanan istilah bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, dan sebaliknya. BIKOMTA dalam tempoh tahun 1960-1991 yang telah dikemaskini dan diselaraskan sesuai dengan pelbagai keperluan pengguna istilah. Bermula pada

tahun 1993, BIKOMTA akan beroperasi sepenuhnya dan dapat dilaksanakan secara sambungan terus dengan pengguna komputer pribadi atau korporat di luar DBP yang ingin mendapatkan khidmat peristilahan dengan cepat dan tepat.

i. Kerja Sama Kebahasaan Antarabangsa

Kerja sama kebahasaan peringkat antarabangsa yang disertai oleh DBP ialah dalam projek Kerja Sama Antara Negara dalam Terjemahan Automatik (KANTA), yaitu projek penyelidikan dan pembangunan penterjemahan berkomputer Malaysia-Jepun. Fasa pertama projek yang dibiayai sepenuhnya oleh Jepun ini dirancang dapat dilaksanakan dalam tempoh enam tahun (1987-1992). Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menjadi Urus Setia dan Pengarah Projek, dan DBP menjadi penyelidik bersama dengan UTM. Pencapaian DBP sebagai penyelidik pembinaan kamus asas, pembinaan kamus istilah, pembinaan data teks, analisis teks dan penjaanaan teks bahasa Melayu dalam projek ini setakat ini adalah bersesuaian dengan rancangan yang telah ditetapkan oleh pihak Jepun. Projek ini adalah merupakan projek penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang hasilnya bertujuan memperbanyak penerbitan buku ilmu melalui proses penterjemahan berkomputer.

j. Pengembangan Bahasa melalui Penerbitan

Pengembangan bahasa Melayu didukung oleh penerbitan buku serta penggunaannya melalui media massa dan masyarakat pengguna umum. D daripada satu segi, sesuai dengan hakikat ini, penerbitan buku, majalah, jurnal dan bahan bacaan yang sangat berkesan yang diselenggarakan oleh DBP hingga akhir dekad yang lalu. D daripada segi yang lain, pengembangan bahasa Melayu menjurus kepada pemupukan dan penghayatan bahasa Melayu baku yang indah, sopan dan bertradisi agung yang dilahirkan melalui penulisan karya kreatif dan kritikan sastera dalam pelbagai genre.

Sehubungan dengan ini, DBP menjadi penerbit yang ulung dalam penghasilan dan penerbitan bukan sahaja buku dan sastera yang bermutu, tetapi juga buku teks dan ilmu pengetahuan peringkat sekolah, buku ilmiah bagi keperluan pengajian tinggi, dan buku ilmu pengetahuan umum untuk masyarakat.

Penerbitan buku DBP telah berkembang pesat dalam semua bidang sejak diterbitkan naskah pertama (terjemahan) *Anak Raja dengan Anak Papa* pada tahun 1958. Dalam tempoh tahun 1956-1979, DBP menerbitkan 1,127 judul buku pelbagai bidang, terutamanya untuk keperluan sistem pendidikan rendah dan menengah. Dalam tempoh tahun 1980-1991, sejumlah 2,824 judul lagi diterbitkan yang sebahagiannya untuk keperluan pengajian tinggi dan bacaan umum pelbagai bidang. Dengan itu, sejak tahun 1956 hingga akhir 1991, DBP telah menerbitkan sejumlah 3,951 judul buku yang memenuhi semua keperluan pengguna pelbagai peringkat pendidikan dan masyarakat umum. Dalam tahun 1992 ini, lebih kurang 600 judul sudah dan sedang diselenggarakan untuk penerbitan. Perangkaan ini dengan jelas menunjukkan betapa gigihnya kami mengusahakan penerbitan buku untuk

meningkatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan menggalakkan budaya membaca di kalangan masyarakat Malaysia.

Selain itu, penerbitan enam judul majalah bulanan (*Dewan Masyarakat, Dewan Sastera, Dewan Budaya, Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Pelita Bahasa*) dan beberapa jurnal, termasuk *Kanun* (bermula 1989), memesatkan dan memperluas penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang, genre, laras, dan gaya. Insya-Allah, pada awal tahun 1993, akan terbit pula *Dewan Kosmik*, majalah khusus yang akan mengetengahkan dan memantapkan laras bahasa ilmu sains dan teknologi.

4. Dasawarsa 1990-an yang Mencabar

Dasawarsa 1990-an sangat mencabar kerana ia memulakan dekad pertama pelaksanaan Wawasan 2020 yang akan menentukan arah aliran pembinaan bahasa Melayu dalam hubungannya dengan pembinaan negara bangsa Malaysia yang maju.

DBP akan mengusahakan agar bahasa Melayu baku terbina dan berkembang dengan segar dan pesat serta mengatasi perkembangan bahasa-bahasa lain di Malaysia. Dalam Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995) dan seterusnya, program pembinaan korpus bahasa dan kondifikasi bahasa akan dipertingkatkan dengan memberikan perhatian kepada usaha untuk memperengkap dokumentasi bahasa Melayu bagi tujuan penyelidikan linguistik dan sosiolinguistik, pembentukan istilah, penyusunan buku bahasa, penyusunan kamus dan tesaurus, dan penyebaran maklumat bahasa Melayu baku bagi pelbagai pengguna sasaran dengan lebih cekap, pesat, dan berkesan.

Sokongan dan kerja sama daripada badan dan orang perseorangan di dalam dan luar negeri akan terus dipohon dan dijalin untuk mencapai matlamat perancangan bahasa Melayu dan sastera kebangsaan yang diselenggarakan oleh DBP. Kita berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyokong dan bekerja sama dengan DBP selama ini, khususnya kepada pihak-pihak tertentu di sektor awam, pusat pengajian tinggi dan badan dokumentasi, badan penyelidikan dan penerbitan bahasa yang telah menyumbangkan khidmat kepakaran mereka dalam pelbagai jenis jawatankuasa dan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa, sastera dan penerbitan buku di DBP. Pihak pertumbuhan bahasa/sastera/buku juga banyak menyumbang kepada kegiatan DBP, antaranya Persatuan Linguistik Malaysia, Persatuan Penterjemah Malaysia, Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena), dan Majlis Buku Kebangsaan.

Dalam dekad baru ini, bahasa Melayu akan muncul bukan sahaja sebagai bahasa rasmi, bahasa pendidikan, bahasa budaya tinggi sains dan teknologi, dan bahasa kebangsaan yang bermaruah di Malaysia, tetapi juga sebagai bahasa utama yang akan mendapat tempat di negara-negara rantau ini. Harapan ini perlu disokong dengan bukti dan kesungguhan kita menanganinya secara terancang dan terarah. Untuk tujuan ini, kita perlu menilai prestasi pelaksanaan dan perancangan bahasa sehingga akhir tekad yang lalu dengan seksamanya dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dengan sewajarnya supaya perancangan bahasa dalam tempoh menjelang abad ke-21

dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai matlamatnya. Hal ini penting untuk menjamin keberkesanan perancangan dan pelaksanaan bahasa dalam menuju Wawasan 2020.

Dasar Bahasa Negara yang tersirat dalam Perlembagaan dan Akta Bahasa Kebangsaan memperlihatkan bahawa Malaysia sebuah negara yang mempunyai satu bahasa kebangsaannya seperti kebanyakan negara lain tetapi mengamalkan penggunaan pelbagai bahasa. Undang-undang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu digunakan bagi maksud-maksud rasmi kerajaan (kerajaan pusat, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun; termasuk urusan dengan sektor swasta) sahaja yang tidak mencakupi pengurusan di sektor swasta. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan pula berfungsi sebagai bahasa pemersatu antara kaum dalam urusan komunikasi umum, tanpa menyekat penggunaan, pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa suku kaum dan bahasa-bahasa lain dalam urusan-urusan harian dan urusan-urusan bukan rasmi yang lain, serta menjadi lambang identiti negara.

Peranan DPB dalam dekat ini amat mencabar kerana, pada teorinya, kewibawaan dan kejayaan pembudayaan bahasa baku adalah mencerminkan kewibawaan dan kejayaan DGP yang dipertanggungjawabkan tugas perancangan bahasa. Banyak usaha yang dapat dilaksanakan dan tujuan ini, DPB akan memberikan perhatian yang lebih serius kepada dua perkara pokok dalam proses pembudayaan bahasa baku serius kepada dua perkara pokok dalam proses pembudayaan bahasa baku ini, iaitu (i) pemantapan unsur-unsur bahasa baku, dan (ii) penyebaran maklumat bahasa baku itu.

Peranan DPB dalam perancangan aspek bahasa bagi pembinaan bahasa rasmi sudah selesai menurut perkembangan masa. Tugas DPB dalam bidang ini pada tahap awal ialah menyediakan infrastruktur dan kemudahan bahasa seperti istilah dan kaedah surat-menyurat rasmi supaya dapat mengalihkan penggunaan fungsi bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu dalam pentadbiran dan urusan kerajaan. Perkembangan selanjutnya lebih banyak bergantung kepada penggunaan sebenar di sektor awam yang telah berlaku sehingga akhir dekad yang lalu. Walau bagaimanapun, DPB masih ada peranannya dalam proses pembudayaan bahasa rasmi ini. Sesuatu yang pasti ialah bahwa kita tidak akan membiarkan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain terus-menerus mencemari kedaulatan dan keutuhan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Untuk ini, seandainya sikap pengguna bahasa menjadi kendala, sikap itulah yang harus dikikis. DPB dapat memainkan peranan menasihati dan mempengaruhi pimpinan sektor awam agar golongan pentadbir dan pegawai atasan menjadi teladan bagi pelaksanaan bahasa rasmi sepenuhnya di sektor awam.

Peranan DPB dalam bidang pembudayaan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan formal sudah lama bermula, iaitu dari awal penubuhan DPB, dengan pelbagai usaha penerbitan buku teks mata pelajaran bahasa Melayu dan buku teks pelbagai mata pelajaran yang lain, serta buku rujukan dan bacaan tambahan, untuk keperluan sekolah rendah, menengah, vokasional dan teknik. Tugas ini telah

dilaksanakan oleh DBP dengan cukup berjaya walaupun terpaksa bersaing dengan penerbit-penerbit lain. Penerbitan buku ilmu dalam bahasa Melayu untuk keperluan pengajian tinggi pun dapat dilaksanakan walaupun hasilnya tidak mencukupi. Kini, DBP berjaya menerbitkan sejumlah lebih kurang 4,000 judul buku dalam pelbagai bidang bagi pelbagai peringkat pembaca; sebahagian besarnya untuk sektor pendidikan.

Kini, menjelang abad ke-21, fungsi utama DBP ialah untuk menyertai usaha "pembudayaan bahasa Melayu tinggi" yang berlaku serentak dengan "pembudayaan ilmu tinggi" sebagai wahana untuk merealisasikan matlamat dan cita-cita dasar pendidikan negara yang baru dan matlamat hendak membina manusia Malaysia yang berilmu. Ternyata bahawa DBP perlu merancang penerbitan karya-karya ilmu pengetahuan tinggi yang dapat memberi sumbangan besar kepada pemikiran masyarakat melalui buku-buku sains dan kemasyarakatan. Kita akan melihat penerbitan karya-karya asli dan terjemahan daripada pemikiran dan falsafah Islam, daripada pemikiran dan falsafah tamadun-tamadun dunia yang besar dan klasik, daripada sejarah dan kebudayaan Melayu dan serantau yang memperlihatkan keagamaan dan kemurnian seni, sastera dan budaya serta tradisi kita, dan daripada kemajuan sains dan teknologi baru ciptaan dunia antarabangsa.

5. Penutup

Tugas DBP untuk terus berusaha membina dan mengembangkan bahasa Melayu di Malaysia merupakan tugas dan cabaran yang amat besar. Usaha untuk meletakkan bahasa Melayu ke tahap yang setinggi-tingginya bukan sekadar perlu diteruskan, bahkan menjadi strategi perancangan bahasa yang harus diutamakan kini. Yang diperlukan bukan sekadar memperbanyak atau memperkuat Akta Bahasa untuk tujuan melindungi status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahkan melahirkan usaha yang serius bagi membentuk satu tradisi budaya hidup negara melalui penggunaan bahasa kebangsaan dengan sepenuhnya secara artikulat dan berkesan. Tidak cukup kiranya pembinaan infrastruktur bahasa Melayu terus menerus dilaksanakan tanpa perimbangan dengan usaha melahirkan satu generasi pengguna bahasa yang mampu menghasratkan bentuk pengucapan intelektual dan kreatif. Untuk mencapai tujuan ini, kita memerlukan satu perancangan pembangunan mental dan sosial yang berakar umbi dan berfalsafah kebangsaan serta kenegaraan, bukan sekadar menerjemah apa-apa yang selama ini telah kita pelajari dan kecapi daripada sistem penjajah dan dunia moden barat. Kita perlu meningkatkan keyakinan bahawa pemantapan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa utama negara, dan kesempurnaan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu dan bahasa pengucapan budaya tinggi menjadi prasyarat kepada pembinaan dan pemupukan suatu peradaban bangsa yang moden dan berkepribadian tinggi.

Usaha DBP untuk membina dan memupuk bahasa Melayu ke tahap yang dicitakan sebagai bahasa pengucapan ilmu dan budaya moden berarti kita juga bertekad untuk memperlengkap dan menyediakan bahasa tersebut dalam menghadapi

kemungkinannya menjadi bahasa perhubungan antarbangsa, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Bukan suatu hal yang mustahil untuk merealisasikan kemungkinan ini. Melihat arus perkembangan bahasa Melayu di rantau nusantara dewasa ini, DBP cukup yakin pada kejayaan merealisasikan bentuk bahasa Melayu yang bersifat supranasional, seperti yang tercetus pada usaha pemufakatan kebahasaan yang cukup gigih antara tiga negara, Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dalam mencari dan menyatukan ciri-ciri kesamaan.

Kita amat berharap bahawa melalui usaha kerja sama kebahasaan yang kini didukung oleh kegiatan Mabbim, satu ragam bahasa Melayu tinggi yang bertaraf bahasa intelektual, yang dapat berfungsi sebagai bahasa untuk pertumbuhan dan pengembangan ilmu, pemikiran, dan teknologi, akan dapat direalisasikan pada masa muka. Ragam bahasa yang demikian akan menjadi alat pengucapan bersama para ilmuwan, budayawan, teknokrat, pendidik, dan pelajar tidak kira di mana mereka berada asalkan bidang dan ruang perbicaraan melibatkan persoalan ilmu dan pemikiran budayatinggi. Dalam hubungan inilah DBP berkeyakinan bahawa Mabbim masih punya kewibawaan menjadi badan perancang bahasa peringkat serantau yang amat penting untuk membina satu ragam bahasa Melayu tinggi yang dapat kita manfaatkan bersama serta memenuhi cita-cita untuk menjadikan bahasa kebangsaan kepunyaan kita ini sebagai satu bahasa perhubungan antarbangsa yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Hasan. 1987. *30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Asmah Haji Omar. 1992. *The Linguistic Scenery in Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Farid M. Onn. "Pembinaan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Negara Malaysia Dalam Menghadapi Cabaran Peradaban Modern: Realiti dan Visi". Kertas kerja Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya, IKIP, Medan, 21-22 Desember 1990.
- Hasan Ahmad. 1988. *Bahasa, Sastra, Buku: Cetusan Fikiran Hassan Ahmad*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Raja Mukhtaruddin Raja Mohd, Dain. 1992. *Pembinaan Bahasa Melayu: Perancangan Bahasa di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rubin, J. dan Bjorn H. Jernudd (Eds.). 1975. *Can Language Be Planned?* Hawaii: The University of Hawaii Press.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam Perkembangan Bahasa Melayu di Malaysia
Pemakalah : Farid M. Onn
Pemandu : Harimurti Kridalaksana
Pencatat :

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** T. Fatimah Djajasudarma, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
Adakah politik bahasa nasional yang ikut memperkuat bahasa Melayu? Apakah mungkin adanya internasionalisasi bahasa-bahasa di ASEAN melalui pemanfaatan hasil teknologi lewat satelit dsb.? Mungkin ini bisa menjadi usulan dari kongres. Ini untuk internasionalisasi melalui pemanfaatan hasil-hasil teknologi modern.

Jawaban:

Ada kendala yang makin menonjol. Karena itu, pejuang bahasa di Malaysia sudah mulai menyatakan hasrat untuk hal ini. Sekarang ini sedang dirancang seminar besar, semacam kongres ini. Pemimpin negara juga hadir untuk membenarkan amanatnya. Dalam hubungan ini, kita ingin melihat ke arah mana kita mau dibawa dalam bahasa kita ini. Juga dalam hubungan yang berlaku dari segi pembinaan kemajuan negara yang dihubungkan dengan ekonomi. Jadi, dalam hal ini, jelas kedudukan kita ke arah mana akan dibawa.

Poin kedua saya setuju sekali. Di Malaysia sering disebut-sebut menjadi Pusat Komunikasi. Jadi, dalam konteks ini saya pikir dengan adanya kemudahan yang begitu canggih sewajarnya kita pergunakan bahasa Melayu. Tidak tampak mengapa bahasa Melayu ini tidak boleh menjadi bahasa Indonesia. Juga di Brunei bahasa Melayu kita gunakan sebagai alat penting dalam hubungan komunikasi, dan setelah kita begitu kuat, tentu saja nanti akan diterima sebagai bahasa antarbangsa terutama di PBB dan ini harus kita tunjukkan.

2. **Pertanyaan:** Rahmadia, IKIP Muhammadiyah Ujung Pandang

Dari pembicaraan tadi ternyata bahasa Indonesia banyak dipakai di sana, bahkan juga dalam surat kabar. Apakah tidak lebih baik dikembangkan saja bahasa Indonesia di Malaysia supaya Malaysia Indonesia mempunyai satu bahasa.

Jawaban:

Kenapa tidak dijadikan saja bahasa Indonesia? Suara-suara di sana malah sebaliknya disebut bahasa Melayu. Jangan salah anggap, bukan berarti bahasa Indonesia itu begitu keseluruhan, yang saya sebut tadi istilah-istilah lain. Sebenarnya masih kita anggap sebagai apa bahasa itu datang dari asas yang sama tidak ada bedanya. Saya menggunakan cara tersebut. Ada usaha di sana untuk mengenai sebutan baku sebagai sebutan resmi dan sekarang sudah sampai ke tingkat sekolah. Sebutan itu bergantung pada siapa yang menjadi menteri penerangan.

3 **Pertanyaan:** Awang Mataim Bakar, University Brunei Darussalam

Sesudah mengikuti sesi kita sekurang-kurangnya telah terdapat gambaran tentang perkembangan bahasa di Malaysia. Fokus pembicaraan lebih mengutamakan perkembangan dari segi korpusnya. Hal yang menarik perhatian saya ialah segi kata majemuk, yaitu sistem pengejaan kata majemuk. Memang hal itu terdapat dalam tata bahasa dewan. Kalau dulu ada 29 kata majemuk, dalam tata bahasa dewan sekarang telah berubah menjadi 15. Yang menarik perhatian saya, beberapa kata, misalnya *alat tulis*, yang dulu dipisahkan sampai suatu ketika, kemudian digabungkan dan sekarang dipisahkan. Jadi, dalam buku itu tidak ada penerangan. Dalam kesempatan ini mohon penerangan apakah yang menyebabkan gejala bahasa itu.

Jawaban:

Yang 29 kata diturunkan menjadi 15 sebenarnya bukan diketepikan begitu saja sebab dalam 29 itu ada perkataan seperti *apabila*, dan *bilamana* kita anggap kata sendi atau kata gabung yang secara ejaan demikian. Ini tidak termasuk kumpulan kata majemuk atau kata yang digabungkan. Jadi, itu kita ketepikan sehingga benar-benar kata majemuk yang menimbulkan pertanyaan, digabungkan atau dipisahkan. Dulu *alat tulis* dipisahkan. Zaman penggunaan bahasa yang umum saja, penggunaan yang coba-coba kami memikirkan kalau perkara ini sudah ada pakar bidang yang mencadangkan. Kalau ada tiga kata atau empat kata mau dieja macam bahasa Jerman, tentu bentuk bahasa Melayu tidak ada lagi. Jadi *alat tulis* ditulis terpisah karena akan dikembalikan kepada gaya penulisan ejaan bahasa Melayu yang sebenarnya dan ini sesuai dengan Mabbim.

4. **Usul:** Mayong Maman, Jakarta

Saya ingin mengusulkan agar arah perencanaan bahasa kedua bahasa itu bisa berjalan efektif. Umpamanya, dalam siaran pembinaan bahasa Indonesia di televisi yang diadakan setiap minggu. Bagaimanapun bahasa pejabat itu sangat efektif atau mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Oleh karena itu, saya mengusulkan sekali-sekali ataupun satu kali dua bulan ada dialog yang diperankan atau dimainkan oleh pejabat tinggi. Saya kira, bahasa mereka sangat efektif mempengaruhi

keinginan yang dimaksudkan para pakar kedua bahasa. Hal semacam ini juga dilaksanakan di Malaysia.

Jawaban:

Saya sangat setuju dengan pendapat itu.

5. Usul: Ahmad Samin Siregar, Universitas Sumatera Utara

Selama ini informasi mengenai Indonesia di Malaysia cukup banyak. Akan tetapi, informasi mengenai Malaysia di Indonesia sulit sekali kita dapat. Ada kendala memasukkan buku dari Malaysia ke Indonesia, tetapi tidak ada kendala memasukkan buku dari Indonesia ke Malaysia. Karena kita ini akan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, bagaimana usaha kita supaya arus buku dari Malaysia itu bisa masuk ke Indonesia. Usul kami, mohon agar ada keseimbangan arus buku dan perlu dibuat aturan-aturan. Kami dengar hal itu pernah dibicarakan di tingkat menteri, tetapi tidak jalan.

Jawaban:

Saya kira ini masalah dalam negara Indonesia. Usul Bapak akan kami catat sebagai saran dalam kongres ini.

6. Usul: Nasrudin, IKIP Ujung Pandang

Berdasarkan fakta, ada persamaan budaya Malaysia dan Indonesia. Ada titian muhibah di televisi, tetapi tidak ada titian bahasa. Orang Indonesia yang menonton film Malaysia sering mengeluhkan film-film Malaysia cukup menarik, informatif, tetapi informasi tidak sampai karena banyak tidak mengerti bahasa Malaysia. Dalam hal ini, saya usul kalau bisa disiapkan suatu program, entah bagaimana caranya supaya ada titian bahasa Malaysia di televisi atau dengan cara lain.

Jawaban:

Apa saja usaha untuk kerja sama itu baik. Mabbim yang pertemuannya satu kali setahun hingga sekarang masih membicarakan istilah, walaupun dalam pertemuan bulan Februari nanti di Brunai akan masuk dalam bidang-bidang sastra dan ilmu-ilmu sosial sains. Bidang sains sudah tamat. Istilah sains dan teknologi akan selesai tahun 1994. Semua subbidang yang dikerjakan itu dianggap selesai walaupun sebenarnya ilmu ini tidak ada habisnya. Akan tetapi, jika dihubungkan dengan istilah untuk bidang subbidang sains dan teknologi, kita katakan sudah cukup menangani segala-galanya. Kita sekarang masuk dalam bidang sosial sains dan kemasyarakatan. Ini saya rasa akan ada jalan menemukan budaya bahasa. Bahwa kita pun bersedia membicarakan hal tata bahasa, bagaimana melihat tata bahasa. Kalau boleh jangan terlalu jauh bedanya. Ini suatu perkiraan yang wajar.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DI BRUNEI DARUSSALAM

Awang Muh. Amin bin Begawan Pehin
Khatib Paduka Awang Haji Sirat
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam

"... oleh karena Baginda memahami akan hakikat bahasa dan budaya sebagai nilai yang mencerminkan bangsa, Almarhaum¹ dengan gigih dan tanpa sebarang kewahaman telah mempertahankan identiti dan ciri-ciri budaya Melayu Breunei. Almarhum telah menempatkan bahasa Melayu di tingkat yang tinggi di dalam pentadbiran negara dengan memaktubkannya di dalam Perlembagaan sebagai bahasa Rasmi Negara, dan menguatkuasakan bagi semua undang-undang juga ditulis dalam bahasa Melayu..."¹ (Pelita Brunei, 29 Oktober 1986)

Di luar dari negara Indonesia yang kaya dengan tradisi dan budaya adalah dikagumi bahawa sudah lebih setengah abad negara ini telah menunjukkan sifat prihatin terhadap kewujudan satu bahasa yang mampu mendukung cita-cita nasional khusus bagi tujuan perpaduan serta pemupukan budaya dan pengenalan bangsa Indonesia. Di Brunei Darussalam ketetapan di dalam Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 1959, khusus bagi istilah *rasmi* untuk dua perkara iaitu *agama* dan *budaya*, disambut oleh rakyat dengan hati yang amat selesa dan menggembirakan. Dapat difahami bahawa agama rasmi, iaitu Islam, akan menentukan nilai budaya dan kehidupan serta survival bangsa yang melibatkan sistem peraturan dan perundangan negara, siasah, dan juga sebagai asas pembentukan sistem ekonomi dan pendidikan negara. Bahasa rasmi, iaitu bahasa Melayu, merupakan identiti utama bagi bangsa dan kebudayaan Melayu. Bahasa akan tetap kekal sebagai alat utama untuk memelihara dan mempertahankan peradaban Melayu dan mampu untuk menunjangi semangat dan sifat nasionalisme orang Melayu Brunei.

Saya tertarik dengan soalan pertama daripada pihak panitia Kongres yang mengajukan persoalan *seberapa jauh bahasa Melayu di Brunei Darussalam telah memperoleh kedudukan yang mantap baik sebagai bahasa negara maupun sebagai bahasa nasional?*" Mengikut jangkakan peratus (*percentage*) belumlah dapat dikatakan seratus peratus (100%). Akan tetapi, sebagaimana sifat bahasa itu sendiri, iaitu dinamis, usaha yang berunsurkan dinamisme juga telah dan sentiasa dilaksanakan. Mengikut sejarah,

iaitu dengan berlatarbelakangkan sistem pendidikan awal di Brunei,² perkembangan sastra lisan³ dan tulisan⁴ baik dalam bentuk tradisi⁵ mahupun moden⁶ dan persuratan-persuratan rasmi,⁷ bahasa Melayu telah menjadi perhatian utama apabila adanya ura-ura untuk menggubal Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei dalam tahun 1950-an. Bertolak dari kesedaran itu dan bersesuaian dengan iklim sosio-politik negara Brunei, satu peruntukan dalam Bab82(1) dan (2) telah menetapkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa *rasmi negara*. Untuk melaksanakan peruntukan tersebut, kerajaan telah mempertingkatkan usaha agar bahasa Melayu dapat diselaraskan penggunaannya dan mungkin juga sebagai satu alat untuk merangsang kebangkitan "nasionalisme" terutama untuk tujuan melengkapkan orang-orang Brunei dengan ilmu pengetahuan agar berkeupayaan mencapai tahap intelek yang wajar sesuai dengan perkembangan semasa dan evolusi pemikiran pada waktu itu.

Sejak Perlembangan Bertulis, 1959, pihak kerajaan pada masa itu benar-benar mengambil perhatian yang serius terhadap bahasa Melayu dan pagedaran surat-surat keliling merupakan "langkah yang amat besar artinya dalam memberikan peranan kepada bahasa Melayu bagi mengambil alih peranan bahasa Inggeris secara berperingkat-peringkat" (Haji Ahmad Kadi, 1991).

Zaman selepas pendudukan Jepun merupakan titik bertolak untuk memulakan langkah-langkah bagi memajukan bidang-bidang terutama bidang pentadbiran, pendidikan, ekonomi dan sosio-budaya secara menyeluruh. Di bidang pendidikan umpamanya, dengan "tertubuhnya sekolah Inggeris selepas tahun 1951 di Brunei Darussalam, ianya merupakan satu cabaran kepada kedudukan bahasa Melayu, dan adalah disedari kemajuan persekolahan aliran Inggeris amat cepat jika dibandingkan dengan persekolahan Melayu" (Matassim, 1988). Sebenarnya pada masa itu, dalam konteks Negara Brunei Darussalam, "tidak ada satu revolusi pendidikan moden dalam bahasa Melayu disebabkan kekurangan bahan-bahan dalam bahasa Melayu dan ahli-ahli pendidikan moden Melayu" (Amin, 1987). Semua ini secara langsung tidak mendorong kecepatan proses kemajuan bahasa Melayu sendiri.

Walau bagaimanapun, ada beberapa faktor yang boleh dijadikan asas untuk menyegerakan usaha mengangkat taraf kedudukan bahasa Melayu. Pertama ialah kesedaran anak-anak tempatan setelah menerima pendidikan di luar negeri terutama di kalangan mereka yang pernah melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaya. Boleh dikatakan mereka turut terpengaruh dengan semangat kebangsaan dari guru-guru mereka, terutama Cikgu Harun Mohd. Amin. Mereka juga merupakan nadi penggerak kepada penubuhan sebuah organisasi nonpolitik yang memperjuangkan semua aspek kehidupan masyarakat Melayu Brunei. Pertubuhan itu dikenali sebagai Barip (Barisan Pemuda). Kedua, isu bahasa boleh dijadikan alat untuk membangkitkan semangat nasionalisme Melayu. Sebagai contoh, sebuah organisasi politik Brunei yang bergiat dalam tahun 1950-an, iaitu Partai Rakyat Brunei, pernah menyuarakan dalam Kongres Partai Rakyat yang pertama tentang pentingnya bahasa Melayu.

"Kongres itu telah mengambil keputusan menyokong keputusan yang telah diambil oleh Kongres Pemuda di Malaya baru-baru ini berazam kepada satu negara: dan telah menetapkan supaya bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan atau bahasa Nasional". (Mikrofilem DBP)

Ketiga, kesedaran telah wujud disebabkan oleh adanya tanda-tanda taburan penduduk yang semakin meningkat akibat daripada gejala pertumbuhan pembangunan. Ini adalah satu hakikat yang mesti diterima, setidak-tidaknya untuk ramalan jangka masa panjang. Bayangkan sahaja keadaan negara yang berbilang kaum yang sudah tentu mengalami kepelbagaian budaya dan citarasa hidup. Kadang-kadang terpaksa beberapa persoalan ditimbulkan, seperti "mengapakah terdapat masalah bagi bahasa rasmi di sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum" dan "mengapakah rakyat yang berbilang kaum itu sukar menerima satu bahasa rasmi bagi negara mereka? Persoalan ini barangkali boleh terjawab melalui pandangan begini.

"Soal sebenar yang menyebabkan timbul masalah bagi bahasa rasmi di sebuah negara yang rakyatnya berbilang kaum itu sukar menerima satu bahasa menjadi bahasa rasmi negara adalah berakar umbi kepada sikap fanatik dalam memelihara apa yang dinamakan kebudayaan dan pandangan hidup masing-masing sehingga, kerana sikap fanatik begini, menjadikan mereka tidak dapat menerima dengan pengertian baik tentang keperluan negara kepada satu bahasa rasmi sahaja, malah mereka tidak dapat menimbulkan kesedaran yang baik terhadap cita-cita nasional" (Badaruddin Haji Othman, Bahana, DBP).

Secara ringkas, persoalan seberapa jauh bahasa Melayu memperoleh kedudukan mantap tetap menjadi satu isu penting untuk dihalusi. Secara rasmi, bahasa Melayu tetap dan akan kekal disebut *bahasa rasmi* selagi tidak ada perubahan berlaku dalam peruntukan yang termaktub di dalam Perlembagaan. Persoalan kedua ialah "*faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat perkembangan bahasa Melayu di Brunei Darussalam?*" Ketegasan secara positif, berpandukan kepada keluhuran dan kemurnian budaya bangsa, mendorong kerajaan bertindak sesegeranya untuk mengisi keperluan-keperluan tertentu demi kepentingan pembangunan yang bersifat nasional. Soal bahasa tidak dikecualikan. Sebagai langkah awal, Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan dengan tujuan agar jabatan ini "*berusaha dan berikhtiar untuk memperkembangkan dan meninggikan bahasa Melayu.*" Tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka, kegiatan-kegiatan kebahasaan dan kesusasteraan serta penerbitan telah berjalan secara terarah. Kita tentu sudah maklum bahawa kemampuan bahasa Melayu itu belumlah dapat menyaingi kemampuan bahasa Inggeris terutama di bidang keilmuan. Walau bagaimanapun, usaha tetap berjalan agar keseimbangan dapat dicapai sekurangnya untuk memelihara agar bahasa Melayu dapat digunakan dengan baik, berfungsi dalam bidang pendidikan, dan berupaya sebagai alat komunikasi utama di peringkat nasional.

Di pihak lain pula, menyahut baik ketegasan kerajaan itu. Dalam tahun 1962, lahir sebuah persatuan yang dinamakan *Asterawani*. Di antara tujuan besar persatuan itu ialah "memperluas dan mempertingkatkan penggunaan bahasa Melayu, kegiatan-

kegiatan kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional.

Sekarang kita lihat pula faktor-faktor yang menghambat perkembangan bahasa Melayu. Yang jelas ialah kehadiran bahasa Inggeris. Selain itu, bahasa Cina juga turut mencemari kewibawaan bahasa Melayu. Soal bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dan bahasa perhubungan antarabangsa tidak dinafikan. Cuma yang menyedihkan ialah orang-orang yang terlalu berkiblat kepada bahasa itu kadang-kadang langsung tidak mempunyai daya rangsangan untuk terlibat mengembangkan bahasa Melayu baik secara lisan mahupun secara tulisan. Kehadiran masyarakat minoriti Cina, sebuah masyarakat yang amat aktif dalam bidang perusahaan dan perdagangan, sedikit sebanyak menyebabkan berlaku pencemaran bahasa. Contohnya ialah mereka sewenang-wenangnya menggunakan bahasa Cina pada papan-papan tanda perniagaan. Walau bagaimanapun, untuk mengatasi perkara ini langkah-langkah ketegasan dijalankan seperti

1. mengadakan perarakan bagi menyambut bulan bahasa (23.7.1962) yang disertai oleh pelbagai kaum dan masyarakat di seluruh negara;
2. mengadakan Pengarah dengan wakil-wakil Syarikat Perniagaan dan Bank;
3. mengadakan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan Dewan Perniagaan Tionghua;
4. mengadakan pengarah dengan pengiklan dan pembuat papan tanda.

Untuk melihat ketegasan yang dinyatakan itu, *Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam* telah bertitah seperti berikut.

"Pembentukan identiti kebruneian melibatkan beberapa perkara yang mustahak supaya diutamakan. Di antaranya ialah bahasa rasmi negara, yakni bahasa Melayu, dan adat-istiadat, yakni adat resam orang-orang Brunei serta kebudayaannya."

"Dalam perkara bahasa Melayu ini, beta ingin meningkatkan kepada rakyat dan penduduk di negeri ini yang berketurunan Tionghua, supaya mereka mempelajari bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus serta menggunakannya pada setiap masa, sebagai satu bukti taat setia yang tulen dan sebenarnya kepada Negeri Brunei ini; supaya mereka tidak akan dicurigai oleh rakyat Brunei yang terdiri dari penduduk-penduduk tempatan negeri ini. Dengan amalan sedemikian, maka orang-orang yang berketurunan Tionghua di negeri ini akan dapat membuktikan yang mereka mempelajari bahasa Melayu bukan setakat hanya untuk mendapatkan taraf kerakyataan Negeri Brunei, malahan menerima dan mengakui bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara dan menggunakan pada setiap waktu."

(Titah semasa Majlis Kesyukuran Sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Ke-36

yang diadakan oleh Dewan Perniagaan Tionghua Brunei pada 1 September 1982).

Soalan seterusnya ialah "usaha apa yang perlu dilakukan untuk lebih memantapkan kedudukan bahasa Melayu di Brunei Darussalam," Jawabannya ialah kesedaran yang secara total perlu ada. Usaha untuk menyedarkan harus dipertingkatkan sistem pendidikan atau kurikulum pendidikan harus menilai bahawa bahasa Melayu itu amat penting sepenting bahasa Inggeris. Lebih jauh daripada itu, Majlis bahasa serantau, iaitu Mabbim, harus lebih aktif untuk terus mempergiat pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Undang-undang yang boleh mengawasi dan mengawal kedudukan dan status bahasa Melayu hendaklah diadakan serta dilaksanakan oleh semua pihak dengan keyakinan dan kematangan. Itulah jawapan ringkas bagi mencapai hasrat untuk memantapkan kedudukan bahasa Melayu di Brunei Darussalam.

Simpulan

Sebagai penutup cerita, jawapan kepada persoalan "seberapa jauh bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dapat dijadikan bahasa perhubungan antarabangsa di kawasan Asia Tenggara dan langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh ke arah itu" adalah seperti urutan begini.

"Bahasa Melayu boleh dituturkan dan difahami oleh lebih kurang 200 juta orang di rantau ini. Sejak beberapa dekad yang lalu usaha-usaha melalui "perekayasaan" (engineering) bahasa atau lebih diiktiraf sebagai perancangan bahasa telah berjalan dengan terarah. Perancangan Bahasa Melayu tidak sahaja dilihat dari sudut pembinaan korpus bahasa malahan dari segi pengembangannya dalam masyarakat yang melibatkan proses penyebaran dan penggunaan bahasa itu dalam pelbagai bidang kegiatan.

Di Malaysia, umpamanya, "bahasa dibina dan dikembangkan sebagai salah satu alat pembangunan negara, alat pendidikan, alat pengembang ilmu dan perpaduan bangsa yang cukup penting. Apabila alat ini, iaitu bahasa, "cekap", "cukup", dan "diterima masyarakat" maka berjayalah bahasa itu memainkan peranannya sebagai alat pembangunan negara". (Prof Datuk Ismail Hussein - Pengantar "Bahasa Sastera Buku - Cetusan Fikiran Hassan Ahmad, DBP, 1988).

Di Indonesia, kesimpulan umum (Keputusan Kongres Bahasa IV, Jakarta, 21-26 November 1983) telah dibuat bahawa, "Apabila dilihat dari saat lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 sampai dengan saat perkembangannya dewasa ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat. Fungsi bahasa Indonesia telah makin mantap, tidak hanya sebagai alat komunikasi sosial dan administratif tetapi juga sebagai alat komunikasi ilmu dan keagamaan. Ini bererti bahawa bahasa Indonesia telah memiliki poros inti yang cukup besar dan cukup terpadu, yang memungkinkan

manusia dari satu latar belakang bahasa di Tanah Air berkomunikasi dengan manusia dari latar belakang bahasa yang lain. Sebagai alat penyebar ilmu, bahasa Indonesia telah dapat pula menjalankan fungsinya dengan baik, yang terbukti dengan makin banyaknya buku ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia".

Di Brunei Darussalam, bahasa Melayu akan tetap dibina sebagai budaya bangsa malahan akan terus dikembangkan sebagai alat peningkatan ilmu dan dapat digunakan dalam pelbagai bidang kegiatan.

Dengan jumlah penduduk Melayu yang cukup besar, Singapura juga tentu tidak terkecuali dan tidak akan dikecualikan untuk sama-sama terlibat dalam proses pengembangan bahasa Melayu.

Jadi adalah jelas, bahasa Melayu, setelah kesedaran timbul di kalangan cendekiawan dan ilmuan termasuk ahli-ahli politik dan mereka yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem pemerintahan, mempunyai potensi yang amat besar untuk menjadi bahasa dunia menjelang dekad-dekad mendatang. Walaupun demikian, beberapa syarat perlu dilalui. Bahasa Melayu tidak dapat dikatakan sudah kukuh semata-mata kerana terciptanya ribuan istilah, terhasilnya kamus dan buku-buku tatabahasa sekiranya bahasa Melayu tidak dikembangkan melalui penulisan atau buku dalam pelbagai bidang ilmu".

CATATAN

1. Almarhum Sultan Omar Ali Saifuddein Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Brunei Darussalam yang Ke-28 dan memerintah 1950–1967. Baginda digelar sebagai Arkitek Brunei Moden, Penyair Diraja dan ahli siasah yang mempunyai visi yang tajam.
2. Titah Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang Ke-29.
3. Pendidikan Melayu secara formal di Brunei bermula dalam tahun 1914.
4. Sastera Lisan yang popular di Brunei ialah Diangdangan, Syair (Menambang) dan sebagainya.
5. Sastera tulisan tradisional yang amat dikagumi ialah Syair Rakis karangan Pengiran Shahbandar Pengiran Mohamad Salleh. Ditulis dalam tahun 1845.
6. Sastera yang bermula dengan penulisan puisi, novel, cerpen dan sebagainya. Lebih ketara bermula tahun-tahun 1950'an.
7. Yang dimaksud iaitu Surat-Surat Perjanjian (Treaty) terutama dengan pihak kerajaan British.

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : Perkembangan Bahasa Melayu di Brunei Darussalam" (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam)
Pemakalah : Awang Moch. Amin bin Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Awang Haji Sirat
Pemandu : M. Diah
Pencatat : Isti Nureni
Budiono Isas

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Ukun Suryaman, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran

Apakah bahasa Melayu yang dibina dan dikembangkan di Brunei pada dasarnya berdasarkan bahasa Malaysia atau sedikit banyak berbeda? Kalau saya membaca bentuk yang Bapak sampaikan, tampaknya demikian.

Jawaban:

Bahasa Melayu di Brunei Darussalam pada dasarnya sama dengan bahasa Melayu di Malaysia, tetapi ada sedikit perbedaan. Bahasa Melayu di Brunei Darussalam mengandung sedikit banyak nilai budaya dan menyerap istilah-istilah budaya dan tradisi yang ada di Brunei Darussalam.

2. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia

Sekadar informasi, di Indonesia tahun depan (barangkali) di sekolah dasar, yang di Brunei disebut sekolah rendah, akan diajarkan bahasa Inggris. Menurut pengamatan banyak orang bahasa ini adalah bahasa yang bergengsi. Melihat hal itu timbul kekhawatiran saya bahwa anak-anak akan mencintai bahasa itu daripada bahasa Indonesia, dan di Brunei juga demikian. Apa strategi Brunei supaya anak-anak Brunei menguasai bahasa Inggris dan tetap mencintai bahasa Melayu?

Jawaban:

Dasar dwibahasa di Brunei sudah dimulai sejak awal tahun 1950-an dan baru diresmikan tahun 1980-an. Melihat penonjolan bahasa Inggris sangat besar, Dewan Bahasa juga merasa khawatir, tetapi ini dapat diatasi dengan cara bahwa bahasa Inggris tetap diterima asalkan penggunaannya harus seimbang dengan bahasa Melayu.

3. **Pertanyaan:** T. Fatimah Djajasudarma, Universitas Padjadjaran

- a. Mengenai lintas bahasa tadi (pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Asim), saya ingin menanyakan apakah nantinya bahasa Melayu Brunei itu menjadi salah satu varian Melayu akibat pengaruh bahasa-bahasa yang ada?
- b. Di samping itu, ada pengaruh pembatas yang berbeda antara Melayu Malaysia dan Melayu Brunei sebab secara genetis sama (serumpun) tetapi ada perbedaan antara Melayu Barat dan Melayu Timur. Apakah nanti ada kecenderungan perbedaan sehingga kita harus hati-hati kalau mengatakan *bahasa Melayu* Malaysia dan Melayu Brunei?

Jawaban:

Hal itu tidak mengkhawatirkan karena perbedaan itu hanya pada istilah dan kata-kata tertentu saja.

4. **Pertanyaan:** Hajah Kamsiah Haji Abdullah, Singapura

Apakah berakibat positif atau negatif pemakaian bahasa Inggris dalam mata pelajaran tertentu (misalnya matematika, dan ilmu alam) yang diajarkan di sekolah menengah bawah atau sekolah menengah atas?

Jawaban:

Saya tidak melihat yang satu positif atau yang lain negatif karena di satu pihak pemakaian bahasa Inggris memang diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada buku-buku tertentu yang dibutuhkan yang tidak ada dalam bahasa Melayu. Di pihak lain, bahasa Melayu juga digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, kedua bahasa itu tetap berjalan dengan baik dan dapat memajukan pendidikan.

5. **Pertanyaan:** Djalinus Syah, Mantan Dosen Uinversitas Gadjah Mada

Bahasa Inggris bukanlah merupakan musuh kita, tetapi merupakan teman untuk perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Inggris saat ini merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan, setiap hari kurang lebih seribu istilah berbahasa Inggris dari berbagai bidang ilmu masuk ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, apakah kita mampu menerjemahkan begitu banyaknya itu, selain itu bahasa Inggris merupakan bahasa utama di ASEAN. Jadi, rugilah kita kalau tidak memanfaatkan bahasa itu.

Jawaban:

Saya bersetuju dengan pernyataan Saudara.

6. **Pertanyaan:** Leonardus Lumbanbatu, Kopertis Wilayah II Palembang

Saya sangat tertarik pada simpulan terakhir yang mengatakan bahwa bahasa Melayu sudah dikukuhkan. Hal itu semata-mata karena terciptanya ribuan istilah dan kamus-kamus serta buku-buku tata bahasa. Tolong terangkan lebih lanjut mengapa untuk membangun bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu justru terletak pada penulisan buku berbagai ilmu dan bagaimana ciri-ciri mengembangkan bahasa Melayu bersifat lisan ke dalam bahasa tulis.

Jawaban:

Untuk memperkuat bahasa Melayu itu ada satu cara, yaitu dengan menulis atau membukukan ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai bidang ilmu (ini dalam hubungannya di Brunei Darussalam). Kini lebih jauh lagi tugas Dewan Bahasa, untuk memperoleh buku-buku dalam berbagai bidang ilmu dan usaha terjemahan banyak dilakukan kemudian dimasyarakatkan.

7. **Pertanyaan:** Abdul Djebar Hapip, FKIP Universitas Lambung Mangkurat

- a. Selama Anda mengikuti kongres ini apakah banyak kata atau istilah, struktur yang menyulitkan Anda sehingga menghambat penangkapan Anda.
- b. Seberapa jauh di Brunei Darussalam publikasi berbahasa Indonesia sudah beredar terutama dari segi ilmu pengetahuan dan bahan-bahan pengajaran di sekolah-sekolah, dan sejauh mana bahasa Indonesia berpengaruh ke dalam bahasa Melayu Brunei, misalnya dalam pengambilan kata-kata?

Jawaban:

Pemakalah (yang berbahasa Melayu Brunei) tidak mendapat masalah. Pengaruh bahasa Indonesia di Brunei cukup minimal tetapi ada.

8. **Pertanyaan:** Soenardji, FPBS IKIP Semarang

Dapatkah konsep Kongres Pemuda di Indonesia (Sumpah Pemuda 1928) yang menetapkan *bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan atau bahasa nasional* berlaku di Brunei karena kata-kata itu menurut artinya dapat berlaku di negara lain yang serumpun.

Jawaban:

Hal itu tidak mungkin karena masalah sosiopolitik dan sosiobudaya yang berbeda.

PENELAAHAN, PENGAJARAN BAHASA, DAN BUDAYA INDONESIA DI BEIJING

Huang Chenfang

Department of Oriental Studies, University of China

1. Hubungan Kebudayaan dan Sejarah antara Cina dan Indonesia

Sebelum memasuki judul yang akan diuraikan di bawah, ada baiknya jika dilihat selang pandang hubungan kebudayaan dan sejarah antara kedua negeri kita dan memetik beberapa kata dari buku-buku klasik untuk melatarbelakangi perkembangan yang begitu pesat dalam penelaahan serta pengajaran bahasa dan budaya Indonesia di Beijing pada masa kini.

Pada tahun 1961 arkeolog-arkeolog Indonesia telah menemukan uang Cina sebanyak 40 kilogram, di antaranya yang paling lama ialah uang yang dikeluarkan pada Dinasti Han yang didirikan pada tahun 206 sebelum Masehi. Maka, dapat diperkirakan bahwa pada Dinasti Han hubungan perdagangan Cina dengan Indonesia sudah dimulai. Pandangan itu dapat diperkuat dengan kata-kata yang tercatat dalam buku-buku sejarah klasik. Dalam *Kitab tentang Dinasti Han* yang ditulis Ban Gu, jilid ke-28 bagian *Catatan Ilmu Bumi* tercatat bahwa pada masa itu Kerajaan Han sudah dapat membuat kapal laut. Jadi, kira-kira antara tahun 140 sebelum Masehi sampai dengan tahun 87 sebelum Masehi sudah ada kapal laut Kerajaan Han yang melawat ke luar negeri. Pada tahun 111 sebelum Masehi Kaisar Hanwu telah berhasil menenteramkan kawasan Nan-yue dan membagi-bagi kawasan itu menjadi sembilan daerah pemerintahan; tiga di antara daerah pemerintahan itu dijadikan pelabuhan tempat kapal laut berlayar dan berlabuh. Dari catatan-catatan dalam buku sejarah klasik itu dapat dipastikan hubungan Cina dengan Indonesia sudah dimulai pada tahun sebelum Masehi.

Sampai pada zaman Han Timur (tahun 25–tahun 220), hubungan perniagaan dan muhibah terus berkembang. Dalam *Kitab tentang Dinasti Han Timur* yang ditulis Fan Ye tercatat bahwa pada tahun 131 kerajaan dari Jawa telah mengirim utusannya ke Kerajaan Han untuk menyumbangkan cenderamata dan Kaisar Kerajaan Han memberi cenderamata pula untuk raja di Jawa yang berupa stempel emas dengan pita berwarna ungu. Dari warna pita yang ungu itu dapat diketahui bahwa kaisar sangat menghargai kedatangan utusan dari Jawa itu.

Pada bulan Maret tahun 399 seorang biksu kenamaan yang bernama Fa Xian pernah mengarungi samudra, berlayar puluhan ribu li (2 li sama dengan satu km.)

selama 14 tahun dan pernah singgah di 34 negara dan daerah. Waktu kembali ke tanah airnya, beliau menggondol banyak kitab bahasa Sanskerta. Sekembali dari perjalanannya, ditulisnya sejilid buku *Fo Guo Ji (Catatan Tentang Negara Buddha)* yang merupakan salah satu buku paling mula dan paling tebal yang memperkenalkan pengalaman perjalanannya dan sekarang banyak dikutip orang sebagai bahan penting untuk mempelajari dunia Timur. Menurut apa yang tercatat dalam buku *Catatan tentang Negara Buddha* itu, Biksu Fa Xian pada bulan Maret tahun 411 berlayar dari Srilangka menuju ke tanah asalnya di tengah perjalanan tiba-tiba diserang badai, kapalnya teratung-atung di laut selama tiga belas hari. Akhirnya, ia terdampar di sebuah pulau yang pada waktu itu disebut Jawadwipa, tempat mereka menetap selama lima bulan untuk memperbaiki kapalnya. Dalam buku itu ditulisnya juga tentang sejarah, geografi, adat istiadat, dan agama Buddha di Jawadwipa.

Pada Dinasti Tang (tahun 618–907) banyak biksu melawat ke luar negeri untuk menuntut dan memperdalam ajaran agama Buddha. Pada permulaan Dinasti Tang terdapat 33 orang biksu melawat ke luar negeri, di antaranya 17 orang pernah singgah di Indonesia; mereka telah memberi sumbangan dalam menjalin persahabatan dan dalam pertukaran kebudayaan antara Cina dan Indonesia di antaranya biksu Yi Jing yang boleh dikatakan seorang yang berjasa dalam memperkenalkan sejarah, geografi, agama, masyarakat, adat istiadat negara dan daerah Asia Tenggara. Dua buku yang ditulisnya, yaitu *Da Tang Xi Yu Qiu Fa Gao Seng Zhuan* atau *Catatan Pendeta yang Menuntut Ajaran Agama Buddha di Tanah Barat pada Dinasti Tang* dan *Nan Hai Ji Gui Nei Fa Zhuan* atau *Catatan Ajaran Agama Buddha yang Dikirim dari Lautan Selatan* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris.

Pada tahun 671 Biksu Yi Jing berangkat dari Guangzhou ke India, dalam perjalanan itu beliau singgah di Kerajaan Sriwijaya kebudayaannya yang sudah maju dan agama Buddha yang banyak dianut orang di sana sangat mengesankannya, maka beliau memutuskan untuk menetap beberapa waktu di Kerajaan Sriwijaya untuk mempelajari bunyi dan pramasatra bahasa Sanskerta. Setengah tahun kemudian, beliau pergi ke Tanah Melayu, dan setelah tinggal dua bulan di sana baru berangkat ke India. Setelah mempelajari agama Buddha selama sepuluh tahun di India, pada tahun 689 beliau kembali lagi ke Kerajaan Sriwijaya dan menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin kitab suci agama Buddha yang dibawanya dari India sebanyak empat ratus jilid, kira-kira makan waktu empat tahun. Karena pekerjaan penerjemahan itu merupakan tugas berat, hal itu memerlukan lebih banyak tenaga dan alat tulis. Pada tahun 689 Biksu Yi Jing kembali ke Guangzhou, dan tidak lama berangkat lagi ke Sriwijaya dengan membawa empat pembantu untuk menyelesaikan tugasnya. Semua penerjemahan itu selesai pada tahun 692 dan Yi Jing kembali ke Kerajaan Tang pada tahun 695.

Pada masa itu Kerajaan Sriwijaya juga merupakan pusat kebudayaan agama Buddha, sehingga biksu Yi Jing menganjurkan supaya orang-orang yang hendak mempelajari ajaran agama Buddha ke luar negeri ada baiknya jika singgah dulu di Kerajaan Sriwijaya untuk beberapa waktu. Dalam *Catatan Pendeta yang Menuntut*

Ajaran Agama Buddha di Tanah Barat pada Dinasti Tang Yi Jing mencatat bahwa biksu-biksu yang melawat dengan jalan laut ke India untuk mempelajari ajaran agama Buddha ada 56 orang, di antaranya terdapat 12 orang singgah atau menetap untuk seumur hidup di Kerajaan Sriwijaya.

Dalam kitab tersebut Yi Jing telah beberapa kali menyinggung "bahasa Kunlun". Dicatatnya, "Pendeta Yun Qi orang Tonkin menetap di sana belasan tahun lamanya. Ia pandai berbahasa Kunlun. Pendeta Da Jin berangkat ke Sriwijaya pada tahun 683 dan menetap di sana beberapa lamanya. Ia menguasai bahasa Kunlun."

Menurut hasil studi para sarjana, "Kunlun" yang disebut oleh Yi Jing bukan ditujukan kepada suatu negara, melainkan kepada Laut Selatan termasuk Asia Tenggara. Banyak sarjana menafsirkan bahwa "Kunlun" yang disebut Yi Jing itu adalah bahasa Melayu kuno pada prasasti-prasasti di daerah dekat Palembang pada abad ke-7. Prasasti-prasasti itu meskipun ditulis dengan huruf Pallawa dari India Selatan dan bercampur dengan kata-kata pinjaman bahasa Sanskerta, bahasanya ialah bahasa Melayu kuno.

Dari catatan-catatan tersebut dapat diketahui bahwa sudah sejak lama ada orang Cina yang pandai dan menguasai bahasa Melayu kuno di daerah Indonesia.

Sampai pada Dinasti Song (tahun 960–tahun 1279) teknik pembuatan kapal laut dan perkembangan usaha perniagaan banyak lebih maju lagi. Pada masa itu hubungan perniagaan antara dinasti Song dan negara-negara kepulauan di Asia Tenggara, Indonesialah yang merupakan salah satu negara yang paling erat.

Menurut apa yang tercatat dalam prasasti *Catatan Pemugaran Biara Tian Qing Guangzhou*, pada abad ke-11, seorang penghulu negeri Kerajaan Sriwijaya yang bernama Tihualak (menurut terjemahan bunyi katanya) setelah mengetahui sebuah biara di Guangzhou rusak, hanya tinggal reruntuhan, ia mengirim utusan ke Guangzhou untuk membicarakan pemugaran kembali biara Tian Qing dengan pemerintah setempat, Guangzhou, atas biaya penghulu negeri itu. Pemerintah setempat Guangzhou, menerimanya dengan baik. Maka, pada tahun 1067 dimulailah pemugaran biara itu dan rampung pada tahun 1079. Selain itu, disumbangkan pula oleh penghulu negeri sebanyak lima ratus ribu uang emas untuk membeli tanah dan uang hasil dari sewa tanah dipakai untuk mengongkosi pengeluaran Biara Tian Qing. Kaisar Shen Zong dari Kerajaan Song menghargai usaha itu dan menganugerahi "gelar kehormatan jenderal besar" kepada utusan yang dikirimkan itu sebagai pembalas jasa.

Dari tahun 1368 sampai tahun 1644 merupakan zaman dinasti Ming. Pada tahun 1403 Kaisar Ming Chen Zu dari Kerajaan Ming pernah mengutus duta ke Jawa, Sumatra, dan negeri-negeri lain untuk memajukan hubungan perniagaan. Dan dari tahun 1406 sampai tahun 1431 bahariwan besar, Zheng He, telah tujuh kali melawat ke "lautan barat" "setiap kali singgah di Sumatra dan enam kali singgah di Jawa dengan tujuan mengembangkan perniagaan atas dasar saling menguntungkan, menjalin persahabatan, dan menyebarkan ajaran agama Islam. Ma Fan yang ikut dalam rombongan armada Zheng He dalam karyanya yang berjudul *Ying Ya Sheng Lan* atau

Pemandangan Indah di Seberang Samudra telah menuturkan kegiatan berdagang Zheng He dan kunjungan muhibahnya. Ditulisnya juga bahwa penduduk Jawa suka sekali akan porselen, kasturi, dan lain-lain dari Cina.

Dari cuplikan-cuplikan buku klasik dan uraian-uraian tersebut jelas sekali bagi kita, di antara kedua negara kita tidak hanya terdapat pertukaran dan hubungan di bidang perniagaan, tetapi juga terdapat pertukaran dan hubungan di bidang kebudayaan yang telah dirintis oleh nenek moyang kita. Maka, tidaklah mengherankan bila pada masa kini hubungan tradisional itu berkembang terus dan bertambah mendalam dan meluas sehingga perasaan intim lebih meresap pada sanubari kedua bangsa kita.

2. Penelaahan Bahasa dan Budaya Indonesia di Masa Kini Beserta Hasil Materinya

Bahasa sebagai alat komunikasi diperlukan oleh segenap umat manusia. Dalam perkembangan teknologi canggih yang begitu pesat pada zaman ini, berkomunikasi tidak hanya dalam lingkungan satu bangsa atau satu negeri saja, tetapi dalam lingkungan internasional atau antarbangsa untuk sama-sama memajukan pembangunan ekonomi negeri masing-masing dan mengembangkan persahabatan dan perdamaian. Maka, menelaah dan menguasai suatu bahasa berarti memberi andil bagi perkembangan tersebut.

Bahasa juga merupakan wadah pembawa kebudayaan. Secara vertikal, dengan adanya wadah pembawa itu kita dapat mewarisi kebudayaan yang diciptakan nenek moyang kita pada belasan abad yang lalu, turun-temurun terus disampaikan kepada generasi kita dan seterusnya. Secara horizontal bahasa sebagai wadah pembawa dapat menyampaikan isi kebudayaan dari suatu bangsa atau suatu negeri ke bangsa atau negeri yang berdekatan ataupun yang berjauhan sehingga terjadi pertukaran dan penjalinan kebudayaan antara bangsa dan negeri.

Dalam belasan tahun ini, seiring dengan perkembangan pesat di bidang ekonomi di negeri kami, rakyat menuntut perkembangan yang lebih pesat di bidang kebudayaan segera menyusulnya supaya jangan ketinggalan. Maka, muncullah pasang naik kegairahan penelaahan kebudayaan. Tak terbilang banyaknya buku mengenai teori ataupun keadaan kebudayaan dalam dan luar negeri yang telah terbit dalam beraneka isi, bentuk, dan edisi. Berbagai macam majalah dan surat kabar baru bersifat kebudayaan bermunculan sebagai jamur pada musim hujan. Dalam keadaan situasi yang menguntungkan itu, kami sebagai penelaah dan pengajar yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam bidang bahasa dan kebudayaan Indonesia tidak mau ketinggalan; kami aktif menulis buku-buku dan artikel, menerjemahkan sajak, cerpen, dan novel Indonesia, memperkenalkan bahasa dan kebudayaan Indonesia, mengasuh generasi baru sebagai penerus usaha kita. Izinkanlah saya di sini mengambil beberapa contoh hasil usaha kami dalam menjalin persahabatan dan hubungan kebudayaan antara Cina dan Indonesia.

a. Berbagai Macam Kamus yang Telah Terbit

Kamus Baru Bahasa Indonesia-Mandarin, disusun oleh Tim Redaksi *Kamus Baru Bahasa Indonesia-Mandarin*, Seksi Bahasa dan Budaya Indonesia, Fakultas Ilmu Ketimuran (*Department of Oriental Studies*), Universitas Peking. Kamus itu terbit pada bulan November 1989 sebagai kamus dwibahasa Indonesia-Mandarin yang untuk pertama kalinya beredar dalam format sedang di negeri kami. Kamus ini mendapat sambutan hangat dari publik negeri kami sehingga cetakan kedua segera akan menyusul. Dalam kamus ini termuat 28.258 entri kata dasar dan 20.369 entri kata jadian. Kami merasa haru dan berterima kasih kepada peminat dan pakar kebahasaan yang telah berkenan menulis artikel penilaian terhadap kamus tersebut yang telah dimuat dalam majalah dan surat kabar Indonesia, terutama kami sampaikan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. A. Teeuw dari Negeri Belanda. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kabar bahwa kerja sama antara Universitas Peking dan Universitas Indonesia dalam menyusun dua jilid kamus telah dimulai, yaitu *Kamus Indonesia-Mandarin* dan *Kamus Mandarin-Indonesia* yang telah mendapat persetujuan kementerian pendidikan kedua negeri dan telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* antara Universitas Peking dan Universitas Indonesia ketika Rektor Universitas Indonesia, Sujudi, berkunjung ke Universitas Peking. Kami yakin adanya kerja sama di bidang perkamusan ini akan mempererat hubungan antara Universitas Peking dan Universitas Indonesia, baik di bidang pendidikan maupun di bidang lain.

Kamus Kata Pinjaman dalam Bahasa Mandarin, yang disusun oleh Profesor Gao Mingkai dkk., terbit pada bulan Desember 1984. Kamus itu memuat 10.000 lebih entri kata asing yang pernah muncul, baik dalam buku-buku klasik maupun dalam buku, majalah, atau surat kabar zaman sekarang. Yang dimaksud dengan kata pinjaman ialah tidak hanya termasuk kata-kata asing dari luar negeri, tetapi juga termasuk kata-kata suku bangsa dari dalam negeri. Kira-kira kata pinjaman itu berjumlah lima puluh bahasa. Entri kata pinjaman dari bahasa Indonesia kurang lebih tujuh puluh buah kata. Entri-entri yang dimasukkan ke dalam kamus ini, ada yang diterjemahkan menurut bunyi bahasa Mandarin, misalnya *mo-di-jia* dari kata *merdeka* yang banyak terdapat dalam surat kabar dan majalah pada zaman 40-an dan 50-an abad ini, *ge-li-si* dari kata *keris*; ada yang diterjemahkan menurut bunyi bahasa daerah, misalnya *xue-wen* dari kata *sabun*, kata ini dipinjam oleh bahasa daerah Fujian, maka diterjemahkan menurut bunyi bahasa daerah Fujian; ada yang diterjemahkan menurut bunyi bahasa Mandarin dengan tambahan nama benda itu, misalnya *du-gu-guo* dari kata *dukuh*, ditambah satu kata *guo* yang menyatakan "buah", *da-ma-er-xiang* dari kata *damar* ditambah sebuah kata *xiang* yang bermakna 'wangi-wangian'. Namun, yang diterjemahkan menurut makna kata tidak dimasukkan ke dalam kamus ini.

Kamus Kebudayaan Timur, diterbitkan bulan Februari 1993 dengan menampung 3.800 entri tentang kebudayaan negeri-negeri timur kecuali Cina. Penyusunannya dipimpin oleh profesor-profesor Fakultas Ilmu Ketimuran, Universitas Peking dan penulis-penulis entrinya kebanyakan dosen dari fakultas tersebut. Dalam kamus

tersebut terdapat kurang lebih 220 entri tentang kebudayaan Indonesia yang cukup luas jangkauannya.

Pada masa-masa yang silam, orang Barat bila membicarakan kebudayaan dunia, pada umumnya yang dibicarakan hanya kebudayaan Barat; kebudayaan Timur tidak mendapat kedudukan yang sewajarnya, paling-paling yang hanya disentuh adalah kebudayaan Cina dan India. Keadaan semacam itu sangat tidak adil. Dalam kamus itu, hampir semua negeri Timur mendapat tempat yang selayaknya. Suatu negeri baik besar maupun kecil, baik yang sudah maju maupun yang sedang maju, baik yang kaya maupun yang sedang berkembang, masing-masing mempunyai kebudayaan yang memiliki kepribadian sendiri dan merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan dunia yang patut mendapat penghargaan yang sama. Maka, dimasukkan entri-entri tentang kebudayaan Afganistan, Birma, Iran, Kamboja, Kongo, Korea, Laos, Muang Thai, Nepal, Filipina, Singapura, Turki, Vietnam, dan lain-lain yang dalam kamus ini telah memberi corak istimewa pada kamus ini.

Kamus Apresiasi dan Analisis Puisi Lirik Asing diterbitkan pada bulan Januari 1991. Dalam kamus itu dimuat 700 lebih puisi lirik yang berbobot dari 500 lebih penyair kenamaan. Setiap entri diuraikan dalam tiga bagian, terjemahan puisi ke dalam bahasa Mandarin, pengenalan tentang penyairnya, dan apresiasi serta analisisnya. Puisi-puisi itu diterjemahkan dari bahasa-bahasa Timur dan Barat. Yang dari bahasa Timur adalah bahasa-bahasa Arab, Birma, India, Indonesia, Jepang, Korea, Muang Thai, Pakistan, Persia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Kamus itu disusun oleh profesor-profesor dari beberapa fakultas Universitas Peking, dan bagian negeri-negeri Timur dipimpin dan ditangani oleh Fakultas Ilmu Ketimuran. Sembilan belas buah puisi Indonesia yang termahur mengisi halaman-halaman yang khusus disediakan untuknya, sama-sama dimuat sejajar dengan penyair-penyair besar sedunia, misalnya Dante Aighieri dari Italia, George Gordon Bayron dari Inggris, Johan Ckristoph Friedrich von Schiller dari Jerman, Johann Wolfgang von Goette dari Jerman, Pablo Neruda dari Chili, Petofi Sandor dari Hongaria, Rabindranath Tagore dari India, Robert Frost dari Amerika, William Shakespeare dari Inggris.

Yang agak menarik ialah pemunculan urutan puisi itu. Menurut kebiasaan di negeri-negeri Barat, pada umumnya urutannya ialah puisi-puisi dari negeri Barat didahulukan baru kemudian puisi-puisi dari negeri Timur. Namun, dalam kamus tersebut sebaliknya, puisi-puisi dari negeri Timur diatur di muka, baru kemudian puisi-puisi Barat. Itu sesuai dengan pandangan para penyusun yang menganggap Timur sebagai awal dan Barat sebagai akhir; Timur sebagai terbitnya sesuatu dan barat sebagai silamnya sesuatu.

Kamus Kesusastraan Timur diterbitkan pada bulan Desember 1992. Penyusunan kamus itu dipimpin oleh profesor-profesor Fakultas Ilmu Ketimuran Universitas Peking dengan pakar ternama di bidang ilmu ketimuran, mantan wakil rektor Universitas Peking Profesor Ji Xian-lin sebagai penyunting utama. Dalam kamus tersebut termuat sebanyak 3.600 entri yang isinya melingkupi pujangga, karya sastra, tokoh-tokoh utama dari karya-karya penting, mitos, dan tokoh-tokoh utamanya,

lembaga pujangga, aliran dalam kesusastraan, majalah sastra, badan organisasi kesusastraan, hadiah bidang sastra, terminologi teori sastra, dan sebagainya yang dikumpulkan dari 60 lebih negeri Asia dan Afrika, di antaranya terdapat 150 lebih entri mengenai sastra Indonesia yang disusun oleh profesor Seksi Bahasa dan Budaya Indonesia, Fakultas Ilmu Ketimuran, Universitas Peking.

Kamus Adat Istiadat Timur terbit pada bulan September 1991. Kamus itu menampung kira-kira 1480 lebih berbagai macam adat istiadat dari 44 negara dan daerah Asia dan Afrika Utara. Dalam kamus itu, di antaranya, terdapat hampir seratus entri tentang adat istiadat bangsa Indonesia yang dikerjakan profesor-profesor Seksi Bahasa dan Budaya Indonesia, Fakultas Ilmu Ketimuran, Universitas Peking.

Jika hendak menelaah kebudayaan suatu negeri secara menyeluruh, kita harus juga mendalami adat istiadat rakyat negeri itu yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari padanya. Sebagaimana diketahui, dalam sejarah dunia terdapat empat ragam kebudayaan yang saling mempengaruhi dan telah memainkan peranan penting dalam memajukan perkembangan kebudayaan dan masyarakat di seluruh dunia. Keempat ragam kebudayaan itu ialah kebudayaan Cina, kebudayaan Hindu, kebudayaan Islam, dan kebudayaan Barat. Di antara empat ragam kebudayaan itu ada tiga yang berasal dari dunia Timur. Kebudayaan Indonesia dalam periode yang berlainan telah menerima pengaruh keempat ragam kebudayaan itu dengan tidak meninggalkan kepribadiannya. Adat-istiadatnya yang sudah menjadi darah daging dari empat ragam kebudayaan itu tentu serba aneka ragam dan kaya raya isinya. Hal itu telah menyediakan kesempatan dan bahan bagi kita untuk lebih banyak mengenal bangsa, negara, dan kebudayaannya sehingga dapat memperlancar hubungan antara bangsa kita dalam meningkatkan persahabatan dan saling mengerti.

b. *Buku Pelajaran yang Telah Dipublikasikan*

Buku Pelajaran Bahasa Indonesia diterbitkan dalam tiga jilid pada bulan Mei 1990 untuk cetakan pertama. Untuk memenuhi permintaan khalayak ramai yang berminat keras untuk mempelajari bahasa Indonesia, pada bulan Maret 1992 buku itu dicetak ulang di Beijing. Dan jilid, pertamanya telah diterbitkan pula di Singapura dalam edisi penjelasan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dua macam. Buku ini tidak hanya dipakai sebagai buku pelajaran di Universitas Peking, tetapi digunakan juga oleh Institut Bahasa-bahasa Asing Beijing, Institut Bahasa-bahasa Asing Guangzhou, Institut Bahasa-bahasa Asing Luoyang dan oleh banyak kursus bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh negeri kami.

Buku pelajaran yang disusun oleh Seksi Bahasa dan Budaya Indonesia, Fakultas Ilmu Ketimuran, Universitas Peking ini dipakai untuk tiga semester sebagai peletakan dasar-dasar fonetik, tata bahasa, dan kosakata bagi mahasiswa yang baru belajar bahasa Indonesia di negeri kami.

Buku ini disusun setelah penyusun menyimpulkan pengalaman mengajar dan menyusun diktat pelajaran bahasa Indonesia selama puluhan tahun di Universitas Peking. Kami telah mencapai kesepakatan dalam prinsip penyusunan buku pelajaran. Kami menyadari bahwa siswa yang belajar bahasa Indonesia di Universitas Peking bukan bangsa Indonesia; bahasa ibu mereka ialah bahasa Mandarin yang akan selalu mengganggu cara berpikir mereka dalam berbahasa Indonesia. Maka, kami memilih titik berat dan menganalisis kesukaran-kesukaran mereka dalam berbahasa Indonesia. Kemudian, kami memberi penjelasan dan catatan seperlunya dari sudut latar belakang kebudayaan, adat istiadat, masyarakat, dsb. sebagai penuntun. Kami menyadari pula, bahwa mereka belajar bahasa Indonesia bukan di bumi Indonesia, melainkan di Beijing. Mereka tidak memiliki lingkungan dan suasana yang baik untuk berbahasa Indonesia. Buku pelajaran untuk mereka harus sesuai dengan keadaan tersebut. Oleh karena itu, kami menetapkan bahwa praktik berbahasa harus diutamakan. Kami menyusun latihan praktik berbahasa yang besar volumenya dan beraneka ragam bentuknya untuk dikerjakan, baik di dalam maupun di luar kelas. Kami menyadari juga, mereka belum pernah belajar bahasa Indonesia; mereka sama sekali tidak tahu-menahu tentang bahasa Indonesia. Maka, dalam penyusunan buku pelajaran ini kami ikuti prinsip-prinsip yang lazim untuk belajar bahasa asing sebagai permulaan, yaitu yang mudah didahulukan baru kemudian berangsur-angsur kepada yang agak sukar, yang sederhana dikemukakan, setelah itu baru ditambah dengan yang agak rumit, yang dekat dengan jangkauan pemikiran siswa diatur dalam teks pelajaran bagian muka, kemudian baru melangkah pada isi yang agak jauh dari jangkauan pemikiran mereka.

Dalam buku pelajaran ini dimuat termasuk pokok-pokok teori bahasa, pengetahuan tentang bahasa Indonesia, dan latihan keterampilan dasar.

Buku Pelajaran Bahasa Indonesia jilid keempat terbit pada tahun 1993 sebagai lanjutan dari buku pelajaran dasar.

c. *Buku, Artikel, dan Terjemahan tentang Indonesia sebagai Penyebar Persahabatan*

Setelah diadakan reformasi di bidang ekonomi dalam negeri kami, perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi sangat pesat. Perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi itu sangat mendorong perkembangan di bidang kebudayaan. Rakyat meminta lebih banyak dihidangi santapan rohani untuk meningkatkan pengetahuan dan memperkaya kehidupan di bidang kebudayaan sebagai hiburan. Situasi semacam itu sungguh menguntungkan kami untuk banyak menulis buku dan karya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah perkembangan kebudayaan dunia terdapat saling mempengaruhi antara kebudayaan suatu bangsa dan kebudayaan bangsa lain. Dapat dikatakan tiada suatu bangsa yang kebudayaannya tidak terpengaruh oleh kebudayaan bangsa lain. Bagaimana pun majunya kebudayaan suatu bangsa, ia tetap harus berkembang terus supaya jangan ketinggalan zaman. Demi menyuburkan

perkembangan kebudayaan, diperlukan sikap aktif, berdeda lapang dan berpandangan jauh, pandai belajar, menerima dan menyerap unsur-unsur kebudayaan bangsa lain yang berguna dengan tidak melepaskan kepribadian nasional. Indonesia adalah satu negara besar yang penduduknya menduduki tempat ketiga di Asia, bersejarah lama dan berkebudayaan cemerlang. Candi Borobudur yang mulai dibangun pada pertengahan abad kedelapan merupakan satu candi agama Buddha yang paling besar di dunia, wayang kulit sebagai kesenian tradisional rakyat beserta alat musik gamelannya tetap sangat disukai rakyat. Bentuk sastra Indonesia, baik yang terdapat pada zaman dulu maupun pada zaman sekarang banyak ragamnya, misalnya mantera sebagai bentuk sajak zaman purba, gurindam sebagai sajak dua baris di zaman dulu, kekawin sebagai sastra istana, pantun sebagai sajak rakyat, kidung sebagai sajak klasik dan banyak lagi bentuk sajak dan sastra modern zaman kini. Pendeknya, banyak yang dapat diperkenalkan dan dipelajari demi memperkaya kebudayaan bangsa kami.

Kami yang bergerak di bidang pendidikan dan penelaahan tentang bahasa dan kebudayaan Indonesia tentu aktif dan antusias menulis buku-buku dan artikel tentang Indonesia. Berikut ini akan saya kemukakan sebagian nama buku, artikel, dan hasil terjemahan yang sudah diterbitkan.

1. *Stilistika dengan Penerapannya pada Bahasa Indonesia* diterbitkan pada bulan Juli 1993.
2. *Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia* diterbitkan pada bulan Februari 1992.
3. *Sam Po Kong dan Indonesia* ditulis dalam bahasa Indonesia dan terbit pada bulan September 1992 di Indonesia.
4. *Ikhtisar Sejarah Hubungan China dengan Indonesia* terbit pada bulan Agustus 1987.
5. *Ikhtisar Sejarah Politik Indonesia Modern* terbit pada bulan November 1989.

Terjemahan-terjemahan novel *Salah Asuhan* dari Abdul Muis, *Surapati* dari Abdul Muis, *Keluarga Gerilya* dan *Korupsi* dari Pramudya Ananta Tur, *Max Havelaar* dari Eduard Douwes Dekker, *Belenggu* dari Armijn Pane, *Roro Mendut* dari Ajip Rosidi, *Jangir Bali* dari Nur Sutan Iskandar, *Hati yang Damai* dan *Keberangkatan* dari Nh. Dini, *Harimau Harimau* dari Mochtar Lubis, *Hutan Belantara* Ibu Kota dari Umar Narzain. Di samping itu, cerpen Nh. Dini, yang berjudul "Penanggung Jawab Candi", Ray Fernandes, yang berjudul "Pengakuan", "Kurniawan Junaedhie Gatot", "Sahabatku yang Malang" telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan dimuat dalam majalah sastra.

Masih ada juga artikel yang dimuat dalam majalah di luar negeri, misalnya *A Study of Chinese Loanwords in the Malay and Indonesian Languages* dimuat dalam majalah *Bijdragen*, Belanda, *Sabin dan Karyanya* dimuat dalam majalah *Archipel*, Prancis, *Perbandingan Gaya Bahasa antara Inem dengan Jatayu* dimuat dalam *Jurnal Dewan Bahasa*, Malaysia.

Suatu hal yang mengharukan ialah beberapa kamus Mandarin monolingual yang baru, baik yang ukuran besar maupun yang berukuran kecil telah memasukkan kata-kata pinjaman dari bahasa Indonesia sebagai entri, misalnya kata *bing-lang* yang

dipinjam dari kata Indonesia yang berarti 'biji pinang', tidak hanya terdapat dalam *Kamus Sino-Bahasa*, halaman 30, *Kamus Mandarin*, halaman 41, *Kamus Mandarin Modern*, halaman 70, tetapi juga terdapat dalam kamus-kamus besar, seperti *Kamus Lautan Kosa Kata*, halaman 1402, *Kamus Besar Bahasa Mandarin* jilid keempat (semuanya dua belas jilid), halaman 1353. Kata *liu-lian* yang dipungut dari kata Indonesia yang menyatakan buah durian juga terdapat dalam kamus besar tersebut di atas pada halaman 1219. Sementara itu, kata-kata pinjaman dari kata Indonesia yang muncul dalam majalah, surat kabar atau dalam percakapan sehari-hari jumlahnya jauh lebih banyak lagi, misalnya kata-kata *ang-ke-lung* dari kata Indonesia *angklung*, kata *wa-yang* dari kata Indonesia *wayang*, kata *kan-mei-lan* dari kata Indonesia *gamelan*, *jia-to-jia-to* dari kata Indonesia *gado-gado*. Satu kata pinjaman yang sangat menarik dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Mandarin ialah kata *hong-mao-dan* dari kata Indonesia *rambutan*, sungguh imajinatif dan kena benar. Bunyi *hong* yang berarti merah merupakan bunyi tambahan supaya menjadi tiga suku kata untuk disamakan dengan jumlah suku kata dalam bahasa Indonesia, yang sekaligus dapat mengingatkan kita pada warna buah itu, bunyi *mao* merupakan terjemahan langsung dari arti kata *rambut* yang juga dapat memberi gambaran bahwa buah itu berambut, sedangkan bunyi *dan* ialah terjemahan dari bunyi *tan* dalam kata *rambutan* dan merangkap menyatakan makna bundar kecil yang sama dengan bentuk buah itu. Jadi, sekaligus warna, rupa, bentuk, dan bunyi nama buah itu tercermin dalam kata *hong-mao-tan* itu.

3. Pengajaran Bahasa Indonesia di Universitas Peking

Bahasa merupakan suatu sistem simbol yang khas yang digunakan umat manusia. Tatkala manusia berada dalam masyarakat, mereka tentunya mengadakan kontak satu sama lain. Oleh karena itu, bahasa memainkan peranan penting dalam menyampaikan informasi dan perasaan batin sebagai alat komunikasi. Apabila kita hendak mengenal sesuatu yang ada dalam masyarakat ini, bahasa dapat mengantarkan kita untuk mengetahui apa yang akan kita hayati dan pahami. Jika bahasa itu dikenakan pada kebudayaan, bahasa menjadi wadah pembawa informasi kebudayaan, mencatat, dan menyimpan kebudayaan pada masa itu yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Dengan pengertian tersebut, kami, para dosen Seksi Bahasa dan Budaya Indonesia, Universitas Peking menginsafi perlunya pengajaran bahasa Indonesia dan pengasuhan generasi baru, menyediakan siswa tamatan yang siap pakai dalam jumlah yang memadai.

Untuk seksi kami, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pokok yang wajib bagi setiap mahasiswa. Untuk menyukseskan mata pelajaran bahasa Indonesia, kami menyediakan tiga bahan materi bersifat pegangan. Bahan itu adalah sebagai berikut.

- a. Program pengajaran disusun oleh Seksi Bahasa dan Budaya Indonesia untuk periode pengajaran tertentu. Dalam program tersebut ditetapkan tujuan, tuntutan, isi, pengaturan pengajaran, prinsip, dan metode pengajaran bahasa Indonesia yang

harus ditaati oleh setiap dosen yang mengajar dan dilaksanakan oleh setiap pelajar. Untuk memeriksa pelaksanaan program itu, dilampirkan patokan ujian, yang di dalamnya ditentukan tujuan, isi, lingkungan, bentuk, cara, waktu, dan pemberian angka untuk ujian pertengahan dan akhir semester. Kertas ujian boleh disusun oleh pimpinan seksi atau oleh dosen yang tidak mengajar mata pelajaran itu berdasarkan patokan-patokan yang sudah ditentukan. Dalam program itu terlampir pula daftar fonetik, daftar tata bahasa, daftar bentuk kalimat, daftar kosakata, dsb. untuk menentukan isi dan batas yang harus diberikan kepada siswa dalam tahap tertentu.

- b. Rencana pengajaran disusun oleh pimpinan seksi atau dosen untuk empat tahun pengajaran atas dasar program tersebut di atas yang di dalamnya. Diperinci tuntutan-tuntutan konkret yang harus dicapai oleh siswa selama empat tahun, waktu belajar, angka kredit untuk empat tahun dan untuk setiap mata pelajaran, mata pelajaran wajib, mata pelajaran alternatif, dan mata pelajaran nonalternatif, ketentuan-ketentuan untuk mengikuti mata pelajaran tersebut di atas, dan daftar pengaturan mata pelajaran wajib untuk empat tahun.
- c. Rancangan pengajaran untuk setiap pelajaran disusun oleh dosen yang bertugas memberi kuliah itu berdasarkan program dan rencana pengajaran tersebut di atas. Isi rancangan itu meliputi tujuan pelajaran, titik berat kata-kata, bentuk kalimat, tata bahasa dsb. untuk pelajaran itu beserta penjelasan-penjelasan seperlunya, seluruh waktu yang disediakan dan pembagiannya, metode pengajaran yang disesuaikan dengan isi dan bentuk teks pelajaran, latihan untuk menguasai dan memperkokoh titik berat pelajaran, isi dan bentuk pekerjaan rumah dan bimbingan di luar kuliah bila diperlukan.

Dengan adanya tiga bahan materi sebagai pegangan, pengajaran dapat berjalan mantap dengan bertujuan tegas secara berencana sehingga hasil pelajaran siswa dapat terjamin. Pada umumnya setelah belajar dua tahun siswa dapat berbahasa Indonesia tentang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya tambahkan dua macam metode pengajaran untuk bahasa asing.

- a. Pengajaran bahasa asing harus dihubungkan dengan latar belakang kebudayaan, adat istiadat dan masyarakat pemakai bahasa asing itu. Apakah informasi yang dinyatakan bahasa itu dapat diterima oleh masyarakat, dapat dimengerti oleh pihak pendengar/pembaca? Itu tidak hanya ditentukan oleh apakah kalimat-kalimat itu mengikuti kaidah tata bahasa baku, tetapi juga terikat oleh kebudayaan, adat istiadat, dan masyarakat pemakai bahasa asing itu. Kadang-kadang siswa membuat kalimat menurut kaidah tata bahasa yang baku dan pemilihan kata-katanya pun tepat, tetapi tidak dapat dimengerti oleh pendengar/pembaca atau disalahtafsirkan karena menyimpang dari kebiasaan. Misalnya, kalimat "Saudara sudah makan?" Dalam bahasa Mandarin, kalimat itu tidak hanya memiliki makna bahasa yang menyatakan "Apakah saudara sudah santapan?" atau menawarkan untuk makan, tetapi juga memiliki makna sosial sebagai kalimat sapaan yang hampir sama artinya dengan "Apa kabar?" dalam

bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia yang tidak sama latar belakang kebudayaan dan masyarakatnya, kalimat itu hanya memiliki makna bahasa, tidak terdapat makna sosial. Siswa kami sering menyapa tamu dari Indonesia dengan kalimat tersebut. Kesalahan-kesalahan semacam itu sering dilakukan oleh siswa yang belajar bahasa asing. Berbagai macam cara atau metode untuk menghubungkan isi pelajaran atau makna kata-kata dengan latar belakangnya. Bisa dengan penjelasan, bisa juga minta siswa ikut turun tangan. Misalnya, daripada menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana membuat masakan Indonesia tetapi hasilnya belum tentu memuaskan, lebih baik disuruh saja siswa-siswa itu datang ke rumah dosen kemudian bersama-sama membuat masakan Indonesia, seperti gado-gado, opor, kari, lempeng, dan perkedel seperti yang pernah kami lakukan. Sambil makan-makan bisa juga siswa melihat video cerita Indonesia atau mendengarkan kaset lagu-lagu Indonesia. Siswa tidak hanya dapat melihat rupa masakan itu, tetapi tahu bumbunya dan bagaimana rasanya, juga belajar bagaimana membuatnya. Kesannya, hal itu melekat pada otak siswa sehingga tidak mudah lenyap.

- b. Belajar bahasa asing harus banyak melakukan praktik. Bahasa pada pokoknya muncul, berkembang, dan dipakai dalam praktik. Tanpa praktik, bahasa itu akan mandek. Dalam pengajaran bahasa asing diperlukan banyak praktik. Siswa diharuskan berulang-ulang membaca dengan suara lantang, berulang-ulang mendengar rekaman, dan berulang-ulang berdialog dalam bahasa Indonesia. Dalam kuliah siswa dilatih mereproduksi teks pelajaran, berpidato, bercerita, berdialog, menyiarkan warta berita, menyanyi lagu-lagu Indonesia dsb. Di luar kelas siswa diharuskan mendengar kaset rekaman bahasa Indonesia dan melihat video cerita Indonesia. Menemani tamu-tamu dari Indonesia merupakan salah satu cara yang baik untuk berpraktik. Misalnya, ketika Bapak dan Ibu Sujudi berkunjung ke Universitas Peking; ketika itu siswa kami baru belajar bahasa Indonesia selama tiga belas bulan; kami menugasi siswa untuk menemani beliau berbelanja. Profesor Harimurti Kridalaksana, Profesor Gondomono, Profesor Dahana dari Universitas Indonesia, juga pernah ditemani siswa kami kelas dua.

Pendek kata, untuk dapat mengingat dan menghafalkan kata-kata dan isi teks pelajaran, untuk mencapai kefasihan dan keterampilan berbahasa yang luwes, cara yang baik ialah banyak berpraktik, dan banyak mengulang bahasa asing yang dipelajarinya dengan berbagai macam cara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ban Gu. *Han Shu* (Kitab tentang Dinasti Han).
- Fa Xian. *Fu Guo Ji*, (Catatan tentang Negara Buddha).
- Fan Ye. *Hou Han Shu* (Kitab Tentang Dinasti Han Timur).
- Yi Jing. *Da Tang Xi Yu Qiu Fa Gao Seng Zhuan* (Catatan Pendeta yang Menuntun Ilmu Agama Buddha di Tanah Barat pada Dinasti Tang).
- Yi Jing. *Nan Hai Ji Gui Nei Fa Zhuan* (Catatan Ajaran Agama Buddha yang Dikirim Dari Laut Selatan).
- Ma Huan. *Ying Ya Sheng Lan* (Pemandangan Indah di Seberang Samudra
Ensiklopedia Britania Raya.
Ensiklopedia Indonesia.
- Sun Fu-sheng. *Ikhtisar Sejarah Politik Indonesia Modern*.
Kumpulan Terjemahan Tentang Hubungan Sejarah China dengan Luar Negeri, Jilid Kelima.
- Li Xue-min, Huang Kun-zhang. *Sejarah Huakiau Indonesia*.
- Huang Ai-ling. *Sejarah Singkat Hubungan China-Indonesia*.
- Kong Yuan-zhi. *Sam Po Kong dan Indonesia*.
- Kong Yuan-zhi. *Stilistika*.
Studi Tentang Asia dan Pasifik di Universitas Peking (kumpulan karya).
Kumpulan Karya tentang Kebudayaan Timur.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Penelaahan Pengajaran Bahasa dan Budaya Indonesia di Beijing
Pemakalah : Huang Chenfang
Pemandu : S. Effendi
Pencatat : Sriyanto
Artanti

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Yoyok Gandung Priyana, Majalah *Dharma Wanita*, Jakarta

Bagaimana pengajaran bahasa Indonesia di Beijing sehubungan dengan perbedaan kalimat yang mendasar antara bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin?

Jawaban:

Bagi kami, salah satu kesukaran dalam memahami bahasa Indonesia adalah penguasaan kalimat pasif. Hal itu terjadi karena, antara lain, dalam bahasa Indonesia terdapat lebih dari satu kalimat pasif. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membandingkan perbedaan kedua bahasa itu dengan cara menerjemahkannya. Oleh karena itu, harus diperbanyak latihan. Dengan cara seperti itu, lambat laun mereka akan dapat menguasainya.

2. **Pertanyaan:** Sri Umiyati Haroen, KIP Muhammadiyah, Yogyakarta

Apa tujuan atau motivasi mahasiswa Beijing mempelajari bahasa Indonesia?

Jawaban:

Tujuan mahasiswa Beijing mempelajari bahasa Indonesia bermacam-macam. Dulu mereka mempelajari bahasa Indonesia memang hanya ingin menguasai bahasa itu. Akan tetapi, sekarang mereka mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mempelajari bidang-bidang lain.

Motivasi mahasiswa untuk mempelajari bahasa Indonesia cukup tinggi. Sebagai gambaran, dapat saya kemukakan hal berikut. Pada waktu istirahat mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari bahasa Indonesia. Pada malam hari sering pula para mahasiswa memanfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari bahasa Indonesia hingga lewat malam di perpustakaan.

3. **Pertanyaan:** Ganjar, Jakarta

a. Berapa besar mahasiswa yang mendaftar dan yang lulus di Universitas Peking untuk Jurusan Indonesia?

- b. Apakah ada kerja sama antara Universitas Peking dan pihak lain, seperti Universitas Leiden?

Jawaban:

- a. Kami mengalami dua kesulitan dalam pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia. *Pertama*, jumlah tenaga pengajar terlalu sedikit atau sangat terbatas; bagi para pengajar, waktu yang digunakan untuk mengajar kurang dari separuh karena separuh lebih digunakan untuk studi dan menulis. Oleh karena itu, kami hanya menerima siswa yang sangat terbatas pula. Dalam waktu tiga tahun terakhir kami hanya menerima satu kelas setiap tahun yang tiap kelasnya tidak lebih dari dua puluh siswa. Sejak berdirinya hingga sekarang telah lulus lebih dari tiga ratus orang.
- b. Kerja sama dengan pihak lain sudah dilakukan, antara lain, dengan Universitas Leiden dan Universitas Indonesia. Kerja sama dengan Universitas Leiden dilakukan dengan tukar-menukar dosen dan materi. Kerja sama dengan Universitas Indonesia dilakukan dalam rangka penyusunan kamus *Indonesia-Mandarin* dan *Mandarin-Indonesia*

BAHASA KUNLUN DALAM SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

Kong Yuan Zhi
Universitas Peking

Istilah "bahasa Kunlun" dipakai oleh Yi Jing (I-tsing) dalam bukunya ketika menceritakan pengalamannya di Sriwijaya pada abad ke-7. Untuk apa Yi Jing ke Sriwijaya? Apa gerangan bahasa Kunlun dan hubungannya dengan bahasa Melayu? Soal-soal tersebut akan kami bahas sekadarnya sebagai berikut.

1. Yi Jing dan Sriwijaya

Yi Jing (635–713) berasal dari Kabupaten Fan Yang (Kabupaten Zhuo) Propinsi Hebei Cina Utara. Ia pendeta yang menuntut ilmu agama Buddha ke India dengan menyeberangi laut pada dinasti Tang (618–907). Selama tahun 671–695 ia pulang balik antara Cina dan India. Dalam 25 tahun itu Yi Jing telah tiga kali singgah di Sriwijaya.

Sebagaimana yang ditulis dalam *Ensiklopedi Indonesia*, "Sriwijaya sering dikunjungi biksu-biksu Tionghoa sebelum mereka melawat ke Universitas Nalanda di India (misalnya I-tsing dan Wu-hing) untuk mempelajari tata bahasa Sanskerta dan naskah-naskah suci di Sriwijaya" selama tiga hingga empat tahun (Shadily, 1987:3287).

Pada bulan November tahun 671 Yi Jing berlayar dari Guangzhou (Kanton) menuju ke India. Tak sampai dua puluh hari tibalah ia di Sriwijaya yang waktu itu merupakan suatu pusat penyelidikan ilmu agama Buddha di Asia Tenggara. Di Sriwijaya Yi Jing belajar sabdawidya (tata bahasa Sanskerta) sebagai persiapan kelanjutan perjalanannya ke India.

Setengah tahun kemudian Yi Jing berangkat ke India dengan kapal yang disediakan oleh Sang Raja Sriwijaya. Pada tanggal 8 Februari tahun 673 sampailah Yi Jing di Tamralipiti (Tamluk) di sebelah barat daya Kalkuta dengan melalui Selat Malaka, Kedah, dan Pulau Nikobar. Di sana ia menuntut ilmu agama Buddha selama tiga belas tahun. Kemudian, Yi Jing meninggalkan Tamralipiti dan berlayar kembali ke Sriwijaya dengan melalui Kedah pula. Kali ini kira-kira empat tahun (686–689) Yi Jing berada di Sriwijaya untuk menyalin kitab-kitab suci agama Buddha.

Pada bulan Juli tahun 689 Yi Jing kembali ke Guangzhou untuk memperoleh pembantu penyalin dan kertas beserta tinta Cina. Empat bulan kemudian Yi Jing

pergi lagi ke Sriwijaya untuk ketiga kalinya dengan membawa beberapa pendeta Cina lainnya. Tahun 695 Yi Jing baru pulang ke Cina. Jadi, tahun 671–695 Yi Jing berada di Sriwijaya selama belasan tahun, di samping di India dan tempat-tempat lainnya.

2. Bahasa Kunlun yang Tercatat dalam Buku Yi Jing

Kira-kira pada tahun 691 di Sriwijaya, Yi Jing berhasil menyelesaikan dua buku. Kedua bukunya yang terkenal itu ialah, *Datang Xi Yu Qiu Fa Gao Seng Zhuan* (*Memori Pendeta yang Menuntut Ilmu Agama Buddha di Tanah Barat pada Dinasti Tang*, di bawah ini disingkat dengan *Memori*)¹ dan *Nan Hai Ji Gui Nei Fa Zhuan* (*Catatan Displin Agama Buddha yang Dikirim dari Laut Selatan*, di bawah ini disingkat dengan *Catatan*).²

Buku-buku Yi Jing itu telah mencatat ilmu agama Buddha yang dituntutnya dan pengalamannya di kawasan Laut Selatan. Catatannya di dalam Yamin (1958:16), "Tidaklah saja tentang perkembangan agama Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana di Asia Tenggara, tetapi juga tentang peradaban Indonesia dan perpindahan kekuasaan politik pada penghabisan abad ke-7 di tanah Indonesia. Naskah buku-bukunya telah didapat kembali sehingga I-tsing benar-benar memberi bahan yang nyata seperti dialaminya sendiri dalam abad ke-7 di tanah Indonesia yang sangat berguna bagi pengetahuan mengenai perhubungan Indonesia dengan Tiongkok di bidang rohani dan kebudayaan."

Berhubung begitu pentingnya kedua buku Yi Jing tersebut, *Memori* disalin ke bahasa Prancis oleh E. Chavanner pada tahun 1894. Sementara itu, *Catatan* berhasil disalin ke dalam bahasa Inggris oleh J. Takukusu, sinolog Jepang pada tahun 1896.

Istilah "bahasa Kunlun" yang tercatat dalam *Memori*, antara lain, sebagai berikut.

"Pendeta Yun Qi orang Tonkin ... kembali ke Laut Selatan dan berada di sana untuk belasan tahun lamanya. Ia pandai berbahasa Kunlun."

"Pendeta Da Jin ... berangkat ke Sriwijaya pada tahun ke-2 Yong Chuan (tahun 683) dan singgah di sana beberapa lama. Ia menguasai bahasa Kunlun."

"Meng Hue Ye, murid pendeta Zhen Gu ... sampai di Sriwijaya. Ia menguasai bahasa Gulun (Kunlun)."

Daerah mana yang dimaksudkan oleh Yi Jing dengan istilah "Kunlun"?

Kunlun pun diberi nama "Gulun" atau "Juelun (Chuehlun)". Menurut *Catatan* Yi Jing, penjelasan mengenai Kunlun adalah sebagai berikut.

"Beberapa negara di Laut Selatan ada yang besarnya seratus atau beberapa ratus li, ada yang seratus yojana. Di samudra besar, meskipun sulit untuk mengukur jarak, boleh dipastikan bahwa awak kapal dagang tahu dengan tepat di mana letak Juelun. Nama (Kunlun) itu digunakan untuk menyebut penduduk asli dari kepulauan di Laut Selatan yang disebut Kunlun. Penyebutan itu bertarih dari zaman ketika suku bangsa itu untuk pertama kali datang di Tonkin (Tongkin) dan di Guangzhou (Kanton).

Cirinya ialah rambutnya keriting dan kulitnya hitam. Penduduk asli kepulauan di Laut Selatan di mata orang-orang Cina sama saja seperti itu."

Kata-kata Yi Jing tersebut dikutip pula oleh Slametmuljana (1981:131) dan diterangkannya, "Dalam bahasa Cina, Chueh-lun (K'un-lun) ialah istilah yang digunakan untuk menyebut penduduk asli di negara-negara di Laut Selatan pada umumnya."

Baik Kunlun maupun Juelun atau Gulun, "ditujukan secara umum kepada penduduk asli di Laut Selatan atau di sebelah timur Sungai Gangga," demikian G. Ferrand (1955:5). Di samping itu, sarjana-sarjana lain menulis bahwa Kunlun, yang disebut oleh Yi Jing, tak lain ialah Jawa, Sumatra, dan pulau-pulau lainnya (Ding Fu Bao, 1984:963); Kunlun terletak di Nusantara dan sekitarnya (Wang Bang Wei, 1988:83) dan Kunlun pada masa sekitar dinasti Tang ditujukan kepada bagian selatan Semenanjung Indocina dan kepulauan di Asia Tenggara (Ci Hai, 1979:1480).

Ternyata, Kunlun yang disebut oleh Yi Jing bukan ditujukan kepada suatu negara, melainkan kepada Laut Selatan termasuk Asia Tenggara.

3. Bahasa Kunlun Adalah Bahasa Melayu Kuno

Catatan Yi Jing mengenai bahasa Kunlun di Sriwijaya menimbulkan perhatian yang luas di kalangan sarjana dari berbagai negeri meskipun istilah "Kunlun" dalam bahasa Cina itu disalin ke dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti *K'ouen-louen*, *Kw'un-lun*, *Kw'enlun*, *Kwenlun*, dan *K'un-lun*. Sarjana-sarjana yang pernah membahas masalah tersebut ialah, antara lain, M.G. Ferrand, N.J. Krom, B.B. Parnikel, Prentice, H. Steinhauer, O.W. Wolters, Zuber Usman, S. Takdir Alisjahbana, Slametmuljana, Salaton Hamzah, Ismail Hamid, dan Wang Ren Shu.

Sayang sekali bentuk konkret bahasa Kunlun tidak dicatat oleh Yi Jing dalam bukunya. Namun, banyak sarjana menaksirkan bahwa Kunlun yang disebut oleh Yi Jing itu tak lain adalah bahasa Melayu Kuno pada prasasti-prasasti di daerah dekat Palembang pada abad ke-7—tempat dan masa Yi Jing berada (Steinhauer, 1980:351 – 352; Wang Ren Shu, 1986:370).

Empat prasasti bahasa Melayu Kuno terdapat di Sumatera Selatan dan Bangka yaitu:

- 1) prasasti di Kedukan Bukit dekat Palembang, tahun Saka 605 (683 M),
- 2) prasasti di Talang Tuwo dekat Palembang, tahun Saka 606 (684 M),
- 3) prasasti di Kota Kapur di Pulau Bangka, tahun Saka 608 (686 M), dan
- 4) prasasti di Karang Berahi di daerah hulu Merangin, tahun Saka 608 (686 M).

Keempat prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa dari India Selatan dan bercampur dengan kata pungutan bahasa Sanskerta. Namun, yang pasti bahasa di prasasti-prasasti itu adalah bahasa Melayu Kuno (cf. Pane, 1950:29; Mees, 1969:2-3;

Slametmuljana,1981:67-81; Asmah,1987:403). Di antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu modern terdapat perbedaan-perbedaan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Dalam tulisan kuno tidak terdapat letupan bilabial bersuara, tetapi digunakan vokal bilabial, misalnya perkataan *wulan* (bulan), *wanyak* (banyak), dan *wuat* (buat).
- 2) Huruf e pepet juga tidak ada atau ditulis dengan vokal a, misalnya, *dengan* ditulis *dngan* atau *dangan*.
- 3) Awalan *ber-*dituliskan dalam bahasa Melayu kuno dalam bentuk *mar-*, misalnya *marlepas* (berlepas), *marwat* (berbuat).
- 4) Awalan *ni-* dahulu adalah sama dengan awalan *di-* sekarang, misalnya *niparwuat* (diperbuat); *nikenai* (dikenai). (Hamid, 1987:88).

Di samping itu, terdapat tambahan *h* pada bahasa Melayu modern bila dibandingkan dengan bahasa Melayu kuno, misalnya *sepulu* (sepuluh) (Slametmuljana, 1981:73).

Prasasti Melayu tertua tidak saja terdapat di daerah-daerah yang berbahasa Melayu, tetapi juga di luarnya seperti terbukti dari prasasti Gandasuli di Jawa Tengah pada tahun 827 dan 832 M (Alisjahbana, 1956:7).

Bahasa Melayu kuno pada prasasti-prasasti tersebut berbeda sama sekali dengan bahasa Sanskerta pada prasasti-prasasti di Kuthi (Kutai), Kalimantan Timur dan di Taruma, Jawa Barat pada abad ke-5.

Di sini timbul pertanyaan mengapa bahasa Melayu kuno pada prasasti di Kedukan Bukit, dll. itu bercampur dengan kata-kata Sanskerta, seperti *samvau* (perahu), *siddhayastra* (kesaktian), *subhiksa* (makmur), dan *çuklapaksa* (bagian terang), serta apa sebabnya bahasa Melayu kuno itu ditulis dengan huruf Pallawa dari India Selatan?

Soal-soal tersebut berkaitan dengan pengaruh India terhadap Indonesia pada masa silam. "Boleh dipastikan bahwa pada kira-kira tahun 150 telah ada perhubungan antara India dan Nusantara" (Pane, 1950:22). Di antara orang India yang datang ke Indonesia ada yang membawa kebudayaan India, terutama filsafat, agama, dan sistem negara (Wojowasito, 1953:26).

Fa Xian (Fah Hien), pendeta agama Buddha Cina yang menuntut ilmu agama Buddha ke India pernah singgah di Ye-Po-Ti (Ya-Wa-Di) ketika kembali dari India pada tahun 414. Ye-Po-Ti terletak di Indonesia (khususnya di Jawa atau Sumatera) menurut para sejarawan Cina. Ada sarjana Indonesia yang berpendapat bahwa Ye-Po-Ti tersebut adalah negara Aruteun di Jawa Barat (Slametmuljana, 1981:27). Oleh Fa Xian, ditulis dalam bukunya Fo Guo Ji (Catatan Tentang Negara Buddha) bahwa di Ye-Po-Ti agama Brahman sangat makmur. Buktinya adalah pengaruh India sudah cukup besar di Indonesia pada awal abad ke -5.

Pada abad ke-7 Palembang tempat pusat Kerajaan Sriwijaya tidak saja suatu pusat perdagangan di Asia Tenggara, tetapi juga pusat studi ilmu agama Buddha di

kawasan tersebut. "Guru-guru India yang terkenal (Dharmapala, Syakyakirti, dll) mengajar di Sriwijaya, dan seribu pendeta Buddha menjadikannya pusat yang penting bagi aliran Hinayana, kemudian (sejak abad ke-8) aliran Mahayana meluas dari Sriwijaya ke Asia Tenggara" (Shadily, 1987:3287). Dari fakta tersebut tidaklah mengherankan bila terdapat kata-kata pungutan bahasa Sanskerta dalam bahasa Melayu kuno.

Dalam membicarakan tiga prasasti (di antaranya dua ditemui di sekitar Palembang dan satu di Bangka) tersebut, C.A. Mees menunjukkan bahwa prasasti-prasasti itu memakai bahasa rakyat, bukan Sanskerta. Rupanya, pengumuman itu memang dimaksudkan supaya dibaca oleh rakyat (Mees, 1969:2). Dengan perkataan lain, bahasa Melayu kuno sudah menjadi bahasa resmi dan dikenal baik oleh rakyat di Sriwijaya masa itu. Justru bahasa setempat itulah dipelajari oleh Yi Jing dan pendeta-pendeta Cina lainnya untuk memahami tata bahasa Sanskerta. Adapun bahasa Kunlun yang disebut oleh Yi Jing tak lain adalah bahasa setempat itu – bahasa Melayu kuno, atau "ditaksir sebagai salah satu bahasa Melayu kuno" (Wang Bang Wei, 1988:83). Bahasa Melayu kuno yang ada pada prasasti-prasasti di Kedukan Bukit (683 M) dll telah meluas di Semenanjung Indocina (Campa, Kamboja, dan Malaya) dan Indonesia (Wang Ren Shu, 1987:370). Dalam hal ini, bahasa Kunlun disamakan pula dengan bahasa Melayu kuno pada abad ke-7 oleh O.W. Wolters (Wolters, 1986:28).

Di sini rupanya ada baiknya dicatat pula bahwa bahasa Melayu tidak selalu disebut sebagai bahasa Kunlun dalam buku-buku kuno Cina. Misalnya, Ma Huan (1965), juru bahasa Zheng He (Cheng Ho), pernah mencatat bahwa bahasa di Samudra-Pasai di Aceh sama dengan bahasa yang dipakai di Malaka ketika armada Zheng He mengadakan kunjungan muhibah ke Sumatera pada abad ke-15, dan Bahasa di Samudra-Pasai itu tak lain adalah bahasa Melayu. Namun, bahasa Melayu itu tidak disebut oleh Ma Huan sebagai bahasa Kunlun. Sebagaimana diketahui, bahasa Melayu abad ke-15 tergolong ke dalam bahasa Melayu klasik (cf. Asmah, 1987:403).

4. Simpulan

Bahasa Kunlun di Sriwijaya yang tercatat oleh Yi Jing tidak lain adalah bahasa Melayu kuno seperti yang ada pada prasasti-prasasti Melayu kuno di Kedukan Bukit (683 M) dll. Bahasa Kunlun inilah bahasa perantara bagi Yi Jing dan pendeta-pendeta Cina lainnya di Sriwijaya untuk memahami tata bahasa Sanskerta sebagai persiapan kelanjutan perjalanannya ke India. Pada abad ke-7 itu bahasa Melayu kuno sudah tersebar luas di Asia Tenggara.

Ternyata, bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Kerajaan Melayu di daerah Jambi di Sumatra mempunyai sejarah yang panjang dan terus berkembang sebagai suatu bahasa yang dinamis. Dan kini bahasa Melayu telah dipakai oleh lebih kurang 200 juta orang, terutama di Indonesia, Malaysia, Negara Brunei Darussalam, dan Singapura. Seiring dengan suksesnya usaha penyatuan bahasa Melayu yang terdapat beberapa perbedaan di negara atau daerah yang berlainan (misalnya bahasa Indonesia

dan bahasa Malaysia yang kedua-duanya berasal dari bahasa Melayu), maka dapat diharap bahwa bahasa Melayu baru itu akan menjadi salah satu bahasa dunia pada kemudian hari.

CATATAN:

1. Buku ini ditulis pula menurut bunyi bahasa Cina dengan *Ta-T'ang hsi-yü ch'iu-fa kao-seng chuan* (Wolters, 1986:5) atau *Ta T'ang Si Yu K'ieou Fa Kao Seng Tchouan* -- Tentang Agama-Agama Utama yang Dipeluk untuk Mengamalkan Peraturan Agama di Tanah Barat (Yamin, 1958:15).

"Tanah Barat" pada dinasti Han (206 sebelum M--220 M) ditujukan kepada Propinsi Xinjiang dan Asia Tengah dan daerah-daerah lainnya yang di sebelah barat Yu Men Guan di Propinsi Gansu (*Kamus Bahasa Tionghoa Modern*, 1978:1216). Namun, Tanah Barat juga dinamakan untuk India (Ding Fu Bao, 1984:476).

- 2) Buku ini ditulis pula menurut bunyi bahasa Cina dengan *Nan-Hai chi-kuei nei-fa chuan* (Wolters, 1986:4) atau *Nan hai ki kouai nei fa tcouan*--Pelapuran Agama Buddha seperti Diamalkan di Kepulauan Indonesia (Yamin, 1958:15). Buku tersebut dititipkan oleh Yi Jing ketika berada di Sriwijaya kepada temannya yang pulang ke Cina.

"Laut Selatan" dalam arti sempit ditujukan kepada Laut Cina Selatan. Namun, dalam arti luas, khususnya pada masa silam Cina "Laut Selatan" disamakan dengan daerah dan lautan luas di sebelah selatan Cina, termasuk Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1956 *Sejarah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Asmah, Haji Omar. Juni 1987. *Susur Galur Bahasa Melayu dalam Gelombang Tamadun*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa.
- Asraf, Awang Sariyan, Farid M. Onn, dan Firdaus Abdullah. Februari 1985. *Penyatuan Bahasa Melayu Senusantara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa.
- Chavanes, Edouard. 1894 *Memoire Composé à L'époque de la Grande Dynastie Tang sur Les Religieux Eminents qui Allèrent Chercher La Loi dans Les Pays D'occident, par I-tsing*. Paris
- Ci Hai (Kamus Besar Bahasa Cina), yang direvisi dan diterbitkan oleh Penerbit Perkamusan Shanghai: 1979.
- Ding Fu Bao. 1984 *Kamus Ilmu Agama Buddha*. Beijing: Penerbit Benda Kebudayaan.
- Fa Xian (Fa Hien). *Fo Guo Ji (Catatan Tentang Negara Buddha)*. s.d. Ferrand, M.G. "Le K'ouen-louen et Les Anciennes Navigations Interocéaniques dans Les Mers du Sud", *Journal Asiatique* XIe Série, XIII, 239-358, 431-492; XIV, 5-68, 201-241.
- . *Studi mengenai Negara Kuno Sumatra*. 1995. Disalin ke dalam bahasa Cina oleh Feng Cheng Jun. Beijing.
- Hamid, Ismail. Februari 1987. *Perkembangan Bahasa Melayu dalam Sejarah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa.
- Hamzah, Salaton. 1974. *Bahasa Malaysia dalam Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Krom, N.J. "Transcripties van de reeds vroeger bekende inschriften van Pagarreojoeng en Soeroaso", *Oudheidkundig Verslag 1912 van de Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie*, Bijlage H. 51-52.
- Ma Huan. 1955. *Ying Ya Sheng Lan (Pemandangan Indah di Seberang Samudera)*. Disunting oleh Feng Cheng Yun. Beijing.
- Mees, C.A. *Tata Bahasa dan Tata Kalimat*. 1969. University of Malaya Press, Kuala Lumpur: Singapura.
- Pane, Sanusi. 1950 *Sejarah Indonesia I*, cetakan ke-4; Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.

- Parnikel, B.B. 1977. "K voprosu o funkcijax pis'mennogo malajskogo jazyka i o sostave malajskoj tradicionnoj literatury", *Malajsko-indonezijskie issledovanija*, Sbornik statej pamjati akademika A.A. Gubera, Moscow, 90-104.
- Prentice, D.J. 1978. "The Best Chosen Language", *Hemisphere* 22-3 (March) 18-23; 22-4 (April) 28-33.
- Shadily, Hassan (ed). 1987. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta.
- Slametmuljana. 1981. *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Steinhauer, H. 1980. "On The History of Indonesian". *Studeis in Slavic and General Linguistics. Volume 1*. Utrecht, The Netherlands, 350-351.

LAPORAN SIDANG

Judul Makalah : Bahasa Kunlun dalam Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu
Pemakalah : Kong Yuan Zhi
Pemandu : Soenjono Dardjowidjojo
Pencatat : Nantje Harijati W.
Ani Mariani

Rangkuman

Yi Jing, pendeta dari Cina, menggunakan nama Kunlun untuk menyebut penduduk asli Kepulauan Laut Selatan atau di sebelah timur sungai Gangga. Cirinya berambut keriting dan berkulit hitam. Lain halnya dengan banyak sarjana, mereka menaksirkan bahwa Kunlun yang disebut Yi Jing itu tidak lain adalah bahasa Melayu Kuno dan sayang sekali bentuk konkret bahasa Kunlun tersebut tidak dicatat oleh Yi Jing dalam bukunya.

Tanggapan:

Dalam makalah yang berjudul *Bahasa Kunlun dalam Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu*, pemakalah hanya mengadakan spekulasi dan hal ini memerlukan bukti-bukti.

KEBUDAYAAN SEBAGAI PENGETAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN BAHASA DI INDONESIA

Edmund A. Anderson
Hongkong

1. Pendahuluan

Selama 15—20 tahun ini, seluruh bidang pengajaran bahasa dan bidang-bidang yang berkaitan dengannya yaitu ilmu pengajaran bahasa dan ilmu untuk memperoleh kemampuan berbahasa mengalami aktivitas yang besar. Sebelumnya, kebanyakan prinsip-prinsipnya telah diturunkan dari ilmu bahasa struktur, yang akibat sukses dalam pembangunan lembaga-lembaga militer untuk pengajaran bahasa, seperti Army Language School di Monterey, California, A.S. pada umumnya sudah dianggap standar.

Mulai tahun-tahun akhir 1950-an, prinsip ini mulai dikritik dan ketidaksetujuan dengan pemakaian prinsip ini makin lama makin sering diutarakan. Kebanyakan pelajar-pelajar bahasa sesudah Perang Dunia II bukan orang militer. Bagi mereka, kemungkinan memakai kekerasan cara mengajar bahasa Army Language School (terutama *the oral metode*, yang mengharuskan para pelajar meniru-niru ucapan dan mengulangi pola-pola kalimat dan cara mengajarnya didasarkan teori ilmu pendidikan *behaviorism*) tidak dapat dikerjakan dengan mudah. Selain itu, pemakaian bahasa yang dipelajari waktu damai berbeda dari keperluan waktu perang (misalnya, di tempat tertentu *mendengarkan keadaan musuh* untuk menangkap komunikasi di antara pesawat terbang musuh dan pengawasan dari darat).

Pada umumnya, makin lama makin banyak perhatian guru-guru bahasa dan para pengarang buku pelajaran diarahkan kepada situasi pelajar bahasa dan kepada proses belajar bahasa. Yang mulai dilupakan ialah pencarian untuk *metode yang sempurna* yang akan dapat menyelesaikan semua persoalan para guru bahasa dengan menyediakan suatu mantra yang dapat memastikan keberhasilannya.

Saya ingat buku-buku karangan Earl Stevick, ramalan guru-guru TESL zaman '70-an, dengan judul *Memory, Meaning and Methods: Some Psychological Perspectives on Language Teaching*¹ dan *Teaching Languages: Away and Way's* yang dengan jelas menjelaskan pikiran zaman itu. Di dalam buku itu, Stevick mengkritik pencarian

keajaiban pengajaran dan pelajaran bahasa, yaitu pencarian hasrat oleh guru-guru bahasa dan pengarang-pengarang buku pelajaran bahasa untuk *metode yang sempurna* yang dapat mereka terapkan di dalam kelas atau program pengajaran bahasa mereka. Dengan demikian, mereka dan murid-murid mereka bagaimanapun pasti akan berhasil.

Stevick menunjukkan bahwa kebanyakan metode terkenal yang dipakai pada waktu itu berhak dibanggakan atas keberhasilannya. Menurut Stevick, kunci keberhasilan seorang pelajar bahasa tidak tergantung pada apakah guru memakai atau tidak memakai, misalnya, *the oral method* (metode dalam mana guru selalu bicara dalam bahasa yang dipelajari), tetapi bergantung pada *cara penggunaan* metode itu. Guru-guru dapat berhasil, bukan hanya karena pemilihan suatu metode, melainkan karena mereka secara sadar atau tidak dapat memberi para pelajar yang diperlukan oleh pelajar (meskipun pelajar tahu atau tidak tahu *yang diperlukan*, dibandingkan dengan *yang diinginkan*). Seorang guru yang baik kadang-kadang terpaksa memberi pelajar *yang diinginkan* si pelajar meskipun hanya buang waktu sementara (misalnya, permintaan mendesak dari seorang pelajar untuk belajar "abjad bahasa Indonesia"), tetapi akhirnya dia tahu bahwa dia dapat berhasil sebagai guru bahasa hanya kalau dia dapat memberi si pelajar *yang diperlukan* agar dapat menggunakan bahasa itu untuk memenuhi keperluannya dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam pekerjaannya atau lingkungan sosialnya.

Pelajaran bahasa untuk komunikasi (*communicative language learning*). Dari segi ilmu bahasa, karangan dua orang Amerika Serikat, ahli antropologi John Gumperz dan ahli antropologi yang berkenaan dengan ilmu bahasa Dell Hymes memperkenalkan konsep *kemampuan berkomunikasi*³ melahirkan konsep-konsep *pelajaran bahasa untuk komunikasi* dan *pengajaran bahasa untuk komunikasi*.

Kemampuan komunikasi suatu konsep yang sekaligus menggairahkan dan produktif merupakan suatu kemajuan. Akan tetapi, cara konsep *kemampuan berkomunikasi* dilaksanakan pada dasarnya tidak menguntungkan pelajar dan guru. Sayang sekali, *pelajaran dan pengajaran bahasa untuk berkomunikasi* dijadikan *metode yang terbaru* untuk diterapkan dalam kelas-kelas, pelajaran-pelajaran dan program-program pengajaran.

Kemampuan komunikasi didasarkan pada filsafat yang memandang persoalan yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pelajaran bahasa dari keadaan keseluruhan. Akan tetapi, pelaksanaan teknik-teknik untuk mencapai *kemampuan berkomunikasi* selain menghilangkan hal-hal yang baik dari *the oral metode*⁴ bahan pelajaran dan pengajaran. Selain itu, bahan-bahan pelajaran ini memecahbelahkan pandangan dari keadaan keseluruhan tentang apa harus yang dipelajari dengan memberikan pelajar-pelajar beberapa *kalimat atau ungkapan dasar* (*key phrase*) yang dipakai, misalnya *membuat permohonan* (*make requests*), atau *mendapatkan informasi* (*get information*), atau salah satu fungsi bahasa yang lain. Pengarang pelajaran bahasa itu menganggap bahwa para pelajar sudah mempunyai banyak pengetahuan tentang situasi berbicara dan *kalimat atau ungkapan dasar* hanya disambungkan ke dalam pengetahuan tentang

situasi berbicara masing-masing untuk membuat percakapan tanpa persiapan sebelumnya.

Daya cipta dalam pemakaian bahasa (linguistics creativity) dipakai untuk mengkritik "pekerjaan yang membosankan, yaitu mempelajari pola kalimat dan dialog" serta diutamakan (mungkin lebih sebagai iklan daripada pokok pedagogis.)³ Dengan memberikan beberapa *kalimat atau ungkapan dasar (key phrases)* kepada si pelajar, dia diminta menggunakan *daya cipta* untuk membuat dialog sendiri⁴ untuk berkomunikasi dengan tepat.

Selain menganggap rendah pentingnya pengulangan dan latihan dalam proses memperoleh *kemampuan berbahasa*, cara membuat latihan ini kenyataannya mengabaikan kesadaran tentang bahasa yang sedikit demi sedikit muncul dalam pikiran dalam bidang-bidang ini pada dasawarsa 1980-an, yaitu kesadaran bahwa apa pun yang dikatakan orang selalu ditemukan dalam struktur komunikasi tulisan dan lisan yang lebih besar, yaitu *discourse structure* dalam bahasa Inggris.

Michael Halliday dan Ruqaiya Hasan, antara lain, telah menunjukkan secara jelas bahwa pola-pola *discourse* pada umumnya dapat diramalkan dalam bahasa apa pun; memang, tidak setepat struktur fonologi atau struktur tata bahasa, tetapi bagaimanapun jauh dari sembarangan.

Makalah ini menjelaskan pendapat pengarang mengenai cara memecahkan persoalan-persoalan ini dan akan mengutamakan suatu konsep 'kebudayaan sebagai pengetahuan' dan berusaha menerangkan segi-segi dari konsep ini yang relevan yang dapat lebih menjelaskan persoalan yang dialami pada saat ini dalam kegiatan pengajaran dan pelajaran bahasa. Terutama, pengarang akan membuka beberapa usul mengenai bagaimana cara pelajar mulai memecahkan persoalan untuk mendapatkan bahan pelajaran yang realistik dan dapat diandalkan sebagai dasar pelajarannya.

2. Kebudayaan

Dalam pengalaman saya, konsep kebudayaan sebagai pengetahuan sangat produktif menghasilkan ide-ide mengenai bagaimana cara memajukan pengajaran dan pelajaran bahasa. Kebudayaan ialah pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan orang dan yang dipakai untuk mengartikan pengalaman orang-orang dan menghasilkan tindak-tanduk sosial.⁵

Dalam beberapa segi definisi ini perlu ditekankan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kebudayaan ialah apa yang *diketahui orang-orang*.
- 2) Sebagian pengetahuan diperoleh pada waktu lahir (yang disebut *naluri*). Kebudayaan adalah *pengetahuan* yang diperoleh dari pengalaman yang dialami selama hidup bersama dengan orang lain dalam masyarakat. Sedikit saja pengetahuan kebudayaan dipelajari secara formal. Kebanyakan diperoleh secara tak sadar dari orang tua, anggota keluarga, teman-teman, tetangga, dll. Implikasi-

nya ialah pengetahuan ini yang sama-sama dipegang disebut kebudayaan. Tentu, ada pengetahuan pribadi (yang dipelajari ahli-ahli psikologi).

Pada umumnya, sepanjang kehidupan kita masing-masing, kita memperoleh informasi baru, menggabungkannya dengan yang diketahui sebelumnya dan kita susun kembali seluruh pengetahuan.⁷ Misalnya, konsep *kebersihan* mungkin diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut.

Melalui seribu isyarat yang hampir tak terlihat: hidung kisut [orang tua], nada suara menjijikkan, interversi jasmani yang kasar, Saudara memperoleh pengetahuan. [Dengan kemajuan kemampuan berbahasa seorang anak], istilah untuk *bersih* dan *kotor* dihubungkan [oleh orang tua, anggota keluarga, teman-teman, dll.] dengan macam-macam kata *cerita, pakaian, tempat, bau, dan orang* [-pun].⁷

3) Kebudayaan berguna

Kebudayaan terjadi dari semua hal [orang-orang] yang perlu mengetahui untuk mengartikan kehidupan: kepercayaan atau perasaan, peraturan, standar, ide dan gambaran.⁸ Kebudayaan membantu kita membuat tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diidamkan. Pengetahuan kebudayaan seperti *resep* untuk menghasilkan tindak-tanduk dan benda-benda.⁹ Misalnya, bagaimana cara anak-anak *menghormati orang tuanya*? Apa arti sebenarnya "sungguh-sungguh menghormati" orang tua, dibandingkan dengan "asal saja"? Apa yang diketahui sehingga anak remaja sampai menikah? Ini baru beberapa tindak-tanduk yang diartikan dan dikendalikan oleh kebudayaan.

Kebudayaan suatu masyarakat memungkinkan *penyesuaian* kehidupan masyarakat tersebut dengan lingkungannya. Dengan perubahan situasi dan kondisi kehidupan mereka (melalui perpindahan tempat, perubahan iklim, perang, hubungan dengan golongan orang yang baru melalui perdagangan, dll.), kebudayaan suatu masyarakat langsung diuji untuk melihat apakah kebudayaan tersebut mengajukan *penyesuaian* kehidupan mereka dan dengan demikian, kelangsungan hidup atau menjadi beban yang mengakibatkan kemunduran nasib anggota masyarakat tersebut. *Penyesuaian* menyinggung... menanggulangi lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk kelangsungan hidup.¹⁰

Kita harus makan dan minum secukupnya, harus mempertahankan panas badan kira-kira 37°C [98.6°F] dan harus membela diri sendiri dari musuh.¹¹

Kita perlu kasih-sayang dan relatif bebas dari ketakutan dan kegelisahan. Ketakutan dan kegelisahan yang berlaku terlalu lama bisa memusnahkan kita.

Kita harus dapat membedakan kebaikan dan kejahatan dan harus tahu bagaimana menanggulangi kejahatan. Kita harus menanggulangi dukacita atau kesedihan dan permusuhan orang lain.¹²

Kita harus *mengganti diri sendiri* melalui melahirkan anak dan menerima orang-orang baru dan harus mengintegrasikannya. Kita harus membagikan barang-barang, peralatan, dan pelayanan dalam masyarakat serta harus punya cara berkomunikasi dengan orang lain.¹³

a. Unsur Struktur Kebudayaan

Bagaimana *unsur struktur* kebudayaan?

Pertama-tama ialah *simbol*, adalah ... objek atau peristiwa apa pun yang dianggap berarti.¹⁴ *Benda-benda* yang sering bermanfaat sebagai simbol: bendera, lambang suatu keluarga (bhs. Ingg: *coat of arms*), merek mobil, komputer, dll. *Peristiwa* dapat mempunyai makna tertentu, misalnya Proklamasi Kemerdekaan 1945 atau Sumpah Pemuda. Akan tetapi, yang paling penting ialah golongan *simbol lisan (dan tulisan)* dan *konsep-konsep* yang sehubungan dengannya.

Mempelajari kebudayaan suatu masyarakat penting untuk dapat mengerti simbol lisan (dan tulisan) atau ungkapan kebudayaan itu. Arti *mengerti* dalam hal ini adalah memahami konsep-konsep, yaitu arti yang dihubungkan dengan simbol-simbol.¹⁵

Simbol dan konsep ialah *prinsip penggolongan* simbol dan konsep. *Prinsip penggolongan* berlaku pada waktu orang menggolongkan benda-benda atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak sama, tetapi kita anggap seolah-olah sama.¹⁶

Misalnya konsep *kebersihan* membantu menjelaskan prinsip ini. Yang dianggap "kotor" atau "kurang bersih" sebenarnya berbeda.

Prinsip organisasi yang kedua ialah prinsip *kode kebudayaan*, yaitu... sekumpulan peraturan untuk membentuk, menggabungkan, dan menafsirkan simbol-simbol.¹⁷

Mengendarai mobil merupakan suatu contoh *kode kebudayaan*. Sopir mobil perlu membuat beberapakegiatan mekanis (menghidupkan mesin, mengemudikan mobilnya, memakai rem, ganti persneling, menyalakan lampu untuk membelok, lampu besar dan alat penyuram lampu besar, dll.). Akan tetapi, yang lebih penting ialah bagaimana mengemudikan mobilnya di jalan (setir kanan atau kiri, jalan di jalur dengan baik, mematuhi batas kecepatan, dll.).

Macam peraturan yang kedua cukup ruwet sebab kadang-kadang ada peraturan yang sebenarnya kekecualian peraturan yang dasar, misalnya, *peraturan khusus untuk melanggar peraturan dasar*. Sopir mengemudi mobilnya ke sebelah kiri jalan akan sangat frustrasi seandainya ada kendaraan lambat di depan mobilnya atau ada perbaikan jalan atau ada pohon jatuh di jalur kiri dan menghalangi lalu lintas. Itu sebabnya *kode lalu lintas* perlu ditinjau kembali dengan bentuk seperti berikutnya: *Setir sebelah kiri jalan kecuali mendahului mobil yang lain*¹⁸ atau *seandainya diizinkan petunjuk jalan atau polisi lalu lintas*. Selanjutnya, satu hal yang penting ialah *tingkat-tingkat kesadaran*¹⁹ pengetahuan kebudayaan. Yang pertama ialah *penge-*

*tahuan kebudayaan yang dibicarakan berlawanan dengan pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan.*²⁰

Suatu contoh *pengetahuan kebudayaan yang dibicarakan* ialah kalau orang tua mendidik anaknya dalam cara yang sopan bertindak-tanduk dan merasa dalam masyarakat dengan sebab-sebabnya.²¹

Pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan ialah ... pengetahuan yang sama-sama dipunyai orang-orang yang tidak mungkin dibicarakan [atau dibicarakan dengan susah payah].²²

Pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan diperoleh secara tidak sadar. Pada umumnya, kebanyakan pengetahuan kebudayaan dan terutama kebanyakan struktur bahasa dan cara memakai bahasa adalah *pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan*. Keadaan ini mendasarkan logika argumentasi saya untuk memperbaiki cara belajar bahasa terutama bahan pelajaran yang dipakai dan cara mempersiapkan guru-guru bahasa.

Ilmuwan yang meneliti kebudayaan yakin bahwa *pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan* sangat penting sebab pada umumnya kebanyakan orang hidup dengan menggunakan *pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan*, bukan pengetahuan kebudayaan yang dibicarakan. Penjelasan kebudayaan yang dibicarakan seringkali cita-cita dan ideal-ideal bukan penjelasan cara mereka hidup sebenarnya. Sebenarnya menurut *pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan*, orang mungkin hidup tidak sesuai dengan ideal, tetapi menurut prinsip kegunaannya (yaitu, Akan berhasil? Boleh dibuat tanpa ditangkap polisi?

Sayangnya, *pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan* tidak mudah dijelaskan. Penelitiannya perlu perhatian yang besar. Tujuannya perlu dipertahankan keras-keras. Bagaimanapun, tidak mustahil menghubungkan *pengetahuan kebudayaan yang tidak dibicarakan* dan *pengetahuan kebudayaan yang dibicarakan*.

Pertama, kita harus memperhatikan "apa yang terjadi" mengingatkan pemakaian bahasa lisan dan tulisan di kelilingnya dan reaksi orang-orang (nonverbal) terhadap "apa yang terjadi."²³

Sebagai orang luar suatu masyarakat, kita boleh menggunakan kesadaran bahwa ... dihadapi dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan kebudayaan seperti anak-anak [atau orang luar], orang biasanya membicarakan hal-hal yang biasanya tidak dibicarakan.²⁴

Ketiga-tiganya kita boleh menggunakan kesadaran bahwa situasi tertentu memungkinkan komunikasi lisan. Penjelasan sebagian pengetahuan kebudayaan biasanya lebih lancar kalau pemilik pengetahuan kebudayaan berada dalam situasi pengetahuan tersebut bermanfaat atau digunakan.²⁵

b. Kedua Macam Pengetahuan dan Cara Belajar Bahasa

Kita dapat mengetahui lebih daripada yang dapat kita terangkan.²⁶ Dalam proses pemerolehan kemampuan berbahasa, anak-anak sudah dapat mengucapkan kata-kata dan kalimat sebelum mengetahui arti kata itu sebenarnya.

Waktu anak laki-laki saya berumur tiga tahun, dia suka mengatakan /h.Its/ saat menunjukkan punggung yang gatal dan juga waktu menunjukkan lutut yang sakit atau terkelupas akibat jatuh. Dia memakai /h.Its/ untuk dua keadaan. Bagi orang dewasa, kedua keadaan ditunjukkan dengan dua kata yang berbeda, yaitu /h.Its/ dan /Itfəz/. Selanjutnya, yang dipelajari selalu dalam suasana sosial. Yang disebut dan dibuat anak tersebut ditafsirkan berhubungan dengan nilai-nilai sosial: "Lisa anak baik", "Laura ramah sekali". Akan tetapi, pusat perhatiannya pada nilai-nilai sosial, tindak-tanduk bahasa yang sebenarnya sebagai dasar untuk pertimbangan sosial berhubungan sosial nilai-nilai tetap tidak diucapkan.

Sebagai akibat pemerolehan kemampuan berbahasa, secara tidak sadar adalah *apa yang diketahui orang yang cakap berbahasa dengan lancar*.²⁷ Jawaban itu mempunyai implikasi cukup penting untuk pelajaran dan pengajaran bahasa.

- 1) Meskipun semua orang tidak sama pandainya memakai bahasa, orang tahu cara untuk berusaha menyelesaikan persoalan komunikasi.
- 2) Mereka dapat memerankan apa yang seharusnya dikatakan dan dibuat dalam sandiwara keadaan sosial sehari-hari.
- 3) Mereka dapat mempertimbangkan sebutan orang lain mana yang kedengarannya "tepat" atau "tidak tepat".²⁸

Sebaliknya, adalah penting mengatakan *apa yang tidak diketahui orang yang cakap berbahasa dengan lancar*.

- a) Kalau ditanya, mereka tidak dapat menjelaskan dengan tepat seluk-beluk bagaimana menyelesaikan persoalan komunikasi. Mereka tidak tahu cara *menjelaskan* yang seharusnya dikatakan dan dibuat tanpa memerankannya sendiri. *Penjelasan* itu kurang teliti dan seluk-beluk tidak mengikutsertakan banyak bahan yang relevan (misalnya, partikel *kok*, *sih*, dan *nih* dalam percakapan santai). Biasanya, banyak informasi yang penting tidak diikutsertakan dengan asumsi bahwa informasi itu umumnya diketahui secara analogis oleh semua orang, termasuk para pelajar.
- b) Mereka tidak dapat menjelaskan *mengapa* suatu sebutan "kedengarannya tidak tepat".

Fakta seperti ini telah diperhatikan Steven Krashen dalam modelnya mengenai pemerolehan kemampuan berbahasa seorang anak. Bagi Krashen, "monitor bahasa" menunjukkan bagian otak yang secara sadar memperhatikan pemakaian bahasanya dan orang lain, yang prinsipnya dibentuk sebagai penjelasan peraturan bahasa. Waktu memperoleh bahasa yang baru, "monitor bahasa" kurang

berguna dibandingkan bagian otak yang mengatur "memperoleh kemampuan berbahasa secara tak sadar".

c. Kebudayaan sebagai Pengetahuan dan Guru Bahasa

Apa artinya semua ini terhadap proses mengajar dan belajar bahasa?

Yang tepat adalah bagaimana *peranan guru bahasa* dalam proses pelajaran bahasa?

Dari pengalaman saya selama tujuh tahun di Indonesia dan sekarang empat tahun di Hongkong kelihatannya ada banyak guru bahasa privat atau dalam kurs yang bertindak seolah-olah menjaga rahasia profesi adalah hal yang paling penting. Mereka takut orang lain akan mencuri rahasia profesi. Sebaliknya, mereka setiap saat mencari cara memperoleh rahasia profesi orang lain. Yang dikerjakannya kelihatannya bertujuan membuat para pelajar *tergantung pada* kepandaianya. Akibatnya, mereka secara tidak sadar menolong para pelajar *membuat koneksi* di antara *pelajaran bahasa dan pengalaman sehari-hari para pelajar*. Strategi ini berhasil sampai titik tertentu. Pelajar yang sungguh-sungguh akan kembali beberapa kali, tetapi sering berhenti karena mereka tidak merasa mulai menguasai kehidupannya melalui bahasa dalam keadaan kebudayaan yang baru.²⁹ Atau, kalau mereka bertemu guru pribadi atau guru lain yang mementingkan kedewasaan pelajar dalam pemakaian bahasa dengan menolong membuat koneksi tersebut di atas, guru yang berusaha membuat pelajar tergantung pada dia akan ketinggalan.

Guru bahasa yang menolong pelajar membuat koneksi tersebut ialah guru pribadi atau guru yang tidak akan tidak mempunyai murid. Dalam pengalaman saya sama seorang guru bahasa yang baik cepat disebar di Indonesia. Dia tidak akan selesai-selesai memperoleh banyak pelajar baru dan kebanyakan akan karena guru diakui kepandaianya oleh pelajar yang telah berhasil.

Guru bahasa, terutama bahasa Indonesia, memperoleh petunjuk untuk membantu para pelajar memperoleh kemampuan berbahasa yang berlaku? Saya anggap petunjuk terbaik sampai saat ini ialah petunjuk Donald N. Larson, yang disebut *barefoot language learning*, yaitu *pelajaran bahasa kaki telanjang*" (BLL, selanjutnya).³⁰ Asumsinya pelajar yang sungguh-sungguh akan memperoleh bahasa bagaimana saja. Lalu, tujuan BLL ialah untuk membantu pelajar maju dalam bahasa dengan cara apa pun.

Kunci BLL ialah konsep *the learning cycle*, yaitu *gambaran roda pelajaran lima jari* yang dapat dipakai guru bahasa untuk merencanakan pelajar memperoleh kemampuan berbahasa dan akan tetap dipakai para pelajar waktu pelajaran formal selesai. Saya memakai gambaran ini untuk membuat kursus lengkap untuk bahasa Indonesia lisan³¹, tahap pertama kursus bahasa Sunda lisan³² dan lebih dari setengah tahap pertama bahasa Jawa lisan.³³

Hal itu dikendalikan oleh nilai tujuan yang dasar, yaitu menolong pelajar dapat berdiri *secara dewasa* dalam bahasa dan oleh nilai instrumen dasar dari *pelajar yang*

terus-menerus terlibat dengan anggota golongan para pemakai bahasa yang dipelajari dan dengan segala macam hasil pengetahuan kebudayaan yang ada melalui interaksi pribadi dalam segala macam sastra dan media masa, pelajar ditolong tahap demi tahap untuk maju secara realistis. Setiap tahap terdiri dari lima langkah, seperti berikut ini.

Langkah (1) Menentukan tujuan pelajaran: Untuk apa mempelajari bahasa?

Langkah (2) Memperoleh pengetahuan kebudayaan (Teks-teks; sumber pengetahuan: guru pribadi atau guru, buku, dan sumber yang lain) **diperlukan** untuk mendapatkan *kemampuan berkomunikasi* dan dengan demikian dapat mencapai tujuan dalam Langkah (1).

Langkah (3) Berlatih yang diperoleh dalam Langkah (2)

Latihan Kelancaran -

Kalimat-kalimat dalam *teks* sebagai bahasa dalam keadaan tertentu adalah

- a. mendengarkan,
- b. mengartikan,
- c. menirukan,
- e. memproduksi bersama-sama,
- d. mengatur pembagian dan sumbangan,
- f. membuat restorasi, dan
- g. mengalternasi.

Latihan Ketelitian -

- a. Mempelajari bunyi baru:
 1. Mendengarkan
 2. Menirukan
 3. Memproduksi
- b. Membedakan bunyi yang hampir sama:
 1. Mendengarkan
 2. Menguji pendengaran
 3. Menirukan
 4. Memproduksi

Latihan Tata Bahasa

- a. Latihan pola kalimat:
 1. Mendengarkan
 2. Menirukan
 3. Memproduksi
- b. Latihan golongan pola kalimat:
 1. Mendengarkan
 2. Menguji pendengaran
 3. Menirukan
 4. Memproduksi

Latihan Kosakata

- Menggolongkan kata/istilah/ungkapan baru
- Mendefinisikan kata/istilah/ungkapan
- Membedakan kata-kata/istilah-istilah/ungkapan-ungkapan yang hampir sama
- Mengisi kata-kata/istilah-istilah/ungkapan-ungkapan ke dalam golongan kata tertentu
- Mencari batas luas arti kata/istilah/ungkapan

Langkah (4) Menggunakan yang dilatih: Sandiwara (di dalam kelas),
Dalam masyarakat (luar kelas),

Langkah (5) Menilai kegiatan Langkah 1--4:

Apakah si pelajar telah mencapai tujuan?

Persoalan apa yang telah dihadapi?

Bagaimana cara menyelesaikannya?

Bagaimana reaksi orang-orang di luar kelas terhadap percobaan pelajar menggunakan bahasa yang dipelajari?

d. Kebudayaan sebagai Pengetahuan dan Pengarang Bahan Pelajaran

Satu hal yang dilepaskan pengikut *pengajaran bahasa untuk komunikasi* ialah kepentingan pengajaran dan pelajaran peraturan tata bahasa secara formal. Ada beberapa sebab yang tidak perlu disebut di sini.

Menurut hemat saya, masalah mengajar peraturan tata bahasa atau tidak mengajar tata bahasa dapat diterangkan dari kesadaran bahwa pada waktu ahli bahasa berusaha menjelaskan secara jelas pengetahuan yang dipakai orang yang cakap berbahasa tertentu mengenai berbicara dan menulis ialah relatif banyaknya pengetahuan tersebut. Kita makin lama makin sadar bahwa penelitian yang paling dalam sampai saat ini sebagian kecil saja dari pengetahuan tersebut. Makin lama ahli bahasa makin sadar mengenai *the vastness of human language* dalam kata *Langendoen* dan *Postal*(?), yaitu *keluasan* pengetahuan kebudayaan mengenai bahasa. Meskipun alat-alat elektronika makin lama makin mampu menangkap dan menganalisis tindak-tanduk berbahasa, kita makin lama makin sadar akan *keluasan* aspek-aspek kecil mengenai bahasa dan hal semacam itu diperoleh secara tidak sadar oleh anak-anak sebelum mereka mencapai ulang tahun kelima.

Pengetahuan ini kelihatannya diperoleh lebih dalam dan efisien daripada pengetahuan yang diperoleh dari pelajaran formal peraturan tata bahasa. Tujuannya bukan untuk menjelaskan peraturan tata bahasa supaya para pelajar memperolehnya, melainkan untuk mengatur pemerolehan kemampuan berbahasa dengan menghilangkan halangan proses pemerolehan kemampuan berbahasa secara tidak sadar.

1) Teks dan Bahan Pelajaran Buatan

Pengarang buku pelajaran bahasa biasanya ingin menyediakan bahan bahasa yang khas (teks-teks) dan sesuai dengan kemampuan para pelajar. Untuk memenuhi keinginan itu, pengarang cenderung mengolah bahan bahasa yang disediakan. Guru yang terlatih pun hanya dapat secara jelas *menerangkan* kurang dari yang dia *ketahui* secara tidak diucapkan.

Saya pernah menguji prinsip ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Canton di Hongkong. Saya minta guru-guru menjelaskan kepada saya apa yang harus saya ketahui untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam masyarakat melalui bahasa yang saya pelajari.

Kedua grup guru mengabaikan banyak hal yang akan diperlukan para pelajar. Hal itu adalah hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai pemakaian bahasa untuk komunikasi yang tidak diucapkan. Saya terpaksa berulang-ulang bertanya supaya pertama mereka sadar saya betul-betul tidak mengerti *pengetahuan tidak dibicarakan* tertentu. Misalnya, mereka biasanya memberikan pokok pembicaraan suatu percakapan dan berasumsi bahwa saya sebagai pelajar pasti akan mengetahui bagaimana membuka percakapan dan sampai pokok pembicaraan selanjutnya menutup percakapan. Kedua, saya harus bertanya berulang-ulang supaya mengisi kekosongan dalam teks (dari Pembukaan sampai Penutupan).

Bagaimanapun, beberapa aspek kode bahasa yang tidak dibicarakan biasanya tidak diikutsertakan (misalnya, partikel). Kalau ditanyakan, guru-guru menjelaskan bahwa partikel tidak punya arti. (Ini dibicarakan dalam bagian makalah ini *Kebudayaan sebagai Pengetahuan dan Pendidikan Latihan Guru Bahasa*.)

2) Bahan Pelajaran yang Asli

Pemakaian bahan pelajaran yang asli ialah salah satu cara yang lebih mendekati ideal untuk menyediakan kepada pelajar bahan bahasa yang realistis dan dapat diandalkan sebagai dasar pelajarannya. Bahan pelajaran yang asli untuk pelajaran bahasa lisan ialah pusat perhatian saya sejak tahun 1975. Saya pernah mengikuti demonstrasi bahan pelajaran yang asli yang dipakai di koran-koran dan majalah, dan saya mendukung pemakaian bahan tersebut untuk pelajar tingkat menengah atau lebih ke atas. Saya sendiri pernah mengarang bagaimana menggunakan acara radio dan televisi untuk latihan mendengarkan, tetapi untuk pelajar yang baru mulai bahan pelajaran yang asli, itu merupakan hal yang paling penting.

Kita perlu menemukan cara untuk mengajak anggota masyarakat yang menggunakan bahasa yang dipelajari dalam hal membuka jalan ke *pengetahuan bahasa dan pemakaian bahasa yang tidak diucapkan*.

Satu cara yang dipakai dengan sukses sebenarnya sangat sederhana pemakaiannya, tetapi hasilnya bahan bahasa asli yang dicari sangat berharga. Orang yang cakap berbahasa dipelajari diberi suatu masalah atau tugas yang harus diselesaikan pelajar

di luar kelas dalam masyarakat. Selanjutnya, mereka meminta menyandiwarakannya seperti biasa. Pembuatannya direkam audio (atau video). Rekaman masing-masing dinilai oleh juri terdiri dari pemain sandiwarawan dan orang yang berbahasa tersebut. Penilaian menyebutkan apakah tiap rekaman seperti asli atau kaku dan kalau dianggap seperti asli dianggap pantas untuk dipakai sebagai bahan pelajaran³⁴. Cara menirukan proses anak-anak mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari bayi dibandingkan dengan kehidupan digambarkan oleh pengarang teks sendiri.

4. Kebudayaan sebagai Pengetahuan dan Pendidikan Latihan Guru Bahasa

Orang yang cakap berbahasa apa pun *dapat* percaya mengenai perasaan mereka sendiri mana ucapan atau pola kalimat atau sebutan dalam percakapan yang *kedengarannya pantas* meskipun seperti telah saya katakan tadi jarang mereka dapat menjelaskan mengapa yang *tidak pantas* memang begitu. Dalam penjelasannya, mereka akan ingat penjelasan tata bahasa guru bahasanya berdasarkan keputusan tentang mana yang betul dan mana yang tidak betul menurut standar pemakaian bahasa dalam keadaan formal dan untuk tulisan ragam formal.

Guru pribadi atau guru adalah orang yang cakap berbahasa yang dipelajari tidak dikecualikan dari mantra-mantra dan penjelasan-penjelasan *folklinguistik*. Daripada hanya menurunkan cerita rakyat tentang bahasa, guru pribadi atau guru bahasa perlu menjadi penyelidik dan orang yang memperhatikan percakapan mereka sendiri dan tulisan sendiri juga segala macam orang yang cakap berbahasa dalam masyarakat.

Percakapan berikutnya di antara seorang pelajar dan seorang guru pribadi terjadi beberapa tahun yang lalu.

Pel. Apa artinya kata-kata seperti
sih, kok, loh, nih, etc. dalam
bahasa Indonesia

Peng. Tidak ada arti

Pel. O, kalau begitu, tidak usah di-
pakai, betul? Lebih irit!

Peng. T-i-d-a-k?!
dipakai, rasanya
kurang lengkap

Pel. Bagaimana?

Pokoknya partikel-partikel memang mempunyai makna konotatif, bukan makna leksikal. *Perasaan* atau *intuisi* bahasa kepunyaan guru pribadi atau guru dapat dipercayai para pelajar. Penjelasan (misalnya, tidak ada arti dalam percakapan di atas)

membantah *perasaan* atau *intuisi* guru pribadi atau guru bahasa sendiri dan *perasaan* yang akhirnya tepat dan penjelasan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya, campur tangan si pelajar yang akhirnya menggoda pikiran guru pribadi atau guru bahasa sehingga sadar bahwa penjelasannya tidak tepat. Itu sebabnya, saya katakan bahwa guru pribadi dan guru bahasa tidak perlu hanya mempelajari rahasia dan teknik profesi ini, tetapi juga harus menjadi peneliti pemakaian bahasa dalam situasi sehari-hari.

5. Menempatkan Dasar-Dasar yang Teguh

Pembangunan Pelajaran Bahasa untuk Komunikasi (PelBK) dan Pengajaran Bahasa untuk Komunikasi (PengBK): "Dagang seperti biasa". Saya kecewa dengan cara sebenarnya PelBK dan PengBK, yaitu seperti mode terbaru seperti gelombang di dalam profesi TESL/TEFL/FL mulai akhir 70-an dan memuncak awal 80-an. Sekarang kehebohan PelBK dan PengBK kelihatannya menghilang. Mengapa? Saya kecewa hampir dari awal PelBK dan PengBK. Saya rasa akhirnya PelBK dan PengBK dibuat seperti *hal dulu* dalam bungkus baru. Yang terutama mengecewakan ialah pemborosan konsep Gumperz dan Hymes oleh organisasi TESL/TEFL/FL. Mengapa? Saya sependapat dengan Stevick dan yang lainnya bahwa *kemampuan berkomunikasi* cenderung dianggap semacam mantra yang secara misterius akan berhasil seperti yang belum pernah dimimpikan.

Kunci pelajaran (dan pengajaran) bahasa yang berhasil ialah dulu ada dan pernah ada, pelajaran (dan pengajaran) yang menghubungkan para pelajar secepat mungkin dengan anggota golongan masyarakat melalui bahasa yang dipelajari dipakai sehari-hari. Pelajaran bahasa yang berhasil melihat suasana secara luas, yang memungkinkan para pelajar berinteraksi seerat mungkin dengan masyarakat.

Sekarang saya sedang belajar bahasa Canton di Hongkong. Pengalaman ini jauh berbeda dari pengalaman belajar bahasa Indonesia di Bandung mulai 1975. Bahasa Tiong Hoa sangat berbeda dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terutama karena sistem penulisannya. Para pelajar perlu memperoleh kemampuan memakai sistem romanisasi (atau IPA) untuk dapat mencatat huruf hidup, huruf mati dan ketujuh nada

(rendah rata $_ _ _$, menengah rata $_ _ _$, tinggi rata $_ _ _$,
tinggi turun $\backslash$, rendah turun $\backslash$,
rendah naik pendek $/$, rendah naik panjang $/$).

Ketika bergaul dengan orang yang berbahasa Canton, kita perlu menguasai huruf Tiong Hoa. Hanya sarjana dan ahli bahasa yang paham sistem romanisasi atau IPA.

Jadi, saya terpaksa mempelajari huruf Tiong Hoa yang satu huruf menunjukkan satu suku kata. Apalagi, kemampuan membaca dan menulis dalam huruf Cina dianggap satu ciri orang berpendidikan.

Kalau kita mempelajari bahasa asing (seperti bahasa Inggris) di negara sendiri, keterlibatan dalam masyarakat yang bicara bahasa yang dipelajari akan sangat terbatas dan hanya akan terbatas untuk beberapa penutur bahasa itu yang kebetulan sedang belajar atau bekerja di daerahnya.

Dekatnya pelajar dengan masyarakat yang menggunakan bahasa yang dipelajari dapat juga diukur secara psikologis. Dalam pengalaman saya, kalau saya membedakan pengalaman di Indonesia (Bandung dan Surabaya), Singapore Hongkong, kemungkinan mendekati orang yang cakap berbahasa Indonesia di Bandung yang paling baik. Di Bandung tahun 1975–1980 orang mempunyai waktu untuk berbicara dengan para pelajar bahasa. Bahasa Indonesia dipakai oleh orang Sunda dan mahasiswa, pedagang, dan pejabat pemerintah dari luar daerah. Para pelajar harus teliti mencari orang sebagai contoh memakai bahasa Indonesia. Ada yang memilih pembantu rumah tangga karena dekat. Akan tetapi, seorang perempuan dari kampung jauh dari kota bukan contoh yang cocok untuk seorang pedagang. Saya mengusulkan untuk mencari contoh dengan tingkat pendidikan, status sosial dan umur yang agak sama dengan mereka.

Keadaannya dengan bahasa Sunda tidak sama. Dalam hal itu, bahasa asli orang Sunda dan bahasa perhubungan untuk banyak orang dari luar daerah membuat versi bahasa Sunda tersendiri, terutama dalam ragam santai. Karena ada variasi dalam pemakaian bahasa Sunda itu, pelajar harus memilih mau bicara bahasa Sunda dengan cara mana?

Keadaan Singapura tidak sama dengan Indonesia. Orang Melayu di Singapura lebih suka berbicara bahasa Inggris dengan orang asing daripada menggunakan bahasa Melayu walaupun orang asing itu lancar berbahasa Indonesia. Di Singapura juga bahasa Inggris kelihatannya simbol orang berpendidikan. Di Singapura, kurang dari 2% orang keturunan Tiong Hoa menganggap bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu; kebanyakan menganggap diri orang Hokkien dan tidak senang kalau pemerintah berusaha memaksakan bahasa Mandarin sebagai kesukuan orang Tiong Hoa. Bahasa Tamil secara resmi adalah bahasa kesukuan orang-orang India. Hanya orang Tamil yang agak tua tetap memegang bahasa tersebut. Kebanyakan orang keturunan India, terutama yang lebih muda lebih suka bahasa Inggris dan bahasa ibu mereka, misalnya, bahasa Hindi, bahasa Sindhi, dan bahasa Malayalam daripada menggunakan bahasa Tamil.

Keadaan di Hongkong berbeda. Bahasa Canton ialah bahasa kesukuan Hongkong meskipun hanya sebagian, yaitu lebih dari 50% orang Tiong Hoa Hongkong keturunan orang Propinsi Canton. Akan tetapi, bahasa Canton terdengar di mana-mana di Hongkong. Bahasa Mandarin jarang kedengaran di jalan, tetapi mulai lebih sering terdengar di acara radio dan televisi mendekati tahun 1997. Mahasiswa saya di Hongkong Baptist College tidak mementingkan bahasa Canton. Mereka tidak

mengerti sistem struktur bahasa dan bagaimana orang memakai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menghafal kode ragam lisan yang ditulis dengan sistem tulisan logografis Tiong Hoa (juga dengan beberapa huruf yang tidak ada untuk bahasa Mandarin). Sistem logografis itu menggambarkan suku kata bukan huruf mati, huruf hidup, atau nada bahasa. Jadi, ragam lisan bahasa Canton diperoleh orang Hongkong belum lama dihubungkan dengan huruf Tiong Hoa, yaitu logogram masing-masing mewakili satu suku kata dengan nadanya.

Seolah-olah persoalan banyaknya pengetahuan yang diperlukan orang Hongkong tidak cukup (jangan tanya persoalan si pelajar bahasa Canton), teks-teks dalam bahasa Tiong Hoa yang formal diharapkan dibaca dengan ucapan ragam lisan bahasa Mandarin. Keadaan ini berarti bahwa huruf lain diperlukan dengan arti yang sama dalam bahasa Canton dan bahasa Mandarin.

Lebih sulit berhubungan dengan orang yang berbahasa Canton, daripada orang yang berbahasa Mandarin. Keadaan ini jauh berbeda dari Bandung di antara tahun 1975-79. Teman sekerja yang berpendidikan di Universitas Baptis Hongkong dapat berbahasa Inggris dan cepat. Dia kurang sabar dengan usaha pelajar bahasa Canton. Selain itu, bahasa Canton kurang dihargai secara terbuka dibandingkan dengan bahasa Mandarin, terutama untuk ragam formal. Kebanggaan satu-satunya orang berbahasa Canton ialah kebanggaan tertutup, sedangkan mereka akan mengatakan bahwa mereka bangga akan bahasa Mandarin.

CATATAN

1. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers, 1976.
2. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers, 1980.
3. Bhs.Ingg.: *communicative competence* yang dibandingkan dengan *kemampuan bahasa* (bhs.Ingg. *linguistic competence*), yang dijadikan pusat perhatian ahli bahasa struktur dan ahli ilmu tata bahasa generativ-transformasi (bhs.Ingg. *transformational-generative grammarians* (yaitu Chomsky dkk).
4. Menaksir terlalu rendah penguasaan ketrampilan dasar yaitu ucapan, ketepatan tata bahasa, katanya untuk mencapai ketrampilan *komunikasi*. Saya sering mendengar bahwa "komunikasi lebih penting daripada tata bahasa." Tafsiran guru-guru ialah bahwa ketepatan penggunaan pola kalimat, misalnya, tidak penting. Yang penting ialah, apakah pelajar berhasil komunikasi atau tidak? Seolah-olah orang *dapat* berkomunikasi kalau kurang tepat menggunakan tata bahasa! Jelas waktu itu perasaan bahwa deskripsi kaidah tata bahasa dapat menolong pelajar dalam *aquisition* bahasa terlalu optimis dan hal seperti itu harus dipikirkan kembali, tetapi proses perbaikan berlebih-lebihan ke arah berlawanan.
5. Sebetulnya, peniruan pola-pola kalimat dan pengulangan dialog-dialog sampai mampu berbicara dengan lancar suatu ciri-ciri yang kuat dalam *the oral method*. Kalau para pelajar dapat *pola dialog yang realistik (authentic texts)* sebagai bahan pelajaran, tujuan untuk

- berlatih pola-pola tersebut sampai mampu menggunakan nya secara tidak sadar (seperti biasa) adalah tujuan yang baik.
6. Dan pasti memasukkan peraturan percakapan diri sendiri!
 7. "Culture is the acquired knowledge that people use to interpret experience and to generate social behavior". Goodenough, W.H. 1964. *Cultural Anthropology and Linguistics*. In Dell Hymes. *Language in Culture and Society*. Harper and Row. Quoted in Spradley, J.P. and D.W. McCurdy. 1975. *Anthropology: The Cultural Perspective*. Wiley and Sons, p.5.
 8. "Throughout our lives we receive new information, integrate it with previous knowledge, and rearrange our total store of knowledge". Spradley, J.P. & D.W. McCurdy, p.30.
 9. "By a thousand subtle cues: [a parent's] wrinkled nose, a [vocal] tone of disgust, rough physical intervention, you acquired knowledge. [As infant linguistic ability improved], the terms for *clean* and *dirty* were attached [by parents, relatives, friends] to words, stories, clothes, places, smells, and [even] people". Lih. h.31.
 10. "Culture consists of all things [that people] must know in order to understand life: beliefs, rules, standards, ideas and conceptions". Lih. h.7.
 11. "Cultural knowlegde is like *a recipe* for producing behavior and artifacts". Lih. h. 17.
 12. "...coping with a physical, biological and social environment to meet fundamental requirements for survival". Lih. h. 33.
 13. Lih. h. 36
 14. Lih. h. 37.
 15. Lih. h. 37.
 16. "...any object or event that has been assigned meaning". Lih. h. 20.
 17. "[To learn the culture of a society] it is necessary to understand the verbal symbols or terms of that culture. To understand implies understanding of the concepts, i.e., meaning assigned to symbols". Lih. h.22.
 18. Lih. h.23.
 19. "...a set of rules for forming, combining and interpreting symbols". Lih. h.27.
 20. Lih. h. 29.
 21. *Levels of consciousness*
 22. *Explicit culture vs. tacit culture.*
 23. Lih. h.31.
 24. "...shared knowledge that people cannot talk about [or only with great effort]". Lih.h.32.
 25. Lih. h.32--33
 26. "...confronted with naive individuals such as children [or, an outsider], people often talk about things that ordinarily remain tacit. Lih. h.33
 27. Lih. h.33
 28. "We can know more than we can tell." Michael Polanyi. *The Tacit Dimension*. Glouchester, Mass.: Peter Smith, 1983, h.4.
 29. Asumsinya di sini orang yang bukan sarjana bahasa.
 30. *Appropriate atau inappropriate.*

31. On the other hand, there are those who rather enjoy the dependence on the language tutor or teacher, because such dependence exonerates them from the responsibility of moving ahead.
32. *Becoming Bilingual. Guide to Language Learning*. Bersama William A. Smalley. New Canaan, Ct.: Practical Anthropology, 1972. *Guidelines for Barefoot Language Learning: An Approach Through Independence and Involvement*. University Press of America, 1984(?).
33. *Spoken Indonesia: A Course in Indonesia's National Language*. Jakarta: P.T. Gramedia, Forthcoming.
34. First Lessons in Basa Jawi. Manuscript.

Pasti, pendapat bahwa ini "hanya sandiwara" ada kebenaran juga secara ketat. Jawaban saya terhadap kritik ini ialah memperoleh bahan pelajaran dengan cara ini, tidak moril merekam percakapan orang secara diam-diam. Jadi bahan pelajaran yang diperoleh dengan simulasi menghasilkan bahan paling baik. Selanjutnya para pelajar yang berhasil akan *terlibat* dalam kehidupan anggota masyarakat yang berbahasa yang dipelajari. Dari pengalaman mereka akan menemukan "bahan bahasa yang paling asli".

PENGUNAAN KATA-KATA DARI BAHASA INDONESIA DI BRUNEI DARUSSALAM (Laporan Awal)

Karyono Purnama
Universiti Brunei Darussalam

1. Pendahuluan

a. Situasi Kebahasaan di Brunei Darussalam

Sejak tahun 1959 bahasa Melayu secara resmi ditetapkan sebagai bahasa resmi di negara Brunei Darussalam.¹ Bahasa Melayu yang dimaksud ialah bahasa Melayu Baku (BMBK) yang oleh sementara penduduk awam di negara ini (terutama yang tua-tua) disebut juga sebagai bahasa Melayu Malaysia, atau bahasa Melayu dari Malaysia, bahasa Melayu Sekolah, dan bahasa Melayu Tulen. Mengapa mereka menamakan bahasa Melayu Baku demikian? Pertama, karena mereka beranggapan bahwa bahasa Melayu Baku tersebut berasal dari Semenanjung Malaysia. Kedua, hampir semua terbitan (majalah, komik, novel-novel, surat kabar, dan sebagainya) yang ditulis dalam bahasa tersebut, serta buku-buku rujukan (*reference*) dan buku-buku pelajaran tentang bahasa Melayu Buku ini diterbitkan di Malaysia atau Singapura (yang pernah pula menjadi bagian dari Malaysia). Ketiga, bahasa Melayu Baku tersebut dinamakan sebagai bahasa Melayu Sekolah karena digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah beraliran Melayu atau diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Selanjutnya, bahasa Melayu Baku dinamakan bahasa Melayu Tulen karena mereka melihat variasi bahasa Melayu yang lain sebagai bahasa yang berasal dari bahasa Melayu Semenanjung tersebut.

Di kalangan masyarakat Brunei sendiri, sesungguhnya sudah ada semacam bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Brunei (BMBR), sebuah dialek bahasa Melayu yang memiliki ciri khas kebruneian dan yang telah sejak berabad-abad yang silam digunakan oleh masyarakat Melayu Kampung Air yang bermukim di sepanjang muara Sungai Brunei, dan yang selanjutnya digunakan sebagai *lingua franca* di antara kaum dan suku asli di kawasan negara ini (dan juga di bagian-bagian tertentu Sabah dan Serawak, khususnya yang berbatasan dengan negara Brunei Darussalam).² Dalam situasi masa kini, kedua bahasa tersebutlah yang digunakan secara bersamaan di dalam masyarakat Brunei selain bahasa-bahasa lain (bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan lain-lain). Soepomo melihat bahwa penggunaan kedua macam bahasa Melayu tersebut ialah secara diglosik.³ Bahasa Melayu Baku digunakan dalam situasi

tutur dan urusan -urusan yang bersifat resmi, sedangkan bahasa Melayu Brunei digunakan dalam percakapan dan urusan yang bersifat pribadi atau tidak resmi. Pendapat yang sama dinyatakan pula oleh Nothofer sebagai berikut.

*"Thus, Brunei Malay and Standard Malay are dialects which have a supraregional function, Brunei Malay being the informal and Standard Malay the formal medium."*⁴

Dengan sistem dan pola penggunaan yang semacam itu, dalam perkembangan selanjutnya, tak terelakkan lagi, bahasa Melayu Baku yang digunakan di wilayah negara ini sudah makin lama tercampur bahasa Melayu Brunei. Banyak perbendaharaan kata dan aturan penggunaan bahasa Melayu Brunei yang bersifat halus dan amat sopan sudah pula digunakan dalam bahasa Melayu Baku tersebut. Kata-kata dari bahasa Melayu Brunei yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu Baku tersebut adalah *bisai* 'baik', 'elok', *kitani*/*katani* honorifik untuk 'kita', *kita* honorifik untuk 'anda', *biskita* honorifik untuk 'dia', *diungkayahkan* 'diusahakan', *awda* 'anda': lelaki dan perempuan, dan sebagainya. Kata-kata tersebut bersama aturan penggunaannya tidak dikenal baik di Malaysia, di Indonesia (kecuali mungkin di beberapa tempat di Kalimantan) maupun di wilayah bahasa Melayu lain di Nusantara.

Bila ditinjau dari keadaan ini, bahasa Melayu Baku yang digunakan di Brunei sesungguhnya tidak lagi serupa dengan bahasa Melayu Baku yang digunakan di Semenanjung Malaysia. Bahasa Melayu Baku yang digunakan di wilayah ini sesungguhnya sudah berkembang menjadi variasi bahasa Melayu Baku yang unik berciri dan bercorak kebruneian. Berikut adalah seserpih contohnya.

"Demikianlah teras utama kongres yang bertema "Tinggal Landas Ke Abad XXI" ini dan mudah-mudahan *lunih-lunih* (=intisari) yang terkumpul daripadanya akan dapat dijadikan *sekitubit* (= sedikit) perangsang atau katalis perbincangan-perbincangan seterusnya untuk *membisaikan* (= memperbaiki) lagi sikap atau perangai sebagian orang *katani* (= honorifik 'kita') yang tampaknya *inda* (= tidak) begitu *ingau* (= perduli) tentang survival bangsa menjelang abad ke-21 ini."⁵

Nothofer pernah juga menyatakan pendapat yang kira-kira sama, yaitu sebagai berikut.

*"This dialect is almost identical with Peninsular Standard Malay, but with identifiable Bruneiization on all linguistic levels: final [a] is pronounced [a] as in the other Malay dialects used in Brunei. Only some radio and TV-speakers use [ɨ]. Lexically we find a large number of Brunei Malay items when Bruneian use Standard Malay, e.g. *damit* 'small', *ungkayah* 'to promote', *kita* '2nd person singular'."*⁶

Variasi bahasa Melayu Baku semacam ini di Brunei memang biasanya hanya dipakai untuk keperluan-keperluan yang agak terbatas. Biasanya digunakan sebagai bahasa dalam urusan-urusan dan sambutan-sambutan atau pidato—pidato di dalam situasi tutur yang bersifat resmi atau amat resmi oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah dan orang-orang kenamaan serta di dalam penerbitan resmi. Untuk ucapan-ucapan di lingkungan orang biasa/orang kebanyakan, cenderung sepenuhnya digunakan bahasa/dialek Melayu Brunei.⁷

Dalam proses perkembangannya pula, bahasa Melayu Baku di Brunei menerima juga unsur-unsur dari bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, dan bahasa Tamil termasuk unsur-unsur (khususnya perbendaharaan kata) dari bahasa Indonesia (seterusnya BI). Unsur dari BI tersebut setakat ini hanya terselip di sana-sini dan banyak yang tidak disadari lagi oleh penutur di sini. Unsur-unsur tersebut aslinya berasal dari Indonesia (misalnya, kata-kata *cetek*, *lelucon*, dan *berdikari*).

b. Kriteria

Dalam karya ini, penulis akan memberikan beberapa contoh dan menjelaskan bagaimana kata-kata BI tersebut terselip dalam bahasa Melayu Brunei yang digunakan di negara ini. Kata-kata atau istilah-istilah yang dianggap berasal dari BI tersebut ditentukan, antara lain, berdasarkan kriteria berikut ini.

- 1) Kata-kata yang menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, susunan W.J.S. Poerwadarmita⁸ digolongkan berasal dari perbendaharaan kata asli salah satu bahasa daerah/bahasa suku di Indonesia, seperti *cetek* (Jawa), *garong* (Jakarta), dan *piawai* (Minangkabau).
- 2) Kata-kata, istilah, singkatan atau akronim diciptakan di Indonesia secara khusus dalam kaitannya dengan sejarah kebangsaan, perjuangan politik, pembangunan ekonomi, perkembangan teknologi, dan sebagainya, seperti *Sang Saka*, *repelita*, *berdikari*, dan *Pancasila*.
- 3) Kata-kata, istilah-istilah, atau ungkapan-ungkapan yang merujuk pada benda-benda, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bunga-bunga, makanan dan minuman, adat-istiadat, gaya hidup, serba-serbi kehidupan, dan sebagainya yang bercirikan khas Indonesia atau berasal dari wilayah Indonesia, misalnya, *tempe*, *salak*, *rujak*, *gado-gado*, *sambal pecel*, *batik*, *pacar*, *jago*, dan *wayang kulit*.
- 4) Kata-kata/istilah-istilah Indonesia atau Melayu Baku banyak digunakan di Indonesia, tetapi biasanya tidak populer digunakan di Brunei (B). Misalnya, *banyak* (B: 'ramai'), *kecil* (B: 'damit'), *diundang* (B: 'dijemput/dipelawa'), *pengumuman* (B: 'maklumat'), *wanita* (B: 'perempuan'), *Minggu* (B: 'Ahad'), *percakapan* (B: 'perbualan'), dan *akhir* (B: 'penghujung').⁹
- 5) Kata-kata yang dipungut dari bahasa asing (khususnya dari bahasa Inggris) ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan dalam bahasa Melayu Baku dengan tetap mempertahankan sistem asimilasi/ adaptasi (ejaan dan ucapan) BI. Misalnya *reputasi*, *email*, *primitif*, *persis*, *solidaritas*, dan *amandemen*.

Selain itu, kata-kata tersebut juga digolongkan sebagai kata-kata atau ungkapan-ungkapan BI, yaitu kata-kata yang berasal dari bahasa-bahasa kuno, khususnya bahasa Sansekerta dan bahasa Kawi/Jawa Kuno, yang telah dihidupkan kembali untuk memperkaya bahasa Indonesia, seperti *wanita* (S/Kw), *purba* (Kw), *susila* (Kw), dan *prasasti* (S/Kw).¹⁰

c. Data dan Rujukan

Data diambil dan dikumpulkan dari tiga nomor penerbitan surat kabar resmi pemerintah Brunei (*Pelita Brunei*), acara-acara radio dan Televisi Brunei, serta hasil observasi pada percakapan sehari-hari baik antara orang Brunei dan orang Brunei maupun antara orang Brunei dan orang Indonesia.

Etimologi dan seluk-beluk setiap kata, istilah, atau ungkapan yang dibahas atau digunakan sebagai contoh dalam tulisan ini sudah diteliti dengan cara memeriksa kamus-kamus berikut.

- 1) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, susunan W.J.S. Poerwadarminta (diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- 2) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- 3) *Kamus Dewan* (Edisi Baru), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1991.
- 4) *Kamus Bahasa Melayu Brunei*, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Bandar Seri Begawan, 1991.
- 5) *Bausastra Jawa*, oleh S. Prawiro Atmodjo, Yayasan Joyoboyo, Surabaya, 1987.

Selain kamus-kamus resmi di atas, dirujuk juga kamus-kamus kecil berbagai bahasa daerah di Indonesia yang dihasilkan dan diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, pada tahun 1985.

Sayang sekali belum ada kamus bahasa Melayu Baku diterbitkan di Brunei sehingga sukar untuk memastikan apakah kata-kata tertentu yang dimuat di dalam kamus-kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Melayu Baku di Malaysia juga dapat diterima dan digunakan di Brunei Darussalam. Kamus bahasa Melayu Brunei yang sudah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei sendiri masih amat sederhana dan masih perlu dikembangkan serta diperkaya lagi.¹¹

2. Kata-Kata yang Digunakan

Pada umumnya, masyarakat tutur bahasa Melayu di Brunei Darussalam masih beranggapan bahwa sumber utama kata-kata baru bahasa Melayu Baku berasal dari Malaysia Semenanjung. Oleh karena itu, tidak banyak yang menyadari bahwa banyak kata Melayu baru yang mereka gunakan (misalnya, *gotongroyong*, *lelucon*, *canggih*, *berdikari*, dan *pacar*) sesungguhnya berasal dari perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Kata-kata seperti itu memang kerap dipungut dulu oleh orang-orang dan media massa di Malaysia baru kemudian dikenal dan digunakan oleh orang-orang dan media massa di Brunei.

Kata-kata BI biasanya digunakan karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut, antara lain, adalah untuk menyesuaikan diri dalam pertuturan dengan orang-orang Indonesia atau orang-orang yang berbahasa Indonesia. Beberapa kata BI juga digunakan untuk menggantikan kata-kata bahasa Melayu asli yang dirasa sudah tidak sesuai lagi digunakan dengan konteks dan topik pembicaraan tertentu. Kadang-kadang kata-kata BI digunakan untuk mengisi kekosongan istilah untuk menyatakan hal-hal tertentu. Ungkapan BI kadang-kadang digunakan untuk bergurau atau diselipkan begitu saja dalam pembicaraan sekadar untuk mengakrabkan atau menyedapkan pembicaraan. Selain itu, ada juga kata-kata BI itu sudah lama diserap ke dalam bahasa Melayu Baku sehingga tidak lagi disadari sumber dan identitas aslinya.

Berikut ini adalah beberapa macam kata/ungkapan BI yang digunakan di Brunei beserta contohnya. Apabila ada padanan kata atau sinonimnya dalam bahasa Melayu asli/bahasa Melayu¹² diberi kurung.

- a) Kata-kata BI/bahasa Melayu Baku yang banyak digunakan di Indonesia biasanya tidak populer di Brunei. Oleh masyarakat luas, kata-kata ini kadang-kadang saja digunakan terutama oleh kalangan yang terpelajar di Brunei karena kata-kata Melayu yang mempunyai makna sama masih sering digunakan. Contoh kata-kata tersebut adalah sebagai berikut: *istri* (B: 'bini'), *suami* (B: 'laki'), *pengumuman* (B: 'maklumat'), *gelisah/cemas* (B: 'risau'), *benar/betul* (B: 'lurus'), *undangan* (B: 'sekejap'), *dikalahkan* (B: 'ditewaskan'), *olahraga* (B: 'sukan'), *remaja* (B: 'belia'), *informasi* (B: 'maklumat'), *umum* (B: 'am'), *khusus* (B: 'khas'), *sendok* (B: 'sudu'), *ujian* (B: 'peperiksaan'), *enak* (B: 'sedap'), *halus* (B: 'lembut'), *penting* (B: 'mustahak'), *penelitian* (B: 'penyelidikan'), *masing-masing* (B: 'setiap satunya'), *diselesaikan* (B: 'ditamatkan'), *datang* (B: 'tiba'), *pulang* (M: 'balik'), *pergi* (B: 'jalan'), *dipakai* (B: 'digunakan'), *tetangga* (B: 'jiran'), *akrab* (B: 'mesra'), *kelompok* (B: 'kumpulan'), *menghitung* (B: 'mengkira'), *selesai* (B: 'berakhir'), *tetangga* (B: 'jiran'), *berhasil* (B: 'berjaya'), *akrab* (B: 'mesra'), *minggu* (B: 'ahad'), *surat-kabar* (B: 'akhbar') dan *taraf* (B: 'peringkat').
- b) Kata-kata BI/Melayu Baku digunakan untuk mengisi kekosongan istilah/terminologi untuk menyatakan/menamakan sesuatu. Beberapa cita rasa keindahan adalah sebagai berikut: *srikandi*, *sarjana*, *mahasiswa*, *wisma*, *utama*, *rumit* (Minang), *pameran* (Jw), *lumayan* (Jw), *canggih*, *pustakawan*, *seniman*, *seniwati*, dan *wawasan* (Jw).
- c) Kata-kata yang khas diciptakan/digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut: *berdikari*, *mandataris*, *kaki lima*, *kamar mandi* (B: 'bilik mandi'), *mahasiswa/mahasiswa* (B: 'pelajar/penuntut'), *juara* (B: 'johan'), *olahraga* (B: 'sukan'), *wanita* (B: 'perempuan'), *wacana*, dan *gotong royong*. Yang lainnya merupakan kata-kata yang merujuk pada produk, buah-buahan, makanan, dan sebagainya yang berasal dari Indonesia, misalnya *tempe*, *gado-gado*, *salak*, *duku*, *mangga golek/harum-manis/gedong*, *belinjo/mlinjo*, *sambal pecel*, *rempeyek*, *es Bandung*, *mi Bandung*, dan *jamu sariawan*. (Gadis-gadis atau wanita di Brunei ada juga yang menggunakan nama Indonesia/Jawa, misalnya, *Kartini*, *Hartini*, *Suryani*, *Puspawati*, *Juliarwati*, *Lisawati*;

atau campuran antara Jawa dan Melayu: *Rosmahwati*, *Yusmawati*, *Saridah*, dan *Norkartini*.)

- d) Kata-kata yang berasal dari bahasa kuno (Sanskerta/Kawi) dan bahasa daerah di Indonesia (terutama dari bahasa Jawa) adalah, *kesinambungan* (Jw), *prasasti* (S/Kw), *madya* (Kw), *gotong-royong* (Jw), *merosot* (Jw: *mrosot*), *mantap* (Jw: *mantep*), *waspada* (Jw: *waspodo*), *wanita* (S/Kw), *putera-puteri* (S), *perawan* (Jw), *melancong* (B: 'makan angin'), *Sari Ayu* (Jw), *Mustika Ratu* (Jw), *minggir* (Jw), *manjur* (Jw), *jamu galian singset* (Jw), dan sebagainya.
- e) Kata-kata asing (Inggris) yang menggunakan sistem adaptasi sebutan dan ejaan Indonesia adalah *solidaritas*, *prioritas*, *praktis*, *persis*, *orientasi*, *generasi*, *institusi*, *transaksi*, *koperasi*, *informasi*, *reputasi*, *standardisasi*, *potensi*, dan sebagainya. Kata-kata pungutan dari bahasa Inggris yang ejaannya berakhir *-tion*, yang apabila diasimilasi dengan sistem BI ucapannya menjadi /i/ di Brunei biasanya tetap dipertahankan seperti aslinya, yaitu diakhiri dengan bunyi /syen/, seperti dalam kata-kata *televisyen*, *seksyen*, *operesyen*, dan *ekseminesyen*. Demikian juga, akhiran kata-kata Inggris yang dieja *ty* di Brunei biasanya diucapkan /ti/ (dalam BI kadang-kadang diucapkan /tas/), seperti pada kata *sekuriti*, *kualiti*, *fakulti*, dan *universiti*.
- f) Selain jenis kata yang digunakan di atas ada juga kata BI yang digunakan orang Brunei hanya untuk bertutur dengan orang Indonesia. Kata-kata tersebut jarang digunakan dalam pertuturan di antara sesama orang Brunei. Contoh: *Bapak/Pak* dan *Ibu/Bu* (baik sebagai kata ganti orang kedua maupun sebagai kata panggilan), *bisa* (B: 'boleh/dapat'), *ijin* (B: 'kebenaran'), *bilang* (B: 'berkata'), *akhir* (B: 'penghujung'), *sampai* (B: 'tiba'), *pusing* (B: 'pening'), *judul* (B: 'tajuk'), *kota* (B: 'bandar'), *pacar* (B: 'kekasih/tunangan'), *mobil* (B: 'kereta'), *terbatas* (B: 'terhad'), *senang* (B: 'suka'), *mudah* (B: 'senang'), *sampai* (B: 'tiba'), *anggota* (B: 'ahli'), *hemat* (B: 'berjimat'), *ahli* (B: 'pakar'), *mobil* (B: 'kereta'), *tak usah* (B: 'tak payah'), *pipa* (B: 'paip'), *berangkat/pergi* (B: 'berjalan'), *siang hari* (B: 'tengah hari'), *sesudah* (B: 'lepas'), *kamar* (B: 'bilik'), dan *bioskop* (B: 'panggung wayang').

Kadang-kadang orang Brunei suka bergurau dengan ungkapan khas Indonesia, seperti *Mampir dulu*; *Nggak usah*, *ya*; *Jangan gitu*, *dong*; dan *Oh*, *itu bisa diatur*. Gurauan tersebut cenderung dibuat oleh penutur dari kalangan terpelajar biasanya ditujukan kepada orang Indonesia yang terlibat dalam percakapan dengan mereka. Ungkapan semacam ini tidak pernah ditujukan kepada lawan tutur sesama orang Brunei. Jumlah ungkapan itu tidak banyak biasanya berupa ungkapan yang memang di Indonesia sudah populer dan berbentuk klise. Kebanyakan ungkapan itu mereka peroleh dari film Indonesia yang diputar di TV Brunei dan gedung-gedung bioskop atau yang mereka tonton di rumah dari rekaman video.

Kata, istilah, dan ungkapan yang digunakan tersebut biasanya tidak mengalami asimilasi, perubahan makna, ataupun perubahan lain, seperti yang kadang-kadang mereka lakukan pada bahasa asing lainnya. Semuanya digunakan sesuai dengan konteks dan cara penggunaannya yang asli seperti yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Pada umumnya kata yang bersifat homonim regional, yaitu yang ucapan dan ejaannya sama, tetapi artinya dalam BI dan dalam bahasa Melayu berlainan, seperti *babu* (BI/Jw.: 'pembantu rumah', B: 'ibu'), *baja* (BI: 'sejenis logam', B: 'pupuk'), *budak* (BI: 'pekerja paksa, hamba', B: 'anak, kanak-kanak'), *punggung* (BI: 'bagian belakang tubuh', B: 'pantat, pinggul'), *pusing* (BI: 'sakit kepala', B: 'berputar'), dan *kereta* (BI: 'kereta', B: 'automobil'), arti dan penggunaannya seperti dalam bahasa Melayu atau bahasa Melayu Brunei yang diberlakukan. Kebetulan kebanyakan di antara mereka tidak tahu arti kata-kata tersebut dalam BI.

3. Saluran dan Proses Pemungutan

Proses pinjam-meminjam dan pemungutan kata biasanya terjadi jika terjadi kontak bahasa antara masyarakat tutur yang satu dan masyarakat tutur yang lain. Kontak bahasa tersebut mengakibatkan kedua belah pihak terdedah (*exposed*) pada bahasa pihak lawan tutur. Walaupun pergaulan antara masyarakat Brunei dan masyarakat Indonesia setakat ini belum seakrab hubungan mereka dengan masyarakat Malaysia dan Singapura, ternyata cukup banyak saluran dan kegiatan sehari-hari yang memungkinkan terjadinya kontak bahasa yang merupakan titik awal terjadinya proses penggunaan dan pemungutan kata, istilah, dan ungkapan dari BI. Ada dua macam saluran untuk pendedahan bahasa Indonesia kepada masyarakat Brunei, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Berikut ini adalah beberapa saluran yang tampak jelas.

a. Saluran Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan saluran tidak langsung adalah alur tidak langsung yang ditempuh oleh kata, istilah, ungkapan BI untuk mencapai masyarakat tutur bahasa Melayu di Brunei Darussalam. Karena hubungan komunikasi di antara penduduk negara Brunei Darussalam dan masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lampau tidak begitu lancar, kata BI tersebut biasanya dikenal dan diambil melalui Malaysia. Yang termasuk dalam pengertian alur tidak langsung ialah kontak antara penutur Brunei dan BI yang terjadi tanpa melalui komunikasi langsung dengan orang Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh saluran tidak langsung.

- 1) Banyak kata BI, misalnya, *gotong-royong* (B: 'memuncang-muncang'), *sebentar* (B: 'sekejap'), dan *mahasiswa* (B: 'pelajar, penuntut') sebelum dikenal di Brunei telah terkenal di Malaysia karena digunakan di media-media massa (surat kabar dan televisi) Malaysia. Siaran Televisyen Malaysia, yaitu RTM1 dan RTM2 menggunakan kata BI tersebut. Kata-kata tersebut dapat dengan jelas ditangkap di Brunei Darussalam. Melalui saluran tersebut, dilakukan juga pemutaran film Indonesia secara berseri atau sekali-kali selama 1-2 kali seminggu.

Surat-surat kabar dan majalah terbitan Malaysia juga sering menggunakan kata dan istilah dari Indonesia. Beberapa kata yang lazim digunakan di Indonesia (*wanita, remaja, dan putra-putri*), bahkan digunakan sebagai nama dari tiga

majalah/mingguan populer di Malaysia (Majalah *Wanita*, Majalah *Remaja*, dan Majalah *Putra-Putri*). Majalah-majalah tersebut juga beredar di Brunei Darussalam. Jika sekali kata-kata tersebut digunakan media massa Malaysia, masyarakat Brunei menjadi terbiasa, kemudian ikut menggunakan kata-kata tersebut.

- 2) Selain itu, kebetulan edisi pertama kamus resmi Bahasa Melayu (Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia) yang digunakan di Malaysia dan di Brunei disusun oleh orang Indonesia¹³ dan isinya dekat sekali dengan kamus besar bahasa Indonesia lainnya. Banyak kata Indonesia asli di dalamnya dianggap dan diterima sebagai bagian dari perbendaharaan kata bahasa Melayu Baku. Sebagian besar isi dan kata-kata yang ada di dalamnya masih dimuat juga dalam edisi dan cetakan kamus tersebut yang terbaru.
- 3) Dengan dibentuknya Majelis Bahasa Brunei Indonesia dan Malaysia (MABBIM), banyak kata BI diusulkan dan diterima untuk melengkapi perbendaharaan kata bahasa Melayu Baku, baik yang menyangkut perbendaharaan kata umum maupun istilah-istilah teknis, seperti istilah Kimia, Biologi, dan Fisika. Di Brunei sudah diterbitkan pula hasil dari proyek MABBIM untuk digunakan oleh masyarakat luas, misalnya *Daftar Ejaan Rumi Baru*.

b. Saluran Langsung

Yang dimaksud dengan saluran langsung ialah alur langsung yang ditempuh kata-kata, istilah-istilah, dan ungkapan-ungkapan BI untuk mencapai penutur bahasa Melayu di Brunei. Dalam proses ini biasanya benar-benar terjadi kontak bahasa langsung antara orang Brunei dan orang Indonesia. Dengan bertambah akrabnya hubungan antara masyarakat Brunei dan masyarakat Indonesia, kontak bahasa semacam ini makin lama makin jamak. Berikut ini adalah contoh kontak, baik secara resmi maupun tidak resmi, yang berhasil penulis catat.

- 1) Mahasiswa perguruan tinggi mengenal kata-kata BI dari pensyarah-pensyarah (dosen-dosen) mereka orang Indonesia. Kebanyakan pensyarah-pensyarah dari Indonesia memberikan kuliah mereka dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Mahasiswa biasanya cepat sekali terbiasa dengan bahasa Indonesia pensyarah mereka.

Kadang-kadang ada juga satu atau dua mahasiswa dari Indonesia mendapat beasiswa dari pemerintah Brunei untuk belajar di Universiti Brunei Darussalam/-UBD (satu-satunya universitas di negara Brunei Darussalam). Dari pergaulan dengan mahasiswa Indonesia ini, mahasiswa Brunei dapat mengenal kata-kata dan istilah-istilah BI.

- 2) Kalangan remaja dan pemuda terdedahkan pada ungkapan-ungkapan dan istilah-istilah BI di sanggar dan klub seni lukis, tari, musik, kerajinan tangan, seni bela diri (pencak silat) dan sebagainya, dari beberapa guru atau pelatih mereka yang didatangkan dari Indonesia. Setakat ini ada 1 orang ahli musik, 1 orang guru seni rupa dan kerajinan, dan 1 orang pelatih silat dari Indonesia.

- 3) Golongan masyarakat yang beragama Islam terdedahkan pada BI di masjid-masjid, pusat dakwah, dan surau-surau karena sebagian pendakwah, guru, dan penceramah agama mereka orang Indonesia. Sejak sekitar awal tahun '80-an, mulai didatangkan guru agama, pendakwah, dan penceramah agama dari Indonesia. Sebagian tiba di Brunei atas sponsor atau ikatan kontrak dengan pemerintah Brunei dan sebagian lagi atas usaha sendiri.

Untuk mengisi acara-acara hari besar agama Islam (5--7 kali dalam setahun), Pemerintah Brunei sering pula mendatangkan penceramah agama dari Indonesia untuk bekerja selama 2--3 minggu. Walaupun mereka menetap di Brunei untuk jangka waktu yang relatif amat pendek, peranan mereka sebagai promotor bahasa Indonesia juga tidak kecil. Rata-rata mereka diminta berceramah 2 kali sehari. Dengan demikian, selama mereka berada di Brunei mereka berceramah paling tidak sebanyak 20 kali. Massa yang mereka hadapi juga besar terutama apabila ceramah mereka disiarkan melalui radio dan televisi Brunei.

- 4) Karya sastra dan seni modern dari Indonesia, seperti, novel, cerpen, puisi, lagu, dan film Indonesia (terutama yang diputar di saluran TV Brunei) ikut membantu masyarakat Brunei terbiasa dengan perbendaharaan kata BI. Karya-karya tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sejak pertengahan abad ini.
- 5) Program kerja sama Brunei dan Indonesia atau ASEAN, misalnya Siaran Hiburan Bersama Radio dan Televisyen Brunei/RTB dan Televisi Republik Indonesia/TVRI, *ASEAN Youth Music Workshop*, *ASEAN Song Festival*, dan *SEA Games*, terutama yang diselenggarakan atau disiarkan di saluran-saluran TV Brunei, memberikan kesempatan juga kepada masyarakat Brunei untuk berkenalan dengan kata-kata dan istilah-istilah BI.
- 6) Kata-kata BI tersebut merembes juga langsung ke dalam rumah keluarga Brunei terbawa oleh pembantu rumah tangga, pengasuh anak, tukang kebun, atau pengemudi mobil pribadi yang mereka datangkan dari Indonesia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Karena biasanya berasal dari kalangan masyarakat bawah, tenaga kerja ini biasanya hanya dapat berbahasa Indonesia atau salah satu dari dialek bahasa Indonesia. Mereka baru mulai menggunakan bahasa Melayu setelah beberapa lama bekerja di Brunei. Peranan mereka dalam penyebaran BI di negara ini tidak kecil. Dengan melalui pembantu rumah tangga dan pengasuh anak, banyak anak-anak Brunei (terutama yang kedua orang tuanya bekerja di luar rumah) dari hari ke hari terdedahkan pada BI sejak mereka belajar bertutur. Setakat ini ada lebih dari 6.000 tenaga tidak terampil bekerja di Brunei.
- 7) Walaupun jumlahnya tidak dapat dipastikan, ada juga orang-orang Indonesia yang sudah sejak lama menetap di Brunei, kawin, beranak-pinak, dan mendapatkan kewarganegaraan Brunei. Mereka masih berhubungan dengan saudara-saudara mereka di Indonesia dan sebagian masih aktif menggunakan bahasa Indonesia/bahasa daerah mereka.
- 8) Sementara itu, pedagang-pedagang Brunei kerap melakukan kunjungan ke Indonesia, dan tiap kali mereka pulang kembali ke Brunei, mereka membawa

bermacam-macam oleh-oleh termasuk ungkapan-ungkapan dan kata-kata BI.

- 9) Sebaliknya, ada juga orang-orang Indonesia datang ke Brunei untuk masa yang singkat untuk berdagang atau sekadar berkunjung sebagai tamu atau sebagai turis. Setiap kali berurusan dengan orang Brunei, sedikit banyak mereka akan menggunakan juga istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan BI.

Setakat ini dari kajian ini belum dapat dinyatakan secara pasti, yang mana di antara kegiatan dan peristiwa kontak bahasa di atas yang paling kuat mengakibatkan pemungutan kata dan ungkapan BI di negara ini.

Laporan resmi jumlah tenaga kerja Indonesia yang menetap di sini berikut mungkin angka-angkanya dapat memberikan gambaran seberapa banyak kontak langsung di antara penutur asli bahasa Indonesia dan masyarakat Brunei Darussalam.

LAPORAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM¹⁴

a. Pegawai Pemerintah

1) Profesional/Ahli

a) Pengajar/pensyarah/dosen di Universitas Brunei Darussalam	17 orang
b) Ahli perpustakaan di Univ. Brunei Darussalam	1 orang
c) Ahli perikanan di Kementerian Perindustrian	1 orang
d) Ahli arkeologi di Museum Brunei/Kementerian Kebudayaan	1 orang
e) Dokter di Rumah Sakit Raja Istri Pengiran Anak Saleha	1 orang
f) Ahli agama di Pusat Dakwah/Kementerian Agama	2 orang
g) Guru agama di Kementerian Agama	4 orang
h) Ahli musik di radio dan Televisyen Brunei	1 orang
i) Ahli seni rupa dan kerajinan di Kementerian Kebudayaan	1 orang
j) Pelatih silat di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan	1 orang
k) Pelatih bulutangkis di Kementerian Keuangan	4 orang
l) Mekanik pesawat terbang (H.M. Sultan Flight)	4 orang

2) Terampil dan Semiterampil

Paramedis/Perawat	<u>7 orang</u>
Jumlah	38 orang

b. Perusahaan Negara

1) Profesional/Ahli

Ahli pengeboran minyak dan arsitek di Brunei Shell Petroleum	7 orang
--	---------

2.) Terampil/Semiterampil

a) Pramugari di Royal Brunei Airlines	14 orang
b) Tenaga pengebor minyak di Brunei Shell Petroleum	<u>44 orang</u>
Jumlah	58 orang

c. **Swasta**

1) Profesional/Ahli	
Perusahaan Air Minum SEHAT (IBIC)	3 orang
2) Terampil/Semiterampil	
a) Perusahaan Air Minum Sehat (IBIC)	25 orang
b) Cap3 International (Tinsmith)	25 orang
c) Guru agama (Iqra)	8 orang
d) Sopir tanker minyak	31 orang
e) Pramuniaga (Pusat-pusat perbelanjaan)	11 orang
f) Juru jual/ <i>salesman</i> (Electrolux)	10 orang
g) Mekanik (bengkel mobil)	4 orang
h) Tukang masak	20 orang
i) Pelayan restoran	83 orang
j) Tenaga perhotelan di Istana	<u>8 orang</u>
Jumlah	235 orang
3) Tenaga Tidak Terampil	
a) Pembantu rumah tangga	5.254 orang
b) Sopir, tukang kebun, buruh bangunan	<u>923 orang</u>
Jumlah	6.177 orang

Jumlah keseluruhan tenaga kerja Indonesia di Brunei Darussalam

$$(38 + 58 + 235 + 6.177) \text{ orang} = 6.508 \text{ orang}$$

Catatan: Tenaga profesional/ahli atau mereka yang berpenghasilan lebih dari B\$ 1,000,-/bulan biasanya disertai oleh keluarga mereka (yang rata-rata terdiri atas 4 jiwa).

Angka yang menunjukkan jumlah penutur asli bahasa Indonesia yang menetap di Brunei ini amat penting diketahui untuk menilai dan memperkirakan besarnya pengaruh BI di Brunei. Dalam bertutur dengan mereka ini (terutama dengan yang kurang berpendidikan) orang-orang Brunei cenderung mengikuti laras bahasa mereka.¹⁵ Dengan demikian, makin besar jumlah penutur asli bahasa Indonesia yang berinteraksi dengan orang Brunei (karena urusan pekerjaan, urusan sosial, dan lain-lainnya), makin banyak pulalah penutur bahasa Melayu di Brunei yang akan terbiasa mendengar dan mempergunakan BI.

Jenis pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan orang Indonesia tersebut selama berada di Brunei juga perlu diperhatikan untuk mengetahui kira-kira dengan berapa banyak orang Brunei mereka berurusan dan berkomunikasi dari hari ke hari.

c. Katalisator Proses Pemungutan

Proses pemungutan kata dan istilah BI tersebut walaupun tidak terlalu cepat, ternyata cukup lancar. Mungkin hal itu disebabkan oleh dua hal berikut.

Pendedahan (*exposure*) masyarakat Brunei terhadap BI tanpa keterbukaan tentu tidak akan berakibat banyak. Seperti yang sudah disebut di atas, masyarakat tutur bahasa Melayu di Brunei rata-rata memiliki *toleransi bahasa* yang amat tinggi terhadap lawan tutur dari Indonesia. Mereka cenderung menyesuaikan diri dengan mencoba berbahasa mengikuti bahasa atau dialek lawan tutur mereka.

Toleransi bahasa yang amat tinggi ini, khususnya, terlihat jelas di kalangan yang cukup berpendidikan atau berstatus sosial menengah atau tinggi. Mungkin karena mereka memiliki lebih banyak pilihan bahasa dan lebih terbiasa untuk menggunakan berbagai bahasa atau dialek. Kalangan yang kurang berpendidikan atau berstatus sosial rendah biasanya memiliki pilihan bahasa dan lebih terbatas, yaitu bahasa ibu, bahasa suku, atau bahasa daerah mereka sendiri saja dan bahasa Melayu Brunei. Selain itu, sebagian dari proses kontak bahasa tersebut memang sangat efektif bagi pendedahan dan penyebaran istilah dan ungkapan BI pada masyarakat Brunei. Pertemuan antara satu penutur Indonesia (yang berbahasa/menggunakan BI) dengan sekaligus sekelompok besar masyarakat Brunei acap kali terjadi, misalnya, dalam pertemuan antara dosen dan mahasiswanya, penceramah agama dan umatnya di masjid dan surau, pembantu rumah tangga dan keluarga majikannya, penulis karya sastra (novel, cerpen, dan sebagainya) dan pembacanya, penyanyi dan penggemarnya, serta seniman film Indonesia (melalui layar TV atau bioskop) dan penontonnya.

Seorang dosen Indonesia setiap kali memberi kuliah di kelas biasanya menghadapi 15 sampai 80 orang mahasiswa. Di masjid, ceramah seorang pendakwah atau penceramah agama dari Indonesia didengar sekaligus oleh ratusan atau, bahkan, ribuan jemaah Brunei. Dengan sistem keluarga meluas (*extended family*) yang masih dianut oleh banyak keluarga Brunei, seorang pembantu rumah tangga Indonesia tidak jarang harus melayani suatu keluarga yang jumlah anggotanya sampai lebih dari 12 jiwa. Apabila di negara ini terdapat 6.000 pembantu rumah tangga orang Indonesia dan masing-masing melayani keluarga yang rata-rata terdiri dari 6 jiwa, paling tidak ada 36.000 (kira-kira 16% dari populasi total) orang Brunei setiap hari terdedahkan pada bahasa Indonesia.

4. Simpulan

Walaupun tidak ada guru, kursus, atau program pengajaran bahasa Indonesia yang resmi di Brunei Darussalam, ternyata penyebaran kata, istilah, dan ungkapan bahasa Indonesia cukup meluas. Walaupun tidak selalu penutur bahasa Melayu di Brunei menggunakan kata-kata bahasa Indonesia tersebut, mereka senantiasa memahami dan siap untuk mempergunakannya bilamana saja diperlukan. Mereka mempunyai semacam *standby mastery* (penguasaan tersimpan) atas kata, istilah, dan ungkapan

bahasa Indonesia tersebut. Hal yang sama tidak berlaku pada orang-orang Indonesia yang bekerja dan bermukim di Brunei Darussalam terhadap bahasa Melayu Brunei atau bahasa daerah lainnya di sana. Banyak yang sudah bertahun-tahun menetap di negara ini, tetapi tidak pandai juga menggunakan bahasa daerah, kecuali beberapa ungkapan pendek atau kecil.

Lalu bagaimana? Mungkinkah akan terjadi proses "pengindonesiaan" bahasa Melayu di Brunei? Mungkinkah lama-kelamaan bahasa Indonesia akan makin lebih banyak diunakan daripada variasi bahasa-bahasa Melayu lainnya di negara ini? Penulis percaya, hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Alasannya, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a) Bahasa Melayu Brunei dan bahasa daerah lainnya merupakan bahasa yang kuat dalam kebudayaan dan kehidupan masyarakat Brunei Darussalam. Tidak mungkin bahasa itu, terutama bahasa Melayu Brunei, akan tergeser begitu saja oleh bahasa-bahasa dari luar daerah.
- b) Selain bahasa Indonesia, ada banyak lagi bahasa lain yang lebih didengar dan lebih berpengaruh terhadap masyarakat Brunei, yaitu bahasa Melayu Semenanjung, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa-bahasa tersebut ternyata sampai sekarang pun tidak mampu menggeser popularitas bahasa Melayu Brunei di segala lapisan sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, kata yang dipungut dari bahasa-bahasa tersebut (terutama dari bahasa Inggris) banyak yang mengalami semacam proses "pembruneian". Contoh, *tayar* 'tire', *pincin* 'pension', *garan* 'grant', *talipun* 'telephone', *ijin* 'agent', dan *kutin* 'tin'.¹⁶
- c) Walaupun masyarakat Brunei memiliki toleransi bahasa yang amat tinggi, pada saat yang sama mereka tampaknya memiliki kesetiaan yang amat kuat terhadap bahasa Melayu Brunei dan bahasa suku sendiri. Mereka bersifat multilingual dan sudah selama berabad-abad terbiasa pula terdedah dengan berbagai macam kode tutur tanpa terlalu terpengaruh dengan salah satu di antaranya. Penguasaan mereka atas bahasa Indonesia hanya akan menambah jumlah variasi bahasa atau dialek Melayu yang mereka kuasai.

Selain itu, kalau kita perhatikan, tampak jelas bahwa sesungguhnya pengaruh bahasa Indonesia hanya terbatas dalam penggunaan bahasa Melayu Baku. Padahal, dalam pertuturan sehari-hari bahasa Melayu Baku jauh lebih sedikit digunakan (hanya pada sitausi dan urusan resmi saja) daripada bahasa Melayu Brunei dan bahasa Inggris.¹⁷ Dengan demikian, sesungguhnya bahasa Indonesia hanya akan berpengaruh pada sebagian kecil kegiatan tutur masyarakat Brunei. Keadaan semacam ini tidak akan memungkinkan bahasa Indonesia menjadi sebuah bahasa yang dominan di wilayah ini. Pengaruh bahasa Indonesia tidak akan melebihi pengaruh bahasa Melayu Semenanjung, bahasa Arab, dan bahasa Inggris terhadap bahasa-bahasa dan dialek-dialek Melayu di Brunei.

Kata, istilah, dan ungkapan asli dari bahasa Indonesia yang digunakan di Brunei (ataupun di kawasan lain di Asia Tenggara) lebih bersifat komplementer terhadap

kata, istilah, dan ungkapan yang berasal dari bahasa Melayu. Dengan keadaan semacam ini kata, istilah, dan ungkapan bahasa Indonesia sesungguhnya lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap dan pemer kaya bahasa Melayu, terutama pada variasinya yang baku. Dengan demikian, proses sesungguhnya bersifat positif dan amat baik untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu Baku sampai bahasa itu dapat berfungsi sepenuhnya sebagai sebuah bahasa modern yang sempurna.

CATATAN

1. Surat-surat Perlembagaan, Negara Brunei Darussalam, 1959: 23, Bab 82, ps. 1 & Bab 83. Ps.3.
2. Asmah Hj. Omar *Susur Galur Bahasa Melayu* Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1985.
3. Poedjosoedarmo, Soepomo (1990) "The Geminate Consonants in Brunei Malay", a paper presented at the Extraordinary Session of the Borneo Research Council, Kuching, August 3-10, 1990.
4. Nothofer, Bernd "The Languages of Brunei Darussalam", makalah dalam Seminar Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan Melayu. Bandar Seri Begawan, 3-8 Agustus 1987, hal. 3.
5. dato Paduka Awg. Hj. Mahmud Hj. Bakyr, Pidato Pembukaan Kongres Bahasa, Sastra dan Budaya, Dewan Bahasa & Pustaka Brunei, Bandar Seri Begawan, 29 September - 3 Oktober 1993.
6. Nothofer, Bernd "The Languages of Brunei Darussalam" Makalah dalam Seminar Antarbangsa Bahasa, Kesusastraan, dan Kebudayaan Melayu, Universiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 3-8 Agustus 1987, hal. 4.
7. Purnama, Karyono (1991) "The Sociolinguistic Patterns of Use of Standard Malay in Brunei Darussalam", makalah dalam Konferensi Internasional Linguistik Austronesia (6ICAL), Honolulu, hal. 15.
8. W.J.S. Poerwadarmita (1987) *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Balai Pustaka, Jakarta.
9. Huruf "B" di dalam tanda kurung berarti kata/istilah/ungkapan Melayu yang lazimnya dipergunakan di Negara Brunei Darussalam.
10. Perlu diperhatikan bahwa dalam laporan ini sengaja tidak akan dibahas kata-kata Sansekerta/Kawi/Jawa Kuno yang di Brunei dipergunakan untuk gelar-gelar keluarga diraja, gelar-gelar kebangsawanan, dan yang dipergunakan dalam adat-istiadat tradisional kenegaraan. Seluk-beluk kata-kata tersebut perlu dikaji secara tersendiri. Kata-kata yang dikaji di sini hanyalah yang dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari di kalangan orang biasa.
11. Bahasa/dialek Melayu Brunei sesungguhnya adalah sebuah bahasa/dialek Melayu yang cukup tua, kompleks, dan amat kaya. Masih ada lagi kata-kata dan ungkapan-ungkapan asli Melayu Brunei (misalnya, *ninggai*; *sesajen*; *agas*; sejenis lalat kecil penghisap darah;

tais; rembesan air; rangit; nyamuk; lumih-lumih; intisari; dan lu'uh; ampas yang tertinggal dalam proses pembuatan tepung sagu) yang belum dimasukkan ke dalam kamus yang baru pertama kali disusun dan diterbitkan itu. Kamus itu tentu akan lebih sempurna dan berguna pula kalau dimasukkan di dalamnya kata & ungkapan yang dipungut dari bahasa Melayu Baku ataupun dari bahasa-bahasa sumber lainnya yang sudah diterima dan digunakan dalam pertuturan dan tulisan-tulisan dalam bahasa Melayu Brunei.

12. Termasuk kata-kata pungutan lama berasal dari bahasa-bahasa asing (Arab, Tamil, Cina, dan lain-lainnya) yang sudah dianggap sebagai perbendaharaan kata dasar bahasa Melayu.
13. Teuku Iskandar Alibasyah (1970) *Kamus Dewan*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur.
14. *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia di Negara Brunei Darussalam*, Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bandar Seri Begawan, Mei...
15. Mal semacam ini jarang berlaku apabila orang Brunei bertutur dengan pendatang-pendatang dan pekerja-pekerja dari negara-negara lainnya, seperti Filipina, Thailand, Bangladesh, dan India, karena mereka tidak sepenuhnya menguasai bahasa orang-orang itu. Biasanya yang terjadi sebaliknya, orang-orang asing dari negara-negara tersebut terpaksa mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Melayu Brunei agar dapat lancar berkomunikasi dengan orang-orang tempatan.
16. Hj. Chuchu bin Tassia *Dialek Sosial di Negara Brunei Darussalam*, Latihan Ilmiah, Universiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 1991.
17. Purnama Karyono (1991), hlm. 15, dan (1992) "Code Choice in the Conversations Among The Tutongs And The Dusuns", makalah dalam Pertemuan Tahunan Masyarakat Linguistik Australia, University of Sydney, Sydney, 27-29 Juni 1992, hlm. 14

DAFTAR PUSTAKA

- Asmah Hj. Omar. 1985. *Susur Galur Bahasa Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Atmodjo, S. Prawiro. 1987. *Bahasa Jawa*, Surabaya: Yayasan Joyoboyo.
- Dato Pdk. Awg. Hj. Mahmud Hj. Bakyr. 1993. "Ucapan Alu-Aluan Kongres Bahasa Sastera dan Budaya". Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. 29 September - 2 Oktober 1993.
- Hj. Chuchu bin Tassim. 1991. *Dialek Sosial di Negara Brunei Darussalam*. Latihan Ilmiah, Universiti Brunei Darussalam,
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Teuku Iskandar Alibasyah. 1970. *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia
- Kamus Dewan* (Edisi Baru). 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia,
- Kamus Bahasa Melayu Brunei*. 1991. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
- Laporan Ketenagakerjaan Indonesia di Brunei Darussalam*. Mei 1993. Bandar Seri Begawan: Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- Nothofer, Bernd. "The Language Of Brunei Darussalam". Makalah dalam Seminar Antarbangsa Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu. 3-8 Agustus 1987. Bandar Seri Begawan: Universiti Brunei Darussalam.
- Pelita Brunei*, Akhbar resmi kerajaan, Negara Brunei Darussalam. 1993. Terbitan bulan September, 1993, tahun 38, bilangan 30, 31, 32.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 1990. "The Geminant Consonants in Brunei Malay". Makalah dalam Simposium Bahasa-Bahasa Austronesia, Kuching, Serawak, 4-9 Agustus 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S. , *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan kebudayaan). Jakarta: Balai Pustaka.

- Purnama, Karyono. 1991. "The Sociolinguistic Pattern of Use of Standard Malay in Brunei Darussalam". Makalah dalam Konferensi Internasional Linguistik Austronesia (ICAL), University of Hawaii, Honolulu, May 20-14, 1991.
- . 1992. "Code Choices In The Conversation Among The Tutongs And The Dusuns", makalah dalam Pertemuan Tahunan Masyarakat Linguistik Australia, University of Sydney, 27-29 Juni, 1992.

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU DALAM KONTEKS NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Awang Mataim Bakar
Universiti Brunei Darussalam

1. Pendahuluan

Memperjuangkan bahasa Melayu (BM) sebagai bahasa ilmu, bahasa dunia yang dihormati masyarakat antarabangsa, adalah tanggung jawab kita bersama. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kewibawaan dan kejayaan pembudayaan BM sebagai bahasa ilmu mencerminkan kewibawaan dan kejayaan penuturnya.

Dalam konteks Negara Brunei Darussalam (NBD), biarpun pembudayaan BM sebagai bahasa ilmu kurang digalakkan, usaha untuk mengangkat status BM sebagai bahasa moden dan antarabangsa memang giat dan rancak dilakukan, sama rancaknya dengan negara-negara anggota Mabbim yang lain.

Dalam kertas kerja ini bahasa ilmu ditakrifkan sebagai bahasa yang digunakan sebagai pangantar untuk menimba dan menyampaikan ilmu pengetahuan atau bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan atau memperkatakan ilmu. Kebanyakan dunia keilmuan itu melibatkan dunia pendidikan, sudah tentu fokus perbincangan kertas ini berkisar pada ruang liput BM dalam bidang pendidikan.

Pengamatan kertas ini tertentu kepada perhitungan berapa banyak BM dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan tanpa melihat mutu BM yang digunakan. Oleh sebab itu, kertas ringkas ini lebih bersifat laporan sahaja.

2. Kedudukan Bahasa Melayu dalam Perlembagaan

Status BM sebagai bahasa rasmi NBD sudah mula termaktub sejak pemasyhuran Perlembagaan Negeri Brunei pada 29 September 1959. Pendahuluan ini terkandung dalam Bab 82 (1) yang menyatakan seperti berikut.

Bahasa rasmi negeri ini ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan huruf yang ditentukan oleh undang-undang bertulis.¹

Bertitik tolak dari tarikh tersebut, secara perlahan BM telah mula dilibatkan dalam urusan pentadbiran (Awang Haji Ahmad, 1991: 2) dan seterusnya dalam bidang yang lain.

3. Kedudukan BM dalam Falsafah Negara Nbd.

Melayu Islam Beraja (MIB) adalah falsafah negara NBD yang ditanamkan kepada setiap jiwa warga Brunei untuk mewujudkan warga yang ideal mencapai matalamat negara. Salah satu matalamat negara melalui MIB ialah pengukuhan BM sebagai bahasa nasional (Abdul Aziz, Awang, 1992:17). BM dijadikan sebagai mekanisme yang signifikan dalam menonjolkan identiti Melayu dalam MIB. Oleh karena itu, BM harus diamalkan dan dihayati oleh setiap individu Brunei bagi pendukung falsafah negara dan agar konsep bahasa sebagai alat perpaduan dan lambang kedaulatan negara kelihatan dengan nyata.

4. Senario Penggunaan BM dalam Bidang Pendidikan

Dalam konteks NBD, proses pendidikan formal ditangani oleh dua kementerian. Hal ini demikian kerana berbezanya elemen yang dominan dalam pelaksanaan pendidikan itu. Proses pendidikan yang elemennya lebih menjurus kepada bidang keagamaan dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, sementara yang lain-lain dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna. Kementerian Pendidikan tidak berkecenderungan memberikan asas pengetahuan agama malah kementerian tersebut juga memasukkan mata pelajaran Pengetahuan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh pelajar-pelajar terutama diperingkat rendah dan menengah. Begitu juga dengan kementerian Hal Ehwal Ugama, kementerian tersebut tidak juga mengabaikan pelajaran-pelajaran yang bersifat *non-teologic*.

a) Penggunaan BM dalam Proses Pendidikan Kelolaan Kementerian Pendidikan

Pada awal tahun 1985, sistem pendidikan dwibahasa (*Dwibahasa Education System*) telah mula diimplementasikan di NBD. Sistem pendidikan ini dikenal dengan "Sistem Pendidikan Negara Brunei Darussalam" (Jumat, Ahmad 1991:14). Sistem pendidikan ini berbeza dengan sistem sebelumnya yang berbentuk dua aliran, iaitu aliran Melayu dan aliran Inggris. Sistem dwibahasa ini diperkenalkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Dengan pengenalan sistem ini, pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran di NBD telah mula melibatkan penekanan dua bahasa, iaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, nisbah penggunaan kedua-dua bahasa ini sebagai bahasa pengantar tampaknya tidak seimbang. Ketidakeimbangan ini dapat dilihat melalui statistik yang dilampirkan dalam kertas ini yang mendeskripsikan kekerapan penggunaan BM di semua peringkat persekolahan.

1) Sekolah Rendah Darjah I - III (Rendah Bawah)

Di peringkat awal pendidikan fomal ini, BM digunakan secara keseluruhan dalam menyampaikan pelajaran kecuali mata pelajaran bahasa Inggris. Ini bermakna BM

digunakan dengan peratus 77.8% (Lihat Lampiran A). Di peringkat ini, proses penyampaian ilmu lebih bersifat *monolingual* kerana mata-mata pelajaran bukan bahasa Inggrs disampaikan dengan menggunakan BM sahaja.

2) Darjah IV - VI (Rendah Atas)

Murid-murid di peringkat ini sudah terlibat dengan sistem peringkat dwibahasa. Di peringkat ini penggunaan BM sebagai bahasa pengantar mata pelajaran sudah mula berkurang. Berdasarkan lampiran A, kekerapan penggunaan BM hanya 18 period seminggu, berbanding dengan penggunaan bahasa Inggrs yang penggunaannya sejumlah 27 period seminggu. Berdasarkan peratus penggunaannya pula, BM hanya digunakan sebanyak lebih kurang 40% sahaja, iaitu digunakan untuk mengajar mata pelajaran BM, Ugama, Sivik, Pendidikan Jasmani, dan Lukisan.

3) Sekolah Menengah Form I - III (Menengah Bawah)

Di peringkat ini, penggunaan BM sudah makin merosot. Ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita betapa menurunnya keterlibatan BM dalam mengungkapkan bidang-bidang keilmuan. Kemerosotan ini dibuktikan dengan menurunnya peratusan penggunaannya (Lihat Lampiran B). Jika di sekolah rendah atas (Upper Primary) BM digunakan sejumlah 40%, tetapi di peringkat menengah bawah ini, penggunaannya hanya sekitar 27.5% hingga 35% sahaja.

4) Form IV - V (Menengah Atas)

Berdasarkan lampiran B, kita telah diberi bayangan bahawa di peringkat *Form IV - V* aliran sains, BM hanya mengisi 4 period sahaja daripada 40 period dalam seminggu. Sementara bagi aliran Arts hanya 8 period dalam seminggu. Ini menunjukkan bahawa penggunaan BM sebagai bahasa pengantar di peringkat ini merosot lagi jika dibandingkan dengan penggunaannya di menengah bawah. Peratusan penggunaan BM sebagai bahasa pengantar bagi Form IV - V hanyalah sekitar 10%-20% sahaja.

5) Form VI (Menengah Atas) Aliran Inggrs

Pelajar-pelajar di peringkat ini adalah calon-calon yang akan menduduki pemeriksaan GCE "A" level. Mereka hanya dikehendaki mengambil 4 mata pelajaran sahaja, iaitu 3 peringkat "A" dan 1 peringkat "O". Bagi aliran sains, semua mata pelajaran yang ditawarkan menggunakan pengantar bahasa Inggrs. Mereka tidak mengambil mata pelajaran berpengantar BM (Lihat Lampiran B). Bagi aliran Arts pula, dari mata pelajaran yang ditawarkan, hanya 3 mata pelajaran sahaja yang berpengantar BM, sedangkan selebihnya menggunakan bahasa Inggrs (lihat Lampiran B).

6) Tingkatan VI (Aliran Melayu)

Mereka ini adalah kumpulan terakhir dari pelajar-pelajar yang terlibat dengan sistem pendidikan lama (sebelum sistem dwibahasa) dari aliran Melayu. Data yang disertakan dalam lampiran B jelas menggambarkan bahawa BM begitu masih digunakan sepenuhnya sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di peringkat ini kecuali mata pelajaran bahasa Inggris. Ini bersesuaian dengan aliran persekolahan mereka ini.

7) Universiti Brunei Darussalam

Data yang terdapat dalam lampiran C, jelas menunjukkan bahawa daripada 17 program yang dilaksanakan oleh Universiti Brunei Darussalam (UBD), hanya 4 program sahaja yang bahasa pengantarnya majoriti BM, sedangkan program-program selebihnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

Terdapat beberapa program dalam aliran Inggris, iaitu program Ijazah Sarjana, Certificate in Early Childhood dan PGCE yang BM tidak mengambil tempat dalam arus perjalanan penerimaan dan penyampaian ilmu di peringkat ini kerana daripada unit-unit yang diperlukan lulus untuk program ini tidak satu pun unit yang berpengantar BM.

Bagi program ijazah Sarjana Muda dan Certificate in Education penggunaan BM hanya sekitar 3,2%–17%. Keterlibatan BM ini pun adalah kerana adanya kursus-kursus wajib universiti yang bernilai 4 unit yang mesti diambil oleh semua pelajar UBD, iaitu kursus MIB. Dengan peratus ini, ia memperlihatkan sedikit kemerosotan berbanding dengan penggunaan BM di menengah atas yang penggunaannya sedikit, iaitu 10%–20%.

Dari program dalam aliran Melayu, fungsi BM sebagai penunjang utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran begitu masih terserlah dan utuh. Ini nyata sekali gambarannya seperti dalam lampiran C. Berdasarkan lampiran tersebut semua, program-program sijil dilaksanakan sepenuhnya dengan menggunakan BM sebagai bahasa pengantarnya. Bagi program ijazah pula, penggunaannya adalah sekitar 92,7%–93,5%.

8) Aliran Vokasional dan Teknikal

Di NBD terdapat 6 buah institusi yang menjurus pada bidang pendidikan jenis vokasional dan teknik, iaitu sebagai berikut.

- (1) Institut Teknologi Brunei, Jalan Muara
- (2) Sekolah Vokasional, Lambak Kanan
- (3) Pusat Latihan Mekanik, Tungku, Gadong
- (4) Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal (MTSSR), Jalan Muara

(5) Maktab Kejuruteraan Jefri Bolkih, Kuala Belait

(6) Maktab Jururawat P.A.P. Rashidah Saadatul Bolkih, Jalan Muara

Keenam-enam institusi ini tidak menyenaraikan mata pelajaran yang berpengantar BM sebagai mata pelajaran peperiksaan. Mata pelajaran Ugama dan MIB hanya diajarkan sebagai mata pelajaran tambahan sahaja. Dalam lampiran C, kita boleh melihat mata-mata pelajaran yang diajarkan di MTSSR, Jalan Muara mengikuti kursus-kursus tertentu. Dalam lampiran ini hanya dua kursus sahaja yang diperlihatkan daripada beberapa kursus yang dijalankan di Maktab ini. Yang nyata di sini bahawa mata pelajaran yang berpengantar BM tidak terkandung dalam senarai mata pelajaran yang akan diduduki dalam peperiksaan bagi mendapatkan sijil kursus-kursus tersebut.

b) Penggunaan BM dalam Proses Pendidikan Kelolaan Kementerian Hal Ehwal Ugama

Kementerian Hal Ehwal Ugama merupakan satu kementerian yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan amalan Islam terhadap penganutnya. Proses pemasyarakatan ini dilaksanakan salah satu daripadanya melalui pendidikan formal dengan menggunakan kod bahasa yang tertentu termasuklah BM. Dalam kertas ini penulis membuat penelitian tentang beberapa banyak BM digunakan di sekolah-sekolah Agama khas, di Sekolah Menengah Arab, di Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan dan di Institut Pengajian Islam, iaitu institusi-institusi pendidikan yang dikelolakan oleh kementerian ini.

1) Sekolah Agama Khas

Di sekolah-sekolah Agama khas, seluruh mata pelajaran diajarkan dengan menggunakan BM sebagai bahasa pengantarnya (Lihat Lampiran D).

2) Sekolah Menengah Arab

Kedaaan di sekolah-sekolah agama khas berbeza daripada di Sekolah Menengah Arab. Di peringkat persediaan, mata pelajaran yang menggunakan BM sebagai bahasa pengantarnya, hanya untuk mata pelajaran BM dan pendidikan Jasmani sahaja, dengan 6 period seminggu (4 period untuk BM dan 2 period untuk Pendidikan jasmani) daripada 40 period. Ini memberikan gambaran bahawa hanya 15% sahaja BM digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan di peringkat ini. Peratusan ini semakin merosot lagi apabila sampai ke peringkat tingkat I-V kerana peratusan penggunaannya hanya di antara 10%–12,5% sahaja (Lihat Lampiran E). Begitu juga di tingkatan VI BM hanya digunakan untuk mata pelajaran BM sahaja, sedangkan mata pelajaran yang lain diajarkan kebanyakannya dalam bahasa Arab kecuali mata pelajaran bahasa Inggris. Peratusan penggunaan BM di peringkat ini adalah lebih kurang 11% sahaja.

3) Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan

Di peringkat ini BM begitu dominan digunakan. Tahun I, II, dan III semua bahasa pengantarnya dalam pelajaran menggunakan BM kecuali mata pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Peratusan penggunaan BM di Maktab ini adalah antara 90%–92% (Lihat Lampiran F).

4) Institut Pengajian Islam

Institut ini menawarkan program Diploma Pengajian Islam. Pelajar-pelajarnya terdiri daripada pelajar-pelajar aliran Arab. Kursus-kursus yang ditawarkan juga keseluruhannya menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya kecuali Kuliah Tamadun Islam dan Kenegaraan sahaja yang menggunakan BM. Kursus ini ditawarkan untuk pelajar-pelajar tahun I sahaja yang merupakan kursus wajib institut.

5. Penutup

Gambaran yang diberikan di atas tentang kedudukan BM dalam bidang pendidikan di NBD cukup untuk membimbangkan kita semua. Makin tinggi peringkat pendidikan itu, makin sedikit fungsi BM itu sebagai alat pengungkap ilmu. Pengukuhan kedudukan BM sebagai bahasa yang berdaulat lagi disanjung tinggi bukan hanya sekadar memaktubkannya ke dalam perlembagaan, melainkan cara yang lebih penting adalah melakukan usaha yang lebih serius membentuk satu tradisi budaya hidup negara melalui penggunaan BM secara seimbang dengan bahasa lain terutama dalam bidang pendidikan. Dengan cara ini, akan lahir satu generasi pengguna BM yang mampu menghasratkan bentuk pengucapan intelektual dan kreatif yang sekaligus akan mencernakan ciri Melayu yang terkandung dalam MIB.

CATATAN

1. *Perlembagaan Negeri Brunet 1959, hal. 23.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz, P.O.K.L.W.D.S.S. Haji Awang, 1992. "Melayu Islam Beraja Negara Brunei Darussalam". Kertas Kerja Seminar Melayu Islam Beraja. Negara Brunei Darussalam.
- Ahmad bin Kadi, Awang Haji, 1991 "Kedudukan dan Peranan Bahasa Melayu Sejak 29 September, 1959". Kertas Kerja Seminar Dialek. Negara Brunei Darussalam.
- Ahmad bin Haji Jumat, Dato Dr. Haji, 1991, "Dwibahasa (Bilingual) System of Education in Negara Brunei Darussalam". Kertas Kerja Seminar Bilingualism and National Development. Negara Brunei Darussalam.
- Handbook 1993/94. Faculty of Education. Universiti Brunei Darussalam.*
- Handbook 1993/94. Faculty of Management and Administrative Studies. Universiti Brunei Darussalam.*
- Handbook 1993/94. Faculty of Science. Universiti Brunei Darussalam.*
- Perlembagaan Negeri Brunei, 1959.*

**LAMPIRAN A: KEKERAPAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU
SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI
SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH**

DARJAH I-III

BIL	SUBJEK	BP	PM
1	MATEMATIK	BM	12
2	BAHASA MELAYU	BM	10
3	PELAJARAN AM	BM	4
4	LUKISAN	BM	2
5	SIVIK	BM	2
6	UGAMA	BM	3
7	LATIHAN JASMANI	BM	2
8	BAHASA INGGERIS	BI	10
	JUMLAH		45

BP : Bahasa Pengantar PM: Per Minggu

DARJAH IV-V

BIL	SUBJEK	BP	PM
1	MATHEMATICS	BI	10
2	ENGLISH	BI	10
3	HISTORY	BI	2
4	GEOGRAPHY	BI	2
5	SCIENCE	BI	3
6	MALAY	BM	10
7	UGAMA	BM	3
8	SIVIK	BM	1
9	PHYSICAL EDUCATION	BM	2
10	LUKISAN	BM	2
	JUMLAH		45

BP : Bahasa Pengantar PM: Per Minggu
BI : Bahasa Inggeris BM: Bahasa Melayu

**LAMPIRAN B: KEKERAPAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU
SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DI
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH**

MENENGAH BAWAH: FORM I-III

BIL.	SUBJEK	BP	FI & II PM	F III PM
1	ENGLISH	BI	7	8
2	MATHEMATICS	BI	6	6
3	GEOGRAPHY	BI	4	4
4	HISTORY	BI	3	3
5	INTEGRATED SCIENCE	BI	6	6
6	COMMERCE/HOME SCIENCE/ART	BI/BI BM	3	3
7	ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE	BM	3	3
8	PHYSICAL EDUCATION	BM	2	2
9	MALAY	BM	4	5
10	MELAYU ISLAM BERAJA	BM	2	1
	JUMLAH		40	40

BP : BAHASA PENGANTAR BM: BAHASA MELAYU
BI : BAHASA INGGRIS PM: PER MINGGU

MENENGAH ATAS: FORM IV-V (ALIRAN SAINS)

BIL.	SUBJEK	BP	PM
1	ENGLISH	BI	6
2	BIOLOGY	BI	5
3	CHEMISTRY	BI	5
4	MATHEMATICS	BI	6
5	ADDITIONAL MATHEMATICS/ISLAMIC RELIGIOUS KNOWLEDGE	BI/BM	4
6	PHYSICS/HISTORY	BI	5
7	GEOGRAPHY/ECONOMICS/PRINCIPLES	BI	5
8	MALAY	BM	4
	JUMLAH		40

BP : BAHASA PENGANTAR BM: BAHASA MELAYU
BI : BAHASA INGGERIS PM: PER MINGGU

MENENGAH ATAS: FORM IV-V (ALIRAN SASTERA)

BIL	SUBJEK	BP	PM
1	ENGLISH	BI	6
2	MATHEMATICS	BI	6
3	GEOGRAPHY	BI	5
4	CHEMISTRY	BI	6
5	PRINCIPLES OF ACCOUNTS	BI	4
6	HISTORY/ECONOMICS	BI	5
7	ISLAMICS RELIGIOUS KNOWLEDGE/ ART/SASTERA	BM	4
8	MALAY	BM	4
	JUMLAH		40

BP : BAHASA PENGANTAR**BM: BAHASA MELAYU****BI : BAHASA INGGERIS****PM: PER MINGGU****FORM VI (ALIRAN SAINS)**

BIL	SUBJEK	BP	PM
1	CHEMISTRY	BI	5
2	BIOLOGY	BI	5
3	PHISICS	BI	5
4	MATHEMATICS	BI	5
5	GENERAL PAPER	BI	5
6	ECONOMICS	BI	5
7	ENGLISH	BI	5
	JUMLAH		35

BP : BAHASA PENGANTAR**BM: BAHASA MELAYU****BI : BAHASA INGGERIS****PM: PER MINGGU**

FORM VI (ALIRAN SASTERA)

BIL	SUBJEK	BP	PM
1	MATHEMATICS	BI	6
2	ACCOUNTING	BI	6
3	GEOGRAPHY	BI	6
4	HISTORY	BI	6
5	PUBLIC AFFAIR	BI	6
6	GENERAL PAPER	BI	6
7	ECONOMICS	BI	6
8	ENGLISH	BI	6
9	MALAY	BM	6
10	SYARA'IAH	BM	6
11	USSULUDDIN	BM	6

BP : BAHASA PENGANTAR**BM: BAHASA MELAYU****BI : BAHASA INGGERIS****PM: PER MINGGU****FORM VI (ALIRAN MELAYU)**

BIL	SUBJEK	BP	PM
1	ENGLISH	BI	6
2	BAHASA MELAYU	BM	6
3	EKONOMI	BM	6
4	GEOGRAFI	BM	6
5	SEJARAH	BM	6

BP : BAHASA PENGANTAR**BM: BAHASA MELAYU****BI : BAHASA INGGERIS****PM: PER MINGGU**

**JUMLAH UNIT YANG MENGGUNAKAN BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR
DI UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM**

Aliran Inggeris

BIL	PROGRAM	UNIT DIPERLUKAN	UNIT DALAM BI	UNIT DALAM BM	% BM
1	B.A. Education Preservice Upgraders	124 109	120 105	4* 4*	3.2 3.8
2	B.A. Primary Education Preservice-Strand A Preservice-Strand B Preservice-Strand A Preservice-Strand B	124 124 94 94	108 117 78 87	16** 7*** 16** 7***	12.9 5.9 17.0 7.4
3	B.Sc. Educations	124	120	4*	3.2
4	Certificate in Education Strand A Strand B	94 94	78 87	16** 7***	17 7.4
5	P G C E Geography Economics TESL	55 53 55	55 53 55	0 0 0	0 0 0
6	Cert in Early Childhood Edu	52	0	0	0
7	M.Ed. Management	30	30	0	0
8	B.A. Management Studies	124	120	4*	3.2
9	M.A. Public Policy & Administration	124	120	4*	3.2
10	M.A. Public Policy	30	30	0	0
11	B.Sc. Computer Studies	124	120	4*	3.2
12	B.Sc. Mathematics	124	120	4*	3.2
13	B.Sc. Engineering	124	120	4*	3.2

BIL	PROGRAM	UNIT DIPERLUKAN	UNIT DALAM BI	UNIT DALAM BM	% BM
1	B.A. Pendidikan Preservice Upgraders	124	g****	116	93.5
		109	g****	101	92.7
2	P G C E				
	Kursus Dua Semester	30	0	30	100
	Bahasa Melayu	55	0	55	100
	Sejarah	51	0	53	100
3	Sijil Perguruan Pendidikan	30	0	30	100
4	Sijil Pengajaran Bahasa Melayu	30	0	30	100

* Kursus Melayu Beraja

** Kursus Melayu Islam Beraja (4 Unit) BM (12 Unit)

*** Kursus Melayu Islam Beraja (4 Unit) BM (3 Unit)

**** Kursus Bahasa Inggeris

Course	Subject or Unit	Unit Value	Approximate Hours of Instruction
1. BTTEC First Certificate in Construction 6 months + 3 months Industrial attachment	1. Communication Processes & Techniques	1.0	90 hours (t/t)
	2. Introduction to the Built Environment	2.0	180 hours (t/t)
	3. Mathematics	1.0	90 hours (t/t)
	4. Sciences	1.0	90 hours (t/t)
	5. English Language & Communication	1.0	90 hours (t/t)
	6. Common Skill	no values	Variable
	6	6.0	540 hours
2. BTEC Natipnal Certificate in Building Studies 11/2 years + 6 months industrial attachment	1. The Built Environment	1.0	90 hours (t/t)
	2. Construction Science	1.0	90 hours (t/t)
	3. Construction Technology	1.5	135 hours (t/t)
	4. Material in Construction	0.5	90 hours (t/t)
	5. Mathematics	1.0	90 hours (t/t)
	6. Organisation & Procedures	1.0	90 hours (t/t)
	7. Site Surveying & Levelling	1.0	90 hours (t/t)
	8. Building Construction	1.0	90 hours (t/t)
	9. Environment Science	1.0	90 hours (t/t)
	10. Measurement	1.0	90 hours (t/t)
	11. English as a Foreign Language	1.0	90 hours (t/t)
	12. Common Skill	no values	variable
	12	11	1005 hours

**LAMPIRAN D: MATA PELAJARAN DAN BAHASA PENGANTAR
BAGI SEKOLAH AGAMA KHAS**

BIL	SUBJEK	BP	I-III	IV	V	VI
01	AL-QURAN	BM	/	/	/	/
02	TAUHID	BM	/	/	/	/
03	IBADAT	BM	/	-	-	-
04	ADAB	BM	/	-	-	-
05	TARIKH ISLAM	BM	/	/	/	/
06	LATIHAN SEMBAHYANG	BM	/	/	/	/
07	TULISAN JAWI	BM	/	/	/	/
08	TAHARAH	BM	-	/	-	-
09	SALAH	BM	-	/	/	/
10	SIAM	BM	-	/	-	/
11	TAJWID	BM	-	/	/	/
12	TASAUF	BM	-	/	/	/
13	ZAKAT	BM	-	/	/	/
14	HAJI	BM	-	-	/	/
15	MUNAKAHAT	BM	-	-	/	/
16	FARAI DH	BM	-	-	/	/
17	MUAMALAT	BM	-	-	/	/
18	JINAYAT	BM	-	-	/	/

LAMPIRAN E

[illegible]

TABURAN PERIOD DAN BAHASA PENGANTAR MATA PELAJARAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ARAS

TINGKATAN/PERSEDUAAN

TINGKAT VI ATAS & BAWAH

BIL.	MATA PELAJARAN	BAHASA PENGANTAR			PERIOD/MINGGU	
		BM	BA	BI	SYARAJAH	USULUDDIN
1	AL-QURQON		/		3	
2	FIQH		/		2	
3	TAUHID		/		-	2
4	USUL AL FIQH		/		2	
5	MANTIQ		/		-	2
6	HADITH		/		2	
7	TAFSIR		/		-	2
8	MUSTALAH HADITH		/		2	
9	ULUM AL QURAN		/		-	2
10	TAHFIZ AL QURAN		/		-	2
11	TARIKH ISLAM		/		2	2
12	TARIKH TASYRIE		/		2	2
13	NAHU SARAF		/		6	6
14	BALGHAH		/		2	2
15	INSYA'		/		3	3
16	ADAB NUSUS		/		4	4
17	BAHASA MELAYU	/			4	4
18	ENGLISH			/	4	4

**TABURAN PERIOD & BAHASA PENGANTAR MATA PELAJARAN
DI MAKTAB PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN**

MATA PELAJARAN	BAHASA PENGANTAR			PERIOD/MINGGU		
	BM	BA	BI	TH I	TH II	TH III
<i>PENDIDIKAN</i>						
SAIKOLOGI				2	2	1
PEDAGOGI				2	2	1
METHOD PENG AGAMA				2	2	1
PRINSIP				1	1	1
TEKNOLOGI				1	1	1
SOSIOLOGI				1	1	1
<i>SYARAJAH</i>						
IBADAT				2	2	1
JENAYAT				2	2	1
MUNAKAHAT				2	2	-
MUAMALAT				2	2	-
FARAI DH				2	2	-
MUARAJA AH KITAB LAMA				2	2	1
<i>USULUDDIN</i>						
TAUHID				2	2	1
TASAUF				1	1	-
TAFSIR				1	-	-
HADITH				-	1	-
SEJARAH ISLAM				1	1	1
<i>AL QUR'AN</i>						
METHOD PENG. AL QUR'AN				1	1	1
BACAAN AL QUR'AN				2	2	1
TAJWID				1	1	1
AMALI IBADAT				1	1	1
ZIKIR SYARAFIL ANAM				1	1	1
KHAT				1	1	1
BAHASA MELAYU (LINGUISTIK)				1	1	1
BAHASA ARAB				2	2	1
ENGLISH				1	1	1
<i>LATIHAN MENGAJAR</i>				6M	6M	2P
M : MINGGU						
P : PENGAL						

**KEDWIBAHASAAN, PRESTASI AKADEMIK,
DAN PENGUASAAN BAHASA MELAYU
DI KALANGAN PENUNTUT-PENUNTUT MELAYU
DI SINGAPURA**

Hajah Kamsiah Haji Abdullah
Nanyang Technological University
Institute of Education
Singapore

Kedwibahasaan merupakan tonggak utama sistem pendidikan di Singapura sejak tahun 1966 sehingga pembelajaran bahasa ibunda dan bahasa Inggris diwajibkan bagi semua murid tidak kira dari golongan etnik apa pun asal-usul mereka. Ini bermakna karena setiap murid akan mempelajari bahasa Inggris di samping mempelajari satu lagi bahasa lain, biasanya bahasa Melayu, Cina, atau Tamil. Bagi murid yang bersekolah aliran Inggris, mereka mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pertama sekolah (EL1) dan bahasa Melayu (ML2), Cina, atau Tamil sebagai bahasa kedua. Sebaliknya, bagi mereka yang bersekolah dalam aliran Melayu, Cina atau Tamil (yang bermaksud kebanyakan mata pelajaran diajar dalam bahasa tersebut), mereka mempelajari bahasa-bahasa pengantar ini sebagai bahasa pertama dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Walau bagaimanapun, aliran persekolahan Melayu ini sudah tidak lagi wujud sejak tahun 1983. Yang masih ada ialah madrasah-madrasah yang mengajarkan bahasa Melayu, Inggris, dan Arab selain pengetahuan agama Islam.

Kedwibahasaan menjadi semakin penting setelah timbulnya Laporan Goh pada tahun 1978 yang mewajibkan pembelajaran bahasa kedua (CMT) bagi semua peringkat. Bahkan, kelulusan dalam bahasa kedua dijadikan satu syarat kemasukan di universiti dan pusat-pusat pengajian tinggi. Ini berarti, bagi penuntut yang tidak lulus dalam bahasa kedua, mereka tidak akan dapat menjejakkan kakinya di universiti dalam negeri walaupun mereka lulus dengan cemerlang dalam mata pelajaran yang lain. Selain itu, terdapat juga peraturan yang tidak membenarkan murid dari satu kaum terbesar di Singapura untuk mempelajari bahasa kedua yang bukan bahasa ibunda mereka. Maksudnya, murid-murid Cina belajar bahasa Mandarin, begitu juga murid-murid Melayu dan India mestilah belajar Bahasa Melayu atau Tamil masing-masing, kecuali salah seorang ibu bapak mereka bukan berbahasa ibundakan salah satu dari empat bahasa rasmi di Singapura, iaitu Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Perkara ini mempunyai implikasi yang mendalam dan begitu jauh ke atas sistem sosial dan pendidikan di Singapura, tentunya.

Seganding dengan polisi kedwibahasaan, polisi penyaluran (*streaming*) dilakukan pada peringkat-peringkat tertentu di tingkatan sekolah rendah dan menengah.

- a. Sebanyak 10% murid-murid yang paling bijak disalurkan ke aliran Ekspres Istimewa (*Special Express*) tempat mereka mempelajari bahasa Inggris dan bahasa ibunda pada tingkat bahasa pertama, di samping dibenarkan mempelajari satu lagi bahasa asing seperti bahasa Jepun, Perancis, dan German.
- b. Sebanyak 30%–40% murid terbaik disalurkan ke aliran Ekspres tempat mereka mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan bahasa ibunda sebagai bahasa kedua dalam masa empat tahun sebelum mengambil Sijil Am Pelajaran.
- c. Murid-murid yang lulus peperiksaan sekolah rendah disalurkan ke aliran normal tempat mereka akan mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan bahasa ibunda sebagai bahasa kedua dalam masa lima tahun sebelum mengambil peperiksaan sijil Am Pelajaran Normal.

Sistem Pendidikan Singapura 1979 ini kemudian telah melalui beberapa modifikasi dan penghalusan sehingga muncul pula Sistem Baru Pendidikan Singapura yang baru dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mulai dari tahun 1992. Walaupun sistem pendidikan Singapura ini kerap diubah-suai, dasar asas kedwibahasaan tetap tidak berubah. Semua murid yang melalui sistem pendidikan nasional di Singapura akhirnya perlu mencapai tahap kecekapan asas dalam dua bahasa, bahasa ibunda dan bahasa Inggris.

Perkembangan pendidikan yang berasaskan pertimbangan praktikal ini telah mengakibatkan pemeringkatan dalam penguasaan bahasa Inggris di kalangan penuntut dan orang ramai kerana bahasa ini telah pun menjadi bahasa perniagaan dan komunikasi antara bangsa yang paling penting dan dianggap sangat berharga untuk persaingan dalam perdagangan dan komunikasi antarbangsa. Di samping itu, penguasaan bahasa Mandarin (yang digalakkan pembelajarannya, kerana budaya ketimuran dan peluang perniagaan dengan Cina di kalangan orang-orang Cina), juga semakin meluas. Akan tetapi, apakah yang terjadi kepada penguasaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan Singapura, baik di kalangan orang-orang Melayu maupun di kalangan kaum-kaum lain yang terdahulu dari ini sering bertutur dalam bahasa Melayu koloquial?

Tidak dapat dinafikan bahawa corak penggunaan bahasa Melayu telah berubah dan bahasa Melayu tidaklah sepenting bahasa Inggris dan Mandarin yang mempunyai masyarakat pengguna bahasa yang lebih luas. Bahasa Melayu di Singapura lebih bersifat *ceremonial* digunakan untuk istiadat rasmi pemerintah (dalam angkatan tentera dan parlimen). Dapat dikatakan bahawa kesan polisi kedwibahasaan ini sungguh meluas dan mendalam di kalangan semua peringkat dan aneka masyarakat, termasuk orang-orang Melayu sendiri. Kesan positif kedwibahasaan sudah pun kelihatan dalam keputusan peperiksaan bahasa pertama dan kedua yang semakin meningkat setiap tahun bagi semua kaum. Keupayaan berbahasa Inggris yang baik di kalangan orang-orang Melayu, terutama mereka yang berpendidikan tinggi umumnya tampak jelas.

Namun, kesan kedwibahasaan khususnya dwibahasa Inggris-Melayu ke atas penguasaan bahasa Melayu sendiri masih diragukan.

Kajian awal yang dijalankan tentang sikap dan motivasi terhadap pembelajaran BI dan BM di kalangan murid-murid Melayu. Kamsiah (1985) telah mencatatkan sikap murid-murid Melayu yang kurang positif terhadap pembelajaran BM jika dibandingkan dengan BI. Begitu juga tentang motivasi, didapati motivasi integrasi dan instrumental yang lebih tinggi terhadap pembelajaran BI dari BM.

Sebab mengapa merosotnya kecenderungan untuk menguasai BM telah banyak dibincangkan, antaranya ialah nilai ekonomi BI yang tinggi, mudahnya mendapat pekerjaan yang bergaji lumayan jika boleh berbahasa Inggris, wujudnya peluang pendidikan yang lebih tinggi dalam BI, dan sebagainya.

Pendek kata, masyarakat Melayu moden di Singapura amat peka dengan perkembangan dan peluang-peluang yang akan dapat diraih melalui pendidikan Inggris; tetapi apakah kesan kedwibahasaan ini terhadap penguasaan BM atau bahasa ibunda mereka? Adakan kedwibahasaan ini akan menjejaskan kelakonan BM mereka, pencapaian akademik mereka, dan adakah kesan ini negatif atau positif?

Oleh kerana tidak mungkin seseorang dapat menggunakan dua bahasa sekaligus atau pada satu masa yang sama, tidak dapat tidak, penggunaan satu-satu bahasa akan mengurangkan peluang satu bahasa lain digunakan dalam komunikasi, dan ini boleh menjejaskan secara negatif kepada bahasa yang tidak digunakan. Dalam konteks Singapura, Gopinathan (1981) pernah mendapati bahawa perkembangan bahasa Tamil adalah bersifat subtraktif atau mengecut, bilangan pengguna bahasa Tamil semakin hari semakin kecil. Keadaan bahasa Melayu pula kelihatan mantap ialah bahasa yang paling tinggi darjah kekekalan (*language maintenance*). Di samping itu, ada banyak kajian-kajian awal yang menunjukkan betapa baiknya kesan kedwibahasaan terhadap pencapaian atau prestasi seseorang terutamanya prestasi am atau akademik, sama ada berbentuk verbal atau nonverbal. Misalnya, Peal dan Lambert membuktikan kesan positif dwibahasa.

Besarnya kesan-kesan yang bertalian dengan BI telah dibincangkan oleh Kamsiah Abdullah (1993), dalam kertas kerja beliau tentang pengekalan identiti bangsa dan bahasa di kalangan murid-murid yang sama. Dalam kertas kerja itu telah dibandingkan kesan dwibahasa (di samping pemikiran kritikal, jantina, kecekapan am, dll.) terhadap penguasaan BI dan BM. Dalam kajian tersebut diperlihatkan kesan latar belakang bahasa Inggris yang positif untuk bahasa Inggris, tetapi negatif untuk bahasa Melayu. Bahkan, latar belakang dwibahasa mempunyai pertalian juga dengan pemikiran kritikal yang dikatakan oleh Marzano (1989), misalnya, sebagai tonggak institusi demokratik Barat.

Dengan berlatarbelakangkan segala masalah ini akan dibentangkan satu kajian tentang kedwibahasaan Melayu-Inggris di kalangan murid-murid Melayu yang dijalankan di dua belas sekolah menengah di Singapura. Seramai 580 orang murid-murid sekolah menengah yang terdiri dari 249 orang atau 43% dari aliran ekspres

(iaitu aliran yang baik dari segi pencapaian akademik) dan 330 orang atau 57% dari aliran normal (biasa); dari menengah 1 hingga menengah 5 telah digunakan untuk penyelidikan ini. Kesemua mereka adalah penutur jati bahasa Melayu dan telah mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah masing-masing sekurang-kurangnya sejak peringkat sekolah rendah lagi. Latar belakang penggunaan bahasa Inggris di rumah murid sampel ini menunjukkan bahawa

- 6.4% menggunakan BI sepanjang masa,
- 15% sangat kerap menggunakan BI,
- 28% kerap menggunakan BI,
- 44,5% gunakan sedikit sahaja BI,
- 5.7% langsung tidak menggunakan BI.

Jelas di sini bahawa lebih kurang 50% daripada sampel adalah mereka yang berlatarbelakangkan persekitaran dwibahasa. Selain di sekolah, mereka kerap atau sering menggunakan BI; sementara yang selebihnya boleh dikatakan mempunyai latar belakang bahasa Melayu walaupun mereka juga berpendidikan Inggris.

Pecahan perincian data di atas juga telah dilakukan dan didapati bahawa 5% dari kalangan ini menggunakan BI sahaja dengan kawan-kawan dan hanya 1% sahaja yang menggunakan hanya BM dengan kawan-kawan--yang lainnya bertutur dalam dua bahasa dengan rakan-rakan mereka. Tentang penggunaan BM dan BI dengan ibu, bapa, adik-beradik dan datuk-nenek pula, 27.2 % menyatakan bahawa mereka menggunakan BI dengan ibu, 38.4% menyatakan mereka menggunakan BI dengan bapa, 65% menggunakan BI dengan adik-beradik mereka dan hanya 4% yang menggunakan BI dengan datuk atau nenek mereka. Selain itu, didapati sampel ini membaca purata 5.6 buku Inggris dan hanya 4 buku Melayu setiap bulan.

Angka-angka ini menunjukkan betapa meluasnya penggunaan dua bahasa di persekitaran rumah tangga dan kejiranan, telah muncul lebih banyak keluarga yang benar-benar berlatarbelakangkan kedwibahasaan Melayu-Inggris. Bahkan, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Inggris semakin meluas dan mendalam di kalangan masyarakat Melayu Singapura. Dalam statistik baru yang dikeluarkan oleh bekas Menteri Pendidikan, Dr. Tony Tan, pada tahun 1990* jelas bahawa bilangan keluarga Melayu yang menggunakan BI sebagai bahasa yang pertama telah bertambah kepada 10.6% dan angka ini mungkin akan bertambah lagi tahun demi tahun.

Dalam kajian ini kesan-kesan kedwibahasaan akan dikaji, dengan penumpuan terhadap aspek latar belakang persekitaran rumah tangga terhadap penguasaan bahasa Melayu murid-murid. Selain latar belakang rumah, faktor-faktor jantina, umur, prestasi akademik dan tingkat sosio-ekonomi keluarga juga diambil perhatian.

Mula-mula akan dibuat penggolongan tentang tahap kedwibahasaan sampel. Mereka akan digolongkan kepada lima kategori berdasarkan prestasi BM dan BI mereka: angka 4 menunjukkan kelakonan yang paling tinggi sementara angka 1 menunjukkan kelakonan paling rendah. Jadwal 4 kali 4 ini adalah seperti berikut.

JADWAL 1 PENGGOLONGAN SAMPEL BERDASARKAN KEMAMPUAN BAHASA MELAYU DAN INGGRIS

	BI-1	BI-2	BI-3	BI-4	JUMLAH
BM-1	-	-	2	1	3 (,5%)
BM-2	-	1	3	-	4 (,7%)
BM-3	2	21	30	15	68 (11,7%)
BM-4	3	107	272	123	505 (87,1%)
	5	129	307	139	580 (100%)

Dari jadual di atas, didapati 123 orang murid terdiri dari mereka yang sangat tinggi pencapaian BM dan BI, 107 adalah mereka yang tinggi pencapaian BM, tetapi rendah dalam BI, sementara 15 orang (2,6%) dari mereka adalah sebaliknya, lebih tinggi pencapaian BI mereka daripada pencapaian dalam BM mereka. Keseluruhannya 87,1% dari sampel adalah mereka yang mempunyai tahap penguasaan BM yang tinggi, berbanding dengan hanya 139 atau 24% daripada mereka dalam kategori tahap penguasaan BI yang tinggi. Nyata dari segi pencapaian BM lebih ramai murid yang dapat dikatakan baik penguasaan bahasa mereka.

Seterusnya akan dibentang profil golongan penuntut berdasarkan penguasaan bahasa Melayu dan Inggeris mereka. Perinciannya ditunjukkan dalam Jadwal 2.

JADWAL 2 PROFIL MURID BERDASARKAN KEDWIBAHASAAN

	BM4-BI4 (ting)	BM4- BI3	BM4-BI2	BM3-BI2 (rend)	BM3- BI3	BM3- BI4
Bilangan	123	272	107	21	30	15
Aliran-Exp. Norm.	89% 11%	39% 61%	12% 88%	14% 86%	20% 80%	60% 40%
Jant.-Perem -Lelaki	65% 43%	48,5% 57,5%	41% 59%	48% 52%	37% 63%	27% 63%
Pend. Ibu	4,74	3,86	2,27	3,85	4,83	5,86
Pend. Bapa	5,16	4,52	4,40	4,22	5,50	6,0
Latar-Dwibahasa	2,99	3,44	3,56	3,81	2,83	1,73
Pen. Akademik	232,41	202,02	186,47	185,67	190,4	201,8
Matematik	4,38	3,00	2,26	2,67	2,93	3,33
Sains	4,54	3,63	3,28	3,81	3,47	4,13

Sekarang marilah kita tumpukan pembicaraan kepada profil murid-murid yang tinggi BM dan BI mereka, iaitu 123 orang murid yang mempunyai kecekapan dua

bahasa yang tinggi ini. Ternyata mereka ini terdiri dari yang paling bijak - min markat-T ukuran pencapaian akademik mereka yang diwakili oleh markat T Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) adalah yang tertinggi, iaitu 232.41. Mereka juga mendapat gred yang tertinggi dalam matematik dan sains, mempunyai ibu dan juga bapa yang berpendidikan kedua dan ketiga tingginya dalam penggolongan ini, dan yang menjadi perhatian mereka juga mempunyai latar belakang Inggris yang kedua tingginya di antara golongan dwibahasa ini.

Beralih kepada profil 15 orang yang mempunyai penguasaan BI yang sangat tinggi, tetapi bahasa Melayu pula lebih rendah, didapati, mereka ini dari segi prestasi akademik, adalah lebih rendah dari golongan BM-BI tinggi-tinggi tadi, tetapi dari segi latar belakang, memang mereka terdiri dari golongan sosio-ekonomi yang lebih baik (diwakili oleh pendidikan ibu dan bapa, lebih tinggi angkujuk, lebih tinggi taraf pendidikan), dan mempunyai latarbelakang keinggrisan yang paling tinggi. Seterusnya akan diterangkan tentang profil golongan yang berlatarbelakangkan kemelayuan lebih tinggi dari keinggrisan. Mereka ini (107 orang atau 18 peratus - Melayu 4 dan Inggris 2,272 orang atau 46.9% - Melayu 4, Inggris 3) terutama golongan 107 orang adalah mereka yang mempunyai pencapaian paling rendah dalam PSLE, matematik, dan sains. Mereka juga mempunyai ibu bapa yang berpendidikan lebih rendah dan mempunyai latar belakang bahasa Inggris yang kedua paling rendah.

Golongan seterusnya, yang rendah pencapaian dalam kedua-dua bahasa pula menunjukkan profil yang paling rendah dalam segala aspek. Tampaknya soal pencapaian dwibahasa Melayu dan Inggris berinteraksi dengan pencapaian akademik, tingkat sosio-ekonomi dan latar belakang dwibahasa.

Kesimpulan dari perincian butiran profil murid-murid dwibahasa ini menunjukkan dengan jelas kelebihan murid-murid yang tinggi penguasaan BM dan BI dalam pencapaian akademik. Mereka mengatasi golongan yang lebih tinggi BI daripada BM dalam kesemua variabel kognitif termasuk sains dan matematik.

Matlamat khusus kajian ini ialah untuk mengukur betapa besarnya kesan beberapa variabel yang dipilih terhadap penguasaan BM, tetapi sebelum analisis ini dilakukan, ada baiknya jika diperlihatkan apakah pertalian di antara beberapa pemboleh ubah yang dipilih tadi dengan pencapaian BM sampel. Oleh itu, hasil dari analisis korelasi Pearson dibentangkan dalam Jadwal 3.

**JADWAL 3 KORELASI ANTARA PEMBOLEH UBAH
(BERDASARKAN 537 ORANG MURID)**

Pemboleh Ubah	Bahasa Melayu	Bah. Inggris	Pencapaian Akademik
Bahasa Melayu	1.0	.21*	.37*
Bahasa Inggris	.21*	1.0	.69*
Pencapaian Akademik	.37*	.69*	1.0
Latar-Dwibahasa	.19*	.25*	.12*
Umur	.10	.10	.05
Tingkatan	-.08	.08	.09
Aliran	-.24*	.50*	-.73*
Jantina	-.16*	-.17*	.12*
Pendidikan Ibu	-.07	.26*	.16*
Pendidikan Bapa	-.08	-.17*	-.12*
BI dgn Ibu	-.07	.26*	.15*
BI dgn Bapa	-.09	.24*	.15*

* signifikan pada aras .01

Hasil dari analisis yang didasarkan pada sampel 537 orang ini, didapati variabel yang paling erat hubungannya dengan BM ialah pencapaian akademik, $r = .37$, kedua ialah aliran persekolahan $r = .24$, ketiga BI, $r = .22$, ketiga latar belakang BI $r = .19$, jantina dengan murid-murid perempuan lebih tinggi BM mereka, $r = .16$. Pemboleh ubah yang lain tidak mempunyai pertalian yang signifikan dengan penguasaan BM. Walau bagaimanapun, semua pemboleh ubah yang berdasarkan latar belakang penggunaan BI, sama ada dengan ibu bapa, datuk nenek, adik-beradik, rakan-rakan, dan faktor pendidikan ibu bapa bertalian secara signifikan dengan pencapaian BI sampel. Trend yang serupa didapati juga untuk pencapaian akademik.

Dapat disimpulkan sejauh ini bahawa

- pencapaian akademik mempunyai pertalian rapat dengan BM dan BI;
- penguasaan BM dan BI bertalian secara rendah tetapi signifikan;
- latar belakang BI mempunyai pertalian yang rendah dan negatif dengan penguasaan BM;
- latarbelakang BI mempunyai pertalian yang sederhana dan positif terhadap penguasaan BI;
- janina mempunyai pertalian yang sederhana (dengan murid perempuan mempunyai penguasaan lebih tinggi) dalam kedua-dua BM dan BI;

- f. pendidikan ibu bapa mempunyai pertalian yang rendah, tetapi signifikan dengan penguasaan BI.

Kesimpulan tentang pertalian korelasi seperti yang tertera di atas hanya memberi satu gambaran tentang *trend-trend* perhubungan antara pemboleh ubah. Untuk menyelidiki tentang kesan beberapa pemboleh ubah tertentu, satu analisis yang dinamakan *path analysis* perlu dilakukan supaya *magnitude* kesan-kesan itu dapat diperbanding. Model yang digunakan, berdasarkan analisis regresi, melibatkan 6 pemboleh ubah bebas yang bersandar pada pemboleh ubah yang diukur, iaitu penguasaan BM. Dalam model ini kesemua 6 pemboleh ubah, iaitu pencapaian akademik, BI, jantina, umur, pendidikan ibu, dan latar belakang BI diandaikan mempunyai kesan yang langsung terhadap penguasaan BM. Dalam masa yang sama pemboleh ubah tersebut juga mempunyai kesan tidak langsung melalui pencapaian akademik yang menjadi pemboleh ubah mediator di antara BM dan kesemua pemboleh ubah lain. Jelas bahawa model ini memerlukan dua analisis regresi: pertama dengan BM sebagai pemboleh ubah bersandar, dan kedua dengan pencapaian akademik sebagai pemboleh ubah bersandar. Jadwal 4 dan 5 memperlihatkan hasil analisis tersebut.

JADWAL 4 ANALISIS REGRESI TERHADAP BAHASA MELAYU

Variabel	R	R	R tambah	b	S.E. b	Std B BETA
Pencapaian Akademik	.3749	.141	.141	.0167	.001	.4044
Latar Dwibahasa	.4365	.191	.050	.1345	.024	.2215
Jantina	.4538	.205	.014	-.1359	.047	-.1118
Umur	.4601	.212	.007	.0390	.016	.0907
Pend.Ibu	.4679	.219	.002	-.0252	.001	-.0900

JADWAL 5 ANALISIS REGRESI DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK SEBAGAI MEDIATOR

Variabel	R	R	R tambah	b	S.E. b	BETA
Bahasa Inggris	.6877	.4729	.4729	19.76	.904	.6949
Latar-Dwibahasa	.6904	.4768	.0038	1.70	.735	.0738
Jantina	.6934	.4804	.0036	2.99	1.45	-.0647

Dengan BM sebagai pemboleh ubah bersandar, didapati pencapaian akademik muncul selepas langkah satu, ia menyumbang 14.1% ke atas variasi prestasi BM. Latar belakang BI muncul selepas langkah 2, menyumbang 5% lagi ke arah variasi prestasi BM, seterusnya jantina muncul selepas langkah 3 diikuti oleh peringkat umur dan pendidikan ibu. BI tidak menyumbang secara signifikan terhadap variasi pencapaian BM.

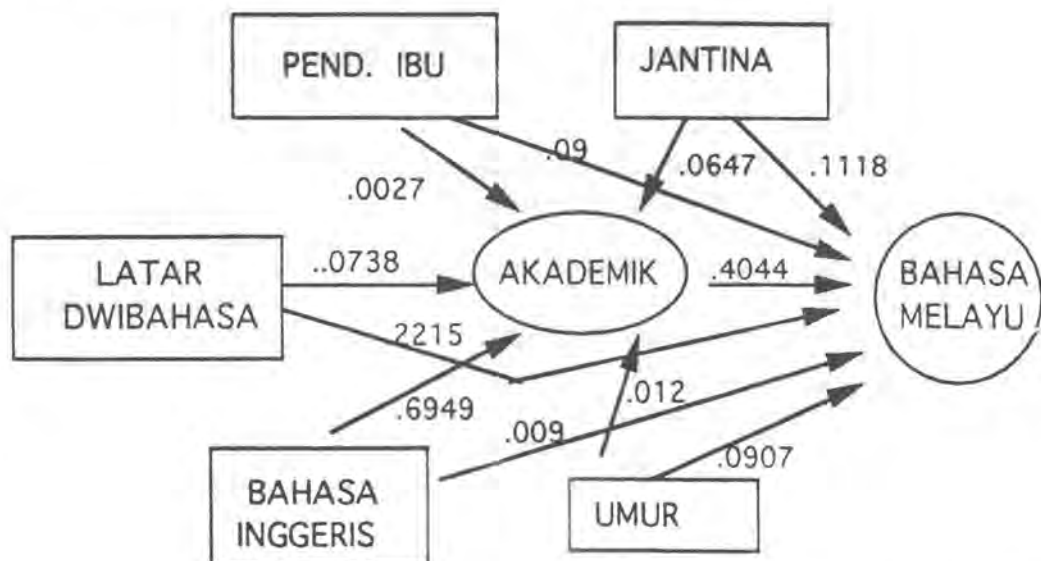
Kemudian, apabila pencapaian akademik pula dijadikan pemboleh ubah bersandar, didapati BI muncul selepas langkah pertama dan memberi sumbangan yang terbesar, iaitu 47.3% ke atas pencapaian akademik. Latar belakang dwibahasa kelihatan selepas langkah 2, menyumbang sebanyak .03% dan jantina selepas langkah 3 juga menyumbang sebanyak .03%. Umur dan pendidikan ibu tidak memberi sumbangan signifikan terhadap pencapaian akademik.

Akhirnya, berdasarkan daripada nilai BETA atau (*standardized b coefficient*) barulah dikira pula jumlah kesan-kesan langsung dan tidak langsung keenam-enam pemboleh ubah terhadap penguasaan BM. Hasilannya diperlihatkan dalam Jadwal 6 dan Rajah 1.

JADWAL 6 JUMLAH KESAN PEMBOLEH UBAH
TERHADAP PENGUASAAN BM

Pemboleh Ubah	Kesan Langsung	Kesan tidak Langsung	Jumlah Kesan
1. Pencapaian Akademik	.4044	-	.4044
2. Bahasa Inggris	.0090	.2781	.2871
3. Latar-Dwibahasa	.2215	.0298	.2513
4. Jantina	.1118	.0262	.1386
5. Umur	.0907	.0120	.1027
6. Pend. Ibu	.0900	.0027	.0927

Rajah 1 Model Kesan Beberapa Pemboleh Ubah terhadap Bahasa



Dapatan dari analisis di atas menunjukkan betapa besarnya faktor pencapaian atau kemampuan akademik atau kecekapan am seseorang terhadap penguasaan BM, *path coefficient* .4 ini paling besar di antara keenam-enam pemboleh ubah yang dikaji. Tampaknya, kesemua faktor bertitik tolak dari kecekapan am ini.

Yang kedua besarnya ialah penguasaan BI yang mempunyai kesan positif terhadap penguasaan BM, penguasaan BI yang baik akan juga mengakibatkan penguasaan BM yang baik dan, sebaliknya, penguasaan BI yang rendah akan mengakibatkan penguasaan BM yang rendah juga.

Kesan yang ketiga besarnya ialah latar belakang dwibahasa atau lebih tepat latar belakang BI seseorang, yang mempunyai kesan negatif terhadap penguasaan BM, semakin kurang latar belakang BI, semakin baiklah penguasaan BM. Sebaliknya, semakin tinggi latar belakang keinggrisan, semakin rendahlah pencapaian BM.

Faktor seperti jantina dan umur juga mempunyai kesan yang kecil terhadap BM, tetapi taraf sosio-ekonomi tampaknya tidak mempunyai kesan yang signifikan terhadap penguasaan BM.

Dapatan di atas menimbulkan beberapa persoalan: mengapakah pula penguasaan BI bertindak secara bertentangan dengan latar belakang BI di dalam model kajian ini? Dengan lain perkataan, mengapakah kesan penguasaan BI itu positif, tetapi kesan latar belakang BI di rumah itu negatif? Saya hanya dapat membuat beberapa andaian berdasarkan dari data dan tinjauan kajian-kajian lampau.

Dari hasil analisis yang dibuat, didapati bahawa BI tidak mempunyai kesan langsung terhadap penguasaan bahasa Melayu dalam model ini walaupun pertalian kedua-dua pemboleh ubah erat $r = .22$. Kebanyakan dari kesan positifnya terhasil secara tidak langsung melalui pencapaian akademik. Oleh itu, dapat ditakbirkan

bahawa pencapaian BI merupakan komponen penting pencapaian akademik dan oleh kerana pencapaian akademik ini mempunyai kesan yang terbesar terhadap BM, kesan penguasaan BI ini juga turut menjadi besar. Latar belakang BI pula memperlihatkan kesan yang berbeza, kesan tidak langsung (melalui pencapaian akademik) adalah kecil, tetapi kesan langsungnya yang besar. Dapatan ini telah menunjukkan secara jelas kesan negatif latar belakang Inggrs terhadap penguasaan BM.

Kajian lanjutan untuk menentukan tentang kesan dwibahasa ini patut dijalankan untuk mendapatkan lebih banyak butiran tentang kesan-kesannya terhadap BM. Jika benar sekitaran yang kaya dengan penggunaan bahasa Inggrs itu merendahkan pencapaian bahasa Melayu, apakah pula yang harus dilakukan oleh ibu bapak, guru, dan institusi tertentu untuk mengekangnya? Atau, adakah penguasaan bahasa Melayu itu terpaksa 'dikorbankan' demi mengejar taraf kedwibahasaan yang tinggi?

LAPORAN SIDANG

- Judul Makalah : 1. Kebudayaan sebagai Pengetahuan Sehubungan dengan Pengajaran dan Pelajaran Bahasa di Indonesia
2. Kedwibahasaan, Prestasi Akademik, dan Penguasaan Bahasa Melayu di Kalangan Penuntut-Penuntut Melayu di Singapura
- Pemakalah : 1. Edmund A. Anderson (Hongkong)
2. Hajah Kamsiah Haji Abdullah (Singapura)
- Pemandu : Husni Muaz
- Pencatat : Sriyanto
Dedi Puryadi

TANYA JAWAB

1. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

Seandainya Anda ingin mengajarkan bahasa Indonesia, kebudayaan mana yang akan Anda ajarkan? Pertanyaan itu muncul karena tadi Anda katakan bahwa mengajarkan bahasa berarti mengajarkan budaya. Sementara itu, saya berpendapat bahwa kebudayaan Indonesia itu belum ada

Jawaban:

Selama ini saya tidak pernah mengajar bahasa Indonesia. Ketika saya membuka sekolah di Bandung, yang mengajar bahasa Indonesia adalah orang Indonesia. Saya hanya membantu agar pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing dapat lebih efektif. Untuk itu, orang asing yang akan belajar bahasa Indonesia harus menyesuaikan dengan budaya setempat sesuai dengan tujuan orang asing tersebut. Saya tidak ingin mencampuri urusan orang Indonesia tentang ada atau belum kebudayaan Indonesia.

2. **Pertanyaan:** Samsuri, IKIP Malang

Saya berpendapat bahwa seorang guru harus mengajarkan norma bahasa atau bahasa yang baku. Variasi bahasa yang ada dalam masyarakat perlu diajarkan sebagai bandingan. Bagaimana tanggapan Anda?

Jawaban:

Pengalaman saya bukan sebagai pengajar di sekolah tinggi di Indonesia, melainkan di sekolah untuk orang asing.

Kita memang harus berhati-hati di dalam mengajarkan bahasa Indonesia bagi orang asing. Kalau mereka ingin membawakan makalah, yang diajarkan memang bahasa nonmatif. Akan tetapi, kalau untuk keperluan pergaulan sehari-hari, pemekaran pengajaran harus diarahkan kepada bahasa pergaulan.

3. **Pertanyaan:** Kerarin Bangun, SMA Negeri 17 Jakarta

Apakah menurut Anda buku-buku bahasa Indonesia yang ditulis oleh orang asing, seperti karangan Cornel, sudah cukup memuat unsur kebudayaan atau belum?

Jawaban:

Saya belum mengadakan penelitian secara khusus. Yang saya ketahui adalah bahwa banyak orang memakai buku Cornel. Kritik yang muncul adalah bahwa di dalam buku itu terlalu banyak dialek Jakarta.

4. **Pertanyaan:** Huang Chen Fang, Seksi Bahasa Indonesia Departement of Oriental Studies, University of China, Peking

Bagaimana menyesuaikan pengajaran bahasa dan kebudayaan?

Jawaban:

Menurut saya, cara ini lebih cocok dipakai di luar jam pelajaran. Harus diakui bahwa sistem ini sulit diadwalkan.

5. **Pertanyaan:** Hilman Pardede, FPS IKIP Malang

Berdasarkan teori Daniel (86), dwilingual adalah juga dwikultural. Sejauh mana penutur bahasa Melayu yang dwilingual itu juga dwikultural?

Jawaban:

Saya melihat penguasaan beliau sangat erat dengan pendedahan suatu bahasa. Pendedahan suatu bahasa sebenarnya pendedahan kebudayaan. Penggunaan bahasa Inggris di Singapura memang sudah sangat merasuk. Banyak generasi muda yang lebih menguasai bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Akan tetapi, orang Melayu di Singapura masih kuat berpegang pada budaya Melayu. Hal itu dapat dilihat, baik dari segi cara berpakaian maupun makannya.

6. **Pertanyaan:** Kerli Zulhendri, Percetakan Angkasa, Bandung

Penjelasan itu mengemukakan bahwa seorang yang bilingual mempunyai prestasi akademik yang baik. Dari asumsi itu diperkirakan seorang yang multilingual akan memiliki prestasi lebih baik, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Upaya meningkatkan bilingualis berpengaruh terhadap prestasi akademik. Bagaimana tanggapan Ibu?

Jawaban:

Pendapat tersebut belum dapat disimpulkan, tetapi mungkin saja seorang yang multilingual dapat berprestasi lebih baik. Alasannya, seorang yang monolingual di Singapura ditakuti karena hal ini menunjukkan orang tersebut kurang berpendidikan.

7. **Pertanyaan:** Sri Soejatni Satari, Direktur Permuseuman

- a. Setahu saya anggota parlemen di Singapura yang berasal dari etnis mana pun harus berbahasa Melayu. Apabila seorang anggota parlemen tidak pernah belajar formal kapan mereka belajarnya?
- b. Apabila terjadi perkawinan campuran, misalnya antara suku yang berbahasa Tamil-Melayu atau Melayu-Cina bahasa apa yang dipakai untuk anak-anak mereka?

Jawaban:

- a. Sebenarnya bahasa Melayu di Singapura disebut bahasa kebangsaan. Hal ini hanya simbol saja sebab kenyataannya banyak orang Singapura tidak memakainya. Setiap anggota parlemen Singapura tidak diharuskan menggunakan bahasa Melayu. Setiap anggota boleh menggunakan bahasa Inggris, Cina, dan Tamil untuk mengemukakan pendapatnya. Apabila seorang anggota parlemen belum menguasai bahasa Melayu, pemerintah Singapura mengadakan kursus-kursus. Bahkan, seorang yang lulus dalam kursus tersebut ada bonus yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Apabila terjadi perkawinan antara satu suku, misalnya, ibu dan bapak Melayu, maka si ibu + bapak diwajibkan mengajarkan bahasa Melayu. Akan tetapi, apabila terjadi perkawinan campuran Melayu dan Tamil, si anak bebas memilih bahasa yang ingin dikuasainya.

8. **Pertanyaan:** Asim Gunarwan, Fakultas Sastra Universitas Indonesia

- a. Bahasa Inggris telah merasuk pada rumah tangga masyarakat, pada suatu ketika bahasa Melayu akan tergusur, bagaimana prediksi ini?
- b. Sejauh mana kesahihan data penelitian yang Ibu lakukan adalah subjek kajian mengenai penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggris, bagaimana pendapat itu mengenai hal ini?

Jawaban:

- a. Saya berpendapat bahwa penduduk Singapura perlu dikebalkan nilai-nilai ketimurannya agar mereka merasa bertanggung jawab terhadap nilai itu sehingga nilai dari barat tidak sepenuhnya diterima bulat-bulat. Selain itu, untuk pengekalan bahasa Melayu perlu dilakukan pula pendidikan moral para tahap dini. Hal ini dilakukan agar orang-orang muda bertanggung jawab terhadap bahasa Ibundanya.
- b. Data penelitian ini sudah valid karena penelitian ini sudah mencakupi kriteria-kriteria: lisan, tulisan, tata bahasa, kosakata.

9. **Pertanyaan:** M. Naim, Singapura

Mohon jawaban itu dari kesimpulan yang berupa pertanyaan pada akhir makalah?

Jawaban:

Kita tidak perlu mengorbankan bahasa Melayu karena dwibahasawan di Singapura masih tinggi.

10. **Pertanyaan:** Yon Adlis, FKIP Universitas Jambi

- a. Adakah sikap negara Singapura untuk menerapkan politik bahasa nasional?
- b. Imperialisme barat menular juga di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Apakah Ibu akan melihat kejadian Singapura terjadi di Indonesia?

Jawaban:

- a. Dwibahasa yang setinggi-tingginya akan mencapai penggunaan bahasa Melayu yang baik. Penguraian bahasa Melayu masih baik, tinggi, dibandingkan penguasaan bahasa lainnya.
- b. Hal ini tidak akan terjadi karena bahasa Melayu masih kuat dan akan tetap berjaya.

PENGARUH BAHASA INDONESIA TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DI MALAYSIA

Farid M. Onn dan Amdun Husain
Dewan Bahasa dan Pustaka

1. Pendahuluan

Jalinan persahabatan antara negara Malaysia dan Indonesia yang terpupuk untuk sekian lamanya telah membuka ruang yang seluas-luasnya kepada usaha kerja sama dalam pelbagai bidang. Salah satu bidang kerja sama yang telah tersemai dan telah membuahkan hasil yang cukup menggalakkan menyangkut hal kebahasaan. Melalui Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) yang tertubuh pada tahun 1972, kedua buah negara berusaha sama melakukan kegiatan membina dan mengembangkan korpus bahasa kebangsaan/nasional yang melibatkan sistem bunyi, sistem ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Dalam bidang kosakata, usaha MBIM yang kemudiannya diteruskan oleh Mabbim (Majlis Bahasa Brunei-Darussalam Indonesia Malaysia) setelah negara Brunei menyertainya pada tahun 1985 telah menjurus kepada usaha memperbanyak dan menyelaraskan istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Selain itu, proses pengayaan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia adalah melalui pengambilan dan peminjaman antara kedua-dua bahasa tersebut. Kertas ini seterusnya akan meninjau pengaruh bahasa Indonesia, khususnya dalam bidang kosakata, terhadap perkembangan bahasa Melayu di Malaysia.

2. Latar Belakang

Kawasan kepulauan termasuk hujung tanah yang terbentang di antara Benua Asia dengan Benua Australia pada suatu ketika dahulu pernah dikenal dengan nama Gugusan Pulau-Pulau Melayu. Di kawasan ini terdapat sekitar 350 buah bahasa. Daripada bahasa yang sebanyak itu, bahasa yang paling meluas penggunaannya, bukan terbanyak bilangannya penuturnya, sejak beberapa abad yang lalu ialah bahasa Melayu. Di samping menjadi bahasa ibunda kepada beberapa juta orang, bahasa itu telah membuahkan sejumlah ragam bahasa Melayu yang dituturkan oleh pengguna bukan Melayu juga.

Antara ragam yang pernah muncul, malah masih digunakan hingga sekarang terutama di beberapa buah kota, ialah ragam Melayu Pasar. Bahasa Melayu Pasar atau

bahasa Melayu Rendah ini sebenarnya ialah suatu ragam bahasa Melayu yang dipijinkan, dengan kosakata, bentuk kata, dan struktur ayat yang disederhanakan. Selanjutnya, bahasa itu dikreolkan pula - yaitu dijadikan bahasa ibunda oleh kelompok tertentu seperti yang berlaku di Melaka, Pulau Pinang dan Singapura, lalu muncul dialek "Baba", umpamanya.

Sebagai bahasa sastera dan bahasa pemerintahan pula, bahasa Melayu telah digunakan sejak zaman Sriwijaya. Pada puncak kejayaannya, kerajaan ini telah mengembangkan sayap pengaruhnya hampir ke seluruh kawasan Malaysia moden, dan juga hampir seluruh bahagian barat Indonesia. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa istana dan sastera diteruskan di negeri lain yang muncul, tidak sahaja di negeri yang penduduknya berbahasa Melayu seperti di Melaka, Kampar, dan Jambi, tetapi juga di negeri yang bahasa ibunda penduduknya bukan bahasa Melayu, seperti di Aceh.

Kegiatan kececekieaan melalui kalam dan fikiran yang tajam menyebar luas dari Aceh hingga ke kawasan lain di kepulauan kita ini. Di Palembang, umpamanya, kegiatan penulisan tertumpu pada Abdul Samad al-Falambani yang, antara lain, menghasilkan *Hidayat al-Salikin*. Pengeran Shahbandar Muhammad Salleh atau Pengeran Indera Mahkota di Brunei telah menghasilkan *Syair Rakis*. Begitu pula di Banjarmasin terdapat Arshad al-Banjari yang menulis *Sabil al-Muhtadin*, dan Mohd. Ismail Daud dari Patani telah menghasilkan *Matla'al-Badrin* dan *Furu'al-Masail*.

Kemuncak kepada kegiatan persuratan yang menggunakan bahasa Melayu ini ialah Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Di sinilah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terutamanya kegiatan kebudayaan dan kececekieaan Melayu. Banyak hasil karya yang diterbitkan dari pulau ini seperti *Kitab al-Hakim* oleh Tajuddin Abdul Fadzil Ahmad, dan *Sabil al-Hidayat* oleh Sayyed Aluwi Ba'alwi. Akan tetapi, hasil penulisan yang lebih dikenal dalam persuratan Melayu ialah karya Raja Ali Haji yang berjudul *Bustan al-Katibin*, *Salasilah Melayu dan Bugis*, dan *Tahfat al-Nafis*.

Daripada huraian di atas nyatalah bahawa bahasa Melayu yang bertapak sejak abad ke-7, dan berkembang hingga ke abad 20 ini telah melahirkan berbagai bentuk bahasa Melayu dan telah menjalankan beberapa banyak fungsi yang berbeza. Kepentingan bahasa Melayu sebagai alat perhubungan luas, sebagai bahasa pemerintahan, dan sebagai bahasa perdagangan memang sudah terbukti. Begitu pula sebagai bahasa pengungkapan sastera, budaya, dan falsafah pun, kemampuan bahasa Melayu memang diakui. Oleh sebab itu, bahasa Melayu mudah diterima sebagai bahasa nasional, baik di Indonesia dengan nama bahasa Indonesia, maupun di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Oleh sebab itu juga, apabila Bell (1976:167) mengatakan bahawa Bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Melayu pijin, kita tidak wajar menerimanya bulat-bulat.

Walau bagaimanapun, "Zaman Keemasan" bahasa Melayu sebenarnya mula menghadapi "Zaman Kegelapan" sejak Melaka dialahkan oleh Portugis dalam tahun 1511. Zaman kegelapan itu sebenarnya bukan disebabkan oleh bahasa Melayu itu

kehilangan sinarnya, tetapi perkembangannya telah digerhanai oleh kerakusan penjajah memperkosa daerah, memperhamba manusia, dan menjarah kekayaan di kepulauan kita yang tercinta ini. Kesan daripada kekalutan penjajah itu hubungan bahasa antara penutur dan pengguna di pelbagai daerah mula merenggang mengikut perbatasan wilayah pengaruh penjajah. Di satu pihak, bahasa itu terdedah kepada pengaruh Inggeris, dan di pihak yang lain bahasa itu terpajan kepada pengaruh Belanda, lantas berkembanglah bahasa itu mengikut arus masing-masing mengikut riak dan gelombang sosiopolitik di kedua-dua daerah.

3. Perbezaan antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Melayu di Malaysia

Walaupun bahasa Indonesia (BI) dan bahasa Melayu di Malaysia (BMM) yang berasal daripada bahasa Melayu yang sama telah dipisahkan oleh dua kuasa penjajah dari Eropah, kedua bahasa itu telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat bukan sahaja dalam pertuturan umum, tetapi juga dalam pengungkapan dan penyampaian ilmu pada peringkat pengajian tinggi. Dengan perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat, tidak hairanlah jika ada orang yang mengatakan bahawa BI dan BMM sekarang tidak lagi sama dengan bahasa Melayu yang menjadi leluhur kepada kedua-dua bahasa itu.

Di Indonesia bahasa Melayu telah dinobatkan menjadi bahasa Indonesia dalam tahun 1928, dan sejak itu istilah bahasa Indonesia terus digunakan hingga sekarang. Di Malaysia pula istilah bahasa Malaysia pernah digunakan sejak tahun 1970, tetapi pada tahun 1990 istilah itu kembali diubah menjadi bahasa Melayu kerana Perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia menyatakan dengan jelas bahawa Bahasa Kebangsaan di Malaysia ialah bahasa Melayu.

Walaupun BI dan BMM dilahirkan daripada bahasa yang sama, negara Indonesia dan Malaysia telah menempuh jalan politik yang sendiri-sendiri sehinggakan sukar bagi kedua-dua negara mencari titik persamaan atau menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bidang politik, ekonomi, dan juga sosial. Kesannya BI dan BMM telah menempuh jalan yang berbeza pula. Antara beberapa aspek yang didapati berbeza ialah lafal, ejaan yang dipengaruhi oleh lafal, kosakata dan juga maknanya, dan yang paling kecil perbezaannya ialah dalam aspek tata bahasa.

Sekadar menyebut beberapa contoh, dari segi lafal kebanyakan penutur BMM melafalkan kebanyakan huruf {a} di hujung dengan bunyi /ə/, tetapi bagi beberapa kata tertentu seperti *bola*, *fakta*, *asrama*, dan sebagainya, huruf {a} di hujung tetap dilafalkan dengan bunyi /a/ juga. Selain itu, penutur BMM di Sabah, Sarawak, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, dan Perak Utara, selamanya melafalkan huruf {a} di hujung dengan bunyi /a/. Sehubungan dengan itu, Kongres Bahasa Melayu IV yang berlangsung pada bulan Disember 1984, telah memutuskan agar semua huruf {a} di hujung dilafalkan dengan bunyi /a/. Akan tetapi, hingga ke hari ini keputusan itu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana terdapat beberapa kendala ekstralinguistik.

Perbezaan ejaan antara yang digunakan di Malaysia dengan yang terpakai di Indonesia tidaklah begitu banyak seperti dulu. Namun, ejaan bagi beberapa kata masih terus berbeza—mungkin juga kerana perbezaan lafal, seperti:

Indonesia	Malaysia
arti	erti
arung	harung
putra	putera
beda	beza
kendara	kendera
karena	kerana

Dalam proses penyerapan kata-kata asing pun terdapat perbezaannya. Mungkin dalam penyerapan kata-kata Arab, Farsi, Tamil, Sanskrit, dan Cina perbezaannya tidak begitu ketara, tetapi penyerapan kata-kata Eropah Barat memperlihatkan perbezaan yang agak menonjol. BI banyak menyerap kata-kata Eropah melalui bahasa Belanda, sementara BMM pula mengambilnya melalui bahasa Inggeris. Oleh sebab itu, BMM mengenal kata seperti *basikal*, *polis*, *polisi* (insuran), *parti*, *universiti*, *ofis*, dan *muzik* yang dalam BI dikenal sebagai *sepeda*, *polisi*, *polis* (ansuransi), *partai*, *universitas*, *kantor*, dan *musik*.

Selain itu, ada juga kata-kata Eropah, terutama daripada bahasa Inggeris, yang dalam BI diserapkan terus tetapi diterjemahkan dalam BMM, dan begitu pula kebalikannya. Dan jika BI atau BMM sama-sama menerjemahkannya, mungkin pula padanan kata yang diberikan itu berbeza lagi.

Inggeris	BI	BMM
<i>identity</i>	mengidentifikasi	mengenal pasti
<i>business</i>	bisnes	urus niaga
<i>insurance</i>	asuransi	insurans
<i>feedback</i>	umpan balik	maklum balas
<i>follow-up</i>	tindak lanjut	tindakan susulan

Perbezaan dalam penggunaan kata yang tidak terbatas kepada kata-kata asing, tetapi meliputi kata-kata setempat juga, sering menimbulkan salah terima, rasa lucu, dan tidak jarang juga menimbulkan rasa malu. Namun, jika orang Malaysia dan orang Indonesia menggunakan bahasanya masing-masing, masih nyata bahawa bahagian yang dapat difahami jauh lebih besar daripada bahagian yang tidak. Hakikat ini menyiratkan masih wujudnya *teras* atau *intisari bersama* yang umum antara BI dan BMM.

4. Usaha Sama Kebahasaan Indonesia-Malaysia

Perkembangan suatu bahasa itu pada amnya selaras dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat penggunaanya. Akan tetapi, oleh sebab

perkembangan dunia moden terlalu cepat datangnya, perkembangan bahasa kita perlu dirancang dengan bijaksana agar bahasa kita dapat memberikan segala pengetahuan tentang sains, teknologi, perdagangan, dan lain-lainnya yang menjadi ciri perkembangan kemajuan abad ke-20 dan ke-21 ini kepada masyarakat pengguna bahasa kita. Dalam hal ini bukanlah berapa banyak istilah yang sudah kita gubal yang harus ditanyakan. Jauh lebih penting daripada itu ialah sebanyak manakah buku dalam bidang yang disebut tadi terdapat dalam bahasa kita.

Sebenarnya masih belum banyak buku dalam bidang itu yang ditulis atau diterjemah oleh ilmuwan kita. Usaha sendiri-sendiri secara berasingan dalam hal ini hanya akan memperlebar jurang perbezaan antara BI dan BMM. Satu usaha perlulah ditingkatkan agar lebih banyak buku yang diperlukan dapat diterbitkan. Dalam hal penerbitan buku ini, pokok persoalan yang harus dicari penyelesaiannya ialah bahasa. Perbezaan dalam beberapa aspek bahasa seperti yang dinyatakan tadi harus dikurangkan ke paras yang minimum. Usaha ini tentu saja menepati kata orang tua-tua

Yang renggang dirapatkan

Yang rapad dipertemukan

Dalam hal ini, apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya dalam tahun 1957, satu Perjanjian Kebudayaan telah ditandatangani oleh Malaysia dan Indonesia. Salah satu daripada tujuan perjanjian itu ialah mengadakan ejaan bersama untuk kedua-dua buah negara tersebut. Hasilnya, dalam tahun 1957 terhasillah suatu sistem ejaan yang dikenal dengan nama Sistem Malindo. Disebabkan suasana politik tidak begitu menyenangkan mana-mana pihak selepas itu, sistem itu tidak berpeluang dapat dilaksanakan.

Walau bagaimanapun, setelah tempoh suram itu berlalu, pada tahun 1967 satu sistem telah digubal dan disetujui bersama, tetapi sistem itu pun tidak dapat dilaksanakan atas beberapa sebab lalu dipendamkan buat sementara waktu. Antara sebab yang menjadi penghalang pelaksanaan sistem itu ialah masalah sosiologi di kedua-dua buah negara, di samping terdapatnya peraturan, dan ciri tertentu dalam sistem itu yang menyebabkannya tidak dapat diterima dengan serta merta oleh pengguna bahasa itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Walau bagaimanapun, setelah suara bantahan dan sanggahan terhadap sistem itu mula surut dan beberapa pindaan dilakukan, akhirnya pada 16 Ogos 1972 disetujuilah satu sistem ejaan bersama. Di Indonesia sistem itu dikenal sebagai *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, sementara di Malaysia pula sistem yang sama dikenal sebagai *Sistem Ejaan Baharu Bahasa Malaysia*.

Untuk meneruskan kerja sama itu, pada tahun yang sama dibentuk pula sebuah badan yang diberi nama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia atau singkatnya MBIM. Dalam sidang pertamanya pada 29 Disember 1972, MBIM telah menetapkan bahawa fungsi utamanya ialah sebagai berikut.

- a. Bertindak sebagai badan bersama yang akan mengadakan pertemuan untuk memikirkan, menelaah, dan membincangkan hal-hal bersama dalam bidang tata bahasa, peristilahan, ejaan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasa di kedua-dua negara;
- b. Menampung dan menyalurkan bahan-bahan tentang bahasa dari kedua-dua belah pihak untuk kegunaan dan kajian bersama;
- c. Menyerahkan bahan bahasa yang menyentuh kepentingan kebangsaan negara masing-masing kepada Menteri Pendidikan untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

Walaupun MBIM kemudiannya berubah nama menjadi Mabbim (Majlis Bahasa Brunei-Darussalam Indonesia Malaysia) dengan penyertaan Brunei sebagai anggota baru dalam tahun 1985, fungsi utama itu tetap sama. Melalui sidang-sidangnya yang diadakan dua kali setahun itu, MBIM/Mabbim telah dapat menyeragamkan dan menyatukan kegiatan kebahasaan terutama dalam bidang peristilahan, dan juga dalam bidang penyusunan kamus istilah.

5. Kemasukan Kosa kata Indonesia ke dalam Bahasa Melayu

Dalam awal tahun 1960-an, kata-kata seperti *ganyang*, *goblok*, dan *bobrok* memang sering terdengar di Malaysia. Kata-kata yang lain seperti *alis*, *babu*, *bendi*, *bisa* (boleh), *gugat*, *kantor*, *kanan* dan sebagainya diketahui juga oleh orang Malaysia walaupun terasa sedikit *aneh*. Akan tetapi, setelah MBIM/Mabbim terus bersidang sejak 21 tahun yang lalu itu kata-kata itu, kecuali *bisa* dan *kantor*, tampaknya sudah menjadi sebahagian daripada kosakata BMM. Bukan itu saja malah kata-kata lain pun seperti *bibit-bibit*, *busana*, *citra*, *gabah*, *lestari*, *mapan*, *santai*, dan *tatar* tidak lagi terasa keasingannya kepada penutur BMM. Selain itu, ada kata seperti *anggun* dan *canggih* yang walaupun memang digunakan dengan maksudnya sekarang di beberapa daerah di Malaysia sejak lama dahulu, kepopularan kata itu di Malaysia sekarang adalah disebabkan penggunaannya yang agak meluas di Indonesia. Hakikat seperti ini merupakan satu "pengaruh balik" yang berlaku dalam BMM.

Melalui pelajar Malaysia yang melanjutkan pendidikan mereka di Indonesia sejak 20-30 tahun yang lalu, sekian banyak kosakata Indonesia kita bawa masuk ke dalam BMM. Di samping istilah khusus mengikut bidang pengajian masing-masing, mereka juga memperkenalkan kata-kata untuk bercanda atau bergurau-senda. Di samping pelajar Malaysia itu, tenaga pengajar Indonesia yang pernah dan sedang berkhidmat di Malaysia pun turut memperkenalkan beberapa kosakata Indonesia ke dalam BMM melalui kelas yang mereka bimbingi, kuliah yang diberikan, ataupun melalui kegiatan sosial mereka.

Peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan perindustrian pun seperti projek Nusa Tiga yang merangkumi Batam, Singapura dan Johor, serta beberapa projek lain yang sama konsepnya yang sedang dibincangkan, turut

menggalakkan "lintas kata" antara BI dan BMM. Bagi orang Malaysia tentulah kemasukan kata Indonesia yang akan lebih dirasai, begitu pula kebalikannya.

Selaras dengan kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan perindustrian itu, kemasukan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang kini jumlahnya melebihi 500,000 orang itu turut menjadi agen pembawa kosakata Indonesia ke dalam BMM. Mereka inilah sebenarnya pembawa kata umum dari BI atau mungkin juga dari bahasa daerah mereka ke dalam BMM. Antara TKI yang sekian banyak itu, mereka yang bekerja sebagai pembantu rumahlah yang meninggalkan kesan yang lebih terasa dalam hal pemasukan kosakata BI ke dalam BMM. Hakikat ini mudah difahami kerana merekalah yang akan tinggal di rumah mengurus anak sewaktu majikan mereka pergi bekerja. Kalau dengan majikan bahasa yang digunakan mereka agak terkawal, tetapi dengan anak-anak mereka berasa lebih bebas menggunakan ragam BI yang sudah terbiasa dengan mereka. Anak-anak yang masih kecil itu lebih cepat menerima dan menangkap gaya bahasa itu beserta kosakatanya berbanding dengan orang dewasa. Malahan, jika pekerja itu pandai memasak, selera anak itu pun mungkin turut berubah.

Walau bagaimanapun dalam hal "lintas kata" ini, peranan media massa bukan kepalang pentingnya. Siaran radio dan TV dari kedua-dua buah negara yang saban hari dapat didengar dan dipirsa oleh penduduk di wilayah yang berhampiran, menyebabkan kegiatan "lintas kata" itu berlaku dengan lebih cepat. Penggunaan antena parabola umpamanya menyebabkan banyak orang yang beranggapan bahawa kosakata BMM telah membanjiri khazanah kosakata BI. Selain itu, peranan akhbar pun tidak kurang pentingnya. Dari satu segi, walaupun penyebaran akhbar kurang meluas berbanding dengan siaran radio atau TV, akhbar akan dibaca oleh orang yang agak terpelajar. Kesannya, pembaca akhbar akan dapat meneliti penggunaan suatu kata dalam kalimatnya, dan dapat menerka maksud kata itu dengan berpandukan kalimat sebelum atau selepasnya, ataupun berpandukan wacananya sendiri.

Dalam hal ini di Malaysia sekarang ada sebuah akhbar bernama *Watan* yang memuatkan berita/rencana dalam BI sebanyak delapan halaman daripada 32 halamannya setiap hari. Berita/rencana yang terkandung dalam delapan halaman itu disiarkan di bawah judul *Titian Muhibah*. Melalui *Titian Muhibah* ini pembacanya akan terdedah kepada sekian banyak kata BI setiap hari. Lama kelamaan kata-kata itu tidak lagi terasa keasingannya kepada pembaca.

6. Penutup

Daripada huraian di atas dapat dilihat bahawa BI dan BMM itu berasal daripada yang satu, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu mempunyai sejarah yang panjang baik sebagai bahasa kesusasteraan, bahasa pemerintah/istana dan undang-undang, bahasa perdagangan, maupun sebagai bahasa keagamaan. Oleh hal yang demikian, tidaklah benar jika ada orang yang mengatakan bahawa BI ataupun BMM itu berasal daripada bahasa Melayu pijin.

Walaupun berasal daripada bahasa yang sama, kelainannya mula kelihatan apabila penjajah mula bertapak di wilayah kita ini. Kelainan itu terus merenggang kerana wilayah kita terus dibelah dua, dan diperintah oleh dua kuasa yang bukan sahaja bahasanya tidak sama, malah sistem pemerintahan di negara mereka pun berlainan pula.

Setelah mereka pergi--dinyahkan dari Indonesia, dan dipersilakan pulang dari Malaysia--kita perlu bersama-sama dan merangka strategi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara kita untuk menghadapi cabaran dunia pascamoden. Untuk menjayakan kerja sama dalam bidang apa pun, bahasa untuk mengungkapkan wawasan dan fikiran amat diperlukan. Dalam hal ini tidak ada bahasa yang lebih ampuh daripada bahasa kita sendiri, iaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Malaysia.

Usaha untuk mengatasi atau mengecilkan jurang perbezaan antara BI dan BMM telah berlaku sejak 20-30 tahun lalu. Oleh sebab dalam hal BI dan BMM ini perbezaan utamanya lebih tertumpu pada kosakata, proses "lintas kata" yang berlaku sekarang menjamin hasil yang amat menyenangkan kedua-dua pihak. Hendaknya jangan pula ada suara sumbang yang mengatakan bahawa yang satu cuba membanjiri lalu mencemari yang lain. Sebarang penerimaan atau penolakan biarlah ditentukan oleh mereka yang saling berhubungan antara satu dan yang lain. Dengan demikian, pemahaman antara pengguna BI dan BMM dapat ditingkatkan, dan proses itu dapat berlaku secara alami.

PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI SINGAPURA

Haji Abbas Mohd. Shariff
Singapura

1. Pendahuluan

Sistem pendidikan baru Singapura yang diperkenalkan sejak tahun 1979 dan diperbaiki pada tahun 1991 bertujuan untuk mendidik dan melahirkan potensi kanak-kanak dengan sepenuhnya agar mereka dapat hidup sebagai manusia yang berguna dan menjadi warganegara yang berfaedah. Untuk mencapai matlamat tersebut, sistem pendidikan Singapura menetapkan objektif-objektif berikut:

- a. menghasilkan para lepasan sekolah yang tahu sekurang-kurangnya satu bahasa serta mempunyai kemahiran asas kira-kira;
- b. membolehkan murid-murid sederhana dan yang lebih cerdas berdwibahasa iaitu menguasai bahasa Inggeris dan mempunyai peringkat literasi yang minimum dalam bahasa kedua;
- c. mengurangkan pembaziran pendidikan;
- d. menghasilkan tenaga manusia dengan kemahiran-kemahiran tertentu bagi kepentingan ekonomi negara;
- e. menyemai nilai-nilai moral yang tertentu;
- f. memenuhi kehendak perkembangan jasmani kanak-kanak.

Untuk mengurangkan pembaziran pendidikan, sistem pendidikan kesembilan puluhan membolehkan kanak-kanak belajar menurut kebolehan mereka. Dengan demikian, mereka disalurkan ke kelas tertentu berdasarkan pencapaian mereka dalam pelajaran. Pada akhir darjah empat mereka disalurkan ke kursus EM1 (Inggeris dan Bahasa Melayu Lanjutan), EM2 (Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu), dan EM3 (Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu Asas). Murid-murid kursus EM1 dan EM2 apabila lulus Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) berdasarkan pencapaian, mereka akan disalurkan ke Kursus Khas/Ekspres atau Normal Akademik/Normal Teknikal sementara murid-murid dalam kursus EM3 akan mengikuti kursus Normal (Akademik) atau Normal (Teknikal). Setelah empat tahun di sekolah menengah penuntut-penuntut Kursus Normal (Akademik) atau Normal (Teknikal) akan menduduki Peperiksaan Persekolahan Peringkat Biasa (GCE N-level) dan kemudian masuk ke Menengah 5 Biasa (S5N) untuk mengambil Peperiksaan Sijil Persekolahan Peringkat Biasa seperti yang diambil oleh murid-murid Menengah 4 Ekspres (GCE "O" level).

Bagi mereka yang lulus Menengah 4 Biasa atau Menengah 5 Biasa (GCE "O" level) mereka boleh melanjutkan pelajaran ke Institut Teknikal. Bagi mereka yang lulus Peperiksaan Sijil Persekolahan Peringkat Biasa (GCE "O" level) dibenarkan melanjutkan pelajaran ke Maktab Rendah atau Pusat Pra-U yang tertentu untuk membolehkan mereka mengambil Peperiksaan Sijil Persekolahan Peringkat Tinggi (GCE "A" level) dalam dua atau tiga tahun. Murid-murid yang tidak menunjukkan minat mereka dalam pelajaran akademik boleh melanjutkan pelajaran di Institut Teknikal atau Politeknik. Para lulusan politeknik atau mereka yang lulus Peperiksaan Sijil Persekolahan Peringkat Tinggi boleh melanjutkan pelajaran ke universiti, seperti yang digambarkan dalam Lampiran 1.

2. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ibunda

Sejak darjah satu hingga ke peringkat sekolah menengah dan kemudian ke peringkat pra-universiti, tumpuan juga diberikan pada mata pelajaran bahasa pertama (bahasa Inggeris) bahasa ibunda (bahasa Melayu bagi orang-orang Melayu) untuk memenuhi matlamat menghasilkan masyarakat yang berdwibahasa.

Berdasarkan sistem pelajaran yang diperbaiki, bahasa Melayu mengambil status tertentu bagi memenuhi kehendak berbagai golongan penuntut menurut kebolehan mereka mengikutinya. Dengan demikian, bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa pertama (BM1) yang disebut sebagai *Bahasa Melayu Lanjutan*, bahasa kedua (BM2) disebut sebagai *Bahasa Melayu* dan bahasa ketiga (BM3) yang disebut sebagai *Bahasa Melayu Asas*.

3. Bahasa Melayu Lanjutan (*Bahasa Pertama*)

Pada akhir tahun lima puluhan para penuntut di sekolah menengah telah mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu Sukatan X (sebagai bahasa pertama) untuk Peperiksaan Senior Cambridge. Sejak awal tahun enam puluhan kertas bahasa Melayu Sijil Malaysia (MCE) ditawarkan kepada penuntut-penuntutan aliran Melayu. Kemudian, setelah Singapura terpisah dari Malaysia kertas bahasa Melayu ini dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Singapura-Cambridge yang menguruskan Peperiksaan Sijil Persekolahan Peringkat Biasa sehingga hari ini.

Mulai akhir tahun enam puluhan calon-calon yang mengambil kertas bahasa Melayu itu semakin merosot disebabkan kurangnya penuntut-penuntutan aliran Melayu di Singapura. Mereka yang bersekolah Inggeris hanya mengambil bahasa Melayu yang dulunya dikenali sebagai bahasa kedua. Setelah melalui proses mempelajari bahasa Melayu (dulunya sebut bahasa kedua), Kementerian Pendidikan menerima saranan untuk mengembalikan kemahiran dan meninggikan taraf bahasa Melayu di kalangan para pelajar Melayu. Kementerian Pendidikan mulai mengadakan kelas Bahasa Melayu Lanjutan (dulunya dikenali sebagai bahasa pertama) kepada sepuluh peratus penuntut aliran Inggeris yang telah mencapai kelulusan terbaik. Pengajaran dan pembelajaran

Bahasa Melayu Lanjutan dikendalikan di Pusat Bahasa Singapura dan di beberapa buah sekolah tertentu.

4. Bahasa Melayu (*Bahasa Kedua*)

Kita tidak dapat menafikan bahawa konsep bahasa kedua seperti yang diamalkan di Singapura agak berbeza sedikit dengan apa yang termaktub dalam monograf UNESCO mengenai *Fundamental Education*. Ahli-ahli bahasa mengistilahkan bahasa kedua sebagai bahasa yang dipelajari atau dikuasai atau diketahui selain daripada bahasa ibundanya (*mother tongue*), sedangkan bahasa kedua, menurut konteks Singapura, ialah salah satu daripada tiga bahasa rasmi Singapura (bahasa Melayu, Mandarin, dan Tamil) yang dipilih untuk dipelajari di sekolah-sekolah. Ini bererti bahawa bahasa kedua yang dipelajarinya mungkin bahasa ibundanya sendiri, misalnya anak-anak Melayu mempelajari bahasa Melayu dan anak-anak Cina mempelajari bahasa Mandarin. Demikian juga halnya bagi anak-anak India yang mempelajari bahasa Tamil yang merupakan bahasa ibundanya. Namun, ada juga anak-anak Cina dan India yang bahasa kedua bukan bahasa ibundanya. Walau bagaimanapun, pihak Kementerian agak tegas mengimplementasikan dasar bahasa kedua iaitu tidak membenarkan mereka mengambil selain daripada bahasa ibunda mereka. Berdasarkan sistem pendidikan yang diperbaiki, bahasa Melayu kedua kini dikenali sebagai *bahasa Melayu*.

5. Bahasa Melayu Pilihan

Penggunaan bahasa Melayu oleh ahli bijak pandai sangat menentukan perkembangan bahasa Melayu selanjutnya. Jika bahasa Melayu ini dapat diperkembangkan di kalangan orang-orang yang bukan Melayu, bahasa Melayu akan melalui satu proses yang lebih sihat untuk mencapai matlamat keharmonian bangsa. Dengan tawaran yang diberikan kepada sepuluh peratus daripada murid-murid bukan Melayu yang terbaik (hasil Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah) serta memandangkan prestasi dan kebolehan mereka dalam mata pelajaran lain, murid-murid tersebut difikir layak untuk menguasai suatu bahasa tambahan selain daripada bahasa pertama (bahasa Inggris) dan kedua (bahasa ibunda). Sejak tahun 1985 pihak Kementerian Pelajaran telah menawarkan bahasa Melayu dalam kategori bahasa-bahasa tambahan ini (bahasa-bahasa Jepun, Perancis, dan Jerman).

Mata pelajaran ini diajarkan di Pusat Bahasa, Kementerian Pelajaran, dan di beberapa buah sekolah khas. Setelah mempelajari bahasa Melayu selama empat tahun, mereka akan menduduki peperiksaan khas untuk mengambil mata pelajaran tersebut.

6. Buku Teks dan Peralatan Mengajar dalam Bahasa Melayu

Dalam usaha memperkemas kurikulum sekolah serta menyediakan prasarana yang sesuai untuk memajukan keberkesanan pengajaran-pembelajaran, Kementerian

Pendidikan telah membentuk suatu institusi khas yang dinamakan Institut Perkembangan Kurikulum (CDIS) dengan matlamat yang berikut.

- a. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran untuk membantu kurikulum di sekolah;
- b. Mengenalkan kaedah-kaedah tertentu kepada guru-guru agar mereka tahu menggunakan bahan-bahan yang disediakan;
- c. Menyebarkan penerangan mengenai inovasi dan amalan kurikulum;
- d. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan sumber untuk sekolah-sekolah.

Peranan utama Institut Perkembangan Kurikulum (CDIS) ialah menyediakan buku-buku, termasuk peralatan mengajar, dalam suatu pakej kurikulum pelbagai media. Penulis-penulis CDIS bukan sahaja merancang, menulis, mencuba, mengkaji dan menerbitkan bahan-bahan pengajaran pelbagai media malah mereka akan memastikan bahawa guru-guru dapat menggunakannya dengan baik dalam suasana yang menggembirakan. Melalui ceramah-ceramah, majlis taklimat dan bengkel-bengkel, guru-guru dilatih menggunakan bahan-bahan yang disediakan.

Lampiran 2 menggambarkan rajah struktur Institut Perkembangan Kurikulum Singapura yang menunjukkan dua bahagian terbesar institut tersebut, iaitu:

- a. Kumpulan-Kumpulan Projek
- b. Jabatan Teknologi Pendidikan

7. Kumpulan Projek Bahasa Melayu Sekolah Rendah (*Primary Malay Project*)- (*Maps*)

Kumpulan Projek Bahasa Melayu peringkat sekolah rendah ditubuhkan pada tahun 1982 untuk memenuhi keperluan Sistem Pendidikan Baru pada ketika itu. Tujuannya seperti berikut:

- a. menghasilkan bahan-bahan pengajaran untuk memenuhi kehendak Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua;
- b. memperkembangkan strategi pengajaran yang baru agar memudahkan murid-murid mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dengan lebih berkesan dan memastikan agar mereka memperolehi kemahiran yang tertentu;
- c. menyediakan pelbagai kegiatan dan situasi agar menarik minat serta merangsang murid-murid bertutur, membaca dan menulis bahasa Melayu, serta dapat menghayatinya.

Perlu dinyatakan di sini bahawa tekanan diberikan pada kemahiran berbahasa yang berpusat kepada kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, dan berfikir.

Kini Kumpulan Projek ini telah menghasilkan:

- a. buku-buku teks *Saribahasa bagi murid-murid darjah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6*;

- b. buku latihan kerja *Saribahasa* bagi murid-murid darjah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;
- c. buku Panduan Guru (Darjah, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6).

Untuk mengukuhkan pelajaran bahasa Melayu sebagai kesinambungan daripada bahan yang terdapat di buku teks, alat-alat audio/visual disediakan seperti berikut:

- a. kaset-kaset audio;
- b. transparensi-transparensi induk OHP,
- c. carta-carta,
- d. gambar-gambar, dan
- e. slaid-slaid.

Pakej (*package*) bahan-bahan pengajaran-pembelajaran dilengkapi dengan beberapa rancangan televisyen yang dipancarkan melalui Televisyen Pendidikan.

8. Kumpulan Projek Melayu Sekolah Menengah (*Secondary Malay Project*)-(Mass)

Kumpulan Projek Bahasa Melayu Peningkat Sekolah Menengah yang telah ditubuhkan pada tahun 1983 mempunyai tujuan yang hampir sama dengan Kumpulan Projek Bahasa Melayu peringkat Sekolah Rendah.

Projek ini menghasilkan siri buku-buku yang dinamakan *Intisari Bahasa* yang disusun menurut Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.

Berikut ialah buku-buku bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Kumpulan Projek Bahasa Melayu Sekolah Menengah.

- a. Buku-buku teks *Intisari* bagi penuntut-penuntut Menengah 1, 2, 3, 4 dan Menengah 5 (Aliran Biasa)
- b. Buku-buku latihan kerja *Intisari* bagi penuntut Menengah 1, 2, 3, 4 dan 5 Menengah 5 (Aliran Biasa)
- c. Buku Panduan Guru (Menengah 1, 2, 3, 4 dan 5)

Bagi melengkapi pakej bahasa Melayu ini, disediakan juga alat-alat mengajar seperti transparensi induk OHP, pita kaset audio, dan slaid. Beberapa rancangan televisyen pendidikan yang bertajuk *Mutiara Budaya* disediakan untuk membantu beberapa pelajaran yang terdapat dalam buku teks. Kesemua input dalam pakej bahasa Melayu ini bukan sahaja membantu guru-guru dalam menyampaikan pelajaran dengan lebih berkesan malah membantu memudahkan para pelajar mempelajarinya.

9. Kumpulan Projek Bahasa Melayu Pilihan

Pada tahun 1984 Kementerian Pendidikan membuat ketetapan mengenalkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua tambahan kepada sepuluh peratus penuntut bukan Melayu. Usaha diambil untuk membentuk kumpulan projek yang tugasnya adalah untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran bagi mata pelajaran tersebut. Pada

tahun 1985 kumpulan projek ini dinamakan sebagai Kumpulan Projek Bahasa Melayu sebagai bahasa ketiga yang duduknya di bawah Jabatan Pengajian Bahasa-Bahasa Asia.

Kumpulan projek ini telah menjalankan berbagai kajian untuk menghasilkan buku-buku teks dan alat-alat audio/visual untuk kegunaan murid-murid dan guru-guru. Kumpulan Projek Bahasa Melayu ini menyelesaikan tugasnya pada tahun 1990 setelah menghasilkan buku-buku berikut:

- a. Buku-buku teks *Sari Mestika Bahasa* untuk penuntut-penuntut Menengah 1, 2 dan 3;
- b. Buku-buku latihan kerja *Sari Mestika Bahasa* untuk Menengah 1, 2 dan 3;
- c. Alat-alat audio/visual: transparensi-transparensi
kaset-kaset audio
carta-carta

Pada tahun 1991 diperkenalkan sukatan pelajaran baru untuk mata pelajaran Bahasa Melayu Pilihan yang telah diubahsuaikan untuk memenuhi kehendak kohortnya. Kumpulan Projek yang dibiayai oleh CDIS dibentuk di Pusat Bahasa untuk menghasilkan buku-buku berdasarkan sukatan pelajaran baru itu.

Kini Kumpulan Projek Bahasa Melayu Pilihan telah menghasilkan buku-buku (bahan-bahan percubaan) yang berjudul *Bahasa Melayu Aktif*.

10. Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Kebangsaan, University Teknologi Nanyang (Nanyang Technological University)

Pada tahun 1957 apabila Maktab Perguruan Singapura ditubuhkan keperluan untuk melatih guru-guru Melayu ditimbulkan. Kemudian, di bawah skim melatih guru-guru Melayu atau apa yang disebut sebagai *guru-guru TUOS (Teacher's Under Other Schemes)* ramai murid lulusan Darjah VII Sekolah Melayu diambil untuk latihan selama tiga tahun. Walaupun kurikulumnya lebih diberatkan pada isi pelajaran peringkat sekolah menengah, terdapat juga pelajaran mengenai teori bahasa dan asas perkaedahan dalam pengajaran.

Apabila Sekolah Menengah Sang Nila Utama dan Sekolah Menengah Tun Seri Larang serta beberapa sekolah aliran Melayu dibuka, ramai tenaga guru-guru SITC (Sultan Idris Training College) dan TUOS digunakan untuk mengajar berbagai mata pelajaran. Ketika itulah pelajar-pelajar Melayu yang berkelulusan diberi latihan untuk mengajar bukan sahaja mata pelajaran Bahasa Melayu, malah mata pelajaran seperti Matematik, Geografi, Sejarah, Sains dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya.

Guru-guru perintis sekolah menengah Melayu inilah yang meningkatkan lagi taraf bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu pengetahuan moden diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Mereka juga menghasilkan kumpulan lulusan para pelajar menengah aliran Melayu yang sebahagiannya terpilih dalam perkhidmatan perguruan di Singapura pada tahun enam puluhan.

Dekad tujuh puluhan merupakan tahun-tahun berlakunya pergolakan politik yang baru. Singapura harus berdikari sebab sudah menjadi negara yang berdaulat dan tidak lagi berada dalam negara Malaysia. Ekonomi Singapura harus diperkukuhkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dimusykilkan walaupun ia tetap menjadi bahasa kebangsaan. Bilangan pelajar-pelajar Melayu dalam sekolah-sekolah aliran Melayu makin merosot hingga menyebabkan penutupan beberapa buah sekolah aliran Melayu. Ketika ini status Maktab Perguruan Singapura juga ditingkatkan dan dinamakan sebagai Institut Pendidikan Singapura.

Institut Pendidikan yang ditubuhkan pada tahun 1973 telah mengambil tugas Jabatan Pendidikan Universiti Singapura (*Faculty of Education, University of Singapore*), Maktab Latihan Perguruan (*Teachers Training College*) dan Unit Penyelidikan Kementerian Pelajaran (*Research Unit, Ministry of Education*). Institut ini melatih para siswa dan bukan siswa untuk menjadi guru dan juga memberi kursus latihan dalam perkhidmatan dan kursus profesional pos siswazah. Institut ini juga bertanggung jawab dalam kajian pendidikan yang dianggap relevan dengan kehendak Republik Singapura.

Pada tahun 1992, Institut Pendidikan Singapura yang kini bertukar nama menjadi Institut Pendidikan Kebangsaan Singapura digabungkan dengan Universiti Teknologi Nanyang. Unit Bahasa Melayu tergolong dalam Jabatan Pengajian Bahasa-bahasa Asia dan Linguistik Terapan dalam Jabatan Sastra. Beberapa program yang ditawarkan kepada mereka yang hendak menjadi guru Bahasa Melayu disertakan dalam Lampiran-lampiran 3, 4, 5 dan 6.

11. Bahasa Melayu di Universiti Nasional Singapura

Sejak tahun 1952 para mahasiswa dibenarkan mengambil bahasa Melayu dalam pengajian mereka di Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya yang ketika itu berpusat di Singapura. Jabatan ini dipindahkan ke Kuala Lumpur pada tahun 1959 semasa Universiti Malaya ditubuhkan di sana. Ketika itu di Singapura ada dua jabatan pengajian Melayu yang telah ditubuhkan, iaitu di Universiti Singapura dan Universiti Nanyang. Pada peringkat awalnya kedua-dua Universiti tersebut telah menghasilkan kerja-kerja penyelidikan yang sungguh membanggakan.

Apabila Universiti Singapura berubah bentuk menjadi Universiti Nasional Singapura, Jabatan Pengajian Melayu masih dikekalkan tetapi orientasinya berbeza dengan Jabatan Pengajian Melayu Lama. Ini jelas kelihatan dalam mata kuliah yang ditawarkan selama tiga tahun (memperolehi gelar BA) di dalam kurikulum Jurusan Pengajian Melayu seperti dalam Lampiran 7.

Selain daripada ramai siswa yang memperolehi gelaran sarjana muda sastera (BA), seramai 13 orang telah menerima ijazah sarjana sastera (MA), dan 4 orang dengan gelaran Ph.D. Ketika ini seramai 3 mahasiswa sedang mengambil kursus Ph.D.

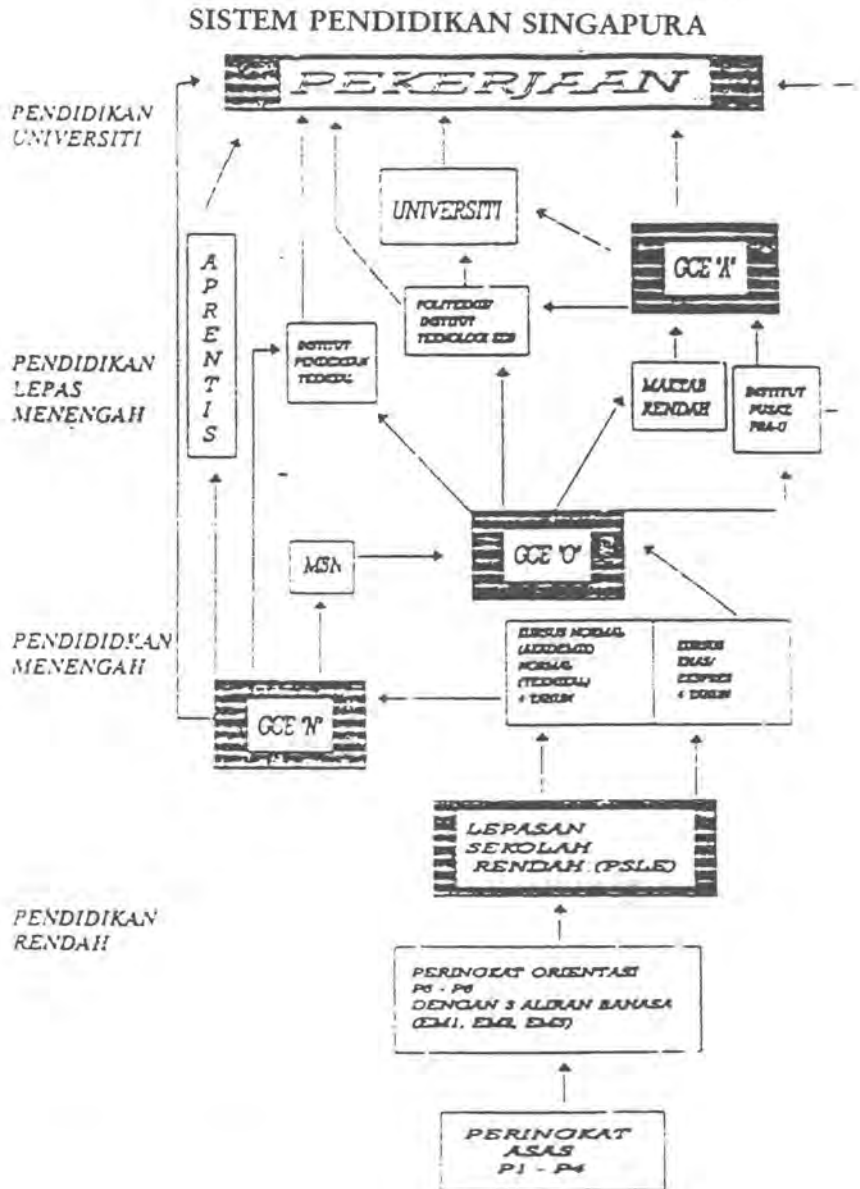
sementara 5 yang lain sedang meneruskan dalam pengajian untuk memperoleh gelaran sarjana sastera.

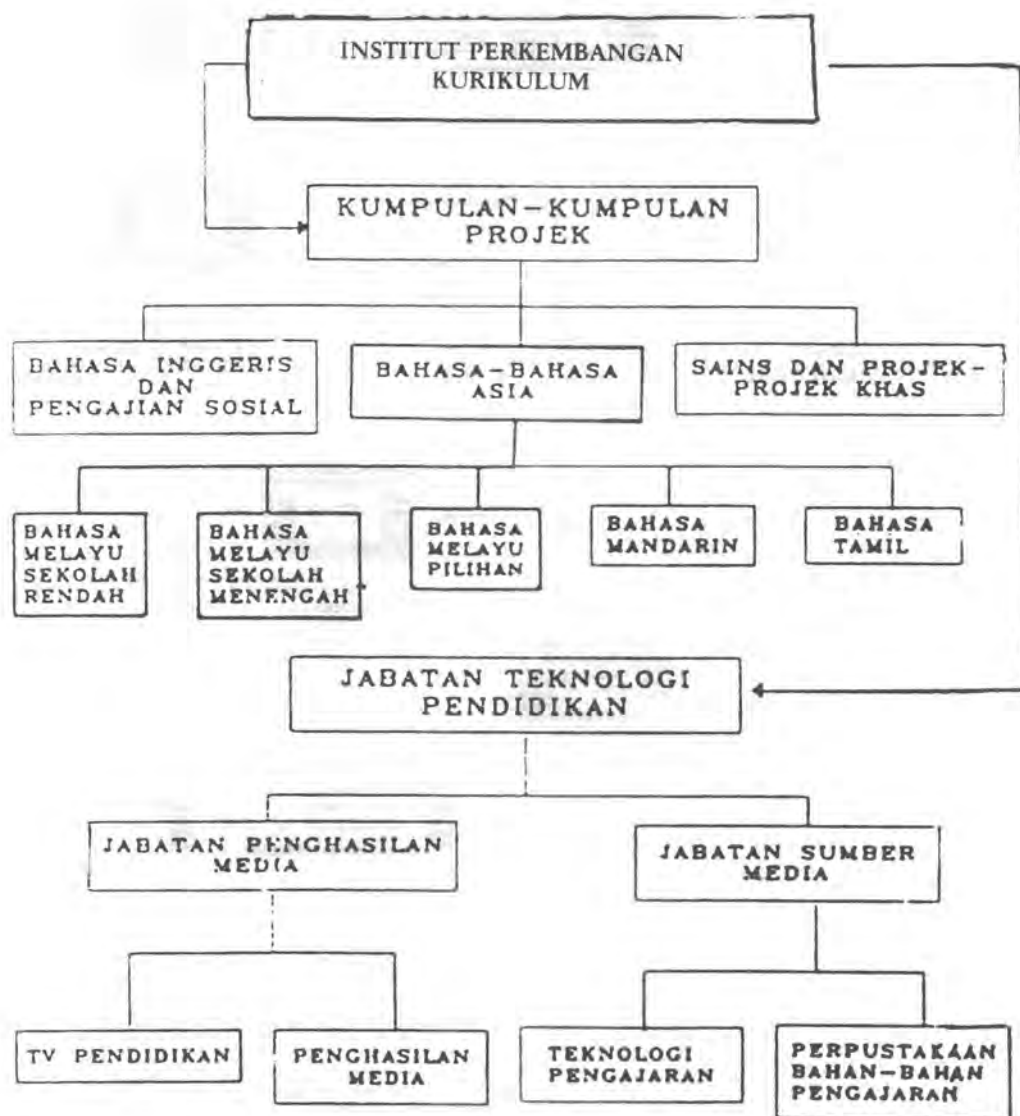
12. Penutup

Singapura memasuki ambang politik yang baru pada tahun 1965, merdeka dan berdaulat serta harus berdikari dan menentukan nasib hari mukanya yang pada ketika itu tidak begitu cerah. Satu perkara yang sangat dibimbangkan adalah kebolehnya mengatasi berbagai masalah ekonomi. Bahasa Melayu tetap menjadi bahasa kebangsaan, tetapi kedinamisan kempen-kempen beransur-ansur kendur memandangkan perlunya pengetahuan bahasa Inggeris dalam perhubungan dengan negeri-negeri luar serta menjadi daya penarik untuk memikat pelabur-pelabur asing. Singapura terpaksa menyediakan keadaan yang unggul bagi menghasilkan para pekerjaannya dengan ketrampilan yang tertentu mengutamakan bahasa Inggeris agar dapat menawan kuasa-kuasa besar untuk kepentingan ekonomi. Kita tidak dapat menafikan bahawa penilaian manusia di dunia lebih banyak ditentukan oleh ekonomi dan politik dan bukan prestasi bahasa. Bahasa Inggeris diutamakan bukan kerana ia bahasa indah, tetapi ia mendukung nilai ekonomi yang begitu tinggi untuk Singapura berhempas pulas untuk hidup. Namun, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetap dihormati dan bahasa Melayu tetap berkembang dan dimajukan sebagai bahasa kedua yang penting. Lagu Kebangsaan yang didendangkan setiap hari melalui televisyen Perbadanan Penyiaran Singapura pada waktu siaran pembukaan dan penutupannya adalah dalam bahasa kebangsaan. Tidak ketinggalan juga murid-murid sekolah akan menyanyikan lagu kebangsaan pada setiap pagi dan petang semasa mengibarkan bendera Singapura. Upacara-upacara rasmi juga tidak ketinggalan dengan lagu kebangsaan, malah kata arahan tentera pun dalam bahasa Melayu.

Dewasa ini isu mengenai bahasa Melayu tidak dipersoalkan lagi. Apa yang menjadi isu kesemasaan ialah kurang kefasihan di kalangan para pelajar dalam bahasa Melayu, sikap tidak berusaha dan sikap acuh tidak acuh semasa bertutur dalam bahasa Melayu; gangguan bahasa Inggeris yang sungguh ketara dalam bahasa Melayu, pencemaran dalam bahasa Melayu dan fungsinya sebagai alat pengucapan intelektual. Walaupun tugas Majlis Bahasa Melayu Singapura adalah untuk mengawasi segala tren yang kurang sihat dalam perkembangan bahasa Melayu, tugas yang utama dibebani oleh guru-guru bahasa Melayu serta semua yang terlibat dalam penggunaan bahasa Melayu. Sistem pendidikan Singapura yang menaruh perhatian yang berat mengenai bahasa Melayu sebagai salah satu daripada bahasa kedua yang diajarkan di sekolah menitikberatkan pencapaiannya sejak mereka berada dalam darjah satu sehingga ke peperiksaan menengah empat sehingga membolehkan mereka ke peringkat pra-universiti. Mereka yang menunjukkan prestasi yang baik dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan akan melayakkan diri masuk ke Universiti. Dengan pendedahan Bahasa Melayu Lanjutan kepada murid-murid yang bijak, usaha peningkatannya makin nyata dan taraf bahasa Melayu tetap akan terpelihara.

Dalam bidang pedagogi pula, guru-guru bahasa Melayu yang mengajar dalam peringkat sekolah rendah, menengah mahupun peringkat pra-universiti, mereka dikehendaki menyertai bengkel-bengkel bahasa yang dianjurkan oleh pihak kurikulum Kementerian Pendidikan Singapura atau Institut Perkembangan Kurikulum Singapura. Institut Pendidikan Kebangsaan, Universiti Teknologi Nanyang juga mengedalikan kursus-kursus khas mempertingkatkan kebolehan guru-guru agar mereka dapat mengajar bahasa Melayu dengan lebih berkesan.





UNIT BAHASA MELAYU, JABATAN BAHASA-BAHASA ASIA DAN LINGUISTIK TERAPAN	
DIPLOMA PENDIDIKAN TAHUN 1	
AD101	Linguistik AM
AD102	Tatabahasa MeLayu
AF101	Pengenalan Kesusastraan Melayu Klasik
AF102	Kesusasteraan Melayu Klasik
CD101	Kurikulum Bahasa Melayu
CD102	Alat Pengajaran Bahasa Melayu
CD103	Konsep Asas dan Teori Pengajaran-Pembelajaran Bahasa Melayu
CD104	Perkembangan Pengajaran Bahasa
CD105	Pengajaran Kemahiran Lisan
CD106	Pengajaran Bacaan
CZ111	Pendekatan-pendekatan dalam Pengajaran Pendidikan Moral
CZ112	Pengurusan Darjah dan Strategi Pengajaran Pendidikan Moral
CD113	Meninjau Program *Rakyat yang Baik*
CZ121	Komunikasi Lisan 1
CZ122	Komunikasi Penulisan 1

UNIT BAHASA MELAYU, JABATAN BAHASA-BAHASA ASIA DAN LINGUISTIK TERAPAN	
DIPLOMA PENDIDIKAN TAHUN 2	
AD201	Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu
AD202	Perkembangan Bahasa Melayu
AF201	Pengenalan Kesusasteraan Melayu/Indonesia Modern
AF202	Kesusasteraan Melayu/Indonesia Modern
CD201	Pengajaran Penulisan
CD202	Pengajaran Kemahiran Mendengar
CD203	Pengurusan Kelas Bahasa
CD204	Pengajaran Tatabahasa
CD205	Pengajaran Kosakata
CD206	Program Pemulihan dan Pengayaan
CD207	Penilaian Bahasa
CD208	Makmal Bahasa: Pengajaran - Pembelajaran
CZ211	Nilai Susila Rakyat di Singapura
CZ212	Konsep Moral dan Isu-isu Moral Dalam Pendidikan Moral
CZ213	Amalan Budaya Berlainan
CZ221	Komunikasi Lisan II
CZ222	Komunikasi Penulisan II

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (MENENGAH) POSTGRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION (SEC)	
PENGAJARAN BAHASA MELAYU DAN KESUSASTERAAAN MELAYU	
CD531	Kurikulum dan Alat Pengajaran Bahasa Melayu
CD532	Konsep Asas dan Teori Pengajaran-Pembelajaran Bahasa
CD533	Pengajaran Kemahiran Lisan dan Pendengaran
CD534	Pengajaran Bacaan dan Kosakata
CD535	Pengajaran Penulisan dan Tatabahasa
CD536	Penilaian Bahasa
CD541	Pengajaran Kesusasteraan Melayu
CD542	Pengajaran Puisi Melayu
CD543	Pengajaran Novel Melayu
CD544	Pengajaran Cerpen Melayu
CD545	Pengajaran Drama Melayu
CD546	Pengajaran Kesusasteraan Klasik Melayu

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (RENDAH) POSTGRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION (PRIMARY)	
PENGAJARAN BAHASA MELAYU DAN PENDIDIKAN MORAL	
CD501	Kurikulum dan Alat Pengajaran Bahasa Melayu
CD502	Konsep Asas dan Teori Pengajaran-Pembelajaran Bahasa
CD503	Perkembangan Pengajaran Bahasa
CD504	Kemahiran Lisan dan Mendengar
CD505	Pengajaran Bacaan dan Kosakata
CD506	Pengajaran Penulisan dan Tatabahasa
CD507	Program Pemulihan dan Pengayaan
CD508	Pengajaran Pengajaran Bahasa
CZ511	Pendekatan-pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral
CZ512	Pengurusan Darjah dan Strategi Pengajaran Pendidikan Moral
CZ513	Meninjau Program *Rakyat Yang Baik*
CZ514	Susila Rakyat Singapura

JURUSAN PENGAJIAN MELAYU 1993/1994	
Tahun Pertama	
MS101	Sejarah dan Pemodenan Bahasa Melayu
MS102	Kesusasteraan Melayu Moden
MS103	Institusi-institusi Sosial dan Budaya Melayu
MS105	Mitos dalam Masyarakat Melayu: Pengenalan dan Latar Belakang Sejarah
Tahun Kedua	
MS201	Bahasa Melayu dan Linguistik
MS202	Kesusasteraan Indonesia Moden
MS203	Pendidikan dan Masyarakat Melayu
MS204	Pemikiran dan Pembangunan Orang-orang Melayu
MS205	Mitos dalam Masyarakat Melayu: Sifat, Fungsi dan Perkara-perkara yang Berkaitan
MS206	Sejarah dan Historiografi Orang-orang Melayu
Tahun Ketiga	
MS301	Bahasa, Pemikiran dan Budaya Orang-orang Melayu
MS302	Kesusasteraan Melayu Klasik
MS303	Kehidupan Beragama Orang-orang Melayu
MS304	Modenisasi Orang-orang Melayu
MS305	Masyarakat Melayu Singapura Kontemporari: Isu-isu dan Masalah-masalah

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA LULUSAN PROGRAM SARJANA BAHASA DAN SASTRA PENGUTAMAAN LINGUISTIK

Bambang Kaswanti Purwo
Masyarakat Linguistik Indonesia

Ada empat pertanyaan yang ingin saya lontarkan sebagai bahan pembicaraan pada diskusi panel ini. Barangkali lebih tepat kalau saya katakan dua, bukan empat, tetapi masing-masing pertanyaan beranak dua, yaitu (a) dan (b).

- (1) a. Setakat ini menjadi apakah atau bekerja sebagai apakah mahasiswa lulusan program sarjana bahasa yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan linguistik?
b. Setakat ini bahan ajar apakah—mengenai linguistik—yang disampaikan kepada mahasiswa di program sarjana bahasa dan sastra?
- (2) a. Peluang-peluang di bidang apa lagikah yang sebenarnya dapat dimasuki oleh lulusan yang berbekalkan pengetahuan linguistik itu?
b. Bahan ajar apakah yang sebenarnya dapat dan perlu disampaikan kepada mereka sebagai bekal yang, sekiranya mereka peroleh, akan lebih meningkatkan kemampuan mereka di lapangan kerja?

Tidak seperti di perguruan tinggi di Amerika Serikat, di Indonesia tidak ada Jurusan Linguistik. Yang ada adalah jurusan bahasa (misalnya, Indonesia, Nusantara, Inggris) di bawah Fakultas Sastra, yang memberikan mata kuliah linguistik. Untuk menghindari kerumitan, terutama untuk menanggapi pertanyaan nomor satu, saya sempitkan pembicaraan saya pada Jurusan Bahasa Indonesia (JBI) saja. Bahan, mengenai JBI ini saya peroleh dari Universitas Udayana dan Universitas Indonesia.

1. Tanggapan atas pertanyaan (1a): Menjadi apakah mereka?

Saya mencoba mencari ke Universitas Indonesia dan Universitas Udayana data mengenai jenis pekerjaan apa sajakah yang disandang oleh lulusan Fakultas Sastranya dan berharap dapat memperoleh pula data (hasil penghitungan kuantitatif) mengenai jenis pekerjaan apakah yang paling banyak memikat mereka? Dari Universitas Indonesia, yaitu dari Ikatan Alumni Fakultas Sastra Indonesia, saya peroleh data mentah (dalam bentuk disket, *D-Base*) yang belum diolah. Saya tidak sempat

mengolahnya, tetapi di situ saya jumpai daftar nama lulusan jurusan bahasa yang ada di fakultas sastra UI dengan alamat tempat mereka bekerja. Akan tetapi, dengan membaca alamat tempat mereka bekerja itu tidak semua dapat saya tebak jenis pekerjaan apa yang mereka rasuki. Dari Universitas Udayana, saya dapatkan keterangan bahwa Jurusan Bahasa Inggrisnya memiliki data yang mirip dengan yang di Universitas Indonesia itu, tetapi juga belum diolah. Mengenai Jurusan Bahasa Indonesia, saya peroleh keterangan secara lisan dari I Made Madya dan Ni Made Dhanawaty. Oleh karena itu, lewat sumber yang terbatas seperti itu, sementara ini saya coba simpulan jenis pekerjaan yang dirasuki oleh lulusan Jurusan Bahasa Indonesia. Nomor urut di sini tidak menunjukkan urutan jenjang dari yang terbanyak sampai ke yang tersedikit diminati.

- (1) Pengajar
- (2) Peneliti (Pusat Bahasa, Balai Bahasa)
- (3) Pegawai
 - a. Perpustakaan
 - b. Kantor Pemerintah Daerah
 - c. Kantor Depdikbud
- (4) Pewicara (penyiar radio, televisi)
- (5) Penulis (wartawan, editor)

2. Tanggapan atas pertanyaan (1b): Matakuliah apa selama ini?

Jenis mata kuliah—yang berkaitan dengan linguistik—yang saya daftar di sini saya pilah atas tiga besar: wajib, pilihan, dan "praktis". Dari segi isinya sebenarnya lebih tepat apabila saya bagi dua, yaitu "pengetahuan" (yang terdiri atas "wajib" dan "pilihan") dan "praktis". Yang saya maksudkan dengan "praktis" ialah mata kuliah yang sedikit atau banyak mengarah ke pembekalan keterampilan berbahasa.

a. Wajib

Universitas Udayana dan Universitas Indonesia

- (1) Pengantar Linguistik Umum
- (2) Fonologi I dan II
- (3) Morfologi I dan II
- (4) Sintaksis I dan II
- (5) Semantik (leksikal) I dan II

b. Pilihan

- 1) Universitas Udayana dan Universitas Indonesia
 - (1) Kapita Selekta Linguistik
 - (2) Seminar Linguistik

- (3) Sociolinguistik
 - (4) Struktur Bahasa Daerah
 - (5) Sejarah Kajian Bahasa Indonesia
 - (6) Linguistik Historis
 - (7) Linguistik Komparatif
 - (8) Metode Penelitian Bahasa
 - (9) Metode Pengajaran Bahasa dan Sastra
 - (10) Bahasa Arab
- 2) Universitas Udayana
 - (1) Linguistik Abad ke-20
 - (2) Struktur Bahasa Daerah
 - (3) Bahasa Sanskerta
 - 3) Universitas Indonesia
 - (1) Struktur Bahasa Sunda
 - (2) Struktur Bahasa Lamalera
 - (3) Struktur Bahasa Jawa
 - (4) Struktur Bahasa Batak Toba
 - (5) Bahasa Jawa Kuno
 - (6) Pengantar Leksikografi
 - (7) Pengantar Dialektologi

c. Praktis

- 1) Universitas Udayana
 - (1) Teori Terjemahan
 - (2) Kemahiran Bahasa Indonesia I s.d. VI
- 2) Universitas Indonesia
 - (1) Retorika Indonesia I dan II
 - (2) Penulisan Populer I dan II

3. Tanggapan atas pertanyaan (2a): Bidang kerja apa lagikah?

Perkembangan minat studi di bidang akademik akhir-akhir ini semakin mengarah pada pelonggaran sekat antardisiplin ilmu. Orang tidak lagi cenderung mengurung dirinya dan berkuat di bidang ilmu yang disandangnya saja, tetapi mulai meminati wilayah pinggir yang berbatasan dengan bidang ilmu-ilmu lain.

Medan penelitian linguistik adalah bahasa, tetapi tidak hanya ahli linguistik yang berurusan dengan bahasa. Ahli kedokteran bidang neurologi juga ada yang berurusan dengan bahasa, berurusan dengan pasien-pasien yang "menderita" gangguan berbahasa (afasia dsb.). Ahli teknologi komputer ada pula yang berurusan

dengan bahasa, dalam upaya untuk membuat komputer dapat memahami dan menanggapi di dalam bahasa Indonesia.

Di AS kini ada yang disebut *clinical linguists*, yaitu ahli linguistik yang bekerja di tempat layanan kesehatan berdampingan dengan dokter bidang neurologi menangani pasien yang mengalami gangguan berbahasa. Dari dokter-dokter ahli neurologi Universitas Indonesia saya sudah lama mendengar imbauan dari mereka supaya ada ahli linguistik yang bersedia bekerja sama dengan mereka menangani pasien yang menderita gangguan berbahasa.

BPP Teknologi dalam proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang di bidang "penerjemahan komputer" mengharapkan keterlibatan banyak ahli linguistik Indonesia. Untuk dapat membuat komputer yang mampu mengolah bahasa Indonesia, mereka tidak dapat tidak harus bekerja sama dengan ahli linguistik Indonesia. Sudah selama lima tahun ini mereka bekerja sama dengan tim peneliti linguistik dari Lembaga Bahasa Unika Atma Jaya, dan beberapa tahun dengan tim peneliti dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Akan tetapi, bidang yang masih harus diteliti oleh ahli linguistik masih begitu luas dan dalamnya sehingga masih terbuka lahan yang lapang bagi ahli linguistik yang berminat di bidang ini.

Dari penerbit Kanisius dan Gramedia saya memperoleh informasi bahwa di antara buku-buku yang mereka pasarkan kamus merupakan buku yang paling laku. Dari data pemasaran Kanisius, angka terendah jumlah penjualan kamus mendekati sekitar 2.000 yang terjual selama tahun 1992 dan ada satu juta jenis kamus yang mencapai pangsa pasar sejumlah 16.000-an (Kamus Inggris-Indonesia). Data ini menyingkapkan bahwa bidang perkamusan seharusnya dapat menarik banyak tenaga kerja lulusan mahasiswa pengutamaan linguistik.

Diagram Halliday [M.A.K. Halliday, *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning* (London, Edward Arnold, 1979), hlm. 11], yang saya kutip berikut ini (lihat lampiran), barangkali dapat memberikan gambaran mengenai bidang apa saja yang menyediakan peluang untuk dirasuki oleh mereka yang berlatar belakang linguistik.

4. Tanggapan atas pertanyaan (2b): Tambahan mata kuliah apa?

Ada dua hal yang perlu dipisahkan untuk menjawab pertanyaan (2b) ini. Yang pertama berkaitan dengan tanggapan atas pertanyaan (1a) dan yang kedua dengan tanggapan atas pertanyaan (2a).

Mengenai yang pertama, perlu kiranya saya lontarkan pertanyaan berikut. Sudah memadaiakah jenis mata kuliah yang saya sarikan pada tanggapan (1b) di atas itu bagi mereka dalam profesi berikut ini?

- (1) Pengajar
- (2) Peneliti (Pusat Bahasa, Balai Bahasa)

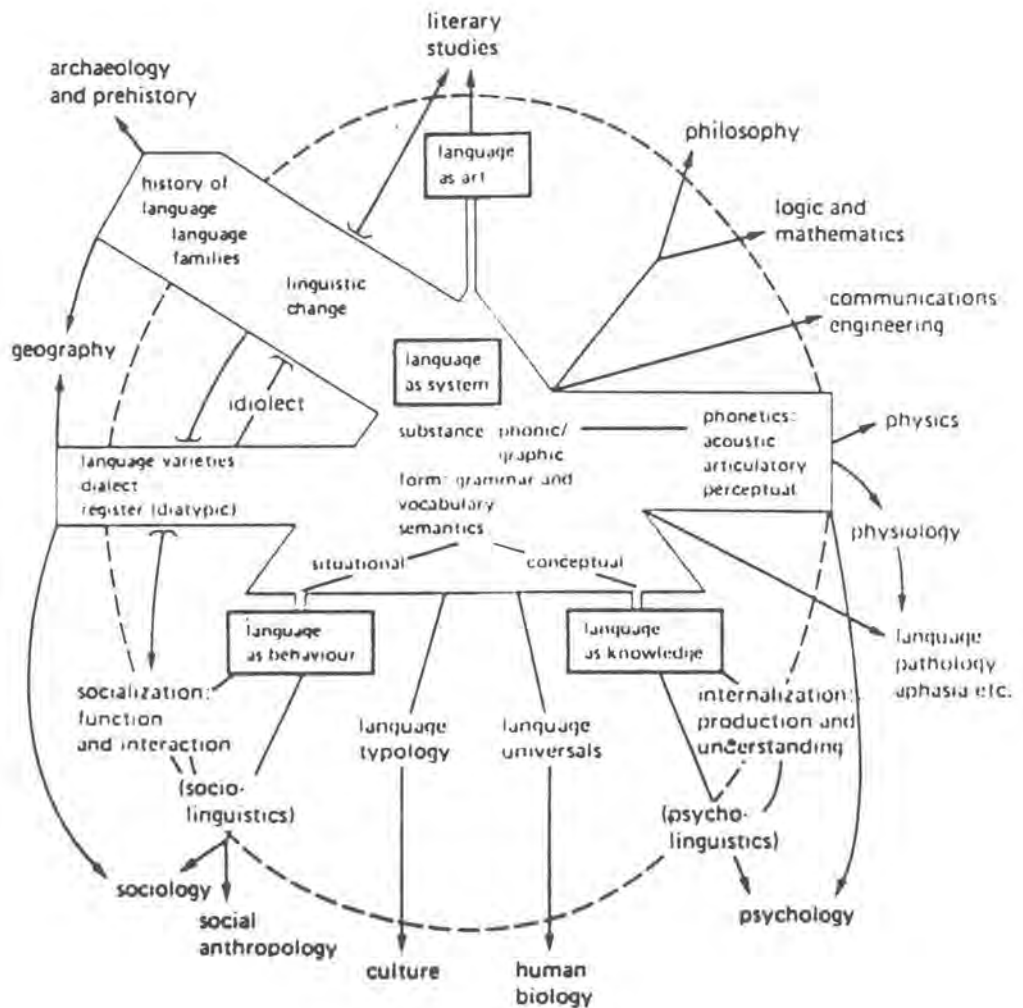
- (3) Pegawai
 - a. Perpustakaan
 - b. Kantor Pemerintah Daerah
 - c. Kantor Depdikbud
- (4) Pewicara (penyair radio, televisi)
- (5) Penulis (wartawan, editor)

Mata kuliah yang terdaftar di atas itu kiranya lebih mengarah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan jenis (1) dan (2) daripada ke (3) sampai dengan (5). Apabila sebagian besar lulusan masuk ke jenis pekerjaan (1) dan (2), barangkali ada alasan kuat untuk tetap mempertahankan jenis mata kuliah sebagaimana yang berlaku hingga kini. Akan tetapi, apabila jumlah lulusan yang mengambil bidang kerja (3)–(4) ternyata banyak jumlahnya, perlulah kiranya dipertimbangkan penambahan jenis mata kuliah yang dapat memenuhi kebutuhan ini.

Mengenai yang kedua, untuk mengantisipasi perkembangan ke masa depan, sebagaimana yang dikemukakan pada "tanggapan atas pertanyaan (2a)", perlu kiranya dipertimbangkan penambahan jenis mata kuliah seperti berikut.

- (1) neurolinguistik,
- (2) linguistik komputasional,
- (3) penerjemahan komputer, dan
- (4) leksikografi [yang lebih dari tingkat "pengantar"].

Diagram Halliday (1979:11)



PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Lukman Ali
Universitas Indonesia

Dalam tujuan pembangunan nasional sektor pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa bahasa dan sastra Indonesia dan daerah harus dibina dan dikembangkan. Dasarnya ialah kebijaksanaan nasional seperti yang dituangkan dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 beserta Penjelasanannya mengenai bahasa daerah.

Penjelasan ini penting karena seperti dinyatakan bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan yang dipelihara oleh masyarakatnya, dilindungi, dan dibina juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan yang hidup. Ini adalah masalah pokok yang berkaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia, sedangkan masalah penggunaan dan pengajaran bahasa-bahasa asing tertentu sebagai alat perhubungan antarbangsa serta pemanfaatannya dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern, belum pula terencana dengan baik untuk dapat diabdikan bagi kepentingan nasional.

Yang harus diingat ialah agar kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak disaingi oleh bahasa daerah dan bahasa asing itu.

Bila diringkaskan, masalah bahasa Indonesia dapat disebut, antara lain, sebagai berikut.

1. Bagaimana masyarakat Indonesia secara menyeluruh di tanah air kita ini dapat memiliki dan menguasai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang ampuh sesuai dengan keperluan pemakaiannya.
2. Bagaimana mengatasi penggunaan ejaan yang dalam kenyataannya masih belum utuh dipakai yang rupanya bertolak dari kekurangtahuan bahwa ejaan itu tidak hanya penggantian sejumlah huruf saja, tetapi juga penulisan kata dan tanda baca.
3. Begitu pula halnya penyusunan dan pemasyarakatan tata bahasa yang menggambarkan kodrat bahasa Indonesia sendiri belum tersusun dengan sempurna sampai saat ini.
4. Pembentukan istilah dalam berbagai bidang ilmu belum pula mencukupi kebutuhan walaupun telah dihasilkan $\pm$ 125.000 istilah sampai tahun 1991 (lihat lampiran). Istilah ini dihasilkan dalam sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) dan Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (Mabbim). Di luar badan itu penciptaan istilah terus pula berjalan.

5. Pengolahan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* harus secara terus-menerus dilakukan, khususnya pelaksanaan revisinya, sedangkan tenaga ahlinya harus pula dilengkapi jumlahnya dan ditingkatkan kemampuannya.
6. Soal apresiasi sastra rupanya tak beranjak banyak menuju peningkatan. Yang terus jadi persoalan ialah tetap terbatasnya peminat dan penikmatnya yang pada gilirannya mempengaruhi penerbitannya.
7. Pelaksanaan pengajaran bahasa asing terus saja belum memadai hasilnya. Sekarang akan tiba pula pengajaran bahasa Inggris di SD. Oleh karena itu, secepatnya kita tentu perlu mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya dengan bijaksana dan tepat guna.
8. Selanjutnya, secara garis besar kita perhatikan pula hasil Sensus Penduduk tahun 1990 oleh Biro Pusat Statistik yang mencatat bahwa penduduk Indonesia yang dapat berbahasa Indonesia ada sejumlah 107.066.316 orang dan yang tidak dapat berbahasa Indonesia 27.055.488 orang. Tidakkah ini merupakan masalah pula?
9. Akhirnya, kegiatan menanamkan kemampuan pemakaian bahasa harus selalu ditanamkan agar tercapai keterampilan berbahasa yang tinggi serta menumbuhkan sikap positif yang mengandung unsur kebanggaan dan kesetiaan berbahasa nasional. Sampai saat ini masih terasa kurangnya unsur kebanggaan dan kesetiaan itu.

Demikianlah, antara lain, masalah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah sebagaimana yang kita hadapi dewasa ini dalam pembinaan dan pengembangan.

Dalam kongres ini akan disinggung (lagi) masalah tersebut bersama para tokoh dari organisasi profesi, yaitu PWI, IDI, PII, dan ISEI dalam rangka ikut bersama-sama mencari jalan meningkatkan mutu bahasa Indonesia agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik.

**HASIL SIDANG MAJELIS BAHASA
BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA
TAHUN 1976-1991**

No.	Istilah	Jumlah	Sidang Majelis	Tahun
1.	Kehutanan	655	VII,VII,IX	76,76,77
2.	Pertanian	1.070	VII,VII,IX	76,76,77
3.	Linguistik	2.586	VII,VIII	76,77
4.	Kesusasteraan	506	VII,VIII	76,77
5.	Kependidikan	485	VII,VIII	76,77
6.	Teknik Sipil	470	VII,VIII,IX	76,76,77
7.	Fisika	1.088	VIII,IX,X	76,77,77
8.	Geografi dan Geologi	1.262	VIII,X	76,77
9.	Matematika	3.012	IX,X,XI	77,77,78
10.	Biologi	580	IX,X	77,77
11.	Arsitektur	183	IX	77
12.	Agama Islam	525	X	77
13.	Kedokteran-Kesehatan	2.794	X,XI	77,78
14.	Olah Raga	1.617	X,XI	77,78
15.	Ekonomi	1.325	X,XI	77,78
16.	Manajemen	1.860	XI,XII	78,78
17.	Komunikasi Massa	1.266	XI,XIII	78,79
18.	Anatomi	1.245	XII,XIII	78,79
19.	Farmasi-Farmakologi	1.721	XII,XIII	78,79
20.	Psikologi	1.080	XII,XIII	78,79
21.	Teknik Mesin	1.759	XIII,XIV	79,80
22.	Mineralogi	1.060	XIII,XIV	79,80
23.	Antropologi	1.524	XIV,XV	80,80
24.	Sosiologi	1.779	XIV,XV	80,80
25.	Statistika	1.130	XV,XV	80,80
26.	Petrologi	2.929	XV,XVI	80,81
27.	Hukum Internasional	2.269	XV,XVI	80,81
28.	Hidrogeologi	854	XVI,XVI	80,81
29.	Hidrologi	1.027	XVI,XVI	80,81
30.	Meteorologi	1.940	XVI,XVI	81,81
31.	Ilmu Kependudukan	1.895	XVII,XVII	81,81
32.	Administrasi Niaga	2.414	XVII,XVII	81,82
33.	Kesehatan Masyarakat	1.952	XVII,XVIII	81,82
34.	Ilmu Perpustakaan dan Dokumentasi	2.069	XVII,XVIII	82,82,83
35.	Zoologi	1.898	XVIII,XIX	82,82
36.	Teknologi Makanan	2.288	XVIII,XIX	82,82
37.	Elektroteknik	1.419	XIX,XX	82,83
38.	Perkebunan	1.680	XIX,XX	82,83
39.	Fisika	701	XX	83
40.	Biologi	1.432	XXI	84
41.	Hukum Laut	1.339	XXI,XXII	84,84

No.	Istilah	Jumlah	Sidang Majelis	Tahun
42.	Pelayaran	1.613	XXI,XXIII	84,85
43.	Kimia1	3.486	XXII,XXIII	84,85
44.	Biologi2	2.680	XXII,XXIII	84,85
45.	Penerbitan dan Percetakan	1.312	XXII,XXIII	84,85
46.	Fisika2	3.988	XXIII,XXIV	84,85
47.	Matematika2	1.059	XXIII	85
48.	Biologi3	3.616	XXIV	85
49.	Akuntansi	3.182	XXIV,XXV	85,86
50.	Biologi4	1.905	XXV	86
51.	Fisika3	761	XXV	86
52.	Kimia3	1.428	XXV	86
53.	Matematika4	3.951	XXV	86
54.	Biologi4	1.738	XXVI	87
55.	Ginekologi dan Obstetri	500	XXVI	87
56.	Fisika4	243	XXVI	87
57.	Kimia3	609	XXVI	87
58.	Matematika5	4.594	XXVI,XXVII	87,88
59.	Fisika5	5.098	XXVII	88
60.	Keuangan	315	XXVII	88
61.	Kimia4	1.081	XXVII	88
62.	Biologi6	1.022	XXVII	88
63.	Biologi7	1.166	XXVIII	89
64.	Fisika6	1.015	XXVIII	89
65.	Kimia5	3.593	XXVIII,XXIX	89,90
66.	Keuangan	1.264	XXVIII,XXIX	89,90
67.	Matematika6	80	XXIX	90
68.	Matematika7	1.460	XXIX	90
69.	Fisika7	1.323	XXIX	90
70.	Biologi8	1.383	XXIX	90
71.	Biologi9	2.078	XXIX	90
72.	Biologi10	1.612	XXX	91
73.	Biologi11	496	XXX	91
74.	Fisika9	1.826	XXX	91
75.	Matematika8	257	XXX	91
76.	Keuangan1	1.344	XXX	91
	Jumlah Istilah	123.766		

Sumber: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA VI

PENDAHULUAN

Kongres Bahasa Indonesia VI, yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta, dari tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 2 November 1993 dan diikuti oleh 770 peserta dari seluruh Indonesia dan 52 peserta dari luar negeri (Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, Hongkong, India, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Singapura), membahas pokok-pokok masalah sebagai tersebut di bawah ini.

1. Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa

- 1) Bahasa Indonesia dan Pembangunan Nasional
- 2) Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara
- 3) Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan
- 4) Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan
- 5) Bahasa Indonesia dan Generasi Muda
- 6) Bahasa Indonesia dan Peran Wanita
- 7) Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional
- 8) Sastra dalam Kehidupan Masyarakat
- 9) Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000
- 10) Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 11) Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern

2. Pengembangan Bahasa dan Sastra

- 1) Pengembangan Laras Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
- 2) Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia melalui Penerjemahan
- 3) Kehidupan Bahasa dan Sastra di Indonesia
- 4) Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 5) Karya Kebahasaan dan Kesastraan sebagai Sarana Pengembangan Bahasa
- 6) Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bahasa Daerah
- 7) Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Kaitannya dengan Bahasa Asing
- 8) Penerjemahan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern

3. Pembinaan Bahasa dan Sastra

- 1) Penyuluhan Bahasa dan Sastra
- 2) Peran Organisasi/Masyarakat Profesi dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 3) Sumbangan/Peranan Media Massa dalam Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 4) Strategi Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia melalui Organisasi Profesi
- 5) Strategi Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa
- 6) Penyuntingan dan Peningkatan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 7) Penerbitan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern
- 8) Terbitan sebagai Sarana Utama Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa

4. Pengajaran Bahasa dan Sastra

- 1) Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
- 2) Pendidikan Sekolah sebagai Jalur Pemasyarakatan Hasil Pengembangan Bahasa

5. Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri

- 1) Perkembangan Pengkajian Bahasa Indonesia di Luar Negeri
- 2) Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing
- 3) Peningkatan Peran Pengajar Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing
- 4) Unsur Budaya Indonesia dalam Materi Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing
- 5) Perkembangan Bahasa Serumpun

Dengan memperhatikan:

1. Sumpah Pemuda 1928;
2. Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 36 beserta penjelasannya);
3. Putusan Kongres Bahasa Indonesia I-V;
4. Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993;
5. pidato Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda ke-65, pembukaan Kongres Pemuda/ Komite Nasional Pemuda Indonesia VII, dan pembukaan Kongres Bahasa Indonesia VI pada tanggal 28 Oktober 1993 di Balai Sidang Hilton Jakarta;
6. makalah-makalah yang disajikan dan dibahas di dalam sidang paripurna, yaitu:
 - (1) *Laporan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*
 - (2) *Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa* oleh Ir. Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - (3) *Bahasa dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern* oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, Menteri Negara Riset dan Teknologi
 - (4) *Bahasa Indonesia dalam Dunia Pendidikan* oleh Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- (5) *Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara: Akar dan Dampak Ideologis Istilah-Istilah Politik* oleh Drs. Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara
- (6) *Peranan Psikologi dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra* oleh Prof. Dr. Fuad Hassan, Anggota Dewan Pertimbangan Agung
- (7) *Peranan Bahasa Indonesia dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa* oleh Letnan Jenderal TNI (Purn.) M. Yogie S.M., Menteri Dalam Negeri
- (8) *Bahasa Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Nasional* oleh Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
- (9) *Bahasa Indonesia dan Generasi Muda* oleh Hayono Isman, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
- (10) *Bahasa Indonesia dan Ketahanan Nasional* oleh Laksamana Madya TNI (Purn.) Machmud Subarkah, Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional
- (11) *Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional* oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- (12) *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000* oleh Dr. Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- (13) *Kesinambungan dalam Kebijaksanaan Bahasa Nasional* oleh Prof. Dr. Amran Halim, Rektor Universitas Sriwijaya
- (14) *Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Keagamaan* oleh Dr. H. Hasbullah Mursyid, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama
- (15) *Pengembangan Laras Bahasa dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern* oleh Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- (16) *Sastra Indonesia dan Pembinaan Generasi Muda* oleh Emha Ainun Nadjib, Sastrawan
- (17) *Sastra dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia* oleh Goenawan Mohammad, Sastrawan
- (18) *Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* oleh Dr. Boediono, Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. makalah-makalah yang disajikan dan dibahas di dalam sidang kelompok dan diskusi panel; dan
8. pandangan, tanggapan, usul, dan saran para peserta;

Kongres Bahasa Indonesia VI, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mencapai kesepakatan dan mengambil putusan tersebut di bawah ini.

BAGIAN I UMUM

1. Masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemanfaatan bahasa asing. Ketiga kelompok masalah bahasa itu merupakan masalah yang memiliki hubungan timbal balik dan, oleh karena itu, tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan kata lain, ketiga kelompok masalah bahasa itu merupakan satu kesatuan. Oleh karena masalah bahasa itu menyangkut kepentingan semua lapisan masyarakat, semua instansi Pemerintah, semua badan usaha, baik di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan sektor swasta dan semua organisasi atau badan lain, pelaksanaan kebijaksanaan bahasa nasional itu memerlukan dukungan kelembagaan yang memiliki wewenang, ruang gerak, dan daya jangkau secara nasional pula. Dengan demikian, untuk mengelola keseluruhan masalah bahasa di Indonesia itu diperlukan satu **Kebijaksanaan Bahasa Nasional**, yaitu kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan.
2. Kebijakan bahasa nasional itu perlu mencakup batasan dan ketentuan mengenai:
 - (1) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 maupun sebagai bahasa negara sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, serta pembinaan, pengembangan, pengajaran, dan pemuasarakatannya;
 - (2) kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai unsur kebudayaan Indonesia yang hidup, sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, serta pembinaan, pengembangan, pengajaran, dan pelestariannya; dan
 - (3) kedudukan dan fungsi bahasa asing di Indonesia serta pengajaran dan/atau pemanfaatannya.
3. Kebijakan bahasa nasional itu perlu dilengkapi dengan rencana strategi jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan dengan sasaran-sasaran yang jelas, yang disusun secara realistis sehingga tujuan yang hendak dicapai benar-benar dapat diraih.
4. Supaya benar-benar dapat berfungsi sebagai garis haluan dan patokan dalam pengelolaan masalah bahasa di Indonesia, kebijakan bahasa nasional itu perlu dirumuskan secara berencana, terarah, terinci, terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk **Undang-Undang Kebahasaan Indonesia**.
5. Untuk mengelola semua persoalan kebahasaan dan melaksanakan Undang-Undang Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 4, Kongres Bahasa Indonesia VI berpendapat bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu segera ditingkatkan menjadi lembaga nondepartemen dengan nama **Lembaga Kebahasaan Indonesia**, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
6. Oleh karena masalah kebahasaan di Indonesia itu merupakan masalah nasional dan menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat, Lembaga Kebahasaan

Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas perlu dilengkapi dengan dewan atau badan pertimbangan kebahasaan yang bertugas pokok memberikan pertimbangan kebahasaan, diminta atau tidak diminta, kepada Ketua Lembaga Kebahasaan Indonesia. Dewan atau badan pertimbangan kebahasaan itu terdiri dari para ahli bahasa, ilmuwan, dan tokoh-tokoh masyarakat baik dari lingkungan Pemerintah maupun dari lingkungan masyarakat umum.

7. Supaya benar-benar memiliki daya jangkauan nasional dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, Lembaga Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas perlu ditunjang dengan lembaga sejenis dengan nama **Balai Kebahasaan Indonesia** di setiap daerah tingkat I di seluruh Indonesia. Balai Kebahasaan Indonesia sebagai penunjang Lembaga Kebahasaan Indonesia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, tetapi berfungsi di bawah koordinasi Lembaga Kebahasaan Indonesia.
8. Untuk memasyarakatkan putusan Kongres dan mengambil langkah-langkah persiapan yang diperlukan bagi penyusunan Undang-Undang Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 4 di atas dan pembentukan Lembaga Kebahasaan Indonesia yang dimaksud pada butir 5 di atas, Kongres Bahasa Indonesia VI membentuk **Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia VI** yang tersusun sebagai berikut.
 - (1) Prof. Dr. Amran Halim (Ketua merangkap Anggota)
 - (2) Ilen Surianegara (Wakil Ketua merangkap Anggota)
 - (3) Dr. Hasan Alwi (Sekretaris merangkap Anggota)
 - (4) Prof. Dr. Anton M. Moeliono (Anggota)
 - (5) Basyuni Suriamiharja (Anggota)
 - (6) Hans E. Kawuluan (Anggota)
 - (7) Imam Sukarsono, S.H. (Anggota)
 - (8) Dr. Mien A. Rifai (Anggota)
 - (9) Prof. Dr. Saparinah Sadli (Anggota)
 - (10) Dr. Sapardi Djoko Damono (Anggota)
 - (11) Prahastoeti Adhitama, M.A. (Anggota)

BAGIAN II KHUSUS

1. Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memantapkan perannya sebagai sarana pembangunan nasional, penyelenggaraan negara, pendidikan, kegiatan keagamaan, dan peningkatan partisipasi generasi muda serta sebagai sarana pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional.

Dalam perjuangan bangsa Indonesia menghadapi era lepas landas, peran bahasa dan sastra Indonesia perlu dimantapkan dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tindak Lanjut

1. Sebagai anutan masyarakat, hendaknya para penyelenggara negara dan pemerintah memberikan teladan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
2. Karena bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa negara Republik Indonesia, administrasi kenegaraan, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus dilaksanakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik hendaknya dijadikan syarat dalam penerimaan pegawai dan kenaikan pangkat/jabatan.
4. Penanaman sikap positif terhadap bahasa Indonesia bukan hanya tugas guru bahasa Indonesia, melainkan juga tugas guru semua bidang studi. Oleh karena itu, guru bidang studi lain harus membantu membina sikap positif peserta didik.
5. Organisasi kepemudaan sebaiknya memasukkan upaya pembinaan bahasa Indonesia dalam program organisasinya dan melatih disiplin berbahasa Indonesia, antara lain melalui perlombaan, penulisan karya tulis, dan pertemuan.
6. Perlu dipikirkan pola pembinaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda, seperti yang telah digunakan dalam pemasyarakatan P-4.
7. Organisasi kebahasaan, seperti Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), dan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI), serta organisasi kepemudaan diharapkan ikut membantu upaya membina anggota masyarakat yang masih buta bahasa Indonesia yang diperkirakan berjumlah 17 persen.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.
9. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu menyusun rencana untuk menemukan ciri khas ragam lisan yang baku. Hal ini perlu dilakukan agar kesenjangan antara ragam bahasa tulis dengan ragam bahasa lisan dapat diperkecil.
10. Kegiatan apresiasi sastra di kalangan masyarakat perlu diusahakan antara lain melalui pertemuan ilmiah, pementasan drama, dan perlombaan.
11. Dalam kaitannya dengan sastra Indonesia sebagai penapis pengaruh kebudayaan asing, upaya penelitian dan pemasyarakatan sastra Nusantara harus terus digalakkan. Selain itu, mutu dan jumlah hasil karya sastra Indonesia, mutu dan jumlah ahli sastra dan pengajaran sastra, serta minat menikmati karya sastra harus terus ditingkatkan.
12. Putusan Seminar Politik Bahasa Nasional ¹⁹⁷⁵ 1976 perlu dipertimbangkan dalam merumuskan Kebijaksanaan Bahasa Nasional.
13. Putusan Kongres Bahasa Indonesia terdahulu yang belum terlaksana perlu ditindaklanjuti.
14. Pemakaian bahasa asing untuk nama dan kegiatan badan usaha yang makin lama makin meluas menunjukkan sikap yang kurang menghargai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, instansi Pemerintah yang berwenang perlu melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dengan taat asas dalam pemberian izin usahanya.

2. Pengembangan Bahasa dan Sastra

Kebudayaan nasional sebagian besar telah terwujud dalam berbagai pranata kemasyarakatan seperti sistem politik, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dan berbagai ungkapan seni. Semuanya itu diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Di samping itu, terdapat beratus-ratus bahasa daerah yang menjadi bagian kebudayaan kita dan digunakan untuk mengungkapkan berbagai pranata kemasyarakatan tersebut. Beberapa bahasa asing juga digunakan dalam berbagai fungsi tertentu.

Pelambangan dunia gagasan dan nilai menuntut berbagai laras bahasa yang diperlukan oleh peradaban modern yang dicoraki ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pemanfaatan kekayaan bahasa sebagai sarana ekspresi seni tercipta dalam sastra.

Putusnya hubungan pengarang dengan sumber sastra daerahnya akan mengakibatkan pemiskinan batin. Oleh karena itu, berbagai bentuk sastra klasik dan sastra lisan, misalnya wayang dan drama tradisional, yang merupakan bagian sejarah sastra kita, perlu dipelihara dan dikembangkan sebagai milik budaya bersama.

Penelitian pelbagai aspek bahasa Indonesia mempunyai peranan penting bukan hanya untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang hakikat dan cara kerja bahasa Indonesia, melainkan juga untuk memberikan landasan yang lebih kokoh pada pengajaran dan penyuluhan bahasa. Hanya pemahaman yang tepat tentang seluk-beluk bahasa Indonesia dapat mendukung pengajaran dan penyuluhan yang efektif, yang pada akhirnya akan menumbuhkan sikap dan wawasan yang positif dan apresiatif serta penggunaan bahasa yang mantap dan cendekia.

Penerjemahan buku secara terencana perlu segera dilancarkan karena, untuk jangka waktu yang lama, keterbatasan penguasaan bahasa asing masih akan merupakan hambatan untuk menyerap pengetahuan yang disajikan dalam buku-buku berbahasa asing.

Tindak Lanjut

1. Kegiatan penelitian bahasa dan sastra perlu ditingkatkan dalam jumlah dan mutu untuk memantapkan upaya pengembangan bahasa dan sastra.
2. Karena ada kesejajaran dalam hubungan timbal balik antara pencendekiaan laras bahasa keilmuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, para ilmuwan hendaknya mengembangkan laras bahasa keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Demi pemantapan laras bahasa keilmuan yang memerlukan kosakata dan peristilahan khusus, usaha penyusunan daftar istilah ilmiah dan kamus bidang ilmu perlu ditingkatkan.
4. Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 tentang "pemeliharaan bahasa daerah" perlu dirumuskan tindakan operasionalnya.
5. Usaha penerjemahan, baik yang menyangkut karya ilmiah maupun yang menyangkut karya sastra, memerlukan prasarana kamus dwibahasa dan daftar peristilahan. Karena itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu

- merencanakan penyusunan kamus dan daftar istilah bagi kemudahan para penerjemah.
6. Untuk memberi kesempatan mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya tulis, pengarang perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya.
 7. Untuk meluaskan kesempatan menambah ilmu pengetahuan serta meluaskan cakrawala, perlu disusun panitia khusus yang bertugas melaksanakan seleksi penerjemahan, penerbitan, dan pemasaran karya sastra dan pustaka dunia yang terkenal.
 8. Sebagai upaya pengadaan bahan sastra klasik Nusantara, perlu disusun buku ajar sastra Nusantara untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan:
 - (a) mengadakan seleksi bahan bacaan sastra dan budaya, sesuai dengan penilaian kelompok pendukung budaya yang bersangkutan;
 - (b) menyusun, menyadur, menerjemahkan, menjelaskan, dan memberi catatan pada bahan, sesuai dengan jenis, jenjang, dan tingkat pendidikan peserta didik.
 9. Perlu diwujudkan kebijaksanaan yang mewajibkan bahan-bahan sastra dan kebudayaan klasik Nusantara sebagai bagian dari kurikulum nasional.
 10. Perlu diusahakan agar setiap daerah memiliki majalah budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang diusahakan oleh Pemerintah dengan imbalan yang memadai bagi pengarang.
 11. Sastra klasik Nusantara perlu diterjemahkan, disadur, dan diterbitkan secara teratur dengan memanfaatkan berbagai media elektronik dan cetak yang memiliki jangkauan luas.
 12. Perpustakaan Pusat/Daerah perlu dijadikan sarana aktif untuk promosi bacaan, khususnya bagi generasi muda. Fungsinya sebagai pusat penyimpanan hasil penerbitan harus disertai dengan fungsi sebagai pusat penyebaran.

3. Pembinaan Bahasa dan Sastra

Pembinaan bahasa dan sastra adalah usaha untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi sastra. Secara konkret usaha ini mencakup, antara lain, penyuluhan dan penerbitan oleh pelbagai pihak, termasuk oleh media massa dan organisasi profesi. Usaha tersebut telah dilaksanakan selama beberapa tahun ini, namun hasilnya belum memuaskan. Oleh sebab itu, melalui strategi yang tepat diharapkan akan dicapai kemajuan dan hasil yang lebih memuaskan.

Kehidupan dan perkembangan sastra hingga saat ini belum begitu menggembirakan. Oleh karena itu, iklim yang memungkinkan sastra itu hidup dan berkembang perlu segera diciptakan sehingga masyarakat luas sekurang-kurangnya dapat mengapresiasi karya sastra.

Sehubungan dengan itu, pembinaan sastra Indonesia hendaknya diarahkan agar masyarakat bahasa memiliki minat baca dan kegemaran menulis yang tinggi.

Pembinaan bahasa Indonesia melalui kegiatan penyuluhan, walaupun belum memberikan hasil yang diharapkan, tetap merupakan cara yang ampuh untuk

mengubah sikap berbahasa para pemakai bahasa Indonesia yang belum atau kurang positif.

Sebagai media komunikasi yang mempergunakan bahasa, media massa telah membuktikan diri sebagai sarana yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Di samping itu, dunia pers dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan sikap positif dan apresiatif serta menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendekia dengan mengungkapkan bahasa secara lebih rasional dan berpegang pada konvensi-konvensi bahasa yang sudah baku. Oleh sebab itu, peranan media massa sebagai penyebar sekaligus sebagai tolok ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sejak kebangkitan nasional pada awal abad ini, tenaga profesi, seperti dokter, insinyur, dan pedagang, sudah memainkan peranan yang sangat menentukan dalam mengobarkan semangat kebangsaan, antara lain dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan.

Kini dalam alam kemerdekaan, lebih-lebih dalam menghadapi era lepas landas, tenaga profesi dan organisasi profesi, seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia, akan tetap berperanan dalam meningkatkan sikap bahasa yang positif dan apresiatif serta dalam menggalakkan penggunaan bahasa yang kreatif dan bermutu. Di samping itu, organisasi-organisasi itu juga akan berperan sebagai pendorong peluasan penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu dan teknologi, baik yang menyangkut wacana ilmiah maupun yang berhubungan dengan tata istilah.

Organisasi profesi kebahasaan, seperti HPBI, HISKI, dan MLI, harus berusaha mengembangkan potensinya sebagai sarana pembina dan pengembang bahasa dan sastra, khususnya yang menyangkut kepakaran dan sumber daya manusia.

Tindak Lanjut

1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membina kerja sama yang luas dengan berbagai lembaga, terutama dengan perguruan tinggi dan media massa.
2. Hasil-hasil pengembangan bahasa, seperti pedoman pembentukan istilah, daftar istilah, dan kamus-kamus istilah, perlu diterbitkan dan disebarluaskan melalui toko-toko buku.
3. Untuk dapat menghasilkan terbitan yang mutunya baik dari segi isi dan bahasanya, perlu diupayakan buku-buku acuan kebahasaan seperti pedoman pemakaian bahasa yang baik dan benar, pedoman penulisan laporan ilmiah, pedoman penyuntingan, dan berbagai jenis kamus.
4. Untuk memacu kegiatan penerbitan karya-karya ilmiah, baik artikel maupun buku, perlu diupayakan pelatihan dan pendidikan secara berencana bagi peneliti dan penyunting.

5. Agar penyuluhan lebih efektif dan efisien, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir; dan berdasarkan hasil evaluasi itulah disusun rencana penyuluhan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang lebih terpadu dan terarah.
6. Bahan penyuluhan perlu disiapkan dalam kemasan yang menarik bagi setiap kelompok sasaran sehingga setiap kelompok sasaran itu memiliki sikap berbahasa yang positif, keterampilan berbahasa yang baik, minat baca yang tinggi, dan apresiasi sastra yang baik.
7. Ketersediaan tenaga penyuluh yang andal sangat diperlukan, terutama bagi para peserta didik di semua jenis dan jenjang pendidikan sekolah.
8. Strategi pemasyarakatan yang lebih tepat perlu disusun agar penyuluhan dapat dilaksanakan lebih efektif.
9. Pertemuan berkala perlu diadakan antara guru sastra dan ahli sastra/ sastrawan guna meningkatkan kemampuan apresiasi dalam rangka tugas guru.
10. Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendekia, media cetak dianjurkan menyediakan rubrik bahasa sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenai bahasa.
11. Dalam memperkaya bahasa Indonesia dunia pers telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur serapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan. Namun, pengguna bahasa dalam pers dianjurkan juga menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.
12. Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penerimaan calon wartawan.
13. Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantauan dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.
14. Agar peran serta organisasi profesi dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dapat tetap dipertahankan, kepakaran para anggotanya perlu ditingkatkan, antara lain melalui kegiatan pertemuan ilmiah dan karya tulis ilmiah.
15. Kegiatan rutin organisasi profesi kebahasaan harus didukung dengan dana dan kepakaran manajemen. Organisasi profesi itu perlu bekerja sama membentuk pusat karier untuk menyalurkan tenaga-tenaga kebahasaan sehingga pengangguran dan kemubaziran tenaga kebahasaan dapat dicegah.

4. Pengajaran Bahasa dan Sastra

Tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah membina kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta kemampuan apresiasi karya sastra Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu manusia Indonesia sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan masa kini dan mendatang. Tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional.

Dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, kurikulum, buku pelajaran, metode pengajaran, evaluasi pengajaran, guru, perpustakaan sekolah, dan lingkungan keluarga serta masyarakat memegang peranan penting. Kurikulum bahasa dan sastra harus luwes dan memungkinkan guru dan peserta didik mengembangkan kreativitas dalam kegiatan belajar-mengajar. Isi dan cara penyajian buku pelajaran harus menarik dan menunjang pembinaan kemampuan dan keterampilan berbahasa dengan baik dan benar serta meningkatkan kemampuan apresiasi sastra. Metode belajar-mengajar harus dapat mengembangkan interaksi guru-peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik mempunyai sikap kritis, kreatif, dan responsif dalam menghadapi pelajaran dan kehidupan. Hasil evaluasi pengajaran bahasa harus dapat menjadi dasar penentuan kemajuan dan pengaturan program belajar-mengajar. Guru bahasa dan nonbahasa di berbagai jenjang pendidikan serta lingkungan keluarga dan masyarakat harus memberikan teladan berbahasa dengan baik dan benar kepada peserta didik dan merangsang mereka gemar membaca dan menulis. Jumlah, jenis, serta mutu koleksi perpustakaan sekolah perlu ditingkatkan.

Bahasa daerah di wilayah tertentu dapat diajarkan kepada peserta didik penuturnya tanpa menghambat pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Karena itu, kurikulum, buku pelajaran, metode, dan sarana lain untuk pendidikan dan pengajaran bahasa daerah perlu dikembangkan.

Bahasa asing tertentu diajarkan di sekolah terutama untuk membina kemampuan memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditulis dalam bahasa asing tersebut. Pengajaran bahasa asing, khususnya di sekolah dasar, tidak boleh menghambat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Tindak Lanjut

1. Kurikulum pengajaran bahasa dan sastra untuk sekolah dasar dan menengah yang akan diberlakukan mulai tahun 1994 perlu dipahami benar oleh guru serta dilengkapi dengan buku-buku pelajaran yang baik dan buku-buku pedoman pelaksanaan yang jelas.
2. Pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, sebagaimana diputuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia V, hendaklah lebih menekankan aspek keterampilan berbahasa yang baik dan benar serta aspek apresiasi sastra daripada aspek pengetahuan tentang bahasa dan sastra Indonesia.
3. Buku pelajaran bahasa yang digunakan di sekolah dasar dan menengah hendaklah baik, dilihat dari segi isi, mutu, dan penyajiannya. Dalam penyusunan buku pelajaran bahasa perlu diperhatikan agar semua aspek formal bahasa (bunyi, kosakata, dan tata bahasa) dikembangkan dengan baik.
4. Sistem pengujian sebagai salah satu cara evaluasi pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia perlu diperbaiki sekurang-kurangnya dari segi bentuk dan isi agar hasilnya memberikan gambaran yang objektif mengenai kemajuan belajar serta kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia peserta didik.

5. Untuk meningkatkan serta memperluas wawasan guru bahasa di sekolah dasar dan menengah, sebagaimana disarankan pada Kongres Bahasa Indonesia V, perlu segera disusun dan dikembangkan berbagai buku acuan seperti buku panduan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa pedagogis, dan panduan pengajaran bahasa komunikatif.
6. Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum perlu diupayakan agar diperoleh keterampilan penggunaan bahasa Indonesia untuk keperluan akademis.
7. Sebelum gagasan tentang pengajaran bahasa asing di sekolah dasar dilaksanakan, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dari segala sudut.

5. Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri pada umumnya bersifat instrumental, terutama bagi para sarjana yang ingin melaksanakan penelitian di Indonesia dan para calon diplomat dan usahawan yang akan bertugas di Indonesia. Setelah belajar di negara masing-masing, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian mengikuti pengajaran lanjutan di Indonesia. *Pelajaran 212*

Sudah saatnya kini Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing (BIPA) ditangani dengan lebih serius, antara lain dengan menyusun kurikulum yang luwes yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan keperluan pembelajar; menyusun materi pengajaran dengan format yang menarik dan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lisan maupun tulis, yang hidup di masyarakat, baik untuk interaksi formal maupun interaksi informal; dan menggunakan metode pengajaran yang berdasarkan pendekatan komunikatif. Oleh karena itu, guru dan dosen BIPA seyogianya memahami kaidah-kaidah sosiolinguistik yang mendasari pendekatan komunikatif.

Perlu dikembangkan pula materi bahasa Indonesia bidang tertentu, seperti bidang hukum, bidang perdagangan, bidang perbankan, yang mungkin sekali diminati para pembelajar asing.

Perpustakaan dan laboratorium bahasa perlu disediakan untuk melengkapi BIPA yang dapat dipergunakan di luar jam pelajaran oleh para pembelajar.

Dengan memperbandingkan perkembangan dan pengajaran bahasa Melayu di negara-negara Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, upaya penyempurnaan pengajaran bahasa Indonesia pada umumnya dan pengajaran BIPA khususnya perlu ditingkatkan.

Tindak Lanjut

1. Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan para pembelajar agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula dikembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemerintah dan swasta mengadakan program pertukaran

7. pengajaran
pengajaran dan materi pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri.

2. Perlu dikembangkan materi BIPA yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ujaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara proporsional dan sesuai dengan konteks.
3. Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu ditingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum, mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
4. Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan praanggapan, yang sangat lazim dipergunakan di dalam interaksi informal. Di samping itu, perlu diperhatikan juga unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya.
5. Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain.
6. Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru sampai lulus S-1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan lebih baik di negara asal pembelajar.

Jakarta, 2 November 1993

PANITIA PERUMUS

Harimurti Kridalaksana (Ketua merangkap Anggota)

S.R.H. Sitanggang (Sekretaris merangkap Anggota)

A. Latief (Anggota)

Achadiati Ikram (Anggota)

Amran Halim (Anggota)

Anton M. Moeliono (Anggota)

Hans Lapoliwa (Anggota)

Hasan Alwi (Anggota)

Ilen Surianegara (Anggota)

Mansoer Pateda (Anggota)

Soeseno Kartomihardjo (Anggota)

Yohanes Kalamper (Anggota)

**SAMBUTAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
PADA UPACARA PENUTUPAN KONGRES BAHASA INDONESIA VI
DI JAKARTA, 2 NOVEMBER 1993**

Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hadirin dan undangan yang saya hormati,
Para peserta Kongres yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, ridho dan perkenan-Nya kita semua dapat hadir disini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Kongres Bahasa Indonesia VI yang berlangsung selama lima hari ini telah membahas berbagai Makalah. Dari pembahasan Makalah itu telah pula diambil putusan-putusan penting serta berbagai hal yang perlu ditindaklanjuti. Sehubungan dengan itu, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua peserta Kongres ini.

Dalam sambutan pada upacara pembukaan Kongres VI ini tanggal 28 Oktober 1993 yang lalu, Presiden Soeharto telah menyampaikan arahan dan harapan. Di antara harapan dan arahan yang beliau sampaikan itu adalah bahwa agar hasil Kongres VI dapat dijadikan pedoman guna menyusun langkah-langkah yang tepat dalam mengelola bahasa nasional kita untuk keperluan sekarang dan masa yang akan datang. Hal itu dianggap penting karena kita sebentar lagi akan memasuki tahap tinggal landas dan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.

Setelah mendengar putusan-putusan Kongres VI yang disampaikan tadi, saya dapat menyatakan bahwa putusan-putusan itu searah dan sejalan dengan arahan dan harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Walaupun demikian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa bagaimanapun baiknya putusan yang diambil, jika tidak disertai dengan pelaksanaannya, putusan-putusan itu tetaplah tinggal sebagai putusan belaka. Sehubungan dengan itu, saya sangat mengharapkan agar putusan-putusan yang diambil itu dijadikan garis haluan dalam melakukan pengelolaan bahasa Indonesia, paling tidak dalam masa lima tahun mendatang.

Saudara-saudara yang saya hormati,

Pada satu pihak kita menyadari bahwa bahasa Indonesia, antara lain berfungsi sebagai alat pemersatu dan lambang jatidiri bangsa kita. Pada pihak lain, kita pun menyadari kenyataan bahwa arus globalisasi telah melanda masyarakat kita. Tidak mungkin kita menahan arus yang mengalir dengan deras itu. Tindakan yang bijaksana yang dapat kita lakukan adalah menyaring hal-hal yang dibawa oleh arus itu. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan dan tidak membahayakan kepribadian dan budaya bangsa dapat kita terima sebagai bahan untuk menata kehidupan bangsa kita dalam memasuki dunia modern. Akan tetapi, pengaruh dan berbagai masalah yang dianggap merugikan kehidupan dan budaya bangsa seharusnya kita tolak.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kebahasaan tampaknya kita harus melakukan tindakan-tindakan yang nyata. Akhir-akhir ini kita makin merasakan bahwa pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya makin berkembang dalam masyarakat. "Ini merupakan ancaman terhadap bahasa Indonesia yang merupakan salah satu lambang jatidiri bangsa kita", demikian kata Bapak Presiden pada upacara pembukaan Kongres ini beberapa hari yang lalu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya ingin menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar keinginan untuk menggunakan bahasa asing itu harus kita batasi, dalam arti penggunaan bahasa asing itu pada tempat dan situasi yang tepat. Dengan melakukan hal itu dan disertai dengan penuh kesadaran, kita dapat menjadikan bahasa Indonesia sebagai lambang jatidiri negeri yang kita cintai ini.

Kongres VI Bahasa Indonesia ini bertema "*Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*". Tema ini menyiratkan sebuah harapan sehingga perlu digariskan upaya-upaya yang patut dilakukan untuk mencapai harapan itu. Harapan-harapan dan upaya-upaya itu sudah tertuang dalam putusan Kongres yang sudah disepakati. Saya sangat mengharapkan agar putusan itu dapat kita nyatakan dalam bentuk bekerja dan berkarya.

Akhirnya, dengan ucapan Alhamdulillah rabbi al'amin, Kongres Bahasa Indonesia VI ini secara resmi ditutup.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberkahi semua usaha kita

Terima kasih.

Wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 2 November 1993

SOESILO SOEDARMAN

PEMAKALAH KONGRES BAHASA INDONESIA VI

1. Pemakalah Dalam Negeri

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | Ir. Azwar Anas | Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat |
| 2. | Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
| 3. | Letjen TNI (Purn.) M. Yogie S.M. | Menteri Dalam Negeri |
| 4. | Drs. Moerdiono | Menteri Sekretaris Negara |
| 5. | Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6. | dr. Tarmizi Taher | Menteri Agama |
| 7. | Hayono Isman | Menteri Negara Pemuda dan Olahraga |
| 8. | Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie | Menteri Riset dan Teknologi/ Ketua BPPT |
| 9. | Prof. Dr. Fuad Hassan | Dewan Pertimbangan Agung |
| 10. | Dr. Budiono | Kepala Biro Perencanaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11. | Prof. Dr. Edi Sedyawati | Direktur Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12. | Laksamana Madya TNI (Purn.)
Machmud Subarkah | Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan
dan Keamanan Nasional |
| 13. | Prof. Dr. Anton M. Moeliono | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 14. | Prof. Dr. Amran Halim | Rektor Universitas Sriwijaya |
| 15. | Goenawan Mohamad | Pemimpin Umum Majalah <i>Tempo</i> |
| 16. | Emha Ainun Nadjib | Budayawan |

- | | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 17. | Dr. Hasan Alwi | Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa |
| 18. | Dr. Marwah Daud | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| 19. | Dr. Rahayu Hidayat | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 20. | Dr. Sapardi Djoko Damono | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 21. | Dr. Mochtar Pabotinggi | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
| 22. | Dr. Multamia R.M.T. Lauder | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 23. | Dr. Siti Chamamah Soeratno | Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada |
| 24. | Dr. B. Karno Ekowardono | FPBS IKIP Semarang |
| 25. | Dr. Khaidir Anwar | Fakultas Sastra, Universitas Andalas |
| 26. | Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 27. | Dr. Y. Inyo Fernandez | Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada |
| 28. | Prof. Dr. Ayatrohaedi | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 29. | Prof. Dr. Mansoer Pateda | FKIP Universitas Sam Ratulangi |
| 30. | Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. | Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa |
| 31. | Dr. M. Marcellino | Lembaga Bahasa Universitas Atma Jaya |
| 32. | Dr. Asim Gunarwan | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 33. | Darmawan Sukmadjaja, M.Sc. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| 34. | Dr. Benny Hoedoro Hoed | Fakultas Sastra, niversitas Indonesia |
| 35. | A. Latief, M.A. | Kepala Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa |
| 36. | Dr. Basuki Suhardi, M.A. | Fakultas Sastra, Universitas Indonesia |
| 37. | Prof. Dr. Zainuddin Thaha | FPPBS IKIP Ujung Pandang |
| 38. | Drs. Ishadi Sk., M.Sc. | Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Penerangan |

39. Drs. Darmanto Jt. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
40. Dr. S. Sinansari-ecip Surat Kabar *Republika*
41. Dr. Yayah B. Lumintaintang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
42. Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
43. Drs. Adjat Sakri, M.A. Institut Teknologi Bandung
44. Dr. Mien A. Rifai Herbarium Bogoriense
Lembaga Biologi Nasional, LIPI
45. Drs. H.J. Koesoemanto Percetakan Universitas Sebelas Maret
46. Hammam Riza Yusuf, M.Sc. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
47. Prof. Dr. Abdul Hamid Saleh Attamini, S.H. Universitas Indonesia
48. Drs. Sumardi, M.Sc. Pusat Perbukuan
49. Drs. Sutarto Guru SMP Negeri 67, Jakarta
50. Drs. B. Rachmanto IKIP Sanatha Dharma, Yogyakarta
51. Dr. Jahya Umar Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sistem Pengujian
52. Prof. Dr. Sumarsono FKIP Universitas Udayana Singaraja
53. Drs. Liberty Sihombing, M.A. Fakultas Sastra Universitas Indonesia
54. Prof. Dr. Gorys Keraf Fakultas Sastra Universitas Indonesia
55. Prof. Dr. T.A. Ridwan Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara
56. Prof. Dr. Yus Rusyana FPBS IKIP Bandung
57. Drs. Sugino, M.A. Universitas Satya Wacana Salatiga
58. Dr. Liek Wilardjo Universitas Satya Wacana, Salatiga
59. Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo Lembaga Bahasa Universitas Katolik
Atma Jaya
60. Prof. Dr. Suseno Kartomihardjo IKIP Malang

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| 61. | Dr. Nafron Hasjim | Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa |
| 62. | Leon Agusta | Sastrawan |
| 63. | Dr. I. Kuntara Wiryamartana | Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada |
| 64. | Dr. Kartono Mohamad | Ikatan Dokter Indonesia |
| 65. | Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto | Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia |
| 66. | Ir. Iman Sucipto Umar | Persatuan Insinyur Indonesia |
| 67. | Syamsul Basri | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) |
| 68. | - | Persatuan Sarjana Hukum Indonesia |
| 69. | Prof. Dr. Sabarti Akhadijah M.K. | Himpunan Pembina Bahasa Indonesia |
| 70. | Dr. Sapardi Djoko Damono | Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia |
| 71. | Dr. Bambang Kaswanti Purwo | Masyarakat Linguistik Indonesia |
| 72. | Hamid Jabbar | Sastrawan |
| 73. | Sutardji Calzoum Bachri | Sastrawan/Majalah <i>Horizon</i> |
| 74. | A.A. Navis | Sastrawan |

2. Pemakalah Luar Negeri

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Prof. Dr. N.F. Alieva | Language Departement Institut Oriental Studies Moscow, Rusia |
| 2. | Prof. Dr. James T. Collins | University of Hawaii USA |
| 3. | Dr. James Sneddon | Griffith University Australia |
| 4. | Prof. Chung Young-Rhim | Hankuk University of Seoul, Korea |
| 5. | Prof. Dr. Bernd Nothofer | Institut fur Orientalische und Ostasiatische Germany |
| 6. | Dr. Farid M. Onn | Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia |
| 7. | Amdun Husain | Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia |

- | | | |
|-----|---|--|
| 8. | Awang Muh. Amin bin Begawan
Pehin Khatib Paduka Awang Haji Sirat | Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei
Darussalam |
| 9. | Haji Muhamad Ariff Ahmad | Dewan Bahasa dan Pustaka Singapura |
| 10. | Hajah Kamsiah Haji Abdullah | Singapura |
| 11. | Awang Mataim Bakar | University Brunei Darussalam |
| 12. | Drs. Haji Abbas Mohd. Shariff | Singapura |
| 13. | Karyono Purnama | Brunei Darussalam |
| 14. | Edmund A. Anderson | Hongkong |
| 15. | Prof. Huang Chenfang | Republik Rakyat Cina |
| 16. | Prof. Kong Yuan Zhi | Universitas Peking, Republik Rakyat Cina |

PESERTA
KONGRES BAHASA INDONESIA VI

1. **Daerah Istimewa Aceh**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Drs. M. Ridwan Ismail | Pemimpin Proyek Penelitian
Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Daerah Istimewa Aceh |
| 2. Dr. Bakhrum Yunus | FKIP Universitas Syiah Kuala |
| 3. Drs. Abdullah Faridan | Ketua HPBI Cabang Banda Aceh |
| 4. Drs. Muh. Ashief | SMA Negeri 5, Banda Aceh |
| 5. Drs. Husni Yusuf | Ketua Jurusan Bahasa Indonesia
FKIP Universitas Syiah Kuala |
| 6. Zaini Ali | FKIP Universitas Syiah Kuala |
| 7. Dra. Tri Murni, M.Pd. | FKIP Universitas Syiah Kuala |

2. **Sumatra Utara**

- | | |
|--|---|
| 8. Drs. T. Aiyub Sulaiman | Fakultas Sastra
Universitas Sumatra Utara |
| 9. Drs. Alimuddin Lubis | FPBS IKIP Medan |
| 10. Prof. Dr. Daulat Purnama
Tampubolon | Rektor Universitas HKBP
Nomensen, Medan |
| 11. Prof. Dr. Mangasa Silitonga | FPBS IKIP Medan |
| 12. Drs. Ahmad Darwin Nasution | SMA Negeri 2 Medan |
| 13. Drs. H. Ahmad Samin Siregar | Ketua Himpunan Sarjana-
Kesusastraan Indonesia (Hiski)
Cabang Medan |
| 14. Dr. Jawasi Naibaho | FPBS IKIP Medan |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 15. Drs. Khairil Ansari, M.Pd. | FPBS IKIP Medan |
| 16. Dra. Anni Krisna Siregar | Fakultas Sastra
Universitas Sumatra Utara |
| 17. Drs. Zubeirsyah, S.U. | Fakultas Sastra
Universitas Sumatra Utara |
| 18. Drs. Paraturen Sukapiring, S.U. | Fakultas Sastra
Universitas Sumatra Utara |
| 19. Drs. Sulaiman Faris | Fakultas Sastra
Universitas Sumatra Utara |
| 20. Drs. Shafwan Hadi Umry | SMA Negeri 1 Medan |
| 21. Drs. Sabaruddin Ahmad | Jalan Rahmatsyah
No. 107 Medan |
| 22. Dra. T. Silvana Sinar, M.A. | Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara |
| 23. Dra. Hj. Yusmaniar Noor | FPBS IKIP Medan |
| 24. Dra. Suhertuti, M.Pd. | Kopertis Wilayah I Medan |
| 25. Dr. Bahren Umar Siregar | Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara |
| 26. Drs. H. Jumino Suhadi, M.A. | FKIP UISU Medan |
| 27. Drs. Abu Bakar | Ketua HPBI Cabang Medan |
| 28. Dra. Rosmawati R. | Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara |
| 29. Dra. Yulizar Yoenas | Fakultas Sastra
Universitas Sumatera Utara |
| 3. Sumatra Barat | |
| 30. Drs. Yusran Khatib, M.Pd. | FPBS IKIP Padang |
| 31. Prof. Dr. Mursal Esten | FPBS IKIP Padang |
| 32. Prof. Dr. Amir Hakim Usman | FPBS IKIP Padang |
| 33. Drs. Indra Jaya | SMP Negeri 1 Padang |

34. Drs. Busri
Ketua Himpunan Sarjana-
Kesusastraan Indonesia (Hiski)
Cabang Padang
35. Drs. Barhaya Ali
Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pembinaan Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah
Sumatera Barat
36. Dra. Yetti Morelent
FKIP Universitas Bung Hatta
Padang
37. Dra. Gusnetti
FKIP Universitas Bung Hatta
Padang
38. Dra. Rawayati Zain
FKIP Universitas Bung Hatta
Padang
39. Drs. Aguslilana
FPBS IKIP Padang
40. Marjusman Maksam
FPBS IKIP Padang
41. Dra. Yuslina Kasim
IKIP Padang
42. Drs. Halipami Rasyad
FPBS IKIP Padang
43. Drs. Marah Rusmali
FPBS IKIP Padang
44. Mafardi
FKIP UMSB Padang Panjang
45. Drs. Hasanuddin W.S.
FPBS IKIP Padang
46. Drs. Mac Aditiawarman
Kopertis Wilayah X Padang
47. Dra. Novia Juita
FPBS IKIP Padang
48. Dra. Ramadian
FKIP Universitas Muhamaddiyah
Padang Panjang
49. Drs. Marsis, M.Pd.
Fakultas Sastra
Universitas Bung Hatta, Padang
50. Dra. Novi Erni Nurdin
FPBS IKIP Padang
51. Dra. Adriyetti Amir, M.S.
Fakultas Sastra Unand
52. Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu
FKIP Universitas Bung Hatta
Padang

53.	Dra. Asni Ajub	FPBS IKIP Padang
54.	Drs. Hermawan	Kopertis Wilayah X, Jalan Situjuh No. 1, Padang
55.	Dra. Irnawati	FKIP Univ. Bung Hatta
56.	Drs. Susetioyo, M.Pd.	Universitas Bung Hatta
4. Riau		
57.	Dr. M. Diah, M.Ed.	Rektor Universitas Riau
58.	Prof. Drs. H. Said Mahmud Umar	Ketua Jurusan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Riau
59.	Dra. Hilaliah	SMA Negeri 3 Pekanbaru
60.	Dra. Evizariza	Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (Hiski) Cabang Riau
61.	Drs. Dasri, M.S.	Pemimpin Proyek Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Riau
62.	Prof. Drs. Kailani Hasan, M.Pd.	FKIP Universitas Riau
5. Jambi		
63.	Drs. H. Bachtiar	Asisten II Sekwilda Jambi
64.	Dra. Yulisma	Ketua Jurusan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Jambi
65.	Drs. Mujiyono Wiryotinoyo, M.Pd.	Ketua MLI Cabang Jambi
66.	Lumer Manalu	SMP Negeri 4 Jambi
67.	Drs. Dasril Syam	Kepala Bidang Kesenian Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi
68.	Dra. Warni, M.Hum.	FKIP Universitas Jambi
69.	Drs. Yon Adlis, M.A.	FKIP Universitas Jambi
70.	Larlen	FKIP Universitas Jambi

6. Sumatera Selatan

71. Taufik Rachman, S.H. Mewakili Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan
72. Dr. Diemroh Ihsan Ketua MLI Cabang Palembang
73. Drs. Zainal Abidin Gaffar Ketua HPBI Cabang Palembang
74. Drs. Muslim Tuwi, M.Pd. Ketua Jurusan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya
75. Drs. Hasanuddin H.B. SMP Negeri 5 Palembang
76. Dr. Nangsari Ahmad FKIP Universitas Sriwijaya
77. Drs. Kasmansyah FKIP Universitas Sriwijaya
78. Drs. Zainal Abidin Gani FKIP Universitas Sriwijaya
79. Dra. Siti Salamah Arifin FKIP Universitas Sriwijaya
80. Dra. H. Kusmiarti FKIP Universitas Sriwijaya
81. Dra. Nurbaya FKIP Universitas Sriwijaya
82. Dra. Sri Rarasati M.R. FKIP Universitas Sriwijaya
83. Drs. Agus Saripudin, Dip. Tesl. FKIP Universitas Sriwijaya
84. Drs. Supriyadi FKIP Universitas Sriwijaya
85. Drs. Subadiyono, M.Pd. FKIP Universitas Sriwijaya
86. Dra. Latifah Ratnawati FKIP Universitas Sriwijaya
87. Drs. Abudaud Hn. FKIP Universitas Sriwijaya
88. Dra. Maimunah H. SMA Negeri 14 Palembang
89. Drs. Leonardus Lumbanbatu Kopertis Wilayah II Palembang

7. Bengkulu

90. Drs. Hi. W.N. Djangdja Asisten Kesejahteraan Sosial Setwilda Tingkat I Bengkulu

- | | |
|--|--|
| 91. Drs. Suhargi | SMA Negeri 1 Curup |
| 92. Dra. Ria Ariesta, M.Pd. | Ketua Jurusan Bahasa Indonesia
FKIP Universitas Bengkulu |
| 93. Drs. Svahrial Badius | Kepala Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bengkulu |
| 94. Dra. Suriyam | Ketua Himpunan Sarjana-
Kesusastraan Indonesia (Hiski)
Cabang Bengkulu |
| 8. Lampung | |
| 95. Hotman Atiek, S.H. | Kabag Pengumpulan dan
Penyaringan Informasi Humas
Pemda Tk. I Lampung |
| 96. Drs. Sudradjat, M.Pd. | Ketua Jurusan Bahasa Indonesia
FKIP Universitas Lampung |
| 97. Drs. Sutjipto | SMA Negeri 3
Bandar Lampung |
| 98. Dra. Theresia Suwati | Kepala Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung |
| 9. DKI Jakarta | |
| 99. Drs. T. Miryadi | Mewakili Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 100. Drs. Harjanto Sastrodiwirjo, M.P.A. | Kabag Ortala dan Humas
Lembaga Administrasi Negara |
| 101. Drs. Suyoso Sukarno, Ph.D | Sekretaris Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara |
| 102. Drs. Buchjar Sjam | Kepala Biro Organisasi, Setjen
Departemen Agama |
| 103. Dra. Wagu Padlyati, M.Sc. | Departemen Perindustrian |

104.	Drs. Risman Ludin	Bagian Hubungan Antarlembaga Biro Humas, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi
105.	Drs. W.D.F. Rindorinda	Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
106.	Drs. H. Zarkasih Nur	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
107.	dr. Sukowaluyo Mintorahardjo	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
108.	Sri Hardjo, S.E.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
109.	Dra. Hj. Mien S. Warnaen	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
110.	Drs. P.C. Sutisno	Pustekom, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
111.	M. Alwi Dahlan	Wakil Kepala BP7 Pusat
112.	Drs. Sukanto	Bappenas
113.	D. Budiprayitno	Asisten IV Menpora Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
114.	Drs. Anwar Sulaiman	Departemen Keuangan
115.	A. Karim Wahid, S.H.	Departemen Keuangan
116.	Mukti Wibowo, S.E., M.A.	Departemen Keuangan
117.	Drs. Haryo Sukmono	Departemen Transmigrasi dan PPH
118.	Ir. Satrio	Penasihat Ahli Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum
119.	Drs. Soejanto Wignjodipoera	Biro Kepegawaian Departemen Tenaga Kerja
120.	Yetti S. Gaos, B.A.	Departemen Kehutanan

121.	Imam Sukarsono, S.H.	Staf Ahli Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
122.	Dra. Siti Yamtinah	Kepala Bidang Diklat Administratif, Pusdiklat, Departemen Perdagangan
123.	Drs. Zakaria Idris	Direktur Balai Pustaka
124.	Dr. Sumaryo Suryokusumo	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri
125.	Muradi Juti, S.H.	Direktur Pembinaan Kesatuan Bangsa, Ditjen Sospol Departemen Dalam Negeri
126.	Drs. Andang Sumadinata	Kepala Pusdiklat Departemen Sosial
127.	M. Arsyad Subik, B.A.	Direktur Radio Departemen Penerangan
128.	Boyke Sukapdjo	Kantor Berita Antara/KNI
129.	Drs. H. Usman Effendy	Ketua II PB Persatuan Artis dan Film Indonesia
130.	Luhut M.P. Pangaribuan	Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
131.	Sumantri	Ikatan Penerbit Indonesia
132.	Harmon Barmawi Thaif	Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
133.	H. B. Faisal	Persatuan Stasiun Radio Swasta Niaga Indonesia
134.	Arman R. Iskandar	Ketua BPD Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia Jakarta
135.	Ny. Sutartono	Pengurus Pusat Dharma Wanita
136.	Dr. Ida F. Tanjung	Ketua Umum Dharma Pertiwi
137.	Dra. Marlina F. Suriawan	Mabes Palang Merah Indonesia

138.	Suriani Amrin	Mewakili Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia
139.	Drs. H.M. Irsyad Sudiro	DPP Golongan Karya/DPP MDI
140.	F.X. Oerip Soedjoed	Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia
141.	Marsekal Madya TNI (Purn) H. Muhammad	Ketua Majelis Ulama Indonesia
142.	Soedjono	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
143.	Br. Michael Pudiyartana A.J.	Wakil Organisasi MAWI
144.	Zainal A.S., S.H.	Direktorat Sosial Politik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
145.	Hariadi S.W.	Wartawan Harian <i>Kompas</i>
146.	A.S. Laksana	Wartawan Harian <i>Media Indonesia</i>
147.	Ricardo Iwan Yatim	Wartawan Majalah <i>Matra</i>
148.	Apul D. Maharadja	Wartawan Harian <i>Suara Pembaharuan</i>
149.	Kosasih Kamil	Wakil Pemimpin Umum Harian <i>Merdeka</i>
150.	Drs. Ali Nurdin	Pemimpin Redaksi Harian <i>Republika</i>
151.	H. Robert Garty	Redaktur Pelaksana Harian <i>Bertut Buana</i>
152.	Moch. Djoko Yuwono	Wartawan Harian <i>Terbit</i>
153.	Prahastoeti Adhitama, M.A.	Pemimpin Umum/Redaksi Majalah <i>Eksekutif</i>
154.	Susanto Pudjomartono	Pemimpin Redaksi Harian <i>Jakarta Post</i>
155.	J. Sujanto	Pemimpin Redaksi Majalah <i>Mawas Diri</i>

156.	Ilham Bintang	Redaktur (wartawan) <i>Harian Angkatan Bersenjata</i>
157.	Philipus Ateng Winarno	Wartawan <i>Harian Umum Suara Karya</i>
158.	Edi Siswono	Staf Litbang <i>Pos Kota</i>
159.	T. I. Wibowo	Wartawan Majalah <i>Detik</i>
160.	Dra. Srikandi Waluyo	Redaktur Senior Majalah <i>Femina</i>
161.	Dasriel Rasmala	Wartawan Majalah <i>Kartini</i>
162.	Henedi Sujanto	Pemimpin Redaksi Majalah <i>Samar</i>
163.	Frank Sartono	Wartawan Majalah <i>Jakarta-Jakarta</i>
164.	Mustafa Helmy	Pemimpin Redaksi <i>Editor</i>
165.	Akmal Djamaran, S.H.	Redaktur Pendidikan <i>Harian Pelita</i>
166.	Prof. Dr. S. Budhisantos	Direktur Peninggalan Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan
167.	Dr. F.X. Sutopo	Direktur Kesenian Ditjenbud
168.	Dra. Sri Soejatni Satrio	Direktur Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan
169.	Dr. I Gusti Ngurah Anom	Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Direktorat Jenderal Kebudayaan
170.	Dra. K. Permadi, S.H.	Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan
171.	Dra. Suwari Kartiwa, M.Sc.	Kepala Museum Nasional
172.	Prof. Dr. Mulyanto Sumardi	Universitas Indonesia

173.	Prof. Dr. Yaumil Agoes Achir	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
174.	Dr. Muhadjir	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
175.	Felicia N. Utorodewo, S.S., M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
176.	Dr. Melani Budianta	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
177.	Drs. Ibnu Wahyudi, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
178.	Dr. Soenarijati Djajaneegara	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
179.	Riris K. Thoha Sarumpaet, Ph.D.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
180.	Dr. Okke K.S. Zaimar	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
181.	Drs. Kentjono, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
182.	Drs. M.S. Hutagalung	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
183.	Dr. Sri Sukesi Adiwimarta	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
184.	Drs. Munadi Padmadiwiria	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
185.	Prof. Dr. Bistok A. Siahaan	FPBS IKIP Jakarta
186.	Prof. Dr. Dali S. Naga	IKIP Jakarta
187.	Dra. Mardar Arsjad	FPBS IKIP Jakarta
188.	Prof. Dr. Maurits Simatupang, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
189.	Kolonel Marinir Drs. Muddin Maruf	Lembaga Bahasa Hankam

- | | | |
|------|---------------------------------------|---|
| 190. | Lilie Suratminto, S.S., M.A. | Ketua Masyarakat Linguistik
Indonesia (MLI)
Cabang DKI Jakarta |
| 191. | Drs. Anwar Ali Akbar | Ketua HPBI Cabang DKI Jakarta |
| 192. | Panuti Sudjiman, Ph.D. | Ketua Hiski Cabang DKI Jakarta |
| 193. | Prof. Dr. Haryati Soebadio | Universitas Indonesia |
| 194. | Prof. Dr. Kusnadi Hardjasumantri | Kompleks Depdikbud
Pejaten |
| 195. | Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary | Kepala Pusat Penelitian
Arkeologi Nasional |
| 196. | Prof. Dr. Sri Utari Subiyakto Nababan | FPBS IKIP Jakarta |
| 197. | Drs. Jos Daniel Parera | FPBS IKIP Jakarta |
| 198. | Dr. Daoed Joesoef | Jalan Bangka Barat 1/7
Jakarta |
| 199. | Soetjipto Wirosardjono | Biro Pusat Statistik
Jakarta |
| 200. | dr. Abdul Gafur | Jalan Teuku Umar
No. 56
Jakarta |
| 201. | Dr. Juniar Z. Adji, M.Pd. | FPBS IKIP Jakarta |
| 202. | Prof. Dr. Juwono Sudarsono | Fakultas Sosial Politik
Universitas Indonesia |
| 203. | Dr. Masinambow, E.K.M. | Deputi Ketua Bidang Ilmu
Pengetahuan Sosial dan
Kemanusiaan, LIPI |
| 204. | Ani Sumadi | Radio Republik Indonesia,
Jakarta |
| 205. | Dra. Pudentia M. Purenti Sri S. | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 206. | Ny. S. Suryono (Bu Kasur) | Ketua Yayasan Setia Balita (TK
Mini Pak Kasur) Jakarta |

- | | | |
|------|---------------------------|--|
| 207. | Dr. Taufik Abdullah | Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia |
| 208. | Drs. Oyon Sofyan | Kepala Pusat Dokumentasi Sastra
H.B. Jassin |
| 209. | Ilen Surianegara | Jalan Pramuka No. 30, Jakarta |
| 210. | Klara Wijaya | Redaktur PT Media
Antarkota/Grup Pos Kota |
| 211. | Prof. Dr. P.W.J. Nababan | Fakultas Sastra
Universitas Kristen Indonesia |
| 212. | Drs. Pamusuk Eneste | Editor Penerbit PT Grasindo |
| 213. | S.S. Nasution, B.A. | Ketua Himpunan Penerjemah
Indonesia |
| 214. | Dr. Salim Said | Ketua Dewan Kesenian Jakarta |
| 215. | Taufiq Ismail | Sastrawan |
| 216. | Dr. Boen S. Oemarjati | Fakultas MIPA
Universitas Indonesia |
| 217. | Dr. Tresnati S. Sholichin | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 218. | Yusuf Abdullah Puar | Pengarang dan Wartawan |
| 219. | Prof. Drs. Gazali Dunia | Fakultas Sastra
Universitas Nasional |
| 220. | Drs. Sudarno, M.Ed. | IAIN/IKIP Muhamadiyah,
Ciputat 15412 |
| 221. | Dra. Sakura H. Ridwan | FPBS IKIP Jakarta |
| 222. | Slamet Djabarudi | Majalah <i>Tempo</i> |
| 223. | Drs. A. Aziz Husein | Direktur Televisi Republik
Indonesia |
| 224. | Dr. Myrna Laksman | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 225. | Ikranagara | Sastrawan |

226.	Dr. Djati Kerami	Staf Pengajar Fakultas MIPA Universitas Indonesia
227.	Prof. dr. Sidarta Ilyas	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
228.	Drs. Soerjadi W.H.	Jalan Merpati I No. 17 Pasanggrahan
229.	Drs. Jan Hoesada, M.M.	Akuntan Publik, Jalan Anggrek Neli Murni Raya No. 86, Jakarta 11480
230.	Faisal H. Basri, S.E., M.A.	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
231.	Dr. Hein Steinhauer	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
232.	Helen	Jakarta
233.	Nirwan Dewanto	Jurnal Kebudayaan <i>Kalam</i>
234.	Drs. Subagio Sastrowardoyo, M.A.	Sastrawan
235.	Asrul Sani	Sastrawan
236.	Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja	Anggota DPA, Ketua Konsorsium Ilmu Hukum
237.	Dra. Yayah Rochayah	Kepala Seksi Anggaran Depdikbud Departemen Keuangan
238.	Drs. Cyprisnus T.A.A.	Kasubdit PAR V Departemen Keuangan
239.	Drs. Lumban Gaol	Kasubdit PAP IV Departemen Keuangan
240.	Drs. Syafei	Kepala Seksi PAP IV Departemen Keuangan
241.	Dra. Syafiah	SMA Negeri 6 Jakarta
242.	Drs. Djadun	SMP Negeri 35 Jakarta

243. Prof. Dr. Makaminan Makagiansar, M.A. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
244. H. Soetanto Wiryoprasanto Wakil Ketua BPPN
245. Prof. Dr. Achmad Baiquni Rektor Universitas Nasional
246. F. Darmanto Jalan Kemajuan Rt 007/002, No. 40, Petukangan Selatan, Jakarta
247. Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah Jalan Teuku Umar No. 16, Jakarta 10310
248. Dr. M. Quraish Shihab, M.A. IAIN Jakarta
249. Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H. Ketua Yayasan Jayabaya
250. Soepojo Padmodipoetro Ketua Dewan Pengawas Perum Balai Pustaka
251. Dr. Sularso Sopater Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
252. Letkol Pol. (Purn.) Drs. Soejatno Gondowidjojo Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
253. Soepartiwi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
254. Tb. Gandjar Angkawijaya Jalan H. Naim III No. 66, Kebayoran Baru, Jakarta
255. Drs. Sumardi Hs., M.Sc. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
256. Siti Hardiyanti Rukmana Televisi Pendidikan Indonesia
257. Agi Betha AN Teve
258. Siti Sumandari Sukamso Direktorat Jenderal Kebudayaan
259. Bruce Frederick Jarvis Penerjemah dan Editor Jalan R.P. Soeroso 2-4, Jakarta 10350
260. Dr. Riga Adiwoso Suprpto Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

261.	Drs. Djoemingan Koesoemo Prajitno	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
262.	Dra. Haslinda Erlina	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
263.	Dra. Andi St. Rosmaladewi	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
264.	Drs. Mudini	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
265.	Drs. Widiyatmoko	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
266.	Dra. D. Wilda Siregar	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
267.	Dra. Farida Ariani	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
268.	Dra. Elina Syarif	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
269.	Maria Josefina Mantik, S.S.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
270.	Dra. Poppy Dewi Puspitawati	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
271.	Dra. Enny Angraeni	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
272.	Drs. R. Eko Djuniarto	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
273.	Dra. Endang Nilla P.	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
274.	Drs. Cepi Suwangga	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
275.	Dra. Sri Mulyati	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
276.	Dra. Elita Burhanuddin	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa

277.	Dra. Joeslina Azie, M.Sc. Ed.	Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
278.	Drs. Caca Sudarsa	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
279.	Dra. Artanti	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
280.	Dra. Tri Saptarini	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
281.	Drs. Buha Arntonang	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
282.	Dra. Titik Indiasitini	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
283.	Dra. Sri Winarti	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
284.	Drs. Muh. Abdul Khak	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
285.	Dra. Utari Sudewa	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
286.	Dra. Ebah Suhaebah	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
287.	Dra. Nantje Haridjati W.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
288.	Dra. Anita K. Rustapa, M.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
289.	Drs. A. Rozak Zaidan, M.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
290.	Dra. Erlis Nur Mujiningsih	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
291.	Dra. Atisah	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
292.	Dra. Maini Trisna Jayawati	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

293.	Drs. Puji Santosa	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
294.	Dra. Sulistiati	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
295.	Dra. L.M. Elmi Wiarti, M.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
296.	Drs. Utjen Djusen Ranabrata	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
297.	Drs. S. Amran Tasai	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
298.	Drs. Saksono Prijanto	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
299.	Dra. Siti Zahra Yundiati	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
300.	Dra. Juhriah	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
301.	Drs. M. Jaruki	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
302.	Drs. Mardiyanto	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
304.	Dra. Martha Lena A.M.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
305.	Drs. Zulkarnain	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
306.	Drs. Slamet Riyadi Ali	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
307.	Drs. E. Zainal Arifin, M.Hum.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
308.	Dra. Junaiyah H.M.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
309.	Drs. M. Djasmin Nasution	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

310.	Dra. Lustantini Septiningsih	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
311.	Dra. Ani Mariani	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
312.	Drs. Sriyanto	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
313.	Drs. Suryo Handono	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
314.	Dra. Ekawati	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
315.	Dra. Nurweni Saptawuryandari	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
316.	Dra. Harlina Indijati	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
317.	Budiono Isas, B.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
318.	Drs. Lukman Hakim	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
319.	Drs. Sugiyono	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
320.	Drs. Kasno	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
321.	Dra. Sri Timur Suratman	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
322.	Drs. Adi Sunaryo	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
323.	Dra. Cormentya Sitanggang	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
324.	Dra. Elly Iswati	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
325.	Dra. Kurniatri Resminingsih	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

326.	Drs. Dedi Puryadi	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
327.	Dra. Menuk Hardaniwati	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
328.	Dra. Isti Nureni	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
329.	Dra. Siti Mulyani	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
330.	Drs. Abd. Gaffar Ruskhan	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
331.	Dra. Erwina Burhanuddin	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
332.	Drs. Sutiman	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
333.	Dra. Umi Basiroh, M.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
334.	Dra. Alma Evita Almanar	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
335.	Drs. M. Fanani	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
336.	Dra. Yurni Karim	SMA Negeri 103 Jakarta
337.	Drs. M. Fauzi	SMP Negeri 108 Jakarta
338.	Dra. Sumarsidah	SMA Negeri 92 Jakarta
339.	Pamela Magdalena	STIE Perbanas Jakarta
340.	Dra. M. Yamilah	FPBS IKIP Jakarta
341.	Drs. Wanter	SMA Negeri 71 Jakarta
342.	Dra. Nenny Junaeni	SMP Negeri 252 Jakarta
343.	Dra. Harmaizul	SMP Negeri 135 Jakarta
344.	Dra. Zulfahnur Z.F	FPBS IKIP Jakarta
345.	Drs. Mukti U.S.	FPBS IKIP Jakarta

346.	Drs. Nanang Soenardi	FPBS IKIP Jakarta
347.	Dra. Nurlena Basir	FPBS IKIP Jakarta
348.	Wito Young Hwang	Mahasiswa Pancasarjana Program Studi Linguistik Universitas Indonesia
349.	Drs. Asrom	SMP Negeri 28 Jakarta
350.	Sutini	STIE Perbanas
351.	Hoedi Soejanto	Jalan Boulevard Raya TB II/ 36-37, Kelapa Gading Permai Jakarta
352.	Dra. Fathiaty Murtadhy	FPBS IKIP Jakarta
353.	Dra. Liliana Muliastuti	FPBS IKIP Jakarta
354.	Drs. H. Lukman	FPBS IKIP Jakarta
355.	Erika Mediana	Jalan Semarang No. 35 Jakarta Pusat
356.	Dra. Rosmid Rosa	IKIP Jakarta
357.	Endahyanti Restisari	STIE Perbanas Jakarta
358.	Drs. Soepijadi	FPBS IKIP Jakarta
359.	Dra. Sofia Manan	IKIP Jakarta
360.	Dra. Zaniar Rachman	IKIP Jakarta
361.	Endang Heriyo Guntarsih	SMP Negeri 93 Jakarta
362.	Dra. Aneke Sumarauw Pangkarego	IKIP Manado
363.	Drs. Suyatno	IKIP Muhammadiyah Jakarta
364.	Drs. Edy Sukardi	IKIP Muhammadiyah Jakarta
365.	Drs. Nawawi	IKIP Muhammadiyah Jakarta
366.	Dra. Dameria Nainggolan	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
367.	Dra. Ny. H. Suhartini Hartono	FPBS IKIP Jakarta

368.	Karnem	SMP Negeri 192 Jakarta
369.	Dra. Sri Suhita	FPBS IKIP Jakarta
370.	Kinayati Djojoseuroto	FPBS IKIP Jakarta
371.	Drs. Widjono H.S.	FPBS IKIP Jakarta
372.	Drs. Krisanjaya	FPBS IKIP Jakarta
373.	Dewi Susilawati	SMA Perguruan Rakyat Jakarta
374.	Sutiyatmi	SMA Perguruan Rakyat Jakarta
375.	Drs. H. Sudarsono	SMA Negeri 1 Bekasi
376.	L. Pamela Kawira, S.S.	Fakultas Sastra Univesitas Indonesia
377.	Sus Indah Eko Mustikoweni	SMP Negeri 114 Jakarta
378.	Santi Prahmanati Mardikarno, S.S.	Universitas Darma Persada Jakarta
379.	Dra. Kissumi Dwiyananingsih	SMP Negeri 123 Jakarta
380.	Pdt. Weinata Sairin, M.Th.	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
381.	Veeramalla Anjaiah, M.A., M. Phil.	Mahasiswa Asing (India) Fakultas Sastra Univesitas Indonesia
382.	Titik Pudjiastuti, S.S., M. Hum.	Fakultas Sastra Univesitas Indonesia
383.	Dra. H. Nowo Astuti	FPBS IKIP Jakarta
384.	Choi Sin Young	Jalan Sawo No. 507, Depok
385.	Lucy R. Montolalu	Fakultas Sastra Univesitas Indonesia
386.	Nini Ibrahim	IKIP Muhammadiyah Jakarta
387.	Dra. Prima Gusti Yanti	IKIP Muhammadiyah Jakarta
388.	Zainal Muttaqien	Instito Universitario Orientale Dipartimento Di Studi Asiatici

389. Nitrasatri Handayani, S.S. Fakultas Sastra
Universitas Indonesia
390. Murni Widyastuti, M.Hum. Fakultas Sastra
Universitas Indonesia
391. Dra. Wahyati D. Pradipta Fakultas Sastra
Universitas Indonesia
392. Drs. Paimao Sri Pamungkas SMA Negeri 74 Jakarta
393. Drs. Budya Pradipta Fakultas Sastra
Universitas Indonesia
394. Dr. Purwati Wahyono Fakultas Sastra
Universitas Indonesia
395. Drs. H. Aceng Rahmat, M.Pd. FPBS IKIP Jakarta
396. Abdul Azis SMA Diponegoro 01 Jakarta
397. Dra. Rita Johan, M.Pd. Unika Atma Jaya
398. Dra. M.B. Mesang IKIP Jakarta
399. C. Hartati Budhiman, S.S. UPN Veteran Jakarta
400. Jolanda H.D. Pilongo Program Pascasarjana
IKIP Jakarta
401. Erlinda Nila Gusti, S.S. STIE Perbanas Jakarta
402. Inneke Thesiani, S.S. STIE Perbanas Jakarta
403. Ruth Hutagalung, S.S. STIE Perbanas Jakarta
404. Martha Salea Worouw Program Doktor
FPS Universitas Indonesia
405. Krisna R. Sempurnadaja Jalan Kemang Selatan No. 98
Jakarta
406. Drs. Amir Rochyatmo Fakultas Sastra
Universitas Indonesia
407. Karsono H. Saputra, S.S. Fakultas Sastra
Universitas Indonesia

408.	F.X. Rahyono	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
409.	Dr. Bonneff Marcel	Jalan Wijayakarta No. 12, Jakarta
410.	Dra. Rahmania Komalaningrum, Dip.Ed.	PKG Bahasa Indonesia, Dikmenum, Dikdasmen
411.	Maria Indra Rukmi	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
412.	Dra. Yusnidar Abdullah	Guru SMA Negeri 61 Jakarta
413.	Mulvani	SMAK I Jakarta
414.	H.M. Wangsasaputra	Redaksi Majalah <i>KPS</i> Jakarta
415.	Yati R. Suhardi	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
416.	Rasyid Sartuni, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
417.	Dra. M.A. Inez Saptanno	Universitas Nasional
418.	Dra. Dewi Kurniawati	Universitas Nasional
419.	Dra. Syahfitri Purnama	Universitas Nasional
420.	Wisaksono Noeradi	Kotak Pos 2263, Jakarta 10022
421.	Yoyok Gandung Priyana	Majalah <i>Dharma Wanita</i> , Jakarta
422.	Drs. Wahyu Wibowo	Tabloid Mingguan <i>Paron</i>
423.	Suharti	IKIP Jakarta
424.	S. Eryda Lubis	IKIP Jakarta
425.	Irene Risakota	IKIP Jakarta
426.	Sari Endahwarni, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
427.	Jenny T. Hardjatno, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
428.	Lina Fatmawati Kurniawan, M.A.	North Jakarta International Jakarta

- | | | |
|------|--|---|
| 429. | Dr. Suyati Suwarso | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 430. | Suraya Saleh, M.A. | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 431. | Dra. Kerarin Bangun | SMA Negeri 17 Jakarta |
| 432. | M. Nasirudin | Pascasarjana IKIP Jakarta |
| 433. | Dra. R. Neni Nuraeni | SMA Negeri 1 Bekasi |
| 434. | Iis Rastika | SMP Negeri 180 Jakarta |
| 435. | Ny. Endang S. Ertanu | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 436. | Savitri Sri Bharata | Jalan Cipinang Baru Raya
No. 35 A |
| 437. | Prof. Dr. Ny. T. Hardjono | Program Pascasarjana
IKIP Jakarta |
| 438. | Prof. Dr. Ny. S. Sadli | Fakultas Psikologi, Universitas
Indonesia |
| 439. | Dr. H. Fahmi D. Saifuddin, M.Ph | Jalan Darmawangsa Raya No. 4,
Jakarta |
| 440. | Drs. Nurul Murtadho, M.Pd. | Jalan Kenari II No. 49, Jakarta |
| 441. | Dra. Wahyu Trihastuti | Pusat Perbukuan |
| 442. | Dra. Suharmini | Pusat Perbukuan |
| 443. | Dra. Sri Suparti | Pusat Perbukuan |
| 444. | Drs. Hendytio R. | Pusat Perbukuan |
| 445. | Drs. Daniel Tulalessy | Pusat Perbukuan |
| 446. | Dewaki Kramadibrata Nugardjito, S.S., M.A. | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 447. | Sunu Wasono, S.S. | Fakultas Sastra
Universitas Indonesia |
| 448. | Antonio Soriete | Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Indonesia |

449.	Drs. Totok Suhardiyanto	BIPA Fakultas Sastra Universitas Indonesia
450.	Dra. Christina Sumarni	SMA Negeri 6 Jakarta
451.	Hendytio R.	Pusat Perbukuan
452.	Drs. Muhammad Zaed	IKIP Jakarta
453.	Drs. Ahmad Tolla	Jakarta
454.	Dra. Tri Pramesti, M.S.	Jakarta
455.	Kim Giung Soeb	Jakarta
456.	Drs. Mayong Maman	Jakarta
457.	F.F. Lendo	Jakarta
458.	Pambudi Widodo	Jakarta

10. Jawa Barat

459.	Prof. Dr. H. Jusuf Sjarif Badudu	Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung
460.	Dr. Moh. Tadjuddin, M.A.	Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung
461.	Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan	FPBS IKIP Bandung
462.	Drs. H. Diharna	Asisten III Sekwilda Propinsi Jawa Barat
463.	Drs. H. Ukun Suryaman	Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung
464.	Dr. T. Fatimah Djajasudarma	Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran
465.	Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka	Jalan Lawanggitung 77, Bogor
466.	Mahbub Djunaidi	Jalan Kliningan II No. 1 Turangga, Bandung

- | | | |
|------|---|---|
| 467. | Drs. M.M. Purbo-Hadiwidjono | Jalan Kidang Pananjung No. 5.
Bandung |
| 468. | Drs. Jakob Sumardjo | Jalan Pasir Layung X-1, Bandung |
| 469. | Drs. A. Siamet Widodo | SMA Negeri 1 Bandung |
| 470. | Drs. H.M.E. Suhendar, M.Pd. | FPBS IKIP Bandung |
| 471. | Nani Andriani | SMP Pasawahan 2, Purwakarta |
| 472. | Dra. Romlah Suhadi, M.Pd. | IKIP Bandung |
| 473. | Etii Rochaeli | Fakultas Pascasarjana
Universitas Padjajaran |
| 474. | Syafruddin Pernyata | Fakultas Pascasarjana
Universitas Padjajaran |
| 475. | Prof. Dr. H. Ahmad S. Harjasujana, M.A. | FPBS IKIP Bandung |
| 476. | Drs. H. Alam Sutawijaya | FPBS IKIP Bandung |
| 477. | Drs. Kosadi Hidayat, M.Pd. | FPBS IKIP Bandung |
| 478. | Drs. Yoyo Mulyana, M.Ed. | FPBS IKIP Bandung |
| 479. | Drs. Syamsuddin A.R. | FPBS IKIP Bandung |
| 480. | Dra. Noerhayati Sudibyo | FPBS IKIP Bandung |
| 481. | Dra. Hj. Ica Sutari K.Y. | FPBS IKIP Bandung |
| 482. | Drs. Badrun | IKIP Bandung |
| 483. | Drs. H. Sukandi | FPBS IKIP Bandung |
| 484. | Drs. H. Hasan Basri | FPBS IKIP Bandung |
| 485. | Dra. Yetti Mulyati | FPBS IKIP Bandung |
| 486. | Dra. Lilis Siti Sulistyaningsih | FPBS IKIP Bandung |
| 487. | Drs. Supriyadi | FPBS IKIP Bandung |
| 488. | Dra. Nuny Sulistiany Idris | FPBS IKIP Bandung |
| 489. | Dra. Isah Cahyani | FPBS IKIP Bandung |

490.	Drs. Andoyo Sastromiharjo	FPBS IKIP Bandung
491.	Dra. Tum Kartini, S.S.	FPBS IKIP Bandung
492.	Dra. H.E. Suryatim, M.Pd.	FPBS IKIP Bandung
493.	Prof. Dr. Indiyah Imran	FPBS IKIP Bandung
494.	Drs. H. Akhlan Husen	FPBS IKIP Bandung
495.	Drs. Agus Suriamiharja, M.Pd.	FPBS IKIP Bandung
496.	Drs. Usep Kuswari	FPBS IKIP Bandung
497.	Drs. Dingding Haerudin	FPBS IKIP Bandung
498.	Drs. Ivoa Ana Rosmana	FPBS IKIP Bandung
499.	H. Karna Yudibrata	FPBS IKIP Bandung
500.	Nurhayati	IKIP Bandung
501.	Eet Kuraisin	Percetakan Angkasa, Bandung
502.	Drs. Yuldi	Percetakan Angkasa, Bandung
503.	Drs. Kerli Zuhendri	Percetakan Angkasa, Bandung
504.	Dra. Ade Rahima	Jalan Tubagus Ismail No. 8, Bandung
505.	Drs. H. Ahmad Basri N.S.	FPBS IKIP Bandung
506.	Dra. Ratnasih Mukmini, M.Pd.	Jalan Situ Sari I No. 7, Bandung
507.	Dra. Epon Kurniasih	SMA Negeri 9, Bandung
508.	Dra. Rita Hardyani	SMA Negeri 15 Bandung
509.	Elin Sjamsuri	FPBS IKIP Bandung
510.	Drs. Alfauzi Salam	PT Krakatau Steel
511.	Drs. Sutedja Sumadipura	IKIP Bandung
512.	Dr. Chaidar Alwasilah	Balai Bahasa IKIP Bandung
513.	Dra. Noerzisri A. Nazar, M.S.	ITB Bandung

514. Dra. Emi Rusmiah

FPBS IKIP Bandung

11. Jawa Tengah

515. Dr. D. Iddi Subroto

Fakultas Sastra
Universitas Sebelas Maret

516. Dr. Soenardji

Ketua HPBI Cabang Semarang

517. Dr. Sudaryono

Fakultas Sastra
Universitas Diponegoro

518. Drs. Surono, S.U.

Ketua MLI Cabang Semarang

519. Dra. Utami Handayani

Serwilda Tingkat I Jawa Tengah

520. Dra. Sri Haryanti

SMA Negeri 1 Purwokerto

521. Prof. Dr. Ramelan, M.A.

IKIP Semarang

522. Drs. Sarwidji

FKIP Universitas Sebelas Maret

523. Drs. D. Tukiran

FKIP UTM, Jalan Kapten
Suparman, Magelang

524. Drs. Usdiyanto

SMA Taruna Nusantara
Magelang

525. Yohanes Sardini

Surat Kabar *Suara Merdeka*,
Semarang

526. Dra. Markhamah

FKIP Universitas
Muhammadiyah, Surakarta

527. Drs. Swandono

FKIP Universitas Sebelas Maret

528. Drs. Amir Fuady

FKIP Universitas Sebelas Maret

529. Drs. Marwoto, M.S.

FKIP Universitas Sebelas Maret

530. Drs. F.X. Soehardjo

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Surakarta

531. Drs. Kunardi Hardjoprawiro

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Surakarta

532. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd.
FKIP Universitas
Universitas Negeri Surakarta
533. Dra. Juliana Agussalim
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Surakarta
534. Dra. Tutut Tugiat
IKIP Muhammadiyah Kembaran,
Purwokerto
535. Drs. Soenaryo AS
Univesitas Veteran
Bangun Nusantara Sukoharjo
536. Dra. Sri Mulyati
Ketua Jurusan PBSI
FKIP Universitas Panca Sakti,
Tegal
537. Ladiman
SMPN 2, Kragan Rembang
538. Drs. Asul Wiyanto
Kampus SMA Taruna Nusantara
Magelang
539. Prof Dr. Retmono
Rektor IKIP Semarang
540. Drs. Anshari Basuki, S.U
Fakultas Sastra
Universitas Diponegoro

12. Yogyakarta

541. Drs. Slamet Riyadi
Balai Penelitian Bahasa
Yogyakarta
542. Prof. Drs. Muhammad Ramlan
Fakultas Sastra
Universitas Gadjah Mada
543. Drs. Yohanes Tri Mastoyo J.K.
Ketua MLI Cabang Yogyakarta
544. Prof. Dr. Umar Kayam
Fakultas Sastra
Universitas Gadjah Mada
545. Drs. G.B.P.H. Poeger
Jalan Kolonel Sugiyono No. 24,
Pugeran, Brontokusumo
Yogyakarta
546. Dr. Rachmat Djoko Pradopo
Fakultas Sastra
Universitas Gadjah Mada
547. Drs. Sunyata
SMA Negeri 2 Sleman

548.	Dr. Sudaryanto	Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
549.	Drs. Dhanu Priyo Prabowo	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
550.	Dra. Sri Nardiati	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
551.	Luciana Aliseputro	Yogyakarta
552.	Drs. Tirta Suwondo	Pemimpin Proyek Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah Yogyakarta
553.	Enita Istiwati Sahelan	Jatimulyo RT 22/RW 05 No. 606, Yogyakarta 55242
554.	Drs. Jabrohim	FPBS IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
555.	Prof. Dr. H. Sarwadi	Universitas Gadjah Mada
556.	Drs. Soepomo	Fakultas Sastra, Universitas Gajah Mada
557.	Drs. Sutarna	Universitas Gadjah Mada
558.	Drs. R. Sumadi	FPBS IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
559.	Sa'adatul Athiyah	FPBS IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
560.	Drs. Abdulhayi	FPBS IKIP Yogyakarta
561.	Drs. Hery Mardiyanto	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
562.	Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
563.	Heriyanto	FPBS IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
564.	Sri Ummiaty Haroen	IKIP Muhammadiyah Yogyakarta
565.	Dr. A. Sudewa	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

566.	Dr. S. Djawanai	Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada
567.	Drs. Sukardi Mp	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
568.	Drs. Pardi	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
569.	Drs. Edy Setiyanto	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
13. Jawa Timur		
570.	Prof. Dr. Samsuri	FPBS IKIP Malang
571.	Dr. Suparno	FPBS IKIP Malang
572.	Dra. Sri Surani, M.S.	Ketua HPBI Cabang Jember
573.	Prof. Dr. Budi Darma	FPBS IKIP Surabaya
574.	Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo	FPBS IKIP Surabaya
575.	Dra. Annasiyah Chamid	SMP Negeri 5 Surabaya
576.	Dr. H. Imam Syafi'ie	FPBS IKIP Malang
577.	Dra. Lusiana Aliseputro	Pemda Tingkat I Jawa Timur
578.	Drs. Totong Tirtawijaya	Ketua HPBI Cabang Surabaya
579.	Drs. Diding Wahyudin R.	FPBS IKIP Surabaya
580.	Dra. Nusa Tjahja Pratiwi	SMEA Negeri 3 Surabaya
581.	Drs. Muljono	IKIP Surabaya
582.	Drs. Amin Suudi	SPKG Bahasa Indonesia SMPN 24 Surabaya
583.	Dra. Endah Budayati	STM Negeri 2 Madiun
584.	Drs. Priyono	SMA Negeri 2, Caruban, Madiun
585.	Mashadi Said	IKIP Malang

586.	Hilman Pardede	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
587.	Anang Santosa	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
588.	C. Indah Nartini	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
589.	Djoko Purnomo	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
590.	Eden Anthoni Sitompul	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
591.	I Nyoman Merdhana	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
592.	Maryono	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
593.	Muhamad Arifin	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
594.	Mursini	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
595.	Parlindungan Nadeak	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
596.	Salam	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
597.	Sugit Zulianto	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
598.	Syofiani	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
599.	Zahra Alwi	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
600.	Hanna	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
601.	Drs. Gatot Susilo Sumowijoyo	FPBS IKIP Surabaya
602.	Dr. Leo Idra Ardiana, M.Pd.	FPBS IKIP Surabaya

603.	Drs. E. Yonohudiyono	FPBS IKIP Surabaya
604.	Dra. Joharni Harjono	FPBS IKIP Surabaya
605.	Dra. Erita Djati Pratiwi	SMA 17 Agustus Surabaya
606.	Drs. Budiyono	Surabaya
607.	Drs. Widodo H.S.	FPBS IKIP Malang
608.	Johannes Ramelan	SMP Negeri 2 Surabaya
609.	Ahmad	Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
610.	Drs. M.H. Sundoro	Fakultas Sasatra Universitas Jember
611.	Drs. Budinuryanta Yohanes, M.Pd.	FPBS IKIP Surabaya
612.	Drs. Bambang Irawan	FPBS IKIP Surabaya
613.	Drs. Imam Koermen	FPBS IKIP Surabaya
614.	Dra. Joharni Harjono	FPBS IKIP Surabaya
615.	Dra. Foriyani Subiyatningsih	Bidang Kesenian Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur

14. Kalimantan Barat

616.	Drs. H. Muchalli Taufiek	Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat
617.	Drs. A.R. Muzammil	Ketua Hisk Cabang Pontianak
618.	Prof.Dra. Suryati B. Azharie	etua HPBI Cabang Tanjungpura
619.	Drs. Asmadi	SMA Negeri 3 Pontianak
620.	Drs. Sukamto, M.Pd.	FKIP Universitas Tanjungpura
621.	Drs. Ahadi Sulissusiawan	Pemimpin Proyek Penelitian dan Pengembangan Bahasa Kalimantan Barat
622.	Dra. Sri Suharti S.	SD Negeri 39 Pontianak

623. Dra. Sulistyawati

Jalan Gusti Hamzah No. 203 A,
Pontianak

15. Kalimantan Tengah

624. Drs. Mariyedie

FKIP Universitas Palangkaraya

625. Drs. Johanes Kalamper

Ketua HPBI Cabang
Palangkaraya

626. Prof. K.M.A. M. Usop, M.A.

Universitas Palangkaraya

627. Suwardi, B.A.

SMA Negeri 5 Palangkaraya

16. Kalimantan Selatan

628. Prot. Drs. Abdul Diebar Hapip, M.A.

FKIP Universitas
Lambung Mangkurat

629. Drs. Abdurachman Ismail

Ketua HPBI Cabang Banjarmasin

630. Drs. Subroto

SMA Negeri 2 Banjarmasin

631. Dr. Durdje Durasid

FKIP Universitas
Lambung Mangkurat

632. Dr. Djantera Kawi

FKIP Universitas
Lambung Mangkurat

633. Dra. Zakiah Agus Kusasi

FKIP Universitas
Lambung Mangkurat

634. Prof. Sjahrial SAR Ibrahim

FKIP Universitas
Lambung Mangkurat

635. Drs. Daud Pamungkas

FKIP Universitas
Lambung Mangkurat

636. Prof. Fudiat Suryadikara, Ph.D.

FKIP Universitas
Lambung Mangkurat

17. Kalimantan Timur

637. Drs. Abdul Rachman Ibrahim

Kabag Biro Humas Pemda Tk. I
Kalimantan Timur

638. Drs. Masman Hatuwe, M.Pd.

Universitas Mulawarman

- | | | |
|------|----------------------|---|
| 639. | H. Sabran Idjab | Kepala Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Timur |
| 640. | Drs. Mursalin | Ketua HPBI Cabang Samarinda |
| 641. | Drs. A.K.H. Murtadlo | FKIP Universitas Mulawarman |
- 18. Sulawesi Utara**
- | | | |
|------|-------------------------------------|---|
| 642. | Drs. A. Nadjamuddin | Mewakili Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I
Propinsi Sulawesi Utara |
| 643. | Drs. Leo A. Apituley, S.H. | Ketua HPBI Cabang Manado |
| 644. | Dr. Nani Tuloli | STKIP Gorontalo
Universitas Sam Ratulangi |
| 645. | Dr. Julianus Akun Danie | FPBS IKIP Manado |
| 646. | M. Tulung Tuturoong | SMP Negeri 1 Manado |
| 647. | Dr. Wiesje H.C.M. Lalamentik | Fakultas Sastra
Universitas Sam Ratulangi |
| 648. | Dr. H. Hunggu Tadjuddin Usup | FPBS IKIP Manado |
| 649. | Dra. Ny. J. Sendewana R. | Fakultas Sastra
Universitas Sam Ratulangi |
| 650. | Dra. Saryati Nadjamuddin Tome, M.S. | FPBS IKIP Manado |
| 651. | Dra. Althe Tallei, M.Pd. | FPBS IKIP Manado |
| 652. | Dra. J.A. Karisoh | Fakultas Sastra
Universitas Sam Ratulangi |
| 653. | Rika Mamangkey | FPBS IKIP Manado |
| 654. | Drs. Adri Ch. Manengkei | Wakil Pemda Tingkat I
Sulawesi Utara |
- 19. Sulawesi Tengah**
- | | | |
|------|--------------------|--|
| 655. | Basir Nursin, S.H. | Wakil Pemda Tingkat I
Sulawesi Tengah |
|------|--------------------|--|

656.	Drs. Amir Kadir	FKIP Universitas Tadulako
657.	Drs. Abdillah Abd. Rahim, M.S.	Ketua HPBI Cabang Palu
658.	Ny. Sarifah Mastura, B.A.	SMA Negeri 2 Palu
659.	Prof. Dr. Elfrida Borman Sumampouw	FKIP Universitas Tadulako
660.	Drs. Darwis Mustafa	FKIP Universitas Tadulako
661.	Drs. Akhmad Syam	FKIP Universitas Tadulako
662.	Dra. Ny. F. Rogi Waruwu	FPBS IKIP Manado

20. Sulawesi Selatan

663.	Drs. H. Iskandar Rotte	Asisten Kesejahteraan Sosial Setwilda Tingkat I Sulawesi Selatan
664.	Drs. Abd. Kadir B.	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
665.	Prof. Dr. H. Sjahrudin Kaseng	Rektor IKIP Ujung Pandang
666.	Drs. Syarif Rahman	SMA Negeri 5 Ujung Pandang
667.	Drs. Abdul Muthalib	Kepala Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
668.	Prof. Dr. H. Fachruddin A.E.	Guru Besar FPBS IKIP Ujung Pandang
669.	Drs. Muhammad Sikki	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
670.	Drs. Abdul Kadir Mulya	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
671.	Drs. J.S. Sande, M.S.	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
672.	Drs. A. Zainul Arifin	Sekretaris Wilayah Daerah TK I Propinsi Sulawesi Tenggara
673.	Dra. H. Sitti Dawiah, M.S.	FKIP UVRI Ujung Pandang

674.	Drs. Zainuddin Hakim	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
675.	Drs. Muhammad Naim Haddade	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
676.	Drs. Mustamin Basran	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
677.	Dr. Kamaruddin, M.A.	Ketua HPBI Cabang Ujung Pandang
678.	Dra. Zainab	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
679.	Muhamad Bahar Abas	Ujung Pandang
680.	Suyuti Suhaib, M.A.	Ujung Pandang
681.	Drs. Mudarsep	Ujung Pandang
682.	Dra. Nurhayati	Ujung Pandang
683.	Dra. H. Ny. Masrurah Mokhtar, M.S.	UMI Ujung Pandang
684.	Prof. Dr. Husen Abas, M.A.	Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin
685.	Drs. Nur Asik	IAIN Alauddin Ujung Pandang
686.	Hanafi Bin Abu	Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin
687.	Drs. Abdul Waris Hamid	IAIN Alauddin Ujung Pandang
688.	Drs. Hasanuddin	Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin
689.	Dra. H. Nurchaya Kadir	Kopertis Wilayah IX Universitas Hasanuddin
690.	Dra. Andi Tenri Ampa	Kopertis Wilayah IX Universitas Hasanuddin
691.	Ery Iswary	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
692.	Drs. Hamzah	Fakultas Pascasarjana Universitas Hasanuddin

693.	Drs. Baso	IKIP Ujung Pandang
694.	Dra. Gusnawaty	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
695.	Nurdin N.	Universitas Hasanuddin
696.	Dra. Mahmudah	Universitas Hasanuddin
697.	Dr. Abd. Muhs Ba'dulu, M.S.	FPBS IKIP Ujung Pandang
698.	Prof. Dr. H.M. Ide Said D.M., M.Pd.	IKIP Ujung Pandang
699.	Drs. H. Moha Junaedi	IKIP Ujung Pandang
700.	Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa	IKIP Ujung Pandang
701.	Dr. H. Kulla Lagousi, M.S.	IKIP Ujung Pandang
702.	Dr. Ny. H. St. Hawang Hanalie, M.S.	IKIP Ujung Pandang
703.	Dr. Ny. Sugira Wahid, M.S.	IKIP Ujung Pandang
704.	La Muhiddin	Universitas Hasanuddin
705.	Ermaida	Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
706.	Drs. Kaharudin	Universitas Hasanuddin
707.	Drs. Ondy M. Aniyanto	Universitas Hasanuddin
708.	Drs. Arma Amir Hamzah	Universitas Hasanuddin
709.	Dra. H. Berhana Menggang	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
710.	Drs. Arifin Usman, M.S.	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
711.	Drs. Muhammad Darwis, M.S.	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
712.	Dra. H. Rabiana Badudu, M.S.	Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
713.	Dra. Rosnah B.	SMA Negeri Sulawesi Selatan

- | | | |
|------------|----------------------------|--|
| 714. | Dra. Haji Rosma Mudung | Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin |
| 715. | Drs. Syahrudin H.T. | SMA Negeri 467 Pangsid
Sulawesi Selatan |
| 716. | Dra. Sabriah | SMA Negeri Langnga, Pinrang
Sulawesi Selatan |
| 717. | Drs. H. Syamsuddin Mudaing | SPGLB Negeri Ujung Pandang |
| 718. | Hasbi Sjamsir | Fakultas Pascasarjana
Universitas Hasanuddin |
| 719. | Dra. Kembong Daeng | Fakultas Pascasarjana
Universitas Hasanuddin |
| 720. | Dra. Mardiana | Fakultas Pascasarjana
Universitas Hasanuddin |
| 721. | Manga Duslin | SMP Negeri Palloko
Sulawesi Selatan |
| 723. | Drs. Sapiudin | SMA Negeri Sulawesi Selatan |
| 724. | Drs. Mahmud | Balai Penelitian Bahasa
Ujung Pandang |
| 725. | Drs. Adnan Usmar, M.S. | Balai Penelitian Bahasa
Ujung Pandang |
| 21. | Sulawesi Tenggara | |
| 726. | Mahdin | SMP Negeri 2 Kendari |
| 727. | Drs. Zalili Sailan | MLI Cabang Kendari |
| 728. | H.M. Sanib | Kepala Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Debdikbud
Propinsi Sulawesi Tenggara |
| 729. | Drs. La Ode Sidu, M.S. | FKIP Universitas Haluoleo |
| 22. | Bali | |
| 730. | Dr. Aron Meko Mbeti | Fakultas Sastra
Universitas Udayana |

- | | | |
|------------|-------------------------------|--|
| 731. | Prof Dr. I Gusti Ngurah Bagus | Fakultas Sastra
Universitas Udayana |
| 732. | Drs. I Nyoman Sulaga, M.S. | Kepala Balai Penelitian Bahasa
Denpasar |
| 733. | Drs. I Made Denes | Balai Penelitian Bahasa Denpasar |
| 734. | Drs. I Gusti Ketut Ardhana | Balai Penelitian Bahasa Denpasar |
| 735. | Drs. I Wayan Cika, M.S. | Fakultas Sastra
Universitas Udayana |
| 736. | Ida Ayu Anom Indrawati | SMP Negeri 2 Denpasar |
| 737. | I Gusti Ketut Anom | Ketua Hiski Cabang Denpasar |
| 738. | Drs. I Nengah Budiasa | Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pembinaan Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah Bali |
| 739. | Prof. Dr. I Wayan Bawa | Fakultas Sastra
Universitas Udayana |
| 740. | Andre Idris Geerts | Wisma Kyrway, Ubud |
| 741. | Drs. I Made Suandhi | Balai Penelitian Bahasa Denpasar |
| 742. | Drs. I Wayan Sudiarta | Balai Penelitian Bahasa Denpasar |
| 743. | Drs. I Made Swastika | Jalan Pulau Adi, Gang VII/1
Sumuh, Denpasar |
| 23. | Nusa Tenggara Barat | |
| 744. | Warsito | Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 745. | M. Husni Muadz, Ph.D. | FKIP Universitas Mataram |
| 746. | Drs. H. Lalu Ahmad Muhidin | Ketua Cabang HPBI Mataram |
| 747. | Dra. Sri Yaningsih | Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Nusa Tenggara Barat |
| 748. | Drs. Priyono, M.A. | FKIP Universitas Mataram |

749. I Made Pater, B.A.

SMA Negeri 2 Mataram

24. Nusa Tenggara Timur

750. Drs. Tarno

Ketua Hiski Cabang Kupang

751. Drs. Abraham Gampar

Kepala Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Nusa Tenggara Timur

752. Dra. Vironika Ulle Bhoga

SMA Negeri 2 Kupang

753. Theresia Yosephine Kumanireng

FKIP Universitas Nusa Cendana

25. Maluku

754. Drs. M. Maricar

Kadit Sospol Daerah Tingkat I
Propinsi Maluku

755. Drs. J. Tamaela

Kepala Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Maluku

756. Dra. Ratna Umanailo

SMA Negeri 3 Ambon

757. Drs. Zainuddin

MLI Cabang Ambon

758. Dra. Nn. J. Tetelepta

FKIP Universitas Pattimura

759. Drs. Yusuf Abdulrahman

Pegawai Daerah Maluku Utara
Ternate

26. Irian Jaya

760. Drs. D. Rumbewas

Pemda Tingkat I
Irian Jaya

761. Drs. Salam Nurhadi

SMA Negeri 1 Jayapura

762. Drs. Theodorus T. Purba, M.Sc.

MLI Cabang Irian Jaya

763. Barnabas Suebu, S.H.

Jalan Mandala No. 6
Jayapura

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|--|
| 764. | Drs. Dharmojo | FKIP Universitas Cendrawasih |
| 765. | Drs. J. Ch. Sujanto, M.S. | FKIP Universitas Cendrawasih |
| 27. Timor Timur | | |
| 766. | Drs. R.B. Suprihanto | Ketua HPBI
Cabang Timor Timur |
| 767. | Dra. Mgt. Sri Widaningsih | FKIP Universitas Timor Timur |
| 768. | Drs. Victor Raul | SMA Negeri Los Palos |
| 769. | Wakidjan Mangundiprodjo, B.A. | Kepala Bidang Kesenian
Kantor Wilayah Debdikbud
Propinsi Timor Timur |

PESERTA LUAR NEGERI

1. Malaysia

- | | | |
|------|----------------------------------|---|
| 766. | Hong Seyu Luan | 119 Jalan Beringin
Taman Melodies 80250
Johor Baru, Johor
Malaysia |
| 767. | Hoi Ngai Loon | Kolej Selatan
59-K, Jalan Ibrahim Sultan
Johor Baru 80300
Malaysia |
| 768. | Jan Hui San | 22-A, Jalan Salleh
Kim Teng Park 80300
Johor Baru, Johor
Malaysia |
| 769. | Nee Chan Pearn | Blok 6, Unit 421
Jalan Stulang Laut 2
Taman Stulang Laut 80300
Johor Baru, Johor
Malaysia |
| 770. | Dr. Tan Sri Datuk Ismail Hussein | Malaysia |
| 771. | Asral H. Wahafid | Malaysia |
| 772. | Hj. Kamsiah Abdullah | Malaysia |

2. Singapura

- | | | |
|------|--------------------|---|
| 773. | Dr. Liaw Yock Fang | Univesitas
Departement Malay Studies,
National of Singapore |
| 774. | Yang Quee Yee | 24-12, Tong Eng Bldg 105,
Cecil Staeel
Singapore 2057 |

775. Maimunah Binti Kemat 465-E Bukit Timah Road
Singapore 1025
776. Mohammad Ambri Famlı API Blok 148
Hougang Street 11 03-86
Singapore 1953
777. Mohammad Ganı Ahmad API Blok 439 ANG MO
Klo, Ave 10 02-4321
Singapore
778. Adam Bin Fadila Blok 606
Yishun St. 61 03-303
Singapore
779. Muhammad Junib B. Abdullah 69, Sunbird Garden
Singapore 1648
780. Masran B. Sabran Blok 65I, Yishun Ave 4
781. Abbas Bin Mohd. Sharif 150, Tembilang Road
Singapore 1542
782. Almuddin Hashim Kementerian
Penerangan Keseman
460 Alexandra Road 36-00
Bangunan PSA, Singapore 0511
783. Osman Bin Ismail Pegawai Pendidikan
Institut Perkembangan
Kurikulum Bukit Timah Road
Singapore 1025
784. Mohd. Naim Daipi Kementerian
Penerangan Keseman
460 Alexandra Road 36-00
Bangunan PSA, Singapore 0511
785. Aziz Abu Talib 745/747 North Bridge Road
Singapore 0719

3. Brunei Darussalam

786. Awang Muhammad bin Awang Haji Jambol Dewan Bahasa dan Pustaka
Kementerian Kebudayaan Belia
Sukan, Bandar Seri Begawan 2064

787. PGN Mahmud PGN Damit
No. 9 Simpang 61
Kampung Manggis 2
788. Hj. Md. Daud Bin Taha
No. 3 Simpang 933
Kampung S.G. Belukut
Jalan Kota Batu
789. Karvono Purnama
Univ. Brunei Darussalam
Gadong 3186
790. Awang Mataim Bakar
Universitas Brunei Darussalam
Gadong 3186
791. Haji Jaludin Bin Haji Chuchu
Universitas Brunei Darussalam
Gadong 3186
4. Korea
792. Kim Yang Gyem
Mashasiwa S3 UGM
d.a. Jalan Pejaten Raya
Kompleks P dan K Blok III/5
Pasar Minggu
5. Hongkong
793. Dr. Edmund A. Anderson
Departement of English
H.K. Bapt College
224 Waterloo Rd., Kwn.
Hongkong
794. Huang Chen Fang
Seksi Bahasa Indonesia
Departement of Oriental Studies
University of China, Peking
6. Jepang
795. Masao Yamaguchi
Setsunan University
Ikadanakamachi 17-8
Neyagawa, Osaka 572, Japan
796. Reiko Yamaguchi
Monzen-306, 118 Agura-cho
Iwakura, Sakyo-ku, Kyoto 606
Japan
797. Ms. Hiroe Fukushima, M.A.
Faculty of Foreign Languages
Kyoto Sangyo University
Motoyama, Kamigamo, Kita-ku
Kyoto 603, Japan

798. Keiko Fukamachi
Universitas Takushoku
3-4-14 Kohinata
Bunkyo, Tokyo 112
799. Moimura Shigeru
Osaka University of Foreign
Studies, 8-1-1 Aomatan Higashi
Minoo, Osaka 562, Japan
800. Michiko Ogiwara
Peg. Pertamina Tokyo
1-1-1 Rehisaiwa
Eniyodaku, Imperial Tower
Tokyo
801. Yoshihiro Takadanu
Jalan Batu I No. 31
Pejaten Timur, Jakarta
802. Kyoko Funada
2-3-145 Bunky-cho
Mishima City, Shizuoka Pref
Japan

7. Australia

803. Dr. Margaret Boequet Sieh
Faculty of Asian and
International Studies
Griffith University
Queensland 4111, Australia
804. Robyn Northcote
CASU N.T. Dept. Education
PO Box 4821 Darwin, Australia
805. Casuarina N.T.
Australia

8. Inggris

806. Ian Donaldson
Kedutaan Besar Inggris Jakarta
807. Annabel Teh Gallop
Curator for Indonesian and
Malay, The British Library
London

9. Belanda

808. Dr. Jacob Vredembregt
d.a. Villa Siti Andalusia
Ciputat 15411

10. **Italia**

809. Prof. S. Faizah Soenoto Rivai

Instituto Universitario
Orientale, Napoli, Itali

11. **Jerman**

810. Dr. Indarjo Gasch

Blumberger Damm 275
12687, Berlin, Jerman

12. **India**

811. Jas Singh Yadav

Indian Council Cultural Relation

**PANITIA
KONGRES BAHASA INDONESIA VI**

I. Panitia Pengarah

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Ketua |
| 2) Sdr. Hayono Isman
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga | Wakil Ketua I |
| 3) Prof. Dr. Edi Sedyawati
Direktur Jenderal Kebudayaan | Wakil Ketua II |
| 4) Dr. Hasan Alwi
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa | Sekretaris
merangkap
Anggota |
| 5) Prof. Dr. Samaun Samadikun
Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | Anggota |
| 6) Prof. Dr. Amran Halim
Rektor Universitas Sriwijaya | Anggota |
| 7) Prof. Drs. H.M. Soedomo, M.A.
Asisten I Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Generasi Muda | Anggota |
| 8) Prof. Dr. Astrid S. Susanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia | Anggota |
| 9) Prof. Dr. Achadiati Ikram
Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia | Anggota |
| 10) Prof. Dr. Anton M. Moeliono
Fakultas Sastra Universitas Indonesia | Anggota |
| 11) Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia | Anggota |
| 12) Dr. Ahmad Pratiknyo
Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |

- | | |
|---|---------|
| 13) Dr. Jimly Asshiddique, S.H.
Staf Ahli/Sekretaris Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 14) H. Basyuni Suriamiharja
Ketua Umum PGRI | Anggota |
| 15) Dr. Ir. Hidayat Syarif
Kepala Biro Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas | Anggota |
| 16) Kol. (L) (Purn.) Hans E. Kawuluan
Staf Ahli Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional | Anggota |
| 17) Drs. Nunus Supardi
Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan | Anggota |

II. Panitia Penyelenggara

- | | |
|-------------|------------------------|
| Ketua | : Dr. Hasan Alwi |
| Wakil Ketua | : Sdr. A. Latief, M.A. |

Tim Teknis:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana | Koordinator |
| 2. Drs. Lukman Ali | Anggota |
| 3. Sdr. Panuti Sudjiman, Ph.D. | Anggota |
| 4. Dr. Sapardi Djoko Damono | Anggota |
| 5. Drs. Taya Paembonan | Anggota |
| 6. Sdr. Irvan Masduki, S.H. | Anggota |
| 7. Dr. S. Effendi | Anggota |
| 8. Drs. Sunaryo | Anggota |

Bidang:

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. Sekretariat | : Drs. Hasjmi Dini (Sekretaris) |
| Seksi: | |
| 1) Persuratan | |
| Ketua | : Drs. M. Nurhanadi |
| Anggota | : A. Rachman Djalil |
| | Tukiyar |
| | Sumiyati |
| | Retno |
| | Samijati |
| | Siti Sapurah |
| | Kartiyah |
| | Warku |
| | Munjari |
| | Sutini |
| | Ahmad Lesteluhu |

Dedeh Ipah Syarifah
Siti Hamidah
Ngatini

- 2) Pendaftaran dan Perjalanan
Ketua : Drs. Amir Mahmud
Anggota : Drs. B. Trisman
Drs. Ys. Satim
Wahyu Hidayat, S.H.
Sarnata
Suwardi
Ajip Syarifuddin
Suprpto
- 3) Keuangan
Ketua : Jusnan Jumus
Anggota : Sartiman
Warkim Harnaedi
Suwanda
A. Rachman Idris
Rifman
Nasim
Yusna
- 4) Penggandaan
Ketua : Drs. Djamari
Anggota : Dian Pitaloka Y.P.R.
Siti Darini
Radiyo
Warno
- 5) Perlengkapan
Ketua : Drs. E. Asmad
Anggota : Drs. Rapendi
Arman
Erwin Subagio
Sarwono
Medrawati
Sartono
Sujitno
Sukardi
Ciptodigiyarto
Supar
Suratmin
Edi Suyanto
Tutug Iswanto
Rudy

- 6) Protokol
 - Ketua : Dra. Elly Wahyuni
 - Anggota : Ngadimin
Mahmud S.
Sandra Evy

2. Persidangan
 - Seksi:
 - 1) Permakalahan
 - Ketua : Drs. A. Patoni
 - Anggota : Dra. Hartini Supardi
Dra. Hari Sulastri
Drs. Haryanto
Dra. Lien Sutini
Drs. Teguh Dewabrata
Sunarto Rudy
Dasmu
Mudjiman
Baridin
Ansori
Purwanto
Yusuf
Ibrahim Abubakar
Dede Supriyadi
Asman A.S.
Djarwanto
Surachman

 - 2) Pelaksanaan
 - Ketua : Dr. Dendy Sugono, S.Pd.
 - Anggota : Dra. Dad Murniah
Dra. Rini Adiati E.
Dra. Mu'jizah
Drs. Mustakim
Drs. S.S.T. Wisnu Sasangka
Sukadi
Endang Suprihatin
Endang Bachtiar
Suyatmo
Endang Siswanti

 - 3) Pelaporan
 - Anggota : Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A.
Drs. Djamari

3. Logistik
 - Seksi:
 - 1) Akomodasi
 - Ketua : Drs. Suhadi
 - Anggota : Sri Sutarti

Endang Sulistiyanti
Sri Kanti Widada
Zainuddin Wahab
Sunarko
Murtiati

- 2) Keamanan
Ketua
Anggota

: Drs. Margono
: Suradji
Gunawan
Sumanto
Ahya bin Idrus
Arkan
Rahmat
Darmo
Dedy Setiadi

- 3) Kesehatan
Ketua
Anggota

: dr. Julianto
: dr. Fanggalwati
Bunga Tiur
Sri Purwaningsih
Siti Hasanah
Neneng Yunara
Erlin
Preksi
Waluyo
Wantino
Rawina

4. Informasi
Seksi:

- 1) Humas
Ketua
Anggota

: Dr. Yayah B. Lumintaintang
:
: Sukarna Syarif, S.H., M.A.
: Drs. Badri
Supadiatmoko
Sutrisno
Setiono
Ade Mu'min
Dra. Meity Taqdir Q.
Dra. Nur Hayati
Drs. K. Biskoyo
Drs. Amran Purba

- 2) Dokumentasi
Ketua
Anggota

: Wiyono
: Budhi Iswanto
Elly Damayanti
Heru Sudiyo
Dumiyati

3) Pelayanan Informasi

Ketua : Drs. Martin
Anggota : Dra. Yeyen Maryani
Drs. Syahidin Badru
Dra. Wiwiek Dwi Astuti
Drs. Sutaryo
Dra. Non Martis
Budyono

5. Pameran : Dr. Nafron Hasjim (Ketua)

Seksi:

1) Pengumpulan

Ketua : Drs. Sukasdi

2) Penyajian

Ketua : Dra. Jumariam, M.Sc.

3) Pemanduan

Ketua : Dra. Udiati Widiastuti

PERPUSTAKAAN
PUSAT PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

11-0715

URUTAN			
9	8	-	192

